



PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024





BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 392 /KUM/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;

- c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 188.45/ 392 /KUM/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

1. DINAS PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis periode 2021–2026 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Rencana Kerja tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2024 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai dengan yang dirumuskan pada Renstra 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan yang memuat kebijakan dan

program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun

anggaran 2024 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya yang mengatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah dan dokumen Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dikarenakan dokumen perubahan RKPD merupakan himpunan dari seluruh dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan RENJA K/L serta perubahan RENJA Provinsi/ Kabupaten/ Kota menandakan bahwa adanya perubahan arah kebijakan yang menjadi dasar analisis dalam melakukan reuiu 3 RENSTRA Perangkat Daerah demi menjaga keterkaitan kebijakan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah dengan instansi vertikal di atasnya. Menanggapi hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk menyusun Perubahan RAPBD sebagai bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan). Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian anggaran serta target yang telah tersusun sebelumnya. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan pada realisasi kinerja serta realisasi anggaran yang telah

dilaksanakan pada tahun 2024. Perubahan dilakukan pada Penyesuaian perubahan anggaran beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Penyesuaian perubahan Renja Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Penyesuaian ini pun dilakukan untuk menyikapi adanya hasil evaluasi renja sampa dengan triwulan II tahun 2024 dengan tujuan perubahan guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

Dengan adanya beberapa kebijakan di atas, maka disusunlah dokumen Perubahan RENJA tahun 2024 ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Kemendagri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran, Klafisikasi, kodefikasi dn nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar (Nomor 4 Tahun 2021) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar;
21. Peraturan Bupati banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan Penyesuaian perubahan anggaran beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan seluruh komponen Dinas Pendidikan yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Anak 7 Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, Bidang Sarana Prasarana, serta Sekretariat yang sesuai dengan evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan tujuan perubahan guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
- 3.2. Alasan Dilakukan Perubahan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Dinas Pendidikan pada tahun 2024 memiliki anggaran untuk menjalankan/ melaksanakan empat (4) Program dan Tiga Belas (131) Kegiatan dengan anggaran Rp. 680.419.719.360.-. Realisasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 273.746.969.881.- atau dengan capaian 40.23 % .

Adapun Hasil Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berjalan dan beberapa masih belum memenuhi target kinerjanya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II ;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sampai Triwulan II telah mencapai 86,02% dari target 100%;
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 25,04% dari target 50,03%;
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 16,44% dari target 63,28%;

- e. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 13,36% dari target 48,12%;
- f. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sampai Triwulan II telah mencapai 35,07% dari target 52,99%;
- g. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- h. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sampai Triwulan II telah mencapai 75,81% dari target 100%;
- i. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sampai Triwulan II telah mencapai 32,35% dari target 50%;
- j. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sampai Triwulan II telah mencapai 22,07% dari target 37,07%;
- k. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 23,33% dari target 51,33%;
- l. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sampai Triwulan II telah mencapai 36,1% dari target 50,98%;
- m. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sampai Triwulan II telah mencapai 19,71% dari target 53,35%;
- n. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sampai Triwulan II telah mencapai 33,12% dari target 50%;

- o. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sampai Triwulan II telah mencapai 30,23% dari target 46,01%;
- p. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sampai Triwulan II telah mencapai 21,35% dari target 45,45%;
- q. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sampai Triwulan II telah mencapai 48,99% dari target 98,58%;
- r. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan II telah mencapai 4,29% dari target 22,33%;
- s. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan II telah mencapai 3,22% dari target 49,18%;
- t. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 96,3%;
- u. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 17,15%;
- v. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 10,76%;
- w. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;

- x. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- y. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sampai Triwulan II telah mencapai 41,95% dari target 72,37%;
- z. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 72,89% dari target 86,45%;
- å. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 43,47% dari target 79,02%;
- ä. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 35,48% dari target 49,16%;
- ö. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 79,16% dari target 100%;
- aa. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 81,42%;
- bb. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan II telah mencapai 34,33% dari target 88,57%;
- cc. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan II telah mencapai 2,68% dari target 38,58%;
- dd. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 50,3%;

- ee. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 29,73%;
- ff. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 5,79% dari target 49,45%;
- gg. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 49,98%;
- hh. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 5,65% dari target 28,47%;
- ii. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0,67% dari target 47,35%;
- jj. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 51,4%;
- kk. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 63,98%;
- ll. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sampai Triwulan II telah mencapai 0,88% dari target 48,92%;
- mm. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 2,26% dari target 55,29%;
- nn. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 99,75%;
- oo. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 99,35%;

- pp. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- qq. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 99,45%;
- rr. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 68,51%;
- ss. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sampai Triwulan II telah mencapai 34,24% dari target 69,06%;
- tt. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan II telah mencapai 50% dari target 100%;
- uu. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan II telah mencapai 58,44% dari target 72,25%;
- vv. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 22,17% dari target 67,95%;
- ww. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan II telah mencapai 39,48% dari target 50%;
- xx. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan II telah mencapai 45,9% dari target 65,38%;
- yy. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 80,91%;

- zz. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 97,09%;
- åå. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- ää. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- öö. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sampai Triwulan II telah mencapai 39,63% dari target 52,1%;
- aaa. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan II telah mencapai 3,81% dari target 42,31%;
- bbb. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- ccc. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Sampai Triwulan II telah mencapai 88,21% dari target 99,18%;
- ddd. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan II telah mencapai 2,91% dari target 52,79%;
- eee. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 4,72% dari target 48,76%;
- fff. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 8,36% dari target 49,32%;

- ggg. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 8,97% dari target 49,17%;
- hhh. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- iii. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 51% dari target 100%;
- jjj. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 1,49% dari target 19,98%;
- kkk. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 22,01% dari target 62,12%;
- lll. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 25,23% dari target 76,91%;
- mmm. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan II telah mencapai 12,03% dari target 48,07%;
- nnn. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 49,19%;
- ooo. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan II telah mencapai 6,57% dari target 49,55%;
- ppp. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Sampai Triwulan II telah mencapai 7,74% dari target 49,43%;

- qqq. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 50%;
- rrr. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 98,87%;
- sss. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 0,3% dari target 50,79%;
- ttt. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- uuu. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- vvv. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 100%;
- www. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sampai Triwulan II telah mencapai 27,06% dari target 45,32%;
- xxx. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 83,42%;
- yyy. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 83,37%;
- zzz. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 4,43% dari target 48,33%;

âââ. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 53,28% dari target 100%;

äâä. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 56,86% dari target 100%;

2. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sampai Triwulan II telah mencapai 46,93% dari target 56,59%;

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 44,26% dari target 50,6%;

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sampai Triwulan II telah mencapai 53,73% dari target 62,01%;

d. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 31,99% dari target 41,29%;

e. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 94,11% dari target 100%;

f. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 93% dari target 100%;

3. Realisasi Program/Kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Triwulan II

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sampai Triwulan II telah mencapai 100% dari target 100%;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II telah mencapai 100% dari target 100%;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sampai Triwulan II telah mencapai 100% dari target 100%;
- d. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 1,97% dari target 3,92%;
- e. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 4,38% dari target 5,79%;
- f. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 2,78% dari target 6,62%;
- g. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 25,3% dari target 25,42%;
- h. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan II telah mencapai 4,62% dari target 5,7%;
- i. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 3,58%;
- j. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 1,12%;
- k. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 98,93% dari target 100%;

- l. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 98,85% dari target 100%;
- m. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 18,71% dari target 0%;
- n. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 28,7% dari target 28,83%;
- o. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Sampai Triwulan II telah mencapai 50,85% dari target 50%;
- p. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 98,71% dari target 100%;
- q. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 50,16% dari target 50,35%;
- r. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan II telah mencapai 0% dari target 0,07%;
- s. Program Pengelolaan Pendidikan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan II telah mencapai 49,12% dari target 49,14%;
- t. Program Pengembangan Kurikulum Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Sampai Triwulan II telah mencapai 98,93% dari target 100%;
- u. Program Pengembangan Kurikulum Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Sampai Triwulan II telah mencapai 99,1% dari target 100%;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan Dikarenakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang berada pada ditriwulan II masih dalam tahapan proses Perencanaan dan Pelaksanaan. Pencapaian hasil dari pekerjaan bisa dilihat pada triwulan berikutnya atau dapat dilihat dalam pencapaian di akhir tahun atau triwulan 4, selain itu ada beberapa Program, Kegiatan ataupun sub kegiatan yang masih dalam tahap pembahasan dan menunggu anggaran perubahan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan masih dalam proses monitoring, dalam proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang belum sampai pada tahap pelaporan, ataupun dalam tahapan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
 - b. Faktor Penyebab terpenuhinya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah berjalan dari triwulan I sampai dengan triwulan II merupakan pekerjaan rutin disetiap tahunnya, dan ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah selesai pekerjaan ataupun pelaksanaannya pada triwulan II. Selain itu dukungan serta koordinasi yang dilakukan sehingga tercapainya target kegiatan.
 - c. Faktor penyebab melebihi target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan : Pencapaian yang didorong oleh para pendidik dan tenaga kependidikan dalam keterlibatan dari segala kegiatan yang telah direncanakan, dukungan yang diberikan untuk pemenuhan dan telah terfasilitasinya para pendidik dan tenaga kependidikan dalam pekerjaannya. Kesadaran bagi warga belajar, masyarakat dari 22 pentingnya Pendidikan formal dan membuka wawasan kemampuan kompetensi disetiap murid, pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu dapat melihat ketersediaan ataupun perbandingan antar guru siswa perjenjangnya Koordinasi serta evaluasi yang dijalankan untuk dapat menemukan solusi dan Tindakan agar pemenuhan kebutuhan terpenuhi dan tersedia. Serta komitmen yang mendasari tercapainya realisasi yang melebihi target yang ditentukan.

- d. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu penyesuaian target pada tahun 2024 yang mengacu pada tingkat capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target periodik yang ditetapkan karena belum merupakan jadwal untuk pelaksanaan dan adanya penyesuaian serta perubahan sebelum pelaksanaan.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian terhadap perubahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berserta perubahan anggaran yang akan mendukung tercapainya target , melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta pemantauan anggaran agar sesuai alokasi, meningkatkan koordinasi antar bidang terkait pelaksanaan program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam rangka tindak lanjuti Langkah selanjutnya.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan																		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	80 Nilai	2.146.477.541.346	77,19	1.568.683.030.870	74	12.520.441.798	0	78.809.850.005	0	237.886.167.535	0	237.886.167.535	77,19	1.806.569.198.405	96,49 %	84%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	100	351.618.200	100	124.684.600	100	68.123.800	25	19.544.800	50	34.810.200	50	34.810.200	100	159.494.800	100,0 0%	45%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja SKPD tersusun dengan baik																
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	102.168.600	12	10.065.700	6	26.498.000	2	19.544.800	5	22.794.000	5	22.794.000	17	32.859.700	56,67 %	32%
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	36.686.000	4	14.735.300	1	7.062.000	0	0	0	0	0	0	4	14.735.300	57,14 %	40%
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	33.500.000	4	13.250.000	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	4	13.250.000	57,14 %	40%
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	7	33.734.000	4	13.737.000	1	6.578.000	1	0	1	6.578.000	1	6.578.000	5	20.315.000	71,43 %	60%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
		SKPD																
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	33.500.000	4	13.250.000	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	4	13.250.000	57,14 %	40%
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	75.920.300	6	33.430.300	3	12.736.500	2	0	2	3.188.900	2	3.188.900	8	36.619.200	53,33 %	48%
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126	36.109.300	48	26.216.300	26	2.249.300	14	0	14	2.249.300	14	2.249.300	62	28.465.600	49,21 %	79%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.090.655.796.147	100	769.657.418.520	100	439.121.000	25	77.753.955.351	45	235.384.212.236	45	235.384.212.236	100	1.005.041.630.756	100,00 %	48%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21275	2.079.084.968.147	7258	761.718.988.138	3661	0	3.661	77.670.905.351	4.400	235.199.159.236	4400	235.199.159.236	11658	996.918.147.374	54,80 %	48%
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1948	1.400.723.500	24	26.712.300	900	406.823.000	225	80.150.000	499	180.055.000	499	180.055.000	523	206.767.300	26,85 %	15%
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	115.926.000	4	41.087.000	1	22.194.000	0	1.550.000	0	3.648.000	0	3.648.000	4	44.735.000	80,00 %	39%
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	JumlahLaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	92	81.972.000	36	31.878.500	20	10.104.000	5	1.350.000	7	1.350.000	7	1.350.000	43	33.228.500	46,74 %	41%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	SKPD																	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100	1.136.294.500	100	395.799.100	100	266.500.000	25	9.000.000	50	22.797.500	50	22.797.500	100	418.596.600	100,00%	37%
1.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	636.294.500	4	102.259.100	2	65.000.000	1	9.000.000	1	22.797.500	1	22.797.500	5	125.056.600	27,78%	20%
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50	500.000.000	15	293.540.000	10	201.500.000	0	0	0	0	0	0	15	293.540.000	30,00%	59%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.338.590.160	100	2.346.897.935	100	1.243.963.000	25	32.554.609	50	308.571.204	50	308.571.204	100	2.655.469.139	100,00%	36%
1.01.01.2.06.00	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatn dan Perlengkapan Kantor Yang	6	238.981.0	2	98.645.30	1	15.605.00	0	0	1	0	1	0	3	98.645.30	50,00	41%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
02	Perlengkapan Kantor	Disediakan		00		0		0							0	%		
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	59.417.000	2	14.200.000	1	13.344.000	0	0	1	10.116.000	1	10.116.000	3	24.316.000	75,00%	41%
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	486.147.360	13	158.147.180	1	85.204.000	1	7.460.000	1	27.563.000	1	27.563.000	14	185.710.180	87,50%	38%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	16	427.365.500	2	145.108.600	1	34.810.000	1	740.000	1	7.681.800	1	7.681.800	3	152.790.400	18,75%	36%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	132	694.235.300	50	62.795.000	30	25.500.000	10	9.575.000	12	13.700.000	12	13.700.000	62	76.495.000	46,97%	11%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292	5.432.444.000	70	1.868.001.855	40	1.069.500.000	10	14.779.609	5	249.510.404	5	249.510.404	75	2.117.512.259	25,68%	39%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.546.329.000	100	2.258.383.084	100	45.000.000	0	0	50	45.000.000	50	45.000.000	100	2.303.383.084	100,00%	90%
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31	2.546.329.000	6	2.258.383.084	3	45.000.000	0	0	3	45.000.000	3	45.000.000	9	2.303.383.084	29,03%	90%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	39.931.246.939	100	6.803.695.168	100	9.815.495.598	25	966.317.200	50	1.816.715.200	50	1.816.715.200	100	8.620.410.368	100,00%	22%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.338.590.160	100	2.346.897.935	100	1.243.963.000	25	32.554.609	50	308.571.204	50	308.571.204	100	2.655.469.139	100,00%	36%
1.01.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	156	1.622.595.	24	484.230.6	36	324.991.5	9	47.695.957	18	117.329.8	18	117.329.8	42	601.560.5	26,92	37%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
02	Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan		439		47		98				63		63		10	%	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	38.308.651.500	24	6.319.464.521	12	9.490.504.000	3	918.621.243	6	1.699.385.337	6	1.699.385.337	30	8.018.849.858	50,00 %	21%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.517.666.400	100	2.816.979.328	100	642.238.400	25	28.478.045	50	274.061.195	50	274.061.195	100	3.091.040.523	100,00 %	68%
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	198.710.000	2	77.980.000	1	38.990.000	1	6.465.000	1	12.912.530	1	12.912.530	3	90.892.530	60,00 %	46%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	49	949.251.000	14	178.604.053	7	134.790.000	5	20.055.045	5	40.749.715	5	40.749.715	19	219.353.768	38,78 %	23%
1.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	352	270.345.000	168	102.781.375	50	32.900.000	5	1.958.000	20	7.023.000	20	7.023.000	188	109.804.375	53,41 %	41%
1.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	3.099.360.400	6	2.457.613.900	4	435.558.400	0	0	1	213.375.950	1	213.375.950	7	2.670.989.850	43,75 %	86%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar PAUD	65,58	210.250.656.819	91,26	272.871.860.971	64,74	166.599.433.275	57,49	16.457.772.830	57,49	35.738.078.346	57,49	35.738.078.346	148,75	38.195.692.246	226,82 %	18%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100	274.850.285.037	100	109.831.908.222	100	87.337.121.838	0	3.477.232.216	50	16.235.867.341	50	16.235.867.341	100	289.107.728.312	100,00%	138%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	58,24		52,5		57,38		0		57,38		57,38	0	109,88	0	188,67%	0%
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	49,75		39,46		43,05		0		43,05		43,05	0	82,51	0	165,85%	N/A
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	95,79		68		90,89		0		90,89		90,89	0	158,89	0	165,87%	N/A
		Indeks Iklim Keamanan SD	91,27		69,54		87,77		0		87,77		87,77	0	157,31	0	172,36%	N/A
		Indeks Inklusivitas SD	85,17		55,29		79,87		0		79,87		79,87	0	135,16	0	158,69%	N/A
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	6	6.635.000.000	0	0	1	35.000.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00%	0%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	(USB)																	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	41	11.144.929.998	14	2.925.003.775	10	1.707.456.999	0	0	0	55.000.000	0	55.000.000	14	2.980.003.775	34,15 %	27%
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	43	5.101.424.999	20	1.225.760.018	9	1.215.000.000	0	0	0	0	0	0	20	1.225.760.018	46,51 %	24%
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	46	10.592.165.247	10	2.026.242.300	10	2.544.051.499	0	0	0	99.800.000	0	99.800.000	10	2.126.042.300	21,74 %	20%
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	60	8.856.883.474	24	3.616.026.450	15	2.278.855.282	0	0	0	99.700.000	0	99.700.000	24	3.715.726.450	40,00 %	42%
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	21	4.476.760.949	9	1.920.544.150	6	1.228.108.999	0	0	0	0	0	0	9	1.920.544.150	42,86 %	43%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	njaga Sekolah																	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	3.861.118.898	19	1.645.981.000	10	1.488.987.499	0	0	0	0	0	0	19	1.645.981.000	63,33 %	43%
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2.946.505.281	8	935.206.900	4	603.106.500	0	0	0	16.762.000	0	16.762.000	8	951.968.900	40,00 %	32%
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	25	3.926.137.514	10	768.163.680	7	960.039.374	0	0	0	0	0	0	10	768.163.680	40,00 %	20%
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	7	5.046.977.000	3	505.400.112	2	341.277.000	0	0	0	0	0	0	3	505.400.112	42,86 %	10%
1.01.02.2.01.00	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan	7	14.110.60	2	6.673.440.	2	3.752.671.	0	0	0	0	0	0	2	6.673.440.	28,57	47%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
16	Sekolah	Sekolah yang Tersedia		1.000		000		000							000	%		
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39950	4.000.000.000	0	0	16000	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD	1	101.010.000	0	0	54	101.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4955	3.146.020.800	2026	816.911.900	990	487.861.500	0	0	450	204.681.000	450	204.681.000	2476	1.021.592.900	49,97%	32%
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	865	1.935.655.800	0	0	60	7.378.500	10	0	35	5.378.500	35	5.378.500	35	5.378.500	4,05%	0%
1.01.02.2.01.00	Pengembangan Karir Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	2150	6.064.618.	1040	2.208.147.	230	800.000.0	100	173.641.500	150	347.752.5	150	347.752.5	1190	2.555.900.	55,35	42%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
27	dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		000		600		00				00		00		100	%	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1576	2.512.153.000	744	909.858.500	360	936.250.892	0	0	250	299.494.000	250	299.494.000	994	1.209.352.500	63,07 %	48%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	732	85.096.354.134	732	77.074.770.480	372	40.778.900.000	200	2.548.361.966	250	14.468.549.341	250	14.468.549.341	982	91.543.319.821	134,15 %	108%
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3783	6.655.497.900	1046	1.328.640.000	744	1.125.540.000	744	284.790.000	744	284.790.000	744	284.790.000	1790	1.613.430.000	47,32 %	24%
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	95	22.921.441.757	24	5.251.811.357	12	2.995.157.000	0	0	0	0	0	0	24	5.251.811.357	25,26 %	23%

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
39	Kebijakan Bidang Pendidikan	bidang pendidikan yang dilaksanakan		00				00									%	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	35	6.913.944.999	0	0	13	2.160.884.999	0	0	0	99.900.000	0	99.900.000	0	99.900.000	0,00%	1%
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29	3.081.427.999	0	0	12	1.076.446.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	993	1.274.369.500	0	0	56	226.300.000	56	212.980.000	56	212.980.000	56	212.980.000	56	212.980.000	5,64%	17%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	1080	2.751.702.400	0	0	360	883.900.800	360	217.878.750	360	0	360	0	360	0	33,33%	0%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Didik	Proses Belajar																
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	222	49.593.140.888	0	0	71	15.192.936.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Nilai Survey Karakter SMP	6,21		54,66		2	37.913.829.145	2,21	2.832.276.614	2,21	7.702.124.005	2,21	7.702.124.005	56,87	7.702.124.005	N/A	N/A
		Persentase anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	100	103.373.192.734	100	51.078.369.659	100		96		50		50	0	150	51.078.369.659	150,00%	49%
		Persentase lembaga pendidikan dasar SMP yang terakreditasi minimal B	85				60		0		60		60	0	60	0	N/A	N/A
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan	70,65		66,09		70.55		75,06		75,06		75,06	0	141,15	0	199,79%	N/A

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
		Asesmen Nasional																
		Persentase sekolah yang mencukupi rasio guru siswa Jenjang SMP	13,2				12,5		9,77		10,25		10,25	0	10,25	0	N/A	N/A
		Persentase pendidik SMP yang bersertifikasi	70		55,21		58,76		72,26		72,26		72,26	0	127,47	0	192,84%	N/A
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,31		55,21		100		98,97		98,97		98,97	0	98,97	0	N/A	N/A
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dengan kualifikasi minimal D.IV/S1	100		100	0	100		98,97		98,97		98,97	0	198,97	0	198,97%	N/A
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	45.000.000	0	0	1	35.000.000	0	0	0	12.014.500	0	12.014.500	0	12.014.500	0,00%	27%
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	12	3.601.730.500	4	1.535.557.000	4	1.016.006.500	0	0	0	27.188.950	0	27.188.950	4	1.562.745.950	33,33%	43%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Sekolah/TU	Dibangun																
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	1.038.321.950	3	483.989.000	3	459.228.250	0	0	0	0	0	0	3	483.989.000	42,86 %	47%
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8	3.677.911.000	5	2.416.322.539	6	2.127.660.000	0	0	0	0	0	0	5	2.416.322.539	62,50 %	66%
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	415.878.250	1	180.935.000	1	234.603.250	0	0	0	13.593.200	0	13.593.200	1	194.528.200	50,00 %	47%
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	25	3.564.625.525	9	1.013.504.448	6	978.904.775	0	0	0	0	0	0	9	1.013.504.448	36,00 %	28%
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	3.981.550.460	11	1.188.636.116	7	849.580.820	0	0	0	48.009.700	0	48.009.700	11	1.236.645.816	36,67 %	31%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	31	5.280.232.667	16	2.742.809.000	32	4.912.744.000	0	0	0	32.900.950	0	32.900.950	16	2.775.709.950	51,61 %	53%
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	64.720.000	2	52.839.000	1	87.550.000	0	0	0	0	0	0	2	52.839.000	100,00 %	82%
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19	4.088.436.950	8	1.938.691.000	4	698.884.450	0	0	0	0	0	0	8	1.938.691.000	42,11 %	47%
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	3.435.316.250	7	2.193.855.000	4	1.096.453.750	0	0	0	9.625.400	0	9.625.400	7	2.203.480.400	58,33 %	64%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19	1.783.217.500	9	787.365.907	8	661.190.000	0	0	0	14.926.000	0	14.926.000	9	802.291.907	47,37 %	45%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Utilitas Sekolah																	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5	2.455.587.000	2	596.977.000	1	710.747.000	0	0	0	0	0	0	2	596.977.000	40,00 %	24%
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	14	1.258.080.000	11	348.040.000	1	302.760.000	0	0	0	0	0	0	11	348.040.000	78,57 %	28%
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertamayangMenerima Biaya Personil Peserta Didik	1725	1.050.000.000	0	0	900	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0%
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	361.980.000	0	0	1	361.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0%
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7	1.779.162.500	5	992.268.500	3	1.094.972.500	0	0	0	0	0	0	5	992.268.500	71,43 %	56%
1.01.02.2.02.00	Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/LombaAkade	5559	3.260.046.	2473	975.490.2	1018	686.101.1	150	44.998.000	850	234.895.8	850	234.895.8	3323	1.210.386.	59,78	37%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
38	Kreativitas Siswa	mik dan Non Akademik		130		00		00				00		00		000	%	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	115	210.174.500	0	0	25	5.000.000	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0,00%	1%
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2670	2.672.610.200	835		512	510.000.000	85	39.678.500	420	298.020.000	420	298.020.000	1255	298.020.000	47,00%	11%
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan	375	1.493.215.200	148	308.743.200	75	317.550.000	0	17.500.000	50	70.392.500	50	70.392.500	198	379.135.700	52,80%	25%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Sekolah	Pembinaan																
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	148	31.920.406.680	148	31.785.982.749	75	15.800.960.000	75	2.388.183.114	75	6.238.496.905	75	6.238.496.905	223	38.024.479.654	150,68%	119%
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2451	1.217.425.500	1897	371.950.000	171	260.000.000	150	67.237.000	156	119.330.000	156	119.330.000	2053	491.280.000	83,76%	40%
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	5	1.157.200.000	5	1.078.477.000	2	309.000.000	0	0	0	0	0	0	5	1.078.477.000	100,00%	93%
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	2	96.500.000	2	85.937.000	2	102.500.000	0	0	0	0	0	0	2	85.937.000	100,00%	89%

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
52	Kebijakan Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		00				0									%	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peeerta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4402	2297040400	0	0	4250	589.631.500	0	210.400.000	4.059	233.700.000	4.059	233.700.000	4059	233.700.000	92,21%	10%
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	13	3764526250	0	0	8	2.003.566.250	0	0	0	76.374.200	0	76.374.200	0	76.374.200	0,00%	2%
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	271	412000000	0	0	95	100.000.000	0	0	95	0	95	0	95	0	35,06%	0%
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5189	752.312.000	0	0	887	202.117.000	0	0	1.080	178.287.000	1.080	178.287.000	1080	178.287.000	20,81%	24%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Peserta Didik																	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	1432418000	0	0	7	949.138.000	0	0	0	27.588.900	0	27.588.900	0	27.588.900	0,00%	2%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1	75,14	93.827.012.483	82	24.689.143.499	71,32	19.379.323.292	50	4.336.488.500	60	5.236.786.000	60	5.236.786.000	142	29.925.929.499	188,98%	32%
		Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	100		57,03		100		57,49		57,49		57,49		114,52	0	114,52%	N/A
		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	6,21		5,75		6,21		3		4		4		9,75	0	157,00%	N/A
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	69		58,84		69,8		58,31		58,71		58,71		117,55	0	170,36%	N/A

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	145	10.346.786.315	21	2.670.090.000	15	2.201.438.000	0	0	0	103.910.000	0	103.910.000	21	2.774.000.000	14,48 %	27%
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	8	670.553.750	6	202.563.000	3	400.000.000	0	0	0	33.450.000	0	33.450.000	6	236.013.000	75,00 %	35%
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	300.000.000	0	0	3	300.000.000	0	0	0	26.900.000	0	26.900.000	0	26.900.000	0,00 %	9%
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD	120	8.402.884.000	18	202.794.000	3	199.969.000	0	0	0	0	0	0	18	202.794.000	15,00 %	2%
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	8880	499.999.800	8870	349.143.000	302	350.000.000	0	0	0	0	0	0	8870	349.143.000	99,89 %	70%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	760	1.440.000.000	0	0	200	480.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0%
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	94	1.378.835.883	42	722.746.399	54	774.980.883	0	0	0	145.000.000	0	145.000.000	42	867.746.399	44,68 %	63%
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	25491	989.196.000	14747	729.471.000	10774	440.000.000	11.114	0	11.114	126.259.000	11.114	126.259.000	25861	855.730.000	101,45 %	87%
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	1263	7.279.603.000	0	0	15	5.000.000	5	2.550.000	8	2.550.000	8	2.550.000	8	2.550.000	0,63 %	0%
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	3637	3.731.298.800	510	467.164.600	380	325.084.600	2	0	4	4.840.000	4	4.840.000	514	472.004.600	14,13 %	13%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Pendidikan PAUD	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2204	1.971.600.500	437	1.214.905.500	437	138.900.000	0	0	448	30.573.000	448	30.573.000	885	1.245.478.500	40,15 %	63%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	890	19.008.750.000	890	17.879.202.000	430	8.784.780.000	430	4.303.845.000	432	4.467.075.000	432	4.467.075.000	1322	22.346.277.000	148,5 4%	118%
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	2376	831.622.000	960	251.064.000	433	100.000.000	0	0	0	0	0	0	960	251.064.000	40,40 %	30%
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3	163.048.000	0	0	1	35.000.000	0	0	100	34.550.000	100	34.550.000	100	34.550.000	3333, 33%	21%
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dilaksanakan	210	123.125.000	0	0	100	35.000.000	0	0	100	32.549.000	100	32.549.000	100	32.549.000	47,62 %	26%

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan																
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)	5	6.999.998.181	0	0	5	999.998.181	0	0	0	65.715.000	0	65.715.000	0	65.715.000	0,00 %	1%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan Kecakapan hidup	68	131.665.157.780	58	35.831.514.000	62.5	21.969.159.000	10	5.811.775.500	20	6.563.301.000	20	6.563.301.000	78	42.394.815.000	114,71 %	32%
		Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	98		79,16		92.5		35		50		50		129,16	0	131,80 %	N/A
		Persentase Peningkatan Jumlah Warga Belajar	50		10		30		5		20		20		30	0	60,00 %	N/A
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	6	1.227.730.000	2	618.925.000	3	500.000.000	0	0	0	38.675.000	0	38.675.000	2	657.600.000	33,33 %	54%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Nonformal/Kesetaraan																	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2508	940.500.000	0	0	2508	940.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	8	376.955.000	6	101.885.000	3	400.000.000	0	0	0	0	0	0	6	101.885.000	75,00%	27%
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	981	39.476.863.000	76	20.806.254.000	31	3.322.407.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	76	20.816.254.000	7,75%	53%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola	75	14.357.470.000	75	14.304.450.000	26	10.470.760.000	26	5.143.380.000	26	5.143.380.000	26	5.143.380.000	101	19.447.830.000	134,67%	135%

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Utilitas Sekolah																	
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2	200.000.000	0	0	2	415.492.000	0	0	0	18.400.000	0	18.400.000	0	18.400.000	0,00 %	9%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru - Siswa Jenjang SD	12.79	324.979.354			12.89	70.000.000	6	0	6,9	38.549.000	6,9	38.549.000	6,9	38.549.000	N/A	12%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	6,21	872.677.800	5,75	440.835.600	100	70.000.000	0	0	88,9	38.549.000	88,9	38.549.000	94,65	479.384.600	1524,15%	55%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	70,65		59,36		70.55		0		75,06		75,06		134,42	0	190,26%	N/A
		Jumlah Dokumen Perencanaan Distribusi, Penempatan dan Formasi PTK	2		2		12		3		6		6		8	0	400,00%	N/A
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	43,5		57,73		43.05		0		43,05		43,05		100,78	0	231,68%	N/A
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	57,48		51,5		57.38		0		57,38		57,38		108,88	0	189,42%	N/A
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35	707.994.400	8	402.946.300	5	35.000.000	0	0	1	18.649.000	1	18.649.000	9	421.595.300	25,71%	60%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27	164.683.400	4	37.889.300	7	35.000.000	1	0	2	19.900.000	2	19.900.000	6	57.789.300	22,22 %	35%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	100	424.646.400	86,91		82	85.000.000	70	49.550.000	75	84.175.000	75	84.175.000	161,91	84.175.000	161,91 %	20%
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	4	219.695.000	4	30.155.000	2	35.000.000	0	0	2	34.625.000	2	34.625.000	6	64.780.000	150,00 %	29%

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/5*100	
	Dasar																	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	11	184.695.000	4	30.155.000	2	35.000.000	0	0	2	34.625.000	2	34.625.000	6	64.780.000	54,55%	35%
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	3	230.000.000	0	0	3	50.000.000	0	49.550.000	3	49.550.000	3	49.550.000	3	49.550.000	100,00%	22%
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4	65.000.000	0	0	3	50.000.000	3	49.550.000	3	49.550.000	3	49.550.000	3	49.550.000	75,00%	76%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Startegis Tahun 2021- 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memuat rincian indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 berdasarkan Renja adalah **4 program, 14 kegiatan dan, 127 sub-kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.688.159.541.212,-** pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dari Anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp, 451.449.366.817,-** dengan tambahan sebesar **Rp.236.710.174.395.-** yang sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2024.

Tabel 3.1

Sumber Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2024

No.	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Ber kurang
1	APBD	453.538.516.360	505.246.215.692	51.707.699.332
2	DAK	226.881.203.000	226.881.203.000	0
TOTAL		680.419.719.360	732.127.418.692	51.707.699.332

3.2 Alasan Dilakukan Perubahan

Perubahan dilakukan untuk Penyesuaian perubahan anggaran dibeberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan yang

utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya, yang memiliki arah tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu juga dapat memberikan hasil realisasi yang teralokasi dengan baik dan tepat sasaran, guna mendukung tercapainya kinerja dan kerja pada Dinas Pendidikan ditahun 2024, serta menjadi gambaran Langkah keputusan ditahun depan.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan SKPD Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Tujuan 1.1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas								
Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan								
DINAS PENDIDIKAN					451.449.366.817,00	688.159.541.212,00	236.710.174.395,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					451.449.366.817,00	688.159.541.212,00	236.710.174.395,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					451.449.366.817,00	688.159.541.212,00	236.710.174.395,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	76 Nilai	76 Nilai	386.097.674.142,00	514.846.582.085,00	128.748.907.943,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun dengan baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	68.123.800,00	68.123.800,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
		Tersusun dengan baik						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	26.498.000,00	26.498.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.578.000,00	6.578.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 *(7-6)</i>	<i>9</i>
	DPA-SKPD	DPA-SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	12.736.500,00	12.736.500,00	0,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Laporan	26 Laporan	2.249.300,00	2.249.300,00	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	374.569.803.344,00	501.583.965.287,00	127.014.161.943,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3661 Orang /bulan	3661 Orang /bulan	374.130.682.344,00	501.144.844.287,00	127.014.161.943,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1900 Dokumen	900 Dokumen	406.823.000,00	406.823.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.194.000,00	22.194.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	20 Laporan	20 Laporan	10.104.000,00	10.104.000,00	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD Yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD Yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	388.364.000,00	273.364.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	186.864.000,00	121.864.000,00	Adanya Penambahan Kegiatan Sosialisasi Penetapan Angka Kkredit (PAK) 2023 Jenjang TK, SD, DAN SMP, dan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan guru 2

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Periode
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	201.500.000,00	151.500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	842.013.000,00	2.135.844.000,00	1.293.831.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.605.000,00	49.933.000,00	34.328.000,00	Pengadaan Tablet 5 buah, Pengadaan printer 2 buah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.344.000,00	135.777.000,00	122.433.000,00	Pengadaan Kursi Kerja Staf Pengadaan Meja Kerja Staff Pengadaan AC Split 2 PK Pengadaan Sofa dan Meja Tamu Pengadaan TV Pengadaan AIR CONDITION (AC SPLIT 1 1/2 PK) Pengadaan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Speaker Portable
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.204.000,00	85.204.000,00	0,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.810.000,00	44.430.000,00	9.620.000,00	Penambahan biaya cetak dan fotocopy
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	25.500.000,00	551.000.000,00	525.500.000,00	Kegiatan Peringatan Hari Guru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	667.550.000,00	1.269.500.000,00	601.950.000,00	Penambahan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	180.441.000,00	135.441.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	180.441.000,00	135.441.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Jasa Penunjang	Persentase Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	100 Persen	9.815.495.598,00	9.815.495.598,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	324.991.598,00	324.991.598,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.490.504.000,00	9.490.504.000,00	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	642.238.400,00	674.348.400,00	32.110.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	134.790.000,00	134.790.000,00	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	32.900.000,00	65.010.000,00	32.110.000,00	Penambahan Anggaran biaya Pemeliharaan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								AC dan Printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	435.558.400,00	435.558.400,00	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD)	100 Persen 99,32 Persen 99,88 Persen	100 Persen 99,32 Persen 99,88 Persen	65.196.692.675,00	173.093.034.127,00	107.896.341.452,00	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Indeks Iklim keamanan SD Indeks Iklim Kebhinekaan SD Indeks Inklusivitas SD Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesman Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesman Nasional	Indeks Iklim keamanan SD Indeks Iklim Kebhinekaan SD Indeks Inklusivitas SD Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesman Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesman Nasional	100 Persen 43,05 Nilai 57,38 Nilai 79,87 Nilai 87,77 Nilai 90,89 Nilai	100 Persen 43,05 Nilai 57,38 Nilai 79,87 Nilai 87,77 Nilai 90,89 Nilai	26.627.586.338,00	90.788.866.131,00	64.161.279.793,00	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang	887.564.999,00	1.812.788.749,00	925.223.750,00	Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	9 Ruang	0,00	1.338.675.710,00	1.338.675.710,00	Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	10 Ruang	1.167.821.499,00	2.795.315.199,00	1.627.493.700,00	Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja dan Pembayaran DAK yang menjadi beban APBD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	20 Unit	2.238.855.282,00	3.008.665.282,00	769.810.000,00	- Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja - Pembangunan Toilet (Jamban) SDN Mali Mali Kec.Karang Intan - Pembangunan Pagar/Paving

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								SDN Madurejo 2 Kec. Sambung Makmur - Pembangunan Pengurangan Halaman SDN Pematang Baru Kec. Martapura Timur - Pembangunan Pengurangan Halaman SDN Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	1.228.108.999,00	1.233.598.999,00	5.490.000,00	Adanya Pergeseran didalam sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru Sekolah SDN Paramasan Atas Kec. Paramasan menjadi Pembangunan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Rumah Dinas Kepsek/Guru Sekolah SDN Belimbing Lama 2 Kec. Sungai Pinang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	10 Ruang	499.607.499,00	1.586.171.249,00	1.086.563.750,00	- Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	4 Ruang	333.106.500,00	643.552.750,00	310.446.250,00	- Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	7 Unit	960.039.374,00	960.039.374,00	0,00	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	341.277.000,00	341.277.000,00	0,00	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	2 Paket	2.502.671.000,00	3.752.671.000,00	1.250.000.000,00	
Penyediaan Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	39950	39950	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Didik Sekolah Dasar	Menerima Biaya Personil Peserta Didik	yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Peserta Didik				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	101.010.000,00	101.010.000,00	0,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	990 Peserta Didik	990 Peserta Didik	400.000.000,00	494.861.500,00	94.861.500,00	Penambahan untuk belanja Seragam Kontingen/pemenang Lomba O2SN SD Ke Tingkat Provinsi dan Pemenang Lomba O2SN Ke Tingkat Nasional dimana Kabupaten Banjar memperoleh Medali Emas untuk Cabang Olahraga Bulu Tangkis Putera, Medali Emas Cabang Olahraga Pencak Silat Putera, Medali

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Perak Cabang Olahraga Atletik Putera, Medali Perak Cabang Olahraga Karate, Medali Perunggu Cabang Olahraga Senam dan Pemenang Cabang Olahraga Renang.
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60 Orang	60 Orang	7.378.500,00	7.378.500,00	0,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	230 Orang	638 Orang	800.000.000,00	1.521.479.000,00	721.479.000,00	Penambahan anggaran untuk : -Biaya Pendidikan Profesi Guru PAI SD, - Diklat peningkatan Kompetensi guru pendamping

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								khusus (Inklusi_ SD Angkatan II, - Coaching Clinic peningkatan Kompetensi guru SD untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	360 Satuan Pendidikan	360 Satuan Pendidikan	545.086.000,00	838.050.892,00	292.964.892,00	- Insentif untuk guru-guru pendamping khusus awalnya dianggarkan sebanyak 131 orang namun ada sekitar 9 orang guru pendamping khusus yang lulus PPPK dan ada yang berhenti sehingga kelebihan anggaran ini akan dialihkan untuk

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah untuk studi tiru pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang di tahun ini rencananya akan mulai dibentuk dikarenakan setiap kabupaten/kota wajib untuk membentuk ULD untuk membantu melayani siswa-siswa berkebutuhan khusus. selain itu perjalanan dalam daerah dialihkan untuk monev sertifikasi yang setiap tahun

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								selalu diminta laporannya oleh inspektorat dan wajib dilaksanakan sebelum pencairan sertifikasi. "- Insentif untuk guru-guru di daerah cukup sulit, sulit dan sangat sulit awalnya dianggarkan sebanyak 100 orang namun ada sekitar 45 guru honor yang lulus PPPK sehingga kelebihan anggaran ini akan dialihkan untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah untuk studi tiru

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang di tahun ini rencananya akan mulai dibentuk dikarenakan setiap kabupaten/kota wajib untuk membentuk ULD untuk membantu melayani siswa-siswa berkebutuhan khusus. selain itu perjalanan dalam daerah dialihkan untuk monev sertifikasi yang setiap tahun selalu diminta laporannya oleh inspektorat dan wajib dilaksanakan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								sebelum pencairan sertifikasi.
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	372 Satuan Pendidikan	0,00	40.780.338.133,00	40.780.338.133,00	Terdapat silpa di 59 sekolah yang merupakan silpa dari sebelum tahun 2020 sehingga apabila sekolah ingin menggunakan dana tersebut, harus dimasukkan ke dalam RKA Perubahan agar di tahun 2025, tidak muncul lagi dana sebelum tahun 2020. Dana ini tidak berdampak pada pengurang dana tahap 2 yang akan salur

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								di 2024 ini sehingga harus ditambahkan di dalam RKA Perubahan 2024 agar dapat digunakan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	744 Orang	744 Orang	1.125.540.000,00	1.125.540.000,00	0,00	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	12 Ruang	0,00	3.118.525.000,00	3.118.525.000,00	Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	373 Orang	373 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	372 Orang	372 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang	1.277.784.999,00	2.234.724.499,00	956.939.500,00	- Penambahan anggaran untuk Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (TA. 2025) - Penyesuaian Honorarium berdasarkan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								beban kerja
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	10 Unit	602.517.999,00	1.155.959.499,00	553.441.500,00	-Penambahan anggaran untuk Honorarium Jasa Perencanaan Rehabilitasi Toilet / WC (TA. 2025)
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	56 Orang	56 Orang	226.300.000,00	226.300.000,00	0,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	360 Satuan Pendidikan	360 Satuan Pendidikan	883.900.800,00	883.900.800,00	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	74 Ruang	6.054.015.888,00	16.383.042.996,00	10.329.027.108,00	- Penambahan Honorarium Jasa Konsultan Perencanaan - Penyesuaian Honorarium berdasarkan beban kerja

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								1. Penambahan anggaran untuk Rehabilitasi SDN Sungkai 2 Kec. Simpang Empat, SDN Paring Tali Kec. Simpang Empat (Terdampak Gempa Bumi), SDN Tambak Sirang Baru Kec. Gambut, SDN Sungai Jati Kec. Mataraman
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks Iklim keamanan SMP	Indeks Iklim keamanan SMP	100 Persen	100 Persen	10.869.137.045,00	39.928.731.604,00	29.059.594.559,00	
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	SMP Indeks Iklim Kebhinekaan SMP						
	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	58,76 Nilai	58,76 Nilai				
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	70,55 Nilai	70,55 Nilai				
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen	84,59 Nilai	84,59 Nilai				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Asesmen Nasional	Nasional	88,01 Nilai	88,01 Nilai				
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	4 Ruang	469.206.500,00	1.045.656.500,00	576.450.000,00	Penambahan honor jasa konsultan tahun anggaran 2025.
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	3 Ruang	148.428.250,00	480.888.250,00	332.460.000,00	Penambahan honor jasa konsultan tahun anggaran 2025.
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	6 Ruang	349.760.000,00	2.219.520.000,00	1.869.760.000,00	Penambahan honor jasa konsultan tahun anggaran 2025.
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	234.603.250,00	233.058.250,00	-1.545.000,00	Penambahan honor jasa konsultan tahun anggaran 2025.

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6 Unit	8 Unit	778.904.775,00	1.214.864.775,00	435.960.000,00	- Penambahan anggaran untuk Pembangunan Fasilitas parkir (Paving) di SMPN 1 Gambut (Fisik dan jasa konsultan) '- Penambahan anggaran untuk jasa konsultan, pengawasan dan penyesuaian honor berdasarkan beban kerja
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	8 Unit	849.580.820,00	1.122.500.820,00	272.920.000,00	- Penambahan anggaran untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitary (Pemb.WC) SMPN 2 Martapura Barat - Penambahan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								anggaran untuk jasa konsultan, pengawasan dan penyesuaian honor berdasarkan beban kerja
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	32 Ruang	578.263.000,00	5.114.704.000,00	4.536.441.000,00	- Adanya penambahan anggaran untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas dan Jasa Konsultasi Perencanaan Database Bangunan Sekolah Menengah Pertama - Penambahan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	-	1 Ruang	0,00	97.550.000,00	97.550.000,00	- Penambahan Anggaran untuk

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Unit Kesehatan Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang UKS (TA.2025)
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	4 Ruang	492.884.450,00	894.187.825,00	401.303.375,00	- Penambahan anggaran untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Penambahan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Perencana Rehabilitasi Perpustakaan - Penambahan anggaran untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMPN 7 Aluh-Aluh dikarenakan kerusakan stuktur pondasi

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								sehingga anggaran murni tidak mencukupi
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	4 Ruang	169.453.750,00	1.158.113.750,00	988.660.000,00	- Penambahan anggaran untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Penambahan Anggaran untuk Jasa Konsultansi Perencanaan (TA.2025)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	8 Unit	273.940.000,00	696.790.000,00	422.850.000,00	- Penambahan anggaran untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Penambahan Anggaran untuk Jasa Konsultansi Perencanaan (TA.2025)

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								- Adanya pergeseran anggaran Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah (Rehab.WC/Sanitar) SMPN 4 S.Tabuk ke SMPN 3 Martapura dikarenakan sudah ada kegiatan tersebut dengan Dana DAK Tahun 2024
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	710.747.000,00	710.747.000,00	0,00	
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	302.760.000,00	302.760.000,00	0,00	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Peserta Didik	Personil Peserta Didik						
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	361.980.000,00	361.980.000,00	0,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	8 Paket	753.422.500,00	1.094.972.500,00	341.550.000,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1018 Peserta Didik	1018 Peserta Didik	350.000.000,00	776.101.100,00	426.101.100,00	- Penambahan Anggaran untuk kegiatan Pelatihan Duta Sekolah Sehat dan Sosialisasi Anti Bullying dan Narkoba
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	512 Orang	628 Orang	450.000.000,00	842.954.000,00	392.954.000,00	- Adanya pengurangan pagu insentif yang tidak tersalurkan -

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Kualifikasi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						Menganggarkan diklat PPG PAI dikarenakan masih adanya beberapa guru PAI yang belum lulus PPG, dan untuk pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga daerah yang menyediakan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	462.530.000,00	312.530.000,00	perlunya pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana alam di satuan pendidikan Bentuk tindak lanjut dari Permendikbud no 33 thn 2019 ttg penyelenggaraa

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								n program satuan pendidikan aman bencana, Kab Banjar merupakan salah satu wilayah rawan bencana, terutama bencana banjir di musim penghujan, dan kabut asap di musim kemarau, sehingga peserta didik perlu mendapatkan wawasan dan keterampilan ttg mitigasi bencana alam. Untuk dpt memberikan wawasan dan keterampilan ttg penyusunan kurikulum

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								mitigasi bencana alam kpd peserta didik, maka guru-guru harus mndptkan workshop ttg mitigasi bencana alam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	75 Satuan Pendidikan	0,00	15.801.015.084,00	15.801.015.084,00	Silpa Tahun Sebelumnya
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	171 Orang	306 Orang	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Ruang	0,00	334.000.000,00	334.000.000,00	- Penambahan Anggaran untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi RuangTU (TA.2025)

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Ruang	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	76 Orang	76 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	76 Orang	76 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4250 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	589.631.500,00	589.631.500,00	0,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	8 Ruang	1.317.816.250,00	2.038.841.250,00	721.025.000,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Penambahan Anggaran untuk Jasa Konsultansi Perencanaan (TA.2025)
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	95 Orang	95 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1080 Buku	1613 Buku	202.117.000,00	401.767.000,00	199.650.000,00	Pengadaan buku pengetahuan untuk siswa

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	7 Ruang	485.638.000,00	981.098.000,00	495.460.000,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Penambahan Anggaran untuk Jasa Konsultansi Perencanaan (TA.2025)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1 Rasio Pengawas dan Penilik	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1 Rasio Pengawas dan	100 Persen	100 Persen	8.079.917.292,00	20.298.036.892,00	12.218.119.600,00	
			6,21 Persen	6,21 Persen				
			69,78 Persen 7	69,78 Persen				
			1,32 Persen	71,32 Persen				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	PAUD	Penilik PAUD						
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	84 Unit	17 Unit	1.475.000.000,00	2.556.951.400,00	1.081.951.400,00	- Adanya Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural - Penambahan belanja Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur '- Penambahan anggaran untuk Pembangunan Sanitari Toilet/Jamban TK Negeri Pertiwi Podok Kec. Aluh Aluh - Penambahan anggaran untuk Pembangunan Sanitari Toilet/Jamban TK Negeri

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Pembina Beruntung Baru
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	5 Unit	400.000.000,00	896.811.350,00	496.811.350,00	- Penambahan anggaran belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk menyesuaikan beban kerja - Penambahan Anggaran Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Tahun 2025 - Penambahan anggaran Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD (ABT) - Penambahan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								anggaran Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Database Sarana dan Prasarana PAUD Negeri - Penambahan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Penambahan anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam - Penambahan anggaran Rehabilitasi Ruang Guru TK Negeri Pembina Simpang Empat

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.150.000,00	150.000,00	- Adanya penambahan anggaran untuk Petugas Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan yang menyesuaikan beban kerja - Adanya pergeseran dikarenakan Pembangunan Halaman/Area Bermain TK Negeri Jawa Kec. Martapura sudah teranggarkan di sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sehingga di ganti dengan Rehabilitasi Pembangunan Halaman/Area Bermain TK

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Negeri Pembina Mataraman
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	199.969.000,00	199.969.000,00	0,00	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	302 Paket	302 Paket	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	480.000.000,00	240.000.000,00	-240.000.000,00	Adanya pengurangan anggaran dikarenakan Data peserta didik tidak mampu usulan dari satuan pendidikan banyak yang tidak termasuk didalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	52 Paket	54 Paket	674.980.883,00	772.430.883,00	97.450.000,00	adanya pengurangan anggaran dikarenakan Honorarium

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)Sudah dilaksanakan dengan Epurchasing
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10774 Peserta Didik	10774 Peserta Didik	240.000.000,00	440.000.000,00	200.000.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	380 Orang	380 Orang	325.084.600,00	325.084.600,00	0,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	138.900.000,00	18.900.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Kelembagaan dan Manajemen	Manajemen						
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	405 Satuan Pendidikan	0,00	8.784.780.000,00	8.784.780.000,00	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	433 Orang	433 Orang	100.000.000,00	107.500.000,00	7.500.000,00	Adanya penambahan anggaran untuk Menganggarkan honor tim Manajemen BOP PAUD untuk memverifikasi dan memvalidasi satuan PAUD bahwa dana yang diterima dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kualitas pendidikan anak usia dini

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	0,00	472.282.750,00	472.282.750,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan beban kerja - penambahan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								anggaran untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Guru PAUD TA. 2025
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	10 Ruang	1.549.884.628,00	2.480.528.728,00	930.644.100,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan beban kerja - penambahan anggaran untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas PAUD TA. 2025
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	224 Orang	400 Orang	600.000.000,00	765.375.000,00	165.375.000,00	Perubahan Honorarium Narasumber Bimbingan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pendidikan	Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						Teknis, Pelatihan, dan atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan karena Beberapa Narasumber berasal dari Internal SKPD penyelenggara
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5 Unit	999.998.181,00	1.002.273.181,00	2.275.000,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan beban kerja
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) APS Persentase Masyarakat yang	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) APS Persentase	100 Persen	100 Persen	19.620.052.000,00	22.077.399.500,00	2.457.347.500,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	terlayani Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Persentase Peningkatan Jumlah Warga Belajar Persentase Pesantren dalam Penyelenggaraan Kejar Paket Sesuai Standar	Masyarakat yang terlayani Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan dan Kecakapan Hidup Persentase Peningkatan Jumlah Warga Belajar Persentase Pesantren dalam Penyelenggaraan Kejar Paket Sesuai Standar	30 Persen 62.5 Persen 92,5 Persen	30 Persen 62.5 Persen 92,5 Persen				
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	3 Unit	500.000.000,00	553.860.250,00	53.860.250,00	- Adanya penambahan anggaran untuk belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan beban kerja - adanya penambahan anggaran untuk belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Tahun 2025
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2508 Peserta Didik	0 Peserta Didik	940.500.000,00	0,00	-940.500.000,00	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal 6 Ayat (3) : Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan tujuan asal penganggaran adalah untuk peserta didik usia di atas 24 tahun (yang tidak tercover dana BOSP pusat) Sehingga ada ketidaksesuaian antara tujuan penganggaran dengan regulasi.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	4 Paket	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	31 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	11.959.552.000,00	3.322.407.000,00	-8.637.145.000,00	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	26 Satuan Pendidikan	0,00	10.470.760.000,00	10.470.760.000,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	26 Dokumen	26 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	1 Paket	0,00	101.575.000,00	101.575.000,00	- Menganggarkan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan TIK Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8971 Peserta Didik	8971 Peserta Didik	5.000.000.000,00	5.940.500.000,00	940.500.000,00	- Penambahan kegiatan Gebyar Pendidikan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Kesetaraan, Bimtek Pengelola SPNF SKB dan PKBM, Kombel Pengelola, Operator dan Tutor, Gebyar Pendidikan Kesetaraan, Sosialisasi Dan Pendampingan Akreditasi SPNF, Bimtek Tutor Paket A, Paket B, dan Paket C , Penyusunan Modul Ajar, - Pengurangan belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Insentif Pengelola PKBM
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	Jumlah Mebel Sekolah yang	1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Tersedia	Tersedia						
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	468.297.250,00	268.297.250,00	Adanya penambahan anggaran untuk belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Tahun 2025
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum	82 Persen	82 Persen	85.000.000,00	149.925.000,00	64.925.000,00	
Penetapan Kurikulum Muatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Lokal Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar						
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	114.925.000,00	64.925.000,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	114.925.000,00	64.925.000,00	Menganggarkan buku kurikulum muatan lokal, modul ajar usia 3-4 thn dan 4-6 thn untuk acuan bagi satuan pendidikan dalam pembelajaran menuju paud berkualitas
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru-Siswa Jenjang SMP Rasio Guru-Siswa Jenjang	Rasio Guru-Siswa Jenjang SMP Rasio Guru-Siswa Jenjang	12,84 Persen	10,33 Persen 12,84 Persen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	SD Rasio Guru-Siswa PAUD	SD Rasio Guru-Siswa PAUD	10,33 Persen 18 Persen	 18 Persen				
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Perencanaan distribusi, Penempatan dan Formasi PTK Rasio Pengawas dan Penilik PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesman Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesman Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Jumlah Dokumen Perencanaan distribusi, Penempatan dan Formasi PTK Rasio Pengawas dan Penilik PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesman Nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesman Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	12 Dokumen 43,05 Nilai 57,38 Nilai 6,21 persen 70,55 Nilai	12 Dokumen 43,05 Nilai 57,38 Nilai 6,21 persen 70,55 Nilai	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kese

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								taraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan bertujuan Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perubahan dilakukan untuk penyesuaian perubahan anggaran beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan sub kegiatan, beserta penambahan indikator pada kegiatan yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan. Selain itu, Penyesuaian Perubahan Rencana Dinas Pendidikan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimal.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dibandingkan dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2024 awal sehingga dianggap perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Hal lain yang membuat perubahan rencana kerja tidak dapat berjalan secara maksimal dan penganggaran yang belum sesuai yaitu, perubahan anggaran yang merubah target dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan dalam mencari barang yang sesuai rencana dan perbedaan harga beberapa barang, membuat pelaksanaan realisasi kegiatan terhambat. Pemindahan beberapa komponen rincian belanja juga dilakukan guna melakukan penyesuaian penganggaran. Selain itu, melakukan perubahan pada anggaran kegiatan yang dianggap masih 84 dapat dimaksimalkan juga dilakukan guna meningkatkan efisiensi anggaran. Perubahan Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil karyawan-karyawati Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta peran aktif stake-holder yang bersangkutan.

Dinas Kesehatan

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan dokumen yang mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan perubahan RKPD tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja memuat penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Perumusan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sesuai dengan kebijakan perubahan RKPD tahun 2024, diantaranya yaitu efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah, fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2024 dan project strategis RPJMD, memastikan berfungsi dan bermanfaatnya kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2024, menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa serta serapan belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini, secara khusus kepada tim penyusun dan tim sekretariat hingga selesainya Perubahan Renja ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan terkait urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kedua dokumen ini disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda. Renstra PD dan Renja PD harus saling terkait. Renja PD merupakan penjabaran dari perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra PD. Pada Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, sedangkan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam menyusun Renja PD harus berpedoman pada Renstra PD dengan mempertimbangkan arahan di dalam dokumen RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan, melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD dan mencatat kegiatan dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik tahun 2024 yang belum ada di RKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2024, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 memperhatikan efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah, fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2024 dan Project strategis RPJMD, memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2024, menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional

atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran/Renja Perangkat Daerah.

Sesuai informasi Pemerintah Provinsi bahwa kebijakan pendapatan daerah pada APBD 2024 cukup variatif jika dibandingkan dengan APBD 2023, disebabkan adanya sejumlah komponen pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan target. Ketidaksesuaian perkembangan keadaan ini mempengaruhi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024. Penyusunan perubahan renja Dinas Kesehatan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024.

1.2 **LANDASAN HUKUM**

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 Kabupaten Banjar meliputi;

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 05);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Indikator Kesehatan Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
- 19) Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara sasaran, penganggaran, indikator dan target kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum Rencana Strategis (renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II.

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- 1.1 Latar Belakang, memuat gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat daerah dengan mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kesehatan serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen perubahan RKPD dan Renstra perangkat daerah.
 - 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan
 - 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, pada sub bab ini memuat faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

2.1.6 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah, pada bab ini memuat implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

2.1.7 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut, pada bab ini memuat kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja, memuat perubahan indikator kinerja yang ada pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan
- 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, memuat jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan, berisikan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- 3.4 Alasan Dilakukan Perubahan, memuat penjelasan alasan mengapa dilakukan Perubahan Renja Dinas Kesehatan

BAB IV. PENUTUP, berisi kesimpulan yang ada dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan dengan memuat kaidah-kaidah dalam penulisan serta poin-poin permasalahan yang ada beserta cara mengatasinya.

- 4.1 Catatan Penting dalam Penulisan Rencana Kerja Perubahan 2023, berisi hal-hal yang penting yang mempengaruhi penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan
- 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan.
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut, berisi fokus dari Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah yang masih ada dalam menjalankan program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyajikan pengukuran terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sampai triwulan II.

Dinas Kesehatan perlu mengkaji terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 sampai triwulan II dengan pokok-pokok kajian:

2.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dimana target 93,4% hanya terealisasi 45,20%.
- b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan dimana target 95,54% hanya terealisasi 80%.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 100% hanya terealisasi 70%.
- d. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70% dimana target 67% hanya terealisasi 63%.
- e. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi dimana target 40% hanya terealisasi 35%.
- f. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 4258 orang hanya terealisasi 3365 orang.
- g. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 4064 orang hanya terealisasi 3910 orang.
- h. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar dimana target 15470 orang hanya terealisasi 15408 orang.

- i. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 15904 orang hanya terealisasi 15662 orang.
- j. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 38724 orang hanya terealisasi 24225 orang.
- k. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dimana target 5010 orang hanya terealisasi 4439 orang.
- l. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dimana target 50 orang hanya terealisasi 36 orang.
- m. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria dimana target 50 orang hanya terealisasi 29 orang.
- n. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dimana target 100 orang hanya terealisasi 2 orang.
- o. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tidak memenuhi target adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya dimana target 50 orang hanya terealisasi 45 orang.

2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan dimana dari target 93,36 terealisasi.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi dikarenakan SK Tim TPCB dan Jadwal pembinaan TPCB ke Puskesmas sudah ada.
- c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator yang tercapai adalah Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama dimana target 100% terealisasi.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar dimana dari target 88% terealisasi.
- e. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik dimana target 52,93% terealisasi.
- f. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dimana target 25% terealisasi.
- g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi dimana target 25% terealisasi.
- h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dimana target 100% terealisasi.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 100% terealisasi.
- j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 100% terealisasi.
- k. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Persentase capaian SPM Puskesmas dimana target 25% terealisasi.
- l. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, indikator yang memenuhi target adalah Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi dimana target 100% terealisasi.
- m. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun dimana target 50% terealisasi.
- n. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Posyandu aktif dimana target 0% terealisasi.
- o. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana target 4 dokumen terealisasi.
- p. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dimana target 4 dokumen terealisasi.

- q. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana target 13 laporan terealisasi.
- r. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dimana target 1304 orang terealisasi.
- s. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dimana target 6 dokumen terealisasi.
- t. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dimana target 6 dokumen terealisasi.
- u. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dimana target 6 dokumen terealisasi.
- v. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dimana target 10 orang terealisasi.
- w. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang disediakan dimana target 7 paket terealisasi.
- x. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dimana target 6 laporan terealisasi.
- y. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dimana target 0 unit terealisasi.
- z. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dimana target 6 laporan terealisasi.
- â. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dimana target 6 laporan terealisasi.

- ä. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dimana target 1 unit terealisasi.
- ö. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dimana target 17 unit terealisasi.
- aa. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dimana target 4 unit terealisasi.
- bb. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 4282 terealisasi.
- cc. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dimana target 25 dokumen terealisasi.
- dd. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dimana target 3 dokumen terealisasi.
- ee. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dimana target 1 dokumen terealisasi.
- ff. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Peduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB), indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar dimana target 2 dokumen terealisasi.
- gg. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan dimana target 3 dokumen terealisasi.
- hh. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dimana target 6 dokumen terealisasi.
- ii. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah

Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dimana target 0 dokumen terealisasi.

- jj. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dimana target 0 dokumen terealisasi.
- kk. Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota dimana target 52 unit terealisasi.
- ll. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun dimana target 0 unit terealisasi.
- mm. Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yg dibangun dimana target 0 unit terealisasi.
- nn. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya dimana target 0 unit terealisasi.
- oo. Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan dimana target 5 paket terealisasi.
- pp. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dimana target 0 dokumen terealisasi.
- qq. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dimana target 2 dokumen terealisasi.
- rr. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar dimana target 21 unit terealisasi.
- ss. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar dimana target 1 unit terealisasi.
- tt. Sub kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis

Telemedicine), indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan dimana target 215 layanan terealisasi.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, indikator yang melebihi target adalah Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDM dimana target 90% terealisasi 94%.
- b. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), indikator yang melebihi target adalah Persentase Apotek dan toko obat yang berizin dimana target 82% terealisasi 93%.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dimana target 3 paket terealisasi 7 paket.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dimana target 3 paket terealisasi 6 paket.
- e. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator yang melebihi target adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dimana target 37 paket terealisasi 50 paket.
- f. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 3723 orang terealisasi 4042 orang.
- g. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dimana target 5010 orang terealisasi 7201 orang.
- h. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 55544 orang hanya terealisasi 97960 orang.
- i. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 200 orang hanya terealisasi 21151 orang.
- j. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Orang yang mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar dimana target 424 orang terealisasi 991 orang.

- k. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dimana target 1 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- l. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dimana target 0 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- m. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dimana target 2 dokumen terealisasi 7 dokumen.
- n. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dimana target 0 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- o. Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dimana target 0 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- p. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dimana target 0 dokumen terealisasi 2 dokumen.
- q. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator yang melebihi target adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dimana target 0 dokumen terealisasi 5 dokumen.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- a. Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:
 - 1) Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan masih ada Posyandu balita yang kadernya kurang dari 5 orang, adanya pergantian unsur pimpinan di desa/kelurahan sehingga ada pengurangan dan pergantian kader, insentif dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang kesehatan, adanya penyesuaian posyandu dengan pengelolaan posyandu baru yaitu posyandu siklus hidup, belum terintegrasinya kegiatan survei PHBS dengan program lain, belum adanya kebijakan di tingkat kabupaten untuk implementasi posyandu siklus hidup dan belum adanya penataan sistem di tingkat daerah dalam implementasi Posyandu siklus hidup

serta tidak tersosialisasinya tentang SBH ke pihak pendidikan (korwil pendidikan) dan satuan pendidikan (sekolah) untuk kegiatan SBH.

- 2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat, kurangnya sarana transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan apotek dan toko obat, apotek dan toko obat yang jam buka dan tutupnya tidak menentu, tidak ada laporan dari pemilik apotek atau toko obat bahwa sudah tidak beroperasi, masih ada pemilik apotek dan toko obat yang tidak kooperatif saat pembinaan, masih sedikit apotek dan toko obat yang menyampaikan feedback perbaikan dan pelaporan SIMONA dan SIPNAP yang belum tepat waktu.
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terealisasi dikarenakan untuk barang yg memenuhi nilai TKDN terlebih dahulu harus melalui pemesanan dari penyedia dan ada sebagian barang yg sudah tidak di produksi lagi, karena beracuan dengan DPA pengadaan.
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan aplikasi ASPAK terkadang mengalami gangguan/maintenance.
- 5) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan tidak ada nya regulasi di tingkat kabupaten sehingga dasar kegiatan masih rendah, dan keterbatasannya kompetensi petugas dalam implementasi pelaksanaan posyandu siklus hidup.
- 6) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tidak terealisasi dikarenakan proses perencanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain, ada USG di Puskesmas yang rusak, sehingga masih dikirim ke Penyedia, masih ada Puskesmas yang dokternya belum terorientasi Penguatan Pelayanan ANC Terintegrasi USG Obstetri Dasar Terbatas karena pindah tugas & meninggal, MOU pembentukan jejaring skrining layak hamil dan ANC belum terealisasi, kurang maksimalnya kerjasama lintas program dan kurangnya promosi kesehatan .
- 7) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tidak terealisasi dikarenakan masih ada ibu melahirkan tidak di Faskes (DK), masih ada ibu melahirkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana alkes sesuai standar dan belum semua Bidan tersertifikasi pelatihan APN.
- 8) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tidak terealisasi dikarenakan pengelola belum memahami DO, formulir KPSP tidak digunakan secara maksimal.

- 9) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tidak terealisasi dikarenakan belum semua sasaran menerima alokasi buku rapor kesehatan.
 - 10) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tidak terealisasi dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut termasuk pada sistem aplikasi karena pelayanan lansia (pemeriksaan kesehatan) masih bergabung di Posbindu karena ketidaktersediaan strip pemeriksaan gula darah dan kolesterol.
 - 11) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tidak terealisasi dikarenakan padatnya jadwal narasumber dan pejabat terkait sehingga terkendala dalam penjadwalan kegiatan serta belum optimalnya penjangkaran dan deteksi dini.
 - 12) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) tidak terealisasi dikarenakan kegiatan terlaksana berdasarkan jadwal pengobatan pasien dan pasien sering berpindah-pindah tempat tinggal (lose follow up).
 - 13) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria tidak terealisasi dikarenakan hambatan berupa hal teknis mengenai aplikasi E-Sismal yang sering down dan error, pasien lebih mementingkan urusan pribadi sehingga tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya.
 - 14) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, tidak terealisasi dikarenakan banyaknya kegiatan tidak sebanding dengan jumlah tenaga pelaksana.
 - 15) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan pelaksanaan Uji Kompetensi Tekhnis Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan 1x dalam 1 tahun rencana kegiatan di TW III, peserta yang mendaftar pada peta jabatan sebanyak 147 orang, namun hanya 85 orang yang memenuhi persyaratan, dari 85 peserta yang memenuhi persyaratan, hanya 83 peserta yang mendaftar pada aplikasi E-Ukom, dari 83 peserta tersebut, hanya 67 peserta yang berhasil terverifikasi dan dapat mengikuti Uji Kompetensi JFK Tahun 2024, peserta yang tidak terverifikasi tersebut terkendala beberapa hal antara lain rekomendasi yang tidak dikeluarkan oleh instansi terkait, dokumen persyaratan yang tidak lengkap, dan peserta mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi dikarenakan adanya pendampingan dari Inspektorat.

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi dikarenakan Sudah terbentuk susunan Panitia, Penguji UKOM dan Mapping Calon Peserta UKOM JFK Tahun 2024 Pembekalan bagi Calon Penguji UKOM JFK Tahun 2024.
- 3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan kerjasama yang baik dengan bidang dan puskesmas serta adanya koordinasi yang intens dimana kegiatan monitoring capaian kinerja dapat berjalan tepat waktu sehingga laporan evaluasi capaian kinerja dinkes dapat selesai tepat waktu.
- 4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara ASN Dinas Kesehatan dan UPTD dengan Sub Bid Keuangan, dan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan BPKPAD.
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran dan tersedianya kegiatan diklat yg di buthkan berdasarkan tupoksi.
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk menunjang pelaksana kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi dikarenakan tersedianya dana, tagihan listrik dan SDA rutin setiap bulan.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana BMD.
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi dikarenakan koordinasi yang baik dengan lintas program dan puskesmas serta tersedianya regulasi PMK Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari Kemenkes bekerja sama dengan Kominfo untuk Bantuan Internet pada Puskesmas Paramasan (terdata pada Th 2023) oleh Kemenkes dan 25 Puskesmas sudah melaporkan data pelayanan melalui SIKDA Generik.
- 11) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi dikarenakan proses melalui OSS DPTPSP.
- 12) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi dikarenakan selama ini kegiatan posyandu sudah

berjalan dan pada dasarnya kegiatan posyandu lainnya pun juga sudah berjalan dengan baik hanya perlu penggabungan kegiatan termasuk waktu pelaksanaan, adanya dukungan dari pemerintahan Desa/Kelurahan untuk kegiatan Posyandu termasuk pendanaan posyandu yang bersumber dari dana desa termasuk insentif kader posyandu, untuk realisasi pertriwulan tetap 0% karena untuk mencapai target posyandu aktif harus melaksanakan posyandu dalam 10 bulan yaitu nanti di akhir triwulan IV.

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bidang bidang terkait.

- 13) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi dikarenakan kerjasama koordinasi yang baik dengan bidang bidang terkait dan Puskesmas.
- 14) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan kerjasama koordinasi yang baik dengan bidang bidang terkait dan Puskesmas.
- 15) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi dikarenakan pengumpulan data dari dinkes dan uptd berjalan dengan baik dan tepat waktu.
- 16) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terealisasi dikarenakan adanya kerjasama antara tanggung jawab pengelola keuangan hingga bisa selesai tepat waktu.
- 17) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi dikarenakan adanya kerja sama, antara BPKAD Dinkes dan 27 UPT Puskesmas, guna ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan ketepatan pembelajaran bimtek pada semua aplikasi baru.
- 18) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD terealisasi dikarenakan adanya kerjasama BPKAD, Dinkes dan 27 UPT Puskesmas, guna ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan.
- 19) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran dan tersedianya kegiatan diklat yg di buthkan berdasarkan tupoksi.
- 20) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor terealisasi dikarenakan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 21) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi dikarenakan tersedianya dan terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 22) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedianya anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung kantor untuk keperluan kerja.

- 23) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk mendukung sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 24) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi dikarenakan dana tersedia , tagihan listrik dan SDA rutin setiap bulan.
- 25) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk berjalannya dan terpenuhinya kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 26) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk berjalannya dan terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 27) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran untuk berjalannya dan terpenuhinya kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 28) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus terealisasi dikarenakan adanya Permenkes No.4 Tahun 2019 Tentang SPM Bidang Kesehatan yang mengatur tentang standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan adanya kerjasama yang baik dengan puskesmas untuk upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penderita diabetes melitus.
- 29) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi dikarenakan adanya regulasi PMK nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual dan tersedianya anggaran untuk PMT ibu hamil KEK dari berbagai sumber (BOK, dana desa).
- 30) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terealisasi dikarenakan adanya anggaran untuk test kebugaran ASN, adanya tenaga pengelola program untuk meninput data kebugaran melalui sitko, adanya Aplikasi Pelaporan melalui E- Monev, adanya sebagian puskesmas yang melakukan test kebugaran haji dengan mandiri.
- 31) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat terealisasi dikarenakan adanya anggaran untuk Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat.
- 32) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Peduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) terealisasi dikarenakan adanya Tim TGC yang telah dibentuk di tingkat Puskesmas dan adanya dukungan dari lintas sektor.

- 33) Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari lintas sektor dan pengelola program.
- 34) Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi dikarenakan adanya dukungan lintas sektor Kader posbindu PTM mendapatkan praktik langsung dalam penggunaan aplikasi ASIK didukung pendampingan dari petugas pengelola program PTM, adanya komunikasi yang baik dengan Tim ASIK Dinkes Provinsi Kalsel sehingga memudahkan penyampaian informasi terbaru mengenai upgrade ASIK, adanya sosialisasi ASIK versi terbaru melalui daring Puskesmas untuk aktivasi dan adanya kerjasama yang baik sehingga koordinasi pelaksanaan program dapat dimaksimalkan.
- 35) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya terealisasi dikarenakan adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut dan pengelolaan Asman Toga di Puskesmas selaras dengan program kerja PKK, sehingga didukung oleh lintas sektor.
- 36) Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terealisasi dikarenakan Pembayaran Iuran PBI Tagihan BPJS ke desa untuk melakukan sosialisasi JKN.
- 37) Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terealisasi dikarenakan kegiatan pembinaan tim TPCB masih dilaksanakan.
- 38) Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia, konsultan perencana yang kompeten, dokumen kontrak perencanaan pembangunan sudah dibuat, SPJ pencairan kontrak perencanaan pembangunan selesai, tim POKJA UKPBJ yang berkompeten, tender perbaikan atap gedung utama plafon UPTD. Puskesmas Sungai Tabuk 3 dan persiapan pekerjaan penambahan ruang Puskesmas Sungai Tabuk 3 sudah dilaksanakan.
- 39) Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi dikarenakan konsultan perencana yang kompeten, survey lapangan pekerjaan fisik berjalan dengan lancar, dokumen kontrak perencanaan pembangunan sudah dibuat, SPJ pencairan kontrak perencanaan pembangunan sudah selesai, tender pekerjaan pembangunan rumah dinas medis dan paramedis UPTD. Puskesmas Pengaron dan tender master plan, kak dan ded rs tipe d kabupaten banjar sudah dilaksanakan, tim POKJA UKPBJ yang kompeten di bidangnya.
- 40) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia, Konsultan yang berkompeten, dokumen kontrak perencanaan pembangunan sudah dibuat dan tim POKJA UKPBJ yang kompeten di bidangnya.

- 41) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, terealisasi dikarenakan adanya anggaran kas dan penyedia obat-obatan.
 - 42) Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan terealisasi dikarenakan komitmen bersama telah dilaksanakan dengan baik, sumber daya alat dan komunikasi dalam hal sistem rujukan yang sudah terintegrasi dan DPA sudah bisa digunakan untuk kegiatan melaksanakan kegiatan RME.
 - 43) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan melalui Rekrutmen Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dari Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2 formasi tersebut.
 - 44) Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi dikarenakan barang ready stock, pendampingan Kejaksaan Negeri Banjar untuk pengadaan IPAL Puskesmas, kontrak pengadaan *solar cell*, IPAL dan air bersih Puskesmas sudah di buat, survey lapangan untuk pengadaan *solar cell*, IPAL dan air bersih Puskesmas dapat dilaksanakan secara lancar, tim teknis survey lapangan untuk pengadaan *solar cell*, IPAL dan air bersih Puskesmas yang kompeten.
 - 45) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi dikarenakan pengajuan perbaikan dan pemeliharaan dari Puskesmas Cintapuri (dental unit), Puskesmas Mataraman (dental unit), Puskesmas Beruntung Baru (dental unit), Simpang Empat 2 (Hematologi Analyser), Puskesmas Sungai Tabuk 1 (Pemindahan dental unit), tersedia penyedia untuk perbaikan, telah diberikan surat pengumuman untuk UPTD agar segera melakukan pengajuan untuk alat-alat yang dilakukan kalibrasi
 - 46) Sub kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) terealisasi dikarenakan kegiatan pelaksanaan pertemuan monev pengelola program PIS PK sudah dilaksanakan.
- c. Faktor-faktor penyebab capaian melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:
- 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota melebihi target dikarenakan adanya pengusulan formasi ASN pada Pengadaan Tahun 2024 untuk Puskesmas Sungai Pinang, rekrutmen Nusantara Sehat oleh Kementerian Kesehatan untuk Puskesmas Sungai Pinang, adanya formasi rekrutmen Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tahun 2024 oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Puskesmas Sungai Pinang dan Puskesmas Telaga Bauntung.

- 2) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melebihi target dikarenakan adanya kerjasama antar OP, seksi perizinan, dinas DPMPTSP dalam penerbitan perizinan dan tersedia form komitmen apotek dan toko obat agar pemilik usaha melakukan perbaikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor melebihi target dikarenakan tersedianya anggaran untuk menunjang pelaksana kegiatan.
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan melebihi target dikarenakan tersedianya anggaran untuk menunjang pelaksana kegiatan.
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya melebihi target dikarenakan tersedianya anggaran untuk mendukung berjalannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir melebihi target dikarenakan adanya regulasi Permenkes Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensi Bidan dan tersedianya SDM Bidan di Desa/Kelurahan.
- 7) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV melebihi target dikarenakan adanya dukungan dari atasan, adanya dukungan dari organisasi KPA, LKKNU, adanya SK tim PDP puskesmas.
- 8) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif melebihi target dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Lingkungan Instansi Pemerintahan, adanya Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 800.1.12.1/20/BKPSDM Tahun 2023 tentang Upaya Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan IVA Test bagi PNS, PPPK dan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, adanya kebijakan Permenkes No.6 Tahun 2024 tentang SPM Bidang Kesehatan yang mengatur tentang standar pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendukung adanya kerjasama dari beberapa bidang di Dinas Kesehatan di Kabupaten Banjar dan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 9) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi melebihi target dikarenakan adanya komunikasi yang baik dengan Tim ASIK Dinkes Provinsi Kalsel sehingga memudahkan penyampaian informasi terbaru

mengenai upgrade ASIK dan adanya sosialisasi ASIK versi terbaru melalui daring.

- 10) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat melebihi target dikarenakan adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pengelola program kesehatan jiwa di puskesmas dan dinas kesehatan sehingga memudahkan dalam koordinasi program.
- 11) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan melebihi target dikarenakan adanya anggaran untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah Medis, adanya anggaran untuk pengadaan Reagen SKAM RT dan adanya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan penjamah makanan bagi jasa boga.
- 12) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan fasilitator dan narasumber, adanya Pendampingan dari BKOM (Seksi Kesling Kesjaor), adanya Pendamping dari pengelola kesehatan haji dan olahraga di puskesmas(Seksi Kesling Kesjaor) dan adanya anggaran dari kabupaten untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran calon jamaah haji.
- 13) Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan melebihi target dikarenakan adanya dukungan dari Kemenkes bekerja sama dengan Kominfo untuk Bantuan Internet pada Puskesmas Paramasan (terdata pada Th 2023) oleh Kemenkes dan hasil pemeriksaan oleh BPKP Regional Kalimantan Selatan terkait Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Kab Banjar dinyatakan sudah berjalan baik.
- 14) Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat melebihi target dikarenakan adanya Permenkes No.2015 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan ILP (Posyandu Siklus Hidup) dan adanya dana untuk kegiatan tersebut.
- 15) Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran dan adanya dukungan dari bidang dan seksi lain yang terkait dalam kegiatan promosi kesehatan melalui pameran pembangunan.
- 16) Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan terealisasi dikarenakan Surat pertanggungjawaban sudah selesai.
- 17) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya anggaran 2024 dan data usulan puskesmas.

2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul dengan tidak terealisasinya beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan di tahun 2024 tentunya berdampak terhadap capaian akhir

Renstra periode tahun 2021-2026, hal ini menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan Renja Perubahan 2024 dan Renstra periode 2021-2026 sehingga faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya kinerja tersebut bisa di selesaikan dan tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Oleh karena itu Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yaitu pertriwulan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terealisasinya target program, selain itu Dinas Kesehatan akan menggali dan mengembangkan inovasi-inovasi terutama pada program yang belum terealisasi sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pencapaian target program.

2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

- a. Penyesuaian target program/kegiatan terhadap kemampuan maksimal yang akan dicapai dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, keuangan serta kondisi lingkungan yang ada saat ini.
- b. Memprioritaskan anggaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target Renstra dan menyusun skala prioritas untuk Renstra 2021-2026.
- c. Menyusun kegiatan inovatif atau merevisi/intervensi kegiatan yang sudah ada selama ini sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator program dimaksud .
- d. Melakukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan berbasis data tervalidasi yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target Renstra, RPJMD maupun SPM bidang kesehatan sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.
- e. Meningkatkan koordinasi di segala jenjang/tingkat pada stakeholder, mitra kesehatan, lintas sektor lainnya serta antar Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang lebih intensif dalam rangka menyusun strategi peningkatan pencapaian target kinerja Renstra.
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan di Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dan refreasing pengetahuan.

Capaian Dinas Kesehatan pada tahun 2024 diprediksi akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun perkiraan realisasi capaian tahun 2023 dan prediksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kesehatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terpenuhi ya Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	95 Indeks	787.365.4 43.800	93,36 Indeks	130.58 9.974.9 38	94 Indeks	155.276. 243.806	62,06 Indeks	10.025.49 2.702	61,99 Indeks	87.262.5 42.188	1,320	0,62 7	217	227.878.0 09.828	0,997	0,166
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100%	602.321.6 00	100%	202.04 7.200	100%	111.483. 000	32,35 %	-	52,93 %	29.352.2 00	0,853	0,26 3	2	231.399.4 00	1,853	0,335
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34 Dokumen	195.528.7 00	7 Dokumen	186.478 .700	6 Dokumen	52.065.0 00	3 Dokumen	-	4 Dokumen	5.134.20 0	1,167	0,09 9	14	191.612.9 00	0,240	0,954
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35 Dokumen	151.378.5 00	6 Dokumen	15.568. 500	7 Dokumen	20.118.0 00	2 Dokumen	-	4 Dokumen	14.968.0 00	0,857	0,74 4	12	30.536.50 0	0,196	0,103

[illegible]

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	763.519.270.000	100%	119.475.094.584	100%	141.647.278.306	25%	9.562.911.572	25%	83.290.772.115	0,500	0,656	2	212.328.778.271	1,500	0,156
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1575 Orang /bulan	705.000.000.000	1090 Orang /bulan	118.344.264.584	1304 Orang /bulan	140.307.978.306	1304 Orang /bulan	9.467.211.572	1026 Orang /bulan	83.049.642.115	1,787	0,659	3420	210.861.118.271	0,693	0,168
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	58.350.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	3.871.893.870	12 Dokumen	1.031.060.000	12 Dokumen	1.299.300.000	3 Dokumen	88.860.000	6 Dokumen	237.080.000	0,750	0,251	21	1.357.000.000	0,266	0,266
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 Laporan	169.270.000	N/A	N/A	12 Laporan	16.700.000	3 Laporan	-	6 Laporan	4.050.000	0,750	0,243	9	4.050.000	0,013	0,000

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tri wulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	48 Lapora n	278.443.7 50	12 Lapora n	99.770. 000	12 Lap ora n	23.300.0 00	3 Lapora n	6.840.000	6 Lapora n	-	0,750	0,29 4	21	106.610.0 00	0,266	0,358
Pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administراس i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100%	2.600.000 .000	100%	97.354. 225	100% 0%	116.161. 500	25%	-	25%	30.470.0 00	0,500	0,26 2	2	127.824.2 25	1,500	0,037
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Doku men	157.621.2 60	1 Doku men	15.961. 500	1 Do ku me n	16.161.5 00	0 Doku men	-	0 Doku men	-	0,000	0,00 0	1	15.961.50 0	0,167	0,101
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	111 Orang	2.600.000. 000	10 Orang	81.392. 725	45 Ora ng	100.000. 000	4 Orang	-	10 Orang	30.470.0 00	0,311	0,30 5	24	111.862.7 25	0,093	0,031
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administراس i Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.976.35 7.200	100%	1.303.0 37.936	100% 0%	1.773.24 6.000	100%	-	100%	657.413. 079	2,000	0,37 1	3	1.960.451 .015	3,000	0,109

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II							
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang a Bangunan Kantor yang disediakan	25 Paket	180.994.9 00	5 Paket	10.395. 000	7 Pak et	10.000.0 00	0 Paket	-	7 Paket	-	1,000	0,00 0	12	10.395.00 0	0,240	0,057
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	1.485.997. 500	17 Paket	181.307 .750	5 Pak et	220.000. 000	2 Paket	-	5 Paket	42.320.0 00	1,400	0,19 2	24	223.627.7 50	0,317	0,122
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	605.864.8 00	4 Paket	41.343. 300	5 Pak et	43.246.0 00	1 Paket	-	5 Paket	21.900.0 00	1,200	0,50 6	10	63.243.30 0	0,193	0,068
Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lapora n	9.703.500. 000	12 Lapora n	1.069.9 91.886	12 Lap ora n	1.500.00 0.000	3 Lapora n	-	3 Lapora n	593.193. 079	0,500	0,39 5	18	1.663.184. 965	0,208	0,110
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.670.000 .000	100%	243.26 6.000	10 0%	90.527.0 00	0%	-	0%	-	0,000	0,00 0	1	243.266.0 00	1,000	0,146
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	368 Unit	1.670.000. 000	19 Unit	243.266 .000	104 Uni t	90.527.0 00	0 Unit	-	0 Unit	-	0,000	0,00 0	19	243.266.0 00	0,052	0,146
Pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.825.125 .000	100%	7.916.1 43.083	10 0%	9.206.00 0.000	25%	449.032.3 30	100%	3.040.76 8.560	1,250	0,37 9	2	11.405.94 3.973	2,250	2,802

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lapora n	160.200.0 00	12 Lapora n	8.000.0 00	12 Lap ora n	9.800.00 0	2 Lapora n	-	6 Lapora n	2.600.00 0	0,667	0,26 5	20	10.600.00 0	0,211	0,050
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Lapora n	2.664.925. 000	12 Lapora n	242.354 .043	12 Lap ora n	432.750. 000	3 Lapora n	21.432.330	6 Lapora n	109.812. 781	0,750	0,30 3	21	373.599.1 54	0,213	0,091
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Lapora n	34.918.80 0.000	12 Lapora n	7.665.7 89.040	12 Lap ora n	8.763.45 0.000	3 Lapora n	427.600.00 0	6 Lapora n	2.928.35 5.779	0,750	0,38 3	21	11.021.74 4.819	0,266	0,220
Penatausah aan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.172.370 .000	100%	1.353.0 31.910	10 0%	2.331.54 8.000	100%	13.548.80 0	100%	213.766. 234	2,000	0,09 7	3	1.580.346 .944	3,000	0,324
Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	270.990.0 00	1 Unit	28.350. 800	1 Uni t	38.990.0 00	1 Unit	-	1 Unit	9.748.36 3	2,000	0,25 0	3	38.099.16 3	3,000	0,105

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	2.280.000. 000	9 Unit	382.986 .110	13 Uni t	446.940. 000	2 Unit	13.548.800	4 Unit	81.396.3 37	0,462	0,21 2	15	477.931.2 47	0,557	0,168
Terlaksanan ya Pemeliharaaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	1.357.000. 000	1 Unit	884.760 .000	1 Uni t	1.794.86 8.000	1 Unit	-	1 Unit	98.871.5 34	2,000	0,05 5	3	983.631.5 34	3,000	0,652
Terlaksanan ya Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	N/A	N/A	20 Unit	56.935. 000	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terlaksanan ya Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	372 Unit	142.840.0 00	N/A	N/A	75 Uni t	50.750.0 00	18 Unit	-	50 Unit	23.750.0 00	0,907	0,46 8	68	23.750.00 0	0,002	0,000

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terpenuhi ya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	88%	11.717.21 8.862.357	100%	104.88 4.916.2 80	52 %	60.277.1 10.243	16,37 %	71.718.00 0	47,05 %	51.392.7 10.437	1,220	0,85 4	2	156.349.3 44.717	2,522	0,009
Terlaksana ya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	70%	11.534.23 6.921.350	40%	57.404. 444.01 6	67 %	22.136.6 55.968	63%	28.300.00 0	63%	4.243.97 6.000	1,881	0,19 3	2	61.676.72 0.016	3,258	0,005
Terpenuhi a Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembanguna n Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungn ya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	60.000.00 0.000	N/A	N/A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terbangunn ya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembanguna n Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	26 Unit	14.000.00 0.000	1 Unit	16.665. 783.976	21 Uni t	8.099.09 0.000	21 Unit	-	21 Unit	114.260. 000	2,000	0,01 4	43	16.780.04 3.976	0,115	1,190
Terbangunn ya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembanguna n Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yg dibangun	21 Unit	45.350.00 0.000	1 Unit	1.560.9 70.000	19 Uni t	2.089.91 8.000	19 Unit	-	19 Unit	74.691.0 00	2,000	0,03 6	39	1.635.661. 000	0,143	0,034

[illegible]

[illegible]

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7 Unit	422.899.110	N/A	N/A	1 Unit	30.000.000	0 Unit	-	1 Unit	10.545.000	1,000	0,352	1	10.545.000	0,143	0,000
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	17 Paket	6.822.680.428	N/A	N/A	5 Paket	6.307.951.580	5 Paket	28.300.000	5 Paket	158.656.000	2,000	0,030	10	186.956.000	0,118	0,000
Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll)	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1002 Layanan	19.814.912	N/A	N/A	1000 Layanan	18.320.000	0 Layanan	-	215 Layanan	-	0,215	0,000	215	-	0,000	0,000

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	100%	182.739.441.007	84%	47.275.363.504	92 %	37.840.633.775	0%	43.418.000	25%	47.152.513.237	0,272	1,247	1	94.471.294.741	1,112	0,259
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11093 Orang	345.435.100	8342 Orang	535.965.250	10645 Orang	642.676.000	1891 Orang	-	3365 Orang	526.927.500	0,494	0,820	13598	1.062.892.750	0,752	1,552
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11019 Orang	267.093.400	8363 Orang	39.682.000	10161 Orang	61.284.000	1988 Orang	-	3910 Orang	-	0,580	0,000	14261	39.682.000	0,759	0,149
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10363 Orang	125.051.700	8899 Orang	13.303.100	9309 Orang	95.480.000	1975 Orang	-	4042 Orang	-	0,646	0,000	14916	13.303.100	0,859	0,106
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan kesehatan sesuai standar	41568 Orang	175.531.100	35370 Orang	23.731.100	38677 Orang	410.489.100	7494 Orang	-	15408 Orang	-	0,592	0,000	58272	23.731.100	0,851	0,135
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11692 Orang	127.634.400	54019 Orang	5.391.000	79524 Orang	255.457.000	0 Orang	-	15662 Orang	247.500.000	0,197	0,969	69681	252.891.000	4,620	0,042

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40426 8 Orang	421.365.8 00	23775 4 Orang	596.334 .850	370 296 Ora ng	100.000. 000	46593 Orang	-	97960 Orang	29.292.0 00	0,390	0,29 3	382 307	625.626.8 50	0,588	1,415
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61037 Orang	372.955.4 00	43319 Orang	7.001.5 00	968 12 Ora ng	38.777.0 00	12851 Orang	-	24225 Orang	-	0,383	0,00 0	803 95	7.001.500	0,710	0,019
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41682 Orang	265.000.0 00	32869 Orang	5.937.5 00	381 60 Ora ng	26.875.0 00	11302 Orang	-	21151 Orang	-	0,850	0,00 0	653 22	5.937.500	0,789	0,022
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5511 Orang	742.581.8 36	5723 Orang	49.041. 000	504 6 Ora ng	115.829. 800	2819 Orang	-	4282 Orang	63.000.0 00	1,407	0,54 4	128 24	112.041.0 00	1,039	0,066
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	873 Orang	832.023.1 12	1034 Orang	22.012. 000	848 Ora ng	102.535. 275	881 Orang	-	991 Orang	2.046.00 0	2,208	0,02 0	290 6	24.058.00 0	1,187	0,026

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7462 Orang	421.168.5 00	1744 Orang	26.633. 000	100 20 Ora ng	70.423.0 00	2057 Orang	-	4439 Orang	40.617.8 00	0,648	0,57 7	824 0	67.250.80 0	0,234	0,063
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14388 Orang	1.658.017. 767	3379 Orang	576.269 .750	100 20 Ora ng	563.361. 500	3873 Orang	7.696.000	7201 Orang	479.763. 500	1,105	0,86 5	144 53	1.063.729. 250	0,235	0,348
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	15 Doku men	576.562.5 00	4 Doku men	41.804. 800	3 Do ku me n	72.300.0 00	0 Doku men	-	2 Doku men	900.000	0,667	0,01 2	6	42.704.80 0	0,311	0,073
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	101 Doku men	4.375.000. 000	25 Doku men	3.756.1 99.300	25 Do ku me n	755.000. 000	25 Doku men	3.222.000	25 Doku men	100.516. 000	2,000	0,13 7	75	3.859.937. 300	0,267	0,859
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27 Doku men	1.494.980. 600	3 Doku men	61.854. 000	5 Do ku me n	50.000.0 00	0 Doku men	-	3 Doku men	5.594.00 0	0,600	0,11 2	6	67.448.00 0	0,133	0,041
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 Doku men	3.607.000. 000	5 Doku men	917.695 .900	3 Do ku me n	400.000. 000	0 Doku men	-	2 Doku men	-	0,667	0,00 0	7	917.695.9 00	0,227	0,254

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	51 Doku men	781.000.0 00	1 Doku men	502.798 .000	5 Do ku me n	105.242. 500	0 Doku men	-	2 Doku men	42.302.0 00	0,400	0,40 2	3	545.100.0 00	0,027	0,644
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40 Doku men	340.000.0 00	3 Doku men	20.462. 900	25 Do ku me n	70.000.0 00	0 Doku men	-	0 Doku men	4.080.00 0	0,000	0,05 8	3	24.542.90 0	0,075	0,060
Terlaksanan ya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31 Doku men	2.588.000. 000	3 Doku men	184.245 .400	6 Do ku me n	300.000. 000	1 Doku men	4.000.000	3 Doku men	20.200.0 00	0,667	0,08 1	7	208.445.4 00	0,118	0,071
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgun a NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13 Orang	200.000.0 00	6 Orang	14.880. 000	200 Ora ng	28.105.0 00	1 Orang	-	1 Orang	1.800.00 0	0,010	0,06 4	8	16.680.00 0	0,462	0,074
Terlaksanan ya Pengelolaan Upaya Penguranga n Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Penguranga n Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	33 Doku men	8.083.500. 000	12 Doku men	1.018.6 72.847	12 Do ku me n	840.000. 000	0 Doku men	1.125.000	2 Doku men	694.967. 101	0,167	0,82 9	14	1.714.764. 948	0,369	0,126
Terlaksanan ya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60 Doku men	7.345.113. 300	12 Doku men	1.024.0 15.000	12 Do ku me n	500.000. 000	3 Doku men	-	6 Doku men	135.399. 900	0,750	0,27 1	21	1.159.414. 900	0,213	0,139

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Doku men	135.050.0 00.000	1 Doku men	36.428. 496.900	2 Do ku me n	30.660.5 70.800	0 Doku men	-	0 Doku men	44.580.8 11.800	0,000	1,45 4	1	81.009.30 8.700	0,050	0,270
Terdistribusi nya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratori um Rujukan/Na sional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratori um Rujukan/Na sional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan	1 Paket		N/A	N/A	N/ A	N/A	1 Paket	-	1 Paket	-	N/A	N/A	2	-	N/A	N/A
Terlaksanan ya Penyelengga raan Kabupaten/ Kota Sehat	Penyelenggar aan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Doku men	389.480.0 00	N/A Doku men	N/A	1 Do ku me n	40.000.0 00	0	-	1 Doku men	1.000.00 0	1,000	0,02 5	1	1.000.000	0,111	0,000
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	60 Doku men	8.708.000. 000			0	-	3	-	6	-	0,000	0,00 0	9	-	0,000	0,000
Terlaksanan ya Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten /Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	224.000.0 00	0 Unit	889.185 .047	25 Uni t	105.000. 000	0 Unit	-	52 Unit	-	2,080	0,00 0	52	889.185.0 47	0,083	3,970
Terlaksanan ya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Lapora n		N/A	N/A	N/ A	N/A	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	N/A	N/A	0	-	N/A	N/A

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Pemberian Obat Massal)																		
Tersedia dan Terkelolaanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	650.000.0 00	1 Unit	173.344 .000	1 Unit	599.999. 800	0 Unit	27.375.000	0 Unit	134.815. 036	0,000	0,27 0	1	335.534.0 36	1,000	0,267
Terlaksanan ya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluara ga	18.320.00 0	0 Keluara ga	13.298. 000	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1535 Orang	324.480.0 00	N/A	N/A	100 Ora ng	262.415. 500	229 Orang	-	576 Orang	12.000.0 00	8,050	0,04 6	805	12.000.00 0	0,005	0,000

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	218.560.0 00	N/A	N/A	100 Orang	62.917.5 00	13 Orang	-	36 Orang	12.058.5 00	0,490	0,19 2	49	12.058.50 0	0,005	0,000
Terlaksanan ya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	156.080.0 00	39 Orang	136.428 .360	0 Orang	53.899.0 00	16 Orang	-	29 Orang	9.364.50 0	0,000	0,17 4	84	145.792.8 60	0,000	0,874
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						0 Orang	-	0 Orang	-	6 Orang	-	0,000	0,00 0	6	-	0,000	0,000
Terselengga ranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penyelengg araan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%	943.000.0 00	100%	95.340. 500	10 0%	198.458. 000	100%	-	100%	3.778.80 0	2,000	0,01 9	3	99.119.30 0	3,000	0,101
Terlaksanan ya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	50 Doku men	143.000.0 00	50 Doku men	12.895. 500	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terlaksanan ya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30 Doku men	619.506.4 92	N/A	N/A	12 Do ku me n	198.458. 000	2 Doku men	-	7 Doku men	3.778.80 0	0,750	0,01 9	9	3.778.800	0,025	0,000

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Tersedianya Alat/Perang kat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perang kat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	12 Unit	150.000.0 00	6 Unit	82.445. 000	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terselengga ranya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	100%	242.500.0 00	100%	205.10 8.760	10 0%	101.362. 500	0%	-	50%	-	0,500	0,00 0	2	205.108.7 60	1,500	0,846
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalika n, Diawasi dan Ditindaklanj uti Perizinannya	Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	55 Unit		N/A	N/A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terlaksanan ya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	43 Unit	309.660.0 00	30 Unit	188.209 .760	25 Uni t	23.163.0 00	0 Unit	-	0 Unit	-	0,000	0,00 0	30	188.209.7 60	0,698	0,608

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	14 Doku men	242.500.0 00	1 Doku men	16.899. 000	4 Do ku me n	78.199.5 00	0 Doku men	-	0 Doku men	-	0,000	0,00 0	1	16.899.00 0	0,071	0,070
Meningkatn ya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	100%	7.245.801 .600	100%	2.121.9 35.884	88 %	1.270.00 0.000	0,43%	90.000.00 0	8,83%	426.720. 000	0,105	0,40 7	1	2.638.655 .884	1,105	0,293
Terlaksanan ya Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagun aan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayagun aan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	100%	2.145.801 .600	100%	329.62 0.000	90 %	30.000.0 00	96%	-	94%	-	2,111	0,00 0	3	329.620.0 00	3,111	0,154
Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	70 Doku men	2.145.801. 600	16 Doku men	329.620 .000	16 Do ku me n	30.000.0 00	1 Doku men	-	1 Doku men	-	0,125	0,00 0	18	329.620.0 00	0,230	0,154

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terlaksanan ya Pengemban gan Mutu dan Peningkata n Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengemban gan Mutu dan Peningkata n Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UPT yang SDMk mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100%	5.100.000 .000	100%	1.792.3 15.884	65 %	1.240.00 0.000	0%	90.000.00 0	0%	426.720. 000	0,000	0,41 7	1	2.309.035 .884	1,000	0,351
Terlaksanan ya Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1046 Orang	5.100.000. 000	107 Orang	1.792.3 15.884	100 Ora ng	1.240.00 0.000	15 Orang	90.000.000	45 Orang	426.720. 000	0,600	0,41 7	167	2.309.035. 884	0,103	0,351
Terpenuhi nya standar pelayanan kefarmasian	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATA N DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	95,93 %	4.456.696 .800	89%	388.45 8.000	94, 54 %	-	26%	-	50%	58.430.0 00	0,804	0,00 0	2	446.888.0 00	1,766	0,087

[illegible]

[illegible]

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Rumah Tangga																		
Meningkatn ya Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT BIDANG KESEHATA N	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	165.404.6 00.000	100%	870.55 9.600	93, 40 %	220.000. 000	10%	-	45,80 %	-	0,597	0,00 0	2	870.559.6 00	1,597	0,005
Terlaksanan ya Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkata n Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi, Pemberdaya an, Kemitraan, Peningkata n Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	100%	1.291.000 .000	100%	40.436. 000	10 0%	60.000.0 00	10%	-	15%	-	0,250	0,00 0	1	40.436.00 0	1,250	0,031
Terlaksanan ya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	22 Doku men	1.291.000. 000	1 Doku men	40.436. 000	4 Do ku me n	60.000.0 00	0 Doku men	-	2 Doku men	-	0,500	0,00 0	3	40.436.00 0	0,068	0,031
Terlaksanan ya Pelaksanaa n Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu aktif	80%	164.113.6 00.000	90,05 %	84.846. 000	76 %	80.000.0 00	0%	-	0%	-	0,000	0,00 0	1	84.846.00 0	1,126	0,001

Sasaran	Program/ Kegiatan/S ub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7+8)/6		10 = 5 + (7+8)		11=(5+9)/4	
Terselenggar anya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	21 Doku men	1.208.000. 000	1 Doku men	84.846. 000	7 Do ku me n	80.000.0 00	0 Doku men	-	2 Doku men	-	0,286	0,00 0	3	84.846.00 0	0,061	0,070
Terlaksanan ya Pengemban gan dan Pelaksanaa n upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Pengemban gan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase UKBM Aktif	100%	576.562.5 00	100%	745.27 7.600	10 0%	80.000.0 00	15%	-	15%	-	0,300	0,00 0	1	745.277.6 00	1,300	1,293
Terlaksanan ya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan teknis dan supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22 Doku men	576.562.5 00	1 Doku men	745.277 .600	5 Do ku me n	80.000.0 00	0 Doku men	-	3 Doku men	-	0,600	0,00 0	4	745.277.6 00	0,073	1,293

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Tidak ada perubahan pada indikator kinerja baik pada indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan maupun indikator sub kegiatan pada tahun 2024.

3.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sesuai dengan Renja Perubahan Tahun 2024 melaksanakan 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan dan 70 sub kegiatan sehingga total pagu perubahan anggaran Rp.382.752.776.511,-. Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Program	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan dan 70 sub kegiatan sehingga total pagu anggaran Rp.382.752.776.511,-. Pada APBD Perubahan 2024 ini Pemerintah Daerah menambahkan Pagu anggaran guna memenuhi kebutuhan antara lain:

- Penambahan pagu untuk kegiatan baru/tambahan
- Memenuhi pengadaan obat Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- Memenuhi pelaksanaan kegiatan kegiatan premi peserta BPJS PBPU Pemda, sehubungan dengan sustainabilitas UHC, penambahan peserta unutm mencapai target 98% sesuai RPJMD, disertai penambahan sporadik peserta bagi kalangan warga tidak mampu yang belum menjadi peserta dan atau tidak aktif lagi kepesertaannya akibat dinonaktifkan sebanyak kurang lebih 10.000 jiwa di Kabupaten Banjar

Tabel 3.2

Sumber Pendanaan Dinas Kesehatan dan UPT

No.	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	APBD	Rp 359.494.526.353	Rp 395.953.159.692	Rp 36.458.633.339
2.	DAK	Rp 43.482.166.000	Rp 43.482.166.000	Rp 0
UPTD				
1.	APBD	Rp 6.830.212.831	Rp 6.708.260.571	- Rp 121.925.260
2.	DAK	Rp 25.924.611.543	Rp 25.924.611.553	Rp 10
3.	JKN	Rp 20.624.791.849	Rp 28.229.683.610	Rp 7.604.891.761
4.	BLUD	Rp 1.624.893.560	Rp 4.552.373.204	Rp 2.927.479.644

3.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 didasari oleh adanya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/528/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan efisiensi pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang mana ada beberapa sub kegiatan

yang menambah maupun mengurangi pagu anggaran. Penambahan pagu anggaran juga dimaksudkan untuk kegiatan baru/tambahan, memenuhi pengadaan obat Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dan memenuhi pelaksanaan kegiatan kegiatan premi peserta BPJS PBPUPemda, sehubungan dengan sustainabilitas UHC, penambahan peserta untuk mencapai target 98% sesuai RPJMD, disertai penambahan sporadik peserta bagi kalangan warga tidak mampu yang belum menjadi peserta dan atau tidak aktif lagi kepesertaannya akibat dinonaktifkan sebanyak kurang lebih 10.000 jiwa di Kabupaten Banjar.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Dinas Kesehatan					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	76 indeks	76 indeks	155.276.243.806,00	163.849.014.281,00	8.572.770.475	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100 %	100 %	111.483.000,00	111.483.000,00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	52.065.000,00	52.065.000,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	20.118.000,00	49.518.000,00	29.400.000	1. Desk Perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan tahun 2026 2. Desk Perencanaan penganggaran UPTD tahun 2026 3. Rapat koordinasi lintas sektor perencanaan, penganggaran,

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								program bidang kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan	39.300.000,00	67.950.000,00	28.650.000	1. Evaluasi pertemuan SPM 2. Pertemuan evaluasi BOK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	141.647.278.306,00	149.712.885.781,00	8.065.607.475	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1304 Orang/bulan	1304 Orang/bulan	140.307.978.306,00	148.373.585.781,00	8.065.607.475	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.299.300.000,00	1.299.300.000,00	-	Pengurangan pada aktivitas Honorarium PNS (Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	16.700.000,00	33.300.000,00	16.600.000	Penambahan Kuantitas Pelaksanaan Rapat Koordinasi pada kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.300.000,00	31.300.000,00	8.000.000	Penambahan Kuantitas Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertemuan BMD pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD						Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100 %	100 %	116.161.500,00	116.161.500,00	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	16.161.500,00	16.161.500,00	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.773.246.000,00	1.773.246.000,00	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	220.000.000,00	230.255.000,00	10.255.000	1. Usulan tambahan untuk Honorarium Pengadaan barang/Jasa pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Usulan tambahan Makan Minum Rapat

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	43.246.000,00	43.246.000,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000	ada tambahan untuk biaya perjalanan dinas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	90.527.000,00	132.506.000,00	41.979.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	104 Unit	104 Unit	90.527.000,00	301.025.000,00	210.498.000	Penambahan pagu dikarenakan ada tambahan usulan sarana/prasarana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	9.206.000.000,00	9.206.000.000,00	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.750.000,00	432.750.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	8.763.450.000,00	8.763.450.000,00	-	Alasan pengurangan untuk kegiatan pertemuan evaluasi SPM, BOK,

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Umum Kantor yang Disediakan	Umum Kantor yang Disediakan						penambahan untuk retribusi, penambahan sarana prasana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.331.548.000,00	2.401.548.000,00	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	38.990.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	446.940.000,00	446.940.000,00	-	Penambahan pagu dikarenakan ada tambahan usulan
Pemeliharaan/Rehabi- litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire- habilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire- habilitasi	1 Unit	1 Unit	1.794.868.000,00	1.893.958.000,00	99.090.000	Usulan tambahan untuk Honorarium Pengadaan barang/Jasa dan Pengelolaan Kegiatan pada Pekerjaan Rehab Gedung kantor Dinkes
Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	75 Unit	75 Unit	50.750.000,00	55.420.000,00	4.670.000	Usulan tambahan untuk pekerjaan service AC, Komputer dan Printer

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Dipelihara/Dire habilitasi	Dipelihara/Dire habilitasi						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	21 Unit	21 Unit	8.099.090.000,00	7.422.805.500,00	- 676.284.500	1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa belum dianggarkan/tidak ada 2. Belum ada anggaran untuk fotocopy/ penggandaan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	19 Unit	19 Unit	2.089.918.000,00	4.351.046.000,00	2.261.128.000	1. Honorarium pengadaan barang/jasa belum dianggarkan/tidak ada 2. Belum ada anggaran untuk fotocopy/ penggandaan 3. Anggaran sebelumnya belum mencukupi/memadai, sehingga masih perlu urug dan pemadatan tanah lagi karena tanah di sekitar

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Puskesmas masih berair/gambut 4. Perlu siring/pagar untuk menghindari abrasi tanah (Belum ada anggaran untuk pembuatan pagar beton Puskesmas)
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	21 Unit	1.167.421.500,00	11.658.627.500,00	10.491.206.000	1. Honorarium pengadaan barang/jasa belum dianggarkan/tidak ada 2. Perlu honorarium TIM PPS Kejaksaaan Negeri Kab. Banjar (SK Bupati Banjar Tahun 2024) 3. Belum ada anggaran untuk fotocopy/ penggandaan 4. Menambah anggaran/pagu untuk mobil UPTD IFK Kab. Banjar dari Rp.580.920.000,- menjadi Rp.820.000.000,- 5. Usulan tambahan dana untuk CDOB UPTD IFK Kab. Banjar
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit	449.170.788,00	308.500.000,00	- 140.670.788	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11 Unit	11 Unit	1.996.421.000,00	2.047.171.000,00	50.750.000	1. Honorarium pengadaan barang/jasa belum dianggarkan/tidak ada 2. Perlu dilakukan rehab karena kondisinya rusak pasca banjir besar (UPTD Puskesmas Martapura Barat)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	1.349.700.000,00	9.413.725.000,00	8.064.025.000	Perubahan satuan farmasi kit menjadi satuan paket Pentingnya alat untuk mndeteksi masalah pernafasan seperti asfiksia pada bayi baru lahir secara dini sehingga dapat segera menentukan tatalaksana selanjutnya
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	419.667.845,00	389.667.845	Terdapat sisa kegiatan kalibrasi alat kesehatan 190,243,838 Di alihkan ke perbaikan alat kesehatan dan Di alihkan ke sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (laptop dan printer)
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	5 Paket	5 Paket	6.307.951.580,00	5.889.258.683,00	- 418.692.897	1. Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan yang disediakan	Kesehatan yang disediakan						Terdapat sisa kegiatan pengadaan obat penunjang 254.042.000 : - Di alihkan ke sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (laptop dan printer) - Di alihkan ke sub kegiatan penyelenggaraan system informasi kesehatan(SDMK) - Di alihkan ke sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (honorarium PPK,PP danTim pendukung) - Di alihkan ke sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pengadaan Spektrofotometer) 2. Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Terdapat sisa kegiatan pengadaan bmhp 310.075.862 dialihkan :

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								- Di alihkan ke sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pengadaan Spektrofotometer) - Di alihkan ke sub kegiatan pengembangan faskes lainnya 3. Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Perubahan kegiatan pertemuan gema cermat menjadi kegiatan pertemuan pengelola apotek dan toko obat
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1000 Layanan	1000 Layanan	18.320.000,00	18.320.000,00	-	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10645 Orang	10645 Orang	642.676.000,00	694.072.000,00	51.396.000	1. Kampanye Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu hamil di 5 Kecamatan Lokus Stunting (Kecamatan dengan kasus stunting tinggi) dengan peserta sebagian ibu hamil di wilayah kerja 5 Kecamatan merupakan intervensi spesifik stunting dan pencegahan terjadinya anemia pada ibu hamil serta untuk mencegah terjadinya stunting baru. 2. Evaluasi Kasus Kematian Ibu dan Manajemen Tatalaksana Persalinan dan Rujukan karena masih tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Banjar dan perbaikan koordinasi teknis terkait tatalaksana di RS Rujukan dan Alur Rujukan dengan peserta Kepala Puskesmas, Dokter, Pengelola Kesehatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Ibu, Pengelola Kesehatan Anak, Perwakilan dari RS di Kabupaten Banjar, Organisasi Profesi dengan narasumber pakar dari Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10161 Orang	10161 Orang	61.284.000,00	61.284.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9309 Orang	9309 Orang	95.480.000,00	398.006.965,00	302.526.965	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38677 Orang	38677 Orang	410.489.100,00	410.489.100,00	-	Kegiatan Introduction vaksin baru dan Pertemuan sosialisasi dan implementasi ASIK bagi Koordinasi imunisasi dan bidan koordinasi Puskesmas terdapat ketidaksesuaian Narasumber
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79524 Orang	79524 Orang	255.457.000,00	255.457.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370296 Orang	370296 Orang	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000	1. Kegiatan Rapat Koordinasi LP/LS Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Dilakukan perubahan untuk pembelian

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								souvenir yang bermanfaat bagi Masyarakat (peserta yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher Rahim) 2. Kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Usia Produktif Dilakukan perubahan untuk pembelian souvenir yang bermanfaat bagi Masyarakat (peserta yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher Rahim)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96812 Orang	96812 Orang	38.777.000,00	38.777.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38160 Orang	38160 Orang	26.875.000,00	26.875.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	5046 Orang	5046 Orang	115.829.800,00	1.323.327.385,00	1.207.497.585	1. Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan Sesuai Standar						Penderita Diabetes Melitus Dilakukan perubahan untuk pembelian souvenir yang bermanfaat bagi Masyarakat (bagi penderita DM yang rutin periksa selama 12 kali atau rutin dalam 1 tahun/setiap bulan) 2. Kegiatan ATK Diabetes Melitus Dilakukan perubahan untuk pembelian poster MARNING MANIS “Mari SKrining Mencegah Penyakit Kronis” sebagai KIE untuk mengajak Masyarakat agar mau dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular 3. Kegiatan Evaluasi dan Validasi data program diabetes melitus Terdapat sisa kegiatan berupa honorarium narasumber yang akan di alihkan ke kegiatan pembelian poster MARNING MANIS “Mari SKrining Mencegah Penyakit Kronis” sebagai KIE untuk mengajak Masyarakat agar mau

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	848 Orang	848 Orang	102.535.275,00	64.643.275,00	- 37.892.000	1. Kegiatan Rapat Lintas Sektor dan Lintas Program Penanganan Masalah ODGJ dan ODMK Dilakukan perubahan untuk Pembelian Souvenir yang bermanfaat bagi Masyarakat (peserta yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim) 2. Kegiatan Penguatan kapasitas kader kesehatan jiwa dalam penanganan masalah kejiwaan di Masyarakat Dilakukan perubahan untuk pembelian poster MARNING MANIS “Mari SKrining Mencegah Penyakit Kronis” sebagai KIE untuk mengajak Masyarakat agar mau dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular 3. Kegiatan pembelian ATK Program Pengelolaan ODGJ Berat Dilakukan perubahan untuk pembelian leaflet berupa Kartu

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Peduli Kesehatan Jiwa (KPKJ) yang diperuntukan bagi penderita ODGJ berat sebagai kartu monitoring/pemantauan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10020 Orang	10020 Orang	70.423.000,00	473.820.400,00	403.397.400	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10020 Orang	10020 Orang	563.361.500,00	755.061.500,00	191.700.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen	3 Dokumen	72.300.000,00	72.300.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	755.000.000,00	1.935.856.000,00	1.180.856.000	1. Pembelajaran upaya-upaya penurunan AKI/AKB dan evaluasi AMP SR Latar Belakang : AKI dan AKB mengalami peningkatan di tahun 2024. Pada tri wulan 2 jumlah kasusnya sudah melebihi total

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								kasus di tahun 2023. Kegiatan evaluasi AMP SR di Kabupaten Banjar belum berjalan karena kurangnya pengetahuan terkait cara pelaksanaan evaluasi yang tepat dan benar. Hasil dari konsultasi ke Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes RI, Kabupaten Banjar perlu melakukan pembelajaran terkait upaya-upaya dalam penurunan AKI/AKB ke Ke Kabupaten yang sudah sudah secara signifikan dapat menurunkan AKI/AKB dan pelaksanaan evaluasi AMP SR sudah berjalan dengan baik yaitu di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dengan mengikutsertakan pemangku kebijakan dan lintas sektor terkait Seksi yang menangani AKI/AKB. Peserta yang akan ikut pembelajaran ada 15 orang yaitu : Kadinkes, Sekretaris Dinkes, Kabid Kesmas, Kabid SDK, Kabid Yankes, Kabid P2, Kabid PPM (Bappeda), Kasi Kesga

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Gizi, Kasi PPM (Bappeda), Kasubbbag Perencanaan dan Tim Kesga Gizi (5 orang) 2. Pengadaan F75, F100 RUTF dan/atau PKM. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan zoom meeting Identifikasi Kebutuhan dan Ketersediaan Produk Terafi Gizi (F75, F100 dan RUTF) untuk Tata Laksana Gizi Buruk dari kemenkes bahwa standar tatalaksana gizi buruk menggunakan standar global (WHO), F75 , F100, RUTF dan/atau PKMK yang masih di fasilitasi oleh kemenkes untuk impor dalam tahun ini 3. Desk Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi data hasil capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan peserta Kepala Puskesmas, Pengelola Ibu, Pengelola Anak, Pengelola Lansia, Pengelola Keluarga Berencana, Pengelola

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	566.325.000,00	166.325.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	105.242.500,00	459.593.500,00	354.351.000	Kegiatan Pertemuan Evaluasi Program Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Negeri terhadap Keluarga Beresiko Stunting dan Orientasi Petugas Promkes untuk Pembinaan Keluarga SBABS/ODF serta Rapat Koordinasi Pemangku Kebijakan UKS/Madrasah Tingkat Kabupaten Digantikan dengan tambahan kegiatan jambore kader posyandu tingkat provinsi kalsel kegiatan tidak ada di seksi PPM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	25 Dokumen	25 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	-	Untuk Sosialisasi Perizinan Hattra dan Tenaga Kesehatan Tradisional (Perlunya sasaran mengetahui dan memahami peraturan perundang-

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						undangan tentang pelayanan kesehatan tradisional dan program keselatan pasien serta persyaratan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional)
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	437.080.000,00	137.080.000	Kegiatan Advokasi lintas sektor, workshop surveilans PD3I, on job training penginputan siskohatkes jemaaf haji dan on job training PD3I di fasyankes terdapat sisa kegiatan yang dialihkan ke kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	200 Orang	28.105.000,00	64.925.000,00	36.820.000	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	840.000.000,00	1.368.768.000,00	528.768.000	1. Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan : a. Penambahan anggaran untuk antisipasi jika pendapatan labkesda di triwulan IV meningkatkan jadi bertambah Rp. 45.000.000 b. Pengurangan anggaran karena pada kegiatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								pembelian pemilu di bulan february 2024 tidak dibelanjakan karena dari penyedia tidak tersedia barang. jadi berkurang Rp. 28.050.000 c. Penambaham anggaran karena pada kegiatan workshop penanganan bencana tingkat dasar kerana terjadi kesalahan perencanaan kegiatan maka kegiatan dirubah ke fullboard karena kegiatan selama 3 hari dan membutuhkan support wifi dan penginapan. jadi bertambah Rp. 55.390.000 d. Penambahan Anggaran pada kegiatan Pengamanan Kesehatan (PAMKES) karena untuk kegiatan pengamanan kesehatan saat ada acara besar oleh bupati dan SKPD lain di kabupaten banjar selama ini masih belum teranggarkan. Jadi bertambah Rp. 200.000.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	1.998.863.800,00	1.498.863.800	Kegiatan Foging / SMP (Sebelum Masa Penularan) Terdapat sisa kegiatan yang dialihkan ke kegiatan:

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Menular dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular						1. Rapat/Sosialisasi Dalam Rangka Lomba Kawasan Bebas Jentik (Melibatkan LS/LP) 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak Form TB 3. Materai 4. Pembelajaran/Kaji Tiru Program Penyakit Menular (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) 5. Belanja Modal Personal Komputer berupa Laptop (Penyelenggaraan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan) 6. Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya berupa LCD Proyektor, Screen Layar Proyektor, Wireless Laser Pointer (Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan) 7. Pengadaan BHP Larvasida Malaria (pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								minuman di fasilitas kesehatan)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	30.660.570.800,00	93.915.985.017,00	63.255.414.217	a. Pengurangan Belanja Tenaga Kesehatan (Tindakan Klaim Non Kapitasi) karena untuk semua UPTD Puskesmas sudah BLUD semua, jadi untuk pembayaran Klaim di Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk Labkesda. Jadi berkurang Rp. 22.006.000 b. Penambahan pada Belanja Modal Komputer untuk memudahkan mobilisasi aktivasi masyarakat untuk menjadi peserta PBI. Jadi bertambah Rp. 22.006.000 c. Penambahan anggaran pada kegiatan premi peserta BPJS PBPU Pemda, sehubungan dengan sustainabilitas UHC, penambahan peserta untuk mencapai target 98% sesuai RPJMD, disertai penambahan sporadik peserta bagi kalangan warga tidak mampu yang belum menjadi peserta dan atau tidak aktif lagi

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								kepesertaannya akibat dinonaktifkan sebanyak kurang lebih 10.000 jiwa di Kabupaten Banjar. Jadi bertambah Rp. 2.268.000.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan	-	1 Paket	0,00	80.428.500,00	80.428.500	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	19.700.000,00	19.700.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit	105.000.000,00	153.750.000,00	48.750.000	Penambahan Anggaran karena kegiatan TPCB yang semula kegiatan pembinaan dilaksanakan 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun. Hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan mutu pelayanan di puskesmas tetap berlangsung secara berkesinambungan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								dan mengingat survei akreditasi di puskesmas sesuai dengan permenkes 34 tahun 2022 akreditasi di puskesmas dilaksanakan 5 tahun sekali. jadi bertambah Rp. 168.750.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	26.640.000,00	26.640.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	599.999.800,00	642.184.800,00	42.185.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	262.415.500,00	217.677.500,00	- 44.738.000	1. Terdapat sisa kegiatan workshop peningkatan kapasitas bagi petugas fasilitas pelayanan kesehatan dalam tatalaksana TB yang akan dialihkan ke kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai (Sub kegiatan; Pengadaan Obat,

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
								Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan) 2. Sisa pembelian belanja modal alat lab umum berupa mikroskop binokuler akan dialihkan ke kegiatan pertemuan pembentukan tm percepatan penanggulangan TB
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	62.917.500,00	62.917.500,00	-	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	53.899.000,00	212.902.625,00	159.003.625	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	357.335.000,00	357.335.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	100 %	198.458.000,00	198.693.814,00	235.814	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	198.458.000,00	234.458.000,00	36.000.000	1. Pergeseran pada perubahan spesifikasi pengadaan laptop 2. Penambahan anggaran untuk program internship dokter Indonesia, berupa bantuan sewa 3 buah rumah di Gambut 1 buah dan Martapura 2 buah rumah. (3 buah x 12 x 1jt)
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	100 %	100 %	101.362.500,00	101.362.500,00	-	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	25 Unit	23.163.000,00	23.163.000,00	-	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Dokumen	4 Dokumen	78.199.500,00	78.199.500,00	-	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	88 %	88 %	1.270.000.000,00	3.194.247.200,00	1.924.247.200	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	90 %	90 %	30.000.000,00	306.952.200,00	276.952.200	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00	269.252.200,00	239.252.200	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	90 %	90 %	1.240.000.000,00	2.895.395.000,00	1.655.395.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	1.240.000.000,00	2.924.995.000,00	1.684.995.000	Penambahan Anggaran karena kegiatan FKTP melalui pemantauan mutu semula didanai oleh pusat DAN NF sebanyak 15 Puskesmas saja sedangkan di kabupaten banjar ada 25 Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk pemerataan agar 25 puskesmas mendapat pemantauan mutu secara menyeluruh. jadi bertambah Rp. 55.600.000

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	-	0,00	542.101.000,00	542.101.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	0,00	542.101.000,00	542.101.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	12 Dokumen	0,00	542.101.000,00	542.101.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	93.4 %	93.4 %	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	100 %	100 %	60.000.000,00	79.925.000,00	19.925.000	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	79.925.000,00	19.925.000	Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Masyarakat (Sosialisasi Program Intervensi Keamanan Pangan untuk Masyaraka, Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Advokasi Program Intervensi Keamanan Pangan untuk Masyarakat, Aktifkan Posyandu, dan Advokasi Pokjanal Posyandu Tk Kecamatan & Pokja Desa)
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	76 %	76 %	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	-	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Kegiatan Promosi Kesehatan Melalui Pameran Pembangunan)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Aktif	Persentase UKBM Aktif	100 %	100 %	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	221.320.000,00	141.320.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM (Pengadaan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)						Media promosi kesehatan, Bimtek PHBS dan Germas)
Puskesmas Martapura 1					3.050.327.040,00	0,00	- 3.050.327.040	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.050.327.040,00	0,00	- 3.050.327.040	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.050.327.040,00	0,00	- 3.050.327.040	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	25 %	25 %	3.050.327.040,00	0,00	- 3.050.327.040	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	76 %	76 %	370.780.000,00	0,00	- 370.780.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	40 Unit	40 Unit	370.780.000,00	0,00	- 370.780.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	29 %	29 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3060 Orang	0,00	67.500.000,00	67.500.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	5.900.000,00	5.900.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1966 Orang	0,00	147.450.000,00	147.450.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	368 Orang	0,00	27.600.000,00	27.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	255 Orang	0,00	19.125.000,00	19.125.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	438 Dokumen	0,00	376.456.000,00	376.456.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	780 Dokumen	0,00	58.500.000,00	58.500.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	-	7 Dokumen	0,00	68.100.000,00	68.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	10 Dokumen	0,00	261.675.000,00	261.675.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	2.679.547.040,00	0,00	- 2.679.547.040	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	54.000.000,00	54.000.000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	600.000,00	600.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	180 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan	-	8 Orang	0,00	600.000,00	600.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	pelayanan kesehatan sesuai standar	pelayanan kesehatan sesuai standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen	0,00	268.050.000,00	268.050.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	8 Dokumen	0,00	17.000.000,00	17.000.000	
Puskesmas Martapura 2					1.356.436.180,00	0,00	- 1.356.436.180	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.356.436.180,00	0,00	- 1.356.436.180	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.356.436.180,00	0,00	- 1.356.436.180	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 %	52 %	1.356.436.180,00	0,00	- 1.356.436.180	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	67undefined %undefined	67undefined %undefined	277.457.800,00	0,00	- 277.457.800	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	171 Unit	171 Unit	277.457.800,00	0,00	- 277.457.800	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	192undefined %undefined	192undefined %undefined	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	678 Orang	0,00	23.400.000,00	23.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	647 Orang	0,00	3.850.000,00	3.850.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	-	5089 Orang	0,00	143.325.000,00	143.325.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan Sesuai Standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	2.475.000,00	2.475.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	229.554.000,00	229.554.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	14.490.000,00	14.490.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	-	100 Dokumen	0,00	209.325.000,00	209.325.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Menular dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.078.978.380,00	0,00	- 1.078.978.380	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	31.250.000,00	31.250.000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	100 Laporan	0,00	750.000,00	750.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	676 Orang	0,00	1.575.000,00	1.575.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100 Orang	0,00	300.000,00	300.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	115.800.000,00	115.800.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000	
Puskesmas Martapura Timur					1.352.216.900,00	0,00	- 1.352.216.900	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.352.216.900,00	0,00	- 1.352.216.900	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.352.216.900,00	0,00	- 1.352.216.900	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	1.352.216.900,00	0,00	- 1.352.216.900	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	156.997.400,00	0,00	- 156.997.400	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	46 Unit	46 Unit	156.997.400,00	0,00	- 156.997.400	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10988 Orang	0,00	72.000.000,00	72.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10489 Orang	0,00	7.675.000,00	7.675.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	-	3680 Orang	0,00	51.150.000,00	51.150.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan Sesuai Standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	652 Orang	0,00	16.500.000,00	16.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	696 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	229.254.000,00	229.254.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	-	12 Dokumen	0,00	218.625.000,00	218.625.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Menular dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.195.219.500,00	0,00	- 1.195.219.500	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	326 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	350 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	158.325.000,00	158.325.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
Puskesmas Martapura Barat					1.236.805.973,00	0,00	- 1.236.805.973	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.236.805.973,00	0,00	- 1.236.805.973	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.236.805.973,00	0,00	- 1.236.805.973	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 %	52 %	1.236.805.973,00	0,00	- 1.236.805.973	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	67 %	67 %	162.652.000,00	0,00	- 162.652.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	54 Unit	54 Unit	162.652.000,00	0,00	- 162.652.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	376 Orang	0,00	51.300.000,00	51.300.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1785 Orang	0,00	91.800.000,00	91.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	328 Orang	0,00	15.300.000,00	15.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	403 Orang	0,00	2.925.000,00	2.925.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	250.975.000,00	250.975.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	8 Dokumen	0,00	8.700.000,00	8.700.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	23.620.000,00	23.620.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	-	25 Dokumen	0,00	203.775.000,00	203.775.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.074.153.973,00	0,00	- 1.074.153.973	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	65 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	6 Dokumen	0,00	163.800.000,00	163.800.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	19.650.000,00	19.650.000	
Puskesmas Astambul					1.603.243.962,00	0,00	- 1.603.243.962	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.603.243.962,00	0,00	- 1.603.243.962	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.603.243.962,00	0,00	- 1.603.243.962	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	1.603.243.962,00	0,00	- 1.603.243.962	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	67 %	67 %	274.710.082,00	0,00	- 274.710.082	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	29 Unit	29 Unit	274.710.082,00	0,00	- 274.710.082	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	657 Orang	0,00	84.480.000,00	84.480.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	627 Orang	0,00	2.725.000,00	2.725.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1243 Orang	0,00	91.280.000,00	91.280.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	736 Orang	0,00	11.760.000,00	11.760.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	1.120.000,00	1.120.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	271.324.115,00	271.324.115	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	14.140.000,00	14.140.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	44.170.000,00	44.170.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	218.235.000,00	218.235.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.328.533.880,00	0,00	- 1.328.533.880	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	2.034.275.242,00	2.034.275.242	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	3.080.000,00	3.080.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	-	736 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan sesuai standar	kesehatan sesuai standar						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	813 Orang	0,00	560.000,00	560.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	7.980.000,00	7.980.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	163.720.000,00	163.720.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	198.458.000,00	198.693.814,00	235.814	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	235.814,00	235.814	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	19.960.000,00	19.960.000	
Puskesmas Mataraman					936.359.800,00	0,00	- 936.359.800	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					936.359.800,00	0,00	- 936.359.800	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					936.359.800,00	0,00	- 936.359.800	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentas puskemas terakreditasi minimal utama	Persentas puskemas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	936.359.800,00	0,00	- 936.359.800	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	109.117.600,00	0,00	- 109.117.600	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	155 Unit	155 Unit	109.117.600,00	0,00	- 109.117.600	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	467 Orang	0,00	48.600.000,00	48.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	446 Orang	0,00	7.325.000,00	7.325.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3442 Orang	0,00	51.975.000,00	51.975.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	451 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	578 Orang	0,00	1.950.000,00	1.950.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1951 Dokumen	0,00	202.569.000,00	202.569.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	191.175.000,00	191.175.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	827.242.200,00	0,00	- 827.242.200	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5 Laporan	0,00	750.000,00	750.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	451 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	27.900.000,00	27.900.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	127.800.000,00	127.800.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	0,00	9.000.000,00	9.000.000	
Puskesmas Simpang Empat 1					620.711.844,00	0,00	- 620.711.844	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					620.711.844,00	0,00	- 620.711.844	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					620.711.844,00	0,00	- 620.711.844	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	undefined undefined	undefined undefined	620.711.844,00	0,00	- 620.711.844	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	undefined undefined	undefined undefined	107.952.320,00	0,00	- 107.952.320	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	70 Unit	70 Unit	107.952.320,00	0,00	- 107.952.320	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian SPM Puskesmas	Presentase Capaian SPM Puskesmas	undefined undefined	undefined undefined	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	229 Orang	0,00	42.000.000,00	42.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	218 Orang	0,00	8.200.000,00	8.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	-	2037 Orang	0,00	58.350.000,00	58.350.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan Sesuai Standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	293 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	275 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	228.874.000,00	228.874.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	13.950.000,00	13.950.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	37.675.000,00	37.675.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	-	12 Dokumen	0,00	170.550.000,00	170.550.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Menular dan Tidak Menular	Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	512.759.524,00	0,00	- 512.759.524	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.350.000,00	1.350.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	40 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	275 Orang	0,00	900.000,00	900.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	7926 Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	158.520.000,00	158.520.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	32.350.000,00	32.350.000	
Puskesmas Simpang Empat 2					875.436.000,00	0,00	- 875.436.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					875.436.000,00	0,00	- 875.436.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					875.436.000,00	0,00	- 875.436.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minal Utama	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minal Utama	52,00 %	52,00 %	875.436.000,00	0,00	- 875.436.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian ASPAK Puskesmas MInimal 70 %	Presentase Capaian ASPAK Puskesmas MInimal 70 %	67 %	67 %	216.571.200,00	0,00	- 216.571.200	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	77 Unit	77 Unit	216.571.200,00	0,00	- 216.571.200	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian SPM Puskesmas	Presentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	210 Orang	0,00	37.800.000,00	37.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	201 Orang	0,00	4.725.000,00	4.725.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1371 Orang	0,00	51.600.000,00	51.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	269 Orang	0,00	17.100.000,00	17.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	265 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	198.280.000,00	198.280.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	5.250.000,00	5.250.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	30.100.000,00	30.100.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	146.625.000,00	146.625.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	658.864.800,00	0,00	- 658.864.800	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	dan Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	269 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	265 Orang	0,00	900.000,00	900.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	113.850.000,00	113.850.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000	
Puskesmas Sambung Makmur					618.215.600,00	0,00	- 618.215.600	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					618.215.600,00	0,00	- 618.215.600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					618.215.600,00	0,00	- 618.215.600	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	618.215.600,00	0,00	- 618.215.600	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70 %	Presentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70 %	67 %	67 %	62.706.000,00	0,00	- 62.706.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	62.706.000,00	0,00	- 62.706.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Presentase capaian SPM Puskesmas	Presentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1428 Orang	0,00	31.500.000,00	31.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	127 Orang	0,00	5.250.000,00	5.250.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	680 Orang	0,00	51.000.000,00	51.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	168 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	11 Dokumen	0,00	196.002.000,00	196.002.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	27.525.000,00	27.525.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	9 Dokumen	0,00	26.715.000,00	26.715.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	27 Dokumen	0,00	135.000.000,00	135.000.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	555.509.600,00	0,00	- 555.509.600	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	750.000,00	750.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	180 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	4 Orang	0,00	300.000,00	300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	3 Dokumen	0,00	53.100.000,00	53.100.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	6 Dokumen	0,00	113.700.000,00	113.700.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000	
Puskesmas Pengaron					926.032.499,00	0,00	- 926.032.499	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					926.032.499,00	0,00	- 926.032.499	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					926.032.499,00	0,00	- 926.032.499	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52 %	52 %	926.032.499,00	0,00	- 926.032.499	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	67 %	67 %	120.009.600,00	0,00	- 120.009.600	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	120.009.600,00	0,00	- 120.009.600	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	329 Orang	0,00	54.000.000,00	54.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	314 Orang	0,00	13.250.000,00	13.250.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2212 Orang	0,00	47.550.000,00	47.550.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	303 Orang	0,00	15.150.000,00	15.150.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	360 Orang	0,00	4.050.000,00	4.050.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	242.058.000,00	242.058.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	19.300.000,00	19.300.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	25.350.000,00	25.350.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	201.150.000,00	201.150.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	806.022.899,00	0,00	- 806.022.899	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	302 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	396 Orang	0,00	300.000,00	300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	9.750.000,00	9.750.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	170.100.000,00	170.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000	
Puskesmas Sungai Pinang					637.717.600,00	0,00	- 637.717.600	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					637.717.600,00	0,00	- 637.717.600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					637.717.600,00	0,00	- 637.717.600	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	637.717.600,00	0,00	- 637.717.600	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	68.668.800,00	0,00	- 68.668.800	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15 Unit	15 Unit	68.668.800,00	0,00	- 68.668.800	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	291 Orang	0,00	29.700.000,00	29.700.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	278 Orang	0,00	15.125.000,00	15.125.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2272 Orang	0,00	67.800.000,00	67.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	329 Orang	0,00	14.625.000,00	14.625.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	282 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1505 Dokumen	0,00	231.339.000,00	231.339.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	14.100.000,00	14.100.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	29.275.000,00	29.275.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	189.450.000,00	189.450.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	569.048.800,00	0,00	- 569.048.800	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	dan Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	329 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	10 Orang	0,00	150.000,00	150.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	29.700.000,00	29.700.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	122.850.000,00	122.850.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	12.415.000,00	12.415.000	
Puskesmas Paramasan					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	16 Unit	16 Unit	48.896.100,00	48.896.100,00	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	74 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	71 Orang	0,00	9.800.000,00	9.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	662 Orang	0,00	46.800.000,00	46.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	108 Orang	0,00	22.200.000,00	22.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	84 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	198.313.000,00	198.313.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	21.750.000,00	21.750.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	140.100.000,00	140.100.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	270.532.194,00	0,00	- 270.532.194	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	117.600.000,00	117.600.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	17.600.000,00	17.600.000	
Puskesmas Sungai Tabuk 1					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	67 %	67 %	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	63 Unit	63 Unit	203.316.000,00	349.625.840,00	146.309.840	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2496 Orang	0,00	57.600.000,00	57.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	189 Orang	0,00	7.875.000,00	7.875.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1928 Orang	0,00	90.600.000,00	90.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	66 Orang	0,00	4.950.000,00	4.950.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	108 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9 Dokumen	0,00	252.264.000,00	252.264.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	3 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	11 Dokumen	0,00	74.650.000,00	74.650.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	32 Dokumen	0,00	227.900.000,00	227.900.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.430.362.745,00	0,00	- 1.430.362.745	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	4 Laporan	0,00	300.000,00	300.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	-	60 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	pelayanan kesehatan sesuai standar	pelayanan kesehatan sesuai standar						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	120 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	9 Dokumen	0,00	112.350.000,00	112.350.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	9 Dokumen	0,00	15.150.000,00	15.150.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)						
Puskesmas Sungai Tabuk 2					719.690.000,00	0,00	- 719.690.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					719.690.000,00	0,00	- 719.690.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					719.690.000,00	0,00	- 719.690.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	719.690.000,00	0,00	- 719.690.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK minimal 70%	Persentase capaian ASPAK minimal 70%	67 %	67 %	213.947.196,00	0,00	- 213.947.196	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	96 Unit	96 Unit	213.947.196,00	0,00	- 213.947.196	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92% %	92% %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	5.110.000,00	5.110.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	55.125.000,00	55.125.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	15.225.000,00	15.225.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	219.979.000,00	219.979.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	13.125.000,00	13.125.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	-	12 Dokumen	0,00	50.450.000,00	50.450.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	191.925.000,00	191.925.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	505.742.804,00	0,00	- 505.742.804	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	6 Laporan	0,00	300.000,00	300.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	-	12 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan reproduksi	kesehatan reproduksi						
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	122.400.000,00	122.400.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	6.500.000,00	6.500.000	
Puskesmas Sungai Tabuk 3					784.681.820,00	0,00	- 784.681.820	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					784.681.820,00	0,00	- 784.681.820	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					784.681.820,00	0,00	- 784.681.820	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	784.681.820,00	0,00	- 784.681.820	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Presentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	134.718.692,00	0,00	- 134.718.692	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	9 Unit	9 Unit	134.718.692,00	0,00	- 134.718.692	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	33.480.000,00	33.480.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	20.130.000,00	20.130.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	40.050.000,00	40.050.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	-	0 Orang	0,00	12.900.000,00	12.900.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	219.175.000,00	219.175.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	21.600.000,00	21.600.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	78.690.000,00	78.690.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	174.750.000,00	174.750.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	649.963.128,00	0,00	- 649.963.128	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	450.000,00	450.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	900.000,00	900.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	11.400.000,00	11.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	127.320.000,00	127.320.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	18.390.000,00	18.390.000	
Puskesmas Gambut					1.995.331.600,00	0,00	- 1.995.331.600	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.995.331.600,00	0,00	- 1.995.331.600	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.995.331.600,00	0,00	- 1.995.331.600	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	1.995.331.600,00	0,00	- 1.995.331.600	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang Terakreditasi	Persentase Fasyankes yang Terakreditasi	90 %	90 %	193.800.000,00	0,00	- 193.800.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	36 Unit	36 Unit	193.800.000,00	0,00	- 193.800.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang Terakreditasi	Persentase Fasyankes yang Terakreditasi	90 %	90 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	897 Orang	0,00	68.040.000,00	68.040.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	856 Orang	0,00	2.820.000,00	2.820.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1691 Orang	0,00	66.360.000,00	66.360.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	843 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1123 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	280.472.000,00	280.472.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	28.700.000,00	28.700.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	30.450.000,00	30.450.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	236.370.000,00	236.370.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.801.531.600,00	0,00	- 1.801.531.600	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	39.840.000,00	39.840.000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-	12 Laporan	0,00	3.920.000,00	3.920.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	dan Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	421 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1123 Orang	0,00	2.940.000,00	2.940.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	2.380.000,00	2.380.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	228.480.000,00	228.480.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000	
Puskesmas Kertak Hanyar					1.696.236.340,00	0,00	- 1.696.236.340	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.696.236.340,00	0,00	- 1.696.236.340	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.696.236.340,00	0,00	- 1.696.236.340	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52,00 %	52,00 %	1.658.536.340,00	0,00	- 1.658.536.340	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	67 %	67 %	50.000.000,00	0,00	- 50.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	- 50.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Presentase Capaian SPM Puskesmas	Presentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	568 Orang	0,00	35.100.000,00	35.100.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	550 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4210 Orang	0,00	101.250.000,00	101.250.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	62 Orang	0,00	19.800.000,00	19.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	310 Orang	0,00	24.600.000,00	24.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	401 Dokumen	0,00	268.520.000,00	268.520.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	76 Dokumen	0,00	12.675.000,00	12.675.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	74 Dokumen	0,00	17.975.000,00	17.975.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	478 Dokumen	0,00	186.675.000,00	186.675.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.608.536.340,00	0,00	-1.608.536.340	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	53 Dokumen	0,00	37.250.000,00	37.250.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	77 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	-	60 Dokumen	0,00	10.950.000,00	10.950.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan reproduksi	kesehatan reproduksi						
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	91 Dokumen	0,00	188.550.000,00	188.550.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	88 %	88 %	37.700.000,00	0,00	- 37.700.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas Memiliki Perencanaan Kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	Persentase Puskesmas Memiliki Perencanaan Kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	90 %	90 %	37.700.000,00	0,00	- 37.700.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	2 Orang	37.700.000,00	0,00	- 37.700.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	13 Dokumen	0,00	18.170.000,00	18.170.000	
Puskesmas Tatah Makmur					830.069.960,00	0,00	- 830.069.960	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					830.069.960,00	0,00	- 830.069.960	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					830.069.960,00	0,00	- 830.069.960	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	830.069.960,00	0,00	- 830.069.960	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal	Persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal	67 % 70 %	67 % 70 %	143.340.800,00	0,00	- 143.340.800	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	74 Unit	74 Unit	143.340.800,00	0,00	- 143.340.800	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	255 Orang	0,00	63.180.000,00	63.180.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	243 Orang	0,00	5.325.000,00	5.325.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2000 Orang	0,00	41.550.000,00	41.550.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	245 Orang	0,00	15.150.000,00	15.150.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	318 Orang	0,00	11.700.000,00	11.700.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	182.298.000,00	182.298.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	20.485.000,00	20.485.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	153.600.000,00	153.600.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	686.729.160,00	0,00	-686.729.160	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	1.950.000,00	1.950.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	245 Orang	0,00	2.250.000,00	2.250.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	318 Orang	0,00	75.000,00	75.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	131.580.000,00	131.580.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	8.415.000,00	8.415.000	
Puskesmas Aluh Aluh					2.013.822.496,00	0,00	- 2.013.822.496	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.013.822.496,00	0,00	- 2.013.822.496	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.013.822.496,00	0,00	- 2.013.822.496	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 52,00 % %	52,00 52,00 % %	2.013.822.496,00	0,00	- 2.013.822.496	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70 %	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70 %	undefined undefined	undefined undefined	253.014.676,00	0,00	- 253.014.676	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	48 Unit	48 Unit	253.014.676,00	0,00	- 253.014.676	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	539 Orang	0,00	42.750.000,00	42.750.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	514 Orang	0,00	16.800.000,00	16.800.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4111 Orang	0,00	103.950.000,00	103.950.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	634 Orang	0,00	34.200.000,00	34.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	685 Orang	0,00	1.125.000,00	1.125.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	304.933.000,00	304.933.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	36.000.000,00	36.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	40.950.000,00	40.950.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	208.425.000,00	208.425.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.760.807.820,00	0,00	- 1.760.807.820	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	2.400.000,00	2.400.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	634 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	685 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	11.400.000,00	11.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	215.100.000,00	215.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	30.540.000,00	30.540.000	
Puskesmas Beruntung Baru					998.208.640,00	0,00	- 998.208.640	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					998.208.640,00	0,00	- 998.208.640	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					998.208.640,00	0,00	- 998.208.640	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	52,00 %	52,00 %	998.208.640,00	0,00	- 998.208.640	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70 %	67 %	67 %	163.371.000,00	0,00	- 163.371.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	92 Unit	92 Unit	163.371.000,00	0,00	- 163.371.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	274 Orang	0,00	54.000.000,00	54.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	262 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1629 Orang	0,00	93.075.000,00	93.075.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	300 Orang	0,00	10.950.000,00	10.950.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	340 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1667 Dokumen	0,00	220.595.000,00	220.595.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	31.800.000,00	31.800.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	48 Dokumen	0,00	27.700.000,00	27.700.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	5328 Dokumen	0,00	163.570.000,00	163.570.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	834.837.640,00	0,00	- 834.837.640	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-	1 Laporan	0,00	600.000,00	600.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	dan Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	299 Orang	0,00	4.350.000,00	4.350.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	4.050.000,00	4.050.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	110.250.000,00	110.250.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	17.970.000,00	17.970.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
Puskesmas Karang Intan 1					773.219.480,00	0,00	- 773.219.480	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					773.219.480,00	0,00	- 773.219.480	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					773.219.480,00	0,00	- 773.219.480	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	773.219.480,00	0,00	- 773.219.480	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	persentase capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	136.499.000,00	0,00	- 136.499.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	18 Unit	18 Unit	136.499.000,00	0,00	- 136.499.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian SPM Puskesmas	persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	264 Orang	0,00	35.100.000,00	35.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	252 Orang	0,00	18.400.000,00	18.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2826 Orang	0,00	58.500.000,00	58.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	276 Orang	0,00	28.650.000,00	28.650.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1254 Orang	0,00	4.950.000,00	4.950.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	214.531.000,00	214.531.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	7.500.000,00	7.500.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	-	12 Dokumen	0,00	16.175.000,00	16.175.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	173.100.000,00	173.100.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	636.720.480,00	0,00	- 636.720.480	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	975.000,00	975.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	54 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	5.850.000,00	5.850.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	141.300.000,00	141.300.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000	
Puskesmas Karang Intan 2					893.906.160,00	0,00	- 893.906.160	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					893.906.160,00	0,00	- 893.906.160	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					893.906.160,00	0,00	- 893.906.160	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	Presentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	893.906.160,00	0,00	- 893.906.160	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	Presentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	86.821.600,00	0,00	- 86.821.600	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	26 Unit	26 Unit	86.821.600,00	0,00	-86.821.600	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian SPM Puskesmas	Presentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	417 Orang	0,00	23.400.000,00	23.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	398 Orang	0,00	6.850.000,00	6.850.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2771 Orang	0,00	117.450.000,00	117.450.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	431 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	524 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	284.462.483,00	284.462.483	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	13.650.000,00	13.650.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	29.605.000,00	29.605.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	211.875.000,00	211.875.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	807.084.560,00	0,00	-807.084.560	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-	5 Laporan	0,00	375.000,00	375.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	dan Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	431 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	124.500.000,00	124.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
Puskesmas Aranio					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52 %	52 %	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	67 %	67 %	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	28 Unit	28 Unit	122.400.000,00	141.151.000,00	18.751.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	47.520.000,00	47.520.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1185 Orang	0,00	88.230.000,00	88.230.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	192 Orang	0,00	32.400.000,00	32.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	303.658.000,00	303.658.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	20.775.000,00	20.775.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	39.450.000,00	39.450.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	225.930.000,00	225.930.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular						
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	442.744.400,00	0,00	-442.744.400	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	2.700.000,00	2.700.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	12 Orang	0,00	600.000,00	600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	16.425.000,00	16.425.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	-	12 Dokumen	0,00	222.570.000,00	222.570.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan ibu dan anak	kesehatan ibu dan anak						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	19.500.000,00	19.500.000	
Puskesmas Telaga Bauntung					662.906.580,00	0,00	- 662.906.580	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					662.906.580,00	0,00	- 662.906.580	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					662.906.580,00	0,00	- 662.906.580	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	662.906.580,00	0,00	- 662.906.580	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas minimal 70%	67 %	67 %	270.921.500,00	0,00	- 270.921.500	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	270.921.500,00	0,00	- 270.921.500	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	114 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	83 Orang	0,00	10.375.000,00	10.375.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	444 Orang	0,00	33.300.000,00	33.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	192 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	128 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	203.412.000,00	203.412.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	17.800.000,00	17.800.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	111.150.000,00	111.150.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	391.985.080,00	0,00	-391.985.080	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	-	62 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan sesuai standar	kesehatan sesuai standar						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	78 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	27.825.000,00	27.825.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	87.525.000,00	87.525.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	-	12 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)						
Laboratorium Kesehatan Daerah					779.478.157,00	0,00	- 779.478.157	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					779.478.157,00	0,00	- 779.478.157	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					779.478.157,00	0,00	- 779.478.157	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	779.478.157,00	0,00	- 779.478.157	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	Persentase Capaian ASPAK Puskesmas Minimal 70%	67 %	67 %	33.500.000,00	0,00	- 33.500.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	17 Unit	17 Unit	33.500.000,00	0,00	- 33.500.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	745.978.157,00	0,00	- 745.978.157	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	12 Dokumen	745.978.157,00	0,00	-745.978.157	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya						
Instalasi Farmasi Kabupaten					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Unit	20 Unit	151.514.000,00	151.511.740,00	- 2.260	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Puskesmas	Persentase Capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 Dokumen	12 Dokumen	451.996.000,00	451.996.000,00	-	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya						
Puskesmas Cintapuri Darussalam					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					217.043.354.049,00	382.752.776.511,00	165.709.422.462	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Presentase puskesmas terakreditasi minimal utama	52,00 %	52,00 %	60.277.110.243,00	214.419.409.030,00	154.142.298.787	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian ASPAK puskesmas minial 70%	Presentase capaian ASPAK puskesmas minial 70%	67 %	67 %	22.136.655.968,00	42.062.789.871,00	19.926.133.903	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	23 Unit	23 Unit	102.537.000,00	102.537.000,00	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian SPM Puskesmas	Presentase capaian SPM Puskesmas	92 %	92 %	37.840.633.775,00	160.557.899.469,00	122.717.265.694	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	244 Orang	0,00	59.400.000,00	59.400.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	143 Orang	0,00	8.300.000,00	8.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1534 Orang	0,00	37.050.000,00	37.050.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	39 Orang	0,00	12.150.000,00	12.150.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	138 Orang	0,00	9.075.000,00	9.075.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	560 Dokumen	0,00	214.577.000,00	214.577.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	14.250.000,00	14.250.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	-	1 Dokumen	0,00	26.600.000,00	26.600.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	175.875.000,00	175.875.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	354.706.712,00	0,00	- 354.706.712	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan	0,00	900.000,00	900.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	39 Orang	0,00	6.750.000,00	6.750.000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	75.000,00	75.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	-	1 Dokumen	0,00	26.400.000,00	26.400.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
	kesehatan reproduksi	kesehatan reproduksi						
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	122.175.000,00	122.175.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	220.000.000,00	748.005.000,00	528.005.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80.000.000,00	588.080.000,00	508.080.000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	4.950.000,00	4.950.000	
					1.842.067.827.694,00	2.906.679.096.937,00	1.064.611.269.243	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan penyusunan regulasi tentang administrasi Kesehatan. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- b. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan

setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBBN.

- c. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Dinas Kesehatan).
- d. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa permasalahan yang saat ini masih menjadi fokus Dinas Kesehatan antara lain :

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) masih sangat tinggi disebabkan masih banyak bidan yang tidak terlatih untuk manajemen BBLR dan manajemen asfiksia, sehingga jika terjadi kasus BBLR dan asfiksia bidan hanya memberikan pertolongan pertama dan kemudian langsung dirujuk).
- b. Stunting juga menjadi perhatian Dinas Kesehatan ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain sasaran tidak dapat diukur semua dikarenakan tingkat kehadiran balita di Posyandu masih sangat rendah, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi timbang yaitu kegiatan melakukan pengukuran kepada semua sasaran jika tidak semua balita datang ke Posyandu maka akan dilakukan sweeping ke rumah-rumah.

Dalam menangani permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan saat ini, diperlukan pendanaan yang sudah di usulkan dalam SIPD 2024, selain itu peran dinas Kesehatan juga sangat menentukan dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik, antara lain :
 - 1) Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapatkan asupan gizi
 - 2) Ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan agar bayi sehat
 - 3) Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI eksklusif)
 - 4) Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MPASI)
 - 5) Peningkatan kualitas SDM, dalam hal ini menjadi perhatian bahwa masih banyak bidan yang tidak terlatih untuk manajemen BBLR dan manajemen asfiksia, sehingga jika terjadi kasus BBLR dan asfiksia bidan hanya memberikan pertolongan pertama dan kemudian langsung dirujuk).
- b. Membentuk tim Audit Maternal Perinatal (AMP).
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tahun 2024 tidak terlepas dari arahan pimpinan serta peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

RSUD Ratu Zalecha Martapura

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2024.

Perubahan renja tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa penyesuaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian pagu belanja dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan disusunnya perubahan renja tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan dapat melaksanakan target kinerja yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .

Dasar penyusunan RENJA RSUD Ratu Zalecha adalah Peraturan Bupati Banjar 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 58) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Dalam rangka mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh mandiri serta berkualitas. Maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab pada Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif serta terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Banjar, RSUD Ratu Zalecha Martapura melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pemecahan masalah yang menjadi konsep dan kerangka Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Ratu Zalecha. RENSTRA dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari atas RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rentra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Perubahan RENJA RSUD Ratu Zalecha Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian anggaran serta target yang telah tersusun sebelumnya. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan pada realisasi kinerja serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Perubahan dilakukan pada anggaran beberapa sub kegiatan, yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Kebutuhan yang dimaksud berupa belanja barang, jasa, dan belanja modal yang sebelumnya tidak teranggarkan. Penyesuaian terhadap target pun mesti dilakukan untuk menyikapi adanya perubahan anggaran tersebut guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Banjar 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26)
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman arah kerja bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura pada periode perubahan anggaran tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II;
2. Melakukan perbaikan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator hasil yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, memuat sistematika dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang memuat penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dengan segala kendala dari pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada APBD tahun 2024.
- 2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target menguraikan mengenai realisasi dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memenuhi target yang telah ditentukan.
- 2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target menguraikan mengenai realisasi dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

- 2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Tercapai/Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan menguraikan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program atau kegiatan yang telah dilaksanakan serta faktor-faktor pendukung penyebab tercapainya target kinerja program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
- 2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra SKPD, berisikan pelaksanaan kegiatan yang tertunda sehingga membuat persentase capaian kegiatan dan sub kegiatan yang tidak maksimal.
- 2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Terpenuhinya Target Kinerja, berisikan hal-hal yang menjadi penghambat serta tindak lanjut untuk kedepannya agar kegiatan yang sudah di susun atau di rencanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan target dan anggaran yang ada serta berdasarkan pemetaan terkait dampak yang dihasilkan terhadap capaian sub kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja Perubahan, berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta alasannya serta tabel rincian program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024, berisikan penjelasan mengenai sumber anggaran APBD dan BLUD terkait program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 3.3 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024, berisikan mengenai sumber pendanaan pada anggaran murni dan perubahan serta total kebutuhan anggaran.
- 3.4 Alasan Dilakukan Perubahan, berisikan mengenai pelaksanaan perubahan pada tahun 2024.

BAB IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran baik yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Ratu Zalecha merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). RENJA memuat penjabaran dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang mengakibatkan pencapaian dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal. Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut terus di monitoring dan di evaluasi agar dapat diukur progresnya. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan serta (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024 ada beberapa program/kegiatan yang memenuhi target kinerja dan yang tidak memenuhi target kinerja.

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Adapun rincian program/kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target serta melebihi target kinerja periode triwulan II 2024 sebagai berikut :

2.1.1 Program yang tidak memenuhi target :

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha, 1 (satu) program yang memenuhi target kinerja dan 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja.

2.1.2 Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

Dari 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1.3 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target :

Dari 18 (delapan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

- a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, indikator Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan target kinerja 1 dokumen realisasi 0 dokumen.
- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 4 dokumen realisasi 0 dokumen. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.
- c. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Pelayanan dengan target kinerja 1 unit, realisasi 0 unit. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target

2.2.1 Program yang memenuhi target sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dengan target kinerja triwulan II (semester 1) 76 indeks dengan realisasi 0 indeks, karena untuk penilaian IKKI semester 1 pada tahun 2024 dilaksanakan pada triwulan IV.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja ada 2 yaitu :
 - 1) Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit target kinerja triwulan II 83% realisasi 83%.
 - 2) Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar target kinerja 80% realisasi 0%, realisasi kinerja dapat dihitung pada akhir tahun atau triwulan IV.

Secara kumulatif target kinerja program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dapat dikatakan tercapai.

2.2.2 Kegiatan yang memenuhi target :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja target kinerja triwulan II sebesar 25% realisasi 25%, capaian 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dengan target kinerja pada triwulan II sebesar 25% realisasi 25%, capaian 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah indikator target Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Rumah Sakit dengan target triwulan II 25% realisasi 25%, capaian 100%.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah indikator target Pelaksanaan Administrasi Umum RS dengan target triwulan II 25% realisasi 25%, capaian 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah dengan target kinerja triwulan II sebesar 25% realisasi 25% capaian 100%.
- f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD indikator kinerja Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit dengan target kinerja triwulan II sebesar 25% realisasi 25%, capaian 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja triwulan II sebesar 50% realisasi 50% .

2.2.3 Sub Kegiatan yang memenuhi target :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target pada triwulan II sebanyak 9 dokumen dengan realisasi 9 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 3 laporan realisasi 3 laporan .
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja pada triwulan II sebesar 8 Laporan dengan realisasi 9 Laporan .
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja triwulan II 623 Orang/bulan dengan realisasi 503 Orang/bulan.
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target kinerja 12 Dokumen dan Realisasi 12 Dokumen.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD target kinerja pada triwulan II sebesar 12 Laporan realisasi 12 Laporan .
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 Paket realisasi 1 Paket
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target kinerja triwulan II sebanyak 6 Laporan realisasi 6 Laporan .

- i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target kinerja triwulan II sebanyak 2 Laporan realisasi 2 Laporan .
- j. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator kinerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan target kinerja pada triwulan II sebanyak 6 unit kerja realisasi 6 unit kerja .
- k. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit target kinerja triwulan II sebesar 1 unit realisasi 1 unit, realisasi kinerja dapat dihitung pada triwulan IV.
- l. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan target kinerja pada triwulan II sebanyak 22 unit realisasi 22 unit .
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen.
- n. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota dengan target kinerja 80 realisasi 80, pelaksanaan kinerja ditargetkan pada triwulan IV.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target

2.3.1 Program yang melebihi target

Tidak ada

2.3.2 Kegiatan yang melebihi target

Tidak ada

2.3.3 Sub kegiatan yang melebihi target :

Tidak ada

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Tercapai/Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

2.4.1 Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan jadwal kegiatan yang belum selaras dengan pelaksanaan kegiatan disebabkan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang lain, sehingga rencana kegiatan yang sudah disusun digeser waktu pelaksanaannya.
- b. Adanya perubahan pejabat struktural yang memangku komitmen (PPK/PPTK/PP) sehingga kegiatan PBJ mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya.
- c. Adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan mengalami keterlambatan.

2.4.2 Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan yang bersifat rutin didukung dengan tersedianya tenaga yang kompeten serta ketersediaan anggaran.
- b. Tersedianya anggaran dan proses pemilihan penyedia yang berjalan lancar sehingga dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- c. Ketepatan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2.4.3 Faktor pendukung pencapaian yang melebihi target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan didukung oleh penyusunan rencana kegiatan yang sudah matang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan yang tertunda sehingga membuat presentase capaian kegiatan dan sub kegiatan tidak maksimal, karena pada sub kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit untuk kegiatan pemeliharaan atap masih dalam proses konsolidasi namun untuk

pengangkutan limbah atau sampah medis sudah terangkut secara bertahap. Evaluasi terkait penetapan target dan anggaran harus dilaksanakan dengan tepat .

2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Terpenuhinya Target Kinerja

Kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian target kinerja antara lain akan dibentuk tim pemantauan kinerja SKPD sehingga hal-hal yang menjadi penghambat dapat ditindaklanjuti segera dan kedepannya agar rencana aksi atau kegiatan yang sudah disusun dapat dimaksimalkan pelaksanaannya dan melakukan penyesuaian target dan anggaran sesuai dengan kondisi yang ada, serta berdasarkan pemetaan terkait dampak yang dihasilkan terhadap capaian sub kegiatan.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024 (%)	
									I		II							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6 + (8+9)		11 = (10/5) *100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
TERPENUHI NYA NILAI IKKI RUMAH SAKIT	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	80 Indeks	203.420.440.2 26	87,1 Indeks	151.066.625.1 73	76 Indeks	173.393.143. 496	0	31.797.152. 693	0	74.581.104. 416	0%	61 %	87,1	257.444.882. 282	108,9 %	126, 56
Terlaksanan ya Akuntabilita s Kinerja	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	74.625.100	100%	41.558.500	100%	56.940.000	25 %	6.750.000	50%	18.350.000	50 %	44 %	175 %	66.658.500	175	89,3 2
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokume n	27.285.000	15 Dokume n	21.086.000	15 Dokum en	22.080.000	7 Do k	1.500.000	9 Dokum en	1.500.000	60 %	14 %	31	24.086.000	182,4	88,2 8
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RS dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RS	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.500.000	5 Laporan	5.685.000	5 Lapora n	10.860.000	3 Lap	0	3 Lap	5.150.000	60 %	47 %	11	10.835.000	220	94,2
Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	35.840.100	16 Laporan	14.787.500	16 Lapora n	24.000.000	4 Lap	5.250.000	9 Lap	11.700.000	56 %	71 %	29	31.737.500	181,2 5	88,6
Terlaksanan ya administrasi keuangan RS	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	84.700.815.12 6	100%	54.638.121.85 6	100%	77.389.615.4 96	25 %	11.196.976. 320	50%	34.290.647. 350	50 %	59 %	175 %	100.125.745. 526	100%	118,2

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024 (%)	
									I		II							
									7		8							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6 + (8+9)		11 = (10/5) *100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	740 Orang / Bulan	83.939.315.126	6922 Orang	54.492.729.956	623 Orang/ Bulan	77.092.635.496	503	11.173.756.320	514	34.235.372.350	83 %	59 %	1512	99.901.858.626	204 %	119,0
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan RS	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	750.000.000	24 Dokumen	140.618.900	24 Dokumen	288.240.000	6	23.220.000	12 Dokumen	55.050.000	50 %	27 %	42	218.888.900	175 %	29,2
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran RS dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran RS	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	11.500.000	24 Laporan	4.773.000	24 Laporan	8.740.000	6 Lap	0	6 Lap	225.000	50 %	3 %	36	4.998.000	150 %	43 %
Terlaksananya administrasi Kepegawaian RS	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaaan administrasi Kepegawaian RS	100%	4.145.000.000	100%	1.056.366.769	100%	1.452.000.000	25%	163.574.246	50%	489.360.567	50 %	45 %	175%	1.709.301.582	175 %	41 %
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	145.000.000	6 Dokumen	8.460.000	6 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	0	4 Dokumen	0	67 %	0 %	13	8.460.000	217 %	6%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	4.000.000.000	135 Orang	1.047.906.769	228 Orang	1.440.000.000	25 orang	163.574.246	38 Orang	489.360.567	27 %	45 %	198	1.700.841.582	51 %	43 %
Terlaksananya administrasi umum RS	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaaan administrasi Umum RS	100%	4.500.000.000	100%	1.996.512.500	100%	1.315.116.000	25%	0	50%	919.590.000	50 %	70 %	175%	2.916.102.500	175 %	65 %

Sasaran	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024 (%)	
									I		II							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6 + (8+9)		11 = (10/5) *100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000.000	4 Paket	1.996.512.500	4 Paket	1.219.741.000	1 Paket	0	1 Paket	910.840.000	50 %	75 %	6	2.907.352.500	120 %	97%
Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.500.000.000	-	0	4 Laporan	95.375.000	1	0	2 Lap	8.750.000	50 %	9%	3	8.750.000	75%	0,6%
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	12.000.000.000	100%	2.547.524.200	100%	7.179.472.000	25 %	780.279.121	50 %	3.413.493.166	50 %	58 %	175 %	6.741.296.487	175 %	56,2 %
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000.000	12 Laporan	2.547.524.200	12 Laporan	7.179.472.000	3	780.279.121	6 Lap	3.413.493.166	50 %	58 %	21	6.741.296.487	175 %	56,2 %
Terlaksananya Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	100%	98.000.000.000	100%	90.786.541.348	100%	86.000.000.000	25 %	19.649.573.006	50 %	46.320.019.558	50 %	77 %	175 %	156.756.133.912	175 %	160,0 %
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	98.000.000.000	6 Unit Kerja	90.786.541.348	6 Unit Kerja	86.000.000.000	6	19.649.573.006	6	46.320.019.558	NA	77 %	18	156.756.133.912	300 %	160,0 %
TERLAKSANANYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	92%	16.600.000.000	90%	8.324.689.211	80%	8.783.357.186	0	6.160.000	0%	766.148.379	NA	9%	90%	9.096.997.590	98%	55%
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	85%		73%		80%								73%		86%	
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Di RS	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	85 %	15.400.000.000	90%	8.090.706.811	80 %	8.316.325.586	0%	0	0%	1.498.900.000	NA	18 %	90%	9.589.606.811	106 %	62%
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	100 %		73%		86%								73%		73%	73%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENTA PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENTA PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENTA PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENTRA PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RENTA PD s/d Tahun 2024
									I		II						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6 + (8+9)		11 = *100%
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	4.600.000.000	2 Unit	2.267.542.480	2 Unit	3.498.426.000	1 Unit	0	1 Unit	0	50%	0%	4	2.267.542.480	400%
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	103 Unit	4.800.000.000	51 Unit	5.785.949.331	22 Unit	4.817.899.586	4	0	22	1.498.900.000	100%	31%	77	7.284.849.331	75%
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan RS Rujukan di Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan RS Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Akreditasi Berfokus Pada Pelayanan	80 %	1.000.000.000	80%	133.877.500	80%	348.837.600	80%	0	80%	9.870.000	80%	3%	80%	143.747.500	100%
		Persentase Capaian Akreditasi Berfokus Pada Manajemen	80 %		80%		80%		80%	80%	80%	80%					
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	400.000.000	4 Dokumen	36.180.000	4 Dokumen	98.575.600	0	0	1	0	25%	3%	2	36.180.000	50%
Terkelolanya Penelitian Kesehatan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	99.827.000	0	0	0	0	15%	0%	0	0	0%
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	80%	500.000.000	80%	97.697.500	80%	150.435.000	25%	0	45,00%	9.870.000	56%	7%	45%	107.567.500	100%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 6 + (8+9)		11 = (10/5) *100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Keperawatan Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	92% 95,2% 92,3	200.000.000	90,5% 84% 96%	100.104.900	90,5% 88% 92,3%	118.194.000	0 0	6.160.000	0 0	21.840.000	NA NA	24% 24%	90,5% 84% 96%	128.104.900	98,4% 88,2% 104%	64%
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.104.900	1 Unit	118.194.000	1	6.160.000	1	21.840.000	50%	24%	3	128.104.900	300%	64%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Perubahan

Perubahan dilakukan pada anggaran beberapa sub kegiatan, yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Kebutuhan yang dimaksud berupa belanja barang, jasa, dan belanja modal yang sebelumnya tidak teranggarkan. Penyesuaian terhadap target pun mesti dilakukan untuk menyikapi adanya perubahan anggaran tersebut guna menjaga keserasian antara target dan anggaran Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD Ratu Zalecha merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Tahun 2021-2026 RSUD Ratu Zalecha telah memuat secara merinci indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyesuaian target indikator kinerja utama pada indikator Akreditasi dikarenakan berdasarkan hasil penilaian akreditasi tahun 2022 sudah mencapai paripurna, dan penyesuaian target indikator SPM dikarenakan berdasarkan realisasi tahun 2022 sudah mencapai 88,19% maka dilakukan perhitungan ulang dengan pertimbangan komponen indikator pembentuknya sehingga dihasilkan target 89% dengan capaian 84 indikator SPM RS dari 94 indikator SPM RS yang harus dipenuhi.

Serta berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan RI dimana RSUD Ratu Zalecha yang semula di tunjuk sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas KJSU-KIA dan Diabetes Melitus (Kanker, jantung, Stroke dan Urologi-Kesehatan Ibu dan Anak, dan Diabetes Melitus) menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan 10 (sepuluh) Layanan Prioritas yaitu ; Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal, Hepar, Layanan KIA, Respiratori dan Tuberkulosis, Penyakit Infeksi Emerging, Layanan Kesehatan Jiwa, Diabetes Mellitus dimana diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan layanan dan peningkatan SDM serta sarana prasarana.

Beberapa penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja. Berikut daftar indikator kinerja yang dilakukan perubahan :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Peruba han Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	-			
Meningkatnya mutu pelayanan RSUD Ratu Zalecha	IKM Rumah Sakit	IKM Rumah Sakit	86,0	86,5	173.393.143.496	197.391.167.496	23.998.024.000	Target IKM RSUD Ratu Zalecha menyesuaikan capaian IKM RSUD Ratu Zalecha tahun 2023
	Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna (100%)	8.783.357.186	8.768.122.186	(15.235.000)	
	SPM Rumah Sakit	SPM Rumah Sakit	90%	90,5%				Target SPM RSUD Ratu Zalecha menyesuaikan capaian SPM RSUD Ratu Zalecha tahun 2023
TOTAL ANGGARAN					182.176.500.682	206.159.289.682	23.982.789.000	
TERPENUHINYA NILAI IKKI RUMAH SAKIT	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	76 Indeks	76 Indeks	173.393.143.496	197.391.167.496	23.998.024.000	
Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	56.940.000	56.940.000	-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	22.080.000	22.080.000	-	Adanya perubahan penyesuaian anggaran dari kegiatan jasa Narsum Ranwal 2025 dan cetak spanduk sehingga anggaran dialihkan ke belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.860.000	10.860.000	-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	24.000.000	24.000.000	-	
Terlaksananya administrasi keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	100%	77.389.615.496	77.389.615.496	-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	623 OB	584 OB	77.092.635.496	77.092.635.496	-	Perubahan penurunan target karena adanya ASN yang purna tugas/Pensiun dan Meninggal
Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	288.240.000	288.240.000	-	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	8.740.000	8.740.000	-	

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Terlaksananya administrasi Kepegawaian RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	100%	100%	1.452.000.000	1.452.000.000	-	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	12.000.000	12.000.000	-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	228 Orang	228 Orang	1.440.000.000	1.440.000.000	-	
Terlaksananya administrasi umum RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Umum RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Umum RS	100%	100%	1.315.116.000	1.313.140.000	(1.976.000)	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.219.741.000	1.217.765.000	(1.976.000)	Adanya perubahan pagu karena adanya penyesuaian anggaran yang dirasa perlu untuk segera direalisasikan terkait kebutuhan untuk menunjang kegiatan pengadaan mebel, kegiatan pengadaan alat pendingin ruangan dan kegiatan adminstrasi perkantoran
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	95.375.000	95.375.000	-	Penyesuaian aktivitas dengan sub kegiatan akreditasi, perubahan aktivitas survei verifikasi akreditasi menjadi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit
	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit	100%	100%			-	

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	100%	7.179.472.000	7.179.472.000	-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.179.472.000	7.179.472.000	-	
Terlaksananya Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	100%	100%	86.000.000.000	110.000.000.000	24.000.000.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	86.000.000.000	110.000.000.000	24.000.000.000	-Adanya perubahan dari Belanja Pegawai dan Barang Jasa dikarenakan peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada peningkatan belanja Operasional. -Penambahan anggaran perubahan BLUD berasal dari peningkatan Pendapatan BLUD
TERLAKSANANYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	80 %	80%	8.783.357.186	8.768.122.186	(15.235.000)	
	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	80 %	80%	8.316.325.586	8.316.325.586	-	
	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	83 %	83%				
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit	3.498.426.000	3.498.426.000	-	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	28 Unit	4.817.899.586	4.817.899.586	-	Adanya penyesuaian kebutuhan pada pembelian belanja modal alat kedokteran bedah dan alat kedokteran ICU sehingga anggaran dialihkan ke belanja modal alat kedokteran umum dan alat kedokteran ICU

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Di RS	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	80 % 83 %	80% 83%	348.837.600	333.602.600	(15.235.000)	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	98.575.600	98.575.600	-	adanya penyesuaian kebutuhan untuk menunjang kegiatan pada Kehumasan RSUD Ratu Zalecha
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	99.827.000	99.827.000	-	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	150.435.000	135.200.000	(15.235.000)	Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS DHP) tidak melaksanakan survei verifikasi akreditasi melainkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit sehingga anggaran dan aktivitas yang berkaitan dgn survei verifikasi akreditasi, dari persiapan sampai dengan pelaksanaan survei, disesuaikan dan dirubah untuk kegiatan pendukung akreditasi lainnya
Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	90,5 % 88 % 92,3 %	90,5 % 88 % 92,3 %	118.194.000	118.194.000	-	
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	1 Unit	118.194.000	118.194.000	-	

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 RSUD Ratu Zalecha Martapura melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjar dan 1 kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD, adapun program/kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- c) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3.3 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024

3.3.01 Sumber Pendanaan

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha Martapura sebanyak 2 program dan 9 kegiatan, dengan total anggaran murni sebesar Rp 182.176.500.682,- dengan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 maka pada Perubahan Renja pagu total RSUD Ratu Zalecha Martapura menjadi Rp 206.159.289.682,-. Rincian pendanaan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sumber Pendanaan TA 2024

No	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.	APBD	96.176.500.682	96.159.289.682	16.211.000
2.	BLUD	86.000.000.000	110.000.000.000	24.000.000.000
	Total	182.176.500.682	206.159.289.682	24.016.211.000

3.3.02 Total Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan RSUD Ratu Zalecha Martapura berasal dari APBD dan BLUD, rekapitulasi kebutuhan anggaran bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Perubahan dan Sumber Pendanaan Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	182.176.500.682	206.159.289.682	APBD/BLUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.393.143.496	197.391.167.496	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.940.000	56.940.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.080.000	22.080.000	APBD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.860.000	10.860.000	APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.389.615.496	77.389.615.496	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.092.635.496	77.092.635.496	APBD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	288.240.000	288.240.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.740.000	8.740.000	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.452.000.000	1.452.000.000	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.000.000	12.000.000	APBD
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.440.000.000	1.440.000.000	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.315.116.000	1.313.140.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.219.741.000	1.217.765.000	APBD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.375.000	95.375.000	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.179.472.000	7.179.472.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.179.472.000	7.179.472.000	APBD
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	86.000.000.000	110.000.000.000	
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	86.000.000.000	110.000.000.000	BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.783.357.186	8.768.122.186	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.316.325.586	8.316.325.586	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.498.426.000	3.498.426.000	APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.817.899.586	4.817.899.586	APBD
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.837.600	333.602.600	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98.575.600	98.575.600	APBD
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	99.827.000	99.827.000	APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	150.435.000	135.200.000	APBD
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.194.000	118.194.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	118.194.000	118.194.000	APBD

3.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Ada beberapa program/kegiatan pada Tahun 2023 yang dilakukan perubahan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perubahan dilakukan karena adanya penyesuaian anggaran dari kegiatan jasa Narsum Ranwal 2025 dan cetak spanduk sehingga anggaran dialihkan ke belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN perubahan dilakukan penyesuaian target kinerja pada kegiatan belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas/ pensiun dan meninggal.
3. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perubahan dilakukan karena penyesuaian anggaran yang dirasa perlu untuk segera direalisasikan terkait kebutuhan untuk menunjang kegiatan pengadaan mebel, kegiatan pengadaan alat pendingin ruangan dan kegiatan administrasi perkantoran.
4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perubahan dilakukan karena Penyesuaian aktivitas dengan sub kegiatan akreditasi, perubahan aktivitas survei verifikasi akreditasi menjadi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit.
5. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan perubahan dilakukan karena Perubahan Kebutuhan yang dirasa perlu segera direalisasikan terkait kebutuhan operasional Rumah Sakit. (kegiatan ini masuk dalam perubahan walaupun disetujui namun disarankan untuk menggunakan anggaran BLUD).

6. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD perubahan dilakukan penambahan anggaran perubahan BLUD berasal dari peningkatan Pendapatan BLUD untuk keperluan perubahan dari belanja pegawai dan barang jasa dikarenakan peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada peningkatan belanja operasional.
7. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan perubahan dilakukan karena penyesuaian kebutuhan pada pembelian belanja modal alat kedokteran bedah dan alat kedokteran ICU sehingga anggaran dialihkan ke belanja modal alat kedokteran umum dan alat kedokteran ICU.
8. Pada program pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan perubahan dilakukan karena penyesuaian kebutuhan untuk menunjang kegiatan pada Kehumasan RSUD Ratu Zalecha.
9. Pada program pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota perubahan karena Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS DHP) tidak melaksanakan survei verifikasi akreditasi melainkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit sehingga anggaran dan aktivitas yang berkaitan dgn survei verifikasi akreditasi, dari persiapan sampai dengan pelaksanaan survei, disesuaikan dan dirubah untuk kegiatan pendukung akreditasi lainnya.

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Perubahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Peruba han Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	-			
Meningkatnya mutu pelayanan RSUD Ratu Zalecha	IKM Rumah Sakit	IKM Rumah Sakit	86,0	86,5	173.393.143.496	197.391.167.496	23.998.024.000	Target IKM RSUD Ratu Zalecha menyesuaikan capaian IKM RSUD Ratu Zalecha tahun 2023
	Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Paripur na	Paripur na (100%)	8.783.357.186	8.768.122.186	(15.235.000)	
	SPM Rumah Sakit	SPM Rumah Sakit	90%	90,5%				Target SPM RSUD Ratu Zalecha menyesuaikan capaian SPM RSUD Ratu Zalecha tahun 2023
	TOTAL ANGGARAN				182.176.500.682	206.159.289.682	23.982.789.000,0 0	
TERPENUHINYA NILAI IKKI RUMAH SAKIT	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	76 Indeks	76 Indeks	173.393.143.496	197.391.167.496	23.998.024.000	
Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	56.940.000	56.940.000	-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokume n	15 Dokum en	22.080.000	22.080.000	-	Adanya perubahan penyesuaian anggaran dari kegiatan jasa Narsum Ranwal 2025 dan cetak spanduk sehingga anggaran dialihkan ke belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.860.000	10.860.000	-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	24.000.000	24.000.000	-	
Terlaksananya administrasi keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	100%	77.389.615.496	77.389.615.496	-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	623 OB	584 OB	77.092.635.496	77.092.635.496	-	Perubahan penurunan target karena adanya ASN yang purna tugas/Pensiun dan Meninggal
Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	288.240.000	288.240.000	-	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	8.740.000	8.740.000	-	

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Terlaksananya administrasi Kepegawaian RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	100%	100%	1.452.000.000	1.452.000.000	-	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	12.000.000	12.000.000	-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	228 Orang	228 Orang	1.440.000.000	1.440.000.000	-	
Terlaksananya administrasi umum RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Umum RS	Capaian Pelaksanaan administrasi Umum RS	100%	100%	1.315.116.000	1.313.140.000	(1.976.000)	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.219.741.000	1.217.765.000	(1.976.000)	Adanya perubahan pagu karena adanya penyesuaian anggaran yang dirasa perlu untuk segera direalisasikan terkait kebutuhan untuk menunjang kegiatan pengadaan mebel, kegiatan pengadaan alat pendingin ruangan dan kegiatan administrasi perkantoran
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	95.375.000	95.375.000	-	Penyesuaian aktivitas dengan sub kegiatan akreditasi, perubahan aktivitas survei verifikasi akreditasi menjadi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit
	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jabatan dan operasional rumah sakit	100%	100%			-	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit			-	Adanya Perubahan Kebutuhan yang dirasa perlu segera direalisasikan terkait kebutuhan operasional Rumah Sakit - Usulan disetujui namun menggunakan anggaran BLUD

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	100%	7.179.472.000	7.179.472.000	-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.179.472.000	7.179.472.000	-	
Terlaksananya Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	100%	100%	86.000.000.000	110.000.000.000	24.000.000.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	86.000.000.000	110.000.000.000	24.000.000.000	-Adanya perubahan dari Belanja Pegawai dan Barang Jasa dikarenakan peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada peningkatan belanja Operasional. -Penambahan anggaran perubahan BLUD berasal dari peningkatan Pendapatan BLUD
TERLAKSANANYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	80 % 83 %	80% 83%	8.783.357.186	8.768.122.186	(15.235.000)	
	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	80 % 83 %	80% 83%	8.316.325.586	8.316.325.586	-	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit	3.498.426.000	3.498.426.000	-	

	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	28 Unit	4.817.899.586	4.817.899.586	-	Adanya penyesuaian kebutuhan pada pembelian belanja modal alat kedokteran bedah dan alat kedokteran ICU sehingga anggaran dialihkan ke belanja modal alat kedokteran umum dan alat kedokteran ICU
--	--	--	---------	---------	---------------	---------------	---	---

Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU (Rp)			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8*(7-6)	9
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Di RS	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	80 % 83 %	80% 83%	348.837.600	333.602.600	(15.235.000)	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	98.575.600	98.575.600	-	adanya penyesuaian kebutuhan untuk menunjang kegiatan pada Kehumasan RSUD Ratu Zalecha
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	99.827.000	99.827.000	-	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	150.435.000	135.200.000	(15.235.000)	Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS DHP) tidak melaksanakan survei verifikasi akreditasi melainkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Rumah Sakit sehingga anggaran dan aktivitas yang berkaitan dgn survei verifikasi akreditasi, dari persiapan sampai dengan pelaksanaan survei, disesuaikan dan dirubah untuk kegiatan pendukung akreditasi lainnya

Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan	Persentase Capaian SPM Pelayanan Keperawatan	90,5 %	90,5 %	118.194.000	118.194.000	-	
	Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik	Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik	88 %	88 %				
	Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	92,3 %	92,3 %				
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	1 Unit	118.194.000	118.194.000	-	

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja RSUD Ratu Zalecha, seluruh pejabat dilingkungan RSUD Ratu Zalecha wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Perubahan Renja Tahun 2024 merupakan acuan bagi RSUD Ratu Zalecha dalam rangka tercapainya sinergi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan RSUD Ratu Zalecha berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya
2. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap penanggung jawab kinerja wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Perubahan Renja tahun 2024 ini agar dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Perubahan Renja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPRP Kabupaten Banjar untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar Tahun 2024 harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

BAB I

PENDAHULUAN

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diatur Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang terdiri dari 6 bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Pertanahan, bidang Bina Jasa Konstruksi, bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain itu juga terdapat 1 Bagian yakni Bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Sebagaimana diketahui kebijakan dan program Pembangunan Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 yang dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Selanjutnya disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Sehubungan dengan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang terlebih dahulu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 bahwa perubahan RKPD dan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

2. Dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksud, dapat menyesuaikan target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah tahun 2024 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2024, demikian pula dengan kinerja SKPD terhadap pencapaian sasaran Perubahan RPJMD 2021-

2026. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar tahun 2024, yang meliputi: penyesuaian kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program dan kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran daerah.

Keadaan yang melatarbelakangi perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2024 meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas;
2. Pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan dan penambahan pekerjaan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Penurunan Target Pendapatan dan Penambahan Kode Rekening Pendapatan Tahun 2024;
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
5. Penambahan unit alat berat dan mobil operasional dalam rangka mendukung capaian target Pendapatan dan target kinerja Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Surat Edaran Bupati Nomor : 000.7.2.4/ 528 /PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan pedoman kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja sampai triwulan II.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, keterkaitan antara perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan perubahan Renja K/ L dan perubahan Renja provinsi/ kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- a. Perubahan Indikator Kinerja;
- b. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; dan
- d. Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024 dari total nilai pagu sebesar Rp. 314.649.279.503,- telah terealisasi sebesar Rp. 52.934.961.826,- atau 25,71%.

Adapun dibawah ini beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kesiapan aplikasi LPSE yang belum maksimal di awal tahun sehingga penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun agak terlambat sehingga proses pengadaan pun menjadi agak terlambat. Proses pengadaan yang terlambat tersebut secara umum untuk pekerjaan konstruksi.
2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Adanya perubahan target dan sasaran sehingga dilaksanakan setelah disahkannya APBD Perubahan/ Pergeseran.
4. Waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk penyelesaian paket pekerjaan.
5. Adanya perubahan lokasi paket pekerjaan dan efisiensi anggaran.

12
Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUPRP dan Pencapaian Renstra DPUPRP s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Banjar

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (I)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	82,95	persen	640.928.152.577	79,14	persen	152.058.907.727	76,55	1.207.645.836	0,13	31.385.603.780	76,68	32.593.249.616	96,89%	21,43%	Bina Marga
1	- Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap - Meningkatkan jembatan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	1,86	persen	640.928.152.577	1,86	persen	152.058.907.727	0,00	1.207.645.836	0,12	31.385.603.780	0,124	32.593.249.616	6,67%	21,43%	Bina Marga
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	94,97	persen	-	91,47	persen		91,24		0,11		91,35		99,87%		Bina Marga
1	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	78	Dokumen	5.725.360.000	72	Dokumen	5.725.360.000	10	21.480.000	21,00	1.459.569.000	31	1.481.049.000	43,06%	25,87%	Bina Marga
2	Tergantinya Jembatan	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	13	Jembatan	28.363.186.200	3	Jembatan	10.500.310.000	0	-	0,00	2.668.749.600	0	2.668.749.600	0,00%	25,42%	Bina Marga
3	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10,5	KM	17.231.530.200	3,5	KM	6.748.010.000	0	-	0,00	1.037.694.450	0	1.037.694.450	0,00%	15,38%	Bina Marga
4	Terekonstruksinya Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12	KM	307.071.366.160	10	KM	88.296.763.000	0	800.000	0,00	19.821.603.025	0	19.822.403.025	0,00%	22,45%	Bina Marga
5	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	6	KM	7.302.035.000	2	KM	1.815.250.000	0	-	0,97	2.856.400	0,97	2.856.400	48,60%	0,16%	Bina Marga
6	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	48	Jembatan	17.556.794.300	24	Jembatan	5.622.965.000	2	183.178.886	0,00	935.882.351	2	1.119.061.237	8,33%	19,90%	Bina Marga
7	Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	32	Jembatan	26.974.230.312	18	Jembatan	9.255.433.878	1	-	8,00	648.430.483	9	648.430.483	50,00%	7,01%	Bina Marga

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab
										I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	Terbangunnya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	13	Jembatan	33.659.752.400	7	Jembat an	11.042.620.000	0	500.000	2,00	2.664.179.000	2	2.664.679.000	28,57 %	24,13 %	Bina Marga
9	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	5.703,25	KM	2.547.875.200	1.907,25	KM	847.760.000	0	-	1382	-	1382	-	72,46 %	0,00 %	Bina Marga
10	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30	KM	38.226.824.777	10	KM	12.204.435.849	2,4	1.001.686.950	8,55	2.146.639.471	10,95	3.148.326.421	109,50 %	25,80 %	Bina Marga
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,07	0	0,58	21	0,65	2	0,36	0,17	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
2	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	53,09	persen	45.200.675.481	50,45	persen	9.708.052.569	49,34	321.520.000	0,00	1.106.666.590	49,34	1.428.186.590	97,80 %	14,71 %	Sumber Daya Air
2	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan Genangan	71,92	persen	45.200.675.481	69,08	persen	9.708.052.569	67,66	321.520.000	0,42	1.106.666.590	68,08	1.428.186.590	98,55 %	14,71 %	Sumber Daya Air
11	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6	Sistem Drainase Perkotaan	1.742.059.580	2	Sistem Drainas e Perkota an	429.579.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sumber Daya Air
12	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8	Sistem Drainase Perkotaan	2.079.022.977	2	Sistem Drainas e Perkota an	317.009.998	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sumber Daya Air
13	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18	Sistem Drainase Perkotaan	21.538.898.730	6	Sistem Drainas e Perkota an	7.362.543.571	0	-	0,00	756.056.590	0	756.056.590	0,00%	10,27 %	Sumber Daya Air

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab	
										I		II							
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1 4	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	4.816.067.100	4	Sistem Drainas e Perkota an	1.598.920.00 0	3	321.520.00 0	1,00	350.610.00 0	4	672.130.00 0	100,00 %	42,04 %	Sumber Daya Air	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,75	3	0,25	11	1,00	4	0,25	0,13		
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
3	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	46,24	persen	54.715.664.71 8	41,1	persen	15.649.672. 694	40, 44	395.322.52 4	0,5 3	650.887.42 4	40,9 7	99,68 %	4,16 %	Sumber Daya Air		
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	66,77	persen		66,73	persen		66, 68		0,0 0		-				66,6 8	99,93 %
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	87,87	persen		81,15	persen		78, 79		0,0 4		-				78,8 3	97,14 %
3	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Sungai yang dikelola	1,75	persen	20.442.849.52 8	2,31	persen	4.272.090.6 94	0,2 9	143.981.9 00	0,0 8	113.390.00 0	0,37	257.371.90 0	16,02 %	6,02 %	Sumber Daya Air	
1 5	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	24	KM	2.736.651.620	2	KM	1.236.681.00 0	1,55	82.920.900	3,45	111.990.00 0	5	194.910.90 0	250,00 %	15,76 %	Sumber Daya Air	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
16	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,7	KM	3.222.185.500	2	KM	512.950.000	0	59.661.000	0,00	-	0	59.661.000	0,00%	11,63 %	Sumber Daya Air
17	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,15	KM	5.594.784.223	0,15	KM	2.021.618.031	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sumber Daya Air
18	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3	Dokumen	810.274.940	1	Dokumen	297.047.000	0	1.400.000	0,00	1.400.000	0	2.800.000	0,00%	0,94 %	Sumber Daya Air
19	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5	Dokumen	615.459.882	3	Dokumen	203.794.663	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sumber Daya Air
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,31	3	0,00	3	0,31	1	0,50	0,06	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
4	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,45	persen	34.272.815.190	69,72	persen	11.377.582.000	62,41	111.583.000	4,22	281.932.524	66,63	393.515.524	95,57 %	3,46 %	Sumber Daya Air
20	Terbangunnya Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	9	Bendung	1.934.720.280	3	Bendung	584.614.000	0	59.180.000	1,00	250.000	1	59.430.000	33,33 %	10,17 %	Sumber Daya Air
21	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	51,632	KM	13.572.818.340	29,632	KM	6.719.217.000	0	820.000	0,00	-	0	820.000	0,00%	0,01 %	Sumber Daya Air

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 2	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	45	KM	10.641.109.820	14	KM	3.908.811.00 0	0	51.583.000	0,75	281.682.52 4	0,75	333.265.52 4	5,36%	8,53 %	Sumber Daya Air
2 3	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	7	Dokume n	496.278.800	2	Dokume n	164.940.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sumber Daya Air
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	1	0,44	2	0,44	1	0,10	0,05	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak	100	persen	72.380.337. 882	100	persen	17.239.191. 300	0	38.963.10 0	5,8 3	909.825.30 0	5,83	948.788.40 0	5,83%	5,50 %	Cipta Karya
			Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	18,53	persen		18,17	persen		0		16, 58	-	16,5 8	-	91,25 %		
5	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten	1,72	persen	72.380.337. 882	1,6	persen	17.239.191. 300	0	38.963.10 0	0,0 0	909.825.30 0	0	948.788.40 0	0,00%	5,50 %	Cipta Karya
2 4	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1.000	Unit SR	4.314.869.20 0	1.000	1.000 Unit SR	10.175.667.0 00	0	12.963.100	0,00	805.825.30 0	0	818.788.40 0	0,00%	8,05 %	Cipta Karya

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 5	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	24	Unit	1.343.268.71 0	8	Unit	445.248.000	8	26.000.000	0,00	104.000.00 0	8	130.000.00 0	100,00 %	29,20 %	Cipta Karya
2 6	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	24	Unit	6.130.758.40 0	8	Unit	2.034.920.00 0	8	-	0,00	-	8	-	100,00 %	0,00 %	Cipta Karya
2 7	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.500	SR	9.258.379.72 6	500	SR	4.583.356.30 0	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00 %	Cipta Karya
Rata-rata capaian kinerja (%)										2,67	0	0,00	5	2,67	1	0,50	0,09	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
5	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	100	persen	49.792.163. 624	100	persen	13.652.014. 800	0	79.859.80 0	0,0 0	258.538.60 0	0	338.398.40 0	0,00%	2,48 %	Cipta Karya
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase Akses Sanitasi Aman	10,3	persen		9,81	persen		0		9,5 5	-	9,55	-	97,35 %		
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase Akses Sanitasi Layak	100	persen		100	persen		0		0,0 0	-	0	-	0,00%		

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	79,16	persen	166.234.151 .359	76,47	persen	36.543.882. 640	75, 14	1.300.000	0,0 0	6.890.842. 700	75,1 4	6.892.142. 700	98,26 %	18,8 6%	Bina Marga
8	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	1,2	persen	166.234.151 .359	1,2	persen	36.543.882. 640	0	1.300.000	0,0 0	6.890.842. 700	0	6.892.142. 700	0,00%	18,8 6%	Bina Marga
3 3	Terehabilitasinya Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	66	KM	99.006.102.9 33	22	KM	36.543.882.6 40	0	1.300.000	0,00	6.890.842.7 00	0	6.892.142.7 00	0,00%	18,86 %	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0	0,00	19	0,00	19	0,00	0,19	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
8	Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	89	persen	2.542.559.7 77	88	persen	472.433.800	87, 52	22.948.00 0	5,2 4	133.029.50 0	92,7 6	155.977.50 0	105,4 1%	33,0 2%	Bina Jasa Konstru ksi
9	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	100	persen	1.807.512.4 47	60	persen	346.715.000	30	22.948.00 0	5,2 4	133.029.50 0	35,2 4	155.977.50 0	58,73 %	44,9 9%	Bina Jasa Konstru ksi
3 4	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	255	Orang	868.143.350	75	Orang	214.220.500	0	9.628.000	55	103.189.50 0	55	112.817.50 0	73,33 %	52,66 %	Bina Jasa Konstruk si
3 5	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.010	Lembag a	533.026.779	310	Lembag a	132.494.500	60	13.320.000	120	29.840.000	180	43.160.000	58,06 %	32,57 %	Bina Jasa Konstruk si

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,10	7	0,56	38	0,66	22	0,66	0,43	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
10	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90	persen	196.414.610	90	persen	46.708.800	60	-	10,00	-	70	-	77,78 %	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi
36	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2	Perangkat Pendukung	25.313.600	2	Perangkat Pendukung	25.313.600	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi
37	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	12	Dokumen	68.936.910	2	Dokumen	21.395.200	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
11	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	100	persen	538.632.720	60	persen	79.010.000	0	-	20,00	-	20	-	33,33 %	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi
38	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	300	Paket Pekerjaan	71.730.060	100	Paket Pekerjaan	14.730.000	0	-	74	-	74	-	74,00 %	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	
39	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	110	Lembaga	239.945.160	30	Lembaga	64.280.000	0	-	16	-	16	-	53,33 %	0,00 %	Bina Jasa Konstruksi
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	-	0,64	-	0,64	-	0,64	0,00	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
9	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	85,1	persen	81.145.764.262	85	persen	18.388.256.054	0	2.522.216.517	0,00	5.216.618.602	0	7.738.835.119	0,00%	42,09%	Sekretariat
12	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	persen	296.795.500	100	persen	70.000.000	52,63	12.595.000	21,05	5.734.200	73,68	18.329.200	73,68 %	26,18%	Sekretariat
40	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen	151.000.000	7	Dokumen	50.000.000	4	10.625.000	1	2.500.000	5	13.125.000	71,43 %	26,25 %	Sekretariat
41	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	25.200.000	2	Dokumen	10.000.000	1	1.970.000	0	3.234.200	1	5.204.200	50,00 %	52,04 %	Sekretariat

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Laporan	25.200.000	10	Laporan	10.000.000	5	-	3	-	8	-	80,00 %	0,00 %	Sekretari at
Rata-rata capaian kinerja (%)										3,33	0	1,33	8	4,67	9	0,67	0,26	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
1 3	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	persen	46.923.741. 639	100	persen	10.856.721. 188	26, 67	1.156.409. 954	23, 33	3.823.517. 552	50	4.979.927. 506	50,00 %	45,8 7%	Sekretar iat
4 3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/ Bulan	30.480.015.2 34	70	Orang/ Bulan	10.669.776.6 88	70	1.120.844. 954	0	3.787.952.5 52	70	4.908.797.5 06	100,00 %	46,01 %	Sekretari at
4 4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokume n	513.702.000	12	Dokume n	170.100.000	3	35.565.000	3	35.565.000	6	71.130.000	50,00 %	41,82 %	Sekretari at
4 5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	28.806.270	1	Laporan	9.538.500	1	-	0	-	1	-	100,00 %	0,00 %	Sekretari at

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
46	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan	10.896.160	16	Laporan	3.608.000	4	-	4	-	8	-	50,00 %	0,00 %	Sekretariat
47	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	11.167.960	1	Dokumen	3.698.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00 %	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										15,60	11	1,40	35	17,00	9	0,60	0,18	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
14	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	persen	55.944.000	100	persen	17.200.000	25	-	25,00	-	50	-	50,00 %	0,00 %	Sekretariat
48	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	51.944.000	4	Laporan	17.200.000	1	-	1	-	2	-	50,00 %	0,00 %	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										1,00	-	1,00	-	2,00	-	0,50	0,00	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
15	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaiaan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100	persen	281.400.000	100	persen	70.000.000	100	67.900.000	0,00	-	100	67.900.000	100,00%	97,00%	Sekretariat

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
49	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42	42 Orang	191.400.000	14	14 Orang	70.000.000	14	67.900.000	0	-	14	67.900.000	100,00 %	97,00 %	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										14,00	97	0,00	-	14,00	97	1,00	0,97	
Predikat Kinerja										SR	ST	SR	SR	SR	ST	SR	SR	
16	Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	persen	11.970.470.029	100	persen	2.198.951.900	25	219.499.722	25,00	350.479.218	50	569.978.940	50,00 %	25,92%	Sekretariat
50	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	48.734.646	12	Paket	16.137.300	3	-	3	1.957.500	6	1.957.500	50,00 %	12,13 %	Sekretariat
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	923.223.832	12	Paket	347.351.600	3	-	3	-	6	-	50,00 %	0,00 %	Sekretariat
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	483.259.350	12	Paket	176.542.500	3	20.604.000	3	17.123.500	6	37.727.500	50,00 %	21,37 %	Sekretariat
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	140.635.910	12	Paket	47.820.500	3	4.473.650	3	3.000.000	6	7.473.650	50,00 %	15,63 %	Sekretariat
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	171	Dokumen	212.690.000	72	Dokumen	72.000.000	10	10.000.000	20	10.000.000	30	20.000.000	41,67 %	27,78 %	Sekretariat
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36	Laporan	44.696.000	12	Laporan	14.800.000	3	450.000	3	1.425.000	6	1.875.000	50,00 %	12,67 %	Sekretariat
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	3.998.386.000	12	Laporan	1.524.300.000	3	183.972.072	3	316.973.218	6	500.945.290	50,00 %	32,86 %	Sekretariat

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp							
Rata-rata capaian kinerja (%)										4,00	10	6,40	16	10,40	4	0,49	0,17	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
17	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	15.160.311.098	100	persen	3.621.110.866	25	918.021.478	25,00	628.038.990	50	1.546.060.468	50,00 %	42,70 %	Sekretariat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	65.458.500	12	Laporan	21.675.000	3	-	3	9.000.000	6	9.000.000	50,00 %	41,52 %	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	1.030.040.263	12	Laporan	400.675.866	3	83.595.358	3	59.632.150	6	143.227.508	50,00 %	35,75 %	Sekretariat
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	9.664.195.200	12	Laporan	3.198.760.000	3	834.426.120	3	559.406.840	6	1.393.832.960	50,00 %	43,57 %	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja (%)										3,00	25	3,00	17	6,00	14	0,50	0,40	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
18	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	6.457.101.996	100	100	1.554.272.100	25	147.790.363	25,00	408.848.642	50	556.639.005	50,00 %	35,81 %	Sekretariat

N o	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	117.749.800	1	Unit	38.990.000	1	5.842.530	0	6.134.705	1	11.977.235	100,00 %	30,72 %	Sekretari at
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Unit	2.761.433.200	63	Unit	960.660.000	3	106.889.833	22	165.728.937	25	272.618.770	39,68 %	28,38 %	Sekretari at
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10	Unit	302.000.000	10	Unit	100.000.000	0	15.920.000	10	6.824.000	10	22.744.000	100,00 %	22,74 %	Sekretari at
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159	Unit	345.170.900	159	Unit	114.295.000	3	4.595.000	57	10.045.000	60	14.640.000	37,74 %	12,81 %	Sekretari at
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	962.783.842	2	Unit	340.327.100	2	14.543.000	0	220.116.000	2	234.659.000	100,00 %	68,95 %	Sekretari at
Rata-rata capaian kinerja (%)										1,80	10	17,80	26	19,60	7	0,75	0,33	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
10	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	persen	2.778.198.539	100	persen	452.207.000	99,25	6.388.800	0,26	75.664.000	99,51	82.052.800	99,51 %	18,14 %	Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	Meningkatnya Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100	persen	385.752.729	100	persen	54.127.900	25	3.250.000	25,00	7.890.000	50	11.140.000	50,00 %	20,58 %	Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	12	Dokumen	177.270.678	4	Dokumen	54.127.900	1	3.250.000	1	7.890.000	2	11.140.000	50,00 %	20,58 %	Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
Rata-rata capaian kinerja (%)										1,00	6	1,00	15	2,00	21	0,50	0,21	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
22	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	86	persen	112.562.648	85	persen	37.272.400	27,67	-	26,66	1.900.800	54,33	1.900.800	63,92 %	5,10 %	Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	300	300 Laporan	37.272.400	300	300 Laporan	37.272.400	83	-	80	1.900.800	163	1.900.800	54,33 %	5,10 %	Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
Rata-rata capaian kinerja (%)										83,00	-	80,00	5	163,00	5	0,54	0,05	
Predikat Kinerja										T	SR	T	SR	ST	SR	SR	SR	
12	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	100	persen	1.034.407.707	100	persen	122.913.100	29,27	500.000	34,14	31.878.500	63,41	32.378.500	63,41 %	26,34 %	Pertanian

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
23	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase inventaris potensi permasalahan pertanahan	100	persen	1.034.407.707	100	persen	122.913.100	29,27	500.000	34,14	31.878.500	63,41	32.378.500	63,41 %	26,34 %	Pertanahan
	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	41	Dokumen	44.013.100	41	Dokumen	44.013.100	6	500.000	20	6.471.000	26	6.971.000	63,41 %	15,84 %	Pertanahan
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4	Berita Acara	128.900.000	4	Berita Acara	78.900.000	1	-	1	25.407.500	2	25.407.500	50,00 %	32,20 %	Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)										3,50	0	10,50	26	14,00	13	0,57	0,24	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
13	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSETEE	Persentase koordinasi, fasilitas dan informasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria	100	persen	80.200.000	100	persen	10.000.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00 %	0,00 %	Pertanahan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	100	persen	80.200.000	100	persen	10.000.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00%	0,00%	Pertanahan
	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3	Dokumen	30.200.000	1	Dokumen	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
14	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	90,06	persen	2.111.990.900	64,12	persen	568.795.000	52,72	-	4,50	114.451.407	57,22	114.451.407	89,24%	20,12%	Pertanahan
25	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	93,19	persen	2.111.990.900	67,25	persen	568.795.000	52,72	-	4,50	114.451.407	57,22	114.451.407	85,09%	20,12%	Pertanahan
	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	200	Dokumen	795.025.000	200	Dokumen	568.795.000	61	-	29	114.451.407	90	114.451.407	45,00%	20,12%	Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)										61,00	-	29,00	20	90,00	20	0,45	0,20	
Predikat Kinerja										R	SR	SR	SR	T	SR	SR	SR	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 ()		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	
15	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	100	persen	405.220.400	100	persen	20.000.000	58,5	-	5,50	-	64	-	64,00 %	0,00 %	Pertanahan
26	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase inventarisasi aset tanah pemkab dalam satu tahun	100	persen	405.220.400	100	persen	20.000.000	58,5	-	5,50	-	64	-	64,00 %	0,00 %	Pertanahan
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	3	Laporan	30.200.000	1	Laporan	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00 %	Pertanahan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Dokumen	232.200.000	1	Dokumen	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00 %	Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									314.649.279.503		7.101.531.670		53.911.544.899		61.013.076.569			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)														15,12	19,39			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)														SR	SR			

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya adalah mempercepat proses pengadaan sehingga bisa lebih cepat menyerap anggaran. Apabila ada pekerjaan yang beresiko tidak dapat dilaksanakan dan anggaran tidak dapat diserap, maka diusulkan untuk dilakukan perubahan pekerjaan yang prioritas dilaksanakan dan penyesuaian penganggaran.

BAB III.**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN****a. Perubahan Indikator Kinerja;**

Tidak ada program, kegiatan yang mengalami perubahan indikator kinerja, dan pada sub kegiatan juga sudah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Review Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

b. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Terdapat 15 program, 26 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, diantaranya ada yang mengalami pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran.

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; dan

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut program/ kegiatannya adalah Rp 314.649.279.503,- yang dirinci seperti halnya pada Tabel 3.1., Sumber dana kegiatan tersebut ada yang berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Alasan dilakukan perubahan.

Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator, target kinerja dan jumlah kebutuhan anggaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Penyesuaian indikator dan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sesuai hasil review renstra
2. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024
3. Penyesuaian pagu indikatif karena perubahan target kinerja

Berikut adalah tabel rincian keterangan perubahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2024 :

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.725.360.000	10.838.968.400	5.113.608.400	- Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan - Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan - Penyelidikan Tanah Jalan Kabupaten - Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan - Perencanaan Teknis Jalan Desa - Perencanaan Jembatan Pada Jalan Kabupaten - Perencanaan Jembatan Pada Jalan Desa
Penggantian Jembatan	10.500.310.000	11.100.310.000	600.000.000	- Rekonstruksi Jembatan Danau Tamiyang Desa Mandikapau Kecamatan Karang Intan (Pola Karya Bakti) (Lanjutan)
Pembangunan Jalan	6.748.010.000	8.248.010.000	1.500.000.000	- Pembangunan Jalan Dusun Baringan Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan
Rekonstruksi Jalan	88.296.763.000	107.703.383.000	19.406.620.000	- Rekonstruksi Jalan Kabupaten di Desa Atiim - Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kabupaten di Desa Atiim - Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur - Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur - Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang - Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang - Rekonstruksi Ruas Jalan Balai Madu - Jembatan Bailey Kecamatan Sambung Makmur - Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Balai Madu - Jembatan Bailey Kecamatan Sambung Makmur - Rekonstruksi Jalan Jingah Habang Hilir Kecamatan Karang Intan - Pengawasan Rekonstruksi Jalan Jingah Habang Hilir Kecamatan Karang Intan - Rekonstruksi Jalan Cor Bahu Beton Wilayah Tengah

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
				- Pengawasan Rekonstruksi Jalan Cor Bahu Beton Wilayah Tengah - Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru (Lanjutan) - Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru (Lanjutan) - Rekonstruksi Tambak Sirang Kabuau - Pengawasan Rekonstruksi Tambak Sirang Kabuau
Pemeliharaan Rutin Jalan	12.118.360.849	13.790.190.849	1.671.830.000	- Operasional Unit Pemeliharaan Jalan Kabupaten - Cadangan dana tanggap darurat jalan - Operasional Unit Pemeliharaan Jalan Desa
Rehabilitasi Jalan	36.543.882.640	55.721.102.640	19.177.220.000	- Rehabilitasi Jalan Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk - Rehabilitasi Jalan Poros Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur - Rehabilitasi Jalan Karang Anyar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut - Rehabilitasi Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk - Rehabilitasi Jalan Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk - Rehabilitasi Jalan Sungai Tabuk Desa Kiram Kecamatan Karang Intan - Rehabilitasi Jalan Desa Handil Tiga Kecamatan Kertak Hanyar - Rehabilitasi Jalan Desa Abirau Kecamatan Karang Intan - Perbaikan Jalan Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk - Perbaikan Jalan Desa Aluh-aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh (Lanjutan) (Sisa Pembayaran) - Rehabilitasi Jalan Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman - Rehabilitasi Jalan Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman - Perbaikan Jalan Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-aluh (lanjutan) - Rehabilitasi Jalan Desa Guntung Ujung Handil Jawa Kecamatan Gambut

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
				- Perbaikan Jalan Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk - Perbaikan Jalan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	429.579.000	541.331.000	111.752.000	- Perencanaan Teknis Th. 2025 tanjung rema, tunggul irang, abdurrahman
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	317.009.998	565.419.998	248.410.000	- Rehabilitasi Saluran Drainase Simpang Empat Jl. Tanjung Rema - Sultan Adam Kec. Martapura - Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Simpang Empat Jl. Tanjung Rema - Sultan Adam Kec. Martapura - Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Simpang Empat Jl. Tanjung Rema - Sultan Adam Kec. Martapura
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.362.543.571	8.131.475.571	768.932.000	- Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gunung Pandan Rt.05 Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur - Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gunung Pandan Rt.05 Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur - Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gunung Pandan Rt.05 Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur - Perencanaan Teknis kantor kecamatan mataraman - Perencanaan Teknis Cindai Alus, Padang Hanyar Tungkaran - Pembangunan Saluran Drainase Jl. Veteran Desa Sungai Sipai Kec. Martapura (Lanjutan) (KPPN) - Pengawasan Saluran Drainase Jl. Veteran Desa Sungai Sipai Kec. Martapura (Lanjutan) (KPPN)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.550.000.000	1.620.000.000	70.000.000	- Swakelola Operasional dan Pemeliharaan Saluran Drainase
Pembangunan Bendung Irigasi	584.614.000	561.249.000	-23.365.000	- Penyesuaian Honorarium
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	3.908.811.000	4.024.687.000	115.876.000	- Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa TA. 2025 - Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI/DIR (swakelola)

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	164.940.000	165.400.000	460.000	- Penyesuaian Honorarium
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.236.681.000	1.233.153.000	-3.528.000	- Penyesuaian Honorarium
Normalisasi/ Restorasi Sungai	512.950.000	514.810.000	1.860.000	- Penyesuaian Honorarium
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.021.618.031	2.016.678.031	-4.940.000	- Penyesuaian Honorarium
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	297.047.000	282.011.000	-15.036.000	- Penyesuaian Honorarium dan Belanja Jasa Konsultansi
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	203.794.663	138.494.663	-65.300.000	- Pengurangan Belanja Jasa Konsultansi
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	10.175.667.000	11.510.178.500	1.334.511.500	- Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Artain Kec. Aranio (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Pinang Lama Kec. Sungai Tabuk (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lawiran Kec. Simpang Empat (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tambak Padi Kec. Beruntung Baru (Fisik 2025)

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
				- Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Asam Kec. Karang Intan (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Maniapun Kec. Pengaron (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Paring Tali Kec. Simpang Empat (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lihung Kec. Karang Intan (Fisik 2025) - Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Belimbing Baru Kec. Sungai Pinang (Fisik 2025) - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur (Fisik 2025) - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mangkauk Kec. Pengaron (Fisik 2025) - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pasar Jati Kec. Astambul (DAK 2025) - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pematang Danau Kec. Mataraman - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pindahan Baru Kec. Beruntung Baru (DAK 2025) - Perencanaan teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tatah Bangkal Kec. Tatah Makmur (DAK 2025) - Survey Investigasi Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan (DAK) Tahun 2025 Kawasan Atas - Survey Investigasi Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan (DAK) Tahun 2025 Kawasan Tengah

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	445.248.000	423.644.000	-21.604.000	- Penyesuaian Honorarium dan Belanja Barang dan Jasa
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.034.920.000	2.020.790.000	-14.130.000	- Penyesuaian Honorarium
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.583.356.300	4.801.726.300	218.370.000	- Penyesuaian Honorarium - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	491.782.300	490.182.300	-1.600.000	- Penyesuaian Honorarium
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	12.378.002.500	12.776.831.500	398.829.000	- Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2025 - Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Tahun 2025 - Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Desa Pengaron Kecamatan Pengaron Tahun 2025 - Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 - Perencanaan Teknis penyediaan sarana dan prasarana air limbah Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur Tahun 2025
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	782.230.000	791.841.500	9.611.500	- Penyesuaian Honorarium dan Belanja Barang dan Jasa
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar	47.875.610.619	50.768.492.536	2.892.881.917	- Perbaikan Kantor Kodim/1006 Banjar - Perencanaan Teknis Rehab Kantor Kodim/1006 Banjar

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Kab. Banjar - Pengawasan Teknis Pembangunan Rutan Polres - Pengawasan Teknis Rehab Kantor Kodim/1006 Banjar - Rehab Kantor Kecamatan Tatah Makmur - Rehab Kantor Desa Banua Hanyar Kec. Kertak Hanyar - Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan Martapura Timur - Rehab Kantor DPUPRP Kab. Banjar - Rehab Workshop Dinas PUPRP Kab. Banjar - Perencanaan Teknis Rehab Kantor Kecamatan Tatah Makmur - Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tatah Makmur - Perencanaan Teknis Rehab Kantor Desa Banua Hanyar Kec. Kertak Hanyar - Perencanaan Teknis Rehab Kantor DPUPRP Kab. Banjar - Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Desa Pingaran Ilir Kec. Astambul dan Desa Banua Anyar DS Kec. Astambul - Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Desa Belimbing Lama Kec. Sungai Pinang - Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Desa Jeruju Laut Kec. Tatah Makmur dan Penambahan Ruang Kantor Kecamatan Gambut - Pengawasan Teknis Rehab Kantor Kecamatan Tatah Makmur - Pengawasan Teknis Rehab Kantor Desa Banua Hanyar Kec. Kertak Hanyar - Pengawasan Teknis Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan Martapura Timur - Pengawasan Teknis Rehab Kantor DPUPRP Kab. Banjar - Pengawasan Teknis Rehab Workshop Dinas PUPRP Kab. Banjar - Pengadaan Street Furniture Pedestrian

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
				- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Desa Bunipah RT.01 dan RT.03 Kec. Aluh-aluh (Jalan Titian) - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Desa Pemurus RT.01 dan RT.03 Kec. Aluh-aluh (Jalan Titian) - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Damai Sejahtera 5 RT.03 RW.02 Desa Cindai Alus Kec. Martapura - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Desa Pemakuan RT.03 Kec. Sungai Tabuk - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Desa Gudang Tengah RT.03 Kec. Sungai Tabuk - Perbaikan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. P. Abdurahman Gg. Manunggal RT.021 RW. 007 Kel. Keraton Kec. Martapura - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl Sekumpul Raya Muhibbin Gg. Ali Imron RT.008/RW.005 Kel. Sekumpul Kec. Martapura - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. Gotong Royong Gg. Al Amin ujung Desa Sungai Sipai Martapura (KPPN) - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. SMP 3 Gg. III RT.09 RW.02 Desa Indrasari Kec. Martapura - Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Desa Benua Hanyar Kec. Kertak Hanyar - Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD-P Martapura - Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD-P Martapura - Sungai Tabuk - Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura APBD-P

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
				- Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD TA. 2025 Martapura - Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD TA. 2025 Sungai Tabuk - Kertak Hanyar - Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD-P Martapura - Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan APBD-P Martapura - Sungai Tabuk - Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura APBD-P
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	960.528.100	1.044.392.250	83.864.150	- Penyesuaian Belanja Jasa Konsultansi - Updating Inventarisasi Jalan Lingkungan Kawasan Atas Kab. Banjar - Updating Inventarisasi Jalan Lingkungan Kawasan Tengah Kab. Banjar - Updating Inventarisasi Jalan Lingkungan Kawasan Bawah Kab. Banjar - Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Atas Dinas PUPRP Kab. Banjar - Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Tengah Dinas PUPRP Kab. Banjar - Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Bawah Dinas PUPRP Kab. Banjar - Penyusunan Dokumen Lingkungan Koridor 5 A. Yani Martapura - Penyusunan Dokumen Lingkungan Etalase Kota Martapura
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	51.393.000	1.393.000	- Penyesuaian Belanja Makan dan Minum Rapat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.200.000	8.800.000	-8.400.000	- Penyesuaian Honorarium
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.351.600	780.719.600	433.368.000	- Penambahan pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang dan personal computer

Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Selisih	Keterangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.524.300.000	1.724.300.000	200.000.000	- Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.675.866	350.675.122	-50.000.744	- Pengurangan Belanja Listrik
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	412.207.000	505.082.000	92.875.000	- Perencanaan dan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) melalui SIMBG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	606.683.800	838.053.800	231.370.000	- Pendataan Informasi Geospasial Tematik - Kajian Rencana Titik Referensi Geodetik - Kajian Garis Sempadan di Kawasan Perkotaan - Pengadaan Citra Satelit
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	193.730.000	295.890.000	102.160.000	- Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Martapura (Swakelola)
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	54.127.900	122.447.900		- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	37.272.400	38.952.400		- Penyesuaian Honorarium

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan DPUPRP Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan						182.618.062.647	308.446.024.503	369.079.538.226			172.748.190.557	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						181.620.124.547	307.724.316.403	368.567.830.126			171.650.458.647	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						181.620.124.547	307.724.316.403	368.567.830.126			171.650.458.647	
65	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	85,10 %	73,00 %	84,95 %	82,30 %	85,00 %	15.445.511.838	18.388.256.054	18.964.616.310		85,05%	18.963.223.310
	1	03	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	100%	86 %	100%	60.000.000	70.000.000	70.000.000		100%	70.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000	50.000.000	51.393.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	50.000.000		
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.000.000		
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	7 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	10.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	100%	86 %	100%	9.114.010.824	10.856.721.188	10.856.721.188		100%	10.856.721.188
	1	03	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang / bulan	65 Orang / bulan	70 Orang / bulan	70 Orang / bulan	70 Orang / bulan	8.927.066.324	10.669.776.688	10.669.776.688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Orang/bulan	10.669.776.688
	1	03	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.100.000	170.100.000	170.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	170.100.000
	1	03	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.538.500	9.538.500	9.538.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	9.538.500
	1	03	01	2022	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	3.608.000	3.608.000	3.608.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Laporan	3.608.000
	1	03	01	2022	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.698.000	3.698.000	3.698.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.698.000
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	N/A	86 %	100%	17.200.000	17.200.000	17.200.000		100%	8.800.000
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	N/A	4 Laporan	4 Laporan	17.200.000	17.200.000	8.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	8.800.000
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100%	100%	105,56%	86 %	100%	50.000.000	70.000.000	70.000.000		100%	70.000.000
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	14 Orang	50.000.000	70.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Orang	70.000.000
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraa n Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	86 %	100%	1.409.742.900	2.198.951.900	2.198.951.900		100%	2.832.319.900
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	16.137.300	16.137.300	16.137.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	16.137.300
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	221.573.600	347.351.600	780.719.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	780.719.600
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	126.643.500	176.542.500	176.542.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	176.542.500
	1	03	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	44.038.500	47.820.500	47.820.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	47.820.500
	1	03	01	2.006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	171 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	72 Dokumen	67.250.000	72.000.000	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Dokumen	72.000.000
	1	03	01	2.006	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.800.000	14.800.000	14.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	14.800.000
	1	03	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	919.300.000	1.524.300.000	1.724.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.724.300.000			
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	86 %	100%	3.445.050.014	3.621.110.866	3.621.110.866		100%	3.571.110.122			
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.675.000	21.675.000	21.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	21.675.000			
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.675.014	400.675.866	350.675.122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	350.675.122			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
	1	03	01	2.008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.202.700.000	3.198.760.000	3.198.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	3.198.760.000	
	1	03	01	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	84 %	100%	1.349.508.100	1.554.272.100	1.554.272.100		100%	1.554.272.100	
	1	03	01	2.009	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.990.000	38.990.000	38.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	38.990.000	
	1	03	01	2.009	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	50 Unit	57 Unit	59 Unit	63 Unit	820.900.000	960.660.000	960.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	63 Unit	960.660.000		
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	27 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	100.000.000		
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	115 Unit	115 Unit	115 Unit	159 Unit	114.295.000	114.295.000	114.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	159 Unit	114.295.000		
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	275.323.100	340.327.100	340.327.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	340.327.100		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
66	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46,24 % 66,77 % 87,87 %	37,87 % 66,68 % 73,93 %	40,44 % 66,70 % 78,79 %	39,20 % 66,73 % 74,75 %	41,10 % 66,73 % 81,15 %	9.110.178.163	15.649.672.694	15.655.699.694		44,49% 66,75% 84,51%	17.297.884.679
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Panjang Sungai yang dikelola	1,75%	1,20%	4,01%	78,50 %	2,31%	4.594.678.163	4.272.090.694	4.272.090.694		1,75%	5.121.245.979

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
						Kabupaten/ Kota													
	1	03	02	201	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai													
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	24 KM	N/A	6 KM	2 KM	10 KM	238.556.000	1.236.681.000	1.233.153.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 KM	262.411.600	
	1	03	02	201	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai													
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	2,7 KM	0,5074 KM	15 KM	2 KM	2.5 KM	2.186.026.500	512.950.000	514.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,1 KM	2.471.729.150	
	1	03	02	201	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,15 KM	N/A	1 KM	0.15 KM	0.15 KM	1.756.061.000	2.021.618.031	2.016.678.031	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,5 KM	1.931.667.100	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota												
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210.240.000	297.047.000	282.011.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	231.264.000
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai												
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	N/A	4 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	203.794.663	203.794.663	138.494.663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	224.174.129

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	10322					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,445 %	55,69 %	62,41 %	78,50 %	69,721 %	4.515.500.000	11.377.582.000	11.377.582.000		76,083 %	12.176.638.700
	10322				0003	Pembangunan Bendung Irigasi												
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	9 Bendung	N/A	9 Bendung	4 Bendung	3 Bendung	753.800.000	584.614.000	561.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Bendung	830.000.000
	10322				0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa												
							Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	51,632 KM	54,78 KM	N/A	-	29,632 KM	0,00	6.719.217.000	6.719.217.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	14 KM	7.391.138.700
	10322				0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	45 KM	18,955 KM	16,95 KM	14 KM	14 KM	3.598.600.000	3.908.811.000	4.024.687.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 KM	3.750.000.000
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa												
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	163.100.000	164.940.000	165.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	205.500.000
67	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	100% 18,53 %	84,65 % 16,72 %	86,94 % 17,98 %	16,60 % 85,61 %	100% 18,17 %	6.778.956.950	17.239.191.300	18.756.338.800		100% 18,35%	7.648.027.414
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten	1,72%	1,56%	1,83%	78,50 %	1,60%	6.778.956.950	17.239.191.300	17.239.191.300		1,66%	7.648.027.414

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan												
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1.000 Unit	N/A	N/A	1500 Unit	1400 Unit	4.314.869.200	10.175.667.000	11.510.178.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	N/A	5.000.000.000
	1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota												
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	24 Unit	12 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	443.867.750	445.248.000	423.644.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	425.587.414
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	24 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.020.220.000	2.034.920.000	2.020.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	2.222.440.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.500 SR	N/A	350 SR	500 SR	700 SR	0,00	4.583.356.300	4.801.726.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	500 SR	0,00
68	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah Persentase Akses Sanitasi Aman Persentase Akses Sanitasi Layak	100% 10,30 % 100%	78,65 % 8,91% 78,65 %	84,95 % 9,55% 84,95 %	84,71 % 9,81% 9,23%	100% 9,81% 100%	5.300.820.000	13.652.014.800	14.058.855.300		100% 10,10% 100%	12.585.052.250
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Akses Sanitasi Layak Persentase Akses Sanitasi Aman	100% 10,30 %	78,65 % 8,91%	84,95 % 9,55%	84,71 % 9,81% 9,23%	100% 9,81%	5.300.820.000	13.652.014.800	13.652.014.800		100% 10,10%	12.585.052.250

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja												
						Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	500 SR	2 Unit	N/A	356.450.000	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	392.095.000	
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	251.500.000	491.782.300	490.182.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	276.650.000	
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat												
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.500 Rumah Tangga	N/A	N/A	280 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	3.987.320.000	12.378.002.500	12.776.831.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Rumah Tangga	11.140.202.250	
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.500 Orang	N/A	N/A	19 Orang	500 Orang	705.550.000	782.230.000	791.841.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Orang	776.105.000
69	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	53,09 %	47,26 %	49,34 %	49,31 %	50,45 %	11.140.977.198	9.708.052.569	10.899.506.569		51,62%	12.255.300.000
	1	03	06	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengurangan Genangan	71,92 %	64,76 %	67,66 %	78,50 %	69,08 %	11.140.977.198	9.708.052.569	9.708.052.569		70,50%	12.255.300.000
	1	03	06	201	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	N/A	500 Meter	350 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	874.310.000	429.579.000	541.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Sistem Drainase Perkotaan	961.800.000		
	1	03	06	201	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	N/A	500 Meter	500 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.438.662.781	317.009.998	565.419.998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.582.600.000		
	1	03	06	201	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 Sistem Drainase Perkotaan	5.435,37 Meter	9.000 Meter	3.500 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	7.241.755.717	7.362.543.571	8.131.475.571	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Sistem Drainase Perkotaan	7.966.000.000		
	1	03	06	201	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	40.362 Meter	45.000 Meter	45.000 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.586.248.700	1.598.920.000	1.661.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.744.900.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
70	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	514.707.200	452.207.000	545.082.000		100%	566.177.992
	1	03	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	8,41%	8,19%	8,25%	94526 %	8,30%	514.707.200	452.207.000	452.207.000		8,36%	566.177.992
	1	03	08	201	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung												
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4 Dokumen	N/A	N/A	2 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	44.000.000
	1	03	08	201	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	450 Dokumen	100 Dokumen	127 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	474.707.200	412.207.000	505.082.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 Dokumen	522.177.992	
71	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	87,58 % 90,00 %	83,41 % 78,00 %	84,62 % 88,93 %	85,54 % 89,29 %	85,54 % 89,29 %	31.978.935.558	48.836.138.719	51.812.884.786		86,52% 89,64%	2.952.177.435

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	51,43 % 100%	11,43 % 100%	38,57 % 88,93 %	78,50 %	42,86 % 100%	31.978.935.558	48.836.138.719	48.836.138.719		47,14% 100%	2.952.177.435
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya												
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	9 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	1500 Kawasan	3 Kawasan	31.591.865.658	47.875.610.619	50.768.492.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kawasan	2.565.097.435
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	17 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	387.069.900	960.528.100	1.044.392.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	387.080.000	
72	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,16 % 82,95 %	72,60 % 73,10 %	75,14 % 76,55 %	73,14 % 74,67 %	76,47 % 79,14 %	99.313.663.240	182.399.535.367	236.072.068.767		77,81% 81,03%	97.445.182.298
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	1,86% 1,20% 94,97 %	2,78% 2,32% 88,14 %	3,47% 2,61% 91,24 %	98,85 %	1,86% 1,20% 91,47 %	99.313.663.240	182.399.535.367	182.399.535.367		1,86% 1,20% 93,22%	97.445.182.298

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	228 Dokumen	19 Dokumen	73 Dokumen	32 Dokumen	72 Dokumen	2.687.800.000	5.725.360.000	11.098.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	78 Dokumen	2.956.580.000
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Diganti	13 Jembatan	N/A	40 Meter	40 Jembatan	3 Jembatan	7.152.560.000	10.500.310.000	11.087.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Jembatan	7.867.816.000
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan												
							Panjang Jalan yang Dibangun	10,5 KM	15 KM	20 KM	3,5 KM	3,5 KM	3.600.550.000	6.748.010.000	8.328.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,5 KM	3.960.605.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan												
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12 KM	21,73 KM	20 KM	10 KM	10 KM	16.810.480.000	82.093.508.000	108.175.613.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1 KM	18.491.528.000
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan												
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	6 KM	1 KM	2 KM	2 KM	2 KM	3.635.230.000	1.815.250.000	1.815.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 KM	3.998.753.000
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	48 Jembatan	341,5 Meter	150 Meter	200 Jembatan	24 Jembatan	6.198.405.000	5.622.965.000	5.622.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Jembatan	1.783.100.000

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
	1	03	10	2.001	0039	Rehabilitasi Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	31 Jembatan	123,6 Meter	150 Meter	60 Jembatan	18 Jembatan	8.278.253.878	9.255.433.878	9.246.923.878	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Jembatan	7.370.055.000		
	1	03	10	2.001	0040	Pembangunan Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	13 Jembatan	40 Meter	10 Meter	40 Jembatan	5 Jembatan	11.353.660.000	11.042.620.000	10.953.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jembatan	12.489.026.000		
	1	03	10	2.001	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	5.703,25 KM	6 Dokumen	9 Dokumen	9 KM	1.907,25 KM	835.400.000	847.760.000	847.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.898 KM	918.940.000		
	1	03	10	2.001	0044	Rehabilitasi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	66 KM	24,891 KM	150 Meter	22 KM	22 KM	25.187.460.000	36.543.882.640	55.028.751.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 KM	27.706.206.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan												
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	4,4 KM	10 KM	10 KM	10 KM	13.573.864.362	12.204.435.849	13.867.505.849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 KM	9.902.573.298
73	1	03	11			PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	89,00	87,33 %	87,50 %	88,00 %	88,00 %	813.593.300	472.433.800	472.433.800		88,50%	592.378.509
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	100%	14,10 %	30,00 %	88,00 %	60,00 %	630.769.500	346.715.000	346.715.000		80,00%	443.492.250
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis												
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	255 Orang	30 Orang	35 Orang	150 Orang	111 Orang	392.145.500	214.220.500	214.220.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 Orang	232.742.250

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.010 Lembaga	137 Orang	137 Orang	315 Lembaga	310 Lembaga	238.624.000	132.494.500	132.494.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Lembaga	210.750.000	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90,00 %	90,00 %	90,00 %	88,00 %	90,00 %	46.708.800	46.708.800	46.708.800		90,00%	63.725.259	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi													
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2 Perangkat Pendukung	N/A	N/A	2 Perangkat Pendukung	2 Perangkat Pendukung	25.313.600	25.313.600	25.313.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	N/A	27.845.259	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21.395.200	21.395.200	21.395.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	35.880.000
	103	11	204			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	100%	20,00 %	40,00 %	88,00 %	60,00 %	136.115.000	79.010.000	79.010.000		80,00%	85.161.000
	103	11	204	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota													
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	300 Paket Pekerjaan	2 Dokumen	50 Laporan	2 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	39.000.000	14.730.000	14.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Paket Pekerjaan	16.203.000
	103	11	204	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	110 Lembaga	N/A	N/A	45 Lembaga	30 Lembaga	97.115.000	64.280.000	64.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Lembaga	68.958.000
74	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,20 %	92,16 %	92,172 %	92,18 %	92,18 %	1.222.781.100	926.814.100	1.330.344.100		92,19%	1.345.054.760
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	100%	40,00 %	60,00 %	94526 %	80,00 %	1.126.809.800	835.413.800	835.413.800		100%	1.239.486.000
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang												
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	898.969.800	606.683.800	838.053.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	975.530.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
	103	12	201	006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota														
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	192.840.000	193.730.000	295.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	225.456.000		
	103	12	201	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Orang	200 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38.500.000		
	103	12	203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100%	100%	88,65	88,00 %	100%	58.698.900	54.127.900	54.127.900		100%	64.569.010		
	103	12	203	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara n penataan ruang	12 Dokumen	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	58.698.900	54.127.900	122.447.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	64.569.010		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
	1	03	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	86,00 %	N/A	N/A	N/A	85,00 %	37.272.400	37.272.400	37.272.400		85,50%	40.999.750		
	1	03	12	204	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	300 Laporan	N/A	N/A	300 Laporan	300 Laporan	37.272.400	37.272.400	38.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	N/A	40.999.750		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						997.938.100	721.708.100	511.708.100			1.097.731.910			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						997.938.100	721.708.100	511.708.100			1.097.731.910			
75	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pelaksanaan fasilitasi sengketa tanah	100%	100%	100%	100%	100%	172.913.100	122.913.100	122.913.100		100%	190.204.410		
	2	10	04	201		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase inventaris potensi permasalahan pertanahan	100%	100%	100%	94,526 %	100%	172.913.100	122.913.100	122.913.100		100%	190.204.410		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
	2	10	04	2.01	00	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	90 Dokumen	30 Dokumen	25 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	44.013.100	44.013.100	44.013.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Dokumen	48.414.410		
	2	10	04	2.01	00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	128.900.000	78.900.000	78.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Berita Acara	141.790.000		
76	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase koordinasi, fasilitasi dan informasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria	100%	100%	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000		100%	11.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
	2	106	2.01			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	100%	100%	100%	94,526 %	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000		100%	11.000.000
	2	106	2.01	003		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota												
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11.000.000
77	2	109				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	90,06 %	29,22 %	52,72 %	100 %	64,12 %	795.025.000	568.795.000	358.795.000		78,66%	874.527.500

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
	2	10	09	201		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	93,19 %	32,34 %	52,72 %	94,526 %	67,25 %	795.025.000	568.795.000	568.795.000		81,79%	874.527.500		
	2	10	09	201	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	200 Dokumen	214 Dokumen	700 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	795.025.000	568.795.000	358.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	N/A	874.527.500		
78	2	10	10			PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase aset tanah pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan	100%	100%	100%	100%	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000		100%	22.000.000		
	2	10	10	201		Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase inventarisasi aset tanah pemkab dalam satu tahun	100%	100%	100%	94,526 %	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000		100%	22.000.000		
	2	10	10	201	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	11.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
							Kabupaten/ Kota												
	2	10	10	2.001	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11.000.000	

BAB IV.

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan pedoman kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja 2024, pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi.

Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) dinas, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai.

Selanjutnya dokumen Perubahan Rencana Kerja 2024 ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun. Rencana kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2024

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 memuat kebijakan, program dan prioritas kegiatan pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun alokasi anggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Renja dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun secara partisipatif di bawah koordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program yang diprioritaskan dapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan sesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Banjar.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD
15. Permendagri Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6;

22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Berisikan penjelasan mengenai uraian garisbesar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan antara lain meliputi : perubahan indikator kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Pasal 3 Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Lima (5) bidang yaitu Bidang Penyediaan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Penyediaan Perumahan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil
2. Penyediaan Perumahan Swadaya
3. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman
2. Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Kajian Dampak Lingkungan
2. Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengelolaan Sampah
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Kemitraan Pengelolaan Sampah

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

2.11 EVALUASI CAPAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 76.561.600,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II belum ada realisasi anggaran dan realisasi fisik dikarenakan masih melakukan proses kontrak.

2. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 104.205.500,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II belum ada realisasi anggaran dan realisasi fisik dikarenakan masih melakukan proses kontrak.

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 9.129.500,- dengan target 100 orang. Sampai dengan triwulan II belum ada realisasi anggaran dan realisasi fisik dikarenakan masih menunggu arahan dan kesiapan masyarakat.

**KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

1. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 612.136.700,- dengan target 24 unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat direalisasikan dan akan di laksanakan di triwulan berikutnya. Faktor penghambat terealisasinya kegiatan ini adalah karena terdapat perubahan SK, maka memerlukan proses verifikasi ulang, menunggu usulan baru dari desa, dan memasukkan SK perubahan ke Bag Hukum.

**KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN**

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 49.135.800,- dengan target 50 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan II capaian realisasi fisik sebanyak 50 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.863.700,- (14%). Tercapainya target sub kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan SOP serta adanya kerjasama yang baik dalam tim. Sedangkan serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 103.703.200,- dengan target 2 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Sampai dengan triwulan

II laporan belum dapat terealisasi Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.054.950,- (13%). Tahapan pekerjaan pada triwulan II adalah Inventarisasi data perumahan yang akan dilakukan pemantauan, menyusun metodologi pekerjaan yang akan dilakukan serta menyusun jadwal kerja, dan Verifikasi lapangan terkait pembangunan perumahan Serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya tersebut dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 639.481.300,- dan target 24 unit rumah. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik dan realisasi anggaran belum terealisasi. Faktor penghambat kegiatan ini adalah terdapat nama Calon Penerima Bantuan yang sama dengan CPB DTKS Dinsos dan akan dilakukan koordinasi dengan bag. Hukum.

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA

1. Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 213.377.000,- dengan target fisik 3 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 5.042.500,- (2%), sedangkan realisasi fisik terealisasi sebanyak 1 dokumen.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Pada sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 191.310.500,- dengan target 2 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum tercapai, Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.555.000,- (1%).

3. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 35.275.000,- dengan target 5 Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Sampai dengan triwulan II telah tercapai 3 laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.550.000,- (24%). Tahapn pekerjaan pada tiwulan ini berupa Melaksanakan kegiatan sosialisasi Rencana Penanganan Dampak Sosiasl Kemasyarakatan, hanya saja untuk realisasi keuangan baru dimasukkan pada bulan Juli.

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 284.639.500,- dan target 2 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum dapat tercapai, sedangkan realisasi angaran sebesar Rp. 2.102.500,- (0,7%).

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.482.969.800,- dan target 2,4 Ha Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar. Sampai dengan triwulan II luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar belum terealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.650.000,- (6%). Hal ini dikarenakan cuaca tidak menentu, seringkali hujan menjadi faktor terkendalanya pekerjaan fisik.

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

1. Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.243.916.500,- dan target 11 Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. Sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini sedang dalam tahap pelaksanaan perencanaan pekerjaan fisik untuk peningkatan kualitas PSU dan persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan kontruksi yang akan dilaksanakan. Sedangkan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 269.779.000,- (4%).

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan II target belum terealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.250.700,-. Faktor penghambat realisasi kinerja dikarenakan masih menunggu Jadwal Penetapan Bantuan Penyediaan / Peningkatan PSU Perumahan oleh pusat.

3. Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 329.816.500,- dan target 30 laporan. Sampai dengan triwulan II tlah tercapai 14 laporan dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 6.088.900,- (2%). Faktor pendorong tercapainya realisasi sebanyak 14 laporan di dukung oleh banyaknya Permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang kepada PEMDA untuk verifikasi.

4. Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 20.690.637.184,- dan target 15 dokumen. Pada triwulan II telah tercapai 9 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.501.928.776,- (41%). Aktivitas kegiatan adalah melakukan pasang baru PJU/PJL serta perbaikan pju/pjl sesuai laporan yang masuk dari masyarakat dan ada yang Masih dalam Perencanaan tahap konsolidasi (yang masuk kategori konsolidasi).

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 138.206.600,- dan target 1 Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan II realiasi fisik kegiatan telah aktivitas kegiatan yang telah dilakukan berupa Rapat Ekspose akhir Penyusunan Dokumen IKPLHD pada tanggal 14 Juni 2024 dan Pengumpulan dan pengolahan Data dalam Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Banjar, Penyampaian Dokumen Final IKPLHD ke DLH Provinsi untuk divalidasi dan memperoleh Rekomendasi serta Penyampaian Dokumen IKPLHD ke KLHK (Penyusunan Dokumen IKPLHD dinyatakan selesai 100%). Factor pendorong tercapainya realisasi kegiatan adalah adanya Dukungan Penuh Pimpinan dan tim teknis yang berpegalaman dalam penyusunan dokumen IKPLHD, serta bimbingan tim dari Provinsi dan Pusat.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 204.550.000,- dan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah tercapai 1 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.576.900,- (98%). Aktivitas kegiatan berupa Menyiapkan Kelengkapan SPJ Honorium Tenaga Ahli dan PPK Penyusunan Dokumen

KLHS RPJMD dan Persiapan Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerjasama yang akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2024 (Pekerjaan Dokumen Sudah Terlaksana 100%). Factor pendorong kegiatan adalah adanya Dukungan Penuh Pimpinan serta tim teknis yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen KLHS.

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 86.028.000,- dan target 35 kegiatan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah mencapai 21 kegiatan. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 17.307.000,- (20%). Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja adalah Adanya laporan RKL-RPL dan Aplikasi SIMPEL KLHK dan Pembinaan dan pemantauan perusahaan Non Proper serta pembuatan akun Apatar dan SIMPEL KLHK.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 13.008.500,- dan target 1 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik dan keuangan belum dapat tercapai. Factor yang menghambat realisasi kegiatan dikarenakan masih dalam proses permintaan penambahan anggaran pada perubahan anggaran.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 115.780.000,- dan target 19 lokasi Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut). Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah mencapai 19 lokasi. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 11.980.000,- (10%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya Bimtek dan Sosialisasi dari KLHK untuk aplikasi IKLH dan IRLH dan Bimtek pemantauan kualitas udara metode passive sampler oleh KLHK.

4. Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 202.104.000,- dan target 1 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah tercapai, sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 181.404.000,- (90%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan adalah kondisi alat baik dan hasil kalibrasi bagus. Aktivitas kegiatan berupa Maintenance dan kalibrasi rutin untuk alat onlino serta visit I oleh Teknisi Vendor alat.

5. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 310.104.828,- dan target 35 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan. Sampai dengan triwulan II target fisik telah tercapai 17 dokumen sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.583.140 (28%). Tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan berupa pengujian & sampling parameter lingkungan. Faktor yang mendorong keberhasilan capaian kegiatan adalah tersedianya peralatan, bahan kimia, SDM, dan fasilitas pendukung lainnya.

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 82.667.500,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan II target fisik 1 laporan belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.175.000,- (46%). Aktivitas kegiatan yang sedang dijalankan berupa menyiapkan bahan untuk sosialisasi lanjutan.

KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 37.270.000,- dan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II target fisik belum dapat terlaksana sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.385.000,- (41%). Tahapan pekerjaan yang telah dilakukan adalah Melakukan Giat bersih di desa pilot proyek.

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa 3,7 Ha Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 107.958.724,- . Sampai dengan triwulan II luas kawasan hutan yang dikelola mencapai 3,7 Ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.41.000,-. Tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Rapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pestisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pupuk organik dan NPK untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan obat-obatan insectisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembayaran listrik untuk rumah penjaga Taman

Kehati dan Gudang,Memproses pembelian Gazebo / Ruang Pertemuan Terbuka, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

2. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Sub kegiatan ini memiliki target 15,79 Ha Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dan memiliki anggaran sebesar Rp. 3.715.620.550,-. Realisasi luas RTH yang dikelola mencapai tercapai 15,79 Ha dengan realisasi anggaran Rp. 1.509.305.286,- (40%). Tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan RTH, Rapat pelaksanaan kegiatan RTH, Memproses pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, Memproses pembelian bahan pupuk organik, sekam bakar, dan NPK, Memproses pembelian tanah humus, Memproses pengadaan peralatan sarana/prasarana petugas kebersihan, Memproses pembelian ATK untuk kegiatan RTH, Memproses pembayaran jaminan kesehatan petugas kebersihan, Memproses pembayaran jaminan kecelakaan petugas kebersihan, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

3. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 96.186.000,- dengan target 2,5 Ha Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik tercapai 100% yaitu 2,5 Ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.896.000,- (51%). Tahap pekerjaan di triwulan II berupa : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Rapat pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Melakukan pemeliharaan hutan kota, Melakukan penanaman bersama manis, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan Mendokumentasikan kegiatan. Factor pendorong tercapainya realisasi kegiatan karena adanya usulan/permintaan penanaman oleh masyarakat.

4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja 30 Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman dengan anggaran sebesar Rp. 60.750.500,-. Sampai dengan triwulan II target telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.830.500,- (52%). Faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini karena Kooperatifnya pegiat Proklam di lokasi Proklam dan tahap pekerjaan sampai dengan triwulan II antara lain Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan PROKLIM, Pendampingan Kampung Iklim, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 117.368.000 dan target 1 dokumen Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.303.000,- (12%). Aktivitas kegiatan berupa Melaksanakan pembagian surat untuk pelaporan semester pengelolaan limbah B3 kepada pelaku usaha.

2. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 63.733.400,- dan target 1 Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 17.011.950,- (27%). Aktivitas kegiatan berupa Menunggu hasil tindak lanjut dari PT. Hero Supermarket, Tbk s.d. tanggal 09 Juli 2024, PT. Intraco Penta, Tbk. s.d. tanggal 18 Juli 2024, dan PT. Lintas Garda Mitra Gemilang s.d. tanggal 18 Juli 2024.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 96.737.800,- dan target 15 dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Sampai dengan triwulan II target fisik telah terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.078.000,- (12%). Tahapan pekerjaan pada triwulan II antara lain Tindak lanjut pengawasan kepada PT. Sumber Berlian Motor dan Rapat internal bidang P3KLH bersama seksi Gakkum. Faktor yang mendorong kegiatan ini adalah rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk memiliki dokumen dan mengelola lingkungan hidup.

2. Sub Kegiatan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 32.978.000,- dan target 2 PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum tercapai dan realisasi anggaran sebesar Rp. 718.000,-. Factor yang menghambat realisasi kegiatan adalah Belum adanya jadwal terkait bimtek pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan target 3 orang PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik dan anggaran belum dapat di realisasikan dan akan di realisasikan di triwulan berikutnya.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 36.276.900,- dan target 30 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Sampai dengan triwulan II jumlah laporan terealisasi sebanyak 20. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.023.000,- (30%). Faktor yang mendorong realisasi kegiatan adalah Jadwal Kegiatan Rutin yang harus dilaksanakan sesuai dengan target. Sedangkan Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Tahapan pekerjaan kegiatan ini berupa 1. Membuat surat Pemberitahuan tentang pengawasan ke perusahaan yang akan diawasi 2. Membuar SPT dan SPPD 3. pengawasan ke PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo dan Cv. Benteng Asia Sejahtera.

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANGTERKAIT DENGAN PPLH
KEGIATAN PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 123.006.000,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan tiwulan II kegiatan fisik belum tercapai dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.374.000,- (4%). Faktor penghambat kegiatan adalah kurangnya sinergitas dalam hal koordinasi dan komunikasi oleh setiap lini baik dari Dinas PRKPLH yang dinaungi oleh Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Dinas/ Lembaga terkait yang berhubungan dengan konsentrasi terhadap pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Jasa Konsultan dan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 169.702.200,- dengan target 1 dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.169.000,- (37%). Factor penghambat tercapainya realisasi kegiatan adalah bila tidak tercapainya kinerja dan upaya mengatasi permasalahan, Tidak semua sekolah dapat dilakukannya pendampingan maupun sosialisasi karena jarak tempuh sekolah yang jauh, kondisi lingkungan yang kurang memadai dan keterbatasan SDM ditiap sekolah, selain itu perlu adanya motivasi yang lebih disetiap sekolah dan warga sekolah untuk terus berpartisipasi pada gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah.

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

**KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 54.353.500,- dengan target 10 pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik tercapai sebanyak 3 dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 18.233.000,- (34%). Faktor penghambat kegiatan berupa tidak adanya sosialisasi tentang tata cara pengaduan ke masyarakat.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 28.240.000,- dengan target 5 sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan II 2 perkara telah dapat ditangani dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.615.000,- (23%). Faktor cuaca yg ekstrim serta medan untuk menuju lokasi sangat berat dan sulit menjadi factor penghambat keberhasilan kinerja.

3. Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.935.000,- dengan target 5 penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik belum dapat tercapai dengan realisasi anggaran Rp. 1.515.000,- (17%). Faktor penghambat kegiatan berupa faktor cuaca dan lambatnya proses pengumpulan data dari pengadu.

**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan target 1 dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik dan anggaran belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan masih dalam proses Menyelesaikan dokumen kepuasan masyarakat, Merancang perubahan UU perda dan Merancang perubahan Jakstrada

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.328.453.100,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan II 33750 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.323.741.101,- (47%). Faktor penghambat kegiatan adalah masih kurangnya armada angkutan sampah, sampai saat ini baru bisa melayani 13 kecamatan dari 20 kecamatan.

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 586.319.000,- dan memiliki target 4 kelompok Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Sampai dengan triwulan II kegiatan fisik telah tercapai 4 kelompok masyarakat (100%) dengan realisasi anggaran Rp. 342.962.000,- (58%). Faktor pendorong kegiatan dikarenakan Jadwal Kegiatan Rutin yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan target serta kerja sama yang baik dengan pihak aparat desa sehingga sosialisasi dapat terlaksana. Pada triwulan II tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, Melaksanakan Sosialisasi Tentang Sampah di Desa Bawahan Pasar Kec. Mataraman, Melaksanakan Sosialisasi Tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Bawahan Selan

Kec. Mataraman dan Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Balai Desa Banua Anyar DS Kec. Astambul serta Musyawarah perencanaan dan penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Antasan Senior.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.156.062.999,- dan target 20 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah tercapai 4 unit sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 516.390.330,- (24%). Faktor penghambat kegiatan adalah Terbatasnya lahan yang strategis untuk pembangunan TPS dan lokasi wilayah yang luas membutuhkan waktu.

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH BLUD INTAN HIJAU
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan target 1 dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 508.036.203 (68%). Aktivitas kegiatan berupa Penanganan sampah di perusahaan-perusahaan yang berkerjasama dengan BLUD Intan Hijau.

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.865.776.500,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Sampai dengan triwulan II 27375 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.921.090.148,- (50%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi alat berat sering mengalami kerusakan sehingga menghambat waktu penanganan/penataan sampah.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.200.387.000,- dan target 6 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik telah tercapai 5 unit sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 219.600.000,- (10%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah.

Berdasarkan uraian evaluasi capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan diatas belum menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hal itu dikarenakan hasil evaluasi renja yang dihasilkan hanya sampai dengan triwulan II dimana kegiatan-kegiatan masih dalam proses pengerjaan hingga triwulan IV. Sedangkan untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi, telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah menyesuaikan dengan rencana aksi yang dibuat oleh bidang pengampu program kegiatan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan II tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
PROGRAM PENDUKUNG														
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	18.348.400.740	6.662.579.568	50%	36%	50%	150%	150%
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	18.348.400.740	6.662.579.568	50%	36%	50%	150%	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	35.056.900	9.117.700	50%	26%	50%	150%	150%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	27	2	3.000.000	1.177.500	1	39%	50%	28	255%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	2.500.000	0	0	0%	0%	1	20%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1.999.700	617.600	0	31%	0%	1	20%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	2.499.600	2.497.600	1	100%	100%	2	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1.999.700	0	0	0%	0%	1	20%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	4.999.800	0	1	0%	33%	4	27%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	16	16	18.058.100	4.825.000	8	27%	50%	24	30%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	10.627.018.257	3.895.281.765	50%	37%	50%	150%	150%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	87	88	10.247.615.757	3.789.301.465	87	37%	99%	174	187%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	13	354.030.000	102.070.000	5	29%	38%	18	138%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	7.023.000	0	0	0%	0%	1	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	16	8.366.500	0	7	0%	44%	23	144%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	13	13	9.983.000	3.910.300	6	39%	46%	19	146%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	100%	50.000.000	48.000.000	100%	96%	100%	200%	200%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18	12	5	50.000.000	48.000.000	7	96%	140%	19	106%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.505.591.001	664.519.062	50%	44%	50%	150%	150%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	10	7	100.526.568	48.342.000	2	48%	29%	9	30%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	9	43	405.770.500	84.399.000	5	21%	12%	48	240%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	7	2	4.997.000	1.460.000	2	29%	100%	4	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	19	18	16.995.000	5.865.200	2	35%	11%	20	500%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	8	4	7.499.600	2.152.500	2	29%	50%	6	30%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15	4	2	18.000.000	2.100.000	3	12%	150%	5	33%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	10	5	5.010.000	720.000	3	14%	60%	8	20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1070	419	946.792.333	628.837.607	304	66%	73%	723	161%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	1.986.478.000	51.180.000	50%	3%	50%	150%	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1	1.986.478.000	51.180.000	0	3%	0%	1	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	100%	3.537.994.182	1.756.645.313	50%	50%	50%	150%	150%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	24	12	2.000.000	700.000	5	35%	42%	29	48%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	12	292.984.182	73.382.929	7	25%	58%	13	108%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	12	12	3.243.010.000	1.682.562.384	11	52%	92%	23	153%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%	606.262.400	237.835.728	50%	39%	50%	150%	150%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	41.719.300	5.991.805	1	14%	100%	2	200%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	33	36	416.954.000	141.555.223	46	34%	128%	79	293%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	90	85	60.568.100	8.176.700	9	14%	11%	99	141%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	87.021.000	82.112.000	1	94%	100%	2	200%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	Meningkatnya Perumahan yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni			97,45%	97,69%	98,02 %	1.594.353.600	38.573.150	0	2%	0%	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	100%	100%	100%	954.872.300	22.648.150	50%	2%	50%	100%	100%
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100%	100%	100%	180.767.100	0	50%	0%	50%	100%	100%
			Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3		1	76.561.600	0	0	0%	0%	0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	1	1	104.205.500	0	0	0%	0%	0	0%
			Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	100%		100%	9.129.500	0	50%	0%	50%	50%	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	400		100	9.129.500	0	0	0%	0%	0	0%
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100%	612.136.700	2.729.500	50%	0,45%	50%	100%	100%
			SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	49	25	24	612.136.700	2.729.500	0	0,45%	0%	25	51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	100%	100%	100%	152.839.000	19.918.650	50%	13%	50%	100%	100%
			SubKegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	250	209	50	49.135.800	6.863.700	50	14%	100%	259	104%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6	2	2	103.703.200	13.054.950	0	13%	0%	2	33%
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,89%	94.89%	22,78 %	639.481.300	15.925.000	11,39	2%	50%	0%	0%
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100	639.481.300	15.925.000	50	2%	50%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	74	29	24	639.481.300	15.925.000	0	2%	0%	29	39%
		Persentase PSU yang memadai			100%	100%	100%	27.279.370.184	8.782.047.376	50%	32%	50%	100%	100%
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	21,71%	22,58%	21.33	27.279.370.184	8.782.047.376	10,665	32%	50%	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100%	100%	100%	27.279.370.184	8.782.047.376	50%	32%	50%	100%	100%
			SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	34	32	11	6.243.916.500	269.779.000	0	4%	0%	32	94%
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	2	1	15.000.000	4.250.700	0	28%	0%	2	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	120	30	30	329.816.500	6.088.900	14	2%	47%	44	37%
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	110	30	15	20.690.637.184	8.501.928.776	9	41%	60%	39	35%
2	Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase Kawasan Kumuh			89,20%	84.74%	82,76%	3.207.571.800	169.900.000	45,295	5%	50%	86,67%	97%
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	30,23%	15.26%	20.23	3.207.571.800	169.900.000	10,115	5%	50%	13%	44%
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	23	8	5	439.962.500	16.147.500	0	4%	0%	300%	13%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9	3	3	213.377.000	5.042.500	1	2%	33%	4	44%
			Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5	2	2	191.310.500	2.555.000	0	1%	0%	2	40%
			SubKegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25	9	5	35.275.000	8.550.000	3	24%	60%	12	48%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	37,2	30,98	2,4	2.767.609.300	153.752.500	1,2	6%	50%	27,61	74%
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	25	10	2	284.639.500	2.102.500	0	1%	0%	10	40%
			SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	10	2.78	2.4	2.482.969.800	151.650.000	0	6%	0%	2,78	28%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)			50,6	58.8	50.40	846.962.828	351.834.140	0	42%	0%	51	101%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			77,23	92.68	77.03			0		0%	88	114%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			58,78	54.69	56.78			0		0%	0	0%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	5,1	58.8	5.2	846.962.828	351.834.140	0	42%	0%	2,87	56%
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	50,6	58.8	50.4	727.025.328	298.274.140	0	41%	0%	50,93	101%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Indeks Kualitas Udara	77,23	92.68	77.03			0		0%	87,9	114%
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	175	55	35	86.028.000	17.307.000	21	20%	60%	76	43%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5	2	1	13.008.500	0	0	0%	0%	2	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			19	115.780.000	11980000	19	10%	100%	19	
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan			1	202.104.000	181404000	1	90%	100%	1	100%
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	175	50	35	310.104.828	87.583.140	17	28%	49%	67	38%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100%	100%	100%	82.667.500	38.175.000	50%	46%	50%	100%	100%
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	3	1	82.667.500	38.175.000	0	46%	0%	3	25%
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100%	37.270.000	15.385.000	50%	41%	50%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	1	1	37.270.000	15.385.000	0	41%	0%	1	100%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	100%	3.980.515.774	1.603.072.786	50%	40%	50%	137%	137%
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	100%	3.980.515.774	1.603.072.786	50%	40%	50%	137%	137%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,7	3,7	3.7	107.958.724	12.041.000	3.70	11%	100%	3,7	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24,82	16,64	15.79	3.715.620.550	1.509.305.286	15.79	41%	100%	15,79	100%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,5	2,5	2,5	96.186.000	49.896.000	2,5	52%	100%	2,5	100%
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50	30	30	60.750.500	31.830.500	30	52%	100%	60	120%
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	100%	100%	342.756.600	208.600.700	50%	61%	50%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	138.206.600	8.023.800	50%	6%	50%	100%	100%
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5	2	1	138.206.600	8.023.800	1	6%	100%	3	60%
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	100%	100%	100%	204.550.000	200.576.900	100%	98%	100%	100%	100%
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	1	204.550.000	200.576.900	1	98%	100%	1	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
4	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Petaan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH			100%	100%	100%	462.643.520	107.156.500	50%	23%	50%	100	100%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	78.406.820	12.250.500	50%	16%	50%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	210.992.700	23.819.000	50%	11%	50%	100%	100%
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	75	72	15	96.737.800	12.078.000	3	12%	20%	75	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD			2	32.978.000	718.000	0	2%	0%	0	0%
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	2	3	45.000.000	0	0	0%	0%	2	50%
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150	60	30	36.276.900	11.023.000	20	30%	67%	80	53%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	100%	100%	100%	91.528.500	26.363.000	50%	29%	50%	156%	156%
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	91.528.500	26.363.000	50%	29%	50%	156%	156%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	13	10	54.353.500	18.233.000	3	34%	30%	16	32%
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			5	28.240.000	6.615.000	2	23%	40%	2	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota			5	8.935.000	1.515.000	0	17%	0%	0	0%
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	100%	50%	75%	123.006.000	5.374.000	37,5%	4%	50,0%	87,5%	88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	100%	50%	75%	123.006.000	5.374.000	37,5%	4%	50,0%	87,5%	87,5%
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	2	1	123.006.000	5.374.000	0	4%	0%	2	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	45%	30%	35%	169.702.200	63.169.000	0%	37%	0%	30%	67%
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	90%	30%	65%	169.702.200	63.169.000	0%	37%	0%	30%	33%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	2	1	169.702.200	63.169.000	0	37%	0%	2	40%
5	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani			70%	69.34%	71%	24.916.998.599	9.917.737.998	36%	40%	36%	0	0%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30%	24.2%	24.30 %	18.100.835.099	7.269.011.647	12,15 %	40%	50,00 %	0,00%	0,00%
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	24.2%	24.30	18.100.835.099	7.218.802.647	5,45%	40%	0%	0%	0%
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	61.57%	61.50			16,08 %		0%	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65.700	85519.5	65.700	15.328.453.100	7.323.471.101	33.750	48%	51%	119269	182%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			1	30.000.000	0	0	0%	0%	0	0%

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30%	24.2%	24.30 %	6.816.163.500	2.648.726.351		39%		0	0
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	24.2%	24.30	6.816.163.500	2.648.726.351		39%		0	0
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	61.57%	61.50						0	0
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	27	9	6	2.200.387.000	219.600.000	5	10%	83%	14	52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	131400	7200	65700	3.865.776.500	1.921.090.148	27375	50%	42%	34575	26%
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3		1	750.000.000	508.036.203	1	68%	100%	1	33%
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100%	100%	100%	181.101.400	31.314.950	50%	17%	50%	150%	150%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Tahun 2024	Pagu Tahunan 2024	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			B3)											
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	58%	58%	60%	181.101.400	31.314.950	29%	17%	50%	87%	150%
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	2	1	117.368.000	14.303.000	0	12%	0%	2	40%
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan	5	2	1	63.733.400	17.011.950	0	27%	0%	2	40%

[illegible]

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2023 terdiri dari :

Program utama yang dilaksanakan tahun 2024 meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring dari kegiatan penyediaan perumahan baik perumahan umum maupun perumahan swadaya. Pada program ini diarahkan untuk melakukan koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu juga menyusun dan mensosialisasikan beberapa kebijakan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman kepada stakeholder dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memfasilitasi penyediaan perumahan untuk menempati rumah layak huni serta meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan. Serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan terhadap usulan peningkatan kualitas perumahan pada masyarakat, memfasilitasi proses permohonan persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan siteplan untuk mendukung proses perizinan pembangunan perumahan yang cepat, efektif dan efisien.

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini terdiri dari 1 kegiatan untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota berupa perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mengampu 1 kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan meliputi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan dan melaksanakan verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang serta melakukan kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan.

4. Program Kawasan Permukiman

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman yang kumuh, menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh serta penyadaran publik terkait dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. kegiatan lain yang dilakukan terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki 3 kegiatan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan

pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut. Selain itu juga melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Kegiatan lain untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan pada masyarakat serta pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi.

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pengelolaan taman diluar kawasan hutan, pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman lainnya serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten dan menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis meliputi pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS sesuai RPJPD/RPJMD.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini mengampu 1 kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan mendampingi gerakan peduli lingkungan hidup.

9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini memiliki 1 kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak mha yang terkait dengan PPLH dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri 1 kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan serta pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pplh kabupaten/kota.

11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melakukan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengembangan kapasitas pejabat pengawas, dan melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

12. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota, pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota. serta penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota yang dilaksanakan di UPT Persampahan.

13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyimpanan sementara limbah b3 dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

Sedangkan Program rutin/penunjang lainnya yang dilaksanakan tahun 2024 ini antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Kegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 kegiatan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Kegiatan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Kegiatan
5. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 kegiatan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	100%	76	18.348.400.740	1.816.307.741	- 416.674.290	19.748.034.191
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	35.056.900	0	0	35.056.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3.000.000			3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	2.500.000			2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	1.999.700			1.999.700

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	2.499.600			2.499.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	1.999.700			1.999.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	4.999.800			4.999.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	18.058.100			18.058.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	10.627.018.257	0	-178.060.000	10.448.958.257

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	88	10.247.615.757			10.247.615.757
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	354.030.000		-178.060.000	175.970.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.023.000			7.023.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	8.366.500			8.366.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	13	9.983.000			9.983.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	50.000.000	0	0	50.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	50.000.000			50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.505.591.001	1.216.131.741	0	2.721.722.742
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	100.526.568			100.526.568

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43	45	405.770.500	538.766.545		944.537.045
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	4	4.997.000	4.964.500		9.961.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	20	16.995.000	8.152.500		25.147.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	7.499.600	3.790.000		11.289.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	18.000.000			18.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	10	5.010.000	5.010.000		10.020.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419	600	946.792.333	655.448.196		1.602.240.529

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.986.478.000	550.000.000	-129.854.000	2.406.624.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1.986.478.000		-129.854.000	1.856.624.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1	1		550.000.000		550.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	3.537.994.182	0	-50.000.744	3.487.993.438
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.000.000			2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	292.984.182		-50.000.744	242.983.438

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.243.010.000			3.243.010.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	606.262.400	50.176.000	-58.759.546	597.678.854
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	41.719.300			41.719.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	33	416.954.000		-58.759.546	358.194.454
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	85	60.568.100			60.568.100

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	87.021.000	50.176.000		137.197.000
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	100%	100%	954.872.300	0	-25.345.500	929.526.800
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100%	100%	180.767.100	0	0	180.767.100
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	76.561.600			76.561.600

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	104.205.500			104.205.500
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	100%	100%	9.129.500	0	0	9.129.500
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	9.129.500			9.129.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	612.136.700	0	0	612.136.700
SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	24	24	612.136.700			612.136.700
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	100%	100%	152.839.000	0	-25.345.500	127.493.500
SubKegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50	50	49.135.800		-16.775.000	32.360.800

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2	1	103.703.200		-8.570.500	95.132.700
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,78%	22,78%	639.481.300	463.150.000	0	1.102.631.300
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100	100	639.481.300	463.150.000	0	1.102.631.300
SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24	41	639.481.300	463.150.000		1.102.631.300

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	21.33	24	27.279.370.184	5.323.730.000	-91.206.000	32.511.894.184
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100	100	27.279.370.184	5.323.730.000	-91.206.000	32.511.894.184
SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11	28	6.243.916.500	2.508.501.000		8.752.417.500
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	15.000.000	0		15.000.000
SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	30	20	329.816.500		-91.206.000	238.610.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	15	15	20.690.637.184	2.815.229.000		23.505.866.184
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	20.23	20.23	3.207.571.800	0	-1.000	3.207.570.800
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	5	5	439.962.500	0	0	439.962.500
SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3	3	213.377.000			213.377.000
Penyusunan/Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si	2	2	191.310.500			191.310.500
SubKegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5	5	35.275.000			35.275.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,4	2,4	2.767.609.300	0	-1.000	2.767.608.300
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2	2	284.639.500		-1.000	284.638.500
SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	2.4	2.4	2.482.969.800			2.482.969.800
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	Tingkat Pencemaran Air	5.2	5.2	846.962.828	1.165.281.516		2.012.244.344
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	50.4	50.4	727.025.328	1.165.281.516	0	1.892.306.844
	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	77.03	77.03				

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	35	35	86.028.000			86.028.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	1	13.008.500	51.745.000		64.753.500
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19	19	115.780.000	0		115.780.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1	1	202.104.000	4.290.000		206.394.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	35	35	310.104.828	1.109.246.516		1.419.351.344
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100%	100%	82.667.500	0	0	82.667.500
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	82.667.500			82.667.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	37.270.000	0	0	37.270.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	1	37.270.000			37.270.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	3.980.515.774	3.309.324.600		7.289.840.374
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	3.980.515.774	3.309.324.600	0	7.289.840.374
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.7	3.7	107.958.724	1.960.000		109.918.724

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15.79	15.79	3.715.620.550	3.255.464.600		6.971.085.150
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,5	2,5	96.186.000	51.900.000		148.086.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30	30	60.750.500	0		60.750.500
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	100%	342.756.600		-13.647.000	329.109.600
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	138.206.600		-13.647.000	124.559.600

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	138.206.600		-13.647.000	124.559.600
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	100%	100%	204.550.000	0	0	204.550.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	204.550.000			204.550.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	210.992.700	2.977.800	-33.428.000	180.542.500
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	210.992.700	2.977.800	-33.428.000	180.542.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	15	96.737.800		-30.450.000	66.287.800
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2	2	32.978.000		-2.978.000	30.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3	3	45.000.000		0	45.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	30	36.276.900	2.977.800		39.254.700

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	100%	100%	91.528.500	0	-48.297.000	43.231.500
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	91.528.500		-48.297.000	43.231.500
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	5	54.353.500		-26.917.000	27.436.500

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	3	28.240.000		-16.380.000	11.860.000
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	1	8.935.000		-5.000.000	3.935.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	75%	100%	123.006.000		-14.990.250	108.015.750
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	75%	100%	123.006.000		-14.990.250	108.015.750

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	123.006.000		-14.990.250	108.015.750
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	35%	100%	169.702.200	0	-200	169.702.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	65%	100%	169.702.200	0	-200	169.702.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	169.702.200		-200	169.702.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24.30%	24.30%	18.100.835.099	2.023.565.079	-86.200.000	20.038.200.178
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24.30	24.30	18.100.835.099	2.023.565.079	-86.200.000	20.038.200.178
	Persentase Sampah Yang Ditangani	Persentase Sampah Yang Ditangani	61.50	61.50				
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65.700	65.700	15.328.453.100		-86.200.000	15.242.253.100

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	30.000.000	20.379.000		50.379.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeloaaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20	20	2.156.062.999	1.840.486.079		3.996.549.078
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	4	586.319.000	162.700.000		749.019.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau								
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24.30%	28%	6.816.163.500	2.689.649.608	0	9.505.813.108
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24.30	24.30	6.816.163.500	2.689.649.608	0	9.505.813.108
	Persentase Sampah Yang Ditangani	Persentase Sampah Yang Ditangani	61.50	61.50				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6	6	2.200.387.000	2.200.000.000		4.400.387.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700	65700	3.865.776.500	160.100.000		4.025.876.500
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	1	750.000.000	329.549.608		1.079.549.608
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100%	100%	181.101.400		-19.547.100	161.554.300
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	60%	100%	181.101.400		-19.547.100	161.554.300

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2024		SEBELUM PERUBAHAN	DEBET	KREDIT	SETELAH PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	117.368.000		-19.547.100	97.820.900
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	63.733.400			63.733.400

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2024 kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 81.293.260.925,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 97.337.910.929,- anggaran ini sudah termasuk anggaran untuk UPT Persampahan BLUD Intan Hijau. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 354.030.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 175.970.000,- yang berkurang sebesar Rp. 178.060.000,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan anggaran dipindah ke kegiatan lain.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.505.591.001,- bertambah sebesar Rp. 1.216.131.741,- menjadi Rp. 2.721.722.742,-. Tambahan anggaran digunakan untuk penambahan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD .
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1986.478.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 2.406.624.000,-, anggaran tersebut bertambah sebesar Rp. 550.000.000,- untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan pengurangan sebesar Rp. 129.854.000 dari pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 6.243.916.500,- mengalami penambahan sebesar Rp. 2.508.501.000,- menjadi Rp. 8.752.417.500,- . Penambahan anggaran dikarenakan bertambahnya target lokasi perumahan yg disediakan PSU dari 11 lokasi menjadi 28 lokasi.
5. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman. Sub kegiatan ini

memiliki pagu awal sebesar Rp. 20.690.637.184,- mengalami penambahan sebesar Rp. 2.815.229.000,- menjadi Rp. 23.505.866.184,-. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk penambahan jaringan listrik di Kec. Astambul, Kec. Karang Intan, Kec. Sungai Tabuk, Kec. Tatah Makmur, taman pendopo, Kec. Sungai Pinang, Ke. Martapura Timur, Kec. Sambung Makmur dan untuk pemeliharaan PJU.

6. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 13.008.500,- mengalami penambahan sebesar Rp. 51.745.000,- menjadi Rp. 64.753.500,-. Penambahan anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca.
7. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 310.104.828,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.109.246.516,- menjadi Rp. 1.419.351.344,-. Tambahan anggaran digunakan untuk belanja modal alat lab lingkungan hidup.
8. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 3.715.620.550,- mengalami penambahan sebesar Rp. 3.255.464.600,- menjadi Rp. 6.971.085.150,-. Tambahan anggaran digunakan untuk biaya pemeliharaan rehab taman Albasia, rehab taman Median jalan, RBRA Kompas Manis, Pembuatan kolam dan taman mahligai sultan Adam, pembuatan kolam Ikan halaman Kantor DPRKPLH, belanja kendaraan roda 3, roda 4 (pick up), bahan bakar dan usulan penambahan belanja jasa perencanaan dan pengawas
9. Kegiatan pengelolaan sampah Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 2.156.062.999,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.840.486.079,- menjadi Rp. 3.996.549.078,-. Penambahan anggaran digunakan untuk pembelian mesin pemilah sampah, pembangunan TPS di Kec. Martapura Kota,

Kec. Astambul, Kec. Karang Intan, Kec. Gambut, Kec. Mataraman, jasa konsultan pengawas, rehab TPS3R, rehab POOL Armada kebersihan, dan pembangunan rumah Magot.

10. Kegiatan pengelolaan sampah Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 586.319.000,- mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 162.700.000,- menjadi Rp. 749.019.000,-. Tambahan anggaran digunakan untuk pembelian bahan cetak, Makan Minup Operasional lapangan Koordinasi Pembentukan KSM dan Bank Sampah, dan Honorarium Rakor Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Sampah.
11. BLUD – Intan Hijau Kegiatan pengelolaan sampah Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 2.200.387.000,- mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.200.000.000,- menjadi Rp. 4.400.387.000,-. Tambahan anggaran digunakan untuk belanja modal alat berat berupa exavator, dan pembangunan pagar TPA Cahaya Kencana.

Beberapa program kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan target kinerja hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran dan hasil realisasi yang telah tercapai di triwulan II.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Perubahan Renja tahun 2024 diharapkan dapat diakomodir perubahan target kinerja serta usulan perubahan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Banjar. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara umum, meskipun kendala atau hambatan dan tantangan yang cukup berat, namun demikian kami tetap berusaha untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjutnya perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
2. Perlu menambah atau memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang ada secara rutin.
3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Satuan Polisi Pamong Praja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2).

Dalam dinamikanya Renja bisa mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran ,target kinerja pada sasaran, program ,kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan. Berpedoman pada penjelasan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2024 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain:

1. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024
2. Adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Adanya pemenuhan keperluan fasilitas penunjang kerja sebagai berikut :
 - 1 Unit AC 2 PK untuk ruang rapat (belum ada)
 - 2 Unit AC 1 PK untuk ruang kerja (kondisi kurang baik)
 - 5 Unit Personal Computer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik)

- 1 Unit Laptop (Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset)
 - 2 Unit Printer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik)
4. Ada penambahan kekurangan anggaran dalam pemenuhan fasilitas kunjungan tamu, di tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan Juni sudah menerima kunjungan tamu dari luar daerah sebanyak 5x sehingga diperlukan anggaran tambahan. Adanya keperluan penyesuaian atau pergeseran belanja pada beberapa sub kegiatan lainnya karena pertimbangan teknis.
 5. Sehubungan dengan kepadatan kegiatan tahun 2024 berhubungan dengan Pilkada serta kegiatan pengamanan yang membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka kaji tiru, sosialisasi dan peningkatan wawasan
 6. Sehubungan dengan pembebasan lahan di area belakang kantor satpol PP untuk menambah lahan parkir, maka dengan ini diperlukan tambahan anggaran
 7. Ada penambahan anggaran untuk peran dan fungsi Satlinmas
 8. Ada penambahan anggaran Penanganan dan Pengendalian Trantibum
 9. Ada Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan rapat koordinasi dalam penegakan perda dan perkara
 10. Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan proses di lapangan (Penyidikan & Penyelidikan) dan untuk menunjang inovasi Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan (SIAP)

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar tahun 2024 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx (belum diberi bag hukum) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pendukung dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Banjar dengan Bupati Banjar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi:

- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja.
- 3.2 Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 3.3 Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanannya.
- 3.4 Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar memiliki kewajiban untuk melaksanakan 1 program prioritas dan 1 program penunjang, dengan 8 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dengan 20 sub kegiatan. Pagu anggaran Rp11.523.387.862 dengan realisasi Rp. 5.835.032.271 atau 50.63 %, adapun pencapaian terhadap indikator kinerjanya yaitu Indek Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan II sebesar 0 karena target untuk indikator ini akan dihitung pada triwulan IV dari target tahunan 76.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Pagu anggaran Rp. 6.978.434.200 dengan realisasi Rp. 2.977.082.000 atau 42.66 %, adapun pencapaian terhadap

3. indikator kinerjanya yaitu persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas sampai dengan triwulan II sebesar 100% dari target 100% atau capaiannya sebesar 100%.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Relisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian (%)	Predikat
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16/10x100	19
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
						Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas	100 %	6,978,434,200	33%	6.101.954.200	21%	312.042.000	56 %	6.413.996.200	0	434.730.000	21 %	2.911.220.850	21 %	3.345.950.850	37,5 %	Tidak Berhasil	

						Penangan n Gangguan Ketentera man dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K 3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang dapat diselesaikan	100 %	6,854,356,000	20 %	215.347.000	20 %	189.360.000	40 %	404.707.000	20 %	414.600.000	20%	2.882.957.000	40%	3.297.557.000	100 %	Berhasil
							Rasio Jumlah Satuan Linmas																

						Pencegaha n Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluha n, Pelaksanaa n Patroli, Pengamana n, dan Pengawala n	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Lap	582,400,000	3 lap	156.880.000	3 lap	139.120.000	6 lap	296.000.000	3 lap	90.960.000	3 lap	154.880.000	6 lap	245.840.000	100 %	Berhasil
						Penindaka n atas Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Berdasarka n Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangana n Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Lap	175,912,000	3 lap	57.592.000	3 lap	50.240.000	6 lap	107.832.000	3 lap	29.280.000	3 lap	44.480.000	6 lap	73.760.000	100 %	Berhasil

						Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dok	6,006,804,000	1 Dok	5.796.604.000	1 Dok	57.600.000	2 Dok	5.854.204.000	1 Dok	294.360.000	1 Dok	2.658.272.000	2 Dok	2.952.632.000	100 %	Berhasil
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	150 Org	81,865,000	36 Org	12.300.000	36 Org	42.957.000	72 Org	55.257.000	36 Org	-	71 Org	24.450.000	107 org	24.450.000	148 %	Berhasil
						Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 Dok	875,000	3 Dok	875.000	-	-	3 Dok	875.000	0 Dok	-	3 Dok	875.000	3 Dok	875.000	100 %	Berhasil
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Lap	6,500,000	-	-	-	-	1 Lap	6,500,000	0 Lap		0 Lap		0 Lap	-	0	Tidak Berhasil
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wa li Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		124,078,200	25%	71.203.200	25%	22.125.000	50%	93.328.200	25%	20.130.000	25%	28.263.850	50%	48.393.850	100 %	Berhasil

						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 Lap	27,553,800	1 Lap	27.553.800	1 Lap	-	2 Lap	27.553.800	1 Lap	5.250.000	1 Lap	5.700.000	2 Lap	10.950.000	100 %	Berhasil
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang	4 Lap	50,003,000.00	1 Lap	23.003.000	1 Lap	13.500.000	2 Lap	36.503.000	1 Lap	10.400.000	1 Lap		2 Lap	24.483.850	100 %	Berhasil

					n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wa li Kota	Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota											14.083.850					
					Penangana n atas Pelanggara n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wa li Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Lap	46,521,400.00	1 Lap	20.646.400	1 Lap	8.625.000	2 Lap	29.271.400	1 Lap	4.480.000	1 Lap	8.480.000	2 Lap	12.960.000	100 %	Berhasil
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	76 Indek	11,523,387,863	0	4.139.389.736	0	3.021.107.587	0	7.160.497.323	0	2.151.709.179	0	3.683.323.092	0	5.835.032.271	0	Tidak Berhasil
					Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	24,914.400	29%	14.132.300	24%	4.629.800	53 %	18.762.100	29%	-	24%	12.826.500	53 %	12.826.500	100 %	Berhasil

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6,490,000	4 Dokumen	2.199.000	2 Dokumen	2.271.000	6 Dokumen	4.470.000	4 Dokumen	-	0	4.324.000	4 Dokumen	4.324.000	66.7 %	Kurang Berhasil
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5,064,600	0	-	2 Dokumen	2.358.800	2 Dokumen	2.358.800	0	-	0	-	0	-	0	Tidak Berhasil

						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	3,480,700	1 Dokumen	2.054.200	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2.054.200	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.806.500	2 Dokumen	1.806.500	100 %	Berhasil
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	9,879,100	5 Laporan	9.879.100	4 Laporan	-	9 Laporan	9.879.100	5 Laporan	-	4 Laporan	6.696.000	9 Laporan	6.696.000	100 %	Berhasil
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	5,970,059,384	22%	1.281.718.155	22%	2.122.859.921	44 %	3.404.578.076	22%	1.006.497.684	22%	2.055.479.101	44 %	3.061.976.785	100 %	Berhasil
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	5,879,991,384	153 Orang/bulan	1.259.998.155	255 Orang/bulan	2.099.996.921	408 Orang/bulan	3.359.995.076	255 Orang/bulan	984.927.684	102 Orang/bulan	2.034.659.101	357 Orang/bulan	3.019.586.785	87.5 %	Cukup Berhasil
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86,880,000	3 Dokumen	21.720.000	3 Dokumen	21.720.000	6 Dokumen	43.440.000	3 Dokumen	21.570.000	3 Dokumen	20.820.000	6 Dokumen	42.390.000	100 %	Berhasil

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3,188,000	0	-	1 Laporan	1.143.000	1 Laporan	1.143.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Tidak Berhasil
					Administrasi Kepegawaian	Persentase Anggota Satpol PP yang lulus	100%	50,996,000	100 %	50.996.000	0	-	100 %	50.996.000	0	-	0	12.515.987	0	12.515.987	0	0	Tidak Berhasil	

						Perangkat Daerah	uji kopetensi Satpol PP																	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	50,996,000	3 Orang	50.996.000	0	-	3 Orang	50.996.000	0	-	1 Orang	12.515.987	1 Orang	12.515.987	33.3 %	0	Tidak Berhasil
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100 Persen	745,371,000	48%	683.464.400	22%	36.241.400	70 %	719.705.800	48%	145.697.673	22%	381.238.582	70 %	526.936.255	100 %	0	Berhasil
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,186,000	3 Paket	3.186.000	0	-	3 Paket	3.186.000	0	-	1 Paket	1.600.000	1 Paket	1.600.000	33.3 %	0	Tidak Berhasil
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	87,680,000	3 Paket	87.680.000,00	0	-	3 Paket	87.680.000	1 Paket	10.500.000	1 Paket	53.188.000	2 Paket	63.688.000	66.7 %	0	Kurang Berhasil
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	40,000,000	2 Paket	23.117.000	2 Paket	12.615.000	4 Paket	35.732.000	1 Paket	2.069.000	2 Paket	15.477.000	3 Paket	17.546.000	75 %	0	Cukup Berhasil

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,750,000	3 Paket	5.501.400	3 Pake t	5.051.400	6 Pak et	11.002.800	3 Pake t	4.990.00 0	1 Paket	1.310.650	4 Pake t	6.300.650	66.7 %	Kurang Berhasil
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lapora n	3,000,000	3 Laporan	750.000	3 Lapo ran	750.000	6 Lap oran	1.500.000	3 Lapo ran	-	3 Lapor an	900.000	6 Lapo ran	900.000	100 %	Berhasil
						Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan	12 Lapora n	590,755,000	3 Laporan	563.230.000	3 Lapo ran	17.825.000	6 Lap oran	581.055.00 0	3 Lapo ran	128.138. 673	3 Lapor an	308.762.9 32	6 Lapo ran	436.901.605	100 %	Berhasil

					Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD																
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3,688,117,084	25%	1.125.467.686	25%	854.216.466	50 %	1.979.684.152	25%	841.608.822	25%	1.097.577.922	50 %	1.939.186.744	100 %	Berhasil
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127,037,084	3 Laporan	32.547.686	3 Laporan	31.496.466	6 Laporan	64.044.152	3 Laporan	26.656.644	3 Laporan	30.142.768	6 Laporan	56.799.412	100 %	Berhasil
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,561,080,000	3 Laporan	1.092.920.000	3 Laporan	822.720.000	6 Laporan	1.915.640.000	3 Laporan	814.952.178	3 Laporan	1.067.435.154	6 Laporan	1.882.387.332	100 %	Berhasil
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Terpeliharaan ya Barang Milik Daerah	100 Persen	1,043,929,995	94%	1.040.769.995	6%	3.160.000	100 %	1.043.929.995	94%	157.905.000	6%	123.685.000	100 %	281.590.000	100 %	Berhasil

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38,990,000	1 Unit	38.990.000	0	-	1 Unit	38.990.000	1 Unit	3.000.00 0	-	9.000.000	1 Unit	12.000.000	100 %	Berhasil
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	25 Unit	507,789,998	25 Unit	507.789.998,00	0	-	25 Unit	507.789.99 8	8 Unit	145.908. 000	5 Unit	108.922.0 00	13 Unit	254.830.000	52 %	Kurang Berhasil
						Operasiona l atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
						Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	47,171,000	20 Unit	44.011.000	21 Unit	3.160.000	41 Unit	47.171.000	15 Unit	8.997.00 0	26 Unit	5.763.000	41 Unit	14.760.000	100 %	Berhasil
						Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	449,978,997	1 Unit	449.978.997	0	-	1 Unit	449.978.99 7	0	-	0	-	0	-	0	Tidak Berhasil

Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai RealisasiKinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 100\%$	Berhasil
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil
4	$<40\%$	Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program,kegiatan, dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang tidak memenuhi targetkinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas target di TW.II tahun 2024 sebesar 56% dengan realisasi 21% maka capaian menjadi 37.5 %.

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Penegakkan Perdadadn Perkada target di TW.II tahun 2024 sebesar 1 Laporan dengan realisasi 0 maka capaian menjadi 0 %.
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan PolisiPamong Praja (Realisasi Program ini akan dilaksanakan di TW. IV)**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahtarget di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen maka capaian menjadi 66.7 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Laporan dengan realisasi 0 maka capaian menjadi0 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 1 Laporan dengan realisasi 0 maka capaian menjadi 0 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target di TW.II tahun2024

- sebesar 408 Orang dengan realisasi 357 Orang maka capaian menjadi 87.5 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target di TW.II tahun 2024 sebesar 408 Orang dengan realisasi 357 Orang maka capaian menjadi 87.5 %.
 - **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** target di TW.II tahun 2024 sebesar 100 % dengan realisasi 0 maka capaian menjadi 0 %.
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan target di TW.II tahun 2024 sebesar 3 Orang dengan realisasi 1 Orang maka capaian menjadi 33.3 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target di TW.II tahun 2024 sebesar 3 Paket dengan realisasi 1 Paket maka capaian menjadi 33.3 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target di TW.II tahun 2024 sebesar 3 Paket dengan realisasi 2 Paket maka capaian menjadi 66.7 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target di TW.II tahun 2024 sebesar 4 Paket dengan realisasi 3 Paket maka capaian menjadi 75 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Paket dengan realisasi 4 Paket maka capaian menjadi 66.7 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target di TW.II tahun 2024 sebesar 25 Unit dengan realisasi 13 Unit maka capaian menjadi 52 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target di TW.II tahun 2024 sebesar 1 Unit dengan realisasi 0 Unit maka capaian menjadi 0 %.

2. Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan

- **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kab/Kota target di TW.II tahun 2024 sebesar 40 % dengan realisasi 40 % maka capaian menjadi 100 %.**

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawal target di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massatarget di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen maka capaian menjadi 100 %.
- Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum target di TW.II tahun 2024 sebesar 3 Dokumen dengan realisasi 3 Dokumen maka capaian menjadi 100 %.
- **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** target di TW.II tahun 2024 sebesar 50 % dengan realisasi 50 % maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan maka capaian menjadi 100 %.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja (Realisasi Program ini akan dilaksanakan di TW. IV)

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** target di TW.II tahun 2024 sebesar 53 % dengan realisasi 53 % maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD target di TW.II tahun

- 2024 sebesar 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 9 Laporan dengan realisasi 9 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** target di TW.II tahun 2024 sebesar 44 % dengan realisasi 44 % maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen maka capaian menjadi 100 %.
 - **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** target di TW.II tahun 2024 sebesar 70 % dengan realisasi 70 % maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu SKPD target di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Target di TW.II tahun 2024 sebesar 50 % dengan realisasi 50 % maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di TW.II tahun 2024 sebesar 6 Laporan dengan realisasi 6 Laporan maka capaian menjadi 100 %.
 - **Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di TW.II tahun 2024 sebesar 100 % dengan realisasi 100% maka capaian menjadi 100 %.**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target di TW.II tahun 2024 sebesar 1 Unit dengan realisasi 1 Unit maka capaian menjadi 100 %.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target di TW.II tahun 2024 sebesar 41 Unit dengan realisasi 41 Unit maka capaian menjadi 100 %.

3. Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Target di TW.II tahun 2024 sebesar 72 Orang dengan realisasi 107 Orang maka capaian menjadi 10

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya pergeseran anggaran atau rencana anggaran kas, tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang antara lain disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terpenuhinya target kinerja dikarenakan dilakukannya evaluasi per bulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.
3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan melebihi target kinerja dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan terhadap Pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Satpol PP Kabupaten Banjar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan rencana aksi per triwulan baik pencapaian kinerja maupun serapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana salah satu implementasinya adalah pemberian reward dan punishment kepada pengampu kinerja yang mencapai/tidak mencapai target.
- b. Satpol PP Kabupaten Banjar merupakan dinas yang melaksanakan pelayanan dasar terhadap publik, dimana kondisi sarana dan prasarana harus ditingkatkan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan akhir periode.

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini ada satu perubahan indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu meningkatnya Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan indikator semula Indeks Kepuasan Masyarakat dirubah menjadi Persentase Responden yang puas terhadap kondisi Ketentraman dan Ketrtiban umum

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah semuanya tetap sama.

3.3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar **Rp 9.286.529.598 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini antara lain :

1. Adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 Tentang

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.

2. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024
3. Adanya pemenuhan keperluan fasilitas penunjang kerja sebagai berikut :
 - 1 Unit AC 2 PK untuk ruang rapat (belum ada)
 - 2 Unit AC 1 PK untuk ruang kerja (kondisi kurang baik)
 - 5 Unit Personal Computer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik)
 - 1 Unit Laptop (Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset)
 - 2 Unit Printer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik)
4. Ada penambahan kekurangan anggaran dalam pemenuhan fasilitas kunjungan tamu, di tahun 2024 dari bulan januari sampai dengan Juni sudah menerima kunjungan tamu dari luar daerah sebanyak 5x sehingga diperlukan anggaran tambahan. Adanya keperluan penyesuaian atau pergeseran belanja pada beberapa sub kegiatan lainnya karena pertimbangan teknis.
5. Sehubungan dengan kepadatan kegiatan tahun 2024 berhubungan dengan Pilkada serta kegiatan pengamanan yang membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka kaji tiru, sosialisasi dan peningkatan wawasan
6. Sehubungan dengan pembebasan lahan di area belakang kantor satpol PP untuk lahan parkir, maka dengan ini diperlukan tambahan anggaran
7. Ada penambahan anggaran untuk peran dan fungsi Satlinmas
8. Ada penambahan anggaran Penanganan dan Pengendalian Trantibum
9. Ada Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan rapat koordinasi dalam penegakan perda dan perkara
10. Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan proses di lapangan (Penyidikan & Penyelidikan) dan Untuk menunjang inovasi Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan (SIAP)

Untuk keterangan lebih jelas terkait uraian diatas dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Pagu Indikatif (Rp)			Alasan Penambahan
							DPA 2024 (Rp)	Usulan Perubahan (Rp)	(+/-)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		18.501.822.062	27.788.351.660	9.286.529.598	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.501.822.062	27.788.351.660	9.286.529.598	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMER INTAH AN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA		11.523.387.862	13.358.755.260	1.835.367.398	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.914.400	24.914.400	-	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.490.000	6.490.000	-	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		5.064.600	5.064.600	-	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.480.700	3.480.700	-	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9.879.100	9.879.100	-	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.970.059.383	6.032.039.383	61.980.000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.879.991.383	5.879.991.383	-	

1	05	01	2.02	03	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan	86.880.00 0	148.860.000	61.980.00 0	- Penyesuaian dengan peraturan terbaru PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.188.000	3.188.000	-	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.996.00 0	50.996.000	-	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		50.996.00 0	50.996.000	-	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		745.371.0 00	1.563.592.000	818.221.0 00	
1	05	01	2.06	01	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor		3.186.000	3.186.000	-	

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.680.000	191.421.000	103.741.000	Penambahan pemenuhan keperluan fasilitas penunjang kerja sebagai berikut : - 1 Unit AC 2 PK untuk ruang rapat (belum ada) - 2 Unit AC 1 PK untuk ruang kerja (kondisi kurang baik) - 5 Unit Personal Computer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik) - 1 Unit Laptop (Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset) - 2 Unit Printer penunjang kerja sekretariat (kondisi kurang baik)
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	40.000.000	99.480.000	59.480.000	Penambahan pemenuhan keperluan fasilitas penunjang kerja (Perlengkapan & kebutuhan ATK)
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.750.000	20.750.000	-	

1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan Kunjungan Tamu	3.000.000	13.000.000	10.000.000	Penambahan kekurangan anggaran dalam pemenuhan fasilitas kunjungan tamu, di tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan Juni sudah menerima kunjungan tamu dari luar daerah sebanyak 5x sehingga diperlukan anggaran tambahan
---	----	----	------	----	---------------------------	-------------------------	-----------	------------	------------	---

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Rapat Rutin, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590.755.000	1.235.755.000	645.000.000	Sehubungan dengan kepadatan kegiatan tahun 2024 berhubungan dengan Pilkada serta kegiatan pengamanan yang membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka kaji tiru, sosialisasi dan peningkatan wawasan yang terdiri dari :- Rapat, konsultasi dan koordinasi persiapan menghadapi Pilkada (Bidang SDA & Linmas)- Rapat, konsultasi dan koordinasi peningkatan kapasitas personil Satpol PP (Bidang SDA & Linmas)- Teknikal visit dan kaji tiru peningkatan, penanganan & pengendalian trantibum (Bidang Tibum)- Rapat,
---	----	----	------	----	--	--	-------------	---------------	-------------	---

										konsultasi dan koordinasi kegiatan sosialisasi perda (Bidang PPHD)- Rapat, konsultasi dan koordinasi kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap perda (Bidang PPHD)- Rapat, konsultasi dan koordinasi kegiatan pengendalian trantibum (PAM) (Bidang Tibum)- Rapat, konsultasi, koordinasi & kaji tiru kesekretariatan
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.688.117.084	3.688.117.084	-	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik		127.037.084	127.037.084	-	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.561.080.000	3.561.080.000	-	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.043.929.995	1.999.096.393	955.166.398	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.990.000	38.990.000	-	

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan RutinKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	507.789.998	698.450.000	190.660.002	Dengan tingginya mobilitas kegiatan di tahun 2024 dalam rangka kegiatan pilkada dan pengamanan hari-hari besar serta sosialisasi, maka diperlukan :- Penambahan terhadap kekuarangan anggaran pemeliharaan rutin- Penambahan anggaran pemeliharaan dalam rangka menghadapi Pilkada- Penambahan anggaran pemeliharaan dalam rangka menghadapi Nataru
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		47.171.000	47.171.000	-	

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan danperbaikan bangunan Satpol PP	449.978.997	1.214.485.393	764.506.396	Sehubungan dengan pembebasan lahan di area belakang kantor satpol PP, maka dengan ini diperlukan tambahan anggaran untuk : - Pembuatan lahan parkir - Pemasangan paving block lahan parkir - Pemasangan pagar kantor - Perbaikan ruang kerja sekretariat
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.978.434.200	14.429.596.400	7.451.162.200	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Dacrah		6.854.356.000	14.017.656.000	7.163.300.000	

					Kabupaten/Kota					
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Apel Gelar Satlinmas- Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas- Upah Satlinmas	6.006.804.000	12.778.885.000	6.772.081.000	- Pemberdayaan Fungsi Satlinmas Desa/Kelurahan- Pemberdayaan Satlinmas terhadap kegiatan Pilkada- Sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana bagi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat, dengan ini satpol pp Kab. Banjar memerlukan tambahan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas anggota satlinmas Desa

										dan Kelurahan sebanyak 3.000 orang melalui sosialisasi, apel gelar pasukan serta memberikan sarana dan prasarana penunjang operasional dan biaya operasional yang menunjang pelaksanaan tugas satlinmas dalam menghadapi persiapan pelaksanaan pilkada 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/2222/SJ Tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, salah satunya menekankan agar Kepala Daerah dapat membangun koordinasi lintas
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.
1	05	02	2.01	05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Upah kegiatan kesemaptaan, korsik, beladiri - Pengadaan baju korsik	81.865.000	413.084.000	331.219.000	- Peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP - Diperlukan adanya penambahan anggaran dalam rangka mendukung capaian peningkatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kab. Banjar melalui kegiatan kesemaptaan, beladiri dan korsik serta mendukung penampilan korsik satpol pp pada setiap acara penting Kabupaten.
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan		875.000	875.000	-	

					Keten teram an Masy arakat					
1	05	02	2.01	15	Pencegah an Gangguan Ketentera man dan Ketertiba n Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaa n dan Penyuluh an, Pelaksana an Patroli, Pengama nan, dan Pengawal an	Penanganan dan Pengendalian Trantibum (PAM)	582.400.000	682.400.000	100.000.000	- Penanganan dan Pengendalian Trantibum berupa Pembayaran Upah Patroli, Deteksi Dini, Pengamanan, Pengawalan, dan Penanganan Unjuk Rasa serta kegiatan
										Insidentil untuk PTT Satpol PP di wilayah Kabupaten Banjar (Pembayaran Kekurangan Upah Regu Mako selama 4 Bulan)- Persiapan pengamanan NATARU (H-2 Natal s.d H+3 Tahun Baru)
1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan PerkadaMelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kegiatan Kerjasama dan Pengedalian	175.912.000	135.912.000	(40.000.000)	Pengurangan anggaran upah pelaksanaan perda jum'at khusyu, dialokasikan untuk penambahan perjadiin (dianggarkan di sekretariat)
1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		6.500.000	6.500.000	-	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah		124.078.200	411.940.400	287.862.200	

					Kabupaten/Ko tadan Peraturan Bupati/Wali Kota					
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan Sosialisasi & Rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait : - Kegiatan rutin sosialisasi perda & perkada - Rapat koordinasi persamaan persepsi melibatkan aparat penegak hukum, perangkat daerah dan perangkat desa	27.553.800	275.370.000	247.816.200	- Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan rapat koordinasi dalam penegakan perda dan perkada selama ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam rangka penegakkan perda dan perkada kab. Banjar
1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	- Kegiatan rutin penyidikan & penyelidikan - Operasi gabungan yustisi & non yustisi	46.521.400	73.067.400	26.546.000	- Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan proses di lapangan (Penyidikan & Penyelidikan) - Untuk menunjang inovasi Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan (SIAP)
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kegiatan rutin pengawasan terhadap kepatuhan perda & perkada	50.003.000	63.503.000	13.500.000	- Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan proses di lapangan (Pengawasan terhadap kepatuhan perda & perkada)

BAB IV PENUTUP

4.1 **Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa dalam melakukan Perubahan Renja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar telah memperhatikan prioritas sub kegiatan mana saja yang dilakukan perubahan.
2. Perubahan Renja disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2026
5. Dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar secara umum ada pengurangan anggaran secara signifikan, yang mana perubahan anggaran tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya pada Renja 2024.
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun 2024.
5. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari peran Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari peran.

4.2 **Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:

- a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024.
2. Saat Perubahan Renja ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlunya dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian program
 3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024, yaitu sebagai berikut.

1. Agar segenap bidang segera melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat tidak ada pengurangan anggaran pada bidang teknis.
2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staff Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian dokumen perubahan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun, selanjutnya kami menyadari akan banyak kekurangan dalam penyusunan perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2024, maka dengan segala kerendahan hati agar ada koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR
NOMOR 012.a TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANJAR**

Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan TimPenyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banjar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarsebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada AnggaranSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 09 Januari

2024

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONGPRAJA KABUPATEN
BANJAR.**



Drs. H. M. IRWAN KUMAR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 198603 1 016

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banjar

Nomor : 012.a Tahun
2024Tanggal : 09 Januari
2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Anggota	1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		4. Kabid Sumber Daya Aparatur & Linmas
		5. Kabid Penegakkan Produk Hukum Daerah
		6. Kasi Operasional dan Penindakan
		7. Kasi Kerja Sama
		8. Kasi Bina Potensi dan Satlinmas
		9. Kasi Bina Teknis Fungsional dan Latihan Dasar
		10. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
		11. Kasi Penyidikan dan Penyelidikan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.
BANJAR TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	D A E R A H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								11.647.625.601,00	18.501.822.062,00	21.442.122.062,00	9.794.496.461,00						16.378.337.560,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.647.625.601,00	18.501.822.062,00	21.442.122.062,00	9.794.496.461,00							16.378.337.560,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.647.625.601,00	18.501.822.062,00	21.442.122.062,00	9.794.496.461,00							16.378.337.560,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja				76 Indeks	76 Indeks	10.538.501.401,00	11.523.387.862,00	12.191.101.862,00	4.775.030.758,00							15.313.532.159,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan				100 Persen	100 Persen	24.914.400,00	24.914.400,00	24.914.400,00	0,00			-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	-		27.322.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			6.481.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.064.600,00	5.064.600,00	5.064.600,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			5.480.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			5.480.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	9.879.100,00	9.879.100,00	9.879.100,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			9.879.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan				100 Persen	100 Persen	5.320.172.920,00	5.970.059.383,00	5.970.059.383,00	649.886.463,00			-	5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Peng uatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	-		8.613.374.859,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12		14	15	16	17	18	19	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.561.080.000,00	3.561.080.000,00	3.561.080.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis		4.819.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	743.929.997,00	1.043.929.995,00	1.336.689.995,00	592.759.998,00			-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	-	1.153.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis		36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	457.790.000,00	507.789.998,00	576.549.998,00	118.759.998,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis		942.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	47.171.000,00	47.171.000,00	47.171.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.978.997,00	449.978.997,00	673.978.997,00	474.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian penanganan terhadap trantibum, Perda/Perkada dan Linmas Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas				100 100 100 % Persen Persen	100 100 100 % Persen Persen	1.109.124.200,00	6.978.434.200,00	9.251.020.200,00	-44.318.799,00							1.064.805.401,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KertertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum/ K3 (Ketertiban, Ketrantiraman, keindahan) yang dapat diselesaikan Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala				100 Persen 5 orang per desa/ kelu 5 orang perdesa/ kelurahan	100 Persen 5 orang per desa/ kelu 5 orang perdesa/ kelurahan	985.046.000,00	6.854.356.000,00	9.091.896.000,00	8.106.850.000,00			-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	-		829.805.401,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			daerah dan Linmas Rasio jumlah Satlimnas aktif Rasio Jumlah Satuan Linmas																	
	1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	492.614.000,00	6.006.804.000,00	8.184.344.000,00	7.691.730.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			244.976.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	81.865.000,00	81.865.000,00	81.865.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			100.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					1 4	1 5	1 6	17	1 8	1 9	2 0	21
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				3 Dokumen	3 Dokumen	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			1.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum yang Dicegah MelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				12 laporan	12 laporan	392.640.000,00	582.400.000,00	682.400.000,00	289.760.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			367.699.401,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.552.000,00	175.912.000,00	135.912.000,00	125.360.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			100.430.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i> <i>jumlah pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</i>				65,57 Persen	65,57 Persen	124.078.200,00	124.078.200,00	159.124.200,00	35.046.000,00			-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis	-		235.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	27.553.800,00	27.553.800,00	27.553.800,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	46.521.400,0 0	46.521.400,0 0	68.067.400,0 0	21.546.000,0 0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.003.000,0 0	50.003.000,0 0	63.503.000,0 0	13.500.000,0 0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis 5. Penguat an Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								11.647.625.601,00	18.501.822.062,00	21.442.122.062,00	9.794.496.461,00						16.378.337.560,00		

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat 2).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini terdapat beberapa dinamika yang menuntut adanya penyesuaian pada indikator dan target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak adanya perubahan kebutuhan belanja dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan seperti :

- a. Adanya penambahan anggaran untuk fasilitasi kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan forkopimda, pilkada dan sekretariat/ umum.
- b. Adanya penambahan anggaran belanja modal sebagai melengkapi fasilitas tempat pelayanan izin penelitian dan fasilitasi desk pilkada 2024.
- c. Ada penambahan anggaran untuk perolehan suara hasil Pileg 2024.
- d. Adanya penambahan anggaran untuk biaya desk pilkada dan honor camat.
- e. Adanya penambahan anggaran untuk penambahan bimbingan teknis/ pendidikan/ latihan FKDM kabupaten dan FKDM kecamatan.
- f. Adanya pengurangan honorarium forkopimda karena adanya temuan BPK terkait honorarium.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pendukung dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Banjar dengan Bupati Banjar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan

capaian tahun berjalan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi:

- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja.
- 3.2 Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 3.3 Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanannya.
- 3.4 Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan 5 (lima) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Daerah s/d tahun	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (5+7+10)	13 = (12/4)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	379	Indeks	74,43	73	79,18	108	76	85,14	112	238,75	62,99
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang disusun	500	persen	103	100	100	100	56	56	100	259	51,80
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	Dok	8	4	4	100	5	5	100	17	48,57
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	Dok	3	3	3	100	1	1	100	7	46,67
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	1	1	1	100	1	1	100	3	60,00
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dok	2	2	2	100	0	0	0	4	40,00
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Dok	0	2	2	100	2	2	100	4	33,33
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	laporan	20	23	23	100	8	8	100	51	51,00

8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang terpenuhi	500	persen	100	100	100	100	50	50	100	250	50,00
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131	OB	25	25	25	100	25	25	100	75	57,25
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	4	12	12	100	0	0	0	16	66,67
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dok	0	0	0	0	6	6	100	6	16,67
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	1	1	1	100	1	1	100	3	60,00
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90	Lap	18	2	2	100	9	9	100	29	32,22
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	500	persen	0	0	0	0	50	50	100	50	10,00
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	26	orang	0	0	0	0	3	3	100	3	11,54
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	500	persen	86	100	100	100	50	50	100	236	47,20
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	2	4	4	100	2	2	100	8	40,00
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	2	5	5	100	2	2	100	9	30,00
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	4	6	6	100	2	2	100	12	40,00
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	4	12	12	100	6	6	100	22	36,67

8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	4	11	11	100	2	2	100	17	30,91
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	4	12	12	100	6	6	100	22	36,67
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	500	persen	100	100	100	100	94	94	100	294	58,80
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82	buah	20	24	89	371	33	33	100	142	173,17
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	500	persen	100	100	100	100	50	50	100	250	50,00
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	Lap	4	12	12	100	0	0	0	16	53,33
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	4	12	12	100	0	0	0	16	26,67
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	4	12	12	100	6	6	100	22	36,67
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	500	persen	100	100	100	100	50	50	100	250	50,00
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	1	1	1	100	1	1	100	3	60,00
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62	unit	10	12	12	100	10	10	100	32	51,61
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	1	1	100	1	1	100	2	50,00

8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	62	buah	14	27	27	100	10	10	100	51	82,26
8	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya kegiatan Penataan Organisasi	100	persen	67	0	0	0	0	0	0	67	67,00
8	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	3	dokumen	2	0	0	0	0	0	0	2	66,67
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan	0,59	persen	0,06	0,09	0,11	122	0,08	0,06	75	0,23	38,98
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	420	persen	100	80	87,5	109	71	57,14	80	244,64	58,25
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1672	orang	230	420	420	100	360	240	67	890	53,23
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	laporan	3	3	3	100	1	1	100	7	46,67
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3	Dok	0	0	0	0	1	1	100	1	33,33
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	99	orang	0	0	0	0	33	33	100	33	33,33
8	1	2	2.01	9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3	Dok	0	0	0	0	1	1	100	1	33,33
8	1	2	2.01	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	3	Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	81	orang	0	0	0	0	27	27	100	27	33,33

8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	1,69	persen	0,24	0,41	0,41	100	0,3	0,1	33	0,75	44,38
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik.	390	persen	100	100	89,88	90	60	60	100	249,88	64,07
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.250	Orang	60	1780	1600	90	340	340	100	2000	47,06
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	845	orang	840	42	51	121	86	86	100	977	115,62
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20	laporan	4	4	4	100	2	2	100	10	50,00

8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina	132	persen	49,08	25	29,82	119	15	15	100	93,9	71,14
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	407	persen	67	80	66,66	83	80	100	125	233,66	57,41
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.638	Org	360	210	210	100	55	55	100	625	38,16
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	4	Lap	0	1	1	100	0	0	0	1	25,00
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	500	persen	100	100	100	100	53	42	79	242	48,40
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terlaksana	340	persen	60	65	71,42	110	42,85	50	117	181,42	53,36
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	5.220	Orang	704	1270	1138	90	600	535	89	2377	45,54
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	500	persen	100	100	100	100	49	49	100	249	49,80
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana	440	persen	75	80	107,14	134	57	57	100	239,14	54,35

8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.650	Orang	660	920	980	107	865	865	100	2505	151,82
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20	laporan	4	4	4	100	2	2	100	10	50,00
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30	Lap	4	6	6	100	2	2	100	12	40,00

Sumber : Perubahan Renstra ke - 2 Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 dan simondalev

Sejatinya bab II ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 0,08 persen adapun realisasinya 0,06 persen sehingga capaiannya adalah 75 persen.

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 0,3 persen adapun realisasinya 0,1 persen sehingga capaiannya adalah 33 persen.

- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 53 persen adapun realisasinya 42 persen sehingga capaiannya adalah 79 persen.

- 4) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 71 persen adapun realisasinya 57,14 persen sehingga capaiannya adalah 80 persen.

- 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 360 orang adapun realisasinya 240 orang sehingga capaiannya adalah 67 persen.

- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 600 orang adapun realisasinya 535 orang sehingga capaiannya adalah 89 persen.

2.2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase ormas yang dibina dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 15 persen adapun realisasinya 15 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penanganan konflik sosial dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 49 persen adapun realisasinya 49 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang disusun dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 56 persen adapun realisasinya 56 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan perangkat daerah SKPD yang terpenuhi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 94 persen adapun realisasinya 94 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

10) Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik dan etika budaya politik dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 60 persen adapun realisasinya 60 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 11) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 57 persen adapun realisasinya 57 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 12) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 5 dokumen adapun realisasinya 5 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 14) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 dokumen adapun realisasinya 2 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 16) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024

yaitu 8 laporan adapun realisasinya 8 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

17) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 25 Orang adapun realisasinya 25 Orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

18) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 dokumen adapun realisasinya 6 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

19) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

20) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 9 laporan adapun realisasinya 9 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

21) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang meningkat wawasan dan kompetensinya dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 3 orang adapun realisasinya 3 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 22) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 paket adapun realisasinya 2 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 23) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 paket adapun realisasinya 2 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 paket adapun realisasinya 2 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 25) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 paket adapun realisasinya 6 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 26) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 27) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 28) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 33 buah adapun realisasinya 33 buah sehingga capaiannya adalah 100 persen.

29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

30) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 unit adapun realisasinya 1 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.

31) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 10 unit adapun realisasinya 10 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.

32) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 unit adapun realisasinya 1 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.

33) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 10 buah adapun realisasinya 10 buah sehingga capaiannya adalah 100 persen.

34) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan target triwulan II

pada tahun 2024 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 35) Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 36) Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paskibraka dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 33 orang adapun realisasinya 33 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 37) Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 38) Sub Kegiatan Pengangkatan Duta Pancasila.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah purnapaskibraka duta pancasila dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 27 orang adapun realisasinya 27 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 39) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 340 orang adapun realisasinya 340 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 40) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 86 orang adapun realisasinya 86 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 41) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 42) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 55 orang adapun realisasinya 55 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 43) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 865 orang adapun realisasinya 865 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 44) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 45) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/ kota dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

2.3. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada program ini adalah indeks kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Kesbangpol dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 76 adapun realisasinya 85,14 sehingga capaiannya adalah 112 persen.

- 2) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 80 persen adapun realisasinya 100 persen sehingga capaiannya adalah 125 persen.
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 42,85 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 117 persen.

2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan :

1. Pada beberapa sub kegiatan yang aktivitas utamanya adalah pelaksanaan sosialisasi/pembinaan dengan objek masyarakat, pelaksana atau pengampu kegiatannya masih belum mampu secara optimal mengejar target kegiatan sosialisasinya, karena dengan kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas dibidang mereka selain harus mengejar target kegiatan yang sudah terjadual sesuai dokumen rencana aksi, ternyata harus ditambah dengan pemenuhan aktivitas kegiatan lainnya yang belum terjadual secara resmi namun wajib dilaksanakan. Salah satu contohnya pada bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yakni program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah dengan indikator kinerjanya adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki kendala yaitu tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN

pada salah satu sekolah dan belum terlaksana dikarenakan jadwal liburan anak sekolah akibatnya mereka terpaksa menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan/sosialisasi pada beberapa sub kegiatannya, sehingga implikasinya capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program pada bidang tersebut tidak bisa sesuai dengan target yang ditetapkan diawal tahapan perencanaan.

2. Faktor kendala teknis dan faktor internal lainnya.

Pada beberapa kondisi bidang pelaksana program dan kegiatan terpaksa menunda pelaksanaan sub kegiatannya karena alasan teknis, seperti karena adanya kebijakan internal bidang, karena ketersediaan anggaran kas yang kurang akibat terserap pada kegiatan lain, dll.

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelaksana kegiatan sudah memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja sehingga target indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Makin meningkatnya pemahaman para pejabat struktural sebagai pengampu program dan kegiatan untuk mempelajari konsep kinerja dan target capaian pada program dan kegiatan yang ditanganinya.

2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026. Sampai triwulan kedua tahun 2024 ini persentase realisasi capaian target Renstra pada program rutin cenderung normal pada kisaran angka capaian 40 sampai 65 persen, walaupun ditemui ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih dibawah 20 persen, dan setelah dicermati pada beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih rendah tersebut ternyata permasalahannya karena angka target Renstranya terlalu tinggi, yang disebabkan adanya kesalahan perhitungan pada saat penetapan, dan untuk kondisi ini kalau memungkinkan akan dilakukan perbaikan target pada tahapan revisi Renstra.

Adapun realisasi capaian target Renstra pada program utama kondisinya hampir mirip dengan capaian pada program rutin, mayoritas kisaran capaiannya sekitar angka 40 sampai 65 persen pada triwulan II tahun 2024, namun ditemui ada satu sub kegiatan yang capaiannya sangat tinggi hampir menyentuh angka 100 persen, dan ternyata

permasalahannya diakibatkan oleh adanya kesalahan penetapan target oleh perencana kegiatannya pada saat tahapan penetapan, kemudian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan terlihat capaian target Renstranya masih cukup rendah dibawah 20 persen, diharapkan para pengampu kegiatannya bisa mengejar pencapaian targetnya agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

2.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

- 1) Terkait masih adanya target Renstra yang terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah akibat kesalahan perhitungan dalam penetapan maka opsi tindakan yang bisa diambil adalah dengan melakukan perbaikan target dan dokumen pada tahapan review Renstra, ataupun kalau memungkinkan bisa dirubah pada tahapan revisi/perubahan Renstra SKPD. Kemudian diharapkan agar setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran kedalam kegiatan (penyusunan rincian belanja)
- 2) Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada diatasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target indikator capaian kinerja.
- 3) Terkait adanya keluhan pada salah satu bidang yang merasa mereka berada dalam kondisi yang tidak ideal, dimana mereka terpaksa harus konsentrasi, memberikan energi dan perhatian penuh pada salah satu kegiatan yang dianggap prestisius, sedangkan kondisi mereka lagi kekurangan sumber daya manusia, sehingga hal ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan lainnya dan akhirnya capaian kinerja tidak terpenuhi. Untuk mengatasi masalah ini tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengajukan usulan penambahan bidang,

mengingat struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar masih bisa ditambah menjadi empat bidang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tabel 2. 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Relisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian (%)	Predikat					
										I		II				I		II										
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp							
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (16/10)	19					
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
8						1																						
8						1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	76 Indeks	6.330.291.848	76	1.585.081.708	76	1.843.428.063	76	3.428.509.771	85,14	1.219.167.205	85,14	1.707.913.972	85,14	2.927.081.177	112	Tercapai
8						1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang disusun	100 Persen	13.489.500	41	11.246.000	15	2.243.500	56	13.489.500	41	1.836.000	15	2.267.000	56	4.103.000	100	Tercapai
8						1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	3.475.000	3	2.329.000	2	1.146.000	5	3.475.000	3	1.836.000	2	1.500.000	5	3.336.000	100	Tercapai
8							1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	2.126.000	0	2.126.000	1	-	1	2.126.000	0	-	1	-	1	-	100	Tercapai
8							1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.845.000	1	1.845.000	0	-	1	1.845.000	1	-	0	767.000	1	767.000	100	Tercapai
8							1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.601.000	0	1.241.000	0	360.000	0	1.601.000	0	-	0	-	0	-	100	Tercapai

8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	1.964.000	2	1.626.500	0	337.500	2	1.964.000	2	-	0	-	2	-	100	Tercapai
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Lap	2.478.500	4	2.078.500	4	400.000	8	2.478.500	4	-	4	-	8	-	100	Tercapai
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang terpenuhi	100 Persen	4.101.542.938	25	789.878.250	25	1.373.215.701	50	2.163.093.951	25	621.054.641	25	1.295.448.655	50	1.916.503.296	100	Tercapai
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	3.991.842.238	25	758.842.550	0	1.346.660.701	25	2.105.503.251	25	586.314.641	0	1.278.078.655	25	1.864.393.296	100	Tercapai
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	104.826.000	3	26.661.000	3	26.055.000	6	52.716.000	3	34.740.000	3	17.370.000	6	52.110.000	100	Tercapai
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	3.902.000	1	3.402.000	0	500.000	1	3.902.000	1	-	0	-	1	-	100	Tercapai
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	972.700	4	972.700	5	-	9	972.700	4	-	5	-	9	-	100	Tercapai
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	50.000.000	25	50.000.000	25	-	50	50.000.000	25	12.618.762	25	-	50	12.618.762	100	Tercapai
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkatkan Wawasan & kompetensinya	5 Orang	50.000.000	1	50.000.000	2	-	3	50.000.000	1	12.618.762	2	-	3	12.618.762	100	Tercapai
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	892.277.600	25	256.687.788	25	252.018.862	50	508.706.650	25	218.838.157	25	231.654.247	50	450.492.404	100	Tercapai

8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.776.500	1	1.416.188	1	1.227.362	2	2.643.550	1	1.410.500	1	-	2	1.410.500	100	Tercapai
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.991.500	1	6.057.000	1	5.017.000	2	11.074.000	1	3.299.500	1	4.854.000	2	8.153.500	100	Tercapai
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.015.000	1	6.384.000	1	5.640.500	2	12.024.500	1	5.474.000	1	2.498.000	2	7.972.000	100	Tercapai
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.499.600	3	4.595.600	3	2.964.000	6	7.559.600	3	3.522.800	3	1.992.000	6	5.514.800	100	Tercapai
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	2.995.000	1	1.235.000	1	1.170.000	2	2.405.000	1	365.000	1	-	2	365.000	100	Tercapai
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	835.000.000	3	237.000.000	3	236.000.000	6	473.000.000	3	204.766.357	3	222.310.247	6	427.076.604	100	Tercapai
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	100 Persen	537.507.810	94	210.485.670	0	-	94	210.485.670	94	171.004.500	0	-	94	171.004.500	100	Tercapai
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit	537.507.810	33	210.485.670	0	-	33	210.485.670	33	171.004.500	0	-	33	171.004.500	100	Tercapai
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 Persen	463.610.000	25	133.020.000	25	123.530.000	50	256.550.000	25	102.843.360	25	117.183.360	50	220.026.720	100	Tercapai
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	463.610.000	3	133.020.000	3	123.530.000	6	256.550.000	3	102.843.360	3	117.183.360	6	220.026.720	100	Tercapai

8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	271.864.000	25	133.764.000	25	92.420.000	50	226.184.000	25	90.971.785	25	61.360.710	50	152.332.495	100	Tercapai
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.990.000	1	15.000.000	0	15.000.000	1	30.000.000	1	8.400.000	0	8.500.000	1	16.900.000	100	Tercapai
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	182.420.000	5	81.750.000	5	71.920.000	10	153.670.000	5	48.021.285	5	48.800.710	10	96.821.995	100	Tercapai
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.184.000	1	30.184.000	0	-	1	30.184.000	1	29.974.500	0	-	1	29.974.500	100	Tercapai
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	27 Unit	18.270.000	8	6.830.000	2	5.500.000	10	12.330.000	10	4.576.000	0	4.060.000	10	8.636.000	100	Tercapai
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan	0,12 Persen	1.558.551.000	0,03	336.917.000	0,05	311.129.000	0,08	648.046.000	0,01	179.969.500	0,05	233.998.850	0,06	413.968.350	75	Tidak Tercapai
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	1.558.551.000	25	336.917.000	46	311.129.000	71	648.046.000	20	179.969.500	37,14	233.998.850	57,14	413.968.350	80	Tidak Tercapai
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2250 Orang	153.336.500	120	46.254.500	240	69.310.000	360	115.564.500	60	21.613.000	180	53.759.000	240	75.372.000	67	Tidak Tercapai

8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Lap	4.998.500	0	3.748.500	1	-	1	3.748.500	0	-	1	-	1	-	100	Tercapai
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	193.064.000	0	158.064.000	1	10.000.000	1	168.064.000	0	105.204.000	1	24.700.000	1	129.904.000	100	Tercapai
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33 Orang	1.021.710.000	0	128.850.000	33	100.785.000	33	229.635.000	0	53.152.500	33	83.551.850	33	136.704.350	100	Tercapai
8	1	2	2.01	9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	75.262.000	0	-	1	75.262.000	1	75.262.000	0	-	1	71.988.000	1	71.988.000	100	Tercapai
8	1	2	2.01	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	54.408.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	Tercapai
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	55.772.000	0	-	27	55.772.000	27	55.772.000	0	-	27	-	27	-	100	Tercapai
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	0,23 Persen	56.303.814.890	0	9.009.640.750	0,3	45.164.319.000	0,3	54.173.959.750	0	32.048.400	0,1	53.922.771.250	0,1	53.954.819.650	33	Tidak Tercapai

8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik.	60 Persen	56.303.814.89 0	0	9.009.640.750	60	45.164.319.00 0	60	54.173.959.75 0	0	32.048.400	60	53.922.771.25 0	60	53.954.819.65 0	100	Tercapai
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	640 Orang	55.789.927.89 0	0	8.908.816.750	34 0	45.024.597.00 0	34 0	53.933.413.75 0	0	-	340	53.919.788.75 0	340	53.919.788.75 0	100	Tercapai
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	195 Orang	502.781.500	86	97.318.500	0	134.622.000	86	231.940.500	86	32.048.400	0	-	86	32.048.400	100	Tercapai

8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	11.105.500	1	3.505.500	1	5.100.000	2	8.605.500	1	-	1	2.982.500	2	2.982.500	100	Tercapai
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina	30 Persen	125.051.000	7	55.651.000	8	21.550.000	15	77.201.000	7	-	8	36.480.000	15	36.480.000	100	Tercapai
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	80 Persen	125.051.000	80	55.651.000	0	21.550.000	80	77.201.000	100	-	0	36.480.000	100	36.480.000	125	Tercapai
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	210 Orang	125.051.000	55	55.651.000	0	21.550.000	55	77.201.000	40	-	15	36.480.000	55	36.480.000	100	Tercapai
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	100 Persen	554.000.500	16	105.383.250	37	197.405.250	53	302.788.500	10,52	55.760.000	31,48	66.662.000	42	122.422.000	79	Tidak Tercapai
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terlaksana	70 Persen	554.000.500	42,85	105.383.250	0	197.405.250	42,85	302.788.500	42,85	55.760.000	7,15	66.662.000	50	122.422.000	117	Tercapai

8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1348 Orang	554.000.500	22 0	105.383.250	38 0	197.405.250	60 0	302.788.500	140	55.760.000	395	66.662.000	535	122.422.000	89	Tidak Tercapai
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial	100 Persen	1.093.561.900	13	457.812.000	36	399.152.000	49	856.964.000	13	197.704.611	36	184.195.000	49	381.899.611	100	Tercapai
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana	90 Persen	1.093.561.900	57	457.812.000	0	399.152.000	57	856.964.000	57	197.704.611	0	184.195.000	57	381.899.611	100	Tercapai
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1620 Orang	886.205.000	36 0	325.580.000	50 5	289.152.000	86 5	614.732.000	360	163.704.611	505	180.165.000	865	343.869.611	100	Tercapai

8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lap	40.045.000	1	27.545.000	1	12.500.000	2	40.045.000	1	2.500.000	1	4.030.000	2	6.530.000	100	Tercapai
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	167.311.900	2	104.687.000	0	97.500.000	2	202.187.000	2	31.500.000	0	-	2	31.500.000	100	Tercapai

Sumber : simondalev

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan akhir periode.

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini tidak ada perubahan indikator kinerja karena perubahan rencana kerja ini telah mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah semuanya tetap sama.

3.3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar **Rp 65.965.271.138,- (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2024

Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
								Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	8					Unsur Pemerintahan Umum							
	8	1				Kesatuan Bangsa dan Politik				65.340.956.858	65.965.271.138	624.314.280	
Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	1			Program Penunjang ^{an} Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	76 Indeks	76 Indeks	5.869.269.708	6.330.291.848	461.022.140	
	8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	13.489.500	13.489.500	-	
	8	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	3.475.000	3.475.000	-	
	8	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	3 Dok	2.126.000	2.126.000	-	
	8	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.845.000	1.845.000	-	
	8	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	1.601.000	1.601.000	-	
	8	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	1.964.000	1.964.000	-	
	8	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Lap	17 Lap	2.478.500	2.478.500	-	
	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	4.101.542.938	4.101.542.938	-	
	8	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	3.991.842.238	3.991.842.238	-	

	8	1	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	104.826.000	104.826.000	-	
	8	1	1	2.02	0005	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	3.902.000	3.902.000	-	
	8	1	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	972.700	972.700	-	
	8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	50.000.000	50.000.000	-	
	8	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	5 Orang	5 Orang	50.000.000	50.000.000	-	
	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	767.277.600	892.277.600	125.000.000	
	8	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.776.500	3.776.500	-	
	8	1	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	17.991.500	17.991.500	-	
	8	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.015.000	20.015.000	-	
	8	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.499.600	12.499.600	-	
	8	1	1	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4 Lap	2.995.000	2.995.000	-	

	8	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	710.000.000	835.000.000	125.000.000	Memfalisitasi kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan forkopimda, pilkada dan sekretariat/ umum
	8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	100 Persen	210.485.670	537.507.810	327.022.140	
	8	1	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	102 Unit	210.485.670	537.507.810	327.022.140	Melengkapi fasilitas tempat pelayanan izin penelitian dan fasilitasi desk pilkada 2024
	8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	463.610.000	463.610.000	-	
	8	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	463.610.000	463.610.000	-	
	8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	262.864.000	271.864.000	9.000.000	
	8	1	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000	38.990.000	-	
	8	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	175.420.000	182.420.000	7.000.000	BBM untuk desk pilkada
	8	1	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.184.000	32.184.000	2.000.000	penambahan instalasi listrik untuk pembangunan pelayanan izin penelitian

	8	1	1	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	18.270.000	18.270.000	-	
Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan	0,12 Persen	0,12 Persen	1.558.551.000	1.558.551.000	-	
	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	100 Persen	1.558.551.000	1.558.551.000	-	
	8	1	2	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420 Orang	2250 Orang	153.336.500	153.336.500	-	
	8	1	2	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Lap	3 Lap	4.998.500	4.998.500	-	
	8	1	2	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	1 Dok	193.064.000	193.064.000	-	
	8	1	2	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33 Orang	33 Orang	1.021.710.000	1.021.710.000	-	
	8	1	2	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	1 Dok	75.262.000	75.262.000	-	
	8	1	2	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	1 Dok	54.408.000	54.408.000	-	
	8	1	2	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	27 Orang	55.772.000	55.772.000	-	

Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	0,23 Persen	0,23 Persen	56.022.856.750	56.303.814.890	280.958.140	
	8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik.	60 Persen	60 Persen	56.022.856.750	56.303.814.890	280.958.140	
	8	1	3	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	514 Orang	640 Orang	55.687.565.750	55.789.927.890	102.362.140	adanya penambahan perolehan suara hasil pileg 2024
	8	1	3	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	231 Orang	247 Orang	324.185.500	502.781.500	178.596.000	adanya penambahan biaya desk pilkada dan honor camat
	8	1	3	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	4 Lap	11.105.500	11.105.500	-	

Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	30 Persen	30 Persen	125.051.000	125.051.000	-	
	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	80 Persen	80 Persen	125.051.000	125.051.000	-	
	8	1	4	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55 Orang	210 Orang	125.051.000	125.051.000	-	
Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	554.000.500	554.000.500	-	
	8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terlaksana	70 Persen	70 Persen	554.000.500	554.000.500	-	
	8	1	5	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1348 Orang	1348 Orang	554.000.500	554.000.500	-	

Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Agama	8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	100 Persen	100 Persen	1.211.227.900	1.093.561.900	-117.666.000	
	8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	90 Persen	90 Persen	1.211.227.900	1.093.561.900	-117.666.000	
	8	1	6	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1520 Orang	1620 Orang	764.169.000	886.205.000	122.036.000	penambahan bimbingan teknis/ pendidikan/ latihan FKDM kabupaten dan FKDM kecamatan
	8	1	6	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lap	4 Lap	50.045.000	40.045.000	-10.000.000	Perjalanan dinas DD dibebankan disekretariat
	8	1	6	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	6 Dok	397.013.900	167.311.900	-229.702.000	Pengurangan honorarium forkopimda adanya temuan BPK terkait honorarium

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Dari tabel 3.1 dapat dilihat beberapa sub kegiatan mengalami perubahan baik secara target kinerja maupun anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 710.000.000 dengan kenaikan anggaran Rp 125.000.000 sehingga menjadi Rp 835.000.000 dikarenakan adanya penambahan fasilitasi kegiatan dukungan penyelenggaraan kegiatan forkopimda, pilkada dan sekretariat.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 210.485.670 dengan kenaikan anggaran Rp 327.022.140 sehingga menjadi Rp 537.507.810 dikarenakan untuk melengkapi fasilitas tempat pelayanan izin penelitan dan fasilitasi desk pilkada pada tahun 2024.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 175.420.000 dengan kenaikan anggaran Rp 7.000.000 sehingga menjadi Rp 182.420.000 dikarenakan penambahan BBM untuk desk pilkada 2024.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 30.184.000 dengan kenaikan anggaran Rp 2.000.000 sehingga menjadi Rp 32.184.000 dikarenakan penambahan instalasi listrik untuk pembangunan pelayanan izin penelitian.
- 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 55.687.565.750 dengan kenaikan anggaran Rp 102.362.140 sehingga menjadi Rp 55.789.927.890 dikarenakan adanya penambahan perolehan suara hasil Pileg tahun 2024

- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 324.185.500 dengan kenaikan anggaran Rp 178.596.000 sehingga menjadi Rp 502.781.500 dikarenakan adanya penambahan biaya desk pilkada dan honor camat.

- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 764.169.000 dengan kenaikan anggaran Rp 122.036.000 sehingga menjadi Rp 886.205.000 dikarenakan penambahan bimbingan teknis atau pendidikan atau pelatihan FKDM Kabupaten dan FKDM kecamatan Kabupaten Banjar.

- 8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 50.045.000 dengan penurunan anggaran Rp 10.000.000 sehingga menjadi Rp 40.045.000 dikarenakan anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada sub kegiatan ini dibebankan ke Sekretariat.

- 9) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 397.013.900 dengan penurunan anggaran Rp 229.702.000 sehingga menjadi Rp 167.311.900 dikarenakan adanya pengurangan honorarium Forkopimda adanya temuan BPK terkait honorarium.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis.

4.1 Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berguna bagi pembangunan di Kabupaten Banjar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya antara lain :

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai :
 - a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA perubahan tahun 2024
2. Saat perubahan renja ini dijabarkan ke dalam RKA perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan, penjabaran RKA perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.
3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya baik di lingkungan Pemerintah maupun di luar pemerintahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024 ini antara lain :

1. Merencanakan ulang Rencana Kerja dan RAK (Rencana Anggaran Kas) disesuaikan dengan kondisi waktu pelaksanaan pada perubahan Renja 2024.
2. Memprioritaskan semua pengadaan barang/ jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja fisik maupun keuangan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dibuat agar kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024		

Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1		Jumlah						Tahun + 1				
				Sebelum		Tahun N				Tahun N						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	01				Rp. 65.238.318.188	Rp. 102.633.570			Rp. 65.340.968.868	Rp. 65.454.118.328			Rp. 65.595.271.133	Rp. 3.852.654.812.00	
						Rp. 65.238.318.188	Rp. 102.633.570			Rp. 65.340.968.868	Rp. 65.454.118.328			Rp. 65.595.271.133	Rp. 3.852.654.812.00	
	8	01	01			Rp. 5.787.880.098	Rp. 101.385.570			Rp. 5.889.286.706	Rp. 5.901.860.038			Rp. 5.932.291.848	Rp. 4.489.988.312.00	
						Rp. 5.787.880.098	Rp. 101.385.570			Rp. 5.889.286.706	Rp. 5.901.860.038			Rp. 5.932.291.848	Rp. 4.489.988.312.00	
	8	01	01			Rp. 13.489.500				Rp. 13.489.500	Rp. 13.489.500			Rp. 13.489.500	Rp. 23.405.800.00	
						Rp. 13.489.500				Rp. 13.489.500	Rp. 13.489.500			Rp. 13.489.500	Rp. 23.405.800.00	
	8	01	01	2001		Rp. 3.475.000				Rp. 3.475.000	Rp. 3.475.000			Rp. 3.475.000	Rp. 6.006.000.00	
						Rp. 3.475.000				Rp. 3.475.000	Rp. 3.475.000			Rp. 3.475.000	Rp. 6.006.000.00	
	8	01	01	2002		Rp. 2.128.000				Rp. 2.128.000	Rp. 2.128.000			Rp. 2.128.000	Rp. 3.706.000.00	
						Rp. 2.128.000				Rp. 2.128.000	Rp. 2.128.000			Rp. 2.128.000	Rp. 3.706.000.00	
	8	01	01	2004		Rp. 1.845.000				Rp. 1.845.000	Rp. 1.845.000			Rp. 1.845.000	Rp. 1.643.800.00	
						Rp. 1.845.000				Rp. 1.845.000	Rp. 1.845.000			Rp. 1.845.000	Rp. 1.643.800.00	
	8	01	01	2005		Rp. 1.601.000				Rp. 1.601.000	Rp. 1.601.000			Rp. 1.601.000	Rp. 1.674.000.00	
						Rp. 1.601.000				Rp. 1.601.000	Rp. 1.601.000			Rp. 1.601.000	Rp. 1.674.000.00	
	8	01	01	2006		Rp. 1.984.000				Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000			Rp. 1.984.000	Rp. 3.006.000.00	
					Rp. 1.984.000				Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000			Rp. 1.984.000	Rp. 3.006.000.00		
8	01	01	2007		Rp. 2.478.500				Rp. 2.478.500	Rp. 2.478.500			Rp. 2.478.500	Rp. 7.243.800.00		
					Rp. 2.478.500				Rp. 2.478.500	Rp. 2.478.500			Rp. 2.478.500	Rp. 7.243.800.00		
8	01	01	2002		Rp. 4.101.542.938				Rp. 4.101.542.938	Rp. 4.101.542.938			Rp. 4.101.542.938	Rp. 3.483.152.712.00		
					Rp. 4.101.542.938				Rp. 4.101.542.938	Rp. 4.101.542.938			Rp. 4.101.542.938	Rp. 3.483.152.712.00		
8	01	01	2001		Rp. 3.991.842.238				Rp. 3.991.842.238	Rp. 3.991.842.238			Rp. 3.991.842.238	Rp. 3.365.452.712.00		
					Rp. 3.991.842.238				Rp. 3.991.842.238	Rp. 3.991.842.238			Rp. 3.991.842.238	Rp. 3.365.452.712.00		
8	01	01	2003		Rp. 104.626.000				Rp. 104.626.000	Rp. 104.626.000			Rp. 104.626.000	Rp. 103.704.000.00		
					Rp. 104.626.000				Rp. 104.626.000	Rp. 104.626.000			Rp. 104.626.000	Rp. 103.704.000.00		
8	01	01	2005		Rp. 3.902.000				Rp. 3.902.000	Rp. 3.902.000			Rp. 3.902.000	Rp. 3.004.000.00		
					Rp. 3.902.000				Rp. 3.902.000	Rp. 3.902.000			Rp. 3.902.000	Rp. 3.004.000.00		
8	01	01	2007		Rp. 972.700				Rp. 972.700	Rp. 972.700			Rp. 972.700	Rp. 1.006.000.00		
					Rp. 972.700				Rp. 972.700	Rp. 972.700			Rp. 972.700	Rp. 1.006.000.00		
8	01	01	2005		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 84.006.000.00		
					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 84.006.000.00		
8	01	01	2011		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 84.006.000.00		
					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 84.006.000.00		
8	01	01	2006		Rp. 787.277.600				Rp. 787.277.600	Rp. 787.277.600			Rp. 787.277.600	Rp. 14.506.000.00		
					Rp. 787.277.600				Rp. 787.277.600	Rp. 787.277.600			Rp. 787.277.600	Rp. 14.506.000.00		
8	01	01	0001		Rp. 3.778.600				Rp. 3.778.600	Rp. 3.778.600			Rp. 3.778.600	Rp. 3.806.000.00		
					Rp. 3.778.600				Rp. 3.778.600	Rp. 3.778.600			Rp. 3.778.600	Rp. 3.806.000.00		
8	01	01	2002		Rp. 17.891.500				Rp. 17.891.500	Rp. 17.891.500			Rp. 17.891.500	Rp. 13.006.000.00		
					Rp. 17.891.500				Rp. 17.891.500	Rp. 17.891.500			Rp. 17.891.500	Rp. 13.006.000.00		
8	01	01	0004		Rp. 20.015.000				Rp. 20.015.000	Rp. 20.015.000			Rp. 20.015.000	Rp. 23.000.000.00		
					Rp. 20.015.000				Rp. 20.015.000	Rp. 20.015.000			Rp. 20.015.000	Rp. 23.000.000.00		
8	01	01	0005		Rp. 12.489.800				Rp. 12.489.800	Rp. 12.489.800			Rp. 12.489.800	Rp. 13.700.000.00		
					Rp. 12.489.800				Rp. 12.489.800	Rp. 12.489.800			Rp. 12.489.800	Rp. 13.700.000.00		

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan												
Kode	Unian	Sumber Dana	Lokasi	Tahua - 1	Jumlah Tahun N						Tahun + 1	
					Sabulum			Seadua				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi		Belanja Modal
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etik Budyas Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Peralatan dan Perakal Kantor Kecamatan, Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Rp. 56.022.896.750					Rp. 56.022.896.750	Rp. 56.303.814.890	Rp. 56.303.814.890
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan d Bidang Pendidikan-Politik, Etik Budyas Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Peralatan dan Perakal Kantor Kecamatan, Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		Rp. 55.687.565.750					Rp. 55.687.565.750	Rp. 55.798.927.890	Rp. 55.798.927.890
8 01 03 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi d Bidang Pendidikan-Politik, Etik Budyas Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Peralatan dan Perakal Kantor Kecamatan, Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		Rp. 324.185.500					Rp. 324.185.500	Rp. 502.781.500	Rp. 502.781.500
8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d Bidang Pendidikan Politik, Etik Budyas Politk, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Peralatan dan Perakal Kantor Kecamatan, Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa		Rp. 11.105.500					Rp. 11.105.500	Rp. 11.105.500	Rp. 11.105.500
8 01 04	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN BERBASIS KEWASPADAN				Rp. 125.051.000					Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi di Kemasyarakatan				Rp. 125.051.000					Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan d Bidang Pendidikan Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singketa Ormas Pergawasan Ormas dan Ormas Adang d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		Rp. 125.051.000					Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000	Rp. 125.051.000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMANGAN KETAHANUAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA				Rp. 554.000.500					Rp. 554.000.500	Rp. 500.416.500	Rp. 500.416.500
8 01 05 2.01	Pertemuan dan Kebijakan Teknis dan Penetapan dan Pelaksanaan Bidang Budaya				Rp. 554.000.500					Rp. 554.000.500	Rp. 500.416.500	Rp. 500.416.500
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan d Bidang Administrasi Sosial, Budyas Administrasi Sosial, Fasilitas Penyelenggaraan Naradika, Fasilitas Keutuhan Unsat Beragama dan Penghayat Kepercayaan d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa		Rp. 554.000.500					Rp. 554.000.500	Rp. 500.416.500	Rp. 500.416.500
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN ALUAKSI DAN FASILITAS PENYANGGARAN NONLUK SOSIAL				Rp. 1.209.978.900					Rp. 1.209.978.900	Rp. 1.062.312.800	Rp. 1.062.312.800
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Konflik Sosial				Rp. 1.209.978.900					Rp. 1.209.978.900	Rp. 1.062.312.800	Rp. 1.062.312.800
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi d Bidang Kewaspadaan Ort, Kerja Sama Intellen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lemoga Masyarakat, Peralatan dan Perakal arat Negara, Fasilitas Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik d Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		Rp. 765.920.000					Rp. 765.920.000	Rp. 894.956.000	Rp. 894.956.000

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun -1	Sebelum				Sesudah				Tahun +1
						Tahun N				Tahun N				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
8	01	06	2.01	0005		Rp. 50.045.000			Rp. 50.045.000	Rp. 40.045.000			Rp. 40.045.000	Rp. 75.000.000,00
8	01	06	2.01	0006		Rp. 397.013.900			Rp. 397.013.900	Rp. 167.311.900			Rp. 167.111.900	Rp. 220.812.500,00
						Rp. 65.238.318.188	Rp. 102.538.670		Rp. 65.340.856.958	Rp. 65.444.918.328	Rp. 510.352.310		Rp. 55.865.771.138	Rp. 8.532.554.812,00
						Jumlah								

Kab. Banjar

Kepala Badan/Kesatuan Bangsa Dan Politik

KABUPATEN BANJAR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SAFRIN NOOR, SH MH

NIP. 19640809196031013

Kab. Banjar
Kepala Badan Kestua Bangsa Dan Politik



SAFRIN NOOR, SH, MH
NP 1984009495031013



BUPATI BANJAR

Martapura, 11 Juli 2024

Nomor : 000.7.2.4/663 / PPE-Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Pagu Indikatif Perubahan
Renja PD 2024

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Banjar
di - Tempat

Dalam rangka merumuskan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berdasarkan hasil pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan Perangkat Daerah. Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) telah menyusun pagu indikatif Perubahan Renja menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan agenda penting lainnya di tahun 2024.

Berkenaan hal tersebut, disampaikan hal-hal berikut:

1. Pagu indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah sudah ditambahkan pada SIPD-RI
2. Perangkat Daerah melakukan input rincian belanja pagu indikatif yang disetujui TAPD, rincian Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana lampiran surat.
3. Melakukan perbaikan target kinerja menyesuaikan penambahan belanja dan juga rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.
4. Setelah Selesai Input Perubahan, Kepala Perangkat Daerah memvalidasi rincian belanja.
5. Jadwal input rincian belanja dilakukan sampai dengan tanggal **19 Juli 2024**, apabila tidak melakukan perbaikan di SIPD-RI sampai batas waktu tersebut maka akan diambil alih TAPD.
6. Rancangan Akhir Renja Perubahan sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Rancangan Perubahan Renja dan pagu indikatif disampaikan kepada Bidang Bappedalitbang Mitra SKPD masing-masing paling lambat tanggal 11 Agustus 2024, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara kolektif.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI BANJAR**

H. SAIDI MANSYUR S.I.Kom

Lampiran Surat
Nomor : 000.7.2.4/643/1996-Skappedalibang
Tanggal : 11 Juli 2024

PAGE INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2024
Batas Kashtun Bangun dan Politik

Sah Kegiatan	Pagu APBD 2024	Pembahasan/ Pengurangan	Pagu Indikatif P- RKPD 2024	Keterangan
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Kewangan RKPD	104.826.000		104.826.000	TIDAK DISETUJUI
Pengembangan Raper Koordinasi dan Konsultasi RKPD	710.000.000	125.000.000	585.000.000	SETUJU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.483.679	231.076.280	401.562.950	AC DISETUJUI HANYA 2 UNIT PENAMBAHAN, TV TIDAK DISETUJUI, LAPTOP DAN PC 1 UNIT DISETUJUI PENAMBAHAN TABLET TIDAK DISETUJUI, PORTER DISETUJUI HANYA 2 UNIT, MOBE TIDAK DISETUJUI, NISIA PENELITIAN DISETUJUI 10007
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.610.000		463.610.000	TIDAK DISETUJUI
Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kebutuhan Dinas Operasional atau Ispungan	175.420.000	7.000.000	168.420.000	SETUJU
Pembentukan Faskedra	1.021.710.000		1.021.710.000	TIDAK DISETUJUI
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Kira Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolektifitas Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Wilayah Politik di Daerah	35.367.565.750	44.191.000	35.381.756.750	SETUJU, KECUALI Sedikitnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Konflik Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.051.000		125.051.000	TIDAK DISETUJUI
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Fasilitas Kebutuhan Umum Masyarakat dan Penghapal Kependudukan di Daerah	554.000.500		554.000.500	TIDAK DISETUJUI
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolektifitas Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	784.150.000	58.100.000	822.250.000	SETUJU DENGAN FULLBOARD, DUSAH JADI FULLDAY
Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kolektifitas Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.045.000	10.000.000	40.045.000	SETUJU
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	297.013.900	251.000.000	146.013.900	SETUJU
Jumlah Total	60.263.696.830	323.440.280	60.487.346.100	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 40 Gedung Berintan Lt. III Telp/Fax (0511) 4721113
 Martapura Kodepos 70611 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023

KEMERIAH BAHAN KEMAZHAAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efisiensi pelaksanaan Rencana Kerja 2024 dan Dokumen Kerja Perubahan 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
- Menyingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42102);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43532);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44011);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47009);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Kerja Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kelengkapan Tata cara Pengurusan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Menteri, Anggota/Bendahara Menteri dan Wakil Menteri;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/PS/21.004/28/2007 tentang Pedoman Umum Pelayanan dan Kinerja Menteri dan Anggota Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengurusan, Pengawasan, Kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurusan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tingkat II, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kecamatan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan, Mekanisme Pengawasan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

LEADERBOARD

- [illegible]

- e. Mendukung pelaksanaan program-program: Gerakan Kerja Sederhan Masyarakat Martapura Utara Politik Kabupaten Banjar;
- f. Mendukung pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kerja Sederhan Masyarakat Banjar dan Politik Kabupaten Banjar.

- KETAWA :** Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini ditanggung oleh pada KPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2023.
- KETERANGAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 6 Februari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR,



SAFRIN NOOR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199203 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TANGGAL 6 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4	1. Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
	2. Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Anggota
	3. Kabid Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
	4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	5. Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANJAR.

SAFRIN NOOR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199203 1 013

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dengan ***bismillaahirrohmaanirrohiim*** dan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dicatat sebagai ibadah dan tidak terputus serta rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar untuk periode triwulan akhir tahun yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar 2024. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/ kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Kegiatan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan salah satu rangkaian tahap perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, Usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025.

Renja SKPD mempunyai peranan penting dalam sistem perencanaan daerah dan sebagai sarana pendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Selain tersebut di atas Renja SKPD juga merupakan :

1. Dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun ke depan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD-P (RAPBDP) Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun dengan menyesuaikan nomenklatur sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2022-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2021-2026, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan untuk pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dominan pada misi ke-4, Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar 2021-2026 dimana Sasaran Pada RPJMD menjadi Tujuan Renstra SKPD, seperti tabel berikut:

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar**

Misi Ke- Empat : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.	
Tujuan RPJMD:	Sasaran RPJMD:
Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik
Tujuan Renstra SKPD	Sasaran SKPD
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
10. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE-Bappedalitbang tentang Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan maksud sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2024 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab I **Pendahuluan**

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

Bab II **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Sampai Dengan**

Triwulan II Tahun 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, berisikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024 dari total nilai pagu sebesar Rp. 20.317.480.264- telah terealisasi sebesar Rp. 10.043.694.636 ,- atau 49,43%.

Adapun dibawah ini beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah :

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Kesiapan aplikasi LPSE yang belum maksimal di awal tahun sehingga penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun agak terlambat sehingga proses pengadaan pun menjadi agak terlambat. Proses pengadaan yang terlambat tersebut secara umum untuk pekerjaan konstruksi.
2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Adanya perbedaan acuan nominal pagu pengadaan untuk kelas kecil, menengah dan besar berdasarkan Perpres dan Permenpu. Sehingga menunggu kejelasan perbup yang menyikapi hal tersebut.
4. Adanya perubahan target dan sasaran sehingga dilaksanakan setelah disahkannya APBD Perubahan/ Pergeseran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp 20.317.480.264,-. Untuk Program Pencegahan penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengelola anggaran sebesar Rp 6.324.427.000,- dengan realisasi sebesar Rp **Rp 4.104.554.140,-** atau sebesar (64.90%). Dari kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar telah melaksanakan 2 Program 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan rincian:

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 511.000.000,- dengan target 365 laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 53.711.000,- (82,78%) dengan realisasi fisik 180 (enam) laporan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senantiasa berusaha hadir memberikan respon cepat terhadap informasi kejadian yang diterima *call center*, sehingga selama kurun waktu 6 (enam) bulan seluruh kejadian peristiwa kebakaran ditanggapi dan dibuatkan laporannya.

2. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 542.000.000,- dengan target 365 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 144.090.000,- (26,58%) dengan realisasi fisik 180 (enam) Dokumen yang sudah tersedia. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senantiasa berusaha hadir memberikan respon cepat terhadap informasi kejadian yang diterima *call center*, sehingga selama kurun waktu 6 (enam) bulan seluruh kejadian peristiwa darurat ditanggapi dan didokumentasikan.

3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 465.000.000,- dengan target 40 orang. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 145.117.600,- (31.21%) dengan realisasi fisik 0.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp25.000.000,- dengan target 5 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (80,00%) dengan realisasi fisik 0.

KEGIATAN INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

1. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp34.625.000,- dengan target 12 dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran belum ada (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 (satu) dokumen tersusun.

2. Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp37.125.000,- dengan target 12 Dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 1.000.000,- (2,69%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 dokumen tersusun.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp242.900.000,- dengan target 250 orang. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- (21,61%), dengan realisasi fisik sebanyak 244 orang masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran.

2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp59.000.000,- dengan target 20 desa/kelurahan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 12.880.000,- (21,83%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) desa/kelurahan yang sudah ada pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp11.069.000,- dengan target 12 laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp1.619.000,- (14,63%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) laporan yang sudah tersusun.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp17.970.200,- dengan target 7 Dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp3.977.000,- (22,13%), dengan realisasi fisik sebanyak 5 Dokumen yang sudah tersusun.

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp8.408.800,- dengan target 3 Dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp1.375.000,- (16,35%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 Dokumen yang sudah tersusun.

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp2.439.766.021,- dengan target 19 Orang/Bulan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp1.457.788.168,- (59,75%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 54.239.800,- dengan target 12 Dokumen. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 32.910.000,- (60,68%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) Dokumen yang sudah tersusun.

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 264.610.000,- dengan target 1 Paket. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp261.635.000,- (98,88%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 (satu) paket yang disediakan.

6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp74.000.000,- dengan target 5 orang. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 38.777.200,- (52,40%), dengan realisasi fisik sebanyak 5 (lima) orang yang sudah mengikuti bimtek.

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

7. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 13.778.500,- dengan target 12 Paket. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 7.461.000,- (54,15%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) paket disediakan.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 39.680.442,- dengan target 12 Paket. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 23.586.332,- (59,44%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) paket disediakan.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp14.347.800,- dengan target 12 Paket. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp6.526.900,- (45,49%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) paket disediakan.

10. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp4.500.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 2.250.000,- (50,00%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) laporan yang tersusun.

11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp333.475.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 209.826.244,- (62,92%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) laporan tersusun.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 105.352.750,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 49.408.370,- (46,90%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) 6 Laporan tersusun.

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp2.033.600.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 912.893.840,- (44,89%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 (enam) 6 Laporan tersusun.

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 73.370.000,- dengan target 1 unit. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 19.699.526,- (26,85%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 (satu) unit dipelihara.

15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 270.912.500,- dengan target 10 unit. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 82.353.132,- (30,40%), dengan realisasi fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit terpelihara.

16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 14.740.000,- dengan target 10 unit. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 4.348.000,00,- (29,50%), dengan realisasi fisik sebanyak 3 (tiga) unit terpelihara.

17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 190.872.000,- dengan target 1 unit. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp 0,00,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 (satu) unit terpelihara. Masih dalam proses pemeliharaan/rehabilitasi.

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Implementasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra:

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPKP dan Pencapaian Renstra Dinas Pemadam
Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2024**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE					Sasaran/Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 14=12, 15=11+13		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
1	5	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	15.030.023													
1	5	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	190.380.285													
1	5	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.100.075													
1	5	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	20.040.030													
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran	86,25 %	22.734.188.519		492.766.991	86,25 %	558.885.500		66.087.073		150.267.073		150.267.073		26,89	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

a. Perubahan Indikator Kinerja

Perubahan indikator kinerja terdapat pada program, kegiatan dan sub kegiatan karena menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 serta menyesuaikan dengan indikator SPM Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dengan perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

b. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Terdapat 2 program, 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, diantaranya ada yang mengalami penambahan dan pergeseran anggaran.

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; dan

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut program/kegiatannya adalah Rp7.081.363.336,- yang dirinci seperti halnya pada tabel 3.1. Sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Alasan dilakukan perubahan.

Secara umum alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator kinerja, dan jumlah kegiatan maupun perubahan dana/ pagu indikatif dikarenakan :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024.
2. Perubahan Indikator sub kegiatan menyesuaikan Kepmendagri Nomor 050-5889 yang telah ditetapkan dengan perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

I. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, misi ke 5 yaitu **“Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar tahun 2024 terdiri dari program utama, yaitu:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Pada program ini diarahkan untuk melakukan koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan terhadap fasilitasi usulan peningkatan sarana prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran, investigasi pendataan jumlah korban kebakaran pasca peristiwa kejadian kebakaran, fasilitasi terhadap proses pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran di desa dan kelurahan. Menyusun dan mensosialisasikan beberapa kebijakan dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran kepada *stakeholder* dan masyarakat. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada lingkungan bangunan gedung publik dan perkantoran. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah permukiman rawan bencana kebakaran seperti kawasan permukiman kumuh dan padat.

Berikut rumusan rencana program dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan
KegiatanPerangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.317.480.264	22.337.905.064	12.317.236.868	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
01	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penilaian mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) DPKP	76%	76%	13.993.053.264	14.260.573.264	267.520.000	
1	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusun nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persentase Tersusun nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	19.768.500	19.768.500	0	
1	05	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	13.440.000	13.440.000	0	
1	05	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.328.500	6.328.500	0	
1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.278.360.983	9.264.650.983	-13.710.000	

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	94 Orang/ Bulan	9.187.820.983	9.187.820.983	0	
1	05	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	90.540.000	76.830.000	-13.710.000	Penyesuaian dan penambahan dana terhadap Perbup no. 2 th 2024 tentang SHS honorarium pengelola keuangan dan pengurangan dana honorarium petugas arsip yang tidak terliisasi
1	05	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	5.049.000	5.049.000	0	
1	05	01	203	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.049.000	5.049.000	0	
1	05	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	150.000.000	150.000.000	-	
1	05	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	-	

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	05	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	150.000.000	150.000.000	-	
1	05	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhi Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	453.030.600	491.363.600	-	
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.469.000	13.572.000	4.103.000	Penambahan anggaran untuk pembelian batteray AA, LR 20, AAA, bola lampu LED
1	05	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.032.000	30.107.000	1.075.000	Penambahan belanja Masker, sarung tangan dan HandSanitizer
1	05	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.529.600	8.529.600	-	
1	05	1	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12.000.000	-	
1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	397.200.000	-2.800.000	
1	05	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	702.272.000	702.272.000	-	

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	05	1	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	486.306.000	486.306.000	-	
1	05	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	73 Unit	73 Unit	17.352.000	17.352.000	-	
1	05	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	122 Unit	96 Unit	198.614.000	198.614.000	-	Penyesuaian target jumlah item belanja
1	05	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.543.042.181	2.525.618.181	-17.424.000	
1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.332.181	148.908.181	-17.424.000	Penyesuaian anggaran belanja internet sesuai dengan keperluan
1	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.376.710.000	2.376.710.000		

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	05	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	841.530.000	1.691.806.000	-	
1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	274.610.000	188.720.000	-85.890.000	Penyesuaian jumlah unit yang dipelihara dan kebutuhan alat tulis kantor
1	05	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	366.051.000	366.051.000		
1	05	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.640.000	36.880.000	16.240.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan AC, PC, dan Printer
1	05	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	159.318.000	244.244.000	84.926.000	Penambahan anggaran untuk rehabilitasi Gedung kantor (lobi)
1	05	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 unit	20.911.000	295.911.000	275.000.000	Penambahan anggaran pembuatan lahan parkir
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Terlayani	1. Persentase layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran	100%	86,25%	6.324.427.000	8.077.331.800	1.752.904.800	

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
							2. Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran		100%				
							3. Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi		100%				
							4. Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran		6,89%				
							5. Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran		100%				
1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Terlayani	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.203.735.700	5.145.531.600	-	
1	05	04	201	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	365 Laporan	511.000.000	62.446.400	-448.553.600	Belanja makan miinum rapat ditiadakan, honor operasional kegiatan piket siaga dikurangi sesuai dengan kebutuhan
1	05	04	201	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	365 Dokumen	365 Dokumen	542.000.000	350.845.000	-191.155.000	Penyusuaian honor operasional kegiatan piket siaga dikurangi sesuai dengan kebutuhan

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	05	04	201	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	40 Orang	65 Orang	465.000.000	495.000.000	30.000.000	Penambahan pada perjalanan dinas
1	05	04	201	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	258 unit	188 unit	3.545.475.700	4.212.589.700	667.114.000	Penambahan pada belanja modal alat rumah tangga, alat pemadam kebakaran
1	05	04	201	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	1 Dokumen	25.535.000	10.535.000	-15.000.000	Pengurangan anggaran sesuai dengan target yang berkurang
1	05	04	201	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	500 Keluarga	250 Keluarga	114.725.000	70.135.000	-44.590.000	
1	05	04	202		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	194.300.000	143.115.500	-51.184.500	
1	5	4	202	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	102.700.000	51.515.500	-51.184.500	Pengurangan anggaran jumlah moderator

KODE					Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja	Perubahan Renja 2024	2024	Renja Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang	
1	5	4	202	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	91.600.000	91.600.000	-	
1	05	04	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	310.828.800	329.003.300	18.174.500	
1	5	4	204	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	500 Orang	100.813.800	158.263.800	57.450.000	Penambahan makan minum rapat dan pembuatan id card
1	5	4	204	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/ Kelurahan	20 Desa/ Kelurahan	86.200.000000	112.588.000	26.388.000	Penambahan honorarium narasumber
1	5	4	204	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	4 dokumen	4 Dokumen	123.815.000	58.151.500	-65.663.500	Penambahan dana untuk pembuatan id card
1	05	04	205		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	615.562.500	3.339.562.500	1.788.099.400	
1	5	4	205	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	56 Unit	612 Unit	615.562.500	2.403.661.900	1.788.099.400	Penambahan pada makan minum apat dan peralatan rescue

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2024 jumlah anggaran yang tersedia di awal Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sebesar Rp 20.317.480.264,- dan mengalami perubahan sebesar Rp 22.337.905.064,-. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan pada beberapa kegiatan diantaranya:

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Ada pengurangan pagu anggaran.

- b) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Ada pengurangan pagu anggaran.

- c) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Ada penambahan pagu anggaran.

- d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Ada pengurangan pagu anggaran.

- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Ada pengurangan pagu anggaran.

- f) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

Ada pengurangan pagu anggaran.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- a) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Ada pengurangan pagu anggaran.

- b) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Tidak ada penambahan pagu anggaran

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Ada penambahan pagu anggaran.

- b) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Ada penambahan pagu anggaran.

- c) Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

Ada pengurangan pagu anggaran.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- a) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Ada penambahan pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang berjalan ini telah menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dibandingkan dengan Rencana kerja DPKP Kabupaten Banjar Tahun 2024 awal. Perubahan Rencana kerja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang, dan masukan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terkait realisasi program kegiatan yang telah diimplementasikan yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya DPKP berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPKP, seluruh aparaturnya DPKP secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2024.
4. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Renja Perubahan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2024. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Banjar merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Banjar sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Banjar tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renja dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan yang menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2021-2026 adalah “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2021-2026, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan untuk pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
- 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
- 5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran Badan Penanggulangan Bencana dominan pada misi ke-3, Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2021-2026, seperti tabel berikut:

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar**

Misi Ke-Tiga : Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
Tujuan:	Sasaran:
Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji RKPD Kabupaten Banjar berdasarkan evaluasi kinerja BPBD sampai dengan Triwulan II tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra BPBD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat

daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2024 ini adalah untuk:

- a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam penanggulangan bencana.
- e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKJIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 2 program dengan 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan, di mana 1 program adalah program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 program utama adalah Program Penanggulangan Bencana.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPBD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPBD
S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
MENURUNNYA RISIKO DAN DAMPAK BENCANA ALAM	INDEKS KAPASITAS DAERAH (IKD)	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Indeks	0,62	0,61	0,60	Rp6.821.711.286	Rp3.013.286.535		28%	53%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	Indeks	80	84	74	Rp7.895.809.655	Rp2.902.538.204	84,64	37%	64%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	100	100	100	Rp19.127.500	Rp5.730.500	100	30%	54%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	Rp2.429.000	Rp500.000	0	21%	65%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	Rp2.557.000	Rp-	0	0%	25%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	Rp1.671.000	Rp-	0		25%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	Rp3.448.000	Rp2.372.500	1	69%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	Rp1.339.000	Rp-	0	0%	6%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	Rp2.793.500	Rp1.685.500	1	60%	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	6	6	Rp4.890.000	Rp1.172.500	3	24%	56%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	100	100	100	Rp4.057.238.355	Rp1.707.142.341	100	42%	61%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	29	29	Rp4.057.238.355	Rp1.666.968.641	29	41%	50%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	12	12	Rp82.980.000	Rp35.805.000	6	43%	44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	Rp3.070.900	Rp2.934.700	1	96%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	Rp7.999.700	Rp1.434.000	6	18%	51%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Rp5.677.200	Rp2.063.500	100	36%	63%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	1	1	Rp2.113.500	Rp2.063.500	1	98%	100%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	4	4	Rp1.509.700	Rp-	1	0%	40%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	12	12	Rp2.054.000	Rp-	6	0%	50%

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persen			100	Rp50.000.000	Rp6.017.000	100	12%	20%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33	5	5	Rp50.000.000	Rp6.017.000	1	12%	20%
		Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	Rp313.569.800	Rp183.346.758	100	58%	112%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	Rp67.179.000	Rp65.801.000	1	98%	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	Rp64.406.800	Rp18.117.100	1	28%	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	Rp16.484.000	Rp4.101.000	1	25%	100%
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	Rp5.500.000	Rp1.175.000	5	21%	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	105	105	Rp160.000.000	Rp94.152.658	81	59%	162%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	100	100	Rp1.441.528.000	Rp-	10	0%	35%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	3	Rp1.441.528.000	Rp472.100.000	1	33%	35%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	10	10	Rp9.603.000	Rp-	0	0%	10%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	Rp1.488.234.800	Rp741.397.979	42%	43%	50%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	Rp111.459.768	Rp47.692.802	6	43%	50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	Rp1.432.690.000	Rp619.778.800	6	43%	50%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100	Rp520.434.000	Rp256.840.126	100	49%	100%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1	1	Rp38.990.000	Rp19.479.350	1	50%	50%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	28	29	Rp423.635.000	Rp180.738.694	29	43%	50%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	510	102	102	Rp107.500.000	Rp21.795.000	41	20%	50%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	Rp57.500.000	Rp54.868.000	1	95%	97%
		PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Indeks Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Indeks	0,41 0,70 0,56	0,38 0,54 0,80	0,38 0,67 0,53	Rp1.642.880.101	Rp327.007.000	0	20%	43%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,41	0,38	0,38	Rp464.588.500	Rp81.849.000	0	18%	81%
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	1	Rp287.050.000	Rp-	0	0%	95%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	2400	800	1150	Rp177.538.500	Rp81.849.000	360	46%	67%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,41 0,70	0,38 0,80	0,38 0,53	Rp1.425.499.000	Rp456.295.384	0	32%	34%

		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	4	1	1	Rp120.706.000	Rp79.600.000	100	66%	100%
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	500	100	100	Rp33.621.500	Rp-	0	0%	0%
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	5	0	1	Rp189.090.000	Rp-	0	0%	0%
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	300	0	100	Rp43.930.000	Rp-	0	0%	0%
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	0	1	Rp302.050.000	Rp-	0	0%	0%
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	400	100	100	Rp33.173.500	Rp-	0	0%	10%
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	1	Rp332.850.000	Rp10.405.384	0	3%	60%
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman	Unit	40	11	21	Rp370.078.000	Rp366.290.000	21	99%	100%

			bencana di kawasan tempat tinggalnya									
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,70	0,37	0,36	Rp985.480.101	Rp539.926.317	0	55%	52%
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	10	2	2	Rp108.752.500	Rp4.425.000	1	4%	50%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10800	0	7000	Rp50.000.000	Rp-	0	0%	50%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1442	8280	1200	Rp612.937.000	Rp159.019.500	29305	26%	50%
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	10	2	2	Rp2.152.284.700	Rp376.481.817	1	17%	59%
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	Indeks	0,56	0,56	0,53	Rp118.169.600	Rp25.901.500	0	22%	15%
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	26	3	4	Rp67.067.000	Rp18.328.500	0	27%	15%
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	12	3	2	Rp58.561.500	Rp7.573.000	0	13%	15%

TABEL 2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN II				KETERANGAN KRITERIA
		TARGET SD TW II	Satuan	Realisasi sd TW II	% Capaian sd TW II	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	0	Indeks	0	0	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	25%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	25%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3	300%	MEMENUHI TARGET
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	8	160%	MEMENUHI TARGET
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan	29	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	6	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	6	100%	MEMENUHI TARGET
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1	Dokumen	1	100%	MEMENUHI TARGET

Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	100%	MEMENUHI TARGET
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	6	100%	MEMENUHI TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	1	20%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100%	MEMENUHI TARGET
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	100%	MEMENUHI TARGET
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	81	162%	MEMENUHI TARGET
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	Persen	50%	50%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	1	35%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	6	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6	100%	MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	50%	Persen	50%	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	29	100%	MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	41	98%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100%	MEMENUHI TARGET
PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Indeks Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan	0	Indeks	0	100%	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)

	penanganan Darurat Bencana 3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	0	Indeks	0	100%	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	1	95%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300	Orang	360	120%	MEMENUHI TARGET
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	0	Indeks	0	100%	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	Kawasan	1	100%	MEMENUHI TARGET
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0	Orang	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	Dokumen	0	100%	MEMENUHI TARGET
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	0	Orang	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	0	3%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	Keluarga	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	0	60%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	21	Unit	21	100%	MEMENUHI TARGET

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	0	Indeks	0	100%	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	Dokumen	1	100%	MEMENUHI TARGET
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500	Orang	891	25%	TIDAK MEMENUHI TARGET
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600	Orang	717	119%	MEMENUHI TARGET
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	0	Indeks	0	100%	MEMENUHI TARGET (TARGET ADA DI TW IV)
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	Dokumen	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0	Kegiatan	0	100%	MEMENUHI TARGET

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa dari 2 program, 12 sub kegiatan dan 44 sub kegiatan yang dilaksanakan BPBD tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Terdapat 9 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Tahun 2025 dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 0 Dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 25% pada triwulan II. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja dikarenakan adanya beberapa kendala terkait penyesuaian belanja kegiatan dengan pagu indikatif yang banyak mendapat pengurangan anggaran.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024 dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 0 Dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 25% pada triwulan II. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja dikarenakan adanya gangguan pada SIPD RI sehingga belum dapat dilakukan penginputan dan keputusan TAPD yang belum sesuai dengan permintaan.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan diukur dari jumlah ASN yang akan melakukan pengembangan kompetensi/bimtek dengan target pada Triwulan II sebanyak 5 orang ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi/Bimtek dan realisasi sebanyak 1 orang. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja dikarenakan tidak semua ASN di BPBD dapat mengikuti Bimtek dikarenakan terbatasnya anggaran transportasi dan akmdasi yang tersedia.

4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan berdasarkan kebutuhan sebagai penunjang kinerja BPBD Kab Banjar dalam memenuhi pengadaan barang milik daerah dengan

target pada triwulan II sebanyak 3 unit dengan realisasi sebanyak 1 unit. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja dikarenakan proses administrasi pada pejabat pengadaan yang cukup lama.

5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebagai penunjang kegiatan di kantor BPBD Kab Banjar dengan target pada triwulan II sebanyak 42 unit dan realisasi sebanyak 41 Unit. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja karena tidak semua peralatan dan mesin dapat dipelihara dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

6. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Tersedianya dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang sah dan legal dengan indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah dan legal dengan target pada Triwulan II sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 95% pada triwulan II. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja karena belum terlaksananya pelaporan keuangan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan penyusunan KRB dan belum teralisasi secara tertulis atau terdokumentasi usulan untuk asistensi ke BNPB Pusat.

7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dengan indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi dengan target pada Triwulan II sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 3% pada triwulan II. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja karena Penyusunan dokumen RPKB perencanaan awal akan dilaksanakan pada Triwulan ke II namun kebutuhan anggaran lebih sedikit sehingga dilakukan pergeseran anggaran perubahan.

8. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten/kota yang sah dan legal dengan indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dengan

dinyatakan sah/legal dengan target pada Triwulan II sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 60% pada triwulan II. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja karena Proses Penyusunan dokumen membutuhkan waktu yang sangat lama dan menunggu penyelesaian penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang masih dalam tahap akhir penyelesaian.

9. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dengan indikator kinerjanya adalah jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana dengan target pada Triwulan II sebesar 3500 orang dan realisasi sebesar 891 Orang. Adapun penyebab tidak memenuhi target kinerja karena Kejadian bencana tidak sesuai dengan yang telah diprediksi.

b) Terdapat 5 Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Laporan dan realisasi sebanyak 3 Laporan. Adapun penyebab realisasi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan karena terdapat kesalahan pada penempatan target awal, perbaikan target akan dilakukan pada renja perubahan ini.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebanyak 5 Laporan dan realisasi sebanyak 8 Laporan. Adapun penyebab realisasi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan karena terdapat kesalahan pada penempatan target awal, perbaikan target akan dilakukan pada renja perubahan ini.
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berdasarkan undangan rapat, sosialisasi, dan koordinasi sesuai keperluan dengan target pada triwulan II sebanyak 50 laporan dan realisasi sebanyak 81 laporan. Adapun penyebab realisasi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan karena banyaknya undangan rapat, sosialisasi, dan koordinasi pada triwulan II yang harus dipenuhi.

4. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan target pada Triwulan II sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 360 orang. Adapun penyebab realisasi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan karena terdapat kesalahan pada penempatan target awal, perbaikan target akan dilakukan pada rencana perubahan ini.

5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator kinerjanya adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target pada Triwulan II sebesar 600 orang dan realisasi sebesar 717 orang. Adapun penyebab melebihi target kinerja karena Kejadian bencana yang terjadi lebih banyak dari jumlah bencana yang telah diprediksi sehingga realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- c) Sedangkan selain sub kegiatan diatas seluruhnya bisa memenuhi target kinerja yang ditentukan.

Sebagai catatan untuk target pada program dan beberapa kegiatan seperti terlihat pada table 2.3 yang target sampai dengan triwulan II nya 0 (nol), hal ini disebabkan target untuk indikator tersebut baru bisa dihitung pada triwulan berikutnya karena menunggu komponen perhitungan dari indikator-indikator tersebut yang baru ada di triwulan 3 ataupun 4. Namun upaya-upaya untuk mencapai target tersebut tetap dilaksanakan pada triwulan 1 dan 2 ini melalui aktivitas-aktivitas yang terdapat pada sub kegiatan masing-masing.

Berdasarkan uraian evaluasi capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan diatas belum menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra BPBD. Hal itu dikarenakan hasil evaluasi renja yang dihasilkan hanya sampai dengan triwulan II dimana kegiatan-kegiatan masih dalam proses pengerjaan hingga triwulan IV. Sedangkan untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi, telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah menyesuaikan dengan rencana aksi yang dibuat oleh bidang pengampu program kegiatan.

Secara umum keberhasilan pencapaian target kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Faktor pendorong

- Koordinasi antara pengampu masing-masing program/kegiatan dan sub kegiatan yang terjalin baik
- Kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat
- Penempatan rencana anggaran kas yang tepat.

Selain faktor pendorong, pada pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam juga ditemui faktor penghambat dalam rangka mencapai target kinerja sampai dengan triwulan 2 yaitu sebagai berikut :

2. Faktor Penghambat

- Keadaan cuaca dan kejadian bencana yang sulit diprediksi sehingga beberapa sub kegiatan melebihi atau kurang dari target yang ditetapkan.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki.
- Beberapa fasilitas dan sarana penunjang kinerja yang kondisinya sudah kurang memadai.

Dari uraian faktor pendorong dan penghambat tersebut maka ada beberapa upaya perbaikan yang diambil dalam rangka mendorong tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut :

3. Upaya Perbaikan

- Menyusun laporan kinerja dengan progresnya serta mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- Menerapkan sistem reward dan punishment atas pencapaian sasaran kinerja BPBD Kabupaten Banjar;
- Melaksanakan rapat evaluasi rutin untuk memberikan tindak lanjut guna peningkatan kinerja;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi AKIP dan evaluasi hasil dalam menentukan kebijakan;
- Memantau capaian rencana aksi atas kinerja dalam penyusunan strategi;
- Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi dan mendokumentasikannya.
- Memperbaiki kekeliruan pada penetapan
- target.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar semula melaksanakan 2 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- V. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pengadaan Mebel
- VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penanggulangan Bencana

- I. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota
 - 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- II. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
 - 3. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota
 5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 6. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 8. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota
- III. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
 2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
 3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
 4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- IV. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota
 2. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2024

Kode Sub.Kegiatan	Uraian	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Target Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
		Target	Satuan Target	Target	Satuan Target			
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					Rp8.162.569.223	Rp8.879.630.223	Rp717.061.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp19.127.500	Rp19.127.500	Rp-
1.05.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp2.429.000	Rp2.429.000	Rp-
1.05.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp2.557.000	Rp2.557.000	Rp-
1.05.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp1.671.000	Rp1.671.000	Rp-
1.05.01.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp3.448.000	Rp3.448.000	Rp-
1.05.01.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp1.339.000	Rp1.339.000	Rp-
1.05.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3	Laporan	Rp2.793.500	Rp2.793.500	Rp-
1.05.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	16	Laporan	Rp4.890.000	Rp4.890.000	Rp-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp4.151.288.955	Rp4.153.208.955	Rp1.920.000
1.05.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang / Bulan	30	Orang/Bulan	Rp4.057.238.355	Rp4.057.238.355	Rp-
1.05.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	12	Laporan	Rp82.980.000	Rp84.900.000	Rp1.920.000
1.05.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp3.070.900	Rp3.070.900	Rp-
1.05.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	Rp7.999.700	Rp7.999.700	Rp-

1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp5.677.200	Rp5.677.200	Rp-
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp2.113.500	Rp2.113.500	Rp-
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	Laporan	Rp1.509.700	Rp1.509.700	Rp-
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Laporan	Rp2.054.000	Rp2.054.000	Rp-
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp-
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	Orang	5	Orang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp-
1.05.01.2.06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah					Rp313.569.800	Rp803.651.800	Rp490.082.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	5	Paket	Rp67.179.000	Rp157.150.000	Rp89.971.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	Bulan	Rp64.406.800	Rp71.017.800	Rp6.611.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	2	Paket	Rp16.484.000	Rp19.984.000	Rp3.500.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	Rp5.500.000	Rp5.500.000	Rp-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Laporan	155	Laporan	Rp160.000.000	Rp550.000.000	Rp390.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp1.451.131.000	Rp1.486.560.000	Rp35.429.000
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	3	Unit	Rp1.441.528.000	Rp1.441.528.000	Rp-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4	Unit	46	Unit	Rp9.603.000	Rp45.032.000	Rp35.429.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp1.544.149.768	Rp1.545.349.768	Rp1.200.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	Rp111.459.768	Rp112.659.768	Rp1.200.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	Rp1.432.690.000	Rp1.432.690.000	Rp-

1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp627.625.000	Rp816.055.000	Rp188.430.000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	1	Unit	Rp38.990.000	Rp38.990.000	Rp-
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29	Unit	29	Unit	Rp423.635.000	Rp582.825.000	Rp159.190.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82	Unit	82	Unit	Rp107.500.000	Rp117.040.000	Rp9.540.000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	Rp57.500.000	Rp77.200.000	Rp19.700.000
1.05.03	PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA					Rp4.939.690.200	Rp4.750.776.200	Rp(188.914.000)
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota					Rp464.588.500	Rp464.588.500	Rp-
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp287.050.000	Rp287.050.000	Rp-
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1150	Orang	1150	Orang	Rp177.538.500	Rp177.538.500	Rp-
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Rp1.425.499.000	Rp1.505.795.000	Rp80.296.000
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Kawasan	1	Kawasan	Rp120.706.000	Rp120.706.000	Rp-
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	100	Orang	100	Orang	Rp33.621.500	Rp33.621.500	Rp-
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp189.090.000	Rp189.090.000	Rp-
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	100	Orang	100	Orang	Rp43.930.000	Rp43.930.000	Rp-
1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp302.050.000	Rp190.250.000	Rp(111.800.000)
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Rp33.173.500	Rp33.173.500	Rp-

1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp332.850.000	Rp351.776.000	Rp18.926.000
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	21	Unit	52	Unit	Rp370.078.000	Rp543.248.000	Rp173.170.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Rp2.923.974.200	Rp2.654.764.200	Rp(269.210.000)
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp108.752.500	Rp133.752.500	Rp25.000.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7000	Orang	5000	Orang	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp(25.000.000)
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1200	Orang	1200	Orang	Rp612.937.000	Rp605.577.000	Rp(7.360.000)
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	Laporan	2	Laporan	Rp2.152.284.700	Rp1.890.434.700	Rp(261.850.000)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					Rp125.628.500	Rp125.628.500	Rp-
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	Rp67.067.000	Rp67.067.000	Rp-
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	5	Kegiatan	Rp58.561.500	Rp58.561.500	Rp-
	Total Pagu Anggaran (APBD Perubahan)					<u>Rp13.102.259.423</u>	<u>Rp13.630.406.423</u>	<u>Rp528.147.000</u>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2024 kebutuhan anggaran sebesar Rp. 13.102.259.423 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 13.630.406.423 Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa sub kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 82.980.000 bertambah sebesar Rp. 1.920.000 menjadi Rp84.900.000 Tambahan anggaran untuk kekurangan Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honor PPK, dan Honor Petugas Penyiapan SPP, SPM pembuat daftar gaji dan pembuat dokumen SKPD yang semula hanya 10 bulan menjadi 12 bulan.
2. Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp.67.179.000 bertambah sebesar Rp. 89.971.000 menjadi Rp157.150.000 Penambahan anggaran dikarenakan untuk pembuatan untuk pembelian Laptop, Komputer dan printer.
3. Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, memiliki pagu awal sebesar Rp64.406.800 bertambah sebesar Rp. 6.611.000 menjadi Rp. 71.017.800 Penambahan anggaran dikarenakan untuk keperluan belanja tinta printer.
4. Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, memiliki pagu awal sebesar Rp. 16.484.000 bertambah sebesar Rp. 3.500.000 menjadi Rp19.984.000 Penambahan anggaran dikarenakan untuk keperluan Pencetakan Map BPBD dan Amplop Cetak Kop BPBD.
5. Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 160.000.000 bertambah sebesar Rp. 390.000.000 menjadi Rp. 550.000.000 Penambahan anggaran dikarenakan Pagu Anggaran Perjalanan Dinas Wilayah Kabupaten

Banjar pada BPBD Kab.Banjar tersisa Rp. 44.435,- , Tugas Koordinasi dan Konsultasi luar wilayah Kab. Banjar yang sudah dilaksanakan dan belum dapat dibayarkan adalah sebesar Rp. 38.496.683 ,- Sedangkan pada Semester 2 ini BPBD banyak mempunyai kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah diantaranya menghadiri undangan-undangan kegiatan Nasional yang langsung dari BNPB Pusat/Undangan kementerian Lainnya yang berurusan dengan Urusan Bencana, Perjalan Dinas Pembuatan Perda Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai lanjutan dari Kajian karhutla pada Tahun 2023, Undangan-Undangan kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan urusan Standar Pelayanan Minimal, untuk Rapat koordinasi Daerah dengan BPBD Provinsi dan kegiatan perencanaan lainnya, perjalanan Dinas sub bagian Keuangan dalam rangka mengurus dokumen Hibah Mobil Dapur Umum dan Perahu Polytheline dan usulan penambahan sub bagian kepegawaian dalam rangka konsultasi dan koordinasi jabatan Fungsional, Uji Kompetensi dan kediklatan Penanggulangan Bencana ke BNPB dan Basarnas Pusat.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub kegiatan Pengadaan Mebel, memiliki pagu awal sebesar Rp. 9.603.000 bertambah sebesar Rp. 35.429.000 menjadi Rp. 45.032.000 Penambahan anggaran dikarenakan untuk untuk Pengadaan Kursi Rapat sebanyak 40 Buah, mengingat Pengadaan Meja Rapat sudah dilaksanakan pada APBD Perubahan 2023 dan belum memiliki Kursi Rapatnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 111.459.768 bertambah sebesar Rp. 1.200.000 menjadi Rp. 112.659.768 Pergeseran pagu Anggaran dari sub kegiatan lain sebesar Rp. 1.200.000 untuk kekurangan pembayaran tagihan telepon kantor BPBD.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 423.635.000 bertambah sebesar Rp. 159.190.000 menjadi Rp. 582.825.000 Penambahan anggaran digunakan untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan perbup SHS yang sebelumnya hanya dianggarkan setengah dari tarif pada perbup tersebut, dikarenakan banyaknya kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dalam kondisi rusak sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan dengan anggaran yang lumayan besar.

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 107.500.000 bertambah sebesar Rp. 9.540.000 menjadi Rp. 117.040.000 Penambahan anggaran digunakan untuk keperluan Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Komputer / Note Book. Pemeliharaan AC Split dan Pemeliharaan Tower Light BPBD.
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 57.500.000 bertambah sebesar Rp. 19.700.000 menjadi Rp. 77.200.000 Penambahan anggaran digunakan untuk keperluan Perbaikan Atap Gedung Kantor dan Gudang Logistik, karena mendapat perhatian dari BKPB untuk Gudang Logistik agar terlihat layak.
11. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 302.050.000 berkurang Rp. 111.800.000 menjadi Rp. 190.250.000 Pengurangan anggaran dikarenakan penyesuaian anggaran setelah perhitungan ulang dengan pihak ketiga dan pagu anggaran bergeser untuk sub kegiatan lainnya.

12. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 332.850.000 bertambah Rp. 18.926.000 menjadi Rp. 351.776.000 Penambahan anggaran digunakan untuk keperluan makan minum rapat pembuatan Perda Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai lanjutan dari Kajian karhutla pada Tahun 2023.
13. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp370.078.000 bertambah Rp. 173.170.000 menjadi Rp. 543.248.000 Penambahan anggaran digunakan untuk keperluan Pengadaan Peralatan Penanggulangan bencana Berupa mesin alkon apung, Tandon dan tenda posko.
14. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 108.752.500 bertambah Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 133.752.500 Penambahan anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas monitoring, evaluasi penanganan bencana dan pendistribusian Logistik.
15. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 50.000.000 berkurang Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 25.000.000 Pengurangan anggaran dikarenakan pergeseran antar sub Kegiatan lainnya.
16. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota, Sub kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 612.937.000 berkurang Rp. 7.360.000 menjadi Rp. 605.577.000 Pengurangan anggaran dikarenakan pergeseran antar sub Kegiatan lainnya.
17. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Sub

kegiatan ini memiliki pagu awal Rp. 2.152.284.700 berkurang Rp. 261.850.000 menjadi Rp. 1.890.434.700 Pengurangan anggaran dikarenakan kejadian bencana di Kabupaten Banjar tidak sesuai dengan yang telah diprediksi sebeumnya, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan lainnya untuk keperluan Pengadaan Peralatan perlengkapan Kantor, perjalanan dinas luar wilayah pada bidang Kedaruratan dan Logistik dan Belanja Makan dan Minum Rapat BPBD.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang berjalan ini telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dibandingkan dengan Rencana kerja BPBD Kabupaten Banjar Tahun 2024 awal.

Perubahan Rencana kerja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang, dan masukan dari masing – masing Bidang dan Sekretariat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait realisasi program kegiatan yang telah diimplementasikan yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peanggulangan Bencana.

Dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan penanganan bencana untuk masyarakat serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait maka perlu adanya upaya tindak sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pelatihan aparatur dalam penanganan Penanggulangan Bencana.
2. Perlunya Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana agar penanganan bencana dilakukan secara maksimal.
3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan penanggulangan bencana.
4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penanganan bencana serta kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga Berencana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini atas dasar penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor : 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Tahun 2024 dalam penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyesuaian indikator mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat mengenai perubahan indikator setiap sub kegiatan.

Diharapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Kabupaten Banjar dapat digunakan sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Renstra SKPD. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan). Dokumen ini sekaligus sebagai dasar penyesuaian Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA).

Dokumen Perubahan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar dilakukan karena adanya Penyesuaian terhadap pagu, target dan indikator sub kegiatan.

Adanya kebijakan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidaksesuaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi sampai triwulan II atas pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan

triwulan II Tahun 2024 maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan

sinergitas antara sasaran, penganggaran, indikator dan target kinerja perangkat Daerah sebagaimana tercantum perubahan rencana strategis (RENSTRA) serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuannya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024;
- 2) Sebagai dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Anggaran Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai triwulan II tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, misal:
 - Pencapaian yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi
 - Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah
 - Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas SDM Perangkat Daerah
 - Perencanaan daerah yang baik
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana pada Belanja Langsung melaksanakan 14 Program dan 30 Kegiatan, serta 78 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.31.244.317.450,- Realisasi Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.618.550.527 atau mencapai 27,58 Persen terhadap seluruh anggaran Rencana Kerja.

(1) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DinsosP3AP2KB baik yang memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terealisasi sebesar 58,37 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.5.728.369.603,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.9.017.861.327,- atau 41,56 Persen.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini

sebesar Rp.13.823.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 60.118.500,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan target fisik 80 persen dan realisasi sudah mencapai 80 persen. Capaian tersebut Sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.5.195.500,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.18.415.000,-.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Target 1 Dokumen dan sudah terealisasi 100 persen. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini hanya sebesar Rp.4.500.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.5.800.000,-.
- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA Perubahan -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Belum ada realisasi pada triwulan ke-II, kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen dan sudah terealisasi 100 persen. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini hanya sebesar Rp.1.398.500,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.4.398.500,-.
- e. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Belum ada realisasi pada triwulan ke-II, kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV.
- f. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan Target 6 Laporan dan realisasi fisik sudah 100 persen, sedangkan realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp.1.479.000,- dari target 10.876.500,- atau realisasi keuangan sebesar 13,6 persen.

- g. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target pada triwulan II yaitu 8 Laporan yang sudah terealisasi 100 persen. sedangkan realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp.1.250.000,- dari target Rp.5.006.000,- atau realisasi keuangan sebesar 10,85 persen
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.2.566.445.353,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.3.945.495.491,-.

Dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Capaian sampai triwulan II yaitu 344 Orang atau 100 persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.2.496.193.353,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.3.859.147.991,-.
- b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Capaian sampai triwulan II yaitu 68 Dokumen atau 107 persen dengan target 63 Dokumen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.70.120.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.80.700.000,-.
- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Capaian Kegiatan sudah 100 persen, Namun realisasi keuangan kegiatan ini sebesar

Rp.132.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.2.015.000,-

- d. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran /Triwulanan /Semesteran SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD sudah sesuai dengan target pada triwulan II yaitu 9 Laporan. Realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini dengan target sebesar Rp.3.632.500,- masih belum ada.
- 3) **Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi kepegawain Perangkat Daerah yang Tersedia sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang sebesar 95 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.20.000.000
- 4) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.1.579.735.604, dari total anggaran sebesar Rp.2.516.101.990.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar 40 Paket pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.47.723.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.119.254.490,-.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor. target triwulan II sebanyak 80 paket sudah tercapai, namun realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar

Rp.1.042.412.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.138.375.000,-.

- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terealisasi sebesar 1.869 Paket pada triwulan II. Capaian tersebut telah melebihi target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan yaitu 1.200 Paket. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.117.822.400,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.165.912.750,-.
 - d. **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sebesar 7 Laporan pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Namun realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.2.747.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.7.000.000.
 - e. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Untuk capaian sub kegiatan ini pada triwulan II yaitu 6 paket dan telah melebihi target pada triwulan II yaitu sebanyak 8 paket. Sedangkan untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.21.679.400, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.29.100.000.
 - f. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar 6 Laporan pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.347.351.305,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.466.000.000.
- 5) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.1.290.518.789 ,dengan total anggaran sebesar Rp. 3.354.139.385

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 6 Laporan pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.63.415.615, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.93.259.690.
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terealisasi sebesar 6 Laporan pada triwulan II Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.1.227.103.174, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.638.260.000.
- 6) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 36,65 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.257.864.857, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.350.707.906

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terealisasi sebesar 1 unit pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target kinerja. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.21.000.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.23.500.000,-.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara

dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya terealisasi sebesar 18 Unit pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.50.435.137, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.252.000.000.

- c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terealisasi sebesar 10 Unit pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.2.410.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.39.320.000.
- d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi terealisasi sebesar 1 Unit pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.109.024.720, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.960.780.566.

- 2. **Program Pemberdayaan Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan terealisasi sebesar 29,95 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.106.404.300,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.314.253.500.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)** dengan indikator kinerja Persentase **Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Terasilitasi dan Meningkatkan Kapasitasnya** terealisasi sebesar 0 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut tidak sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan dan belum ada Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sedangkan target sebesar Rp.10.000.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan

Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi, dengan target 1 Keluarga dan Target Keuangan sebesar Rp.10.000.000,-.

- 2) **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 23,88 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.208.721.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.919.990.900.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 76 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.125.852.300, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.226.701.500.
 - b. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan target 20 Orang dan sudah terealisasi 100 Persen. Untuk Realisasi Keuangan sebesar 52.172.000.
 - c. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0 Lembaga pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.6.200.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.21.480.000.
3. **Program Rehabilitasi Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial dari 2.403 yang mendapat rehabilitasi berbanding dengan PPKS Kab.Banjar yaitu sebanyak 26.326 sehingga realisasi sebesar 9,12 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.421.510.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.2.459.001.000.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dari jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sosial berbanding jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis seluruhnya diluar panti sosial yaitu 2.348 berbanding 2.748 yaitu terealisasi sebesar 85,44 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan ii yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 389.275.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.2.333.790.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 2.237 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.359.445.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.2.057.530.000.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi sampai pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II

yang telah ditetapkan. Tidak ada Realisasi keuangan pada sub kegiatan dengan target sebesar Rp.116.600.000,-.

- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 3 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini belum terealisasi masih dalam proses pencairan dengan target sebesar Rp.98.400.000.
- d. **Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 50 Orang dari Target 50 Orang atau 100 % untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.7.500.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.15.400.000.
- e. **Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 12 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.7.200.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.12.600.000.
- f. **Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.0.
- g. **Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak** dengan indikator Jumlah Orang yang Terpenuhi

Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 10 Orang.

- h. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan** dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 20 Orang.
 - i. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 30 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.19.400.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.54.800.000.
 - j. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 16 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.7.200.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.11.200.000.
- 2) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yaitu jumlah PMKS bukan korban HIV AIDS dan NAFZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sosial berbanding jumlah PMKS bukan korban HIV AIDS dan NAFZA seluruhnya diluar panti sosial yang terealisasi sebesar 55 orang berbanding 152 orang atau sebesar 36,18 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.32.235.000, lebih rendah dibandingkan target triwulan II sebesar Rp.125.211.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 36 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.19.400.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.54.800.000.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 14 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.5335..000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.24.300.000.
- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi pada triwulan II.
- d. **Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 30 Orang dan pada triwulan II masih belum terealisasi.
- e. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 5 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini pada triwulan II sebesar Rp.7.500.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.9.450.000.
- f. **Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Kabupaten/ Kota, dengan target 1 Dokumen namun kegiatannya dilakukan pada triwulan IV.

4. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar terealisasi sebesar 53,94 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.71.607.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.3.351.313.900.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata terealisasi sebesar 105,33 Persen dan (2) Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi terealisasi 42 Persen pada triwulan II. Capaian untuk indikator I sudah melebihi target, untuk indikator ke 2 belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.71.607.500,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.3.351.313.900,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata dengan target sebesar 201.577 dan yang sudah terealisasi pada triwulan II sebesar 176.092 Orang. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.61.468.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.526.745.000.
- b. **Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 67.079 dari target 54.814 Keluarga pada triwulan II. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.10.139.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.309.981.400.

- c. **Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi.
 - d. **Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat** dengan indikator kinerja Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan II.
5. **Program Penanganan Bencana** dengan indikator kinerja Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan terealisasi sebesar 53,94 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.309.253.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.810.418.500.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani terealisasi sebesar 45,66 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut masih belum mencapai target kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.294.291.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.737.849.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Makanan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 1014 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 500 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.97.000.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.256.700.000.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)

dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan II.

- c. **Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 35,63 % dari target triwulan II sebesar 480 orang dan realisasisebesar 171 Orang. Sedangkan untuk Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.98.516.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.230.958.000.
- d. **Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial** dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota, pada triwulan II masih belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke III.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.14.962.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.72.569.500

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana** dengan indikator kinerja Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini sudah terealisasi 100 persen. Untuk realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.14.962.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.25.000.000.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi pada triwulan II, dengan target 150 Orang.

6. **Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** dengan indikator kinerja Indeks PUG dengan target sebesar 0,6375 pada

akhir tahun. Capaian belum bisa dihitung , karena penghitungan indeks pada akhir tahun. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.153.127.449, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.925.252.000.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.4.144.100, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.25.260.800.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PUG** dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 27 Perangkat Daerah pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.14.744.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.29.338.000.
- 2) **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina telah terealisasi 100 persen. Untuk realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.12.044.00, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.12.494.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen dan sudah terealisasi 100 Persen.

- 3) **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup terealisasi sebesar 24,9 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.126.339.449, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.883.420.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas terealisasi sebesar 162 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 126.339.449, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 883.420.000.
7. **Program Perlindungan Perempuan** dengan indikator kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan) terealisasi sebesar 4,2 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini masih belum terealisasi.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi terealisasi sebesar 100 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.0, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.25.570.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi

sebesar 1 Dokumen pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.0, dengan target sebesar Rp.15.070.000.

- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terealisasi sebesar 100 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.0, dengan target sebesar Rp.10.500.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 1 Layanan pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan ini belum ada Realisasi keuangan target sebesar Rp.10.500.000.
8. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** dengan indikator kinerja Persentase Keluarga Berkualitas . indikator ini dapat dihitung pada akhir tahun. Untuk capaian realisasi keuangan program ini sebesar Rp.15.823.700,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.64.065.000,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina terealisasi sebesar 0 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan ini belum terealisasi baik fisik maupun keuangan.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia. Terealisasi sebanyak 5 Dokumen dari target 11 Dokumen dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.079.700 dari target sebesar Rp.55.037.000,- atau sebesar 18,56 persen.

- 2) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan masih 0 Persen pada triwulan II. Realisasi keuangan kegiatan ini juga masih belum ada.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas belum ada realisasi pada triwulan II.

9. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** dengan indikator kinerja Persentase Elemen Data Terpilah terealisasi sebesar 100 Persen pada triwulan II. Namun untuk realisasi keuangan program ini sebesar Rp.6.692.000, lebih rendah dibandingkan target realisasi sebesar Rp.9.117.000 atau sebesar 73,4 %.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah terealisasi sebesar 100 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 6.692.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.9.117.000 atau sebesar 73,4 %.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota** terealisasi sebesar 1 Dokumen pada triwulan II. Sub kegiatan ini telah terealisasi 100 persen untuk fisiknya dan untuk realisasi keuangan sebesar 73,4 persen.

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator kinerja IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak). Indeks ini dapat dihitung pada akhir tahun atau triwulan IV. Untuk realisasi keuangan program ini masih belum ada realisasi.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak dengan target sebesar 62 Persen. Pada kegiatan ini juga belum ada realisasinya

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia terealisasi sebesar 0 Organisasi pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan juga masih belum ada.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target sebesar 2 Dokumen pada triwulan II. Untuk Capaian masih belum terealisasi baik fisik maupun keuangan.
11. **Program Perlindungan Khusus Anak** dengan indikator kinerja IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak). Indikator ini masih belum bisa dihitung terkecuali pada akhir tahun. Untuk program ini dengan target

62,40. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.332.500,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.138.032.000,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di Dampingi terealisasi sebesar 34,28 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.332.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.138.032.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA** dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu terealisasi sebesar 1 Kegiatan dari target 7 Kegiatan pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.0, target sebesar Rp.127.532.000.
- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak terealisasi sebesar 34,28 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.332.500,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.10.580.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK** dengan indikator kinerja Jumlah AMPK yang mendapat pelayanan terealisasi sebesar 12 Layanan pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 332.500,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 10.580.000,-.

12. **Program Pengendalian Penduduk** dengan indikator kinerja Median Usia Perempuan Kawin Pertama terealisasi sebesar 0 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.65.619.900,-, lebih rendah dibandingkan target realisasi sebesar Rp.247.177.900,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Usia Perempuan pada Perkawinan Pertama, dengan target 19 Tahun dan Capaian ini dapat dihitung pada Triwulan IV. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.54.919.900,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.106.005.900,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain** dengan indikator kinerja Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk terealisasi sebesar 7 Unit dari target 6 unit untuk Triwulan II. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.33.960.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.78.646.000,-.
- b. **Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga terealisasi sebesar 3 Laporan pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.20.959.900,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.27.359.900,-.
- 2) **Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** dengan indikator kinerja Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

terrealisasi sebesar 200 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.10.700.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.141.172.000,-.

- a. **Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal** dengan indikator kinerja Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal terealisasi sebesar 8 Satuan Pendidikan pada triwulan II. Capaian tersebut melampaui target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4 satuan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.700.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 141.172.000,-.

13. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan indikator kinerja (1) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) terealisasi sebesar 8,8 Persen dan (2) Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) terealisasi sebesar 80,8. Capaian dapat dihitung pada triwulan akhir / Triwulan IV. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.470.799.075, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.942.641.746,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** dengan indikator kinerja Penurunan ASFR dengan target kinerja sebesar 25 Persen yang dapat dihitung pada akhir triwulan IV. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.436.303.075, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.654.004.396.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal terealisasi sebesar 0

Dokumen pada triwulan II. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.233.946.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.961.776.750,-.

- b. **Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang terealisasi sebesar 0 Dokumen pada triwulan II. Capaian untuk sub kegiatan ini ditargetkan 1 dokumen pada akhir tahun. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.202.357.075, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.692.227.646,-.
- 2) **Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah PUS yang Menggunakan Alat Kontrasepsi terealisasi sebesar 30 Persen pada triwulan II. Capaian untuk triwulan II sudah mencapai 100 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.34.496.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.288.637.350.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya** dengan indikator kinerja Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. terealisasi sebesar 42 Laporan dari Target 147 Laporan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.4.596.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.69.447.250,-.
- b. **Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terealisasi sebesar 512 Orang pada triwulan II. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi

keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.29.900.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.214.690.100,-.

- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP terealisasi sebesar 0 Laporan pada triwulan II. Sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada kasus kegagalan penggunaan MKJP. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.0, dengan target sebesar Rp.4.500.000.

14. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target 62,44. Capaian tersebut bisa dihitung pada akhir tahun/triwulan IV. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.665.765.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.812.174.200,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan indikator kinerja Persentase Keluarga Berkualitas. Capaian tersebut di targetkan pada triwulan IV/ akhir. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.623.129.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.1.696.517.400,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) terealisasi sebesar 11 Laporan pada triwulan II dari target 34 Laporan. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 623.129.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 1.696.517.400,-.

- 2) **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan indikator kinerja Persentase Keluarga sasaran ketahanan keluarga yang aktif, terealisasi sebesar 50 Persen pada triwulan II. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.42.636.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp.182.706.800

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 1 Laporan dengan realisasi fisik untuk triwulan II sebesar 67,66 dan untuk realisasi keuangan masih belum ada.
- b. **Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja** dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Untuk kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 100 Persen dari target 5 Laporan. Untuk realisasi keuangan lebih rendah yaitu 42.636.000 dari target sebesar 82.186.000.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kinerja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								16.871.548.867										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								16.871.548.867										
Meningkatnya indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80 Indeks	65.243.461.340	78,24 Indeks	9.701.111.317	76 Indeks		10.209.572.767	N/A	2.606.497.539	N/A	5.718.369.603	N/A	41,4	78,24 Indeks	15.419.480.920	97,8	23,63
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %	258.833.800	100 %	22.000.000	100	Persen	55.107.000	25 %	4.195.500	50 %	13.823.000	50 %	31	75 %	35.823.000	75 %	13,84
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dok	92.795.100	8 Dok	10.000.000	8	Dokumen	18.415.000,	2 Dok	4.195.500	2 Dok	5.195.500	2 Dok	28,21	10 Dok	15.195.500	33,33 %	16,37
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	5 Dok	39.414.900	1 Dok	2.500.000	1	Dokumen	7.410.000	0 Dok	0	1 Dok	4.500.000	1 Dok	44,83	2 Dok	7.000.000	40 %	17,75
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	2.808.000	1 Dok	0	1	Dokumen	936.000	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0	33,33 %	0
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	5 Dok	31.636.400	1 Dok	2.500.000	1	Dokumen	7.410.000	1 Dok	0	1 Dok	1.398.500	1 Dok	18,9	2 Dok	3.898.500	40 %	12,32
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Dok	2.808.000	1 Dok	0	1	Dokumen	936.000	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0	33,33 %	0

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 5+8		11={10/4}*100%		
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62 Lap	54.817.400	12 Lap	7.000.000	6	Laporan	10.000.000,	3 Lap	0	6 Lap	1.479.000	6 Lap	13,6	18 Lap	8.479.000	29,03 %	15,46
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Lap	34.554.000	16 Lap	0	16	Laporan	10.000.000	4 Lap	0	8 Lap	1.250.000	8 Lap	10,85	24 Lap	1.250.000	50 %	3,62
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	100 %	35.986.155.891	78,57 %	5.102.815.891	100	Persen	5.356.875.382	25 %	992.246.690	50 %	2.566.445.353	50 %	65,05	75 %	7.669.261.244	75 %	21,31
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Org	33.090.497.307	41 Org	4.973.988.241	45	Orang/bulan	5.204.255.382	45 Org	992.246.690	45 Org	2.496.193.353	45 Org	40,57	86	7.470.181.594	38,56 %	20,76
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	284 Dok	606.660.000	12 Dok	123.628.750	12	Dokumen	142.620.000	3 Dok	0	4 Dok	70.120.000	4 Dok	43,9	16 Dok	193.748.750	5,63 %	31,93
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	15.158.500	1 Lap	278.000	1	Laporan	5.000.000	1 Lap	0	1 Lap	132.000	1 Lap	6,55	2 Lap	410.000	40 %	2,70
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan/Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/BulananTriwulanan/ Semesteran SKPD	42 Lap	46.822.000	2 Lap	4.920.900	2	Laporan	5.000.000	0	0	0	0	0 Lap	0	2 Lap	4.920.900	4,76 %	10,60
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	240.000.000	100 %	30.000.000	100	Persen	20.000.000	50 %	10.000.000	50 %	10.000.000	50 %	50	75 %	40.000.000	75 %	16,66

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=[10/4]*100%		
yang Bermutu dan Tepat Waktu		yang Bermutu dan Tepat Waktu																		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Org	240.000.000	3 Org	30.000.000	4	Orang	20.000.000	2 Org	10.000.000	2 Org	10.000.000	2 Org	50	5 Org	40.000.000	10,41 %	16,66	
Meningkatnya Adminsirasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminsirasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	100 %	9.551.579.996	100 %	1.433.940.563	100	Persen	1.247.659.000	25 %	691.020.213	50 %	1.579.735.604	50%	82,03	75 %	3.013.676.167	75 %	31,55	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283 paket	302.686.690	100 Paket	4.698.000	60	Paket	6.000.000	15 Paket	39.000.000	40 Paket	47.723.000	60 Paket	37,14	140 Paket	52.421.000	49,47 %	17,31	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	231 Paket	3.530.450.500	35 Paket	469.855.500	87	Paket	303.435.000	33 Paket	472.100.000	80 Paket	1.042.412.000	80 paket	84,38	115 Paket	1.512.267.500	49,78 %	42,83	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2384 Paket	1.129.765.015	12 Paket	53.560.955	2336	Paket	69.224.000	645 Paket	77.341.900	1869 Paket	117.822.400	1869 Paket	42,06	1881 Paket	171.383.355	78,90 %	15,17	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jmlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	134.252.800	12 Paket	3.260.000	12	Paket	4.000.000	6 Paket	16.726.400	8 Paket	21.679.400	8 Paket	54,06	20 Paket	24.939.400	33,33 %	18,57	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 lap	74.250.000	12 Lap	5.191.100	12	Laporan	15.000.000	3 Lap	1.656.000	7 Lap	2.747.500	7 Lap	16,65	19 Lap	7.938.600	31,66 %	10,69	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lap	4.380.174.991	12 Lap	897.375.008	12	Laporan	850.000.000	3 Lap	84.195.913	6 Lap	347.351.304	6 Lap	42,6	18 Lap	1.244.726.312	30 %	28,41	
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	602.000.000	100 %	217.000.000	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	10 %	217.000.000	50 %	4,5	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	602.000.000	1 Unit	217.000.000	8	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	217.000.000	11,11 %	4,5	
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	13.366.064.114	100 %	2.435.722.531	100	Persen	3.189.999.385	25 %	859.633.517	50 %	1.290.518.789	50 %	40,45	75 %	3.726.241.320	75 %	27,88	

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	24 Lap	10.239.600	12 Lap	1.239.600	0	Laporan	1.000.000	0 Lap	0	0 Lap	0	0 Lap	34,2	12 Lap	1.239.600	50%	12,10
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peneyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Lap	1.050.020.514	12 Lap	108.518.368	12	Laporan	188.999.385	3 Lap	33.470.751	6 Lap	63.415.615	6 Lap	38,73	18 Lap	171.933.983	30 %	16,37
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62 Lap	12.305.804.000	12 Lap	2.325.964.563	12	Laporan	3.000.000.000	3 Lap	826.162.766	6 Lap	1.227.103.174	6 Lap	53,86	18 Lap	3.553.067.737	29,03 %	28,87
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.021.267.539	100 %	459.632.332	100	Persen	339.932.000	25 %	49.401.619	50 %	257.846.857	50 %	75,85	75 %	715.799.189	75 %	14,25
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	244.460.000	1 Unit	38.860.000	1	Unit	38.990.000	1 Unit	10.500.000	1 Unit	21.000.000	1 Unit	53,86	2 Unit	59.680.000	40 %	24,41
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	302 Unit	2.083.794.000	10 Unit	182.717.332	18	Unit	194.412.000	4 Unit	20.596.899	18 Unit	50.435.137	18 Unit	12,95	28 Unit	233.152.469	9,27 %	11,18
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	602 Unit	355.595.000	30 Unit	17.970.000	40	Unit	40.000.000	4 Unit	0	10 Unit	2.410.000	10 Unit	5,27	40 Unit	20.380.000	6,64 %	5,73
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.145.344.159	2 Unit	218.585.000	1	Unit	45.710.000	1 Unit	18.304.720	1 Unit	109.024.720	1 Unit	11,35	3 Unit	327.609.720	50 %	15,27
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	182.124.380	0 Unit	0	1	Unit	20.820.000	0 Unit	0	1 Unit	74.977.000	1 Unit	99,83	1 Unit	74.977.000	20 %	41,17
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	100 %	5.923.326.300	90,67 %	972.415.800	100	Persen	659.379.800	0	432.300	54,23 %	106.404.300	54,23 %	15,8	72,45 %	1.078.820.100	86,23 %	18,21

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100%	208.320.000	100 %	18.304.000	75	Persen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	50 %	18.304.000	75 %	8,78
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	172.000.000	1 Keluarga	18.304.000	1	Keluarga	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Keluarga	18.304.000	12,5 %	10,64
Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.715.006.300	90,62 %	954.111.800	100	Persen	649.379.800	40 %	432.300	40 %	106.404.300	40 %	16,38	70 %	1.060.516.100	85 %	18,55
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.373 Orang	4.686.701.900	153 Orang	492.461.700	117	Orang	489.847.800	76 Orang	432.300	76 Orang	64.032.300	76 Orang	14,22	229 Orang	556.494.000	16,67 %	11,87
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	673.193.000	20 Orang	398.382.500	20	Orang	25.000.000	20 Orang	0	20 Orang	36.172.000	20 Orang	29,79	40 Orang	434.554.500	44,44 %	64,55
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	355.111.400	1 Lembaga	63.267.600	1	Lembaga	134.532.000	0	0	0	6.200.000	0	6,78	1 Lembaga	69.467.600	25 %	19,56
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	18,64 %	10.883.082.676	18,63 %	512.465.600	15,75	Persen	2.116.922.000	3,93 %	852.300.00	3,93 %	1.267.810.000	3,93 %	31,31	11,28 %	1.780.275.600	60,52 %	16,34

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	90 %	9.486.414.276	84,22 %	300.082.400	80	Persen	1.870.225.000	67,08 %	852.300.00	76,83 %	1.235.575.000	76,83 %	65,98	80,52 %	1.535.657.400	89,46 %	16,17
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4.508 Orang	7.429.247.200	165 orang	158.590.000	2367	Orang	2.139.600.000	2000 Orang	844.800.000	2237 Orang	1.204.745.000	2237 Orang	56,28	2.402 Orang	1.362.835.000	53,28 %	18,34
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	725 Orang	415.539.000	0	0	60	Orang	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	146 Orang	671.012.000	13 Orang	19.875.000	10	Orang	25.000.000	0	0	3 Orang	0	3 Orang	0	16 Orang	19.875.000	10,95 %	2,96
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	289 Orang	178.245.000	53 Orang	32.595.000	50	Orang	42.000.000,	50 Orang	7.500.000	50 Orang	7.500.000	50 Orang	17,85	103 Orang	40.095.000	35,64 %	22,49
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupatzen/Kota	260 Orang	336.880.800	29 Orang	17.043.400	33	Orang	25.000.000	0 Orang	0	12 Orang	7.200.000	12 Orang	28,8	35 Orang	24.243.400	13,46 %	71,9
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabunatzen/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	49.813.000	60 Orang	12.459.000	60	Orang	13.625.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	60 Orang	12.459.000	25 %	25,01

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11={10/4}*100%	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	12.000.000	0	0	7	Orang	10.000.000,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	18.999.500	0	0	20	Orang	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	598 Orang	215.730.500	123 Orang	31.691.000	120	Orang	40.000.000	0	0	30 Orang	7.930.000	30 Orang	22,78	153 Orang	39.621.000	25,58 %	18,36
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.104 Orang	143.447.276	16 Orang	27.829.000	16	Orang	35.000.000	0	0	16 Orang	8.200.000	16 Orang	34,45	32 Orang	36.029.000	2,89 %	24,42
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90 %	1.396.668.400	75 %	212.383.200	80	Persen	246.697.000	20 %	0	40 %	32.235.000	50 %	13,06	57,5 %	244.618.200	63,89 %	2,14
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Orang	474.310.500	88 Orang	43.868.500	23	Orang	50.000.000	2 Orang	0	36 Orang	19.400.000	36 Orang	35,40	124 Orang	63.268.500	43,51 Orang	13,33
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	191.840.000	30 Orang	18.000.000	40	Orang	25.000.000	5 Orang	0	14 Orang	5.335.000	14 Orang	21,95	44 Orang	23.335.000	25,88 %	12,16

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	31.152.700	10 Orang	5.072.700	10	Orang	8.500.000	0	0	0	0	0	0	10 Orang	5.072.700	7,69 %	16,28
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	343.536.700	45 Orang	130.362.000	45	Orang	125.000.000	0	0	0	0	0	0	45 orang	130.362.000	29,03 %	3,79
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	64.248.000	12 Orang	15.080.000	12	Orang	22.000.000	5 Orang	0	5 Orang	7.500.000	5 Orang	39,68	17 Orang	22.580.000	38,63 %	35,14
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dok	76.757.500	0 Dok	0	1	Dokumen	16.197.000	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 %	0
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	75 %	18.898.284.600	48,38 %	2.513.268.171	60	Persen	2.376.651.800	0 %	18.035.000	59,91 %	71.607.500	59,91 %	71.607.500	51,16 %	2.584.875.671	68,21 %	13,67
Meningkatnya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 %	1.290.275.000	92,07 %	1.219.750.000	0	Persen	0	0	0	0	0	0 %	0	92,07 %	1.219.750.000	92,07 %	94,53
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	1.290.275.000	186 Orang	1.219.750.000	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	186 Orang	1.219.750.000	92,07 %	94,53
Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata	85 %	17.608.009.600	51,88 %	7.037.405.029	75	Persen	2.376.651.800	0	18.035.000	43,33 %	71.607.500	43,33 %	3,01	47,61 %	1.365.125.671	56,01 %	7,75

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
yang Terdata dan Terfasilitasi		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	85 %		65 %		75	Persen		0		43,33 %							
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	847.566 Orang	1.547.483.300	26.350 Orang	171.860.319	201.577	Orang	278.052.000	0	18.035.000	176.092 Orang	61.468.000	176.092 Orang	22,07	202.442 Orang	233.328.319	23,88 %	15,07
Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	300.461 Keluar ga	1.198.983.200	66.883 Keluar ga	141.550.852	54.814	Keluarga	204.999.800	0	0	67.079 Keluar ga	10.139.500	67.079 Keluar ga	5,49	133.962 Keluarga	151.690.352	44,58 %	12,65
Terpenuhiya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.444 Keluar ga	13.814.271.900	35 Keluar ga	723.023.000	70	Keluarga	1.459.600.000	0	0	0	0	0	0	35 Keluarga	723.023.000	2,42 %	5,23
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	1.047.271.200	95 Orang	257.084.000	150	Orang	434.000.000	0	0	0	0	0	0	95 Orang	257.084.000	22,62 %	24,54
Meningkatnya Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100 %	5.317.065.750	100 %	330.485.400	100	Persen	1.509.022.500	25 %	0	52 %	309.253.000	52 %	20,49	73,9 %	639.738.400	73,9 %	12,03
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100 %	4.995.810.450	100 %	292.932.000	100	Persen	1.423.609.000	4,9 %	0	52 %	294.291.000	52 %	20,67	72,8 %	587.223.000	72,8 %	11,75
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	1.831.009.000	1000 Orang	292.932.000	1.000	Orang	500.000.000	739 Orang	0	1.014 Orang	97.000.000	1014 Orang	20,25	2514 Orang	389.932.000	62,85 %	21,29
Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	1900 Orang	1.301.092.000	0	0	500	Orang	452.467.000,	0	0	0	98.775.000	0	22,01	0	98.775.000	0	7,59

[illegible]

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 5+8		11={10/4}*100%		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							521.626.200											
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER	Indeks PUG	0,772 4 Indeks	5.890.885.800	0,502 5 Indeks	1.864.722.887	0,637 5 Indeks	200.272.600	N/A	24.940.000	N/A	153.127.449	N/A	76,46	0,5025 Indeks	2.017.850.336	0,502 5 Indeks	62,62	
Meningkatnya Pelaksanaan PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Permintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD	100 %	114.452.900	100 %	15.712.400	100	Persen	39.114.800	0	14.744.000	0	14.744.000	50 %	37,69	50 %	30.456.400	50 %	10,87
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Perang kat Daera h	114.452.900	27 Perang kat Daera h	15.712.400	27	Perangka t Daerah	39.114.800	0	14.744.000	0	14.744.000	0	37,69	27 Perangkat Daerah	30.456.400	33,33 %	26,61
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100 %	62.907.000	100 %	10.963.200	100	Persen	17.496.000	0	0	68 %	12.044.000	68 %	68,83	100 %	23.007.200	100	36,57
Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok	62.907.000	1 Dok	10.963.200	1	Dokumen	17.496.000	0	0	1 Dok	12.044.000	1 Dok	68,83	2 Dok	23.007.200	40 %	36,57
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100 %	5.713.525.900	100 %	1.838.047.287	100	Persen	143.661.800	7 %	10.196.000	25 %	126.339.449	25 %	87,94	62,46 %	34,38	62,46 %	34,38

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3.030 Orang	5.713.525.900	650 Orang	1.838.047.287	650	Orang	143.661.800	80 Orang	10.196.000	162 Orang	126.339.449	162 Orang	87,94	816 Orang	1.964.386.736	62,46 %	34,38
Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	20 %	513.841.900	20 %	15.939.000	20	Persen	40.000.000	N/A	350.000	N/A	350.000	N/A	0,876	20%	16.289.000	20 %	1,55
Pendampingan Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi	100 %	191.247.900	100 %	14.889.000	100	Persen	20.000.000	50 %	0	0	0	50%	0	75 %	14.889.000	75%	7,78
Terlaksananya Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Dok	191.247.900	2 Dok	14.889.000	2	Dokumen	20.000.000	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	3 Dok	14.889.000	27,27 %	7,78
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	322.594.000	100 %	1.050.000	100	Persen	20.000.000	0,17	350.000	0,17	350.000	41,66 %	1,750	70,83 %	1.400.000	70,83 %	0,43
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Layan an	322.594.000	24 Layan an	1.050.000	24	Layanan	20.000.000	1 Layan an	350.000	1 Layan an	350.000	1 Layan an	1,75	25 Layanan	1.400.000	7,57 %	0,43
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	4,07 %	2.140.203.800	10 %	137.259.400	15,00	Persen	81.818.000	15 %	13.079.700	25 %	21.071.600	25%	19,24		158.331.000		

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		I	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina	100 %	437.416.800	100 %	68.376.400	100	Persen	68.099.000	19 %	13.079.700	26%	18.327.600	26%	18,56		86.704.000		18,62
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	53 Dok	437.416.800	11 Dok	68.376.400	11	Dokumen	68.099.000	2 Dok	13.079.700	5 Dok	18.327.600	5 Dok	18,56	16 Dok	86.704.000	30,18 %	18,62
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	100 %	1.702.787.000	100 %	68.883.000	100	Persen	13.719.000	0	0	0	2.744.000	0	23,31	50 %	71.627.000	50 %	4,20
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3.613 Orang	1.702.787.000	3 Orang	68.883.000	11	Orang	13.719.000	0	0	0	2.744.000	0	23,31	3 Orang	71.627.000	0,22 %	4,20
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Elemen Data Terpilah	100 %	62.735.100	100 %	10.599.800	100	Persen	14.905.900	0	0	100%	6.692.000	100 %	73,4	100 %	17.291.800	100 %	24,71
Meningkatnya SKPD yang Memiliki Data Terpilah Gender	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	100 %	62.735.100	100 %	10.599.800	76,60	Persen	14.905.900	0	0	100 %	6.692.000	100 %	73,4	100 %	17.291.800	100%	24,71

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	62.735.100	2	10.599.800	1	Dokumen	14.905.900	0	0	1	6.692.000	100	73,4	3	17.291.800	50	24,71
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	67,00 Indeks	1.292.857.500	56,80 Indeks	132.720.000	62,40	Indeks	38.529.700	0	0	0	0	0	0	56, 80 Indeks	132.720.000	28,4 Indeks	10,26
Meningkatnya Kelembagaan, Sinkronisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	67 Persen	1.292.857.500	50 Persen	132.720.000	62	Persen	38.529.700	0	0	0	0	0	0	25 Persen	132.720.000	25 Persen	10,26
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	255 Organisasi	861.739.600	60 Organisasi	10.700.000	60	Organisasi	23.000.000	0	0	0	0	0	0	60 Organisasi	10.700.000	26,66 %	0,15
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Dok	431.117.900	5 Dok	122.020.000	2	Dokumen	15.529.700	0	0	0	0	0	0	5 Dok	122.020.000	31,25 %	28,30
IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	63,20 Indeks	1.430.755.070	62 Indeks	21.044.000	62,20	Persen	146.100.000	8,8	4.150.000	8,8	21.176.000	N/A	N/A	31 Indeks	42.220.000	49,05 %	2,73
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Didampingi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Di Dampingi	100 %	762.095.400	100 %	12.644.000	62	Persen	126.100.000	8,8 %	2.400.000	8,8 %	18.026.000	8,8 %	14,28	50 %	30.670.000	50%	4,02
Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	29 Kegiatan	734.519.000	2 Kegiatan	12.644.000	7	Kegiatan	126.100.000	1 Kegiatan	2.400.000	1 Kegiatan	18.026.000	1 Kegiatan	14,28	3 Kegiatan	30.670.000	10,34 %	4,17

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	100 %	668.659.670	100 %	8.400.000	100 %	Persen	20.000.000	14, 28 %	1.750.000	34,28 %	3.150.000	34,28 %	3.150.000	67,14 %	11.550.000	67,14 %	1,73
Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	365 Layan an	632.030.750	12 Layan an	8.400.000	35	layanan	20.000.000	5 Layan an	1.750.000	12 Layan an	3.150.000	12 Layan an	3.150.000	24 Layanan	11.550.000	6,57 %	1,83
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								961.660.800										
Pendewasaan Usia Perempuan Perkawinan Pertama	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	-	-	17 Tahun	49.180.000	18	Tahun	144.999.800	0	0	0	0	0	0	17 Tahun	49.180.000	-	-
Peningkatan Pengendalian Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Perkawinan Pertama Perempuan Batas Usia 19	8,5 Persen	1.986.924.100	-	-	11,5	Persen	534.127.500	N/A	7.403.300	N/A	65.619.900	N/A	65.619.900	N/A	65.619.900	N/A	3,30
Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %	513.715.200	100 %	73.370.700	100	Persen	15.000.000	50%	0	200%	10.700.000	200 %	71,33	150 %	84.070.700	150 %	62,93
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	33 Satua n Pendid ikan	402.895.200	10 Satua n Pendid ikan	73.370.700	4	Satuan Pendidika n	15.000.000	2 Satua n Pendid ikan	0	8 Satua n Pendid ikan	10.700.000	8 Satua n Pendid ikan	71,33	12 Satuan Pendidika n	84.070.700	36,36 %	80,25

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Usia Perempuan yang Menikah Pertama	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usia Perempuan pada Perkawinan Pertama	-	-	22,63	28.526.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan ketersediaan data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data keluarga	100 %	1.473.208.900	-	-	100 %	Persen	129.999.800	25%	7.403.300	25%	54.919.900	25 %	42,24	25 %	54.919.900	25%	3,72
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	40 Unit	55.934.500	20 Unit	9.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	9.672.000	50 %	17,29
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 Lap	351.333.400	12 Lap	18.854.900	12	Laporan	70.000.000	3 Lap	7.403.300	3 Lap	20.959.900	25 Lap	29,94	15 Lap	39.814.800	25%	11,33
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	600 Unit	1.065.941.000	0	0	20	Unit	59.999.800	0	0	122 Unit	33.960.000	122 Unit	56,60	122 Unit	33.960.000	20,3%	3,18
Pendewasaan Usia Perempuan Melahirkan Pertama	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,5 %	22.077.781.000	9,1 %	6.071.781.833	8,8	Persen	3.878.340.600	N/A	0	N/A	479.989.075	N/A	12,37	9,1	6.551.770.908	9,1	29,67
		Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	81 %		67,59 %		80,8			N/A	0	N/A		N/A		67,59			
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	Penurunan ASFR	100 %	12.244.933.000	20 %	101.039.800	25	Persen	3.329.242.800	N/A	0	N/A	436.303.075	N/A	13,12	20%	537.342.875	20%	5,90

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11={10/4}*100%	
	Kearifan Budaya Lokal																		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dok	51.093.800	1 Dok	91.469.000	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	91.469.000	33%	87,16
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dok	1.588.333.100	-	-	1	Dokumen	1.397.465.300	0 Dok	0	0 Dok	202.357.075	0 Dok	14,48	0 Dok	202.357.075	0 %	18,49
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dok	8.340.265.800	2 Dok	9.570.800	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	3 Dok	9.570.800	100 %	99,88
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dok	1.971.525.500	0 Dok	0	1	Dokumen	1.931.777.500	0 Dok	0	0 Dok	233.946.000	0 Dok	12,11	0 Dok	233.946.000	0 %	11,86

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Alat Kontrasepsi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang alat kontrasepsinya terpenuhi	100 Persen	3.443.482.200	67,56 Persen	332.654.000	68,09	Persen	299.661.000	9,72 Persen	0	11,51 Persen	34.496.000	11,51 Persen	14,57	48,78 Persen	376.340.000	48,78 %	10,92
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	588 Lap	392.344.800	0	0	147	Laporan	135.161.000	21 Lap	0	42 Lap	4.596.000	42 lap	3,40	42 Lap	4.596.000	7,14 %	1,17
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8.048 Orang	1.194.022.000	1123 orang	332.654.000	1.024	Orang	160.000.000	0	0	512 orang	29.900.000	512 Orang	18,68	1.635 Orang	376.340.000	20,31 %	31,51
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10 Lap	22.500.000	0	0	2	Laporan	4.500.000	0	0	0	-	0	0	2 Lap	0	20 %	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,55 Indeks	8.464.209.600	61 Indeks	5.027.027.800	62,44 Indeks		3.694.554.800	N/A	0	N/A	1.275.844.000	N/A	25,37	61 Indeks	6.302.871.800	61 Indeks	80,14
Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Berkualitas	-	-	82,14 %	5.027.027.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,14	5.027.027.800	89,88 %	65,07
Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif	259 Kelompok	7.725.313.200	-	-	253	Kelompok	3.694.554.800	0	0	81 Kelompok	1.233.208.000	81 Kelompok	28,88	81 Kelompok	1.233.208.000	31,27 %	15,96

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	102 Lap	4.269.259.800	34 Lap	263.757.800	34	Laporan	3.694.554.800	0	0	11 Lap	1.233.208.000	11 Lap	28,88	45 Lap	1.496.965.800	44,12 %	35,06	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	0	0	100	Persen	135.000.000	-	-	-	-	-	---	-	-	-	-	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Sasaran Ketahanan Keluarga yang aktif	79 %	738.896.400	0	0	77	Persen	182.706.800	0	0	20%	42.636.000	20 %	23,33	20%	42.636.000	63,29 %	5,77	
Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Lap	220.268.400	0 Lap	0	1	Laporan	50.000.000	0 Lap	0	0 Lap	0	0	0	0	0	0	0	

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2024 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10 = 5+8		11=(10/4)*100%	
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	21 Lap	518.628.000	0 Lap	0	5	Laporan	85.000.000	0 Lap	0	5 Lap	42.636.000	100	50,16	5	42.636.000	23,81	8,22

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, yaitu :

- 1) Tidak tersedianya data PMKS/PPKS yang update berdasarkan hasil pengolahan data (pendataan, verifikasi dan validasi) yang dilaksanakan secara regular/berkala, minimal setiap tahun
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
- 3) Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) sesuai standard bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS/PPKS
- 4) Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 5) Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT
- 6) Rendahnya kesertaan ber KB dengan MKJP.
- 7) Tingginya angka kawin Usia muda 15 - 19.
- 8) Masih kurang peran serta institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam melaksanakan program KB, dan Ketahanan Keluarga (Kader, Pos Pembina KB Desa/PPKBD dan Sub Pos PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja).
- 9) Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- 10) Kurang terintegrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
- 11) Kurangnya maksimalnya tugas dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 12) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah.
- 13) Manajemen yang kurang optimal baik dalam perencanaan pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan
- 2) Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas
- 3) Rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
- 4) Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
- 5) Rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjol) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng)

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan
- 3) Menyediakan tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) yang sesuai dengan standard bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS/PPKS
- 4) Menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3):
- 5) Mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT.
- 6) Meningkatkan kesertaan ber KB dengan MKJP.
- 7) Mengurangi angka kawin Usia muda 15 - 19 dengan advokasi, sosialisasi dan lain-lain
- 8) Mensosialisasikan peran serta institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam melaksanakan program KB, dan Ketahanan Keluarga (Kader, Pos Pembina KB Desa/PPKBD dan Sub Pos PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja).
- 9) Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

- 10) Mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
- 11) Memaksimalkan tugas dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 12) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan, pengembangan, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta pembangunan system pengawasan yang kuat.
- 13) Memperkenalkan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan terstruktur kepada seluruh Sumber Daya Manusia, dengan membuat evaluasi kinerja.

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA****3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Dokumen Perubahan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar dilakukan karena adanya Penyesuaian terhadap indikator sasaran, pagu dan target.

Penyesuaian terhadap indikator sasaran karena adanya perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja adalah 14 program dan 33 kegiatan, serta 73 sub. kegiatan dengan anggaran total anggaran murni sebesar Rp. 31.244.317.450,- dengan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 maka pada Perubahan Rencana Kerja mengalami penambahan anggaran kegiatan sebesar Rp. 848.855.600,- dengan total menjadi sebesar Rp. 32.093.173.050,-.

Adapun rincian pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaannya

No	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dana Alokasi Umum	23.986.246.450,-	26.583.885.259,-	2.597.638.809,-
2.	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	7.258.071.000,-	7.258.071.000,-	0,-
Total		31.244.317.450,-	33.841.956.259,-	2.597.638.809,-

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang/ g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp18.354.835.867	Rp32.093.173.050	Rp13.738.337.183	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp16.871.548.867	Rp22.468.702.350	Rp5.597.153.483	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76	76	Rp10.209.572.767	Rp14.827.012.750	Rp4.617.439.983	Perubahan rincian belanja, belanja kertas dihilangkan ditambahkan ke belanja fotocopy dan jilid
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen	100 Persen	Rp55.107.000	Rp60.118.500	Rp5.011.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp18.415.000	Rp18.415.000	Rp0	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp7.410.000	Rp10.038.500	Rp2.628.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp936.000	Rp936.000	Rp0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp7.410.000	Rp7.398.500	-Rp11.500	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp936.000	Rp936.000	Rp0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6 Laporan	Rp10.000.000	Rp10.876.500	Rp876.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	Rp10.000.000	Rp11.518.000	Rp1.518.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	100 Persen	100 Persen	Rp5.356.875.382	Rp6.321.399.699	Rp964.524.317	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	Rp5.204.255.382	Rp6.152.399.669	Rp948.144.287	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp142.620.000	Rp159.720.000	Rp17.100.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp5.000.000	Rp2.015.000	-Rp2.985.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp5.000.000	Rp7.265.000	Rp2.265.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Rp1.247.659.000	Rp20.000.000	-Rp1.227.659.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Rp1.247.659.000	Rp2.651.422.990	Rp1.403.763.990	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	Rp6.000.000	Rp128.508.990	Rp122.508.990	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	87 Paket	87 Paket	Rp303.435.000	Rp1.290.402.000	Rp986.967.000	Adanya penambahan belanja modal berupa tandon,kursi lipat aula,kursi rapat, karpet aula,karpet ruang kadis, tablet
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2336 Paket	2336 Paket	Rp69.224.000	Rp280.458.000	Rp211.234.000	Adanya penambahan item sabun cuci piring, Pulpen Balliner dan cairan pembersih kaca
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp4.000.000	Rp40.095.000	Rp36.095.000	Penghapusan anggaran pembelian buku agenda diganti ke cetak kalender

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp15.000.000	Rp16.500.000	Rp1.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp850.000.000	Rp895.459.000	Rp45.459.000	Perjalanan dinas untuk KLA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	Rp0	Rp602.000.000	Rp602.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	8 Unit	Rp0	Rp602.000.000	Rp602.000.000	Pengadaan roda dua sebanyak 8 unit untuk TKSK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	Rp3.189.999.385	Rp3.367.411.685	Rp177.412.300	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp1.000.000	Rp0	-Rp1.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp188.999.385	Rp198.671.685	Rp9.672.300	Beban tagihan listrik naik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp3.000.000.000	Rp3.168.740.000	Rp168.740.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	Rp339.932.000	Rp1.804.659.906	Rp1.464.727.906	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	Rp38.990.000	Rp38.990.000	Rp0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	Rp194.412.000	Rp389.400.000	Rp194.988.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	Rp40.000.000	Rp45.730.000	Rp5.730.000	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	Rp45.710.000	Rp1.225.432.566	Rp1.179.722.566	Pemeliharaan aula, pengadaan kanopi dan pengecatan kantor

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	Rp20.820.000	Rp75.107.340	Rp54.287.340	Pembuatan pagar gedung kantor
PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	100 Persen	100 Persen	Rp659.379.800	Rp673.336.300	Rp13.956.500	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Terfasilitasi dan Meningkatkan Kapasitasnya	75 Persen	75 Persen	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1 Keluarga	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Rp649.379.800	Rp663.336.300	Rp13.956.500	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117 Orang	117 Orang	Rp489.847.800	Rp445.186.300	-Rp44.661.500	Adanya penambahan kegiatan SLRT dan Bimsos PUSKESOS, Pengurangan makmin dan uang saku peserta

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Rp25.000.000	Rp128.312.000	Rp103.312.000	anggaran untuk petugas kebersihan dan dan petugas lapangan sebesar Rp. 1.250.000 dialihkan ke Uang Saku/Transport untuk peningkatan TKSK, adapun juga penambahan untuk Uang Saku/Transport kegiatan bakti sosial TKSK diambil dari sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
---	---	----------	----------	--------------	---------------	---------------	--

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp134.532.000	Rp89.838.000	-Rp44.694.000	Anggaran untuk pemeliharaan makam pahlawan yang di geser karena keperluan dari petugas kebersihan makam pahlawan adalah obat rumput dan penggantian bendera merah putih sebesar Rp. 7,230,000, untuk makan minum yang digeser dengan alasan dari veterannya sendiri tidak ada pertemuan dari awal bulan sampai sekarang sebesar Rp. 4,500,000, melihat dari keadaan veteran yang ada maka dari ketua LVRI memberitahukan bahwa sanya tidak dapat menghadirkan veteran sebanyak 25 orang untuk kegiatan kegiatan dengan alasan kesehatan para veteran pada akhirnya di sepakati untuk anggaran digeser sebanyak Rp. 5,700,000, adapun penambahan dari anggaran-anggaran

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
							yang telah digeser untuk honor petugas makam sebesar Rp. 12,000,000, untuk sisa anggaran di alihkan ke sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1,642,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	15,75 Persen	15,75 Persen	Rp2.116.922.000	Rp2.814.499.500	Rp697.577.500	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	80 Persen	80 Persen	Rp1.870.225.000	Rp2.626.346.500	Rp756.121.500	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	367 Orang	2367 Orang	Rp1.639.600.000	Rp2.139.540.000	Rp499.940.000	Adanya penambahan pada target
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	300 Orang	Rp25.000.000	Rp116.600.000	Rp91.600.000	Adanya penambahan pada target
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	63 Orang	Rp25.000.000	Rp179.000.000	Rp154.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Rp42.000.000	Rp38.500.000	-Rp3.500.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	50 Orang	Rp25.000.000	Rp75.106.500	Rp50.106.500	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	Rp13.625.000	Rp11.900.000	-Rp1.725.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	10 Orang	Rp10.000.000	Rp5.000.000	-Rp5.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Rp15.000.000	Rp5.000.000	-Rp10.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	Rp40.000.000	Rp34.800.000	-Rp5.200.000	Adanya perubahan pada rincian belanja
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	16 Orang	Rp35.000.000	Rp20.900.000	-Rp14.100.000	Adanya penambahan pada target

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	80 Persen	80 Persen	Rp246.697.000	Rp188.153.000	-Rp58.544.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	50 Orang	Rp50.000.000	Rp64.700.000	Rp14.700.000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	Rp25.000.000	Rp24.300.000	-Rp700.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Rp8.500.000	Rp7.078.000	-Rp1.422.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	30 Orang	Rp125.000.000	Rp59.205.000	-Rp65.795.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	Rp22.000.000	Rp20.400.000	-Rp1.600.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp16.197.000	Rp12.470.000	-Rp3.727.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	60 Persen	60 Persen	Rp2.376.651.800	Rp2.787.915.800	Rp411.264.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	75 Persen	75 Persen	Rp2.376.651.800	Rp2.787.915.800	Rp411.264.000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	201577 Orang	201577 Orang	Rp278.052.000	Rp316.074.500	Rp38.022.500	Penambahan upah pada petugas operator data kabupaten
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	54814 Keluarga	54814 Keluarga	Rp204.999.800	Rp141.003.800	-Rp63.996.000	Pengurangan pada belanja makan minum rapat

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	100 Keluarga	Rp1.459.600.000	Rp2.110.862.500	Rp651.262.500	Adanya penambahan pada target
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	100 Orang	Rp434.000.000	Rp219.975.000	-Rp214.025.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100 Persen	100 Persen	Rp1.509.022.500	Rp1.365.938.000	-Rp143.084.500	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	Rp1.423.609.000	Rp1.293.368.500	-Rp130.240.500	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	Rp500.000.000	Rp478.974.000	-Rp21.026.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Rp452.467.000	Rp403.660.000	-Rp48.807.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	960 Orang	960 Orang	Rp451.142.000	Rp399.444.500	-Rp51.697.500	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	135 Orang	Rp20.000.000	Rp11.290.000	-Rp8.710.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	Rp85.413.500	Rp72.569.500	-Rp12.844.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	Rp60.413.500	Rp47.569.500	-Rp12.844.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp1.483.287.000	Rp9.624.470.700	Rp8.141.183.700	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp521.626.200	Rp1.334.741.000	Rp813.114.800	
PROGRAM PENGARUSTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Indeks PUG	0,6375	0,6375	Rp200.272.600	Rp925.252.000	Rp724.979.400	
Pelebagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD	100 Persen	100 Persen	Rp39.114.800	Rp29.388.000	-Rp9.726.800	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Rp39.114.800	Rp29.388.000	-Rp9.726.800	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100 Persen	100 Persen	Rp17.496.000	Rp12.494.000	-Rp5.002.000	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp17.496.000	Rp12.494.000	-Rp5.002.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100 Persen	100 Persen	Rp143.661.800	Rp883.420.000	Rp739.758.200	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	650 Orang	650 Orang	Rp143.661.800	Rp883.420.000	Rp739.758.200	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	20 Persen	20 Persen	Rp40.000.000	Rp49.870.000	Rp9.870.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi	100 Persen	100 Persen	Rp20.000.000	Rp15.070.000	-Rp4.930.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp20.000.000	Rp15.070.000	-Rp4.930.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 Persen	100 Persen	Rp20.000.000	Rp34.800.000	Rp14.800.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Layanan	24 Layanan	Rp20.000.000	Rp34.800.000	Rp14.800.000	Adanya penambahan pada target
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	15 Persen	15 Persen	Rp81.818.000	Rp100.685.000	Rp18.867.000	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100 Persen	100 Persen	Rp68.099.000	Rp70.469.000	Rp2.370.000	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp68.099.000	Rp70.469.000	Rp2.370.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	100 Persen	100 Persen	Rp13.719.000	Rp30.216.000	Rp16.497.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	Rp13.719.000	Rp30.216.000	Rp16.497.000	Adanya penambahan pada target
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase Elemen Data Terpilah	100 Persen	100 Persen	Rp14.905.900	Rp9.117.000	-Rp5.788.900	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	76,60 Persen	76,60 Persen	Rp14.905.900	Rp9.117.000	-Rp5.788.900	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp14.905.900	Rp9.117.000	-Rp5.788.900	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	62,4	62,4	Rp38.529.700	Rp57.728.000	Rp19.198.300	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Di Dampingi	100 Persen	100 Persen	Rp38.529.700	Rp57.728.000	Rp19.198.300	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha	60 Organisasi	60 Organisasi	Rp23.000.000	Rp44.240.000	Rp21.240.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp15.529.700	Rp13.488.000	-Rp2.041.700	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tercapainya IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	62,2	62,2	Rp146.100.000	Rp192.089.000	Rp45.989.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	62 Persen	62 Persen	Rp126.100.000	Rp153.189.000	Rp27.089.000	
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Rp126.100.000	Rp153.189.000	Rp27.089.000	penghapusan dokumen penyusunan KLA digantikan dengan pengadaan sosialisasi KHA.

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100 Persen	100 Persen	Rp20.000.000	Rp38.900.000	Rp18.900.000	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	35 Orang	35 Orang	Rp20.000.000	Rp38.900.000	Rp18.900.000	Adanya penambahan pada target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp961.660.800	Rp8.289.729.700	Rp7.328.068.900	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	18 Tahun	18 Tahun	Rp144.999.800	Rp534.127.500	Rp389.127.700	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 Persen	100 Persen	Rp15.000.000	Rp312.628.000	Rp297.628.000	
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	Rp15.000.000	Rp312.628.000	Rp297.628.000	Adanya penambahan pada target
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usia Perempuan pada Perkawinan Pertama	18 Tahun	18 Tahun	Rp129.999.800	Rp221.499.500	Rp91.499.700	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	Rp70.000.000	Rp53.378.500	-Rp16.621.500	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	20 Unit	20 Unit	Rp59.999.800	Rp168.121.000	Rp108.121.200	Adanya penambahan pada target
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need) Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	10,10 Persen 68,09 Persen	10,10 Persen 68,09 Persen	Rp381.661.000	Rp3.878.340.600	Rp3.496.679.600	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penurunan ASFR	25 Persen	25 Persen	Rp82.000.000	Rp3.322.980.800	Rp3.240.980.800	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp62.000.000	Rp1.391.203.300	Rp1.329.203.300	Perubahan rincian hadiah lomba
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp20.000.000	Rp1.931.777.500	Rp1.911.777.500	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PUS yang Menggunakan Alat Kontrasepsi	68,09 Persen	68,09 Persen	Rp299.661.000	Rp555.359.800	Rp255.698.800	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	147 Laporan	147 Laporan	Rp135.161.000	Rp47.138.400	-Rp88.022.600	Perubahan pada target, rincian belanja untuk SSH obat- obatan berkurang harganya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1024 Orang	1024 Orang	Rp160.000.000	Rp503.721.400	Rp343.721.400	Adanya penambahan pada target
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp0	
PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (<i>i-Bangga</i>)	62,44	62,44	Rp435.000.000	Rp3.877.261.600	Rp3.442.261.600	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	86,64 Persen	86,64 Persen	Rp300.000.000	Rp3.694.554.800	Rp3.394.554.800	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	34 Laporan	34 Laporan	Rp300.000.000	Rp3.694.554.800	Rp3.394.554.800	Rincian Kegiatan Berubah
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	100 Persen	Rp135.000.000	Rp182.706.800	Rp47.706.800	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	Rp50.000.000	Rp49.470.800	-Rp529.200	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5 Laporan	5 Laporan	Rp85.000.000	Rp133.236.000	Rp48.236.000	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak, Berkembangnya Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN;
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan;
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan OPD terkait penyelenggaraan pelayanan;

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja Perubahan ini hingga selesai.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

Tahun 2021-2026, memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Disnakertrans sampai dengan triwulan II.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini, sebagai berikut :

- 1) Reviu Renstra Disnakertrans sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan.
- 2) Adanya pelaksanaan proyek prioritas, Penyesuaian Belanja dan Perubahan Aktivitas.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2021-2026.

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), tanggal 3 Juli 2024;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29), tanggal 26 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsive. Selain itu, Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERINGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besari rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara laian meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja;
- Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
- Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaaanya;
- Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2024 memiliki 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Utama

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- f. Kegiatan Perencanaan dan Penguanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Dari 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 16 (enam belas) Sub kegiatan pendukung, target kinerja hasil/keluaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II mencapai untuk Realisasi Keuangan sebesar 30,75% dan Realisasi Fisik mencapai 52,11%. Uraian lebih lengkap mengenai capaian target kinerja program/kegiatan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, terdapat catatan penting antara lain:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan dan Penguanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD .

Hambatan tidak tercapainya pada sub kegiatan ini karena pelaksanaannya pada triwulan III, namun pada triwulan II yaitu pada bulan Juni penyusunan pada tahap perencanaan RKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hambatan pada sub kegiatan ini karena laporan keuangan terlaksana pada bulan Desember, sebagai bahan untuk pelaporan yaitu dengan adanya pelaporan tiap bulan dan rekonsialisasi dengan akuntansi dan asset.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n.

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, target 320 orang, realisasi masih 16 orang.

Faktor Penghambat:

- Sebagian kelengkapan SPJ terlambat dikarenakan masih perlu di lengkapi;
- Belum semuanya calon peserta pelatihan mengumpulkan data diri untuk mengikuti pelatihan ;
- Masih dibawah Koordinasi dengan PKK Kab Banjar, yang akan melaksanakan pelatihan di triwulan III.

Rencana Tindak Lanjut:

- Jadwal pelatihan dilaksanakan di triwulan III.
- Pelaksanaan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan pelatihan.
- Pelaksanaan koordinasi ke desa.
- Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan berjalan dengan lancar - Peserta antusias dalam mengikuti pelatihan.
- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
Hambatan kegiatan ini karena perencanaan kegiatan (arus kas) pada triwulan IV.

C. Program Perencanaan Tenaga Kerja

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Indikator kegiatan: Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Beberapa perusahaan masih dalam proses menyusun Dokumen RTK Mikro.

Faktor Penghambat

- Tidak adanya kewenangan/intervensi dalam pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak membuat RTK mikro.

Rencana Tindak Lanjut:

- kegiatan akan dilaksanakan di TW III / IV, namun proses penyusunan RTK sejak triwulan I sudah berjalan;
- Laksanakan Sesuai dengan jadwal dan monitoring progress dari perusahaan.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Tidak adanya tenaga kerja disabilitas yang dilayani di ULD.

Faktor Penghambat

- Penyandang Disabilitas yang dilayani melalui Unit Layanan Disabilitas masih minim dikarenakan keberadaan layanan ini belum banyak diketahui.

Rencana Tindak Lanjut:

- Berkolaborasi dengan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung ULD.

b. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Indikator kegiatan: Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Faktor Penghambat

- Dokumen persyaratan yang diserahkan terkadang belum lengkap dan perlu dilengkapi kembali.

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Faktor Penghambat

- Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV (Bulan Oktober);

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

E. Program Hubungan Industrial

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan : Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, Target sampai dengan Triwulan II sebanyak 20 Perusahaan realisasi masih 8 Perusahaan, belum mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Terbatasnya mobilisasi,
- Masih Kurangnya kesadaran perusahaan untuk membuat PP
- kurangnya/lemahnya perhatian akan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja

- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, tidak mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Belum rampungnya Payung hukum/Dasar Hukum dalam penerapan Program Jamsostek di Kab Banjar;
- kurangnya/lemahnya perhatian akan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja;
- Daftar penerima manfaat jamsostek pekerja rentan masih dalam proses validasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan III sesuai Payung hukum yang telah selesai ditetapkan.

2. Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitas Kunjungan Tamu.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Pelayanan Antar Kerja

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar

- Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- Job Fair/Bursa Kerja

D. Program Hubungan Industrial

a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.

3. **Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase Adminirtrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

A.PROGRAM TENAGA KERJA

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online

4. Program/Kegiatan Yang Tercapai Disebabkan Oleh :

- Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Dana tersedia dengan anggaran kas kegiatan
- Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
- Perencanaan yang matang dan tim yang terampil dan kolaboratif

Program/Kegiatan Yang Tidak Tercapai Disebabkan Oleh :

Pada program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga kerja dalam perhitungan pencapaian target masih merujuk pada data BPS tahun 2022 sehingga belum bisa dihitung secara real. Pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi peserta pelatihan baru terlaksana sebanyak 16 orang, sedangkan target pada triwulan II yaitu 160 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, selain itu Masih dibawah Koordinasi dengan PKK Kab Banjar, yang akan melaksanakan pelatihan di triwulan III.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian program renstra dinas tenaga kerja dan transmigrasi bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengembangan daerah. Dampak positifnya dapat mencakup Tingkat Kesempatan Kerja, pemulihan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat, namun implikasi negative juga bisa muncul, kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari program tersebut secara berkelanjutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan II, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2024 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan II, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra Disnakertrans untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
- Menyampaikan informasi melalui media sosial atau website mengenai rekrutmen peserta pelatihan
- Mengadakan pelatihan dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan keperluan pasar kerja dan memaksimalkan durasi pelatihan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tri II Tahun 2024 (%)		
										Triwulan I		Triwulan II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=10+6		13 = (12 / 5) * 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks	85	28,569,833,034	84.38	5,468,362,418	77	7,105,754,778	0	919,501,913	55	3,244,734,004	55	3,244,734,004	71.43	45.66	139.38	8,713,096,422	163.98	30.50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	Persen	100	425,412,900	100	47,115,300	100	53,217,400	25	7,000,000	50	21,197,200	50	21,197,200	50.00	39.83	150	68,312,500	150.00	16.06
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	43	35,071,500	9	8,760,000	9	13,242,200	5	3,000,000	8	8,115,200	8	8,115,200	88.89	61.28	17	16,875,200	39.53	48.12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	97,738,500	1	3,793,800	1	4,307,500	0	2,500,000	1	2,764,000	1	2,764,000	100.00	64.17	2	6,557,800	40.00	6.71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	59,197,500	1	3,913,800	1	3,306,300	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	3,913,800	20.00	6.61

[illegible]

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	76,649,500	1	9,325,100	1	9,699,800	3	1,250,000	1	4,337,200	1	4,337,200	100.00	44.71	2	13,662,300	40.00	17.82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	-	0	-	25	18,899,800	0.25	-	9	8,708,400	9	8,708,400	36.00	46.08	9	8,708,400	15.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Disediakan	Persen	100	-	100	486,606,000														
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	1	486,606,000														
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	377,957,768	100	49,964,416	100	50,000,000	25	12,487,387	50	19,127,747	50	19,127,747	50.00	38.26	150	69,092,163	150.00	18.28
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	370,000,000	30	49,964,416	5	50,000,000	2	12,487,387	7	19,127,747	7	19,127,747	140.00	38.26	37	69,092,163	105.71	18.67
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	Persen	1	2,587,091,332	100	431,591,581	100	614,133,500	25	49,440,381	50	229,836,422	50	229,836,422	50.00	37.42	150	661,428,003	15000.00	25.57

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20		5	10,769,000	5	6,935,000	0	-	2	-	2	-	40.00	0.00	7	10,769,000	35.00	#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	94,035,700	10	134,423,000	3	92,242,000	0	-	3	92,000,000	3	92,000,000	100.00	99.74	13	226,423,000	72.22	240.78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	157,365,000	12	30,072,000	12	33,449,500	3	1,000,000	3	6,827,500	3	6,827,500	25.00	20.41	15	36,899,500	125.00	23.45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	102,475,000	12	25,196,100	12	20,907,000	3	-	6	980,000	6	980,000	50.00	4.69	18	26,176,100	150.00	25.54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	6,300,000	12	1,170,000	12	1,500,000	3	180,000	6	450,000	6	450,000	50.00	30.00	18	1,620,000	30.00	25.71
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	12		12	9,750,000	12	9,100,000	0	-	6	3,467,500	6	3,467,500	50.00	38.10	18	13,217,500	150.00	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2,225,715,632	12	220,211,481	12	450,000,000	0	48,260,381	6	126,111,422	6	126,111,422	50.00	28.02	18	346,322,903	30.00	15.56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	850,350,300	100	654,447,170	100	805,137,247	25	138,072,397	50	299,758,535	50	299,758,535	50.00	37.23	150	954,205,705	150.00	112.21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	647,050,300	12	46,742,970	12	90,997,247	3	11,139,156	6	22,599,710	6	22,599,710	50.00	24.84	18	69,342,680	37.50	10.72
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	159,800,000	12	22,059,200	12	34,350,000	3	2,850,000	6	8,760,000	6	8,760,000	50.00	25.50	18	30,819,200	37.50	19.29

	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum yang Disediakan	Laporan	48	43,500,000	12	585,645,000	12	679,790,000	3	124,083,241	6	268,398,825	6	268,398,825	50.00	39.48	18	854,043,825	37.50	1963.32
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	943,025,000	100	436,973,970	100	1,313,605,000	25	6,504,300	50	331,742,100	50	331,742,100	50.00	25.25	150	768,716,070	150.00	81.52
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	136,000,000	1	31,244,788	1	38,990,000	0.25	-	0.5	7,550,000	0.5	7,550,000	50.00	19.36	1.5	38,794,788	150.00	28.53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	504,300,000	3	68,057,399	3	103,000,000	0.75	5,534,300	2	19,849,100	2	19,849,100	66.67	19.27	5	87,906,499	166.67	17.43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	302,725,000	2	337,671,783	2	1,171,615,000	0.5	970,000	0.65	304,343,000	0.65	304,343,000	32.50	25.98	2.65	642,014,783	265.00	212.08
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persen	100	293,920,000	100	35,820,000	42.1	48,100,000	0	-	0	35,347,542	0	35,347,542	0.00	73.49	100	71,167,542	100.00	24.21
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro yang Disusun	Dokumen	19	293,920,000	100	35,820,000	4	48,100,000	0	-	0	35,347,542	0	35,347,542	0.00	73.49	100	71,167,542	526.32	24.21
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	33	193,920,000	3	35,820,000	8	48,100,000	0	-	0	35,347,542	0	35,347,542	0.00	73.49	3	71,167,542	9.09	36.70
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Rupiah / Jam	23100	598,476,707	22.677	1,052,821,400	22.884	1,385,336,800	22899	1,750,000	22899	26,302,250	22899	26,302,250	100065.55	1.90	22921.677	1,079,123,650	99.23	180.31

	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Kompetensi Unit	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persen	9.4	475,384,571	9.19	1,031,660,900	4.2	1,360,159,800	9.19	1,250,000	9.38	18,601,000	9.38	18,601,000	223.33	1.37	18.57	1,050,261,900	197.55	220.93
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	240	470,384,571	512	1,031,660,900	320	1,360,159,800	0	1,250,000	16	18,601,000	16	18,601,000	5.00	1.37	528	1,050,261,900	220.00	223.28
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persen	6.42	13,446,944	2.57	21,160,500	3.85	25,177,000	0	500,000	0	7,701,250	0	7,701,250	0.00	30.59	2.57	28,861,750	40.03	214.63
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktifitas	Perusahaan	25	13,446,944	15	21,160,500	15	25,177,000	0	500,000	0	7,701,250	0	7,701,250	0.00	30.59	15	28,861,750	60.00	214.63
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	54	1,978,552,696	39	149,570,800	30	424,011,500	34.7	17,463,000	0	36,427,000	0	36,427,000	0.00	8.59	39	185,997,800	72.22	9.40
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Lowongan	900	656,676,039	391	29,209,800	150	67,005,000	42	-	126	-	126	-	84.00	0.00	517	29,209,800	57.44	4.45
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	300	57,000,000	391	4,539,000	70	23,800,000	42	-	126	-	126	-	180.00	0.00	517	4,539,000	172.33	7.96
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	120	339,370,000	27	24,670,800	30	43,205,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	27	24,670,800	22.50	7.27
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar	Orang	4500	1,041,928,480	1083	94,476,000	900	219,115,000	121	3,800,000	0	17,376,000	0	17,376,000	0.00	7.93	1083	111,852,000	24.07	10.74

	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	16	294,000,000	4	5,890,000	4	38,415,000	1	3,800,000	1	9,726,000	1	9,726,000	25.00	25.32	5	15,616,000	31.25	5.31
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	4300	267,928,480	1083	8,819,000	1000	67,600,000	121	-	247	2,650,000	247	2,650,000	24.70	3.92	1330	11,469,000	30.93	4.28
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	400	480,000,000	140	79,767,000	100	113,100,000	0	-	0	5,000,000	0	5,000,000	0.00	4.42	140	84,767,000	35.00	17.66
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan	Persen	100	279,948,177	100	25,885,000	100	137,891,500	100	13,663,000	0	19,051,000	0	19,051,000	0.00	13.82	100	44,936,000	100.00	16.05
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	570	39,954,777	153	25,885,000	120	90,298,500	2	13,663,000	9	19,051,000	9	19,051,000	7.50	21.10	162	44,936,000	28.42	112.47
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	230	239,993,400	-	-	60	47,593,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00				
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	55	936,501,992	34.96	124,868,600	27	2,760,968,900	9.63	39,725,000	9.85	172,698,800	9.85	172,698,800	36.48	6.26	44.81	297,567,400	81.47	31.77
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan	Persen	60	398,475,000	39.84	43,804,000	26	80,295,600	6.58	-	7.07	2,950,000	7.07	2,950,000	27.19	3.67	46.91	46,754,000	78.18	11.73

	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	115	197,475,000	25	41,127,000	30	50,295,700	7	-	8	2,950,000	8	2,950,000	26.67	5.87	33	44,077,000	28.70	22.32
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	16	85,000,000	4	2,677,000	4	29,999,900	1	-	2	-	2	-	50.00	0.00	6	2,677,000	37.50	3.15
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Persen	100	554,266,992	100	81,064,600	100	2,680,673,300	100	39,725,000	100	169,748,800	100	169,748,800	100.00	6.33	200	250,813,400	200.00	45.25
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	112	92,000,000	78	44,639,600	25	92,785,000	2	-	6	17,176,500	6	17,176,500	24.00	18.51	84	61,816,100	75.00	67.19
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	Perkara	112	119,760,000	70	36,425,000	25	60,499,800	4	39,725,000	6	42,181,900	6	42,181,900	24.00	69.72	76	78,606,900	67.86	65.64
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	460	189,266,992	-	-	10000	2,527,388,500	0	-	6303	110,390,400	6303	110,390,400	63.03	4.37	63.03	4.37	13.70	0.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	Persen	31.5	278,732,164	21.05	115,220,000	21.05	206,279,000	10.5	64,512,000	31.57	153,493,000	31.57	153,493,000	149.98	74.41	52.62	268,713,000	167.05	96.41

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2024.

- Perubahan target pada beberapa Sub kegiatan
- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan rencana kerja yaitu 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 16 (enam belas) Sub kegiatan pendukung.
- Total kebutuhan dana setelah hasil Perubahan RKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12,180,248,443.00 (dua belas milyar seratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan sumber dana berasal dari DAU.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian.
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan unit disabilitas ketenagakerjaan.
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja.
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Pelindungandan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Kegiatan Perencanaan dan Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ;
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ;
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Alasan dilakukannya Perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran pada renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini , sebagai berikut :

- 1) Reviu Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan yang menyesuaikan Kepmendagri nomor 050-5889 dan telah dituangkan di dalam Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dengan Perbub Nomor 63 Tahun 2021.
- 2) Adanya pelaksanaan proyek prioritas berupa pelatihan
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan Perubahan renja 2024 sebagai berikut :
 - a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan

- b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan
- c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program
- d. Perubahan indikator dan target program/kegiatan /sub kegiatan

Adapun Sub Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
Bertambah PPPK sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga menambah biaya gaji dan tunjangan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penambahan pagu untuk belanja kursi staf, kursi rapat, untuk peralatan dan perlengkapan kantor seperti : Printer di bidang AC untuk mendukung sarana gedung BLK yang rencana akan digunakan pada triwulan IV tahun 2024.
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
tambahan pagu untuk mendukung kegiatan di Bidang – Bidang, seperti Bidang Hubungan Industrial untuk melaksanakan pembinaan ke Perusahaan-perusahaan; Bidang Pelatihan untuk operasional melaksanakan kegiatan di Desa / Kecamatan.
4. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Pembangunan Gedung BLK yang mengharuskan menambah kebutuhan daya listrik PLN.
5. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
penambahan pagu untuk mengakomodir Gedung BLK yang baru dibangun, melengkapi fasilitas.
6. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan pekerja;
Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 10000 (sepuluh ribu orang) pekerja rentan di Kab. Banjar.

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024								
SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU (Rp)			Alasan Perubahan
	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024 (Rp)	Perubahan Renja 2024 (Rp)	Jumlah perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
URUSAN								
WAJIB								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
TENAGA KERJA								
PROGRAM 1								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77 indeks	85 indeks	6.387.803.805	7.367.010.701,00	979.206.896	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	100%	100%	53,217,400	53,217,400	0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	13,242,200	13,242,200	0	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,307,500	4,307,500	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	3,306,300	3,306,300	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	5,499,800	5,499,800	0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Dokumen	4,499,800	4,499,800	0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 laporan	11,467,200	11,467,200	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	10,894,600	10,894,600	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	100%	3.696.167.908	4,269,661,631	573.493.723	Bertambah PPPK sebanyak 3 (tiga) orang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	26 orang	3.540.268.308	4,113,762,031	573.493.723	Bertambah PPPK sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga menambah biaya gaji dan tunjangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	127,300,000	129.520.000,00	2.220.000	kekurangan pada honorarium pejabat pengadaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	21 Dokumen	9,699,800	9,699,800	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	12 Laporan	18,899,800	18,899,800	0	

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	100%	50,000,000	50,000,000	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	5 Orang	5 Orang	50,000,000	50,000,000	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	Persentasepenyelenggaraanpenunjang administrasiumum perkantoran	100%	100%	563.993.500,00	614,133,500	50.140.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	6,935,000	6,935,000	0	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	92,242,000	134.814.000,00	42.572.000	Penambahan pagu untuk belanja kursi staf, kursi rapat, printer, pinjer print dan sofa untuk ruangan kadis ; untuk peralatan dan perlengkapan kantor seperti : Printer di bidang , kursi eselon 2, kursi tamu, Air purifier sharp
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33,449,500	58.164.500,00	24.715.000	Selisih inputan rincian dari SSH di SIPD; kenaikan standart harga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.396.000,00	20,907,000	511.000	Selisih inputan rincian dari SSH di SIPD; kenaikan standart harga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9,100,000	18.735.000,00	9.635.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	400.000.000,00	634.238.458,00	234.238.458	tambahan pagu untuk mendukung kegiatan di Bidang - bidang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	805,137,247	805,137,247	0	

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Disediakan	12 laporan	12 Laporan	90,997,247	131.444.712,00	40.447.465	Pembangunan Gedung BLK yang mengharuskan menambah kebutuhan daya listrik PLN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34,350,000	34,350,000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	679,790,000	679,790,000	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	100%	1.219.287.750,00	1,313,605,000	94.317.250	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38,990,000	38,990,000	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	103,000,000	103,000,000	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.077.157.750,00	1.129.043.000,00	51.885.250	penambahan pagu untuk mengakomodir Gedung BLK yang baru dibangun, melengkapi fasilitas.

PROGRAM 2							0	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	21.189 Rupiah/Jam	22.884 Rupiah/Jam	1.353.337.000,00	1,385,336,800	31.999.800	Selisih inputan rincian dari SSH di SIPD; kenaikan standart harga
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan bersertifikat pelatihan dan bersertifikat kompetensi Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	4.2%	9.20%	1.328.160.000,00	1,360,159,800	31.999.800	Selisih inputan rincian dari SSH di SIPD; kenaikan standart harga
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 orang	48 orang	1.328.160.000,00	1,360,159,800	31.999.800	Selisih inputan rincian dari SSH di SIPD; kenaikan standart harga
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	3.85%	3.85%	25,177,000	25,177,000	0	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	25,177,000	25,177,000	0	Perubahan Target menyesuaikan di renstra
PROGRAM 3							0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan kawasan Ex. Transmigrasi	Persentase Pengembangan kawasan Ex. Transmigrasi	21,05%	31.58%	206,279,000	206,279,000	0	

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	4 Kawasan wilayah	4 Kawasan wilayah	206,279,000	206,279,000	0	
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang DiBina	32 orang	32 Orang	206,279,000	206,279,000	0	
PROGRAM 4							0	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	30%	34%	424.011.500,00	424,011,500	0	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	150 orang	150 Orang	67,005,000	67,005,000	0	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	30 orang	30 orang	23,800,000	23,800,000	0	
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	70 orang	70 orang	43,205,000	43,205,000	0	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	900 orang	900 orang	219,115,000	219,115,000	0	

Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	4 Dokumen	4 dokumen	38,415,000	38,415,000	0	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	1000 Orang	67,600,000	67,600,000	0	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	113,100,000	113,100,000	0	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan	Persentase PMI (Pra dan Purna) Yang Diberikan Fasilitas Perlindungan	100%	100%	137,891,500	137,891,500	0	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	90,298,500	90,298,500	0	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	60 orang	60 orang	47,593,000	47,593,000	0	
PROGRAM 5							0	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	100%	100%	48,100,000	36.641.542,00	-11.458.458	mengurangi belanja ATK
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro/ Mikro	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	100%	42.10%	48,100,000	36.641.542,00	-11.458.458	mengurangi belanja ATK

Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	8 orang	8 orang	48,100,000	36.641.542,00	-11.458.458	mengurangi belanja ATK
PROGRAM 6							0	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	27%	35%	332.968.900,00	2,760,968,900	2.428.000.000	Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 10000 (sepuluh ribu orang) pekerja rentan
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan	Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan	26%	40%	80,295,600	80,295,600	0	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP	30 Perusahaan	30 Perusahaan	50,295,700	50,295,700	0	

	Terdaftar di WLKP Online	Online						
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan)	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan)	4 Laporan	4 Laporan	29,999,900	29,999,900	0	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	100 %	252.673.300,00	2,680,673,300	2.428.000.000	Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 10000 (sepuluh ribu orang) pekerja rentan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	25 perkara	92,785,000	92,785,000	0	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah perkara perselisihan yang diselesaikan	25 perkara	25 perkara	60,499,800	60,499,800	0	

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	100 orang	99.388.500,00	2,527,388,500	2.428.000.000	Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 10000 (sepuluh ribu orang) pekerja rentan
JUMLAH					8.752.500.205	12.180.248.443	3.427.748.238	

REKAPITULASI DATA PENGADAAN TAHUN 2019
KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT
2019

No.	Jenis	Kategori / Bidang Kegiatan / Program / Sub Kegiatan	Tipe / Jenis Pengadaan / Sub Kegiatan	Tipe Klasifikasi Pengadaan	Rencana Pengadaan 2019	Rencana Pengadaan 2019	Rencana Pengadaan 2019	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Tahun 2031		Tahun 2032		Tahun 2033		Tahun 2034		Tahun 2035		Tahun 2036		Tahun 2037		Tahun 2038		Tahun 2039		Tahun 2040		Tahun 2041		Tahun 2042		Tahun 2043		Tahun 2044		Tahun 2045		Tahun 2046		Tahun 2047		Tahun 2048		Tahun 2049		Tahun 2050		Tahun 2051		Tahun 2052		Tahun 2053		Tahun 2054		Tahun 2055		Tahun 2056		Tahun 2057		Tahun 2058		Tahun 2059		Tahun 2060		Tahun 2061		Tahun 2062		Tahun 2063		Tahun 2064		Tahun 2065		Tahun 2066		Tahun 2067		Tahun 2068		Tahun 2069		Tahun 2070		Tahun 2071		Tahun 2072		Tahun 2073		Tahun 2074		Tahun 2075		Tahun 2076		Tahun 2077		Tahun 2078		Tahun 2079		Tahun 2080		Tahun 2081		Tahun 2082		Tahun 2083		Tahun 2084		Tahun 2085		Tahun 2086		Tahun 2087		Tahun 2088		Tahun 2089		Tahun 2090		Tahun 2091		Tahun 2092		Tahun 2093		Tahun 2094		Tahun 2095		Tahun 2096		Tahun 2097		Tahun 2098		Tahun 2099		Tahun 2100		Tahun 2101		Tahun 2102		Tahun 2103		Tahun 2104		Tahun 2105		Tahun 2106		Tahun 2107		Tahun 2108		Tahun 2109		Tahun 2110		Tahun 2111		Tahun 2112		Tahun 2113		Tahun 2114		Tahun 2115		Tahun 2116		Tahun 2117		Tahun 2118		Tahun 2119		Tahun 2120		Tahun 2121		Tahun 2122		Tahun 2123		Tahun 2124		Tahun 2125		Tahun 2126		Tahun 2127		Tahun 2128		Tahun 2129		Tahun 2130		Tahun 2131		Tahun 2132		Tahun 2133		Tahun 2134		Tahun 2135		Tahun 2136		Tahun 2137		Tahun 2138		Tahun 2139		Tahun 2140		Tahun 2141		Tahun 2142		Tahun 2143		Tahun 2144		Tahun 2145		Tahun 2146		Tahun 2147		Tahun 2148		Tahun 2149		Tahun 2150		Tahun 2151		Tahun 2152		Tahun 2153		Tahun 2154		Tahun 2155		Tahun 2156		Tahun 2157		Tahun 2158		Tahun 2159		Tahun 2160		Tahun 2161		Tahun 2162		Tahun 2163		Tahun 2164		Tahun 2165		Tahun 2166		Tahun 2167		Tahun 2168		Tahun 2169		Tahun 2170		Tahun 2171		Tahun 2172		Tahun 2173		Tahun 2174		Tahun 2175		Tahun 2176		Tahun 2177		Tahun 2178		Tahun 2179		Tahun 2180		Tahun 2181		Tahun 2182		Tahun 2183		Tahun 2184		Tahun 2185		Tahun 2186		Tahun 2187		Tahun 2188		Tahun 2189		Tahun 2190		Tahun 2191		Tahun 2192		Tahun 2193		Tahun 2194		Tahun 2195		Tahun 2196		Tahun 2197		Tahun 2198		Tahun 2199		Tahun 2200		Tahun 2201		Tahun 2202		Tahun 2203		Tahun 2204		Tahun 2205		Tahun 2206		Tahun 2207		Tahun 2208		Tahun 2209		Tahun 2210		Tahun 2211		Tahun 2212		Tahun 2213		Tahun 2214		Tahun 2215		Tahun 2216		Tahun 2217		Tahun 2218		Tahun 2219		Tahun 2220		Tahun 2221		Tahun 2222		Tahun 2223		Tahun 2224		Tahun 2225		Tahun 2226		Tahun 2227		Tahun 2228		Tahun 2229		Tahun 2230		Tahun 2231		Tahun 2232		Tahun 2233		Tahun 2234		Tahun 2235		Tahun 2236		Tahun 2237		Tahun 2238		Tahun 2239		Tahun 2240		Tahun 2241		Tahun 2242		Tahun 2243		Tahun 2244		Tahun 2245		Tahun 2246		Tahun 2247		Tahun 2248		Tahun 2249		Tahun 2250		Tahun 2251		Tahun 2252		Tahun 2253		Tahun 2254		Tahun 2255		Tahun 2256		Tahun 2257		Tahun 2258		Tahun 2259		Tahun 2260		Tahun 2261		Tahun 2262		Tahun 2263		Tahun 2264		Tahun 2265		Tahun 2266		Tahun 2267		Tahun 2268		Tahun 2269		Tahun 2270		Tahun 2271		Tahun 2272		Tahun 2273		Tahun 2274		Tahun 2275		Tahun 2276		Tahun 2277		Tahun 2278		Tahun 2279		Tahun 2280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992

No	Kode		Tipe dan Lokasi Kegiatan / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Anggaran / Target / Sasaran	Pembina Kegiatan / Organisasi / Lembaga	Detail Pelaksanaan Kegiatan / Anggaran / Realisasi			Lokasi	Sumber Dana	Realisasi / Persentase	Keterangan Catatan	Target	Page Indikasi / Tgl	Catatan Tambahan / Keterangan
							Anggaran / Rencana		Realisasi / Pelaksanaan							
							Anggaran / Rencana	Realisasi / Pelaksanaan								
1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
3	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
4	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
5	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
6	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
7	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
8	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
9	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
14	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
15	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
16	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
17	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
18	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
19	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
20	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
21	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
22	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
23	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
24	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
25	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
26	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
27	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
28	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
29	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
30	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

[illegible]

No	Kode	Uraian / Bidang Utama / Program / Kegiatan / Sub- Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub- Kegiatan	Tingkat Akhir Periode Revisi	Pencapaian Capaian REKHA RPD	Pencapaian Capaian Target RPD	Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Skala	Target 2024		Peringkat Daerah Pengantar Jumlah		
							Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Revisi	Revisi	RPD 2024	RPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1			Jumlah Rendemen Dana Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan diaplikasikan Pajak dan Perencanaan			3 Unit	3 Unit	0	103.140.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Individu yang mampu mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-01	2.00	Penelitian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
		01.00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit		1.877.157.750,00	1.171.615.000,00	1.129.043.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Individu yang mampu mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
3	07-02		PROGRAM PENGANTARAN TENAGA KERJA PENYUNAN Pencapaian Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro yang Disusun	-	100 %	42.10 %		48.100.000,00	48.100.000,00	36.641.342,00			-	2. Meningkatkan keajaiban makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			100 Persentase	4 Dokumen		48.100.000,00	48.100.000,00	48.100.000,00			-	2. Meningkatkan keajaiban makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat	Pertumbuhan		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-02	2.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																	
		01.00		Jumlah SDM Pencapaian yang mampu menyusun RTK Mikro		15 Orang	6 Orang		48.100.000,00	48.100.000,00	36.641.342,00	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	2. Meningkatkan keajaiban makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
3	07-03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		31.100 Rp	22.000 Rp		1.351.337.000,00	1.385.336.000,00	1.385.336.000,00			-				1.500.000.000,00		
2	07-03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Keterampilan	Penyusunan dokumen Pelatihan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat	-	4.2 Person	9.20 Person		1.328.160.000,00	1.366.159.000,00	1.366.159.000,00			-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Individu yang mampu mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-03	2.00	Proses Pelaksanaan Pelatihan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Keterampilan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Keterampilan pada Tahun n		320 Orang	304 Orang		1.328.160.000,00	1.366.159.000,00	1.366.159.000,00	Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Individu yang mampu mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-03	2.04	Kemampuan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Penyusunan dokumen Pelatihan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat	-	3,05 Person	3,05 Person		25.177.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00			-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Individu yang mampu mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban masyarakat	Pertumbuhan		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	
2	07-03	2.00	Pelaksanaan Kemampuan Produktivitas pada Perusahaan Kecil											-						

No.	Kode	Uraian / Deskripsi Uraian / Program / Kegiatan / Sub- Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub- Kegiatan	Target Akhir Periode Berkas	Capaian REKHA OPD	Pencapaian Capaian Target OPD	MUTUAS, BERKAS AND, BERKAS, BERKAS				Pencapaian		Kategori Skala	STANDAR, MHS, BERKAS, BERKAS, BERKAS		Perangkat Daerah Penerima Jumlah			
							Target 2024		Pagu Indikasi Rp		Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikasi (Rp)	
							Revisi	Revisi	Revisi	Revisi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Perbaikan Kualitas yang Meningkatkan Produktivitas				5 Perbaikan	5 Perbaikan	25.177.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00	Kab. Banjar, Maringpan, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
4	2	07/04	PROGRAM PENGEMPATAN TENAGA KERJA	Penempatan tenaga kerja yang dibutuhkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota			27,00 %	24 %	424.011.300,00	424.011.300,00	424.011.300,00			-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		
2	07/04	2.01	Pelaksanaan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota				150 Layanan	200 Layanan	67.005.000,00	67.005.000,00	67.005.000,00			-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.	Maringpan	6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
3	07/04	2.00	Pelaksanaan antar kerja											-					
		01.02		Jumlah Tenaga Kerja yang Melalui Layanan AKAD dan AKL			10 Orang	10 Orang	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Banjar, Maringpan, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
3	07/04	3.00	Pengelolaan Unit Layanan Pelayanan											-					
		01.03		Jumlah Tenaga Kerja Dibutuhkan yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULP			30 Orang	30 Orang	43.205.000,00	43.205.000,00	43.205.000,00	Kab. Banjar, Sema Kacamatan, Sema Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
2	07/04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar			900 Orang	900 Orang	219.115.000,00	219.115.000,00	219.115.000,00			-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.	Maringpan	6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
3	07/04	2.00	Pencapaian dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online											-					
		03.01		Jumlah Data dan Informasi yang Dibutuhkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			1 Dokumen	1 Dokumen	38.415.000,00	38.415.000,00	38.415.000,00	Kab. Banjar, Maringpan, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI
2	07/04	2.00	Pelaksanaan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemakai dan Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kurti Hub)			1000 Orang	1000 Orang	67.600.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	Kab. Banjar, Maringpan, Sungai Paring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi lokal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan keajaiban ekonomi.		6,00		DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSFORMASI

[illegible]

No	Lamp	Kategori Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Kegiatan	Tahun 2019 / 2020 / 2021	Monev / Evaluasi / Monev	Monev / Evaluasi / Monev	Target 2020					Lamp	Monev / Evaluasi / Monev	Monev / Evaluasi / Monev	Monev / Evaluasi / Monev	Monev / Evaluasi / Monev	Monev / Evaluasi / Monev
							Indikator	Target	Target	Target	Target						
1	1							10	10	10	10	1	1	1	1	1	1
2	2							10	10	10	10	2	2	2	2	2	2
3	3							10	10	10	10	3	3	3	3	3	3
4	4							10	10	10	10	4	4	4	4	4	4
5	5							10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
6	6							10	10	10	10	6	6	6	6	6	6
7	7							10	10	10	10	7	7	7	7	7	7
8	8							10	10	10	10	8	8	8	8	8	8
9	9							10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
10	10							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11							10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
12	12							10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
13	13							10	10	10	10	13	13	13	13	13	13
14	14							10	10	10	10	14	14	14	14	14	14
15	15							10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
16	16							10	10	10	10	16	16	16	16	16	16
17	17							10	10	10	10	17	17	17	17	17	17
18	18							10	10	10	10	18	18	18	18	18	18
19	19							10	10	10	10	19	19	19	19	19	19
20	20							10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
21	21							10	10	10	10	21	21	21	21	21	21
22	22							10	10	10	10	22	22	22	22	22	22
23	23							10	10	10	10	23	23	23	23	23	23
24	24							10	10	10	10	24	24	24	24	24	24
25	25							10	10	10	10	25	25	25	25	25	25
26	26							10	10	10	10	26	26	26	26	26	26
27	27							10	10	10	10	27	27	27	27	27	27
28	28							10	10	10	10	28	28	28	28	28	28
29	29							10	10	10	10	29	29	29	29	29	29
30	30							10	10	10	10	30	30	30	30	30	30
31	31							10	10	10	10	31	31	31	31	31	31
32	32							10	10	10	10	32	32	32	32	32	32
33	33							10	10	10	10	33	33	33	33	33	33
34	34							10	10	10	10	34	34	34	34	34	34
35	35							10	10	10	10	35	35	35	35	35	35
36	36							10	10	10	10	36	36	36	36	36	36
37	37							10	10	10	10	37	37	37	37	37	37
38	38							10	10	10	10	38	38	38	38	38	38
39	39							10	10	10	10	39	39	39	39	39	39
40	40							10	10	10	10	40	40	40	40	40	40
41	41							10	10	10	10	41	41	41	41	41	41
42	42							10	10	10	10	42	42	42	42	42	42
43	43							10	10	10	10	43	43	43	43	43	43
44	44							10	10	10	10	44	44	44	44	44	44
45	45							10	10	10	10	45	45	45	45	45	45
46	46							10	10	10	10	46	46	46	46	46	46
47	47							10	10	10	10	47	47	47	47	47	47
48	48							10	10	10	10	48	48	48	48	48	48
49	49							10	10	10	10	49	49	49	49	49	49
50	50							10	10	10	10	50	50	50	50	50	50
51	51							10	10	10	10	51	51	51	51	51	51
52	52							10	10	10	10	52	52	52	52	52	52
53	53							10	10	10	10	53	53	53	53	53	53
54	54							10	10	10	10	54	54	54	54	54	54
55	55							10	10	10	10	55	55	55	55	55	55
56	56							10	10	10	10	56	56	56	56	56	56
57	57							10	10	10	10	57	57	57	57	57	57
58	58							10	10	10	10	58	58	58	58	58	58
59	59							10	10	10	10	59	59	59	59	59	59
60	60							10	10	10	10	60	60	60	60	60	60
61	61							10	10	10	10	61	61	61	61	61	61
62	62							10	10	10	10	62	62	62	62	62	62
63	63							10	10	10	10	63	63	63	63	63	63
64	64							10	10	10	10	64	64	64	64	64	64
65	65							10	10	10	10	65	65	65	65	65	65
66	66							10	10	10	10	66	66	66	66	66	66
67	67							10	10	10	10	67	67	67	67	67	67
68	68							10	10	10	10	68	68	68	68	68	68
69	69							10	10	10	10	69	69	69	69	69	69
70	70							10	10	10	10	70	70	70	70	70	70
71	71							10	10	10	10	71	71	71	71	71	71
72	72							10	10	10	10	72	72	72	72	72	72
73	73							10	10	10	10	73	73	73	73	73	73
74	74							10	10	10	10	74	74	74	74	74	74
75	75							10	10	10	10	75	75	75	75	75	75
76	76							10	10	10	10	76	76	76	76	76	76
77	77							10	10	10	10	77	77	77	77	77	77
78	78							10	10	10	10	78	78	78	78	78	78
79	79							10	10	10	10	79	79	79	79	79	79
80	80							10	10	10	10	80	80	80	80	80	80
81	81							10	10	10	10	81	81	81	81	81	81
82	82							10	10	10	10	82	82	82	82	82	82
83	83							10	10	10	10	83	83	83	83	83	83
84	84							10	10	10	10	84	84	84	84	84	84
85	85							10	10	10	10	85	85	85	85	85	85
86	86							10	10	10	10	86	86	86	86	86	86
87	87							10	10	10	10	87	87	87	87	87	87
88	88							10	10	10	10	88	88	88	88	88	88
89	89							10	10	10	10	89	89	89	89	89	89
90	90							10	10	10	10	90	90	90	90	90	90
91	91							10	10	10	10	91	91	91	91	91	91
92	92							10	10	10	10	92	92	92	92	92	92
93	93							10	10	10	10	93	93	93	93	93	93
94	94							10	10	10	10	94	94	94	94	94	94
95	95							10	10	10	10	95	95	95	95	95	95
96	96							10	10	10	10	96	96	96	96	96	96
97	97							10	10	10	10	97	97	97	97	97	97
98	98							10	10	10	10	98	98	98	98	98	98
99	99							10	10	10	10	99	99	99	99	99	99
100	100							10	10	10	10	100	100	100	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banjar 2021-2026.

Sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu Restra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-20226.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Disnakertran Kabupaten Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Disnakertran Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh rencana kerja perubahan tersebut.

2. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk mengarahkan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan.
3. Penentuan Prioritas: Menentukan prioritas perubahan yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Perencanaan Taktis: Rinci langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan
5. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan perubahan yang akurat dan efektif.
6. lokasi Sumber Daya: Menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disnakertran Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Evaluasi situasi saat ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, identifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi.
2. Tujuan dan Sasaran: menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta sasaran yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan waktu-batas (SMART) untuk perubahan yang diinginkan.
3. Strategi Perubahan: Merencanakan strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang akan melibatkan perubahan struktural, program pelatihan, peningkatan layanan, atau langkah-langkah lainnya.
4. Kegiatan dan Rencana Aksi: Membuat rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi: menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan keberhasilan

rencana kerja. Serta mengatur sistem untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara berkala.

6. Anggaran: Menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan kegiatan yang real dilaksanakan berkesesuaian dengan pencapaian target RPJMD. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja Disnakertran Tahun 2024 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu mengharapkan sarana masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA ini. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Semoga penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang dibuat berdasarkan dokumen RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahap, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan dibidang ketahanan pangan dan perikanan merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2024.

Tahapan penyusunan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian akan dituangkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil perumusan akhir rancangan SKPD akan ditetapkan menjadi RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Renja SKPD menjadi dokumen Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar termasuk dalam Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu sebanyak 8 (delapan) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan Misi pertama dan dua, yaitu : ***Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tujuan terwujudnya sumber daya yang berkualitas***. Guna mendukung misi pertama tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengemban sasaran yaitu ***meningkatnya ketahanan pangan pangan dan gizi masyarakat*** dengan indikator Kinerja ***Indeks Ketahanan Pangan***. Sedangkan misi kedua yaitu : ***Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*** dengan tujuan ***terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas***, dengan tujuan ***meningkatnya keunggulan perikanan*** dengan indicator ***Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan (LPE)*** dan Indicator ***Nilai Tukar Petani (NTP)*** dengan sasaran ***Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjar yang Mandiri dan Maju***

(Peningkatan Produksi Sektor Perikanan,Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan).

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 di atas, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024.

Sebagai upaya mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar melaksanakan 8 (delapan) Program Kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (sasaran program) yaitu :

1. Berkembangnya Desa Mandiri Pangan;
2. Persentase Stabilitas Harga Pangan;
3. Ketersediaan Pangan Utama;
4. Skor PPH Konsumsi;
5. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan;
6. Skor Keamanan Pangan.
7. Produksi Perikanan Tangkap
8. Produksi Perikanan Budidaya
9. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan di Bidang Perikanan
10. Angka Konsumsi Ikan dan Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/ Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- u. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2020 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
- v. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- w. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.
- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026;
- bb. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah terkait perubahan SOTK sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan sebagai acuan kerja dalam pembuatan RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024, sebagai acuan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024, serta mengakomodasi perencanaan masyarakat di bidang pangan dan perikanan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar yang di dalamnya tertuang tujuan, input, output, outcome dan manfaat yang akan dicapai pada tahun 2024 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lebih lanjut

tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024;
- b. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2024 bagi jajaran birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar;
- c. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan ketahanan pangan secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar;
- d. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
- e. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar 2021-2026. Dalam penyusunan perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi;

Daftar Tabel;

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Dan
Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan**

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan, hampir sebagian besar mencapai target kinerja yang diharapkan dengan uraian realisasi program dan kegiatan yang mendukung target kinerja yang direncanakan seperti tabel capaian berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2023

KODE					Sasaran/ Kinerja	Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiata n (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2023 (Renja tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)		
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)				
2	09					URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)										
2	09	01			Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)(indeks)	76 Indeks		73 Indeks	76,16 Indeks	104,32	74	78,9	8.455.888.875	106,62
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu (persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	39.328.500	100,00
2	09	01	2.01	06	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berkualitash yang berkualitas	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan - Terealisasinya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35 Laporan	6 Dokum en	35 Laporan	35 Laporan	100	35	35	39.328.500	100,00
2	09	01	2.02		Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu (Persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	5.753.443.352	100,00
					Tersedianya gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 ASN	13 ASN	47 ASN	47 ASN	100	47	47	5.631.552.252	100,00

2	09	01	2.02	02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	12	12	107.220.000	100,00
2	09	01	2.02	05	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	4.703.300	100,00
2	09	01	2.02	07	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	100	18	18	9.967.800	100,00
2	09	01	2.05		Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu (Persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	49.426.498	100,00
2	09	01	2.05	11	Peningkatan kompetensi Perencana	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5 Orang	4 ASN	9 Orang	9 Orang	100	5	5	49.426.498	100,00
2	09	01	2.06		Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	598.888.886	100,00
2	9	1	2.06	02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11 Paket	12 Bulan	11 Paket	11 Paket	100	0	0	-	#DIV/0!
2	09	01	2.06	04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	5 paket	12 Bulan	5 Paket	5 Paket	100	5	5	25.216.185	100,00
2	09	01	2.06	05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100	3	3	30.232.650	100,00
2	09	01	2.06	09	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	100	2	2	543.440.051	100,00
2	09	01	2.08		Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	1.330.111.027	100,00
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan		1 Laporan	1 Laporan		1	1	m	100,00
2	09	01	2.08	02	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2 laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	2	2	126.142.747	100,00
2	09	01	2.08	04	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	13 Bulan	13 Laporan	13 Laporan	100	1	1	1.197.778.280	100,00

	09	01	2.09		<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan</i>	100 Persen			100 Persen		100 Persen		100	100	100	684.690.612	100,00	
2	09	01	2.09	01	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	unit	12	Bulan	1	Unit	1	Unit	100	1	1	38.826.592	100,00
2	09	01	2.09	02	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	unit	12	Bulan	20	Unit	20	Unit	100	22	22	410.478.688	100,00
2	09	01	2.09	11	Terpelihara/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	unit	12	Bulan	3	Unit	3	Unit	100	3	3	193.292.940	100,00
2	09	01	2.09	06	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	46	unit			17	Unit	17	Unit	100	46	46	32.442.392	100,00
2	09	01	2.09	07	Terpeliharannya Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	unit			16	Unit	16	Unit	100	16	16	9.650.000	100,00
2	09	02			Meningkatnya kemandirian pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan (Desa)	1	Desa			1	Desa	1	Desa	100	1	1	249.700.600	100,00
2	09	02	2.01		<i>Tersediannya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)</i>	2	paket			2	Paket	2	Paket	100	2	4	249.700.600	200,00
2	09	02	2.01	01	Tersediannya Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (Unit)	1	unit	1	LPM/L PD	2	Unit	2	Unit	100	1	2	27.004.400	200,00
2	09	02	2.01	03	Tersediannya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	1	unit	2	Laporan	1	Unit	1	Unit	100	1	2	222.696.200	200,00
2	09	03			Meningkatnya Cadangan pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Stabilitas Harga Pangan (persen)	≤ 15	Persen			≤ 25	Persen	≤ 25	Persen	100	≤ 20 Persen	13,65	653.009.300	131,75
				Ketersediaan Pangan Utama (persen)			34,84	Persen		12,22	Persen		5,06	Persen	41,4		23,53	31,93		135,70
				Skor PPH Konsumsi (skor)			76,74	Skor		74,71	Skor		79,5	Skor	106,41		75,58	78,6		104,00
2	09	03	2.01		<i>Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan</i>	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah</i>	<i>persentase terciptanya stabilitas harga atas komoditas pangan (persen)</i>	≤ 15 persen				≤ 25	Persen	≤ 25	Persen	100	≤ 20	13,65	163.949.000	131,75

					Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
2	09	03	2.01	01	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	2 laporan	4 Dokum en	1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	8.493.600	100,00
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Perberasan - Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi	-	6 Lapora n				-	-		
2	09	03	2.01	04	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)	1 Dokume n	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	90.690.100	100,00
2	09	03	2.01	05	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (unit)	19 unit	13 LDPM	19 Unit	19 Unit	100	19	19	17.006.800	100,00
2	9	3	2.01	06	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	2 Unit	3 LUPM	2 Unit	2 Unit	100	-	-	-	
2	09	03	2.01	02	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	47.758.500	100,00
2	09	03	2.02		Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan daerah (persen)	34,84 Persen		12,22 Persen	5,06 Persen	41,4	23,53	31,93	256.371.300	135,70
2	09	03	2.02	01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4 laporan	1 lapora n	4 laporan	2 laporan	50	2	1	2.225.100	50,00
2	9	3	2.02	03	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	35 ton		25 Ton	9,2 Ton	36,8	25	23,1	254.146.200	92,40
2	09	03	2.04		Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (kkal/kap/hari)	1.650 kkal/ka p/hari		1.600 kkal/kapita/hari	1.600 kkal/kapita/ hari	100	1.625	1773,1	232.689.000	109,11
2	09	03	2.04	02		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Hasil Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Supali Pangan	-	1 Dokum en			100	-			
2	09	03	2.04	03	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Berkembangnya Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) (DAK) - Berkembangnya Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL)		2 KRPL 5 KRPL 40 Kader 150 Orang 1				-			

					Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Berbasis Sumber Daya Lokal	- Terlaksananya Bimtek Petugas Kader Pangan Posyandu - Terlaksananya Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif - Terlaksananya Promosi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah		Pameran							
2	09	03	2.04	03	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	6 laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100	6	6	176.093.000	100,00
2	09	03	2.04	03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1 laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	56.596.000	100,00
2	09	04			Tertanganinya Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	10,71 Persen		3,57 Persen	3,57 Persen	100	7,14	17	50.715.200	231,79
2	09	04	2.01		Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten (Sistem Informasi)	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100	1	1	11.265.800	100,00
2	09	04	2.01	01	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	11.265.800	100,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	10,71 Persen		3,57 Persen	3,57 Persen	100	7,14	16,55	39.449.400	231,79
2	09	04	2.02	02	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2 Dokumen	39.449.400	#VALUE!
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	1 Laporan					-		
2	09	05			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Keamanan Pangan (Persen)	70 Persen		65 Persen	75 Persen	115,38	65	100	149.776.596	153,85

2	09	05	2.01		Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Skor Keamanan Pangan (SKP)	70 Persen		65 Persen	75 Persen	115,38	65	100	149.776.596	153,85
2	09	05	2.01	01	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)	1 Dokume n	2 Lapora n 350 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	I	34.720.400	100,00
2	09	05	2.01	04	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokume n	12 Lapora n	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	11.946.800	100,00
2	09	05	2.01	05	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokume n	1 Uji	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	I	13.443.600	100,00
2	09	05	2.01	03	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokume n					1	1	89.665.796	100,00
3	25	04			Meningkatnya pengelolaan perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	54.923 Ton		53.926 Ton	49.906 Ton	92,54	54.442	49008	378.070.400	90,02
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	60.744.000	100,00
3	25	04	2.02	02	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10 kelompo k		10 Kelompok	10 Kelompok	100	5	10	19.883.000	200,00
3	25	04	2.02	04	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	10 kelompo k		10 Kelompok	10 Kelompok	100	10	11	40.861.000	110,00
3	25	04	2.03		Terbitnya Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil	100 rekome ndasi					50	63	15.455.000	126,00
3	25	04	2.03	02	Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil	100 rekomen dasi					50	63	15.455.000	126,00

					Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)									
3	25	04	2.04		Terkelolanya Pembudidaya Ikan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (%)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	301.871.400	100,00
3	25	04	2.04	02	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	50 unit		5 Unit	5 Unit	100	-	-		#VALUE!
3	25	04	2.04	03	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	47 unit		41 Unit	41 Unit	100	53	53	214.179.400	100,00
3	25	04	2.04	04	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	47.462.000	100,00
3	25	04	2.04	05	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	100 orang		100 Orang	100 Orang	100	100	100	40.230.000	100,00
						Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan BBII untuk menghasilkan benih / Tercapainya produksi perikanan budidaya di kabupaten banjar		#### ###				-			
						Pengembangan unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah jenis layanan posnlayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya		1.070				-			
						Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan	tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam pemijahan dan bak induk, terlaksananya kolam/bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOKal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit		1				-			

								ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan									
							Forum Komunikasi antar pelaku pengembangan usaha perikanan budidaya	Tersedianya media komunikasi dan informasi dalam pengembangan usaha perikanan budidaya		200			-				
							Penyusunan kebijakan/Standar/Prosedur/Norma di Sub Sektor Perikanan Budidaya	Tersedianya Norma/Standar/Prosedur/kebijakan dalam penyelenggaraan usaha Perikanan Budidaya		2			-				
							Bimbingan teknis dan pelatihan bagi usaha perikanan budidaya	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha pembudidaya ikan terhadap pedoman dan NSPK budidaya ikan		200			-				
							Pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Meningkatkan pembudidaya ikan yang menerapkan pedoman cara budidaya ikan yang baik (CBIB)		10			-				
							Pembinaan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha pembudidaya ikan terhadap pedoman dan NSPK cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)		10			-				
							Penyediaan dan pemuktahiran data statistik perikanan budidaya	Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan budidaya perikanan di Kabupaten Banjar		2			-				
							Pengawasan pengembangan perikanan budidaya	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha budidaya perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku		240			-				
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan		2			-				
							Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (DAK Penugasan)	Tersedianya saran prasarana BBII Lokal Karang Intan, Meningkatnya pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII Lokal Karang Intan		1			-				
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap									
							Fasilitasi forum Komunikasi Antar pelaku pengembangan perikanan tangkap	Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi antar pelaku pengembangan perikanan tangkap		500	100	100	100				
							Penyusunan kebijakan/Standar/Prosedur	Tersedianya Norma/Standar/Prosedur/ke		2	1	0	0				

						ur/Norma di Sub Sektor Perikanan Tangkap	bijakan dalam penyelenggaraan usaha Perikanan Tangkap										
						Sosialisasi kebijakan/Standar/Prosedur/Norma di bagi kelompok usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang kebijakan/standar/prosedur/norma sektor perikanan tangkap	500	50	0	0						
						Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI)	Terpenuhinya standar TPI rakyat/tempat pendaratan ikan	8	2	2	2						
						Penyusunan/pemuktahiran sistem informasi data sektor perikanan tangkap	Tersedianya data potensi desa sektor perikanan tangkap	2	1	1	1						
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan	2	0	0	0						
3	25	03				Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.064 Ton	8.900 Ton	8.933 Ton	100,37	8.982	8990	159595650	100,09		
3	25	03	2.01			Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Dokumen				6	6	8063900	100,00		
3	25	03	2.01	01		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 Dokumen				6	6	8.063.900	100,00		
3	25	03	2.01	02		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0 unit									
3	25	03	2.01	03		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0 unit									
3	25	03	2.02			Meningkatnya Keberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100	100	115509950	100,00	
3	25	03	2.02	01		Berkembangnya Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	85 orang				70	70	25.919.900	100,00		
3	25	03	2.02	02		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	14 kelompok		6 Kelompok	6 Kelompok	100	10	10	65.112.800	100,00	
3	25	03	2.02	03		Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Bantuan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 unit usaha		-	-	-	5	10	24.477.250	200,00	

					Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha											
3	25	03	2.03		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Dokumen		-	-	-	2	2	5.233.500	100,00
3	25	03	2.03	01	Ditetapkan SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	4 Dokumen		-	-	-	2	2	5.233.500	100,00
3	25	03	2.04		Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	275 Unit		225 Unit	225 Unit	100	250	250	30.657.300	100,00
3	25	03	2.04	01	Ditetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen		-	-	-	1	1	5.000.000	100,00
3	25	03	2.04	02	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	275 rekomendasi		225 Rekomendasi	225 Rekomendasi	100	250	250	25.657.300	100,00
3	25	03	2.05		Diterbitkannya Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Perikanan Tangkap Sampai dengan 10 GT (Dokumen)	5 Dokumen		-	-	-	1	1	131.000	100,00
3	25	03	2.05	01	Ditetapkan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen		-	-	-	1	1	131.000	100,00

[illegible]

						Promosi produk perikanan	Meningkatnya Angka konsumsi ikan perkapita										#DIV/0!		
						Pengawasan dan pengendalian usaha dan investasi perikanan	Tersedianya media komunikasi dan informasi dalam pengembangan usaha perikanan budidaya										#DIV/0!		
						Pemuktahiran sistem informasi data sektor perikanan	Tersedianya laporan data statistik pengolahan perikanan yang disusun/dimuktahirkan (laporan)										#DIV/0!		
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan										#DIV/0!		
3	25	06				Meningkatnya pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)	61,02	kg/kapita/tahun	59.53	kg/kapita/tahun	54.56	91.65	61,02	63,21	95.623.900,00	103,59	
							Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Hasil Perikanan		8,00	Persen	7.5	Persen	13.86	184.4	8	2,77	104990200	34,63	
3	25	06	2.01			Menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	Dokumen	-	-	-	1	1	13998000	100,00		
3	25	06	2.01	01		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	dokumen	-	-	-	1	1	13998000	100,00		
3	25	06	2.02			Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	313	unit usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	100	150	150	90.992.200	100,00
3	25	06	2.02	01		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	313	unit usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	100	150	150	90.992.200	100,00

3	25	06	2.03		Tersedianya dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	42,00	Ton		41,6 Ton	41,6 Ton	100	32	36,56	95.623.900,00	114,25
3	25	06	2.03	01	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	42	ton		41,6 Ton	41,6 Ton	100	32	36,56	75.077.400,000	114,25
3	25	06	2.03	02	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	55	pelaku usaha		207 Pelaku Usaha	207 Pelaku Usaha	100	22	22	20.546.500	100,00
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SUMBERDAYA PERIKANAN											#DIV/0!
						Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya perikanan	Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif membantu pemerintah dalam ilegal fishing perikanan										#DIV/0!
						Penyuluhan hukum dalam penyalahgunaan sumberdaya ikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum perikanan										#DIV/0!
						Pembinaan dan pemantauan tindak pidana perikanan	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ilegal fishing perikanan										#DIV/0!
						Pelestarian sumberdaya ikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumberdaya ikan										#DIV/0!
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan										#DIV/0!
3	25	05			Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)	72	Persen		70 Persen	77.78 Persen	111.11	71	79	71.037.300	111,13
3	25	05	2.01		<i>Melakukan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air</i>	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang</i>	10	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100	7	7	71.037.300	100,00

					<i>lainnya yang dapat diusahakan</i>		<i>Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>									
3	25	05	2.01	01	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100	4	4	34.285.200	100,00
3	25	05	2.01	02	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	3 Dokumen		-	-	-	3	3	36.752.100	100,00

Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	KINERJA					
							Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
										17.604.375.671	5.711.775.464	
Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan		Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	IFI = 1/9 (IAV + IBPL + IROADP + I LIT + ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH) Keterangan : I. Ketersediaan Pangan ; 1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar.....” II. Askes Keterjangkauan Pangan dan Penghidupan ; 2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akseslistrik III. Pemanfaatan Pangan 5. Angka harapan hidup saat lahir 6 Berat Badan Balita di bawah standar (underweight) 7. Perempuan Buta Huruf 8. Rumah Tangga tanpa akses air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan.	Skor	80,39			12.029.339.671	5.506.627.678	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan (Desa)	Berkembangnya desa dengan Kesadaran Masyarakat untuk memanfaatkan lumbung pangan, menumbuh dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat secara transparan	Desa	1			524.633.000	35.079.275	

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)</i>	<i>Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia</i>	Paket	1			524.633.000	35.079.275	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	0		524.633.000	35.079.275	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Cadangan Pangan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Stabilitas Harga Pangan (persen)	% Stabilitas harga = $(\Sigma \text{ Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok tahun } n) / (\Sigma \text{ Jumlah Bahan Pangan Pokok}) \times 100\%$	Persen	≤ 15			268.124.000	47.619.500	
			Ketersediaan Pangan Utama (persen)	Persentase Cadangan Pangan Daerah = $(\text{Jumlah Cadangan Pangan tahun berjalan} / \text{jumlah kebutuhan cadangan pangan Kabupaten}) \times 100\%$	Persen	34,84			373.461.400	-	
			Skor PPH Konsumsi (skor)	Skor PPH diperoleh berdasarkan konsumsi kelompok pangan sasaran survey yang diformulasikan : - Nilai capaian peningkatan = %AKG x bobot masing-masing kelompok pangan - Prosentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas / Angka Kecukupan Gizi x 100%	Skor	76,74			409.105.000	134.894.400	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>persentase terciptanya stabilitas harga atas komoditas pangan (persen)</i>	<i>% Stabilitas harga = $(\Sigma \text{ Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok tahun } n) / (\Sigma \text{ Jumlah Bahan Pangan Pokok}) \times 100\%$</i>	Persen	≤ 15			268.124.000	47.619.500	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	Ketersediaan: $Fd - P - \Delta St + I - X - (F + S + I + W + Rou)$ F = pakan (feed) S = bibit (seed) I = Industri W = tercecce (wasted) P = Produksi TS = total penyediaan dalam negeri (total supply) ΔSt = stok akhir – stok awal M = Impor X = Ekspor Perhitungan Fd = ketersediaan bahan makanan Rou = Penggunaan lain	Laporan	1	0		45.291.000		

	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Ski=(Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas beras)/(Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas beras) x 100	Laporan	1	0		147.723.500	47.619.500	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	Informasi Harga yang diupdate setiap hari di Web Panel Harga Pangan (BAPANAS)	Unit	19	0		46.386.000		
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabuapten Banjar dalam 1 Tahun	Laporan	1			6.957.500		
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya informasi neraca bahan makanan (NBM)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (unit)	Jumlah pengembangan kelembagaan LDPM yang di monitoring dan evaluasi	Dokumen	2	1,00		21.766.000		
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten</i>	<i>Persentase cadangan pangan daerah (persen)</i>	<i>Persentase Cadangan Pangan Daerah = (Jumlah Cadangan Pangan tahun berjalan/jumlah kebutuhan cadangan pangan Kabupaten jx 100%</i>	Persen	34,84			373.461.400	-	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	Jumlah Pengadaan cadangan pangan pemerintah Daerah pada tahun berjalan	Ton	4			373.461.400		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (kkal/kap/hari)</i>	<i>Hasil survey analisis konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) dengan sampel 270 rumah tangga se Kabupaten Banjar, dengan rumus : Perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan (DKBM). Kolom energi DKBM menunjukkan kandungan energi (kkal) per 100 gram bagian yang dapat dimakan (BDD). Perhitungan total energi aktual dari seluruh kelompok pangan : menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan</i>	kkal/kap /hari	1650			409.105.000	134.894.400	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	Jumlah Kegiatan : 1.Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif. 2.Sosialisasi B2SA. 3. Penumbuhan, Pembinaan, Penyuluhan UMKM Berbasis Pangan Lokal. 4.Bimtek	Laporan	6	1		342.939.000	69.143.100	

				Olahan Pangan Berbasis Bahan Lokal. 5.Obor Pangan Lestari (OPAL). 6.Bimtek Kader B2SA. 7.Festival Pangan B2SA. 8.Penguatan Kelembagaan UMKM Pangan Lokal. 9.Gerakan Makan Enak Makan Sehat Makan B2SA Suka Sayur dan Buah.							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	Skor PPH 1. Menghitung konsumsi aktual. 2. Menghitung Persentase (%) Terhadap Total Energi Aktual : Energi kelompok pangan x 100 % Total Energi aktual 3. Menghitung Persentase AKE Konsumsi : Energi konsumsi pangan x 100 % AKE Konsumsi (2100 kkal/kap/hari) 4. Menghitung Persentase (%) Skor aktual = % Aktual x Bobot 5. Menghitung Persentase (%) Skor AKE = % AKE x Bobot 6. Menghitung skor PPH : - Skor PPH = Skor AKE (Jika skor AKE lebih kecil dari skor maksimal) - Skor PPH = Skor Maksimal (Jika skor Maksimal lebih kecil dari dari Skor AKE) 7. Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Laporan	1	0		66.166.000	65.751.300	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan =(Jumlah Desa dan Kelurahan yang termasuk Rawan Pangan(Prioritas 1,2,3)/Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banjar) x 100%	Persen	15,86			280.288.500	8.501.500	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten (Sistem Informasi)	Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masingmasing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-	Sistem Informasi	1,00			99.881.500	1.500.000	

			$100).$ $Y(i)=\sum_{(n=1)}^9 \frac{1}{n} [a_i X_{ij}]$							
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). $Y(i)=\sum_{(n=1)}^9 \frac{1}{n} [a_i X_{ij}]$	Dokumen	1	0		99.881.500	1.500.000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan =(Jumlah Desa dan Kelurahan yang termasuk Rawan Pangan(Prioritas 1,2,3)/Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banjar) x 100%	Persen	15,86			180.407.000	7.001.500	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Desa rawan pangan yang disalurkan bantuan	Dokumen	2	0		180.407.000	7.001.500	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Keamanan Pangan (Persen)	Skor Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar = Capaian Tertimbang Kinerja Pengawasan di Peredaran (K1) + Capaian Tertimbang Kinerja Registrasi dan Sertifikasi (K2) Capaian Tertimbang Kinerja Pengawasan di Peredaran (K1): (K1) = 60% x (Y) dimana : (Y) = P/N x 100% (seratus persen) Capaian tertimbang Kinerja Registrasi dan Sertifikasi (K2): (K2) = 40% x (X) (X) = Capaian registrasi sertifikasi dalam 1 tahun. Keterangan: 1. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N); 2. Hasil pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P);	Persen	0,7			110.082.500	46.158.500	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Skor Keamanan Pangan (Persen)		Persen	0,7			110.082.500	46.158.500	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		Dokumen	1	0		110.082.500	46.158.500	

					3. Target nasional tahun berjalan untuk indikator persentase Pangan Segar asal tumbuhan uang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (T).							
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	LPE Sub Sektor Perikanan				g= PDRB sektor t- PDRB sektor t-1/PDRB Sektor t-1 x 100 Dimana : g = Pertumbuhan Sektor PDRB sektort = PDRB Sektor pada tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya PDRB sektor t-1 = PDRB Sektor pada tahun sebelumnya	Persen	3,88			5.042.611.000	119.873.636	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang dapat dilaporkan	Ton	9064			810.634.000	19.110.500	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan</i>	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	<i>Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Satu Daerah Atau Kabupaten Banjar Yang Dapat Realisasi</i>	Dokumen	5			33.200.000	1.768.000	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Jumlah Informasi dan Data Sumber Daya Ikan dalam satu Kabupaten/Kota yang dapat tersedia	Dokumen	5	2		33.200.000	1.768.000	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	35			-		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Keberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Satu Daerah Atau Kabupaten Banjar Yang Dapat Realisasi</i>	Persen	100			710.434.000	16.742.500	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Berkembangnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Jumlah Nelayan Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	85	0		574.990.000	-	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terbentuk dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	14	6		87.000.000	14.592.500	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terbentuk dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit Usaha	5	0		48.444.000	2.150.000	

	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha)								
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	<i>Jumlah Kapal Perikanan Yang tercatat dan diterbitkan Buku Pencatatan Kapal Perikanan</i>	Unit	275			47.000.000	600.000	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlayannya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	Jumlah Kapal Perikanan Yang tercatat dan diterbitkan Buku Pencatatan Kapal Perikanan	Rekomen dasi	275	0		47.000.000	600.000	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdaftaranya Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	<i>Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Perikanan Tangkap dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diterbitkan</i>	Rekomen dasi	25			20.000.000	-	
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Terlayannya Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) (Rekomendasi)	Jumlah Buku Kapal Perikanan(BKP) yang diterbitkan	Rekomen dasi	25	0		20.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya keunggulan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah Produksi PerikananBudidaya yang dapat dilaporkan	Ton	54923			4.085.295.000	77.774.336	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang dapat terealisasi</i>	Persen	100			97.717.000	10.629.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk	Kelompok	10	10		42.717.000	10.629.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	Jumlah kelompok/orang pembudidaya ikan yang memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi & informasi serta pendidikan & pelatihan	Kelompok	10	4		55.000.000		

	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terbitnya Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot</i>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	<i>Jumlah TDPIK yang diterbitkan</i>	Rekomen dasi	100			20.050.000	330.000	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	Jumlah Pembudidaya yang memiliki tanda daftar pembudidaya Ikan (TDPIK)	Rekomen dasi	100	66		20.050.000	330.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Terkelolanya Pembudidaya Ikan</i>	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Persentasi Pembudidaya ikan yang mengetahui cara budidaya ikan yang baik</i>	Persen	100			3.967.528.000	66.815.336	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah sarana yang termanfaatkan sebagai pendukung utama pemcapaian produksi	Unit	24	2		3.223.054.000	10.245.336	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah sarana prasarana yang termanfaatkan 100 % sebagai pendukung utama pemcapaian produksibenih/bibit ikan	Unit	47	27		600.238.000	46.419.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	Jumlah Laporan Pengukuran Uji sample kualitas air dan ikan	Dokumen	1	0		85.000.000	482.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	Jumlah Pembudidaya yang terbina terkait CBIB, CPIB dan CPPIB	Orang	100	70		59.236.000	9.669.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)	P = Persentase Kepatuhan ΣA = Jumlah realisasi pelaku usaha ber-NIB pada tahun n ΣB = Target pelaku usaha ber-NIB pada tahun n	Persen	71			146.682.000	22.988.800	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Melakukan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	P = Persentase Kepatuhan ΣA = Jumlah realisasi pelaku usaha ber-NIB pada tahun n ΣB = Target pelaku usaha ber-NIB pada tahun n	Dokumen	10			146.682.000	22.988.800	

	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	P = Persentase Kepatuhan ΣA = Jumlah realisasi pelaku usaha perikanan tangkap yang ber-NIB pada tahun n ΣB = Target pelaku usaha perikanan tangkap yang ber-NIB pada tahun n	Dokumen	7	4		80.350.000	22.988.800	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	P = Persentase Kepatuhan ΣA = Jumlah realisasi pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang ber-NIB pada tahun n ΣB = Target pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang ber-NIB pada tahun n	Dokumen	3	0		66.332.000		
Nilai Tukar Petani (NTP)				Rumus Nilai Tukar Petani : $NTP = IT/IB \times 100$ Keterangan : NTP : Nilai Tukar Petani IT : Indeks harga yang diterima petani, bersumber dari hasil survey harga ditingkat produsen yang dilaksanakan tiap bulan IB : Indeks harga yang dibayar petani, disusun berdasarkan data hasil survey bulanan statistik harga konsumen di pasar pedesaan yang dilaksanakan tiap bulan.	Persen	104,9			532.425.000	85.274.150	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)	1. Angka Konsumsi Ikan = $(A / B) \times 100\%$ A = Jumlah Ketersediaan Ikan B = Jumlah Penduduk 2. Angka Konsumsi Ikan = $A+B+C$ A=Konsumsi Ikan di Rumah Tangga B= Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga C= Konsumsi Tidak Tercatat	kg/kap/tahun	61,02			532.425.000	85.274.150	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	<i>Berapa banyak data pemasar dan pengolah hasil perikanan yang memiliki kartu KUSUKA yang belum memiliki NIB</i>	Dokumen	1			78.057.800	-	

				berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	dengan skala usaha mikro kecil							
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	Berapa banyak data pemasar dan pengolah hasil perikanan yang memiliki kartu KUSUKA yang belum memiliki NIB dengan skala usaha mikro kecil	Dokumen	1	0		78.057.800		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	<i>Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang mendapat pembinaan terhadap penerapan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil</i>	Unit Usaha	313			219.417.200	19.275.250	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang mendapat pembinaan terhadap penerapan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Unit Usaha	313	223		219.417.200	19.275.250	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tersedianya dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	<i>Jumlah Konsumsi Ikan = (Selisih Ketersediaan - Konsumsi Ikan Perorang) x Responden(sasaran)</i>	Ton	42			234.950.000	65.998.900	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	Jumlah Konsumsi Ikan = (Selisih Ketersediaan - Konsumsi Ikan Perorang) x Responden(sasaran)	Ton	42	24		174.750.000	46.014.300	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	55	43		60.200.000	19.984.600	
Terselenggaranya a Urusan Penyusunan Program	Indikator kepatuhan Kinerja Intern	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indikator kepatuhan Kinerja Intern	Jumlah Indeks kepatuhan dan Kinerja Intern	Skor	76			10.063.645.27 1	5.234.374.50 3	

Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu (laporan)	Jumlah dokumen yang tersusun pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Laporan	35			60.000.000	12.674.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	35	19		60.000.000	12.674.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu (laporan)	Jumlah tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Laporan	100			6.753.190.027	3.727.626.017	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	45		6.620.773.227	3.673.279.117	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	7		108.420.000	37.775.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1		6.082.800	6.082.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	10		17.914.000	10.489.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100			50.000.000	29.998.086	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kompetensi Perencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	1		50.000.000	29.998.086	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah % Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100			1.267.716.600	716.073.553	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	paket	11	3		540.968.500	472.100.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1		25.380.500	10.037.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1		30.617.600	10.418.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1		670.750.000	223.517.253	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Jumlah% jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100			1.407.892.644	570.446.397	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1		6.195.000	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	1		116.143.644	36.427.773	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		1.285.554.000	531.018.624	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	% Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah % Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100			524.846.000	177.555.650	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1		38.990.000	12.135.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persen	22	3		412.800.000	153.520.650	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	46	5		32.660.000	4.185.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	2		9.760.000	1.940.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1		30.636.000	5.775.000	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. Selain itu tugas pokok dan fungsi bidang perikanan adalah melaksanakan pembangunan masyarakat disektor perikanan, melaksanakan pembinaan, pengawasan sumberdaya perikanan, melaksanakan upaya perlindungan sumberdaya hayati perikanan, dan melaksanakan bimbingan usaha dan investasi di sektor perikanan, serta memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan termasuk dalam Prioritas Nasional ke 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal. ▪

Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal. ▪ Pertumbuhan investasi yang belum optimal. ▪ Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan. ▪ Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang tersedia. ▪ Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas. ▪ Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global. ▪ Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global. ▪ Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi. ▪ Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokas i	Target	Satuan		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						12.407.311.771		13.878.517.875
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab banjar	76	Indeks	10.518.477.271	78	11.114.000.610
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab banjar	100	Persen	42.606.900	100	76.443.400
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang berkualitash yang berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab banjar	35	Laporan	42.606.900	35	60.000.000
2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata pendukung statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab banjar					8.221.700
2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan data statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (Data)	Jumlah data Statistik Sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah	Kab banjar					8.221.700
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Kab banjar	100	Persen	6.753.190.027	100	6.915.752.827
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab banjar	45	Orang/Bulan	6.620.773.227	45	6.620.773.227
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab banjar	12	Dokumen	108.420.000		
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab banjar				12	271.980.000
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Kab banjar	1	laporan	6.082.800	1	6.082.700

					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	Kab banjar	18	Laporan	17.914.000	18	16.916.900
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	Kab banjar				1	6.961.800
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	Kab banjar				1	6.961.800
2	09	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Kab banjar	100	Persen	80.000.000	100	100.000.000
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kompetensi Perencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab banjar	5	Orang	80.000.000	5	100.000.000
2	09	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Kab banjar	100	Persen	1.503.664.200	100	1.586.376.100
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab banjar	11	Paket	630.146.500	11	522.876.000
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab banjar	5	paket	25.380.500	5	23.913.000
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab banjar	3	paket	30.617.600	3	30.615.100
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab banjar	2	laporan	817.519.600	2	1.008.972.000
2	09	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kab banjar	100	Persen	1.427.892.644	100	1.228.744.483
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kab banjar	1	laporan	6.195.000	1	6.192.000
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab banjar	2	laporan	116.143.644	2	155.464.483
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab banjar	1	laporan	1.305.554.000	1	1.067.088.000
2	09	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Kab banjar	100	Persen	711.123.500	100	1.199.722.000
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab banjar	1	unit	38.990.000	1	42.750.000

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)						
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab banjar	22	unit	412.800.000	22	686.340.000
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	Kab banjar	46	unit	32.660.000	46	32.660.000
2	09	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab banjar	16	unit	9.760.000	16	9.760.000
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kab banjar	3	unit	216.913.500	3	428.212.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan	Berkembangnya Desa Mandiri Pangan (Desa)	Kab banjar	1	Desa	552.318.500	1	735.893.065
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Paket)	Kab banjar	2	paket	552.318.500	2	735.893.065
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersediannya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	Kab banjar	1	unit	552.318.500	1	679.793.065
2	09	02	2.01	4	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (laporan)	Kab banjar				1	56.100.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Cadangan pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Stabilitas Harga Pangan (persen)	Kab banjar	≤ 15	Persen	1.025.775.500	≤ 12,5	1.792.376.200
							Ketersediaan Pangan Utama (persen)	Kab banjar	34,84	Persen		46,15	
							Skor PPH Konsumsi (skor)	Kab banjar	76,74	Skor		79,19	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersediannya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	Kab banjar	2	laporan	18.711.000	1	16.307.000
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersediannya Pangan Berbasis Sumber Daya Loka	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Kab banjar	1	laporan	45.149.000	1	20.684.000
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat	Tersediannya Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Kab banjar	1	Dokumen	6.957.500	1	6.949.500

					Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Konsumen wilayah Kabupaten/kota	wilayah Kabupaten/kota (laporan)							
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Kosumen di kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Kosumen di kabupaten/Kota (laporan)	Kab banjar			122.305.500	1		168.548.000
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	Kab banjar	19	unit	42.894.000	19		29.166.000
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	Kab banjar	2	Unit	0			
2	09	03	2.01		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten	Persentase cadangan pangan daerah (persen)	Kab banjar	34,84	Persen	373.453.500	46,15		458.443.500
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	Kab banjar	35	ton	373.453.500	35		458.443.500
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Kelompok Pangan (kkal/kap/hari)	Kab banjar	1.650	kkal/kap/hari	416.305.000	1.675		1.092.278.200
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	Kab banjar	6	laporan	350.139.000	6		1.020.462.200
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	Kab banjar	1	laporan	66.166.000	1		71.816.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	Kab banjar	10,71	Persen	200.658.000	15,17		141.123.000
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten (Sistem Informasi)	Kab banjar	1	Sistem Informasi	24.206.000	1		30.216.000
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Kab banjar	1	Dokumen	24.206.000	1		30.216.000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (persen)	Kab banjar	10,71	Persen	176.452.000	15		110.907.000
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)	Kab banjar	2	Dokumen	176.452.000	2		110.907.000

					pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)						
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Skor Keamanan Pangan (Persen)	Kab banjar	70	Persen	110.082.500	75	95.125.000
2	09	05	2.01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Skor Keamanan Pangan (SKP)</i>	<i>Kab banjar</i>	<i>70</i>	<i>Persen</i>	<i>110.082.500</i>	<i>75</i>	<i>95.125.000</i>
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab banjar	1	Dokumen	110.082.500	1	95.125.000
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.566.584.000	4	1.761.303.100
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Kab banjar	9.064	Ton	819.763.500	9.146	439.765.000
3	25	03	2.01		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dan Laut dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	<i>Kab banjar</i>	<i>5</i>	<i>Dokumen</i>	<i>33.200.000</i>	<i>5</i>	<i>132.765.000</i>
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Kab banjar	5	Dokumen	33.200.000	5	40.000.000
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasaranan Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	Kab banjar				10	92.765.000
3	25	03	2.02		<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Keberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab banjar</i>	<i>100</i>	<i>Persen</i>	<i>710.434.000</i>	<i>100</i>	<i>218.000.000</i>
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Berkembangnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Kab banjar	85	orang	574.990.000	97	55.000.000
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Kab banjar	14	kelompok	87.000.000	18	100.000.000
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha)	Kab banjar	5	unit usaha	48.444.000	6	63.000.000
3	25	03	2.04		<i>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</i>	<i>Diterbitkannya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1</i>	<i>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat</i>	<i>Kab banjar</i>	<i>275</i>	<i>Unit</i>	<i>27.000.000</i>		-

					Lainnya yang dapat Diusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diusahkan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)						
3	25	03	2.04	000 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	Kab banjar	275	rekomendasi	27.000.000	-	
3	2 5	0 3	2.0 6		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdaftaranya Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab banjar	1	Dokumen	49.129.500	30	89.000.000
3	25	03	2.06	000 2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Kab banjar	25	rekomendasi	49.129.500	-	
3	25	03	2.06	3	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan(BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Kab banjar				30	89.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya pengelolaan perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kab banjar	54.92 3	Ton	4.051.451.500	55.41 7	750.367.500
3	2 5	0 4	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab banjar	100	Persen	83.817.000	100	168.558.500
3	25	04	2.02	000 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Kab banjar	10	kelompok	29.033.000	10	82.753.000
3	25	04	2.02	000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	Kab banjar	10	kelompok	54.784.000	10	85.805.500
3	2 5	0 4	2.0 3		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terbitnya Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot	Kab banjar	100	rekomendasi	12.932.000	100	59.354.500
3	25	04	2.03	000 2	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Rekomendasi)	Kab banjar	100	rekomendasi	12.932.000	100	59.354.500
3	2 5	0 4	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidaya Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab banjar	100	Persen	3.954.702.500	100	522.454.500

3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota (dokumen)	Kab banjar				1	107.999.500
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Kab banjar	50	unit	3.223.054.000	50	95.995.000
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Kab banjar	47	unit	604.046.500	47	191.461.000
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	Kab banjar	1	Dokumen	85.000.000	1	74.003.000
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	Kab banjar	100	orang	42.602.000	100	52.996.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)	Kab banjar	72	Persen	108.000.000	73	162.471.000
3	25	05	2.01		<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>Melakukan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	Kab banjar	10	Dokumen	108.000.000		162.471.000
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab banjar	7	Dokumen	59.041.000		-
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab banjar	3	Dokumen	48.959.000		-
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	Kab banjar				120	49.000.000
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Kab banjar				60	17.953.000

					kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)										
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha(Pelaku Usaha) pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab banjar					50		68.123.000
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya manusia Pengawasan Sumber daya perikanan (orang)	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	Kab banjar					50		27.395.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun) Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Hasil Perikanan	Kab banjar Kab banjar	61,02 8,00	kg/kapita/tahun Persen	587.369.000	63 9			408.699.600
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			Kab banjar					1		29.149.900
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			Kab banjar					1		29.149.900
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab banjar	1	Dokumen	74.049.800				-
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	Kab banjar	1	dokumen	74.049.800				-
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Kab banjar	313	unit usaha	223.425.200	230			133.999.900
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Kab banjar	313	unit usaha	223.425.200				-

3	25	06	2.02	000 2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Kab banjar				230	133.999.900
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	Kab banjar	42,00	Ton	289.894.000	42,20	245.549.800
3	25	06	2.03	000 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	Kab banjar	42	ton	168.036.000	42,20	230.375.800
3	25	06	2.03	000 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	Kab banjar	55	pelaku usaha	121.858.000	55	15.174.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM SUMBERDAYA PERIKANAN								
					Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya perikanan		Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif membantu pemerintah dalam ilegal fishing perikanan						
					Penyuluhan hukum dalam penyalahgunaan sumberdaya ikan		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum perikanan						
					Pembinaan dan pemantauan tindak pidana perikanan		Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ilegal fishing perikanan						
					Pelestarian sumberdaya ikan		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumberdaya ikan						
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan program		Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan						
GRAND TOTAL											17.973.895.771		15.639.820.975

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjar

OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	CATATA N	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DES A	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetuj ui	-	pertimbangkan lokasi prioritas produksi perikanan	-	62 karena mahalnnya harga pakan ikan sehingga petani bnyak yang bergantung pada pakan dipasaran dan tidak mampu mengolah pakan sendiri , skala prioritas pada peringkat	Usulan diterima, kegiatan tersebut sesuai dengan permintaan/permohonan kelompok dalam bentuk surat
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetuj ui	-	rekomendasi lokasi prioritas produksi perikanan	-	73	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetuj ui	-	sesuai proyek prioritas, lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetuj ui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	256, diperlukan pelatihan peningkatan SDM/ tenaga teknis perikanan budidaya	Usulan diterima

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	65 karena sebagian besar warga penyambaran adalah petani ikan sehingga diperlukan adanya pendampingan dalam mengelola perikanan agar tidak terjadinya ledakan angka kematian lagi, skala prioritas pada peringkat	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Pertimbangan kondisi kerawanan cadangan pangan daerah	-	Diteruskan	Usulan diterima, realisasinya disesuaikan dengan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai dengan proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima, dengan catatan apabila budidaya dilakukan di karamba/jaring apung. Apabila akan dilepasliarkan maka usulan kami teruskan ke Bidang terkait
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	pertimbangan persyaratn sesuai peraturan kebijakan	-	266, diperlukan bantuan modal dan asuransi bagi usaha perikanan	Usulan diterima

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai kewenangan dan tulus organisasi	-	Diteruskan	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	usulan untuk Provinsi	-	Rangking 91	Usulan diterima, diteruskan ke dana DAK atas nama kelompok (Pelita Abadi dan Saka Samban)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	-	-	diteruskan	Usulan diterima, realisasinya disesuaikan dengan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	303, diperlukan pembinaan budidaya ikan yang benar agar para petani ikan tidak merugi	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. pertimbangan jenis ikan yang dibudidaya	-	138	Usulan diterima, berdasarkan surat permohonan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi peternakan	-	284, diperlukan sosialisasi fasilitas akses pemasaran produk ikan	Usulan diterima, akan dilaksanakan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi di Kecamatan dengan beberapa Desa yang mengajukan usulan di musrenbang pada Kecamatan yang sama dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada di SIPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Rekomendasi kondisi kerawanan cadangan pangan daerah.	-	Prioritas Umum Desa	Usulan diterima, realisasinya disesuaikan dengan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi pertanian	-	Rangking 143	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	mendukung proyek prioritas	-	Usulan prioritas 20	Usulan diterima, realisasinya disesuaikan dengan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	79	-

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas peroduksi perikanan	-	86, karena kurangnya tindak lanjut dan pengawasan dari dinas terkait sehingga kelompok yang ada belum optimal,	Usulan akan diteruskan karena proposal yang dibuat oleh kelompok akan diteruskan atau diusulkan ke Provinsi untuk dapat difasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	rekomendasi kondisi kerawanan cadangan pangan daerah dan lokasi lumbung pangan.	-	PRIORITAS 118 DITERUSKAN	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Diteruskan	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan tangkap. Rekomendasi pokdakan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	-	Rangking 154	Usulan diterima, untuk sarana dan prasarana (alat tangkap) diteruskan ke ABPD1/APBN dan memunculkan sub kegiatan baru dengan melampirkan persyaratan proposal sedangkan untuk modal usaha di arahkan ke program KURMA MANIS

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.	-	Rangking 157	Usulan diterima, untuk sarana dan prasarana (alat tangkap) diteruskan ke ABPD1/APBN dan memunculkan sub kegiatan baru dengan melampirkan persyaratan proposal sedangkan untuk modal usaha di arahkan ke program KURMA MANIS
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan tangkap. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku	-	Rangking 160	Usulan diterima, untuk sarana dan prasarana (alat tangkap) diteruskan ke ABPD1/APBN dan memunculkan sub kegiatan baru dengan melampirkan persyaratan proposal sedangkan untuk modal usaha di arahkan ke program KURMA MANIS
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan.	-	Rangking 51	pembangunan lantai jemur akan diproses setelah dilaksanakan CPCL atau survei lokasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan.	-	Rangking 179	Usulan diterima, untuk sarana dan prasarana (alat tangkap) diteruskan ke ABPD1/APBN dan memunculkan sub kegiatan baru dengan melampirkan persyaratan proposal sedangkan untuk modal usaha di arahkan ke program KURMA MANIS
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Rangking 182	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Rangking 183	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	-	-	usulkan	Usulan diterima, akan dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk pembudidaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	rekomendasi kondisi kerawanan cadangan pangan daerah.	-	52	Usulan diterima, realisasinya disesuaikan dengan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 200	Usulan diterima, akan di arahkan ke program KURMA MANIS
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan.	-	Rangking 207	Usulan diterima akan di arahkan ke program KURMA MANIS

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas	-	25	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan. Rekomendasi pokdakan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan.	-	Rangking 215	Usulan diterima, diteruskan ke APBD1/APBN dengan persyaratan mencantumkan proposal
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 222	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 223	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 223	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 225	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 226	Usulan diterima

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 227	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 228	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 229	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan.	-	Rangking 230	Usulan diterima
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usulan disetujui	-	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	-	Rangking 231	Usulan diterima

Usulan tersebut diatas melalui kegiatan musrenbang kecamatan berdasarkan hasil asistensi dan verifikasi bersama Dinas Perikanan Kabupaten Banjar selaku pelaksana .

Usulan Pokok-pokok Pikiran

USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	VOLUME	SATUAN
Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan	Peningkatan Kualitas jalan / bencoran	Desa handil Kuin Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Diteruskan ke Forum SKPD	-	diteruskan	usulan diteruskan	2,4	M2
Sosialisasi Fasilitasi Akses Pembiayaan	insentif guru ngaji dan kaum masjid/moshalla	kecamatan karang intan, Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ditolak	Bukan kewenangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	diteruskan	Usulan diteruskan ke SKPD	-	0
Penumbuhan, pembinaan, penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal	Lapangan Pekerjaan untuk kelompok UMKM	Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk , Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	-	diteruskan	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi pertanian	20	orang
Penumbuhan, pembinaan, penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal	Pembinaan, pendampingan, stabilitasi harga produk UMKM	Desa Sungai Lurus kecamatan sambung makmur , Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	-	diteruskan	Sesuai proyek prioritas	20	orang
Penumbuhan, pembinaan, penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Pembinaan UMKM	Desa Abumbun sungai tabuk, Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	-	diteruskan	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi pertanian	20	orang

berbasis pangan lokal											
Penumbuhan, pembinaan, penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal	pemberdayaan peternakan pertanian dan UMKM	desa cindai alus Rt. 04 kec. martapura , Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	-	diteruskan	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi pertanian	20	orang
Fasilitasi pemberian pakan ikan kepada pokdakan yang memenuhi ketentuan	Bantuan Pakan dan Bibit Ikan	Desa Mandi Kapau Barat , Kab. Banjar	Kabupaten / Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	-	diteruskan	Sesuai proyek prioritas dan lokasi prioritas produksi perikanan	1	paket

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

3.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Gizi
2. Meningkatnya keunggulan Perikanan

3.1.2 Indikator Tujuan

Indikator dari tujuan jangka menengah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar adalah:

1. Indeks Ketahanan Pangan
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan (PDRB)
3. Nilai Tukar Petani (NTP)

4.1.1.Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah
2. **Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi**

4.1.2.Indikator Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

3. Indeks Ketahanan Pangan dengan Target 80,39
 - Berkembangnya Desa Mandiri Pangan
 - Stabilitas Harga Pangan
 - Ketersediaan Pangan Utama
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
 - Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan
 - Skor Keamanan Pangan
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan (PDRB) **dengan Target LPE 3,88 %**

- Pertumbuhan/ Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya (ton)
 - Pertumbuhan/ Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap (ton)
4. Nilai Tukar Petani (NTP) **dan target NTP 104,90**
- Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)
 - Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Perikanan (%)

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal sebagai berikut:

ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU LOKAL
▪ Pasokan Pangan dan Energi ▪ Pembatalan Mobilitas ▪ Investasi	▪ Defisit APBN dan Investas i ▪ Rantai Nilai ▪ Daya Beli	▪ Bencana ▪ Pemantapan Pemulihan Ekonom i ▪ Daya Beli

Untuk men jawab isu-isu tersebut, maka ditetapkan 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Lingkungan Hidup
Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan).
- b. Infrastruktur
Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)
- c. Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia
- d. Ekonomi
Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan, dan pelaku UMKM)
- e. Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital
- f. Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan Food Estate
Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang food estate di Kalteng dan ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan *konektivitas*)

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2024 adalah:

**“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING
DAERAH UNTUK
MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI INKLUSIF”**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”. Tema tersebut dijabarkan melalui beberapa prioritas

sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata,
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana

Dalam upaya mengatasi isu-isu tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung arah kebijakan termasuk dalam Prioritas Nasional 1 dan prioritas Nasional 2 dan mendukung RKPD provinsi dengan tema Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang di jabarkan dalam prioritas 1 dan 2.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

a) Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal.

- Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal.

- Pertumbuhan investasi yang belum optimal.

- Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan.

- Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang

tersedia.

- Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas.

- Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global.

- Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global.

- Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada

kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi.

- Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.

b) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal.

- Cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih rendah.

- Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan angka RLS masih belum optimal.

- Kecenderungan terjadinya risiko Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi

(AKB) yang masih cukup tinggi.

- Kecenderungan terjadinya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta prevalensi stunting yang masih cukup tinggi

- Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak masih belum terselenggara secara optimal.

c) Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara

optimal.

- Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.

- Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.

- Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

- Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistik dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku

kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/ komunitas.

- Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.

- Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.

d) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal.

- Penyelenggaraan pelayanan publik yang melayani, baik secara digital maupun non digital belum optimal dilaksanakan

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara intensifikasi maupun diversifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

- Penyelenggaraan informasi dan statistik melalui manajemen satu data belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan.

- Penyelenggaraan pemerintahan, berbasis kinerja dan manajemen resiko yang belum terinternalisasi secara optimal.

- Peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa masih perlu dioptimalkan dalam upaya mendukung percepatan pencapaian

target indikator, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang

menjadi lokus kegiatan.

e) Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan.

- Penguatan karakter religius masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan event keagamaan dan event budaya.

- Kesadaran demokratis masyarakat yang masih rendah, khususnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

- Kecenderungan meningkatnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari angka kriminalitas yang cukup tinggi.

Berdasarkan Isu strategis yang ada dan Upaya mendukung arah kebijakan Nasional,Provinsi dan Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan 8 Program dan 20 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat di tampilkan dengan tabel berikut:

Tabel 6. Tujuan,Sasaran Dan Target Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

TUJUAN,SASARAN DAN TARGET DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupateb	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	PAGU PERKIRAAN
1	PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 2 .Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	Prioritas Daerah 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Gizi	Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	80,39	12.407.311.771
2	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Prioritas Daerah 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,	Meningkatnya keunggulan Perikanan	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan (PDRB)	3,88%	5.566.584.000
3				Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produksi Pertanian Dan Perikanan		Nilai Tukar Petani (NTP)	104,9	

3.4. Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah,

maka pada tahun 2024 ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam penetapan rencana kerjanya berdasarkan misi 1, yakni ***Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia***, dan misi 2 ***Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan***. Dan khususnya sesuai dengan tema pembangunan di Kabupaten Banjar yaitu ***PEMANTAPAN PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT*** dengan mengemban tugas daerah yaitu prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Program Prioritas Peningkatan Sistem Pendidikan, Peningkatan Sistem Kesehatan, dan Peningkatan Kewirausahaan, dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas. Sedangkan di bidang perikanan prioritas 3 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat dengan indikator indeks ketahanan pangan dengan target Tahun 2024 sebesar 80,39, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka mendukung prioritas ke ini akan melaksanakan 8 (delapan) program. Sedangkan sasaran dibidang perikanan berdasarkan Sasaran terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, dengan indikator LPE sub sektor perikanan dengan target Tahun 2024 sebesar 3.88%, indikator Nilai Tukar Petani dengan target Tahun 2024 sebesar 104,90.

Program prioritas ini sesuai dengan program nasional peningkatan kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yaitu program peningkatan ketahanan pangan, dan program pembangunan sector perikanan dalam pelaksanaan program-program ini telah ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48/PERMENTAN-KP/2020 tentang SPM Bidang Kelautan dan Perikanan dengan jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita dan Penggunaan Cadangan Pangan);
- a. Distribusi dan Akses Pangan (Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dan Stabilitas harga & Pasokan Pangan);
- b. Penganekaragaman dan Keamanan pangan (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan);
- c. Penanganan Rawan Pangan (Penanganan Daerah Rawan Pangan).
- d. Pengelolaan Perikanan Budidaya (Jumlah Produksi Ikan Budidaya)
- e. Pengelolaan Perikanan Tangkap (Jumlah Produksi Ikan Tangkap)
- f. Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan (Produksi Olahan Hasil Perikanan)
- g. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Perikanan)

Berdasarkan program nasional, Standar Pelayanan Minimal dan program prioritas daerah, maka pada tahun 2024 ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merencanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

3.4.1 Program Prioritas :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Sasaran Program antara lain :

1. Berkembangnya Desa Mandiri Pangan (*desa*);
2. Stabilitas Harga Pangan (*persen*);
3. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (*persen*);
4. Skor Keamanan Pangan (*persen*);
5. Peningkatan Produksi Sub Sektor Pengolaan Perikanan Tangkap berbasis pemberdayaan & kemandirian usaha nelayan (ton).
6. Peningkatan Produksi Sub Sektor Perikanan Budidaya berbasis pemberdayaan dan kemandirian usaha budidaya ikan (ton).
7. Peningkatan, Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Keamanan/Ketahanan Pangan melalui pengawasan terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan (*persen*).
8. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan dan Nilai Ekspor Hasil perikanan berbasis keyakyata, usaha mikro kecil (kg/kapita/pertahun).

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
3. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;

8. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
11. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
12. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
15. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
16. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan;
17. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;
18. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
19. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
20. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;

Rencana Sub Kegiatan antara lain :

- 1.Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
- 2.Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- 3.Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
- 4.Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 5.Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
- 6.Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
- 7.Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
- 8.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
- 9.Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.
12. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
14. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
15. Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Asal Segar Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
16. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

17. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
20. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
21. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
22. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
24. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
25. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
26. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
27. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
28. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT.
29. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.
30. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.
31. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

32. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
33. Sub Kegiatan Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
34. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
35. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
36. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
37. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
38. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
39. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
40. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
41. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
42. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
43. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Sub Kegiatan meliputi :

1. Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia (*unit*);
2. Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia (*unit*);
3. Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (*laporan*);
4. Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia (*laporan*);
5. Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan (*dokumen*);
6. Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan (*unit*);
7. Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (*unit*);
8. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (*Laporan*).
9. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (*Ton*);
10. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekagaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (*laporan*).
11. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (*laporan*).
12. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (*dokumen*).
13. Jumlah Penggadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanaan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota (*dokumen*).
14. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina (*dokumen*).
15. Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (*dokumen*).
16. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (*dokumen*).
17. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (*dokumen*).

18. Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (*dokumen*)
19. Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (*Unit*)
20. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (*unit*)
21. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)
22. Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (*kelompok*).
23. Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (*unit usaha*)
24. Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (*dokumen*)
25. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (*dokumen*)
26. Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (*rekomendasi*).
27. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (*dokumen*)
28. Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (*rekomendasi*)
29. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (*dokumen*)
30. Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (*rekomendasi*)
31. Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (*kelompok*)

32. Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*kelompok*)
33. Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (rekomendasi)
34. Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (*unit*)
35. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (*unit*)
36. Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (*dokumen*)
37. Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (*orang*)
38. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (*dokumen*)
39. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (*dokumen*)
40. Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (*dokumen*)
41. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (*unit usaha*)
42. Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (*ton*)

43. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (*pelaku usaha*)

B. Program Pendukung :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2025. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Nasional maupun Nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024. Keberhasilan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta dukungan dan peran aktif stakeholder terkait.

Tabel 7. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program / Kegiatan	RANWAL Pagu Anggaran (Rp.)	RANKHIR Pagu Anggaran (Rp.)	Selisih Pagu Anggaran (Rp.)
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.029.33 9.671	12.407.3 11.771	377.972. 100
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.64 5.271	10.518.4 77.271	454.832. 000
2	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.0 00	42.606.9 00	- 17.393.1 00
2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.00 0	42.606.90 0	- 17.393.1 00
2	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.753.19 0.027	6.753.19 0.027	-
2	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.620.773. 227	6.620.773 .227	-
2	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.420.0 00	108.420.0 00	-
2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.082.800	6.082.800	-

2	09	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.914.000	17.914.000	-
2	09	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	80.000.000	30.000.000
2	09	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	80.000.000	30.000.000
2	09	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.267.716.600	1.503.664.200	235.947.600
2	09	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	540.968.500	630.146.500	89.178.000
2	09	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik	25.380.500	25.380.500	-
2	09	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.617.600	30.617.600	-
2	09	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.750.000	817.519.600	146.769.600
2	09	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.407.892.644	1.427.892.644	20.000.000
2	09	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.195.000	6.195.000	-
2	09	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.143.644	116.143.644	-
2	09	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.285.554.000	1.305.554.000	20.000.000
2	09	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	524.846.000	711.123.500	186.277.500
2	09	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	-
2	09	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	412.800.000	412.800.000	-
2	09	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.660.000	32.660.000	-
2	09	01	209	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.760.000	9.760.000	-
2	09	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.636.000	216.913.500	186.277.500
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	524.633.000	552.318.500	27.685.500
2	09	02	201		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	524.633.000	552.318.500	27.685.500
					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0	0	-
2	09	02	201	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	524.633.000	552.318.500	27.685.500
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.050.690.400	1.025.775.500	- 24.914.900
2	09	03	201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	268.124.000	236.017.000	- 32.107.000

2	0	0	2.	00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	21.766.000	18.711.000	-
	9	3	0	01		0	0	3.055.000
2	0	0	2.	00	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	45.291.000	45.149.000	-
	9	3	0	02		0	0	142.000
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0	0	-
2	0	0	2.	00	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	147.723.500	122.305.500	-
	9	3	0	08				25.418.000
2	0	0	2.	00	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	6.957.500	6.957.500	-
	9	3	0	12				
2	0	0	2.	00	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	46.386.000	42.894.000	-
	9	3	0	10		0	0	3.492.000
2	0	0	2.	00	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		0	-
	9	3	0	06				
2	0	0	2.		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	373.461.400	373.453.500	-
	9	3	0	2				7.900
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		0	-
2	0	0	2.	00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	373.461.400	373.453.500	-
	9	3	0	03				7.900
2	0	0	2.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	409.105.000	416.305.000	7.200.000
	9	3	0	4				
2	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	342.939.000	350.139.000	7.200.000
	9	3	0	02				
2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	66.166.000	66.166.000	-
	9	3	0	03		0	0	
2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	280.288.500	200.658.000	-
	9	4						79.630.500
2	0	0	2.		Pengusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	99.881.500	24.206.000	-
	9	4	0	1				75.675.500
2	0	0	2.	00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	99.881.500	24.206.000	-
	9	4	0	01		0	0	75.675.500
2	0	0	2.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.407.000	176.452.000	-
	9	4	0	2				3.955.000
2	0	0	2.	00	Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	180.407.000	176.452.000	-
	9	4	0	02				3.955.000
2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	110.082.500	110.082.500	-
	9	5						
2	0	0	2.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	110.082.500	110.082.500	-
	9	5	0	1				
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		0	-
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0	-
2	0	0	2.	00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	110.082.500	110.082.500	-
	9	5	0	04				
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0	-
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.575.036.000	5.566.584.000	-
	5							8.452.000
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	810.634.000	819.763.500	9.129.500
	5	3						
3	2	0	2.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan	33.200.000	33.200.000	-
	5	3	0	1				

						dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	2	0	2.	00	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	33.200.00 0	33.200.00 0	-
3	2	0	2.			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	710.434.000	710.434.000	-
3	2	0	2.	00	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	574.990.0 00	574.990.0 00	-
3	2	0	2.	00	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	87.000.00 0	87.000.00 0	-
3	2	0	2.	00	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	48.444.00 0	48.444.00 0	-
3	2	0	2.			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000	27.000.000	- 20.000.00 0
3	2	0	2.	00	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	47.000.00 0	27.000.00 0	- 20.000.00 0
3	2	0	2.			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	49.129.500	29.129.50 0
3	2	0	2.	00	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	20.000.00 0	49.129.50 0	29.129.50 0
3	2	0				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.085.295.000	4.051.451.500	- 33.843.50 0
3	2	0	2.			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	97.717.000	83.817.000	- 13.900.00 0
3	2	0	2.	00	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	42.717.00 0	29.033.00 0	- 13.684.00 0
3	2	0	2.	00	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	55.000.00 0	54.784.00 0	- 216.000
3	2	0	2.			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	20.050.000	12.932.000	- 7.118.000
3	2	0	2.	00	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.050.00 0	12.932.00 0	- 7.118.000
3	2	0	2.			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.967.528.000	3.954.702.500	- 12.825.50 0
3	2	0	2.	00	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.223.054.000	3.223.054.000	-
3	2	0	2.	00	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.238.000	604.046.500	3.808.500
3	2	0	2.	00	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.00 0	85.000.00 0	-
3	2	0	2.	00	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	59.236.00 0	42.602.00 0	- 16.634.00 0
3	2	0				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	146.682.000	108.000.000	- 38.682.00 0
3	2	0	2.			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	146.682.000	108.000.000	- 38.682.00 0

					dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	80.350.000	59.041.000	-21.309.000
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	66.332.000	48.959.000	-17.373.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	532.425.000	587.369.000	54.944.000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	78.057.800	74.049.800	-4.008.000
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.057.800	74.049.800	-4.008.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	219.417.200	223.425.200	4.008.000
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	219.417.200	223.425.200	4.008.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	234.950.000	289.894.000	54.944.000
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	174.750.000	168.036.000	-6.714.000
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.200.000	121.858.000	61.658.000
GRAND TOTAL						17.604.375.671	17.973.895.771	369.520.100

BAB V**PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada Bab I, Bab II, Bab III, dan IV secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar dan mengacu pada program prioritas daerah maka pada tahun 2024 disepakati untuk melaksanakan kegiatan prioritas daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang terangkum pada 43 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
5. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
7. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.
12. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

14. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
15. Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Asal Segar Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
16. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
20. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
21. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
22. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
24. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
25. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
26. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
27. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
28. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT.
29. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.
30. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.
31. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

32. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
33. Sub Kegiatan Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
34. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
35. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
36. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
37. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
38. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
39. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
40. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
41. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
42. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
43. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan anggaran sebesar:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 749.000.000,-
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 810.736.799,-

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 68.370.687,-
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 112.500.000,-s
5. Program Pengeloaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 1.600.000.000,-
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 767.568.500,-
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 294.000.000,-
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 650.800.000,-
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.

Total anggaran sebesar Rp. 15.887.280.165,-

Kegiatan-kegiatan ini dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan program dan kegiatan nasional yang berkembang dan akan disinkronkan sesuai aturan yang berlaku.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dapat terselesaikan.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan selama setahun untuk secara bersama-sama dan bersinergi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disampaikan, semoga bermanfaat dalam menyukseskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2024 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain:

1. Adanya Review Renstra Perubahan Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 tanggal 8 Juli 2024 dari hasil Rapat Internal Monitoring Terhadap Progres Capaian Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra yang diselenggarakan pada Jumat, 31 Mei 2024 bahwa perlu menetapkan target kinerja yang dapat dicapai, menantang, dan realistis dari hasil analisis capaian kinerja sebelumnya.
2. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024
3. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/89/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
4. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

5. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
6. Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2024, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 memperhatikan hal berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 dan Project strategis RPJMD;
3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2024;
4. Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa;
5. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 24)
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 30)

29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).
30. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx (belum diberi bag hukum) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja tahun ini adalah untuk memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya setelah dilakukannya penyesuaian sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/bidang sesuai tupoksi Bidang;
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;
- c. Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Masukkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d triwulan II tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- perubahan indikator kinerja
- jumlah program dan jumlah kegiatan
- total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- alasan dilakukan perubahan

Lampirkan tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada aplikasi SIPD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan

Lampiran

BAB II

**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan rencana strategis untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil dan
Pencapaian Renstra Disdukcapil s/d Tahun Berjalan
Kabupaten Banjar

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar
Periode 2022-2026 Pelaksanaan Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD :
Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan																
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Disdukcapil		Indeks			76	10.440.441.451	84,47	1.954.076.253	0	4.884.412.894			0	4.884.412.894	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		Persen			100	55.000.000	48,57	10.692.200	74	25.520.700			74	25.520.700	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			13	40.000.000	10	6.818.600	13	18.060.600			13	18.060.600	

2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan			22	15.000.000	7	3.873.600	12	7.460.100					12	7.460.100
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		Persen			100	4.723.132.615	24	629.410.612	51	1.980.798.259					51	1.980.798.259
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Orang/bulan			25	4.572.377.815	22	593.033.612	25	1.911.555.259					25	1.911.555.259
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Dokumen			14	141.760.000	3	33.291.000	6	66.123.000					6	66.123.000
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan			2	4.000.000	1	3.086.000	2	3.120.000					2	3.120.000
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD		Laporan			16	4.994.800	3	0	7	0					7	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu		Persen			100	40.000.000	0	0	75	14.554.716					75	14.554.716
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Orang			4	40.000.000	0	0	3	14.554.716					3	14.554.716

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran		Persen			100	1.842.882.500	30	259.576.253	61	1.129.155.628					61	1.129.155.628
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket			10	5.500.000	3	1.478.000	5	2.615.000					5	2.615.000
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket			27	1.106.070.700	5	47.090.800	9	699.390.600					9	699.390.600
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Paket			85	48.213.300	42	9.589.400	65	24.647.800					65	24.647.800
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		Paket			6	66.998.500	2	475.000	2	15.177.250					2	15.177.250
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Laporan			12	5.900.000	3	0	6	2.625.000					6	2.625.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	610.200.000	3	200.943.053	6	384.699.978					6	384.699.978
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan		Persen			100	1.086.306.000	45	472.100.000	45	472.100.000					45	472.100.000
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan		Unit			2	1.086.306.000	1	472.100.000	1	472.100.000					1	472.100.000

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi		Persen			100	2.177.258.336	25	481.802.657	61	1.060.945.645					61	1.060.945.645
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	7.050.000	3	853.500	6	1.490.000					6	1.490.000
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	199.298.336	3	34.540.848	6	77.070.257					6	77.070.257
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.970.910.000	3	446.408.309	6	982.385.388					6	982.385.388
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan		Persen			100	515.862.000	24	100.494.531	50	201.337.946					50	201.337.946
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit			1	38.990.000	1	10.250.000	1	20.600.000					1	20.600.000
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit			23	332.040.000	23	74.055.432	23	144.945.847					23	144.945.847
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit			3	55.062.000	1	5.015.000	2	16.533.000					2	16.533.000

2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit			129	89.770.000	16	11.174.099	32	19.259.099					32	19.259.099	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KIA		Persen			45.5	66.409.800	47,16	4.366.500	50,72	16.253.000					50,72	16.253.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pengguna layanan pendaftaran penduduk yang dapat memenuhi persyaratan		Persen			99.3	66.409.800	99,1	4.366.500	100	16.253.000					100	16.253.000	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Laporan			36	56.410.000	9	3.882.500	18	13.742.500					18	13.742.500	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Laporan			24	9.999.800	6	484.000	12	2.510.500					12	2.510.500	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penyelesaian permohonan layanan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan		Persen			100	185.282.700	100	45.987.000	100	76.558.100					100	76.558.100	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pengguna layanan pencatatan sipil yang dapat memenuhi persyaratan		Persen			100	185.282.700	100	45.987.000	100	76.558.100					100	76.558.100	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Dokumen			708	77.000.000	351	21.460.600	828	33.676.600					828	33.676.600	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		Layanan			33000	108.282.700	5.356	24.526.400	13.124	42.881.500					13.124	42.881.500	

2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data kependudukan (pengolahan dan penyajian) yang sesuai aturan		Persen			100	268.269.800	100	38.246.550	100	101.367.250					100	101.367.250	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun		Persen			100	48.211.800	35	8.736.400	67	31.191.400					67	31.191.400	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		Dokumen			100	48.211.800	43	8.736.400	78	31.191.400					78	31.191.400	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK		Persen			100	143.321.500	100	25.292.800	100	52.983.300					100	52.983.300	
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dokumen			43	143.321.500	13	25.292.800	25	52.983.300					25	52.983.300	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data balikan yang dilaporkan oleh SKPD		Persen			100	76.736.500	11,8	4.217.350	41	17.192.550					41	17.192.550	
		Persentase PKS yang ditindaklanjuti		Persen			100		30		34						34		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan			35	58.736.500	9	3.581.850	18	13.767.350					18	13.767.350	

2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		25	18.000.000	13	635.500	20	3.425.200					20	3.425.200	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)							103,92	56,34	78,02	64,3							
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)							99,18	55,18	98,23	67,77							
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang							
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)							97,93	54,01	99,31	65,59							
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah							

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar diarahkan untuk peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan tertib administrasi kependudukan sebagai sasaran utama dan untuk masa yang akan datang diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan yang ada pada database kependudukan sehingga benar-benar tersedia data yang akurat dan valid.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan indikator Peningkatan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dukcapil diampu oleh Sekretaris Dinas Dukcapil.
- b. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Dukcapil dengan indikator Persentase administrasi kepegawaian Dukcapil sesuai kebutuhan dan tepat waktu diampu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Target Tw.II tahun 2024 adalah 100% dan realisasi adalah 75% sehingga target tidak tercapai.
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diampu oleh Pengadministrasi kepegawaian dengan Target TW.II tahun 2024 sebanyak 4 orang dan realisasi 3 orang maka capaian menjadi 75% sehingga target tidak tercapai.

- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan diampu oleh pengadministrasi kepegawaian dengan Target TW.II tahun 2024 sebanyak 6 paket dan realisasi 5 paket sehingga capaian menjadi 83.33%
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan diampu oleh pengadministrasi kepegawaian dengan Target TW.II tahun 2024 sebanyak 18 paket dan realisasi 9 paket sehingga capaian menjadi 50%.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan diampu oleh Kasubbag Umum Kepegawaian dengan Target TW.II tahun 2024 sebanyak 100% dan realisasi 50% sehingga capaian menjadi 50%
- g. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan diampu oleh pengadministrasi kepegawaian dengan Target TW.II tahun 2024 sebanyak 2 unit dan realisasi 1 unit sehingga capaian menjadi 50%
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan, diampu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Target pada TW. II sebanyak 50% dan realisasi sebesar 37%, sehingga capaian menjadi 74%.
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi diampu oleh pengadministrasi kepegawaian dengan Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 3 unit dan realisasi sebesar 2 unit sehingga capaian adalah 66,66%.

- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator jumlah Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian dengan Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 66 unit dan realisasi sebesar 32 unit sehingga capaian adalah 48,48%.
- k. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan diampu oleh Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 14000 layanan dan realisasi sebesar 13124 layanan sehingga capaian adalah 93,74%.
- l. Program Terkelolanya informasi administrasi kependudukan dengan indikator Persentase pengelolaan data kependudukan (pemanfaatan data) yang sesuai aturan diampu oleh Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 50% dan realisasi sebesar 30% sehingga capaian adalah 60%.
- m. Pen
yelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditindaklanjuti diampu oleh Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dengan Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 50% dan realisasi sebesar 34% sehingga capaian adalah 68%.
- n. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase data balikan yang dilaporkan oleh SKPD diampu oleh Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 45% dan realisasi sebesar 41% sehingga capaian adalah 91,11%.

2) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah diampu oleh Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan target di TW.II tahun 2024 sebesar 12 laporan dengan realisasi 12 laporan maka capaian menjadi 100%.
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN diampu oleh Bendahara dan Pengadministrasi Keuangan dengan target pada Tw.II tahun 2024 sebesar 25 orang dan realisasi 25 orang sehingga capaian 100%.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diampu oleh Bendahara dan Penata Keuangan dengan target pada Tw.II tahun 2024 sebanyak 6 dokumen dan realisasi sebanyak 6 dokumen sehingga capaian 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan diampu oleh Bendahara dan Penata Keuangan, pada Tw.II tahun 2024 dengan target sebanyak 2 laporan dan realisasi sebanyak 2 laporan sehingga capaian 100%.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu diampu oleh pengadministrasi kepegawaian, target TW.II tahun 2024 sebanyak 6 laporan dan realisasi 6 laporan sehingga capaian menjadi 100%.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian

Target TW.II tahun 2024 sebanyak 6 laporan dan realisasi 6 laporan sehingga capaian menjadi 100%.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi yang diampu oleh Kasubbag umum dan kepegawaian Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 50% dan realisasi sebesar 50% sehingga capaian adalah 100%.
- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diampu oleh pengadministrasi kepegawaian Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 6 laporan dan realisasi sebesar 6 laporan sehingga capaian adalah 100%.
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan diampu oleh pengadministrasi kepegawaian Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 6 laporan dan realisasi sebesar 6 laporan sehingga capaian adalah 100%.
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian Target pada TW. II sebanyak 6 laporan dan realisasi sebesar 6 laporan sehingga capaian menjadi 100%.
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian Target pada TW. II sebesar 1 unit, dan realisasi sebesar 1 unit, sehingga capaian menjadi 100%.
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian Target pada TW. II sebesar 23 unit realisasi sebanyak 23 unit sehingga Capaian menjadi 100%.

- m. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase Penyelesaian Permohonan layanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Persyaratan, diampu oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 50% dan realisasi sebesar 50% sehingga capaian adalah 100%.
- n. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk diampu oleh Analis Kebijakan Muda, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 18 laporan dan realisasi sebesar 18 laporan sehingga capaian adalah 100%.
- o. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan indikator Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, diampu oleh Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan sehingga capaian adalah 100%.
- p. Program Pencatatan Sipil indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Persyaratan diampu oleh Kabid Pelayanan Pencatatan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%.
- q. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Pengguna Layanan Pencatatan Sipil Yang Dapat Memenuhi Persyaratan diampu oleh Analis Kebijakan Muda dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%.
- r. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator Persentase pengelolaan data kependudukan (pengolahan dan penyajian) yang sesuai aturan diampu oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Target pada

TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%.

- s. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator Persentase jaringan SIAK yang dikelola dengan baik diampu oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%.
- t. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK diampu oleh Seksi Sistem Informasi Administarsi Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%.
- u. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan diampu oleh Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 18 laporan dan realisasi sebesar 18 laporan sehingga capaian adalah 100%.

3) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diampu oleh Kepala Dinas, Target tw II tahun 2024 sebesar 88,60 dan realisasi sebesar 89,57 dari 505 orang responden dengan capaian sebesar 101,09%.
- b. Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap diampu oleh Kepala Dinas, target pada TW.II tahun 2024 yaitu 73,20% dan realisasi sebesar 75,57% dengan tingkat capaian 103,24%.
- c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dukcapil yang berkualitas dengan indikator Persentase dokumen perencanaan,

penganggaran dan evaluasi kinerja Dukcapil tepat waktu dan tepat mutu diampu oleh Kasubbag Perencanaan, Target di TW.II tahun 2024 sebesar 50% dengan realisasi 74% dan capaian menjadi 148%.

- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah diampu oleh Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan, Target di TW.II tahun 2024 sebesar 10 Dokumen dengan realisasi 13 dokumen maka capaian yang diperoleh sebesar 130%.
- e. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator Persentase dokumen keuangan Dukcapil tepat waktu dan tepat mutu diampu oleh Kasubbag Keuangan dan Aset, Target di TW.II tahun 2024 sebesar 50% dengan realisasi 51% sehingga capaian menjadi 102%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD diampu oleh bendahara, Target Tw.II tahun 2024 sebanyak 6 Laporan dan realisasi sebanyak 7 Laporan sehingga capaian 116,66%.
- g. Administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran diampu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Target TW.II tahun 2024 sebanyak 50% dan realisasi 61% sehingga capaian menjadi 122%.
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan diampu oleh Pengadministrasi Kepegawaian, Target TW.II tahun 2024 sebanyak 50 paket dan realisasi 65 paket sehingga capaian menjadi 118%.
- i. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diampu oleh Kepala UPTD Pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mataraman, Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada TW.II tahun 2024 dengan target 82 indeks dan realisasi sebesar 88,70 indeks sehingga capaian adalah 108,17%.

- j. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diampu oleh Kepala UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gambut, Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada TW.II tahun 2024 dengan target 82 indeks dan realisasi sebesar 87,74 indeks sehingga capaian adalah 107%.
- k. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, diampu oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 99,13% dan realisasi sebesar 99,24% sehingga capaian adalah 100,11%.
- l. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) diampu oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 45,25% dan realisasi sebesar 50,72% sehingga capaian adalah 112,08%.
- m. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase pengguna layanan pendaftaran penduduk yang dapat memenuhi persyaratan, diampu oleh Analis Kebijakan Muda serta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 99,15% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian adalah 100,85%.
- n. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil diampu oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 89% dan realisasi sebesar 94,95% sehingga capaian adalah 106,68%.

- o. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan indikator Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting diampu oleh Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 354 dokumen dan realisasi sebesar 828 dokumen sehingga capaian adalah 233,89%.
- p. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi diampu oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 63% dan realisasi sebesar 78% sehingga capaian adalah 123,80%.
- q. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan indikator Persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun diampu oleh Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 50% dan realisasi sebesar 67% sehingga capaian adalah 134%.
- r. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan indikator Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan diampu oleh pengadministrasi kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 59 dokumen dan realisasi sebesar 78 dokumen sehingga capaian adalah 132,20%.
- s. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun diampu oleh Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 21 dokumen dan realisasi sebesar 25 dokumen sehingga capaian adalah 119,04%.

- t. Program Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan titik layanan diampu oleh Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 10% dan realisasi sebesar 14% sehingga capaian adalah 140%.
- u. Program Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dengan indikator Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD diampu oleh Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 25% dan realisasi sebesar 50% sehingga capaian adalah 200%.
- v. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan diampu oleh Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Target pada TW.II tahun 2024 adalah sebanyak 17 dokumen dan realisasi sebesar 20 dokumen sehingga capaian adalah 117,46%.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya pergeseran anggaran atau rencana anggaran kas, tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang antara lain disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan, terhambatnya pelayanan adminduk karena keterbatasan SDM khususnya di bidang pelayanan, lambatnya proses Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terpenuhinya target kinerja dikarenakan dilakukannya evaluasi per bulan terhadap

serapan anggaran dan capaian target kinerja sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.

3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan melebihi target kinerja dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
- e. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam hal urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan rencana aksi per triwulan baik pencapaian kinerja maupun serapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana salah satu implementasinya adalah pemberian reward dan punishment kepada pengampu kinerja yang mencapai/tidak mencapai target.

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar merupakan dinas yang melaksanakan pelayanan publik, dimana kondisi sarana dan prasarana harus ditingkatkan dengan melakukan peremajaan alat perekaman KTP el dan juga kondisi bangunan, ruang pelayanan, area parkir yang tidak memadai dan tidak sebanding untuk melayani penduduk Kabupaten Banjar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yaitu di Mall Pelayanan Publik Barokah, Plaza Pelayanan Kecamatan Gambut, Plaza Pelayanan Kecamatan Simpang Empat dalam melakukan pelayanan.
- c. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang sudah dipetakan sebagai risiko strategis dan risiko operasional yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
- d. Mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan, melaksanakan pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat secara efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan adminduk di seluruh titik pelayanan.
- e. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik di internal maupun eksternal Disdukcapil Kabupaten Banjar.
- f. Menjaga dan meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang pelayanan di seluruh titik pelayanan Adminduk.

2.2. **PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024**

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Jika melihat capaian realisasi program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2024 s.d triwulan II, pada level sub kegiatan sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan meskipun

terdapat beberapa sub kegiatan yang masih pencapaiannya masih di bawah target.

Pencapaian dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dijabarkan di atas namun di sisi lain juga terdapat faktor penyebab/penghambat yang juga telah dijabarkan di atas. Terhadap kinerja yang belum bisa tercapai akan dilakukan analisa dan tindak lanjut agar pada akhir tahun periode Renstra bisa terpenuhi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

3.1.1 Perubahan Target Indikator Kinerja

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 ada perubahan target indikator kinerja karena adanya Review Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 pada Senin, 8 Juli 2024 dengan disepakatinya Berita Acara Review antara pihak Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Kepala Bidang PPM Bappedalitbang Kabupaten Banjar maka ada perubahan target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai capaian kinerja periode sebelumnya.

3.1.2 Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini, tidak ada perubahan terhadap jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan 4 program, 12 kegiatan, dan 29 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Nama PD : Disdukcapil Kabupaten Banjar

Sasaran Strategis	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
								Renja 2024	Perubaha n Ren ja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.960.403.751	11.483.262.751	522.859.000	
Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.60	88.60	10.440.441.451	10.955.368.451	514.927.000	
	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Dukcapi	76	76	10.440.441.451	10.955.368.451	514.927.000	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100	55.000.000	55.000.000	0	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13	13	40.000.000	38.970.000	-1.030.000	Penyesuaian anggaran karena anggaran pembelian kalkulator digeser serta perhitungan

												ulang makmin rapat
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	22	15.000.000	16.030.000	1.030.000	Penyesuaian anggaran untuk penambahan anggaran fotocopy dan pembelian kertas untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100	4.723.132.615	4.723.132.615	0	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	0	4.572.377.815	4.572.377.815	0	Penyesuaian rincian kegiatan tanpa mengubah pagu
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikas i keuangan SKPD	14	14	141.760.000	141.760.000	0	Penyesuaian rincian kegiatan tanpa mengubah pagu
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	2	4.000.000	4.000.000	0	Penyesuaian rincian kegiatan tanpa mengubah pagu
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana n/semesteran SKPD	16	16	4.994.800	4.994.800	0	Penyesuaian rincian kegiatan tanpa mengubah pagu

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	100	40.000.000	40.000.000	0	
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4	4	40.000.000	40.000.000	0	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	100	1.842.882.500	2.354.509.500	511.627.000	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	10	5.500.000	5.500.000	0	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27	27	1.106.070.700	1.318.076.500	212.005.800	Penambahan paket pengadaan sesuai kebutuhan
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	85	85	48.213.300	89.964.500	41.751.200	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan ATK dan alat kebersihan kantor induk serta UPTD
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	6	66.998.500	66.998.500	0	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	5.900.000	5.900.000	0	

	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	610.200.000	868.070.000	257.870.000	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan makmin rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah khususnya kegiatan Jempol Pelanduk yang diperkirakan akan habis pada bulan September 2024
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100	1.086.306.000	1.086.306.000	0	
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	1.086.306.000	1.086.306.000	0	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	100	2.177.258.336	2.180.558.336	3.300.000	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	7.050.000	7.050.000	0	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	199.298.336	202.598.336	3.300.000	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan biaya langganan internet Starlink yang digunakan untuk pelayanan adminduk di lapangan

	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	1.970.910.000	1.970.910.000	0	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100	515.862.000	515.862.000	0	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	38.990.000	38.990.000	0	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23	23	332.040.000	332.040.000	0	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	3	55.062.000	55.062.000	0	

	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	129	129	89.770.000	89.770.000	0	
Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan							Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	73,5		519.962.300	527.894.300	7.932.000	
	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99,27	99,79	66.409.800	66.841.800	432.000	
							Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	45,5	51				
							persentase penyelesaian permohonan layanan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan	100	100				
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pengguna layanan pendaftaran penduduk yang dapat memenuhi persyaratan	99,3	100	66.409.800	66.841.800	432.000	
	2	12	02	2.01	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36	36	56.410.000	56.410.000	0	Penyesuaian rincian anggaran tanpa mengubah pagu

2	12	02	2.01	007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24	24	9.999.800	10.431.800	432.000	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan cetak formulir di titik titik pelayanan adminduk
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	89	95	185.282.700	192.782.700	7.500.000	
						persentase penyelesaian permohonan layanan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan	100	100				
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pengguna layanan pencatatan sipil yang dapat memenuhi persyaratan	100	100	185.282.700	192.782.700	7.500.000	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	708	708	77.000.000	82.000.000	5.000.000	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan cetak brosur, kertas, x banner, formulir dan amplop
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	33000	33000	108.282.700	110.782.700	2.500.000	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan cetak brosur, kertas, x banner, formulir dan amplop
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data kependudukan (pengolahan dan penyajian data kependudukan) yang sesuai aturan	100		268.269.800	268.269.800	0	

						persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	100	100				
						persentase jaringan SIAK yang dikelola dengan baik	100	100				
						Persentase pengelolaan data kependudukan (pemanfaatan data kependudukan) yang sesuai aturan	100	100				
						persentase peningkatan titik layanan	20	20				
						persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	74	74				
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	100	48.211.800	48.211.800	0	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100	100	48.211.800	48.211.800	0	
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	143.321.500	143.321.500	0	
						persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK						

	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43	43	143.321.500	143.321.500	0	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase PKS yang ditindaklanjuti	100	100	76.736.500	76.736.500	0	
							persentase data balikan yang dilaporkan oleh SKPD	100	100				
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35	35	58.736.500	58.736.500	0	
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25	25	18.000.000	18.000.000	0	

Sumber data : aplikasi SIPD RI ([http:// sipd-ri.kemendagri.go.id/](http://sipd-ri.kemendagri.go.id/))

3.1.3 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, maka kebutuhan dana/pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar adalah untuk program bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. **11.483.262.751,-** (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pada tabel di bawah ini, akan dijelaskan sumber rincian pendanaan dari dana APBD. Rincian tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sumber Rincian Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
Tahun 2024

No.	Sumber Pendanaan	Pagu 2024	Pagu Perubahan 2024	(+/-)
1	APBD	10.960.403.751	11.483.262.751	522.859.000

3.1.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Alasan dilakukan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 disebabkan oleh hal sebagai berikut.

1. Adanya Review Renstra Perubahan Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 tanggal 8 Juli 2024 dari hasil Rapat Internal Monitoring Terhadap Progres Capaian Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra yang diselenggarakan pada Jumat, 31 Mei 2024 bahwa perlu menetapkan target kinerja yang dapat dicapai, menantang, dan realistis dari hasil analisis capaian kinerja sebelumnya;

2. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024;
3. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/89/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
4. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
5. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
6. Penyesuaian rincian belanja untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan tanpa harus mengubah pagu anggaran yang sudah tersedia;
7. Penambahan paket pengadaan sesuai kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk dimana peralatan dan perlengkapan kantor tersebut akan mendukung langsung pelayanan Adminduk di seluruh titik pelayanan.
8. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan ATK serta bahan kebersihan/peralatan kebersihan untuk Kantor Induk Disdukcapil Kabupaten Banjar dan UPTD Gambut serta UPTD Mataraman;
9. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan makmin rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah khususnya kegiatan Jempol Pelanduk yang diperkirakan akan habis pada bulan September 2024 serta untuk mengakomodir koordinasi

ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI dalam rangka pengambilan Blanko KTP Elektronik dan koordinasi pemanfaatan data kependudukan dan koordinasi terkait inovasi pelayanan di Kabupaten Banjar.

10. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan biaya langganan internet Starlink yang digunakan untuk pelayanan adminduk di lapangan;
11. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan cetak brosur, kertas, x banner, formulir dan amplop untuk bidang bidang pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa dalam melakukan Perubahan Renja maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar telah memperhatikan prioritas sub kegiatan mana saja yang dilakukan perubahan.
2. Dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar secara umum ada pengurangan anggaran secara signifikan, yang mana perubahan anggaran tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya pada Renja 2024.
3. Perubahan Renja disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2026.
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun 2024.
5. Jika nanti pada pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini terdapat kekurangan anggaran maka Pengguna Anggaran dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya kebutuhan anggaran tersebut dan kemungkinan untuk dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya (tahun 2025).

6. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:
 - a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2024
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024.
2. Saat Perubahan Renja ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.
3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024, yaitu sebagai berikut.

1. Agar segenap bidang segera melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat tidak ada pengurangan anggaran pada bidang teknis.
2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memastikan kegiatan Jemput Bola Pelayanan Langsung (Jempol Pelanduk) yang selama ini telah berjalan dapat terus dilaksanakan dengan efektif.
4. Memastikan terjaganya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Disdukcapil Kabupaten Banjar dengan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
5. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun. Semoga Allah SWT selalui meridhai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Perubahan Renja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2024 ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas berkat Rahmat, dan Hidayah -Nya, Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini adalah untuk menyesuaikan target dan kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 1 (satu) periode tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Renja Perubahan ini menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Banjar, sehingga Pembangunan Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, rencana kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dan yang dibutuhkan. Rencana Kerja ini diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga ada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMD Tahun 2024, mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024. Adapun yang menjadi alasan yang mendasari adanya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini, sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target kinerja pada sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- 2) Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini Selaras dengan issue strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini yaitu mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini memuat perubahan target dan indikator yang akan dicapai pada kegiatan bersifat teknis maupun penunjang kegiatan serta penyesuaian terhadap penyesuaian anggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6322);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6).
 15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar ini adalah sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum yang akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.

1.3.2 Tujuan

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/bidang sesuai tupoksi masing-masing;
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;
- c. Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas PMD Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam Empat BAB, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas PMD Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab II menampilkan dan menguraikan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PMD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD Tahun 2024.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab III menjelaskan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

BAB IV. Penutup.

Bab IV menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 2 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi ke 2 : Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.

Tujuan : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.

Sasaran : Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan.

Indikator Sasaran : Indeks Desa Membangun (IDM)

Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Maju

Persentase Desa Berkembang

Dalam rangka mencapai misi ke 2 Kabupaten Banjar serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Rincian Belanja Dinas PMD Tahun 2024

No	Uraian	Pagu
1	BELANJA OPERASI	Rp 13.426.721.840
	Belanja Pegawai	Rp 4.628.857.920
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.797.863.920
2	BELANJA TRANSFER	Rp 169.777.072.900
	Belanja Bagi Hasil	Rp 8.916.525.800
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 160.860.547.100
3	BELANJA MODAL	Rp. 619.426.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.619.426.000
JUMLAH BELANJA		Rp183.823.220.740

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 01 januari 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PMD Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
									I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81%	Rp35.876.878.445	74%	Rp6.478.385.309	78%	Rp7.255.336.580	0%	Rp986.304.088	0%	Rp3.475.833.849	0	Rp3.475.833.849	0%	47,91%
Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Rp393.745.500	100%	Rp37.672.500	100%	Rp61.000.000	25%	Rp-	50%	Rp13.755.000	50%	Rp13.755.000	50%	22,55%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	Rp128.245.500	7 Dok	Rp17.683.000	6 Dok	Rp25.500.000	1 Dok	Rp-	3 Dok	Rp5.255.000	3 Dok	Rp5.255.000	50%	20,61%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14 Dok	Rp35.000.000	4 Dok	Rp4.996.000	4 Dok	Rp5.000.000	2 Dok	Rp-	2 Dok	Rp2.000.000	2 Dok	Rp2.000.000	50%	40%
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14 Dok	Rp41.000.000	4 Dok	Rp4.994.500	4 Dok	Rp6.000.000	1 Dok	Rp-	2 Dok	Rp5.000.000	2 Dok	Rp5.000.000	50%	83,33%
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Lap	Rp80.500.000	3 Lap	Rp4.999.000	3 Lap	Rp10.500.000	3 Lap	Rp-	2 Lap	Rp500.000	2 Lap	Rp500.000	66,66%	4,76%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Lap	Rp79.000.000	16 Lap	Rp5.000.000	16 Lap	Rp14.000.000	3 lap	Rp-	8 Lap	Rp1.000.000	8 Lap	Rp1.000.000	50%	7,14 %
Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	Rp23.242.769.412	96,7 2%	Rp3.826.094.808	100%	Rp4.654.857.920	56,4 5%	Rp579.507.965	70,9 6%	Rp2.221.786.336	70,9 6%	Rp2.221.786.336	70,9 6%	47,7 3%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/ Bln	Rp2.152.379.372	25 Org/ Bln	Rp3.646.015.708	25 Org	Rp4.473.757.920	25 Org	Rp540.732.965	27 Org	Rp2.138.436.336	27 Org	Rp2.138.436.336	96,4 3%	47.8 0%%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dok	Rp792.160.000	12 Dok	Rp152.400.000	12 Dok	Rp161.100.000	3 Dok	Rp38.775.000	6 Dok	Rp83.350.000	6 Dok	Rp83.350.000	50%	51,7 4%
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	33 Lap	Rp65.939.000	2 Lap	Rp9.810.500	2 Lap	Rp10.000.000	0 Lap	Rp-	0 Lap	Rp-	0 Lap	Rp-	0%	0%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	98 Lap	Rp79.266.700	20 Lap	Rp18.138.200	20 Lap	Rp10.000.000	4 Lap	Rp-	9 Lap	Rp-	9 Lap	Rp-	45%	0%
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 %	Rp195.000.000	-	-	100%	Rp50.000.000	25%	Rp-	50%	Rp2.280.000	50%	Rp2.280.000	50%	4,56 %

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	32 Ora ng	Rp195.000.000	-	-	4 Oran g	Rp50.000.000	0 Org	Rp-	2 Org	Rp2.280.000	2 Org	Rp2.280.000	50%	4,56 %
Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 %	Rp4.272.213.816	100 %	Rp1.320.567.812	100%	Rp469.806.500	25%	Rp183.850.320	50%	Rp345.339.492	50%	Rp345.339.492	50%	73,51%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Pak et	Rp59.134.500	4 Pak et	Rp8.984.000	4 Paket	Rp10.452.500	0 Pak et	Rp-	2 Pak et	Rp3.247.000	2 Pak et	Rp3.247.000	50%	31,06%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Pak et	Rp64.171.586	4 Pak et	Rp7.445.000	4 Paket	Rp10.081.000	0 Pak et	Rp-	1 Pak et	Rp2.770.000	1 Pak et	Rp2.770.000	25%	27,48%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Rp112.933.600	4 Paket	Rp23.249.500	4 Paket	Rp23.556.500	0 Paket	Rp3.046.500	2 Paket	Rp8.100.500	2 Paket	Rp8.100.500	25%	34,3 9%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	Rp132.496.100	4 Paket	Rp15.764.420	4 Paket	Rp25.716.500	0 Paket	Rp1.953.415	2 Paket	Rp5.443.415	2 Paket	Rp5.443.415	50%	21,1 7%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Lap	Rp3.903.478.030	12 Lap	Rp1.265.124.892	12 Lapo ran	Rp400.000.000	0 Lap	Rp178.850.405	6 Lap	Rp325.778.577	6 Lap	Rp325.778.577	50%	81,4 4%
Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	Rp1.828.844.000	100 %	Rp17.015.000	100%	Rp681.391.000	10%	Rp-	50%	Rp448.900.000	50%	Rp4.489.000.000	50%	65,8 8%
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	215 Unit	Rp1.828.844.000	1 Unit	Rp17.015.000	43 Unit	Rp681.391.000	0	Rp-	20 Unit	Rp448.900.000	20 Unit	Rp448.900.000	46,5 1%	65,8 8%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	Rp4.032.155.285	100 %	Rp982.310.012	100%	Rp960.306.160	25%	Rp188.556.423	50%	Rp332.885.106	50%	Rp332.885.106	50%	34,66%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	Rp1.208.035.685	12 Lap	Rp147.489.252	12 Lap	Rp264.506.160	3 Lap	Rp19.486.378	6 Lap	Rp52.977.331	6 Lap	Rp52.977.331	50%	20,03%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	Rp2.785.018.000	13 Lap	Rp834.820.760	12 Lap	Rp695.800.000	0 Lap	Rp169.070.045	6 Lap	Rp279.907.775	6 Lap	Rp279.907.775	50%	40,23%
Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %	Rp1.912.150.432	100 %	Rp294.725.177	100%	Rp377.975.000	10%	Rp34.389.380	50%	Rp110.887.915	50%	Rp110.887.915	50%	29,34%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125 Unit	Rp871.178.432	25 Unit	Rp211.161.577	1 Unit	Rp38.990.000	0 Unit	Rp11.197.190	0 Unit	Rp19.218.680	0 Unit	Rp19.218.680	0%	49,29%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	Rp930.175.332	-	-	24 Unit	Rp235.889.000	0 Unit	Rp18.807.190	10 Unit	Rp76.647.235	10 Unit	Rp76.647.235	41,66%	32,49%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 Unit	Rp210.730.000	30 Unit	Rp15.388.100	36 Unit	Rp34.720.000	0 Unit	Rp4.385.000	10 Unit	Rp14.529.000	10 Unit	Rp14.529.000	27.77%	41,85%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp390.438.000	1 Unit	Rp68.175.500	1 Unit	Rp68.376.000	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp493.000	0 Unit	Rp493.000	0%	0,72 %
Meningkatnya kualitas penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	15,55%	Rp770.371.482	10,12%	Rp208.799.000	11,93%	Rp299.346.000	10,57%	Rp-	11,02%	Rp25.367.000	11,02%	Rp25.367.000	92,37%	8,47 %
Meningkatnya fasilitasi tata batas wilayah desa	Penyelenggara an Penataan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan tata batas wilayah desa	80%	Rp770.371.482	20%	Rp208.799.000	40%	Rp299.346.000	10,57%	Rp-	30%	Rp25.367.000	30%	Rp25.367.000	75%	8,47 %
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Des a	Rp770.371.482	5 Des a	Rp208.879.900	5 desa	Rp299.346.000	0 des a	Rp-	0 des a	Rp25.367.000	0 des a	Rp25.367.000	0%	8,47 %
Meningkatnya persentase kerjasama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	7,22	Rp 1.418.120.210	2,89 %	Rp 237.239.000	4,33 %	Rp 495.534.500	3,25 %	Rp 206.407.500	3,61 %	Rp 346.372.500	3,61 %	Rp 346.372.500	83,37%	69,90%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa, Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan, Meningkatnya Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	100 %	Rp 1.418.120.210	40%	Rp 237.239.000	60%	Rp 495.534.500	45%	Rp 206.407.500	50%	Rp 346.372.500	50%	Rp 346.372.500	83,33%	69,90%
		Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	67,30	Rp1.418.120.210	26,92%		40,38%				33,65%		33,65%		83,33%	
		Persentase kawasan desa yang dikembangkan	14%		5,60%		8,40%		6,30%		7%		7%		83,33%	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dok	Rp 526.364.583	1 Dok	Rp 46.112.500	1 Dok	Rp 229.663.000	0 Dok	Rp -	0 Dok	Rp 133.965.000	0 Dok	Rp 133.965.000	0%	58,33%
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dok	Rp 317.492.627	1 Dok	Rp 32.791.000	1 Dok	Rp 110.663.000	0 Dok	Rp 98.443.000	0 Dok	Rp 98.443.000	0 Dok	Rp 98.443.000	0%	88,96%
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dok	Rp 574.263.000	1 Dok	Rp 158.335.500	1 Dok	Rp 155.208.500	0 Dok	Rp 107.964.500	0 Dok	Rp 113.964.500	0 Dok	Rp 113.964.500	0%	73,43%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	100 %	Rp 806.735.500.501	43,32 %	Rp 155.603.129.765	100 %	Rp 172.190.360.600	25,00 %	Rp 38.398.851.827	50,00 %	Rp 85.678.733.153	52,70 %	Rp 85.678.733.153	52,70 %	49,76 %
Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset Desa sesuai dengan ketentuan	100 %	Rp 806.735.500.501	100 %	Rp 155.603.129.765	100%	Rp 172.190.360.600	40.5 %	Rp 38.398.851.827	58,42 %	Rp 85.678.733.153	58,42 %	Rp 85.678.733.153	58,42 %	49,75 %
		Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	100 %	Rp806.735.500.501	40%				45%		52,25 %		52,25 %		87,58 %	
		Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 %		40%				45%		50%		50%		83,33 %	

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3167 Dok	Rp 1.945.810.275	1053 Dok	Rp 480.879.250	1053 Dok	Rp 551.000.000	265 Dok	Rp -	380 Dok	Rp 29.990.000	380 Dok	Rp 29.990.000	36,08%	5,44%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	831 Dok	Rp 173.450.000	-	-	1 Dok	Rp 35.000.000	0 Dok	Rp -	0 Dok	Rp -	0 Dok	Rp -	0%	0%
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dok	Rp 793.758.140.556	1 Dok	Rp 153.217.56.061	1 Dok	Rp 170.035.159.200	0 Dok	Rp 38.168.836.152	0 Dok	Rp 84.805.573.153	0 Dok	Rp 84.805.573.153	0%	49,88%
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2216 Org	Rp 2.106.413.300	997 Org	Rp 973.049.754	443 Org	Rp 410.388.100	166 Org	Rp 92.639.000	277 Org	Rp 373.743.500	277 Org	Rp 373.743.500	62,52%	91,07%
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dok	Rp 1.174.469.295	1 Dok	Rp 174.926.900	1 Dok	Rp 299.103.400	0 Dok	Rp 20.762.675	0 Dok	Rp 178.010.000	0 Dok	Rp 178.010.000	0%	59,51%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4 Lap	Rp 2.797.192.600	-	-	1 Lap	Rp 40.101.500	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp 5.750.000	0 Lap	Rp 5.750.000	0%	14,34%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	9 Dok	Rp 877.984.175	2 Dok	Rp 85.150.000	2 Dok	Rp 169.120.000	0 Dok	Rp 40.857.000	0 Dok	Rp 107.001.000	0 Dok	Rp 107.001.000	0%	63,27%
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5 Dok	Rp 1.063.105.700	1 Dok	Rp 57.831.600	1 Dok	Rp 77.208.500	0 Dok	Rp -	0 Dok	Rp 46.058.500	0 Dok	Rp 46.058.500	0%	59,65%
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1235 Org	Rp 816.103.800	560 Org	Rp 249.148.300	280 Org	Rp 130.520.000	0 Org	Rp -	0 Org	Rp -	0 Org	Rp -	0%	0%
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	80 Desa	Rp 886.044.800	20 Desa	Rp 149.109.400	20 Desa	Rp 209.287.400	5 Desa	Rp -	5 Desa	Rp 44.450.000	5 Desa	Rp 44.450.000	25%	21,24%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
									I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	138 5 Lap	Rp 325.618.50 0	277 Lap	Rp 35.582.00 0	277 Lap	Rp 27.500.00 0	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp -	0%	0%
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dok	Rp 845.647.60 0	2 Dok	Rp 179.896.5 00	2 Dok	Rp 205.972.5 00	0 Dok	Rp 75.757.0 00	0 Dok	Rp 88.157.00 0	0 Dok	Rp 88.157.00 0	0%	42,8 0%
Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %	Rp 11.132.63 8.192	81,2 3%	Rp 2.332.890 .967	87,4 5%	Rp 3.582.643 .060	82,7 8%	Rp 38.846.5 00	84,4 4%	Rp 968.968. 172	84,4 4%	Rp 968.968. 172	96,5 5%	27,0 5%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	50%	Rp 11.132.63 8.192	20%	Rp 2.332.890 .967	30&	Rp 3.582.643 .060	22,5 0%	Rp 38.846.5 00	25%	Rp 968.968. 172	25%	Rp 968.968. 172	83,3 3%	27,0 5%
		Persentase PKK Aktif	100 %	Rp 11.132.63 8.192	100 %		100 %		25%		50%		50%			

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp				
Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	50%	Rp 11.132.638.192	100 %		100 %		25%		50%		50%		50%	
		Persentase Posyandu Aktif	100 %	Rp11.132.638.192	100 %		100 %		25%		50%		50%		50%	
		Persentase desa berprestasi	100 %		100 %		100 %		25%		50%		50%		50%	
		Persentase Pamsimas Aktif	87%		84,89%		85%		0%		84,59%		84,59%		99,51%	
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	80 Dok	Rp 11.020.998.461	16 Dok	Rp 2.132.607.067	16 Dokuemn	Rp 2.974.279.060	0 Dok	Rp 38.846.500	11 Dok	Rp 886.703.172	11 Dok	Rp 886.703.172	68,75%	29,81%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dok	Rp 409.016.300	1 Dok	Rp 87.068.000	1 Dok	Rp 90.664.000	0 Dok	Rp -	0 Dok	Rp 75.015.000	0 Dok	Rp 75.015.000	0%	82,74%
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	5 Lap	Rp 646.559.800	1 Lap	Rp 58.215.900	1 Lap	Rp 337.700.000	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp 7.250.000	0 Lap	Rp 7.250.000	0%	2,15%

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra DPMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DPMD sampai dengan Renja DPMD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DPMD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja DPMD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra DPMD s/d Tahun 2024(%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Teknologi Tepat Guna	Teknologi Tepat Guna	Teknologi Tepat Guna														
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 Lap	Rp 394.252.575	2 Lap	Rp 55.000.000	1 Lap	Rp 180.000.000	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp -	0 Lap	Rp -	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (akhir Juni 2024), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD target 2 laporan dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%. Dikarenakan , capaiannya masih 0 (nol) karena penetapan target di akhir triwulan 4.
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya target 1 Unit dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%. Dikarenakan Penetapan target di akhir triwulan 4.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 1 Unit dengan realisasi 0 dan capaian masih 0 %. Dikarenakan belum dapat dilaksanakan pada triwulan II ini masih mempersiapkan pengadaan barang jasanya terkait dengan penginputan melalui e purchasing dan e - syrupnya.
 3. Program Penataan Desa, dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan Yaitu:

Fasilitasi tata Wilayah Desa, dengan indikator Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya target 5 desa deangan realisasi masih 0 dan capaian masih 0%. Dikarenakan belum adanya tenaga teknis pemetaan wilayah, belum adanya data desa, dan kebijakan pemerintah terkait dengan tata ruang desa, desa masih fokus dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.

5. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan indikator Jumlah hasil fasilitasi dokumen hasil penyusunan produk hukum desa, target 1 dokumen dengan realisasi 0 dokumen dan capaian masih 0 %
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator Jumlah hasil fasilitasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa target 1 Laporan dengan realisasi 0 laporan dan capaian masih 0%
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan indikator Jumlah hasil fasilitasi dokumen profil desa target 1 dokumen dengan realisasi 0 dokumen dan capaian masih 0 %
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan indikator Jumlah hasil Fasilitasi Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan indikator Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas target 280 orang dengan realisasi 0 Orang dan capaian masih 0 %.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan indikator Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa target 20 desa dengan realisasi 0 desa dan capaian 0%

- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan indikator Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa target 277 Laporan dengan realisasi 0 laporan dan capaian masih 0 %.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan indikator jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan target 2 dokumen dengan realisasi 0 dokumen dan capaian masih 0 %.

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa target 1 dokumen dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna target 1 laporan dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat target 1 laporan dengan realisasi 0 dan capaian masih 0%.

b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 6 dokumen dengan realisasi 3 dokumen dan capaian 50%.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD target 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen dan capaian 50%.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD target 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen dan capaian 50%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target 3 laporan dengan realisasi 2 laporan dan capaian 66.66%.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 16 laporan dengan realisasi 8 laporan dan capaian 50%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 28 orang dengan realisasi 27 orang dan capaian 96.43%.
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD target 12 dokumen dengan realisasi 6 dokumen dan capaian 50%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD target 20 laporan dengan realisasi 9 laporan dan capaian 45%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Administrasi Kepegawiaan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan target 4 dengan realisasi 2 orang dan capaian 50%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan target 4 paket dengan realisasi 1 dan capaian masih 25%, dikarenakan masih tersedia bahan ataupun komponen listrik
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan target 4 paket dengan realisasi 1 dan capaian masih 25%.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan target 4 paket dengan realisasi 2 dan capaian masih 50%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 12 laporan dengan realisasi 6 Laporan dan capaian sudah 50%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan target 43 unit dengan realisasi 20 unit dan capaian 46.51 %
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 12 laporan dengan realisasi 6 laporan dan capaian 50%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 12 laporan dengan realisasi 6 laporan dan capaian 50%.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 24 unit dengan realisasi 10 unit dan capaian 41.66%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara target 36 unit dengan realisasi 10 unit dan capaian 27.77%.
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa target 1053 dokumen dengan realisasi 380 dokumen dan capaian 36.08%.

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan indikator Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas target 443 orang dengan realisasi 277 orang dan capaian 62.52%.

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat target 16 dokumen dengan realisasi 11 dokumen dan capaian 68.75%.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran yang tidak direncanakan dengan baik sehingga target kinerja tidak terpenuhi.
 - Target memang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan selanjutnya.
 - Force majeure
 - Penetapan target yang tidak diperhitungkan dengan baik.
2. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sebagai berikut :
 - Rencana kegiatan termanajemen dengan baik, sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
 - Koordinasi yang baik antar bidang dan stakeholder
 - Evaluasi perbulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kegiatan, sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut :
 - Terhadap program , kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas PMD berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya

- Terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Dinas PMD berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD
 - Tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD.
 - Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan serta dengan tidak melihat seberapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut
 - Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan
 - Terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target capaian Renstra maka program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut akan sama dengan target yang telah ditentukan di akhir Renstra.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Dinas PMD perlu melakukan evaluasi terhadap target kinerja program/kegiatan
 - Perlu adanya koordinasi yang lebih matang agar kinerja dapat dicapai secara konsisten.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM atau Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa tujuan dari Indeks Desa Membangun (IDM) adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dapat diukur dengan pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa, 5 (lima) status Desa terdiri dari Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Kabupaten Banjar menargetkan Status Desa Tertinggal tidak ada lagi di tahun 2023, capaian optimis target tersebut, dilihat dari Status Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Banjar sudah menjadi 0 (nol) dengan kata lain, tidak ada lagi Status Desa Sangat Tertinggal di Tahun 2023.

Secara umum skor Indeks Desa Membangun Kabupaten Banjar meningkat dari tahun 2015 sampai 2023. Skor IDM Kabupaten Banjar ditahun 2020 yang mencapai 0.6337 naik 0.6451 ditahun 2021 dan terus meningkat di tahun 2022 dengan skor 0.6793 dan pada Tahun 2023 menjadi skor 0, 7280 sehingga Pada tahun 2023 peningkatan Status Desa terdapat 31 Desa Mandiri, 123 Desa Maju dan 123 Desa Berkembang dengan kenaikan status menjadi desa Mandiri dari 5 desa menjadi 31 Desa mandiri dengan demikian capaian tersebut sangat baik dan sudah tidak ada lagi Desa tertinggal sehingga pembangunan di Kabupaten Banjar sangat terasa untuk semua lapisan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan BUMDes , sampai dengan triwulan II ini ada 245 jumlah Bumdes yang sudah terbentuk, namun yang aktif sekitar 177 Bumdes. Penyebab tidak aktifnya Bumdes ini antara lain, adanya pergantian kepengurusan, adanya pengurus yang berhenti, SDM nya yang masih kurang memahami tentang pengelolaan BUMDes dll.

Berdasarkan pemeringkatannya Bumdes ada dalam 4 tingkatan yaitu : Bumdes perintis ada 70, Bumdes pemula ada 63, Bumdes berkembang ada 39, dan Bumdes maju ada 5.

Pada kegiatan pengelolaan keuangan desa, ada beberapa kegiatan yang langsung untuk membantu perekonomian masyarakat pedesaan seperti BLT dan PKTD, saat ini penyaluran BLT s.d triwulan ini realisasinya sebesar Rp. 24.957.900.000 dari pagu sebesar Rp.33.674.400.000,- dengan jumlah 9.354 KPM (Kelompok penerima manfaat). Sedangkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dilaksanakan untuk pembangunan di desa melalui dana desa telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa untuk menambah penghasilan atau memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dan digaji berupa uang tunai, harian atau mingguan. Program padat karya ini biasanya untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, perumahan, irigasi, dan infrastruktur lainnya.

Tidak kalah penting peranan DPMD untuk bisa menghimbau kepada masyarakat pedesaan maupun lembaga yang ada desa untuk lebih memperhatikan kesehatan, air minum, sanitasi, dan peran serta pemuda agar terlibat langsung dalam pembangunan yang ada di desa melalui pemberdayaan masyarakat desa yaitu kegiatan PKK, Posyandu, Pamsimas, Karang Taruna, lembaga adat, RT/RW.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Perubahan Target Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Adapun perubahan target kinerja dan indikator kinerja untuk Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah dengan adanya pemutakhiran data IDM Tahun 2024 dimana realisasi untuk status IDM dengan 277 desa yaitu:

- 1. Status Desa Mandiri realisasi 61
- 2. Status desa Maju realisasi 123
- 3. Status desa berkembang 93
- 4. Status Penurunan desa tertinggal 0

Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa adalah:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun 2024

Kinerja	Indikator	Target
Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	Persentase desa mandiri	22.02%
	persentase desa maju	44.41%
	Persentase desa berkembang	33.57%

Selanjutnya adapun perubahan target kinerja dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas PMD tahun 2024 dapt dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Target Kinerja dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas PMD Tahun 2024

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Sasaran strategis DPMD	Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan	Menurunnya kesenjangan dan kemiskinan melalui pembangunan perdesaan		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	4.33%	4.33%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	40.38%	40.38%
	Persentase kawasan desa yang dikembangkan	Persentase kawasan desa yang dikembangkan	8.40%	8.40%
	persentase desa yang melakukan kerjasama	Persentase desa yang melakukan kerjasama	86%	86%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa	Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa	11.93%	11.93%
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Telah Menyelesaikan Tata Batas Wilayah Desa	Persentase Desa yang Telah Menyelesaikan Tata Batas Wilayah Desa	40%	40%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa	5 Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	62.09%	62.09%
	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan ketentuan	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan ketentuan	100%	100%

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60%	60%
	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset Desa sesuai dengan ketentuan	100%	100%
	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan Aset Desa sesuai ketentuan			
	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	60%	60%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1053 Dokumen	1053 Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	443 Orang	443 Orang
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280 Orang	280 Orang
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	20 Desa	20 Desa
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	277 Laporan	277 Laporan
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1 Dokumen
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	87.45%	87.45%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Persentase Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	100	100
	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	30	30
	Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	100	100

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pamsimas Aktif	Persentase Pamsimas Aktif	85	85
	Persentase PKK Aktif	Persentase PKK Aktif	100	100
	Persentase desa berprestasi	Persentase desa berprestasi	100	100
Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	16 Dokumen

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76	78
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	100

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4 Orang

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4Paket	4 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target	
	Sebelum	Sesudah Perubahan	Sebelum	Sesudah Perubahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

3.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

9. Program Penataan Desa

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub kegiatan :

- Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilakukan Perubahan

Pagu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan pelaksanaan 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 42 sub kegiatan adalah sebesar Rp191.662.339.836,-. Adapun Realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 90.495.274.674,- (47.21 %).

Adapun perubahan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran antar sub kegiatan baik sub kegiatan pada program masing- masing maupun pergeseran pada program yang lain.
2. Adanya perubahan pada target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target yang sebelumnya 76% menjadi 78% orang dengan anggaran sebelumnya Rp.7.255.336.580 Berubah menjadi Rp. 8.024.898.820
3. Adanya perubahan pada target Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target sebelumnya 2 Orang menjadi 4 Orang dengan anggran sebelumnya Rp. 50.000.000 Berubah menjadi Rp.90.000.000

4. Adanya perubahan target pada sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, sebelumnya target 2 laporan menjadi 1 laporan dengan anggaran Rp. 180.000.000 menjadi Rp. 60.607.000

Selain yang disebutkan diatas, untuk perubahan Renja 2024 ini akan dijelaskan lebih rinci ke dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMD Kabupaten Banjar

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1.	Tujuan : Menurunnya Kesenjangan dan Kemiskinan Melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7425	0.7425	183.823.220.740	191.662.339.836	7.839.119.096	Penyesuaian terhadap target dan indikator pada pencapaian outcome
2.	Sasaran : Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Persentase Desa Mandiri	0.7425	22.02	183.823.220.740	191.662.339.836	7.839.119.096	Penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan
			Persentase Desa Maju		44.41				
			Persentase Desa Berkembang		33.57				
			Persentase Penurunan Desa Tertinggal		100				
3.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	11.93%	11.93%	299.346.000	248.346.000	-51.000.000	Adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi.
4.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang telah menyelesaikan Tata Batas Wilayah Desa	Persentase desa yang telah menyelesaikan tata batas wilayah desa	40%	40%	299.346.000	248.346.000	-51.000.000	Adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi.

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
5.	Fasilitasi Tata wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	5 Desa	5 Desa	299.346.000	248.346000	-51.000.000	Adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi.
6.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	4.33%	4.33%	495.534.500	424.774.500	-70.760.000	Adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi.
7.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	40.38	40.38	495.534.500	424.774.500	-70.760.000	Adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi.
		Persentase kawasan desa yang dikembangkan	Persentase kawasan desa yang dikembangkan	8.4	8.4				
		Persentase desa yang melakukan kerjasama	Persentase desa yang melakukan kerjasama	86	86				
8.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	229.663.000	171.113.000	-58.550.000	Adanya pergeseran terhadap sub kegiatan di internal kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
9.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	110.663.000	98.453.000	-12.210.000	Tidak ada perubahan
10.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	155.208.500	155.208.500	0	Penambahan pagu dilakukan karena pergeseran dari subkegiatan pada program yang sama
11.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	62.09	62.09	172.190.360.600	179.052.009.956	6.861.649.356	Penyesuaian terhadap target dan indikator
		Persentase pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan	Persentase pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan	100	100				
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	60	60	172.190.360.600	179.052.009.956	6.861.649.356	Penyesuaian terhadap taget dan indikator,

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Pemerintahan Desa	administrasi pemerintahan desa	administrasi pemerintahan desa						yaitu adanya perubahan gaji pembakal, adanya sosialisasi terhadap peraturan hukum dan perundang2an
13.		Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan	100	100				
14.		Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	60	60				
15.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1053 Dokumen	1053 Dokumen	551.000.000	618.735.000	67.735.000	Pengurangan pagu karena adanya perubahan target dan pergeseran untuk menambah ke perjalanan dinas luar kota
16.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	277 Dokumen	277 Dokumen	35.000.000	35.000.000	0	Tidak Ada Perubahan

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
17.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	170.035.159.200	176.740.449.556	6.705.290356	Penambahan pagu untuk mengakomodir Kekurangan BHPRD tahun 2021 serta untuk penambahan Tunjangan Pambakal, Aparat Desa serta BPD - Penambahan juga untuk mengakomodir Hadiah Pemenang Lomba Desa serta Pemenang Pendamping Desa
18.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	443 Orang	443 Orang	410.388.100	377.188.100	-33.200.000	-pengurangan pagu untuk mengakomodir kegiatan lainnya
19.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	299.103.400	250.037.400	-49.066.000	- Pengurangan pagu untuk

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	dan Lembaga Kerja sama antar Desa	BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						mengakomodir kegiatan lainnya
20.	Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	40.101.500	40.101.500	0	Tidak ada perubahan
21.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	169.120.000	184.015.000	14.895.000	Perubahan target dari 1 dokumen menjadi 2 dokumen
22.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	77.208.500	284.508.500	207.300.000	Pengurangan pagu untuk mengakomodir belanja perjalanan dinas bidang
23.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280 Orang	280 Orang	130.520.000	125.320.000	-5.200.000	Tidak ada perubahan
24.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	277 Laporan	277 Laporan	27.500.000	32.000.000	4.500.000	Penambahan pagu karena adanya pergeseran pada sub kegiatan lain
25.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	20 Desa	20 Desa	209.287.400	173.587.400	-35.700.000	Penambahan pagu karena adanya

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
									pergeseran pada sub kegiatan lain
26.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	205.972.500	191.067.500	-14.905.000	Pengurangan pagu anggaran untuk mensupport perjadiin bidang
27.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	87.45%	87.45%	3.582.643.060	3.912.310.560	329.667.500	Adanya pergeseran terhadap sub kegiatan yang lain
28.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	100	100	3.582.643.060	3.912.310.560	329.667.500	Adanya pergeseran terhadap sub kegiatan yang lain
		Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	30	30				
		Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	100	100				
		Persentase Pamsimas Aktif	Persentase Pamsimas Aktif	85	85				
		Persentase PKK Aktif	Persentase PKK Aktif	100	100				
		Persentase desa berprestasi	Persentase desa berprestasi	100	100				

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
29.	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	16 Dokumen	2.974.279.060	3.509.580.560,00	535.301.500	Penambahan pagu untuk mengakomodir pendampingan kepada KPSPAMS untuk dapat memberikan akses air minum 24 jam. dan sosialisasi pedoman pengelolaan SPAMBM diantaranya ttg biaya perolehan air yang telah mengacu pada konsep FCR dan sosialisasi.
30.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	90.664.000	86.408.000	-4.256.000	Pengurangan pagu untuk mengakomodir pemeliharaan kendaraan roda 4 operasional bidang

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
31.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	337.700.000	255.715.000	-81.985.000	Tidak ada perubahan
32.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan	180.000.000	60.607.000	-119.393.000	Tidak ada perubahan
33.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76	78	7.255.336.580	8.024.898.820	769.562.240	Adanya penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan
34.	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	100	61.000.000	61.000.000	0	Tidak ada perubahan
35.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	25.500.000	25.500.000	0	Tidak ada perubahan
36.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	Tidak ada perubahan

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
37.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	6.000.000	0	Tidak ada perubahan
38.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	10.500000	10.500.000	0	Tidak ada perubahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	14.000.000	14.000.000	0	Tidak ada perubahan
39.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	100	4.654.857.920	4.654.857.920	0	Adanya pergeseran untuk mengakomodir di sub kegiatan yang lain
40.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	4.473.757.920	4.473.757.920	0	Adanya pergeseran untuk mengakomodir

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
									pada sub kegiatan yang lain dan adanya tambahan belanja PPH21
41.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	161.100.000	161.100.000	0	Tidak ada perubahan
42.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	Tidak ada perubahan
43.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	Tidak ada perubahan
44.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100%	100%	50.000.000	90.000.000	40.000.000	

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
45.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4 Orang	50.000.000	90.000.000	40.000.000	
46.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	469.806.500	1.030.465.900	560.659.400	Adanya perubahan target dan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan akhir.
47.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.452.500	12.237.500	1.785.000	Tidak ada perubahan
48.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.081.000	10.081.000	0	Tidak ada perubahan
49.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	23.556.500	23.556.500	0	Tidak ada perubahan
50.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.716.500	29.590.900	3.874.400	Tidak ada perubahan

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
51.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	955.000.000	555.000.000	Penambahan pagu karena adanya pergeseran pada sub kegiatan lainnya (untuk mengakomodir perjadiin bidang2)
52.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	100%	681.391.000	950.447.000	269.056.000	Penambahan pagu karena adanya pengadaan jaringan internet dan pembuatan papan nama
53.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	681.391.000	950.447.000	269.056.000	Penambahan pagu karena adanya pengadaan jaringan internet dan pembuatan papan nama
54.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	100	960.306.160	854.254.000	- 106.052.160	Adanya pergeseran antar sub kegiatan untuk mensupport

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
									kegiatan yang lainnya.
55.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	264.506.160	158.454.000	-106.052.160	Pengurangan pagu untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemeliharaan kendaraan, honorarium dan perjadin
56.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pegawai. Tamu dan rapat dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	695.800.000	695.800.000	0	tidak ada perubahan
57.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	100%	377.975.000	383.874.000	5.899.000	Adanya pergeseran dari sub kegiatan yang lain untuk menambah pemeliharaan kendaraan

No.	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
58.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000	38.990.000	0	tidak ada perubahan
59.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	235.889.000	203.928.000	-31.961.000	
60.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	34.720.000	37.270.000	2.550.000	Tidak ada perubahan
61.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	68.376.000	103.686.000	35.310.000	Tidak ada perubahan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra DPMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis /rasional, produktif disiplin, serta efektif dan efisien baik dalam perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaannya.

Hal hal yang mendapat perhatian dalam Perubahan Renja 2024 ini adalah adanya perubahan dalam beberapa indikatornya serta penambahan jumlah anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan target dan indikatornya dari beberapa sub kegiatannya.
2. Pergeseran antara sub kegiatan dengan sub kegiatan lainnya dengan tujuan untuk mensupport kegiatan yang lebih prioritas dan lebih membutuhkan dana yang lebih banyak.

3. Penambahan pagu anggaran. Pada beberapa sub kegiatan

Pada akhirnya perubahan Renja 2024 ini adalah untuk penyesuaian anggaran terhadap target- target yang telah ditetapkan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Perubahan RENJA DPMD Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di desa melalui peningkatan kapasitas Lembaga dan aparat desa yang

berkualitas dan professional sehingga dapat membangun desanya agar lebih sejahtera dan maju. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 -2026 tersebut, didalam pelaksanaan harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya. yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:
 - a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas PMD dan RPJMD Kabupaten Banjar
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas PMD Tahun 2023
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan
2. Perubahan Rencana Kerja DPMD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD, didalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMD, RKPD provinsi, RPJP Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas)
4. Perubahan Renja DPMD Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMD terhadap Perubahan Renja 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
2. Adanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif sebagai motor pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai kontrol sosial.
3. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan desa dimana

permasalahan yang dihadapi oleh desa lebih kompleks kedepannya.

Demikian Renja Perubahan Dinas PMD tahun 2024 ini disusun, Semoga Allah SWT selalui meridai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis. Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja Perubahan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Dinas Perhubungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk yang akan datang.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian/UPT di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Perhubungan Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dimana pada dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Kabupaten Banjar dalam RPJMD 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Visi Bupati Banjar ialah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis.”** Untuk mencapai visi tersebut maka dibuatlah misi bagi tiap sektor yang diampu oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mengacu pada misi 2 yaitu **“Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.”**

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Banjar Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan SKPD yang dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD :

Perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;

- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan SKPD;
- j. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan SKPD;
- k. Pembahasan forum SKPD; dan
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perubahan SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD

Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD terdiri dari susunan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- c. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Perubahan SKPD dan program dan kegiatan.

d. Penutup.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Perhubungan Kab. Banjar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD
15. Permendagri Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Surat Edaran Bupati Nomor : 000.7.2.4/ 528 /PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Perubahan Target Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan, yang

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada masing-masing Bidang sekaligus sebagai sarana pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam sisa tahun pelaksanaan berjalan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 4 (empat) sub bab yaitu latar belakang penyusunan rencana kerja perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD Tahun 2024. Materi yang disajikan dalam bab ini ialah realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi penjelasan tentang uraian garis besar rekapitulasi perubahan program dan kegiatan yang meliputi perubahan indikator kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta alasan dilakukan perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaannya maupun jika terjadi ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke II dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi ke 2 : Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Tujuan 2.1 : Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi

Indikator Sasaran : Rasio Konektivitas

Mengacu pada APBD Tahun 2024, total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebesar Rp. 13.555.047.331 dengan Realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.200.841.233 (38%).

Adapun rincian untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan II ini adalah :

- 1) Program wajib sebesar Rp. 1.242.425.426 (28,72% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.326.060.233).
- 2) Program rutin sebesar Rp. 3.958.415.807 (43% total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.228.987.098).

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terdapat beberapa catatan penting, antara lain :

1. Program / Kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh :
 - a) Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan III dan IV.
 - b) Kegiatan belum dilaksanakan karena menyesuaikan anggaran kas.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
 - a) Kegiatan yang sebagian besar dijadwalkan pada triwulan III dan triwulan IV berdampak pada pelaksanaan kinerja yang harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu karena mengingat target cukup banyak yang belum tercapai sementara periode tahun anggaran akan berakhir.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut :
 - a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
 - b) Efektifitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi anggaran

Tabel II. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Sasaran/U rusan Bidang/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Pada Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		
							k	Rp.	k	Rp.				I		II		k	Rp.	k	Rp.	k
											K	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k					
1					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14 =12	15=13	15=10/14*100		
2	1	5			Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	100 Rasio	47,752, 406,508	116,10 %	12,722, 981,766	72 ,5	Rasio	13.555.04 7.331,00	0	1.726.8 67.162	0	4.042.6 98.846	0	4.042.6 98.846	0	29, 82	
2	1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKKI Perangkat Daerah	80 Indeks	37,529, 246,999	92,09 %	6.125.8 32.446	76	Indeks	Rp9.228.9 87.098,00	0	1.930.5 41.481	0	3.961.1 03.804	0	3.961.1 03.804	0	42, 92	

2	15	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	235,629,900	100%	26.514.100	100%	persen	Rp33.569.000,00	46,15	3.302.000	53,84%	3.302.000	1	3.302.000	54	9,84
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39,719,800	2 Dokumen	5.340.000	2	Dokumen	Rp7.549.000,00	1	1.260.000	1	1.260.000	1	1.260.000	50	16,69
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	62,555,100	4 Dokumen	9.057.800	4	Dokumen	Rp11.146.000,00	1	1.176.800	1	1.176.800	1	1.176.800	25	10,56

2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	29,223,000	3 Dokumen	3.537.900	3	Laporan	Rp4.870.000,00	3	865.200	3	865.200	3	865.200	100	17,77
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	104,132,000	4 Dokumen	8.578.400	4	Laporan	Rp10.004.000,00	1	0	2	0	2	0	50	0,00
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan	100%	31,720,283,937	191%	4.189.973.533	100%	Persen	Rp6.127.652.972,00	25	771.780.961	50	2.239.968.940	50	2.239.968.940	5000	36,56

						Tahun SKPD															
2	15	1	2.03		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas e Tersusun nya dokumen pengelolaa n Barang Milik Daerah tepat waktu	100 %	22.034. 880	-	-	10 0	Persen	Rp7.200.0 00,00	25	0	50	0	50	0	50	0,0 0
2	15	1	2.03	6	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Lapora n	22.034. 880	-	-	12	Lapora n	Rp7.200.0 00,00	7	0	7	0	7	0	58	0,0 0
2	15	1	2.05		Administra si Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi Kepegawai an Perangkat Daerah	100%	212,000 ,000	100%	29.700. 424	10 0 %	persen	50.000.00 0	25	10.440. 000	50	10.440. 000	50	10.440. 000	500 0	20, 88

						sesuai kebutu- han dan tepat waktu															
2	1 5	1	2. 0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbanga n Teknis Implementasi Peraturan Perundan- g- Undangan	20 Orang	212,000 ,000	4 Orang	29.700. 424	15	Orang	50.000.00 0	4	10.440. 000	4	10.440. 000	4	10.440. 000	27	20, 88
2	1 5	1	2. 0 6		Administra- si Umum Perangkat Daerah	Persentas e penyeleng- garaan penunjang administrasi umum perkantoran	100%	1,802,5 49,200	100%	223.202 .850	10 0 %	persen	Rp208.88 5.300,00	25	62.824. 952	50	150.21 5.146	50	150.21 5.146	500 0	71, 91
2	1 5	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen- erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe- nerangan Bangunan Kantor	5 Paket	24,935, 000	0,95 Paket	3.685.7 00	1	Paket	Rp11.369. 300,00	0	0	0,4 19	2.848.0 00	0	2.848.0 00	42	25, 05

						yang Disediaka n															
2	1 5	1	2. 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	10 Paket	109,528 ,900	2 Paket	19.194. 950	2	Paket	Rp20.604. 000,00	0. 02 4	9.404.0 00	1	9.404.0 00	1	9.404.0 00	50	45, 64
2	1 5	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Pengganda an Yang Disediaka n	5 Paket	93,011, 800	0,94 Paket	8.832.2 00	1	Paket	Rp9.412.0 00,00	0. 16	3.890.0 00	0,3 12	3.890.0 00	0,3 12	3.890.0 00	31	41, 33
2	1 5	1	2. 0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamud	60 Lapora n	74,360, 000	12 Lapora n	3.565.0 00	12	Lapora n	Rp7.500.0 00,00	3	1.882.0 00	6	1.882.0 00	6	1.882.0 00	50	25, 09
2	1 5	1	2. 0 6	9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i Dan	60 Lapora n	1,400,0 00,000	12 Lapora n	187.925 .000	12	Lapora n	Rp160.00 0.000,00	3	47.648. 952	6	132.19 1.146	6	132.19 1.146	50	82, 62

						Konsultasi SKPD																
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	620,000,000	100%	703.983.000	100%	Persen	Rp614.922.000,00	60	557.081.000	80	584.531.000	80	584.531.000	8000	95,06	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	2.164.889.644	3 Unit	638.554.000	4	Unit	Rp492.610.000,00	4	465.700.000	4	465.700.000	4	465.700.000	100	94,54	
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	48.624.000	-	-	20	Unit	Rp48.624.000,00	20	48.624.000	20	48.624.000	20	48.624.000	100	100,00	
2	15	1	2.07	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	620,000,000	6 Unit	65.429.000	6	Unit	Rp73.688.000,00	4	42.757.000	6	70.207.000	6	70.207.000	100	95,28	

					dan Mesin Lainnya	yang Disediakan															
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	765,854,000	100%	529.071.386	100%	Persen	Rp1.745.275.026,00	25%	362.191.379	50%	719.429.832	1	719.429.832	50	41,22
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Disediakan	60 Laporan	765,854,000	12 Laporan	77.191.884	12	Laporan	Rp74.440.026,00	3	13.856.979	6	27.699.332	6	27.699.332	50	37,21
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	0	12 Laporan	451.879.502	12	Laporan	Rp1.670.835.000,00	3	348.334.400	6	691.730.500	6	691.730.500	50	41,40

2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	2,077,929,962	100%	423.387.153	100%	Persen	Rp441.482.800,00	25	162.921.189	59	253.216.886	59	253.216.886	590	57,36
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	222,980,000	1 Unit	38.964.617	1	Unit	Rp38.990.000,00	0.024	8.150.000	0,52	16.000.000	0,52	16.000.000	52	41,04
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan	12 Unit	1,572,640,000	12 Unit	258.945.536	27	Unit	Rp275.030.000,00	10	54.542.189	13	132.372.886	13	132.372.886	48	48,13

					1 Atau Lapangan	Perizinannya																
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	155,240,000	12 Unit	28.615.000	50	Unit	Rp28.620.000,00	8	1.400.000	11	6.015.000	11	6.015.000	22	21,02	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	127,069,962	1 Unit	96.862.000	1	Unit	Rp98.842.800,00	1	98.829.000	1	98.829.000	1	98.829.000	100	99,99	

2	15	2		Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	70.23 %	3,337,904,741	59,80 %	1.091.592.345	75	Persen	Rp5.059.290.333,00	0	656.705.135	0	1.184.254.726	0	1.184.254.726	0	23,41
2	15	2	2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	75%	794,000,000	39,36 %	151.952.300	50	Persen	Rp46.910.900,00	0 %	4.726.500	0%	8.438.500	0	8.438.500	0	17,99

2	1 5	2	2. 1 4	3	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Laporan	681,650 ,000	12 Laporan	140.399 .300	4	Laporan	Rp15.372. 900,00	1	3.276.5 00	2	5.288.5 00	2	5.288.5 00	50	34, 40
2	1 5	2	2. 1 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan	5 Laporan	112,350 ,000	1 Laporan	11.553. 000	1	Laporan	Rp31.538. 000,00	0, 25	1.450.0 00	0,5	3.150.0 00	1	3.150.0 00	50	9,9 9

					Trayek Kewenanga n Kabupaten /Kota	Orang dalam Trayek Kewenang an Kabupate n/Kota															
2	1 5	2	2. 1 6		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentas e ketersedia an Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	100%	87,000, 000	100%	59.350. 000	10 0	Persen	Rp15.000. 000,00	0 %	0	0%	0	0	0	0	0,0 0

2	1 5	2	2. 1 6	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate n/Kota	4 Doku men	66,000, 000	1 Doku men	59.350. 000	1	Doku men	Rp15.000. 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0 0
2	1 5	2	2. 0 5		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentas e Kendaraa n Wajib Uji yang Memenuhi Persyarata n Teknis dan Laik Jalan	100%	2,978,6 43,500	70%	880,290 ,045	10 0	Persen	Rp922.20 5.900,00	25	71.970. 185	50	269.51 5.626	50	269.51 5.626	50	29, 23
2	1 5	2	2. 0 5	1	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraa n Bermotor yang Tersedia	2%	100,000 ,000	1 Unit	198.200 .000	1	Unit	Rp399.56 9.900,00	0	0	0,3	100.04 0.500	0	100.04 0.500	30	25, 04

2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	29,700 Dokumen	1,611,542,000	4080 Unit	602.512.045	5850	Unit	476.312.000	1248	71.970.185	1578	169.475.126	1578	169.475.126	27	35,58
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45 Buah	351,800,000	9 Unit	79.578.000	1	Unit	46.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	15	2	2.03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	75%	1,337,178,531	59,37 %	258.379.076	63	Persen	Rp103.559.428,00	0 %	16.098.500	0%	30.921.000	0	30.921.000	0	29,86

2	15	2	2.03	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5 Unit	559.891.557	1 Unit	205.727.651	1	Unit	Rp50.843.928,00	0,25	16.098.500	0,5	29.371.000	1	29.371.000	50	57,77
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	19 Unit	275,030.400	5 Unit	52.651.425	3	Unit	Rp52.715.500,00	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000	0	2,94
2	15	2	2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	90%	922,158.371	57%	360.179.600	80	Persen	Rp1.060.640.313,00	35	411.268.500	36	415.318.500	36	415.318.500	45	39,16
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit	415,000.000	1 Unit	67.339.000	2	Unit	Rp174.325.500,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0,26

2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit	250,000,000	41 Unit	227.541.500	60	Unit	Rp761.437.013,00	30	411.268.500	30	413.518.500	30	413.518.500	50	54,31
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9 Unit	122,655,415	1 Unit	43.998.000	2	Unit	Rp31.633.800,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	1,42
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	115 Unit	134,502,956	30 Unit	21.301.100	80	Unit	Rp93.244.000,00	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0,97
2	15	2	2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,36 Indeks	3,340,761,900	0,39 Indeks	3.286.385.135	0.38	Indeks	Rp759.480.792,00	0	146.894.450	0	452.104.200	0	452.104.200	### ###	59,53

2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	25 Laporan	816,841,000	10 Laporan	452.804.000	25	Laporan	Rp178.866.508,00	0	0	22	169.459.000	22	169.459.000	88	94,74
2	15	2	2.06	16	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	121 Unit	368,921,000	25 Unit	2.798.693.000	25	Unit	Rp244.364.284,00	8	80.364.450	9	94.745.200	9	94.745.200	36	38,77

2	15	2	2.07		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	85%	119,450,000	70%	19.379.550	75	Persen	Rp23.497.000,00	0%	5.747.000	0%	6.347.000	0	6.347.000	0	27,01
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20 Laporan	23,000,000	5 Laporan	4.500.000	5	Laporan	Rp4.998.000,00	0	1.998.000	0	1.998.000	0	1.998.000	0	39,98
2	15	2	2.07	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	75 Laporan	73,450,000	10 Laporan	14.879.550	15	Laporan	Rp14.999.000,00	4	3.749.000	5	4.349.000	5	4.349.000	33	29,00
2	15	2	2.07	7	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	3 Dokumen	10.711.400	-	-	1	Dokumen	Rp3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

2	15	2	2.04		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100%	46,340,000	117,65 %	40.434.500	100	Persen	Rp9.268.000,00	25 %	0	50 %	1.609.900	1	1.609.900	1	17,37
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	46,340,000	12 Laporan	40.434.500	12	Laporan	Rp9.268.000,00	2	0	4	1.609.900	4	1.609.900	33	17,37
2	15	2	2.08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	87,78 %	665,519,300	84,34 %	827.050.000	85.56	Persen	Rp37.000.000,00	0 %	0	0%	0	0	0	### ###	0,00

2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	11 Laporan	640,919,300	1 Laporan	827.050.000	2	Laporan	Rp37.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	15	3			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	90%	134,566,666	11,12 %	38.964.500	50	Persen	1.348.497.900	5	5.716.500	8	57.876.700	8	57.876.700	16	4,29
2	15	3	2.03		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	90%	99,682,000	66,66 %	38.964.500	70	Persen	Rp19.722.200,00	0 %	1.700.000	0%	3.210.200	0	3.210.200	0	16,28

					Orang Perseorang an Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha																
2	1 5	3	2. 0 3	1	Fasilitasi Pemenuha n Persyarata n Perolehan Izin Usaha Penyelengg araan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorang an Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenanga n Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuha n Persyarata n Perolehan Izin Usaha Penyeleng garaan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseoran gan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenang an Kabupate n/Kota dalam Sistem Pelayanan	5 Doku men	24,982, 000	0 Doku men	27.944. 500	1	Doku men	Rp4.996.2 00,00	0	0	0	1.510.2 00	0	1.510.2 00	0	30, 23

2	1 5	3	2. 0 3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	74,700,000	1 Laporan	11.020.000	1	Laporan	Rp14.726.000,00	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	11,54
---	--------	---	--------------	---	---	--	--------------	------------	--------------	------------	---	---------	-----------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-------

2	1 5	3	2. 1 3		Kegiatan Pembangu nan dan Penerbitan Izin Pembangu nan dan Pengoperas ian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentas e Dermaga/ Shelter dan Fasilitas Perlengka pan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuha n	77%	319,280 ,000	68%	674.784 .614	50	Persen	Rp1.328.7 75.700,00	0 %	4.016.5 00	0%	54.666. 500	0	54.666. 500	0	4,1 1
2	1 5	3	2. 1 3	3	Pengoperas ian dan Pemelihara an Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang	5 Unit	138,000 ,000	1 Unit	29.693. 614	1	Unit	Rp229.99 9.800,00	0	1.350.0 00	0,3	51.550. 000	0	51.550. 000	30	22, 41
2	1 5	3	2. 1 3	2	Pembangu nan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	4 Unit	12,000, 000	3 Unit	618.450 .000	5	Unit	Rp1.047.2 76.500,00	0	2.666.5 00	0	3.116.5 00	0	3.116.5 00	0	0,3 0

Dari Tabel diatas dapat dilihat sampai dengan triwulan II tahun 2024 Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan target pada triwulan II sebesar 0 dan realisasi sebesar 0 karena pada tahun ini penilaian inspektorat hanya dilakukan pada semester II, tidak dilakukan pada semester I karena pada semester I hanya dilakukan penilaian mandiri. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 50% pada triwulan II.

Program ini memiliki 8 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan indikator kinerjanya adalah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu tepat mutu dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%. Kegiatan ini memiliki 4 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Telah melaksanakan rapat terkait pembuatan dokumen.
- Penginputan Renja 2025 pada Aplikasi SIPD.
- Penyusunan Dokumen Renja 2025 (Penyempurnaan Ranwal Renja 2025).

- Telah selesai mengikuti desk terakhir penyusunan Renja 2025.
- Melakukan beberapa penyesuaian pada dokumen rancangan akhir Renja 2025.
- Menyusun Dokumen Renja 2025 pada tahap penyelesaian Ranhir Renja 2025 yang diinput pada SIPD Dinas Perhubungan.

Faktor Penghambat :

- Adanya penyesuaian/perubahan data-data dari acuan Renstra.
- Adanya kendala Aplikasi di SIPD RI pada saat penginputan Renja, sehingga menyebabkan penginputan harus dilakukan berulang kali.
- Adanya beberapa perubahan sehingga berpengaruh pada penyesuaian dokumen penganggaran. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- Mempersiapkan data pendukung untuk pemenuhan syarat dokumen yang diminta oleh inspektorat untuk penilaian pada semester II karena pada semester I hanya dilakukan penilaian mandiri.

Faktor Penghambat:

- Masih belum terdapat faktor penghambat pada triwulan II karena pada tahun ini penilaian inspektorat hanya dilakukan pada semester II, tidak dilakukan pada semester I karena pada semester I hanya dilakukan penilaian mandiri.

Faktor Pendukung:

- Komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Perhubungan dengan Sekretaris terhadap progres peningkatan nilai IKKI.
- Adanya kontribusi penuh dari 2 (dua) sub bagian sekretariat Dinas Perhubungan.
- Etos kerja dan dedikasi yang tinggi dari unit kerja.
- Tersedianya data pendukung

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Tahun 2025 dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 0 Dokumen. Namun, capaian kinerja fisik telah dilakukan mencapai 25% pada triwulan II.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Melaksanakaaadminin koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penyusunan RKA Tahun 2025.
- Melaksanakan koordinasi dengan bidang maupun sekretariat untuk penginputan RKA Tahun 2025 pada aplikasi SIPD RI sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk anggaran DINAS PERHUBUNGAN.

Faktor Penghambat :

- Adanya beberapa kendala terkait penyesuaian belanja kegiatan dengan pagu indikatif yang banyak mendapat pengurangan anggaran.

Faktor Pendukung :

- Koordinasi yang terjalin baik antar operator SIPD Internal.
- Adanya koordinasi dan respon yang baik dari bidang-bidang dalam pembuatan
- RKA Manual sehingga bisa selesai dengan tepat waktu.
- Adanya sarana pendukung dalam mengerjakan RKA Manual.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 0 Laporan dan realisasi sebanyak 3 Laporan pada triwulan I.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Mempersiapkan bahan data capaian realisasi kinerja.

- Melaksanakan rapat pembahasan hasil realisasi kinerja.
- Asistensi dengan Tim Penyusunan Laporan Hasil Kinerja Daerah.
- Asistensi Penyusunan Laporan Bupati. Proses Penggandaan.

Faktor Penghambat:

- Adanya perbedaan persepsi IKK yang menghambat dalam proses penyusunan LPPD.
- Adanya berbagai revisi penyusunan LKJIP.

Faktor Pendukung:

- Tersediannya data pendukung dalam pemenuhan laporan.
- Berkonsultasi dengan pihak terkait.

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebanyak 2 Laporan dan realisasi sebanyak 2 Laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Koordinasi antar sub bagian perencanaan terkait persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja.
- Melakukan penyusunan laporan evaluasi rutin bulanan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- Melaksanakan koordinasi dengan operator bidang internal di DINAS PERHUBUNGAN terkait pelaporan rutin bulanan dan triwulanan.
- Pembuatan laporan triwulan I.
- Melaksanakan rapat internal DINAS PERHUBUNGAN terkait evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan I.
- Mengarsipkan dokumen-dokumen evaluasi kinerja.
- Penyerahan dokumen evaluasi kepada pihak terkait.
- Mengikuti kegiatan rapat asistensi pengisian simondalev.
- Pembuatan laporan triwulan II

Faktor Penghambat :

- Adanya keterlambatan penginputan simondalev karena belum tersedianya penginputan simondalev 2024.
- Adanya perubahan operator simondalev.
- Belum dapat diunduhnya keterisian simondalev karena simondalev 2024 masih belum sepenuhnya siap saat proses penginputan.

Faktor Pendukung :

- Adanya operator bidang internal di Dinas Perhubungan yang memudahkan proses penginputan simondalev 2024.
- Kerjasama yang baik antar sub bagian perencanaan maupun semua unit kerja lingkup Dinas Perhubungan sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar.
- Tersedianya data pendukung dalam pemenuhan laporan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerjanya adalah presentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%. Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target Triwulan 37 Orang/bulan dengan Realisasi 37 orang/bulan orang.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Persiapan Pelaksanaan atas Pembayaran Gaji ASN dan TPP ASN Dinas Perhubungan Kab. Banjar (Pembuatan Template dan Daftar Gaji) ub.Juni dan Gaji ke 13,TPP Mei dan TPP ke 13.
- Pelaksanaan atas Pembayaran Gaji berupa Input Data Sim Gaji, Payroll One
- Step Gaji, Aplikasi SIPD Penatausahaan ub.Juni Gaji ke 13,TPP Mei dan TPP 13

- Kepengurusan Berkas yang sudah TTD lengkap Ke BPKPAD Untuk Gaji ASN ub.Juni Gaji ke 13,TPP Mei dan TPP 13.

Faktor Penghambat:

- Untuk perhitungan Pajak TPP , maka di gabungkan antara perhitungan Pajak TPP Mei dan TPP ke 13

Faktor Pendukung :

- Melakukan Perhitungan TPP U.b Mei dan menyesuaikan perhitungan pajak yang di gabungkan TPP Bulan Mei dan Bulan Ke 13

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Laporan sub kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Faktor Penghambat:

- PPTK yang sering berubah sehingga pelaporan dapat dilakukan 3 bulan sekali

Faktor Pendukung :

- Data keuangan Yang Tersedia sudah di arsipkan dengan baik.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur dengan indikator jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada triwulan II sebanyak 0 Laporan dan realisasi sebanyak 0 laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Telah melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun Berupa Neraca, LRA dan Calk.

- Masih Melakukan Koordinasi laporan Keuangan Akhir Tahun Ke BPKPAD.
- Belum Melakukan Rekonsiliasi Barang.
- Penyesuaian Stock Barang.
- Keuangan masih belum terserap secara maksimal dikarenakan masih tahap proses E-Katalog.

Faktor Penghambat :

- SDM yang belum Memadai.
- Perubahan Format CALK.
- Belum Selesai Tahapan Penyusunan.
- Masih tahap proses E-Katalog

Faktor Pendukung:

- Data keuangan Yang Tersedia sudah di arsipkan dengan baik.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan indikator kinerjanya adalah persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD diukur dengan indikator jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada triwulan II sebanyak 6 Laporan dan realisasi sebanyak 6 laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Melaksanakan Pembuatan Laporan Penatausahaan Barang Pakai Habis.
- Realisasi Keuangan Belum Terserap dikarenakan masih tahap E-katalog.

Faktor Penghambat :

- Adanya Kendala dalam proses Pemesanan Di E-katalog sehingga proses rekap data terlambat.

- Adanya kendala pada pembayaran dikarenakan anggaran UP kurang memadai.

Faktor Pendukung :

- Adanya data pendukung yang lengkap sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar adanya SDM yang kompeten.

d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerjanya adalah persentase orang. Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 35%.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target pada Triwulan II sebanyak 15 orang dan realisasi sebanyak 5 orang.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Telah mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Membuat laporan tentang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan waktu, jadwal yang padat bisa membuat sulit mengikuti Bimtek.
- Kesulitan dalam memilih bidang Bimtek yang tepat/relevan dengan pekerjaan.

Faktor Pendukung :

- Bimtek yang Relevan dengan pekerjaan dapat meningkatkan minat untuk mengikuti.

- Fasilitas yang baik, termasuk lokasi yang mudah dijangkau, transportasi yang tersedia serta kemudahan registrasi dan fasilitas lainnya.
- Tersedianya anggaran untuk mengikuti Bimbingan Teknis

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah persentase paket dan laporan. Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyusunan laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target pada Triwulan II sebanyak 50% dan realisasi sebanyak 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembelian komponen Listrik/penerangan bangunan kantor.
- Membuat laporan pembelian komponen listrik/penerangan bangunan kantor.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bahan/barang yang sesuai keinginan.
- Jarak toko yang menjual bahan/barang yang jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan.

2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyusunan laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target pada Triwulan II sebanyak 100% dan realisasi sebanyak 100%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan.

- Membuat laporan pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bahan/barang yang sesuai keinginan.
- Jarak toko yang menjual bahan/barang yang jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan.

3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyusunan laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan II sebanyak 12 laporan dan realisasi sebanyak 6 laporan atau 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pemesanan jamuan untuk tamu.
- Membuat laporan pemesanan jamuan tamu.

Faktor Penghambat :

- Informasi yang tidak jelas atau tidak tepat mengenai waktu dan tujuan kunjungan dapat memperlambat proses penerimaan tamu.
- Keterbatasan dalam jumlah staf atau fasilitas untuk melayani tamu dapat menghambat proses penerimaan.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ruang pertemuan, peralatan presentasi, dan teknologi lainnya yang dibutuhkan oleh tamu tersedia dan berfungsi dengan baik.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyusunan laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 12 laporan dan realisasi sebanyak 6 laporan atau 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Membuat laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Faktor Penghambat :

- Proses administrasi yang lambat, seperti proses persetujuan atau izin yang diperlukan sebelum rapat dapat dilaksanakan.
- Kurangnya persiapan dalam hal data, informasi, atau materi presentasi yang diperlukan untuk mendukung diskusi dan pengambilan keputusan dalam rapat.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antara semua pihak yang terlibat.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan dengan indikator kinerjanya adalah persentase unit, dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyusunan laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 unit dan realisasi sebanyak 100%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Menentukan spesifikasi teknis kendaraan yang diperlukan, termasuk jenis kendaraan, kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, dan fitur khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional atau lapangan.
- Menentukan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan kendaraan, termasuk biaya akuisisi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.
- Melakukan pembelian kendaraan dinas operasional.

- Membuat laporan pembelian kendaraan dinas operasional.

Faktor Penghambat :

- Proses pengadaan yang melibatkan banyak tahapan dan persetujuan dari berbagai pihak sering kali memperlambat pelaksanaan.
- Terbatasnya jumlah penyedia kendaraan yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan bisa menjadi penghambat dalam mendapatkan kendaraan yang sesuai.
- Kebijakan yang berubah-ubah terkait pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas dapat menyebabkan ketidakpastian dan penundaan dalam proses pengadaan.

Faktor Pendukung :

- Alokasi anggaran yang cukup dan tepat waktu memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengadaan tanpa mengalami penundaan.
- Kebijakan dan regulasi yang mendukung pengadaan yang efisien dan efektif dapat mempermudah proses dan memberikan panduan yang jelas untuk setiap tahapannya.

2. Pengadaan Mebel

Penyusunan laporan pengadaan mebel dengan target pada Triwulan II sebanyak 20 unit dan realisasi sebanyak 100%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembelian barang-barang mebel.
- Membuat laporan pembelian barang-barang mebel.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bahan/barang yang sesuai keinginan.
- Jarak toko yang menjual bahan/barang yang jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.

- Ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan.

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyusunan laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target pada Triwulan II sebanyak 6 unit dan realisasi sebanyak 85%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembelian peralatan dan mesin lainnya
- Membuat laporan pembelian peralatan dan mesin lainnya

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bahan/barang yang sesuai keinginan.
- Jarak toko yang menjual bahan/barang yang jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok bahan/barang yang diinginkan.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpenuhinya jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi dengan indikator kinerjanya adalah persentase laporan, dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyusunan laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target pada Triwulan II sebanyak 12 laporan dan realisasi sebanyak 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembayaran tagihan listrik dan PDAM
- Membuat laporan pembayaran tagihan Listrik dan PDAM

Faktor Penghambat :

- Jika anggaran tidak dicairkan tepat waktu, pembayaran untuk tagihan listrik dan air bisa tertunda.

- Gangguan teknis dalam sistem pembayaran elektronik atau masalah dengan akses internet dapat menghambat proses pembayaran.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Penggunaan sistem pembayaran elektronik atau otomatis dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran tagihan.
- Penetapan jadwal pembayaran yang konsisten dan teratur memastikan bahwa tagihan selalu dibayar tepat waktu.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyusunan laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target pada Triwulan II sebanyak 12 laporan dan realisasi sebanyak 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pembayaran gaji PTT
- Belanja iuran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi non-ASN
- Belanja honor petugas pengelola kearsipan
- Membuat laporan pembayaran gaji PTT, Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta honor petugas kearsipan.

Faktor Penghambat :

- Jika anggaran tidak dicairkan tepat waktu, pembayaran untuk bisa tertunda.
- Jarak pengantaran LS sangat jauh

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Penetapan jadwal pembayaran yang konsisten dan teratur memastikan bahwa tagihan selalu dibayar tepat waktu.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpenuhinya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpenuhi dengan indikator kinerjanya adalah persentase unit, dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyusunan laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 unit dan realisasi sebanyak 100%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pemeliharaan dan perbaikan mobil dinas jabatan.
- Membuat laporan pemeliharaan dan perbaikan mobil dinas jabatan.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bengkel yang sesuai keinginan.
- Jarak bengkel yang sesuai terlalu jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok barang/sparepart yang diinginkan.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyusunan laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target pada Triwulan II sebanyak 27 unit dan realisasi sebanyak 90%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Membuat laporan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional dan lapangan.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari bengkel yang sesuai keinginan.
- Jarak bengkel yang sesuai terlalu jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok barang/sparepart yang diinginkan.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyusunan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan target pada Triwulan II sebanyak 25 unit dan realisasi sebanyak 50%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Belanja peralatan dan pemeliharaan personal komputer.
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga
- Membuat laporan belanja peralatan dan pemeliharaan personal komputer serta membuat laporan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga.

Faktor Penghambat :

- Sulitnya mencari toko yang sesuai keinginan.
- Jarak toko yang sesuai terlalu jauh.

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran.
- Ketersediaan stok barang/sparepart yang diinginkan.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penyusunan laporan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 unit dan realisasi sebanyak 100%.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Penilaian kondisi bangunan saat ini.
- Identifikasi kebutuhan perbaikan dan renovasi.
- Pembuatan rencana kerja dan anggaran biaya.

Faktor Penghambat :

- Kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat atau angin kencang, dapat menghambat pekerjaan di luar ruangan..
- Keterlambatan pengiriman bahan bangunan dan perlengkapan bisa menunda jadwal pekerjaan.
- Kekurangan tenaga kerja terampil atau pekerja yang sakit dapat mengurangi produktivitas dan memperlambat pekerjaan.

Faktor Pendukung :

- Rencana kerja yang terperinci dan jadwal yang realistis.
- Anggaran yang mencukupi dan dialokasikan dengan baik.
- Tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini memiliki 8 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan indikator kinerjanya adalah Presentase Perlengkapan jalan yang terpenuhi, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Triwulan II sebesar 48,13% dan realisasi sebesar 28,91%.

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota dengan target 2 unit dan realisasinya sebanyak 0 unit (Masih dalam proses pengerjaan).

Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Telah melaksanakan kajian kebutuhan Halte

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK

- Keterlambatan respon dari pihak penyedia
- Terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan perencanaan halte
- Kegiatan Proses pengerjaan sehingga mempengaruhi capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota .
- Tersedianya tempat untuk pembangunan halte.

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota

Melakukan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota tahun 2024, pada target Triwulan II telah tercapai dengan realisasi sebanyak 52 unit.

Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Menyiapkan telahan Staff untuk di teruskan ke pengguna anggaran.
- Setelah pengguna anggaran menyetujui melakukan pemesanan melalui E-Katalog .
- Melaksanakan pemesanan E-Katalog.
- Proses pekerjaan selesai menyiapkan berkas SPJ.
- Melaksanakan pemberkasan SPJ.

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK .
- Konfirmasi dengan penyedia terkait harga Satuan Standar Harga Barang berkesuaian dengan RAB.

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan percepatan proses pengerjaan fisik.

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Melakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan target 2 unit dan realisasinya sebanyak 0 unit (Masih dalam proses pengerjaan), Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Telah melaksanakan pendataan Prasarana jalan

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK .
- Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dilaksanakan di Triwulan III.

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
- Tersedianya sarana dan prasarana, data dukung hasil survey.

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Melakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan target 30 unit dan realisasinya sebanyak 0 unit (Masih dalam proses pengerjaan), Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Telah melaksanakan pendataan perlengkapan jalan

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK .
- Konfirmasi dengan penyedia terkait harga Satuan Standar Harga Barang berkesuaian dengan RAB.
- Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dilaksanakan di Triwulan III.

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- Tersedianya sarana dan prasarana, data dukung hasil survey.

b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota yaitu V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar dengan indeks 0,38 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerjanya adalah persentase jumlah laporan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota berupa 12 Laporan dengan target pada Triwulan II sebesar 50% dan Realisasi sebesar 50%.

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Triwulan II sebanyak 3 Laporan dan realisasi sebanyak 3 Laporan.

Tahapan pekerjaan (Fisik) yang telah dilakukan :

- Penyusunan agenda pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin maupun yang insidentil perlu dievaluasi secara berkala untuk penetapan plotting personil petugas Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat di lapangan.
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Keagamaan seperti Peringatan beberapa Ulama yang ada di Kabupaten Banjar, Pengamanan Keberangkatan Jama'ah Haji dan Kepulangannya, Pengamanan peringatan Hari Besar Islam.

Faktor Penghambat:

- Adanya Kegiatan dadakan sehingga Pengamanan dan rekayasa Arus Lalu lintas tidak maksimal;
- Banyak nya kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas sehingga perlu memakai Alat Untuk mengatur Lalu Lintas;
- Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dilakukan tanpa perencanaan/dadakan

Faktor Pendukung:

- Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Fasilitas Pendukung seperti alat alat pengatur Lalu lintas (Water Barrier & Traffic Cone);
- Pelaksanaan Skenario pengamanan sebelum kegiatan sehingga pada waktu pelaksanaan berjalan dengan lancar.

2. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada triwulan II yaitu sebanyak 1 Dokumen.

Tahapan pekerjaan (Fisik) yang telah dilakukan :

- pelaksanaan monitoring arus lalu lintas harian per triwulan

Faktor Penghambat:

- Laporan monitoring arus lalu lintas harian dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali per kegiatan Sehingga update laporan tidak bisa dilihat per triwulan;
- SDM kurang memadai

Faktor Pendukung:

- Pengawasan lalu lintas tetap dilaksanakan secara berkala setiap bulannya atau secara insidental apabila diperlukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas di lapangan.

3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pertahun sebanyak 1 Laporan. selama setahun dengan Realisasi sebesar 0% dan akan dilaksanakan pada Triwulan Berikutnya.

Faktor Penghambat:

- Belum ditetapkannya jadwal pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2024 sehingga di triwulan 2 belum terlaksana.

Faktor Pendukung:

- Koordinasi yang baik dengan instansi terkait terutama pihak Kepolisian Resort Banjar mengenai isu terkait yang akan diangkat dalam kegiatan Forum LLAJ nantinya.

4. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dengan target pada triwulan II yaitu 14 Buah.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pengadaan traffic cone(48 buah), water barrier(20 buah), pembayaran listrik traffic light (3 titik);

Faktor Penghambat:

- Target tahunan yang tidak sinkron dengan rincian pekerjaan dalam sub kegiatan yang dilaksanakan

Faktor Pendukung:

- Tersedianya daftar kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

5. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 Dengan Target pada triwulan II yaitu sebanyak 14 Laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan Keagamaan seperti peringatan Haul Ulama di Kabupaten Banjar, Hari Besar Islam, dan Keberangkatan Kepulangan Jama'ah Haji Asal Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat:

- Adanya pergeseran anggaran pada sub kegiatan dan target tahunan yang tidak sinkron dengan rincian pekerjaan dalam sub kegiatan yang dilaksanakan

Faktor Pendukung:

- Adanya laporan masyarakat dan isu-isu terkait mengenai permasalahan lalu lintas di lapangan yang memerlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas

c. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Pencapaian Target Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat yaitu jumlah dokumen Andalalin yang disetujui untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase objek wajib Andalalin yang mematuhi peraturan Andalalin 75 Persen. Dengan Target pada Triwulan II adalah 40% dengan Realisasi sebesar 35%.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Dengan Hasil keluaran dan sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil

Andalalin dengan target pertahun berjumlah 5 Laporan dengan realisasi pada Triwulan II berjumlah 1 laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk pelaksanaan hasil Penilaian Andalalin

Faktor Penghambat:

- Masih kurangnya SDM yang memenuhi persyaratan untuk peningkatan kompetensi penilai Andalalin

Faktor Pendukung:

- Adanya penawaran Bimtek maupun Diklat Teknis untuk peningkatan kompetensi penilai Andalalin dari Lembaga Swasta maupun Pusdiklat Perhubungan Darat

2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi target pertahunnya Pertahunnya sebanyak 15 Laporan target yang telah terealisasi sebanyak 5 Laporan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Pelaksanaan Pengawasan Dokumen Andalalin yang berlokasi di Kabupaten Banjar
- Melaksanakan Cek Lokasi Perihal Penapisan Standar teknis Dokumen Andalalin
- Melaksanakan Cek Lokasi perihal Pengajuan Izin Andalalin

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang memerlukan Andalalin ada kriteria tertentu untuk dapat ditetapkan sebagai Objek Wajib Andalalin
- Pengawasan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan arus lalu lintas tetap dilaksanakan secara berkala maupun secara insidentil sesuai kebutuhan di lapangan

Faktor Pendukung:

- Waktu Pelaksanaan telah terjadwal sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar
- Tersedianya anggaran untuk petugas/tim penilai Andalalin.

d. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Pencapaian Target Kinerja Kepala Seksi Keselamatan Operasional Pengendalian pada bidang lalu Lintas Perhubungan Darat yaitu pada triwulan II masih 0 dan Realisasi Masih 0.

Faktor penghambat

- Adanya Jadwal Kegiatan dalam waktu yang bersamaan sehingga jumlah personal yang dibutuhkan tidak mencukupi pada saat acara atau kegiatan kegiatan tertentu.

Faktor Pendukung

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di dukung oleh kerjasama TIM dan Manajemen operasional pengendalian lalu lintas yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas lapangan, Sumber Daya Manusia tenaga penunjang kegiatan bidang perhubungan (tenaga honorer/PTT) yang sigap dan cepat tanggap dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan

Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Target Sub Kegiatan pertahun adalah 1 dokumen dengan realisasi pada Triwulan II adalah 0% dan akan direalisasikan pada Triwulan IV.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan :

- Belanja Bahan Cetak Karcis untuk menunjang kegiatan tersebut

Faktor Penghambat :

- Penyusunan laporan dikerjakan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran

2. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Target Sub Kegiatan pertahun adalah 4 dokumen dengan realisasi pada Triwulan II yaitu 1 dokumen dengan realisasi 50% dikarenakan untuk realisasi akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan :

- ATK, Belanja bahan cover, belanja kegiatan bahan komputer untuk menunjang kegiatan tersebut

Faktor Penghambat :

- Aplikasi Perizinan Elektronik Berbasis Web yang digunakan Sering Mengalami gangguan (Error)

Faktor Pendukung :

Tersedianya Anggaran dan Prasarana Pendukung.

f. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Target Sub Kegiatan pertahun adalah 1 dokumen dengan realisasi pada Triwulan II adalah 0% dan akan direalisasikan pada Triwulan berikutnya.

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan alat, bahan dan tenaga survey

Faktor Pendukung :

- tersedianya anggaran

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini memiliki 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Target Sub Kegiatan pertahun adalah 4 dokumen dengan realisasi pada Triwulan II yaitu 1 dokumen dengan realisasi 50% dikarenakan untuk realisasi akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan :

- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor ATK

Faktor Penghambat :

- Aplikasi Perizinan Elektronik Berbasis Web yang digunakan Sering Mengalami gangguan (Error)

Faktor Pendukung :

- Tersedianya Anggaran dan Prasarana Pendukung

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Target Sub Kegiatan pertahun adalah 1 dokumen dengan realisasi pada Triwulan II adalah 0% dan akan direalisasikan pada Triwulan IV.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan :

- Belanja Bahan Cetak Karcis untuk menunjang kegiatan tersebut

Faktor Penghambat :

- Penyusunan laporan dikerjakan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran

- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dengan target 1 Dokumen dan realisasinya sebanyak 0 Dokumen (Masih dalam proses pengerjaan sebanyak 10 %). Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Sudah dilakukan Penandatanganan Surat Perintah Kerja

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK
- Terjadinya beberapa kali pergantian pihak penyedia karena penyedia susah dihubungi

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- Koordinasi Komunikasi yang baik antar pegawai Dinas Perhubungan dengan pihak penyedia.

2. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan Pembangunan pelabuhan sungai dan danau dengan target 5 unit dan realisasinya sebanyak 0 Unit (Masih dalam proses pengerjaan sebanyak 35 %). Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan :

- Menyurati Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk proses pekerjaan di mulai
- Pejabat pengadaan barang dan jasa menyurati penyedia untuk melakukan proses pengerjaan
- Penyedia menyiapkan RAB kemudian melakukan proses penawaran dan negosiasi
- Penandatanganan SPK
- Proses SPJ

Faktor penghambat :

- Terjadi keterlambatan dalam keluarnya SK PPK .
- Keterlambatan respon dari pihak penyedia

Faktor pendukung :

- Tersedianya anggaran Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- Tersedianya tanah untuk pembangunan dermaga dari hasil hibah

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Hasil Keluaran dari sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara Target Sub Kegiatan pertahun adalah 1 dokumen

dengan realisasi pada Triwulan II adalah 0% dan akan direalisasikan pada Triwulan III.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan :

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ,Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar , Pemeliharaan dermaga kec martapura (Murung,air santri)

Faktor Penghambat :

- Realisasi berdasarkan angkas dilakukan pada triwulan 3

Faktor Pendukung :

- Tersedianya anggaran

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Pemutakhiran Kinerja dan Penyesuaian Target

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi baik darat dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang disusun secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran

Untuk rumusan rencana kerja dan pendanaan SKPD tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III. 1 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												13.555.047.331	17.723.910.986				8.570.750.000	
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9.228.987.098	11.016.122.753				3.035.000.000	
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												33.569.000	36.966.000				55.000.000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	7,549,000	8.435.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	10,000,000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	11.146.000	13.657.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	20,000,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	4,870,000	4,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	10,000,000	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,004,000	10,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	15,000,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6.127.652.972	6.127.652.972				695.000.000
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	37 Orang/bula	37 Orang/bula	100 Persen	100 Persen	6.009.473.972	6.009.473.972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	570,000,000	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Dokumen	500 Dokumen	100 Persen	100 Persen	111.780.000	111.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	115,000,000	

							SKPD																
2	15	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,399,000	8.802.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	10,000,000	
2	15	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										7.200,000	7.200,000						20,000,000	
2	15	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	7.200,000	7.200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	20,000,000	
2	15	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30,000,000	30,000,000						200,000,000	
2	15	01	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	15 Orang	15 Orang	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	200,000,000	
2	15	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										208.885.300	208.885.300						525,000,000	
2	15	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	11.369.300	20.298.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	10,000,000	
2	15	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	60,000,000	
2	15	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	2 Paket	2 Paket	100 Persen	100 Persen	20.604.000	20.604.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	30,000,000	
2	15	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	9.412.000	14.024.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	15,000,000	
2	15	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	7.500,000	10.750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	10,000,000	

						Tamu											Umum					
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	160,000,000	287.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	400,000,000	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											614.922.000	2.175.624.935					290.000,000
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	4 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	492.610.000	2.002.724.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	80,000,000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	20 Unit	21 Unit	100 Persen	100 Persen	48.624.000	56.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	120,000,000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	6 Unit	13 Unit	100 Persen	100 Persen	73.688.000	116.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	90,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.745.275.026	1.745.275.026					720,000,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	74.440.026	74.440.026	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	150,000,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	1.670.835.000	1.670.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	570,000,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											441.482.800	517.842.800					530,000,000
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	38,990,000	38,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	40,000,000	

2	15	01	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	27 Unit	31 Unit	100 Persen	100 Persen	275.030.000	351.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	300,000,000
2	15	01	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	50 Unit	50 Unit	100 Persen	100 Persen	28.620.000	28,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	40,000,000
2	15	01	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Martapura, Semua Kelurahan	71 indeks	76 indeks	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	98.842.800	98.842.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKKI Perangkat Daerah	78 indeks	150,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											2.977.562.333	5.059.290.333				2,324,172,568
2	15	02	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											1.060.640.313	1.729.475.613				226,312,368
2	15	02	2	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 persen	75 persen	2 Unit	3 Unit	80 Persen	80 Persen	174.325.500	237.164.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	250,000,000
2	15	02	2	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	60 Unit	128 Unit	80 Persen	80 Persen	761.437.013	1.367.433.313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	600,000,000
2	15	02	2	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	70 persen	2 Unit	2 Unit	80 Persen	80 Persen	31.633.800	31.633.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	70,000,000
2	15	02	2	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rasio konektivitas		70 persen	70 persen	80 Unit	80 Unit	80 Persen	80 Persen	93.244.000	93.244.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	160,000,000
2	15	02	3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											103.559.428	103.559.428				280,000,000
2	15	02	3	07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Sarana Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rasio konektivitas		70 persen	70 persen	1 Unit	1 Unit	63 persen	63 persen	50.843.928	50.843.928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	220,000,000
2	15	02	3	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang	Rasio konektivitas		70 persen	70 persen	3 Unit	3 Unit	63 persen	63 persen	52.715.500	52.715.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	75,16 persen	60,000,000

[illegible]

2	15	02	2.06	14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas	-12,5 Persen	-12,5 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,38 indeks	0,38 indeks	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	70.000.000
2	15	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas	-12,5 Persen	-12,5 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0,38 indeks	0,38 indeks	4.996.000	4.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	12.750.000
2	15	02	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Rasio konektivitas	-12,5 Persen	-12,5 Persen	25 Dokumen	25 Dokumen	0,38 indeks	0,38 indeks	244.364.284	1.111.230.284	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	250.000.000
2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas	-12,5 Persen	-12,5 Persen	25 Laporan	10 Laporan	0,38 indeks	0,38 indeks	178.866.508	533.852.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	350.000.000
2	15	02	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										23.497.000	23.497.000					40.000.000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rasio konektivitas	0,39 indeks	0,39 indeks	5 Laporan	5 Laporan	75 Persen	75 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	10.000.000
2	15	02	2.07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Andalalin	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Rasio konektivitas	0,39 indeks	0,39 indeks	15 Laporan	15 Laporan	75 Persen	75 Persen	14.999.000	14.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	20.000.000
2	15	02	2.07	07	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Rasio konektivitas	0,39 indeks	0,39 indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	75 Persen	75 Persen	3.500.000	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	10.000.000
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										37.000.000	37.000.000					0

2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio konektivitas	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 indeks	0,39 indeks	2 Laporan	2 Laporan	85,56 Persen	85,56 Persen	37.000.000	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39 indeks	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											46.910.900	127.910.900				250.000.000
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas		28,50 Persen	28,50 Persen	1 Laporan	1 Laporan	50 Persen	50 Persen	31.538.000	31.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	29,96 Persen	50.000.000
2	15	02	2.14	03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio konektivitas		28,50 Persen	28,50 Persen	4 Unit	4 Unit	50 Persen	50 Persen	15.372.900	36.372.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	29,96 Persen	200.000.000
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											15.000.000	15.000.000				30.000.000
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas		28,50 Persen	28,50 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	29,96 Persen	30.000.000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											1.348.497.900	1.648.497.900				1.710.000.000
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha											19.722.200	319.722.200				50.000.000

2	15	03	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio konektivitas	50 persen	50 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	70 persen	70 persen	4.996.200	304.996.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	29,96 persen	20.000.000
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas	50 persen	50 persen	1 Laporan	1 Laporan	70 persen	70 persen	14.726.000	14.726.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	29,96 persen	30.000.000
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau										1.328.775.700	1.328.775.700	1.660.000.000			
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Rasio konektivitas	50 persen	50 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	70 persen	70 persen	51.499.400	51.499.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	29,96 persen	60.000.000
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Rasio konektivitas	50 persen	50 persen	5 Unit	5 Unit	70 persen	70 persen	1.047.276.500	1.047.276.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	29,96 persen	1.200.000.000

2	15	03	2.1 3	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Rasio konektivitas		50 persen	50 persen	1 Unit	1 Unit	70 persen	70 persen	229.999.800	229.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	29,96 persen	400.000.000
TOTAL																13.555.047.331	17.723.910.986					8.570.750.000

3.2 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar Rp. 4.217.978.500,- (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar, dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

Tabel III.2 Rincian Perubahan Pagu Indikatif

No	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum		Sesudah		Bertambah / Berkurang
			Target	Jumlah	Target	Jumlah	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp11.146.000	4 Dokumen	Rp13.477.000	Rp2.331.000
2	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp6.399.000	1 Laporan	Rp8.110.000	Rp1.711.000
3	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.369.300	1 Paket	Rp20.804.300	Rp9.435.000
4	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp9.412.000	1 Paket	Rp14.024.500	Rp4.612.500
5	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp7.500.000	12 Laporan	Rp10.750.000	Rp3.250.000
6	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp160.000.000	12 Laporan	Rp287.500.000	Rp127.500.000

No	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum		Sesudah		Bertambah / Berkurang
			Target	Jumlah	Target	Jumlah	
7	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp492.610.00 0	7 Unit	Rp1.977.610.0 00	Rp1.485.000.0 00
8	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp48.624.000	27 Unit	Rp56.021.000	Rp7.397.000
9	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp73.688.000	25 Unit	Rp116.875.00 0	Rp43.187.000
10	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Rp275.030.00 0	13 Unit	Rp351.390.00 0	Rp76.360.000
11	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5850 Unit	Rp476.312.00 0	5850 Unit	Rp499.372.70 0	Rp23.060.700
12	2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	Rp15.372.900	12 Laporan	Rp96.372.900	Rp81.000.000

No	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum		Sesudah		Bertambah / Berkurang
			Target	Jumlah	Target	Jumlah	
14	: 2.15.03.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp4.996.200	1 Dokumen	Rp304.996.200	Rp300.000.000
15	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp9.268.000	12 Laporan	Rp18.768.000	Rp9.500.000
16	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	Rp301.254.000	12 Laporan	Rp378.984.000	Rp77.730.000

No	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Sebelum		Sesudah		Bertambah / Berkurang
			Target	Jumlah	Target	Jumlah	
17	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	25 Dokumen	Rp244.364.284	25 Dokumen	Rp1.136.430.284	Rp892.066.000
18	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	25 Laporan	Rp178.866.508	25 Laporan	Rp383.866.508	Rp205.000.000
19	2.15.01.2.01.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	Rp174.325.500	2 Unit	Rp237.164.500	Rp62.839.000
20	2.15.01.2.01.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Unit	Rp761.437.013	60 Unit	Rp1.367.436.313	Rp605.999.300
21	2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Dibangun	5 Unit	Rp1.047.276.501	7 Unit	Rp1.247.276.501	Rp200.000.000
						Total	Rp4.217.978.500

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, perubahan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel III.3 Alasan Perubahan Anggaran Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya atau perlunya bahan laporan yang harus disiapkan, sehingga perlunya bahan pendukung yang harus tersedia
2.	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya atau perlunya bahan laporan yang harus disiapkan, sehingga perlunya bahan pendukung yang harus tersedia
3.	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kondisi dilapangan banyaknya lampu penerangan pada halaman kantor yang usang atau rusak termakan oleh waktu
4.	2.15.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.
5.	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Banyaknya Kunjungan Tamu Pada Dinas Perhubungan serta Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.
6.	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
7.	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perlunya Penambahan kendaraan mobil derek untuk mengakomodir kegiatan pada Dishub
8.	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Penambahan kursi tunggu tamu karena tidak tersedia kursi tunggu tamu dikarenakan rusak berat
9.	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belum tersedianya alat penunjang survey serta pendukungnya yang mumpuni dalam penghimpunan data
10	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingginya tingkat penggunaan kendaraan operasional lapangan untuk kebutuhan survei dan pengawalan sementara umur kendaraan yang sudah tua memerlukan pemeliharaan yang lebih. Anggaran pemeliharaan untuk mobil operasional lapangan yang ada tidak mencukupi maka dari itu terjadi penyesuaian kebutuhan anggaran guna menunjang kelancaran urusan.
11	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dalam rangka menunjang kegiatan pengujian kendaraan bermotor maka Alat yang digunakan juga harus direhabilitasi secara berkala.
12	2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dalam rangka penunjang terselenggaranya angkutan pengumpan untuk pemenuhan fasilitas penyelenggaraan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan diselenggarakan masuk ke kota Martapura

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Terintegrasi Secara Elektronik	
13	2.15.03.2.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam rangka penunjang pemenuhan persyaratan usulan pengajuan pembangunan fasilitas dermaga pada sungai martapura
14	2.15.02.2.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Perubahan anggaran pada sub kegiatan ini ialah untuk mengakomodasi kegiatan yang belum dianggarkan pada rencana kerja murni yaitu kajian potensi retribusi parkir di Kabupaten Banjar yang memiliki tujuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah kabupaten dalam hal penerimaan retribusi parkir dan potensi retribusi parkir dapat menjadi acuan untuk menetapkan proyeksi PAD dari sektor retribusi parkir di tahun yang Akan datang.
15	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kurang memadainya alat komunikasi pada setiap anggota yang ada dilapangan sehingga menghambat kinerja dalam rangka kegiatan pengamanan dan lainnya
16	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam	1. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan untuk

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	ruas jalan kabupaten terutama marka jalan. 2. belum sepenuhnya terpelihara/ pengecatan median dan trotoar pada wilayah Kota Martapura sehingga membuat penampilan kota Martapura Kurang bagus 3. Kurangnya atau terbatasnya alat pengamanan acara seperti Traffic Cone dan Water Barrier
17	2.15.02.2.06.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Perlunya penambahan kegiatan untuk menunjang kegiatan pengamanan pada kegiatan hari Natal dan Tahun Baru serta Posko Pengamanan Haul
18	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pemenuhan usulan musrembang untuk menunjang kegiatan sekolah (fasilitas Pendukung angkutan umum)
19	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kurangnya Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan Kabupaten sehingga perlunya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dalam rangka menunjang penurunan angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Banjar dalam Hal Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan seperti Rambu Jalan, RPPJ dan Cermin Tikung.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 serta prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Banjar 2024

Adapun catatan penting yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi jalan untuk meningkatkan konektivitas darat.
2. Melakukan pendataan jumlah dan kondisi fasilitas perhubungan yang tersedia.
3. Meningkatkan capaian kinerja outcome dan output, sehingga seluruh target kinerja tahun 2024 dapat tercapai seluruhnya.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya, dengan berlandaskan semangat untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, maka telah disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

Program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan, dalam rangka untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mencapai apa yang telah direncanakan, sesuai dengan program yang di

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banjar untuk lima Tahun ke depan.

perencanaan yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2024 dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika, yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421)
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor *61 Tahun 2019* tentang Rancana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor *65 Tahun 2010* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor *12 Tahun 2017* tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.;
- p. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 05);

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
- v. Peraturan Bupati Banjar nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar;
- w. Surat Edaran Bupati Nomor 050/667/PPE-Bappeda Litbang/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di Tahun 2024 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati / Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Banjar.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 ini sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Rencana Kerja tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan dilaksanakan di Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar di Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA ,STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN JUNI 2024

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap triwulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan setiap triwulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran yang merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Triwulan II Tahun 2024 program ini realisasi fisik sebesar 57.02% dan realisasi keuangan sebesar 44.60%. Dalam program ini ada 7 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri atas 4 Sub Kegiatan yakni:

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah, realisasi fisik sebesar 92.00 % ,realisasi keuangan 91.60 %. Capaian Kinerja 100 %.Faktor pendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini tersedianya aplikasi pendukung kerja, Komitmen tinggi petugas untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik;

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, realisasi fisik sebesar 78.33 % dan realisasi keuangan 63.43 %.capaian kinerja 100 % .lancarnya koordinasi penyusunan Dokumen RKA karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, realisasi fisik sebesar 40 % dan realisasi keuangan 54.80 %.capaian kinerja 0.0 % .capaian masih 0 % karena Dokumen Perubahan RKA akan disusun pada triuwulan III.
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 91.60 %.capaian kinerja 100 % .lancarnya koordinasi penyusunan Dokumen RKA karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, realisasi fisik sebesar 29 % dan realisasi keuangan 0.0 %.capaian kinerja 0.0 % . capaian masih 0 % karena Dokumen Perubahan DPA akan disusun pada triuwulan III;
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi fisik sebesar 70 % dan realisasi keuangan 50 %.capaian kinerja 50 %,terpenuhinya penyusunan

laporan Capaian Kinerja yang tepatwaktu karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi fisik sebesar 45.00 % dan realisasi keuangan 25 %.cpaian kinerja sebesar 50 %.Subkegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya Kompetensi memadai serta komitmen yang tinggi dari para ASN;

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas 2 sub kegiatan yakni :

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi fisik sebesar 50 % dan realisasi keuangan 34.07 %.lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan karena Komitmen tinggi petugas untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik serta adan Aplikasi pendukung dan Petugas Operator yang teliti, cepat dan tepat waktu;

- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi fisik sebesar 50 % dan realisasi keuangan 32.77 %.lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan karena Komitmen tinggi petugas untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik serta adan Aplikasi pendukung dan Petugas Operator yang teliti, cepat dan tepat waktu;

- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 47.37 %. Yang menghambak koordinasi dan penyusunan laporan keuangan karena adanya perbedaan realisasi dengan bidang,

dikarenakan pencatatan kartu kendali di bidang tidak sesuai/sinkron dengan realisasi yang sebenarnya sudah dibayar;

- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi fisik sebesar 50.00 % dan realisasi keuangan 0.0 %. Capaian kinerja sebesar 33.33 %. Subkegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya Kompetensi memadai serta komitmen yang tinggi dari para ASN;
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah, yang terdiri atas 1 Sub kegiatan yakni :
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, realisasi fisik sebesar 50 % dan realisasi keuangan 0.0 %.
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas 1 Sub kegiatan yakni :
 - 1.4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi fisik sebesar 0.0 % dan realisasi keuangan 0.0 %. Bimbingan teknis belum terealisasi karena menurut rencana Aksi tertjadwal di triwulan III ;
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas 6 Sub Kegiatan
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi fisik sebesar 98.92 % dan realisasi keuangan 98.92 %;
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik sebesar 95.94 % dan realisasi keuangan 95.94 %;
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi fisik sebesar 86.4 % dan realisasi keuangan 86.40 %;
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,

realisasi fisik sebesar 11.43 % dan realisasi keuangan 11.43 %;

1.4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi fisik sebesar 0.0 % dan realisasi keuangan 0.0 % karena sebagian rapat dilaksanakan di masing-masing sub bagian dan menyesuaikan frekwensi kunjungan yang sebagian diterima dan jamuan tamu;

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi fisik sebesar 70.21% dan realisasi keuangan 70.21 % karena Prosentase capaian output yang melampaui target dalam perhitungan target kinerja output karena anggaran untuk satu kali perjalanan dinas yang digunakan untuk keberangkatan 2 (dua) orang, memungkinkan untuk dihadiri oleh 1 (satu) orang saja dan dipergunakan untuk perjalanan dinas dengan intensitas lebih banyak, Termasuk penggunaan sarana transportasi yang lebih murah sehingga memungkinkan jumlah output yang lebih banyak;

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 Sub Kegiatan yakni :

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 100 % ;

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik sebesar 40.62 % dan realisasi keuangan 40.62 %;

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi fisik sebesar 58 % dan realisasi keuangan 42.12 %;

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , terdiri atas 4 Sub Kegiatan yakni :

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik sebesar 55.81 % dan realisasi keuangan 58.81 % Capaian ini dikarenakan adanya efisiensi dan kondisi kendaraan yang belum memerlukan pemeliharaan, kendaraan belum memerlukan penggantian suku cadang;

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik sebesar 49.45 % dan realisasi keuangan 49.45 % hal ini karena karena ternyata peralatan kerja yang masih bagus dan belum diperlukan perbaikan dan beberapa kendaraan belum memerlukan penggantian suku cadang;

1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik sebesar 40.72 % dan realisasi keuangan 40.72 % capaian ini hal ini karena karena ternyata peralatan kerja yang masih bagus dan belum diperlukan perbaikan;

1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi fisik sebesar 0.0 % dan realisasi keuangan 0.0 %;

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Masih kurangnya komitmen pejabat pengelola informasi
- Keterbatasan kuantitas pranata humas
- Anggota KIM kebanyakan kurang memahami IT
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan Informasi kepada masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan

❖ Tindak Lanjut

- Meningkatkan komitmen SKPD terhadap pengelola PPID yang lebih baik
- Meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan
- Melakukan kemitraan dengan media informasi
- Membina dan melanjutkan kerjasama dengan masyarakat (kelompok informasi masyarakat dan kelompok budaya)
- Fasilitasi edukasi pengelola informasi komunikasi publik Kabupaten/Kota dan PPID pembantu

Dalam program ini ada 1 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan terdapat 5 Sub Kegiatan didalamnya yakni :

- 2.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, realisasi fisik sebesar 45.00 % dan realisasi keuangan 0.0 %;
- 2.1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, realisasi fisik sebesar 60.0 % dan realisasi keuangan 19.07 %;
- 2.1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, realisasi fisik sebesar 85 % dan realisasi keuangan 81.18 %;
- 2.1.4. Pelayanan Informasi Publik, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 1.91 %;
- 2.1.5. Layanan Hubungan Media, realisasi fisik sebesar 55 % dan realisasi keuangan 31.02 %;

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kebijakan pusat agar kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan SPBE
- Belum tersedianya seluruh dokumen arsitektur SPBE
- Terbatasnya SDM yang menguasai SPBE

❖ Tindak Lanjut

- Mengajukan kegiatan pengadaan infrastruktur TIK
- Penataan penganggaran infrastruktur TIK antar SKPD
- Upgrade atau meningkatkan maintenance infrastruktur TIK yang ada
- Kerjasama antar SKPD terkait untuk penyediaan fasilitas sistem aplikasi

- Mengoptimalkan kerja tim SPBE

Meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan

Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- 3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam kegiatan ini ada 2 Sub Kegiatan yakni :

- 3.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 99.90 %. Subkegiatan ini terlaksana dengan baik karena pengadaan barang/jasa dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 3.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 95.31 %, subkegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam penanganan jaringan dan pemasangan Fiber Optik serta pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 3.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 4 sub Kegiatan :

- 3.2.1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, realisasi fisik sebesar 37.50 % dan realisasi keuangan 25 %;

- 3.2.2. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, realisasi fisik sebesar 25 % dan realisasi keuangan 25 %;

- 3.2.3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, realisasi fisik sebesar 68 % dan realisasi keuangan 95.53 %;

- 3.2.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, realisasi fisik sebesar 28 % dan realisasi keuangan 25 %;

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- SKPD tidak tepat waktu dalam mengumpulkan Data dan Informasi Statistik Sektoral
- Pengelolaan Data Statistik Sektoral SKPD belum memenuhi Standar - SKPD belum secara optimal mendapatkan informasi tentang pengelolaan data statistik
- Jenis data SKPD setiap tahunnya ada yang berubah/ adanya kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta format

❖ Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan Keterampilan/wawasan bagi pengelola data melalui sosialisasi/webinar/workshop terhadap SKPD
- Penerbitan peraturan kepala daerah tentang satu data Kabupaten Banjar
- Sosialisasi prinsip satu data Kabupaten Banjar

Dalam program ini ada 1 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, realisasi fisik sebesar 35 % dan realisasi keuangan 0.0 % subkegiatan ini dapat berjalan karena adanya Penerbitan peraturan kepala daerah tentang satu data kabupaten Banjar;

4.1.2. Membangun Metadata Statistik Sektoral, realisasi fisik sebesar 35.00 % dan realisasi keuangan 0.0 % .subkegiatan ini terkendalan karena Jenis data SKPD setiap tahunnya ada yang berubah/ adanya kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta format ;

4.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor, realisasi fisik sebesar 90.00 % dan realisasi keuangan 9.23 % .

4.1.4. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, realisasi fisik sebesar 45 % dan realisasi keuangan 0.0 %

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

- ❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja dalam program ini
 - Sumber daya manusia masih terbatas (kuantitas maupun kualitas)
 - Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara sementara masih kurang
 - Sumber daya manusia bersertifikat standar Badan Siber dan Sandi Negara masih belum ada di Kalimantan Selatan (minimal seharusnya 2 orang/ Kabupaten)
 - Kabupaten masih belum fokus menangani Keamanan Informasi
- ❖ Rencana Tindak Lanjut
 - Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan pembinaan Keamanan Informasi di kabupaten Banjar
 - Mengupayakan sertifikasi bagi petugas/auditor
 - Meningkatkan jumlah sandiman Kabupaten Banjar
 - Meningkatkan sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi
 - Sarana Keamanan Informasi akan dipenuhi/ditingkatkan

Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 4 Sub Kegiatan

- 5.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 95 % dan realisasi keuangan 90.19 %;
- 5.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 95 % dan realisasi keuangan 92.95 %;
- 5.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, realisasi fisik sebesar 15 % dan realisasi keuangan 0.0 %;
- 5.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 15 % dan realisasi keuangan 0.0 %;

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 5 % dan realisasi keuangan 0 %;

Secara keseluruhan realisasi fisik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebesar 94.18 % dan realisasi keuangan sebesar 63.49 %. Capaian keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ini, masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan oleh adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Standar Satuan Harga, sehingga banyak rasionalisasi dan aturan-aturan yang menyebabkan pencairan dana kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakala kegiatan yang telah dirancang.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra masih di sesuaikan dengan kemampuan keuanagan Daerah yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar TA.2024.

Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasinya adalah mempercepat Proses kegiatan dan pengadaan sehingga bisa lebih cepat menyerap anggaran.apabila ada pekerjaan resiko yang tidak dapat dilaksanakan dan anggaran tidak dapat diserap, maka diusulkan untuk dilakukan perubahan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dengan penyesuaian penganggaran.

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Triwulan II (Januari s/d Juni)TA. 2024
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan					Indeks SPBE		3.00								3.50				0.00		Kepala Dinas
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18,047,453,930		6,740,832,981		2,994,772,499		-		-		9,735,605,480		53.9		
	216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
	21601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terselenggaraanya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi informatika, Statistik	skor	89	8,872,445,590	89	1,654,899,141	89	2,151,844,099	89	-	89	-	89	3,806,743,240	100	42.9	Sekretaris	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
					dan Persandian																
		216012.011	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	59,931,400	100	22,310,900	100	20,700,000	100	-	100	-	100	43,010,900	100	71.8	Sekretaris
		216012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	21,421,900	3	7,621,900	3	12,000,000					3	19,621,900	100	91.6	Kabubag Perencanaan
		216012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	13,509,500	1	6,709,000	1	1,860,000					1	8,569,000	100	63.4	Kabubag Perencanaan
		216012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	5,000,000	1	1,250,000	1	1,490,000					1	2,740,000	100	54.8	Kabubag Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD																
		216012.01104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	2,980,000	1	1,600,000					1	4,580,000	100	91.6	Kabubag Perencanaan
		216012.01105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1		1	-					1	-	100	-	Kabubag Perencanaan
		216012.01106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	4	5,000,000	4	2,500,000	4	2,500,000					4	5,000,000	100	100	Kabubag Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD																
		216012.01107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5,000,000	4	1,250,000	4	1,250,000					4	2,500,000	100	50.00	KabubB ag Perencanaan
		216012.022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	% Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	4,939,203,692	100	752,650,169	100	928,808,487	100	-	100	-	100	1,681,458,656	100	34.04	Sekretaris
		216012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	28	4,814,576,692	28	726,403,169	28	913,848,487					28	1,640,251,656	100	34.07	Kasubb ag Keuangan dan Aset
		216012.0203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	114,120,000	1	22,440,000	1	14,960,000					1	37,400,000	100	32.77	Kasubb ag Keuangan dan Aset

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		216012.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	3,000,000	7	-	7	-					7	-	100	-	kasubbag umpeg
		216012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	persen	100	40,000,000	100	40,000,000	100	-	100	-	100	-	100	40,000,000	100	100	Sekretaris
		216012.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	40,000,000	20	40,000,000	20	-					20	40,000,000	100	100	kasubbag umpeg
		216012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	% Terasilitasi penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	persen	100	1,107,818,000	100	231,287,686	100	663,871,567	100	-	100	-	100	895,159,253	100	80.80	sekretaris
		216012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,006,000	1	-	1	9,898,000					1	9,898,000	100	98.92	kasubbag umpeg

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		216012.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	526,480,000	1	-	1	505,130,000					1	505,130,000	100	95.94	kasubbag umpeg
		216012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34,932,000	1	500,000	1	29,680,500					1	30,180,500	100	86.40	kasubbag umpeg
		216012.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	29,840,000	1	1,320,000	1	2,092,000					1	3,412,000	100	11.43	kasubbag umpeg
		216012.0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	13,000,000	12	-	12	-					12	-	100	-	kasubbag umpeg
		216012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	493,560,000	12	229,467,686	12	117,071,067					12	346,538,753	100	70.21	sekretaris
		216012.0608	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang Pelayanan	persen	100	2,363,392,498	100	529,164,761	100	463,994,970	100	-	100	-	100	993,159,731	100	42.02	sekretaris

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
					Umum Kantor																
		216012.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,000,000	12	1,000,000	12	-					12	1,000,000	100	100	kasubbag umpeg
		216012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190,105,998	12	48,371,281	12	28,844,114					12	77,215,395	100	40.62	kasubbag umpeg
		216012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,172,286,500	12	479,793,480	12	435,150,856					12	914,944,336	100	42.12	kasubbag umpeg
		216012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	persen	100	359,100,000	100	79,485,625	100	74,469,075	100	-	100	-	100	153,954,700	100	42.87	sekretaris

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		216012.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	38,990,000	1	17,530,000	1	5,400,000					1	22,930,000	100	58.81	kasubbag umpeg
		216012.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	240,480,000	16	55,125,625	16	63,784,075					16	118,909,700	100	49.45	kasubbag umpeg
		216012.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	66	29,750,000	66	6,830,000	66	5,285,000					66	12,115,000	100	40.72	kasubbag umpeg
		216012.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	49,880,000	1	-	1	-					1	-	100	-	kasubbag umpeg

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														-				
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik				Persentase tindak lanjut aduan yang ditangani dengan cepat sesuai dengan SOP	%	17.86		17.86		17.86		17.86		17.86		17.86	-	100	Kepala Dinas	
		21602	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Terlaksananya penyebaran Informasi dan Komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	%	71	4,290,199,000	71	813,379,800	71	622,198,000	71	-	71	-	71	1,435,577,800	100	33.46	Kabid IKP
				Meningkatnya Diseminasi penyebaran informasi dan program pemerintah	Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas pemerintah	%	100		100		100		100		100		100	-	100		
		21602.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah sesuai prinsip keterbukaan	% tersusunya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	%	100	4,290,199,000	100	813,379,800	100	622,198,000	100	-	100	-	100	1,435,577,800	100	33.46	Kabid IKP

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Informasi Publik	Kabupaten Banjar																
		216022.0102	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	37,800,000	12	-	12	-					12	-	100	-	Seksi Pengelolan opini Publik
		216022.0104	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	54,025,000	12	1,500,000	12	8,800,000					12	10,300,000	100	19.07	Seksi Pengelolan Media Informasi dan Komunikasi Publik
		216022.0105	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	214,230,000	12	52,046,800	12	121,863,000					12	173,909,800	100	81.18	Seksi Pengelolan Media Informasi dan Komunikasi Publik
		216022.0106	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	27,859,000	1	533,000	1	-					1	533,000	100	1.91	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik

TUJUAN	SASARAN	KO DE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SAT UAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENAN GGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		2 16 02 2.0 1 07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Laya nan	28	3,877,8 90,000	28	740,70 0,000	28	485,82 0,000					28	1,226,5 20,000	100	31 .6 3	Seksi Hubung an Media dan Layanan Informa si Publik
		2 16 02 2.0 1 12	Penyelenggar aan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya a Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemina sikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendisemin asikan Informasi Program atau Kebijakan	Dok ume n	2	78,395, 000	2	18,600, 000	2	5,715,0 00					2	24,315, 000	100	31 .0 2	Seksi Pengelol aan opini Publik
	Meningkatnya kualitas infrastru ktur teknologi informasi dan komuni kasi dalam pelayanan publik				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100		100	-	100		Kepala Dinas

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		21603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terimplemen- tasinya Layanan SPBE (Layanan publik dan Layanan administrasi) secara elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggara- kan secara online dan terintegrasi	%	44.71	4,693,777,240	44.71	4,256,659,240	44.71	205,926,000	44.71	-	44.71	-	44.71	4,462,585,240	100	95.07	Kabid Penyele- nggaraa n E-Gov
				Meningkatny a Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangka n	%	48.15		48.15		48.15		48.15		48.15	-	100.00				
		216032.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terkoneksiny a perangkat daerah di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00%	4,456,536,240	100.00%	4,256,461,240	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	4,256,461,240	1000.00%	95.51	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		216032.010004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	75,000,000	1	74,925,000	1	-					1	74,925,000	100	99.90	seksi Pengembangan Aplikasi
		216032.0103	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	47	4,381,536,240	47	4,181,536,240	47	-					47	4,181,536,240	100	95.44	seksi Infrastruktur TIK
		216032.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terimplementasinya inovasi yang mendukung Smart City pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasi inovasi yang mendukung smart city	%	42.55%	237,241,000	42.55%	198,000	42.55%	205,926,000	42.55%	-	42.55%	-	42.55%	206,124,000	1000.00%	86.88	Kabid peny.E Gov
		216032.0207	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	28	8,000,000	28	-	28	2,000,000					28	2,000,000	100	25.00	Seksi Pengembagan Aplikasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		216032.0208	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	23	8,000,000	23	-	23	2,000,000					23	2,000,000	100	25.00	Seksi Pengembangan Aplikasi
		216032.0209	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	208,671,000	1	198,000	1	198,776,000					1	198,974,000	100	95.35	Seksi Tata Kelola E-Gov
		216032.0212	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	12,570,000	1	-	1	3,150,000					1	3,150,000	100	25.06	Seksi Tata Kelola E-Gov
		220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														0				
Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		100			100		100	100	-	100		Kepala Dinas

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		20202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	126,998,500	100	-	100	3,599,800	100	-	100	-	100	3,599,800	100	2.83	Kabid Standi
		20202.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten / kota	persentase data Statistik sektoral yang diolah	%	16.67	126,998,500	16.67	-	16.67	3,599,800	16.67	-	16.67	-	16.67	3,599,800	100.00	2.83	Kabid Standi
		20202.2.0101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	40,827,900	1	-	1					1	-	100	-	Seksi Penyelenggaraan Statistik	
		20202.2.0103	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	28,671,200	1	-	1					1	-	100	-	Seksi Penyelenggaraan Statistik	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		20202.0104	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	60	38,999,800	60	-	60	3,599,800					60	3,599,800	100	9.23	Seksi Pengelolan Data
		20202.0106	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral diDaerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral diDaerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	18,499,600	1	-	1					1	-	100	-	Seksi Pengelolan Data	
	Meningkatnya Penerapan Persandian dikabupaten Banjar				Persentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	%	14.81		14.81		14.81		14.81	14.81	14.81	14.81	-	100			
		2021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														-				
		202102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggan ya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	indeks	190	64,033,600	190	15,894,800	190	11,204,600	190	-	190	-	190	27,099,400	100	42.32	Kabid Standi

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
				Terlaksananya Keamanan Informasi pada layanan di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi	%	8.51		8.51		8.51		8.51		8.51		-	100			
		2102.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarannya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen dan laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	49,033,800	100	15,894,800	100	11,204,600	100	-	100	-	100	27,099,400	100	55.27	Kabid Standi
		2102.0101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	18,349,800	1	15,894,800	1	655,000				1	16,549,800	100	90.19	Seksi Penyelenggaraan Persandian	
		2102.0102	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	11,349,600	1	-	1	10,549,600				1	10,549,600	100	92.95	Seksi Penyelenggaraan Persandian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		2021.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	12,334,800	1	-	1	-					1	-	100	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2021.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	27	6,999,600	27	-	27	-					27	-	100	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2022	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	11.11	14,999,800	11.11	-	11.11	-	11.11	-	11.11	-	11.11	-	100.00	-	Kabid Standi

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV						
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		210220201	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	3	14,999,800	3	-	3	-					3	-	100	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian

- Sumber : Laporan Triwulan II DKISP 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kominfo yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK. Informasi TIK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah di rumuskan di perlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan di capai dengan di pertegas adanya arah kebijakan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional dan provinsi sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Tema Nasional yang diusung pada RKPD 2024 adalah : **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** Tema tersebut dijabarkan kedalam 7 (Tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan major project.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan dengan major project.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan major project.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan major project.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas **Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Dan program Prioritas yang melekat pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Tema Nasional yang diusung pada RKPD Prov. Kalsel 2024 adalah : “PENGUATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN” Tema tersebut di jabarkan melalui prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya saing
2. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah
4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik**
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
6. Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate

TABEL 4 Hasil telaah Kebijakan dan Program Nasional

NO	Program Prioritas Pembangunan		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik	Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Banjar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusun Sasaran Strategis.

Adapun tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sebagai berikut.

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Indeks SPBE
	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase tindak lanjut aduan yang ditangani dengan cepat sesuai dengan SOP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya Penerapan Persandian dikabupaten Banjar	Persentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi

TABEL 6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

N O	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
			Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral
			Meningkatnya Penerapan Persandian di kabupaten Banjar

C. PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian untuk Renja Perubahan tahun 2024 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Kesiambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian mempunyai tugas yang besar mewujudkan Berekembangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten , maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

Dalam perencanaan kerja Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 telah kami cermati beberapa output yang perlu kami sesuaikan baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan. Secara keseluruhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 mengajukan perubahan dari anggaran murni sebesar **Rp 18,047,453,930** ,- (*Delapan Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) menjadi **Rp 20.387.905.130,-** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan usulan penambahan sebesar **Rp 2.340.451.200** ,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Adapun Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Perubahan anggaran Tahun 2024 program memiliki pagu Rp 7.286.850.422,- menjadi Rp 8.337.354.578,-. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu murni sebesar Rp 59.931.400,- tanpa ada perubahan pagu kegiatan, namun hanya berubah antar sub kegiatan.

Adapun Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 2 (dua) sub

kegiatan, yakni sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pagu murni Rp 21.421.900 ,- berkurang menjadi Rp 19.621.900,- karena adanya efesiensi pada belanja narasumber;
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu murni sebesar Rp 5.000.000,- menjadi Rp 6.800.000,-;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan, memiliki Pagu Anggaran murni Rp 40.000.000,- menjadi Rp 140.000.000,- (bertambah sebesar Rp 100.000.000,-). Adapun Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:
- ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan , pagu murni Rp 40.000.000,- menjadi Rp 140.000.000,-.karena adanya rencana Bimtek Pemrograman Web dan Keamanan Informasi ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan, memiliki Pagu Anggaran murni Rp 2.363.392.498,- menjadi Rp 2.364.392.498,- (bertambah sebesar Rp 1.000.000,-). Adapun Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:
- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat , pagu murni Rp 1.000.000,- menjadi Rp 2.000.000,-.karena adanya rencana penambahan beli Materai ;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan, memiliki Pagu Anggaran murni Rp 1.107.818.000,- menjadi Rp 2.448.376.000,- (bertambah sebesar Rp 1.340.558.000,-). Adapun Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:

- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , pagu murni Rp 526.480.000 ,- menjadi Rp 840.530.000,- .karena adanya rencana pembelian peralatan Studio dan peralatan pendukung untuk media center dan command center ;
 - ❖ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, pagu murni Rp 29.840.000 ,- menjadi Rp 19.780.000,-.karena adanya efesiensi dari beberapa belanja cetak dan penggandaan ;
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu murni Rp 493.600.000 ,- menjadi Rp 964.570.000,- .karena adanya rencana peningkatan wawasan jurnalistik bagi para awak media yang bermitra dengan pemerintah kabupaten Banjar
- Kegiatan Pemeliharaan barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu murni Rp 359.100.000 ,- menjadi Rp 558.479.000,- Sub Kegiatan yang berubah yakni :
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu murni sebesar Rp 240.480.000 ,- menjadi Rp 247.059.000,- karena ada biaya untuk pajak kendaraan operasional yang belum terakomodir ;
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu murni sebesar Rp 29.750.000 ,- menjadi Rp 22.550.000,- karena ada efesiensi untuk belanja pemeliharaan;
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu murni sebesar Rp 49.880.000 ,- menjadi Rp 249.880.000,- untuk rehap di gedung Media Center;

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

Tahun 2024 pagu murni Program ini Rp 4.290.199.000 ,- menjadi Rp 5.264.779.000,- (Bertambah sebesar Rp 974.580.000,-) Dalam program ini ada 1 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rp 4.290.199.000 ,- menjadi Rp 5.264.779.000,- (Bertambah sebesar Rp 974.580.000,-). Sub Kegiatan didalamnya yakni :
 - ❖ Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, pagu murni Rp 37.800.000 ,- menjadi Rp 9.900.000,- karena adanya sosialisasi yang sudah terakomodir sehingga bisa di maksimalkan di triwulan sebelumnya.
 - ❖ Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, pagu murni 54.025.000 ,- menjadi Rp 39.025.000,- karena adanya belanja peralatan studio guna mendukung kegiatan publikasi yang di pindahkan ke sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada kesekretariatan.
 - ❖ Pengelolaan Media Komunikasi Publik, pagu murni Rp 214.300.000 ,- menjadi Rp 499.030.000,- karena adanya penambahan belanja cetak baleho untuk persiapan hari jadi dan publikasi informasi menjelang pemilu.
 - ❖ Pelayanan Informasi Publik, pagu murni Rp 27.859.000 ,- menjadi Rp 1.939.000,- ; hanya menyesuaikan pagu di dalam rincian belanja;
 - ❖ Layanan Hubungan Media, pagu murni Rp 3.877.890.000 ,- menjadi Rp 4.616.490.000, karena adanya belanja Jurnalis serta advetorial yang belum terakomodir di anggaran murni;
 - ❖ Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, pagu murni Rp 78.395.000 ,-

menjadi Rp 98.395.000, untuk belanja sosialisasi kelompok Informasi Masyarakat;

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Program ini memiliki pagu murni Rp 4.693.777.240 ,- menjadi Rp 4.493.777.240,- (bertambah sebesar Rp 200.000.000,-);.Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berubah yakni :

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pagu murni Rp 2.479.113.603 ,- menjadi Rp 3.267.494.247,-. Adapun sub Kegiatan didalamnya:
 - ❖ Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, pagu murni Rp 4.381.536.240 ,- menjadi Rp 4.181.536.240 karena adanya belanja Modal UPS yang di alihkan menjadi menjadi belanja Bimtek;

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tahun 2024 program ini memiliki pagu murni Rp 126.998.500 ,- menjadi Rp 594.510.500

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota , dengan pagu Rp 126.998.500 ,- menjadi Rp 594.510.500
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, pagu murni Rp 40.827.900,- menjadi 508.339.900 karena untuk belanja server kegiatan wali data , satu data, geospasial

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

program ini memiliki pagu murni Rp 64.033.600 menjadi Rp 87.013.800,-

- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu murni Rp 14.999.800,- menjadi 37.980.000,-
- ❖ Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pagu murni Rp 14.999.800,- menjadi 37.980.000,- untuk pelaksanaan Bimtek Operasional Jaring Komunikasi Sandi;

Dalam perjalannya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2024 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam dalam lampiran tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2024

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan					Indeks SPBE		3.00		3.00			Kepala Dinas
		2	URUSAN PEMERINTAHANAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18,047,453,930		20,387,905,130	2,340,451,200	
		2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								-	
		2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi informatika, Statistik dan Persandian	skor	89	8,872,445,590	89	9,947,824,590	1,075,379,000	Sekretaris
		2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	59,931,400	100	59,931,400	-	Sekretaris

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	21,421,900	3	19,621,900	(1,800,000)	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	13,509,500	1	13,509,500	-	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	-	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	-	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	5,000,000	1	5,000,000	-	KabubBag Perencanaan

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
		2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5,000,000	4	6,800,000	1,800,000	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5,000,000	4	5,000,000	-	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya a Penatausahaa n keuangan perangkat daerah yang berkualitas	% Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	4,939,203,692	100	4,939,203,692	-	Sekretaris

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	28	4,814,576,692	28	4,814,576,692	-	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	114,120,000	1	114,120,000	-	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8,037,200	1	8,037,200	-	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Laporan	12	2,469,800	12	2,469,800	-	Kasubbag Keuangan dan Aset

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase tersusunnya dokumen dan laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	persen	100	3,000,000	100	3,000,000	-	Sekretaris
		2 16 01 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	3,000,000	7	3,000,000	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	persen	100	40,000,000	100	140,000,000	100,000,000	Sekretaris
		2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	40,000,000	20	140,000,000	100,000,000	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	persen	100	1,107,818,000	100	1,882,818,000	775,000,000	sekretaris

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,006,000	1	10,006,000	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	526,480,000	1	840,530,000	314,050,000	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34,932,000	1	34,932,000	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	29,840,000	1	19,780,000	(10,060,000)	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	13,000,000	12	13,000,000	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	493,560,000	12	964,570,000	471,010,000	sekretaris

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggara nya jasa penunjang pelayanan umum kantor	% Terfasilitasiny a penyelenggara an penunjang Pelayanan Umum Kantor	persen	100	2,363,392,498	100	2,364,392,4 98	1,000,000	sekretaris
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,000,000	12	2,000,000	1,000,000	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190,105,998	12	190,105,998	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,172,286,500	12	2,172,286,50 0	-	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	persen	100	359,100,000	100	558,479,000	199,379,000	sekretaris
		2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	unit	1	38,990,000	1	38,990,000	-	kasubbag umpeg

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
	Meningkatn ya Peran Masyarakat dalam Penyelengga raan Pelayanan Publik				Persentase tindak lanjut aduan yang ditangani dengan cepat sesuai dengan SOP	%	16.37		16.37		-	Kepala Dinas
		2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Terlaksanany a penyebarluas an Informasi dan Komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	%	71	4,290,199,000	71	5,264,779,000	974,580,000	Kabid IKP
				Meningkatnya Diseminasi penyebaran informasi dan program pemerintah	Cakupan Pelaksanaan Diseminasi Dan Distribusi Informasi program prioritas pemerintah	%	100		100		-	
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah sesuai prinsip keterbukaan Informasi Publik	% tersusunya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar	%	100	4,290,199,000	100	5,264,779,000	974,580,000	Kabid IKP
		2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksanany a Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	37,800,000	12	9,900,000	(27,900,000)	Seksi Pengelolaan opini Publik

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	54,025,000	12	39,025,000	(15,000,000)	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik
		2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	214,230,000	12	499,030,000	284,800,000	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik
		2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	27,859,000	1	1,939,000	(25,920,000)	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik
		2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	28	3,877,890,000	28	4,616,490,000	738,600,000	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik
		2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	78,395,000	2	98,395,000	20,000,000	Seksi Pengelolaan opini Publik

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
	Meningkatn ya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		-	Kepala Dinas
		2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terimplement asinya Layanan SPBE (Layanan publik dan Layanan administrasi) secara elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggara n secara online dan terintegrasi	%	44.71	4,693,777,240	44.71	4,493,777,240	(200,000,000)	Kabid Penyelenggaraan E- Gov
				Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Aplikasi Informatika yang di Bangun / Kembangkan	%	48.15		48.15		-	
		2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoneksiny a perangkat daerah di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunaka n akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00%	4,456,536,240	100.00%	4,256,536,240	(200,000,000)	Kabid Penyelenggaraan E- Gov

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya a Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	75,000,000	1	75,000,000	-	seksi Pengembangan Aplikasi
		2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya a Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	47	4,381,536,240	47	4,181,536,240	(200,000,000)	seksi Infrastruktur TIK
		2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terimplementasinya inovasi yang mendukung Smart City pada perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	42.55 %	237,241,000	42.55 %	237,241,000	-	Kabid peny.E Gov
		2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya a Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	28	8,000,000	28	8,000,000	-	Seksi Pengembangan Aplikasi

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya a Penyelenggar an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	23	8,000,000	23	8,000,000	-	Seksi Pengembangan Aplikasi
		2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya a Program Inovasi yang Diimplementa sikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementas ikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	208,671,000	1	208,671,000	-	Skski Tata Kelola E-Gov
		2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembang an Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggara an SPBE	Dokumen	1	12,570,000	1	12,570,000	-	Seksi Tata Kelola E-Gov
		2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	Meningkatn ya kualitas data statistik Sektoral				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100		-	Kepala Dinas

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggara nya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	126,998,500	100	594,510,500	467,512,000	Kabid Standi
		2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten / kota	persentase data Statistik sektoral yang diolah	%	16.67	126,998,500	16.67	594,510,500	467,512,000	Kabid Standi
		2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	40,827,900	1	508,339,900	467,512,000	Seksi Penyelenggaraan Statistik
		2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya a Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yangDihimpun	Dokumen	1	28,671,200	1	28,671,200	-	Seksi Penyelenggaraan Statistik

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	60	38,999,800	60	38,999,800	-	Seksi Pengelolaan Data
		2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggara nya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	18,499,600	1	18,499,600	-	Seksi Pengelolaan Data
	Meningkatn ya Penerapan Persandian dikabupaten Banjar				Persentase keterhubunga n perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	%	14.81		14.81	-		
		2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								-	
		2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggany a Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	indeks	190	64,033,600	190	87,013,800	22,980,200	Kabid Standi

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
				Terlaksananya a Keamanan Informasi pada layanan di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mendapat layanan keamanan informasi	%	8.51		8.51		-	
		2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara nnya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Persentase dokumen dan laporan pelaksanaaan keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	49,033,800	100	49,033,800	-	Kabid Standi
		2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkanny a Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta yang Ditetapkan	Dokumen	1	18,349,800	1	18,349,800	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Laporan	1	11,349,600	1	11,349,600	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	12,334,800	1	12,334,800	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	27	6,999,600	27	6,999,600	-	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	11.11	14,999,800	11.11	37,980,000	22,980,200	Kabid Standi

TUJUA N	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2024				Bertambah / Berkurang	PENANGGUNG JAWAB
							Murni		Perubahan			
							k	Rp	k	Rp	Rp	
		2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Operasionalis asi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	3	14,999,800	3	37,980,000	22,980,200	Seksi Penyelenggaraan Persandian

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2024 dalam tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi, Teknologi Informatika dan persandian dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ditentukan oleh dukungan yang maksimal dari seluruh karyawan dan karyawan serta kerjasama lintas sektoral (SKPD) di Kabupaten Banjar.

Tindak lanjut kedepan berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar akan melakukan penyusunan Peta Rencana SPBE serta penguatan pada Audit Teknologi Informasi Komunikasi khususnya infrastruktur dan Aplikasi sehingga layanan publik yang diberikan dapat lebih efektif dan optimal pemanfaatannya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar maka sasaran pembangunan di Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2024 tercatat secara jelas, sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan yang akan datang dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan rencana Kerja Perubahan tahun 2024 dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana kerja perubahan tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2021-2026 yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam kurun satu tahun.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat

(1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini, sebagai berikut :

- 1) Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, serta indikator sub kegiatan yang menyesuaikan Kepmendagri nomor 050-5889 dan telah dituangkan di dalam Renstra Perubahan Kedua Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustriandn Perdagangan.
- 2) Optimalisasi anggaran pada program – program prioritas maupun program pendukung guna mendukung kelancaran operasional.

Rencana kerja perubahan yang telah disusun diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan pencapaian visi, misi yang terkait Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yaitu Misi ke-1 yang berbunyi: *Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia* dan juga Misi ke-2 yang berbunyi *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut adalah yang menjadi landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan DKUMPP Kabupaten Banjar 2024;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), Tanggal 3 Juli 2024;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29), Tanggal 26 Juli 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi DKUMPP Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan Capaian Renstra

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.1, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Terjadi perubahan indikator dan satuan pada renstra perubahan 2021- 2026 sehingga sebagian realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dikumulatitkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perubahan indikator ini tidak mengurangi daya ungkit terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran dinas.

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II :

1. Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan

indikator persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan, target 100%, realisasi 50%, capaian 50%.

- b. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator persentase sarana distribusi perdagangan yang refresentatif, target 18,75%, realisasi 6,25%, capaian 6,25%.
- c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator persentase koefisien variasi harga antar waktu, target 9%, realisasi 4,63%, capaian 51,44%
- d. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan indikator persentase produk/komoditas daerah yang dipromosikan, target 100%, realisasi 0%, capaian 0%
- e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan indikator IKKI, target 73%, realisasi 0%, capaian 0%
- f. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, target 95,25%, realisasi 0%, capaian 0%
- g. Program pengelolaan system informasi industry nasional dengan indikator persentase tersedinya informasi industry secara lengkap danterkini, target 95%, realisasi 0%, capaian 0%
- h. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase pertumbuhan usaha mikro, target 31,9%, realisasi 0%, capaian 0%
- i. Program pengembangan UMKM dengan indikator persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya, target 9,35%, realisasi 0%, capaian 0%
- j. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator (1) persentase koperasi yang mematuhi aturan perundanganundangan,
(2) persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan, target 19,63%, realisasi 0%, capaian 0%
- k. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan indikator persentase KSP/USP sehat, target 13,79%, realisasi 0%, capaian 0%
- l. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih, target 17,29%, realisasi 0%, capaian 0%
- m. Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan

indikator persentase koperasi yang meningkat volume usahanya, target 33,74%, realisasi 0%, capaian 0%

2. Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase tertib ukur, terget 18%, terealisasi sebesar 18,27% atau tercapai 101,5%.

3. Program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase tertib ukur, terget 18%, terealisasi sebesar 18,27% atau tercapai 101,5%.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target sasaran kinerja serta kebijakan/tindakan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya:

- a. Masih banyaknya pelaku UM dan IKM dan yang belum mempunyai sertifikat Halal, P-IRT dan Keamanan;
- b. Pelaku UM dan IKM yang masih minim dalam menjalin kemitraan usaha dan permodalan dengan usaha besar;
- c. Belum optimalnya pelaku usaha mikro, industri dan koperasi dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah;
- d. Kurangnya penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi;
- e. Masih kurangnya jiwa kewirausahaan Pengurus;
- f. Masih rendahnya kemitraan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya;
- g. Masih rendahnya fasilitasi pengembangan usaha koperasi
- h. Banyaknya PKL yang belum terdaftar secara formal baik menyangkut lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya dan Penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berikut ini adalah implikasi yang timbul terhadap target capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan Pada dokumen Reviu Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2021- 2026.

- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan II, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2023 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.
 - Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan II, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.
6. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :
- a. Pemerintah terus mendorong dan menggelorakan semangat gotong royong dan meyakinkan bahwa bila berkoperasi bisa mensejahterakan;
 - b. Mendata dan memfasilitasi pelaku UM yang belum memiliki sertifikat Halal, P-IRT dan keamanan;
 - c. Pemerintah memberikan stimulus terhadap sektor usaha yang dijalankan oleh Koperasi (Hibah dana atau hibah barang);
 - d. Memfasilitasi akses pasar terhadap produk usaha koperasi
 - e. Mengoptimalkan berbagai kebijakan dari Pemerintah dan peningkatan akses permodalan untuk pelaku usaha mikro dan koperasi;
 - f. Meningkatkan penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi untuk koperasi

secara berkelanjutan;

- g. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan sertifikasi produk batu permata dan batu mulia yaitu melalui strategi peningkatan daya saing industri kecil, sedangkan kebijakannya yakni dengan peningkatan kemampuan teknologi industri di bidang batu permata dan batumulia, pengadaan alat laboratorium uji sertifikasi LPSB, sosialisasi layanan sertifikasi LPSB dan partisipasi dalam promosi perdagangan tingkat nasional.
- h. Solusi untuk mengatasi permasalahan PKL yang dihadapi pemerintah Kabupaten Banjar, diantaranya agar segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan lebih optimal dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kakilima dan asongan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Tw II

Kode					Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA PD(Renstra Perangkat Daerah) pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian kinerja Renstra Sampai dengan Renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran Renja PD yg dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD thn 2026)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d thn 2024%
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =(10+6)		13 =(12/5)*100 %
														TRI I		TRI II								
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3					URUSAN PEMELIHARAAN PILIHAN																			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DANPENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN (Persen)		100%	8.666.116	35%	3.916.000	100 %	3.200.000	0%	0%	50%	895.800	50%	895.800	50 %	27,99%	85%	4.811.800	0,85%
3	30	02	2.01		Keg Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan,dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan		100%	2.556.000	35%	3.916.000	100 %	1.000.000	0%	0%	50%	463.800	50%	463.800	50 %	46,38%	85%	4.379.800	0,85%

						tepat waktu (Persen)																	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan	4rek	2.556.000	1rek	3.916.000	2dok	500.000	0	0	1	231.900	1	231.900	50%	46,38%	2	4.147.900	0,50%

						berusaha terintegrasisecara elektronik (Dokumen)																	
3	30	02	2.02		Kegiatan Penerbitan TandaDaftar Gudang	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	100%	1.540.000	0	-	100%	432.000	25	432.000	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
3	30	02	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	6	1.540.000	0	-	4	216.000	1	216.000	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
3	30	02	2.03		Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam	100%	2.270.000	0	-	100%	800.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%

					Negeri	negeri yang dikeluarkan tepat waktu (Dokumen)																	
3	30	02	2.03	1	Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	2	1.135.000	0	-	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	30	02	2.03	2	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yg diverifikasi sebagai pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri (Dokumen)	2	1.135.000	0	-	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%

3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG REPRESENTATIVE	100%	4.575.665.968	36%	303.982.500	18,75%	844.729.000	0	243.959.000	6,25%	0	6,25%	243.959.000	6,25%	28,88%	42,25%	547.941.500	1,17%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang	16 unit	4.575.665.968	36%	303.982.500	18,75%	844.729.000	0	243.959.000	6,25%	0	6,25%	243.959.000	6,25%	28,88%	42,25%	547.941.500	1,17%

						ditingkatkan/ dikembangkan													%				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (unit)	16unit	4.550.165.968	-	301.366.000	3unit	843.292.000	0	243.959.000	1	0	1	243.959.000	33,33%	28.92%	-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distrubusi perdagangan	5unit	25.500.000	-	2.616.500	1unit	1.500.000	0	0	0	0	0%	1.500.000	0	100%	-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9%	366.920.105	5,34%	161.878.200	9%	67.743.400	6,14%	3.425.000	3,13%	23.700.000	4,63%	27.125.000	51,44%	40,04%	-		0%
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tndak lanjutatas ketidakstabilan ketersediaan bapoktingKab	100%	19.088.944	5,34%	161.878.200	12b1n	1.650.000	3	0	3	500.000	6	500.000	50%	30,30%	-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi KetersediaanBarang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang di tingkat agen dan pasar rakyat	20lap	19.088.944	-	161.878.200	4dok	1.650.000	1	0	1	500.000	2	500.000	50%	30,30%	-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%

3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data informasi harga dan stok	100%	339.881.161	-	21.480.000	16lap	65.103.400	5	0	5	26.625.000	10	26.625.000			-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 Kab/Kota	60 laporan	121.085.000,00	-	21.480.000	12	24.217.000	4	0	4	4.450.000	8	4.450.000			-	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	0%
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	60 laporan	5.861.702	-	Tidak dikerjakan di 2021	-	-	-								-	-	0%
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten kota	12 laporan	212.934.459	-	Tidak dikerjakan di 2021	4	40.886.400	1	0	1	22.175.000	2	22.175.000			-	-	0%

3	30	05	2.02		Kegiatan Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasiijin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	100%	7.950.000	-	Tidak dikerj akan di 2021	100%	990.000	0	0	0	0	0	0		-	-	0%
3	30	05	2.02	1	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan PestisidaBersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan PengadaanPupuk dan Pestisida Bersubsidi	12	7.950.000	-	Tidak dikerj akan di 2021	2	990.000	0	0	0	0	0	0		-	-	0%

3	30	05			PROGRAM PENGEMBAN AN EKSPOR	Persentase produk unggulan daerah yang dikembangkan	100%	354.692.090	-	386.000.000	100%	227.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagangn bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosidagang bagi produk unggulan daerah	5	354.692.090	-	386.000.000	100%	227.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0%
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan nUsaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	5	14.119.000	-	386.000	5plk ush	227.000	0	0	0	0	1	0	-	-	-		0%

3	30	05	2.01	02	Pemeran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
3	30	05	2.01	03	Pameran dagang local	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang local	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
3	30	05	2.01	04	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	5	340.573.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
3	30	05	2.01	05	Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yg disusun menjadi materi promosi	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
3	30	05	2.01	06	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	21,22%	425.667.842	-	69.072.600	18%	102.883.025	0	0	18,27%	23.658.200	18,27%	23.658.200	101,5%	22,99%	18,27%	92.730.800	0,86%

3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yg melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kab/Kota	25umkm	-	-	23.940.500	5	13.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	30	07	2.01	02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	-	-	-	-	--	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					SEKRETARIAT																	

3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP	80	68.921.964.074	0	0	73	12.613.356.878	0	1.172.024.627	0	3.174.180.893	0	4.346.205.520	0	0	0	12.283.412.487	0
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	454.514.848	0%	0	100%	78.877.700	25	1.334.000	50	2.510.000	75	3.844.000	75%	4,87%	75%	3.844.000	0,75%

3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	6	134.163.225	0%	-	6	20.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	55.671.409.830	0%	-	12	8.749.466.965	3	868.812.023	3	1.837.211.810	6	2.701.226.033	50%	30,87%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	50	46.797.170.238	0%		47	8.687.188.665	47	868.812.023	0	1.832.414.010	47	2.696.428.233	100%	31,03	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%

3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dok penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	93.120.000	0%	-	1	31.920.000	0	0	0	0	0	0%	0%	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	156.103.893	0%		1	30.358.300	0	0	4.797.800	0	4.797.800	0%	14,81%	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	518.624.400	0%	-	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mny a SKPD masih terpisah	0%

3	31	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksnanya bimbinganteknis	50	518.624.400	0%		5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahu n sebel u mny a SKPD masi h terpisa h	Tahu n sebel umny a SKPD masi	0 %
																					h terpi sah		
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	5.277.564.992	0%	-	12	955.784.953	3	83.687.493	3	371.083.399	6	454.770.892	50%	47,58 %	Tahu n sebel u mnya SKPD masi h terpisa h	Tah un sebel umn ya SKPD mas i h terpi sah	0 %
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (paket)	4	176.354.909	0%		12	29.636.000	3	0	3	8.210.200	6	8.210.200	50%	27,70 %	Tahu n sebel u mnya SKPD masi h terpisa h	Tah un sebel umn ya SKPD mas i h terpi sah	0 %

3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	517.455.561	0%	-	12	95.799.100	3	5.393.600	3	17.901.000	6	23.294.600	50%	24,31%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	343.025.174	0%	-	12	64.297.800	3	9.968.200	3	20.520.300	6	30.488.500	50%	46,87%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan (paket)	12	402.568.235	0%	-	12	75.862.300	3	2.520.000	3	9.047.700	6	11.567.700	50%	15,24%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	0%

3	31	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.838.161 .111	0%	-	12 lap	690.189. 753	3	65.805. 693	3	315.40 4.199	6	381.209.8 92	50%	55,21%	Tahu n sebel u mnya SKPD masi h terpisa h	Tah un sebel umn ya SKP D mas ih terpi sah	0%
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.459.311. 541	0%		12	2.175.28 5260	3	174.81 3.811	3	870.88 0.750	6	1.045.694 .561	50%	48,07%	Tahu n sebel u mnya SKPD masi h terpisa h	Tah un sebel umn ya SKP D masi	0%
																					h terpi sah		
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.232.85 1.541	0%	-	12	226.885. 260	3	49.863. 811	3	86.257. 294	6	136.121.1 05	50%	60,17%	Tahu n sebel u mnya SKPD masi h terpisa h	Tah un sebel umn ya SKP D mas ih terpi sah	0%

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	2.226.460.000	0%	-	12	1.948.400.000	3	124.950.000	3	784.623.456	6	909.573.456	50%	46,67%	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.270.538.462	0%	-	100%	606.736.000	25%	43.377.300	25%	97.292.734	50%	140.670.034	50%	23,18%	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	0%
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	194.950.000	0%	-	1	38.990.000	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	7,69%	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelum mnya SKPD masih terpisah	0%

					PERINDUSTRIAN																		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	92,75%	1.526.111.168	-	699.622.500	92.25%	421.761.500	0	0	0	153.538.600	0	153.538.600	0%	36,40%	0%	853.161.100	0%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang dibangun/fasilitasi (%)	100%	1.526.111.168	-	699.622.500	4	421.761.500	0	0	1	153.538.600	1	153.538.600	25%	36,40%	Beda satuannya dengan tahun sebelumnya	853.161.100	0%
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dok hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	4dok	947.052.124	-	552.894.100	4	314.851.500	1	34.930.800	1	76.266.200	2	111.197.000	50%	35,31%	Beda satuannya dengan tahun sebelumnya	664.091.100	0%
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Saranadan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1dok	357.639.778	0%	107.739.600	1	66.030.000	0	0	0	34.031.600	0	34.031.600	0%	51,53%	Beda satuannya dengan tahun sebelumnya	141.771.200	0%

3	02	2.0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	4	221.419. 2 66	-	8.988.8 0 0	4	40.880.0 0 0	1	0	1	8.310.0 0 0	2	8.310.000			Beda satua n denga n tahun sebelu mnya		25%
3	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya informasi industri secaralengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	95%	257.612 .339	-	1.419.3 0 0	95 %	10.636. 8 00	0	0	0	0	0	0	0	0	Beda satua n denga n tahun sebel u mny a	1.419 .300	0%
3	04	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	95%	257.612 .339	-	1.419.3 0 0	1	10.636.8 00	0	0	0	0	0	0	0	0	Beda satua n denga n tahu n sebel u mnya	1.41 9 .300	0%

3	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dok hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri, data kawasan industri sertadata lain lingkup kab/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	2	4.603.874	-	1.419.300	2	850.000	0	0	0	0	0	0	0	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	1.419.300	0%		
3	31	04	201	03	Sub keg Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah dok hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dan perusahaan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINas	2	53.008.465	-	-	2	9.786.800	0	0	0	0	0	0	0	0	50%		
2	17	07			Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	159,64%	2.542.653.030	67,25%	100.518.500	31.93%	411.230.100	0	0	0	19.815.240	0	19.815.240	0%	4,81%	67,25%	120.333.740	0,42%

2	17	07	201		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 2. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 3. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan Persentase usaha mikro yang diberikan dukunganfasilitasi pelatihan	1. 37,2% 2. 33,90 % 3. 12,19 % 4. 0,74% 5. 0,62%	2.542.653.030		67,25 %	100.518500	550	411.230100	0	0	200	19.815.240	200	19.815.240	36,36%	4,81%	Beda satuan dengan tahun sebelumnya	Beda satu an dengan tahun sebelumnya	0%
---	----	----	-----	--	---	--	--	---------------	--	---------	------------	-----	------------	---	---	-----	------------	-----	------------	--------	-------	-------------------------------------	--------------------------------------	----

2	17	07	201	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	25000	238.184.000,00	100%	52.681.000,00	5000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	17	07	201	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (unit usaha)	3750	418.000.000,00	100%	22.831.500	550	80.000.000	0	0	100	850.000	100	850.000	18,18%	1,06%	Berbeda satu ndgn tahun sebelu mnya	23.681.500	0%
2	17	07	201	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (unit usaha)	8200	526.000.000,00	100%	14.100.800	2000	146.230.100	0	0	300	0	300	0	15%	0%	Berbeda satu ndgn tahun sebelu mnya	0	0%

2	1708				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	46,76%	938.833 . 939,00	100 %	108.032 . 700	9.35 %	127.104 . 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--	--	--	----------------------------------	--	---------------	-------------------------	--------------	----------------------	--------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	1706	2.01			Kegiatan Pengembangan UsahaMikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Persentas e usaha mikro yang terfasilit asi pemasar an produkn ya 2. Pesentas e usaha mikro yang mendap atkan fasilitasi pengemb angan Produksi dan Pengola han Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	1. 9,98% 2. 2,00% 3. 9,34%	938.833. 939,00	100 %	108.032 . 700	75	127.104 . 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.0 32.7 0 0	0
---	------	------	--	--	---	--	----------------------------------	-----------------	--------------	----------------------	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---

[illegible]

					Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Perse ntase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan 24. Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	1. 98,16 % 91,38%	487.469 .030,00	100 %	14.437.700	19.63%	90.000.000	0	0	0	21.799.800	0	21.799.800	0%	24,22 %	Berbeda satu tahun sebelumnya	36.237.500	0%
2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	1. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi 1. Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	1. 35 2. 123.	487.469.030,00	100 %	14.437.700	41	90.000.000	0	0	41	21.799.800	41	21.799.800	100%	24,22%	Berbeda satu tahun sebelumnya	36.237.500	0%

					dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		
2	1 7	0 3	2.0 1	0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan , kesehatan kemandiria n, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/K ota	88	224.000 000	100%	4.254.50 0	41	40.000. 0 00	32 9	0	41	21.79 9.800	41	21.799 800	100%	54,49%	Berbe da satua ndgn tahun sebel u mnya	26.05 4.300	0%
2	1 7	0 3	2.0 1	0 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenanga n Kabupaten/ kota	1. 67 2. 21	263.469. 030,00	100%	10.183.2 00	41	50.000. 0 00	0	0	41	21.79 9.800	41	21.799 800	100%	43,59%	Berbe da satua ndgn tahun sebel u mnya	31.98 3.000	0%

2	1704				PROGR AM PENILAI AN KESEH ATAN KSP/US P KOPER ASI	• Persenta se KSP/ USP Sehat	34,48%	487.469 .030,00	95,6 2 %	53.007. 7 71,00	13.7 9%	90.000. 0 00	0	0	0	2.953 .400	0	2.953. 4 00	0%	3,28%	Berbe da satua ndgn tahun sebel u mnya	55.96 1.171	0%
2	1704	2.01			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan • Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima pengharg aan	64	487.469. 030,00	100%	53.007.7 71,00	64	90.000. 0 00	0	0	20	2.953 .400	20	2.953. 4 00	34,48%	3,28%	Berbe da satua ndgn tahun sebel u mnya	55.96 1.171	0%
2	1704	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (unit usaha)	58	170.700. 000,00	0,00	0,00	58	30.000. 0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	Berbe da satua ndgn tahun sebel u mnya	55.96 1.171	0%

					a																		
2	17	04	201	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan (unit usaha)	6	316.769.030,00	100%	53.007.71,00	6	60.000.000	0	0	20	2.953.400	20	2.953.400	333%	4,92%	Berbeda satu tahun sebelumnya	55.961.171	0%
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DANLATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dab Pengurus) yang terlatih	86,64%	487.469.030,00	100%	46.955.900,00	17.29%	207.197.800	0	0	0	11.200.000	0	11.200.000	0%	5,40%	100%	58.155.900	1,15%
2	17	05	201		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	60	487.469.030,00	100%	46.955.900,00	50	207.197.800	0	0	25	11.200.000	25	11.200.000	50%	5,40%	Berbeda satu tahun sebelumnya	58.155.900	0%

					Kabupaten/Kota																		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota yang memahami tentang perkoperasian	60	487.469.030,00	100%	46.955.900,00	1	207.197.800	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Berbeda satu tahun sebelumnya	0	0%
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	46,01%	1.884.340.786,00	100%	501.235.984,00	33.74%	397.900.400	0	0	0	9.239.600	0	9.239.600	0%	2,32%	100%	510.475.584	2,17%
2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	30	1.884.340.786,00	-	-	65	397.900.400	0	0	0	9.239.600	0	9.239.600	0%	2,32%	Berbeda satu tahun sebelumnya	-	0%

2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70	1.884.340.786,00	100%	501.235.984,00	71	397.900.400	0	0	30	9.239.600	30	9.239.600	42,25%	2,32%	Berbeda satu tahun sebelumnya	-	0%
---	----	----	------	----	--	---	----	------------------	------	----------------	----	-------------	---	---	----	-----------	----	-----------	--------	-------	-------------------------------	---	----

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan(DKUMPP) Kabupaten Banjar merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMPP Kabupaten Banjar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas DKUMPP Kabupaten Banjar kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing

- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DKUMPP Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMPP.

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi perubahan Indikator Kinerja sebelum dan sesudah, Jumlah program pada DKUMPP adalah 16 program, 27 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Untuk alasan dilakukannya perubahan sendiri pada sisi indikator sub kegiatan karena harus menyesuaikan dengan regulasi tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait Kinerja dan Indikator Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, sedangkan untuk anggaran terkait dengan optimalisasi anggaran pada program – program prioritas maupun program pendukung guna mendukung kelancaran operasional. Alasan dilakukannya perubahan ini juga terkait dengan penambahan pagu pada urusan industry sebesar Rp. 306.265.800 untuk mendukung fasilitasi dan

promosi produk unggulan daerah melalui DEKRANASDA Kab. Banjar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilakukan perubahan renja dengan melakukan:

- a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
- b. Pergeseran
- c. an pada rekening belanja antar program
- d. Perubahan indikatanggaran pada rekening belanja antar kegiatan
- e. Pergeseran anggaror program/kegiatan /sub kegiatan

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diliat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	Persen	42.34	42.34	650,178,000	708,728,000	58,550,000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin usaha simpan pinjam	Persen	84.48	84.48	25,792,800	25,792,800	-	
	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Persen	100	100			-	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	unit	7	7	20,451,000	20,451,000	-	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit	7	7	20,451,000	20,451,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Jumlah Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	unit	1	1	5,341,800	5,341,800	-	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	1	5,341,800	5,341,800	-	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang mematuhi aturan perundangan	persentase koperasi yang mematuhi aturan perundangan	Persen	58.9	58.9	49,932,000	104,432,000	54,500,000	
	persentase ksp dan usp yang mematuhi aturan perundangan	persentase ksp dan usp yang mematuhi aturan perundangan	Persen	60.34	60.34			-	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	koperasi	32	32	49,932,000	104,432,000	54,500,000	
	Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	koperasi	9	9			-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	koperasi	41	41	49,932,000	104,432,000	54,500,000	Penambahan untuk mengakomodir 1. inovasi Si Sakti Manis untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan mempermudah media informasi untuk anggota koperasi. 2. akomodir kegiatan peningkatan kapasitas koperasi berprestasi (7 Koperasi)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Sehat	Persentase KSP/ USP Sehat	Persen	29.31	29.31	85,949,700	89,999,700	4,050,000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	unit usaha	58	58	85,949,700	89,999,700	4,050,000	
	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	koperasi	6	6			-	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	58	58	25,492,000	29,542,000	4,050,000	Penambahan Uang Saku pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	koperasi	6	6	60,457,700	60,457,700	-	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	persen	69.16	69.16	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	orang	60	60	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	110	110	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	Penyesuaian rincian belanja menyesuaikan dengan standar satuan harga terbaru, yang tidak terserap, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	persen	42.94	42.94	129,989,500	134,489,500	4,500,000	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan	koperasi	30	30	129,989,500	134,489,500	4,500,000	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit usaha	70	70	129,989,500	134,489,500	4,500,000	Penyesuaian rincian belanja menyesuaikan dengan standar satuan harga terbaru, yang tidak terserap, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha	Persen	13.69	16.01	1,201,328,660	1,243,136,660	41,808,000	Penyesuaian target Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha dari 13.69% menjadi 16.01 sesuai hasil evaluasi MenpanRB yang mana dengan TW 2 tahun 2024 target telah terealisasi sebesar 15.55% atau capaiannya 113.59%

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	persen	95.79	95.79	962,850,760	986,158,760	23,308,000	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	persen	22.3	22.3	962,850,760	986,158,760	23,308,000	
	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	persen	31.23	31.23			-	
	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	persen	3.27	3.27			-	
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	persen	0.37	0.37			-	
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	persen	0.18	0.18			-	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	750	750	121,671,900	121,671,900	-	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	unit usaha	2000	2000	172,534,100	199,780,960	27,246,860	untuk fasilitasi sertifikasi halal self declare 100 unit

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	125	125	127,900,000	127,900,000	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	20	20	33,999,800	33,999,800	-	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	unit usaha	5000	5000	27,246,860	0	(27,246,860)	Updating PLKUKM tidak bisa dilaksanakantahun ini oleh DKUMPP karna harus kerjasama dengan BPS, dana dialihkan untuk mendukung fasilitasi sertifikasi halal
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	170	270	479,498,100	502,806,100	23,308,000	Penambahan untuk pelatihan DEA sharing dengan Kominfo Pusat dengan target 100 PUM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	persen	28.05	28.05	238,477,900	256,977,900	18,500,000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya	persen	5.99	5.99	238,477,900	256,977,900	18,500,000	
	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan	persen	0.96	0.96			-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	persen	5.83	5.83			-	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit usaha	260	260	238,477,900	256,977,900	18,500,000	mengakomodir kegiatan konsultasi koordinasi dan studi banding mendukung penyusunan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	persen	1.72	1.72	2,570,710,946	2,590,124,946	19,414,000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izin Dan Pendaftaran Usaha Yang Dikeluarkan	Persentase Rekomendasi Izin Dan Pendaftaran Usaha Yang Dikeluarkan	persen	100	100	31,764,840	31,764,840	-	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	15,299,840	15,299,840	-	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	3	3	15,299,840	15,299,840	-	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,310,000	3,960,000	(1,350,000)	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	5	5	5,310,000	3,960,000	(1,350,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,640,000	4,290,000	(1,350,000)	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	2	2	5,640,000	4,290,000	(1,350,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,515,000	8,215,000	2,700,000	
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	dokumen	2	2	5,515,000	8,215,000	2,700,000	kegiatan pengawasan dan monitoring waralaba
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Representative	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Representative	persen	18.75	18.75	1,424,670,000	1,424,670,000	-	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan	sarana	3	3	1,424,670,000	1,424,670,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	4	1,419,170,000	1,419,170,000	-	Penyesuaian biaya kajian pasar modern, sisanya dialihkan untuk pemeliharaan pasar tayibah ex kebakaran
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	4	5,500,000	5,500,000	-	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	persen	9	9	594,145,500	594,145,500	-	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten	persen	100	100	1,359,500	4,159,500	2,800,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	1,359,500	4,159,500	2,800,000	penambahan untuk kegiatan sidak gejala harga bapokting yang tahun ini menjadi concen dalam pengendalian inflasi
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting	ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting	laporan	12	12	592,186,000	589,386,000	(2,800,000)	
	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting	persen	100	100			-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	5,200,000	5,200,000	-	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	12	12	1,150,000	1,150,000	-	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	585,836,000	583,036,000	(2,800,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	Persentase rekomendasi izin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	persen	100	100	600,000	600,000	-	
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	4	4	600,000	600,000	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dikembangkan	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dikembangkan	persen	100	100	279,426,000	291,426,000	12,000,000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah	Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah	persen	100	100	279,426,000	291,426,000	12,000,000	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	pelaku usaha	7	7	80,000,000	80,000,000	-	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	10	10	103,426,000	103,426,000	-	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	60	60	46,000,000	58,000,000	12,000,000	mengakomodir biaya kontribusi pelatihan ekspor bagi pelaku usaha
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	5	5	50,000,000	50,000,000	-	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	Persentase Tertib Ukur	persen	35	35	168,204,606	187,618,606	19,414,000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	35	35	168,204,606	187,618,606	19,414,000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	3320	3320	119,827,606	139,241,606	19,414,000	untuk pencaanangan daerah tertib ukur yang ditargetkan dicapai pada tahun berikutnya
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	578	578	38,828,000	38,828,000	-	
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	unit	6	6	9,549,000	9,549,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Daerah Yang Dipromosikan	Persentase Produk Daerah Yang Dipromosikan	persen	100	100	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	persen	100	100	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5	5	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	mengalihkan belanja yang tidak terserap untuk kontribusi pelatihan ekspor bagi pelaku usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	2.07	2.07	1,883,923,600	2,570,863,600	686,940,000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	persen	92.49	92.49	1,775,652,500	2,462,592,500	686,940,000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang di bina/ fasilitasi	Persentase IKM yang di bina/ fasilitasi	persen	100	100	1,775,652,500	2,462,592,500	686,940,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	4	4	760,519,000	760,519,000	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1	1	66,918,000	66,918,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	4	4	948,215,500	1,635,155,500	686,940,000	peningkatan sarana dan fasilitas untuk fasilitasi Pemasaran UMKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin	Persentase IKM yang Memiliki Izin	persen	100	100	49,413,000	49,413,000	-	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	49,413,000	49,413,000	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	19,413,000	22,413,000	3,000,000	akomodir kegiatan koordinasi dan pengawasan perijinan usaha perindustrian

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	4	4	30,000,000	27,000,000	(3,000,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan koordinasi dan pengawasan perijinan usaha perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	persen	95	95	58,858,100	58,858,100	-	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	persen	100	100	58,858,100	58,858,100	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	2	2	2,198,000	2,198,000	-	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen	2	2	31,867,000	31,867,000	-	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	1	1	24,793,100	24,793,100	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	persen	76	76	12,501,819,625	12,192,012,625	(309,807,000)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	persen	100	100	60,000,000	60,000,000	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	20,000,000	16,038,000	(3,962,000)	Pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	4	10,184,000	7,789,000	(2,395,000)	Pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	14,000,000	20,357,000	6,357,000	optimalisasi kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6	6	15,816,000	15,816,000	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	7,333,249,706	6,983,249,706	(350,000,000)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	50	50	7,092,649,706	6,742,649,706	(350,000,000)	pengalihan belanja gaji dan tunjangan yang tidak terserap untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja OPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	210,600,000	210,600,000	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	30,000,000	30,000,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	125,000,000	125,000,000	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	10	125,000,000	125,000,000	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PersentaseTerlaksananya administrasi umum perangkat daerah	PersentaseTerlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	1,609,705,016	1,859,048,016	249,343,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	26,230,000	16,270,000	(9,960,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	692,495,380	805,353,380	112,858,000	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain Mesin absensi, meja kursi kerja, dan lainnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	paket	12	12	69,440,000	79,400,000	9,960,000	penambahan belanja logistik kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	12	12	54,672,000	54,672,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	766,867,636	903,352,636	136,485,000	mengakomodir kebutuhan koordinasi dan konsultasi, serta harmonisasi pelaksanaan tugas baik dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	2,558,823,400	2,399,673,400	(159,150,000)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	389,089,400	389,089,400	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	13	2,169,734,000	2,010,584,000	(159,150,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	815,041,503	765,041,503	(50,000,000)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	38,990,000	38,990,000	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	13	436,401,503	436,401,503	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	870	870	65,650,000	65,650,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	274,000,000	224,000,000	(50,000,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
						18,807,960,831	19,304,865,831	496,905,000	

Adapun Rencana kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Banjar
Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2					3	4	8	9	11	12	14	18	19	
					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan					18.807.960.831,00	19.304.865.831,00			22.749.309.720,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.353.326.285,00	14.385.969.285,00			18.041.096.846,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					14.353.326.285,00	14.385.969.285,00			18.041.096.846,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	76 Persen	76 Persen	12.501.819.625,00	12.507.104.625,00			15.723.843.568,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00			96.716.989,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	16.038.000,00	DTU-DAU		41.200.000,00
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	10.184.000,00	7.789.000,00	DTU-DAU		15.466.880,00
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	14.000.000,00	20.357.000,00	DTU-DAU		11.652.509,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan	15.816.000,00	15.816.000,00	DTU-DAU		28.397.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	7.333.249.706,00	6.983.249.706,00			10.340.094.639,00	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.092.649.706,00	6.742.649.706,00	DTU-DAU		10.293.124.639,00	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	210.600.000,00	210.600.000,00	DTU-DAU		12.870.000,00	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	DTU-DAU		34.100.000,00	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Perencana yang meningkat kompetensinya	100 Persen	100 Persen	125.000.000,00	125.000.000,00			100.000.000,00	
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	DTU-DAU		100.000.000,00	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.609.705.016,00	1.609.705.016,00			1.167.818.286,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.230.000,00	16.270.000,00	DTU-DAU		39.862.126,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	692.495.380,00	692.495.380,00	DTU-DAU		119.617.842,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	69.440.000,00	79.400.000,00	DTU-DAU		76.321.190,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	54.672.000,00	54.672.000,00	DTU-DAU		88.462.729,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	766.867.636,00	822.152.636,00	DTU-DAU		843.554.399,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.558.823.400,00	2.558.823.400,00			3.130.901.001,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	389.089.400,00	389.089.400,00	DTU-DAU		270.220.867,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	2.169.734.000,00	2.169.734.000,00	DTU-DAU		2.860.680.134,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeloharaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur	100 Persen	100 Persen	815.041.503,00	815.041.503,00			888.312.653,00
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	38.990.000,00	DTU-DAU		38.990.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	436.401.503,00	436.401.503,00	DTU-DAU		480.041.653,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	870 Unit	870 Unit	65.650.000,00	65.650.000,00	DTU-DAU		67.881.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	274.000.000,00	224.000.000,00	DTU-DAU		301.400.000,00	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas pembantu Persentase Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin usaha simpan pinjam	100 84,48 Persen Persen	100 84,48 Persen Persen	25.792.800,00	25.792.800,00			62.920.000,00	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	7 Unit	7 Unit	20.451.000,00	20.451.000,00			49.610.000,00	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	20.451.000,00	20.451.000,00	DTU-DAU		49.610.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	DTU-DAU		58.678.400,00		
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	41 Unit Usaha	41 Unit Usaha	49.932.000,00	49.932.000,00	DTU-DAU		48.400.000,00		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Sehat	29,31 Persen	24.14 Persen	85.949.700,00	89.999.700,00			107.078.400,00		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	58 Koperasi 6 Koperasi	58 Koperasi 6 Koperasi	85.949.700,00	85.949.700,00			107.078.400,00		
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	25.492.000,00	29.542.000,00	DTU-DAU		37.950.000,00		
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan										
						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	60.457.700,00	60.457.700,00	DTU-DAU		69.128.400,00		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dab Pengurus) yang terlatih	69,16 Persen	51.87 Persen	358.514.000,00	358.514.000,00			410.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	DTU-DAU		7.700.000,00	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	127,71 Persen	95,79 Persen	962.850.760,00	986.158.760,00			854.132.400,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,18 Persen 0,37 Persen 22,3 Persen 31,23 Persen 3,27 Persen	0,18 Persen 0,37 Persen 22,3 Persen 31,23 Persen 3,27 Persen	962.850.760,00	962.850.760,00			854.132.400,00	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	750 Unit Usaha	750 Unit Usaha	121.671.900,00	121.671.900,00	DTU-DAU		162.800.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	172.534.100,00	199.780.960,00	DTU-DAU		203.500.000,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	127.900.000,00	127.900.000,00	DTU-DAU		157.300.000,00
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20 Orang	20 Orang	33.999.800,00	33.999.800,00	DTU-DAU		66.000.000,00
2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil								
						Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	DTU-DAU		7.700.000,00
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	5000 Unit Usaha	5000 Unit Usaha	27.246.860,00	0,00	DTU-DAU		50.802.400,00
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 Orang	170 Orang	479.498.100,00	502.806.100,00	DTU-DAU		206.030.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	28,05 Persen	28,05 Persen	238.477.900,00	238.477.900,00			266.726.098,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan Produksi dan Pengolahan Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	0,96 Persen 5,83 Persen 5,99 Persen	0,96 Persen 5,83 Persen 5,99 Persen	238.477.900,00	238.477.900,00			266.726.098,00
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	260 Unit Usaha	260 Unit Usaha	238.477.900,00	238.477.900,00	DTU-DAU		266.726.098,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.454.634.546,00	4.918.896.546,00			4.708.212.874,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.570.710.946,00	2.590.124.946,00			3.262.997.066,00
3	30	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	42,94 Persen	39,88 Persen	129.989.500,00	129.989.500,00			539.317.980,00
3	30	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan	30 Koperasi	30 Koperasi	129.989.500,00	129.989.500,00			539.317.980,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	30	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	DTU-DAU		30.000.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN	100 Persen	100 Persen	31.764.840,00	31.764.840,00			44.000.000,00
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	15.299.840,00	15.299.840,00			19.000.000,00
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	15.299.840,00	15.299.840,00	DTU-DAU		19.000.000,00
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.310.000,00	5.310.000,00			8.000.000,00
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang								
						Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	5 Dokumen	5.310.000,00	3.960.000,00	DTU-DAU		8.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.640.000,00	5.640.000,00			8.000.000,00
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	5.640.000,00	4.290.000,00	DTU-DAU		8.000.000,00
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.515.000,00	5.515.000,00			9.000.000,00
3	30	02	2.04	0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri								
						Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	5.515.000,00	8.215.000,00	DTU-DAU		9.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG REPRESENTATIVE	18,75 Persen	18,75 Persen	1.424.670.000,00	1.424.670.000,00			1.766.600.000,00	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan	3 Sarana	3 Sarana	1.424.670.000,00	1.424.670.000,00			1.766.600.000,00	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	1.419.170.000,00	1.419.170.000,00	DTU-DAU		1.760.000.000,00	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	DTU-DAU		6.600.000,00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU	9 Persen	9 Persen	594.145.500,00	594.145.500,00			621.136.000,00	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten	100 Persen	100 Persen	1.359.500,00	1.359.500,00			5.000.000,00	
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	1.359.500,00	1.359.500,00	DTU-DAU		5.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting	100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 Laporan	592.186.000,00	592.186.000,00			613.836.000,00		
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	DTU-DAU		28.000.000,00		
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	DTU-DAU		0,00		
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	585.836.000,00	585.836.000,00	DTU-DAU		585.836.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Sebelum	Sesudah
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	100 Persen	100 Persen	600.000,00	600.000,00			2.300.000,00		
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	DTU-DAU		2.300.000,00		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN	100 Persen	100 Persen	279.426.000,00	279.426.000,00			585.000.000,00		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah	100 Persen	100 Persen	279.426.000,00	279.426.000,00			585.000.000,00		
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional										
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	DTU-DAU		350.000.000,00		
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal										
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	103.426.000,00	103.426.000,00	DTU-DAU		100.000.000,00		
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	46.000.000,00	46.000.000,00	DTU-DAU		55.000.000,00		
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor										
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	5 Produk	50.000.000,00	50.000.000,00	DTU-DAU		80.000.000,00		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	35 persen	35 persen	168.204.606,00	187.618.606,00			205.261.066,00		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	20 Persen	20 Persen	168.204.606,00	168.204.606,00			205.261.066,00		
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3320 Unit	3320 Unit	119.827.606,00	139.241.606,00	DTU-DAU		179.261.066,00		
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	578 Orang	578 Orang	38.828.000,00	38.828.000,00	DTU-DAU		20.000.000,00		
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal										
						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	6 Unit	6 Unit	9.549.000,00	9.549.000,00	DTU-DAU		6.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPROMOSIKAN	100 Persen	100 Persen	72.500.000,00	72.500.000,00			11.000.000,00		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100 Persen	100 Persen	72.500.000,00	72.500.000,00			11.000.000,00		
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	5 UMKM	72.500.000,00	72.500.000,00	DTU-DAU		11.000.000,00		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.883.923.600,00	2.570.863.600,00			1.445.215.808,00		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	92,49 Persen	92,49 Persen	1.775.652.500,00	2.462.592.500,00			1.235.215.808,00		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pesentase IKM yang di bina/ fasilitasi (%)	100 Persen	100 Persen	1.775.652.500,00	1.775.652.500,00			1.235.215.808,00		
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	760.519.000,00	760.519.000,00	DTU-DAU		195.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	DTU-DAU		75.000.000,00	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	95 Persen	95 Persen	58.858.100,00	58.858.100,00			25.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	95 Persen	95 Persen	58.858.100,00	58.858.100,00			25.000.000,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	2 Dokumen	2.198.000,00	2.198.000,00	DTU-DAU		10.000.000,00
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	31.867.000,00	31.867.000,00	DTU-DAU		0,00
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas								
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	24.793.100,00	24.793.100,00	DTU-DAU		15.000.000,00
J U M L A H									18.807.960.831,00	19.304.865.831,00			22.749.309.720,00

NO	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJ U REN CAN A TAH UN 2025		PERAN GKAT DAER AH PENAN GGUNG JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONA L	DA ER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								16.324.323. 758,00	18.807.960. 831,00	19.304.865.8 31,00	2.980.542.0 73,00						22.749.309. 720,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.449.689. 212,00	14.353.326. 285,00	14.385.969.2 85,00	1.936.280.0 73,00							18.041.096. 846,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.449.689. 212,00	14.353.326. 285,00	14.385.969.2 85,00	1.936.280.0 73,00							18.041.096. 846,00	
1.	2.17. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepatu han Dan Kinerj a Intern (IKKI) DKUM PP				76 Persen	76 Persen	11.114.528. 552,00	12.501.819. 625,00	12.507.104.6 25,00	4.609.315.0 16,00							15.723.843. 568,00	

	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksana kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		96.716.989,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.038.000,00	- 3.962.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			41.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	20.357.000,00	6.357.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			11.652.509,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				19 Laporan	19 Laporan	15.816.000,00	15.816.000,00	15.816.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			28.397.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	6.191.664.633,00	7.092.649.706,00	7.092.649.706,00	900.985.073,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			10.293.124.639,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	210.600.000,00	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan			12.870.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

			an SK PD													intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokras i				
	2.17. 01.2. 02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Perencana yang meningkat kompetensinya</i>				100 Persen	100 Persen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>				10 Orang	10 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Sarana dan Prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran</i>				100 Persen	100 Persen	1.123.399.016,00	1.609.705.016,00	1.664.990.016,00	

	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	26.230.000,00	26.230.000,00	16.270.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	206.189.380,00	692.495.380,00	692.495.380,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	69.440.000,00	69.440.000,00	79.400.000,00	

	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.672.000,00	54.672.000,00	54.672.000,00	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD				12 Laporan	12 Laporan	766.867.636,00	766.867.636,00	822.152.636,00	
		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWAN PENDANAAN					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIOD E RENSTR AOPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.558.823.400,00	2.558.823.400,00	2.558.823.400,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	389.089.400,00	389.089.400,00	389.089.400,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	436.401.503,00	436.401.503,00	436.401.503,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				870 Unit	870 Unit	65.650.000,00	65.650.000,00	65.650.000,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	274.000.000,00	274.000.000,00	224.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

			<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi SimpanPinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	5.341.800,00	5.341.800,00	5.341.800,00	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASANDAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan				58,90 60,34 Persen Persen	58,90 60,34 Persen Persen	49.932.000,00	49.932.000,00	49.932.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi</i>				32 Koperasi 9 Koperasi	32 Koperasi 9 Koperasi	49.932.000,00	49.932.000,00	49.932.000,00	

	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi										
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	24.507.000,00	0,00	0,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJANG PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah (12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				41 Unit Usaha	41 Unit Usaha	25.425.000,00	49.932.000,00	49.932.000,00	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat				29,31 Persen	24.14 Persen	85.949.700,00	85.949.700,00	89.999.700,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan				58 Koperasi 6 Koperasi	58 Koperasi 6 Koperasi	85.949.700,00	85.949.700,00	89.999.700,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										

			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	25.492.000,00	25.492.000,00	29.542.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan										
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	60.457.700,00	60.457.700,00	60.457.700,00	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih				69,16 Persen	51.87 Persen	149.999.000,00	358.514.000,00	358.514.000,00	

	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	149.999.000,00	358.514.000,00	358.514.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	110 Orang	149.999.000,00	358.514.000,00	358.514.000,00	
		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWAN PENDANAAN					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTR AOPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya				42,94 Persen	39,88 Persen	129.989.500,00	129.989.500,00	129.989.500,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas pemberdayaan dan perlindungan				30 Koperasi	30 Koperasi	129.989.500,00	129.989.500,00	129.989.500,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha										

			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	129.989.500,00	129.989.500,00	129.989.500,00	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro				127,71 Persen	95,79 Persen	655.019.760,00	962.850.760,00	986.158.760,00	

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan				0,18 Persen 0,37 Persen 22,3 Persen 31,23 Persen 3,27 Persen	0,18 Persen 0,37 Persen 22,3 Persen 31,23 Persen 3,27 Persen	655.019.760,00	962.850.760,00	986.158.760,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro										
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				750 Unit Usaha	750 Unit Usaha	121.671.900,00	121.671.900,00	121.671.900,00	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro										
		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWAN PENDANAAN					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIOD E RENSTR AOPD	CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Usaha Mikro yangTelah Mendapatkan Perizinan				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	172.534.100,00	172.534.100,00	199.780.960,00	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	127.900.000,00	127.900.000,00	127.900.000,00	

	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro										
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	20 Orang	33.999.800,00	33.999.800,00	33.999.800,00	
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil										

			Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanUsaha Mikro dan Kewirausahaan				90 Orang	170 Orang	171.667.100,00	479.498.100,00	502.806.100,00	
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UsahaMikro yang meningkat Omzetnya				28,05 Persen	28,05 Persen	238.477.900,00	238.477.900,00	238.477.900,00	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikrodengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaranproduknya</i> <i>Pesentase usaha mikro yangmendapatkan fasilitasi pengembangan Produksi danPengolahan</i> <i>Pesentase usaha mikro yangmendapatkan HAKI</i>				0,96 Persen 5,83 Persen 5,99 Persen	0,96 Persen 5,83 Persen 5,99 Persen	238.477.900,00	238.477.900,00	238.477.900,00	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi										
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				260 Unit Usaha	260 Unit Usaha	238.477.900,00	238.477.900,00	238.477.900,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.874.634.546,00	4.454.634.546,00	4.918.896.546,00	1
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN							2.390.710.946,00	2.570.710.946,00	2.590.124.946,00	

		BIDANG PERDAGANGAN										
1.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahnya				42,94 Persen	39,88 Persen	129.989.500,00	129.989.500,00	129.989.500,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan</i>				30 Koperasi	30 Koperasi	129.989.500,00	129.989.500,00	129.989.500,00	
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahnya</i>				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN				100 Persen	100 Persen	31.764.840,00	31.764.840,00	31.764.840,00	

	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan	<i>Persentase rekomendasi izinpengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	15.299.840,00	15.299.840,00	15.299.840,00	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	15.299.840,00	15.299.840,00	15.299.840,00	
		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIOD E RENSTR AOPD	CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda DaftarGudang	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	5.310.000,00	5.310.000,00	3.960.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
			Jumlah Dokumen TandaDaftar Gudang				5 Dokumen	5 Dokumen	5.310.000,00	5.310.000,00	3.960.000,00	

			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	5.515.000,00	5.515.000,00	8.215.000,00	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATANSARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG REPRESENTATIVE				18,75 Persen	18,75 Persen	1.244.670.000,00	1.424.670.000,00	1.424.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan</i>				3 Sarana	3 Sarana	1.244.670.000,00	1.424.670.000,00	1.424.670.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										
			<i>Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan</i>				3 Unit	3 Unit	1.239.170.000,00	1.419.170.000,00	1.419.170.000,00	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Koordinasidan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.359.500,00	1.359.500,00	1.359.500,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting Persentase tindak lanjut atasketidakstabilan harga dan stok bapokting</i>				100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 Laporan	592.186.000,00	592.186.000,00	592.186.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Laporan PemantauanHarga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										
		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIOD E RENSTR AOPD	CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan PemantauanHarga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	585.836.000,00	585.836.000,00	585.836.000,00	

	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijinagen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan				100 Persen	100 Persen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
			Jumlah Laporan Pengawasan PengadaanPupuk dan Pestisida Bersubsidi				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PRODUKUNGGULAN DAERAH YANG DIKEMBANGKAN				100 Persen	100 Persen	279.426.000,00	279.426.000,00	279.426.000,00	

	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah</i>				100 Persen	100 Persen	279.426.000,00	279.426.000,00	279.426.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional										
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal										

			Jumlah Pelaku Usaha yangDifasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	103.426.000,00	103.426.000,00	103.426.000,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan										
			Jumlah Pelaku Usaha yangDifasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor										
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang DisusunMenjadi Materi Promosi				5 Produk	5 Produk	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAN PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur				35 persen	35 persen	168.204.606,00	168.204.606,00	187.618.606,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat – alat ukur,takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</i>				20 Persen	20 Persen	168.204.606,00	168.204.606,00	187.618.606,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				3320 Unit	3320 Unit	119.827.606,00	119.827.606,00	139.241.606,00	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yangDibina</i>				578 Orang	578 Orang	38.828.000,00	38.828.000,00	38.828.000,00	

	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal										
			Jumlah Unit Hasil PenyidikanMetrologi Legal				6 Unit	6 Unit	9.549.000,00	9.549.000,00	9.549.000,00	
7.	3.30.07	PROGRAM PENGUNAANDAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSentase PRODUKDAERAH YANG DIPROMOSIKAN				100 Persen	100 Persen	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				100 Persen	100 Persen	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,perhotelan dan jasa akomodasi				5 UMKM	5 UMKM	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	

	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.483.923.600,00	1.883.923.600,00	2.328.771.600,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)				92,49 Persen	92,49 Persen	1.375.652.500,00	1.775.652.500,00	2.220.500.500,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang di bina/fasilitasi (%)				100 Persen	100 Persen	1.375.652.500,00	1.775.652.500,00	2.220.500.500,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	360.519.000,00	760.519.000,00	760.519.000,00	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWAN PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	66.918.000,00	66.918.000,00	66.918.000,00	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	948.215.500,00	948.215.500,00	1.393.063.500,00	
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin				100 Persen	100 Persen	49.413.000,00	49.413.000,00	49.413.000,00	

	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepatwaktu				100 Persen	100 Persen	49.413.000,00	49.413.000,00	49.413.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	19.413.000,00	19.413.000,00	19.413.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan S										

			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)				95 Persen	95 Persen	58.858.100,00	58.858.100,00	58.858.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJANG PENDANAAN					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah (Rp) 12)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaanindustri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota				95 Persen	95 Persen	58.858.100,00	58.858.100,00	58.858.100,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data KawasanIndustri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	2 Dokumen	2.198.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas										

			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	31.867.000,00	31.867.000,00	31.867.000,00	
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas										
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	24.793.100,00	24.793.100,00	24.793.100,00	
	J U M L A H								16.324.323.758,00	18.807.960.831,00	19.304.865.831,00	1.064

BAB V

PENUTUP

1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Rencana Kerja Perubahan DKUMPP Kab.Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Kedua Renstra DKUMPP Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan DKUMPP Kabupaten Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Renstra 2021-2026 DKUMPP Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja DKUMPP Kabupaten Banjar Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Renja DKUMPP Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar;
3. Perubahan Renja DKUMPP Kabupaten Banjar didalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD);

Renja Perubahan DKUMPP Tahun 2024 agar dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan. Agar masing-masing sub bagian/bidang dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2024 ini.

Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Renja Perubahan Tahun 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut DKUMPP Kabupaten Banjar terhadap Renja Perubahan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Renja Perubahan Tahun 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024.
2. Masing-masing unsur Organisasi Perangkat Daerah dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2024 ini.

Demikian Dokumen Renja Perubahan DKUMPP Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di sisa pelaksanaan tahun 2024 ini guna pencapaian target kinerja DKUMPP dan mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Banjar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD). Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun ke 5 Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Tahun 2021-2026, Hasil Reviu Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

tahapannya penyusunan Renja Perubahan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Dokumen Renja Perubahan ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSTP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 4 Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berizin Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Banjar Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), Tanggal 3 Juli 2024;
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29), Tanggal 26 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan, tetapi harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsif.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sektor penanaman modal di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan berisikan alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang

baru/tidak/belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, perizinan jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Selain itu, adapun Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi dan misi Bupati Kabupaten Banjar terpilih periode 2021- 2026.

Visi Kabupaten Banjar adalah *"Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis"*.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Banjar 2021-2026, maka ditetapkan misi untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Berdasarkan urusan dan wewenang yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkontribusi dalam mewujudkan Misi Kelima sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran yang dikelola untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 11.744.240.908,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah). Adapun rincian belanjanya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rincian Belanja DPMPTSP Kab.Banjar Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 11.009.322.908
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 5.642.428.485
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.366.894.423
5.2	BELANJA MODAL	Rp 734.918.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 598.918.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 130.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 6.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp 11.744.240.908

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik		Nilai Investasi	1.457.694.008.540	728.847.004.270	654.325.700.000	44,89	955.740.200	370.541.000	38,77
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	89,43	102,79	10.788,5	5.578.293.046	51,71
2	Tersusunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20	10	10	50,00	46.302.400	36.803.000	79,48
2.1	Peraturan Daerah Mengenai	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	1	0	1	100,00	46.302.400	36.803.000	79,48
2.1.1	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	1	100,00	46.302.400	36.803.000	79,48
2.1.1.1	Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	1	100,00			
3	Meningkatnya Jumlah Investor	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	13	6	3	23,08	268.195.700	9.868.000	3,68
3.1	Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	76	69	66	86,84	268.195.700	9.868.000	3,68
3.1.1	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0	0,00	36.370.700	5.074.000	13,95
3.1.1.1	Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0	0,00			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	4	1	11,11	231.825.000	4.794.000	2,07
3.1.2.1	Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun		4	1	11,11			
4	Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM	100	50	50	50,00	641.242.100	323.870.000	50,51
4.1	Meningkatnya Pemahaman Para Perundangan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	50	50	50,00	641.242.100	323.870.000	50,51
4.1.1	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	10	53	265,00	100.312.500	11.625.500	11,59
4.1.1.1	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usaha dalam Merealisasikan	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	10	53	265,00			
4.1.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70	34	36	51,43	348.684.200	239.619.500	68,72
4.1.2.1	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70	34	36	51,43			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.3	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70	34	36	51,43	192.245.400	72.625.000	37,78
4.1.3.1	Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70	34	36	51,43			
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	89,43	102,79	80.123.100	23.556.000	29,40
5.1	Terselenggaranya Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan & Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	100	50	50	50,00	80.12 ³	23.556.000	29,40
5.1.1	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem secara Elektronik	658	328	397	60,33	37.028.000	8.450.500	22,82
5.1.1.1	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	200	100	120	60,00			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.2	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	300	150	170	56,67			
5.1.1.3	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	158	78	107	67,72			
5.1.2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1317	658	2594	196,96	23.000.000	2.910.000	12,65

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.2.1	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	300	150	1000	333,33			
5.1.2.2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	700	350	1000	142,86			
5.1.2.3	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	317	158	594	187,38			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10	15	75,00	10.000.000	7.778.000	77,78
5.1.3.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	5	2	5	100,00			
5.1.3.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	5	2	5	100,00			
5.1.3.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	10	4	5	50,00			
5.1.4	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Penyediaan dan Pengelolaan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35	17	22	62,86	10.095.100	4.417.500	43,76

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.4.1	Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Penyediaan dan Pengelolaan Penyediaan dan Pengelolaan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35	17	22	62,86			
6	Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	50	50	50,00	48.299.400	12.195.150	25,25
6.1	Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	50	50	50,00	48.299.400	12.195.150	25,25
6.1.1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	0	0	0,00	48.299.400	12.195.150	25,25
6.1.1.1	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	1	0	0	0,00			
7	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Program Penunjang Urusan Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	87	0	0	0,00	10.660.078.208	5.542.541.896	51,99
7.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	27	13	15	55,56	57.000.000	7.973.500	13,99

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran			
				Target	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11
7.1.1	Tersusunnya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	4	3	42,86		13.500.000	3.525.000	26,11
7.1.1.1	Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan		2	1	1	50,00				
7.1.1.2	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan		2 2	1 1	1 1	50,00 50,00				
7.1.1.3	Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan									
7.1.1.4	Tersusunnya Dokumen Renstra	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra		1	0	0	0,00				
7.1.2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	0	0	0,00		7.000.000	-	0,00
7.1.2.1	Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni		1	0	0	0,00				
7.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2	1	1	50,00		5.000.000	-	0,00
7.1.3.1	Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan		2	1	1	50,00				
7.1.4	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	0	0	0,00		7.000.000	601.000	8,59
7.1.4.1	Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni		1	0	0	0,00				

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	1	50,00	5.000.000	-	0,00
7.1.5.1	Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	2	1	1	50,00			
7.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3	4	66,67	12.500.000	3.847.500	30,78
7.1.6.1	Tersusunnya Laporan LKJIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	1	1	1	100,00			
7.1.6.2	Tersusunnya Laporan LKPJ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1	1	1	100,00			
7.1.6.3	Tersusunnya Laporan LPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	1	1	1	100,00			
7.1.6.4	Tersusunnya Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	3	2	1	33,33			
7.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	7	6	40,00			
7.1.7.1	Tersusunnya Laporan SAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	1	0	0	0,00	7.000.000	-	0,00
7.1.7.2	Tersusunnya Laporan IKKI emester I dan Semester II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	2	1	0	0,00			
7.1.7.3	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	12	6	6	50,00			
7.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100	50	50	50,00	3.053.244.485	3.340.981.328	59,20

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Anggaran		
				Target	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36	36	36	100,00	5.560.828.485	3.285.979.028	59,09
7.2.1.1.	Terkelolanya Pembayaran Gaji	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan		36	36	36	100,00			
7.2.2	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		76	38	38	50,00	81.600.000	56.960.000	69,80
7.2.2.1	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun		76	38	38	50,00			
7.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	0	0	0,00	5.408.000	-	0,00
7.2.3.1	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang		1	0	0	0,00			
7.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	1	1	50,00	5.408.000	4.048.300	74,86
7.2.4.1	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		2	1	1	50,00			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	50	50	50,00	12.964.000	9.780.800	75,45
7.3.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan arang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 1	0 0	0 0	0,00 0,00	4.680.000	2.547.500	54,43
7.3.1.1	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun							
7.3.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0,00	5.400.000	5.121.800	94,85
7.3.2.1	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang	1	0	0	0,00			
7.3.3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0,00	2.884.000	2.111.500	73,21
7.3.3.1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1	0	0	0,00			
7.4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	8	4	5	62,50	75.287.500	52.596.645	69,86
7.4.1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	1	2	66,67	30.287.500	7.596.645	25,08
7.4.1.1	Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	1	2	66,67			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.4.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	2	3	60,00	45.000.000	45.000.000	100,00
7.4.2.1	Terkelolanya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Fasilitas Peraturan Perundang-Undangan	5	2	3	60,00			
7.5	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	50	50	50,00	717.106.475	447.246.229	62,37
7.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0,00	27.040.000	18.767.000	69,40
7.5.1.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	0	0	0,00			
7.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0,00	38.264.000	14.172.500	37,04
7.5.2.1	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	1	0	0	0,00			
7.5.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0	0,00	42.533.000	23.776.500	55,90
7.5.3.1	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	1	0	0	0,00			
7.5.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0,00	21.870.000	9.560.000	43,71

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11
7.5.4.1	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	1	0	0 0,00				
7.5.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	0 0,00		18.750.000	3.650.000	19,47
7.5.5.1	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	2	1	0 0,00				
7.5.6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	0 0,00		27.573.661	10.447.000	37,89
7.5.6.1	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	1	0	0 0,00				
7.5.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	0 0,00		496.075.814	361.873.229	72,95
7.5.7.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	1	0	0 0,00				
7.5.8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0 0,00		45.000.000	5.000.000	11,11
7.5.8.1	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	1	0	0 0,00				
7.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	50	50 50,00		636.138.400	3.514.000	0,55
7.6.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	144	72	40 27,78		636.138.400	3.514.000	0,55

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.6.1.1	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	144	72	40	27,78			
7.7	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	50	50	50,00	2.335.668.040	1.275.958.914	54,63
7.7.1	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	1	0	0,00	6.330.000	1.500.000	23,70
7.7.1.1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	1	0	0,00			
7.7.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	2	66,67	340.558.600	106.382.395	31,24
7.7.2.1	Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	3	1	2	66,67			
7.7.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	6	5	41,67	1.988.779.440	1.168.076.519	58,73
7.7.3.1	Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	12	6	5	41,67			
7.8	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	50	50	50,00	1.172.669.308	398.484.480	33,98
7.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	0	0	0,00	38.990.000	30.043.247	77,05

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.8.1.1	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	1	0	0	0,00			
7.8.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	7	8	53,33	264.002.000	137.172.333	51,96
7.8.2.1	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	15	7	8	53,33			
7.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115	57	25	21,74	50.950.000	23.339.000	45,81
7.8.3.1	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	115	57	25	21,74			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
				Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.8.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	1	33,33	818.727.308,0	207.929.90	25,40
7.8.4.1	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	3	1	1	33,33			

Tabel 2.3
Realisasi Rencana Aksi DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik		Nilai Investasi	1.457.694.008,540	654.325.700.000	44,89	955.740.200	370.541.000	38,77	Kepala Dinas	1. Tidak semua pelaku usaha memahami tentang tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan di OSS 2. Para pelaku usaha yang masih terlambat dalam pelaporan LKPM 3. Keterlambatan melakukan rekapitulasi data realisasi investasi karena menunggu laporan LKPM dari pelaku usaha 4. Menunggu data realisasi investasi yang diakui dari Kementerian Investasi/BKPM	1. Melaksanakan bimtek agar pelaku usaha lebih memahami mengenai OSS 2. Melaksanakan sosialisasi tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan 3. Memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terlambat melaporkan LKPM 4. Berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM serta Pemerintah Provinsi terkait nilai realisasi investasi yang valid	Juli - Desember 2024
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,43	102,79	10.788.500.708	5.578.293.046	51,71		1. Masih menggunakan sistem manual dalam pemenuhan survei IKM 2. Sarpras yang kurang memadai 3. Belum ada pendampingan pengisian survei IKM	1. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 2. Melakukan pendampingan pengisian survei IKM 3. Menggunakan sistem yang lebih update agar pemenuhan survei IKM lebih efektif dan efisien	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Lersusunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20	10	50,00	46.302.400	36.803.000	79,48	Kepala Bidang Penanaman Modal	Jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA menyesuaikan/ mengikuti antrian jadwal di Kanwil Kemenkum HAM Jadwal rapat paripurna&rapat pembahasan rancangan PERDA mengikuti agenda kegiatan DPRD	Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkumham mengenai jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA Melaksanakan koordinasi dengan DPRD mengenai agenda rapat pembahasan rancangan PERDA	Juli - Desember 2024
2.1	Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	1	1	100,00	46.302.400	36.803.000	79,48	Kepala Bidang Penanaman Modal	Jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA menyesuaikan/ mengikuti antrian jadwal di Kanwil Kemenkum HAM Jadwal rapat paripurna&rapat komisi pembahasan rancangan PERDA mengikuti agenda kegiatan DPRD	Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkumham mengenai jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA Melaksanakan koordinasi dengan DPRD mengenai agenda rapat pembahasan rancangan PERDA	Juli - Desember 2024
2.1.1	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Keputusan Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	100,00	46.302.400	36.803.000	79,48	Kepala Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA menyesuaikan/ mengikuti antrian jadwal di Kanwil Kemenkum HAM Jadwal rapat paripurna&rapat komisi pembahasan rancangan PERDA mengikuti agenda kegiatan DPRD	Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkumham mengenai jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA Melaksanakan koordinasi dengan DPRD mengenai agenda rapat pembahasan rancangan PERDA	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1.1.1	Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	100,00				Staf / Pelaksana	Jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA menyesuaikan/ mengikuti antrian jadwal di Kanwil Kemenkum HAM Jadwal rapat paripurna & rapat pembahasan rancangan PERDA mengikuti agenda kegiatan DPRD	Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkumham mengenai jadwal rapat harmonisasi rancangan PERDA Melaksanakan koordinasi dengan DPRD mengenai agenda rapat pembahasan rancangan PERDA	Juli - Desember 2024
3	Meningkatnya Jumlah Investor baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	13	3	23,08	268.195.700	9.868.000	3,68	Kepala Bidang Penanaman Modal	Minimnya anggaran yang tersedia (Pendampingan Pameran DPMPTSP Tingkat Provinsi) Belum adanya jadwal kegiatan di Triwulan I (Banjar Expo dan APKASI)	Mengusulkan penambahan pagu anggaran Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II dan III	Juli - Desember 2024
3.1	Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	76	66	86,84	268.195.700	9.868.000	3,68	Kepala Bidang Penanaman Modal	Minimnya anggaran yang tersedia (Pendampingan Pameran DPMPTSP Tingkat Provinsi) Belum adanya jadwal kegiatan di Triwulan I (Banjar Expo dan APKASI)	Mengusulkan penambahan pagu anggaran Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II dan III	Juli - Desember 2024
3.1.1	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0,00	36.370.700	5.074.000	13,95	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan III	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.1.1	Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0,00				Staf /	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan III	Juli - Desember 2024
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	1	11,11	231.825.000	4.794.000	2,07	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal	Minimnya anggaran yang tersedia (Pendampingan Pameran DPMPPTSP Tingkat Provinsi) Belum adanya jadwal kegiatan di Triwulan I (Banjar Expo dan APKASI)	Mengusulkan penambahan pagu anggaran Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II dan III	Juli - Desember 2024
3.1.2.1	Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun	9	1	11,11				Staf / Pelaksana	Minimnya anggaran yang tersedia (Pendampingan Pameran DPMPPTSP Tingkat Provinsi) Belum adanya jadwal kegiatan di Triwulan I (Banjar Expo dan APKASI)	Mengusulkan penambahan pagu anggaran Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II dan III	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM	100	50	50,00	641.242.100	323.870.000	50,51	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	1. Tidak semua pelaku usaha memahami tentang tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan di OSS 2. Para pelaku usaha yang masih terlambat dalam pelaporan LKPM 3. Keterlambatan melakukan rekapitulasi data realisasi investasi karena menunggu laporan LKPM dari pelaku usaha 4. Menunggu data realisasi investasi yang diakui dari Kementerian Investasi/BKPM	1. Melaksanakan bimtek agar pelaku usaha lebih memahami mengenai OSS 2. Melaksanakan sosialisasi tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan 3. Memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terlambat melaporkan LKPM 4. Berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM serta Pemerintah Provinsi terkait nilai realisasi investasi yang valid	Juli - Desember 2024
4.1	Meningkatnya Pemahaman Para Investor Terhadap Peraturan Perundangan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	50	50,00	641.242.100	323.870.000	50,51	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	1. Tidak semua pelaku usaha memahami tentang tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan di OSS 2. Para pelaku usaha yang masih terlambat dalam pelaporan LKPM 3. Keterlambatan melakukan rekapitulasi data realisasi investasi karena menunggu laporan LKPM dari pelaku usaha	1. Melaksanakan bimtek agar pelaku usaha lebih memahami mengenai OSS 2. Melaksanakan sosialisasi tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan 3. Memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terlambat melaporkan LKPM	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	53	265,00	100.312.500	11.625.500	11,59	Kepala Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Waktu penyelesaian permasalahan yang tidak menentu 2. Tidak semua pelaku usaha memahami tentang tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan di OSS 3. Penyelesaian permasalahan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan	1. Penjadwalan penyelesaian permasalahan 2. Melaksanakan sosialisasi tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan 3. Melakukan kolaborasi dengan bidang lain	Juli - Desember 2024
4.1.1.1	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	53	265,00				Staf / Pelaksana	1. Waktu penyelesaian permasalahan yang tidak menentu 2. Tidak semua pelaku usaha memahami tentang tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan di OSS 3. Penyelesaian permasalahan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan	1. Penjadwalan penyelesaian permasalahan 2. Melaksanakan sosialisasi tata cara teknis pengisian kelengkapan dokumen perizinan 3. Melakukan kolaborasi dengan bidang lain	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70	36	51,43	348.684.200	239.619.500	68,72	Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pelaku usaha berhalangan hadir 2. Delegasi pelaku usaha bukan orang yang memahami mengenai OSS	1. Melaksanakan bimtek agar pelaku usaha lebih memahami mengenai OSS 2. Melakukan kolaborasi dengan bidang lain 3. Memastikan kembali terkait kehadiran pelaku usaha yang akan mengikuti bimtek/sosialisasi	Juli - Desember 2024
4.1.2.1	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70	36	51,43				Staf / Pelaksana	1. Pelaku usaha berhalangan hadir 2. Delegasi pelaku usaha bukan orang yang memahami mengenai OSS	1. Melaksanakan bimtek agar pelaku usaha lebih memahami mengenai OSS 2. Melakukan kolaborasi dengan bidang lain 3. Memastikan kembali terkait kehadiran pelaku usaha yang akan mengikuti bimtek/sosialisasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.3	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70	36	51,43	192.245.400	72.625.000	37,78	Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. SK Pengawasan masih dalam proses perbaikan 2. Pada aplikasi OSS belum ada menu untuk mengakses para pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif 3. Belum ada tindak lanjut dari Kementerian BKPM atas laporan/keluhan yang sudah disampaikan	1. Melakukan evaluasi melalui aplikasi OSS terkait perbaikan SK Pengawasan dan menu untuk mengakses para pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif 2. Menyampaikan keluhan/hambatan kepada Kementerian BKPM	Juli - Desember 2024
4.1.3.1	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70	36	51,43				Staf / Pelaksana	1. SK Pengawasan masih dalam proses perbaikan 2. Pada aplikasi OSS belum ada menu untuk mengakses para pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif 3. Belum ada tindak lanjut dari Kementerian BKPM atas laporan/keluhan yang sudah disampaikan	1. Melakukan evaluasi melalui aplikasi OSS terkait perbaikan SK Pengawasan dan menu untuk mengakses para pelaku usaha yang mendapatkan sanksi administratif 2. Menyampaikan keluhan/hambatan kepada Kementerian BKPM	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,43	102,79	80.123.100	23.556.000	29,40	Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha, dan Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan	1. Masih menggunakan sistem manual dalam pemenuhan survei IKM 2. Sarpras yang kurang memadai 3. Belum ada pendampingan pengisian survei IKM	1. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 2. Melakukan pengisian survei IKM 3. Menggunakan sistem yang lebih update agar pemenuhan survei IKM lebih efektif dan efisien	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1	Terselenggaranya Pelayanan Berorientasi dan Non-Berorientasi & Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan & Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	100	50	50,00	80.123.100	23.556.000	29,40	Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha, dan Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan	1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan dan aplikasi 2. Sarana dan prasarana yang belum maksimal (Ruang Konsultasi) 3. Belum sinkronnya koordinasinya antar SKPD terkait 4. Aplikasi perizinan online yang sering gangguan 5. Dinas teknis yang masih belum menerapkan SOP secara optimal 6. Batas waktu perbaikan berkas setelah cek lokasi belum jelas oleh SKPD Teknis 7. Aplikasi SI-ARI yang masih dalam maintenance dan belum dapat ditentukan kapan waktu penyelesaiannya 8. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pengajuan perizinan 9. Kurangnya keterlibatan para pelaku usaha dalam rangka kemitraan investasi daerah	1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami peraturan dan aplikasi melalui bimtek peningkatan kompetensi SDM 2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas teknis 3. Berkoordinasi dengan bidang yang mampu terkait permasalahan aplikasi perizinan mandiri SI-ARI 4. Melaporkan kendala/hambatan aplikasi pelayanan online apabila terjadi gangguan 5. Mengusulkan pemenuhan sarpras 6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	658	397	60,33	37.028.000	8.450.500	22,82	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu I dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha II	1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan dan aplikasi 2. Jumlah SDM yang kurang memadai 3. Belum sinkronnya koordinasi antar SKPD terkait 4. Aplikasi perizinan online yang sering gangguan 5. Dinas teknis belum menerapkan SOP secara optimal 6. Batas waktu perbaikan berkas setelah cek lokasi belum jelas oleh SKPD Teknis 7. Aplikasi SI-ARI yang masih dalam maintenance dan belum dapat ditentukan kapan waktu penyelesaiannya	1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami peraturan dan aplikasi melalui bimtek peningkatan kompetensi SDM 2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas teknis 3. Berkoordinasi dengan Dinas terkait mengampu terkait pemeliharaan aplikasi perizinan mandiri SI-ARI 4. Melaporkan kendala/hambatan aplikasi perizinan online apabila terjadi gangguan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1.1	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	200	120	60,00				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan dan aplikasi 2. Jumlah SDM yang kurang memadai 3. Belum sinkronnya koordinasi antar SKPD terkait 4. Aplikasi yang sering gangguan 5. Dinas teknis belum menerapkan SOP secara optimal 6. Batas waktu perbaikan berkas setelah cek lokasi belum jelas oleh SKPD Teknis 7. Aplikasi SI-ARI yang masih dalam maintenance dan belum dapat ditentukan kapan waktu penyelesaiannya	1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami peraturan dan aplikasi melalui bimtek peningkatan kompetensi SDM 2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas teknis 3. Berkoordinasi dengan bidang pemeliharaan terkait pemeliharaan aplikasi perizinan mandiri SI-ARI 4. Melaporkan kendala/hambatan aplikasi perizinan online apabila terjadi gangguan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1.2	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	300	170	56,67				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan dan aplikasi 2. Jumlah SDM yang kurang memadai 3. Belum sinkronnya koordinasi antar SKPD terkait 4. Aplikasi pelayanan yang sering gangguan 5. Dinas teknis belum menerapkan SOP secara optimal 6. Batas waktu perbaikan berkas setelah cek lokasi belum jelas oleh SKPD Teknis 7. Aplikasi SI-ARI yang masih dalam maintenance dan belum dapat ditentukan kapan waktu penyelesaiannya	1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami peraturan dan aplikasi melalui bimtek peningkatan kompetensi SDM 2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas teknis 3. Berkoordinasi dengan bidang yang mengampu terkait pemeliharaan aplikasi perizinan mandiri SI-ARI 4. Melaporkan kendala/hambatan aplikasi perizinan online apabila terjadi gangguan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.1.3	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	158	107	67,72				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan dan aplikasi 2. Jumlah SDM yang kurang memadai 3. Belum sinkronnya koordinasi antar SKPD terkait 4. Aplikasi perizinan online yang sering gangguan 5. Dinas teknis belum menerapkan SOP secara optimal 6. Batas waktu perbaikan berkas setelah cek lokasi belum jelas oleh SKPD Teknis 7. Aplikasi SI-ARI yang masih dalam maintenance dan belum dapat ditentukan kapan waktu penyelesaiannya	1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami peraturan dan aplikasi melalui bimtek peningkatan kemampuan SDM 2. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas teknis 3. Berkoordinasi dengan bidang yang mengampu terkait pemeliharaan aplikasi perizinan mandiri SI-ARI 4. Melaporkan kendala/hambatan aplikasi perizinan online apabila terjadi gangguan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1317	2594	196,96	23.000.000	2.910.000	12,65	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu II dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha I	1. Keterbatasan SDM sehingga sulit membagi waktu penjadwalan 2. Sarpras kurang memadai 3. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan lain pada Dinas terkait 4. Kegiatan pelayanan publik sering terhambat karena kurangnya koordinasi di internal bidang 5. Belum meratanya kemampuan SDM 6. Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal 7. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pengajuan perizinan 8. Kurangnya keterlibatan para pelaku usaha dalam rangka kemitraan investasi daerah	1. Penambahan jumlah personil dengan gender laki-laki 2. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 3. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas terkait terkait 4. Memberikan reward dan punishment di internal bidang 5. Peningkatan kemampuan SDM melalui bimtek 6. Pemanfaatan sistem secara maksimal 7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.2.1	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	300	1000	333,33				Staf / Pelaksana	1. Keterbatasan SDM sehingga sulit membagi waktu penjadwalan 2. Sarpras kurang memadai 3. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan lain pada Dinas terkait 4. Kegiatan pelayanan publik sering terhambat karena kurangnya koordinasi di internal bidang 5. Belum meratanya kemampuan SDM masyarakat 6. Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal 7. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pengajuan perizinan 8. Kurangnya keterlibatan para pelaku usaha dalam rangka kemitraan investasi daerah	1. Penambahan jumlah personil dengan gender laki-laki 2. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 3. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas terkait terkait 4. Memberikan reward dan punishment di internal bidang 5. Peningkatan kemampuan SDM masyarakat 6. Pemanfaatan sistem secara maksimal 7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan	Jul - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.2.2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	700	1000	142,86				Staf / Pelaksana	1. Keterbatasan SDM sehingga sulit membagi waktu penjadwalan 2. Sarpras kurang memadai 3. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan lain pada Dinas terkait 4. Kegiatan pelayanan publik sering terhambat karena kurangnya koordinasi di internal bidang 5. Belum meratanya kemampuan SDM 6. Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal 7. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pengajuan perizinan 8. Kurangnya keterlibatan para pelaku usaha dalam rangka kemitraan investasi daerah	1. Penambahan jumlah personil dengan gender laki-laki 2. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 3. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas terkait 4. Memberikan reward dan punishment di internal bidang 5. Peningkatan kemampuan SDM melalui bimtek 6. Pemanfaatan sistem secara maksimal 7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.2.3	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	317	594	187,38				Staf / Pelaksana	1. Keterbatasan SDM sehingga sulit membagi waktu penjadwalan 2. Sarpras kurang memadai 3. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan lain pada Dinas terkait 4. Kegiatan pelayanan publik sering terhambat karena kurangnya koordinasi di internal bidang 5. Belum meratanya kemampuan SDM 6. Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal 7. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat dalam pengajuan perizinan 8. Kurangnya keterlibatan para pelaku usaha dalam rangka kemitraan investasi daerah	1. Penambahan jumlah personil dengan gender laki-laki 2. Pengusulan sarpras untuk menunjang kegiatan 3. Berkoordinasi secara intens dengan Dinas terkait 4. Memberikan reward dan punishment di internal bidang 5. Peningkatan kemampuan SDM melalui bimtek 6. Pemanfaatan sistem 7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	15	75,00	10.000.000	7.778.000	77,78	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu II dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha I	Kurangnya kemampuan SDM dalam berkoordinasi secara intens baik internal maupun eksternal	Peningkatan kemampuan dan kemauan SDM dalam berkoordinasi	Juli - Desember 2024
5.1.3.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kesehatan/Pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	5	5	100,00				Staf / Pelaksana	Kurangnya kemampuan SDM dalam berkoordinasi secara intens baik internal maupun eksternal	Peningkatan kemampuan dan kemauan SDM dalam berkoordinasi	Juli - Desember 2024
5.1.3.2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	5	5	100,00				Staf / Pelaksana	Kurangnya kemampuan SDM dalam berkoordinasi secara intens baik internal maupun eksternal	Peningkatan kemampuan dan kemauan SDM dalam berkoordinasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.3.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perkebunan, Kelautan, Hutan dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perkebunan, Kelautan, Hutan dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	10	5	50,00				Staf / Pelaksana	Kurangnya kemampuan SDM dalam berkoordinasi secara intens baik internal maupun eksternal	Peningkatan kemampuan dan kemauan SDM dalam berkoordinasi	Juli - Desember 2024
5.1.4	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik	35	22	62,86	10.095.100	4.417.500	43,76	Kepala Seksi Sistem Informasi, Pelayanan dan Pengaduan	1. Sarana dan prasarana yang belum maksimal (Ruang Konsultasi) 2. Aplikasi mandiri SI-ARI yang masih kurang baik dan tahap perbaikan 3. Seringnya perubahan regulasi dari pemerintah pusat	1. Mengusulkan pemenuhan sarpras 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi mandiri SI-ARI, sementara masih menggunakan google form 3. Melakukan update secara rutin terkait perubahan regulasi dari pemerintah pusat	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.4.1	Terfasilitasinya Layanan Konsultasi Serta Laporan Layanan Konsultasi	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	35	22	62,86				Staf / Pelaksana	1. Sarana dan prasarana yang belum maksimal (Ruang Konsultasi) 2. Aplikasi mandiri SI-ARI yang masih bermasalah dan tahap perbaikan 3. Seringnya perubahan regulasi dari pemerintah pusat	1. Mengusulkan pemenuhan sarpras 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi mandiri SI-ARI, sementara masih menggunakan google form 3. Melakukan update secara rutin terkait perubahan regulasi dari pemerintah pusat	Juli - Desember 2024
6	Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	50	50,00	48.299.400	12.195.150	25,25	Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan	1. Keterlambatan dalam mendapatkan data dari bidang-bidang 2. Aplikasi yang masih dalam perbaikan sehingga memakai data manual dari google form untuk masalah data 3. Pada pelaksanaan pemeliharaan aplikasi SI-ARI mengalami keterlambatan karena masih mencari tau apa saja masalah dari aplikasi SI-ARI 4. Pihak tim teknis vendor terkesan melambat-lambatkan pekerjaan sehingga aplikasi SI-ARI masih belum bisa	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi mandiri SI-ARI, sementara masih menggunakan google form 3. Berkoordinasi dengan vendor terkait SOP pemeliharaan aplikasi SI-ARI	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											dioperasikan untuk pelayanan perizinan sementara digoogle form		

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1	Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	50	50,00	48.299.400	12.195.150	25,25	Kepala Bidang Reklame, Cipta, Informasi dan Pengaduan	1. Keterlambatan dalam mendapatkan data dari bidang-bidang 2. Aplikasi yang masih dalam perbaikan sehingga memakai data manual dari google form untuk penarikan data 3. Pada pelaksanaan pemeliharaan aplikasi SI-ARI mengalami kendala karena masih mencari tau apa-apa saja masalah dari aplikasi SI-ARI 4. Pihak tim teknis vendor terkesan melambat-lambatkan pekerjaan sehingga aplikasi SI-ARI masih belum bisa dioperasikan untuk pelayanan perizinan sementara digoogle form	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi SI-ARI sementara masih menggunakan google form 3. Berkoordinasi dengan vendor terkait SOP pemeliharaan aplikasi SI-ARI	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dapat Dilacak, Ditelusuri dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dapat Dilacak, Ditelusuri dan Dimanfaatkan	1	0	0,00	48.299.400	12.195.150	25,25	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha	1. Keterlambatan dalam mendapatkan data dari bidang-bidang 2. Aplikasi yang masih dalam perbaikan sehingga memakai data manual dari google form untuk penarikan data 3. Pada pelaksanaan pemeliharaan aplikasi SI-ARI mengalami keterlambatan karena masih mencari tau apa-apa saja masalah dari aplikasi SI-ARI 4. Pihak tim teknis vendor terkesan melambat-lambatkan pekerjaan sehingga aplikasi SI-ARI masih belum bisa dioperasikan untuk pelayanan perizinan sementara digoogle form	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi SI-ARI sementara masih menggunakan google form 3. Berkoordinasi dengan vendor terkait SOP pemeliharaan aplikasi SI-ARI	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan dalam mendapatkan data dari bidang-bidang 2. Aplikasi yang masih dalam perbaikan sehingga memakai data manual dari google form untuk penarikan data 3. Pada pelaksanaan pemeliharaan aplikasi SI-ARI mengalami keterlambatan karena masih mencari tau apa-saja masalah dari aplikasi SI-ARI 4. Pihak tim teknis vendor terkesan melambat-lambatkan pekerjaan sehingga aplikasi SI-ARI masih belum bisa dioperasikan untuk pelayanan perizinan sementara digoogle form	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data 2. Melaporkan kepada vendor terkait permasalahan aplikasi mandiri SI-ARI, sementara masih menggunakan google form 3. Berkoordinasi dengan vendor terkait SOP pemeliharaan aplikasi SI-ARI	Juli - Desember 2024
7	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	87	0	0,00	10.660.078.208	5.542.541.896	51,99	Sekretaris	Kegiatan belum dilaksanakan karena penilaian akan dilaksanakan pada Trwulan III	Mempersiapkan penilaian pada Triwulan III	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	27		15 55,56	57.000.000	7.973.500	13,99	Sekretaris	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang dalam Pengumpulan Data dan Bahan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Aplikasi Terkait yang Sering gangguan 3. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Melaporkan kendala aplikasi 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang	Juli - Desember 2024
7.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7		3 42,86	13.500.000	3.525.000	26,11	Kasubbag Perencanaan	1. Keterlambatan Dalam Mendapatkan Data dan Informasi Dari Bidang-Bidang 2. Banyaknya Laporan Tahun 2023 yang Belum Diselesaikan Diawal 2024 3. Intensitas Pekerjaan Meningkat Sehingga Pekerjaan Menjadi Banyak yang Tertunda 4. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang 5. Aplikasi yang Kadang Gangguan Sehingga Menghambat Pekerjaan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Manajemen pekerjaan di internal sub bagian 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang 4. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1.1	Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	2	1 50,00					Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan Dalam Mendapatkan Data dan Informasi Dari Bidang-Bidang 2. Banyaknya Laporan Tahun 2023 yang Harus Diselesaikan Diawal 2024 3. Intensitas Pekerjaan Meningkat Sehingga Pekerjaan Menjadi Banyak yang Tertunda 4. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang 5. Aplikasi yang Kadang Gangguan Sehingga Menghambat Pekerjaan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Manajemen pekerjaan di internal sub bagian 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang 4. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1.2	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	2	1	50,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan Dalam Mendapatkan Data dan Informasi Dari Bidang-Bidang 2. Banyaknya Laporan Tahun 2023 yang Harus Diselesaikan Diawal 2024 3. Intensitas Pekerjaan Meningkat Sehingga Pekerjaan Menjadi Banyak yang Tertunda 4. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang 5. Aplikasi yang Kadang Gangguan Sehingga Menghambat Pekerjaan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Manajemen pekerjaan di internal sub bagian 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang 4. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1.3	Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	2	1 50,00					Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan Dalam Mendapatkan Data dan Informasi Dari Bidang-Bidang 2. Banyaknya Laporan Tahun 2023 yang Harus Diselesaikan Diawal 2024 3. Intensitas Pekerjaan Meningkat Sehingga Pekerjaan Menjadi Banyak yang Tertunda 4. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang 5. Aplikasi yang Kadang Gangguan Sehingga Menghambat Pekerjaan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Manajemen pekerjaan di internal sub bagian 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang 4. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1.4	Tersusunnya Dokumen Renstra	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1	0 0,00					Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan Dalam Mendapatkan Data dan Informasi Dari Bidang-Bidang 2. Banyaknya Laporan Tahun 2023 yang Harus Diselesaikan Diawal 2024 3. Intensitas Pekerjaan Meningkat Sehingga Pekerjaan Menjadi Banyak yang Tertunda 4. Masih Dalam Tahap Pengkoreksian Oleh Mitra Bappedalitbang 5. Aplikasi yang Kadang Gangguan Sehingga Menghambat Pekerjaan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk pengumpulan data dan informasi 2. Manajemen pekerjaan di internal sub bagian 3. Melakukan follow up kepada Mitra Bappedalitbang 4. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024
7.1.2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Tersusun Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Tersusun Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0,00	7.000.000	-	0,00	Kasubbag Perencanaan	1. Pengumpulan Bahan untuk Menyusun RKA oleh Masing-Masing Bidang Masih Dalam Proses 2. Adanya Pengusulan SSH Baru Melalui SILAKAS Pada RKA 2024 Masih Masih Memperlambat Proses Penyusunan RKA 3. Ada Beberapa Rincian Belanja yang Belum Terakomodir di Standar Biaya	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang dalam penyusunan RKA 2. Berkoordinasi dengan BPKPAD terkait usulan Standay Biaya terkhusus pada aplikasi SILAKAS	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											(SSH, SBU, SPK dan ASB)		
7.1.2.1	Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Pengumpulan Bahan untuk Menyusun RKA oleh Masing-Masing Bidang Masih Dalam Proses 2. Adanya Pengusulan SSH Baru Melalui SILAKAS Pada RKA 2024 Sehingga Sedikit Memperlambat Proses Penyusunan RKA 3. Ada Beberapa Rincian Belanja yang Belum Terakomodir di Standar Biaya (SSH, SBU, SPK dan ASB)	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang dalam penyusunan RKA 2. Berkoordinasi dengan BPKPAD terkait usulan Standay Biaya terbaru pada aplikasi SILAKAS	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1	50,00	5.000.000	-	0,00	Kasubbag Perencanaan	1. Kurang Cepatnya Masing-Masing Bidang dalam Proses Penanganan 2. Aplikasi SIPD yang Sering Gangguan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses penanganan anggaran 2. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024
7.1.3.1	Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	2	1	50,00				Staf / Pelaksana	1. Kurang Cepatnya Masing-Masing Bidang dalam Proses Pergeseran 2. Aplikasi SIPD yang Sering Gangguan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pergeseran anggaran 2. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024
7.1.4	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1	100,00	7.000.000	601.000	8,59	Kasubbag Perencanaan	1. Kurang Cepatnya Bidang-Bidang Dalam Penanganan Data 2. Adanya Pembaharuan Aplikasi SIPD Penatausahaan dan Keuangan 3. Penandatanganan Dokumen DPA di Bagian Administrasi Pembangunan yang Memerlukan Waktu yang Lama	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data 2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait penyesuaian penyelesaian pembaharuan aplikasi SIPD dan penandatanganan dokumen DPA	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.4.1	Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	1	1	100,00				Staf / Pelaksana	1. Kurang Cepatnya Bidang-Bidang Dalam Mengumpulkan Data 2. Adanya Pembahasan Aplikasi SIPD Penatausahaan dan Keuangan 3. Penandatanganan Dokumen DPA di Bagian Administrasi Pembangunan yang Memerlukan Waktu yang Lama	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data 2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait mengenai waktu penyelesaian pembahasan aplikasi SIPD dan penandatanganan dokumen DPA	Juli - Desember 2024
7.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0,00	5.000.000	-	0,00	Kasubbag Perencanaan	1. Kurang Cepatnya Masing-Masing Bidang dalam Proses Pembahasan aplikasi SIPD yang Sering Gangguan 2. Aplikasi SIPD yang Sering Gangguan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pembahasan aplikasi anggaran 2. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024
7.1.5.1	Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	2	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Kurang Cepatnya Masing-Masing Bidang dalam Proses Pergeseran 2. Aplikasi SIPD yang Sering Gangguan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pergeseran anggaran 2. Melaporkan kendala aplikasi	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	6	4	66,67	12.500.000	3.847.500	30,78	Kasubbag Perencanaan	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Beberapa Data yang Belum Rilis 3. Sulit Mencocokkan Waktu Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Terkait	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Memvalidasi data yang sudah diinputkan 3. Berkoordinasi dengan intens ke bidang-bidang agar data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Desember 2024
7.1.6.1	Tersusunnya Laporan LKJIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	1	1	100,00				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Beberapa Data yang Belum Rilis 3. Sulit Mencocokkan Waktu Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Terkait	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Memvalidasi data yang sudah dikumpulkan 3. Berkoordinasi dengan intens ke bidang-bidang agar data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.6.2	Tersusunnya Laporan LKPJ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1	1	100,00				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Beberapa Data yang Belum Rilis 3. Sulit Mencocokkan Waktu Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Terkait	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Memvalidasi data yang sudah dikumpulkan 3. Berkoordinasi dengan intens ke bidang-bidang agar data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Desember 2024
7.1.6.3	Tersusunnya Laporan LPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	1	1	100,00				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Beberapa Data yang Belum Rilis 3. Sulit Mencocokkan Waktu Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Terkait	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Memvalidasi data yang sudah dikumpulkan 3. Berkoordinasi dengan intens ke bidang-bidang agar data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.6.4	Tersusunnya Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	3	1	33,33				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Beberapa Data yang Belum Rilis 3. Sulit Mencocokkan Waktu Untuk Berkoordinasi Dengan Pihak Eksternal Terkait	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Memvalidasi data yang sudah diinputkan 3. Berkoordinasi dengan intens ke bidang-bidang agar data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Desember 2024
7.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	6	40,00	7.000.000	-	0,00	Kasubbag Perencanaan	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Adanya Keterlambatan Penginputan Simondalev Karena Belum Tersedianya Penginputan Simondalev 2024 3. Belum Dapat Diunduhnya Keterisian Simondalev Karena Simondalev 2024 Masih Belum Sepenuhnya Siap Saat Proses Penginputan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Berkoordinasi dengan Mitra Bappedalitbang secara intens terkait waktu penginputan aplikasi simondalev	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.7.1	Tersusunnya Laporan SAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	1	0 0,00					Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Adanya Keterlambatan Penginputan Simondalev Karena Belum Menerima Penginputan Simondalev 2024 3. Belum Dapat Diunduhnya Keterisian Simondalev Karena Simondalev 2024 Masih Belum Sepenuhnya Siap Saat Proses Penginputan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Berkoordinasi dengan Mitra Bappedalitbang secara intens terkait waktu penginputan aplikasi simondalev	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.7.2	Tersusunnya Laporan IKKI Semester I dan Semester II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	2	0 0,00					Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Adanya Keterlambatan Penginputan Simondalev Karena Belum Tersedianya Penginputan Simondalev 2024 3. Belum Dapat Diunduhnya Keterisian Simondalev Karena Simondalev 2024 Masih Belum Sepenuhnya Siap Saat Proses Penginputan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Berkoordinasi dengan Mitra Bappedalitbang secara intens terkait waktu penginputan aplikasi simondalev	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.7.3	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	12	6	50,00				Staf / Pelaksana	1. Kurangnya Respon Cepat Dari Bidang-Bidang Dalam Pengumpulan Bahan-Bahan Laporan yang Diminta Oleh Sub Bagian Perencanaan 2. Adanya Keterlambatan Penginputan Simondalev Karena Belum Tersedianya Penginputan Simondalev 2024 3. Belum Dapat Diunduhnya Keterisian Simondalev Karena Simondalev 2024 Masih Belum Sepenuhnya Siap Saat Proses Penginputan	1. Memberikan deadline dan berkoordinasi kepada bidang-bidang dalam proses pengumpulan data untuk bahan laporan 2. Berkoordinasi dengan Mitra Bappedalitbang secara intens terkait waktu penginputan aplikasi simondalev	Juli - Desember 2024
7.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100	50	50,00	5.653.244.485	3.346.987.328	59,20	Sekretaris	1. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 2. Kode rekening sering tidak tepat	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Memastikan kode rekening sesuai dengan DPA	Juli - Desember 2024
7.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	100,00	5.560.828.485	3.285.979.028	59,09	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Keterlambatan dalam perhitungan dan pendataan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah	1. Berkoordinasi dengan Subbag Umpeg terkait rekapitulasi pemotongan TPP 2. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2.1.1	Terkelolanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	36	36	100,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan dalam perhitungan dan pendataan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah	1. Berkoordinasi dengan Subbag Umpeg terkait rekapitulasi pemotongan TPP 2. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024
7.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76	38	50,00	81.600.000	56.960.000	69,80	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 2. SPJ dari bidang-bidang belum lengkap 3. Kode rekening sering tidak tepat	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Membuat checklist untuk kelengkapan SPJ yang diberikan ke bidang-bidang 3. Memastikan kode rekening sama dengan DPA	Juli - Desember 2024
7.2.2.1	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	76	38	50,00				Staf / Pelaksana	1. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 2. SPJ dari bidang-bidang belum lengkap 3. Kode rekening sering tidak tepat	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Membuat checklist untuk kelengkapan SPJ yang diberikan ke bidang-bidang 3. Memastikan kode rekening sama dengan DPA	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0,00	5.408.000	-	0,00	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Keterlambatan dalam Kelengkapan dokumen untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 3. Kurangnya sarpras	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Meningkatkan koordinasi internal di subbag keuangan 3. Mengusulkan sarpras	Juli - Desember 2024
7.2.3.1	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan dalam Kelengkapan dokumen untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 3. Kurangnya sarpras	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Meningkatkan koordinasi internal di subbag keuangan 3. Mengusulkan sarpras	Juli - Desember 2024
7.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	1	50,00	5.408.000	4.048.300	74,86	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Keterlambatan dalam Kelengkapan Dokumen Untuk Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Eksternal 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 3. Sarpras yang belum memadai	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Meningkatkan koordinasi internal di subbag keuangan 3. Mengusulkan sarpras	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2.4.1	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2	1	50,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan dalam Kelengkapan Dokumen Untuk laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Eksternal 2. Aplikasi SIPD yang sering bermasalah 3. Sarpras yang belum memadai	1. Melaporkan kendala aplikasi SIPD ke Instansi terkait 2. Meningkatkan koordinasi internal di subbag keuangan 3. Mengusulkan sarpras	Juli - Desember 2024
7.3	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	50	50,00	12.964.000	9.780.800	75,45	Sekretaris	1. Lambatnya tindak lanjut dari bidang aset mengenai rencana penghapusan aset 2. Keterlambatan Mengumpulkan Data Dari Bidang-Bidang Dalam Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan koordinasi dengan bidang aset BPKPAD mengenai aset 2. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk mengumpulkan data RKBMD	Juli - Desember 2024
7.3.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan arang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0,00	4.680.000	2.547.500	54,43	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Keterlambatan Mengumpulkan Data Dari Bidang-Bidang Dalam Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Aplikasi SIMDA Aset yang sering gangguan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk mengumpulkan data RKBMD 2. Melaporkan kendala aplikasi SIMDA Aset ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.3.1.1	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1	0	0,00				Staf /	1. Keterlambatan Mengumpulkan Data Dari Bidang-Bidang Dalam Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Aplikasi SIMDA Aset yang sering gangguan	1. Memberikan deadline kepada bidang-bidang untuk mengumpulkan data RKBMD 2. Melaporkan kendala aplikasi SIMDA Aset ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024
7.3.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0,00	5.400.000	5.121.800	94,85	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Sarpras yang belum memadai 2. Lambatnya tindak lanjut dari bidang aset BPKPAD terkait penghapusan aset	1. Mengusulkan sarpras 2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang aset BPKPAD penghapusan aset	Juli - Desember 2024
7.3.2.1	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Sarpras yang belum memadai 2. Lambatnya tindak lanjut dari bidang aset BPKPAD terkait penghapusan aset	1. Mengusulkan sarpras 2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang aset BPKPAD penghapusan aset	Juli - Desember 2024
7.3.3	Terlaksananya Penatausahaan arang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0,00	2.884.000	2.111.500	73,21	Kasubbag Keuangan & Aset	1. Keterlambatan dalam Pendataan untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Aplikasi SIMDA Aset yang sering bermasalah	1. Meningkatkan koordinasi internal 2. Melaporkan kendala aplikasi SIMDA Aset ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.3.3.1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun		1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Keterlambatan dalam Pendataan untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Aplikasi SIMDA Aset yang sering bermasalah	1. Meningkatkan koordinasi internal 2. Melaporkan kendala aplikasi SIMDA Aset ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024
7.4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu		8	5	62,50	75.287.500	52.596.645	69,86	Sekretaris	Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II	Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan II	Juli - Desember 2024
7.4.1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3	2	66,67	30.287.500	7.596.645	25,08	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Jadwal Bimtek yang tidak menentu	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana bimtek	Juli - Desember 2024
7.4.1.1	Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3	2	66,67				Staf / Pelaksana	Jadwal Bimtek yang tidak menentu	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana bimtek	Juli - Desember 2024
7.4.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	3	60,00	45.000.000	45.000.000	100,00	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II	Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di Triwulan II	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.4.2.1	Terkelolanya Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	3	60,00				Staf / Pelaksana	Jadwal Bimtek yang tidak menentu	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana bimtek	Juli - Desember 2024
7.5	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran		100	50	50,00	717.106.475	447.246.229	62,37	Sekretaris	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia		1	0	0,00	27.040.000	18.767.000	69,40	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.1.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun		1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	0	0,00	38.264.000	14.172.500	37,04	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.5.2.1	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0,00	42.533.000	23.776.500	55,90	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.3.1	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Terdapat permintaan bahan logistik yang tidak tersedia di anggaran dan penyedia	Melakukan koordinasi dengan penyedia terkait permintaan bahan logistik	Juli - Desember 2024
7.5.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0,00	21.870.000	9.560.000	43,71	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Permintaan cetakan yang mendadak	Melakukan koordinasi lebih awal	Juli - Desember 2024
7.5.4.1	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Permintaan cetakan yang mendadak	Melakukan koordinasi lebih awal	Juli - Desember 2024
7.5.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	0	0,00	18.750.000	3.650.000	19,47	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1. Terdapat perubahan rincian kegiatan 2. Keterbatasan jumlah penyedia barang	1. Melakukan update rincian kegiatan 2. Melakukan survei penyedia barang	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.5.5.1	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun		2	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Terdapat perubahan rincian kegiatan 2. Keterbatasan jumlah penyedia barang	1. Melakukan update rincian kegiatan 2. Melakukan survei penyedia barang	Juli - Desember 2024
7.5.6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	0	0,00	27.573.661	10.447.000	37,89	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1. Penghitungan kebutuhan untuk kunjungan tamu tidak tepat 2. Terdapat Kunjungan yang dadakan	Mengkonfirmasi ulang terkait jumlah tamu	Juli - Desember 2024
7.5.6.1	Kunjungan/Laporan Fasilitasi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun		1	0	0,00				Staf / Pelaksana	1. Penghitungan kebutuhan untuk kunjungan tamu tidak tepat 2. Terdapat Kunjungan yang dadakan	Mengkonfirmasi ulang terkait jumlah tamu	Juli - Desember 2024
7.5.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	0	0,00	496.075.814	361.873.229	72,95	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Jadwal kegiatan yang tidak menentu	Melaksanakan koordinasi terkait jadwal kegiatan	Juli - Desember 2024
7.5.7.1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun		1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Jadwal kegiatan yang tidak menentu	Melaksanakan koordinasi terkait jadwal kegiatan	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.5.8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	0	0,00	45.000.000	5.000.000	11,11	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Jadwal kegiatan yang kurang tersusun sehingga kegiatan tidak terlaksana	Menyusun jadwal kegiatan lebih rinci	Juli - Desember 2024
7.5.8.1	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun		1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Jadwal kegiatan yang kurang tersusun sehingga kegiatan tidak terlaksana	Menyusun jadwal kegiatan lebih rinci	Juli - Desember 2024
7.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan		100	50	50,00	636.138.400	3.514.000	0,55	Sekretaris	Terdapat Perubahan Rincian Barang Yang akan dibeli	Melakukan update berkala mengenai rincian barang yang akan dibeli	Juli - Desember 2024
7.6.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		144	40	27,78	636.138.400	3.514.000	0,55	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Terdapat Perubahan Rincian Barang Yang akan dibeli	Melakukan update berkala mengenai rincian barang yang akan dibeli	Juli - Desember 2024
7.6.1.1	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola		144	40					Staf / Pelaksana	Terdapat Perubahan Rincian Barang Yang akan dibeli	Melakukan update berkala mengenai rincian barang yang akan dibeli	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.7	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	50	50,00	2.335.668.040	1.275.958.914	54,63	Sekretaris	Tagihan dari penyedia jasa tidak dalam waktu yang bersamaan	Pembayaran menyesuaikan di tanggal terakhir	Juli - Desember 2024
7.7.1	Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	0	0,00	6.330.000	1.500.000	23,70	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Persediaan sesuai dengan kebutuhan	Menambah persediaan materai	Juli - Desember 2024
7.7.1.1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat dan Laporan Penyediaan Jasa	2	0	0,00				Staf / Pelaksana	Persediaan sesuai dengan kebutuhan	Menambah persediaan materai	Juli - Desember 2024
7.7.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	2	66,67	340.558.600	106.382.395	31,24	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Tagihan dari penyedia jasa tidak dalam waktu yang bersamaan	Pembayaran menyesuaikan di tanggal terakhir	Juli - Desember 2024
7.7.2.1	Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	3	2	66,67				Staf / Pelaksana	Tagihan dari penyedia jasa tidak dalam waktu yang bersamaan	Pembayaran menyesuaikan di tanggal terakhir	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.7.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12	5	41,67	1.988.779.440	1.168.076.519	58,73	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1. Pengumpulan tanda terima gaji PTT yang terlambat 2. SIPD NPD yang mengalami gangguan	1. Melaksanakan koordinasi internal 2. Membuat deadline penandatanganan tanda terima gaji PTT 3. Melaporkan kendala aplikasi SIPD NPD ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024
7.7.3.1	Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun		12	5	41,67				Staf / Pelaksana	1. Pengumpulan tanda terima gaji PTT yang terlambat 2. SIPD NPD yang mengalami gangguan	1. Melaksanakan koordinasi internal 2. Membuat deadline penandatanganan tanda terima gaji PTT 3. Melaporkan kendala aplikasi SIPD NPD ke Instansi terkait	Juli - Desember 2024
7.8	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan		100	50	50,00	1.172.669.308	398.484.480	33,98	Sekretaris	1. Terdapat kesalahpahaman terkait bagian gedung yang perlu diperbaiki 2. Tidak tersampainya sarana prasarana yang perlu diperbaiki	1. Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan bagian aset 2. Koordinasi internal	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	0	0,00	38.990.000	30.043.247	77,05	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Jadwal kegiatan yang padat	Menunggu waktu luang	Juli - Desember 2024
7.8.1.1	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	1	0	0,00				Staf / Pelaksana	Jadwal kegiatan yang padat	Menunggu waktu luang	Juli - Desember 2024
7.8.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	8	53,33	264.002.000	137.172.333	51,96	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1. Terdapat SPBU yang menggunakan nota manual 2. Banyaknya kendaraan yang melakukan perbaikan 3. Kondisi kendaraan yang sudah lebih dari 5 tahun	1. Kendaraan harus cepat diperbaiki untuk kegiatan operasional 2. Penghapusan aset dan pembelian pengadaan unit baru	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi	Persentase Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.8.2.1	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	15	8	53,33				Staf / Pelaksana	1. Terdapat SPBU yang menggunakan nota manual 2. Banyaknya kendaraan yang melakukan perbaikan 3. Kondisi kendaraan yang sudah lebih dari 5 tahun	1. Kendaraan harus cepat diperbaiki untuk kegiatan operasional 2. Penghapusan aset dan pengajuan pengadaan unit baru	Juli - Desember 2024
7.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	115	25	21,74	50.950.000	23.339.000	45,81	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Terdapat masalah/biaya terkait bagian gedung yang perlu diperbaiki	Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan bagian aset	Juli - Desember 2024
7.8.3.1	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	115	25	21,74				Staf / Pelaksana	Terdapat masalah/biaya terkait bagian gedung yang perlu diperbaiki	Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan bagian aset	Juli - Desember 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis / Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan	
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi					Persentase Realisasi
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.8.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	1	33,33	818.727.308	207.929.900	25,40	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Tidak tersampainya sarana/prasarana yang perlu diperbaiki	Koordinasi internal	Juli - Desember 2024
7.8.4.1	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola		3	1	33,33				Staf / Pelaksana	Tidak tersampainya sarana/prasarana yang perlu diperbaiki	Koordinasi internal	Juli - Desember 2024

Berikut adalah penjelasan singkat terkait hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar :

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi. Program ini terealisasi sebesar 10% dari target 20% dengan persentase capaian 50%.
 - Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah Investor Baru. Program ini terealisasi sebesar 6 Investor dari target 13 Investor dengan persentase capaian 23,08%.
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase LKPM. Program ini terealisasi sebesar 50% dari target 100% dengan persentase capaian 50%.
 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Data dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses. Program ini terealisasi sebesar 50% dari target 100% dengan persentase capaian 50%.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Program ini terealisasi sebesar 0 dari target 87 dengan persentase capaian 0%.
2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
 - Nihil.
3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
 - Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Program ini terealisasi sebesar 89,43 dari target 87 dengan persentase capaian 102,79%.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah karena beberapa capaian kinerja berada di akhir Triwulan IV. Oleh karena itu sebagian besar outputnya dan penyelesaiannya berada di akhir tahun.
- Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah nihil.
- Adapun faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah karena dalam pelaksanaannya semua lini di lingkungan DPMPTSP memaksimalkan semua SDM dan pelayanan sehingga target bisa tercapai dengan cepat.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

- Implikasi yang timbul adalah secara umum akan menambah realisasi capaian hingga tahun terakhir Renstra. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan seperti capaian yang masih sangat minim dan belum mencapai target. Diharapkan nantinya pada Triwulan III dan Triwulan IV bisa dimaksimalkan agar target tahun 2024 bisa tercapai serta target Renstra SKPD yang sudah diperjanjikan juga dapat dicapai dengan baik.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

- Memaksimalkan capaian target pada Triwulan III dan Triwulan IV karena masih ada sebagian kegiatan yang memang hasil akhir capaiannya berada di Triwulan IV.
- Melaksanakan evaluasi berkala terkait dengan capaian kinerja disetiap Triwulan serta berkoordinasi terkait kendala dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil capaian kinerja.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Kabupaten Banjar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Canaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021-2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Perangkat (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN IDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern DPMPTSP	80		73	90, 27	123,66 %	86,15	176,42 %	220,52 %
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	118 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	100 %	16 Dokumen	39 Dokumen	33,05 %
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen erencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen					24 Dokumen	24 Dokumen	80 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
2	18	01	2	01	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahanrka- SKPD	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25 %
2	18	01	2	01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	25 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 01 05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	25 %
2 18 01 2 01 06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	100 %	6 Laporan	29 Laporan	61,70 %
2 18 01 2 02	Administrasi Keuangan erangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2 18 01 2 02 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	36 Orang		26 Orang	37 Orang	142,31 %	36 Orang	73 Orang	202,78 %
2 18 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %		12 Dokumen	20 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	380 Dokumen		76 Dokumen			76 Dokumen	76 Dokumen	20 %
2	18	01	2	02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2 Laporan	40 %
2	18	01	2	02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest er SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest er SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest er SKPD	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	4 Laporan	40 %
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 %		100 %			100 %	100 %	100 %
2	18	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	20 %
2	18	01	2	03	05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 Laporan		1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	20 %

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Canaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 Laporan		1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	20 %	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian erangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	36 Orang		4 Orang	2 Orang	50 %	16 Orang	18 Orang	50 %	
2	18	01	2	05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	15 Orang		3 Orang			7 Orang	7 Orang	46,67 %	
2	18	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang		1 Orang	2 Orang	200 %	20 Orang	22 Orang	104,76 %	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %	
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Dan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	40 %
2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2 Laporan	40 %
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2 Laporan	40 %
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	200 Unit		39 Unit	250 Unit	641,02 %	249 Unit	499 Unit	249,5 %
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang rusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	4 Laporan	40 %
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	15 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	6 Laporan	40 %
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	20 %
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	2 Unit	200 %
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Dan Perizinannya	20 Unit		10 Unit	10 Unit	100 %	14 Unit	24 Unit	120 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Canaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-2)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	125 Unit		54 Unit	140 Unit	259,26 %	91 Unit	231 Unit	184,8 %
2	18	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	3 Gedung		2 Gedung	4 Gedung	200 %	3 Gedung	7 Gedung	233,33 %
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	100 %		30 %	30 %	100 %	20 %	50 %	50 %
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67 %
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	200 %
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen	100 %
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen	100 %
2	18	03				Modal Program Promosi Penanaman	Jumlah Investor Baru	60 Investor	35 Investor	8 Investor	8 Investor	100 %	13 Investor	56 Investor	93,33 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan	Target Kinerja Canaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor Yang Mengenal Kabupaten Banjar	380 Investor		50 Investor	422 Investor	844 %	63 Investor	485 Investor	127,63 %
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		1 Dokumen	100 %
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	45 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	9 Dokumen	10 Dokumen	22,22 %
2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,34	81,53	83	84,01	101,22 %	86,07	251,61 %	284,82 %
2	18	04	2	01		Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	2000 %	2000 %
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Satu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.610 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	3.687 Pelaku Usaha	1.536,25 %	958 Pelaku Usaha	4.645 Pelaku Usaha	288,51 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Canaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Penanaman Modal	3.230 Kegiatan Usaha		480 Kegiatan Usaha	1.614 Kegiatan Usaha	336,25 %	1.301 Kegiatan Usaha	2.915 Kegiatan Usaha	90,25 %
2	18	04	2	01	03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	102 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	130 %	25 Kegiatan Usaha	43 Kegiatan Usaha	42,12 %
2	18	04	2	01	04	Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	178 Orang		33 Orang	33 Orang	100 %	33 Orang	66 Orang	37,01 %
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2	18	05	2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	05	2	01	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha		80 Kegiatan Usaha	530 Kegiatan Usaha	662,5 %	158 Kegiatan Usaha	688 Kegiatan Usaha	688 %
2	18	04	2	01	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	90 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	1.100 %	150 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	777,78 %
2	18	04	2	01	03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	90 Kegiatan Usaha		50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100 %	150 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	222,22 %
2	18	06				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100 %		50 %	50 %	100 %	100 %	150 %	150 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021- 2025	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-3) 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Daerah (N-1)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan realisasi investasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi investasi.

Jumlah seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan oleh DPMPTSP pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Rencana Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.744.240.908 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah). Selengkapnya terkait dengan rencana kerja perubahan dan pendanaan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut :

TAHUN 2024

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	-				100 %	100 %	12.964.000,00	12.964.000,00	12.964.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-				18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	-				8 Orang	8 Orang	75.287.500,00	75.287.500,00	75.287.500,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-				80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	607.785.000,00	13.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																				
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					316 Pelaku Usaha	658 Pelaku Usaha	37.028.000,00	37.028.000,00	45.906.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																				
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	10.095.100,00	10.095.100,00	6.095.100,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																				
							Jumlah Kegiatan Usaha yang menerima pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					634 Kegiatan Usaha	1317 Kegiatan Usaha	23.000.000,00	23.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ)	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

Tabel 2.5
Rincian Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik		Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.457.694.008.540	1.457.694.008.540	Rupiah	955.740.200	955.740.200	-		Kepala Dinas
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	Nilai / Skor	955.740.200	955.740.200	-		
2	Tersusunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20	20 Persen		46.302.400	46.302.400	-		Kepala Bidang Penanaman Modal
2.1	Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	Perda Kemudahan Investasi	1	1 Dokumen		46.302.400	46.302.400	-		Kepala Bidang Penanaman Modal
2.1.1	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1 Dokumen		46.302.400	46.302.400	-		Kepala Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
3	Meningkatnya Jumlah Investor aru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	13	13	Investor	268.195.700	268.195.700	-		Kepala Bidang Penanaman Modal
3.1	Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	76	76	Investor	268.195.700	268.195.700	-		Kepala Bidang Penanaman Modal
3.1.1	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1 Dokumen		36.370.700	36.370.700	-		Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal
3.1.2	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	9 Dokumen		231.825.000	231.825.000	-		Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal
4	Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM	Persentase LKPM	100	100	Persen	641.242.100	641.242.100	-		Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	Meningkatnya Pemahaman Para Investor Terhadap Peraturan Perundangan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	100	Persen	641.242.100	641.242.100	-		Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Modal dan Informasi Penanaman Modal
4.1.1	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	90	20	Kegiatan Usaha	100.312.500	100.312.500	-		Kepala Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4.1.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70	70	Pelaku Usaha	348.684.200	348.684.200	-		Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4.1.3	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70	70	Kegiatan Usaha	192.245.400	192.245.400	-		Kepala Seksi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	Nilai/Skor	80.123.100	91.001.100	10.878.000		Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha, dan Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan
5.1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan & Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Berusaha	100	100	Persen	80.123.100	91.001.100	10.878.000		Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha, dan Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	316	658	Pelaku Usaha	37.028.000	45.906.000	8.878.000	Bertambah karena untuk mengakomodir kegiatan pelayanan di Bidang PJU	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu I dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha II
5.1.2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	634	1317	Kegiatan Usaha	23.000.000	26.000.000	3.000.000	Bertambah karena untuk mengakomodir kegiatan pelayanan di Bidang PJU	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu II dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha I
5.1.3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	Dokumen	10.000.000	13.000.000	3.000.000	Bertambah karena untuk mengakomodir kegiatan pelayanan di Bidang PJU	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu II dan Kepala Seksi Pelayanan Jasa Usaha I
5.1.4	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35	35	Pelaku Usaha	10.095.100	6.095.100	4.000.000	Berkurang karena untuk makan minum untuk ditambahkan ke kegiatan perjalanan dinas	Kepala Seksi Sistem Informasi, Pelayanan dan Pengaduan
6	Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	100	Persen	48.299.400	48.299.400	-		Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan
6.1	Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	100	Persen	48.299.400	48.299.400	-		Kepala Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan
6.1.1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	Dokumen	48.299.400	48.299.400	-		Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Reklame

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern DPMPSTP	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	76	87	Nilai/Skor	10.660.078.208	10.649.200.208	10.878.000		Sekretaris
7.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	27	27	Dokumen	57.000.000	60.800.000	3.800.000		Sekretaris
7.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	Dokumen	13.500.000	13.500.000	-		Kasubbag Perencanaan
7.1.2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	7.000.000	7.000.000	-		Kasubbag Perencanaan
7.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	Dokumen	5.000.000	5.000.000	-		Kasubbag Perencanaan
7.1.4	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Dokumen	7.000.000	7.000.000	-		Kasubbag Perencanaan
7.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	5.000.000	5.000.000	-		Kasubbag Perencanaan
7.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	Laporan	12.500.000	12.500.000	-		Kasubbag Perencanaan

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	15	Laporan	7.000.000	10.800.000	3.800.000	Bertambah karena untuk mengakomodir rapat evaluasi	Kasubbag Perencanaan
7.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dokumen Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat M...	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat M...	100	100	Persen	5.653.244.485	5.659.334.485	6.090.000		Sekretaris
7.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	Orang/Bulan	5.560.828.485	5.560.828.485	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Dokumen Perangkat Daerah Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Dokumen / Modul/Standar Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76	76	Dokumen	81.600.000	87.690.000	6.090.000	Bertambah karena untuk membayar bendara pengurus barang	Kasubbag Perencanaan & Aset
7.2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	5.408.000	5.408.000	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	2	Laporan	5.408.000	5.408.000	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.3	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	Persen	12.964.000	12.964.000	-		Sekretaris
7.3.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan arang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen	4.680.000	4.680.000	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.3.2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Laporan	5.400.000	5.400.000	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.3.3	Terlaksananya Penatausahaan arang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaar Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Laporan	2.884.000	2.884.000	-		Kasubbag Keuangan & Aset
7.4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	8	8	Orang	75.287.500	75.287.500	-		Sekretaris

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4.1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	Orang	30.287.500	30.287.500	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.4.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Orang	45.000.000	45.000.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	100	Persen	717.106.475	927.447.814	210.341.339		Sekretaris
7.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	27.040.000	27.040.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	38.264.000	38.264.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	42.533.000	42.533.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	21.870.000	21.870.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	Dokumen	18.750.000	21.450.000	2.700.000	Bertambah karena untuk pembuatan papan nama dan souvenir	Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.6	Kunjungan dan Fasilitasi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Laporan	27.573.661	35.215.000	7.641.339	Bertambah karena untuk memfasilitasi kebutuhan pelayanan	Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.5.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	496.075.814	696.075.814	200.000.000	Bertambah karena adanya penambahan perjalanan dinas untuk koordinasi kegiatan Kepala Dinas dan Sekretariat	Kasubbag Umum & Kepegawaian

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.5.8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	Dokumen	45.000.000	45.000.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	Persen	636.138.400	693.342.368	57.203.968		Sekretaris
7.6.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	144	144	Unit	636.138.400	693.342.368	57.203.968	Bertambah karena adanya sarana dan prasarana pelayanan	Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.7	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	100	Persen	2.335.668.040	2.198.868.040	136.800.000		Sekretaris
7.7.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Laporan	6.330.000	6.330.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.7.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	Laporan	340.558.600	203.758.600	136.800.000	Berkurang karena ada sarana yang tidak bisa direalisasikan pada 2024	Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.7.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	1.988.779.440	1.988.779.440	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.8	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	Persen	1.172.669.308	1.021.156.001	151.513.307		Sekretaris
7.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	Unit	38.990.000	38.990.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Target			Anggaran		Bertambah / Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
			Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Satuan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.8.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	Unit	264.002.000	265.278.000	1.276.000	Bertambah karena ada perubahan rincian untuk mobil hibah dari 2023 dan 2024	Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115	115	Unit	50.950.000	50.950.000	-		Kasubbag Umum & Kepegawaian
7.8.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	818.727.308	665.938.001	152.789.307	Berkurang karena beberapa gedung sudah terealisasi di tahun 2023	Kasubbag Umum & Kepegawaian

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kab.Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar;
3. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar didalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD);
4. Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024 agar dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut DPMPTSP Kabupaten Banjar terhadap Renja Perubahan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Agar masing-masing sub bagian/bidang dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2024 ini.
2. Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Renja Perubahan Tahun 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024.

Demikian Dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di sisa pelaksanaan tahun 2024 ini.

Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pihak di internal DPMPTSP agar turut bersama-sama melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2024 ini dengan penuh tanggung jawab guna mendukung tercapainya target kinerja DPMPTSP Kabupaten Banjar.

Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2023. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian Perencanaan Tahunan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2024, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2021-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 didasari oleh:

1. Perlunya penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, serta indikator sub kegiatan.
2. Adanya pelaksanaan proyek prioritas, penyesuaian belanja serta perubahan aktivitas

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar yaitu “Meningkatnya Akselerasi Ekonomi kreatif dan Pariwisata, Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar, dan Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Banjar Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bajar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), tanggal 3 Juli 2024;

Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29), tanggal 26 Juli 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Tahun 2024 Disbudporapar Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk melakukan perubahan belanja, menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja tersebut, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 kedalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian sekaligus sebagai sarana pengendalian pada Disbudporapar Kabupaten Banjar dalam sisa tahun pelaksanaan berjalan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2024 Disbudporapar Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar, keterkaitan antara perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

2.1. Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2024

- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- 2.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021 - 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah.
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
- 5) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Maka sesuai urusan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Disbudporapar Kabupaten Banjar yaitu urusan kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan serta pariwisata, serta sesuai tugas dan fungsinya, Disbudporapar Kabupaten Banjar secara khusus mendukung tercapainya misi ke 2 yaitu Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah, pada tujuan ke-1 yaitu terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas dengan sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital.

Disbudporapar Kabupaten Banjar juga mendukung tercapainya misi ke 5 yaitu Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis., dengan tujuan yaitu terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur.dengan sasaran ke-2 yaitu berkembangnya seni budaya Banjar dan seni

budaya religius yang mencerminkan karakter & kepribadian luhur masyarakat Banjar, serta sasaran ke-3 yaitu meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga.

Untuk mendukung tercapainya hal-hal tersebut di atas maka pada tahun 2024 Disbudporapar Kabupaten Banjar telah menetapkan 9 program, 25 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 24.376.911.112,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rincian Belanja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Uraian	Pagu
I	BELANJA DAERAH	
1	BELANJA OPERASI	Rp. 23.573.389.112
	Belanja Pegawai	Rp. 6.313.758.492
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.484.630.620
	Belanja Hibah	Rp. 5.775.000.000
2	BELANJA MODAL	Rp. 803.522.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 276.545.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 245.477.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 181.500.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 100.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp. 24.376.911.112

Sumber data : DPA Disbudporapar Kab.Banjar Tahun 2024

2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan target 52% sedangkan realisasinya mencapai 48%. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.

2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan target 10% sedangkan realisasinya mencapai 0%. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.
3. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan target 66,67% sedangkan realisasinya mencapai 46,67%. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.
4. Program Pembinaan Sejarah, dengan target 60% sedangkan realisasinya belum ada. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan target 67,5% sedangkan realisasinya mencapai 62,5%. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target skor 76 sedangkan realisasinya belum ada. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan target 64 orang sedangkan realisasinya masih belum ada pada Triwulan Ke-II Tahun 2023.
2. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan target 50% sedangkan realisasinya belum ada pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
3. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki 2 indikator yaitu yang pertama Persentase Ketersediaan Amenitas dengan target 52,637% sedangkan realisasinya belum ada. Yang kedua adalah Persentase Destinasi Wisata dengan Aksesibilitas yang Memadai dengan target 38%. Indikator ini realisasinya sudah mencapai targetnya pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
4. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan target 110.000 Orang sedangkan realisasinya sebanyak 27.474 Orang pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
5. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 66,67% sedangkan realisasinya baru mencapai 44,44% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.

6. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 82,14% sedangkan realisasinya baru mencapai 80,36% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
7. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 40 Orang sedangkan realisasinya belum ada pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
8. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan target 67,5% sedangkan realisasinya sudah mencapai 62,50% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
9. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan target 44 Kali sedangkan realisasinya baru mencapai 34 Kali pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
10. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten/Kota, dengan target 375 orang sedangkan realisasinya baru mencapai 75 orang pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
11. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten, dengan target 100% sedangkan realisasinya belum ada sampai Triwulan Ke-II Tahun 2024.
12. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya baru terealisasi 64,03% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
13. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya baru terealisasi 46,37% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
14. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya baru terealisasi 50% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya baru terealisasi 50% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya baru terealisasi 29,76% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Tidak ada.

=

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 Kelompok sedangkan realisasinya juga 1 Kelompok pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan target 36 Unit sedangkan realisasinya juga 36 Unit pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan target 16% sedangkan realisasinya juga 16% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan target 5 organisasi sedangkan realisasinya juga 5 organisasi pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target 100% sedangkan realisasinya juga 100% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% sedangkan realisasinya juga 100% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.

2.4 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan target 38,75% sedangkan realisasinya mencapai 54,73%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan target 34,50% sedangkan realisasinya mencapai 58,50%.
2. Program Pemasaran Pariwisata, dengan target 9% sedangkan realisasinya mencapai 10%.

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pada indikator Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai dengan target 38% sedangkan realisasinya 48% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
2. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan target 100% sedangkan realisasinya 500% pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan target 200 Orang sedangkan realisasinya 207 Orang pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan target 100 Orang sedangkan realisasinya 119 Orang pada Triwulan Ke-II Tahun 2024.

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

2.5.1 Faktor-Faktor Tidak Tercapai Target Kinerja

2.5.1.1 Program

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Faktor penghambat :

Internal:

1. Perhitungan realisasi target program dilaksanakan pada akhir tahun.
2. Alur kas terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Kurangnya SDM pada saat kegiatan dilaksanakan.

Eksternal:

1. Kurangnya koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
2. Pelaku usaha pariwisata yang masih jarang/belum memberikan data yang diminta saat ke lapangan, Lambatnya data yang di berikan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga data yang di sajikan belum update.
3. Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan.

2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Faktor penghambat:

Internal:

kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam bidang kreatif, kurangnya akses terhadap sumber daya manusia.

Eksternal:

Perubahan teknologi dan tren pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif karena pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar baru.

3. Program Pengembangan Kebudayaan.

Faktor penghambat :

Internal:

Staff kebudayaan tidak mengetahui secara spesifik persyaratan yang diinginkan WBTB Kabupaten menjadi WBTB Nasional.

Eksternal:

WBTB Kabupaten tidak diterima menjadi WBTB Nasional.

4. Program Pembinaan Sejarah.

Faktor penghambat :

Internal:

Penyebarluasan Topik sejarah belum dapat dilakukan, karena jadwal pelaksanaannya di triwulan ke-IV.

Eksternal:

Kegiatan ini belum dilaksanakan pada TW ini, karena jadwal pelaksanaan kegiatan terjadwal di TW IV, sehingga tidak dapat ditentukan faktor penghambatnya

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Faktor penghambat :

Internal:

Sulitnya tim verifikasi untuk mendapatkan cagar budaya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Eksternal:

Syarat-syarat untuk penetapan cagar budaya tidak terpenuhi oleh objek diduga cagar budaya.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Internal:

1. Terkadang terjadinya miss communication antara pegawai sub bagian perencanaan dengan pegawai bidang-bidang.

2. Terkadang terjadinya keterlambatan pengiriman data-data dari bidang-bidang yang diperlukan oleh sub bagian perencanaan.

Eksternal:

1. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan di luar hari kerja.
2. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan baru ketika suatu pekerjaan belum selesai.
3. Aplikasi SIPD untuk penginputan anggaran terkadang mengalami gangguan.
4. Terkadang terbitnya peraturan-peraturan terbaru dan aplikasi-aplikasi terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga membuat pekerjaan terhambat karena harus mempelajari atau menjalankan aplikasi-aplikasi baru terbaru tersebut.

2.5.1.2 Kegiatan

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Faktor penghambat :

Internal:

Penetapan tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).

Eksternal:

Minat masyarakat yang ada di destinasi wisata kurang untuk mengakses informasi dari web dan media sosial.

2. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Faktor penghambat :

Internal:

Kurangnya informasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.

Eksternal:

Kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi dan peluang di sektor ekonomi kreatif.

3. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang lain di internal Disbudporapar Kabupaten Banjar

Eksternal:

Kurangnya koordinasi lintas sektor yang berkepentingan dengan kepariwisataan.

4. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki indikator yang belum mencapai target yaitu yang pertama Persentase Ketersediaan Amenitas.

Untuk faktor penghambat indikator pertama :

Internal:

Penginputan aplikasi SIRUP yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Eksternal:

Adanya syarat yang belum terpenuhi pada lokasi pekerjaan.

5. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Sulitnya memenuhi syarat yang diminta sesuai dengan sistem registrasi nasional.

Eksternal:

Beberapa Warisan Budaya Tak Benda tidak memenuhi syarat untuk masuk sitem registrasi nasional.

6. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Proses administrasi untuk pencairan anggaran pembinaan kesenian yang terkadang memerlukan waktu lama.

Eksternal:

Terdapatnya kelompok kesenian yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan.

7. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Penyebarluasan Topik sejarah belum dapat dilakukan, karena jadwal pelaksanaannya di triwulan ke-IV.

Eksternal:

Penyebarluasan Topik sejarah belum dapat dilakukan, karena jadwal pelaksanaannya di triwulan ke-IV.

8. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Kurangnya literatur atau buku-buku sejarah tentang objek yang di duga sebagai cagar budaya

2. Kurangnya alat untuk verifikasi Cagar Budaya.

Eksternal:

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan cagar budaya, minimnya pengetahuan masyarakat sebagai informan Objek diduga cagar budaya.

9. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Faktor Penghambat:

Internal:

Adanya kegiatan lain dibidang olahraga sehingga kegiatan senam tidak bisa dilaksanakan

Eksternal:

1. Faktor alam dan hari besar nasional/keagamaan

2. Kendala dalam penerapan Germas adalah kesibukan pelaku olahraga dan kurangnya kesadaran individu terkait Germas.

10. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena sesuatu hal

Eksternal:

Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena booking gedung sudah terisi, terkadang terkendala dengan batasan usia peserta yang berada pada rentan 16 -30 tahun.

11. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.

Faktor Penghambat:

Internal:

SDM belum memadai.

Eksternal:

Manajemen kepengurusan organisasi kepemudaan belum memadai.

12. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Terkadang terjadinya miss communication antara pegawai sub bagian perencanaan dengan pegawai bidang-bidang.
2. Terkadang terjadinya keterlambatan pengiriman data-data dari bidang-bidang yang diperlukan oleh sub bagian perencanaan.

Eksternal:

1. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan di luar hari kerja.
2. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan baru ketika suatu pekerjaan belum selesai.
3. Aplikasi SIPD untuk penginputan anggaran terkadang mengalami gangguan.
4. Terkadang terbitnya peraturan-peraturan terbaru dan aplikasi-aplikasi terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga membuat pekerjaan terhambat karena harus mempelajari atau menjalankan aplikasi-aplikasi baru terbaru tersebut.

13. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

Belum lengkapnya Rekapitulasi data-data yang dikumpulkan dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Aset.

Eksternal:

Jaringan internet kadang terganggu.

14. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Banyaknya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
2. Banyaknya bahan logistik dan kebutuhan makan minum tamu dan rapat yang dibutuhkan.
3. Banyaknya bahan cetakan yang diperlukan dan terbatasnya waktu pembuatan desain cetak.
4. Kebutuhan rapat Dalam Daerah dan Luar Daerah belum semuanya terpenuhi.

Eksternal:

1. Sulitnya penyesuaian antara peralatan yang diperlukan dengan penyedia peralatan.
2. Banyaknya tamu yang berkunjung sehingga kewalahan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum.
3. Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Banyaknya kebutuhan rapat dan undangan dari instansi dan mitra.

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Sisa stock materai masih mencukupi.
2. Penggunaan ATK yang berlebihan.

Eksternal:

1. Pembayaran sumber daya air, dan telepon sesuai dengan tagihan, sehingga anggaran tidak terserap sebesar target. Pemakaian sumber daya yang berlebihan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan.
2. Pembelian barang menggunakan aplikasi e-catalog yang masih baru memerlukan penyesuaian sehingga memerlukan waktu yang lebih lama

16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

Kurangnya kesadaran pemeliharaan.

Eksternal:

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas Pegawai untuk memelihara barang Milik Daerah.

2.5.2 Faktor-Faktor Terpenuhinya Target Kinerja

2.5.2.1 Kegiatan

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong:

Internal:

Tersedianya Anggaran dan sumber daya manusia mendukung.

Eksternal:

Terlaksananya pencairan anggaran dan tersedianya barang.

2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong:

Internal:

Adanya anggaran dan staff kebudayaan yang membantu untuk pencairan upah petugas yang membantu untuk merawat, menjaga dan melestarikan cagar budaya yang dimiliki Kab. Banjar.

Eksternal:

1. Adanya juru pemelihara sekaligus petugas kebersihan yang membantu untuk melestarikan cagar budaya
2. Adanya SK yang membantu untuk memperkuat status pelestarian Cagar Budaya

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Faktor Pendorong:

Internal:

Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat.

Eksternal:

Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat dengan sistem Pengadaan Langsung.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Faktor Pendorong:

Internal:

tersedianya anggaran dana hibah 6 organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi organisasi olahraga di Kabupaten Banjar.

Eksternal:

Terstandarisasinya organisasi keolahragaan pengusul hibah yang disetujui mendapatkan Dana Hibah berupa uang untuk memajukan olahraga di Kabupaten Banjar.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Adanya pegawai yang bersemangat untuk mengikut bimtek dalam upaya mengembangkan kompetensinya.
2. Kepala Dinas mendukung penuh Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Eksternal:

Banyaknya penyedia jasa bimbingan teknis yang legal secara hukum dan berkompeten.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Faktor Pendorong:

Internal:

Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Eksternal:

Banyaknya penyedia peralatan dan mesin lainnya yang bisa menjadi pilihan.

2.5.3 Faktor-Faktor Melebihi Target Kinerja

2.5.3.1 Program

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Faktor Pendorong:

Internal:

E-flyer dan proses pendaftaran jelas dan mudah dipahami

Eksternal:

Kehadiran peserta pada penyelenggaraan seleksi rata-rata 50% dari pendaftar

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Faktor Pendorong:

Internal:

Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar dan olahraga rekreasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah.

Eksternal:

49 atlet dari 119 atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) tahun 2024 dan 32 atlet dari 29 atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Special Olympics Daerah Tingkat Provinsi (PESODA) tahun 2024 berhasil meraih medali sehingga pada triwulan II persentase atlet yang berdaya saing adalah 54,72%.

3. Program Pemasaran Pariwisata

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Dukungan anggaran yang tersedia.
2. Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam bidangnya.
3. Sesuai dengan arahan pimpinan

Eksternal:

1. Promosi pariwisata yang efektif.
2. Destinasi wisata yang mudah diakses.
3. Kualitas pelayanan pariwisata yang baik dan ramah.

2.5.3.2 Kegiatan

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pada Indikator Persentase Destinasi Wisata dengan Aksesibilitas yang Memadai.

Faktor Pendorong:

Internal:

Adanya fasilitasi kegiatan berupa perencanaan untuk pengusulan kegiatan yang mendukung pencapaian aksesibilitas.

Eksternal:

Adanya partisipasi dari beberapa organisasi perangkat daerah teknik yang terkait.

2. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Faktor Pendorong:

Internal:

Mencapai target kinerja, Melengkapi data-data yang setiap tahun selalu diminta instansi/lembaga lain dan masyarakat, Mewujudkan program dan jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan.

Eksternal:

Dapat melayani masyarakat, lembaga/instansi lain pada saat mereka memerlukan data tentang kepariwisataan, Melayani masyarakat yang memerlukan Rekomendasi pariwisata sehingga dinas dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Faktor Pendorong:

Internal:

Anggaran tersedia sehingga kegiatan kejuaraan daerah berjalan dengan baik

Eksternal:

Terselenggaranya 6 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari Sepak Bola , Pencak Silat, Bola Basket, Bola Voli, Sepak Takraw, dan Bulutangkis yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikutkan dalam POPDA 2024.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Faktor Pendorong:

Internal:

Anggaran tersedia sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi berjalan dengan baik

Eksternal:

Rangkaian hasil dari Kejuaraan Daerah dalam menyeleksi calon atlet POPDA Tahun 2024 telah terpenuhi dan telah memasuki tahap persiapan dan pembinaan yang selanjutnya menjadi Kontingen POPDA Kabupaten Banjar tahun 2024 Hasil POPDA 2024 Kabupaten Banjar berada diperingkat 4, mendapatkan 3 emas 10 perak dan 13 perunggu dengan total 26 medali Bola Basket 1 perak dan 1 perunggu Bulutangkis 2 emas, 1 perak, 1 perunggu Pencak Silat 5 perak dan 9 perunggu Tennis Lapangan 1 perunggu Tinju 1 emas, 3 perak, 1 perunggu.

2.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Dokumen Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu dokumen Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Periode 2021- 2026 yang telah direviu, sehingga capaian target Renja Tahun 2024 ini tentu memiliki dampak terhadap pencapaian target di dokumen Reviu Renstra. Berdasarkan tabel 2.2 di bawah ini, dapat terlihat sejauhmana tingkat capaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra untuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut ini adalah dampak yang timbul terhadap target capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan Pada dokumen Reviu Renstra Disbudporapar 2021- 2026.

- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan II, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2023 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.
- Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan II, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada

di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra Disbudporapar untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

2.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dari uraian faktor pendorong dan penghambat tersebut maka ada beberapa upaya perbaikan yang diambil dalam rangka mendorong tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan berkala, guna mendukung tercapainya target kinerja yang diperjanjikan oleh masing-masing pengampu kinerja.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal Disbudporapar Kabupaten Banjar melalui bimbingan teknis serta konsultasi ke satuan kerja perangkat daerah baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah.
3. Menyusun agenda kegiatan di seluruh unit kerja dengan memperhatikan batas waktu pengerjaan.
4. Menerapkan pembinaan atlet yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas daya saing atlet di semua cabang olahraga yang ditunjang dari segi sarana prasarana olahraga, development of achievement sports education dan Pembinaan secara terus menerus.
5. Akan menambah beberapa titik destinasi wisata serta jumlah petugas pendata jumlah kunjungan wisatawan.
6. Melakukan persiapan untuk memastikan adanya pendata pada aksesibilitas tempat wisata.
7. Melakukan sinergitas dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan akses berupa jalan menuju lokasi wisata.
8. Melakukan penyelesaian desain dan pembuatan RAB Paket kegiatan yang berhubungan dengan destinasi wisata.

9. Melibatkan para duta pariwisata, vlogers, pokdarwis (kelompok sadar wisata), influencers, serta pemangku kepentingan lainnya guna mempromosikan dan memviralkan tempat-tempat pariwisata Kabupaten Banjar baik melalui sosial media yang mereka miliki maupun dengan pertemuan-pertemuan langsung secara tatap muka di berbagai kegiatan.
10. Memberikan pelatihan sebagai tour guide kepada para duta pariwisata agar nantinya dapat menuntun wisatawan lokal maupun mancanegara dalam berwisata.
11. Melaksanakan berbagai event perlombaan yang bertujuan sebagai penunjang peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Banjar sebagai contoh lomba foto atau video tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar.
12. Melaksanakan berbagai event ekonomi kreatif tidak hanya untuk skala daerah Kabupaten Banjar namun juga untuk skala Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat memperkenalkan berbagai produk ekonomi kreatif khas Kabupaten Banjar kepada masyarakat umum.
13. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.
14. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar.
15. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif.
16. Melakukan kerjasama dengan institusi/lembaga pendidikan yang memiliki atau mengkaji ilmiah tentang warisan budaya.
17. Menambah anggaran kegiatan untuk penelitian warisan budaya dari internal maupun eksternal.
18. Mencari dan menggali lagi informasi atau referensi dari lembaga atau individu terkait objek kebudayaan, mengundang pakar dan informan sebagai pemenuhan kebutuhan data.
19. Cagar Budaya yang memiliki potensi namun milik masyarakat akan dilakukan pendekatan secara persuasif dan win-win solution tanpa ada paksaan.
20. Memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya Pecinta Cagar Budaya untuk memberikan informasi atau laporan terkait warisan budaya.

21. Menganggarkan kegiatan survey di sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang kepemudaan.
22. Melakukan pemasangan iklan kegiatan-kegiatan bidang kepemudaan secara lebih intensif di media cetak ataupun elektronik, serta media lainnya seperti pemasangan baliho-baliho atau spanduk di jalan-jalan umum yang ramai dilewati masyarakat, atau tempat—tempat yang sering dikunjungi masyarakat hingga ke tempat-tempat yang biasanya jarang mendapatkan informasi-informasi bidang kepemudaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya Akselerasi Ekonomi kreatif dan Pariwisata	Orang	2.250.000	4.439.537	197,31	Rp. 4.746.240.000	Rp. 725.723.944	15,29	Meningkatnya kualitas layanan, meningkatnya promosi. Adanya petugas pendata, tersediainya anggaran untuk melakukan pendataan sebanyak 25 pendata	Ada event Triwulan I, Triwulan II yang masih berjalan di Kab.Banjar	kurangnya pendata yang ada di titik pendataan destinasi wisata	Cuaca masih tidak menentu, dan masih ada hujan di beberapa tempat wisata, , Ada beberapa spot wisata yang kurang terpelihara, kurangnya inovasi pengelola destinasi wisata, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar destinasi wisata akan adanya wisata di lingkungannya

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan daerah	Orang	2.250.000	4.439.537	197,31	Rp. 4.746.240.000	Rp. 725.723.944	15,29	Meningkatnya kualitas layanan, meningkatnya promosi. Adanya petugas pendata, tersediainya anggaran untuk melakukan pendataan sebanyak 25 pendata	Ada event Triwulan I, Triwulan II yang masih berjalan di Kab.Banjar	kurangnya pendata yang ada di titik pendataan destinasi wisata	Cuaca masih tidak menentu, dan masih ada hujan di beberapa tempat wisata, , Ada beberapa spot wisata yang kurang terpelihara, kurangnya inovasi pengelola destinasi wisata, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar destinasi wisata akan adanya wisata di lingkungannya
	Hari	2	2	100,00	Rp. 4.746.240.000	Rp. 725.723.944	15,29	Tidak ada perhitungan. Karena Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas pendata usaha pariwisata (Pendataan akomodasi mendapatkan data bahwa rata-rata lama menginap untuk pengunjung adalah 1,6 hari dibulatkan menjadi 2 hari))	Ada beberapa event yang berjalan di Kab.Banjar dengan waktu lebih dari 1 hari	Ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya minat masyarakat lokal untuk menghabiskan uang pada aktivitas wisata.	Ketidakstabilan ekonomi untuk menghabiskan uang dan menetap lebih lama di destinasi wisata Kabupaten Banjar

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Rp.	692.730	692.730	100,00	Rp. 4.746.240.000	Rp. 725.723.944	15,29	Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan atraksi wisata, serta kerajinan tangan / souvenir ditempatkan-tempat wisata.	keinginan wisatawan/turis untuk menikmati makanan khas daerah dan oleh-oleh khas daerah	kesulitan dalam mengumpulkan data pengeluaran yang riil dari pengunjung.	Ketidakstabilan ekonomi untuk menghabiskan uang pada aktivitas wisata.
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen (%)	48	48	100,00	Rp. 1.914.395.500	Rp. 410.006.450	21,42	Koordinasi dengan kepala dinas berjalan baik untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah dan akan berjalan	Koordinasi dengan pengelola destinasi untuk kegiatan yang akan terlaksana berjalan dengan baik.	1. Perhitungan realisasi target program dilaksanakan pada akhir tahun. 2. Alur kas terkadang tidak seusai dengan yang telah direncanakan. 3. Kurangnya SDM pada saat kegiatan dilaksanakan.	1. Kurangnya koordinasi lintas sektor kepariwisataan. 2. Pelaku usaha pariwisata yang masih jarang/belum memberikan data yang diminta saat ke lapangan, Lambatnya data yang di berikan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga data yang di sajikan belum update. 3. Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persen (%)	N/A	N/A	N/A	Rp. 308.643.000	Rp. 132.870.000	43,05	1. Adanya kegiatan pelatihan bagi pengelola dan pelaku usaha wisata. 2. Tersedianya anggaran kegiatan pelatihan bagi pengelola dan pelaku usaha wisata.	1. Adanya minat pengelola pariwisata dan pelaku usaha pariwisata untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia.	1. Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang lain di internal Disbudporapar Kabupaten Banjar	1. Kurangnya koordinasi lintas sektor kepariwisataan.
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Orang	200	250	125,00	Rp. 308.643.000	Rp. 132.870.000	43,05	Mencapai Target kinerja yang sudah di tentukan , Mengaplikasikan program/jadwal kegiatan yang telah tersusun, Dukungan/support atasan untuk melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan	Masyarakat yang mendukung program kerja pemerintah khususnya di bidang kepariwisataan, Keinginan masyarakat dan pemerintah untuk terus mengembangkann kepariwisataan di Kabupaten Banjar	Pergantian Pejabat internal seperti PPTK,PPK yang berpengaruh dalam pencairan dan kebijakan melaksanakan kegiatan, Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena sesuatu hal	Keterlambatan pengolahan SK Kegiatan yang berakibat banyak revisi karena harus di sesuaikan dengan kondisi di lapangan, beberapa kelompok masyarakat yang agak susah untuk di ajak kerjasama untuk mengikuti pelatihan
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen (%)	16,79	0	0,00	Rp. 1.542.670.000	Rp. 270.495.450	17,53	Dana tersedia oleh Dinas, dan Dinas memfasilitasi untuk survey lokasi	Adanya koordinasi yang baik dengan pengelola wisata	Penginputan SIRUP yang memerlukan waktu yang lumayan lama	Adanya syarat yang belum terpenuhi pada lokasi pekerjaan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persen (%)	48	48	100				Adanya fasilitasi kegiatan berupa perencanaan untuk pengusulan kegiatan yang mendukung pencapaian aksesibilitas	Adanya partisipasi dari beberapa OPD teknik terkait	Tidak tercovernya program prioritas OPD yang menangani aksesibilitas	Belum adanya forum dan komitmen bersama untuk penanganan aksesibilitas yang menunjang kegiatan pariwisata
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	N/A	N/A	N/A	Rp. 1.107.550.000	Rp. 9.854.600	0,89	Dinas memfasilitasi untuk melakukan survey ke lokasi wisata yang akan dibangun toilet, gapura, dermaga, dan rambu.	Adanya koordinasi yang baik dengan desa yang akan dibangun atau dibuatkan sarana prasarana tersebut	Masih ada saran revisi Design untuk toilet, dermaga dan gapura dari Pengelola teknis, Adanya penyesuaian pagu anggaran untuk kesesuaian kondisi lapangan (ex= pagu akrilik dan pagu gapura)	Adanya perubahan titik lokasi disebabkan permintaan dari stakeholder eksternal, dan menyesuaikan jadwal dengan pihak konsultan untuk mengadakan rapat, dikarenakan bulan Mei banyak tanggal merah jadi rapat dilakukan diakhir bulan. Dan proses penyusunan DED yang memerlukan waktu.
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	N/A	N/A	Rp. 290.120.000	Rp. 195.777.350	67,48	Kegiatan Jambore telah berjalan dengan lancar. Adanya dana dari Dinas, dan SDM memadai	Adanya koordinasi yang baik dengan para pokdarwis	target belum terpenuhi karena realisasinya dibuat di akhiir tahun	Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Laporan	2	2	100,00	Rp. 145.000.000	Rp. 64.863.500	44,73	Adanya dana dari Dinas, dan SDM memadai	Adanya koordinasi yang baik dengan petugas pendata di 24 titik lokasi wisata.	Kurangnya koordinasi antar bidang destinasi dengan sub bagian perencanaan serta sub bagian keuangan	website atau aplikasi Destia Borneo akhir-akhir ini sering mengalami gangguan server, sehingga menghilangkan sebagian data yang telah di input
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persen (%)	100	500	500,00	Rp. 63.082.500	Rp. 6.641.000	10,53	Mencapai target kinerja, Melengkapi data-data yang setiap tahun selalu diminta instansi/lembaga lain dan masyarakat, Mewujudkan program dan jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan	Dapat melayani masyarakat,le mbaga/instnasi lain pada saat mereka memerlukan data tentang kepariwisataan , Melayani masyarakat yang memerlukan Rekomendasi pariwisata sehingga dinas dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata	Kurangnya tenaga administrasi untuk merekap data yang di peroleh di lapangan, kurangnya pengawasan di lapangan karena bersamaan dengan kegiatan yang lain	Pelaku usaha pariwisata yang masih jarang/belum memberikan data yang diminta saat ke lapangan, Lambatnya data yang di berikan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga data yang di sajikan belum update

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Usaha	1	5	500,00	Rp. 63.082.500	Rp. 6.641.000	10,53	Mencapai target kinerja, Melengkapi data-data yang setiap tahun selalu diminta instansi/lembaga lain dan masyarakat, Mewujudkan program dan jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan	Dapat melayani masyarakat,lem baga/instnasi lain pada saat mereka memerlukan data tentang kepariwisataan, Melayani masyarakat yang memerlukan Rekomendasi pariwisata sehingga dinas dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata	Kurangnya tenaga administrasi untuk merekap data yang di peroleh di lapangan, kurangnya pengawasan di lapangan karena bersamaan dengan kegiatan yang lain	Pelaku usaha pariwisata yang masih jarang/belum memberikan data yang diminta saat ke lapangan, Lambatnya data yang di berikan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga data yang di sajikan belum update
Program Pemasaran Pariwisata	Persen (%)	6	10	166,67	Rp. 2.399.978.000	Rp. 292.853.394	12,20	1.Dukungan anggaran yang tersedia. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam bidangnya. 3.Sesuai dengan arahan pimpinan	promosi pariwisata yang efektif, destinasi wisata yang mudah diakses, kualitas pelayanan pariwisata yang baik dan ramah	Penetapan tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).	1.Ada kegiatan yang lebih prioritas sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. 2. Tidak tersedianya jaringan internet di destinasi wisata yang dipromosikan. 3. Jaringan internet di destinasi wisata hanya untuk provider tertentu saja.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	40.500	27.474	67,84	Rp. 2.399.978.000	Rp. 292.853.394	12,20	konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi destinasi wisatanya ke media sosial.	Penetapan tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).	Minat masyarakat yang ada di destinasi wisata kurang untuk mengakses informasi dari web dan medsos
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 5.000.000	Rp. 0	0,00			tidak tersedianya fasilitas untuk petugas pendata	tidak adanya masyarakat yang terdata
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	2	200,00	Rp. 1.768.096.000	Rp. 133.611.000	7,56	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia di anggaran kas sesuai dengan perencanaan kegiatan	kerjasama terjalin dengan baik antara dinas dan dinas lain, dibantu juga dari pihak kepolisian. dan pihak ketiga bisa bekerjasama sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan	adanya beberapa perubahan yang harus disesuaikan	ada kegiatan lain diluar Disbudporapar yang wajib diikuti sesuai arahan pimpinan
	Laporan	1	1	100,00	Rp. 1.768.096.000	Rp. 133.611.000	7,56	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia di anggaran kas sesuai dengan perencanaan kegiatan	kerjasama terjalin dengan baik antara dinas dan dinas lain, dibantu juga dari pihak kepolisian. dan pihak ketiga bisa bekerjasama	adanya beberapa perubahan yang harus disesuaikan	ada kegiatan lain diluar Disbudporapar yang wajib diikuti sesuai arahan pimpinan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
									sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan		
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	3	100,00	Rp. 626.882.000	Rp. 159.242.394	25,40	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia di anggaran kas sesuai dengan perencanaan kegiatan	pihak ketiga sebagai vendor bisa bekerjasama sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan	Penetapan tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan	ada kegiatan lain diluar Disbudporapar yang wajib diikuti sesuai arahan pimpinan
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen (%)	N/A	N/A	N/A	Rp. 431.866.500	Rp. 22.864.100	5,29	kreatifitas dan inovasi kemampuan masyarakat menghasilkan ide-ide baru, meningkatnya keterampilan yang tinggi dan bakat berkualitas sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar	adanya dukungan kebijakan pemerintah sehingga terfasilitasinya produk pelaku ekraf, adanya ketersediaan pasar dan permintaan konsumen terhadap produk dan layanan kreatif sehingga dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif	kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam bidang kreatif, kurangnya akses terhadap sumber daya manusia	Perubahan teknologi dan tren pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif karena pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar baru

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	orang	N/A	N/A	N/A	Rp. 431.866.500	Rp. 22.864.100	5,29	adanya akses yang baik terhadap pelatihan ekonomi kreatif	adanya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi kreatif sehingga dapat menjadi faktor pendorong	kurangnya informasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif	kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi dan peluang di sektor ekonomi kreatif
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	N/A	N/A	N/A	Rp. 344.386.500	Rp. 0	0,00	adanya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dalam di jalankan dengan lancar dan bermanfaat bagi para peserta.	1.Terfasilitasiny a produk pelaku ekraf. 2. Meningkatnya pengetahuan pelaku ekraf dalam pemasaran produk mereka secara digital	Sub kegiatan ini adalah sub kegiatan baru sehingga para pegawai masih kesulitan dalam menjabarkan aktivitas yang sesuai dengan sub kegiatan ini	pelaksanaan masih terbentur dengan kegiatan yang lain sehingga masih dalam diskusi.
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	100,00	Rp. 87.480.000	Rp. 22.864.100	26,14	Adanya SDM yang dapat diandalkan dalam membantu melaksanakan kegiatan workshop sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar	Antusias dari peserta yang mengikuti workshop ekraf	Karena kegiatan pada sub kegiatan ini direncanakan pada awalnya pada triwulan ke-I namun karena adanya faktor penghambat eksternal sehingga baru bisa dilaksanakan pada triwulan ke-II	1. Camat dan sekcama di tempat semula yang direncanakan wafat, dan kasi yang membantu kordinasi di kecamatan itu purna tugas sehingga lokasi kegiatan dipindah ke kecamatan lain. 2. Lokasi pelaksanaan kegiatan terdampak banjir

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar.	Persen (%)	66,67	53,3	79,95	Rp. 1.770.713.400	Rp. 461.077.926	26,04	Terdapatnya SDM dalam hal ini Kepala Dinas, Kabid, Kasi dan Staff kebudayaan yang membantu realisasi kegiatan pelestarian Budaya	-Adanya unsur-unsur budaya benda dan tak benda yang dapat dilestarikan - Adanya Pelaku yang masih melestarikan Budaya	Beberapa Budaya ada yang memang belum dilestarikan atau dilaksanakan , karena belum jadwal pelaksanaannya	Beberapa budaya yang akan dilestarikan memiliki sedikit peminat dan pelaku sehingga menghambat pelaksanaannya
Meningkatnya pelestarian budaya	Event	3	3	100,00	Rp. 1.770.713.400	Rp. 461.077.926	26,04	Tersedianya anggaran serta staff Bidang kebudayaan yang membantu untuk pelaksanaan event budaya	Adanya peserta dan bantuan dari stakeholder diluar Disbudporapar yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	waktu persiapan dan proses pengadministrasian dokumen yang terbatas	Peserta yang mengikuti event sering tiba-tiba mengundurkan diri pada hari H
Program Pengembangan Kebudayaan	Persen (%)	44,44	46,67	105,02	Rp. 1.426.498.500	Rp. 405.127.626	28,40	Adanya staff bidang kebudayaan yang membantu untuk mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan untuk memasukkan WBTB Kabupaten ke WBTB nasional	Warisan budaya tak benda yang didaftarkan memenuhi syarat WBTB Nasional	Staff kebudayaan tidak mengetahui secara spesifik persyaratan yang diinginkan WBTB Kabupaten menjadi WBTB Nasional	WBTB Kabupaten tidak diterima menjadi WBTB Nasional
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen (%)	44,44	44,44	100,00	Rp. 10.804.500	Rp. 0	0,00	Adanya anggran untuk mengidentifikasi dan memverifikasi WBTB untuk dimasukkan ke dalam sistem regnas	Terdapatnya WBTB yang dapat dimasukkan ke dalam sistem regnas	Sulitnya memenuhi syarat yang diminta sesuai dengan sistem regnas	Beberapa WBTB tidak memenuhi syarat untuk masuk sitem regnas

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	N/A	N/A	0,00	Rp. 10.804.500	Rp. 0	0,00	adanya kekompakan di bidang untuk mengerjakan kegiatan bersama- sama	lokasi tempat pencarian WBTB yang tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau	Terhambatnya pencarian data WBTB karena kekurangan personel yang memahami tentang pengisian persyaratan WBTB	narasumber untuk WBTB yang kadang sulit untuk dicari karena berbagai alasan antara lain tidak mengetahui sejarahnya atau tidak mau diekspos dimedia
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen (%)	80,36	80,36	100,00	Rp. 1.400.694.000	Rp. 390.127.626	27,85	Tersedianya anggaran untuk mendukung dan membina kelompok kesenian	Terdapatnya sejumlah kelompok kesenian yang dapat dibina	Proses administrasi untuk pencairan anggaran pembinaan kesenian yang terkadang memerlukan waktu lama	Terdapatnya kelompok kesenian yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek	3	3	100,00	Rp. 1.337.287.000	Rp. 377.137.626	28,20	Tersedianya Anggaran dan sumber daya manusia mendukung	tersedianya fasilitas tempat kegiatan dari stakeholder terkait	kurangnya anggaran dan dan kurangnya SDM dalam melaksanakan kegiatan	tidak adanya dukungan dari stakeholder pada kegiatan pasar wadai , pedagang pasar wadai tidak koperatif, kurangnya minat pengunjung dalam pasar wadai
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	N/A	N/A	N/A	Rp. 63.407.000	Rp. 12.990.000	20,49	Tersedianya Anggaran dan sumber daya manusia mendukung	terlaksananya kegiatan GBN dan sumber daya manusia yang mendukung	pelaksanaan tidak sesuai alur kas	kegiatan yang bersamaan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok	1	1	100,00	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100,00	Tersedianya Anggaran dan sumber daya manusia mendukung	terlaksananya pencairan anggaran dan tersedianya barang	Proses pencairan anggaran memakan waktu lama, karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap	Penggunaan sarana kebudayaan yang tidak berhati- hati, sehingga ada alat kesenian yang baru diperbaiki sudah terjadi kerusakan
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Unit	10	10	100,00	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100,00	Terdapatnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas	Terdapatnya penyedia yang menyediakan sarana yang dibutuhkan	Pengadministrasi- an fasilitas sarana dan parasarana yang memakan waktu	Beberapa sarana dan prasarana yang disedikan tidak digunakan dengan baik
Program Pembinaan Sejarah	Persen (%)	N/A	N/A	N./A	Rp. 28.572.800	Rp. 4.385.800	15,35	Terdapatnya topik sejarah yang akan disebarluaskan	Adanya pihak yang mengerti sejarah, untuk membntu membuat topik sejarah yang akan disebarluaskan	Penyebarluasan Topik sejarah belum dapat dilakukan, karena jadwal pelaksanannya di TW IV	Penyebarluasan Topik sejarah belum dapat dilakukan, karena jadwal pelaksanannya di TW IV
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Orang	N/A	N/A	N./A	Rp. 28.572.800	Rp. 4.385.800	15,35	Adanya anggaran dan tim yang nantinya membantu masyarakat untuk memahami sejarah lokal	Tentunya adanya masyarakat yang dijadikan sasaran untuk memahami sejarah lokal	Kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan ini, karena jadwal kegiatan biasanya dilaksanakan pada TW IV	Kegiatan ini belum dilaksanakan pada TW ini, karena jadwal pelaksanaan kegiatan terjadwal di TW IV, sehingga kami tidak dapat menentukan faktor penghambatnya
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Orang	N/A	N/A	N./A	Rp. 23.372.500	Rp. 0	0,00	adanya dana yang tersedia dan SDM yang memadai	lokasi kegiatan yang mudah dijangkau	belum dilaksanakannya kegiatan karena dianggarkabn pada triwulan III	belum dilaksanakannya kegiatan karena dianggarkabn pada triwulan III

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dokumen	N/A	N/A	N./A	Rp. 5.200.300	Rp. 4.385.800	84,34	1. Adanya data untuk penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 2. Terdapatnya staff yang ikut serta dalam lancarnya koordinasi terkait penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 3. Terdapatnya staff atau operator bidang yg membantu untuk inventarisir data simdapokbud.	Adanya bahan atau data yg telah diinventarisir untuk update data simdapokbud	Staff dan Kasi Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional yang cukup kesulitan dalam proses penyusunan ROPK, karena menyesuaikan grafik fisik dan keuangan	1.Data yg kurang lengkap untuk update data simdapokbud. 2. Aplikasi yang bermasalah untuk update data simdapokbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persen (%)	62,5	67,57	108,11	Rp. 315.642.100	Rp. 51.564.500	16,34	Terdapat anggaran untuk membantu proses penetapan dan pelestarian cagar budaya	Terdapatnya warisan budaya benda yang dapat dilestarikan sebagai cagar budaya	Sulitnya tim verifikasi untuk mendapatkan cagar budaya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya	Syarat-syarat untuk penetapan cagar budaya tidak terpenuhi oleh objek diduga cagar budaya
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persen (%)	62,5	67,57	108,11	Rp. 72.088.600	Rp. 0	0,00	Kinerja sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan	Kinerja sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan	Belum adanya cagar budaya yang ditetapkan, sehingga sk baru tidak dapat diproses	syarat-syarat untuk membuat sk belum dapat dipenuhi

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Objek	N/A	N/A	N/A	Rp. 72.088.600	Rp. 0	0,00	tersedianyaa anggaran untuk pentapan cagar budaya	untuk penetapan cagar budaya masih melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan , untuk di triwulan ini sudah pada tahapan pengumpulan data	- kurangnya literatur atau buku-buku sejarah tentang objek yang di duga sebagai cagar budaya - Kurangnya alat untuk verifikasi Cagar Budaya	kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan cagar budaya, minimnya pengetahuan masyarakat sebagai informan Objek diduga cagar budaya
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Unit	36	36	100,00	Rp. 243.553.500	Rp. 51.564.500	21,17	Adanya anggaran dan staff kebudayaan yang membantu untuk pencairan upah petugas yang membantu untuk merwat, menjaga dan melestarikan cagar budaya yang dimiliki Kab. Banjar	- adanya juru pemelihara sekaligus petugas kebersihan yang membantu untuk melestraikan cagar budaya - adanya SK yang membantu untuk memperkuat status pelestarian Cagar Budaya	Anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya, terutama untuk perbaikan yang dirasa terbatas	Beberapa cagar budaya ada yang keadaannya sudah mulai rusak

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Objek	24	24	100,00	Rp. 243.553.500	Rp. 51.564.500	21,17	1.Tersedianya anaggaran untuk juru pelihara dan petugas kebersihan objek cagar budaya. 2. Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi untuk keperluan pembayaran homor juru pelihara dan petugas kebersihan yang membantu untuk melindungi cagar budaya	Adanya juru pelihara yang membantu untuk melakukan perlindungan pada cagar budaya	1. Terkadang terjadi gangguan sinyal internet	1. Juru pelihara cagar budaya ada yang belum membuat rekening baru di Bank Kalsel untuk honorarium mereka yang menyebabkan transfer uang honorarium menjadi kurang tepat waktu. 2.Tingkat kehadiran juru pelihara cagar budaya cukup remdah apabila diundang untuk rapat koordinasi di dinas
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri	Medali	69	49	71,01	Rp. 6.315.283.980	Rp. 3.063.344.640	48,51	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar dan olahraga rekreasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah	26 medali pada Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) tahun 2024 dan 23 medali pada Pekan Olahraga Special Olympics Daerah Tingkat Provinsi (PESODA) tahun 2024 sehingga sampai triwulan II berhasil meraih 49 medali	Minimnya sarana dan prasarana olahraga sehingga beberapa cabang olahraga kesulitan untuk melakukan latihan	Minimnya atlet pada cabang olahraga sehingga perolehan medali kurang maksimal

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persen (%)	0,03	2,06	6866,67	Rp. 168.000.000	Rp. 55.771.500	33,20	Koordinasi yang baik antar SKPD pada saat penghimpunan data	Meningkatnya minat berwirausaha pada pemuda di Kabupaten Banjar	Permintaan dan penghimpunan data yang membutuhkan proses yang lama	Banyaknya data sampel yang dihimpun
Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Medali	69	49	71,01	Rp. 6.315.283.980	Rp. 3.063.344.640	48,51	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar dan olahraga rekreasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah	26 medali pada Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) tahun 2024 dan 23 medali pada Pekan Olahraga Special Olympics Daerah Tingkat Provinsi (PESODA) tahun 2024 sehingga sampai triwulan II berhasil meraih 49 medali	Minimnya sarana dan prasarana olahraga sehingga beberapa cabang olahraga kesulitan untuk melakukan latihan	Minimnya atlet pada cabang olahraga perorangan sehingga perolehan medali kurang maksimal

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Orang	27	48	177,78	Rp. 1.903.917.000	Rp. 95.156.000	5,00	- Adanya SDM internal di bidang kepemudaan yang berkompeten melatih para calon delegasi dari Kabupaten Banjar untuk mengikuti ajang kompetisi kepemudaan. - Adanya SDM internal di bidang kepemudaan yang berkompeten melaksanakan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan kepemudaan. -Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersedia memadai. -Adanya promosi kegiatan kepemudaan melalui sosial media yang dikelola baik oleh SDM internal bidang kepemudaan.	- Minat para pemuda di Kabupaten Banjar yang cukup tinggi untuk mengikuti berbagai kompetisi kepemudaan. - Tersedianya mentor/pelatih eksternal untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan atau untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi kepemudaan.	- Kesalahan penetapan target yang tinggi menyebabkan sulitnya pencapaian realisasi target tersebut.	- Para pemuda di daerah-daerah pedesaan di Kabupaten Banjar masih kurang mengetahui tentang akun sosial media khusus kepemudaan yang berisikan berbagai kompetisi kepemudaan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill para pemuda tersebut karena jaringan atau sarana dan prasarana internet yang kurang memadai atau masih belum tersedia. - Kurangnya minat para pemuda-pemuda di daerah-daerah pedesaan di Kabupaten Banjar untuk berkompetisi disebabkan faktor pendidikan yang masih kurang tinggi.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persen (%)	0,03	2,06	6866,67	Rp. 168.000.000	Rp. 55.771.500	33,20	Koordinasi yang baik antar SKPD pada saat penghimpunan data	Meningkatnya minat berwirausaha pada pemuda di Kabupaten Banjar	Permintaan dan penghimpunan data yang membutuhkan proses yang lama	Banyaknya data sampel yang dihimpun
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persen (%)	22,5	54,73	243,24	Rp. 6.315.283.980	Rp. 3.063.344.640	48,51	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar dan olahraga rekreasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah	49 atlet dari 119 atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) tahun 2024 dan 32 atlet dari 29 atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Special Olympics Daerah Tingkat Provinsi (PESODA) tahun 2024 berhasil meraih medali sehingga persentase atlet yang berdaya saing 54,72%	Minimnya sarana dan prasarana olahraga sehingga beberapa cabang olahraga kesulitan untuk melakukan latihan	Minimnya atlet pada cabang olahraga perorangan sehingga perolehan medali kurang maksimal

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen (%)	16	16	100,00	Rp. 974.011.980	Rp. 32.990.240	3,39	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat	Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat dengan sistem Pengadaan Langsung	Spesifikasi untuk Pemeliharaan Lapangan kurang sesuai yaitu pengecetan dan pemotongan rumput sedangkan untuk pemeliharaan lapangan sangat banyak.	Pihak Penyedia untuk Perbaikan/rehab Lapangan Bola Voli susah dihubungi sehingga komunikasi antara penyedia dan pejabat pengadaan tidak berjalan dengan baik serta kelengkapan administrasi yang diminta oleh pejabat pengadaan tidak dipenuhi.
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Unit	2	2	100,00	Rp. 974.011.980	Rp. 32.990.240	3,39	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat	Pemeliharaan Gedung Dojo dan Lapangan Mini Barakat dengan sistem Pengadaan Langsung	Spesifikasi untuk Pemeliharaan Lapangan kurang sesuai yaitu pengecetan dan pemotongan rumput sedangkan untuk pemeliharaan lapangan sangat banyak.	Pihak Penyedia untuk Perbaikan/rehab Lapangan Bola Voli susah dihubungi sehingga komunikasi antara penyedia dan pejabat pengadaan tidak berjalan dengan baik serta kelengkapan administrasi yang diminta oleh pejabat pengadaan tidak dipenuhi.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	200	207	103,50	Rp. 185.104.000	Rp. 179.483.500	96,96	anggaran tersedia sehingga kegiatan kejuaraan daerah berjalan dengan baik	Terselenggaranya 6 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari Sepak Bola , Pencak Silat, Bola Basket, Bola Voli, Sepak Takraw, dan Bulutangkis yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikutkan dalam POPDA 2024	anggaran yang tersedia hanya untuk 6 kejuaraan, sedangkan di tingkat provinsi pada tahun 2024 terdapat 8 cabang olahraga yang dipertandingkan	Sarana dan Prasarana yang tidak tersedia sehingga harus menyewa lapangan seperti Bulutangkis dan Pencak Silat serta lapangan sepak bola yang kurang memadai
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	400	653	163,25	Rp. 185.104.000	Rp. 179.483.500	96,96	anggaran tersedia sehingga kegiatan kejuaraan daerah berjalan dengan baik	Terselenggaranya 6 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari Sepak Bola , Pencak Silat, Bola Basket, Bola Voli, Sepak Takraw, dan Bulutangkis yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikutkan	anggaran yang tersedia hanya untuk 6 kejuaraan, sedangkan di tingkat provinsi pada tahun 2024 terdapat 8 cabang olahraga yang dipertandingkan	Sarana dan Prasarana yang tidak tersedia sehingga harus menyewa lapangan seperti Bulutangkis dan Pencak Silat serta lapangan sepak bola yang kurang memadai

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
									dalam POPDA 2024		

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Orang	100	119	119,00	Rp. 503.000.000	Rp. 365.897.700	72,74	anggaran tersedia sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi berjalan dengan baik	Rangkaian hasil dari Kejuaraan Daerah dalam menyeleksi calon atlet POPDA Tahun 2024 telah terpenuhi dan telah memasuki tahap persiapan dan pembinaan yang selanjutnya menjadi Kontingen POPDA Kabupaten Banjar tahun 2024 Hasil POPDA 2024 Kabupaten Banjar berada diperingkat 4, mendapatkan 3 emas 10 perak dan 13 perunggu dengan total 26 medali Bola Basket 1 perak dan 1 perunggu Bulutangkis 2 emas, 1 perak, 1 perunggu Pencak Silat 5 perak dan 9 perunggu Tenis Lapangan 1 perunggu Tinju 1 emas, 3 perak, 1 perunggu	anggaran pembinaan untuk 15 hari yang dinilai terlalu pendek untuk pembinaan atlet POPDA	Tahap Pembinaan / Pemusatan Latihan atlet belum optimal dikarenakan waktu / hari belum maksimal dengan kata lain Pembinaan / Pemusatan latihan ± 30 Hari. Adanya pembaharuan pada aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan terlambat
---	-------	-----	-----	--------	-----------------	-----------------	-------	---	---	--	---

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Orang	200	207	103,50	Rp. 503.000.000	Rp. 365.897.700	72,74	anggaran tersedia sehingga sub kegiatan seleksi atlet daerah berjalan dengan baik	Rangkaian hasil dari Kejuaraan Daerah dalam menyeleksi calon atlet POPDA Tahun 2024 telah terpenuhi dan telah memasuki tahap persiapan dan pembinaan yang selanjutnya menjadi Kontingen POPDA Kabupaten Banjar tahun 2024 Hasil POPDA 2024 Kabupaten Banjar berada diperingkat 4, mendapatkan 3 emas 10 perak dan 13 perunggu dengan total 26 medali Bola Basket 1 perak dan 1 perunggu Bulutangkis 2 emas, 1 perak, 1 perunggu Pencak Silat 5 perak dan 9 perunggu Tenis Lapangan 1 perunggu Tinju 1 emas, 3	anggaran pembinaan untuk 15 hari yang dinilai terlalu pendek untuk pembinaan atlet POPDA	Tahap Pembinaan / Pemusatan Latihan atlet belum optimal dikarenakan waktu / hari belum maksimal dengan kata lain Pembinaan / Pemusatan latihan ± 30 Hari. Adanya pembaharuan pada aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan terlambat

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
									perak, 1 perunggu		
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi	5	5	100,00	Rp. 4.303.935.000	Rp. 2.463.125.000	57,23	tersedianya anggaran dana hibah 6 organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi organisasi olahraga di Kabupaten Banjar	Terstandarisasi nya organisasi keolahragaan pengusul hibah yang disetujui mendapatkan Dana Hibah berupa uang untuk memajukan olahraga di Kabupaten Banjar	Organisasi Keolahragaan KORMI masih belum bisa mencairkan dana hibah karena masih proses pemilihan ketua yang baru	masih adanya organisasi keolahragaan yang belum mengusulkan hibah dikarenakan belum lengkapnya adminstrasi pendukung dalam kriteria penerima hibah

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5	N/A	N/A	Rp. 4.303.935.000	Rp. 2.463.125.000	57,23	tersedianya anggaran dana hibah 6 organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi organisasi olahraga di Kabupaten Banjar	Terstandarisasi nya organisasi keolahragaan pengusul hibah yang disetujui mendapatkan Dana Hibah berupa uang untuk memajukan olahraga di Kabupaten Banjar	1.Terhambatnya administrasi pencairan dana hibah Organisasi Keolahragaan KORMI karena masih proses pemilihan ketua yang baru. 2. Dokumen Surat Pertanggungjawa ban dibuat pada akhir tahun (desember)	masih adanya organisasi keolahragaan yang belum mengusulkan hibah dikarenakan belum lengkapnya adminstrasi pendukung dalam kriteria penerima hibah
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kali	22	34	154,55	Rp. 349.233.000	Rp. 21.848.200	6,26	anggaran tersedia sehingga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi berjalan dengan baik	adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program GERMAS yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakat kan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat dengan	Adanya kegiatan lain dibidang olahraga sehingga kegiatan senam tidak bisa dilaksanakan	Faktor alam dan hari besar nasional/keagama an Kendala dalam penerapan Germas adalah kesibukan pelaku olahraga dan kurangnya kesadaran individu terkait Germas

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
									melakukan kegiatan olahraga		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	6	6	100,00	Rp. 349.233.000	Rp. 21.848.200	6,26	anggaran tersedia sehingga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi berjalan dengan baik	adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program GERMAS yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat dengan melakukan kegiatan olahraga	Adanya kegiatan lain dibidang olahraga sehingga kegiatan senam tidak bisa dilaksanakan	Faktor alam dan hari besar nasional/keagamaan Kendala dalam penerapan Germas adalah kesibukan pelaku olahraga dan kurangnya kesadaran individu terkait Germas

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen (%)	7,5	58,5	780,00	Rp. 2.071.917.000	Rp. 150.927.500	7,28	E-flyer dan proses pendaftaran jelas dan mudah dipahami	Kehadiran peserta pada penyelenggaraa n seleksi rata-rata 50% dari pendaftar	Kualifikasi khusus yang sulit bagi sebagian calon pendaftar	Minat pemuda di Kabupaten Banjar pada bidang yang dilombakan belum tinggi
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	orang	75	75	100,00	Rp. 381.918.000	Rp. 92.848.500	24,31	Kegiatan telah terjadwal dan anggaran alur kas untuk kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan kegiatan	pada tahap persiapan kegiatan telah terjalin koordionasi yang baik antara Bidang kepemudaan dengan Pihak Desa atau Kecamatan untuk penjaringan peserta Kegiatan	Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena sesuatu hal	perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena booking gedung sudah terisi, terkadang terkendala dengan batasan usia peserta yang berada pada rentan 16 -30 tahun
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Orang	25	80	320	Rp. 168.000.000	Rp. 55.771.500	33,20	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan kegiatan	terjalinnnya koordionasi yang baik antara Bidang kepemudaan dengan Pihak Desa atau Kecamatan untuk penjaringan peserta Kegiatan	Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan	terkadang terkendala dengan batasan usia peserta yang berada pada rentan 16 -30 tahun

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 75.000.000	Rp. 0	0,00	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan kegiatan	Stakeholder sudah mengetahui Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan	Keterlambatan pemrosesan SK Tim dan PerBup yang berakibat banyak revisi karena harus di sesuaikan dengan kondisi di lapangan, beberapa stakeholder yang agak susah untuk di ajak kerjasama untuk perencanaan Aksi ini.
Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Orang	90	120	133,33	Rp. 138.918.000	Rp. 37.077.000	26,69	Anggaran untuk kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan kegiatan	terjalinnnya koordionasi yang baik antara Bidang kepemudaan dengan Pihak Desa atau Kecamatan untuk penjangingan peserta Kegiatan	Adanya sistem online seperti NPD online yang sering ada gangguan, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena sesuatu hal	terkadang terkendala dengan batasan usia peserta yang berada pada rentan 16 -30 tahun
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Persen (%)	40	40	100,00	Rp. 1.689.999.000	Rp. 58.079.000	3,44	Prioritas kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana	Tingginya minat organisasi yang ingin diberdayakan	SDM belum memadai	Manajemen kepengurusan OKP belum memadai

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 1.689.999.000	Rp. 58.079.000	3,44	Perencanaan sudah sesuai dan anggaran tersedia	Adanya koordinasi yang baik dengan penerima Hibah	Verifikasi dan pembahasan NPHD yang masih alut serta menunggu tim untuk merencanakan rapat	ada beberapa organisasi kepemudaan yang dalam perbaikan di dalam RAB

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks	N/A	N/A	N/A	Rp. 9.472.756.732	Rp. 2.290.214.205	24,18	Terdapatnya pegawai-pegawai yang berkompeten dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing.	Adanya hubungan yang baik dengan mitra kerja dari instansi lain.	1. Terkadang terjadinya miss communication antara pegawai sub bagian perencanaan dengan pegawai bidang-bidang. 2. Terkadang terjadinya keterlambatan pengiriman data-data dari bidang-bidang yang diperlukan oleh sub bagian perencanaan.	1. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan di luar hari kerja. 2. Terkadang para mitra dari instansi lain memberikan suatu pekerjaan baru ketika suatu pekerjaan belum selesai. 3. Aplikasi SIPD untuk penginputan anggaran terkadang mengalami gangguan. 4. Terkadang terbitnya peraturan-peraturan terbaru dan aplikasi-aplikasi terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga membuat pekerjaan terhambat karena harus mempelajari atau menjalankan aplikasi-aplikasi baru terbaru tersebut.
--	--------	-----	-----	-----	----------------------	----------------------	-------	---	--	--	--

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	67,54	64,03	94,80	Rp. 37.679.700	Rp. 14.870.700	39,47	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	1. Ada terjadi perubahan data pada dokumen perencanaan sehingga harus d disesuaikan terlebih dulu. 2. Adanya data dukung yang kurang lengkap dari bidang terkait.	1. Aplikasi SIPD yang sulit diakses ketika penginputan ranwal, rincian renja. 2. Adanya perubahan format dokumen. 3. Ketidaktersediaan standar harga pada penginputan rincian belanja di aplikasi SIPD. 4. Adanya penambahan anggaran baru di luar jadwal penginputan. 5. Adanya perubahan format laporan, sehingga memerlukan tambahan waktu untuk menyesuaikan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	Rp. 14.000.000	Rp. 8.413.500	60,10	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bappedaltbang Kabupaten Banjar /instansi lain	Pengsinkronisasi an data yang ada di internal subbag perencanaan	1.Aplikasi SIPD yang sulit diakses 2.lamanya proses penandatanganan dokumen perencanaan (DPA) 3.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terlambat sehingga realisasi keuangan yang tercatat masih relatif kecil dan bahkan 0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	Rp. 16.988.100	Rp. 3.322.100	19,56	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bappedaltbang Kabupaten Banjar /instansi lain	adanya data dukung yang kurang lengkap dari bidang terkait	1.Tindaklanjut dari permintaan data dukung ke pihak/organisasi/in stansi terkait lainnya yang direspon kurang cepat. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terlambat sehingga realisasi keuangan yang tercatat masih relatif kecil dan bahkan 0

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	100,00	Rp. 6.691.600	Rp. 3.135.100	46,85	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bappedaltbang Kabupaten Banjar / instansi lain	1.adanya data yang harus disesuaikan terlebih dulu. 2. aplikasi SIPD yang sulit diakses	Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen (%)	50	46,37	92,74	Rp. 6.303.139.392	Rp. 1.050.790.898	16,67	1. Adanya tenggat waktu yang ditentukan untuk selesai. 2. Koordinasi yang baik dengan Bid. Perbendaharaan BPKPAD. 3. Jaringan internet mendukung.	SDM Sub Bagian Keuangan kompeten dan berpengalaman dalam melakukan pekerjaan keuangan.	Belum lengkapnya Rekapitulasi data-data yang dikumpulkan dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Aset.	Jaringan internet kadang terganggu
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	42	95,45	Rp. 6.144.673.492	Rp. 974.413.498	15,86	Mudahnya menemui semua pegawai untuk dimintai tanda tangan pencairan gaji	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD	Koneksi ke Aplikasi SIPD tidak lancar, jaringan internet yang kurang bagus.	1.Peraturan Bupati Tentang TPP 2. Adanya mutasi pejabat.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	Rp. 8.465.900	Rp. 4.337.400	51,23	Jaringan internet mendukung	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang dan Mitra Keuangan	- Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen	- Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan - Jaringan internet yang tidak lancar - Aplikasi SIPD yang sering error
	Laporan	1	1	100,00	Rp. 8.465.900	Rp. 4.337.400	51,23	Jaringan internet mendukung	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang dan Mitra Keuangan	- Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen	- Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan - Jaringan internet yang tidak lancar - Aplikasi SIPD yang sering error
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	28	36	128.57	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan penatausahaan keuangan	1. Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang dan Mitra Keuangan 2. Jaringan internet yang mendukung.	Adanya pegawai yang lambat melaporkan pertanggungjawaban pemakaian dana.	Rekapitulasi yang di dapat tidak lengkap. Adanya pembaharuan aplikasi keuangan sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat, jaringan internet kadang lambat.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Dokumen	28	36	128,57	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan penatausahaan keuangan	1. Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang dan Mitra Keuangan 2. Jaringan internet yang mendukung.	Adanya pegawai yang lambat melaporkan pertanggungjawaban pemakaian dana.	Rekapitulasi yang di dapat tidak lengkap. Adanya pembaharuan aplikasi keuangan sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat, jaringan internet kadang lambat.
	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	1.Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah. 2.Teradministrasi dengan jelas.	Koneksi internet mendukung.	Ketika melakukan inventarisasi barang, barangnya tidak ada ditempat disebabkan ada ASN yang mutasi membawa barang tersebut	Koneksi internet kadang terganggu
	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah.	Koneksi internet mendukung.	Beberapa barang hilang sehingga sulit diinventarisasi	Koneksi internet kadang terganggu.
	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah.	Untuk mengetahui barang-barang yang akan dihapuskan.	Beberapa barang hil;ang sehingga sulit diinventarisasi	Lamanya terbitnya Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah daerah Bidang Aset Sekda Kabupaten Banjar.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Dokumen	N/A	N/A	N/A	Rp. 150.000.000	Rp. 72.040.000	48,03	Adanya pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan pencatatan barang milik daerah.	Untuk mengetahui barang-barang yang akan dihapuskan.	Beberapa barang hil;ang sehingga sulit diinventarisasi	Lamanya terbitnya Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah daerah Bidang Aset Sekda Kabupaten Banjar.
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	100,00	Rp. 25.000.000	Rp. 7.474.861	29,90	1. Adanya pegawai yang bersemangat untuk mengikut bimtek dalam upaya mengembangkan kompetensinya. 2. Kepala Dinas mendukung penuh Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai	Banyaknya penyedia jasa bimbingan teknis yang legal secara hukum dan berkompeten	Tidak semua ASN dapat mengikuti bimtek disebabkan tema atau topik yang diberikan oleh penyedia bimtek sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN tersebut	Tema atau topik bimtek yang diberikan oleh penyedia bimtek belum banyak yang sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN yang ada
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	100,00	Rp. 25.000.000	Rp. 7.474.861	29,90	1. Adanya pegawai yang bersemangat untuk mengikut bimtek dalam upaya mengembangkan kompetensinya. 2. Kepala Dinas mendukung penuh Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai	Banyaknya penyedia jasa bimbingan teknis yang legal secara hukum dan berkompeten	Tidak semua ASN dapat mengikuti bimtek disebabkan tema atau topik yang diberikan oleh penyedia bimtek tidak sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN tersebut	Tema atau topik bimtek yang diberikan oleh penyedia bimtek belum banyak yang sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN yang ada

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	50	50	100,00	Rp. 898.201.800	Rp. 578.390.805	64,39	1. Perlu adanya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor. 2. Terpenuhiya bahan logistik dan kebutuhan makan minum tamu dan rapat. 3. Perlunya barang cetakan dan untuk kelancaran kegiatan kantor. 4. Ada komitmen dari pimpinan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan mitra.	1. Perlu adanya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor. 2. Terpenuhiya bahan logistik dan kebutuhan makan minum tamu dan rapat. 3. Perlunya barang cetakan dan untuk kelancaran kegiatan kantor. 4. Ada komitmen dari pimpinan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan mitra.	1. Banyaknya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 2. Banyaknya bahan logistik dan kebutuhan makan minum tamu dan rapat yang dibutuhkan. 3. banyaknya bahan cetakan yang diperlukan dan terbatasnya waktu pembuatan desain cetak. 4. Kebutuhan rapat Dalam Daerah dan Luar Daerah belum semuanya terpenuhi.	1. Sulitnya penyesuaian antara peralatan yang diperlukan dengan penyedia peralatan. 2. Banyaknya tamu yang berkunjung sehingga kewalahan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum. 3. Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Banyaknya kebutuhan rapat dan undangan dari instansi dan mitra.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6	6	100,00	Rp. 32.965.000	Rp. 14.036.000	42,58	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyak alternatif penyedia, Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor	1.Banyaknya keperluan peralatan dan perlengkapan pada awal tahun, tetapi anggaran belum cukup tersedia .	1.Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	6	6	100,00	Rp. 69.987.000	Rp. 33.999.500	48,58	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyak alternatif penyedia, Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor	1.Banyaknya keperluan logistik, tetapi anggaran belum cukup tersedia . 2.Penyesuaian bahan logistik dan alat kebersihan kantor yang masih layak dan tidak layak digunakan	1.Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat.
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6	6	100,00	Rp. 20.249.800	Rp. 3.274.800	16,17	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banyaknya jasa percetakan yang bisa menjadi referensi sebagai tempat pencetakan	1.Banyaknya keperluan logistik, tetapi anggaran belum cukup tersedia . 2.Penyesuaian bahan logistik dan alat kebersihan kantor yang masih layak dan tidak layak digunakan	1.Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100,00	Rp. 775.000.000	Rp. 527.080.505	68,01	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerja sama, referensi serta kaji tiru dengan instansi dan mitra yang berjalan dengan baik	Banyaknya keperluan rapat dan perjalanan dinas, tetapi anggaran belum cukup tersedia .	1.Banyaknya kebutuhan rapat dan undangan dari instansi dan mitra Penggunaan NPD online yang masih belum berjalan secara maksimal. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terhambat
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen (%)	100	100	100,00	Rp. 37.315.000	Rp. 37.315.000	100,00	Perlu adanya peremajaan dan penambahan peralatan.	Banyaknya penyedia peralatan dan mesin lainnya yang bisa menjadi pilahan.	Kurangnya kesadaran pengguna melakukan perawatan.	Sulitnya mencari peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	6	100,00	Rp. 37.315.000	Rp. 37.315.000	100,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya penyedia peralatan dan mesin lainnya yang bisa menjadi pilihan	Menunggu pergeseran anggaran untuk melakukan pencarian penyedia dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan	Sulitnya penyedia dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	50	50	100,00	Rp. 1.668.609.840	Rp. 480.689.126	28,81	1. Kelancaran proses surat menyurat. 2. Terpenuhinya ATK	1. Mudahnnya mencari penyedia jasa surat menyurat. 2. Banyaknya alternatif penyedia ATK. 3. Perlu adanya listrik, air dan telepon untuk kelancaaran kinerja Pelayanan penyedia memuaskan. 4. Banyak tenaga tambahan yang tersedia. Perlu adanya tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan dalam SKPD.	1. Sisa stock materai masih mencukupi. 2. Penggunaan ATK yang berlebihan.	1. Pembayaran sumber daya air, dan telepon sesuai dengan tagihan, sehingga anggaran tidak terserap sebesar target. Pemakaian sumber daya yang berlebihan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan. 2. Pembelian barang menggunakan aplikasi e-catalog yang masih baru memerlukan penyesuaian sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	100,00	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000	50,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai penyediaan jasa surat menyurat	Mudahnya mencari penyedia jasa surat menyurat	Banyaknya keperluan penggunaan materai untuk berbagai kelengkapan tetapi anggaran belum cukup tersedia .	Banyaknya keperluan penggunaan materai untuk berbagai kelengkapan dokumen-dokumen

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	6	6	100,00	Rp. 331.429.840	Rp. 79.943.922	24,12	Perlu adanya listrik, air dan telepon untuk kelancaaran kinerja	Pelayanan penyedia memuaskan	Pemakaian sumber daya yang berlebihan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan	Terkadang terjadinya kenaikan harga Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari pihak penyedia / pemerintah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	6	6	100,00	Rp. 1.331.180.000	Rp. 397.745.204	29,88	Perlu adanya tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan dalam SKPD	Banyaknya alternatif penyedia ATK	Penggunaan ATK yang berlebihan	Anggaran daerah / negara terbatas untuk pengadaan pegawai non ASN
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	67,35	29,76	44,19	Rp. 502.811.000	Rp. 120.682.815	24,00	Adanya SDM Pegawai yang berkompeten dalam memelihara Barang Milik Daerah	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas SDM pegawai untuk memelihara Barang Milik Daerah	Banyaknya keperluan biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas Pegawai untuk memelihara barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100,00	Rp. 38.990.000	Rp. 14.938.025	38,31	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tetapi anggaran belum cukup tersedia .	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-II										
	Kinerja				Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- II	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Anggaran 2024	Realisasi Triwulan Ke-II	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	10	142,86	Rp. 286.260.000	Rp. 80.889.790	28,26	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional , tetapi anggaran belum cukup tersedia .	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22	14	63,64	Rp. 47.137.000	Rp. 13.255.000	28,12	Perlunya peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	Kurangnya kesadaran pemeliharaan	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	Rp. 130.424.000	Rp. 11.600.000	8,89	Perlunya kenyamanan dan perbaikan gedung/ banguna kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	kerusakan pada beberapa bagian bangunan karena termakan usia atau hal - hal lainnya	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disbudporapar dan Pencapaian Renstra Disbudporapar s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri	Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga	Medali	633	Rp.23.404.100.412	344	Rp 9.012.275.350	69	Rp. 6.315.283.980	0	Rp.35.019.500	49	Rp.3.003.344.040	49	Rp.3.003.344.040	71,01	48,51	Disbud porapar Kab.Banjar
	Persentase Wirausaha Muda	Persen (%)	0,08		0,035		0,03		0		2,06		2,06		6866,67		Disbud porapar Kab.Banjar
Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Medali	633	Rp.23.404.100.412	344	Rp 9.012.275.350	69	Rp. 6.315.283.980	0	Rp.35.019.500	49	Rp.3.003.344.040	49	Rp.3.003.344.040	71,01	48,51	Disbud porapar Kab.Banjar
	Jumlah Pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	Orang	600	Rp.7.417.716.575	116	Rp 827.094.850	120	Rp. 2.071.917.000	2	Rp. 850.000	48	Rp 150.927.500	48	Rp 150.927.500	40	7,28	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
	Persentase Wirausaha Muda	Persen (%)	0,08		0,03		0,03		0		2,06		2,06		6866,67		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Internal (IKKI)		80	Rp 51.858.656.597	75	Rp 8.836.222.145	75	Rp. 9.472.756.732	0	Rp 1.245.664.091	0	Rp 2.290.214.205	0	Rp 2.290.214.205	0,00	24,18	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 188.397.750	100	Rp 24.668.900	100	Rp. 37.679.700	0	Rp -	64,03	Rp 14.870.700	64,03	Rp 14.870.700	64,03	39,47	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	Rp 69.999.000	6	Rp 13.934.000	6	Rp. 14.000.000	2	Rp -	3	Rp 8.413.500	3	Rp 8.413.500	50,00	60,10	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	Rp 84.940.500	3	Rp 4.964.400	3	Rp. 16.988.100	0	Rp -	3	Rp 3.322.100	3	Rp 3.322.100	100,00	19,56	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100	Rp 33.458.250	20	Rp 5.770.500	19	Rp. 6.691.600	5	Rp -	10	Rp 3.135.100	10	Rp 3.135.100	52,63	46,85	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 36.458.784.030	100	Rp 5.013.912.666	100	Rp. 6.303.139.392	25	Rp 974.454.184	46,37	Rp 1.050.790.898	46,37	Rp 1.050.790.898	46,37	16,67	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	44	Rp 34.606.709.059	39	Rp 4.888.652.666	44	Rp. 6.144.673.492	44	Rp 953.494.184	42	Rp 974.413.498	42	Rp 974.413.498	95,45	15,86	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	224	Rp 300.687.954	80	Rp 121.220.000	56	Rp. 150.000.000	8	Rp 20.960.000	36	Rp 72.040.000	36	Rp 72.040.000	64,29	48,03	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Rp 40.377.017	1	Rp 4.040.000	1	Rp. 8.465.900	0	Rp -	1	Rp 4.337.400	1	Rp 4.337.400	100,00	51,23	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 337.466.000	100	Rp 5.240.000	100	Rp. 25.000.000	0	Rp -	100	Rp 7.474.861	100	Rp 7.474.861	100,00	29,90	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	33	Rp 337.466.000	1	Rp 5.240.000	1	Rp. 25.000.000	0	Rp -	1	Rp 7.474.861	1	Rp 7.474.861	100,00	29,90	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 4.071.510.160	100	Rp 1.292.644.538	100	Rp. 898.201.800	25	Rp 39.977.800	50	Rp 578.390.805	50	Rp 578.390.805	50,00	64,39	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Paket	60	Rp 311.904.300	12	Rp 23.041.950	12	Rp. 32.965.000	3	Rp -	6	Rp 14.036.000	6	Rp 14.036.000	50,00	42,58	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistlk Kantor yang di sediakan	Paket	60	Rp 851.508.860	12	Rp 63.058.458	12	Rp. 69.987.000	3	Rp -	6	Rp 33.999.500	6	Rp 33.999.500	50,00	48,58	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Paket	60	Rp 188.364.000	1	Rp 15.803.200	12	Rp. 20.249.800	3	Rp -	6	Rp 3.274.800	6	Rp 3.274.800	50,00	16,17	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	60	Rp 2.719.733.000	12	Rp 1.190.740.93 0	12	Rp. 775.000.000	3	Rp 39.977.800	6	Rp 527.080.505	6	Rp 527.080.505	50,00	68,01	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 900.362.000	100	Rp 569.431.811	100	Rp. 37.315.000	0	Rp -	100	Rp 37.315.000	100	Rp 37.315.000	100	100	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Unit	21	Rp 900.362.000	8	Rp 569.431.811	6	Rp. 37.315.000	0	Rp -	6	Rp 37.315.000	6	Rp 37.315.000	100,00	100,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 6.986.230.642	100	Rp 1.431.038.599	100	Rp. 1.668.609.840	25	Rp 216.817.107	50	Rp 480.689.126	50	Rp 480.689.126	50,00	28,81	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	Rp 82.500.000	12	Rp 6.000.000	12	Rp. 6.000.000	3	Rp 1.500.000	6	Rp 3.000.000	6	Rp 3.000.000	50,00	50,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Laporan	60	Rp 1.696.043.142	36	Rp 206.008.759	12	Rp. 331.429.840	3	Rp 28.770.795	6	Rp 79.943.922	6	Rp 79.943.922	50,00	24,12	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	Rp 5.207.687.500	12	Rp 1.219.029.840	12	Rp. 1.331.180.000	3	Rp 186.546.312	6	Rp 397.745.204	6	Rp 397.745.204	50,00	29,88	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Rp 2.914.201.479	100	Rp 499.285.631	100	Rp. 502.811.000	25	Rp 14.415.000	29,76	Rp 120.682.815	29,76	Rp 120.682.815	29,76	24,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Peliharan dan di Bayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 401.920.000	1	Rp 37.744.000	1	Rp. 38.990.000	1	Rp 1.800.000	1	Rp 14.938.025	1	Rp 14.938.025	100,00	38,31	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	Rp 1.494.111.256	9	Rp 179.607.912	21	Rp. 286.260.000	2	Rp 11.315.000	10	Rp 80.889.790	10	Rp 80.889.790	47,62	28,26	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara	Unit	63	Rp 444.403.000	26	Rp 17.425.000	61	Rp. 47.137.000	9	Rp 1.300.000	14	Rp 13.255.000	14	Rp 13.255.000	22,95	28,12	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang diPelihara/ di Rehabilitasi	Unit	1	Rp 573.767.223	2	Rp 264.508.719	1	Rp. 130.424.000	0	Rp -	1	Rp 11.600.000	1	Rp 11.600.000	100,00	8,89	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Presentase pemuda yang berdaya saing	Persen (%)	35,5	Rp 7.417.716.575	34,13	Rp 827.094.850	34,5	Rp. 2.071.917.000	0,5	Rp 850.000	58,5	Rp 150.927.500	58,5	Rp 150.927.500	169,57	7,28	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota , wirausaha muda pemula, dan kader kabupaten/kota	Jumlah orang yang di latih dalam kegiatan kepemudaan	Orang	2840	Rp 5.553.566.575	320	Rp 244.567.850	375	Rp. 381.918.000	25	Rp 450.000	75	Rp 92.848.500	75	Rp 92.848.500	20,00	24,31	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub KegiatanPelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten	Dokumen	1	Rp -	0	Rp -	1	Rp. 75.000.000	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	N/A	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	185	Rp 1.124.416.600	50	Rp 119.284.600	75	Rp. 168.000.000	25	Rp -	80	Rp 55.771.500	80	Rp 55.771.500	106,67	33,20	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpina n,kepelopora n dan kesukarelaw anan kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan	Orang	525	Rp 445.600.000	431	Rp 125.283.250	200	Rp. 138.918.000	30	Rp 450.000	120	Rp 37.077.000	120	Rp 37.077.000	60,00	26,69	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangka n	Persen (%)	100	Rp 1.864.150.000	92,8	Rp 582.527.000	100	Rp. 1.689.999.000	0	Rp 400.000	40	Rp 58.079.000	40	Rp 58.079.000	40,00	3,44	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	7	Rp 964.150.000	2	Rp 582.527.000	5	Rp. 1.689.999.000	N/A	Rp 400.000	N/A	Rp 58.079.000	N/A	Rp 58.079.000	N/A	3,44	Disbud porapar Kab.Ban jar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	Persen (%)	42,5	Rp 23.404.100.412	39	Rp 9.012.275.350	38,75	Rp. 6.315.283.980	0	Rp 35.019.500	54,73	Rp 3.063.344.640	54,73	Rp 3.063.344.640	141,24	48,51	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional	Persen (%)	80	Rp 1.015.000.000	70	Rp 531.084.100	16	Rp. 974.011.980	8	Rp 2.277.000	16	Rp 32.990.240	16	Rp 32.990.240	100,00	3,39	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Unit	2	Rp 655.000.000	16	Rp 531.084.100	2	Rp. 974.011.980	2	Rp 2.277.000	2	Rp 32.990.240	2	Rp 32.990.240	100,00	3,39	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang Meraih Medali Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Orang	1000	Rp 1.233.475.116	156	Rp 202.987.000	200	Rp. 185.104.000	207	Rp 30.082.500	207	Rp 179.483.500	207	Rp 179.483.500	103,50	96,96	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraa n Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaran kujuaraan	Orang	1200	Rp 728.355.108	370	Rp 202.987.000	400	Rp. 185.104.000	640	Rp 30.082.500	653	Rp 179.483.500	653	Rp 179.483.500	163,25	96,96	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang dibina untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Orang	520	Rp 2.436.420.900	100	Rp 274.770.450	100	Rp. 503.000.000	N/A	Rp -	119	Rp 365.897.700	119	Rp 365.897.700	119,00	72,74	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	620	Rp 2.436.420.900	100	Rp 274.770.450	200	Rp. 503.000.000	N/A	Rp -	207	Rp 365.897.700	207	Rp 365.897.700	103,50	72,74	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Organisasi	26	Rp 17.625.000.000	5	Rp 7.932.678.600	5	Rp. 4.303.935.000	N/A	Rp -	5	Rp 2.463.125.000	5	Rp 2.463.125.000	100,00	57,23	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	15	Rp 9.675.000.000	5	Rp 7.932.678.600	6	Rp. 4.303.935.000	N/A	Rp -	N/A	Rp 2.463.125.000	N/A	Rp 2.463.125.000	N/A	57,23	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan	Kali	220	Rp.1.094.204.396	44	Rp 70.755.200	44	Rp. 349.233.000	14	Rp 2.660.000	34	Rp 21.848.200	34	Rp 21.848.200	77,27	6,26	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraa n, penyelenggaraa n, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Dokumen	36	Rp 554.204.396	12	Rp 70.755.200	13	Rp. 349.233.000	3	Rp 2.660.000	6	Rp 21.848.200	6	Rp 21.848.200	46,15	6,26	Disbud porapar Kab.Banjar
Berkembangnya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminkan Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar.	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	Persen (%)	88,89	Rp.3.610.293.133	60	Rp. 1.570.913.300	66,67	Rp. 2.751.292.131	47,05	Rp. 1.245.664.091	66,67	Rp.2.751.292.131	66,67	Rp.2.751.292.131	100	24,47	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Jumlah Apresiasi Budaya Banjar	Event	10	Rp.3.610.293.133	7	Rp. 1.570.913.300	8	Rp. 2.751.292.131	3	Rp. 1.245.664.091	3	Rp.2.751.292.131	3	Rp.2.751.292.131	37,50	24,47	Disbud porapar Kab.Ban jar
PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN	Persentase warisan tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	Persen (%)	88,89	Rp 1.968.984.908	44,44	Rp 1.300.996.550	66,67	Rp. 1.426.498.500	46,67	Rp -	46,67	Rp 405.127.626	46,67	Rp 405.127.626	70,00	28,40	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB	Persen (%)	88,89	Rp 54.109.062	44,44	Rp 1.431.250	66,67	Rp. 10.804.500	44,44	Rp -	44,44	Rp -	44,44	Rp -	66,66	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	8	Rp 54.109.062	0	Rp 1.431.250	1	Rp. 10.804.500	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian yang dibina	Persen (%)	84,82	Rp 1.860.712.620	80,36	Rp 1.285.071.000	82,14	Rp. 1.400.694.000	80,36	Rp -	80,36	Rp 390.127.626	80,36	Rp 390.127.626	97,83	27,85	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan , Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	71	Rp 1.643.296.016	8	Rp 1.244.529.000	8	Rp. 1.337.287.000	3	Rp -	3	Rp 377.137.626	3	Rp 377.137.626	37,50	28,20	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangk at Daerah Penangg ung Jawab							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,dan Pranata Tradisional	Lapor an	6	Rp 217.416.604	1	Rp 40.542.000	1	Rp. 63.407.000	N/A	Rp -	N/A	Rp 12.990.000	N/A	Rp 12.990.000	N/A	20,49	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	Kelom pok	8	Rp 54.163.226	1	Rp 14.494.300	1	Rp. 15.000.000	1	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	100,00	100,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	Unit	46	Rp 54.163.226	10	Rp 14.494.300	10	Rp. 15.000.000	10	Rp -	10	Rp 15.000.000	10	Rp 15.000.000	100,00	100,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaska n	Persen (%)	100	Rp 143.084.618	40	Rp 22.016.250	60	Rp. 28.572.800	N/A	Rp -	N/A	Rp 4.385.800	N/A	Rp 4.385.800	N/A	15,35	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Orang	200	Rp 143.084.618	40	Rp 22.016.250	40	Rp. 28.572.800	N/A	Rp -	N/A	Rp 4.385.800	N/A	Rp 4.385.800	N/A	15,35	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	200	Rp 117.042.939	40	Rp 17.927.500	40	Rp. 23.372.500	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	6	Rp 26.041.679	1	Rp 4.088.750	1	Rp. 5.200.300	N/A	Rp -	N/A	Rp 4.385.800	N/A	Rp 4.385.800	N/A	84,34	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR	Persentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	Persen (%)	72,5	Rp 1.498.223.607	62,5	Rp 247.900.500	67,5	Rp. 315.642.100	62,5	Rp -	67,57	Rp 51.564.500	67,57	Rp 51.564.500	100,10	16,34	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya	Persen (%)	72,5	Rp 360.997.899	62,5	Rp 37.981.000	67,5	Rp. 72.088.600	62,5	Rp -	67,57	Rp -	67,57	Rp -	100,10	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	17	Rp 360.997.899	0	Rp 37.981.000	1	Rp. 72.088.600	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Objek	38	Rp 1.137.225.708	36	Rp 209.919.500	36	Rp. 243.553.500	36	Rp -	36	Rp 51.564.500	36	Rp 51.564.500	100,00	21,17	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	25	Rp 1.137.225.708	24	Rp 209.919.500	24	Rp. 243.553.500	24	Rp -	24	Rp 51.564.500	24	Rp 51.564.500	100,00	21,17	Disbud porapar Kab.Ban jar
Meningkatnya Akselerasi Ekonomi kreatif dan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	5.000 .000	Rp.2.155.960.154	3.255 .500	Rp. 3.984.069.569	4.50 0.000	Rp. 4.746.240.000	4.025 .948	Rp. 206.045.000	4.43 9.537	Rp. 725.723.944	4.439.5 37	Rp. 725.723.944	98,66		Disbud porapar Kab.Ban jar
Meningkatnya Pengembangan Kepariwisataan Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	5.000 .000	Rp.2.155.960.154	3.255 .500	Rp. 3.984.069.569	4.50 0.000	Rp. 4.746.240.000	4.025 .948	Rp. 206.045.000	4.43 9.537	Rp. 725.723.944	4.439.5 37	Rp. 725.723.944	98,66	15,29	Disbud porapar Kab.Ban jar
	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2		2		2		2		2		100		Disbud porapar Kab.Ban jar		
	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah (Rp.)	1.265 .400		1.262 .943		1.26 4.400		692. 730		692. 730		54,79		Disbud porapar Kab.Ban jar		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang representatif	Persen (%)	58	Rp 1.725.928.516	160	Rp 1.978.865.969	52	Rp. 1.914.395.500	48	Rp 195.138.550	48	Rp 410.006.450	48	Rp 410.006.450	92,31	21,42	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang di berkembang	Persen (%)	62,5	Rp 268.019.859	159	Rp 178.001.200	50	Rp. 308.643.000	N/A	Rp 54.308.000	N/A	Rp 132.870.000	N/A	Rp 132.870.000	N/A	43,05	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangk an	Orang	1200	Rp 73.344.531	0	Rp -	400	Rp. 308.643.000	100	Rp 54.308.000	250	Rp 132.870.000	250	Rp 132.870.000	62,50	43,05	Disbud porapar Kab.Ban jar
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan amenitas	Persen (%)	57,89	Rp 1.341.659.779	32	Rp 1.749.813.76 9	52,6 3	Rp. 1.542.670.000	0	Rp 120.700.05 0	0	Rp 270.495.450	0	Rp 270.495.450	0,00	17,53	Disbud porapar Kab.Ban jar
	Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	Persen (%)	42		59		38		48		48		48		126,32		Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	114	Rp 621.290.940	8	Rp 1.709.548.169	9	Rp. 1.107.550.000	N/A	Rp 6.248.000	N/A	Rp 9.854.600	N/A	Rp 9.854.600	N/A	0,89	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	10	Rp 96.991.741	1	Rp 40.265.600	1	Rp. 290.120.000	N/A	Rp 66.952.050	N.A	Rp 195.777.350	N/A	Rp 195.777.350	N/A	67,48	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	16	Rp 593.377.098	0	Rp -	4	Rp. 145.000.000	1	Rp 47.500.000	2	Rp 64.863.500	2	Rp 64.863.500	50,00	44,73	Disbud porapar Kab.Ban jar
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Persen (%)	100	Rp 83.248.878	100	Rp 51.051.000	100	Rp. 63.082.500	0	Rp 20.130.500	500	Rp 6.641.000	500	Rp 6.641.000	500	10,53	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	31	Rp 51.894.078	0	Rp -	1	Rp. 63.082.500	0	Rp 20.130.500	5	Rp 6.641.000	5	Rp 6.641.000	500,00	10,53	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	Persen (%)	10	Rp 2.687.152.990	12	Rp 1.305.056.300	9	Rp. 2.399.978.000	0	Rp 206.045.000	10	Rp 292.853.394	10	Rp 292.853.394	111,11	12,20	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Orang	643.000	Rp 2.687.152.990	116879	Rp 1.305.056.300	110000	Rp. 2.399.978.000	12551	Rp 206.045.000	27474	Rp 292.853.394	27474	Rp 292.853.394	24,98	12,20	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiat an	18	Rp 796.302.326	7	Rp 1.055.448.750	6	Rp. 1.768.096.000	1	Rp -	2	Rp 133.611.000	2	Rp 133.611.000	33,33	7,56	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektro nik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promo si	15	Rp 1.870.626.115	3	Rp 249.607.550	5	Rp. 626.882.000	1	Rp 206.045.00 0	3	Rp 159.242.394	3	Rp 159.242.394	60,00	25,40	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Doku men	6	Rp 20.224.549	0	Rp -	1	Rp. 5.000.000	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuha n pelaku ekonomi kreatif	Persen	10,6	Rp 430.031.638	10,67	Rp 700.147.300	10	Rp. 431.866.500	N/A	Rp -	N/A	Rp 22.864.100	N/A	Rp 22.864.100	N/A	5,29	Disbud porapar Kab.Ban jar
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif	Orang	649	Rp 430.031.638	60	Rp 700.147.300	64	Rp. 431.866.500	N/A	Rp -	N/A	Rp 22.864.100	N/A	Rp 22.864.100	N/A	5,29	Disbud porapar Kab.Ban jar
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Lapor an	9	Rp 37.983.292	0	Rp -	3	Rp. 344.386.500	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	Rp -	N/A	0,00	Disbud porapar Kab.Ban jar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan tujuan / sasaran / program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan / sasaran / program (outcome) / kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
									Triwulan I		Triwulan II						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															(%)	(%)	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi pengembang an kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Orang	649	Rp 369.098.551	40	Rp 43.878.000	80	Rp. 87.480.000	0	Rp -	20	Rp 22.864.100	20	Rp 22.864.100	25,00	26,14	Disbud porapar Kab.Ban jar

Sumber data : Laporan Rekapitulasi Renja Sampai dengan Triwulan II

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini. Pada perubahan Renja 2024 ini, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Disbudporapar tetap, yaitu sebanyak 9 program 25 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab 3 ini.

3.2. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Disbudporapar Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 26.292.078.912,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)**. Dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar, dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 7 (Tujuh) kegiatan, 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan semula Rp. 9.472.756.732,- bertambah Rp. 403.882.500,- menjadi sebesar Rp. 9.876.639.232,-.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan 2 (Dua) kegiatan, 4 (Empat) sub kegiatan semula Rp. 2.071.917.000,- berkurang Rp. 25.066.000,- menjadi sebesar Rp. 2.046.851.000,-.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan 5 (Lima) kegiatan, 5 (Lima) sub kegiatan, semula Rp. 6.315.283.980,- bertambah Rp. 378.798.000,- menjadi sebesar Rp. 6.694.081.980,-
- d. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan 3 (tiga) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan semula Rp. 1.426.498.500,- bertambah Rp. 354.886.000,- menjadi sebesar Rp. 1.781.384.500.
- e. Program Pembinaan Sejarah, dengan 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 28.572.800 tetap menjadi Rp. 28.572.800.
- f. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 315.642.100,- tetap menjadi Rp. 315.642.100,-.

- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan 3 (tiga) kegiatan, 5 (lima) sub kegiatan semula Rp. 1.914.395.500,- bertambah sebesar Rp. 130.304.000 Sehingga menjadi Rp. 2.044.699.500,-.
- h. Program Pemasaran Pariwisata, dengan 1 (satu) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan semula Rp. 2.399.978.000 bertambah sebesar Rp. 655.763.300 sehingga menjadi Rp. 3.055.741.300.
- i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 431.866.500,- bertambah sebesar Rp. 16.600.000 Sehingga menjadi Rp. 448.466.500,-.

3.3. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator, perubahan target dan perubahan anggaran di semua level secara lengkap di jelaskan dan bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Meningkatnya Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Meningkatnya Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Orang	4.500.000	4.500.000	4.746.240.000	5.548.907.300	802.667.300	Untuk alasan perubahan pagu anggaran sama seperti alasan- alasan pada sub- sub kgiatan dan kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.. Sedangkan alasan perubahan target pada Indikator Kinerja yaitu Pengeluaran Wisatawan disebabkan realisasi kinerja pada indikator tersebut pada

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											tahun 2023 telah melebihi target yang semula ditargetkan Pengeluaran Wisatawan sebesar Rp.679.147 namun capaiannya sangat melebihi yaitu sebesar Rp.1.262.943. Oleh sebab itu maka diperlukanlah reviu perubahan kedua pada renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Periode 2021-2026 agar targetnya lebih menantang lagi yaitu sebesar Rp.1.264.400.
Meningkatnya Pengembangan Kepariwisataan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisataan Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Orang	4.500.0000	4.500.0000	4.746.240.000	5.548.907.300	802.667.300	Untuk alasan perubahan pagu anggaran sama seperti alasan-alasan pada sub-sub kgiatan dan kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
		Lama Kunjungan Wisatawan	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	Hari	2	2				

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
		Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah (Rp.)	Rupiah (Rp.)	692.730	1.264.400				Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.. Sedangkan alasan perubahan target pada Indikator Kinerja yaitu Pengeluaran Wisatawan disebabkan realisasi kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2023 telah melebihi target yang semula ditargetkan Pengeluaran Wisatawan sebesar Rp.679.147 namun capaiannya sangat melebihi yaitu sebesar Rp.1.262.943. Oleh sebab itu maka diperlukanlah reviu perubahan kedua pada renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Periode 2021-2026

URUSAN /BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											agar targetnya lebih menantang lagi yaitu sebesar Rp.1.264.400.
Program Peningkatan	Program Peningkatan Daya	Persentase destinasi wisata	Persentase destinasi	Persen (%)	Persen (%)	52	52	Rp. 1.914.395.500	Rp. 2.044.699.500	Rp. 130.304.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tarik Destinasi Pariwisata	yang representatif	wisata yang representatif								
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang di berkembang	Persentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang berkembang	Persen (%)	Persen (%)	50	50	Rp. 308.643.000	Rp. 308.643.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan,Berke mbang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangka n	Lokasi	Orang	400	400	Rp. 308.643.000	Rp. 308.643.000	Rp. 0	
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan amenities	Persentase ketersediaan amenities	Persen (%)	Persen (%)	52,63	52,63	Rp. 1.542.670.000	Rp. 1.676.974.000	Rp. 134.304.000	
		Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	Persen (%)	Persen (%)	38	38				

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Pengadaan/P emeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeli haraan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a yang tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	Unit	9	9	Rp. 1.107.550.000	Rp. 1.243.854.000	Rp. 136.304.000	Pergeseran (Perubahan) : - Adanya penyesuaian pagu dengan kondisi lapangan untuk beberapa item pekerjaan konstruksi, yaitu belanja akrilik dan gapura idenstitas. Kepada pekerjaan gapura Kh.Abdul Ghani, siring MRV (Martapura River View), dan pekerjaan pendukung lainnya. - Penambahan pemeliharaan/ rehabilitasi bangunan gedung kios cinderamata di Makam Syekh Muhammad Arsyed Al Banjari.
Sub Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	Laporan	Laporan	1	1	Rp. 290.120.000	Rp. 290.120.000	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	4	4	Rp. 145.000.000	Rp. 143.000.000	Rp2.000.000 -	Dipindah Ke Sekretariat untuk kepentingan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Persentase rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Persen (%)	Persen (%)	100	100	Rp. 63.082.500	Rp. 59.082.500	Rp4.000.000 -	
Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Laporan	Usaha	1	1	Rp. 63.082.500	Rp. 59.082.500	Rp4.000.000 -	Di Bulan Januari belum dilaksanakan pendataan pelaku usaha pariwisata dan belum adanya petugas pendata yang pasti untuk di SK kan jadi honorarium tidak dapat di realisasikan
Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	Persentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	Persen (%)	Persen (%)	9	9	Rp. 2.399.978.000	Rp. 3.055.741.300	Rp. 655.763.300	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Orang	Orang	110000	110000	Rp. 2.399.978.000	Rp. 3.055.741.300	Rp. 655.763.300	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/K ota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kot a, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/K ota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Dokumen	1	1	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/K ota	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Kegiatan	6	6	Rp. 1.768.096.000	Rp. 2.273.859.300	Rp. 505.763.300	1. Kegiatan posko informasi haul guru sekumpul yang tidak bisa direalisasikan sebesar Rp, 16.046.000 bergeser ke belanja sasirangan pemilihan nanang galuh sebesar Rp. 11.200.000 dan belanja jasa juri lomba baturai pantun sebesar Rp. 2.250.000 dan Juri lomba sajian khas sebesar Rp. 2.250.000. 2. Permintaan penambahan anggaran ini, untuk belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor seperti souvenir pemilihan nanang galuh sebesar Rp.1.000.000, belanja pakaian batik tradisional (APKASI Otonomi Expo) sebesar Rp.12.000.000, Belanja Sewa alat kantor lainnya sewa panggung rigging untuk banjar bersholawat Rp.

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											45.600.000, Sewa dermaga apung untuk kegiatan festival pasar terapung sebesar Rp. 50.000.000, Sewa videotron pemilihan nanang galuh sebesar Rp. 17.955.000, sewa panggung pemilihan nanang galuh sebesar Rp. 10.000.000, dekorasi ruangan pemilihan nanang galuh Rp. 5.000.000, sewa sound system pemilihan nanang galuh sebesar Rp.10.000.000, sewa lighting premium pemilihan nanang galuh sebesar Rp, 28.500.000, Sewa genset 20 kVA pemilihan nanang galuh Rp, 6.000.000. sewa ruang rapat/pertemuan/ karantina sebesar Rp, 3.000.000, honorarium pelatih kesenian Sebesar Rp. 2.000.000. 3. Permintaan

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											penambahan anggaran untuk Perjalanan dinas biasa pemilihan nanang galuh sebesar Rp. 200.000.000, dan perjalanan dinas biasa Launching CEO sebesar Rp.50.000.000.
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Promosi	3	5	Rp. 626.882.000	Rp. 776.882.000	Rp. 150.000.000	Selama ini untuk media promosi destinasi pariwisata kabupaten banjar melalui media sosial (IG, fb, Tiktok dan web) dan media cetak (leaflet dan bookleat) dan untuk tahun ini mempromosikan destinasi pariwisata kab.

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											Banjar melalui media video film pendek.
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persen (%)	Persen (%)	10	10	Rp. 431.866.500	Rp. 448.466.500	Rp. 16.600.000	
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif	orang	orang	64	64	Rp. 431.866.500	Rp. 448.466.500	Rp. 16.600.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Orang	Laporan	3	3	Rp. 344.386.500	Rp. 360.986.500	Rp. 16.600.000	Expo Ekraf sesuai arahan diubah menjadi pameran luar daerah

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi pengembangan n kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Orang	Orang	80	80	Rp. 87.480.000	Rp. 87.480.000	Rp. 0	
Berkembangn ya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminka n Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar.	Berkembangnya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminkan Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar.	Jumlah Apresiasi Budaya Banjar	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	Event	Persen (%)	8	66,67	Rp.1.770.713.400	Rp. 2.125.599.400	Rp.354.886.0 00	Untuk alasan perubahan pagu anggaran sama seperti alasan- alasan pada sub- sub kgiatan dan kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Sedangkan alasan perubahan indikator serta target pada Indikator Kinerja yaitu ditukarnya nama indikator serta targetnya tersebut karena ada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											pemerintah dari Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Cakupan Pelestarian Budaya	Jumlah Apresiasi Budaya Banjar	Persen (%)	Event	66,67	8	Rp.1.770.713.400	Rp. 2.125.599.400	Rp.354.886.000	Untuk alasan perubahan pagu anggaran sama seperti alasan-alasan pada sub-sub kegiatan dan kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Sedangkan alasan perubahan indikator serta target pada Indikator Kinerja yaitu ditukarnya nama indikator serta targetnya tersebut karena ada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Laporan Hasil Evaluasi

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Program pengembang n kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase warisan tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	Persentase warisan tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	Persen (%)	Persen (%)	66,67	66,67	Rp. 1.426.498.500	Rp. 1.781.384.500	Rp. 354.886.000	
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB	Persentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB	Persen (%)	Persen (%)	66,67	66,67	Rp. 10.804.500	Rp. 238.490.500	Rp. 227.686.000	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembang n, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Perlindungan,P engembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Perlindungan, Pengembang n, Pemanfaatan	Objek	Objek	1	1	Rp. 10.804.500	Rp. 238.490.500	Rp. 227.686.000	1. Penambahan Kegiatan program kerja pemerintah daerah kegiatan festival kuliner 2. Penambahan untuk pembelian kain sasirangan dalam mengikuti rekor MURI

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian yang dibina	Persentase kelompok kesenian yang dibina	Persen (%)	Persen (%)	82,14	82,14	Rp. 1.400.694.000	Rp. 1.527.894.000	Rp. 127.200.000	
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	Objek	8	8	Rp. 1.337.287.000	Rp. 1.337.287.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	Laporan	1	1	Rp. 63.407.000	Rp. 190.607.000	Rp. 127.200.000	1. Penambahan Kegiatan Musyawarah seniman alasannya untuk meningkatkan sumber daya manusia pelaku seni 2. penambahan kegiatan Pelantikan Dewan Kesenian Daerah untuk membentuk organisasi kesenian yang anggotanya merupakan pelaku seni

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	Kelompok	Kelompok	1	1	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Dif asilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/D ifasilitasi	Unit	Unit	10	10	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Persentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	Persentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	Persen (%)	Persen (%)	60	60	Rp. 28.572.800	Rp. 28.572.800	Rp. 0	
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Orang	Orang	40	40	Rp. 28.572.800	Rp. 28.572.800	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pemberdayaa n Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/K ota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	Orang	40	40	Rp. 23.372.500	Rp. 23.372.500	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	Dokumen	1	1	Rp. 5.200.300	Rp. 5.200.300	Rp. 0	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	Persentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	Persen (%)	Persen (%)	67,5	67,5	Rp. 315.642.100	Rp. 315.642.100	Rp. 0	
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota ota	Persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya	Persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya	Persen (%)	Persen (%)	67,5	67,5	Rp. 72.088.600	Rp. 72.088.600	Rp. 0	
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	Objek	1	1	Rp. 72.088.600	Rp. 72.088.600	Rp. 0	
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota ota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	Objek	36	36	Rp. 243.553.500	Rp. 243.553.500	Rp. 0	Perubahan satuan target yang awalnya adalah unit menjadi objek untuk memudahkan penilaian kinerja.

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	Objek	24	25	Rp. 243.553.500	Rp. 243.553.500	Rp. 0	Target berubah yang mulanya 24 Objek menjadi 25 Objek sesuai SK Bupati Banjar Nomor 188.45 / 29 /KUM Tahun 2023 Tentang Penetapan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Banjar
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri	Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga	Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga	Medali	Medali	69	69	Rp. 6.315.283.980	Rp. 6.694.081.980	Rp. 378.798.000	
		Persentase wirausaha Muda	Persentase wirausaha Muda	Persen (%)	Persen (%)	0,03	0,03				
		Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Medali	Medali	69	69	Rp. 6.315.283.980	Rp. 6.694.081.980	Rp. 378.798.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	Orang	120	120	Rp. 2.071.917.000	Rp. 2.046.851.000	Rp25.066.000	Alasan berkurangnya pagu anggaran sama seperti alasan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dan Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase wirausaha Muda	Persen (%)	Persen (%)	0,03	0,03				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	Persentase atlet yang berdaya saing	Persen (%)	Persen (%)	38,75	38,76	Rp. 6.315.283.980	Rp. 6.694.081.980	Rp. 378.798.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional	Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional		Persen (%)	16	16	Rp. 974.011.980	Rp. 990.211.980	Rp. 16.200.000	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	Unit	2	2	Rp. 974.011.980	Rp. 990.211.980	Rp. 16.200.000	Memfasilitasi pengadaan peralatan olahraga yang akan digunakan pada kegiatan Kejuaraan dan Persiapan latihan atlet pada ajang PORPROV dan POPDA Melaksanakan kegiatan kejuaraan daerah tingkat pelajar sebagai ajang seleksi atlet POPDA tahun 2025 dan ajang latihan tanding bagi atlet yang ada di Kabupaten Banjar dikarenakan kurangnya kejuaraan olahraga di Kabupaten Banjar
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang Meraih Medali Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah Atlet Pelajar yang Meraih Medali Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Orang	Orang	200	200	Rp. 185.104.000	Rp. 185.104.000	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	Orang	400	400	Rp. 185.104.000	Rp. 185.104.000	Rp. 0	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang dibina untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang dibina untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Orang	Orang	100	100	Rp. 503.000.000	Rp. 708.460.000	Rp. 205.460.000	
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	Orang	200	200	Rp. 503.000.000	Rp. 708.460.000	Rp. 205.460.000	Memfasilitasi pengadaan peralatan olahraga yang akan digunakan pada kegiatan Kejuaraan dan Persiapan latihan atlet pada ajang PORPROV dan POPDA Melaksanakan kegiatan kejuaraan daerah tingkat pelajar sebagai ajang seleksi atlet POPDA tahun 2025 dan ajang latihan tanding bagi atlet yang ada di Kabupaten Banjar dikarenakan

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											kurangnya kejuaraan olahraga di Kabupaten Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembang an Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Organisasi	Organisasi	5	5	Rp. 4.303.935.000	Rp. 4.332.835.000	Rp. 28.900.000	
Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/ko ta sesuai dengan standar nasional	Dokumen	Dokumen	6	5	Rp. 4.303.935.000	Rp. 4.332.835.000	Rp. 28.900.000	Melaksanakan bimtek mengenai penyusunan laporan pertanggungjawab an bagi penerima hibah sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan	Kali	Kali	44	44	Rp. 349.233.000	Rp. 477.471.000	Rp. 128.238.000	
Sub Kegiatan Penyelenggara an, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an, Penyelenggara an, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaa n Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Dokumen	Laporan	13	13	Rp. 349.233.000	Rp. 477.471.000	Rp. 128.238.000	Melaksanakan festival olahraga tradisional (Balogo, Gasing, Ketapel, Enggrang, dan Terompah) bagi para pemuda yang ada di Kabupaten Banjar dan melestarikan

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											olahraga tradisional di Kabupaten Banjar
Program Pengembang n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda yang berdaya saing	Presentase pemuda yang berdaya saing	Persen (%)	Persen (%)	17,25	34,5	Rp. 2.071.917.000	Rp. 2.046.851.000	- Rp25.066.00 0	Alasan berkurangnya pagu anggaran sama seperti alasan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dan Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang di latih dalam kegiatan kepemudaan	Jumlah orang yang di latih dalam kegiatan kepemudaan	Orang	orang	375	375	Rp. 381.918.000	Rp. 356.852.000	Rp25.066.000	Alasan berkurangnya pagu anggaran sama seperti alasan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dan Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawananan pemuda
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	Orang	75	75	Rp. 168.000.000	Rp. 145.934.000	Rp22.066.000	Bidang Kepemudaan Masih Kekurangan Sarana untuk Mendukung Kinerja, maka diusulkan dari anggaran Sub Kegiatan (Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda) dan Sub Kegiatan (Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawananan

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											pemuda) untuk kebutuhan belanja modal dengan rincian : Belanja Modal Laptop (Rp 14.053.000), Belanja Modal AC (Rp 6.013.000), dan Belanja Modal Asset Tak Berwujud Berupa Software untuk Inovasi Bidang Kepemudaan (Rp 5.000.000)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen	1	1	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Orang	Kegiatan	200	6	Rp. 138.918.000	Rp. 135.918.000	Rp3.000.000 -	Bidang Kepemudaan Masih Kekurangan Sarana untuk Mendukung Kinerja, maka diusulkan dari anggaran Sub Kegiatan (Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda) dan Sub Kegiatan (Sub Kegiatan Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda) untuk kebutuhan belanja modal dengan rincian : Belanja Modal Laptop (Rp 14.053.000), Belanja Modal AC (Rp 6.013.000), dan Belanja Modal Asset Tak Berwujud Berupa Software untuk Inovasi Bidang Kepemudaan (Rp 5.000.000)

[illegible]

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan		Persen (%)	100	100	Rp. 1.689.999.000	Rp. 1.689.999.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen hasil peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		Dokumen	5	5	Rp. 1.689.999.000	Rp. 1.689.999.000	Rp. 0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		Indeks	76,00	76,00	Rp. 9.472.756.732	Rp. 9.876.639.232	Rp. 403.882.500	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen (%)	100	100	Rp. 37.679.700	Rp. 32.672.200	- Rp5.007.500	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, DPA, DPAP, RKA, RKAP)	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, DPA, DPAP, RKA, RKAP)		Dokumen	6	6	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	3	3	Rp. 16.988.100	Rp. 11.980.600	Rp5.007.500	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	19	19	Rp. 6.691.600	Rp. 6.691.600	Rp. 0	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan		Persen (%)	100	100	Rp. 6.303.139.392	Rp. 6.303.139.392	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	44	44	Rp. 6.144.673.492	Rp. 6.144.673.492	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	56	56	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	1	1	Rp. 8.465.900	Rp. 8.465.900	Rp. 0	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persen (%)	100	100	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Orang	1	5	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	Penambahan jumlah pegawai yang akan diikutkan Bimbingan Teknis

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persen (%)	100	100	Rp. 898.201.800	Rp. 1.098.201.800	Rp. 200.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		Paket	12	12	Rp. 32.965.000	Rp. 32.965.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan		Paket	12	12	Rp. 69.987.000	Rp. 69.987.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		Paket	12	12	Rp. 20.249.800	Rp. 20.249.800	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	Rp. 775.000.000	Rp. 975.000.000	Rp. 200.000.000	1. Penambahan Makan Minum Jamuan Tamu dikarenakan permintaan tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Banjar khususnya untuk sharing dan berkunjung ke Disbudporapar dan beberapa obyek wisata di Kabupaten Banjar. 2. Bertambahnya juga Perjalanan Dinas Biasa (luar Daerah Kab.

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											Banjar) untuk menunjang kebutuhan beberapa bidang dalam melaksanakan pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan tupoksi masing- masing bidang dan juga memfasilitasi kebutuhan serta mendampingi kepala daerah diberbagai kegiatan diluar daerah Kabupaten Banjar. 3.Bertambahnya Perjalanan Dinas Biasa yang digeser dari keuangan Bidang Destinasi, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persen (%)	100	100	Rp. 37.315.000	Rp. 82.605.000	Rp. 45.290.000	

URUSAN /BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan		Unit	6	6	Rp. 37.315.000	Rp. 82.605.000	Rp. 45.290.000	1. AC karena ada 3 AC yang sudah rusak berat dan perlu diganti, kemudian juga perlu menambah 3 AC baru untuk ruangan baru yang akan dibuatkan partisi/ sekat dan sesuai dengan RKBMD 2024. 2. Laptop karena ada beberapa laptop masing- masing bidang, program dan keuangan yang sudah rusak sehingga perlu diganti dan perlunya spesifikasi yang lebih tinggi karena digunakan untuk beberapa aplikasi dan website yang diperlukan untuk menunjang kelancarakn pekerjaan. 3.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian merupakan inovasi kajian yang akan dibuat oleh ASN Disbudporapar sebagai inovasi

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
											yang menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian.
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persen (%)	100	100	Rp. 1.668.609.840	Rp. 1.668.609.840	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	12	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan		Laporan	12	12	Rp. 331.429.840	Rp. 331.429.840	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Laporan	12	12	Rp. 1.331.180.000	Rp. 1.331.180.000	Rp. 0	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		Persen (%)	100	100	Rp. 502.811.000	Rp. 641.411.000	Rp. 138.600.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Peliharaan dan di Bayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Peliharaan dan di Bayarkan Pajaknya		Unit	1	1	Rp. 38.990.000	Rp. 38.990.000	Rp. 0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	21	21	Rp. 286.260.000	Rp. 274.860.000	Rp11.400.00 0	Digeser ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara		Unit	61	61	Rp. 47.137.000	Rp. 47.137.000	Rp. 0	

URUSAN / BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran		Bertambah (+) atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Setelah Perubahan	Satuan Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi		Unit	1	1	Rp. 130.424.000	Rp. 280.424.000	Rp. 150.000.000	Penambahan Partisi, Halaman dan Pagar, Honorarium pengadaan Barang Jasa

Sumber data : Hasil Inputan Data Perubahan Renja 2024 Disbudporapar pada Aplikasi SIPD

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi badan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Disbudporapar Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama lingkup internal Disbudporapar Kabupaten Banjar.
2. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya pencapaian target kinerja setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar.
3. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada Renstra Perubahan.
4. Perubahan Renja Disbudporapar Tahun 2024 dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disbudporapar Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Agar masing-masing bidang dan sub bagian pada sekretariat dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Perubahan Renja 2024 ini.
2. Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Perubahan Renja 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen Perubahan Renja 2024 Disbudporapar Kabupaten Banjar.
3. Segera melaksanakan kegiatan untuk pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renja Perubahan.

Demikian dokumen Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di sisa tahun pelaksanaan tahun 2024 ini. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pihak di internal Disbudporapar agar turut bersama-sama melaksanakan Perubahan Renja 2024 ini dengan penuh tanggung jawab guna mendukung tercapainya target kinerja Disbudporapar Kabupaten Banjar. Perubahan Renja Disbudporapar Tahun 2024 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAS. BANJAR
TAHUN 2024

Urusan / Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri	Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga	633 Medali			69 Medali	69 Medali	5.595.277.000,00	6315283980	6.694.081.980,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				261 Medali	23.102.118.300	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Persentase Wirausaha Muda	0,08%			0,03%	0,03%	168.000.000,00	168.000.000,00	145.934.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				0,05%	298.588.000	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	633 Medali			69 Medali	69 Medali	5.595.277.000,00	6.315.283.980,00	6.694.081.980,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				261 Medali	23.102.118.300	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Jumlah Pemuda yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional	600 Orang			120 Orang	120 Orang	1.713.918.000,00	1.903.917.000,00	1.900.917.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				120 Orang	2.293.658.000	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Persentase Wirausaha Muda	0,08%			0,03%	0,03%	168.000.000,00	168.000.000,00	145.934.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				0,05%	298.588.000	Disbudporapar Kabupaten Banjar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
Berkembangnya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminkan Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar.	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	88,89%			66,67%	66,67%	1.641.963.400,00	1.770.713.400,00	2.125.599.400,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				77,78%	2.324.229.600	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Jumlah Apresiasi Budaya Banjar	10 Event			8 Event	8 Event	1.641.963.400,00	1.770.713.400,00	2.125.599.400,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				9 Event	2.324.229.600	Disbudporapar Kabupaten Banjar
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
Meningkatnya Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	5.000.000 Orang			4.500.000 Orang	4.500.000 Orang	4.746.240.000,00	5.548.907.300,00	5.548.907.300,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum			4.750.000 Oran		866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	5.000.000 Orang			4.500.000 Orang	4.500.000 Orang	4.746.240.000,00	5.548.907.300,00	5.548.907.300,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum			4.750.000 Oran		866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Lama Kunjungan Wisatawan	2 Hari			2 Hari	2 Hari	4.746.240.000,00	5.548.907.300,00	5.548.907.300,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				2 Hari	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Pengeluaran Wisatawan	Rp.1.265.400			Rp.1.264.400	Rp.1.264.400	3.778.767.000,00	4.746.240.000,00	5.548.907.300,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				Rp.1.265.400	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN KELUARAN/PEMBELAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	TANGGAL KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN								KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEMERIAAN
							KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN		KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN		KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN		KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN						
							KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN	KETERANGAN KEGIATAN KEMERIAAN					
1	1.1.1	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	
2	1.1.2	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.7	1.1.2.8	1.1.2.9	1.1.2.10	1.1.2.11	1.1.2.12	
3	1.1.3	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.3.10	1.1.3.11	1.1.3.12	
4	1.1.4	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.4.6	1.1.4.7	1.1.4.8	1.1.4.9	1.1.4.10	1.1.4.11	1.1.4.12	
5	1.1.5	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.1.5.6	1.1.5.7	1.1.5.8	1.1.5.9	1.1.5.10	1.1.5.11	1.1.5.12	
6	1.1.6	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.6.1	1.1.6.2	1.1.6.3	1.1.6.4	1.1.6.5	1.1.6.6	1.1.6.7	1.1.6.8	1.1.6.9	1.1.6.10	1.1.6.11	1.1.6.12	
7	1.1.7	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.7.1	1.1.7.2	1.1.7.3	1.1.7.4	1.1.7.5	1.1.7.6	1.1.7.7	1.1.7.8	1.1.7.9	1.1.7.10	1.1.7.11	1.1.7.12	
8	1.1.8	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.8.1	1.1.8.2	1.1.8.3	1.1.8.4	1.1.8.5	1.1.8.6	1.1.8.7	1.1.8.8	1.1.8.9	1.1.8.10	1.1.8.11	1.1.8.12	
9	1.1.9	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.9.1	1.1.9.2	1.1.9.3	1.1.9.4	1.1.9.5	1.1.9.6	1.1.9.7	1.1.9.8	1.1.9.9	1.1.9.10	1.1.9.11	1.1.9.12	
10	1.1.10	PEMBELAN KEMERIAAN KEMERIAAN					1.1.10.1	1.1.10.2	1.1.10.3	1.1.10.4	1.1.10.5	1.1.10.6	1.1.10.7	1.1.10.8	1.1.10.9	1.1.10.10	1.1.10.11	1.1.10.12	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URAIAN BOKAL/URAIAN PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	SINGKATAN PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	TARUPT/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	TARUPT/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	SUMBER KEBERKASAN/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI										KETERANGAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	PERINGKATAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI		PERINGKATAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI
							TARUPT/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI		REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI		SUMBER KEBERKASAN/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI		KETERANGAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI		PERINGKATAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	PERINGKATAN/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI				
							REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI	REKAPITULASI/LOKASI/KELOMPOK/KELOMPOK/LOKASI/ORGANISASI						
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			
1.																				

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan baik. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja), digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2024, sebagai wujud untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan hingga terselesaikannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun sebagai acuan dan referensi untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dasar penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Undang-undang di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya peluang dan tantangan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan merupakan wahana belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Atas dasar itu, perpustakaan perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa tapi memprioritaskan daerah-daerah terpencil. Disisi lain tuntutan masyarakat dalam layanan informasi di era keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan dan sekaligus menjadi tanggung jawab pengelolaan kearsipan, sehingga pengembangan urusan kearsipan harus terus dilakukan untuk membuat pengelolaannya menjadi lebih baik.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Banjar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di masing-masing Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Isu-isu strategis tersebut kemudian disusun menjadi strategi pemecahan masalah yang menjadi konsep dan kerangka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. RENSTRA dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan di

bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah dan dokumen Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dikarenakan dokumen perubahan RKPD merupakan himpunan dari seluruh dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan RENJA K/L serta perubahan RENJA Provinsi/ Kabupaten/ Kota menandakan bahwa adanya perubahan arah kebijakan yang menjadi dasar analisis dalam melakukan reuiu RENSTRA Perangkat Daerah demi menjaga keterkaitan kebijakan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah dengan instansi vertikal di atasnya. Menanggapi hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk menyusun Perubahan RAPBD sebagai bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian anggaran serta target yang telah tersusun sebelumnya. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan pada realisasi kinerja serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Perubahan dilakukan pada anggaran beberapa sub kegiatan, yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Kebutuhan yang dimaksud berupa belanja barang, jasa, dan belanja modal yang sebelumnya tidak teranggarkan. Penyesuaian terhadap target pun mesti dilakukan untuk menyikapi adanya perubahan anggaran tersebut guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

Dengan adanya beberapa kebijakan di atas, maka disusunlah dokumen Perubahan RENJA tahun 2024 ini.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2024 mendasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keuda atas Keputusan Menteri dalam negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
- r. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26
- s. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)
- t. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan anggaran dan target sub kegiatan pada seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, serta Sekretariat yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah serta penyebab dari adanya Perubahan Renja.
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, total anggaran keseluruhan, perubahan indikator dan target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta alasannya, serta berisi tabel rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

BAB IV PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa:

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). RENJA memuat penjabaran dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang mengakibatkan pencapaian dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal. Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut terus di monitoring dan di evaluasi agar dapat diukur progresnya. Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program perpustakaan dan kearsipan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan angka capaian pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baik. Besaran pagu anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.381.197.361 dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan mengalami perubahan jumlah pagu keseluruhan menjadi Rp. 8.586.782.361 atau bertambah sebesar Rp. 205.585.000.

Berdasarkan Rencana Kerja pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar mempunyai program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Utama

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Arsip dengan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

➤ Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

1. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

Tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerjanya pada triwulan I.

- ❖ Triwulan II

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja “Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar” masih belum ada penilaian dari tim IKKI Inspektorat, kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 74 dan realisasi dari hasil perhitungan mandiri sebesar 77,67,;

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 51 % dan realisasi kinerja sebesar 2 %;
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 61% dan realisasi kinerja sebesar 51%;
- c. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 8200 orang dan realisasi sebesar 6716 orang.
- d. Kegiatan Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 2 kegiatan.

- ❖ Triwulan II

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” tidak memenuhi target

kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 31.25%;

- b. Kegiatan Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 6 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan
- c. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota “Jumlah Koleksi Etnis Nusantara” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 450 Eksemplar dan realisasi kinerja sebesar 0 Eksemplar;

• SUB KEGIATAN

❖ Triwulan I

- a. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja “Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Orang dan realisasi sebesar 0 Orang;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 40 Orang/Bulan dan realisasi sebesar 23 Orang/Bulan;
- c. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 paket dan realisasi sebesar 0 paket;
- d. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 28 unit dan realisasi sebesar 0 unit;
- e. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 16 unit dan realisasi sebesar 1 unit;
- f. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 21 unit dan realisasi sebesar 0 unit;

- g. Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan indikator kinerja “Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 6 Lokus dan realisasi sebesar 3 Lokus;
- h. Sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 10 arsip dan realisasi sebesar 2 arsip;

❖ Triwulan II

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 6 Paket dan realisasi sebesar 5 Paket;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 6 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- c. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 31 unit dan realisasi sebesar 0 unit;
- d. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 16 unit dan realisasi sebesar 15 unit;
- e. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 21 unit dan realisasi sebesar 0 unit;
- f. Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan indikator kinerja “Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 1653 eksemplar dan realisasi sebesar 505 eksemplar;

- g. Sub kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dengan indikator kinerja “Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 100 eksemplar dan realisasi sebesar 0 eksemplar;
 - h. Sub kegiatan Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dengan indikator kinerja “Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 100 eksemplar dan realisasi sebesar 0 eksemplar;
2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 19.25% dan realisasi sebesar 19.25%.
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja “Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 21.42% dan realisasi sebesar 21.42%.

- ❖ Triwulan II

- c. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja “Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 42.84% dan realisasi sebesar 42.84%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;

- d. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- e. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- f. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%.

❖ Triwulan II

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%;
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%;
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%;
- d. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%;
- e. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%;
- f. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 50% dan realisasi sebesar 50%.

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 5 Laporan dan realisasi sebesar 5 Laporan;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 2 Laporan;
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” memenuhi

target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;

- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit;
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 11 Unit dan realisasi sebesar 11 Unit;
- l. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Layanan dan realisasi sebesar 2 Layanan;

❖ Triwulan II

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 5 Laporan dan realisasi sebesar 5 Laporan;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket;
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja “Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4% dengan realisasi sebesar 13.75%.

- ❖ Triwulan II

- a. Program Pembinaan Perpustakaan memiliki dua indikator kinerja seperti indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 80 dengan realisasi sebesar 86.36 serta indikator kinerja “Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 6.9% dengan realisasi sebesar 14.82%.
- b. Program Pengelolaan Arsip dengan memiliki dua indikator kinerja seperti indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 80 dan realisasi sebesar 88.42 serta indikator kinerja “Tingkat ketersediaan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 38.5% dengan realisasi sebesar 76.9%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun dengan Baik” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 43% dan realisasi sebesar 43.28%;

- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 40% dan realisasi sebesar 69.27%;
- c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kotadengan indikator kinerja “Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 0 arsip dan realisasi sebesar 11 arsip;

❖ Triwulan II

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun dengan Baik” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 51% dan realisasi sebesar 55.63%;
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan II sebesar 71% dan realisasi sebesar 88.28%;
- c. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan II sebesar 13890 Orang dan realisasi sebesar 18391 Orang;
- d. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kotadengan indikator kinerja “Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan II sebesar 0 arsip dan realisasi sebesar 204 arsip;

• **SUB KEGIATAN**

❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja “Terpenuhinya Jasa Ke Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan bersihan Kantor” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 4 laporan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi” melebihi target

- kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan indikator kinerja “Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 243 Eksemplar dan realisasi sebesar 303 Eksemplar;
 - d. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 14250 arsip dan realisasi sebesar 20786 arsip;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 38670 berkas dan realisasi sebesar 152911 berkas;
 - f. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 32 laporan;
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 pengguna dan realisasi sebesar 4 pengguna;
 - h. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan.
 - i. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 arsip dan realisasi sebesar 2894 arsip.
 - j. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip dengan indikator kinerja “Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip” melebihi target

kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 arsip dan realisasi sebesar 11 arsip.

❖ Triwulan II

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen;
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 4 orang dan realisasi sebesar 11 orang;
- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan indikator kinerja “Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 14 lokus dan realisasi sebesar 21 lokus;
- d. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 28500 berkas dan realisasi sebesar 42566 berkas;
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 77340 berkas dan realisasi sebesar 154904 berkas;
- f. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 37 laporan;
- g. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 20 arsip dan realisasi sebesar 65 arsip;
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN” melebihi

target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 0 pengguna dan realisasi sebesar 10 pengguna;

- i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 30 laporan.
 - j. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan II sebesar 2500 arsip dan realisasi sebesar 2894 arsip.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan :
- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
 1. Ketidaksiapan dokumen pada beberapa bagian internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat nilai dari indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tidak maksimal;
 2. Adanya mutasi beberapa pegawai yang membuat beberapa jabatan kosong;
 3. Tidak terbiasa dengan system pengadaan yang baru melalui e-katalog;
 4. Ada kenaikan harga dan ketidaksesuaian spesifikasi dari barang yang ingin diadakan;
 5. Belum adanya urgensi untuk melakukan pemeliharaan, baik berupa pemeliharaan kendaraan roda empat dan dua maupun pemeliharaan Gedung kantor;
 6. Kesulitan dalam menemukan buku yang sesuai dengan yang hendak diadakan;
 7. Kesulitan memperoleh data terkait beberapa capaian kinerja;
 8. Capaian kinerja yang terkait dengan bencana agak sulit untuk tercapai;
 - b. Faktor penyebab terpenuhinya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
 1. Merupakan program/kegiatan/sub kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun;
 2. Adanya dukungan anggaran;
 3. Adanya strategi pelaksanaan yang sesuai.

- c. Faktor penyebab melebihi target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
 - 1. Adanya bantuan instansi lain terkait data capaian kinerja;
 - 2. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki;
 - 3. Adanya komitmen yang kuat dari internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
 - a. Proses pengadaan barang tertunda membuat beberapa capaian kegiatan dan sub kegiatan tidak maksimal;
 - b. Pemeliharaan barang, kendaraan, maupun Gedung tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang seharusnya;
 - c. Target dari pembayaran realisasi gaji/tunjangan ASN tidak tercapai;
 - d. Penyesuaian target yang harus dilakukan mengingat terlampauinya target tahunan pada triwulan II;
 - e. Evaluasi terkait penetapan target dan anggaran sub kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat.
- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Melakukan koordinasi secara lebih intens terkait proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog;
 - b. Menyusun jadwal pemeliharaan baik berupa pemeliharaan kendaraan, barang, maupun Gedung kantor;
 - c. Melakukan penyesuaian target dan anggaran sesuai dengan kondisi riil yang terjadi, serta berdasarkan pemetaan terkait dampak yang dihasilkan terhadap capaian sub.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PEELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
									I		II							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 5 + 8		11 = (10/4) *100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselengga ranya Urusan Penyusuna n Program Perencanaa n, Keuangan, Umum dan Kepegawaia n	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kabupaten Banjar	80	24.133.984.269	81,24	8.842.607.11 6	76	7.337.253.66 1	0	1.041.819.066	0	3.386.070.622	0%	46%	81,24	12.228.677.738	102%	51%
Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100%	16.211.122	98,5%	5.821.500	100%	19.422.000	43.28%	0	55,63%	2.158.000	55,63%	11%	0,5563	7.979.500	56%	49%
Tersusunnya a Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	32 Dokume n	4.864.958	13 Dokume n	1.730.500	7 Dokume n	6.260.000	4 Dokumen	0	5 Dokumen	1.960.000	71%	31%	18 Dokumen	3.690.500	56%	76%

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	5.940.655	4 Dokumen	2.171.000	2 Dokumen	6.672.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	198.000	50%	0%	5 Dokumen	2.369.000	50%	40%
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76 Laporan	5.405.509	44 Laporan	1.920.000	22 Laporan	6.490.000	5 Laporan	0	10 Laporan	0	45%	0%	54 Laporan	1.920.000	71%	36%
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.330.572.068	100%	6.098.600.224	100%	4.955.570.906	25%	261.459.590	50%	2.181.248.112	50%	44%	50%	8.279.848.336	100%	45%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	17.899.651.208	23 Orang/Bulan	5.899.691.974	40 Orang/Bulan	4.854.924.406	23 Orang/Bulan	233.739.590	37 Orang/Bulan	2.128.508.112	92,5%	44%	37 Orang/Bulan	8.028.200.086	92,5%	45%

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	413.677.287	12 Dokumen	176.140.000	12 Dokumen	91.720.000	3 Dokumen	23.840.000	6 Dokumen	48.860.000	50%	53%	18 Dokumen	225.000.000	38%	54%
Tersedianya Administrasi Tugas ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	17.243.573	2 Laporan	6.883.250	1 Laporan	8.926.500	0 Laporan	3.880.000	0 Laporan	3.880.000	0%	0%	2 Laporan	10.763.250	40%	62%
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100%	122.434.775	100%	88.792.697	100%	100.000.000	25%	0	50%	16.764.043	50%	17%	50%	105.556.740	100%	86%
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	122.434.775	42 Orang	88.792.697	7 Orang	100.000.000	0 Orang	0	4 Orang	16.764.043	57%	17%	46 Orang	105.556.740	131%	86%
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	950.928.478	100%	612.430.796	100%	399.486.764	25%	96.226.896	50%	223.701.306	50%	56%	50%	836.132.102	100%	88%

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	27.024.842	24 Paket	12.967.900	12 Paket	12.796.200	2 Paket	2.053.000	5 Paket	6.053.000	42%	47%	29 Paket	19.020.900	48%	70%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	92.412.580	24 Paket	36.824.696	12 Paket	8.927.864	3 Paket	1.573.500	3 Paket	1.573.500	25%	18%	27 Paket	38.398.196	45%	42%
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	270.302.473	24 Paket	89.059.280	12 Paket	72.763.000	3 Paket	16.374.000	6 Paket	27.784.900	50%	38%	30 Paket	116.844.180	50%	43%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	209.830.504	24 Paket	64.820.355	12 Paket	34.999.700	3 Paket	2.154.000	6 Paket	7.198.900	50%	21%	30 Paket	72.019.255	50%	34%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	351.358.079	22 Laporan	408.758.565	11 Laporan	270.000.000	2 Laporan	74.072.396	5 Laporan	181.091.006	45%	67%	29 Paket	589.849.571	53%	168%
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	170.408.127	99%	174.972.250	100%	770.739.000	2%	472.100.000	31,25%	586.020.000	31,25%	76%	31,25%	760.992.250	31,25 %	447%

Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	27.027.545	4 Unit	17.389.000	31 Unit	94.115.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0%	4 Unit	17.389.000	9%	64%
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	116.380.066	17 Unit	98.070.250	16 Unit	630.945.000	1 Unit	472.100.000	15 Unit	586.020.000	94%	93%	32 Unit	684.090.250	58%	588%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	59 Unit	27.000.516	28 Unit	59.513.000	21 Unit	45.679.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0%	28 Unit	59.513.000	47%	220%
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.475.738.985	100%	1.224.840.619	100%	739.768.029	25%	270.618.451	25%	270.618.451	50%	37%	50%	1.495.459.070	50%	43%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	726.172.823	24 Laporan	215.398.444	12 Laporan	169.528.029	3 Laporan	25.028.115	6 Laporan	50.259.711	50%	61%	30 Laporan	265.658.155	50%	37%
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	2.749.566.162	26 Laporan	1.009.442.175	13 Laporan	570.240.000	4 Laporan	139.520.520	7 Laporan	220.358.740	54%	48%	33 Laporan	1.229.800.915	51%	37%

Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.067.690.714	100%	414.304.026	100%	352.266.962	69%	47.483.945	88,28%	11.838.965	88,28%	3,36%	88,28%	426.142.991	88%	40%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	234.819.000	1 Unit	105.494.950	1 Unit	38.990.000	1 Unit	6.208.970	1 Unit	11.838.965	50%	30%	1 Unit	117.333.915	100%	50%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	580.650.669	11 Unit	183.530.126	11 Unit	129.740.000	11 Unit	11.453.975	11 Unit	42.334.845	50%	33%	11 Unit	225.864.971	100%	39%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	91.893.651	39 Unit	42.289.950	64 Unit	44.220.000	14 Unit	2.023.000	34 Unit	10.011.000	53%	23%	34 Unit	52.300.950	53%	57%

Terlaksanan ya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160.327.394	2 Unit	139.289.000	2 Unit	139.316.962	0 Unit	27.798.000	2 Unit	41.375.900	53%	30%	2 Unit	180.664.900	100%	113%
Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	16,77%	2.061.302.876	15.99%	675.872.512	9,53%	656.765.700	14,82%	17.893.000	14,37%	81.583.300	151%	12%	14,37%	757.455.812	86%	37%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	83		91.19		82,6%		86,36%		86,36%		105%		86,36%		104,05%	
Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	144.500 Orang	1.039.308.346	75.219 Orang	331.502.612	28.900 Orang	382.404.000	6716 Orang	8.410.000	18391 Orang	35.111.000	64%	9%	93.610 Orang	366.613.612	65%	35%
Terlaksanan ya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	413.192.291	2 Layanan	139.018.000	2 Layanan	170.404.000	2 Layanan	7.400.000	2 Layanan	31.646.000	100%	19%	2 Layanan	170.664.000	100%	41%

Terlaksanan ya Pengelolaan dan Pengembang an Bahan Perpustakaa n untuk Mewujudka n Keberagama n Koleksi Perpustakaa n	Pengelolaan dan Pengembang an Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaa n yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembang an untuk Mewujudka n Keberagama n Koleksi Perpustakaa n	10.695 Eksempl ar	463.230.987	3941 Eksempl ar	160.780.762	2.139 Eksempl ar	212.000.000	303 Eksemplar	1.010.000	505 Eksemplar	3.465.000	24%	2%	4.446 Eksemplar	164.245.762	42%	35%
Pengemban gan dan Pembinaan Perpustakaa n	Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembudaya an Gemar Membaca	65 Kegiata n	1.021.994.530	24 Kegiata n	344.369.900	13 Kegiata n	274.361.700	2 Kegiatan	9.483.000	4 Kegiatan	46.472.300	31%	17%	28 Kegiatan	390.842.200	43%	38%
Meningkatn ya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaa n Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	158 Lokus	613.657.972	90 Lokus	251.149.900	32 Lokus	179.999.900	3 Lokus	2.800.000	21 Lokus	34.042.500	66%	19%	111 Lokus	285.192.400	70%	46%
Terlaksanan ya Pengembang an Layanan Perpustakaa n Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pengembang an Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaa n Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangk an	5 Perpust akaan	254.512.997	2 Perpust akaan	71.670.000	1 Perpust akaan	64.361.800	0 Perpustak aan	6.683.000	0 Perpustak aan	12.429.800	0%	19%	2 Perpustakaa n	84.099.800	40%	33%

Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	5 Orang	153.823.561	1 Orang	21.550.000	1 Orang	30.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0%	0%	1 Orang	21.550.000	20%	14%
Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	100%	89.910.954	98,94%	33.079.400	99,45%	Rp16.600.000	0%	0	0	0	0%	0%	98,94%	33.079.400	99%	37%
Meningkatnya Pengembangan Koleksi Etnis Nusantara	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	600 Eksemplar	89.910.954	892 Eksemplar	33.079.400	450 Eksemplar	Rp16.600.000	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0%	0%	892 Eksemplar	33.079.400	149%	37%
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	81.244.838	386 Eksemplar	29.879.400	100 Eksemplar	Rp15.000.000	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0%	0%	386 Eksemplar	29.879.400	77%	37%
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	500 Eksemplar	8.666.116	428 Eksemplar	3.200.000	100 Eksemplar	Rp1.600.000	0 Eksemplar	1.000.000	0 Eksemplar	0	0%	0%	428 Eksemplar	3.200.000	86%	37%

Pengelolaan Kearsipan SKPD Berkualitas	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaa n arsip	81	1492843032	76	231.106.200	77	272.847.500	19,25	15.634.000	76,9	77.119.000	99,87	28%	76,9	308.225.200	76,90 %	21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	85,55		84,83		85,15		0		88,42		104%		88,42		88,42 %	
Pengelolaan Kearsipan Dinamis yang berkualitas	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksana nya pengelolaan arsip dinamis	100%	777043564	100%	133.737.000	100%	153.900.000	25%	11.492.000	50%	44.879.500	50%	29%	50%	182.616.500	50%	24%
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	285000 Berkas	513825337	92.460 Berkas	63.372.000	57000 Berkas	78.900.000	20786 Berkas	9.917.000	42566 Berkas	41.504.500	75%	53%	135026 berkas	104.876.500	47%	20%
Terkelolanya pemeliharaa n dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaa n dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaa n dan Penyusutan	163091 Berkas	235208777	152.228 Berkas	38.310.000	154691 Berkas	38.000.000	152911 Berkas	1.575.000	154904 Berkas	3.375.000	100,14 %	9%	307132 berkas	41.685.000	188%	18%
Terlaksanan ya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	240 Laporan	28009450	52 Laporan	32.055.000	48 Laporan	37.000.000	32 Laporan	0	37 Laporan	0	77%	0%	89 laporan	32.055.000	37%	114 %
Pengelolaan Kearsipan Statis yang berkualitas	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksana nya pengelolaan arsip statis	100%	104233374	100%	10.647.200	100%	22.000.000	25%	4.142.000	50%	20.322.000	50%	92%	50%	30.969.200	50%	30%

	Pengumpul an dan Penyampaia n Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulka n dan Disampaika n kepada ANRI	5 Arsip	28009402	NA	NA	1 Arsip	6.000.000	0 Arsip	0	0 Arsip	4.530.000	0%	76%	0%	4.530.000	0%	16%
Terlaksanan ya Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	640 Arsip	76223972	176 Arsip	10.647.200	20 Arsip	16.000.000	2 Arsip	4.142.000	65 Arsip	15.792.000	325%	99%	241 arsip	26.439.200	38%	35%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Berkualitas	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanN asional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksana nya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	611566148	100%	86.722.000	100%	96.947.500	25%	0	50%	11.917.500	50%	12%	50%	98.639.500	50%	16%
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ KotaMelalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	222 Penggun a	90424606	199 Penggun a	47.167.000	54 Penggun a	28.753.500	4 Pengguna	0	10 Pengguna	8.317.500	19%	29%	209 Pengguna	55.484.500	94%	61%

Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	250 Laporan	521141542	55 Laporan	39.555.000	50 Laporan	68.194.000	12 Laporan	0	30 Laporan	3.600.000	60%	5%	85 Laporan	43.155.000	34%	8%
Pengelolaan Kearsipan SKPD Berkualitas	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	86,7	168209313	84,67	68.819.500	85,7	97.730.500	21,42	145,000	42,84	13.223.000	50%	14%	84,67	82.042.500	98%	49%
Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Unit Kearsipan yang melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip	47 Unit Kearsipan	106257021	15 Unit Kearsipan	11.581.000	10 Unit	15.000.000	0 Unit	0	0 Unit	525,000	0%	4%	15 Unit Kearsipan	12.106.000	32%	11%
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	12500 Arsip	36023722	4263 Arsip	6.200.000	2500 Arsip	7.000.000	2894 Arsip	0	2894 Arsip	525,000	116%	8%	7157 arsip	6.725.000	57%	19%
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10	7500 Berkas	70233299	13701 Berkas	5.381.000	1500 Berkas	8.000.000	0 Berkas	0	0 Berkas	0	0%	0%	13701 berkas	5381000	183%	8%

Retensi Di Bawah 10 Tahun	Bawah 10 Tahun	Tahun yang Dimusnahkan																
Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah unit yang dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	5 Unit Kearsipan	54714590	1 Unit Kearsipan	20.579.000	1 Unit Kearsipan	5.939.000	0 Unit Kearsipan	0	0 Unit Kearsipan	198,000	0%	3%	1 Unit Kearsipan	20.777.000	20%	38%
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5000 Arsip	25890429	148 Arsip	225000	1000 Arsip	5.939.000	0 Arsip	0	0 Arsip	198,000	0%	3%	148 Arsip	423.000	3%	2%
Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan	15 unit Kearsipan	5790164	3 Unit Kearsipan	36.659.500	3 Unit Kearsipan	64.291.500	0 Unit Kearsipan	0	0 Unit Kearsipan	0	0%	0%	3 Unit Kearsipan	36.659.500	60%	633 %

Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 Daftar	1447550	3 Daftar	36.659.500	3 Daftar	34.145.500	0 Daftar	0	0 Daftar	7.000.000	0%	21%	3 Daftar	43.659.500	21%	1175%
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	9800 Arsip	1447538	NA	NA	2100 Arsip	30.146.000	0 Arsip	0	0 Arsip	0	0%	0%	0	0	0	0%
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	89 Arsip	1447538	NA	NA	81 Arsip	12.500.000	11 Arsip	145000	204 Arsip	12.500.000	252%	100%	204 Arsip	12.500.000	229%	864%

	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	350 Arsip	1447538	NA	NA	64 Arsip	12.500.000	11 Arsip	145000	64 Arsip	12.500.000	100%	100%	64 Arsip	12500000	18%	864 %
--	--	---	-----------	---------	----	----	----------	------------	----------	--------	----------	------------	------	------	----------	----------	-----	-------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar telah memuat secara merinci indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 sejumlah 5 program dengan 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Perubahan dilakukan pada anggaran serta target yang dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang semula sebesar Rp8.381.197.361 berubah menjadi Rp.8.586.782.361 dengan tambahan sebesar Rp.205.585.000 yang sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2024.

Tahun 2024 terdapat banyak penyesuaian belanja yang dilakukan, hal ini terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Salah satu alasan terbesar pelaksanaan penyesuaian anggaran yaitu telah terpenuhinya kebutuhan dari belanja yang teranggarkan, serta guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran baik dalam hal realisasi maupun mengenai hasil dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar telah menerapkan pelaksanaan kegiatan berorientasi hasil yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar dalam memutuskan adanya penyesuaian anggaran. Adapun penjelasan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
TUJUAN : Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	8.381.197.361	8.586.782.361	205.585.000	Adanya penambahan anggaran berupa : 1. Penambahan anggaran belanja untuk perjalanan dinas untuk kegiatan akreditasi perpustakaan 2. Penambahan honorarium Pengurus Barang dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebagai tindak lanjut dari

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								perubahan jumlah nilai barang yang diurus, sehingga membuat adanya kenaikan dua honorarium tersebut; 3. Penambahan belanja pengadaan baik pengadaan mebel, peralatan mesin lainnya maupun pengadaan sarana dan prasarana
URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					8.381.197.361	8.586.782.361	205.585.000	Adanya penambahan anggaran berupa : 1. Penambahan anggaran belanja untuk perjalanan dinas untuk

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								kegiatan akreditasi perpustakaan 2. Penambahan honorarium Pengurus Barang dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebagai tindak lanjut dari perubahan jumlah nilai barang yang diurus, sehingga membuat adanya kenaikan dua honorarium tersebut; 3. Penambahan belanja pengadaan baik pengadaan mebel, peralatan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								mesin lainnya maupun pengadaan sarana dan prasarana
BIDANG URUSAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					8.010.619.361	8.255.889.361	245.270.000	Adanya penambahan anggaran berupa : 1. Penambahan anggaran belanja untuk perjalan dinas untuk kegiatan akreditasi perpustakaan 2. Penambahan honorarium Pengurus Barang dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebagai tindak lanjut dari

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								perubahan jumlah nilai barang yang diurus, sehingga membuat adanya kenaikan dua honorarium tersebut; 3. Penambahan belanja pengadaan baik pengadaan mebel, peralatan mesin lainnya maupun pengadaan sarana dan prasarana
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	76%	76%	7.337.253.661	7.605.878.661	268.625.000	Adanya penambahan anggaran pada belanja ATK, pembayaran honorarium bendahara barang

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								dan pembantu bendahara barang, perjalanan dinas biasa dan perjadi dalam daerah, serta adanya penambahan belanja pada kegiatan pengadaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	76%	76%	7.337.253.661	7.605.878.661	268.625.000	Adanya penambahan anggaran pada belanja ATK, pembayaran honorarium bendahara barang dan pembantu bendahara barang, perjalanan dinas biasa dan perjadi dalam daerah,

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								serta adanya penambahan belanja pada kegiatan pengadaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100%	100%	19.422.000	19.422.000	Rp0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	6.260.000	6.260.000	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.672.000	6.672.000	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	6.490.000	6.490.000	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.955.570.906	4.960.862.906	5.292.000	Perubahan dilakukan pada penambahan beberapa honorarium bendahara barang dan pembantu bendahara barang dikarenakan kurang bayar, serta penambahan belanja ATK

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	4.854.924.406	4.854.924.406	0	Adanya penyesuaian pada rincian pembayaran gaji dan tunjangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	91.720.000	96.220.000	4.500.000	Perubahan rincian belanja dilakukan pada rincian Belanja Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang. Belanja pada komponen tersebut ditingkatkan karena adanya kurang bayar.

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.926.500	9.718.500	792.000	Penambahan Belanja Kertas F4 sebesar Rp. 792.000 dirasa perlu dikarenakan besarnya kebutuhan pencetakan dokumen.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100%	100%	100.000.000	100.000.000	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	100.000.000	100.000.000	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	399.486.764	523.187.764	123.701.000	Adanya penambahan berbagai kebutuhan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								penunjang pelaksanaan kegiatan teknis, yang didasari dari pemetaan kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.796.200	12.796.200	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.927.864	8.927.864	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	72.763.000	74.337.000	1.574.000	Adanya penambahan pada belanja ATK dan air minum

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.999.700	32.621.700	2.378.000	Adanya pengurangan pada kertas NCR dikarenakan tidak dipergunakan lagi untuk pencetakan NPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	270.000.000	394.505.000	124.505.000	Perubahan dilakukan pada : 1. Penambahan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas biasa untuk Bidang Kearsipan sebesar Rp. 39.505.000 untuk dapat mengakomodir kegiatan 2. Perjalanan Dinas biasa untuk Bidang perpustakaan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								sebesar Rp. 75.000.000 untuk dapat mengakomodir biaya 4 orang asesor dari perpustakas untuk akreditasi perpustakaan 3. Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Bidang Perpustakaan sebesar Rp. 2.500.000 untuk mengakomodir kegiatan akrediatasi perpustakaan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	770.739.000	910.371.000	139.632.000	Adanya penambahan dan pengurangan belanja modal yang sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan barang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	33 Unit	94.115.000	124.185.000	30.070.000	Perubahan Belanja dilakukan pada pengurangan rincian belanja Kursi Layanan, meja bulat, meja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Panjang dan kursi panjang Ruang Baca Perpustakaan dan adanya penambahan pengadaan lemari buku untuk kitab kuning
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	21 Unit	630.945.000	704.349.000	73.404.000	Perubahan Belanja dilakukan pada : 1. penambahan belanja kulkas mini untuk ruang laktasi 2. Penambahan Belanja Laptop untuk kegiatan akreditasi dan pembinaan peprpustakaan serta untuk bidang

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								perencanaan dan umum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	38 Unit	45.679.000	81.837.000	36.158.000	Perubahan rincian belanja dilakukan pada Belanja Alat Pendingin Berupa AC untuk ruangan secretariat dan aula dikarenakan AC pada ruangan tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi dan adanya penyesuaian rincian belanja pada belanja Running Text LED untuk Gedung perpustakaan dan Gedung arsip serta adanya

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								penambahan kursi untuk pegawai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	739.768.029	739.768.029	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.528.029	169.528.029	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	570.240.000	570.240.000	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	352.266.962	352.266.962	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.990.000	38.990.000	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	129.740.000	129.740.000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	64 Unit	44.220.000	44.220.000	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	139.316.962	139.316.962	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42.98	67.40	673.365.700	650.010.700	-23.355.000	Adanya penyesuaian anggaran yang dirasa perlu pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60.88	60.88				

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	9.53	16,25	656.765.700	633.410.700	-23.355.000	Adanya penyesuaian anggaran yang dirasa perlu pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	82,60	82,60				
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28.900 Orang	28.850 Orang	382.404.000	359.049.000	-23.355.000	Adanya penyesuaian anggaran yang dirasa perlu pada sub kegiatan Pengembangan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	2 Layanan	170.404.000	145.554.000	-24.850.000	Adanya penambahan rincian belanja berupa 1. Belanja Cetak Kartu anggota Perpustakaan beserta Ribbonnya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan an kartu anggota

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								perpustakaan sebanyak 1000 pcs kartu anggota perpustakaan dan 5 roll ribbon dengan total anggaran sebesar Rp. 8.750.000 2. belanja makan minum jamuan tamu dan rapat untuk kegiatan akrediatasi perpustakaan sebesar Rp. 3.400.000 dan penambahan belanja souvenir untuk kegiatan perpustakaan keliling sebesar Rp. 11.050.000 dan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								snakc pusling sebesar 22.500.000 serta belanja honorarium Honorarium Narasumber/Pembahas (asesor) sebesar 21.600.000 dan juga terdapat pengurangan anggaran pada belanja jasa konsultan untuk perhitungan IPL dan TGM sebesar Rp. 92.150.000

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.139 Eksemplar	2.139 Eksemplar	212.000.000	213.495.000	1.495.000	Adanya penambahan belanja pada belanja plastic transparan untuk pengolahan bahan Pustaka dan penambahan belanja koran
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	13 Kegiatan	13 Kegiatan	274.361.700	274.361.700	0	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	31 Lokus	31 Lokus	179.999.900	179.999.900	0	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	64.361.800	64.361.800	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	1 Orang	30.000.000	30.000.000	0	
Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	99.45%	99.45%	Rp16.600.000	Rp16.600.000	Rp0	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	450 Eksemplar	450 Eksemplar	Rp16.600.000	Rp16.600.000	Rp0	
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
	Pengolahan dan Penyiangan							
SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Kearsipan Daerah Berkualitas	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	74.15	80.40	370.578.000	330.893.000	-39.685.000	
URUSAN BIDANG : Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					370.578.000	330.893.000	-39.685.000	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	77	77	272.847.500	250.587.500	-22.260.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	85.15	85.15				
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis	Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis	100%	100%	153.900.000	128.463.000	-25.437.000	
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang	Jumlah Naskah Dinas yang	57000 Berkas	57000 Berkas	78.900.000	67.878.000	-11.022.000	Adanya pengurangan belanja pada

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
	Diciptakan dan Digunakan	Diciptakan dan Digunakan						belanja FLASHDISK sebesar Rp. 672.000, Box Arsip sebesar Rp. 8.750.000, honorarium narasumber eksternal meeting kearsipan Rp. 1.600.000
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	154691 Berkas	154691 Berkas	38.000.000	29.585.000	-8.415.000	Adanya pengurangan pada belanja apar, sarung tangan, makan minum Kegiatan Penyusutan Arsi dan adanya pengalihan belanja Detektor Asap dan Penyedot Debu ke sekretariat

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	37.000.000	31.000.000	-6.000.000	Adanya pengurangan belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Non PNS) - Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis	100%	100%	22.000.000	22.000.000	0	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	1 Arsip	6.000.000	6.000.000	0	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,	20 Arsip	20 Arsip	16.000.000	16.000.000	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
	Preservasi dan Akses Arsip Statis	Preservasi dan Akses Arsip Statis						
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	100%	96.947.500	100.124.500	3.177.000	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	54 Pengguna	54 Pengguna	28.753.50	28.130.500	-623.000	Adanya penyesuaian belanja ups
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	50 Laporan	50 Laporan	68.194.000	71.994.000	3.800.000	Adanya penyesuaian belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi Kearsipan dan Tiket dan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Akomodasi Narasumber Pusat) Kegiatan Sosialisasi/Meeting /Rakor Kearsipan serta pengurangan Uang Saku / Transportasi Peserta (Non ASN) Kegiatan Sosialisasi/Meeting /Rakor Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	85.70%	85.70%	97.730.500	80.305.500	17.425.000	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penilaian dan Pemusnahan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penilaian dan Pemusnahan Arsip	10 Unit Kearsipan	10 Unit Kearsipan	15.000.000	12.675.000	-2.325.000	Ada penyesuaian yang dilakukan seperti belanja honorarium Kegiatan Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								(anggota) dan Adanya penambahan belanja pada Makanan dan Minuman Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dan juga terdapat belanja pada ATK
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	2500 Arsip	2500 Arsip	7.000.000	4.200.000	-2.800.000	Adanya pengurangan belanja Honorarium Kegiatan Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip (anggota)
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas	1500 Berkas	8.000.000	8.475.000	475.000	Adanya penambahan belanja pada Makanan dan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Minuman Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dan juga terdapat pengurangan belanja pada ATK
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit yang dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Unit yang dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	1 Unit Kearsipan	1 Unit Kearsipan	5.939.000	3.039.000	-2.900.000	Adanya pengurangan belanja pada honorarium pelaksana kegiatan
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip	5.939.000	3.039.000	-2.900.000	Adanya pengurangan belanja pada honorarium pelaksana kegiatan
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan	3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan	64.291.500	52.091.500	-12.200.000	Adanya penyesuaian yang dilakukan pada beberapa belanja yang pada saat

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								pelaksanaan kegiatan dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian guna menjaga kelancaran dari pelaksanaan kegiatan teknis tersebut.
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	3 Daftar	34.145.500	25.495.500	-8.650.000	Adanya penyesuaian belanja pada sub kegiatan ini seperti pengadaan box arsip, cetak lembar diskripsi dan adanya penyesuaian pada Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Arsip Dinamis

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagus			Alasan Perubahan
			RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	RENJA 2024	Perubahan RENJA 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Tingkat Kompleks
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2100 Arsip	2100 Arsip	30.146.000	26.596.000	3.550.000	Adanya penyesuaian belanja pada sub kegiatan ini seperti pengadaan box arsip, cetak lembar diskripsi dan belanja kertas kissing, serta adanya penyesuaian pada Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kompleks
Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	81 Arsip	81 Arsip	12.500.000	12.500.000	0	

Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	64 Arsip	64 Arsip	12.500.000	12.500.000	0	
TOTAL					8.381.197.361	8.586.782.361	205.585.000	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berdasarkan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk Meningkatkan Tingkat Literasi dan Kegemaran membaca Masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan arsip. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negatife dalam operasionalisasi organisasi.

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APB Kabupaten,
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Agar mencapai kondisi tersebut, maka perlunya rencana tindak lanjut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpustakaan dan kearsipan dalam rangka melaksanakan pelayanan. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, webinar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.
3. Mengoptimalkan dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat serta melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengelolaan kearsipan perangkat daerah yang lebih intensif dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tahun 2024 disusun untuk memberi gambaran tentang perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat pada Perubahan Rencana Kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang

professional dan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan khususnya dibidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021. Rencana Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) Dinas Pertanian Kabupaen Banjar Tahun 2024 menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankhir Renja Perubahan) Dinas Pertanian Kabupaen Banjar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 merupakan tahapan Tahun ke-3 pembangunan pertanian Kabupaten Banjar pada periode RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar memasuki tahun ketiga periode RPJMD tahun 2022-2026. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020, maka RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022- 2026 baru akan disusun pada awal tahun 2022.

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

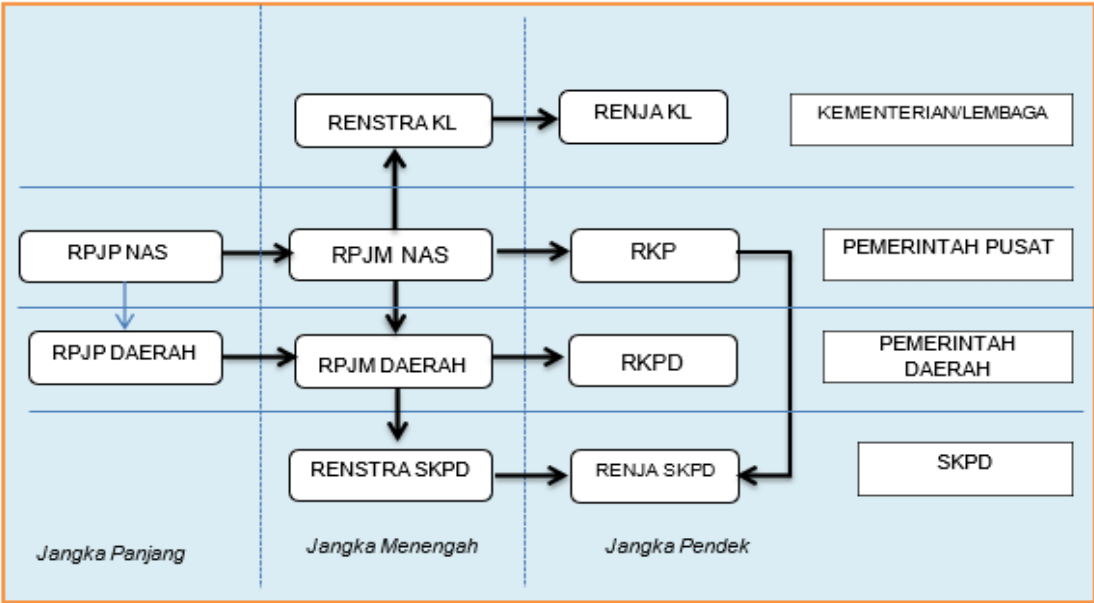
Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) yang disediakan oleh Kemendagri.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah

Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan didalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar didasarkan atas pertimbangan prioritas dan pagu indikatif.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan dan total kebutuhan dana.
4. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.



Gambar 1. Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perubahan Dinas Pertanian disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rewiu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan perubahan rencana kerja dari penjabaran rencana kerja tahunan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Perubahan Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategik yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2024.

Tahapan penyusunan perubahan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan Perubahan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian akan dituangkan penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kemudian menjadi Perubahan Renja SKPD. Hasil perumusan akhir rancangan SKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Perubahan Renja SKPD menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD.

Perubahan Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sasaran umum kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah **Pertanian Maju, Mandiri dan Modern**, dengan startegi utamanya adalah **Meningkatkan kesejahteraan petani, mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas pertanian**.

Berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 dan sesuai dengan urusan dan kewenangannya, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mempunyai peranan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang saat ini dilakukan perubahan yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2024 ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar yang didalamnya tertuang tujuan, input, output, outcome dan manfaat yang akan dicapai pada tahun 2024 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2024 dimaksud, dapat menyesuaikan target indikator pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengaju pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Lebih lanjut tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja Perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja Perubahan sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan SKPD;
4. Sebagai Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024;
5. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pertanian tahun 2025 bagi Jajaran Birokrasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar;
6. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan pertanian secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
7. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan pertanian; dan
8. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan

mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistem penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
- 2.4. Penelaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

2024

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan Pertanian sampai dengan tahun 2023 masih diprioritaskan pada upaya peningkatan produksi pertanian, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN tetap mengacu pada upaya tersebut.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menyusun dan merumuskan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
5. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dinas Pertanian; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat Daerah Kabupaten, Dinas Pertanian juga melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2024 melaksanakan 7 program, 24 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B; dan
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

- 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; dan
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.
- c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
 - e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - 4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.
7. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
 - 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian s/d triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Meningkatn ya produksi pertanian	PENINGKATA N PRODUKSI PERTANIAN	Persentase Peningkata n Produksi Pertanian	Perse n	0,75	0	0	0	0,75	0	0			49.999. 883.37 1	11.6 15.5 99.6 80	18.70 8.593. 686	41.10 1.044. 087	49.99 9.883. 371	3.987. 018.1 08	22.73 4.695. 351		
3	2	0			Terselenggar anya urusan penyusunan program perencanaan , keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indek s	76	0	0	67	76	0	0			38.518. 192.82 4	7.46 5.06 3.12 0	13.98 4.883. 828	30.18 4.639. 943	38.51 8.192. 824	3.339. 812.3 30	20.25 2.006. 596		
3	2	0	2.0		Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya a dokumen perencanaan n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Perse n	100	25	50	75	100	25	58			60.000. 000	18.9 17.0 00	21.03 5.000	54.00 0.000	60.00 0.000	19.70 5.100	33.77 4.600		
3	2	0	2.0	00 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Doku men	9	5	6	7	9	5	6			29.000. 000	17.43 5.000	5.881. 000	29.000 .000	29.000 .000	18.761 .100	23.292 .600		
3	2	0	2.0	00 06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Lapor an	3	3	3	3	3	3	3			25.000. 000	1.482 .000	11.518 .000	19.000 .000	25.000 .000	944.00 0	10.482 .000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
3	27	01	2.01	0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	5	10	15	19	5	10			6.000.000	0	3.636.000	6.000.000	6.000.000	0	0		
3	27	1	2		Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Person	100	25	50	75	100	25	50			30.947.870.801	4.589.174.200	11.878.237.000	23.628.856.700	30.947.870.801	1.904.293.476	16.896.336.177		
3	27	01	2.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3.267	817	1.634	2.450	3.267	637	1.634			30.745.390.801	4.526.749.700	11.829.872.000	23.470.711.700	30.745.390.801	1.828.151.976	16.809.365.177		
3	27	01	2.02	0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0			191.480.000	53.388.500	46.401.000	147.145.000	191.480.000	76.141.500	80.782.500		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
3	27	01	2.02	0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			6.000.000	5.550.000	450.000	6.000.000	6.000.000	0	3.294.000		
3	27	01	2.02	0007	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semestera n SKPD	Lapor an	18	4	9	13	18	4	9			5.000.000	3.486.000	1.514.000	5.000.000	5.000.000	0	2.894.500		
3	27	01	2.03		Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaa n Barang Milik Daerah tepat waktu	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0		
3	27	01	2.03	0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Lapor an	4	1	2	3	4	1	1			5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Daerah pada SKPD		Milik Daerah pada SKPD																			
3	27	01	2.05		Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administra si kepegawaia n perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			146.50 0.000	109.000.000	37.50 0.000	146.500.000	146.500.000	0	49.959.770		
3	27	01	2.05	0011	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang-Undangan	Oran g	5	0	3	5	5	0	7			146.50 0.000	109.000.000	37.500.000	146.50 0.000	146.50 0.000	0	49.959.770		
3	27	1	2,1		Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasi nya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantora n	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			1.653.386.195	705.334.700	392.732.000	1.531.886.195	1.653.386.195	458.224.410	825.330.764		
3	27	01	2.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	0	1			33.000.000	33.00 0.000	0	33.000.000	33.000.000	0	32.670.000		
3	27	01	2.06	0002	Tersedianya Peralatan dan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	5	3	5	5	5	0	5			254.929.500	254.929.500	0	254.929.500	254.929.500	226.850.000	247.640.000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Perlengkapan Kantor		Perlengkap a n Kantor yang Disediakan																			
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	5	9	9	9	2	9			54.687.700	16.050.200	0	54.687.700	54.687.700	0	0		
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2			15.197.000	11.355.000	2.732.000	15.197.000	15.197.000	9.087.500	9.087.500		
3	2	0	2.0	00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			1.295.571.995	390.000.000	390.000.000	1.174.071.995	1.295.571.995	222.286.910	535.933.264		
3	2	0	2.0		Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			542.026.000	487.666.000	54.360.000	542.026.000	542.026.000	0	472.100.000		
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	1	1	1	0	1			487.666.000	487.666.000	0	487.666.000	487.666.000	0	472.100.000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	2	2	2	0	0			54.360.000	0	54.360.000	54.360.000	54.360.000	0	0		
3	2	0	2.0		Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			3.941.200.000	992.511.220	1.151.500.000	3.064.161.220	3.941.200.000	819.617.260	1.374.191.901		
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	3	6	9	12	3	6			396.750.000	150.111.220	92.250.000	334.611.220	396.750.000	88.239.420	166.895.501		
3	2	0	2.0	00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	13	3	7	10	13	3	7			3.544.450.000	842.400.000	1.059.250.000	2.729.550.000	3.544.450.000	731.377.840	1.207.296.400		
3	2	0	2.0		Terpeliharaan ya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			1.222.209.828	562.460.000	444.519.828	1.212.209.828	1.222.209.828	137.972.084	600.313.384		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
3	27	01	2.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	5	9	13	17	4	9			595.170.000	228.240.000	211.000.000	595.170.000	595.170.000	115.222.084	272.433.604		
3	27	01	2.09	0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	8	16	24	35	20	16			139.300.000	35.000.000	45.000.000	129.300.000	139.300.000	22.750.000	43.000.000		
3	27	01	2.09	0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	3	7	7	7	0	7			487.739.828	299.220.000	188.519.828	487.739.828	487.739.828	0	284.879.780		
3	27	02			Sarana pertanian yang berkualitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas	Person	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00			2.345.444.448	1.413.434.370	516.205.568	2.237.371.614	2.345.444.448	106.515.070	227.870.590		
					Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah		Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan	Person	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00											

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Meningkatn ya populasi ternak besar		Persentase pertumbuh an populasi ternak besar	Perse n	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00											
3	27	2	2.01		Terlaksanan ya pengawasan dan pendamping an penggunaan sarana pendukung pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaa n pengawasa n dan pendampin gan penggunaa n sarana pendukung pertanian	Perse n	100	25	50	75	100	20	25			1.636.900.734	1.286.791.520	207.228.000	1.594.224.520	1.636.900.734	55.565.550	90.634.750		
3	27	02	2.01	0001	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			604.664.734	434.160.520	110.638.000	597.638.520	604.664.734	0	8.656.700		
3	27	02	2.01	0002	Terlaksanany a Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendamping an Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Lapor an	4	0	1	2	4	0	1			1.032.236.000	852.631.000	96.590.000	996.586.000	1.032.236.000	55.565.550	81.978.050		
3	27	02	2.02		Terlaksanan ya kegiatan peningkatan kualitas SDG hewan/tana man	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentase pelaksanaa n kegiatan peningkata n kualitas SDG Hewan/tan aman	Perse n	100	25	50	75	100	15	50			517.943.954	88.065.370	221.093.268	481.007.814	517.943.954	35.120.520	107.024.340		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
3	2	0	2.0	00	Meningkatny a Kualitas SDG Hewan/Tana man	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pelaksanaa n Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tan aman	Doku men	1	0	0	0	1	0	0			168.99 7.640	8.288 .500	73.458 .000	160.74 6.500	168.99 7.640	0	2.523. 000		
3	2	0	2.0	00	Termanfaatk annya SDG Hewan/Tana man	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pemanfaata n SDG Hewan/Tan aman	Doku men	2	0	0	1	2	0	0			200.11 8.500	2.752 .000	112.63 7.000	184.67 8.500	200.11 8.500	0	28.042 .000		
3	2	0	2.0	00	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Variet as Ungg ul Baru (VUB)	5000	1000	2500	4000	5000	950	1.210			148.82 7.814	77.02 4.870	34.998 .268	135.58 2.814	148.82 7.814	35.120 .520	76.459 .340		
3	2	0	2.0		Terlaksanan ya pengawasan produk benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/terna k	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota	Persentase pelaksanaa n pengawasa n produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	Perse n	100	25	50	75	100	25	50			190.59 9.760	38.5 77.4 80	87.88 4.300	162.1 39.28 0	190.5 99.76 0	15.82 9.000	30.21 1.500		
3	2	0	2.0	00	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Paka n	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Paka n	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			190.59 9.760	38.57 7.480	87.884 .300	162.13 9.280	190.59 9.760	15.829 .000	30.211 .500		
3	2	0			Meningkatn ya kuantitas dan kualitas prasarana di	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN	Persentase luas lahan yang mendapatk	Perse n	18,74	0	0	0	18,75	0	0,00			2.772.2 22.530	761. 573. 000	936.0 12.60 0	2.809. 117.9 38	3.004. 276.8 68	0	360.4 63.50 0		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					sektor pertanian	GAN PRASARANA PERTANIAN	an fasilitasi prasarana pertanian																			
					Meningkatn ya kuantitas dan kualitas prasarana perkebunan		Persentase luas perkebunan yang mendapatk an fasilitasi prasarana perkebunan	Perse n	100	0	0	0	100	0	0											
3	27	03	2		Tersedianya data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam bentuk peta	Pengembang an Prasarana Pertanian	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta	Doku men	1	0	0	0	1	0	0		259.39 9.900	240. 976. 000	15.28 0.000	257.7 56.00 0	259.3 99.90 0	0	3.892. 000			
3	27	03	2.01	0015	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LCP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjut an/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjut an/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjut an/LCP2B yang Dikelola	Doku men	1	0	0	0	1	0	0		259.39 9.900	240.9 76.00 0	15.280 .000	257.75 6.000	259.39 9.900	0	3.892. 000			
3	27	3	2		Terpenuhiny a pembanguna n prasarana pertanian yang handal dan mantap	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terpenuhin ya pembangun an prasarana pertanian yang	Perse n	1	0	0	0	1	0	0		2.356.7 47.630	390. 444. 000	896.6 10.60 0	2.164. 132.6 00	2.356. 747.6 30	0	335.1 04.50 0			

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
							handal dan mantap																			
3	27	03	2.02	0003	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharaan ya Jalan Usaha Tani	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	1	0	0			100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0		
3	27	03	2.02	0008	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharaan ya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	1	0	0			501.910.000	97.420.000	379.200.000	494.260.000	501.910.000	0	129.692.500		
3	27	03	2.02	0009	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharaan ya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	1	0	0			1.434.543.630	69.344.000	410.834.600	1.277.478.600	1.434.543.630	0	0		
3	27	03	2.02	0015	Terbangun, terehabilitasi , terpeliharaan dan beroperasinya rumah potong hewan	Pembangunan , Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	0	0	0	1	0	0			320.294.000	223.680.000	6.576.000	292.394.000	320.294.000	0	205.412.000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
3	2	0	2.0		Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak rumpun/galur ternak dalam daerah	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaanan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	2	0	0	0	2	0	0			156.075.000	130.153.000	24.122.000	155.175.000	156.075.000	0	21.467.000		
3	2	0	2.0	0001	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	0	0	0	1	0	0			84.675.000	82.567.000	2.108.000	84.675.000	84.675.000	0	6.052.000		
3	2	0	2.0	0002	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Laporan	1	0	0	0	1	0	0			71.400.000	47.586.000	22.014.000	70.500.000	71.400.000	0	15.415.000		
3	2	0	4		Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan optimal	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	Person	77	0	0	0	77	0	0			1.518.953.999	575.680.470	568.756.190	2.175.974.238	2.304.157.277	148.405.378	407.375.285		
							Persentase jenis produk olahan yang dikembangkan	Person	20	0	0	0	20	0	0											

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
							Persentase penurunan angka mortalitas ternak besar	Perse n	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00											
3	27	04	2.01		Menurunnya angka kematian ternak besar di dalam daerah	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kematian ternak besar	Perse n	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00			274.997.890	122.665.000	122.328.890	265.197.890	274.997.890	14.943.000	107.861.500		
3	27	04	2.01	0008	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	0	0	0	1	0	0			274.997.890	122.665.000	122.328.890	265.197.890	274.997.890	14.943.000	107.861.500		
3	27	04	2.02		Terlaksananya pemotongan ternak besar dan unggas di RPH dan RPU yang berkualitas	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH	Ekor	1.800	450	900	1.350	1.800	350	900			359.849.239	187.879.500	83.402.500	312.292.890	333.561.129	32.729.878	91.921.285		
							Jumlah ternak unggas	Ekor	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000	21.090	55.000											

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
						Kabupaten/Kota	yang dipotong di RPU																			
3	27	04	2.02	0004	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	12	3	6	9	12	3	6			359.849.239	187.879.500	83.402.500	338.581.000	359.849.239	32.729.878	91.921.285		
3	27	04	2.03		Terlaksananya pelayanan pemeriksana jasa medik veteriner dengan tepat waktu dan tepat mutu	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang ditangani	Ekor	1.500	375	750	1.125	1.500	473	978			517.190.500	146.815.000	216.119.000	465.086.500	517.190.500	41.488.000	47.745.500		
3	27	04	2.03	0002	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1.500	375	750	1.125	1.500	473	978			517.190.500	146.815.000	216.119.000	465.086.500	517.190.500	41.488.000	47.745.500		
3	27	04	2.04		Terlaksananya produk yang aman, sehat, utuh dan halal untuk di konsumsi	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Person	77	0	0	0	77	0	0			312.916.850	101.594.450	129.107.800	286.397.690	327.208.490	48.344.500	128.701.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang	Kegiatan	5	0	3	5	0	0	0	0											

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
							dilaksanakan																			
3	27	04	2.04	0002	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	0	0	0	1	0	0			187.917.200	72.675.800	71.776.800	166.106.400	187.917.200	26.799.500	80.293.000		
3	27	04	2.04	0010	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	1	0	0	0	1	0	0			124.999.650	28.918.650	57.331.000	105.999.650	124.999.650	21.545.000	48.408.000		
3	27	04	2.05		Lancarnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	Persen	100	25	50	75	100	25	50			53.999.520	16.726.520	17.798.000	49.799.520	53.999.520	10.900.000	31.146.000		
3	27	04	2.05	0003	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	0	0	0	1	0	0			53.999.520	16.726.520	17.798.000	49.799.520	53.999.520	10.900.000	31.146.000		
3	27	05			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana pertanian	Persen	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00			1.805.683.750	466.472.500	1.220.131.250	1.796.703.750	1.805.683.750	89.685.500	372.940.720		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					Meningkatn ya pengendalia n dan penanggulan gan bencana pertanian		Persentase kinerja pengendali an dan penanggula n bencana pertanian	Perse n	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00											
3	27	05	2.01		Pengendalia n dan penannggula n gan bencana pertanian yang optimal	Pengendalian dan Penanggulan an Bencana Pertanian Kabupaten/K ota	Presentase luas lahan yang dilakukan pengendali an dan penanggula n gan bencana pertanian	Perse n	75	0	0	0	75	18	48			1.805.683.750	466.472.500	1.220.131.250	1.796.703.750	1.805.683.750	89.685.500	372.940.720		
3	27	05	2.01	0001	Terkendaliny a Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan yang Dikendalika n	Ha	750	150	350	500	750	150	500			396.448.750	298.972.000	79.926.750	389.448.750	396.448.750	87.513.500	268.648.000		
3	27	05	2.01	0002	Tertanganiny a Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1200	500	850	0	1200	200	600			181.784.000	76.529.500	68.104.500	181.784.000	181.784.000	0	65.857.720		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
3	27	05	2.01	0003	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan	Ha	300	0	0	150	300	50	225			227.451.000	90.971.000	72.100.000	225.471.000	227.451.000	2.172.000	38.435.000		
3	27	05	2.01	0006	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan	Laporan	1	0	0	0	1	0	0			1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0		
3	27	6			Terfasilitasinya izin usaha pelaku usaha di sektor pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	Person	5	0	0	0	5	0	0			318.213.000	63.834.000	119.562.500	269.352.000	318.213.000	11.581.700	96.430.700		
					Terfasilitasinya pembinaan usaha pelaku usaha perkebunan		Persentase usaha perkebunan yang tertib administrasi	Person	100	0	0	0	100	0	0											
					Terfasilitasinya pembinaan usaha pelaku		Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi	Person	15	0	0	0	15	0	0											

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
					usaha peternakan																					
3	27	06	2.01		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	Perse n	1	0	0	0	1	0	0			170.448.000	28.143.500	77.159.000	149.466.000	170.448.000	2.232.500	45.855.500		
3	27	06	2.01	0001	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Penyusunan Standar Pelayanan PublikPemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Doku men	1	0	1	1	1	0	1			38.000.000	19.579.000	11.477.000	36.356.000	38.000.000	1.732.500	2.255.500		
3	27	06	2.01	0002	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Doku men	6	0	3	3	6	0	3			10.053.000	0	0	1.512.000	10.053.000	0	0		
3	27	06	2.01	0005	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Lapor an	7	0	0	0	7	0	0			122.395.000	8.564.500	65.682.000	111.598.000	122.395.000	500.000	43.600.000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
3	2	0	2.0		Terlaksananya penerbitan rekomendasi teknis izin usaha peternakan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang mendapat rekomendasi teknis untuk perizinan usaha	Perse n	1	0	0	0	0	0	0			60.600.000	14.833.000	20.389.500	58.197.000	60.600.000	5.555.000	23.306.000		
3	2	0	2.0	0001	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaa n Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausah aan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaaa n Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pas ar Hewan, Rumah Potong Hewan	Doku men	90	0	35	70	90	0	35			60.600.000	14.833.000	20.389.500	58.197.000	60.600.000	5.555.000	23.306.000		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATU AN	TARGE T KINER JA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGA RAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	T R III	T R IV
3	27	06	2.03		Terlaksananya penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat rekomendasi teknis untuk izin usaha	Perse n	1	0	0	0	1	0	0			87.165.000	20.857.500	22.014.000	61.689.000	87.165.000	3.794.200	27.269.200		
3	27	06	2.03	0001	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			49.998.500	4.139.500	11.042.000	28.372.500	49.998.500	1.388.200	7.313.200		
3	27	06	2.03	0002	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Lapor an	1	0	0	0	1	0	0			37.166.500	16.718.000	10.972.000	33.316.500	37.166.500	2.406.000	19.956.000		
3	27	7			Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Kelompok Tani di sektor pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri	Perse n	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00			2.721.172.820	869.542.220	1.363.041.750	2.645.142.220	2.721.172.820	291.018.130	1.017.607.960		
3	27	7	2		Tumbuh dan berkembangnya kapasitas kelembagaan petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya	Perse n	60,20	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00			2.721.172.820	869.542.220	1.363.041.750	2.645.142.220	2.721.172.820	291.018.130	1.017.607.960		

KODE					SASARAN / KINERJA	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	TARGET PERIODIK				REALISASI KINERJA PERIODIK				ANGGARAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERIODIK				REALISASI ANGGARAN PERIODIK			
										TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV		TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV
3	27	07	2.01	0001	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	0	0	0	20	0	0			852.120.720	531.040.220	219.383.250	816.585.720	852.120.720	59.566.000	211.144.410		
3	27	07	2.01	0002	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	125	0	0	0	125	0	0			1.371.406.000	212.453.000	778.468.000	1.332.657.000	1.371.406.000	156.437.130	615.497.050		
3	27	07	2.01	0003	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	12	0	0	0	12	0	0			497.646.100	126.049.000	365.190.500	495.899.500	497.646.100	75.015.000	190.966.500		
					Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat teknis		Orang	80	20	40	60	80	30	40			497.646.100									

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut: “**Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis**”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju;** Maju dalam pengertian ini adalah: (a) Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang; dan (b) Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
2. **Mandiri;** Mandiri dalam pengertian ini adalah: (a) Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain; (b) Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan; (c) Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. **Agamis;** Agamis dalam pengertian ini adalah agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pertanian harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yaitu melaksanakan misi kedua yaitu:

**“PENINGKATAN EKONOMI YANG BERKUALITAS BERBASIS
KERAKYATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
BERKEADILAN”**

Pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Ekonomi kerakyatan adalah sistim

ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 negara memainkan peranan penting dalam sistim ekonomi kerakyatan, melalui Badan Usaha Milik Negara, yang menguasai produksi hajat hidup orang banyak. Ciri dari sistim ekonomi kerakyatan adalah:

1. Peranan pemerintah yang menunjang terbentuk ekonomi kerakyatan, yang tidak saja terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian melalui badan usaha negara, tetapi tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasarkan keadilan, partisipasi dan berkelanjutan, kedua, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama.
3. Pemerataan penguasaan faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi substansi sistim ekonomi kerakyatan.
4. Pola hubungan produksi kemitraan, sebagaimana ditegaskan Bung Hatta pada koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”, ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan tidak adanya individualistis dan kapitalistis.
5. Kepemilikan saham oleh pekerja, Mekanisme pasarnya, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui usaha bersama koperasi. Mekanisme pasar koperasi sama dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2024 melaksanakan 7 program, 24 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; dan
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- a. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
- b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - 4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian; dan
 - 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

- b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
7. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
 - 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
-------------------	-----------------------------	--------	--------	-----------

1	2	3	4	5
Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,75	A/N

Sasaran strategis Kepala Dinas Pertanian “**Meningkatnya Produksi Pertanian**” dengan indikator kinerja “**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**” dengan target sebesar 0,75% dan ditargetkan pada akhir tahun kinerja atau pada triwulan IV, maka capaian kinerja triwulan II belum dapat dilaporkan. Hal ini karena:

1. Capaian persentase peningkatan produksi pertanian tidak dapat dilaporkan per triwulanan karena, hasil data capaian peningkatan produksi pertanian atau terkait produksi pertanian akan dapat dipublik setelah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi penetapan angka tetap produksi pertanian dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Sehingga capaian produksi ini akan mendapat angka sementara pada saat akhir tahun (triwulan 4) atau awal bulan pada tahun berikutnya;
2. Komoditas pertanian yang diperhitungkan persentase peningkatan produksi pertanian meliputi tanaman pangan (padi), hortikultura (jeruk, pisang, durian dan cabai), perkebunan (karet) dan peternakan (ternak besar sapi);
3. Komoditas tanaman pangan (padi), tanaman hortikultura (jeruk, pisang, durian dan cabai), komoditas perkebunan (karet) dan peternakan (sapi) dilakukan sinkronisasi;
4. Pelaksanaan sinkronisasi capaian produksi ini tergantung pelaksanaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Faktor penghambat:

1. Kegiatan pengadaan sapi dari pusat merupakan kegiatan APBN yang sumber dana dari pusat. Hal itu yang menyebabkan adanya kesulitan atau hambatan dalam penyaluran sapi dengan kondisi

lapangan. Terdapat adanya ketidaksesuaian waktu kegiatan (dana pusat) dengan kondisi lapangan (kebutuhan saprodi petani);

2. Terbatasnya pendanaan APBD;
3. Petani relatif masih menggunakan benih padi varietas lokal daripada benih unggul untuk usahatannya;
4. Kurangnya minat petani muda bekerja disektor pertanian;
5. Sebagian besar kelompok tani di Kabupaten Banjar belum berbadan hukum, sementara kelompok tani di Kabupaten Banjar Sebagian besar belum terintegrasi dan berbadan hukum dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, maka bantuan tersebut hanya bisa diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum, minimal 3 tahun. Akibatnya realisasi bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat kepada Poktan/gapoktan berpotensi menjadi terhambat/tidak terserap, tidak tepat sasaran dan akan menimbulkan permasalahan dengan hukum
6. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mempengaruhi produksi pertanian;
7. Adanya penyakit yang menyerang pada ternak;
8. Terdapatnya keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas; dan
9. Adanya fluktuasi harga pasar dan pasca pasar untuk hasil pertanian.

Faktor pendorong:

1. Adanya kegiatan mitigasi bencana akibat DPI;
2. Koordinasi dengan kementerian terkait kalender tanam;
3. Adanya bantuan sarana produksi melalui dana APBD prov dan APBN;
4. Tersedianya SDMP yang tersebar diwilayah desa;
5. Adanya dukung anggaran dari APBN, APBD prov dan APBD kabupaten;
6. Adanya potensi lahan pertanian yang dapat dioptimalkan dalam peningkatan produksi pertanian;
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan kelembagaan petani (kelembagaannya, peningkatan SDMP-nya, sarana dan prasarana penunjang penyuluhan);

8. Adanya koordinasi dengan stekaholder baik secara vertikal (Dinas instansi terkait) maupun horizontal (Bupati, dan Kementerian);
9. Adanya pengendalian OPT pada komoditas pertanian;
10. Adanya pengendalian penyakit pada ternak dengan vaksinasi, pemberian vitamin dan pengobatan serta tersedianya dana operasional SIKOMANDAN dari APBD II Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik untuk peningkatan populasi ternak;
11. Aktivitas/kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS);
12. Adanya pembinaan dan bimbingan kepada kelompok untuk meningkatkan luas tanam pertanian melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya secara komersil dan menerapkan teknologi terkini;
13. Peran penyuluhan sebagai media komunikasi terdepan dalam penyampaian hasil-hasil inovasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan kapasitas petani. Sistem penyuluhan berupa komunikasi yang efektif akan memberikan dukungan kuat bagi petani untuk memperbaiki sistem usaha taninya yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil yang dicapai;
14. Meningkatnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi; (b) pusat gerakan pembangunan pertanian; (c) pusat pembelajaran; (d) pusat konsultasi agribisnis; dan (e) pusat pengembangan jejaringan kemitraan;
15. Adanya program penumbuhan dan pengembangan petani dalam rangka optimalisasi regenerasi petani.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Kabupate Banjar pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 49.999.883.371 dengan rincian belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan ASN) Rp 30.745.390.801 dan belanja langsung Rp 19.254.492.570 (yang terdiri dari belanja langsung utama Rp 11.481.690.547 dan belanja langsung pendukung Rp 7.772.802.023).

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencapai sasaran strategis “**Meningkatnya Produksi Pertanian**”, yaitu:

1. Melakukan penyesuaian pengadaan saprodi dari pusat dengan kondisi lapangan (kebutuhan saprodi petani) untuk menunjang dalam peningkatan produksi pertanian;
2. Terbatasnya pendanaan APBD untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, maka dilakukan pengusulan bantuan saprodi melalui dana APBD prov dan APBN;
3. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya secara komersil dan menerapkan teknologi terkini agar petani menggunakan benih varietas unggul untuk usahatani;
4. Menyebarluaskan program penumbuhan dan pengembangan petani dalam rangka optimalisasi regenerasi petani, agar minat petani muda bekerja di sektor pertanian;
5. Adanya kegiatan Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS) guna mendukung dalam hal bantuan modal kepada petani untuk usaha di bidang pertanian;
6. Melakukan gerakan pengendalian dan penanganan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) untuk meningkatkan produksi pertanian;
7. Melakukan pengendalian penyakit pada ternak dengan vaksinasi, pemberian vitamin dan pengobatan serta tersedianya dana operasional SIKOMANDAN dari APBD II Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik untuk peningkatan populasi ternak;
8. Mengoptimalkan penyelenggaraan kelembagaan petani (kelembagaannya, peningkatan SDMP-nya, sarana dan prasarana penunjang penyuluhan);
9. Meningkatkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi; (b) pusat gerakan pembangunan pertanian; (c) pusat pembelajaran; (d) pusat konsultasi agribisnis; dan (e) pusat pengembangan jejaringan kemitraan; dan
10. Mengoptimalkan koordinasi dengan stekaholder baik secara vertikal (Dinas instansi terkait) maupun horizontal (Bupati, dan Kementerian).

Adapun tindak lanjut yang dapat diberikan untuk mencapai sasaran strategis “**Meningkatnya Produksi Pertanian**”, yaitu

1. Melakukan kegiatan mitigasi bencana akibat DPI;
2. Adanya bantuan sarana produksi melalui dana APBD prov dan APBN;
3. Adanya koordinasi dengan stekaholder baik secara vartikel (Dinas instansi terkait) maupun horizontal (Kementerian);
4. Adanya pengendalian OPT pada komoditas pertanian;
5. Adanya pengendalian penyakit pada ternak dengan vaknisasi, pemberian vitamin dan pengobatan serta tersedianya dana operasional SIKOMANDAN dari APBD II Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik untuk peningkatan populasi ternak;
6. Adanya pembinaan dan bimbingan kepada kelompok untuk meningkatkan luas tanam pertanian melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya secara komersil dan menerapkan teknologi terkini;
7. Adanya program penumbuhan dan pengembangan petani dalam rangka optimalisasi rigenerasi petani;
8. Melakukan penyesuaian pengadaaan saprodi dari pusat dengan kondisi lapangan (kebutuhan saprodi petani) untuk menunjang dalam peningkatan produksi pertanian;
9. Adanya kegiatan Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS) guna mendukung dalam hal bantuan modal kepada petani untuk usaha dibidang pertanian; dan
10. Mengoptimalkan penyelenggaraan kelembagaan petani (kelembagaannya, peningkatan SDMP-nya, sarana dan prasarana penunjang penyuluhannya).

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertaian

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
1	Persentase peningkatan produksi pertanian	$Q_{(\%) } = \frac{Q_{(n)} - Q_{(n-1)}}{Q_{(n-1)}} \times 100\%$ Q _(%) = persentase peningkatan produksi pertanian Q _(n) = jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) Q _(n-1) = jumlah produksi pertanian	0,50	0,63	0,75	0,89	- 0,89	7,63*	0,75	0,89	

		pada tahun sebelumnya (n-1) Jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen Komoditas produksi pertanian yang diperhitungkan adalah komoditas unggulan daerah, yaitu pangan (padi), hortikultura (jeruk, pisang, durian, cabe), perkebunan (karet) dan peternakan (ternak besar)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

*) Angka sementara dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Tugas Dinas Pertanian secara jelas telah diatur pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian pasal 22 dijelaskan bahwa Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Pertanian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia dari berbagai aspek dan kelemahan yang dapat menghambat proses pembangunan Dinas Pertanian selama tahun 2021-2026.

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- 1 Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Pertanian;
- 2 Tersedianya Perda SOTK dan Uraian Tugas Dinas Pertanian;

- 3 Tersedianya UPTD Balai Benih, Mekanisasi Pertanian, UPTD Penyuluhan Pertanian dan UPTD Rumah Potong Hewan;
- 4 Tersedianya dukungan petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengamat Benih Tanaman (PBT); dan
- 5 Tersedianya dukungan dan kerjasama Aparatur Sipil Negara.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- 1 Rampingnya Struktur organisasi;
- 2 Ruang perkantoran kurang representatif dan kurangnya sarana prasarana pendukung (mobilisasi);
- 3 Kurangnya tenaga teknis lapangan seperti Mantri Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan;
- 4 Kurang akuratnya data base pertanian; dan
- 5 Kompetensi aparatur yang masih rendah.

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal ditujukan untuk mengetahui peluang yang tersedia dan kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang yang tersedia dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, yaitu:

1. Adanya lahan pertanian yang berpotensi untuk peningkatan IP (indek pertanian) atau tanam lebih dari satu kali dalam setahun;
2. Tersedianya lahan pertanian Kabupaten Banjar dengan tipe lahan yang beragam, diantaranya: irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, rawa lebak dan ladang/huma;
3. Tersedianya lembaga-lembaga penelitian/pengkajian pertanian, perguruan tinggi;
4. Peluang pasar untuk hasil olahan komoditas pertanian cukup luas;
5. Tersedianya akses informasi yang semakin terbuka;
6. Tersedianya dukunga pemerintah daerah, lembaga keuangan dalam pengembangan usaha agribisnis pertanian;
7. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan bagi petani; dan
8. Dukungan pusat dan provinsi atas pengembangan komoditas pertanian.

Adapun kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, yaitu:

1. Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perkebunan adalah sebagai berikut:
 - a. Produktivitas komoditas perkebunan masih rendah;
 - b. Mutu hasil perkebunan masih rendah (kwalitas asalan);
 - c. Harga jual yang cenderung fluktuatif serta kecendrungan budidaya monokultur (belum semua petani pekebun melaksanakan pola mix farming/pertanian terpadu);
 - d. Minimnya akses informasi, teknologi dan pemodalan;
 - e. Lemahnya akses pasar serta bargaining position/nilai tukar petani;
 - f. Belum berkembangnya kelembagaan tani yang mandiri, modern dan berdaya saing;
 - g. Minimnya kapasitas sumberdaya manusia perkebunan;
 - h. Panjangnya mata rantai pemasaran produk; dan
 - i. Masih kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jalan usaha tani, drainase, dan embung.
2. Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan merupakan perubahan dari arah kebijakan dari program percepatan swasembada daging. Fokus penanganan program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan adalah kesejahteraan peternak, komoditas sapi/kerbau, komoditas ternak lainnya dan peningkatan daya saing peternakan;
 - b. Disamping itu, pengembangan usaha peternakan juga sangat diminati sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disamping usaha pertanian lainnya;
 - c. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif. Angka Populasi ternak untuk semua jenis ternak sebagai *live stock* pada tingkat nasional maupun regional perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pemotongan dan pengeluaran ternak

tersebut termasuk betina-betina produktif yang semestinya dipertahankan keberadaannya untuk menjamin pertumbuhan populasi ternak; dan

- d. Masih munculnya kasus Flu Burung (*High Patogenic Avian Influenza/HPAI*). Adanya kejadian wabah penyakit ternak (flu burung) dan kekhawatiran penularannya terhadap manusia di tingkat internasional, nasional dan daerah sangat memerlukan tindakan antisipasi yang memadai.
3. Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Laju konversi lahan (alih fungsi lahan) semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya kualitas SDM pertanian;
 - d. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian yang berkualitas; dan
 - e. Belum optimalnya ketersediaan dan pembangunan prasarana pertanian yang handal.

2.3. Penelaahan terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Rancangan akhir perubahan RKPD Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 serta urusan pemeritahan yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar yakni **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”** dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan

5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dominan pada misi kedua, yaitu **“Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan”**. Tujuan dari misi tersebut adalah:

1. **Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.** Hal ini diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian, yaitu **“meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan”**.
2. **Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran.** Hal ini diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian, yaitu **“berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan”**.

Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD perubahan tahun 2024 Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Banjar

Dinas Pertanian

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					49.999.883.371	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					50.710.202.802	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	76	38.518.192.824	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	76	38.973.010.473	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	60.000.000	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	29.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	29.000.000	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	25.000.000	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	6.000.000	
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	30.947.870.801	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	30.957.046.801	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3.267	30.745.390.801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3.267	30.745.390.801	
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	191.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	191.480.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.000.000	
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	14.176.000	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	5.000.000	
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5.000.000	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	146.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	109.000.000	
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	146.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	109.000.000	
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	1.653.386.195	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	2.013.033.715	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33.000.000	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	254.929.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	464.577.020	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	54.687.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	54.687.700	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.197.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.197.000	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.295.571.995	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.445.571.995	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	542.026.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	542.026.000	
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	487.666.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	487.666.000	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	54.360.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	54.360.000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	3.941.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	3.916.464.129	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	396.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	372.014.129	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	3.544.450.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	3.544.450.000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	1.222.209.828	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	1.370.439.828	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	595.170.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	595.170.000	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	139.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	98.850.000	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	487.739.828	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	676.419.828	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas	Persen	0,60	2.345.444.448	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas	Persen	3,50	2.286.520.658	
							Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan	Persen	0,05				Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan	Persen	0,10		
							Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	Persen	1,00				Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	Persen	1,75		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Persen	100	1.636.900.734	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Persen	100	1.601.900.734	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	604.664.734	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	604.664.734	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	1.032.236.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	997.236.000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Persen	100	517.943.954	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman	Persen	100	515.199.954	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	168.997.640	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	168.997.640	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	200.118.500	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	197.374.500	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	5000	148.827.814	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Banjar	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	5000	148.827.814	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	Persen	100	190.599.760		Kab. Banjar	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	Persen	100	169.419.970	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
											Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	1	190.599.760	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	1	169.419.970	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase luas lahan yang mendapatkan fasilitas prasarana pertanian	Persen	18,74	2.772.222.530	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian	Persen	5	2.927.202.530	
							Persentase luas perkebunan yang mendapatkan fasilitas prasarana perkebunan	Persen	100				Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen	1,5		
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta	Dokumen	1	259.399.900	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta	Dokumen	1	259.399.900	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Banjar	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	259.399.900	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Banjar	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	259.399.900	
3	27	3	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian yang handal dan mantap	Persen	1	2.356.747.630	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjar	Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian	Persen	100	2.511.727.630	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Banjar	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Banjar	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100.000.000	
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Banjar	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	501.910.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Banjar	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	488.320.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1.434.543.630	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	1.619.543.630	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	320.294.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	303.864.000	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	156.075.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	2	156.075.000	
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjar	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	84.675.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjar	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	84.675.000	
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	71.400.000	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	71.400.000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Banjar	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	Persen	77	1.518.953.999	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Banjar	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	Persen	77	1.518.946.459	
							Persentase jenis produk olahan yang dikembangkan	Persen	20				Persentase jenis produk olahan yang dikembangkan	Persen	20		
							Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar	Persen	0,31				Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar	Persen	0,31		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Persentase penurunan angka kematian ternak besar	Persen	0,31	274.997.890	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Persentase penurunan angka kematian ternak besar	Persen	0,31	274.997.890	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	274.997.890	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	274.997.890	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH	Ekor	1.800	359.849.239	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH	Ekor	1.500	359.849.239	
							Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU	Ekor	110.000				Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU	Ekor	105.000		
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan	Kab. Banjar	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan	Laporan	12	359.849.239	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan	Kab. Banjar	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan	Laporan	12	359.849.239	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
					Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah hewan yang ditangani	Ekor	1.500	517.190.500	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Jumlah hewan yang ditangani	Ekor	1.500	517.190.500	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Banjar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1.500	517.190.500	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Banjar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1.500	517.190.500	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Banjar	Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	77	312.916.850	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Banjar	Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	77	312.909.310	
							Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan	Kegiatan	5				Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan	Kegiatan	3		
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	187.917.200	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	198.292.900	
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Banjar	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	1	124.999.650	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Banjar	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	1	114.616.410	
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kab. Banjar	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	Persen	100	53.999.520	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kab. Banjar	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	Persen	100	53.999.520	
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Banjar	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	53.999.520	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Banjar	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	53.999.520	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	6,90	1.805.683.750	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Persen	4,80	1.805.683.750	
							Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	6,90				Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor perkebunan	Persen	6,40		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Presentase luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	75	1.805.683.750	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Presentase luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persen	75	1.805.683.750	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	750	396.448.750	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	750	396.448.750	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1200	181.784.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1200	181.784.000	
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Luasan Pencegahan, PenangananKebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	300	227.451.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Luasan Pencegahan, PenangananKebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	300	227.451.000	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan	1	1.000.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjar	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan	1	1.000.000.000	
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	Persen	5	318.213.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	14	297.532.000	
							Persentase usaha perkebunan yang tertib administrasi	Persen	100								
							Persentase usaha peternakan yang tertib administrasi	Persen	15								
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	Persen	1	170.448.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	9	156.124.000	
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan PublikPemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	38.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan PublikPemberian Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	17.126.000	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	6	10.053.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	6	10.053.000	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	7	122.395.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	7	128.945.000	
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Persentase usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang mendapat rekomendasi teknis untuk perizinan usaha	Persen	1	60.600.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Persentase Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Potong Hewan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	45	61.925.000	
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	90	60.600.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	90	61.925.000	
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Kab. Banjar	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat rekomendasi teknis untuk izin usaha	Persen	1	87.165.000	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Kab. Banjar	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Persen	74	79.483.000	
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	1	49.998.500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	1	46.360.500	
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	1	37.166.500	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kab. Banjar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	1	33.122.500	
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase kelompok tani yang mandiri	Persen	4,30	2.721.172.820	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Banjar	Persentase kelompok tani yang mandiri	Persen	5,80	2.901.306.932	
3	27	7	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya	Persen	60,20	2.721.172.820	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya	Persen	44,00	2.901.306.932	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	852.120.720	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	1.077.920.560	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	125	1.371.406.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	125	1.316.034.672	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PERUBAHAN						CATATAN PENTING
					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	12	497.646.100	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	12	507.351.700	
							Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat teknis	Orang	80				Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat teknis	Orang	80		

Adapun Rancangan akhir RKPD Perubahan Dinas Pertanian tahun 2024 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rancangan Akhir RKPD Perubahan Dinas Pertanian tahun 2024 Kabupaten Banjar

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			19.500.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu				100 %	100 %	25.103.807.774	30.947.870.801	30.957.046.801	5.853.239.027			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD, PNS, PPPK		48.055.886.378	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3267 Orang /bulan	3267 Orang /bulan	25.016.527.774	30.745.390.801	30.745.390.801	5.728.863.027	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			45.936.336.378	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.928.550.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	76.280.000	191.480.000	191.480.000	115.200.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada			50.000.000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
														dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			46.000.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.000.000	5.000.000	14.176.000	9.176.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			95.000.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu				100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		45.650.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			45.650.000	DINAS PERTANI AN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu				100 %	100 %	50.000.000	146.500.000	109.000.000	59.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		151.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000	146.500.000	109.000.000	59.000.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			151.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.348.101.200	1.653.386.195	2.013.033.715	664.932.515			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		1.802.550.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			76.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	55.216.500	254.929.500	464.577.020	409.360.520	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada			190.000.000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						NASIONAL	DAERAH		TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
														dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	54.687.700	54.687.700	54.687.700	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			138.000.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.197.000	15.197.000	15.197.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			30.550.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.190.000.000	1.295.571.995	1.445.571.995	255.571.995	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.368.000.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan				0 %	100 %	342.000.000	542.026.000	542.026.000	200.026.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		1.998.000.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	487.666.000	487.666.000	487.666.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			448.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	342.000.000	54.360.000	54.360.000	-287.640.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.550.00 0.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi				100 %	100 %	4.566.470.000	3.941.200.000	3.916.464.129	-650.005.871			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD, Tenaga Kontra k		5.323.00 0.000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	396.750.000	396.750.000	372.014.129	-24.735.871	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			456.200. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	4.169.720.000	3.544.450.000	3.544.450.000	-625.270.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada			4.866.80 0.000	DINAS PERTANI AN	

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			220.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan Persentase pertumbuhan populasi ternak besar Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas				0.05 % 0.6 % 1.00 %	0.1 % 1.75 % 3.5 %	1.384.585.018	2.345.444.448	2.286.520.658	901.935.640							3.632.300.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian				100 %	100 %	680.540.734	1.636.900.734	1.601.900.734	921.360.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Peternak, Matri Tani		1.700.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	149.664.734	604.664.734	604.664.734	455.000.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			550.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	530.876.000	1.032.236.000	997.236.000	466.360.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.150.000.000	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman				100 %	100 %	513.444.424	517.943.954	515.199.954	1.755.530			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Patern ak, Matri Tani		1.432.30 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	168.997.640	168.997.640	168.997.640	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	200.118.500	200.118.500	197.374.500	-2.744.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				5000 Varietas Unggul Baru (VUB)	5000 Varietas Unggul Baru (VUB)	144.328.284	148.827.814	148.827.814	4.499.530	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			532.300. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				100 %	100 %	190.599.860	190.599.760	169.419.970	-21.179.890			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada	Kelom pok Tani, Patern ak, Matri Tani		500.000. 000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Daerah Kabupaten/Kota													dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																			
		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	190.599.860	190.599.760	169.419.970	-21.179.890	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			500.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian				100 % 18,74 %	1.5 % 5 %	1.445.014.900	2.772.222.530	2.927.202.530	1.482.187.630							10.875.0 00.000		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta				1 Dokumen	1 Dokumen	259.399.900	259.399.900	259.399.900	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Matri Tani		800.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	259.399.900	259.399.900	259.399.900	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																			
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro			350.000. 000	DINAS PERTANI AN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian				1 %	100 %	1.019.540.000	2.356.747.630	2.511.727.630	1.492.187.630			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Matri Tani		9.500.00 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.000.00 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	1 Unit	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			2.400.00 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.000.00 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang				1 Unit	1 Unit	428.160.000	501.910.000	488.320.000	60.160.000	Kab. Banjar, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	1. Meningkatkan Pembangunan			2.000.00 0.000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara										Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	3 Unit	0	1.434.543.630	1.619.543.630	1.619.543.630	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			900.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.200.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	591.380.000	320.294.000	303.864.000	-287.516.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				2 Laporan	2 Laporan	166.075.000	156.075.000	156.075.000	-10.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan	Kelompok Tani, Peternak, Matri Tani		575.000.000	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	84.675.000	84.675.000	84.675.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			400.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	81.400.000	71.400.000	71.400.000	-10.000.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			175.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi				0.31 % 20.00 % 77.00 %	0.31 % 20.00 % 77.00 %	1.000.334.799	1.518.953.999	1.518.946.459	518.611.660							2.315.00 0.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Keschatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kematian ternak besar				0.31 %	0.31 %	274.997.890	274.997.890	274.997.890	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Petern ak		350.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	274.997.890	274.997.890	274.997.890	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan			350.000. 000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU				110000 Ekor 1800 Ekor	105000 Ekor 1500 Ekor	415.297.239	359.849.239	359.849.239	-55.448.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	UPTD RPH, RPU, Patern ak		950.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	415.297.239	359.849.239	359.849.239	-55.448.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			950.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang ditangani				1500 Ekor	1500 Ekor	136.040.500	517.190.500	517.190.500	381.150.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hewan		630.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1500 Laporan	1500 Laporan	136.040.500	517.190.500	517.190.500	381.150.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang			180.000. 000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												n, Semua Kel/ Desa	UMUM DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)				5 Kegiatan 77 %	3 Kegiatan 77 %	119.999.650	312.916.850	312.909.310	192.909.660			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengu saha Produ k Hasil Patern akan		260.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	187.917.200	198.292.900	143.292.900	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			135.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	64.999.650	124.999.650	114.616.410	49.616.760	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			125.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan				100 %	100 %	53.999.520	53.999.520	53.999.520	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Ternak dan Patern akan		125.000. 000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan	Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				1 Unit	1 Unit	53.999.520	53.999.520	53.999.520	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			125.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor tanaman pangan dan hortikultura				6.90 %	4.80 % 6.40 %	1.800.980.500	1.805.683.750	1.805.683.750	4.703.250							3.235.00 0.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulungan bencana pertanian				75 %	75 %	1.800.980.500	1.805.683.750	1.805.683.750	4.703.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Matri Tani		3.235.00 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				750 Ha	750 Ha	455.147.500	396.448.750	396.448.750	-58.698.750	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			800.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1200 Ha	1200 Ha	118.382.000	181.784.000	181.784.000	63.402.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan			375.000. 000	DINAS PERTANI AN

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	38.000.000	17.126.000	-26.874.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			141.900. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																			
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				6 Dokumen	6 Dokumen	59.043.000	10.053.000	10.053.000	-48.990.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			273.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				7 Laporan	7 Laporan	146.990.000	122.395.000	128.945.000	-18.045.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			550.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Potong Hewan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				1 %	45 %	60.600.000	60.600.000	61.925.000	1.325.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Petern ak, Matri Tani		200.000. 000	DINAS PERTANI AN	
3.27.06.2.02.0001	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat																			
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				90 Dokumen	90 Dokumen	60.600.000	60.600.000	61.925.000	1.325.000	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada			200.000. 000	DINAS PERTANI AN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan				1 %	74 %	87.165.000	87.165.000	79.483.000	-7.682.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengu saha pengec er obat hewan dan bahan pertani an lainny a		255.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	1 Laporan	49.998.500	49.998.500	46.360.500	-3.638.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			55.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	37.166.500	37.166.500	33.122.500	-4.044.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			200.000.000	DINAS PERTANI AN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri				4.30 %	5.80 %	2.359.103.300	2.721.172.820	2.901.306.932	542.203.632							3.480.280.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya				60.2 %	44.00 %	2.359.103.300	2.721.172.820	2.901.306.932	542.203.632			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelom pok Tani, Gapok tan, Petani, Penyul uh		3.480.280.000	DINAS PERTANI AN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN GUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	480.051.200	852.120.720	1.077.920.560	597.869.360	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			530.500. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				125 Unit	125 Unit	1.381.406.000	1.371.406.000	1.316.034.672	-65.371.328	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			2.199.78 0.000	DINAS PERTANI AN
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Penyuluhan Pertanian																	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				12 Unit	12 Unit	497.646.100	497.646.100	507.351.700	9.705.600	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			750.000. 000	DINAS PERTANI AN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas	Penyuluh pertanian																	
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			0	DINAS PERTANI AN
J U M L A H								40.806.745.491	49.999.883.371	50.710.202.802	9.903.457.311							84.263.3 66.378	

2.4. Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat melalui Musrenbang 2024 dilaksanakan dengan mekanisme RKPD online. Berbagai usulan masyarakat mulai dari tingkat desa diproses secara online dan diaring pada tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan tahapan penyelarasan tingkat kabupaten (Forum SKPD lingkup Dinas). Musrenbang Tahun 2024 terdapat perbaikan mekanisme, dimana pagu maksimal kecamatan pada setiap SKPD sudah ditentukan, sehingga pembahasan usulan akan lebih baik sesuai dengan usulan kecamatan dengan pagu yang umumnya sesuai dengan yang ditetapkan. Demikian pula dengan proses musrenbang, Kriteria Teknis dari SKPD sudah disosialisasikan pada awal proses Musrenbang, namun demikian masih banyak usulan masyarakat yang tidak mengacu pada kriteris teknis tersebut. Sehingga pada saat Musrenbang Kecamatan, dilakukan diskusi antara Tim Musrenbang Kabupaten (perwakilan SKPD) dengan delegasi desa agar sesuai dengan kriteria teknis. Penyelarasan akhir DSP Kecamatan dilakukan pada saat Forum SKPD dan pra Musrenbang. Selanjutnya usulan yang disetujui tersebut secara sistematis sudah merupakan bagian dari Renja SKPD hasil verifikasi yang merupakan hasil penggabungan kegiatan SKPD (*topdown*) dan usulan masyarakat hasil musrenbang (*bottom up*). Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 Kabupaten Banjar

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Aluh Aluh	Balimau	-	-	
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Aluh Aluh	Terapu	1,5 km	500.000.000	
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Aluh Aluh	Kuin Besar	-	-	
4	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Aluh Aluh	Handil Bujur	900 m	900.000.000	
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Aluh Aluh	Tanipah	3 bua	150.000.000	
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	-	-	
7	Pembangunan Lumbung Pangan	Aluh Aluh	Terapu	-	500.000.000	
8	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Aluh Aluh	Terapu	2000 ekor bibit ayam	100.000.000	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
9	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Kuin Besar	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
10	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Kuin Besar	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
11	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Kuin Besar	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
12	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Aluh Aluh	Kuin Besar	-	-	
13	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Aluh Aluh	Balimau	-	-	
14	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Handil Bujur	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
15	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Kuin Kecil	1.000 bibit jeruk	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
16	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Aluh Aluh	Podok	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
17	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Labat Muara	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
18	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi	Aluh Aluh	Podok	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan					
19	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Pulantan	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
20	Fasilitasi Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Bunipah	-	-	
21	Fasilitasi pemberian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang sudah memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil Muara	-	-	Sudah di akomodir di kegiatan reguler deengan penyusunan rdck
22	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil Muara	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
23	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	-	-	
24	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aluh Aluh	Sungai Musang	12 unit	190.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
25	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Kala'an	2 Km	250.000.000	
26	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Aranio	Kala'an	10 orang	15.000.000	
27	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Tiwingan	1 Km	300.000.000	
28	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aranio	Artain	5 ton	225.000.000	Sudah di akomodir di kegiatan reguler deengan penyusunan rdck
29	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi	Aranio	Belangian	1 buah traktor	85.000.000	Di tolak harus ber badan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan					
30	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aranio	Belangian	10 orang	15.000.000	Ajukan proposal, dgn ketentuan Poktan ybs harus SDH berbadan hukum
31	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aranio	Rantau Balai	2 buah traktor	240.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
32	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Aranio	Rantau Balai	20 orang	45.000.000	
33	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Aranio	Tiwingan Baru	1 paket	25.000.000	
34	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Bunglai	3 Km	300.000.000	
35	Pembangunan Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Aranio	Bunglai	1 paket	200.000.000	
36	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Aranio	Bunglai	2 unit	150.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
37	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Pa'au	3 Km	3.000.000.000	
38	Alat dan mesin pertanian pasca panen	Aranio	Pa'au	2 unit	400.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
39	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Aranio	Benua Riam	1 paket	50.000.000	Ajukan proposal, dgn ketentuan Poktan ybs harus SDH berbadan hukum
40	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Aranio	Artain	1 paket	100.000.000	
41	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Artain	6 Km	800.000.000	
42	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aranio	Aranio	500 M	500.000.000	
43	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Pingaran	10 unit mesin perontok	-	Di tolak harus ber badan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
44	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Astambul	Benua Anyar DS	1 Km	500.000.000	
45	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Astambul Seberang	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
46	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Astambul	Sungai Alat	100 m	50.000.000	
47	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Pematang Hambawang	5.000 bibit jeruk	5.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
48	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Astambul	Pematang Hambawang	3000 bibit itik petelur	30.000.000	
49	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Pematang Hambawang	10.000 bibit unggul	10.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
50	Rehabilitasi Jalan	Astambul	Kaliukan	2,5 Km	800.000.000	
51	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Astambul	Tambangan	200 orang	125.000.000	
52	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Pingaran Ulu	10 keltan	700.000.000	Sudah di akomodir di kegiatan reguler deengan penyusunan rdkk
53	Fasilitasi pemberian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang sudah memenuhi ketentuan	Astambul	Pingaran Ulu	10 keltan/ 10 paket	100.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
54	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Astambul	Pingaran Ulu	-	900.000.000	
55	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Pingaran Ulu	-	450.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
56	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Astambul	Pingaran Ulu	500 m	500.000.000	
57	Pembangunan Jembatan Baru	Astambul	Pingaran Ulu	2 Km	500.000.000	
58	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Astambul	Pingaran Ulu	1 Km	800.000.000	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
59	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Astambul	Astambul Kota	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
60	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Astambul	Pingaran Ulu	1 Km	800.000.000	
61	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Astambul	Astambul Kota	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
62	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Benua Anyar DS	-	100.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
63	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Haur Kuning	10 bibit	100.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
64	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Rumpiang	1 unit Mesin Combine	700.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
65	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Beruntung Baru	Haur Kuning	1 unit	500.000.000	
66	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Salat Makmur	2 unit Combine Havester Dc 70	1.000.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
67	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Beruntung Baru	Babirik	1 unit Mesin Combine	200.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
68	Fasilitasi Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Jambu Raya	20 orang	20.000.000	
69	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Beruntung Baru	Muara Halayung	1 unit	50.000.000	
70	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Beruntung Baru	Salat Makmur	8 Km	640.000.000	
71	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Beruntung Baru	Jambu Burung	3.000 Ekor bibit itik	300.000.000	
72	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Beruntung Baru	Muara Halayung	7 Km	200.000.000	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
73	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Salat Makmur	6 unit Hand Traktor R2	240.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
74	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Beruntung Baru	Haur Kuning	1 unit mesin penggiling padi	200.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
75	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Beruntung Baru	Haur Kuning	2 unit mesin penggiling padi	500.000.000	Di tolak harus ber badan hukum
76	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Beruntung Baru	Pindahan Baru	20 orang	40.000.000	
77	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1 unit gudang ALSINTAN	80.000.000	
78	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1 kali Pelatihan pengolahan pupuk kompos dan PGPR	31.000.000	
79	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	2 kali Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Kerbau	31.000.000	
80	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Cintapuri Darussalam	Simpang Lima	1 Km	200.000.000	
81	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Cintapuri Darussalam	Simpang Lima	2 Km	200.000.001	
82	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Cintapuri Darussalam	Surian Hanyar	1,2 Km	1.000.000.000	
83	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Cintapuri Darussalam	Sumber Sari	2 Km	200.000.000	
84	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Cintapuri Darussalam	Keramat Mina	1 Km	200.000.000	
85	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1 Paket (Proyektor, Laptop, Kamera Digital)	40.000.000	
86	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1 kali Pelatihan Pengolahan Tanaman Purun	31.000.000	
87	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	2 kali Pelatihan budidaya tanaman sawit	31.000.000	
88	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Gambut	Malintang Baru	-	-	
89	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi	Gambut	Tambak Sirang Laut	-	-	Di tolak harus ber badan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan					
90	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Gambut	Malintang Baru	-	-	
91	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Gambut	Malintang Baru	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
92	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Gambut	Tambak Sirang Laut	-	-	
93	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Gambut	Malintang	-	-	
94	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Gambut	Tambak Sirang Darat	-	-	
95	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Karang Intan	Lok Tangga	-	-	
96	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Karang Intan	Sungai Arfat	650 m	50.000.000	
97	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Karang Intan	Sungai Arfat	650 m	250.000.000	
98	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Karang Intan	Lok Tangga	-	-	
99	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisisda tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/ gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Balau	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
100	Pembangunan Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
101	Optimasi lahan	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
102	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
103	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
104	Pembangunan Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Karang Intan	Pasar Lama	-	-	
105	Renovasi Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Karang Intan	Mali-Mali	-	-	
106	Pembangunan Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Karang Intan	Mandi Kapau Barat	-	450.000.000	
107	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/ gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Pulau Nyiur	1 Unit Traktor	-	Di tolak harus ber badan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
108	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Sungai Arfat	-	50.000.000	Untuk usulan peremajaan karet, silakan ajukan proposal, apabila dana APBD kabupaten, Poktan ybs harus berbadan hukum, apabila dana provinsi dan atau APBN, cukup terdaftar d simluhtan dgn ketentuan harus tanam dgn pola supradin/ jarak tanam ganda
109	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Karang Intan	Karang Intan	-	-	
110	Penumbuhan, pembinaan, penyuluhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pangan lokal	Karang Intan	Jingah Habang Hulu	-	-	
111	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Balau	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
112	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
113	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	Diakomodir tahun 2024
114	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
115	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
116	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
117	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
118	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi	Karang Intan	Panyambaran	-	-	Di tolak harus ber badan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan					
119	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
120	melaksanakan Sekolah Lapang Hama dan Penyakit Tanaman	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
121	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
122	Renovasi Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Karang Intan	Panyambaran	-	-	
123	Fasilitasi Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
124	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Karang Intan	Pasar Lama	-	-	
125	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Karang Intan	Sungai Asam	-	-	
126	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Sungai Asam	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
127	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Sungai Asam	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
128	Sosialisasi dan fasilitasi Asuransi Usaha tanaman Padi (AUDP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Karang Intan	Sungai Asam	-	-	
129	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Karang Intan	Sungai Alang	-	-	
130	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Sungai Alang	10 ha bibit durian	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
131	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Karang Intan	Lihung	-	-	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
132	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Abirau	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
133	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Mandiingin Barat	500 pohon tanaman buah	25.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
134	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Karang Intan	Karang Intan	-	-	
135	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Balau	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
136	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Karang Intan	Padang Panjang	-	150.000.000	
137	Jembatan penghubung antar jalan kebun	Karang Intan	Padang Panjang	-	100.000.000	
138	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Karang Intan	Padang Panjang	-	200.000.000	
139	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Karang Intan	Padang Panjang	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
140	Pengadaan kandang ternak sapi, kambing, ayam , itik	Karang Intan	Padang Panjang	-	150.000.000	
141	Pengadaan ternak sapi, kambing, ayam , itik	Karang Intan	Padang Panjang	-	150.000.000	
142	Fasilitasi Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Laboratorium Terakreditasi	Karang Intan	Padang Panjang	-	-	
143	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
144	Sosialisasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT - PDUK)	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
145	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Karang Intan	Pandak Daun	-	-	
146	Pelatihan budidaya tanaman pangan,	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	hortikultura dan perkebunan					
147	Fasilitasi pemberian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang sudah memenuhi ketentuan	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	Sudah di akomodir di kegiatan reguler deengan penyusunan rdkk
148	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
149	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
150	Penyampaian informasi berbasis digital/ elektronik untuk peringatan dini atas perubahan iklim	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	
151	Sosialisasi dan fasilitasi Asuransi Usaha tanaman Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	
152	Fasilitasi Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	
153	Pelayanan Kesehatan Hewan Klinik Keliling Lakiku Bungas	Kertak Hanyar	Manarap Baru	-	-	
154	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Martapura	Bincau Muara	-	-	
155	Bimtek olahan pangan berbasis pangan lokal	Martapura	Keraton	-	-	
156	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Martapura	Pasayangan Barat	500 m	500.000.000	
157	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura	Tunggul Irang Ulu	-	-	
158	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura	Tungkaran	-	-	
159	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura	Tungkaran	-	-	
160	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura	Bincau	-	-	
161	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura Barat	Sei Ranggas Hambuku	-	-	
162	Jembatan penghubung antar jalan kebun	Martapura Barat	Panggalaman	-	-	
163	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Martapura Barat	Panggalaman	-	-	
164	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura Barat	Sei Ranggas Ulu	-	-	
165	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura Barat	Sei Ranggas	-	-	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
166	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Martapura Barat	Tangkas	-	-	
167	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura Barat	Tangkas	-	-	
168	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura Barat	Tangkas	-	-	
169	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Martapura Barat	Sei Ranggas Tengah	-	-	
170	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura Barat	Tangkas	-	-	
171	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura Timur	Keramat	600 m	1.700.000.000	
172	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Martapura Timur	Tambak Anyar	1 Paket		
173	Renovasi Irigasi Pertanian berupa irigasi sumur dalam atau sumur dangkal atau irigasi perpompaan	Martapura Timur	Melayu Tengah	-	-	
174	Renovasi Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan	Martapura Timur	Melayu Tengah	-	200.000.000	
175	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura Timur	Akar Begantung Ulu	P 385 M L 250 M	500.000.000	
176	Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Martapura Timur	Akar Begantung Ulu	1 Kegiatan	5.000.000	
177	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura Timur	Tambak Anyar Ilir	-	-	
178	Rehabilitasi Jembatan	Mataraman	Tanah Abang	-	-	
179	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Pengarom	Lumpangi	1 Km	375.000.000	
180	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Antaraku	20 ekor bibit sapi	300.000.000	
181	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Penyiuran	20 ekor bibit sapi	100.000.000	
182	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Penyiuran	5000 Ekor bibit ternak puyuh + Kandang	70.000.000	
183	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Penyiuran	5000 Ekor bibit ternak itik + Kandang	70.000.000	
184	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Pengarom	Benteng	1 Paket Pelatihan dan Pengadaan alat Hidroponik dan aquaponik	50.000.000	
185	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Pengarom	Benteng	1 Paket Budi daya Jamur Merang	10.000.000	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
186	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Pengarom	Penyiuran	1 Paket bibit kopi	300.000.000	Ajukan proposal dgn ketentuan Poktan ybs hrs berbadan hukum (dana APBD kabupaten), yg bersumber dana APBD provinsi dan atau APBN harus terdaftar di simluhtan
187	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Lok Tunggul	200 ekor bibit ayam bangkok	6.000.000	
188	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Pengarom	Lobang Baru	5.500 kg Benih Padi (OVOP)	66.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
189	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Pengarom	Lobang Baru	5.000 batang Bibit Durian (OVOP)	150.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
190	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Pengarom	Lobang Baru	2 unit Mesin Tanam Padi	140.000.000	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
191	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Pengarom	Lobang Baru	300 batang Bibit Karet Okuasi Payung 2	99.000.000	Silakan ajukan proposal dgn ketentuan Poktan ybs hrs berbadan hukum (apbd kabupaten), utk sumber dana APBD provinsi dan atau APBN cukup terdaftar di simluhtan dgn ketentuan jarak tanam wajib pola supradin/ jarak tanam ganda
192	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Pengarom	Mangkauk	5000 kopi dan 5000 pisang	200.000.000	Silakan ajukan proposal dgn ketentuan Poktan ybs hrs berbadan hukum (apbd kabupaten), utk sumber dana APBD provinsi dan atau APBN cukup terdaftar di simluhtan
193	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Pengarom	Mangkauk	5.000 ekor bibit itik	250.000.000	
194	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi	Pengarom	Kertak Empat	40000 bibit kopi	600.000.000	Silakan ajukan proposal dgn ketentuan Poktan ybs hrs berbadan hukum (apbd kabupaten), utk sumber dana APBD provinsi dan atau APBN cukup

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan					terdaftar di simluhtan
195	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sambung Makmur	Batu Tanam	-	-	
196	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sambung Makmur	Batu Tanam	-	-	
197	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sambung Makmur	Pasar Baru	-	-	
198	Bantuan Sarana Pencegahan dan pengendalian kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, Selang, Sprayer pemadam, Tabung Pemadam api dan peralatan lainnya)	Sambung Makmur	Pasar Baru	-	-	
199	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Sambung Makmur	Pasar Baru	-	-	Di tolak usulan tidak sinkron
200	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan	Sambung Makmur	Pasar Baru	-	-	
201	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	
202	melaksanakan Sekolah Lapang Hama dan Penyakit Tanaman	Sambung Makmur	Batang Banyu	-	-	
203	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Sambung Makmur	Batang Banyu	-	-	
204	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sambung Makmur	Baliangin	-	-	
205	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
206	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sambung Makmur	Batang Banyu	-	-	
207	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Sambung Makmur	Batang Banyu	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
208	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
209	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sambung Makmur	Batang Banyu	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
210	Penyediaan Sarana produksi (Paket : benih, pupuk organik, obat-obatan, mulsa) Tanaman Pangan	Sambung Makmur	Batu Tanam	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
211	Bimbingan teknis perkebunan dan peternakan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
212	Jalan Usaha Tani (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Sambung Makmur	Batu Tanam	-	-	
213	melaksanakan Sekolah Lapang Hama dan Penyakit Tanaman	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	
214	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Sambung Makmur	Madurejo	-	-	
215	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Sambung Makmur	Baliangin	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
216	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Sambung Makmur	Baliangin	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
217	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
218	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	
219	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
220	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	
221	Fasilitasi Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sambung Makmur	Baliangin	-	-	
222	Jalan kebun (maksimal 1 km dan tidak aspal)	Sambung Makmur	Batu Tanam	-	-	
223	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Sambung Makmur	Gunung Batu	-	-	
224	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
225	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sambung Makmur	Sungai Lurus	-	-	
226	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Simpang Empat	Sungai Baru	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
227	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Simpang Empat	Paring Tali	-	-	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
228	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Simpang Empat	Sungai Tabuk	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
229	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Simpang Empat	Simpang Empat	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
230	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Simpang Empat	Paring Tali	-	-	
231	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Simpang Empat	Sungai Langsat	-	-	
232	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Simpang Empat	Cabi	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
233	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Simpang Empat	Sungai Langsat	-	-	
234	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Sungai Pinang	Sungai Pinang	-	-	
235	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	
236	Rehabilitasi Jembatan	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	
237	Rehabilitasi Jembatan	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	
238	Sosialisasi dan fasilitasi Asuransi Usaha tanaman Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Sungai Pinang	Sumber Baru	-	-	
239	Pembangunan Dam Parit skala kecil	Sungai Pinang	Rantau Bakula	-	-	
240	Rehabilitasi Jembatan	Sungai Pinang	Sungai Pinang	-	-	
241	Penguatan Kelembagaan Petani di Kecamatan / Desa melalui revitalisasi Kelompok Tani	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	
242	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	Sudah di akomodir di kegiatan reguler deengan penyusunan rdck

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
243	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Sungai Pinang	Kupang Rejo	-	-	
244	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Pinang	Belimbing Baru	-	-	
245	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Sungai Pinang	Kahelaan	-	-	
246	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Sungai Pinang	Sumber Baru	-	-	
247	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Pinang	Sumber Baru	-	-	Di tolak di usulkan melalui dana apbn dan apbd prov
248	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Sungai Tabuk	Sungai Lulut	-	-	
249	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Lok Baintan	-	-	Di tolak harus ber badan hukum
250	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Lok Buntar	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
251	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal ! Apabila belum berbadan hukum, maka akan diteruskan melalui usulan dana APBN/APBD 1 Prov. Akan dilakukan CPCL lebih lanjut koordinasi dengan BPP setempat

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
252	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal ! Apabila belum berbadan hukum, maka akan diteruskan melalui usulan dana APBN/APBD 1 Prov. Akan dilakukan CPCL lebih lanjut koordinasikan dengan BPP setempat
253	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Lok Buntar	-	-	Di tolak harus ber badan hukum di usulkan ke prov dan apbn
254	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Sungai Bangkal	-	-	
255	Pelatihan komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Sungai Tabuk	Pejambuan	-	-	
256	Fasilitasi pemberian Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan berupa obat-obatan bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Pembantanan	-	-	
257	Sosialisasi dan fasilitasi Asuransi Usaha tanaman Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)	Tatah Makmur	Pemangkih Baru	-	-	
258	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Telaga Bauntung	Rantau Bujur	-	515.000.000	
259	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Telaga Bauntung	Rampah	30 ekor bibit kambing	135.000.000	
260	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Telaga Bauntung	Telaga Baru	-	-	
261	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas,	Telaga Bauntung	Telaga Baru	-	-	

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)					

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas, yang kemudian menjadi masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pokok-pokok pikiran tahun 2024 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pokok-pokok pikiran tahun 2024 Kabupaten Banjar

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
1	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
2	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi		Belayung Baru	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
3	Sarana Produksi peternakan (Bibit ternak besar atau kecil/unggas, Hijauan Pakan ternak, Inseminasi Buatan/IB)	Beruntung Baru		-	-	
4	Fasilitasi pemberian pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang sudah memenuhi ketentuan	Beruntung Baru		-	-	Sudah di Fasilitasi pada tahun berjalan dengan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Pinang	Sungai Pinang Lama	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Aluh-Aluh	Bunipah	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
7	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Martapura	Cindai Alus	-	-	Sudah di Fasilitasi pada tahun berjalan dengan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
8	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Martapura	Bincau	250 meter	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Lok Baintan	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Lok Baintan	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
11	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Sungai Tabuk	Lok Buntar	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
12	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Lok Baintan Dalam	-	-	Di tolak, poktan harus berbadan hukum, akan di usulkan dana melalui APBD prov dan APBN
13	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan	Sungai Tabuk	Lok Baintan	-	-	Di tolak, poktan harus berbadan hukum, akan di usulkan dana melalui APBD prov dan APBN

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
	yang memenuhi ketentuan					
14	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Sungai Tandipah	-	-	Di tolak, poktan harus berbadan hukum, akan di usulkan dana melalui APBD prov dan APBN
15	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Sungai Tabuk	Sungai Tandipah	-	-	Sudah di Fasilitasi pada tahun berjalan dengan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
16	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Martapura	Sungai Paring	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
17	Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan	Martapura Barat	Sungai Batang	90 meter	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum
18	Fasilitasi pemberian Alat dan Mesin Pertanian (komoditas Peternakan) bagi kelompok yang memenuhi persyaratan	Mataraman	Takuti	-	-	Di tolak, poktan harus berbadan hukum, akan di usulkan dana melalui APBD prov dan APBN
19	Fasilitasi pemberian bantuan Alat dan mesin pertanian (komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) pra dan pasca panen bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Tambak Danau	-	-	Di tolak, poktan harus berbadan hukum, akan di usulkan dana melalui APBD prov dan APBN
20	Fasilitasi pemberian bantuan Sarana produksi Benih/bibit, pupuk kimia dan pupuk organik/hayati, herbisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) bagi poktan/gapoktan yang memenuhi ketentuan	Astambul	Tambak Danau	-	-	Sudah di Fasilitasi pada tahun berjalan dengan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi

No.	Program/ kegiatan	Lokasi		Besar/ volume	Anggaran (Rp)	Catatan
		Kecamatan	Desa			
21	Renovasi Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	Mataraman	Takuti	-	-	Panjang minimal 500 m dan pagu dana menyesuaikan. Lebar jalan untuk JUT adalah maks 2,5 m dan JP adalah 3 m. Kondisi eksisting apakah sudah ada badan jalan. Silakan diurutkan skala prioritas prasarana dan ajukan proposal. Apabila belum berbadan hukum

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan maksud tujuan dan sasaran dari rencana strategis pembangunan perlu didukung dengan rencana yang matang efektif efisien berdaya guna dan berhasil guna serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus merencanakan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Rencana Strategis K/L dalam hal ini Kementerian Pertanian 2015 - 2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Pada RenstraKementerian Pertanian Tahun 2020-2024 di sebutkan bahwa agenda prioritas Kabinet Kerja "**NAWACITA**" mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, diantaranya: mencukupi kebutuhan pangandari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan visi dan misi Presiden dan wakil presiden 2020-2024 yang harusdiacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang disebut Nawacita kedua.

Untuk mendukung visi presiden dan wakil presiden serta arahan presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020-2024, yakni:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam menerapkan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kementerian pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan

petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah serta daya saing pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian adalah:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Strategis Kementerian Pertanian adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertaniannasional
8. Terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka

Kementerian Pertanian menetapkan lima arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima

Strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
 - b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
 - c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
2. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
 - a. Peningkatan nilai tambah
 - b. Peningkatan daya saing
3. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
 - a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
 - b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida
 - d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
4. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian
 - a. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
 - b. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian
 - c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi

- d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
 - e. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi
 - f. Penguatan kelembagaan petani
5. Strategi dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- a. Penguatan implementasi manajemen ASN
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
 - d. Transformasi pelayanan publik

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya produk hasil perkebunan yang berkualitas dengan indikator meningkatnya produksi karet yang berkualitas sebesar 10,83% dan penambahan UPPB sebanyak 17 UPPB.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan indikator Prosentase penurunan konflik dan gangguan usaha perkebunan sebesar 16,67%.
3. Meningkatkan produksi produktifitas tanaman perkebunan dengan indikator Prosentase peningkatan produktifitas Tanaman Perkebunan sebesar 7,2% dan Prosentase peningkatan produksi Tanaman Perkebunan sebesar 3,76%.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Perkebunan dengan indikator Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sebesar 13,07%.
5. Meningkatkan perlindungan tanaman perkebunan dengan indikator Prosentase kenaikan kelas kelompok tani utama 12,7% dan Prosentase penurunan gangguan OPT sebesar 3%.
6. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dengan indikator Prosentase peningkatan produksi Daging sebesar 5%, Telur sebesar 7%, susu sebesar 5% dan Prosentase peningkatan skala usaha ternak sebesar 16,67%.
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumberdaya peternakan dengan indikator Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumberdaya peternakan sebesar 3,85%.
8. Meningkatkan mutu produk unggulan peternakan dengan indikator Prosentase peningkatan nilai tambah hasil ternak sebesar 68% dan Prosentase produksi ternak yang dipasarkan keluar daerah sebesar

9,99%.

9. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan lembaga pemasaran serta promosi produk peternakan dengan indikator Prosentase peningkatan revitalisasi lembaga pemasaran ternak sebesar 34%.
10. Meningkatkan kesehatan hewan dan penyediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan indikator Prosentase penurunan angka kematian ternak sapi, sapi perah, kerbau dan kambing sebesar 3%, Ayam buras dan itik sebesar 4% dan Ayam ras pedaging dan petelur sebesar 3% dan Prosentase unit usaha yang bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) sebesar 13,7%.

Melihat target kinerja dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keselarasan dengan sasaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, sehingga program kegiatan yang ada di provinsi sangat mendukung kegiatan yang ada di Kabupaten Banjar.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa Visi Pembangunan Daerah untuk lima tahun kedepan adalah: **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Makmur Sejahtera: Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman Sentosa
2. Berkelanjutan: Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
3. Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara: Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021-2026 yang termuat dalam RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021- 2026, serta mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, maka pembangunan pertanian guna mewujudkan Misi Kedua yaitu **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata**.

Pembangunan Pertanian Kalimantan Selatan masih menghadapi permasalahan mendasar terkait Isu Pangan Menuju Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan Perubahan Iklim, yaitu:

1. Belum optimalnya tingkat produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Pengembangan dan Penyediaan benih Padi Lokal bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi Padi Lokal
3. Alih Fungsi Lahan terutama dari tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor lain seperti perkebunan, 57 perikanan dan ke non pertanian seperti perumahan, jalan, industri dan jasa cukup besar
4. Dampak Perubahan Iklim
5. Perbedaan Luas Baku Lahan Pertanian yang diterapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Negara (BPN) dengan data yang tersedia di Kementerian Pertanian RI
6. Masih lemahnya kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura

Tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tertuang pada Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Utama
2. Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Utama
3. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
4. Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura

Sasaran Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah:

1. Tersedianya Produksi Tanaman Pangan Utama
2. Tersedianya Produksi Tanaman Hortikultura Utama

3. Terwujudnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan

4. Terwujudnya Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura

Strategi Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian;
2. Peningkatan produksi komoditas strategis tanaman pangan;
3. Peningkatan produksi komoditas strategis tanaman hortikultura;
4. Pengembangan dan Penyediaan Benih Padi Lokal;
5. Peningkatan luas tambah tanam melalui pengembangan mekanisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air;
6. Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui perluasan areal tanam dan pengamanan produksi;
7. Peningkatan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat;
8. Pengembangan dan pembentukan Korporasi Petani;
9. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian;
10. Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat 61;
11. Perbanyak benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat;
12. Updating luas baku lahan sawah;
13. Optimalisasi Penyusunan Perda LP2B di Kabupaten/Kota beserta Data Spasialnya;
14. Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
15. Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
16. Pengendalian dan Pencegahan Dampak Perubahan Iklim.

Kebijakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui:

1. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian;
2. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengembangan Benih Padi Lokal yang Bersertifikat;
4. Penambahan Luas Tanam Tanaman Pangan;
5. Pengembangan Kawasan Kluster Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya Komoditas Lokal dan Eksotik dalam upaya pencegahan kepunahan komoditas Asli Banua/Lokal;
6. Peningkatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;

7. Penerapan Regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. Penyebaran benih unggul bermutu tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat;
9. Perlindungan dan pengamanan pertanaman dan produksi tanaman pangan dan hortikultura dari organisme pengganggu tanaman (OPT);
10. Penanggulangan Bencana Pertanian;
11. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
12. Meningkatkan ketersediaan pupuk 62;
13. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian yang mandiri;
14. Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian yang profesional dan berkompeten;
15. Menyiapkan dukungan Infrastruktur dan Prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
16. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai promosi produk hasil tanaman pangan dan hortikultura.

3.2 Telaahan terhadap Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten yang luas dan berpenduduk besar. Disamping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
 Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
 Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Sehingga sangat strategis untuk pengembangan dan pemasaran komoditas pertanian. Untuk pengembangan pertanian tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga tidak bisa terlepas dari visi Kabupaten Banjar untuk Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun

2021-2041. Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumberdaya alam guna mendukung daerah sebagai pusat pertumbuhan provinsi yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang yang terkait sektor pertanian adalah:

1. Perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dengan strategi:
 - a. Mengamankan kawasan pertanian pangan yang produktif dan cadangan kawasan pertanian;
 - b. Mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi daerah terbangun; dan
 - c. Memberikan intensif kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana yang mendukung pertanian.
2. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian, dengan strategi:
 - a. Mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya;
 - b. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi bermitra usaha dalam kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif dan terbuka;
 - c. Membangun industri pengolah hasil budi daya pertanian;
 - d. Perkebunan, hortikultura yang diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. Mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan agar tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh terputus; dan
 - f. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan.

Kawasan pertanian yang terdapat dalam rencana pola ruang wilayah terdiri dari:

1. Kawasan tanaman pangan (P-1)

Kawasan tanaman pangan (P-1) selanjutnya disebut sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 42.006 Ha, terdapat di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur.

2. Kawasan hortikultura (P-2)

Kawasan hortikultura (P-2) seluas kurang lebih 2.236 Ha, terdapat di Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan sungai Tabuk

3. Kawasan perkebunan (P-3)

Kawasan Perkebunan (P-3) seluas kurang lebih 110.954 Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Astambul, Kecamatan beruntung Baru, kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura barat, Kecamatan Mataraman Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Telaga Bauntung.

Kawasan perlindungan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (pengembangan padi, hortikultura dan tanaman pangan termasuk kedalam kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertah Hanyar, Beruntung Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang empat, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Pengaron.

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada peningkatan konsumsi pangan dan pertumbuhan pemukiman. Pesatnya

pertumbuhan pemukiman terutama di wilayah sekitar perkotaan berdampak terhadap berkurangnya lahan-lahan produktif, sehingga alih fungsi lahan juga cukup pesat. Alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain juga menimbulkan tantangan atau ancaman dimasa akan datang. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Banjar seluas 15.828 Ha serta lahan cadangan pangan dimaksudkan agar alih fungsi bisa dikendalikan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana atau program.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis antara lain adanya pengaruh lingkungan akibat pengelolaan lahan yang berlebihan, penggunaan pestisida, pupuk kimia dan pencemaran akibat hasil pengolahan limbah perkebunan dan peternakan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak pencemaran terutama limbah dari kegiatan pemotongan ternak di RPH antara lain dengan pembangunan IPAL.

Selain itu juga upaya penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan dan tanaman adalah penggunaan pupuk maupun pestisida hayati yang ramah lingkungan sehingga selain dapat

memperbaiki struktur tanah juga mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

3.3 Telaahan terhadap Arah Kebijakan Kabupaten Banjar Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal.
 - Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal.
 - Pertumbuhan investasi yang belum optimal.
 - Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan.
 - Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang tersedia.
 - Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas.
 - Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global.
 - Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global.
 - Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi.
 - Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.
- b. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal.
 - Cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih rendah.

- Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan angka RLS masih belum optimal.
 - Kecenderungan terjadinya risiko Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) yang masih cukup tinggi.
 - Kecenderungan terjadinya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta prevalensi stunting yang masih cukup tinggi
 - Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak masih belum terselenggara secara optimal.
- c. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara optimal.
- Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.
 - Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.
 - Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
 - Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistic dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/ komunitas.
 - Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.
 - Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal.
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang melayani, baik secara digital maupun non digital belum optimal dilaksanakan.
 - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara intensifikasi maupun diversifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

- Penyelenggaraan informasi dan statistik melalui manajemen satu data belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - Penyelenggaraan pemerintahan, berbasis kinerja dan manajemen resiko yang belum terinternalisasi secara optimal.
 - Peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa masih perlu dioptimalkan dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target indikator, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang menjadi lokus kegiatan.
- e. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan.
- Penguatan karakter religius masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan event keagamaan dan event budaya.
 - Kesadaran demokratis masyarakat yang masih rendah, khususnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 - Kecenderungan meningkatnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari angka kriminalitas yang cukup tinggi.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

a. PRIORITAS 1

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sub prioritas:

- a. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
- b. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional.
- c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital.
- d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.

- e. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
- f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal.
- g. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal.
- h. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

b. PRIORITAS 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
- 3) Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak.
- 4) Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- 5) Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan.
- 6) Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau.
- 7) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

b. PRIORITAS 3

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.
- 5) Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

c. PRIORITAS 4

Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.
- 3) Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.
- 4) Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK.
- 5) Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif.
- 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

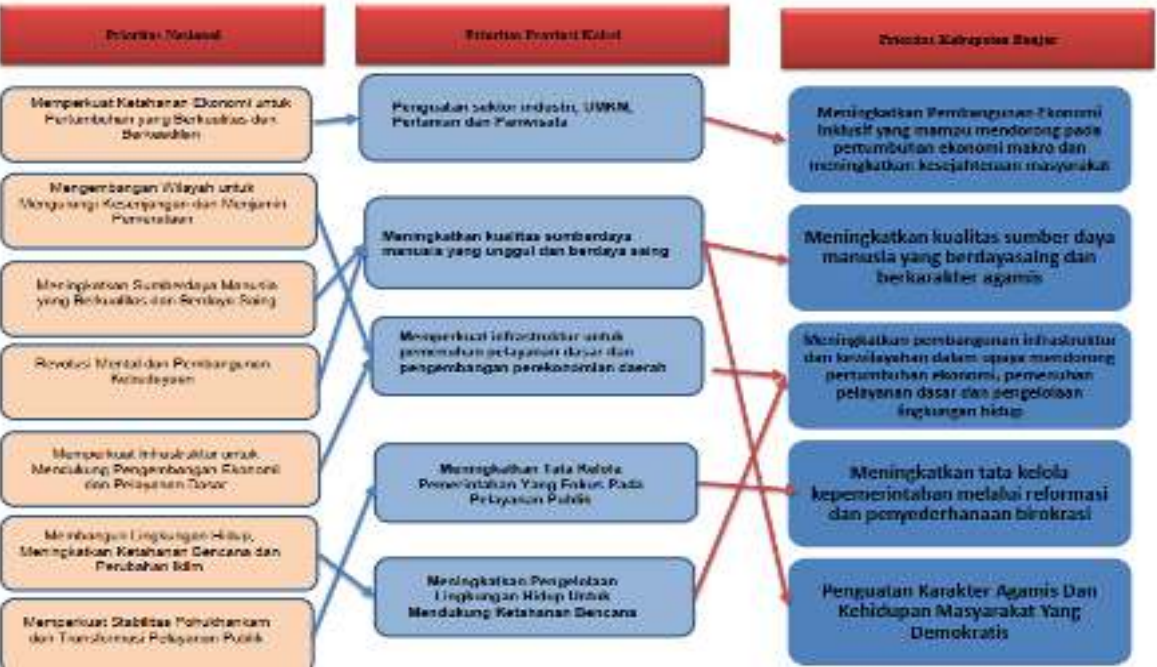
d. PRIORITAS 5

Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis.
- 2) Pembentukan pemuda berkarakter.
- 3) Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

5) Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah (Kabupaten Banjar) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah (Kabupaten Banjar)

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan	Meningkatnya Keunggulan Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Pertanian

Adapun target kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2. Target kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,75

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kabupaten Banjar, provinsi maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan SKPD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawankaryawati Dinas Pertanian Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2024 melaksanakan 7 program, 24 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistrik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman.

- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; dan
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - 4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian; dan
 - 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.

7. Program Penyuluhan Pertanian

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; dan
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Adapun rumusan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	DINAS PERTANIAN							40.806.74 5.491	49.999.8 83.371	50.710.2 02.802	9.903.45 7.311							84.263.36 6.378	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							40.806.74 5.491	49.999.8 83.371	50.710.2 02.802	9.903.45 7.311							84.263.36 6.378	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							40.806.74 5.491	49.999.8 83.371	50.710.2 02.802	9.903.45 7.311							84.263.36 6.378	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				76 %	76 %	32.418.92 8.974	38.518.1 92.824	38.973.0 10.473	6.554.08 1.499							59.305.88 6.378	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu				100 %	100 %	60.000.00 0	60.000.0 00	60.000.0 00	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		295.300.00 0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	29.000.00 0	29.000.0 00	29.000.0 00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			144.250.00 0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25.000.00 0	25.000.0 00	25.000.0 00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			131.550.00 0	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.27.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	6.000.000	6.000.00 0	6.000.00 0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			19.500.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu				100 %	100 %	25.103.80 7.774	30.947.8 70.801	30.957.0 46.801	5.853.23 9.027			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD, PNS, PPPK		48.055.886 .378	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3267 Orang /bulan	3267 Orang /bulan	25.016.52 7.774	30.745.3 90.801	30.745.3 90.801	5.728.86 3.027	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			45.936.336 .378	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.928.550. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	76.280.00 0	191.480. 000	191.480. 000	115.200. 000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			50.000.000	DINAS PERTANIAN	

[illegible]

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.197.00 0	15.197.0 00	15.197.0 00	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			30.550.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.190.000. 000	1.295.57 1.995	1.445.57 1.995	255.571. 995	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.368.000. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan				0 %	100 %	342.000.0 00	542.026. 000	542.026. 000	200.026. 000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	SKPD		1.998.000. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	487.666. 000	487.666. 000	487.666. 000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			448.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	342.000.0 00	54.360.0 00	54.360.0 00	- 287.640. 000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.550.000. 000	DINAS PERTANIAN	

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	118.000.0 00	139.300. 000	98.850.0 00	- 19.150.0 00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			200.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	230.000.0 00	487.739. 828	676.419. 828	446.419. 828	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			529.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			220.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan Persentase pertumbuhan populasi ternak besar Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas				0.05 % 0.6 % 1.00 %	0.1 % 1.75 % 3.5 %	1.384.585. 018	2.345.44 4.448	2.286.52 0.658	901.935. 640							3.632.300. 000		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian				100 %	100 %	680.540.7 34	1.636.90 0.734	1.601.90 0.734	921.360. 000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Peternak, Matri Tani		1.700.000. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.01.000 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,				1 Laporan	1 Laporan	149.664.7 34	604.664. 734	604.664. 734	455.000. 000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu			550.000.00 0	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Teknologi dan Spesifik Lokasi										Semua Kel/ Desa	UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	530.876.000	1.032.236.000	997.236.000	466.360.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.150.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman				100 %	100 %	513.444.424	517.943.954	515.199.954	1.755.530			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Peternak, Matri Tani		1.432.300.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																			
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	168.997.640	168.997.640	168.997.640	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	200.118.500	200.118.500	197.374.500	- 2.744.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																			
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				5000 Varietas Unggul Baru (VUB)	5000 Varietas Unggul	144.328.284	148.827.814	148.827.814	4.499.530	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu			532.300.000	DINAS PERTANIAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	84.675.000	84.675.000	84.675.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			400.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																			
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	81.400.000	71.400.000	71.400.000	- 10.000.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			175.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi				0.31 % 20.00 % 77.00 %	0.31 % 20.00 % 77.00 %	1.000.334.799	1.518.953.999	1.518.946.459	518.611.660							2.315.000.000		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kematian ternak besar				0.31 %	0.31 %	274.997.890	274.997.890	274.997.890	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peternak		350.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	274.997.890	274.997.890	274.997.890	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			350.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU				110000 Ekor 1800 Ekor	105000 Ekor 1500 Ekor	415.297.239	359.849.239	359.849.239	- 55.448.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro	UPTD RPH, RPU, Peternak		950.000.000	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024								NASIONAL	DAERAH	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
														dan Berkeadilan	dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	415.297.239	359.849.239	359.849.239	- 55.448.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			950.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang ditangani				1500 Ekor	1500 Ekor	136.040.500	517.190.500	517.190.500	381.150.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hewan		630.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																			
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			450.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1500 Laporan	1500 Laporan	136.040.500	517.190.500	517.190.500	381.150.000	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			180.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)				5 Kegiatan 77 %	3 Kegiatan 77 %	119.999.650	312.916.850	312.909.310	192.909.660			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan	Pengusaha Produk Hasil Peternakan		260.000.000	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
															kesejahteraan masyarakat					
3.27.04.2.04.000 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.00 0	187.917. 200	198.292. 900	143.292. 900	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			135.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.04.001 0	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																			
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	64.999.65 0	124.999. 650	114.616. 410	49.616.7 60	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			125.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan Hewan				100 %	100 %	53.999.52 0	53.999.5 20	53.999.5 20	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Ternak dan Peternakan		125.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.04.2.05.000 3	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																			
		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	1 Unit	53.999.52 0	53.999.5 20	53.999.5 20	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			125.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor tanaman pangan dan hortikultura				6.90 %	4.80 % 6.40 %	1.800.980 .500	1.805.68 3.750	1.805.68 3.750	4.703.25 0							3.235.000. 000		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				75 %	75 %	1.800.980. 500	1.805.68 3.750	1.805.68 3.750	4.703.25 0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Matri Tani		3.235.000. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01.000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				750 Ha	750 Ha	455.147.5 00	396.448. 750	396.448. 750	- 58.698.7 50	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			800.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01.000 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1200 Ha	1200 Ha	118.382.0 00	181.784. 000	181.784. 000	63.402.0 00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			375.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01.000 3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				300 Ha	300 Ha	227.451.0 00	227.451. 000	227.451. 000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			785.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.05.2.01.000 4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																			
		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				0 laporan	0 laporan	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			25.000.000	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.27.05.2.01.000 6	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																			
		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000. 000	1.000.00 0.000	1.000.00 0.000	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			1.250.000. 000	DINAS PERTANIAN	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				100 % 15 % 5 %	14 %	397.798.0 00	318.213. 000	297.532. 000	- 100.266. 000							1.419.900. 000		
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				1 %	9 %	250.033.0 00	170.448. 000	156.124. 000	- 93.909.0 00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Peternak, Matri Tani		964.900.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.01.000 1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																			
		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.00 0	38.000.0 00	17.126.0 00	- 26.874.0 00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			141.900.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.01.000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																			
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				6 Dokumen	6 Dokumen	59.043.00 0	10.053.0 00	10.053.0 00	- 48.990.0 00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			273.000.00 0	DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.01.000 5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				7 Laporan	7 Laporan	146.990.0 00	122.395. 000	128.945. 000	- 18.045.0 00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro			550.000.00 0	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														dan Berkeadilan	dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Potong Hewan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				1 %	45 %	60.600.00 0	60.600.0 00	61.925.0 00	1.325.00 0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Paternak, Matri Tani		200.000.00 0	DINAS PERTANIAN
3.27.06.2.02.000 1	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat																		
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				90 Dokumen	90 Dokumen	60.600.00 0	60.600.0 00	61.925.0 00	1.325.00 0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			200.000.00 0	DINAS PERTANIAN
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan				1 %	74 %	87.165.00 0	87.165.0 00	79.483.0 00	- 7.682.00 0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengusaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya		255.000.00 0	DINAS PERTANIAN
3.27.06.2.03.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	1 Laporan	49.998.50 0	49.998.5 00	46.360.5 00	- 3.638.00 0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			55.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.06.2.03.000 2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	37.166.50 0	37.166.5 00	33.122.5 00	- 4.044.00 0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan			200.000.00 0	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
															kesejahteraan masyarakat					
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri				4.30 %	5.80 %	2.359.103.300	2.721.172.820	2.901.306.932	542.203.632							3.480.280.000		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya				60.2 %	44.00 %	2.359.103.300	2.721.172.820	2.901.306.932	542.203.632			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Tani, Gapoktan, Petani, Penyuluh		3.480.280.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	480.051.200	852.120.720	1.077.920.560	597.869.360	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			530.500.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				125 Unit	125 Unit	1.381.406.000	1.371.406.000	1.316.034.672	-65.371.328	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			2.199.780.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				12 Unit	12 Unit	497.646.100	497.646.100	507.351.700	9.705.600	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat			750.000.000	DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																			
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	0	0	0	0	Kab. Banjar, Semua Kecamatan,	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada			0	DINAS PERTANIAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berku rang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Semua Kel/ Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masvarakat				
J U M L A H								40.806.7 45.491	49.999.8 83.371	50.710.2 02.802	9.903.45 7.311							84.263.36 6.378	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar bersama dengan DPRD, seyogianya memperhatikan konsistensi antara Renja Perubahan Tahun 2024 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang Tahun 2024 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas Pertanian berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Bappelitbang Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun 2024 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Sekretariat Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan karena ada Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini maka bisa dijadikan dokumen pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar agar dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan. Berpedoman pada penjelasan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2024 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/ 522/ PPE/ Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024
2. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/ 68/ LHE/ P.Kin.As/ II/ ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
3. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2024, maka dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan

belanja daerah;

2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 dan Project strategis RPJMD;
3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2024;
4. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;` Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 24);

26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 36);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx (belum diberi bag hukum) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah untuk memantapkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana setelah dilakukannya penyesuaian sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- b. Sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- c. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan

dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berkenaan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dilampirkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d triwulan II tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi :

1. Perubahan Indikator Kinerja.
2. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
4. Alasan dilakukan perubahan.

Dilampirkan tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada aplikasi SIPD

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024, berupa:

- 4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 4.3 Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan rencana strategis untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian
Renstra Sekretariat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPd :
 Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTR A Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kab Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	persen	11.114.450.374	100	persen	21.742.774.500	25	4.007.014.100	50	7.000.468.138				25	4.007.014.100	125	15.121.464.474	125	106,89	Asisten I/ Bagian Pemerintahan /B agian Kesra/Bagian Hukum	
			Nilai LPPD	3,2005	831.204.873	3,4959	Nilai	409.776.150	3,1500	Nilai	568.073.800	0	147.550.000	0	283.532.300				0	147.550.000	3,50	557.326.150	109,23	67,05	Asisten I/ Bagian Pemerintahan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	persen	11.114.450.374	100	persen	21.742.774.500	25	4.007.014.100	50	7.000.468.138				25	4.007.014.100		15.121.464.474	0	106,89	Asisten I/ Bagian Pemerintahan /B agian Kesra/Bagian Hukum	

			Nilai LPPD	3,2005	831.204.873	3,4959	Nilai	409.776.150	3,1500	Nilai	568.073.800	0	147.550.000	0	283.532.300				0	147.550.000	3,50	557.326.150	109,22981	67,05	Asisten I/Bagian Pemerintahan
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	831.204.873	100	Perse n	60.845.000	100	Perse n	61.425.500	0	32.050.000	0	46.835.000				0	32.050.000	100	6.555.306.484	100	788,65	Bagian Pemerintahan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100		100	Perse n	159.521.150	100	Perse n	146.852.500	50	-	50	31.561.700				50		150		150		Bagian Pemerintahan
			Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100		100	Perse n	158.846.000	100	Perse n	193.721.200	80	86.550.000	80	154.646.200				80		180		180		Bagian Pemerintahan
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	80.034.294	4	Dokumen	60.845.000	4	Dokumen	61.425.500	0	32.050.000	0	46.835.000				0	32.050.000	4	92.895.000	100	116,07	Bagian Pemerintahan/ Subbag Administrasi Pemerintah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	574.298.368	4	Dokumen	159.521.150	4	Dokumen	146.852.500	2	-	2	31.561.700				2	-	6	159.521.150	150	27,78	Bagian Pemerintahan/ Subbag Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	176.872.211	5	Dokumen	158.846.000	5	Dokumen	193.721.200	4	86.550.000	4	154.646.200				4	86.550.000	9	245.396.000	180	138,74	Bagian Pemerintahan/ Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitas dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100	12.631.961.035	100	Perse n	6.064.499.400	100	Perse n	2.034.861.500	25	16.251.000	50	898.520.200				25	16.251.000	125	6.555.306.484	125	51,89	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Persentase fasilitas dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100		100	Perse n	1.998.360.000	100	Perse n	2.429.100.000	25	291.100.000	70	1.629.000.000				25		125		125		Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Persentase fasilitas dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100		100	Perse n	2.754.509.620	100	Perse n	16.585.040.600	25	3.624.363.600	24,88	4.242.974.438				25		125		125		Bagian Kesejahteraan Rakyat

		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	8.000.00 0.000	8	Dokumen	6.064.499.400	9	Dokumen	16.585.040.600	1	3.624.363.600	1	4.242.974.438					1	3.624.36 3.600	9	9.688.8 63.000	112,5	121,1 1	Bagian Kesejahteraan Rakyat/ Subbag Bina Mental dan Spritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi Kesehatan,, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	4	1.531.96 1.035	3	Dokumen	1.998.360.000	4	Dokumen	2.429.100.000	2	291.100.000	1	1.629.000.000					2	291.100. 000	5	2.289.4 60.000	125	149,4 5	Bagian Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Sosial
			Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																							
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	3.100.00 0.000	4	Dokumen	2.754.509.620	4	Dokumen	2.034.861.500	1	16.251.000	5	898.520.200					1	16.251.0 00	5	2.770.7 60.620	125	89,38	Bagian Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Sosial Masyarakat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 0	1.515.40 8.000	10 0	Persentase	114.270.238	10 0	Persentase	250.584.800	25	42.724.500	58	123.89 9.500					25	42.724.5 00	12 5	6.555.3 06.484	125	432,5 8	Bagian Hukum
			Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 0		10 0	Persentase	157.454.900	10 0	Persentase	350.000.000	25	29.150.000	50	91.120.000					25		12 5		125		Bagian Hukum
			Persentase Jumlah Produk	10 0		10 0	Persentase	25.356.	10 0	Persentase	93.187.6	25	3.425.	50,76						25		12 5		125		Bagian Hukum

			Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				216		00		000		14.954.000											
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	548.876.400	865	Dokumen	114.270.238	700	Dokumen	250.584.800	260	42.724.500	407	123.899.500				260	42.724.500	1125	156.994.738	204,54545	28,60	Bagian Hukum
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	613.906.800	7	kasus	157.454.900	12	kasus	350.000.000	3	29.150.000	6	91.120.000				3	29.150.000	10	186.604.900	200	30,40	Bagian Hukum
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500	352.624.800	780	Dokumen	25.356.216	650	Dokumen	93.187.600	197	3.425.000	330	14.954.000				197	3.425.000	977	28.781.216	195,4	8,16	Bagian Hukum
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	37.420.639	100	Perse n	30.564.000	100	Perse n	166.074.600	0	28.950.000	0	50.499.400				0	28.950.000	100	59.514.000	100	159,04	Bagian Pemerintahan
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	37.420.639	1	Dokumen	30.564.000	1	Dokumen	166.074.600	0	28.950.000	0	50.499.400				0	28.950.000	1	59.514.000	100	159,04	Bagian Pemerintahan/ Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
2	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544	100	Perse n	567.275.360	100	Perse n	671.346.800	25	31.667.000	50	171.374.000				25	31.667.000	125	598.942.360	125	33,94	Asisten II/ Bagian Administrasi Pembangunan / Bagian Perekonomian dan SDA
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	76,65	Indeks	347.876.744	60	Indeks	546.738.400	0	211.922.300	50	299.470.646				0	211.922.300	76,65	559.799.044	94,62963	27,99	Bagian PBJ
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544	100	Perse n	567.275.360	100	Perse n	671.346.800	25	31.667.000	50	171.374.000				25	31.667.000	125	598.942.360	125	33,94	Asisten II/ Bagian Administrasi Pembangunan / Bagian Perekonomian dan SDA
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	76,65	Indeks	347.876.744	60	Indeks	546.738.400	0	211.922.300	50	299.470.646				0	211.922.300	76,65	559.799.044	94,62963	27,99	Bagian PBJ

		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100	800.000.000	100	Perse n	456.859.160	100	Perse n	514.117.400	25	13.420.000	50	118.327.000				25	13.420.000	125	470.279.160	125	58,78	Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	13	550.000.000	12	Dokumen	328.318.960	20	Dokumen	384.170.600	3	9.020.000	8	92.922.000				3	9.020.000	15	337.338.960	115,38462	61,33	Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag BUMD dan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	250.000.000	4	Laporan	128.540.200	4	Laporan	129.946.800	1	4.400.000	2	25.405.000				1	4.400.000	5	132.940.200	125	53,18	Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100	864.663.544	100	Perse n	75.044.200	100	Perse n	115.549.600	25	10.747.000	47	27.962.000				25	10.747.000	125	85.791.200	125	9,92	Bagian Pembangunan
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	476.199.544	4	Dokumen	42.079.500	4	Dokumen	53.649.000	1	6.125.000	2	10.375.000				1	6.125.000	5	48.204.500	125	10,12	Bagian Pembangunan / Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	134.784.000	4	Laporan	20.905.100	4	Laporan	46.459.600	1	4.122.000	2	12.337.000				1	4.122.000	5	25.027.100	125	18,57	Bagian Pembangunan / Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	253.680.000	2	Laporan	12.059.600	2	Laporan	15.441.000	0	500.000	1	5.250.000				0	500.000	2	12.559.600	100	4,95	Bagian Pembangunan/ Subbag Pengendalian Program
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	100	2.000.000.000	76,65	Perse n	347.876.744	60	Perse n	546.738.400	66,67	211.922.300	83,33	299.470.646				66,67	211.922.300	143,32	559.799.044	143,32	27,99	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	400.000.000,00	5	Dokumen	19.443.250	5	Dokumen	52.985.700	1	31.372.200	2	37.550.850				1	31.372.200	6	50.815.450	120	12,70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pengelolaan

																								Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.000.00 0.000,00	5	Dok u men	206.160 .094	5	Dok u men	285.947. 700	1	52.41 8.100	1	131.61 5.596					1	52.418.1 00	6	258.57 8.194	120	25,86	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 5	600.000. 000,00	73	orang	122.273 .400	83	orang	207.805. 000	63	128.1 32.00 0	90	130.30 4.200					63	128.132. 000	13 6	250.40 5.400	129,52 381	41,73	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi kebijakan SDA	10 0	100.000. 000	10 0	Perse n	35.372. 000	10 0	Perse n	41.679.8 00	25	7.500. 000	50	25.085 .000					25	7.500.00 0	12 5	42.872. 000	125	42,8 7	Bagian Perekonomian dan SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	45.000.0 00	2	Dok u men	10.733. 000	2	Dok u men	10.733.0 00	0	900.0 00	1	2.935. 000					0	900.000	2	11.633. 000	100	25,85	Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96	55.000.0 00	94	Dok u men	24.639. 000	94	Dok u men	30.946.8 00	0	6.600. 000	47	22.150 .000					0	6.600.00 0	94	31.239. 000	97,916 667	56,80	Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Sumber Daya Alam

3	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	56.547.849.814	100	Perse n	115.378.900	100	Perse n	104.999.800	25	28.700.000	50	198.407.490				25	28.700.000	125	144.078.900	125	0,25	Asisten III/Bagian Organisasi/ Bagian Umum/Bagian Prokopim/ Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	498.726.802	81,05	nilai	17.570.432.619	78	nilai	20.057.836.841	0	2.972.879.120	0	10.768.758.984				0	2.972.879.120	81,05	20.543.311.739	98,841463	4119,15	Asisten III / Bagian Perencanaan dan Keuangan
			IKM Sekretariat Daerah Kab.Banjar	90	35.592.097.664	84	Indeks	25.529.968.560	86	Indeks	32.594.951.392	0	7.010.575.724	0	14.265.010.576				0	7.010.575.724	84	32.540.544.284	93,333333	91,43	Asisten III/Bagian Umum/Bagian Prokopim
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	56.547.849.814	100	Perse n	115.378.900	100	Perse n	104.999.800	25	28.700.000	50	198.407.490				25	28.700.000	125	144.078.900	125	0,25	Asisten III/Bagian Organisasi/ Bagian Umum/Bagian Prokopim/ Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	42.100.000	81,05	nilai	17.570.432.619	76	nilai	20.057.836.841	0	2.972.879.120	0	10.768.758.984				0	2.972.879.120	81,05	20.543.311.739	98,841463	4879,646	Asisten III / Bagian Perencanaan dan Keuangan
			IKM Sekretariat Daerah Kab.Banjar	90	35.592.097.664	84		25.529.968.560	86	Indeks	32.594.951.392		7.010.575.724	0	14.265.010.576				0	7.010.575.724	84	32.540.544.284	93,333333		Asisten III/Bagian Umum/Bagian Prokopim
	Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	1,3	1.791.148.754	1,3	Skor / nilai	440.181.050	1,3	Skor / nilai	835.574.200	0	24.456.500	0	198.407.490				0	24.456.500	1,3	464.637.550	100	170	Bagian Organisasi	
		Persentase pengelolaan tatalaksana	100		82,49	Perse n		100	Perse n		0		20					0		82,49		82,49			Bagian Organisasi
		Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100		100	Perse n		100	Perse n		0		0					0		100		100			Bagian Organisasi
		Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100		0	Perse n		100	Perse n		0		0					0		0		0			Bagian Organisasi
		Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100		87,23	Perse n		100	Perse n		14		0					14		101,23		101,23			Bagian Organisasi
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	204.102.860	4	Dokumen	215.530.000	2	Dokumen	405.697.800	0	9.300.000	0	61.302.800				0	9.300.000	4	224.830.000	44,444444	110,16	Bagian Organisasi/ Subbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	276.187.237	6	Laporan	137.068.050	5	Laporan	181.870.400	0	8.922.500	1	36.927.690				0	8.922.500	6	145.990.550	100	52,86	Bagian Organisasi/ Subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	1.310.858.657	7	Dokumen	87.583.000	7	Dokumen	248.006.000	1	6.234.000	2	100.177.000				1	6.234.000	8	93.817.000	114,28571	7,16	Bagian Organisasi / Subbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100	498.726.802	79,87	Perse n	115.378.900	82	Perse n	104.999.800	0	28.700.000	50	45.298.800				0	-	79,87	6.555.306.484	79,87	1314,41	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Bagian yang berkinerja baik	100		100	Perse n		100	Perse n		25		50				25		125		125			Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100		100	Perse n		100	Perse n		25		50				25		125		125			Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Nilai Sakip Setda	82,5		100	Nilai		100	Nilai		25		99,91				25		125		151,51515			Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	334.942.802	12	Dokumen	54.345.800	12	Dokumen	44.999.900	4	9.300.000	8	19.868.800				4	9.300.000	16	63.645.800	133,33333	19,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	121.684.000	3	Laporan	20.701.400	3	Laporan	24.999.900	3	4.700.000	6	16.100.000				3	4.700.000	6	25.401.400	85,714286	20,87	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Pelaporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	42.100.000	28	Laporan	40.331.700	28	Laporan	35.000.000	4	14.700.000	8	9.330.000				4	14.700.000	32	55.031.700	110,34483	130,72	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	20.810.806.250	100	perse n	16.933.560.256	100	perse n	19.229.278.341	25	2.444.907.389	50	10.614.971.091				25	2.444.907.389	125	19.378.467.645	125	93,12	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	20.663.606.250	117	orang/ bulan	16.528.476.156	117	orang/ bulan	18.801.214.341	117	2.404.398.979	117	10.401.476.591				117	2.404.398.979	234	18.932.875.135	200	91,62	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	12		12	Doku	405.084	12	Doku		3		6	213.49				3		15		125	302,7	Bagian

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		147.200.000		men	.100		men	428.064.000		40.508.410	4.500						40.508.410		445.592.510		1	Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100	644.572.400	100	Perse n	48.995.287	100	Perse n	50.000.000	25	5.830.000	50	19.244.946				25	-	125	6.555.306.484	125	1017,00	Bagian Umum
	Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100		100	Perse n	69.710.800	100	Perse n	120.000.000	25	33.774.000	50	66.918.000				25		125		125		Bagian Hukum
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	144.572.400	320	orang	69.710.800	440	orang	120.000.000	120	33.774.000	240	66.918.000				120	33.774.000	440	103.484.800	550	71,58	Bagian Hukum/ Subbag Dokumentasi dan Informasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	500.000.000	15	orang	48.995.287	80	orang	50.000.000	1	5.830.000	13	19.244.946				1	5.830.000	16	54.825.287	64	10,97	Bagian Umum/ Subbag Tata USahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100	6.306.649.161	100	Perse n	4.794.429.670	100	Perse n	5.441.506.692	25	902.524.851	50	3.385.100.150				25	902.524.851	125	5.696.954.521	125	90,33	Bagian Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	54.663.390	1	Paket	48.044.000	6	Paket	45.174.000	1	5.830.000	2	20.745.000				1	5.830.000	2	53.874.000	33,333333	98,56	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapannya Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapannya Kantor yang Disediakan	28	718.165.061	8	Paket	1.327.095.000	8	Paket	1.974.781.000	1	4.918.300	6	1.383.065.882				1	4.918.300	9	1.332.013.300	32,142857	185,47	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	4	33.820.7	4	Laporan	28.660.000	4	Laporan	27.940.0	1	1.750.	2	12.100.000				1	1.750.00	5	30.410.	125	89,92	Bagian Umum/ Subbag Tata

Tamu	Kunjungan Tamu	10						00		000							0		000				USahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Penyelenggara aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	5.500.00 0.000	2	Lapor an	3.390.6 30.670	12	Lapor an	3.393.61 1.692	3	890.0 26.55 1	6	1.969. 180.26 8				3	890.026. 551	5	4.280.6 57.221	250	77,83	Bagian Umum/ Subbag Tata USahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	10 0	6.413.70 3.105	10 0	Perse n	5.657.2 11.000	10 0	Perse n	6.760.73 5.000	25	3.099. 775.0 00	50	3.742. 180.00 0				25	3.099.77 5.000	12 5	8.756.9 86.000	125	136,5 4	Bagian Umum
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1	2.338.94 3.763	4	Unit	2.421.5 00.000	9	Unit	701.840. 000	0	-	0	0				0	-	4	2.421.5 00.000	400	103,5 3	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang disediakan																						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	3.750.00 0.000	8	Unit	2.602.5 31.000	16	Unit	4.699.86 0.000	10	3.074. 000.0 00	10	3.074. 000				10	3.074.00 0.000	18	5.676.5 31.000	600	151,3 7	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	324.759. 342	4	Paket	633.180 .000	6	Paket	1.359.03 5.000	1	25.77 5.000	3	668.18 0.000				1	25.775.0 00	5	658.95 5.000	125	202,9 1	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	10 0	7.803.54 2.604	10 0	Perse n	4.816.9 27.191	10 0	Perse n	6.450.24 3.000	25	1.668. 709.6 10	60	2.519. 129.61 7				25	1.668.70 9.610	12 5	6.485.6 36.801	125	83,11	Bagian Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	150.000. 000	12	lapora n	36.250. 000	2	lapora n	36.250.0 00	0	12.50 0.000	1	14.600 .000				0	12.500.0 00	12	48.750. 000	600	32,50	Bagian Umum/ Subbag Tata USahaPimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.908.19 6.668	12	Lapor an	1.296.8 71.071	12	Lapor an	1.372.86 0.000	3	326.9 36.54 5	6	675.47 2.417				3	326.936. 545	15	1.623.8 07.616	125	85,10	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	333.778. 198	2	Lapor an	254.540 .000	4	Lapor an	647.133. 000	1	326.9 36.54 5	2	87.731 .000				1	326.936. 545	3	581.47 6.545	150	174,2 1	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	5.411.56 7.738	12	Lapor an	3.229.2 66.120	13	Lapor an	4.394.00 0.000	3	1.002. 336.5	7	1.741. 326.20 0				3	1.002.33 6.520	15	4.231.6 02.640	125	78,20	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga

Mumum Kantor	Kantor yang Disediakan									20													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100	5.041.170.087	100	Perse n	5.439.460.394	100	Perse n	7.561.424.100	25	407.645.315	50	2.340.170.500				25	407.645.315	125	5.847.105.709	125	115,99	Bagian Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	1.130.578.020	21	Unit	784.092.695	25	Unit	440.530.000	5	119.087.398	15	279.989.022				5	119.087.398	26	903.180.093	68,421053	79,89	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	2.578.507.036	109	Unit	1.509.542.098	121	Unit	1.870.300.000	241	29.880.681	65	741.238.515				24	29.880.681	133	1.539.422.779	109,91736	59,70	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	80.525.500	16	Unit	63.198.750	16	Unit	65.000.000	4	3.359.736	10	15.366.736				4	3.359.736	20	66.558.486	125	82,66	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	169.103.550	7	Unit	2.184.864.783	6	Unit	4.309.936.000	1	95.870.000	2	941.822.193				1	95.870.000	8	154.437.120	133,33333	91,33	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	571.731.050	6	Unit	453.014.764	6	Unit	453.980.000	2	81.989.000	2	185.365.375				2	81.989.000	8	535.003.764	133,33333	93,58	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	250	510.724.931	250	Unit	444.747.304	250	Unit	421.678.100	50	77.458.500	100	176.388.758				50	77.458.500	300	522.205.804	120	102,25	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan	100	275.000.	100	Perse n	101.510	100	Perse n	135.600.	25	133.2	100	133.28				25	133.280.	125	234.79	125	85,38	Bagian Umum

dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	penatausahaan keuangan yang tertib administrasi		000			.000			000		80.00		0.000					000		0.000			
	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	149.294.277	100	Perse n	149.941.759	100	Perse n	175.000.000	25	740.000	30	13.613.117				25		125		125		Bagian Umum
	Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	144.945.900	100	Perse n	168.161.469	100	Perse n	171.033.700	25	35.657.191	50	108.489.093				25		125		125		Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	600.000.000	100	Perse n	600.000.000	100	Perse n	600.000.000	25	150.000.000	50	300.000.000				25		125		125		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	275.000.000	2	orang/ bulan	168.161.469	24	orang/ bulan	171.033.700	6	35.657.191	12	108.489.093				6	35.657.191	8	203.818.660	33	74,12	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	149.294.277	9	Paket	101.510.000	9	Paket	135.600.000	9	133.280.000	9	133.280.000				9	133.280.000	18	234.790.000	200	157,27	Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	144.945.900	7	orang	149.941.759	6	orang	175.000.000	1	740.000	2	13.613.117				1	740.000	8	150.681.759	133	103,96	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	600.000.000	2	orang/ bulan	600.000.000	24	orang/ bulan	600.000.000	6	150.000.000	12	300.000.000				6	150.000.000	8	750.000.000	133	125,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Subb a g Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100	3.041.178.858	100	Perse n	673.406.334	100	Perse n	899.860.000	25	174.339.635	71	477.267.905				25	174.339.635	125	847.745.969	125	27,88	Bagian Umum
	Persentase	100		100	Perse		100	Perse		25		50					25		12		125	0,00	

			Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	0	581.950.702	0	n	358.657.923	0	n	518.968.000		101.994.712	296.274.376					5				
			Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	100	974.366.925	100	Perse n	993.912.463	100	Perse n	1.211.448.500	25	160.984.231	47382.735.392			25		125	0,00			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	974.366.925	7	Paket	673.406.334	7	Paket	899.860.000	4	174.339.635	5477.267.905			4	174.339.635	11847.745.969	157,14286	87,00	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	581.950.702	6	Paket	358.657.923	6	Paket	518.968.000	3	101.994.712	3296.274.376			3	101.994.712	9460.652.635	150	79,16	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	3.041.178.858	17	Paket	993.912.463	17	Paket	1.211.448.500	8	160.984.231	8382.735.392			8	160.984.231	251.154.896.694	147,05882	37,98	Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	100	540.264.613	100	Perse n	1.607.211.736	100	Perse n	1.963.127.200	25	127.023.370	50522.400.974			25	127.023.370	125Rp1.734.235.106	125	112	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	100	667.562.105	100	Perse n	97.397.703	100	Perse n	457.712.400	25	41.835.000	5058.985.000			25		125				
			Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	100	2.552.842.827	100	Perse n	121.196.300	100	Perse n	249.326.500	25	2.120.000	507.710.500			25		125				
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	2.552.842.827	12	Laporan	1.607.211.736	12	Laporan	1.963.127.200	3	127.023.370	6522.400.974			3	127.023.370	151.734.235.106	125	67,93	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	667.562.105	12	Laporan	97.397.703	12	Laporan	457.712.400	3	41.835.000	658.985.000			3	41.835.000	15139.232.703	125	20,86	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	540.264.613	12	Laporan	121.196.300	12	Laporan	249.326.500	3	2.120.000	67.710.500			3	2.120.000	15123.316.300	125	22,83	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												53,57	2.058.615.483	28,57	4.712.431.733								
Predikat kinerja												Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												40,25	720.024.221	94,31	3.665.225.781								

Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)	20,48	238.888,61	29,31	507.305,338					
Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 pada tabel di atas, dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemerintahan diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan target 4 dokumen tetapi sampai triwulan 2 belum ada realisasi dokumen yang selesai sehingga capaiannya menjadi 0%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang diampu oleh Bagian Kesra dengan target 9 dokumen tetapi sampai triwulan 2 dokumen yang terealisasi baru 1 dokumen sehingga capaiannya menjadi 11,11%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang diampu oleh Bagian Kesra dengan target 4 dokumen tetapi sampai triwulan 2 dokumen yang terealisasi baru 1 dokumen sehingga capaiannya menjadi 25%.
4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Sub Kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri diampu oleh Bagian Pemerintahan sampai triwulan 2 belum ada realisasi dokumen yang selesai sehingga capaiannya menjadi 0%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sampai triwulan 2 realisasi dokumen yang selesai 20 dokumen dari target 20 dokumen sehingga capaiannya hanya 40%.
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 5 dokumen tetapi sampai dengan triwulan 2 baru 2 dokumen yang terealisasi sehingga capaiannya baru 40%.
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan target 5 dokumen tetapi sampai dengan triwulan 2 baru 1 dokumen yang terealisasi dari target 5 dokumen sehingga capaiannya baru 20%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang diampu oleh Bagian Organisasi dengan target 2 Dokumen tetapi sampai triwulan 2 belum ada realisasi dokumen yang selesai sehingga capaiannya menjadi 0%.
2. Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang diampu oleh Bagian Organisasi dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 5 dokumen sehingga capaiannya

cuma 20%.

3. Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang diampu

oleh Bagian Organisasi dengan target 7 dokumen tetapi sampai dengan triwulan 2 baru 2 dokumen yang teralisasi sehingga capaian kinerjanya cuma 28,57%

4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari Target 28 laporan sampai dengan triwulan 2 baru 8 laporan yang terealisasi sehingga capaian kinerjanya baru 28,57%.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan target kegiatan 80 orang tetapi sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi 13 laporan sehingga capaiannya cuma 16,25%.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 6 paket tetapi sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi 2 paket sehingga capaiannya cuma 33,33%
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target 9 Unit tetapi sampai dengan triwulan 2 belum terealisasi sehingga capaiannya 0%
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

baru 2 unit yang terealisasi dari target 6 unit sehingga capaian kinerjanya cuma 33,33%.

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi juga baru 2 unit yang terealisasi dari target 6 unit sehingga capaian kinerjanya cuma 33,33%.

10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dari target 250 unit yang terealisasi baru 100 unit sehingga capaian kinerjanya cuma 40%.
11. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Cek Up yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru 2 orang yang terealisasi dari target 6 orang sehingga capaian kinerjanya cuma 33,33%
12. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan dari target 17 paket yang terealisasi baru 7 paket sehingga capaian kinerjanya cuma 47%

2. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan target 4 dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.

2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja Jumlah Kasus yang

mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum yang diampu oleh Bagian Hukum dengan target 12 kasus sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 6 kasus sehingga capaiannya menjadi 50%.

3. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator kinerja Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi diampu oleh Bagian Hukum dengan target 650 dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 330 dokumen sehingga capaiannya menjadi 50,77%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Pengendalian Distribusi Perekonomian dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 4 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan target 4 Dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan target 4 Dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.
4. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan target 2 Laporan sampai triwulan 2

sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 1 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.

5. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 2 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 1 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.
6. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 94 Dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 47 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 117 orang sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 117 orang sehingga capaiannya menjadi 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

dengan target 12 Dokumen sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 12 Dokumen sehingga capaiannya menjadi 50%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 440 orang sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 240 orang sehingga capainnya menjadi 54,55%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang diampu oleh Bagian Umum dengan target 4 Laporan sampai triwulan 2 dan target 12 Dokumen sampai triwulan 2 dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dan sudah terealisasi sesuai rencana sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diampu oleh Bagian Umum dengan target 12 Laporan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dimana sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang diampu oleh Bagian Umum dengan target 6 Paket dengan indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang disediakan dimana sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 3 Paket sehingga capaiannya menjadi 50%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 2 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 1 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diampu oleh Bagian Umum dengan

indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 Laporan sampai
triwulan 2 sudah terealisasi

sesuai rencana yaitu sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 4 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 2 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 13 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 7 Laporan sehingga capaiannya menjadi 53,85%.
11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 121 Unit sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 65 Unit sehingga capaiannya menjadi 53,72%.
12. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH dengan target 24 orang/ bulan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 12 orang/ bulan sehingga capaiannya menjadi 50%.
13. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH, Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH dengan target 24 orang/ bulan sampai triwulan 2 sudah terealisasi

sesuai rencana yaitu sebanyak 12 orang/ bulan sehingga capaiannya menjadi 50%.

14. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH

yang disediakan dengan target 6 Paket sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 3 Paket sehingga capaiannya menjadi 50%.

15. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dengan target 12 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
16. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan target 12 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.
17. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan target 12 Laporan sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya menjadi 50%.

3. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 80% realisasi 4 dokumen dari target 5 dokumen.
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang diampu oleh Bagian Kesra dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan

Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 100% realisasi 5 dokumen dari target 4 dokumen.

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diampu oleh Bagian Hukum dengan indikator kinerja Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah sebesar 58,14% dengan realisasi 407 dokumen dari target 700 dokumen.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 100% realisasi 90 orang dari target 83 orang.

**c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota yang sesuai ketentuan**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 66,67% terealisasi sebanyak 8 dokumen dari target 13 dokumen.
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 100% terealisasi sebanyak 6 dokumen dari target 3 dokumen.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 75% terealisasi sebanyak 6 dokumen dari target 8

dokumen.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dengan indikator

kinerja Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 62,5% terealisasi sebanyak 10 unit dari target 16 unit.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 25 Unit sampai triwulan 2 sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 15 Unit sehingga capaiannya menjadi 60%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 62,5% terealisasi sebanyak 10 unit dari target 16 unit.
7. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH dengan indikator kinerja Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 100% terealisasi sebanyak 9 paket dari target 9 paket.
8. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dengan indikator kinerja jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH yang disediakan dengan capaian kinerja pada triwulan 2 adalah 71,43% terealisasi sebanyak 5 paket dari target 7 paket.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut

:

- a. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya pergeseran anggaran atau rencana anggaran kas, tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang antara lain disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan kemudian untuk sasaran karena

indikator dalam bentuk persentase, maka realisasi belum maksimal dikarenakan karena kebanyakan realisasi direncanakan direalisasikan pada triwulan IV, sehingga pada capaian triwulan II ini untuk sasaran masih belum sesuai target.

- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terpenuhinya target kinerja dikarenakan dilakukannya evaluasi per bulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.
- c. Program, kegiatan, dan sub kegiatan melebihi target kinerja dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan anggaran belanja yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan indikator kinerja;
- b. Memangkas dan memaksimalkan anggaran belanja yang tersedia

dan lebih memprioritaskan belanja yang dianggap mendesak;

- c. Memfokuskan belanja dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD dan RPJMD;
- d. Memperhatikan isu strategis pada urusan yang diampu pada tahun 2024;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan rencana aksi per triwulan baik pencapaian kinerja maupun serapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana salah satu implementasinya adalah pemberian reward dan punishment kepada pengampu kinerja yang mencapai/tidak mencapai target
- f. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang sudah dipetakan sebagai risiko strategis dan risiko operasional yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja
- g. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik di internal maupun eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

2.2 PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan

3 (tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Jika melihat capaian realisasi program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2024 s.d triwulan II, pada level sub kegiatan sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih pencapaiannya masih di bawah target.

Pencapaian dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dijabarkan di atas namun di sisi lain juga terdapat faktor penyebab/penghambat yang juga telah dijabarkan di atas. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing- masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Terhadap kinerja yang belum bisa tercapai akan dilakukan analisa dan tindak lanjut agar pada akhir tahun periode Renstra bisa terpenuhi.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun berakhirnya renstra mengalami perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta perubahan indikator dan target disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang hukum, pemerintahan, kesejahteraan sosial, pembangunan, perekonomian, layanan pengadaan, hubungan kemasyarakatan, organisasi, serta umum;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
- 3) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD;
- 4) Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Perubahan Target Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun berakhirnya renstra disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi dan karena adanya penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini, ada perubahan terhadap jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (Tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Fasilitas Kunjungan Tamu
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

- g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- h) Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat

Daerah Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- i) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi

Pimpinan Sub Kegiatan :

1. Fasilitas Keprotokolan
2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- j) Penataan

Organisasi Sub

Kegiatan :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- k) Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 2). Program Perekonomian dan

Pembangunan Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - b). Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
 - c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 3). Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan :
- a). Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan :
 1. Penataan Administrasi Pemerintahan
 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b). Fasilitasi Kerjasama Daerah Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - c). Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Masyarakat

d). Fasilitasi dan Koordinasi

Hukum Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
3. Pendokumentasian Produk Hukum & Pengelolaan Informasi
Hukum

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Belanja Langsung yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Banjar adalah sebesar **Rp. 82.251.344.633,- (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
								Renja 202	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
Meningkatnya Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				76.464.770.933	82.251.344.633	5.786.573.700	
						SEKRETARIAT DAERAH				76.464.770.933	82.251.344.633	5.786.573.700	
							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat						
							Nilai LPPD						
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				22.310.848.300	22.705.983.300	395.135.000	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				401.999.200	426.104.200	24.105.000	
							Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	100 %				
							Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 %	100 %				
							Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %				
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pemerintahan	4 Dok	4 Dok	61.425.500	66.630.500	5.205.000	Penambahan Belanja Makan untuk melaksanakan Kegiatan Rakor Tahunan dan Fasilitas lainnya
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dok	4 Dok	146.852.500	146.852.500	0	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dok	5 Dok	193.721.200	212.621.200	18.900.000	Penambahan Belanja Makan untuk melaksanakan Kegiatan Rapat
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				21.049.002.100	21.205.902.100	156.900.000	
							Persentase fasilitas dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100 %	100 %				
							Persentase fasilitas dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				

						Persentase fasilitasi dan koordinas di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dok	8 Dok	16.585.040.600	16.750.690.600	165.650.000	Penambahan untuk Kegiatan Wisuda Santri/santriwati TK/TPA se Kabupaten Banjar dan Penghargaan kepada ustazd/Ustazdah berprestasi (melaksanakan ibadah umroh untuk 2 orang)
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dok	3 Dok	2.429.100.000	2.429.100.000	0	-
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dok	4 Dok	2.034.861.500	2.026.111.500	8.750.000	Pergeseran Belanja ke Perjadin LD untuk Koordinasi Kegiatan Hibah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				693.772.400	897.432.400	203.660.000	
						Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 %	100 %				
						Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	100 %				
						Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 %	100 %				

	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dok	700 Dok	250.584.800	317.534.800	66.950.000	Penambahan Belanja Kertas untuk Cetak Dok SK/Perbup/Perda dll
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	12 Kasus	350.000.000	486.710.000	136.710.000	Penambahan untuk Honorarium Tim Kuasa Hukum Tingkat Pertama (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi)
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650 Dok	650 Dok	93.187.600	93.187.600	0	-
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah				166.074.600	176.544.600	10.470.000	

							Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %				
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	1 Dok	166.074.600	176.544.600	10.470.000	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan						
							Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah						
	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.218.085.200	1.048.489.000	169.596.200	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				514.117.400	363.717.400	150.400.000	
							Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100 %	100 %				
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dok	20 Dok	384.170.600	233.770.600	150.400.000	Di geser ke Perjadin LD karena adanya : 1. Pembubaran BIN sehingga perlu koordinasi ke Kemendagri dan PN Surabaya serta fasilitasi untuk BPK 2. Usulan Forum Camat terkait BUMDES Pangan Pengendalian Inflasi
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Lap	4 Lap	129.946.800	129.946.800	0	-
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				115.549.600	83.453.400	32.096.200	
							Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %				

4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dok	4 Dok	53.649.000	37.304.000	16.345.000	Digesor ke : 1. Perjadin LD untuk Kegiatan Monev Pembangunan dan Koordinasi ke Provinsi 2. Belanja Modal
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Lap	4 Lap	46.459.600	34.333.400	12.126.200	Digesor ke : 1.Perjadin LD untuk Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2. Belanja Modal
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Lap	2 Lap	15.441.000	11.816.000	3.625.000	Digesor ke Perjadin LD
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				546.738.400	559.638.400	12.900.000	

						Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	60 %	60 %				
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dok	5 Dok	52.985.700	52.985.700	0	-
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dok	5 Dok	285.947.700	285.947.700	0	-
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	83 Org	83 Org	207.805.000	220.705.000	12.900.000	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan PBJ
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				41.679.800	41.679.800	0	
						Persentase fasilitasi kebijakan SDA	100 %	100 %				
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dok	2 Dok	10.733.000	10.733.000	0	-

	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	92 Dok	92 Dok	30.946.800	30.946.800	0	-
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum						
							Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)						
	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				52.935.837.433	58.496.872.333	5.561.034.900	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				104.999.800	197.904.000	92.904.200	
							Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100 %	100 %				
							Persentase Bagian yang berkinerja baik	100 %	100 %				
							Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100 %	100 %				
							Nilai SAKIP Setda	82 Nilai	82 Nilai				
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dok	13 Dok	44.999.900	125.567.500	80.567.600	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat dan Biaya Konsultasi Penyusunan Dokumen Penjenjangan Kinerja Setda
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	3 Lap	24.999.900	33.246.500	8.246.600	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Benda Pos
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Lap	28 Lap	35.000.000	39.090.000	4.090.000	Belanja Makan Minum Rapat
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.229.278.341	19.610.893.401	381.615.060	
							Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100 %	100 %				
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Org	117 Org	18.801.214.341	18.972.510.901	171.296.560	Penambahan karena adanya penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	428.064.000	638.382.500	210.318.500	Penambahan karena adanya penyesuaian kekurangan honorarium pejabat pengelola keuangan
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				170.000.000	205.000.000	35.000.000	
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100 %	100 %				
						Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %				
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	440 Org	440 Org	120.000.000	120.000.000	0	-
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Org	80 Org	50.000.000	85.000.000	35.000.000	Penambahan karena msh banyaknya kebutuhan akan peningkatan kompetensi melalui Bimtek
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.441.506.692	7.489.951.692	2.048.445.000	
						Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100 %	100 %				
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	45.174.000	45.174.000	0	-
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	1.974.781.000	2.935.556.000	960.775.000	1. Adanya tambahan kebutuhan alat pendingin di gedung iqro untuk menunjang persiapan kegiatan MTQ Nasional Kalsel 2. Penambahan alat pendingin pada
												kamar di Guest House Sultan Sulaiman karena alat pendingin yang lama sudah tidak berfungsi dengan optimal. 3. Tambahan kebutuhan alat kantor dari Bagian Organisasi sehubungan dengan kepindahan ke gedung baru. 4. Adanya belanja modal alat rumah tangga untuk kantor perwakilan yang diminta langsung oleh pimpinan untuk menunjang fasilitas pimpinan di kantor perwakilan

	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4 Lap	27.940.000	27.940.000	0	-
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	3.393.611.692	4.481.281.692	1.087.670.000	1. Penambahan dalam rangka menunjang Kegiatan audiensi maupun fasilitasi yang dilaksanakan melibatkan narasumber dari Kementerian utk percepatan Penyederhanaan Birokrasi, penguatan implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta penguatan tata laksana dan fasilitasi pelayanan publik) 2. Penambahan dlm rangka KKP HAM ,JDIH dan Pendampingan dan fasilitasi hukum 3. Penambahan utk Kegiatan FASI Tingkat Nasional 4. Penambahan Untuk Narasumber dan Personil UKPBJ Kab Banjar dalam rangka kegiatan pembahasan Kebijakan PBJ 5. Penambahan utk Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD danKerjasama Daerah 6. Penambahan Untuk memaksimalkan fasilitasi kegiatan pimpinan
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.760.735.000	8.678.855.000	1.918.120.000	
							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	701.840.000	1.974.120.000	1.272.280.000	Pembelian Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	4.699.860.000	5.256.700.000	556.840.000	Pembelian Kendaraan Dinas Opsional Pimpinan

	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.359.035.000	1.448.035.000	89.000.000	Pengadaan Kitchen Set Perwakilan, Kursi Pijat WKDH, Sofa Arab KDH dan Meja Kerja Custom PBJ
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.450.243.000	5.721.503.000	728.740.000	

						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	36.250.000	36.250.000	0	-
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	1.372.860.000	1.450.640.000	77.780.000	Penambahan Biaya Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	647.133.000	647.133.000	0	-
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	13 Lap	4.394.000.000	3.587.480.000	806.520.000	-
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.561.424.100	8.857.753.100	1.296.329.000	
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	440.530.000	440.530.000	0	-
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	121 Unit	1.870.300.000	2.145.340.000	275.040.000	Karena adanya penambahan 10 kendaraan operasional baru dari mobil eselon III, kebutuhan BBM serta pemeliharaan bertambah.
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	65.000.000	65.000.000	0	-
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	4.309.936.000	5.313.985.000	1.004.049.000	Rehab Rumah Dinas, Pemeliharaan area Setda, dan secara bertahap menyiapkan gedung iqro untuk MTQ 2025
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	453.980.000	483.980.000	30.000.000	Karena sudah banyak barang/partisi yang digunakan sudah dimakan usia, jadi perlu adanya perbaikan dan pemeliharaan

4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	250 Unit	421.678.100	408.918.100	12.760.000	Penambahan jumlah unit alat pendingin yang di pelihara dan rehabilitasi
---	----	----	------	------	--	--	----------	----------	-------------	-------------	------------	---

					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.081.633.700	1.081.633.840	0	
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100 %	100 %				
						Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %				
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Org	24 Org	171.033.700	171.033.840	840	-
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 paket	135.600.000	135.600.000	0	-
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	175.000.000	175.000.000	0	-
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang	24 Orang	600.000.000	600.000.000	0	-
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				2.630.276.500	2.860.784.000	230.507.500	
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang	100 %	100 %				

						sesuai ketentuan						
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	899.860.000	1.035.340.000	135.480.000	Meningkatnya kegiatan pimpinan yang memerlukan fasilitas dalam makan minum kegiatan jamuan tamu
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	518.968.000	547.693.000	28.725.000	Meningkatnya kegiatan pimpinan yang memerlukan fasilitas dalam makan minum kegiatan jamuan tamu
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	1.211.448.500	1.277.751.000	66.302.500	Banyak keperluan yang tidak terduga pada anggaran penghias rumah tangga
4	01	01	2.13	4	Penataan Organisasi				835.574.200	835.574.200	0	

						Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	1,3 Skor/ Nilai	1,3 Skor/ Nilai				
						Persentase pengelolaan tatalaksana	100 %	100 %				
						Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100 %	100 %				
						Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100 %	100 %				
						Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100 %	100 %				
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dok	2 Dok	405.697.800	405.697.800	0	-
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Lap	5 Lap	181.870.400	181.870.400	0	-
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dok	7 Dok	248.006.000	248.006.000	0	-
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.670.166.100	2.957.020.100	286.854.000	
						Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	100 %	100 %				
						Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	100 %	100 %				
						Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	100 %	100 %				

	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Lap	12 Lap	1.963.127.200	2.241.477.200	1.278.350.000	Penambahan Belanja Makan dan Minum Rapat serta Penambahan Perjadin KDH WKDH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Lap	12 Lap	457.712.400	466.216.400	8.504.000	Penambahan Belanja Souvenir berupa Plakat (Batu Aji)
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Lap	12 Lap	249.326.500	249.326.500	0	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar kebutuhan dana/pagu indikatif yang diberikan bersumber dari dana APBD adalah sebesar **Rp. 82.251.344.633,00,-** (Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan Pagu awal Renja 2024 sebesar **Rp. 76.464.770.933,00** ada penambahan pagu anggaran sebesar **Rp. 5.786.573.700,00**.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada penambahan pagu dari pagu awal sebesar **Rp. 52.935.837.433,00** menjadi **Rp.58.496.872.333,00**, ada penambahan pagu sebesar **Rp. 5.561.034.900,00**.
3. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terjadi penambahan pagu, dari pagu awal sebesar **Rp. 22.310.848.300,00** menjadi **Rp. 22.705.983.300,00**, ada penambahan pagu sebesar **Rp. 395.135.000,00**.
4. Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terjadi pengurangan pagu, dari pagu awal sebesar **Rp. 1.218.085.200,00** menjadi **Rp. 1.048.489.000,00**, ada pengurangan pagu sebesar **Rp. 169.596.200,00**.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini antara lain :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024;
2. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/ 68/ LHE/ P.Kin.As/ II/ ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;

3. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
5. Penyesuaian rincian belanja untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan tanpa harus mengubah pagu anggaran yang sudah tersedia;
6. Pada Bagian Pemerintahan, adanya penambahan pada Belanja Makan Minum Rapat untuk melaksanakan Kegiatan Rakor Tahunan, Rapat LPPD dan Kerjasama dan Fasilitasi Rapat lainnya;
7. Pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, adanya pergeseran pagu ke Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah karena adanya Pembubaran BIN sehingga perlu koordinasi ke Kemendagri dan PN Surabaya dan Usulan Forum Camat terkait BUMDES Pangan Pengendalian Inflasi;
8. Pada Bagian Hukum, adanya penambahan pada Belanja Kertas untuk Cetak Dokumen SK/Perbup/Perda dll serta penambahan pagu untuk Honorarium Tim Kuasa Hukum Tingkat Pertama (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi).
9. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, adanya penambahan untuk Kegiatan Wisuda Santri/santriwati TK/TPA se Kabupaten Banjar dan Penghargaan kepada ustazd/Ustazdah berprestasi (melaksanakan ibadah umroh untuk 2 orang) serta untuk Koordinasi Kegiatan Hibah;
10. Pada Bagian Administrasi Pembangunan, adanya pergeseran ke Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah karena untuk Kegiatan Monev Pembangunan dan Koordinasi ke Provinsi, Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Belanja Modal;
11. Pada Bagian Umum, adanya penambahan karena masih banyaknya

kebutuhan akan peningkatan kompetensi melalui Bimtek, Rehab dan Pemeliharaan Bangunan area sekitar Setda, Belanja Modal usulan dari Bagian Lingkup Setda, Pemeliharaan Gedung Iqra untuk menunjang

persiapan kegiatan MTQ Nasional Kalsel, Fasilitasi Kebutuhan Kegiatan Pimpinan, dan

12. Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, adanya penambahan Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Souvenir berupa Plakat (Batu Aji) serta Penambahan Perjadin KDH WKDH, dan Penambahan Belanja perjalanan dinas luar daerah untuk fasilitasi, koordinasi dan menunjang kegiatan yang dilaksanakan;
13. Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, karena adanya penambahan Belanja Makan Minum Rapat dan Biaya Konsultasi Penyusunan Dokumen Penjenjangan Kinerja Setda dan penyesuaian kekurangan honorarium pejabat pengelola keuangan;
14. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, adanya penambahan karena perlunya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pembahasan kebijakan PBJ.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yang disusun oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul saat ini. Rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 ini memberikan gambaran mengenai program kegiatan, sasaran, indikator kinerja, target, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Dalam Renja Perubahan tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan, sebagai berikut :

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
 1. Dilakukannya coaching clinic LPPD dan SPM dengan narasumber Kementerian Dalam Negeri.

2. Melakukan Asistensi penyusunan LPPD untuk seluruh Urusan Pemerintahan dengan mengundang Subbag Perencanaan beserta seluruh Bidang Terkait dari Perangkat Daerah.

3. Sebagian besar Perangkat Daerah sudah menyesuaikan Program Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga mempermudah Pengumpulan Data dan Penyajian Data Dukung.
4. Penggunaan Aplikasi Srikandi Dalam Menyampaikan Data Dukung LPPD.
5. Perangkat Daerah menyampaikan Data Dukung Tepat Waktu.
6. Koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD dan Tim Pereviu LPPD (APIP) Kabupaten Banjar.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membantu publikasi.
8. Adanya Instruksi Bupati Banjar untuk melakukan percepatan pengadaan barang/jasa.
9. Pembentukan Tim Pendamping untuk percepatan pengadaan barang/jasa.
10. Pembentukan Tim Pendamping untuk penilaian kinerja penyedia.
11. Tercapainya target kinerja pada sub kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan karena koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banjar, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai eksekutor dalam kelembagaan dan analisis jabatan.
12. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan narahubung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Sasaran fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dengan indikator Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana seluruhnya telah terpenuhi dan tercapai dengan baik hal menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh bagian organisasi dengan support semua perangkat daerah telah berhasil maksimal dalam pencapaian kinerja.
14. Adanya aturan dan ketentuan yang jelas dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana menjadi faktor utama keberhasilan, sehingga pelaksanaan pencapaian kinerja terukur dengan baik dan ada panduan yang nyata melalui aturan untuk

pelaksanaan kegiatan secara

baik, dan telah ditindaklanjuti dengan membuat pedoman tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

15. Koordinasi rutin berjalan dengan baik adanya komitmen dan kerjasama antar perangkat daerah.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja;
 1. Beberapa Perangkat Daerah ada yang belum mengakomodir Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam menjalankan Program dan Kegiatan sehingga tidak dapat diperoleh data untuk beberapa IKK dalam LPPD.
 2. Kesulitan memperoleh data lintas sektor untuk peningkatan capaian kinerja tertentu.
 3. Tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Teknis LPPD untuk seluruh Perangkat Daerah.
 4. Terjadi perbedaan persepsi antara Tim Penyusun LPPD dan Perangkat Daerah untuk memahami IKK, khususnya IKK yang tidak detail definisi operasionalnya pada Pedoman Umum Penyusunan LPPD.
 5. Kepatuhan OPD-OPD dalam pemanfaatan SPSE untuk e-Purchasing belum optimal terutama PPK dalam menginput kontrak dan penilaian kinerja penyedia.
 6. Tidak diinputnya Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung ke dalam non e-Tendering/e-Purchasing pada SPSE oleh PPK.
 7. Tidak adanya Tim Pendukung untuk PPK dalam pengadaan barang/jasa.
 8. Kurangnya jumlah JF Pengelola PBJ karena rendahnya minat ASN Kabupaten Banjar untuk berkarier menjadi JF Pengelola PBJ.
 9. Kedisiplinan PPK dalam pencatatan kontrak masih kurang.
 10. Masih belum maksimalnya internalisasi penerapan reformasi birokrasi dan SAKIP kepada perangkat daerah dan jajarannya secara menyeluruh.

11. Pemahaman pemberi layanan dan penerima layanan yang masih kurang sehingga masih terdapat tanggapan yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
12. Adanya perubahan nomenklatur ditengah penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan sehingga membuat waktu penyusunan menjadi terhambat.
13. Ada beberapa data jabatan pada dokumen analisa jabatan yang belum sesuai dan masih harus diperbaiki sebelum disampaikan ke Kementerian PAN RB terkait penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan.
14. Belum dipahaminya peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah atau masyarakat sehingga masih ada permasalahan terkait pembangunan yang bersifat lintas terkait tidak melibatkan Bagian Administrasi Pembangunan.
15. Masih terdapat perbedaan pemahaman kedudukan dan peran Bagian Administrasi Pembangunan dengan peran lain di perangkat lain terkait tugas dan fungsi Bagian Administrasi pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
16. Belum terpenuhinya perangkat atau alat yang dapat mempermudah Bagian Administrasi Pembangunan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kebutuhan data dilakukan secara manual sehingga tidak effesiensi dalam pemanfaatan waktu dan mungkin untuk terjadi pengambilan data yang salah.
17. Belum didukung dengan Sumber daya manusia yang bisa memahami dan menginterpretasikan peran Bagian Administrasi Pembangunan dan mampu secara mandiri untuk melaksanakan tugas /instruksi dengan baik.
18. Kondisi tertentu yang memerlukan koordinasi cepat terkendala kesibukan antar perangkat daerah, sehingga perlu penyesuaian waktu dan kondisi agar koordinasi dapat berjalan dengan baik.
19. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Lebih

Meningkat capaian kinerja.

20. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD berikutnya.
21. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya.
22. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD berikutnya.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar bagian-bagian;
- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
- Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar) ;
- Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Sebagai salah satu upaya perbaikan nilai SAKIP. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2025, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2025, serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang disusun ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2024, disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Banjar tahun 2024. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan.

Demikian Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Semoga Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik.

LAMPIRAN



BUPATI BANJAR

Nomor	: 000.7.2.4/663 / PPE-Bappedalitbang	Martapura, 11 Juli 2024
Sifat	: Penting	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepala Perangkat Daerah
Perihal	: Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja PD 2024	Se- Kabupaten Banjar di - Tempat

Dalam rangka merumuskan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berdasarkan hasil pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan Perangkat Daerah. Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) telah menyusun pagu indikatif Perubahan Renja menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan agenda penting lainnya di tahun 2024.

Berkenaan hal tersebut, disampaikan hal-hal berikut:

1. Pagu indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah sudah ditambahkan pada SIPD-RI
2. Perangkat Daerah melakukan input rincian belanja pagu indikatif yang disetujui TAPD, rincian Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana lampiran surat.
3. Melakukan perbaikan target kinerja menyesuaikan penambahan belanja dan juga rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.
4. Setelah Selesai Input Perubahan, Kepala Perangkat Daerah memvalidasi rincian belanja.
5. Jadwal input rincian belanja dilakukan sampai dengan tanggal **19 Juli 2024**, apabila tidak melakukan perbaikan di SIPD-RI sampai batas waktu tersebut maka akan diambil alih TAPD.
6. Rancangan Akhir Renja Perubahan sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Rankhir Perubahan Renja dan pagu indikatif disampaikan kepada Bidang Bappelitbang Mitra SKPD masing-masing paling lambat tanggal 11 Agustus 2024, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara kolektif.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 BUPATI BANJAR,
H. SAIDI MANSYUR S.I.Kom

Lampiran Surat

Nomor : 000.7.2.4/663/PPE-Bappedalitbang

Tanggal : 11 Juli 2024

PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2024**Sekretariat Daerah**

Sub Kegiatan	Pagu APBD 2024	Penambahan/ Pengurangan	Pagu Indikatif P- RKPD 2024	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.999.900	4.117.600	49.117.500	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Perangkat Daerah	24.999.900	8.246.600	33.246.500	SETUJU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	4.090.000	39.090.000	SETUJU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	TIDAK DISETUJUI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.974.781.000	665.794.000	2.640.575.000	SETUJU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.393.611.692	989.410.000	4.383.021.692	SETUJU
Pengadaan Mebel	1.359.035.000	188.000.000	1.547.035.000	SETUJU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.372.860.000	143.660.000	1.516.520.000	SETUJU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.394.000.000	98.400.000	4.492.400.000	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.870.300.000		1.870.300.000	TIDAK DISETUJUI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.309.936.000	330.104.000	4.640.040.000	SETUJU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	453.980.000	10.000.000	463.980.000	SETUJU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.678.000	27.240.000	448.918.000	SETUJU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	899.860.000	95.480.000	995.340.000	SETUJU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	518.968.000	28.725.000	547.693.000	SETUJU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.211.448.500	41.302.500	1.252.751.000	SETUJU
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	405.697.800		405.697.800	TIDAK DISETUJUI
Facilitasi Keprntokolan	1.963.127.200	278.350.000	2.241.477.200	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Facilitasi Komunikasi Pimpinan	457.712.400	8.504.000	466.216.400	SETUJU
Penataan Administrasi Pemerintahan	61.425.500	5.205.000	66.630.500	SETUJU
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	146.852.500		146.852.500	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	193.721.200	18.900.000	212.621.200	SETUJU
Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.585.040.600	93.750.000	16.678.790.600	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.429.100.000		2.429.100.000	SETUJU
Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	250.584.800	69.670.000	320.254.800	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Facilitasi Bantuan Hukum	350.000.000	-	350.000.000	SETUJU
Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	166.074.000	10.470.000	176.544.000	SETUJU
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	384.170.600	2.720.000	386.890.600	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	53.649.000	-	53.649.000	SETUJU, KECUALI TV
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	129.946.000	-	129.946.000	SETUJU, CEK ULANG
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15.441.000	-	15.441.000	SETUJU, CEK ULANG
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	207.805.000	112.900.000	320.705.000	SETUJU, KECUALI HONOR PBJ
Jumlah Total	46.085.805.592	3.235.038.700	49.320.844.292	



SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 188.4 / 26 /KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas yang terarah, terukur dan tepat waktu, perlu menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 2 -

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/156/PPE-Bappedalitbang, tanggal 14 Februari 2023, tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
 2. Ketua bertugas mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
 3. Sekretaris bertugas melakukan koordinasi internal Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
 4. Anggota:
 - a) mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disiapkan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024; dan
 - b) menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Maret 2023



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 188.4/ 26 /KUM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

NO	JABATAN FORMAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
9	Kepala Bagian Umum	Anggota
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Pelaporan	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
15	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		REKAPITULASI SMA-DELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024		

Original: 4 01 0 00 0 00 01 0000 Selected: Default

[illegible]

BANKING ACADEMY ONLINE UNIVERSITY PROGRAMS Catalog																
Course		Credits	Prerequisite	Term	Semester										Fall 2024	Spring 2025
					Fall 2023		Spring 2024		Summer 2024		Fall 2024		Spring 2025			
					Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section	Section		
101	101	3	101	Introduction to Banking	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 101-001	Sec: 101-002	Sec: 101-003	Sec: 101-004	Sec: 101-005	Sec: 101-006	Sec: 101-007	Sec: 101-008	Sec: 101-009	Sec: 101-010
102	102	3	102	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 102-001	Sec: 102-002	Sec: 102-003	Sec: 102-004	Sec: 102-005	Sec: 102-006	Sec: 102-007	Sec: 102-008	Sec: 102-009	Sec: 102-010
103	103	3	103	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 103-001	Sec: 103-002	Sec: 103-003	Sec: 103-004	Sec: 103-005	Sec: 103-006	Sec: 103-007	Sec: 103-008	Sec: 103-009	Sec: 103-010
104	104	3	104	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 104-001	Sec: 104-002	Sec: 104-003	Sec: 104-004	Sec: 104-005	Sec: 104-006	Sec: 104-007	Sec: 104-008	Sec: 104-009	Sec: 104-010
105	105	3	105	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 105-001	Sec: 105-002	Sec: 105-003	Sec: 105-004	Sec: 105-005	Sec: 105-006	Sec: 105-007	Sec: 105-008	Sec: 105-009	Sec: 105-010
106	106	3	106	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 106-001	Sec: 106-002	Sec: 106-003	Sec: 106-004	Sec: 106-005	Sec: 106-006	Sec: 106-007	Sec: 106-008	Sec: 106-009	Sec: 106-010
107	107	3	107	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 107-001	Sec: 107-002	Sec: 107-003	Sec: 107-004	Sec: 107-005	Sec: 107-006	Sec: 107-007	Sec: 107-008	Sec: 107-009	Sec: 107-010
108	108	3	108	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 108-001	Sec: 108-002	Sec: 108-003	Sec: 108-004	Sec: 108-005	Sec: 108-006	Sec: 108-007	Sec: 108-008	Sec: 108-009	Sec: 108-010
109	109	3	109	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 109-001	Sec: 109-002	Sec: 109-003	Sec: 109-004	Sec: 109-005	Sec: 109-006	Sec: 109-007	Sec: 109-008	Sec: 109-009	Sec: 109-010
110	110	3	110	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 110-001	Sec: 110-002	Sec: 110-003	Sec: 110-004	Sec: 110-005	Sec: 110-006	Sec: 110-007	Sec: 110-008	Sec: 110-009	Sec: 110-010
111	111	3	111	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 111-001	Sec: 111-002	Sec: 111-003	Sec: 111-004	Sec: 111-005	Sec: 111-006	Sec: 111-007	Sec: 111-008	Sec: 111-009	Sec: 111-010
112	112	3	112	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 112-001	Sec: 112-002	Sec: 112-003	Sec: 112-004	Sec: 112-005	Sec: 112-006	Sec: 112-007	Sec: 112-008	Sec: 112-009	Sec: 112-010
113	113	3	113	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 113-001	Sec: 113-002	Sec: 113-003	Sec: 113-004	Sec: 113-005	Sec: 113-006	Sec: 113-007	Sec: 113-008	Sec: 113-009	Sec: 113-010
114	114	3	114	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 114-001	Sec: 114-002	Sec: 114-003	Sec: 114-004	Sec: 114-005	Sec: 114-006	Sec: 114-007	Sec: 114-008	Sec: 114-009	Sec: 114-010
115	115	3	115	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 115-001	Sec: 115-002	Sec: 115-003	Sec: 115-004	Sec: 115-005	Sec: 115-006	Sec: 115-007	Sec: 115-008	Sec: 115-009	Sec: 115-010
116	116	3	116	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 116-001	Sec: 116-002	Sec: 116-003	Sec: 116-004	Sec: 116-005	Sec: 116-006	Sec: 116-007	Sec: 116-008	Sec: 116-009	Sec: 116-010
117	117	3	117	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 117-001	Sec: 117-002	Sec: 117-003	Sec: 117-004	Sec: 117-005	Sec: 117-006	Sec: 117-007	Sec: 117-008	Sec: 117-009	Sec: 117-010
118	118	3	118	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 118-001	Sec: 118-002	Sec: 118-003	Sec: 118-004	Sec: 118-005	Sec: 118-006	Sec: 118-007	Sec: 118-008	Sec: 118-009	Sec: 118-010
119	119	3	119	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 119-001	Sec: 119-002	Sec: 119-003	Sec: 119-004	Sec: 119-005	Sec: 119-006	Sec: 119-007	Sec: 119-008	Sec: 119-009	Sec: 119-010
120	120	3	120	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 120-001	Sec: 120-002	Sec: 120-003	Sec: 120-004	Sec: 120-005	Sec: 120-006	Sec: 120-007	Sec: 120-008	Sec: 120-009	Sec: 120-010
121	121	3	121	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 121-001	Sec: 121-002	Sec: 121-003	Sec: 121-004	Sec: 121-005	Sec: 121-006	Sec: 121-007	Sec: 121-008	Sec: 121-009	Sec: 121-010
122	122	3	122	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 122-001	Sec: 122-002	Sec: 122-003	Sec: 122-004	Sec: 122-005	Sec: 122-006	Sec: 122-007	Sec: 122-008	Sec: 122-009	Sec: 122-010
123	123	3	123	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 123-001	Sec: 123-002	Sec: 123-003	Sec: 123-004	Sec: 123-005	Sec: 123-006	Sec: 123-007	Sec: 123-008	Sec: 123-009	Sec: 123-010
124	124	3	124	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 124-001	Sec: 124-002	Sec: 124-003	Sec: 124-004	Sec: 124-005	Sec: 124-006	Sec: 124-007	Sec: 124-008	Sec: 124-009	Sec: 124-010
125	125	3	125	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 125-001	Sec: 125-002	Sec: 125-003	Sec: 125-004	Sec: 125-005	Sec: 125-006	Sec: 125-007	Sec: 125-008	Sec: 125-009	Sec: 125-010
126	126	3	126	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 126-001	Sec: 126-002	Sec: 126-003	Sec: 126-004	Sec: 126-005	Sec: 126-006	Sec: 126-007	Sec: 126-008	Sec: 126-009	Sec: 126-010
127	127	3	127	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 127-001	Sec: 127-002	Sec: 127-003	Sec: 127-004	Sec: 127-005	Sec: 127-006	Sec: 127-007	Sec: 127-008	Sec: 127-009	Sec: 127-010
128	128	3	128	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 128-001	Sec: 128-002	Sec: 128-003	Sec: 128-004	Sec: 128-005	Sec: 128-006	Sec: 128-007	Sec: 128-008	Sec: 128-009	Sec: 128-010
129	129	3	129	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 129-001	Sec: 129-002	Sec: 129-003	Sec: 129-004	Sec: 129-005	Sec: 129-006	Sec: 129-007	Sec: 129-008	Sec: 129-009	Sec: 129-010
130	130	3	130	Introduction to Banking Fundamentals	Prerequisite: None	Class: Banking Fundamentals	Sec: 130-001	Sec: 130-002	Sec: 130-003	Sec: 130-004	Sec: 130-005	Sec: 130-006	Sec: 130-007	Sec: 130-008	Sec: 130-009	Sec: 130-010

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Berkas		Unit		Bentuk Dana		Lokasi		Jumlah												Total 1-5	
								Tabel 11													
								Fasilitas					Nonfasilitas								
								Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Tanggung	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)				
1	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	1. Belanja Belanja Operasional	1.000.000.000					1.000.000.000									
2	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	2. Belanja Belanja Operasional	2.000.000.000					2.000.000.000									
3	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	3. Belanja Belanja Operasional	3.000.000.000					3.000.000.000									
4	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	4. Belanja Belanja Operasional	4.000.000.000					4.000.000.000									
5	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	5. Belanja Belanja Operasional	5.000.000.000					5.000.000.000									
6	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	6. Belanja Belanja Operasional	6.000.000.000					6.000.000.000									
7	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	7. Belanja Belanja Operasional	7.000.000.000					7.000.000.000									
8	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	8. Belanja Belanja Operasional	8.000.000.000					8.000.000.000									
9	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	9. Belanja Belanja Operasional	9.000.000.000					9.000.000.000									
10	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	10. Belanja Belanja Operasional	10.000.000.000					10.000.000.000									
11	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	11. Belanja Belanja Operasional	11.000.000.000					11.000.000.000									
12	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	12. Belanja Belanja Operasional	12.000.000.000					12.000.000.000									
13	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	13. Belanja Belanja Operasional	13.000.000.000					13.000.000.000									
14	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	14. Belanja Belanja Operasional	14.000.000.000					14.000.000.000									
15	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	15. Belanja Belanja Operasional	15.000.000.000					15.000.000.000									
16	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	16. Belanja Belanja Operasional	16.000.000.000					16.000.000.000									
17	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	17. Belanja Belanja Operasional	17.000.000.000					17.000.000.000									
18	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	18. Belanja Belanja Operasional	18.000.000.000					18.000.000.000									
19	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	19. Belanja Belanja Operasional	19.000.000.000					19.000.000.000									
20	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	20. Belanja Belanja Operasional	20.000.000.000					20.000.000.000									
21	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	21. Belanja Belanja Operasional	21.000.000.000					21.000.000.000									
22	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	22. Belanja Belanja Operasional	22.000.000.000					22.000.000.000									
23	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	23. Belanja Belanja Operasional	23.000.000.000					23.000.000.000									
24	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	24. Belanja Belanja Operasional	24.000.000.000					24.000.000.000									
25	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	25. Belanja Belanja Operasional	25.000.000.000					25.000.000.000									
26	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	26. Belanja Belanja Operasional	26.000.000.000					26.000.000.000									
27	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	27. Belanja Belanja Operasional	27.000.000.000					27.000.000.000									
28	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	28. Belanja Belanja Operasional	28.000.000.000					28.000.000.000									
29	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	29. Belanja Belanja Operasional	29.000.000.000					29.000.000.000									
30	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	30. Belanja Belanja Operasional	30.000.000.000					30.000.000.000									
31	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	31. Belanja Belanja Operasional	31.000.000.000					31.000.000.000									
32	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	32. Belanja Belanja Operasional	32.000.000.000					32.000.000.000									
33	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	33. Belanja Belanja Operasional	33.000.000.000					33.000.000.000									
34	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	34. Belanja Belanja Operasional	34.000.000.000					34.000.000.000									
35	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	35. Belanja Belanja Operasional	35.000.000.000					35.000.000.000									
36	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	36. Belanja Belanja Operasional	36.000.000.000					36.000.000.000									
37	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	37. Belanja Belanja Operasional	37.000.000.000					37.000.000.000									
38	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	38. Belanja Belanja Operasional	38.000.000.000					38.000.000.000									
39	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	39. Belanja Belanja Operasional	39.000.000.000					39.000.000.000									
40	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	40. Belanja Belanja Operasional	40.000.000.000					40.000.000.000									
41	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	41. Belanja Belanja Operasional	41.000.000.000					41.000.000.000									
42	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	42. Belanja Belanja Operasional	42.000.000.000					42.000.000.000									
43	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	43. Belanja Belanja Operasional	43.000.000.000					43.000.000.000									
44	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	44. Belanja Belanja Operasional	44.000.000.000					44.000.000.000									
45	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	45. Belanja Belanja Operasional	45.000.000.000					45.000.000.000									
46	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	46. Belanja Belanja Operasional	46.000.000.000					46.000.000.000									
47	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	47. Belanja Belanja Operasional	47.000.000.000					47.000.000.000									
48	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	48. Belanja Belanja Operasional	48.000.000.000					48.000.000.000									
49	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	49. Belanja Belanja Operasional	49.000.000.000					49.000.000.000									
50	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	50. Belanja Belanja Operasional	50.000.000.000					50.000.000.000									
51	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	51. Belanja Belanja Operasional	51.000.000.000					51.000.000.000									
52	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	52. Belanja Belanja Operasional	52.000.000.000					52.000.000.000									
53	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	53. Belanja Belanja Operasional	53.000.000.000					53.000.000.000									
54	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	54. Belanja Belanja Operasional	54.000.000.000					54.000.000.000									
55	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	55. Belanja Belanja Operasional	55.000.000.000					55.000.000.000									
56	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	56. Belanja Belanja Operasional	56.000.000.000					56.000.000.000									
57	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	57. Belanja Belanja Operasional	57.000.000.000					57.000.000.000									
58	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	58. Belanja Belanja Operasional	58.000.000.000					58.000.000.000									
59	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	59. Belanja Belanja Operasional	59.000.000.000					59.000.000.000									
60	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	60. Belanja Belanja Operasional	60.000.000.000					60.000.000.000									
61	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	61. Belanja Belanja Operasional	61.000.000.000					61.000.000.000									
62	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	62. Belanja Belanja Operasional	62.000.000.000					62.000.000.000									
63	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	63. Belanja Belanja Operasional	63.000.000.000					63.000.000.000									
64	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	64. Belanja Belanja Operasional	64.000.000.000					64.000.000.000									
65	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	65. Belanja Belanja Operasional	65.000.000.000					65.000.000.000									
66	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	66. Belanja Belanja Operasional	66.000.000.000					66.000.000.000									
67	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	67. Belanja Belanja Operasional	67.000.000.000					67.000.000.000									
68	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	68. Belanja Belanja Operasional	68.000.000.000					68.000.000.000									
69	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	69. Belanja Belanja Operasional	69.000.000.000					69.000.000.000									
70	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	70. Belanja Belanja Operasional	70.000.000.000					70.000.000.000									
71	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	71. Belanja Belanja Operasional	71.000.000.000					71.000.000.000									
72	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	72. Belanja Belanja Operasional	72.000.000.000					72.000.000.000									
73	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	73. Belanja Belanja Operasional	73.000.000.000					73.000.000.000									
74	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	74. Belanja Belanja Operasional	74.000.000.000					74.000.000.000									
75	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	75. Belanja Belanja Operasional	75.000.000.000					75.000.000.000									
76	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	76. Belanja Belanja Operasional	76.000.000.000					76.000.000.000									
77	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	77. Belanja Belanja Operasional	77.000.000.000					77.000.000.000									
78	81	01	211	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	78. Belanja Belanja Operasional	78.000.000.000					78.000.000.000									
79	81	01	214	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	79. Belanja Belanja Operasional	79.000.000.000					79.000.000.000									
80	81	01	213	0002	Pembelian Belanja Bahan dan Jasa Lain-lain	80. Belanja Belanja Operasional	80.000.000.0														

[illegible]

Sekretariat DPRD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2024 menyesuaikan dengan Perubahan RKPD/Renja SKPD dan Perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun terjadinya perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar karena adanya perubahan Renja SKPD dan Perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dilakukan untuk beberapa alasan utama. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Adanya Review Renstra Perubahan Kedua Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 dari hasil Rapat Internal Monitoring Terhadap Progres Capaian Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra yang diselenggarakan pada Jumat, 31 Mei 2024 bahwa perlu menetapkan target kinerja yang dapat dicapai, menantang, dan realistis dari hasil analisis capaian kinerja sebelumnya.
2. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024.
3. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
5. Terdapat penambahan sub kegiatan yaitu sug kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
6. Perbaikan Kesalahan dan Keterlambatan Program: Terkadang, terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam pelaksanaan program dan proyek yang memerlukan perbaikan anggaran untuk memastikan kelanjutan dan penyelesaian yang efektif.

Penyesuaian Renja SKPD bertujuan untuk menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal dan responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Dan Perubahan APBD bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,

sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.

1.2 . Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
 26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
 27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 30);
 29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
 30. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx (belum diberi bag hukum) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan rencana

kegiatan baik itu perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah:

- a. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga terwujudnya sinergitas dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024;
- b. Sebagai *instrument* akuntabilitas di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan laporan kinerjanya.
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Dewan yang mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan

Berisi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2024. Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar triwulan II tahun 2024, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Perubahan indikator kinerja
2. Jumlah program dan jumlah kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
4. Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar melaksanakan satu urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang serta 2 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 81,297,481,689,-

Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 performa dari masing-masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar masih berjalan (sampai dengan triwulan II). Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*).

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar melakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024, pokok-pokok materi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II dapat diuraikan dalam table 2.1 sebagai berikut:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
Sekretariat DPRD

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD
				Targ et	Realisa si	Devia si	Target (Rp)	Targ et (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Devia si		
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.021.526.789	50,23	50,23	0,00	56.714.751.861	71,77	38.060.007.728	48,16	23,61		
1.1	4.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	52,56	52,56	0,00	18.239.500	52,11	4.210.983	12,03	40,08	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN PERENCANAAN
1.2	4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.168.279.587	49,92	49,92	0,00	2.642.048.516	51,12	2.020.630.693	39,10	12,02	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN
1.3	4.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.186.086.000	49,92	49,92	0,00	1.274.936.000	58,32	864.664.931	39,55	18,77	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN

													TATA USAHA DAN KEPEGAWAI AN
1.4	4.02.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.615.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupa ten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN
1.5	4.02.01.2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.125.200	49,9 2	49,92	0,00	4.562.600	50,0 0	0	0,00	50,00	Kabupa ten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN
1.6	4.02.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.000.000	33,2 8	33,28	0,00	160.000.000	100, 00	20.980.000	13,11	86,89	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAI AN
1.7	4.02.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.115.000	49,9 2	49,92	0,00	97.115.000	100, 00	0	0,00	100,0 0	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN PERLENGKA PAN DAN RUMAH TANGGA

1.8	4.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.259.409.259	49,92	49,92	0,00	2.234.884.259	98,91	293.862.500	13,01	85,91	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
1.9	4.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	653.577.000	49,92	49,92	0,00	645.777.000	98,81	6.245.000	0,96	97,85	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
1.1	4.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.503.000	49,92	49,92	0,00	33.251.500	50,00	25.758.417	38,73	11,27	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
1.11	4.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.705.000	49,92	49,92	0,00	40.705.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

													DOKUMENTA SI DAN PERPUSTAK AAN
1.1 2	4.02.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.528.344.01 7	49,9 2	49,92	0,00	3.666.750.0 00	80,9 7	2.106.105.8 69	46,51	34,46	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1.1 3	4.02.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.809.632	49,9 2	49,92	0,00	203.904.816	50,0 0	149.087.404	36,56	13,44	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN PERLENGKA PAN DAN RUMAH TANGGA
1.1 4	4.02.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.790.000	49,9 2	49,92	0,00	134.650.000	54,7 8	133.226.180	54,20	0,58	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN PERLENGKA PAN DAN RUMAH TANGGA
1.1 5	4.02.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	442.780.000	49,9 2	49,92	0,00	238.040.000	53,7 6	154.132.083	34,81	18,95	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN - SUB BAGIAN PERLENGKA

		Operasional atau Lapangan											PAN DAN RUMAH TANGGA
1.1 6	4.02.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.150.000	49,9 2	49,92	0,00	94.910.000	54,8 1	26.657.750	15,40	39,42	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
1.1 7	4.02.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.768.034.089	49,9 2	49,92	0,00	1.556.358.090	88,0 3	224.058.935	12,67	75,35	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
1.1 8	4.02.01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan	1.064.280.000	49,9 2	49,92	0,00	565.750.000	53,1 6	205.679.120	19,33	33,83	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1.1 9	4.02.01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.092.798.505	49,9 2	49,92	0,00	15.470.574.576	53,1 8	13.614.954.625	46,80	6,38	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA

													USAHAAN KEUANGAN
1.2	4.02.01.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	547.725.000	100,00	100,00	0,00	534.045.000	97,50	0	0,00	97,50	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN
1.21	4.02.01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30.064.400.000	49,92	49,92	0,00	27.098.250.004	90,13	18.209.753.238	60,57	29,56	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.275.954.900	49,92	49,92	0,00	1.604.705.400	70,51	373.509.700	16,41	54,10		
2.1	4.02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	574.965.800	49,92	49,92	0,00	422.553.800	73,49	10.523.700	1,83	71,66	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

2.2	4.02.02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	257.250.000	49,92	49,92	0,00	257.250.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
2.3	4.02.02.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.650.000	49,92	49,92	0,00	4.650.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN RISALAH DAN PELAPORAN SEKRETARIAT
2.4	4.02.02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	1.178.512.500	49,92	49,92	0,00	785.675.000	66,67	253.240.000	21,49	45,18	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN PERSIDANGAN

2.5	4.02.02.2.08.002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6.850.000	49,92	49,92	0,00	6.850.000	100,00	4.746.000	69,28	30,72	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN RISALAH DAN PELAPORAN SEKRETARIAT
2.6	4.02.02.2.08.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.726.600	49,92	49,92	0,00	1.726.600	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN - SUB BAGIAN PERSIDANGAN
2.7	4.02.02.2.08.004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	252.000.000	49,92	49,92	0,00	126.000.000	50,00	105.000.000	41,67	8,33	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN
Jumlah			81.297.481.689	50,22	50,22		58.319.457.261	71,74	38.433.517.428	47,28			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan ada yang mengalami penurunan anggaran tetapi angkanya tidak terlalu besar. Secara rinci kondisi perubahan Renja adalah sebagai berikut:

3.1 Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif 2 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2023 semula adalah sebesar Rp 81,297,481,689 berubah menjadi Rp 101,947,855,600. Pada perubahan Rencana Kerja tahun 2024 bertambah satu kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk memfasilitasi Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

3.1.1 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 20,650,373,911,- adapun kegiatan yg mengalami perubahan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami penambahan anggaran, yang awalnya sebesar Rp 7,645,653,276 menjadi Rp 9,533,713,276,-. Pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertambah Rp 282.529.000,- yang digunakan untuk membeli sofa di ruangan Pimpinan DPRD. Pada sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor bertambah Rp 1.180.000,- untuk honorarium PPK. Pada sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan bertambah Rp 12.667.000,- untuk cetak map dan pembuatan stempel.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang awalnya tidak ada kemudian ditambahkan di perubahan dengan anggaran sebesar Rp 5,302,520,000,- untuk membeli mobil dinas Pimpinan DPRD.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengalami penambahan anggaran, yang awalnya sebesar Rp 2,629,754,089,- menjadi Rp 2,789,548,000,-. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berkurang sebesar Rp 68.760.000,- karena terdapat 2 mobil dinas yang dihibahkan. Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bertambah sebesar Rp 228.553.911,- karena menyesuaikan luas bangunan berdasarkan perhitungan dari asset.
- d. Kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 271.410.000,- pada sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD yaitu untuk memfasilitasi pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD periode 2024-2029.

- e. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD mengalami penambahan anggaran, yang awalnya sebesar Rp 30,064,400,000,- menjadi Rp 43,364,400,000,- untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi anggota dan pimpinan DPRD.

3.1.2 Adapun alasan dilakukan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 disebabkan oleh hal sebagai berikut:

- a. Adanya Review Renstra Perubahan Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 tanggal 8 Juli 2024 dari hasil Rapat Internal Monitoring Terhadap Progres Capaian Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra yang diselenggarakan pada Jumat, 31 Mei 2024 bahwa perlu menetapkan target kinerja yang dapat dicapai, menantang, dan realistis dari hasil analisis capaian kinerja sebelumnya;
- b. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang tanggal 3 Juni 2024 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2024;
- c. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/89/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
- d. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- e. Penambahan kegiatan untuk mengakomodir Kendaraan Dinas Jabatan dimana kendaraan dinas jabatan tersebut akan digunakan oleh Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar;
- f. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan ATK, bahan logistik dan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran;
- g. Penambahan untuk mengakomodir kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD untuk memfasilitasi dan mendampingi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
- h. Penambahan untuk mengakomodir kegiatan layanan administrasi DPRD untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Rumusan rencana perubahan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
								Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	4					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	4	02				Sekretariat DPRD				81.297.481.689	101.447.855.600	20.650.373.911	
	4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas dan Persentase fasilitasi pelaksanaan reses			2.275.954.900	2.275.954.900	-	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda			832.215.800	832.215.800	-	
	4	02	02	2.01	02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			574.965.800	574.965.800	-	
	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			257.250.000	257.250.000	-	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD			1.183.162.500	1.183.162.500	-	
	4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			4.650.000	4.650.000	-	
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			1.178.512.500	1.178.512.500	-	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD			260.576.600	260.576.600	-	
	4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			6.850.000	6.850.000	-	
	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah			1.726.600	1.726.600	-	
	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			252.000.000	252.000.000	-	
	4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			79.021.526.789	101.447.855.600	-	

	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000	35.000.000	-	
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.000.000	35.000.000	-	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana			7.374.106.287	7.374.106.287	-	
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.168.279.587	5.168.279.587	-	
	4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.186.086.000	2.186.086.000	-	
	4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.615.500	10.615.500	-	
	4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			9.125.200	9.125.200	-	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas			160.000.000	160.000.000	-	
	4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			160.000.000	160.000.000	-	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran			7.645.653.276	9.642.029.276	1.996.376.000	
	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			97.115.000	97.115.000	-	
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			2.259.409.259	2.541.938.259	282.529.000	Untuk memfasilitasi Pimpinan DPRD
	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			653.577.000	654.757.000	1.180.000	Untuk honorarium PPK

	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			66.503.000	79.170.000	12.667.000	Terdapat permintaan cetak map dan stempel
	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			40.705.000	40.705.000	-	
	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			4.528.344.017	6.228.344.017	1.700.000.000	Untuk memfasilitasi kegiatan Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.302.520.000	5.302.520.000		
	4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.302.520.000	5.302.520.000		Untuk memfasilitasi mobil dinas Pimpinan DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pelayanan perkantoran			407.809.632	407.809.632	-	
	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			407.809.632	407.809.632	-	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara			2.629.754.089	2.789.548.000	159.793.911	
	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			245.790.000	245.790.000	-	
	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			442.780.000	374.020.000	(68.760.000)	Karena ada 2 mobil yang dihibahkan
	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya			173.150.000	173.150.000	-	
	4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1.768.034.089	1.996.588.000	228.553.911	Menyesuaikan luas bangunan berdasarkan perhitungan dari aset
	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitas bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD			1.064.280.000	1.064.280.000	-	

	4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan			1.064.280.000	1.064.280.000	-	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase aparaturnya memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas			29.640.523.505	29.911.933.505	271.410.000	
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD			29.092.798.505	29.092.798.505	-	
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			547.725.000	819.135.000	271.410.000	Untuk memfasilitasi pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2024-2029
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD			30.064.400.000	42.484.674.000	12.420.274.000	
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			30.064.400.000	42.484.674.000	12.420.274.000	Untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan Perubahan Renja maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar telah memperhatikan prioritas sub kegiatan mana saja yang dilakukan perubahan.
2. Dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar secara umum ada pengurangan anggaran secara signifikan, yang mana perubahan anggaran tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya pada Renja 2024.
3. Perubahan Renja disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2026.
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun 2024.
5. Jika nanti pada pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini terdapat kekurangan anggaran maka Pengguna Anggaran dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya kebutuhan anggaran tersebut dan kemungkinan untuk dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya (tahun 2025).

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2024 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:
 - Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
 - Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024.
 - Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2024.
2. Saat Perubahan Renja ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.

3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan

4.3 Rencana tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Agar segenap bidang segera melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat tidak ada pengurangan anggaran pada bidang teknis.
2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan

Demikian Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 disusun. Kami menyadari bahwa Perubahan Renja yang kami susun ini jauh dari kata sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2024 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik kepada Anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat tersusun.

Perubahan Renja Bappedalitbang tahun 2024 Kabupaten Banjar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappedalitbang Kabupaten Banjar.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024. Semoga dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode sisa tahun anggaran yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan Renja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 disusun dengan berdasar pada dokumen Reviu Renstra Bappedalitbang 2021 - 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 , sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbang serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu juga berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Perubahan Target Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada masing-masing Bidang sekaligus sebagai sarana pengendalian pada Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam sisa tahun pelaksanaan berjalan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematik Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini akan menguraikan tentang kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Bappedalitbang) sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappedalitbang pada tahun 2024 mengampu 2 urusan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Berdasar urusan yang diampu, Bappedalitbang mendukung pencapaian Misi Keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu **“Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif”**

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama yaitu **“Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas”** sebanyak 2 (dua) indikator yakni :

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 target 78 dengan definisi operasional : penilaian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang diukur melalui 4 (empat) aspek penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Bappedalitbang, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan definisi operasional : Penerapan Hasil Penelitian dan Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banjar oleh seluruh stakeholders dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar dan pihak lainnya, guna mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 2. 1 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	78	-
2		Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100%	-

Sumber : Perubahan Kedua Renstra 2021-2026, (2024)

Sampai dengan triwulan II untuk pelayanan Kinerja Bappedalitbang Kabupaeten Banjar berdasarkan target kinerja belum ada yang tercapai dikarenakan akan tercapai pada Triwulan IV.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021 - 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah .
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Maka sesuai urusan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bappedalitbang Kabupaten Banjar yaitu urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan, serta sesuai tugas dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten Banjar secara khusus mendukung tercapainya misi ke 4 yaitu **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**. Dengan tujuan pada Perubahan Kedua Renstra yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja dengan sasaran Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas yang diukur melalui 2 indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Untuk mendukung tercapainya hal-hal tersebut di atas maka pada tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Banjar telah menetapkan 4 program, 18 kegiatan dan 57 sub kegiatan dengan total pagu dana murni sebesar **Rp. 14.659.879.356,- (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rincian Belanja Bappedalitbang Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Murni
I	BELANJA DAERAH	Rp. 14.659.879.356
1	BELANJA OPERASI	Rp. 14.133.041.356
1.1	Belanja Pegawai	Rp. 6.865.121.806
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.267.919.550
2	BELANJA MODAL	Rp. 526.838.000
2.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 526.838.000
	JUMLAH BELANJAR	Rp. 14.659.879.356

Sumber : DPA Bappedalitbang Tahun 2024, (2024)

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, selengkapnya bisa dilihat tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 3 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.659.879.356					
BIDANG URUSAN PERENCANAAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	93	0	0	0	Rp 10.299.627.756	Rp 5.806.846.924	Rp 2.216.416.202	38,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Kesibukan unit kerja yang lain sehingga kesulitan dalam rapat internal 2. Kurangnya sdm yang berpengalaman di bagian perencanaan 3. Banyaknya pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan menimbulkan dokumen terkadang tidak berkualitas 4. Kendala dalam penginputan aplikasi yang terkadang mengalami gangguan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Koordinasi yang kuat didalam bagian perencanaan 3. Bahan/data pendukung dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang mudah didapatkan 4. Koordinasi unit kerja yang terjalin sangat baik sehingga memudahkan pekerjaan bagian perencanaan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	0	0	0	Rp 57.000.000	Rp 17.664.000	Rp 12.029.500	68,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Kesibukan unit kerja yang lain sehingga kesulitan dalam rapat internal 2. Kurangnya sdm yang berpengalaman di bagian perencanaan 3. Banyaknya pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan menimbulkan dokumen terkadang tidak berkualitas 4. Kendala dalam penginputan aplikasi yang terkadang mengalami gangguan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Koordinasi yang kuat didalam bagian perencanaan 3. Bahan/data pendukung dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang mudah didapatkan 4. Koordinasi unit kerja yang terjalin sangat baik sehingga memudahkan pekerjaan bagian perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	1	100	Rp 20.000.000	Rp 5.645.000	Rp 3.100.000	54,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Terkendalanya beberapa aplikasi perencanaan diawal tahun yang belum siap 2. Banyaknya pekerjaan di bagian perencanaan membuat tertundanya penyusunan dokumen Renja 2025 3. Standar Harga yang berbeda dengan tahun sebelumnya membuat kesulitan dalam penginputan rincian 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											4. Aplikasi SIPD RI yang lambat membuat penginputan tidak sesuai jadwal 5. Terkendalanya pelaksanaan Rapat untuk pembahasan Dokumen Renja 2025 dengan unit kerja dikarenakan kesibukan unit kerja Faktor Pendukung: 1. Tersedianya data untuk penyusunan tabel keselarasan, IKU dan Perjanjian Kinerja 2. Koordinasi yang terjalin baik antar unit kerja di internal Bappedalitbang.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	1	100	Rp 3.000.000	Rp 2.193.000	Rp 1.013.500	46,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. SSH yang baru membuat penyusunan RKA manual terhambat dikarenakan diperlukan penyesuaian berulang kali 2. Tidak bisa terlaksananya rapat pembahasan RKA 2025 karena kesibukan unit kerja 3. Aplikasi SIPD RI yang lamban Faktor Pendukung: 1. koordinasi unit kerja Bappedalitbang yang terjalin dengan baik 2. Adanya acuan atau contoh terkait penyusunan RKA manual
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	0	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat ini sub kegiatan ini Faktor Pendukung: faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	0	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat ini sub kegiatan ini Faktor Pendukung: faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	0	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat ini sub kegiatan ini Faktor Pendukung: faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	100	Rp 10.000.000	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	100,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Beberapa Data LPPD yang belum rilis menghambat penyusunan LPPD 2. Pemahaman yang berbeda terkait data LPPD membuat penyesuaian Faktor Pendukung: 1. Data Penyusunan LKPJ dan LKjIP yang cukup lengkap mempermudah penyusunan dokumen 2. Kerjasama yang baik diinternal sub bagian perencanaan maupun semua unit kerja lingkup Bappedalitbang, sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	7	7	100	Rp 15.000.000	Rp 4.326.000	Rp 2.416.000	55,8	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Waktu pelaksanaan Rapat Evaluasi yang tidak sesuai jadwal karena kesibukan dari masing-masing unit kerja di awal tahun sehingga diubah menjadi Desk Faktor Pendukung: 1. Tersedianya data tahun n-1 untuk bahan evaluasi 2. Koordinasi antar unit kerja diinternal Bappedalitbang yang terjalin baik, sehingga memudahkan penjadwalan ulang jadwal rapat evaluasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	0	0	0	Rp 6.872.331.806	Rp 3.712.522.924	Rp 1.254.369.056	33,8	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Terdapat penyesuaian aplikasi baru yaitu SIPD Penatausahaan RI Faktor Pendorong : Koordinasi yang baik dengan BPKAD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	136	136	100	Rp 6.731.331.806	Rp 3.636.133.924	Rp 1.200.230.056	33,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Penyesuaian dengan aplikasi SIPD versi terbaru dengan penggabungan SPM dan Menunggu Pengumpulan Rekap Absen atas Pemotongan dari TPP Faktor Pendukung: Telah dilakukan bimtek untuk aplikasi SIPD untuk pencairan Gaji dan TPP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	6	6	100	Rp 125.000.000	Rp 64.350.500	Rp 44.125.000	68,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Masih Penyesuaian dalam Penggunaan Aplikasi SIPD versi baru dan Penggunaan Fitur Baru di SIPD Faktor Pendukung: Sumber Daya Manusia yang baik sehingga Penatausahaan dan Pelaksanaan verifikasi keuangan dapat berjalan dengan baik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	100	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 6.800.000	85,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Belum terdeteksi lagi faktor penghambat atas sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Data Keuangan Sudah Diarsipkan dengan Baik sehingga bisa selalu dipergunakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	6	6	100	Rp 8.000.000	Rp 4.038.500	Rp 3.214.000	79,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Masih ada penyesuaian dalam penginputan data pada aplikasi keuangan yaitu SIPD Penatausahaan Faktor Pendukung:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Pelaksana dan bendahara sudah terbiasa menggunakan Aplikasi SIPD Penatausahaan
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	0	0	0	Rp 7.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.904.000	97,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1 .Jadwal rekonsiliasi yang tertunda 2.Keterlambatan proses mutasi antar SKPD Faktor Pendorong : 1. Koordinasi yang baik dengan bidang Aset 2.Inventaris BMD Tepat Waktu
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	4	2	2	100	Rp 7.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.904.000	97,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Alur administrasi pengurusan berkas yang rumit Faktor Pendukung: Data BMD dan Koordinasi dengan bidang yang intens dan baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Peragkat Daerah yang Medapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	0	0	Rp 135.000.000	Rp 41.000.000	Rp 10.458.528	25,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik 3. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	7	7	100	Rp 135.000.000	Rp 41.000.000	Rp 10.458.528	25,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. belum ada kepastian dari penyelenggara bimtek mengenai jadwal bimteknya 2. ketidak siapan peserta bimtek dalam mengikuti kegiatan bimtek atau jadwal kegiatan bimtek dari penyedia tidak sesuai dengan jadwal peserta Faktor Pendukung: 1.banyaknya penawaran bimtek untuk asn bappedalitbang 2. sudah terjalin hubungan baik dengan penyedia bimtek 3. banyak tersedia webinar gratis dapat di ikuti asn bappeda litbang untuk meningkatkan kompetensi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	100	0	0	0	Rp 710.863.100	Rp 441.830.000	Rp 346.362.473	78,4	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik 3. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2	2	100	Rp 12.000.000	Rp 6.245.000	Rp 6.245.000	100,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: up yang baru keluar di pertengahan hingga akhir bulan penrapan aplikasi baru dalam penata usahaan keuangan setiap pemesanan barang harus menggunakan ecatalog Faktor Pendukung: Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga, kebutuhan pembelian barang di bulan januari masih belum terlalu mendesak

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	2	2	100	Rp 11.999.500	Rp 6.112.500	Rp 6.093.000	99,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Setiap pemesanan barang harus menggunakan ecatalog barang barang tidak semua tersedia di ecatalog Faktor Pendukung: Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga Untuk kebutuhan pembelian sesuai rencana di DPA di bulan maret
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	2	2	100	Rp 18.000.000	Rp 9.324.500	Rp 9.324.500	100,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Terdapat beberapa barang yang dibutuhkan di e-katalog tidak sesuai dengan yang dianggarkan di DPA Tidak sesuai rencana yang ada di DPA Faktor Pendukung: Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga, kebutuhan pembelian barang di bulan januari masih belum terlalu mendesak
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	2	2	100	Rp 18.863.600	Rp 11.148.000	Rp 7.395.200	66,3	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Permintaan cetak digital printing dan cetak banner tidak sesuai di DPA Faktor Pendukung: Adanya hubungan baik dengan penyedia Harga barang cetak di pasar sesuai dengan yang ada di DPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	6	100	Rp 650.000.000	Rp 409.000.000	Rp 317.304.773	77,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Undangan rapat yang dijadwalkan di waktu yang bersamaan sehingga salah satu nya tidak dapat dihadiri. Rapat dadakan atau tidak terencana menyebabkan tidak dapat melakukan pemesanan melalui e catalog Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk meningkatkan pencapaian target kinerja dan produktivitas ASN, sudah terjalin hubungan yang baik dan kerja sama dengan pihak ke 3.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	100	0	0	0	Rp 567.838.000	Rp 546.338.000	Rp 3.750.000	0,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasarana yang sangat memadai 2. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik 3. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar
Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	59	0	0	0	Rp 535.838.000	Rp 535.838.000	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kebutuhan barang tidak sesuai dengan barang-barang yang ada di DPA harga barang yang dapat naik bisa melebihi harga DPA tidak semua barang di DPA terdaftar di ecatalog Faktor Pendukung: Dukungan pimpinan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin di bappedalitbang, pencatatan kartu inventaris barang yang lengkap.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	100	Rp 32.000.000	Rp 10.500.000	Rp 3.750.000	35,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Keadaan gudang tidak terpantau Faktor Pendukung: Sewa gudang yang berlangsung beberapa tahun dan sudah terjalin hubungan dengan baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	100	0	0	0	Rp 1.393.998.000	Rp 687.980.000	Rp 351.281.978	51,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik 3. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	6	6	100	Rp 4.000.000	Rp 2.850.000	Rp 2.850.000	100,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Surat yang datang bersifat segera secara mendadak di hari H Faktor Pendukung: Kemudahan pembelian materai melalui kantor pos dengan sistem non tunai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	6	100	Rp 189.998.000	Rp 104.725.000	Rp 73.009.484	69,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Terkadang lupa mematikan elektronik seperti ac, lampu, komputer dan lainnya Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut 2. Pembayaran yang langsung dan tepat waktu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	6	100	Rp 1.200.000.000	Rp 580.405.000	Rp 275.422.494	47,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Pencairan untuk Media Online di lakukan di Maret (ub. Januari dan februari) sehingga realisasi keuangan belum maksimal Faktor Pendukung: Kinerja pelayanan dari setiap individu sangat maksimal
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	100	0	0	0	Rp 555.596.850	Rp 355.512.000	Rp 234.260.667	65,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. Sarana Prasana yang sangat memadai 2. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik 3. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	100	Rp 38.990.000	Rp 21.000.000	Rp 16.827.000	80,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi Faktor Pendukung: Terjaganya realisasi yang baik dengan pihak penyedia Kewajiban pemegang barang dalam memelihara barang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	19	19	100	Rp 316.660.000	Rp 177.000.000	Rp 110.590.567	62,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi Faktor Pendukung: Didukung adanya hubungan baik dengan penyedia Kewajiban pemegang barang dalam memelihara barang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	100	Rp 119.952.000	Rp 119.952.000	Rp 85.133.100	71,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi dan harga HSB tidak sesuai dengan pasar Faktor Pendukung: Adanya hubungan baik dengan penyedia
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	40	40	100	Rp 79.994.850	Rp 37.560.000	Rp 21.710.000	57,8	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi Faktor Pendukung: Komitmen dan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU	100	0	0	0	Rp 2.379.351.600	Rp 1.314.871.000	Rp 672.665.890	51,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Perubahan Kebijakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Faktor Pendorong: Koordinasi yang baik, antara SKPD, bidang mitra sehingga proses perencanaan daerah bisa berjalan sesuai jadwal
	PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	100	0	0	0						Faktor Penghambat : masih adanya Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan tidak melihat Renstra Faktor Pendorong: adanya asistensi dari bidang mitra sehingga proses perencanaan dapat dikawal dengan baik
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu	100	0	0	0	Rp 1.808.564.600	Rp 1.052.148.000	Rp 439.675.590	41,8	Memenuhi Kriteria	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	1	10	Rp 36.914.000	Rp 36.914.000	Rp 15.477.000	41,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Prasarana yang masih belum lengkap sehingga pada saat pelaksanaan terdapat beberapa kendala - Terbatasnya waktu diskusi sehingga tidak efektif dalam menggali usulan dan permasalahan Faktor Pendukung: - Panitia yang saling bekerja sama dan solid
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	1	100	Rp 32.606.000	Rp 32.606.000	Rp 28.555.000	87,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Waktu diskusi yang kurang sehingga masih belum semua dapat teridentifikasi Faktor Pendukung: - Regulasi teknis yang jelas terkait pelaksanaan Forum PD - Koordinasi yang baik antar Tim di Bappeda
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	2	2	100	Rp 311.647.000	Rp 311.647.000	Rp 284.856.500	91,4	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Terdapat kendala teknis pada saat pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: Panitia Pelaksana yang bekerja maksimal
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	0	0	100	Rp 1.427.397.600	Rp 670.981.000	Rp 110.787.090	16,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Tidak semua data indikator utama pembangunan yang ada di RPJPD memiliki baseline data untuk level kabupaten - Masih terdapat kesalahan teknis penginputan di SIPD khususnya Hilbah Faktor Pendukung: Kordinasi yang baik Tim Penyusun RKPD dan RPJPD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah dan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan	100	0	0	0	Rp 365.787.000	Rp 205.168.000	Rp 201.163.800	98,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Pelaksanaan kegiatan yang berbarengan dengan deadline yang hampir bersamaan menuntut strategi dan upaya maksimal dari seluruh tim subbid data dan informasi baik dari segi efektivitas waktu dan pemikiran untuk menindaklanjuti setiap kegiatan. 2. Adanya Regulasi yang membatasi kerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam analisis data pembangunan. 3. Data-data pembangunan yang dirilis oleh instansi yang berwenang mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya sehingga pelaksanaan update data tidak tepat waktu. 4. Pengukuran pemanfaatan data pembangunan baru dapat dilakukan ketika SKPD telah selesai dalam menyusun Renja nya yaitu pada triwulan III. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini baru dapat diukur pada triwulan III semuanya dapat terlaksana sesuai target batas waktu penyelesaian, 5. Pihak penyedia yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam proses PBJ. 6. Koordinasi dengan penyedia belum maksimal sehingga proses pelaksanaan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan Faktor Pendorong : 1. Kerjasama dan koordinasi antar bidang/unit kerja internal Bappedalitbang Kabupaten Banjar yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai timeline yang telah ditetapkan. 2. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar. 3. SKPD sangat kooperatif dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan data-data perencanaan pembangunan daerah 4. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
	Persentase SKPD Yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah	100	93,64	93,64	100					Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Pengukuran pemanfaatan data pembangunan baru dapat dilakukan ketika SKPD telah selesai dalam menyusun Renja nya yaitu pada triwulan III. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini baru dapat diukur pada triwulan III semuanya dapat terlaksana sesuai target batas waktu penyelesaian Faktor Pendorong : 1. Kerjasama dan koordinasi antar bidang/unit kerja internal Bappedalitbang Kabupaten Banjar yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai timeline yang telah ditetapkan. 2. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar. 3. SKPD sangat kooperatif dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan data-data perencanaan pembangunan daerah 4. Kerjasama dan komunikasi antara atasan dan staf yang terjalin dengan baik
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	0	0	100	Rp 107.357.000	Rp 26.202.000	Rp 23.283.900	88,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. jadwal kegiatan berbarengan dengan kegiatan lain eksternal: 1. Kendala pada Aplikasi LPSE untuk level Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen dan E-Katalag Penyedia yang sering gangguan/error 2. Kendala pada Penyedia yang stock barang habis 3. Kendala pada pengajuan NPD pada aplikasi SIPD Penatausahaan yang gangguan Faktor Pendukung: Internal: 1. tersedianya sarana dan prasarana 2. adanya dukungan dari atasan eksternal:
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	384			100	Rp 125.000.000	Rp 56.786.000	Rp 56.107.400	98,8	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. jadwal kegiatan bidang yang padat (berbarengan) Eksternal: - Adanya Regulasi yang membatasi kerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam analisis data pembangunan. - Data-data pembangunan yang dirilis oleh instansi yang berwenang mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya sehingga pelaksanaan update data tidak tepat waktu. - Pengukuran pemanfaatan data pembangunan baru dapat dilakukan ketika SKPD telah selesai dalam menyusun Renja nya yaitu pada triwulan III. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini baru dapat diukur pada triwulan III semuanya dapat terlaksana sesuai target batas waktu penyelesaian, - Pihak penyedia yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam proses PBJ. - Koordinasi dengan penyedia belum maksimal sehingga proses pelaksanaan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Faktor Pendukung: Internal: 1. komitmen pimpinan dan kerjasama bidang yang baik Eksternal: koordinasi dengan penyelenggara forum satu data - Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar. - SKPD sangat kooperatif dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan data-data perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	0	0	100	Rp 133.430.000	Rp 122.180.000	Rp 121.772.500	99,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. sudah membuat SPJ untuk bulan Juni namun akan terealisasi pada bulan Juli Eksternal: 1. Koordinasi dengan pihak penyedia belum berjalan dengan baik 2. Data-data pembangunan yang dirilis oleh instansi yang berwenang mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya sehingga pelaksanaan update data tidak tepat waktu 3. Adanya Regulasi yang membatasi kerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam analisis data pembangunan 4. Pihak penyedia yang belum bisa memenuhi persyaratan dalam proses PBJ 5.- Koordinasi dengan penyedia belum maksimal sehingga proses pelaksanaan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan Faktor Pendukung: Internal: 1. komitmen pimpinan dan kerjasama bidang yang baik 2. Kerjasama dan koordinasi antar bidang/unit kerja internal Bappedalitbang Kabupaten Banjar yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai timeline yang telah ditetapkan Eksternal: 1. Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan lancar 2. SKPD sangat kooperatif dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan data-data perencanaan pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%	100	0	0	0	Rp 205.000.000	Rp 57.555.000	Rp 31.826.500	55,3	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Data/materi bahan evaluasi baru dapat dilihat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Perencanaan Pembangunan Daerah											di akhir tahun 2. belum semua SKPD memahami perhitungan kinerja sesuai formulasi dan DO yang telah ditetapkan Faktor Pendorong : 1. adanya sistem informasi aplikasi simondalev dalam mengukur kinerja perangkat daerah
	Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik	100	0	0	0						Faktor Penghambat : 1. Sebagian indikator kinerja program prioritas bersifat outcome sehingga baru dapat dilihat triwulan akhir ditetapkan Faktor Pendorong : 1. Dukungan dari bidang mitra dalam mengawal pelaksanaan program prioritas agar berjalan sesuai target yang direncanakan
Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	9	4	4	100	Rp 205.000.000	Rp 57.555.000	Rp 31.826.500	55,3	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Proses ROPK Keuangan pada Simondalev tertunda karena kesulitan integrasi pada SIPD terhadap Simondalev - Beberapa pekerjaan yang harusnya menggunakan aplikasi terpaksa di lakukan secara manual - Terdapat bug pada aplikasi - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menentukan aktivitas pada ROPK Fisik - Masih adanya bug pada aplikasi - Aplikasi mengalami gangguan pada server Kabupaten Banjar - Padatnya jadwal kegiatan lain sehingga saling berbenturan, misalnya saja penyusunan perbub dan sk. - Terdapat bugs pada aplikasi Faktor Pendukung: - Adanya kerjasama dengan bidang mitra berjalan dengan baik - Operator yang sudah berpengalaman secara tahun ke tahun sehingga memahami penggunaan aplikasi - Bug dapat diketahui karena koordinasi yang baik antara skpd, bidang mitra, dan ppe - Diadakannya Desk bersama SKPD - SKPD aktif melakukan pengecekan pada ropk fisiknya masin-masing - Keaktifan dan ketaatan SKPD terkait batas waktu penginputan - Tim bappeda berkoordinasi dengan pengembang melalui zoom
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	79	0	0	0	Rp 1.235.900.000	Rp 517.568.700	Rp 364.522.200	70,4	Memenuhi Kriteria	
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	79	0	0	0					Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Pada triwulan II, pencapaian kinerja kegiatan dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA ditargetkan pada triwulan IV. untuk pencapaian target tersebut tetap dilakukan upaya-upaya

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											untuk pencapaian target. Faktor Pendorong : Kerjasama dan koordinasi yang intens, baik intern maupun dengan SKPD Mitra sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	78	0	0	0					Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Kurangnya data dan informasi yang akurat 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Faktor Pendorong : sinergisitas antara SKPD mitra dan internal bidang yang koordinatif dan responsif
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	0	0	0	Rp 522.000.000	Rp 217.696.200	Rp 196.616.800	90,3	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : Internal 1. Perhitungan masih belum dapat dihitung karena Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dapat dihitung pada Triwulan III 2. Intensitas kegiatan intern bidang PPM dan lintas bidang yang sangat padat , beberapa kegiatan ada yang bersamaan waktu sehingga beberapa kegiatan kurang maksimal/mengalami keterlambatan. Eksternal 1. Proses penginputan perencanaan untuk tahun 2025 pada SIPD, mengalami kendala, antara lain aplikasinya yang sering ,mengalami gangguan/lelet dan ketersediaan SSH/SBU belanja yang belum ada. 2. Kemampuan pejabat/operator simondalev SKPD mitra PPM masih kurang memahami substansi atau cara penginputan pelaporan di simondalev sehingga hasil belum optimal. Faktor Pendorong : 1. Koordinasi dan kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang sektor Bappedalitbang, lintas SKPD dan stakeholder lainnya. 3. Prasarana dan sarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4	2	2	100	Rp 86.000.000	Rp 37.593.600	Rp 35.450.100	94,3	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal pelaksanaan aktivitas dalam sub kegiatan ini bersamaan dengan aktivitas sub kegiatan lainnya, baik yang ada di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan di bidang lainnya yang saling berhubungan erat dan memberi kontribusi terhadap satu sama lainnya serta dengan tugas tambahan lainnya seperti menghadiri rapat baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi, menghadiri rapat melalui zoom meeting serta melaksanakan tugas lainnya. 2. Penyampaian bahan, data dan informasi perencanaan bidang pemerintahan dan pemerintahan kecamatan sebagai bahan penyusunan Ranwal RKPD tidak tepat waktu, sehingga dalam penyusunan tidak optimal dikarenakan data yang belum tersedia/tidak update. 3. Padatnya jadwal kegiatan yang diikuti oleh SKPD mitra Subbid Pemerintahan dan Subbid Pemerintahan Kecamatan sehingga terkendala dalam menentukan jadwal pelaksanaan koordinasi yang telah disusun. 4. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir bulan dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan lainnya baik yang ada di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan pada bidang lainnya. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang Tertib baik dengan SKPD mitra Pemerintahan dan Pemerintahan Kecamatan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	29	29	29	100	Rp 70.000.000	Rp 25.851.700	Rp 24.030.700	93,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal pelaksanaan aktivitas dalam sub kegiatan ini bersamaan dengan aktivitas sub kegiatan lainnya, baik yang ada di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan di bidang lainnya yang saling berhubungan erat dan memberi kontribusi terhadap satu sama lainnya. 2. Penyampaian bahan, data dan informasi perencanaan bidang pemerintahan dan pemerintahan kecamatan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir Renja tidak tepat waktu, sehingga dalam penyusunan tidak optimal dikarenakan data yang belum tersedia/tidak update. 3. Padatnya jadwal kegiatan yang diikuti oleh SKPD mitra Subbid Pemerintahan dan Subbid Pemerintahan Kecamatan sehingga terkendala dalam menentukan jadwal pelaksanaan
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	87	58	58	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											koordinasi yang telah disusun. 4. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir bulan dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan lainnya baik yang ada di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan pada bidang lainnya, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses penatausahaan yang berakibat terjadinya deviasi pada realisasi keuangan. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29	29	29	100	Rp 40.000.000	Rp 17.852.100	Rp 14.754.900	82,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Penyampaian data dan informasi monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan tidak tepat waktu dan beberapa data belum tersedia. 2. SKPD mitra sub bidang Pemerintahan masih belum melakukan update data pada beberapa komponen pada E-Monev Simondalev sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia.
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	2	2	100					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	1	1	100	Rp 76.000.000	Rp 29.674.000	Rp 20.468.000	69,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal Kegiatan yang sering bersamaan mengakibatkan pembagian tugas masih belum maksimal khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dan provinsi sehingga koordinasi yang mendalam dengan SKPD belum dapat maksimal. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang masih mencukupi, antara lain : komputer, printer, ATK dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	6	6	Rp 20.000.000	Rp 10.108.400	Rp 8.804.800	87,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Cuti Lebaran membuat koordinasi secara tatap muka berkurang; 2. SKPD masih harus menyesuaikan dengan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	12	12	100					Memenuhi Kriteria	Matrik yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; 3. Adanya perubahan Kepmen sehingga perlu penyesuaian terhadap sub kegiatan yang berubah pada SKPD Mitra Pembangunan Manusia. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi , antara lain : komputer, printer, ATK dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	6	100	Rp 230.000.000	Rp 96.616.400	Rp 93.108.300	96,4	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal Pelaksanaan yang beberapa kali terbentur dengan kegiatan lainnya. 2. SKPD masih harus menyesuaikan dengan Inputan Simondalev karena Target Keuangan belum dilakukan Updating Data. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi , antara lain: komputer, printer, ATK dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia
	Jumahl Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	3	3	100					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	0	0	0	Rp 209.900.000	Rp 109.181.500	Rp 94.503.900	86,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Adanya sedikit penyesuaian target/indikator karena adanya kepmendagri yang baru sehingga mengharuskan adanya perubahan renstra SKPD yang berdampak pada penyesuaian di Renja mitra 2. Kurang aktifnya dari mitra SKPD dalam koordinasi perencanaan Faktor Pendorong : 1. Adanya komitmen dari pimpinan SKPD mitra dalam koordinasi perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	2	2	100	Rp 81.900.000	Rp 44.006.000	Rp 42.554.900	96,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal Pelaksanaan aktivitas yang berbarengan dengan aktivitas sub kegiatan lainnya Eksternal : Penyampaian bahan, data dan informasi tidak tepat waktu, sehingga dalam penyusunan tidak optimal Faktor Pendukung: Internal : Kerjasama yang baik Internal Subbid Ekonomi Eksternal : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD Mitra Subbid Ekonomi
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	4	100	Rp 20.000.000	Rp 8.829.500	Rp 8.734.000	98,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal yang padat mengakibatkan keterbatasan waktu untuk asistensi Eksternal : 1. Kendala pada sistem SIPD RI

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	4	4	100					Memenuhi Kriteria	(Sistem Error) 2. Penyesuaian target indikator kinerja di SKPD Mitra Faktor Pendukung: Internal : 1. ketersediaan sarana dan prasarana 2. Dukungan dari pimpinan 3. Komunikasi intern yang efektif Eksternal : Kerjasama tim yang efektif dengan SKPD Mitra
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	2	2	100	Rp 32.000.000	Rp 13.448.500	Rp 11.511.000	85,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal kegiatan Sub Bidang Ekonomi yang padat dan bersamaan dengan kegiatan lain Eksternal : Terkendala pada operator masing-masing bidang SKPD mitra yang masih belum sepenuhnya memahami penginputan di aplikasi Simondalev terutama E Sakip dikarenakan ada pergantian operator Faktor Pendukung: Internal : Koordinasi intern yang baik dalam memonitor penginputan dan keterisian E ROPK dan E Monev dan E Sakip untuk SKPD Mitra Eksternal : Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD Mitra melalui Konsultasi secara langsung tatap muka maupun melalui telepon SKPD cukup rapi dalam menyimpan bukti atau alat dukung bahan monev berupa data, foto, file dll
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	0	0	100					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	0	0	100	Rp 40.000.000	Rp 21.808.000	Rp 17.173.500	78,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang 2. Jadwal Perencanaan yang padat Eksternal : 1. Keterlambatan Progres DCT Program YESS akibat Persiapan Exit strategi tahun 2025 2. Adanya pergeseran timeline perencana Faktor Pendukung: Internal : Adanya dukungan pimpinan dan sarana prasarana yang baik Eksternal : Terjalin koordinasi dan respon yang baik dari SKPD Mitra Subbid SDA
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pmebangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	2	100	Rp 16.000.000	Rp 10.216.000	Rp 7.238.500	70,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Penggunaan Sistem Aplikasi yang bersamaan waktunya membuat akses menjadi lambat Eksternal : Terkendalanya Pemutakhiran Sub Kegiatan yang tidak muncul di SIPD RI Faktor Pendukung: Internal : Terjalannya rasa saling memahami kondisi kerja dengan SKPD Mitra Subbid Sumber Daya Alam Eksternal : Terjalannya koordinasi dan kerjasama tim yang baik dengan SKPD Mitra Subbid SDA dan Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Bappedalitbang
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	0	0	100					Memenuhi Kriteria	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	0	0	100	Rp 20.000.000	Rp 10.873.500	Rp 7.292.000	67,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal Kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang padat dan bersamaan dengan dengan kegiatan lain

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	0	0	100					Memenuhi Kriteria	Eksternal : Operator pada masing-masing bidang SKPD Mitra masih belum sepenuhnya memahami penginputan pada Aplikasi Simondalev terutama untuk E SAKIP dikarenakan ada operator yang berganti Faktor Pendukung: Internal : Koordinasi intern yang baik dalam memonitor penginputan dan keterisian E ROPK, E Monev dan E Sakip untuk SKPD Mitra Eksternal : Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD Mitra melalui Konsultasi secara langsung tatap muka maupun melalui telepon
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	0	0	100	Rp 504.000.000	Rp 190.691.000	Rp 73.401.500	38,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. belum teridentifikasinya faktor penghambat dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan proses pelaksanaan Faktor Pendorong : 1. efisiensi dan efektivitas perencanaan 2. ketersediaan data dan informasi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	2	2	100	Rp 370.000.000	Rp 124.213.000	Rp 25.420.500	20,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Faktor Eksternal 1. Perbedaan prioritas antara SKPD Mitra dalam pembangunan infrastruktur 2. perbedaan standar yang digunakan antarinstansi terkait dalam pembangunan infrastruktur Faktor Internal 1.Kurangnya data dan informasi yang akurat 2.Tuntutan waktu yang ketat dapat menghambat koordinasi menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan dokumen perencanaan dengan tepat waktu Faktor Pendukung: Internal : 1. tersedianya sarpras yang memadai 2. kerjasama tim yang solid Eksternal : SKPD Mitra yang kompeten, profesional dan koordinatif
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	3	100	Rp 20.000.000	Rp 6.850.000	Rp 3.850.000	56,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: eksternal 1.tidak lanjut asistensi SKPD belum optimal 2.KAK belum dibuat untuk tahun 2025 3.perlu diadakan penajaman Renja Intenal 1.Jadwal untuk kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain 2.perbedaan prioritas antara perangkat daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pihak Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9	3	3	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	3	100	Rp 21.000.000	Rp 17.224.000	Rp 6.354.000	36,9	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Eksternal 1.masih adanya data dalam proses 2.Operator pada bidang SKPD Mitra masih belum sepenuhnya memahami penginputan di aplikasi Simondalev Internal - adanya tugas tambahan diluar tugas utama Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	2	2	100					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	2	2	100	Rp 60.000.000	Rp 29.528.000	Rp 28.703.000	97,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Faktor Eksternal 1. Perbedaan prioritas antara SKPD Mitra dalam pembangunan kewilayahan 2. perbedaan standar yang digunakan antarinstansi terkait dalam pembangunan kewilayahan Faktor Internal 1.Kurangnya data dan informasi yang akurat 2.Tuntutan waktu yang ketat dapat menghambat koordinasi menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan dokumen perencanaan dengan tepat waktu Faktor Pendukung: Internal : 1. tersedianya sarpras yang memadai 2. kerjasama tim yang solid Eksternal : SKPD Mitra yang kompeten, profesional dan koordinatif
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	3	3	100	Rp 15.000.000	Rp 6.662.000	Rp 5.311.500	79,7	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: eksternal 1.tidak lanjut asistensi SKPD belum optimal 2.KAK belum dibuat untuk tahun 2025 3.perlu diadakan penajaman Renja Intenal 1.Jadwal untuk kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain 2.perbedaan prioritas antara perangkat daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pihak Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9	3	3	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	3	3	100	Rp 18.000.000	Rp 6.214.000	Rp 3.762.500	60,5	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Eksternal 1.masih adanya data dalam proses 2.Operator pada bidang SKPD Mitra masih belum sepenuhnya memahami penginputan di aplikasi Simondalev Internal - adanya tugas tambahan diluar tugas utama Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	2	2	100					Memenuhi Kriteria	
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI	100	0	0	0	Rp 745.000.000	Rp 355.909.000	Rp 96.496.238	27,1	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : EKSTERNAL Adanya kendala pada saat penyepakatan waktu tahapan pelaksanaan penelitian, mengingat jadwal yang cukup padat baik dari Bappedalitbang maupun dari Pihak Ketiga. INTERNAL Belum dimilikinya SDM dengan spesifikasi peneliti di Bappedalitbang. Faktor Pendorong : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyepakatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL 1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang
	PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN	100	0	0	0					Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yg mundur karena jadwal yang harus menyesuaikan dengan agenda kepala daerah; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola data inovasi daerah; 3. Belum ada aplikasi inovasi di Kabupaten Banjar dalam memudahkan manajemen data inovasi daerah; 4. rendahnya antusias peserta dalam mengikuti BIMTEK inovasi daerah Faktor Pendorong : 1. Koordinasi yg baik dengan BSKDN Kemendagri dan BRIDA Provinsi Kalsel selaku narasumber kegiatan BIMTEK inovasi daerah 2.Tersedianya anggaran 3. Kerjasama tim inovasi yg baik
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp 42.360.000	Rp 1.336.300	3,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : EKSTERNAL Adanya kendala pada saat penyepakatan waktu tahapan pelaksanaan penelitian, mengingat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											jadwal yang cukup padat baik dari Bappedalitbang maupun dari Pihak Ketiga. INTERNAL Belum dimilikinya SDM dengan spesifikasi peneliti di Bappedalitbang. Faktor Pendorong : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyeepatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL 1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp 42.360.000	Rp 1.336.300	3,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal yang padat sehingga berbarengan/bersamaan dengan kegiatan lain Belum disepakatinya Penyedia Pelaksana Penelitian Tema Penelitian berubah sehingga masih menunggu perubahan tema atau judul Eksternal : Penyesuaian Jadwal Penelitian yang mengakibatkan Pergeseran pada anggaran dan anggaran kas Faktor Pendukung: Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan Eksternal : 1. Koordinasi yang baik dengan Pihak Peneliti 2. Terjalannya Koordinasi tim yang baik dengan SKPD dalam pelaksanaan pengambilan data dukung penelitian
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyeepatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL 1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang Faktor Pendorong : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyeepatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal yang padat sehingga berbarengan/bersamaan dengan kegiatan lain Eksternal : Penyesuaian Jadwal Penelitian yang mengakibatkan Pergeseran pada anggaran dan anggaran kas Faktor Pendukung: Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan Eksternal : 1. Koordinasi yang baik dengan Pihak Peneliti 2. Terjalannya Koordinasi tim yang baik dengan SKPD dalam pelaksanaan pengambilan data dukung penelitian
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100	0	0	0	Rp 200.000.000	Rp 138.884.000	Rp 9.168.700	6,6	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyesepakatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL 1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang Faktor Pendorong : EKSTERNAL 1. Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Peneliti/Pihak ketiga Lebih Intens terkait Penyesepakatan Waktu Pelaksanaan Penelitian 2. Komitmen dari Pihak ketiga terhadap pencapaian target pelaksanaan penelitian INTERNAL 1. Penentuan tema dan judul penelitian dilakukan lebih awal oleh Tim Bappedalitbang
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp 40.684.000	Rp 1.284.000	3,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : Jadwal yang padat sehingga berbarengan/bersamaan dengan kegiatan lain Eksternal : Penyesuaian Jadwal Penelitian yang mengakibatkan Pergeseran pada anggaran dan anggaran kas Sulitnya Berkomunikasi dengan Pihak Penyedia Faktor Pendukung: Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan Eksternal : 1. Koordinasi yang baik dengan Pihak Peneliti 2. Terjalannya Koordinasi tim yang baik dengan SKPD dalam pelaksanaan pengambilan data dukung penelitian

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Target	Target Sd Triwulan II Tahun 2024			Pagu Anggaran 2024	Anggaran Sd Triwulan II Tahun 2024			Keterangan Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	0	0	0	Rp 100.000.000	Rp 98.200.000	Rp 7.884.700	8,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Jadwal di tunda karena Perubahan/ Revisi Judul Penelitian Kembali Adanya Pergeseran anggaran Kas ke Triwulan ke III Faktor Pendukung: Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan Eksternal : 1. Koordinasi yang baik dengan Pihak Peneliti 2. Terjalannya Koordinasi tim yang baik dengan SKPD dalam pelaksanaan pengambilan data dukung penelitian
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah	100	0	59	0	Rp 345.000.000	Rp 174.665.000	Rp 85.991.238	49,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yg mundur karena jadwal yang harus menyesuaikan dengan agenda kepala daerah; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola data inovasi daerah; 3. Belum ada aplikasi inovasi di Kabupaten Banjar dalam memudahkan manajemen data inovasi daerah; 4. rendahnya antusias peserta dalam mengikuti BIMTEK inovasi daerah Faktor Pendorong : 1. Koordinasi yg baik dengan BSKDN Kemendagri dan BRIDA Provinsi Kalsel selaku narasumber kegiatan BIMTEK inovasi daerah 2. Tersedianya anggaran 3. Kerjasama tim inovasi yg baik
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	0	0	0	Rp 345.000.000	Rp 174.665.000	Rp 85.991.238	49,2	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : - Jadwal Kepala Bappedalitbang berbenturan dengan acara-acara yang akan dihadiri - Jadwal yang berbenturan dengan jadwal bidang lain yang memerlukan Bidang PPI Eksternal : - Penyesuaian Jadwal Koordinasi Tim Inovasi Daerah karena terdiri dari beberapa SKPD Faktor Pendukung: Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan Eksternal : 1. Komitmen yang bagus antara Tim Inovasi daerah 2. Adanya kerjasama yang baik dengan SKPD lain

Sumber : Laporan SIMONDALEV Bappedalitbang sampai Triwulan II (data diolah,2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat sampai dengan triwulan II tahun 2024 Capaian Kinerja dan Anggaran Bappedalitbang, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan Target 93 Indeks dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 10.299.627.756 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 5.806.846.924, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 2.216. 41.202, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 38,2%. Program ini memiliki 8 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 57.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 17.664.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 12.029.500, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 68,1%. Kegiatan ini memiliki 7 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Target 2 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 5. 645.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.100.000, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 54,9%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target 2 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Dokumen dengan Capaian 100%.

Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 2.193.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.013.500, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 46,2%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target 2 Dokumen, untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 0, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%.
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Target 2 Dokumen, untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 0, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan Target 2 Dokumen, untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 0, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target 3 Laporan, untuk Target

dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 10.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 5.500.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 5.500.000, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 100%

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 17 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 7 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 15.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 4.326.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 2.416.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 55,8%

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 6.872.331.806 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 3.712.522.924, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.254.369.056 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 33,8%. Kegiatan ini memiliki 4 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target 546 Orang, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 136 Orang dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 6.731.331.806 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 3.636.133.924, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.200.230.056 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 33,0%

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Target 50 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 125.000.000 dengan Target

Triwulan II sebesar Rp 64.350.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 44.125.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 68,6%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target 1 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 8.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 8.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 6.800.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 85,0%

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target 18 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 8.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 4.038.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.214.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 79,6%

c) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 7.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 4.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.904.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 97,6%. Kegiatan ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD dengan Target 4 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 7.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 4.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.904.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 97,6%

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 135.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 41.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 10.458.528 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 25,5%. Kegiatan ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Target 12 Orang, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 7 Orang dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 135.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 41.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 10.458.528 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 25,5%

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 710.863.100 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 441.830.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 346.362.473 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 78,4%. Kegiatan ini memiliki 5 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan Target 4 Paket, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Paket dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 12.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 6.245.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 6.245.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 100%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Target 4 Paket, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Paket dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 11.999.500 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 6.112.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 6.093.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 99,7%

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan Target 4 Paket, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Paket dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 18.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 9.324.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 9.324.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 100%

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target 4 Paket, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Paket dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 18.863.600 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 11.148.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 7.395.200 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 66,3%

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target 12 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan

II yaitu 6 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 650.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 409.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 317.304.773 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 77,6%

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 567.838.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 546.338.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.750.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0,7%. Kegiatan ini memiliki 2 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin lainnya

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan dengan Target 59 Unit dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 535.838.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 535.838.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan Target 1 Unit, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Unit dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 32.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 10.500.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.750.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 35,7%

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada

Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1.393.998.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 687.980.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 351.281.978 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 51,1%. Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat dengan Target 12 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 4.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 2.850.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 2.850.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target 12 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 189.998.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 104.725.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 73.009.484 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 69,7%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan Target 12 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1.200.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 580.405.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 275.422.494 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 47,5%

h) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar

Rp 555.596.850 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 355.512.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 234.260.667 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 65,9%. Kegiatan ini memiliki 4 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan Target 1 Unit, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Unit dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 38.990.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 21.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 16.827.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 80,1%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan Target 32 Unit, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 19 Unit dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 316.660.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 177.000.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 110.590.567 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 62,5%
3. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan Target 1 Unit, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Unit dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 119.952.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 119.952.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 85.133.100 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 71,0%
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi dengan Target 101 Unit, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 40 Unit dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 79.994.850 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 37.560.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 21.710.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 57,8%

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini memiliki 2 Indikator yaitu yang pertama Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu dan Indikator kedua yaitu Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras dengan masing-masing Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 2.379.351.600 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 1.314.871.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 672.665.890, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 51,2%. Program ini memiliki 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1.808.564.600 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 1.052.148.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 439.675.590 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 41,8%. Kegiatan ini memiliki 4 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan Target 1 Berita Acara, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Berita Acara dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 36.914.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 36.914.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 15.477.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 41,9%

2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan Target 1 Berita Acara, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Berita Acara dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 32.606.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 32.606.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 28.555.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 87,6%

3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan Target 2 Berita Acara, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Berita Acara dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 311.647.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 311.647.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 284.856.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 91,4%

4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan Target 4 Dokumen dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1.427.397.600 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 670.981.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 110.787.090 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 16,5%

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 Indikator yaitu yang pertama Persentase Data Pembangunan Daerah yang Dimutakhirkan dengan Target 100%. Untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV dan Indikator kedua yaitu Persentase SKPD yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah dengan Target 100% untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 93,64% dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 365.787.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 205.168.000, Realisasi Triwulan II sebesar

Rp 201.163.800, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 98%. Program ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan Target 1 Masukan Analisis Data dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 107.357.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 26.202.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 23.283.900 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 88,9%

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Target 384 Orang, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 148 Orang dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 125.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 56.786.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 56.107.400 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 98,8%

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan dengan Target 1 Buku dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 133.430.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 122.180.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 121.772.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 99,7%

c) Pengedalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini memiliki 2 Indikator yaitu yang pertama Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80% dan Indikator kedua yaitu Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi

Kinerja Baik dengan masing-masing Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 205.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 57.555.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 31.826.500, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 56,3%. Program ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dengan Target 9 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 4 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 205.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 57.555.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 31.826.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 55,3%

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini memiliki 3 Indikator yaitu yang pertama Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Target 79 Indeks, Indikator kedua yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA dengan Target 19 Indeks dan Indikator yang ketiga yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Target 78 Indeks. Untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 masing-masing sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 1.235.900.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 517.568.700, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 364.522.200, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 70,4%. Program ini memiliki 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II

Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 522.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 217.696.200, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 196.616.800 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 90,3%. Kegiatan ini memiliki 6 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 4 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 86.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 37.593.600, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 35.450.100 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 94,3%
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan Target 29 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 29 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Target 87 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 58 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 70.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 25.851.700, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 24.030.700 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 93%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Bidang Pemerintahan dengan Target 29 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 29 Laporan dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dengan Target 4 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Perangkat Daerah dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 40.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 17.852.100, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 14.752.900 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 82,7%

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 5 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 76.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 29.674.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 20. 468.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 69%

5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dengan Target 6 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan Target 18 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 12 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp

10.108.400, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 8.804..800 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 87,1%

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dengan Target 6 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 6 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan Target 7 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 230.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 96.616.400, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 93.108.300 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 96,4%

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 209.900.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 109.181.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 94.503.900 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 86,6%. Kegiatan ini memiliki 6 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 4 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran

Tahun 2024 sebesar Rp 81.900.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 44.006.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 42.554.900 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 96,7%

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dengan Target 4 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 4 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan Target 12 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 4 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 8.829.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 8.734.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 98,9%

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rentsra/Renja Bidang Perekonomian dengan Target 4 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan Target 4 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 1 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 32.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 13.448.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 11.511.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 85,6%

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 4 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 0 Dokumen dengan Capaian 0%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 40.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 21.808.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 17.173.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 78,7%

5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pmebangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA dengan Target 2 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan Target 6 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 0 Laporan dengan Capaian 0%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 16.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 10.216.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 7.238.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 70.9%

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rentsra/Renja Bidang SDA dengan Target 2 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 0 Perangkat Daerah dengan Capaian 0% yang akan terealisasi pada Triwulan IV dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan Target 4 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 0 Laporan yang akan teralisasi pada Triwulan IV dengan Capaian 0%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp

10.873.500, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 7.292.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 67,1%

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Kegiatan ini memiliki Indikator Presentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 504.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 190.691.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 73.401.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 38,5%. Kegiatan ini memiliki 6 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 4 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 370.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 124.213.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 24.420.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 20,5%

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dengan Target 3 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan Target 9 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 6.850.000,

Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.850.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 56,2%

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rentsra/Renja Bidang Infrastruktur dengan Target 3 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan Target 4 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 21.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 17.224.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 6.354.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 36,9%

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan Target 4 Dokumen, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Dokumen dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 60.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 29.528.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 28.703.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 97,2%

5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dengan Target 3 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Target 9 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 15.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 6.662.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 5.311.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 79,7%

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sub Kegiatan ini memiliki dua Indikator yaitu yang pertama Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rentsra/Renja Bidang Kewilayahan dengan Target 3 Perangkat Daerah, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 3 Perangkat Daerah dengan Capaian 100% dan Indikator yang kedua yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Target 4 Laporan, untuk Target dan Realiasi Triwulan II yaitu 2 Laporan dengan Capaian 100%. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 18.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 6.214.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 3.762.500 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 60,5%

4. PROGRAM PENELITIAN DAN DAERAH

Program ini memiliki 2 Indikator yaitu yang pertama Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti dan Indikator kedua yaitu Persentase Inovasi yang Diterapkan dengan masing-masing Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 745.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 355.909.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 96.496.238, dan Capaian pada Triwulan II sebesar 27,1%. Program ini memiliki 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 42.360.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.336.300 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 3,2%. Kegiatan ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi dengan Target 1 Laporan dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 42.360.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.336.300 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 3,2%.

b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 0, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%. Kegiatan ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Target 1 Laporan dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 0 Laporan yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp

0, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 0 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 0%.

c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan dengan Target 100% dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 200.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 138.884.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 9.168.700 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 6,6%. Kegiatan ini memiliki 2 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan Target 1 Laporan dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 40.684.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 1.284.000 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 3,2%.
2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Target 1 Laporan dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 98.200.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 7.884.700 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 8%.

d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah dengan Target 100%, Target pada Triwulan II yaitu 0, Realiasi pada Triwulan II yaitu 59 serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu 0 yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 345.000.000 dengan Target

Triwulan II sebesar Rp 174.665.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 85.991.238 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 49,2%. Kegiatan ini memiliki 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dengan Target 1 Laporan dan untuk Target, Realiasi serta Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu 0 Laporan yang akan terealisasi pada Triwulan IV. Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 345.000.000 dengan Target Triwulan II sebesar Rp 174.665.000, Realisasi Triwulan II sebesar Rp 85.991.238 dan Capaian pada Triwulan II sebesar 49,2

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas, fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappedalitbang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusun perencanaan pembangunan daerah, maka Bappedalitbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanannya diantaranya :

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappedalitbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kabupaten Banjar menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- Belum optimalnya keselarasan, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar SKPD ;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
- Dinamika peraturan yang mengamankan adanya struktur organisasi baru di Bappeda. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengamankan pembentukan lembaga baru bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BRIN, Daerah diharapkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai representasi BRIN di Daerah. Tujuan dibentuk BRIDA adalah menjadi representasi daerah dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, inovasi, serta menjadi kepanjangan tangan BRIN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Pemutakhiran Kinerja dan Penyesuaian Target

Pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini terdapat penyesuaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dikarenakan pada Tahun 2023 Capaiannya 78 namun Target untuk Tahun 2024 juga 78, sehingga pada Perubahan Renja Tahun 2024 dilakukan penyesuaian Target menjadi 79.

Kemudian di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Renja 2024 Targetnya 59 Unit, namun pada Perubahan Renja 2024 Targetnya berubah menjadi 24 Unit hal tersebut terjadi dikarenakan pengurangan Jumlah unit pengadaan pada perubahan anggaran tahun 2024 dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimana target awalnya 34 Unit namun karena kesalahan perhitungan maka berubah menjadi 32 Unit.

Selanjutnya pada level sasaran, level program, kegiatan dan sub Kegiatan Perubahan. Renja 2024 ini sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Penyesuaian terhadap Renstra Perubahan Kedua Bappedalitbang Tahun 2021-2026. Selengkapanya terkait perubahan-perubahan yang terjadi bisa dilihat secara lengkap pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab ini.

3.2. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Tidak terdapat perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang dilaksanakan tetap, yaitu sebanyak 4 Program 18 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan, Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapanya bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab 3 ini.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Bappedalitbang Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 15.845.447.216,- (Lima belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas Rupiah)**. Dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar, dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 8 (Delapan) kegiatan, 27 (Dua Puluh tujuh) sub kegiatan semula Rp. 10.299.627.756,- bertambah Rp. 595.853.000,- menjadi sebesar Rp. 10.895.480.756,-;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan 3 (Tiga) kegiatan, 8 (Delapan) sub kegiatan semula Rp. 2.379.351.600,- Bertambah Rp. 420.006.500,- menjadi sebesar Rp. 2.799.358.100,-;
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 3 (Tiga) kegiatan, 18 (Delapan Belas) sub kegiatan, semula Rp. 1.235.900.000,- bertambah Rp. 64.503.000,- menjadi sebesar Rp. 1.300.403.000,-;
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan 4 (empat) kegiatan, 5 (lima) sub kegiatan semula Rp. 745.000.000,- bertambah Rp. 105.205.360,- menjadi Rp. 850.205.360,-.

3.4. Alasan dilakukan Perubahan

Alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator, perubahan target dan perubahan anggaran di semua level secara lengkap di jelaskan dan bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3. 1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Bappedalitbang Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan	
								Target 2024		Target 2024				
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan				Rp14.659.879 .356	Rp15.845.447 .216	Rp 1.185.567.86 0,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp14.659.879 .356	Rp15.845.447 .216			
	5	0 1				PERENCANAAN				Rp13.914.879 .356	Rp14.995.241 .856	Rp 1.080.362.50 0,00		
1	5	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	93 INDEKS	93 INDEKS	Rp10.299.627 .756	Rp10.895.480 .756	Rp 595.853.000, 00		
	5	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persentase	100 Persentase	Rp57.000.000	Rp57.000.000			
	5	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp20.000.000	Rp20.000.000			
	5	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp3.000.000	Rp3.000.000			

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan		
								Target 2024		Target 2024					
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	Rp15.000.000	Rp15.000.000				
	5	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	Rp6.872.331.8 06	Rp6.872.331.8 06				
	5	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/bulan	546 Orang/bulan	Rp6.731.331.8 06	Rp6.731.331.8 06				
	5	0 1	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	Rp125.000.00 0	Rp125.000.00 0				
	5	0 1	0 1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp8.000.000	Rp8.000.000				
	5	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Rp8.000.000	Rp8.000.000				

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp650.000.00 0	Rp971.300.00 0	Rp 321.300.000, 00	Penambahan Dana untuk Perjalanan Dinas untuk memenuhi kebutuhan operasional yang padat
	5	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	Rp567.838.00 0	Rp690.501.00 0	Rp 122.663.000, 00	
	5	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	24 Unit	Rp535.838.00 0	Rp658.501.00 0	Rp 122.663.000, 00	Penyesuaian unit yang dilakukan pengadaan
	5	0 1	0 1	2.0 7	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp32.000.000	Rp32.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan		
								Target 2024		Target 2024					
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		
	5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	Rp1.393.998.000	Rp1.393.998.000				
	5	0	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp4.000.000	Rp4.000.000				
	5	0	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp189.998.000	Rp189.998.000				
	5	0	0	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp1.200.000.000	Rp1.200.000.000				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
									Target 2024		Target 2024			
									Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
	5	0	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	Rp555.596.850	Rp707.486.850	Rp 151.890.000,00	
	5	0	0	2.0	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp38.990.000	Rp38.990.000		
	5	0	0	2.0	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	Rp316.660.000	Rp316.660.000		
	5	0	0	2.0	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp119.952.000	Rp271.842.000	Rp 151.890.000,00	Perbaikan Gedung Kantor Bappedalitbang
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101 Unit	101 Unit	Rp79.994.850	Rp79.994.850		
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU	100%	100%	Rp2.379.351.600	Rp2.799.358.100	Rp 420.006.500,00	
							PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS						
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	Rp1.808.564.600	Rp2.078.571.100	Rp 270.006.500,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp36.914.000	Rp15.627.000	-Rp 21.287.000,00	Penyesuaian/Pergerakan belanja ke sub kegiatan lain
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp32.606.000	Rp31.250.000	-Rp 1.356.000,00	Penyesuaian/Pergerakan belanja ke sub kegiatan lain
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	2 Berita Acara	Rp311.647.000	Rp301.296.500	-Rp 10.350.500,00	Penyesuaian/Pergerakan belanja ke sub kegiatan lain
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp1.427.397.600	Rp1.730.397.600	Rp 303.000.000,00	Pelaksanaan Orientasi Tim RPJMD

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah Yag Dimutakhirkan	100 Persentase	100 Persentase	Rp365.787.000	Rp365.787.000	Rp 56.324.000,00	
					Persentase SKPD Yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah		100 Persentase	100 Persentase					
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp107.357.000	Rp104.352.000	-Rp 3.005.000,00	Penyesuaian/Perge seran belanja ke sub kegiatan lain
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	384 Orang	384 Orang	Rp125.000.000	Rp139.346.500	Rp 14.346.500,00	Penambahan Honor Narasumber Forum Satu Data
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	Rp133.430.00 0	Rp122.088.50 0	-Rp 11.341.500,0 0	Penyesuaian/Perge seran belanja ke sub kegiatan lain
	5	0 1	0 2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%	100 Persentase	100 Persentase	Rp205.000.00 0	Rp355.000.00 0	Rp 150.000.000, 00	
							Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik	100 Persentase	100 Persentase				
	5	0 1	0 2	2.0 3	000 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	9 Laporan	Rp205.000.00 0	Rp355.000.00 0	Rp 150.000.000, 00	Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaetn Banjar Tahun 2021-2026
3	5	0 1	0 3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	78 INDEKS	79 INDEKS	Rp1.235.900. 000	Rp1.300.403. 000	Rp 64.503.000,0 0	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						PEMBANGUNA N DAERAH	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	79 INDEKS	79 INDEKS				
							INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	78 INDEKS	78 INDEKS				
	5	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Renja SKPD yang Sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	100 Persentase	Rp522.000.00 0	Rp578.324.00 0	Rp 56.324.000,0 0	
	5	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp86.000.000	Rp73.732.500	-Rp 12.267.500,0 0	Penyesuaian/Perge seran belanja ke sub kegiatan lain

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	0	0	2.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	87 Laporan	87 Laporan	Rp70.000.000	Rp57.591.000	-Rp 12.409.000,0 0	Penyesuaian/Perge seran belanja ke sub kegiatan lain
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah					
	5	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	Rp40.000.000	Rp53.570.500	Rp 13.570.500,0 0	Penambahan Unit Belanja

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah				
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	5 Dokumen	Rp76.000.000	Rp143.430.000	Rp 67.430.000,00	Penambahan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	18 Laporan	Rp20.000.000	Rp20.000.000		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah				
	5	0 1	0 3	2.0 1	000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	Rp230.000.00 0	Rp230.000.00 0		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah				

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Renja SKPD yang Sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 Persentase	100 Persentase	Rp209.900.00 0	Rp211.640.00 0	Rp 1.740.000,00	
	5	0	0	2.0	000 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp81.900.000	Rp94.440.000	Rp 12.540.000,0 0	Penambahan Belanja untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial /CSR
	5	0	0	2.0	000 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	Rp20.000.000	Rp20.000.000		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
									Target 2024		Target 2024			
									Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan				
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Rp20.000.000	Rp20.000.000		
	5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dalam Renja SKPD yang Sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	100 Persentase	Rp504.000.000	Rp510.439.000	Rp 6.439.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp370.000.000	Rp362.519.800	-Rp 7.480.200,00	Penyesuaian/Pergeseran belanja ke sub kegiatan lain
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9 Laporan	9 Laporan	Rp20.000.000	Rp20.000.000		
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah				
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	Rp21.000.000	Rp21.000.000		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah				
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp60.000.000	Rp73.919.200	Rp 13.919.200,00	Penambahan Pelatihan Operator Geospasial Kabupaten Banjar
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9 Laporan	9 Laporan	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah				
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	Rp18.000.000	Rp18.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah				
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp745.000.000	Rp850.205.360	Rp 745.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI	100 PERSENT ASE	100 PERSENT ASE	Rp745.000.000	Rp850.205.360	Rp 105.205.360,00	
							PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN	100 PERSENT ASE	100 PERSENT ASE				
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	Rp100.000.000	100.000.000,00		
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Kebutuhan Penelitian Yang Terealisasi	100 Persentase	100 Persentase	Rp100.000.000	Rp199.999.900	Rp 99.999.900,00	
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp100.000.000	Rp199.999.900	Rp 99.999.900,00	Penambahan Penelitian Indeks Kesalehan Sosial
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kebutuhan Penelitian Yang Terealisasi	100 Persentase	100 Persentase	Rp200.000.000	Rp200.000.000		
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Penambahan / Perubahan	Alasan Penambahan / Pengurangan
								Target 2024		Target 2024			
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.00 0	Rp100.000.00 0		
	5	0 5	0 2	2.0 3	001 1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100.000.00 0	Rp100.000.00 0		
	5	0 5	0 2	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah	100 Persentase	100 Persentase	Rp345.000.00 0	Rp350.205.46 0	Rp 5.205.460,00	
	5	0 5	0 2	2.0 4	000 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	Rp345.000.00 0	Rp350.205.46 0	Rp 5.205.460,00	Penambahan Unit Belanja

Sumber : Laporan SIPD RI tahun 2024, (2024)

Dari table 2.3 dapat dilihat beberapa sub kegiatan mengalami perubahan baik secara target kinerja maupun anggaran, penjelasannya sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada tahun 2024 Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.299.627.756 naik Rp. 595.853.000 menjadi Rp. 10.895.480.756 hal ini disebabkan karenakan adanya kenaikan pada beberapa kegiatan, yakni :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 710.863.100 naik Rp. 321.300.000 menjadi Rp. 1.032.163.100 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 321.300.000 yang awalnya Rp. 650.000.000 menjadi Rp. 971.300.000 dikarenakan Penambahan dana untuk perjalanan dinas untuk memenuhi kebutuhan yang padat di Badan disebabkan Bappedalitbang merupakan Badan yang mengurus Perencanaan Daerah serta koordinasi antar SKPD yang mengakibatkan banyaknya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar daerah.

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 567.838.000 naik Rp. 122.663.000 menjadi Rp. 690.501.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Perubahan target kinerja yang awalnya 59 Unit menjadi 24 Unit dan Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 122.663.000 yang awalnya Rp. 535.838.000 menjadi Rp. 658.501.000 perubahan diakibatkan adanya penyesuaian unit belanja dikarenakan penambahan pegawai PPPK di Bapepdalitbang

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 555.596.850 naik Rp. 151.890.000 menjadi Rp. 707.486.850 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 151.890.000 yang awalnya Rp. 119.952.000 menjadi Rp. 271.842.000 perubahan dikarenakan perlunya pemeliharaan rutin Gedung untuk tetap bisa digunakan khususnya bagian Atap Gedung yang sudah cukup tidak terawat.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pada tahun 2024 Anggaran untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 2.379.351.600 naik Rp. 420.006.500 menjadi Rp. 2.799.358.100 hal ini disebabkan karenakan adanya kenaikan pada beberapa kegiatan, yakni :

a. **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 1.808.564.600 naik Rp. 270.006.500 menjadi Rp. 2.078.571.100 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 21.287.000 yang awalnya Rp. 36.914.000 menjadi Rp. 15.627.000 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran belanja ke sub kegiatan lain.

- ii. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.356.000 yang awalnya Rp. 32.606.000 menjadi Rp. 31.250.000 perubahandikarenakan Penyesuaian/Pergeseran belanja ke sub kegiatan lain.

- iii. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.350.500 yang awalnya Rp. 311.647.000 menjadi Rp. 301.296.500 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran belanja ke sub kegiatan lain.

- iv. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 303.000.000 yang awalnya Rp. 1.427.397.600 menjadi Rp. 1.730.397.600 perubahan dikarenakan Pelaksanaan Orientasi Tim RPJMD.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 365.787.000 naik Rp. 56.324.000 menjadi Rp. 365.787.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.005.000 yang awalnya Rp. 107.357.000 menjadi Rp. 104.352.000 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran belanja ke sub kegiatan lain.
- ii. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 14.346.500 yang awalnya Rp. 125.000.000 menjadi Rp. 139.346.500 perubahan dikarenakan Penambahan Honor Narasumber Forum satu Data.
- iii. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 11.341.500 yang awalnya Rp. 133.430.000 menjadi Rp. 122.088.500 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran Belanja ke Sub Kegiatan lain.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 205.000.000 naik Rp. 56.324.000 menjadi Rp. 355.000.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 150.000.000 yang awalnya Rp. 205.000.000 menjadi Rp.

355.000.000 perubahan dikarenakan Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada tahun 2024 Anggaran untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 1.235.900.000 naik Rp. 64.503.000 menjadi Rp. 1.300.403.000 hal ini disebabkan karenakan adanya kenaikan pada beberapa kegiatan, yakni :

a. **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 522.000.000 naik Rp. 56.324.000 menjadi Rp. 578.324.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.267.500 yang awalnya Rp. 86.000.000 menjadi Rp. 73.732.500 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran Belanja ke Sub Kegiatan lain.
- ii. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.409.000 yang awalnya Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 57.591.000 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran Belanja ke Sub Kegiatan lain.
- iii. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 13.570.500 yang awalnya Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 53.570.500 perubahan dikarenakan Penambahan Unit Belanja.
- iv. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Perubahan Target yang awalnya 3 Dokumen menjadi 5 Dokumen dan Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 67.430.000 yang awalnya Rp. 76.000.000 menjadi Rp. 143.430.000 perubahan dikarenakan Penambahan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 209.900.000 naik Rp. 1.740.000 menjadi Rp. 211.640.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.540.000 yang awalnya Rp. 81.900.000 menjadi Rp. 94.440.000 perubahan dikarenakan Penambahan Belanja untuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial/CSR.

- ii. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.800.000 yang awalnya Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 29.200.000 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran Belanja ke Sub Kegiatan lain.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 504.000.000 naik Rp. 6.439.000 menjadi Rp. 510.439.000 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penurunan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.480.200 yang awalnya Rp. 370.000.000 menjadi Rp. 362.519.800 perubahan dikarenakan Penyesuaian/Pergeseran Belanja ke Sub Kegiatan lain.

- ii. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 13.919.200 yang awalnya Rp. 60.000.000 menjadi Rp. 73.919.200 perubahan dikarenakan Penambahan Pelatihan Operator Geospasial Kabupaten Banjar.

4. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Pada tahun 2024 Anggaran untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp. 745.000.000 naik Rp. 105.205.360 menjadi Rp. 850.205.360 hal ini disebabkan dikarenakan adanya kenaikan pada beberapa kegiatan, yakni :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000 naik Rp. 99.999.900 menjadi Rp. 199.999.900 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan Target yang awalnya 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen karena kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 99.999.900 yang awalnya Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 199.999.900 perubahan dikarenakan Penambahan Penelitian Indeks Kesalehan Sosial.

b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 345.000.000 naik Rp. 5.205.460 menjadi Rp. 350.205.460 hal ini disebabkan dikarenakan kenaikan pada sub kegiatan :

- i. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Kenaikan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.205.460 yang awalnya Rp. 345.000.000 menjadi Rp. 350.205.460 perubahan dikarenakan Penambahan Unit Belanja.

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Kedua Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi badan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Renstra 2021-2026 Bappedalitbang. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Bappedalitbang tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang di Bappedalitbang;
2. Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Banjar.

3. Perubahan Renja Bappedalitbang, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, Perubahan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, Perubahan RKPD Kabupaten Banjar dan Perubahan Kedua Renstra Badan) ;
4. Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya dan dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banjar tahun 2024.
5. Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA dan DPA Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bappedalitbang Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Agar masing-masing bidang dapat segera menyusun rencana kerja atau aktifitas dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Perubahan Renja 2024 ini.
2. Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Perubahan Renja 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dokume Perubahan Renja 2024 Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
3. Segera melaksanakan kegiatan terutama yang terkait dengan pengadaan barang/jasa setelah DPPA 2024 disahkan mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas.

Demikian dokumen Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di sisa tahun pelaksanaan tahun 2024 ini. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pihak di internal Bappedalitbang agar turut bersama-sama melaksanakan Perubahan Renja 2024 ini dengan penuh tanggung jawab guna mendukung tercapainya target kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan

masuk dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja Perubahan ini hingga selesai.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk

menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BPKPAD s sampai dengan triwulan II.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini, sebagai berikut :

- 1) Reviu Renstra BPKPAD s sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan.
- 2) Adanya pelaksanaan proyek prioritas, Penyesuaian Belanja dan Perubahan Aktivitas.
- 3) Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/663/PPE/ Bappedalitbang tanggal 11 Juli 2024 perihal Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 4) Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil

evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

- 5) Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2024, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024

memperhatikan hal berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 dan Project strategis RPJMD;
3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2024;
4. Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa;
5. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public

melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsive. Selain itu, Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sector Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besari rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara laian meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaaanya
- Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa RENJA Perubahan 2024 – BPKPAD

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 memiliki 3 (Tiga) program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan rincian sebagai berikut :

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Target Tahunan			Triwulan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator Program		Fisik	Keuangan	Indikator Program	Fisik	Keuangan	Indikator Program	Fisik	Keuangan	Indikator Program	
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	100	293.234.885.232	95,36 Persen	Triwulan 1	27,37	87,24	15 Persen	26,29	24,93	22.5 Persen	96,07	28,58	150%	Faktor penghambat : Belum adanya faktor penghambat yang signifikan walaupun ada tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam proses koordinasi bidang-bidang; Faktor pendorong :

[illegible]

																kegiatan
																Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun Regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan sudah di terbitkan oleh pemerintah;
						Triwulan 3	89,40	98,09	75 Persen	9,97	66,28	0 Persen	11,16	67,57	0%	Faktor penghambat :
																Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100	95.36 Persen	9,97	66,28	0 Persen	9,97	66,28	0%	Faktor penghambat :
																Faktor pendorong :
						Capaian terhadap target tahunan							9,97	66,28	67,43 %	
2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	3.604.330.710	4 Persen	Triwulan 1	44,18	38,21	4 Persen	43,04	4,81	7.7 Persen	97,41	12,58	192,50 %	Faktor penghambat : 1. Wajib Pajak yang datanya tidak ada atapun pindah menjadi hambatan

[illegible]

																Pos pemantau MBLB 5. Rekon Pajak dan Retribusi serta BLUD;
						Triwulan 3	89,02	82,76	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	100%	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	100%	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Capaian terhadap target tahunan							0	0	185%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik; Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik;	100	240.031.999.600	80 Persen 98.14 Persen	Triwulan 1	18,69	97,42	10 Persen 20 Persen	17,90	24,59	10 Persen 20 Persen	95,77	25,24	100%	Faktor penghambat : 100% - belum ada tahapan perencanaan anggaran

		Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu;			100 Persen					100 Persen					100 Persen			100%	; Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan baik dari data penerimaan dan data pengeluaran; 1. Aplikasi sipd-ri baru bisa digunakan pada pertengahan bulan Januari sehingga sedikit menghambat proses penerbitan SPD;
																			- Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan baik dari data penerimaan dan data pengeluaran

		Persentase terselesaikannya SPP dan SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah;			100 Persen				100 Persen			100 Persen			100%	- Aplikasi sipd-ri baru bisa di gunakan untuk pembuatan akun BUD, Kuasa BUD, akun Sekda, akun PA SKPD serta akun PTTK baru dimulai pada pertengahan bulan JANuari sehingga proses kebawahnya baru bisa mengikuti setelah proses pembuatan akun tersebut selesai
		Persentase terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;			94.2 Persen				0 Persen			20 Persen			0%	- Bimtek untuk SKPD (Kasubbag Keuangan serta Bendahara SKPD) dilaksanakan dipertengahan bulan Januari; 1. Aplikasi penatausahaan masih dalam tahap

		Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungja waban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan			75 Persen				25 Persen			25 Persen			100%	terkait Penyusunan Raperda dan Pertasnggungja waban Pelaksanaan APBD ;
--	--	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	------	--

[illegible]

									desk input penatausahaan
									2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
									3. Perda Kab. Banjar No. 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024
									4. Perbup Kab. Banjar NO. 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024; - Antusias peserta Bimtek untuk mengikuti serta memahami aplikasi sipd-ri

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

									0 Persen			94.2 Persen			0%	mempengaruhi pada perhitungan Gaji P3K, sebagai jaln keluar SKPD mengajukan pergeseran RAK sesuai keperluan. ; 1. Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan baik dari data penerimaan dan data pengeluaran.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	----------------	--	--	----	--

					25 Persen			50 Persen			200%	2. Adanya aplikasi pendamping sipd yaitu silangkar, sehingga memerlukan waktu untuk pelaksanaan desk input kepada SKPD untuk pemakaian aplikasi silangkar tersebut.; Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan baik dari data penerimaan dan data pengeluaran.; Beberapa SKPD kurang Kooperatif dalam penyusunan laporan keuangan dan belum
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	------	--

									Persen 94.2 Persen 21.3 Persen 0 Persen			Persen Persen Persen			0% 0% 100%	
						Capaian terhadap target tahunan							17, 68	80,78	12,50 % 0% 50% 50% 0% 75,60 % 100%	
4	PROGRAM PENGELOL AAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib; Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	10 0	1.154.676.0 00	88.88 Persen 94.75 Persen	Triwula n 1	20,6 3	18,32	0 Persen 0 Persen	19, 38	11,10	22.22 Persen 20 Persen	93, 94	60,59	0% 0%	Faktor penghambat : 1. Sebagian SKPD terlambat dalam penyampaian Laporan BMD;

										Barang memahami mekanisme Pelaporan BMD. ; 1. Sebagian SKPD terlambat dalam penyampaian Laporan BMD; 2. Pengurus Barang kurang cermat dan teliti dalam pengumpulan data terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Sebagian SKPD merealisasikan Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan pada Triwulan IV. 4. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

									IV.
									4. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang.
									5. Tidak semua Pengurus Barang memahami mekanisme Pelaporan BMD.; 1. Sebagian SKPD terlambat dalam penyampaian Laporan BMD;
									2. Pengurus Barang kurang cermat dan teliti dalam pengumpulan data terkait

									penambahan dan pengurangan BMD; 3. Sebagian SKPD merealisasikan Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan pada Triwulan IV. 4. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang. ; Faktor pendorong : 1. Penyampaian Laporan BMD SKPD tepat waktu;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

						Triwulan 4	100,00	100	88.88 Persen 94.75 Persen	25,50	39,32	Persen Persen	25,50	39,32	0% 0%	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Capaian terhadap target tahunan							25,50	39,32	0% 0%	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah ; Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	100	3.604.330.710	4 Persen 80 Persen	Triwulan 1	44,18	38,21	4 Persen 15 Persen	43,04	4,81	7.7 Persen 22.67 Persen	97,41	12,58	192.50 % 151.13 %	Faktor penghambat : 1. Wajib Pajak yang datanya tidak ada ataupun pindah menjadi hambatan dalam proses peningkatan PAD 2. Masih perlunya peningkatan partisipasi bagi wajib pajak; Penyesuaian atas pergeseran kegiatan dan rekening disahkan pada bulan April 2024

								(triwulan II);
								Faktor pendorong :
								1. Adanya dukungan dari pimpinan
								2. Adanya Aplikasi Zona Nilai Tanah (ZNT)
								3. Penggunaan Pos pemantau MBLB
								4. Koordinasi dengan pendapatan Rumah Sakit Daerah
								5.Sinergitas dan solidaritas Tim dalam meningkatkan PAD ; 1.Peran aktif desa dalam kegiatan updating data objek dan subjek pajak

												2.Dukungan aplikasi pengelolaan pendapatan beserta pendampingnya telah bisa dimanfaatkan 3.Kenaikan pembayaran pajak melalui transaksi non tunai sebesar 25,7%;
												Faktor penghambat : 1. wp sulit ditemui, alamat wp tidak ditemukan, wp pindah tempat tanpa pemberitahuan, dankurangnya kesadaran dari wp untuk membayar pajak 2.wp tidak lengkap dalam melampirkan berkas permohonan

								keberatan
								3.wp tidak memberikan data yang valid
								4.beberapa wp masih kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi ;
								1.Kecilnya progres keuangan kegiatan pemutahiran data akibat rendahnya kinerja pihak mitra kegiatan pendataan tingkat RT pada kelurahan/desa
								2.Terbatasnya jumlah personil penilai pajak PBB sehingga kuantitas objek yang dinilai sedikit

								Persen								Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100	4 Persen 80 Persen	0	0	Persen Persen	0	0	0% 0%	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Capaian terhadap target tahunan							0	0	128,94% 0%	

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
SEKRETARIS - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik	Keuangan	Indikator	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Yang Terlaksana ;	10 0	52.048.20 9.632	76 Persen	Triwulan 1	35,8 2	41,81	0 Persen	34, 57	26,81	0 Persen	96,5 1	64,11	0%	Faktor penghambat : Tidak adanya capaian target dan realisasi pada Triwulan I, karena data terkait indikator baru bisa diperoleh pada Triwulan IV, dalam prosesnya tetap berkoordinasi antar Subbag Sekretariat BPKPAD (Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan dan Subbag
---	--	--	---------	--------------------	-----------	------------	-----------	-------	----------	-----------	-------	----------	-----------	-------	----	--

																		Kuangan dan Aset);
																		Faktor pendorong : Sinergitas seluruh Kasubbag dan Staf dalam berkoordinasi dan tim yang solid untuk membantu dalam kelancaran pada sub kegiatan;

						Triwulan 2	62,52	67,37	0 Persen	62,52	52,48	0 Persen	100,00	77,91	0%	Faktor penghambat : Tidak adanya capaian target dan realisasi pada Triwulan II, karena data terkait indikator baru bisa diperoleh pada Triwulan IV, dalam prosesnya tetap berkoordinasi antar Subbag Sekretariat BPKPAD (Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan dan Subbag
--	--	--	--	--	--	------------	-------	-------	----------	-------	-------	----------	--------	-------	----	---

[illegible]

						an 4	00			0						penghamb at : Faktor pendorong :
1	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencana an, pengangga ran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan;	10 0	80.365.90 0	100 Persentas e	Triwul an 1	22,7 7	18,84	25 Persentas e	22, 77	13,24	40 Persentase	100, 00	70,27	160	Faktor penghamb at : - Intensitas pekerjaan meningkat sehingga pekerjaan menjadi banyak yang tertunda - Masih dalam tahap pengkorek sian oleh mitra PPM Bappedalit bang - dokumen PK masih koreksi bagian organisasi - Kurang nya pemahama n

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																	terdapat beberapa usulan pagu yang tidak sesuai - Adaanya usulan yang sering berubah-ubah dari usulan yang sudah diusulkan sebelumnya - Keterbatasan waktu dalam melengkapi data dukung - Intensitas pekerjaan yang terlalu padat dan beruntun - Adanya perubahan sistem untuk pengecek
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

																Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100,00	100 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan;	100	45.956.103.738	100 Persentase	Triwulan 1	34,07	41,51	25 Persentase	34,07	26,40	25 Persentase	100,00	63,59	100	Faktor penghambat : 1. Aplikasi SIPD RI masih sering mengalami gangguan server dan jaringan. 2. Masih melakukan Input Harian Secara Manual karena sering nya aplikasi bermasalah 3. Banyak Dinas

																		Dinas yang terlambat melaporka n Penerimaan dan pengembal ian yang Dinas mereka Lakukan. 4. Untuk Menyajika n Data Harus dilakukan secara Manual karena aplikasi sering bermasala h dan belum semua kegiatan ter Input Di aplikasi sehingga sedikit memakan waktu yang lama ;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan;	100	20.606.600	100 Persentase	Triwulan 1	48,33	3,85	15 Persentase	48,33	0,00	15 Persentase	100,00	0,00	100	Faktor penghambat : 1. Bidang bidang masih ada yang terlambat menyampaikan usulan RKBMD nya dan Sebagian Dokumen dokumen yang masuk kadang banyak yang kurang lengkap sehingga menghambat proses menganalisa dan meneliti untuk di rekapitulasi jadi 1, serta beberapa
---	--	--	-----	------------	----------------	------------	-------	------	---------------	-------	------	---------------	--------	------	-----	--

																		Bidang sering melakukan perbaikan perbaikan atau mengulang bebeapa Barang yang sudah diajukan sehingga kadang RKBMD yang sudah dikumpulk an jadi satu harus diperbahar ui lagi 2. Rekonsilias i Tw 1 belum terlaksana karena masih menunggu jadwal dari Bid Aset 3. ;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan;	100	206.842.000	100 Persentase	Triwulan 1	29,73	98,35	25 Persentase	16,00	17,69	25 Persentase	53,83	17,98	100	Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah dan tidak sesuai serta pengaplikasian sistem aplikasi baru untuk penilaian yang eror atau dalam masa perbaikan.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan
---	---	---	-----	-------------	----------------	------------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------	-----	--

[illegible]

																	serta pengaplikasian sistem aplikasi baru untuk penilaian yang eror atau dalam masa perbaikan.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, Kerjasama
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern serta Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan.;
						Triwulan 3	76,88	100,00	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100,00	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawai	100	1.369.837.000	100 Persentase	Triwulan 1	35,44	71,64	25 Persentase	33,93	42,10	25 Persentase	95,75	58,77	100	Faktor penghambat : Target kinerja

		an Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan;														yang berubah dan tidak sesuai dan tidak tersediany a barang pada penyedia yang di tuju.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikas i intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana,
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern serta Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan.;
						Triwulan 2	54,28	82,74	25 Persentase	54,28	70,79	25 Persentase	100,00	85,55	100	Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah dan tidak sesuai dan tidak tersedianya barang pada penyedia yang di tuju.;

																	Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern serta Dukungan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan.;
						Triwulan 3	89,09	98,20	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100,00	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100	1.154.242.000	100 Persentase	Triwulan 1	78,75	44,01	90 Persentase	78,75	35,78	90 Persentase	100,00	81,30	100	Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah dan tidak sesuai dan tidak tersediany

		terlaksana sesuai dengan ketentuan;															a barang pada penyedia yang di tuju serta memerlukan waktu untuk pemesanan hingga pembelian barang/unit dari penyedia.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												dengan pihak pelaksana, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern serta Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan.;
												Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah dan tidak sesuai dan tidak tersedianya barang pada

																		penyedia yang di tuju serta memerlukan waktu untuk pemesanan hingga pembelian barang/unit dari penyedia.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan;	10 0	2.050.148. 394	100 Persentase	Triwulan 1	33,0 0	24,19	20 Persentase	23, 60	27,46	20 Persentase	71,5 2	113,53	100	Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah atau tidak sesuai dan tidak tersedianya barang pada penyediaan yang di tujuan.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan
---	---	---	---------	-------------------	-------------------	------------	-----------	-------	------------------	-----------	-------	------------------	-----------	--------	-----	---

																		2024;
																		Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak

																ekstern serta Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan.;
						Triwulan 3	85,50	78,63	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,00	100,00	25 Persentase	0,00	0,00		0,00	0,00	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100	1.210.064.000	100 Persen	Triwulan 1	34,96	39,73	35 Persen	37,46	18,29	35 Persen	107,15	46,04	100	Faktor penghambat : Target kinerja yang berubah dan tidak sesuai dan tidak tersediany

		terlaksana sesuai dengan ketentuan;												a barang pada penyedia yang di tuju.; Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

																	Faktor pendorong : Anggaran yang tersedia, Koordinasi atas usul di persiapan awal rencana anggaran kas, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern serta Dukungan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
KABID ANGGARAN - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik	Keuangan	Indikator	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertib dan baik;	Persentase tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertib dan baik;	100	1.373.893.000	100 Persen	Triwulan 1	14,43	9,35	15 Persen	12,71	3,29	15 Persen	88,12	35,21	100	Faktor penghambat : - tahapan perencanaan anggaran; Faktor pendorong : - tersedianya dokumen pendukung perencanaan anggaran - tersedianya pagu anggaran;
						Triwulan 2	44,07	38,88	30 Persen	43,36	11,04	30 Persen	98,38	28,38	100	Faktor penghamb

[illegible]

																Faktor pendorong
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
KABID AKUTANSI DAN PELAPORAN - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik	Keuangan	Indikator	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;	100	871.347.500	87.3 Persen	Triwulan 1	14,47	26,71	16 Persen	13,90	1,29	16 Persen	96,06	4,85	100	Faktor penghambat : 1.Beberapa SKPD Kurang kooperatif dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi yang disampaikan kurang akurat oleh SKPD

[illegible]

														dari belum memahami penginputan calk dengan format baru sehingga proses koreksi bolak balik.; Faktor pendorong : Kerjasama dan dukungan semua perangkat daerah, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.;
														Faktor penghambat : Faktor pendorong :

						Triwulan 4	100,00	100,00	21.3 Persen	10,00	5,99		10,00	5,99	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
--	--	--	--	--	--	------------	--------	--------	-------------	-------	------	--	-------	------	---	---

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
KABID PERBENDAHARAAN - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik	Keuangan	Indikator	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP)	100	227.660.623.900	100 Persen	Triwulan 1	30,52	99,90	100 Persen	30,27	25,88	100 Persen	99,18	25,91	100	Faktor penghambat : 1. Miskomunikasi dengan SKPD 2. Jaringan internet yang timbul tenggelam 3. Aplikasi sipd-ri yang sering down

		dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu;														sehingga menghambat pelaksanaan 4. Kesalahan hitung pada RAK terutama pada TPP dan Gaji PNS 5. Adanya mutasi dan atau promosi yang mengakibatkan selisih pada hitungan RAK SKPD; Faktor pendorong : 1. Intensitas komunikasi dengan SKPD 2. Pelaksanaan desk input yang mengurangi terjadinya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												kesalahan 3. Adanya kerja sama yang baik antara BPKPAD dan SKPD;
												Faktor penghambat : 1. Pada pertengahan Mei pengentryan RAK SKPD Aplikasi pendamping Sipd yaitu Silangkar, pelaksanaan di selesaikan oleh ketiga subbid pada Bidang Perbendaharaan, dimulai dari penyusunan RAK oleh subbid pengendalian anggaran dan

																	dilanjutkan desk input oleh subbid pengelolaan belanja daerah dan subbid belanja pegawai. 2. Banyak SKPD yang melapor terkait adanya aplikasi APPI, pelantikan P3K pada akhir Maret yang mempengaruhi perhitungan Gaji P3K, sebagai jalan keluar SKPD mengajukan pergeseran RAK sesuai keperluan;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																Faktor pendorong : 1. Seluruh SKPD (Bendahara dan Kasubbag Keuangan) dilingkungan pemkab Banjar 2. Tim Rekon Pendapatan 3. Tim Rekon Belanja ;
						Triwulan 3	90,10	99,98	100 Persen	53,99	84,57		59,92	84,59	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan 4	100,02	100,00	100 Persen	53,99	84,57		53,98	84,57	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola	Persentase Penunjang urusan kewenangan	100	10.000.000.000	100 Persentase	Triwulan 1	24,80	60,00	100 Persentase	24,80	0,18	100 Persentase	100,00	0,31	100	Faktor penghambat : Faktor pendorong :

	n Keuangan Daerah	gan pengelolan keuangan daerah;				Triwulan 2	49,40	60,00	100 Persentase	49,40	11,20	100 Persentase	100,00	18,67	100	Faktor penghambat : Aplikasi penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan baik dari data penerimaan dan data pengeluaran.; Faktor pendorong : Seluruh SKPD (Bendahara dan Kasubbag Keuangan) dilingkungan Pemkab Banjar ;
						Triwulan 3	100,00	100,00	100 Persentase	12,51	12,51		12,51	12,51	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
						Triwulan	100,	100,00	100	12,	12,51		12,5	12,51	0	Faktor

						n 4	00		Persentas e	51			1			penghamba t : Faktor pendorong :
3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan implem ntasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah ;	100	126.135.200	100 Persentas e	Triwulan 1	25,37	37,10	100 Persentas e	25,37	15,17	100 Persentas e	100,00	40,89	100	Faktor penghamb at : Faktor pendorong :
						Triwulan 2	50,31	59,13	100 Persentas e	50,31	39,81	100 Persentas e	100,00	67,32	100	Faktor penghamb at : 1. Aplikasi simgaji webbase dalam kondisi kendala jaringan 2. Adanya aplikasi API yang mengakibatkan banyak SKPD yang selisih hitungan pada perhitungan pajak Pph 21; Faktor pendorong :

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan

KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Periode 2022 – 2026

Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (%)	Indikator	

1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib;	100	1.154.676.000	94.75 Persentase	Triwulan 1	20,63	18,32	20 Persentase	19,38	11,10	20 Persentase	93,94	60,59	100	Faktor penghambat : 1. Sebagian SKPD terlambat dalam penyampaian Laporan BMD; 2. Pengurus Barang kurang cermat dan teliti dalam pengumpulan data terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Sebagian SKPD merealisasikan Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan pada Triwulan IV. 4. Koordinasi
---	---------------------------------	--	-----	---------------	------------------	------------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------	-----	---

																	internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausah aan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang. 5. Tidak semua Pengurus Barang memahami mekanisme Pelaporan BMD. ;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															Faktor pendorong : 1. Penyampaian Laporan BMD SKPD tepat waktu; 2. Pengurus Barang melaporkan dengan cermat dan teliti semua data terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan oleh semua SKPD lebih awal (tidak menumpuk realisasinya di Triwulan IV). 4. Koordinasi internal
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Sebagian SKPD merealisasikan Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan pada Triwulan IV.
																4. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang. ;

																		Faktor pendorong : 1. Penyampaian Laporan BMD SKPD tepat waktu; 2. Pengurus Barang melaporkan dengan cermat dan teliti semua data terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan oleh semua SKPD lebih awal (tidak menumpuk realisasinya di Triwulan IV). 4. Koordinasi internal
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																Faktor pendorong :
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Pengukuran Perjanjian Kerja Triwulanan
KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Tahunan			Triwulan	Target			Realisasi			Capaian (%)			Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Indikator	Fisik (%)	Keuangan (%)	Indikator	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh;	100	3.604.330.710	80 persentase	Triwulan 1	44,18	38,21	15 persentase	43,04	4,81	22.67 persentase	97,41	12,58	151.133333	Faktor penghambat : Penyesuaian atas pergeseran kegiatan dan rekening disahkan pada bulan April 2024 (triwulan II); 1. Wajib Pajak yang datanya

		Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah;			4 Persentase				4 Persentase			7.7 Persentase			192.5	tidak ada atapaun pindah menjadi hambatan dalam proses peningkatan PAD 2. Masih perlunya peningkatan partisipasi bagi wajib pajak; Faktor pendorong : 1.Peran aktif desa dalam kegiatan updating data objek dan subjek pajak 2.Dukungan aplikasi pengelolaan pendapatan beserta pendampingnya telah
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	----------------	--	--	-------	---

																bisa dimanfaatkan
																3.Kenaikan pembayara n pajak melalui transaksi non tunai sebesar 25,7%; 1. Adanya dukungan dari pimpinan 2. Adanya Aplikasi Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Penggunaa n Pos pemantau MBLB 4. Koordinasi dengan pendapatan Rumah Sakit Daerah 5.Sinergitas dan solidaritas

					Triwulan 2	69,16	61,54	35 persentase	66,33	19,05	40.44 persentase	95,92	30,96	115.5428571	Faktor penghambat : 1.Kecilnya progres keuangan kegiatan pemutakhiran data akibat rendahnya kinerja pihak mitra kegiatan pendataan tingkat RT pada kelurahan/desa 2.Terbatasnya jumlah personil penilai pajak PBB sehingga kuantitas objek yang dinilai sedikit 3.Terhambanya pembayaran jenis
--	--	--	--	--	------------	-------	-------	---------------	-------	-------	------------------	-------	-------	-------------	---

[illegible]

[illegible]

							4 Persentas e			12.93 Persentase			323.25	Faktor pendorong : 1.Nota kesepaham an antara Kabupaten Banjar dengan BPN telah ditandatang ani sebagai dasar pelaksanaa n pemutahira n data dan pembuatan peta bidang. 2.Telah digunakann ya aplikasi SI INTAN DARA sebagai support system pada perbaikan basis data PBB P2.; 1. "terlaksana nya
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	--	--------	---

[illegible]

[illegible]

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
KABID PENGENDALIAN PENDAPATAN - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Periode 2022 – 2026 Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
			Satuan	Target					
11	Terlaksananya peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	4	Triwulan 1	4	7,7	192,5	Faktor penghambat : 1. Wajib Pajak yang datanya tidak ada atapun pindah menjadi hambatan dalam proses peningkatan PAD 2. Masih perlunya peningkatan partisipasi bagi wajib pajak Faktor pendorong : 1. Adanya dukungan dari pimpinan 2. Adanya Aplikasi Zona Nilai Tanah (ZNT) 3. Penggunaan Pos pemantau MBLB 4. Koordinasi dengan pendapatan Rumah Sakit Daerah 5. Sinergitas dan solidaritas Tim dalam meningkatkan PAD
					Triwulan 2	4	12,93	323,25	

									1. wp sulit ditemui, alamat wp tidak ditemukan, wp pindah tempat tanpa pemberitahuan, dankurangnya kesadaran dari wp untuk membayar pajak 2.wp tidak lengkap dalam melampirkan berkas permohonan keberatan 3.wp tidak memberikan data yang valid 4.beberapa wp masih kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi Faktor pendorong : 1. "terlaksana nya kegiatan penyusunan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Terlaksananya koordinasi antar bidang dan tim yang baik 3. Terlaksanya kegiatan Sosialisasi dengan baik 4.Aplikasi (Sisapat, SIMPAD, PBBM Kab/Banjar, Sismiop, MonBPHTB), OTM online, transaction monitoring dan Bima PHR) dan Smartgov 5.'Surat keberatan dari wajib pajak		
							Triwulan 3	4	0	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
							Triwulan 4	4	0	0	Faktor penghambat : Faktor pendorong :

Tabel 2							
Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah							
Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Penanggung jawab
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	TW 1 = 15 % TW 2 = 40 % TW 3 = 75 % TW 4 = 95,36 %	Persen	42%	105%		Kaban
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli (PAD)	TW 1 = 4 % TW 2 = 4 % TW 3 = 4 % TW 4 = 4 %	Persen	22%	550%		Kaban
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	TW 1 = 40 % TW 2 = 60 % TW 3 = 70 % TW 4 = 76 %	Persen	60	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	Persen	57	114%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1 = 7 dokumen TW 2 = 0 TW 3 = 1 dokumen TW 4 = 1 dokumen	Dokumen	7	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBBAG PERENCANAAN
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 1 dokumen TW 4 =	Dokumen	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SUBBAG PERENCANAAN
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 1 dokumen TW 4 = 0	Dokumen	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	SUBBAG PERENCANAAN

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SUBBAG PERENCANAAN
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 1 dokumen TW 4 = 0	Dokumen	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	SUBBAG PERENCANAAN
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW 1 = 3 laporan TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 0	Laporan	3	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBBAG PERENCANAAN
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW 1 = 5 dokumen TW 2 = 5 dokumen TW 3 = 5 dokumen TW 4 = 4 dokumen	Dokumen	5	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUBBAG PERENCANAAN
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 25 % TW 2 = 25 % TW 3 = 25 % TW 4 = 25 %	Persen	25	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SUBBAG KEUANGAN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	TW 1 = 72 org/bulan TW 2 = 72 org/bulan TW 3 = 72 org/bulan TW 4 = 72 org/bulan	org/bulan	62 org/bulan	86.11%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUBBAG KEUANGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	TW 1 = 3 dokumen TW 2 = 3 dokumen TW 3 = 3 dokumen TW 4 = 3 dokumen	Dokumen	3 dokumen	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUBBAG KEUANGAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 2 Laporan TW 3 =2 Laporan TW 4=2 Laporan	Laporan	2 laporan	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUBBAG KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	TW 1 = 4 laporan TW 2 = 5 laporan TW 3 = 4 laporan TW 4 = 4 laporan	Laporan	5 Laporan	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan Triwulan Semesteran SKPD	SUBBAG KEUANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 15 % TW 2 = 55 % TW 3 = 15 % TW 4 = 15 %	Persen	55	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SUBBAG KEUANGAN
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 =0 TW 4=0	Dokumen	1	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SUBBAG KEUANGAN

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4 = 1 laporan	Laporan	1 laporan	100%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBBAG KEUANGAN
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 0	Laporan	1	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBBAG KEUANGAN
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 25 % TW 2 = 25 % TW 3 = 25 % TW 4 = 25 %	Persen	25	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	TW 1 = 3 dokumen TW 2 = 3 dokumen TW 3 = 3 dokumen TW 4 = 3 dokumen	Dokumen	3 dokumen	100%	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	SUBBAG UMPEG

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TW 1 = 13 Orang TW 2 = 26 Orang TW 3 = 14 Orang TW 4 = 14 Orang	Orang	26 Orang	100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 25 % TW 2 = 25 % TW 3 = 25 % TW 4 = 25 %	Persen	25	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3 paket	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3 paket	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUBBAG UMPEG

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4= 3 paket	Paket	3 paket	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUBBAG UMPEG
Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4= 3 paket	Paket	3 paket	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4= 3 paket	Paket	3 paket	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 90 % TW 2 = 0% TW 3 = 0 % TW 4 = 10 %	Persen		- 100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUBBAG UMPEG

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TW 1 = 20 Unit TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	0	100%	Pengadaan Mebel	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TW 1 = 54 Unit TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 1 Unit	Unit	55 Unit	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUBBAG UMPEG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 20 % TW 2 = 30% TW 3 = 25% TW 4 = 25 %	Persen	30	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TW 1 = 12 laporan TW 2 = 12 laporan TW 3 = 12 laporan TW 4 = 12 laporan	Laporan	12 Laporan	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUBBAG UMPEG

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW 1 =3 laporan TW 2 =4 laporan TW 3 =3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	4 laporan	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 35% TW 2 = 35% TW 3 = 20% TW 4 = 10%	Persen	35	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TW 1 = 1 Unit TW 2 = 0 TW 3 =0 TW 4 = 0	Unit	0	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SUBBAG UMPEG
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW 1 = 16 unit TW 2 = 16 unit TW 3 = 16 unit TW 4 = 9 unit	Unit	16 unit	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUBBAG UMPEG

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1 = 33 unit TW 2 = 33 unit TW 3 = 33 unit TW 4 = 32 unit	Unit	33 unit	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	1 Unit	100%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 1 unit TW 4 = 0	Unit	1 Unit	100%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUBBAG UMPEG

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	1 Unit	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUBBAG UMPEG
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	TW 1 = 3 dokumen TW 2 = 3 dokumen TW 3 = 3 dokumen TW 4 = 3 dokumen	Dokumen	3	100%	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TW 1 = 13 Orang TW 2 = 26 Orang TW 3 = 14 Orang TW 4 = 14 Orang	Orang	26	100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW 1 = 3 paket TW 2 = 3 paket TW 3 = 3 paket TW 4 = 3 paket	Paket	3	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TW 1 = 20 Unit TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	0	100%	Pengadaan Mebel	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TW 1 = 54 Unit TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 1 Unit	Unit	0	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TW 1 = 12 laporan TW 2 = 12 laporan TW 3 = 12 laporan TW 4 = 12 laporan	Laporan	12	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW 1 =3 laporan TW 2 =4 laporan TW 3 =3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	4	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TW 1 = 1 Unit TW 2 = 0 TW 3 =0 TW 4 = 0	Unit	0	0%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW 1 = 16 unit TW 2 = 16 unit TW 3 = 16 unit TW 4 = 9 unit	Unit	16	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1 = 33 unit TW 2 = 33 unit TW 3 = 33 unit TW 4 = 32 unit	Unit	33	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	1	100%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 1 unit TW 4 = 0	Unit	1	100%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW 1 = 1 unit TW 2 = 1 unit TW 3 = 0 TW 4 = 0	Unit	1	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Persen	100	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BIDANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya rancangan peraturan daerah (RAPERDA) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tertib dan Baik	TW 1 = 15% TW 2 = 30% TW 3 = 30% TW 4 = 25%	Persen	30	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BIDANG ANGGARAN

Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 2 dokumen TW 4=0	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 3 dokumen TW 4=0	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 = 1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	-	100%	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN

Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 2 dokumen TW 4=0	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 3 dokumen TW 4=0	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 = 1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	-	100%	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4= 2 dokumen	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4=2 dokumen	Dokumen		-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = TW 3 = 2 dokumen TW 4=	Dokumen		-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	KASUBBID ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = TW 3 = 2 dokumen TW 4=	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pit. KEPALA SUB BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = TW 3 = 2 dokumen TW 4=	Dokumen	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 1 dokumen TW 3 =0 TW 4=0	Dokumen	1	100%	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 1 dokumen TW 3 =0 TW 4=0	Dokumen	1	100%	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN

Meningkatnya penyaluran Belanja Daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian surat penyediaan dana (SPD), surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Persen	100	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BIDANG PERBENDAHARAAN
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	TW 1 = 22 dokumen TW 2 = 22 dokumen TW 3 = 22 dokumen TW 4 = 22 dokumen	Dokumen	22	100%	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SUBBID PENGENDALIAN ANGGARAN
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	TW 1 = 15 dokumen TW 2 = 15 dokumen TW 3 = 15 dokumen TW 4 = 15 dokumen	Dokumen	15	100%	Koordinas, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	SUBBID PENGENDALIAN ANGGARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	TW 1 = 8 laporan TW 2 = 10 laporan TW 3 = 8 laporan TW 4 = 10 laporan	Laporan	10	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak ketiga (PFK)	SUBBID BELANJA PEGAWAI
Tersedianya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	TW 1 = 47 dokumen TW 2 = 47 dokumen TW 3 = 47 dokumen TW 4 = 47 dokumen	Dokumen	47	100%	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	SUBBID BELANJA PEGAWAI

Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	TW 1 = 47 orang TW 2 = 47 orang TW 3 = 47 orang TW 4 = 47 orang	Orang	47	100%	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SUBBID PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Presentase pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 25% TW 2 = 75% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Persen	75	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	TW 1 = 3 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4 = 3 laporan	Laporan	3	100%	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SUBBID AKUNTANSI PENDAPATAN

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	TW 1 = 3 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	3	100%	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	TW 1 = 0 dokumen TW 2 = 0 dokumen TW 3 =1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	SUBBID AKUNTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Terhimpunnya rekonsiliasi dan verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	TW 1 = 0 dokumen TW 2 = 0 dokumen TW 3 =1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	TW 1 = 3 laporan TW 2 = 5 laporan TW 3 = 4 laporan TW 4= 6 laporan	Laporan	7	100%	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	SUBBID AKUNTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	TW 1 = 3 laporan TW 2 = 5 laporan TW 3 = 4 laporan TW 4 = 6 laporan	Laporan	7	100%	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 0 TW 4 = 0	Laporan	1	100%	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SUBBID EVALUASI DAN LAPORAN
Terhimpunnya data konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 0 TW 4 = 0	Dokumen	1	100%	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	TW 1 = 0 dokumen TW 2 = 2 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4 = 0 dokumen	Dokumen	2	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SUBBID AKUNTANSI PENDAPATAN

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	TW 1 =0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 =0 TW 4= 0	Dokumen	1	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	SUBBID AKUNTANSI PENDAPATAN
Terhimpunnya data penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	TW 1 = 0 dokumen TW 2 = 2 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 0 dokumen	Dokumen	2	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	TW 1 =0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 =0 TW 4= 0	Dokumen	0	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 =0 TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	SUBBID EVALUASI DAN LAPORAN

Terhimpunnya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya data penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 =0 TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 236 orang TW 4= 0	Orang	0	100%	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	SUBBID AKUNTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Terhimpunnya pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	TW 1 =0 TW 2 = 0 TW 3 = 236 orang TW 4= 0	Orang	0	100%	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	TW 1 = 1 aktivitas 29 lembaga TW 2 = 1 aktivitas 29 lembaga TW 3 = 1 aktivitas 29 lembaga TW 4= 1 aktivitas 29	aktivitas lembaga	29	100%	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	SUBBID AKUNTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN

		lembaga					
Terhimpunnya data pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina		aktivitas lembaga			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	TW 1 =0 TW 2 = 1 laporan TW 3 = 0 TW 4= 0	Laporan	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	SUBBID AKUNTANSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	TW 1 =0 TW 2 = 1 laporan TW 3 = 0 TW 4= 0	Laporan	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Terselesaikannya SPP dan SPM yang diajukan oleh PD	Persentase Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Persen	100	100%	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	BIDANG PERBENDAHARAAN

Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	TW 1 = 5 laporan TW 2 = 5 laporan TW 3 = 5 laporan TW 4= 5 laporan	Laporan	5	100%	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	SUBBID PENGENDALIAN ANGGARAN
Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	TW 1 = 100% TW 2 = 100% TW 3 = 100% TW 4 = 100%	Persen	100	100%	Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	BIDANG PERBENDAHARAAN
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	TW 1 = 2339dokuman TW 2 = 2339 dokuman TW 3 = 2339 dokuman TW 4= 2339 dokuman	Dokumen	2,339	100%	Implementasi dan pemeliharaan sisten informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	SUBBID BELANJA PEGAWAI
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	TW 1 = 0% TW 2 = 0% TW 3 = 0% TW 4 = 94.75%	Persen	11	100%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BIDANG BMD

Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	TW 1 = 0% TW 2 = 0% TW 3 = 0% TW 4 = 94.75%	Persen	11	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BIDANG BMD
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	TW 1 = 0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 = 0 TW 4 = 0	Dokumen	1	100%	Penyusunan Standar Harga	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 = 0 TW 4 = 0	Dokumen	0	0%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
Terfasilitasinya penatausahaan RKBMD dan RKBMD di kabupaten Banjar	Jumlah dokumen Terkumpulkan dan Terekapnya laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	TW 1 = 0 TW 2 = 1 dokumen TW 3 = 0 TW 4 = 0	Dokumen	1	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	Dokumen	0	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	Dokumen	0	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 1 Laporan TW 4 = 0	Laporan	0	100%	Inventarisasi Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 0 TW 4 = 15 laporan	Laporan	0	100%	Pengamanan Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 TW 2 = 0 TW 3 = 1 laporan TW 4 = 0	Laporan	0	100%	Penilaian Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Terfasilitasinya Penilaian BMD	Jumlah daftar hasil penilaian BMD	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 =1 laporan TW 4= 0	Laporan	0	100%	Penilaian Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Jumlah Kegiatan data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar yang bisa disajikan	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan penetapan status penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS

Terfasilitasinya penatausahaan pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen surat-menyurat yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah dokumen daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Jumlah berkas data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	TW 1 = 0 dokuman TW 2 = 0 dokumen TW 3 = 0 dokumen TW 4= 25 dokumen	Dokumen	4	100%	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Laporan	1	100%	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Laporan	1	100%	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terfasilitasinya rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di Kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Laporan	1	100%	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Laporan	1	100%	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

Meningkatnya pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Persentase capaian pendapatan asli daerah	TW 1 = 4% TW 2 = 4% TW 3 = 4% TW 4 = 4%	Persen	13	325%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
Meningkatnya pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	TW 1 = 4% TW 2 = 4% TW 3 = 4% TW 4 = 4%	Persen	13	325%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 = 1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terhimpunnya data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Fasilitasi data penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang terhimpun	TW 1 =0 TW 2 =0 TW 3 = 1 dokumen TW 4= 1 dokumen	Dokumen	0	100%	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	ANALIS PENDAPATAN DAERAH

Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 5 dokumen TW 4= 8 dokumen	Dokumen	1	50%	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Fasilitasi data penyusunan dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 5 dokumen TW 4= 8 dokumen	Dokumen	1	50%	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	ANALIS PENDAPATAN DAERAH
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	TW 1 = 1 laporan TW 2 =1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Laporan	1	100%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Terhimpunnya data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Fasilitasi data penyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4 = 1 laporan	Laporan	1	100%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENGADMINISTRASI PAJAK
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	TW 1 = 0 Unit TW 2 = 0 Unit TW 3 = 5 Unit TW 4 = 0 Unit	Unit	0	100%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Fasilitasi sarana dan prasarana pajak daerah	TW 1 = 0 Unit TW 2 = 0 Unit TW 3 = 5 Unit TW 4 = 0 Unit	Unit	0	100%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	ANALIS PENDAPATAN DAERAH
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	TW 1 = 2 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4 = 3 laporan	Laporan	3	100%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Subbid Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan

Terfasilitasinya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Penyusunan data objek dan subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB	TW 1 = 2 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	3	100%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Penyusunan data objek dan subjek pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, MBLB dan PBJT (PPJ),	TW 1 = 2 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	3	100%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Terlaksananya kegiatan penyusunan data objek dan subjek pajak daerah	Penyusunan data objek dan subjek pajak PBJT (Hotel, Parkir, dan Hiburan)	TW 1 = 2 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	3	100%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Terlaksananya kegiatan pendataan wajib pajak dan penerbitan NPWPD	Laporan penerbitan NPWPD baru untuk PBJT (resto) dan Pajak Reklame	TW 1 = 2 laporan TW 2 = 3 laporan TW 3 = 3 laporan TW 4= 3 laporan	Laporan	3	100%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENGADMINISTRASI PAJAK

Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	TW 1 = 1 laporan TW 2 =1 laporan TW 3 =1 laporan TW 4=1 laporan	1 laporan	1	100%	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Fasilitasi Data Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data pajak daerah	TW 1 = 1 laporan TW 2 =1 laporan TW 3 =1 laporan TW 4=1 laporan	2 laporan	1	100%	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	ANALIS PENDAPATAN DAERAH
Terhimpunnya data pelaporan pajak daerah yang telah di verifikasi	Fasilitasi Data pelaporan pajak daerah yang telah terhimpun dan diverifikasi	TW 1 = 1 laporan TW 2 =1 laporan TW 3 =1 laporan TW 4=1 laporan	2 laporan	1	100%	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	ANALIS PENDAPATAN DAERAH
Terpenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	TW 1 = 1300 objek pajak TW 2 = 3800 objek pajak TW 3 = 6300 objek pajak TW 4= 8300 objek pajak	Objek Pajak	2,863	100%	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Terhimpunnya objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Fasilitasi Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	TW 1 = 1300 objek pajak TW 2 = 3800 objek pajak TW 3 = 6300 objek pajak TW 4= 8300 objek pajak	Objek Pajak	2,683	70.60%	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	TW 1 =3 dokumen TW 2 =0 TW 3 = 0 TW 4 = 0	Dokumen	0	100%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
Terhimpunnya Penyusunan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	Jumlah Penyusunan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, pajak Reklame)	TW 1 =3 dokumen TW 2 =0 TW 3 = 0 TW 4 = 1	Dokumen	0	100%	Penetapan Wajib Pajak Daerah	PENGADMINISTRASI PAJAK
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layan pajak daerah)	TW 1 = 11 layanan TW 2 =11 layanan TW 3 =11 layanan TW 4=11 layanan	Layanan	11	100%	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Terfasilitasinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	TW 1 = 11 layanan TW 2 =11 layanan TW 3 =11 layanan TW 4=11 layanan	Layanan	11	100%	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	TW 1 = 4 dokumen TW 2 =4 dokumen TW 3 =4 dokumen TW 4=4 dokumen	Dokumen	4	100%	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 1 dokumen TW 3 = 1 dokumen TW 4 =5 dokumen	Dokumen	4	100%	Penagihan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terhimpunnya Penagihan Pajak Daerah	Fasilitasi Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 1 dokumen TW 3 = 1 dokumen TW 4 =5 dokumen	Dokumen	1	100%	Penagihan Pajak Daerah	PENGADMINISTRASI PAJAK

Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	TW 1 = 1 dokumen TW 2 =1 dokumen TW 3 =1 dokumen TW 4=1 dokumen	Dokumen	1	100%	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terhimpunnya data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Fasilitasi data penyusunan dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 dokumen TW 2 =1 dokumen TW 3 =1 dokumen TW 4=1 dokumen	Dokumen	1	100%	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	TW 1 = 1 dokumen TW 2 =2 dokumen TW 3 =3 dokumen TW 4 = 4 dokumen	Dokumen	2	100%	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Terlaksananya Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Fasilitasi Data Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 2 dokumen TW 3 = 3 dokumen TW 4 = 4 dokumen	Dokumen	2	100%	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	ANALIS PENAGIHAN PAJAK
Terhimpunnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Fasilitasi dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 dokumen TW 2 = 2 dokumen TW 3 = 3 dokumen TW 4 = 4 dokumen	Dokumen	2	100%	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengadministrasi Pajak
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (11 jenis pajak daerah, 1 retribusi daerah)	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4 = 1 laporan	Dokumen	1	100%	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Terhimpunnya data penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Fasilitasi Data Penyusunan Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhimpun	TW 1 = 1 laporan TW 2 = 1 laporan TW 3 = 1 laporan TW 4= 1 laporan	Dokumen	1	100%	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENGADMINISTRASI PAJAK
---	--	---	---------	---	------	---	-------------------------------

A. Program Utama

a. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS PP
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung Pelaksanaan APBD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
4. **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 5. **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**
 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

c. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari ke-4 (empat) program dan 15 kegiatan yang terdiri dari 15 Sub kegiatan pendukung dan 45 Sub kegiatan utama, target kinerja hasil/keluaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) mencapai untuk Realisasi Keuangan sebesar 48 % dan Realisasi Fisik mencapai 53,42 %. Uraian lebih lengkap mengenai capaian target kinerja program/kegiatan disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II (Bulan Mei) tahun 2024, terdapat catatan penting antara lain:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Hambatannya Penyusunan RKA Murni tahun 2025 karena penyusunan masih pada tahan Rankhir renja dan pagu masih belum ditetapkan.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Hambatan Pelaksanaannya di triwulan 3, akan tetapi penyusunan renja perubahan sudah dilaksanakan dengan mengusulkan pagu perubahan/ masih pada tahap penyusunan RKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Hambatan Pelaksanaannya di triwulan 3, akan tetapi penyusunan renja perubahan sudah dilaksanakan dengan mengusulkan pagu perubahan.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Hambatan pelaksanaan kegiatan di triwulan IV

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Hambatan pada sub kegiatan ini karena laporan keuangan terlaksana pada bulan Desember, sebagai bahan untuk pelaporan yaitu dengan adanya pelaporan tiap bulan dan rekonsialisasi dengan akuntansi dan asset.

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Indikator indikator : Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan:

Faktor Penghambat:

- Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III, di triwulan II (Bulan Mei) masih pada tahap RKPD, namun pada triwulan I sudah ada tahapan kegiatan yaitu Menyusun Perbub Nomor 50 tahun 2024 tentang standar harga satuan, SK Tim TAPD, Perbub Pergeseran 1 APBD TA.2024

Rencana Tindak Lanjut:

- Kegiatan dilaksanakan di triwulan III sesuai dengan perencanaan.

- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator indikator : Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan

- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Target sub kegiatan ini tidak tercapai
sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan:

Faktor Penghambat:

- Akan dilaksanakan pada triwulan 3

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

- Target sub kegiatan ini tidak tercapai
sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan:

Faktor Penghambat:

- Akan dilaksanakan pada triwulan 3
- Banyak Dinas Dinas yang lambat melaporkan Penerimaan dan pengembalian yang Dinas mereka Lakukan sehingga lap Keu yang seharusnya lebih cepat selesai akhirnya menjadi terlambat karena harus melakukan perbaikan lagi

Rencana Tindak Lanjut:

- Akan dilaksanakan rekon per SKPD
- Kegiatan dilaksanakan di triwulan III sesuai dengan perencanaan.

- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, -LO dan Beban.

Faktor Penghambat:

- Belum tersedianya laporan neraca,LO dan LPE

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinnasi dengan SKPD dan bidang aset yang baik

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- Target sub kegiatan ini tidak tercapai
sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan:

Faktor Penghambat:

- Dilaksanakan setelah penyusunan laporan keuangan Audited

- Menyesuaikan dengan surat edaran dari kemendagri RI terkait penyusunan Raperda dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rencana Tindak Lanjut:

- Akan dilaksanakan sesuai perencanaan

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelolaan Barang Milik

Indikator kegiatan : Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan.

- Penyusunan Standar Harga
Target Triwulan II masih dalam tahap proses penyusunan, untuk tersusunnya dokumen pada Triwulan III, tidak mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Respon SKPD Menanggapi Usulan Penyusunan Standar Harga
- SDM tidak memahami tugasnya dan SKPD terlambat mengusulkan ke BPKPAD
- Terbatasnya mobilisasi

Rencana Tindak Lanjut :

- Akan dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan
- Koordinasi Internal SKPD dalam hal pengajuan usulan standar harga.
- Penilaian Barang Milik Daerah
Target Triwulan II tidak mencapai target

Faktor penghambat :

- Belum ada Usulan Penilaian BMD dari

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan SKPD terkait penilaian BMD

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kegiatan :

- Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah
- Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Target Triwulan II masih dalam tahap update data wajib

pajak tidak mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menggunakan data yang lama (Data dari KPP-Pratama/sebelum peralihan) sehingga data yang ada masih blm akurat;
- Keterbatasannya waktu dan jumlah SDM dari BPKPAD dalam hal Pemutakhiran data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Rencana Tindak Lanjut :

- Komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa terkait Penelitian dan Verifikasi Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah terjalin baik sehingga mempermudah dalam pelaksanaan
- kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan

2. Program /Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan logistic Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan mebel
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Indikator indikator : Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

E. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

e. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. **Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 4 %.Persentase realisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 7,7%. dengan persentase capaian 192,5%. Perhitungan persentase realisasi Triwulan 1 diperoleh dari formulasi sebagai berikut:

Realisasi Tahun N - Realisasi Tahun N1/ Realiasasi Tahun N1 X 100 %

59.432.494.184 - 55.197.842.158/ 55.197.842.158 X 100% = 7.7 %

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mana target adalah 4 % realisasi 7,7 %

Perhitungan persentase realisasi Triwulan 2 diperoleh dari formulasi:

Realisasi Tahun N - Realisasi Tahun N1/ Realiasasi Tahun N1 X 100 %

145.227.372.036 - 119.179.622.349/119.179.622.349 X 100% = 21.9 (digunakan didalam perhitungan realisasi bulan Juni 2024)

4. **Program/Kegiatan Yang Tercapai Disebabkan Oleh :**

- Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- Dana tersedia dengan anggaran kas kegiatan
- Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
- Perencanaan yang matang dan tim yang terampil dan kolaboratif

Program/Kegiatan Yang Tidak Tercapai Disebabkan Oleh :

- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
- Dana tidak tersedia dengan anggaran kas kegiatan anggaran kas di triwulan III dan IV
- Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
- Faktor kendala teknis dan faktor internal lainnya

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD

Implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian program renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu perubahan kebijakan fiscal dan moneter yang mendukung pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan asset, perubahan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, Kerjasama yang baik antara BPKPAD dengan instansi lain dapat mempercepat realisasi program dan meningkatkan efektivitas pengelolaan,

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan II, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2024 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan II, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra BPKPAD Kabupaten

Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra BPKPAD untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
 - Menyampaikan informasi melalui media sosial atau website mengenai rekrutmen peserta pelatihan
 - Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target indikator capaian kinerja.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar

TABEL 2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja	Satua n	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi target Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)	Predik at		
							I		II		TK	Rp.	I		II		Realisas i Indik ator	Realis asi Keua ngan			Re alisas i Ind ika tor	Realisas i Keuang an
							T K	Rp.	TK	Rp.									TK	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,00	21		
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN																					
5.02	KEUANGAN																					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota Yang Terlaksana	52.048.209.6 32	76	Perse n	0	21.769.7 91.224	0	30.914.5 14.278	0	30.914.51 4.278	0	13.95 2.337 .059	0	22.019. 422.581	0	22.019.42 2.581	#DIV/0!			
5.02.01.2.01	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanany a Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan	Persentase dokumen perencanaan , penganggara n dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan	80.365.900	100	Perse ntase	4 0	15.141.0 00	20	25.373.5 00	20	25.373.50 0	40	10.64 0.000	20	20.122. 500	20	20.122.50 0	100,00			

		ketentuan	ketentuan																
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.484.400	9	Doku men	7	5.144.000	7	7.894.000	7	7.894.000	7	3.144.000	7	5.894.000	7	5.894.000	100,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.267.000	1	Doku men	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.673.500	1	Doku men	0	-	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.630.500	1	Doku men	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.103.500	1	Doku men	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!

5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.103.500	3	Laporan	3	8.022.000	3	12.239.500	3	12.239.500	3	6.272.000	3	12.239.500	3	12.239.500	100,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.103.500	19	Dokumen	4	1.975.000	9	2.740.000	9	2.740.000	4	1.224.000	4	1.989.000	9	1.989.000	100,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	45.956.103.738	100	Persentase	25	19.076.08.965	25	27.261.569.525	25	27.261.569.525	25	12.131.041.362	25	19.261.846.307	25	19.261.846.307	100,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45.463.290.238	72	Orang /Bulan	72	18.916.298.065	72	26.985.948.625	72	26.985.948.625	63	12.012.767.962	63	19.059.510.307	72	19.059.510.307	100,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya a Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	466.651.900	12	Dokumen	3	152.858.800	6	261.807.100	6	261.807.100	3	111.421.300	3	191.337.100	6	191.337.100	100,00	

5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.800	2	Laporan	1	4.037.600	2	8.184.400	2	8.184.400	1	4.037.600	1	8.184.400	2	8.184.400	100,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	11.161.800	18	Laporan	4	2.814.500	9	5.629.400	9	5.629.400	4	2.814.500	4	2.814.500	9	2.814.500	100,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	20.606.600	100	Persentase	15	792.400	55	16.774.800	55	16.774.800	15	-	55	14.446.800	55	14.446.800	100,00	
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.507.900	1	Dokumen	0	-	1	2.507.900	1	2.507.900	0	0	1	2.507.900	1	2.507.900	100,00	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.024.500	4	Laporan	1	792.400	2	1.536.700	2	1.536.700	0	0	0	1.536.700	0	1.536.700	0,00	

5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.074.200	1	Laporan	0	-	1	12.730.200	1	12.730.200	0	0	1	10.402.200	1	10.402.200	100,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	206.842.000	100	Persentase	25	203.421.000	25	203.421.000	25	203.421.000	25	36.581.286	25	48.581.286	25	48.581.286	100,00	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.842.000	12	Dokumen	3	3.421.000	6	3.421.000	6	3.421.000	3	0	6	-	6	-	100,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	50	Orang	13	200.000.000	26	200.000.000	26	200.000.000	13	36.581.286	26	48.581.286	26	48.581.286	100,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	1.369.837.000	100	Persentase	25	981.393.968	25	1.066.746.469	25	1.066.746.469	25	576.747.317	25	872.291.565	25	872.291.565	100,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28.638.000	12	Paket	3	7.159.500	6	13.125.750	6	13.125.750	3	7.078.500	6	11.826.000	6	11.826.000	100,00	

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59.712.000	12	Paket	3	32.216.338	6	39.707.169	6	39.707.169	3	6.372.000	6	15.053.500	6	15.053.500	100,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.260.000	12	Paket	3	7.080.000	6	11.800.000	6	11.800.000	3	6.462.500	6	10.812.000	6	10.812.000	100,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	88.127.000	12	Paket	3	26.438.130	6	44.063.550	6	44.063.550	3	23.726.000	6	36.241.000	6	36.241.000	100,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.112.100.000	12	Laporan	3	908.500.000	6	958.050.000	6	958.050.000	3	533.108.317	6	798.359.065	6	798.359.065	100,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	1.154.242.000	100	Persentase	90	507.936.000	0	507.936.000	0	507.936.000	90	412.968.000	0	475.855.000	0	475.855.000	#DIV/0!	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24.042.000	20	Unit	20	24.042.000	0	24.042.000	0	24.042.000	20	0	0	24.017.000	0	24.017.000	#DIV/0!	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.130.200.000	55	Unit	54	483.894.000	0	483.894.000	0	483.894.000	47	412.968.000	47	451.838.000	47	451.838.000	#DIV/0!	

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	2.050.148.394	100	Perse	20	504.348.391	30	947.463.984	30	947.463.984	20	563.029.195	30	866.608.030	30	866.608.030	100,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	376.823.394	48	Laporan	12	110.054.540	24	182.890.899	24	182.890.899	12	93.618.549	24	154.352.174	24	154.352.174	100,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.673.325.000	13	Laporan	3	394.293.851	7	764.573.085	7	764.573.085	3	469.410.646	7	712.255.856	7	712.255.856	100,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	1.210.064.000	100	Perse	35	480.749.500	35	885.229.000	35	885.229.000	35	221.329.899	35	459.671.093	35	459.671.093	100,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38.990.000	1	Unit	1	9.747.500	0	19.495.000	0	19.495.000	1	7.655.920	0	11.728.875	0	11.728.875	#DIV/0!	

5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	620.860.000	57	Unit	16	193.020.000	32	386.040.000	32	386.040.000	15	147.813.979	15	275.482.218	15	275.482.218	46,88	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106.170.000	131	Unit	33	35.530.000	66	68.990.000	66	68.990.000	32	8.700.000	32	18.040.000	32	18.040.000	48,48	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	279.300.000	2	Unit	1	150.000.000	1	279.300.000	1	279.300.000	1	3.900.000	1	95.500.000	1	95.500.000	100,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	115.064.000	3	Unit	1	80.032.000	2	106.564.000	2	106.564.000	1	45.000.000	2	46.920.000	2	46.920.000	100,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	49.680.000	2	Unit	1	12.420.000	2	24.840.000	2	24.840.000	2	8.260.000	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase terselesaikannya SPP dan SPM yang diajukan	240.031.999.600	100	Perse n	100	233.892.876.800	100	234.591.715.300	100	234.591.715.300	100	59.019.570.900	100	59.019.570.900	100	59.019.570.900	100,00	

		(IPKAD)	oleh Perangkat Daerah																
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertib dan baik	1.373.893.000	100	Perse n	15	165.229.300	10	515.903.800	10	515.903.800	15	45.251.500	10	45.251.500	10	45.251.500	100,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	70.000.000	2	Doku men	0	-	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	70.000.000	2	Doku men	0	-	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	235.494.500	2	Doku men	0	6.070.000	0	145.744.500	0	145.744.500	0	6.000.000	0	23250000	0	23.250.000	#DIV/0!
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	323.139.200	2	Doku men	0	-	0	18.014.000	0	18.014.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!

5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	229.100.000	2	Dokumen	0	-	0	4.986.000	0	4.986.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54.400.000	3	Dokumen	0	47.400.000	0	47.400.000	0	47.400.000	0	10.688.000	0	10688000	0	10.688.000	#DIV/0!	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	391.759.300	2	Dokumen	1	111.759.300	1	251.759.300	1	251.759.300	1	28.563.500	1	69.604.300	1	69.604.300	100,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya penyaluran Belanja Daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	227.660.623.900	100	Perse n	100	227.434.088.900	100	227.456.775.900	100	227.456.775.900	100	58.925.609.200	100	118.500.153.675	100	118.500.153.675	100,00	

5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya a Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen RAK dan SPD yang diterbitkan	140.595.500	88	Dokumen	44	45.244.000	44	45.244.000	44	45.244.000	44	12.500.000	44	45.244.000	44	45.244.000	100,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya	Terlaksananya a Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya	227.049.520.600	60	Dokumen	0	227.036.021.100	0	227.042.928.100	0	227.042.928.100	0	58.885.573.400	0	118.385.895.875	0	118.385.895.875	#DIV/0!	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	69.657.800	36	Laporan	0	11.353.800	0	27.133.800	0	27.133.800	0	3.535.800	0	15.133.800	0	15.133.800	#DIV/0!	

			Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
5.02.02.2.02 .0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	173.000.000	47	Dokumen	0	149.020.000	0	149.020.000	0	149.020.000	0	0	0	20.380.000	0	20.380.000	#DIV/0!
5.02.02.2.02 .0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	227.850.000	47	Orang	47	192.450.000	47	192.450.000	47	192.450.000	47	24.000.000	47	33.500.000	47	33.500.000	100,00

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Presentase pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	871.347.500	87.3	Perse n	1 6	246.764. 600	25	549.448. 400	25	549.448.4 00	25	246.7 64.60 0	25	246.764 .600	25	246.764.6 00	100,00	
5.02.02.2.03 .0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	23.140.000	12	Lapor an	3	5.638.20 0	6	10.479.0 00	6	10.479.00 0	3	0	3	2.138.0 00	3	2.138.000	50,00	
5.02.02.2.03 .0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	46.890.000	2	Doku men	0	15.117.0 00	0	15.117.0 00	0	15.117.00 0	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	
5.02.02.2.03 .0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	81.898.000	18	Lapor an	3	-	5	14.537.0 00	5	14.537.00 0	3	0	3	11.208. 000	3	11.208.00 0	60,00	

	dan Semesteran	Semesteran	Semesteran																	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	155.800.000	2	Laporan	1	98.525.000	1	155.800.000	1	155.800.000	1	11.275.000	1	139.572.400	1	139.572.400	100,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.991.000	2	Dokumen	0	-	2	218.991.000	2	218.991.000	0	0	0	20.032.400	0	20.032.400	0,00	
																		-		
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	69.410.000	1	Dokumen	0	61.152.400	1	61.152.400	1	61.152.400	0	0	0	1.107.600	0	1.107.600	0,00	

	Kerugian Daerah	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	84.933.000	1	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	127.193.500	236	Orang	0	10.560.000	0	17.600.000	0	17.600.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibangun	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibangun	10.890.000	29	Lembaga	0	3.570.000	0	3.570.000	0	3.570.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	52.202.000	1	Laporan	1	52.202.000	0	52.202.000	0	52.202.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	#DIV/0!
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselesaikannya SPP dan SPM yang diajukan oleh PD	Persentase Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	10.000.000.000	100	Persentase	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	18.300.000	100	899.613.800	100	899.613.800	100,00

5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	20	Laporan	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0	18.300.000	0	899.613.800	0	899.613.800	#DIV/0!	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	126.135.200	100	Persentase	100	46.794.000	100	69.587.200	100	69.587.200	100	19.135.200	100	50.210.200	100	50.210.200	100,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	126.135.200	9356	Dokumen	0	46.794.000	0	69.587.200	0	69.587.200	0	19.135.200	0	50.210.200	0	50.210.200	#DIV/0!	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	1.154.676.000	94.75	Perse	0	211.521.500	0	513.177.000	0	513.177.000	0	128.158.000	0	219.272.500	0	219.272.500	#DIV/0!	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	1.154.676.000	94.75	Persentase	0	211.521.500	0	513.177.000	0	513.177.000	0	128.158.000	0	219.272.500	0	219.272.500	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	282.421.000	1	Dokumen	0	122.421.000	1	282.421.000	1	282.421.000	0	71.774.000	0	120.274.000	0	120.274.000	0,00	

5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	63.593.000	1	Dokumen	0	-	1	2.593.000	1	2.593.000	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	426.830.500	6	Laporan	0	68.366.500	0	183.406.500	0	183.406.500	3	38.750.000	3	63.014.500	3	63.014.500	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	90.765.000	1	Laporan	0	-	0	3.165.000	0	3.165.000	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	34.537.500	15	Laporan	0	1.000.000	0	4.537.500	0	4.537.500	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	104.175.000	1	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.690.000	25	Dokumen	0	2.000.000	0	5.890.000	0	5.890.000	3	0	3	3.000.000	3	3.000.000	#DIV/0!	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	53.664.000	4	Laporan	0	17.734.000	0	31.164.000	0	31.164.000	1	17.634.000	1	30.934.000	1	30.934.000	#DIV/0!	

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	3.604.330.710	4	Perse n	4	1.547.033.100	4	2.166.715.400	4	2.166.715.400	4	173.281.026	4	477.884.131	4	477.884.131	100,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	3.604.330.710	80	perse ntase	15	1.547.033.100	35	2.166.715.400	35	2.166.715.400	35	173.281.026	35	477.884.131	35	477.884.131	100,00	
			Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah		4	Perse ntase	4		4		4	-	4		4	4	4	4	100,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9.448.000	2	Doku men	0		0	5.338.000	0	5.338.000	0	0	0	1.782.000	0	1.782.000	#DIV/0!	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100.502.500	8	Doku men	1	96.282.000	2	100.502.500	2	100.502.500	1	3.726.000	1	7.002.500	1	7.002.500	50,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	123.345.000	4	Lapor an	1	36.104.100	2	75.528.000	2	75.528.000	2	31.187.500	2	44.407.500	2	44.407.500	100,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	210.462.500	5	Unit	0	185.735.000	0	191.230.000	0	191.230.000	0	4.830.000	0	21.760.000	0	21.760.000	#DIV/0!	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah,	1.509.258.810	11	Lapor an	2	759.115.000	5	1.229.508.500	5	1.229.508.500	2	25.350.000	2	58.516.000	2	58.516.000	40,00	

			Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah																
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	33.933.500	4	Laporan	1	30.933.500	1	31.933.500	1	31.933.500	1	18.752.500	1	30.933.500	1	30.933.500	100,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	64.978.500	8300	Objek Pajak	1300	29.480.000	3800	43.055.000	3.800	43.055.000	1363	23.250.000	1363	43.055.000	1363	43.055.000	35,87
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame)	59.789.000	3	Dokumen	3	3.250.000	3	16.873.000	3	16.873.000	3	3.250.000	3	16.873.000	3	16.873.000	100,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (11 jenis layanan pajak daerah)	121.259.400	11	Layanan	11	40.191.000	0	60.582.400	0	60.582.400	11	40.191.000	11	60.582.400	11	60.582.400	#DIV/0!
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54.590.000	16	Dokumen	4	40.859.000	4	40.859.000	4	40.859.000	4	0	4	24.634.500	4	24.634.500	100,00

5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	986.070.400	5	Dokumen	1	267.548.400	2	283.548.400	2	283.548.400	1	0	1	99.441.566	1	99.441.566	50,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15.750.500	1	Dokumen	1	9.750.500	1	12.750.500	1	12.750.500	1	4.227.000	1	4.277.000	1	4.277.000	100,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	302.754.600	4	Dokumen	1	47.784.600	1	70.374.600	1	70.374.600	1	18.517.026	1	59.987.165	1	59.987.165	100,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi saksi Pemerintah Daerah (11 jenis pajak daerah, 1 retribusi daerah)	12.188.000	4	Laporan	1	-	2	4.632.000	2	4.632.000	2	0	2	4.632.000	2	4.632.000	100,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Rencana Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024.
 - Perubahan target pada beberapa Sub kegiatan
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan rencana kerja yaitu 4 (empat) program dan 15 kegiatan yang terdiri dari 36 Sub kegiatan pendukung dan 45 Sub kegiatan utama.
 - Total kebutuhan dana setelah hasil Perubahan RKA Tahun Anggaran 2024 Rp.317,454,039,013,00 dengan sumber dana berasal dari DAU, PAD, Dana Desa.
2. **Alasan dilakukan perubahan** anggaran pada renja BPKPAD Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2024 ini , sebagai berikut :
 1. Reviu Renstra BPKPAD sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan yang menyesuaikan Kepmendagri nomor 050-5889 dan telah dituangkan di dalam Renstra Perubahan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH yang ditetapkan dengan Perbub nomor 63 tahun 2021.

2. Adanya pelaksanaan proyek prioritas Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan Perubahan renja 2024 sebagai berikut :
 - a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
 - b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan
 - c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program
 - d. Perubahan target program/kegiatan /sub kegiatan
 - e. Penambahan pagu untuk BPJS Kesehatan pada sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
 - f. Penambahan 2 Sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun Sub Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Karena Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Adanya penambahan pagu dari masing-masing bidang dan mengurangi uang saku / sportasi non ASN
6. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Reklas kode Belanja

7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Adanya penambahan sub kegiatan
8. Pengadaan Mebel
Adanya penambahan sarana dan prasarana kantor
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Adanya penambahan sarana dan prasarana kantor
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Adanya pengurangan upah pegawai non ASN yang diterima menjadi pegawai PPPK
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) .
Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
13. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Adanya penambahan honorarium narasumber
14. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Adanya Penambahan honorarium TAPD
15. Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban
Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
16. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Menambah Belanja Box Countainer dan Makan Minum Rapat
17. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

18. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah).
Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
19. Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Operasional penyelenggaraan Akutansi Pemerintah daerah
Belanja ATK
20. Penyusunan Standar Harga
Adanya Penambahan Belanja Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi
Terkait penyusunan SHBJ, ASB, da HSPK 2025
21. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah
Penambahan Belanja Bahan Cetak dan Alat Kantor
22. Penatausahaan Barang Milik daerah
Adanya Kegiatan Sosialisasi dan BMD
23. Inventarisasi Barang Milik
Penambahan Belanja Bahan Cetak dan Alat Kantor
24. Pengamanan barang Milik daerah
Adanya Honorarium Narasumber dengan Kejaksaan
25. Penilaian Barang Milik daerah
Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
26. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah
Adanya Belanja Makan dan Minum Rapat
27. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah
Adanya Belanja Makan dan Minum Rapat
28. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

30. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Adanya Penambahan Fitur Aplikasi Smart Gov Tax ation maps

31. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Adanya Penambahan Belanja ATK

32. Penagihan Pajak Daerah

Adanya Pengurangan Bahan Cetak

33. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adanya pengerungan belanja jasa tenaga pelayanan umum

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Pada Perubahan Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024								
SKPD : BPKPAD								
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU			Alasan Perubahan
	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
I	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
URUSAN								
WAJIB								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
KEUANGAN								
PROGRAM 1								
					296,839,215,942	317,454,039,013	20,614,823,071	10,430,347,999
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Pencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	76%	76%	52,048,209,632	65,387,667,703	13,339,458,071	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100%	100%	80,365,900	77,251,200	(3,114,700)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	16,484,400	13,076,600	(3,407,800)	Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,267,000	10,267,000	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,673,500	7,673,300	(200)	Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,630,500	8,130,400	(2,500,100)	Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,103,500	8,103,500	(2,000,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	15,103,500	18,410,500	3,307,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan	10,103,500	11,589,900	1,486,400	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	19 Laporan	19 Laporan	0	0	0	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	19 Laporan	19 Laporan	0	0	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100%	100%	45,956,103,738	56,882,068,589	10,925,964,851	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	72 Orang/Bulan	45,463,290,238	56,362,885,089	10,899,594,851	Penambahan BPJS Kesehatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	466,651,900	495,521,900	28,870,000	Adanya perubahan Honor PPTK & PPK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14,999,800	12,499,800	(2,500,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	11,161,800	11,161,800	0	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang	100%	100%	20,606,600	15,934,600	(4,672,000)	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,507,900	2,507,900	0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3,024,500	3,024,500	0	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,074,200	10,402,200	(4,672,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian	76%	76%	206,842,000	156,842,000	(50,000,000)	

		Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	6,842,000	6,842,000	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10 Orang	10 Orang	200,000,000	150,000,000	(50,000,000)	Pergeseran dimasukkan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	76%	76%	1,369,837,000	2,105,837,000	736,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28,638,000	28,638,000	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	59,712,000	59,712,000	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	81,260,000	81,260,000	0	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	88,127,000	88,127,000	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,112,100,000	1,848,100,000	736,000,000	Adanya penambahan pagu dari masing-masing bidang dan mengurangi uang saku / transportasi non ASN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan	76%	76%	1,154,242,000	2,740,707,300	1,586,465,300	

Pemerintah Daerah		pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1	0	570,000,000	570,000,000	Adanya kesalahan penginputan rincian belanja pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	2	0	684,000,000	684,000,000	Mobil Operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk kelapangan mendata wajib pajak, Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan, perkotaan dan BPHTB) & (Bidang Pengendalian Pendapatan untuk kelapangan menangani keberatan wajib pajak, penagihan dan keberatan pajak daerah wajib pajak daerah)
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	34 Unit	24,042,000	103,342,000	79,300,000	Adanya penambahan sarana dan prasarana kantor karena mebel yang ada mengalami kerusakan dan tidak dapat di gunakan kembali
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit	47 Unit	1,130,200,000	1,383,365,300	253,165,300	Adanya penambahan sarana dan prasarana kantor untuk pembelian belanja modal untuk menunjang kinerja BPKPAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	76%	76%	2,050,148,394	2,080,147,014	29,998,620	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	376,823,394	406,822,014	29,998,620	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1,673,325,000	1,673,325,000	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	76%	76%	1,210,064,000	1,328,880,000	118,816,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38,990,000	38,990,000	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit	620,860,000	629,455,000	8,595,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131 Unit	131 Unit	106,170,000	116,390,000	10,220,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	279,300,000	379,301,000	100,001,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	3 Unit	115,064,000	115,064,000	0	

		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	49,680,000	49,680,000	0	
PROGRAM 2								
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	92.58%	92.58%	240,031,999,600	246,929,621,600	6,897,622,000	
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	100.00%	100.00%				
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	88.88%	88.88%				
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%	100%	1,373,893,000	1,325,394,000	(48,499,000)	

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	64,500,000	(5,500,000)	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	64,500,000	(5,500,000)	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	94 Dokumen	2 Dokumen	235,494,500	197,995,500	(37,499,000)	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	323,139,200	323,139,200	0	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	229,100,000	229,100,000	0	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	54,400,000	54,400,000	0	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	391,759,300	391,759,300	0	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya penyaluran Belanja Daerah yang tertib dan baik	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja	100%	100%	227,660,623,900	234,691,644,900	7,031,021,000	

		Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu						
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88 Dokumen	88 Dokumen	140,595,500	140,595,500	0	
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	60 Dokumen	227,049,520,600	234,105,589,600	7,056,069,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	36 Laporan	69,657,800	64,609,800	(5,048,000)	Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	47 Dokumen	47 Dokumen	173,000,000	133,800,000	(39,200,000)	Adanya pengurangan makan dan minum rapat

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	47 Orang	227,850,000	247,050,000	19,200,000	Adanya penambahan honorarium narasumber
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan baik	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100%	100%	871,347,500	803,347,500	(68,000,000)	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	23,140,000	10,240,000	(12,900,000)	Adanya Penambahan honorarium TAPD
Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLo dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	2 Dokumen	46,890,000	15,490,000	(31,400,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	18 Laporan	18 Laporan	81,898,000	87,698,000	5,800,000	Belanja Box Countainer dan Makan Minum Rapat

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	155,800,000	142,572,400	(13,227,600)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	218,991,000	208,191,000	(10,800,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	69,410,000	19,610,000	(49,800,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah Kebijakan dan Panduan	1 Dokumen	1 Dokumen	84,933,000	117,260,600	32,327,600	Belanja ATK

Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah daerah	Pemerintah Daerah	Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	236 Orang	236 Orang	127,193,500	139,193,500	12,000,000	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang dibina	29 Lembaga	29 Lembaga	10,890,000	10,890,000	0	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan	52,202,000	52,202,000	0	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	Terselesaikannya SPP dan SOM yang diajukan oleh PD	Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu	100	100	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem	Terselesaikannya SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan	Persentase penyelesaian Surat	100	100	126,135,200	109,235,200	(16,900,000)	

Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	ketentuan	Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu						
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	9,356	3,734	126,135,200	109,235,200	(16,900,000)	
PROGRAM 3								
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	93	93	1,154,676,000	1,484,015,000	329,339,000	
Pengelolaan Barang Milik daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	93,25	93,25	1,154,676,000	1,484,015,000	329,339,000	
Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	282,421,000	555,814,000	273,393,000	Adanya Penambahan Belanja Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi Terkait penyusunan SHBJ, ASB, da HSPK 2025
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	63,593,000	67,175,000	3,582,000	Penambahan Belanja Bahan Cetak dan Alat Kantor

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	
Penatausahaan Barang Milik daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	4 Laporan	426,830,500	431,230,500	4,400,000	Adanya Kegiatan Sosialisasi dan BMD
Inventarisasi Barang Milik	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	90,765,000	92,409,000	1,644,000	Penambahan Belanja Bahan Cetak dan Alat Kantor
Pengamanan barang Milik daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	15 Laporan	15 Laporan	34,537,500	114,287,500	79,750,000	Adanya Honorarium Narasumber dengan Kejaksaaan
Penilaian Barang Milik daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	2 Laporan	104,175,000	39,175,000	(65,000,000)	Pergeseran dimasukan ke rekening penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			0	0	0	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang Milik daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	40 Dokumen	98,690,000	101,190,000	2,500,000	Adanya Belanja Makan dan Minum Rapat
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan barang Milik daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	53,664,000	82,734,000	29,070,000	Adanya Belanja Makan dan Minum Rapat
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		2 Laporan	0	0	0	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah		375 Orang	0	0	0	

		Kabupaten/Kota						
PROGRAM 4								
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	98%	98%	3,604,330,710	3,652,734,710	48,404,000	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	4%	4%	3,604,330,710	3,652,734,710	48,404,000	
		Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh	80%	80%	3,604,330,710	3,652,734,710	48,404,000	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9,448,000	9,448,000	0	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,502,500	96,602,500	(3,900,000)	Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	123,345,000	90,419,000	(32,926,000)	Pemindahan Pagu Ke Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	15 Unit	210,462,500	254,692,500	44,230,000	Penambahan Plang Parkir
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	1,509,258,810	1,584,258,810	75,000,000	Adanya Penambahan Fitur Aplikasi Smart Gov Tax ation maps
Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil	4 Laporan	4 Laporan	33,933,500	33,933,500	0	

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8300 Objek Pajak	8300 Objek Pajak	64,978,500	64,978,500	0	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	59,789,000	59,789,000	0	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	11 Layanan	121,259,400	141,259,400	20,000,000	Adanya Penambahan Belanja ATK
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	16 Dokumen	54,590,000	54,590,000	0	
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	986,070,400	993,434,400	7,364,000	Adanya Pengurangan Bahan Cetak
Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15,750,500	15,750,500	0	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	302,754,600	241,390,600	(61,364,000)	Adanya pengerungan belanja jasa tenaga pelayanan umum
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12,188,000	12,188,000	0	

BAB IV

PENUTUP

2.2. 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2024

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Strategis BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banjar 2021-2026.

Sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, Rencana kerja (Renja) Perubahan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu Restra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026.

2.3. 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2024 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 BPKPAD Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh rencana kerja perubahan tersebut.

2. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk mengarahkan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan.
3. Penentuan Prioritas: Menentukan prioritas perubahan yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Perencanaan Taktis: Rinci langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan
5. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan perubahan yang akurat dan efektif.
6. lokasi Sumber Daya: Menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan.

2.4. 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut BPKPAD Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Evaluasi situasi saat ini di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, identifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi.
2. Tujuan dan Sasaran: menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta sasaran yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan waktu-batas (SMART) untuk perubahan yang diinginkan.
3. Strategi Perubahan: Merencanakan strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang akan melibatkan perubahan struktural, program pelatihan, peningkatan layanan, atau langkah-langkah lainnya.
4. Kegiatan dan Rencana Aksi: Membuat rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.

5. Monitoring dan Evaluasi: menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan keberhasilan rencana kerja. Serta mengatur sistem untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara berkala.
6. Anggaran: Menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Perubahan Rencana Kerja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan kegiatan yang real dilaksanakan berkesesuaian dengan pencapaian target RPJMD. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA- BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																						
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
					Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1						
						Sebelum					Sesudah											
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)							
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp. 58.608.494.842	Rp. 1.196.200.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 227.034.521.100	Rp. 296.839.215.942	Rp. 70.647.580.613	Rp. 2.715.868.300	Rp. 10.000.000.000	Rp. 234.090.590.100	Rp. 317.454.039.013	311.364.122.072,00	Rp.
5	02					KEUANGAN					Rp. 58.608.494.842	Rp. 1.196.200.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 227.034.521.100	Rp. 296.839.215.942	Rp. 70.647.580.613	Rp. 2.715.868.300	Rp. 10.000.000.000	Rp. 234.090.590.100	Rp. 317.454.039.013	311.364.122.072,00	Rp.
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp. 50.912.009.632	Rp. 1.136.200.000			Rp. 52.048.209.632	Rp. 62.731.799.403	Rp. 2.655.868.300			Rp. 65.387.667.703	67.645.478.337,00	Rp.
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 80.365.900				Rp. 80.365.900	Rp. 77.251.200				Rp. 77.251.200	Rp. 104.907.440,00	
5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Keraton			Rp. 16.484.400				Rp. 16.484.400	Rp. 13.076.600				Rp. 13.076.600	Rp. 14.008.060,00	
5	02	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 10.267.000				Rp. 10.267.000	Rp. 10.267.000				Rp. 10.267.000	Rp. 18.662.400,00	
5	02	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 7.673.500				Rp. 7.673.500	Rp. 7.673.300				Rp. 7.673.300	Rp. 18.662.400,00	

5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.630.500				Rp. 10.630.500	Rp. 8.130.400				Rp. 8.130.400	Rp. 1.891.680,00
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.103.500				Rp. 10.103.500	Rp. 8.103.500				Rp. 8.103.500	Rp. 20.156.600,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.103.500				Rp. 15.103.500	Rp. 18.410.500				Rp. 18.410.500	Rp. 21.526.300,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Keraton		Rp. 10.103.500				Rp. 10.103.500	Rp. 11.589.900				Rp. 11.589.900	Rp. 10.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 45.956.103.738				Rp. 45.956.103.738	Rp. 56.882.068.589				Rp. 56.882.068.589	Rp. 61.862.127.561,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Keraton		Rp. 45.463.290.238				Rp. 45.463.290.238	Rp. 56.362.885.089				Rp. 56.362.885.089	Rp. 61.483.002.061,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 466.651.900				Rp. 466.651.900	Rp. 495.521.900				Rp. 495.521.900	Rp. 346.671.200,00
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.999.800				Rp. 14.999.800	Rp. 12.499.800				Rp. 12.499.800	Rp. 21.324.300,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.161.800				Rp. 11.161.800	Rp. 11.161.800				Rp. 11.161.800	Rp. 11.130.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 20.606.600				Rp. 20.606.600	Rp. 15.934.600				Rp. 15.934.600	Rp. 22.500.000,00
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.507.900				Rp. 2.507.900	Rp. 2.507.900				Rp. 2.507.900	Rp. 2.500.000,00
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.024.500				Rp. 3.024.500	Rp. 3.024.500				Rp. 3.024.500	Rp. 5.000.000,00
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.074.200				Rp. 15.074.200	Rp. 10.402.200				Rp. 10.402.200	Rp. 15.000.000,00

5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 206.842.000					Rp. 206.842.000	Rp. 156.842.000				Rp. 156.842.000	Rp. 115.000.000,00
---	----	----	------	--	---	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	-----------------	--------------------

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.112.100.000				Rp. 1.112.100.000	Rp. 1.848.100.000				Rp. 1.848.100.000	Rp. 250.000.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 18.042.000	Rp. 1.136.200.000			Rp. 1.154.242.000	Rp. 84.839.000	Rp. 2.655.868.300			Rp. 2.740.707.300	Rp. 1.278.756.000,00
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Keraton								Rp. 570.000.000			Rp. 570.000.000	Rp. 486.306.000,00
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Martapura, Keraton								Rp. 684.000.000			Rp. 684.000.000	Rp. 684.000.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.042.000	Rp. 6.000.000			Rp. 24.042.000	Rp. 39.792.000	Rp. 63.550.000			Rp. 103.342.000	Rp. 12.000.000,00
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 1.130.200.000			Rp. 1.130.200.000	Rp. 45.047.000	Rp. 1.338.318.300			Rp. 1.383.365.300	Rp. 96.450.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.050.148.394				Rp. 2.050.148.394	Rp. 2.080.147.014				Rp. 2.080.147.014	Rp. 2.778.862.932,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 376.823.394				Rp. 376.823.394	Rp. 406.822.014				Rp. 406.822.014	Rp. 423.149.332,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.673.325.000				Rp. 1.673.325.000	Rp. 1.673.325.000				Rp. 1.673.325.000	Rp. 2.355.713.600,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.210.064.000				Rp. 1.210.064.000	Rp. 1.328.880.000				Rp. 1.328.880.000	Rp. 929.848.100,00

5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.990.000				Rp. 38.990.000	Rp. 38.990.000				Rp. 38.990.000	Rp. 79.980.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 620.860.000				Rp. 620.860.000	Rp. 629.455.000				Rp. 629.455.000	Rp. 548.673.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.170.000				Rp. 106.170.000	Rp. 116.390.000				Rp. 116.390.000	Rp. 31.885.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 279.300.000				Rp. 279.300.000	Rp. 379.301.000				Rp. 379.301.000	Rp. 50.500.100,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 115.064.000				Rp. 115.064.000	Rp. 115.064.000				Rp. 115.064.000	Rp. 157.970.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.680.000				Rp. 49.680.000				Rp. 49.680.000	Rp. 60.840.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Rp. 2.967.478.500	Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 227.034.521.100	Rp. 240.031.999.600	Rp. 2.809.031.500	Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 234.090.590.100	Rp. 246.929.621.600	Rp. 227.352.827.468,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Rp. 1.343.893.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.373.893.000	Rp. 1.295.394.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.325.394.000	Rp. 2.864.100.000,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 64.500.000				Rp. 64.500.000	Rp. 400.000.000,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 64.500.000				Rp. 64.500.000	Rp. 400.000.000,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 205.494.500	Rp. 30.000.000			Rp. 235.494.500	Rp. 167.995.500	Rp. 30.000.000			Rp. 197.995.500	Rp. 66.550.000,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	- Dana Transfer Umum-Dana	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan,		Rp. 323.139.200				Rp. 323.139.200	Rp. 323.139.200				Rp. 323.139.200	Rp. 665.500.000,00

					APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Alokasi Umum	Semua Kel/Desa												
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 229.100.000				Rp. 229.100.000	Rp. 229.100.000				Rp. 229.100.000	Rp. 532.400.000,00
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.400.000				Rp. 54.400.000	Rp. 54.400.000				Rp. 54.400.000	Rp. 600.000.000,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 391.759.300				Rp. 391.759.300	Rp. 391.759.300				Rp. 391.759.300	Rp. 199.650.000,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp. 626.102.800			Rp. 227.034.521.100	Rp. 227.660.623.900	Rp. 601.054.800			Rp. 234.090.590.100	Rp. 234.691.644.900	R p. 217.723.089.200,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.595.500				Rp. 140.595.500	Rp. 140.595.500				Rp. 140.595.500	Rp. 409.831.200,00
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Desa	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.999.500			Rp. 227.034.521.100	Rp. 227.049.520.600	Rp. 14.999.500			Rp. 234.090.590.100	Rp. 234.105.589.600	R p. 216.543.807.000,00

5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.657.800				Rp. 69.657.800	Rp. 64.609.800				Rp. 64.609.800	Rp. 232.925.000,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 173.000.000				Rp. 173.000.000	Rp. 133.800.000				Rp. 133.800.000	Rp. 57.700.000,00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 227.850.000				Rp. 227.850.000	Rp. 247.050.000				Rp. 247.050.000	Rp. 478.826.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Rp. 871.347.500				Rp. 871.347.500	Rp. 803.347.500				Rp. 803.347.500	Rp. 1.565.000.000,00
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.140.000				Rp. 23.140.000	Rp. 10.240.000				Rp. 10.240.000	Rp. 30.000.000,00

5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.890.000				Rp. 46.890.000	Rp. 15.490.000				Rp. 15.490.000	Rp. 50.000.000,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 81.898.000				Rp. 81.898.000	Rp. 87.698.000				Rp. 87.698.000	Rp. 165.000.000,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.800.000				Rp. 155.800.000	Rp. 142.572.400				Rp. 142.572.400	Rp. 185.000.000,00

5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 127.193.500				Rp. 127.193.500	Rp. 139.193.500				Rp. 139.193.500	Rp. 50.000.000,00
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.890.000				Rp. 10.890.000	Rp. 10.890.000				Rp. 10.890.000	Rp. 50.000.000,00
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.202.000				Rp. 52.202.000	Rp. 52.202.000				Rp. 52.202.000	Rp. 200.000.000,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp. 10.000.000.000			Rp. 10.000.000.000			Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 5.000.000.000,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rp. 10.000.000.000		Rp. 10.000.000.000			Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000	Rp. 5.000.000.000,00	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				Rp. 126.135.200				Rp. 126.135.200	Rp. 109.235.200				Rp. 109.235.200	Rp. 200.638.268,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 126.135.200				Rp. 126.135.200	Rp. 109.235.200				Rp. 109.235.200	Rp. 200.638.268,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp. 1.124.676.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.154.676.000	Rp. 1.454.015.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.484.015.000	Rp. 727.027.100,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp. 1.124.676.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.154.676.000	Rp. 1.454.015.000	Rp. 30.000.000			Rp. 1.484.015.000	Rp. 727.027.100,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 282.421.000				Rp. 282.421.000	Rp. 555.814.000				Rp. 555.814.000	Rp. 60.050.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 63.593.000				Rp. 63.593.000	Rp. 67.175.000				Rp. 67.175.000	Rp. 50.000.000,00

5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 426.830.500				Rp. 426.830.500	Rp. 431.230.500				Rp. 431.230.500	Rp. 228.833.600,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.765.000				Rp. 90.765.000	Rp. 92.409.000				Rp. 92.409.000	Rp. 221.874.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.537.500	Rp. 30.000.000			Rp. 34.537.500	Rp. 84.287.500	Rp. 30.000.000			Rp. 114.287.500	Rp. 34.007.500,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 104.175.000				Rp. 104.175.000	Rp. 39.175.000				Rp. 39.175.000	Rp. 50.000.000,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.690.000				Rp. 98.690.000	Rp. 101.190.000				Rp. 101.190.000	Rp. 55.613.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.664.000				Rp. 53.664.000	Rp. 82.734.000				Rp. 82.734.000	Rp. 26.649.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.604.330.710				Rp. 3.604.330.710	Rp. 3.652.734.710				Rp. 3.652.734.710	Rp. 15.638.789.167,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Rp. 3.604.330.710				Rp. 3.604.330.710	Rp. 3.652.734.710				Rp. 3.652.734.710	Rp. 15.638.789.167,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.448.000				Rp. 9.448.000	Rp. 9.448.000				Rp. 9.448.000	Rp. 26.490.049,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.502.500				Rp. 100.502.500	Rp. 96.602.500				Rp. 96.602.500	Rp. 150.237.250,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.345.000				Rp. 123.345.000	Rp. 90.419.000				Rp. 90.419.000	Rp. 174.156.230,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 210.462.500				Rp. 210.462.500	Rp. 254.692.500				Rp. 254.692.500	Rp. 57.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.509.258.810				Rp. 1.509.258.810	Rp. 1.584.258.810				Rp. 1.584.258.810	Rp. 1.485.300.168,00

5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.933.500				Rp. 33.933.500	Rp. 33.933.500				Rp. 33.933.500	Rp. 58.539.900,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.978.500				Rp. 64.978.500	Rp. 64.978.500				Rp. 64.978.500	Rp. 633.511.405,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.789.000				Rp. 59.789.000	Rp. 59.789.000				Rp. 59.789.000	Rp. 155.117.588,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 121.259.400				Rp. 121.259.400	Rp. 141.259.400				Rp. 141.259.400	Rp. 228.174.661,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.590.000				Rp. 54.590.000	Rp. 54.590.000				Rp. 54.590.000	Rp. 81.491.274,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 986.070.400				Rp. 986.070.400	Rp. 993.434.400				Rp. 993.434.400	Rp. 12.214.354.075,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.750.500				Rp. 15.750.500	Rp. 15.750.500				Rp. 15.750.500	Rp. 171.660.401,00
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 302.754.600				Rp. 302.754.600	Rp. 241.390.600				Rp. 241.390.600	Rp. 214.546.577,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.188.000				Rp. 12.188.000	Rp. 12.188.000				Rp. 12.188.000	Rp. 45.152.589,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu Urusan penunjang pemerintahan khususnya pada bidang kepegawaian sekaligus penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja sebelumnya, yang didasarkan pada dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam melaksanakan program-program kerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai masukan, saran, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Kerja Pemerintah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program/ kegiatan SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENSTRA SKPD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Perubahan RENJA SKPD dilakukan sebagai bentuk Penyesuaian terhadap Realisasi Pendapatan dan Belanja: Selama tahun anggaran berjalan, realisasi pendapatan dan belanja dapat berbeda dari yang direncanakan. Penyesuaian ini diperlukan agar anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual.

Perubahan Renja SKPD bertujuan untuk menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal dan responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) , rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). Disamping itu Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat tahun 2024.

Dari uraian arti strategis mengenai Renja di atas, maka disusun Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang secara substansial merupakan terjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilaksanakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sebagai Bagian terintegrasi dari Pemerintah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) ini dalam sebuah Rencana Kerja, Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Perubahan Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Perubahan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA SKPD serta sebagai proses penyusunan APBD.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 , Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian target serta anggaran guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagai dasar BKPSDM selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai tugas dan fungsi.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 9) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang , Rencana Pembangunan Jangka Menengah , Dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5);
- 20) Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
- 21) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat ;
- 22) Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 23) Peraturan Bupati Banjar Nomor xx tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
- 24) Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Menyediakan dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di BKPSDM, Pemerintah , DPRD dan masyarakat Kabupaten Banjar dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

- (2) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kab.Banjar selama kurun waktu satu tahun (2024).
- (3) pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Banjar dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BKPSDM Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

2) Tujuan

- (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun (2024) sebagai bagian dari Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar.
- (2) untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- (3) sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2024.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 Badan Kepegawaian Kabupaten Banjar ini, secara berurutan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja ;
- Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan Penutup Tentang Perubahan Renja BKPSDM

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yg Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

- 1) Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja pada Program ini adalah Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi kualifikasi dan kompetensi dengan Target 13.3 Indeks dengan dan realisasi 12.84 Indeks dokumen dengan capaian 86.13 %.
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi tersusun tepat waktu dan tepat mutu dengan target sebesar 100 % dengan realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II 42.2 % dengan Capaian kinerja kegiatan sebesar 42.2 %
- 3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 17 laporan dengan Realisasi 7 Laporan serta capaian sebesar 41.18%
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Target 50 Orang dan realisasi masih nihil karena pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan Target 5 Unit dan realisasi
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan Target 5 Unit dan realisasi

sampai dengan Triwulan II 2 unit dengan capaian kinerja sebesar 40 %

7) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan Target 300 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 74 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 30.25 %

8) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi dengan Target 1 Lembaga dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil

9) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Yang dikelola dengan target 1 dokumen dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah nihil

10) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan data kepegawaian yang dikelola dengan target 7 ddokumen dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar 1 dokumen dengan capaian sebesar 14.29%

11) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian dengan Target 100 % dan realisasi 50% dengan capaian 50%.

12) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target 4 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 50%

- 13) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan Target 1 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 0 Dokumen dengan capaian kinerja masih nihil Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III

- 14) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 5 unit dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar 1 unit dengan capaian 20%

- 15) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir dengan Target 300 Orang dan realisasi sampai dengan Triwulan II 15 Orang dengan capaian kinerja sebesar 5%

- 16) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan Target 150 Orang dan realisasi sampai dengan Triwulan II 28 Orang dengan capaian kinerja sebesar 18.6 %

- 17) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Target 1 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100 %

- 18) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan

Target 12 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II 3laporan dengan capaian kinerja sebesar 25%.

19) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan dengan Target 500 Orang dan realisasi sampai dengan Triwulan II 200 Orang dengan capaian kinerja sebesar 36.36 %.

20) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan Target 63 Orang dan realisasi sampai dengan Triwulan II 5 Orang dengan capaian kinerja sebesar 6.35 %

2.2. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yg memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan target sebesar 100 % dengan realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II 50 % dengan Capaian kinerja kegiatan sebesar 50 %

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.

- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan dengan Target 100 % dan realisasi 50 % dengan capaian 50 %.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Terpeliharanya barang milik daerah dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.
- 6) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase kegiatan pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan dengan Target 100 % dengan realisasi 50% dengan capaian 50%.
- 7) Mutasi dan Promosi ASN
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase pelayanan Administrasi bidang mutasi dan promosi tepat waktu dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.
- 8) Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator kinerja pada Kegiatan ini adalah Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan Target 100 % dan realisasi 50% dengan capaian 50 %.
- 9) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan tepat waktu dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.
- 10) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terselenggara dengan Target 100% dengan dan realisasi 50% dengan capaian 50%.

11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Target 6 Dokumen dengan dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 66.6 %

12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Target 2 Dokumen dan realisasi masih nihil dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.

13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Target 1 Dokumen dan realisasi masih nihil karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV

14) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan Target 1 Dokumen dan realisasi masih nihil dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.

15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target 3 laporan dengan Realisasi 3 Laporan serta capaian sebesar 100%

16) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 6 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50 %.

- 17) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target 1 Laporan dengan realisasi 1 laporan dengan capaian sebesar 100%

- 18) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target 18 Laporan dan realisasi sampai Dengan triwulan II 9 laporan dan capaian sebesar 50 %

- 19) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 12 Paket dan realisasi sebesar 6 paket dan capaian sebesar 50 %.

- 20) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan Target 12 Paket dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 6 paket dan capain kinerja sebesar 50 %

- 21) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 12 paket dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 6 paket dengan capaian kinerja 50 %.

22) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target 1 paket dan realisasi masih nihil karena pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

23) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 4 laporan dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar 2 laporan dengan capaian sebesar 50 %

24) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebesar 4 laporan dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 2 laporan dengan capaian 50%

25) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target 12 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II 6 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 50 %

26) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 6 laporan dengan capaian kinerja 50 %

27) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 1 unit dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 1 unit dengan capaian 100 %

28) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan Target 1 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil dengan capaian kinerja sebesar 0 %. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

29) Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan Target 4 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 50 %

30) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi yang dikelola dengan target 4 dokumen dan realisasi sampai dengan triwulan II adalah 2 dokumen serta capaian 50%

31) Pengelolaan Assessment Center

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center dengan Target 2 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV

32) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan Target 4 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 25%

33) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan Target 4 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II 1 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 25%

34) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa dengan Target 500 Orang dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil .Kegiatan Akan dilaksanakan Pada Triwulan IV

35) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan Target 12 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II 6 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 50 %.

36) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun dengan Target 1 dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil dikarenakan penyusunan kebijakan akan dilaksanakan pada triwulan III

37) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi dengan Target 1 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

- 38) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan Target 3 Laporan dan realisasi sampai dengan Triwulan II masih nihil karena penyusunan laporan akan dimulai pada triwulan III .

- 39) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Indikator kinerja pada Sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama dengan Target 1 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 0 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 0 %.
- Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II

2.3 Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yg melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan dengan Target 47 orang dan realisasi 50 orang dengan capaian 95,74 %.

- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan target 1000 dokumen dengan capaian 71.80%.

- 3) Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga

Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dengan Target 4 Dokumen dan realisasi sampai dengan Triwulan II 3 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75 %

2.4 Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan jadwal yang sudah disusun

- Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan jadwal yang sudah disusun;
 - 1) ketidakselerasan laporan evaluasi kinerja tahun lalu sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja tahun 2025;
 - 2) Adanya beberapa sub bid yang tidak mereview kembali terkait kegiatan dan pagu, sehingga berpatokan pada tahun sebelumnya;
 - 3) Adanya SHS yang belum ada di sistem SIPD;
 - 4) tidak lengkapnya dokumen usulan mutasi dari pengusul;
 - 5) Jadwal seleksi mutasi masuk baru bisa ditetapkan setelah seluruh persyaratan pengusul mutasi telah lengkap.
 - 6) Masih terdapat PNS yang mengusul kenaikan pangkat jabatan fungsional tetapi belum memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
 - 7) Masih banyaknya data PNS yang tidak update sehingga menghambat proses pengolahan data pengembangan karir PNS.
 - 8) Belum optimalnya aplikasi SIPD dikarenakan beberapa spesifikasi tidak terbaca pada DPA 2024
 - 9) Masih perlunya penyesuaian anggaran pada kode rekening JKM di perubahan anggaran 2024;
 - 10) Masih ada beberapa koreksi pada laporan keuangan;
 - 11) Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kegiatan bidang PKA terkait Bimtek Pengelola Keuangan sehingga melakukan penyesuaian jadwal dan kegiatan;
 - 12) Keterlambatan kelengkapan Ls gaji, sehingga pembayaran gaji PTT bulan maret terlambat diterima;

- 13) Penempatan Rencana anggaran kas kurang tepat dalam pembagiannya sehingga pada realisasi keuangan akan deviasi sampai realisasi terserap;

2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Perubahan target pada Perubahan rencana kerja sebagai salah satu langkah akselerasi terhadap target capaian program rencana strategis

2.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- 1)
- 2) Koordinasi dengan sub bid terkait penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2025 agar seluruh kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi dapat teralokasi.
- 3) Membuat usulan SHS pada aplikasi SILAKAS
- 4) Membuat surat edaran sedini mungkin yang isinya mengingatkan kepada tiap PNS di SKPD agar membuat SKP sesuai denganketentuan, dan kepada SKPD agar melakukan rekapitulasi SKP tiap PNS;
- 5) Membuat surat edaran serta himbauan kepada seluruh PNS Kabupaten Banjar untuk membuat SKP sesuai dengan ketentuan, dan kepada SKPD agar melakukan rekapitulasi terhadap SKP tiap PNS;
- 6) Koordinasi dengan BPSDM Prov Kalsel terkait jadwal serta menyusun ulang jadwal
- 7) Sosialisasi kepada ASN tentang persyaratan Administrasi kenaikan pangkat sehingga berkas usulan kenaikan pangkat dapat memnuhi syarat
- 8) Membuat surat edaran sedini mungkin yang isinya mengingatkan kepada tiap PNS di SKPD agar membuat SKP sesuai dengan ketentuan, dan kepada SKPD agar melakukan rekapitulasi terhadap SKP tiap PNS;
- 9) Menetapkan jadwal pembinaan dan melaksanakan pembinaan sesuai jadwal (time schedule);

- 10) Memanggil pasangan PNS yang mengajukan usul perceraian sebanyak 3 kali panggilan, apabila tidak memenuhi panggilan maka akan menjadi catatan pada saat dibawa ke rapat tim majelis;
- 11) Membuat Surat Edaran mengenai rekapitulasi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS di tiap SKPD;
- 12) Data peserta pelatihan yang disampaikan oleh Perangkat harus akurat dan update sehingga ketersediaan dan kevalidan data dapat dipertanggungjawaban data ;
- 13) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan meningkatkan koordinasi dalam pembuatan anggaran untuk ujian kompetensi jabatan fungsional;
- 14) Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dan BPSDM Kemendagri di Jakarta agar kegiatan Penyertaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran	Capaian (%)		Predikat		
				I		II			I		II							
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Berkembangnya Profesional ASN	65.5	20,689,839,644	65.5	6,281,238,975.00	65.5	14,171,803,115	65.5	14,171,803,115	61.85	1,374,097,984	61.85	7,205,151,310	61.85	7,205,151,310	94.43	34.82	Tidak Tercapai
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76	10,045,280,844	76	2,754,897,875.00	76	6,106,131,815	76	6,106,131,815	0	1,054,834,282	89,89	5,002,841,706	89.89	5,002,841,706	118.28	49.80	Terca pai
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	60,000,000	25	10,971,000.00	50	22,004,000	50	22,004,000	25	2,430,000	42,2	9,075,000	42.2	9,075,000	84.40	15.13	Tidak Tercapai
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	11,400,000	2	-	4	2,295,000	4	2,295,000	2	-	4	1,250,000	4	1,250,000	100.0	10.96	Terca pai
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	8,200,000	0	-	0	2,709,000	0	2,709,000	0	-	0	2,705,000	0	2,705,000	N/A	32.99	Terca pai
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	2	5,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	N/A	0.00	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predikat
				I		II				I		II						
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perubahan RKA-SKPD																	
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	3,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	N/A	0.00	Terca pai
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	3,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	N/A	0.00	Terca pai
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	13,500,000	3	6,885,000.00	3	9,500,000	3	9,500,000	3	2,430,000	3	4,640,000	3	4,640,000	100.0	34.37	Terca pai
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	15,000,000	4	4,086,000.00	8	7,500,000	8	7,500,000	4	-	8	480,000	7	480,000	87.5	3.20	Tidak Terca pai
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	6,405,332,644	25	1,296,697,275.00	50	3,609,604,715	50	3,609,604,715	25	774,041,794	50	3,448,147,850	50	3,448,147,850	100	53.83	Terca pai
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50	6,254,489,644	50	1,255,591,375.00	50	3,531,549,715	50	3,531,549,715	46	746,461,794	54	3,390,562,350	54	3,390,562,350	108.0	54.21	Terca pai
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	140,843,000	3	36,105,000.00	6	70,755,000	6	70,755,000	3	22,580,000	4	51,695,500	4	51,695,500	66.7	36.70	Tidak Terca pai
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,000,000	1	5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	100.0	100.00	Terca pai
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	5,000,000	4	900.00	9	2,300,000	9	2,300,000	4	-	9	890,000	9	890,000	100.0	17.80	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predik at
				I		II				I		II						
				Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	116,061,600	50	-	100	116,061,600	100	116,061,600	0	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	86.16	Terca pai
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	100,000,000	0	-	10	100,000,000	10	100,000,000	0	-	10	100,000,000	10	100,000,000	100	100.00	Terca pai
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	16,061,600	0	-	50	16,061,600	50	16,061,600	0	-	0	-	0	-	-	0.00	Tidak Terca pai
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,688,010,600	25	756,990,500.00	50	1,213,211,000		1,213,211,000	25	131,772,730	45,65	834,618,170	45,65	834,618,170	#DIV/0!	49.44	Terca pai
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	44,079,000	2	12,285,500.00	5	24,807,000	5	24,807,000	0	-	6	23,417,000	6	23,417,000	120.0	53.13	Terca pai
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	694,060,000	2	458,346,000.00	5	653,865,000	5	653,865,000	3	-	5	361,195,000	5	361,195,000	100.0	52.04	Terca pai
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	28,857,600	2	7,530,000.00	5	15,210,000	5	15,210,000	0	5,430,000	5	13,190,000	5	13,190,000	100.0	45.71	Terca pai
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	46,814,000	2	20,329,000.00	5	20,329,000	5	20,329,000	2	-	5	10,800,000	5	10,800,000	100.0	23.07	Terca pai
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	29,200,000	1	7,500,000.00	2	15,000,000	2	15,000,000	1	-	2	4,725,000	2	4,725,000	100.0	16.18	Terca pai
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	845,000,000	1	251,000,000.00	2	484,000,000	2	484,000,000	1	126,342,730	2	421,291,170	2	421,291,170	100.0	49.86	Terca pai
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,181,543,500	25	307,360,000.00	50	653,418,000	50	653,418,000	25	141,439,758	100	470,966,586	100	470,966,586	200	39.86	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predikat
				I		II				I		II						
				Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	432,353,500	3	139,425,000.00	6	270,098,000	6	270,098,000	3	45,232,716	6	142,159,365	6	142,159,365	100.0	32.88	Tercaipai
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	749,190,000		167,935,000.00	3	383,320,000	6	383,320,000	3	96,207,042	6	328,807,221	6	328,807,221	100.0	43.89	Tercaipai
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	594,332,500	25	381,980,000.00	50	491,832,500	50	491,832,500	25	5,150,000	50	140,034,100	50	140,034,100	100	23.56	Tercaipai
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	38,990,000	1	15,000,000.00	1	23,990,000	1	23,990,000	0	2,500,000	1	11,650,000	1	11,650,000	100.0	29.88	Tercaipai
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	194,700,000	1	58,700,000.00	4	112,200,000	4	112,200,000	2	2,650,000	4	33,473,500	4	33,473,500	100.0	17.19	Tercaipai
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82	57,900,000	30	57,900,000.00	55	57,900,000	55	57,900,000	2	-	58	34,000,000	58	34,000,000	105.5	58.72	Tercaipai
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	200,000,000	5	200,000,000.00	5	200,000,000	5	200,000,000	1	-	2	32,912,600	2	32,912,600	40.0	16.46	Tidak Tercaipai
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	11	102,742,500	2	50,380,000.00	5	97,742,500	5	97,742,500	1	-	5	27,998,000	5	27,998,000	100.0	27.25	Tercaipai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predik at
				I		II				I		II						
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	Anggar an	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
35	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	52.2	3,650,483,800	52.2	1,389,423,100.00	52.2	2,966,820,300	52.2	2,966,820,300	0	71,329,750	51,15	359,759,450	51.15	359,759,450	97.99	9.86	Tidak Terca pai
36	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	1,109,832,600	25	377,806,100.00	50	1,025,783,400	50	1,025,783,400	25	24,789,750	50	99,567,650	50	99,567,650	100	8.97	Terca pai
37	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	18,747,200	0	6,957,400.00	0	13,967,400	0	13,967,400	0	-	0	9,825,900	0	9,825,900	#DIV/0!	52.41	Terca pai
38	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	499,499,800	0	18,253,700.00	0	495,505,800	0	495,505,800	0	-	0	38,952,900	0	38,952,900	#DIV/0!	7.80	Terca pai
39	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250	9,271,300	75	1,407,500.00	150	4,672,500	150	4,672,500	53	-	74	2,804,500	74	2,804,500	49.3	30.25	Tidak Terca pai
40	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	300,000,000	0	300,000,000.00	1	300,000,000	1	300,000,000	0	-	0	-	0	-	-	0.00	Tidak Terca pai
41	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	111,500,000	0	3,346,000.00	1	111,500,000	1	111,500,000	0	-	0	5,140,000	0	5,140,000	-	4.61	Tidak Terca pai
42	Pengelolaan Data Kepegawaian	7	119,814,300	2	34,859,800.00	3	73,390,300	3	73,390,300	0	23,361,450	1	40,657,950	1	40,657,950	33.3	33.93	Tidak Terca pai
43	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4	51,000,000	1	12,981,700.00	2	26,747,400	2	26,747,400	1	1,428,300	2	6,812,400	2	6,812,400	100.0	13.36	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predikat
				I		II				I		II						
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Mutasi dan Promosi ASN	100	1,231,058,400	25	275,639,500.00	50	893,901,100	50	893,901,100	25	25,760,000	71,2	135,800,500	71.2	135,800,500	142.4	11.03	Terca pai
45	Pengelolaan Mutasi ASN	4	133,664,000	1	35,806,000.00	2	68,036,500	2	68,036,500	1	-	2	7,500,000	2	7,500,000	100	5.61	Terca pai
46	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	356,946,300	250	67,575,000.00	500	135,856,500	500	135,856,500	511	-	718	46,880,000	718	46,880,000	144	13.13	Terca pai
47	Pengelolaan Promosi ASN	4	740,448,100	1	172,258,500.00	2	690,008,100	2	690,008,100	1	25,760,000	2	81,420,500	2	81,420,500	100	11.00	Terca pai
48	Pengembangan Kompetensi ASN	100	944,338,900	25	672,948,000.00	50	826,130,900	50	826,130,900	0	18,000,000	0	65,297,400	0	65,297,400	-	6.91	Tidak Terca pai
49	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	150	311,892,900	0	196,027,500.00	50	311,892,900	50	311,892,900	28	18,000,000	28	31,817,400	28	31,817,400	56.0	10.20	Tidak Terca pai
50	Pengelolaan Assessment Center	2	407,646,000	0	407,646,000.00	0	407,646,000	0	407,646,000	0	-	1	6,042,000	1	6,042,000	#DIV/0!	1.48	Terca pai
51	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4	25,000,000	1	6,885,000.00	2	14,005,000	2	14,005,000	0	-	1	6,363,000	1	6,363,000	50.0	25.45	Tidak Terca pai
52	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100	124,800,000	25	39,532,000.00	50	52,482,000	50	52,482,000	65	-	65	12,410,000	65	12,410,000	130.0	9.94	Terca pai
53	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	300	25,000,000	75	9,186,000.00	150	13,814,000	150	13,814,000	10	-	15	6,365,000	15	6,365,000	10.0	25.46	Tidak Terca pai
54	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4	50,000,000	1	13,671,500.00	2	26,291,000	2	26,291,000	0	-	1	2,300,000	1	2,300,000	50.0	4.60	Tidak Terca pai
55	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	365,253,900	25	63,029,500.00	50	221,004,900	50	221,004,900	25	2,780,000	50	59,093,900	50	59,093,900	100	16.18	Terca pai
56	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	77,192,900	0	23,093,000.00	1	47,557,400	1	47,557,400	0	-	1	15,828,200	1	15,828,200	100	20.50	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran	Capaian (%)		Predikat		
				I		II			I		II							
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Kinerja		Anggaran	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12	39,093,100	3	11,930,500.00	6	17,393,000	6	17,393,000	2	-	3	1,762,500	3	1,762,500	50	4.51	Tidak Tercapai
58	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	500	78,341,800	0	15,305,000.00	0	24,805,000	0	24,805,000	0	2,380,000	0	19,637,200	0	19,637,200	-	25.07	Tercapai
59	Pembinaan Disiplin ASN	550	117,564,700	150	4,985,700.00	250	111,814,700	250	111,814,700	100	400,000	200	5,845,700	200	5,845,700	80	4.97	Tidak Tercapai
60	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	33,378,100	3	4,295,500.00	6	7,751,500	6	7,751,500	0	-	6	6,688,600	6	6,688,600	100	20.04	Tercapai
61	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20	19,683,300	5	3,419,800.00	10	11,683,300	10	11,683,300	0	-	10	9,331,700	10	9,331,700	100	47.41	Tercapai
62	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.3	6,994,075,000	13.3	2,136,918,000.00	13.3	5,098,851,000	13.3	5,098,851,000	0	247,933,952	12,84	1,842,550,154	12.84	1,842,550,154	97	26.34	Tidak Tercapai
63	Pengembangan Kompetensi Teknis	100	479,247,000	25	245,760,500.00	50	424,247,000	50	424,247,000	0	16,517,322	50	296,459,669	50	296,459,669	100	61.86	Tercapai
64	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	63	471,856,000	10	245,760,500.00	20	416,856,000	20	416,856,000	5	16,517,322	5	294,226,669	5	294,226,669	25	62.36	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%)		Predikat
				I		II				I		II						
				Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemerintahan Umum																	
65	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	7,391,000	0	-	1	7,391,000	1	7,391,000	0	-	0	2,233,000	0	2,233,000	-	30.21	Tidak Terca pai
66	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	6,514,828,000	25	1,891,157,500.00	50	4,674,604,000	50	4,674,604,000	0	231,416,630	50	1,546,090,485	50	1,546,090,485	100	23.73	Terca pai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran	Capaian (%)		Predikat		
				I		II			I		II							
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1	40,751,000	0	40,751,000.00	1	40,751,000	1	40,751,000	0	-	0	39,484,000	0	39,484,000	-	96.89	Tidak Tercapai
68	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	1	1,078,000,000	0	659,000,000.00	0	1,064,000,000	1	1,064,000,000	1	31,183,320	1	37,659,180	1	37,659,180	100	3.49	Tercapai
69	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4	260,077,000	1	14,517,000.00	2	252,517,000	2	252,517,000	3	-	3	230,849,500	3	230,849,500	150	88.76	Tercapai
70	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	4,871,000,000	0	1,063,320,000.00	1	3,087,336,000	1	3,087,336,000	0	200,233,310	0	1,136,654,805	0	1,136,654,805	-	23.34	Tercapai

No	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Realisasi Kinerja dan Anggaran	Capaian (%)		Predik at		
				I		II			I		II			Kinerja	Anggar an			
			Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	Kinerja	Anggar an	
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	265,000,000	0	113,569,500.00	1	230,000,000	1	230,000,000	1	-	0	101,443,000	1	101,443,000	100	38.28	Terca pai

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Pada tahun 2024 BKPSDM akan melaksanakan 3 program 12 kegiatan serta 52 Sub kegiatan . Dengan total pagu dana sebesar Rp. **16.423.480.134,-** Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Banjar 2024 sebagai terlihat pada tabel berikut :

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, tidak terjadi perubahan indikator kinerja karena perubahan rencana kerja ini telah mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2 Jumlah Program ,Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Jumlah Program Pada Perubahan Renja 2024 adalah sebanyak 3 Program,12 Kegiatan dan 52 sub kegiatan ,Tahun Anggaran 2024

ini. Nama program/kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini

**Tabel 3.1 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
BKPSDM Kabupaten Banjar 2024**

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024
1	2	3
	BKPSDM	21,125,029,644
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,160,192,344
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,400,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,200,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,500,000
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,200,000
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,200,000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,500,000
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,408,647,644
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,254,489,644
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137,723,000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,435,000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,000,000
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116,061,600
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16,061,600

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024
1	2	3
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,463,695,600
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44,079,000
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,375,195,000
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,857,600
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,814,000
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,500,000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	957,250,000
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,142,905,000
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393,715,000
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749,190,000
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968,882,500
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,990,000
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,700,000
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,450,000
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	556,000,000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84,742,500
34	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,801,319,800
35	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	760,882,600
36	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	18,747,200
37	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	249,549,800
38	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9,271,300
39	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	300,000,000
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12,500,000
41	Pengelolaan Data Kepegawaian	119,814,300
42	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	51,000,000

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024
1	2	3
43	Mutasi dan Promosi ASN	1,166,058,400
44	Pengelolaan Mutasi ASN	133,664,000
45	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	291,946,300
46	Pengelolaan Promosi ASN	740,448,100
47	Pengembangan Kompetensi ASN	647,574,900
48	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	80,678,900
49	Pengelolaan Assessment Center	342,096,000
50	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	25,000,000
51	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	124,800,000
52	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25,000,000
53	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	50,000,000
54	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	226,803,900
55	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	61,692,900
56	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31,693,100
57	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	68,341,800
58	Pembinaan Disiplin ASN	23,314,700
59	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	22,078,100
60	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	19,683,300
61	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,163,517,500
62	Pengembangan Kompetensi Teknis	608,689,500
63	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	601,298,500
64	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	7,391,000
65	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6,554,828,000

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2024
1	2	3
66	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	40,751,000
67	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	1,078,000,000
68	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	260,077,000
69	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4,871,000,000
70	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	305,000,000

Sumber : Rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan sesuai RKA Perubahan BKPSDM 2024

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada BKPSDM Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 21,125,029,644 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembila Ribu Enam ratus empat Puluh Empat Rupiah)**. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Adapun alasan terkait perubahan anggaran BKPSDM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) pemenuhan kebutuhan koordinasi luar kota dalam rangka uji kompetensi jabatan fungsional , monitoring tugas belajar serta koordinasi Asesment pada lembaga penyelenggara asesment
- 2) Memenuhi Keperluan Pelaksanaan Rapat Monitoring Realisasi Keuangan Bulanan Serta Rapat Persiapan Penghapusan Aset
- 3) Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Administrator Orientasi PPPK)
- 4) Penyesuaian dilakukan kerana terdapat pegawai tidak tetap yang status kepegawainya berubah menjadi PPPK sehingga dapat dilakukan pengurangan sesuai keperluan
- 5) Perbaikan Instalasi Air sebagai untuk mendukung keperluan yang sifatnya primer dalam kegiatan fasilitasi PKP dan PKA serta Orientasi Pelatihan Dasar;

- 6) Rehabilitasi ruang kerja kantor yang sudah tidak lagi representatif serta penyediaan fasilitas sanitasi perkantoran serta upaya guna meningkatkan realisasi pendapatan dengan melakukan rehabilitasi terhadap aula pertemuan yang menjadi salah satu obyek pendapatan perangkat daerah;
- 7) Kegiatan Seleksi CASN dilaksanakan dengan fasilitasi Dari BKN dalam Hal Ini KANREG VII BKN sehingga biaya yang harus dikeluarkan ketika penyelenggaraan mandiri dapat dipangkas;
- 8) Pengurangan dikarenakan belanja Software hanya dilakukan untuk mengembangkan Software yang ada;
- 9) Ujian dinas dan UKPPI pada tahun ini mengalami penurunan jumlah peserta sehingga kelebihan anggaran dapat dilakukan perubahan untuk mendukung kegiatan yang bersifat prioritas;
- 10) Pengurangan dikarenakan belanja Software hanya dilakukan untuk mengembangkan Software yang ada;
- 11) Alokasi belanja Honorarium dialihkan kepada alokasi yang lebih krusial terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 12) kegiatan koordinasi persiapan Asesement dengan lembaga Asessment ke luar daerah dialihkan pada kegiatan perjalanan dinas luar kota;
- 13) Alokasi belanja Honorarium dialihkan kepada alokasi yang lebih krusial terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 14) Alokasi belanja bantuan pemeriksaan Kesehatan dikurangi dengan memperhatikan realisasi sampai tahun berjalan sebagai upaya untuk meminimalisir SILPA;

- 15) Alokasi Belanja Software dialihkan menjadi kegiatan lain yang bersifat prioritas;
- 16) Pemangkasan pada anggaran honorarium yang tidak dapat direalisasikan sebagai bentuk efisiensi;
- 17) Menambah kegiatan penyertaan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN sebagai upaya guna mendorong pencapaian IP ASN pada dimensi kompetensi khususnya mengenai kewajiban PNS untuk melaksanakan Pengembangan kompetensi 20 JP per Tahun;
- 18) Anggaran uji kompetensi bagi Pejabat Pengawas sebagai prasyarat perpindahan jabatan fungsional di pangkas dikarenakan masih terdapat rekomendasi jabatan dari instansi pembina jabatan fungsional yang belum terbit sehingga jumlah PNS yang direncanakan mengikuti uji kompetensi berkurang serta perbedaan besaran biaya uji kompetensi masing - masing instansi pembina jabatan fungsional;
- 19) Perubahan anggaran dilakukan karena alokasi murni dianggarkan untuk penyertaan Orientasi PPPK setelah dilakukan koordinasi dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Orientasi PPPK akan diselenggarakan dengan pola fasilitasi;
- 20) Perubahan anggaran dilakukan untuk mengakomodir bantuan tugas belajar PNS jabatan Fungsional Dokter Spesialis

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM
Tahun 2024**

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
						BKPSDM	Rp 17.876.750.698	Rp 21.125.029.644	-Rp 3.248.278.946
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.647.391.898	Rp 11.160.192.344	Rp 2.548.800.446
5	03	01	2	01		PERENCANAAN. PENGANGGARAN. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -
5	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11.400.000	Rp 11.400.000	Rp -
5	03	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 8.200.000	Rp 8.200.000	Rp -
5	03	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp -
5	03	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	Rp -
5	03	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	Rp -
5	03	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp -
5	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -
5	03	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 5.107.443.698	Rp 6.408.647.644	Rp 1.301.203.946.00
5	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.956.600.698	Rp 6.254.489.644	Rp 1.297.888.946

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	03	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 140.843.000	Rp 137.723.000	-Rp 3.120.000
5	03	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.000.000	Rp 11.435.000	Rp 6.435.000
5	03	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
5	03	01	2	05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 116.061.600	Rp 116.061.600	
5	03	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
5	03	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 16.061.600	Rp 16.061.600	Rp -
5	03	01	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 1.588.010.600	Rp 2.463.695.600	Rp 875.685.000.00
5	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 44.079.000	Rp 44.079.000	Rp -
5	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 694.060.000	Rp 1.375.195.000	Rp 681.135.000.00
5	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Rp -
5	03	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 28.857.600	Rp 28.857.600	Rp -
5	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.814.000	Rp 46.814.000	Rp -
5	03	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 29.200.000	Rp 11.500.000	-Rp 17.700.000.00
5	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 745.000.000	Rp 957.250.000	Rp 212.250.000.00

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	03	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1.181.543.500	Rp 1.142.905.000	-Rp 38.638.500.00
5	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 432.353.500	Rp 393.715.000	-Rp 38.638.500.00
5	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 749.190.000	Rp 749.190.000	Rp -
5	03	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 594.332.500	Rp 968.882.500	Rp 410.550.000.00
5	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.990.000	Rp 38.990.000	Rp -
5	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 194.700.000	Rp 194.700.000	Rp -
5	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 57.900.000	Rp 94.450.000	Rp 36.550.000.00
5	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 556.000.000	Rp 356.000.000.00
5	03	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 102.742.500	Rp 84.742.500	Rp 18.000.000.00
5	03	02				ROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 3.135.283.800	Rp 2.801.319.800	-Rp 333.964.000.00
5	03	02	2	01		Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 1.010.832.600	Rp 760.882.600	Rp 249.950.000.00

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	03	02	2	01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp 18.747.200	Rp 18.747.200	Rp -
5	03	02	2	01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 499.499.800	Rp 249.549.800	Rp 249.950.000.00
5	03	02	2	01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 9.271.300	Rp 9.271.300	Rp -
5	03	02	2	01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp -
5	03	02	2	01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	Rp -
5	03	02	2	01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 119.814.300	Rp 119.814.300	Rp -
5	03	02	2	01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000	Rp -
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Rp 899.858.400	Rp 1.166.058.400	Rp 266.200.000.00
5	03	02	2	02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 133.664.000	Rp 133.664.000	Rp -
5	03	02	2	02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 124.746.300	Rp 291.946.300	Rp 167.200.000.00
5	03	02	2	02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 641.448.100	Rp 740.448.100	Rp 99.000.000.00
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 944.338.900	Rp 647.574.900	-Rp 296.764.000.00
5	03	02	2	03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp 311.892.900	Rp 80.678.900	-Rp 231.214.000.00

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	03	02	2	03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp 407.646.000	Rp 342.096.000	-Rp 65.550.000.00
5	03	02	2	03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp -
5	03	02	2	03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 124.800.000	Rp 124.800.000	Rp -
5	03	02	2	03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp -
5	03	02	2	03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 280.253.900	Rp 226.803.900	-Rp 53.450.000.00
5	03	02	2	04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 77.192.900	Rp 61.692.900	-Rp 15.500.000.00
5	03	02	2	04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 39.093.100	Rp 31.693.100	-Rp 7.400.000.00
5	03	02	2	04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 78.341.800	Rp 68.341.800	-Rp 10.000.000.00
5	03	02	2	04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 32.564.700	Rp 23.314.700	-Rp 9.250.000.00
5	03	02	2	04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 33.378.100	Rp 22.078.100	-Rp 11.300.000.00
5	03	02	2	04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp 19.683.300	Rp 19.683.300	Rp -
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 6.094.075.000	Rp 7.163.517.500	Rp 1.069.442.500.00
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 479.247.000	Rp 608.689.500	Rp 129.442.500.00

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	04	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 471.856.000	Rp 601.298.500	Rp 129.442.500.00
5	04	02	2	01	0004	Pembinaan. Pengoordinasian. Fasilitasi. Pemantauan. Evaluasi. dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.391.000	Rp 7.391.000	Rp -
5	04	02	2	02		Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 5.614.828.000	Rp 6.554.828.000	Rp 940.000.000.00
5	04	02	2	02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan. serta Jabatan Fungsional	Rp 40.751.000	Rp 40.751.000	Rp -
5	04	02	2	02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Rp 178.000.000	Rp 1.078.000.000	Rp 900.000.000.00
5	04	02	2	02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Rp 260.077.000	Rp 260.077.000	Rp -

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Renja 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah/ Berkurang
5	04	02	2	02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Rp 4.871.000.000	Rp 4.871.000.000	Rp -
5	04	02	2	02	0008	Pembinaan. Pengoordinasian. Fasilitas. Pemantauan. Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Pengelolaan Sumber Belajar. dan Kerja Sama. serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Rp 265.000.000	Rp 305.000.000	Rp 40.000.000.00

Sumber Data : SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlepas dari dokumen Revisi Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Dalam hal anggaran tidak mencukupi maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat pelaksanaan sebagai target kinerja Renja dapat dicapai. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar selama Tahun 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara

tim. individu maupun institusi organisasi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu. untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju aparatur pemerintah yang profesional. bersih dan berwibawa serta pelayan masyarakat yang terbaik. sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.** maka terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten banjar pada Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah. program dan kegiatan. indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(P-RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarp ada Tahun 2024 akan melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaanprogram/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru. peraturan-peraturan baru atau adanya kebutuhan. maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku

➤ **Kaidah – Kaidah pelaksanaan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Daerah dan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. maka unsur-unsur organisasi. mulai dari Sekretariat. Bidang-bidang dan seluruh pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
- 2) Menjaga konsistensi antara dokumen Perubahan Rencana Kerja
- 3)
- 4)
- 5) Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar. Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
- 6) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun

2024. maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berkenaan. dan sebagai pedoman/acuan melanjutkan tugas yang belum terselesaikan maupun belum terlaksana sampai akhir Tahun 2024 untuk dapat mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan. serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun mendatang.

Inspektorat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Perubahan Renja tahun 2024 banyak anggaran perlu disesuaikan antara lain pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan Perubahan regulasi atas kebijakan yang ada. Dalam penetapan program mulai dari Renja Murni dan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2024 didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dipengaruhi hal-hal diantaranya adalah :

- 1) Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, pada pasal 162 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA/PPAS.
 - 3) Penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Perubahan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor tahun 2024 tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar untuk sisa tahun anggaran 2024 dan adanya perubahan kebijakan, prioritas, atau kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja yang sudah ada.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan capaian prioritas renstra. Serta untuk memantapkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan

kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi

- Perubahan Indikator Kinerja
- Jumlah Program dan Kegiatan
- Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN LALU

2.1 Analisis Gambaran Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian Peraturan Bupati tersebut dicabut seiring telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah tersebut mempunyai Tipe A.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Inspektur, Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengkoordinir Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.

2.2 Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;;

6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Itda; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan penjabaran sebagai berikut

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) sub kegiatan		
						I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6+7+8+						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
0																
		INSPEKTORAT DAERAH				14.661.778.145		2.027.011.522		6.039.722.533						
	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektorat Daerah	80	Indeks	14.661.778.145	0	2.027.011.522	0	6.039.722.533	0	6.039.722.533	0.00	-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	11.984.800	33	1.256.400	14.83	1.256.400	47,83	1.256.400	-	47,83	-
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dokumen	5.950.000	6	968.400	9	968.400	9	968.400	-	-	69.23
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Laporan	6.034.800	6	288.000	13	288.000	13	288.000	-	-	56.52
	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	9.701.051.970	26	1.621.780.208	26	5.144.426.841	52	5.144.426.841	-	52	-
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/ Bulan	9.579.233.970	48	1.608.450.208	48	5.111.101.841	48	5.111.101.811	-	-	100
	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	108.700.000	3	13.330.000	6	33.325.000	6	33.325.000	-	-	50,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.890.000	1	0	1	0	1	0	-	-	100
	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	6.228.000	3	0	7	0	7	0	-	-	50,00
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	Persen	11.468.000	29	0	29	995.000	58	995.000	-	58	-
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	5.000.000	0	0	1	0	1	0	-	-	100

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) sub kegiatan	
								I		II						
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6+7+8+				
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	6.468.000	0	0	3	995.000	3	995.000	-	-	50,00
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	Persen	2.237.100.000	21	168.716.540	17	426.022.650	38	426.022.650	-	60,00	-
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	14.100.000	2	0	3	5.025.000	3	5.025.000	-	-	60,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48	Orang	2.223.000.000	18	168.716.540	48	420.997.650	48	420.997.650	-	-	100
	Terselenggaranya Kegiatan Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	Persen	558.318.800	25	86.847.932	25	201.161.770	50	201.161.770	-	50,00	-
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	13.593.000	3	474.000	6	2.403.000	6	2.403.000	-	-	50,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	16.666.500	3	831.200	6	2.873.300	6	2.873.300	-	-	50,00
	Tersedianya bahan logistik kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	104.997.500	3	9.797.375	6	19.168.075	6	19.168.075	-	-	50,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	36.537.800	3	7.024.202	6	11.259.902	6	11.259.902	-	-	50,00
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	11.024.000	6	2.100.000	12	3.400.000	12	3.400.000	-	-	50,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.500.000	3	877.700	6	7.306.800	6	7.306.800	-	-	50,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	350.000.000	3	65.743.455	6	154.750.693	6	154.750.693	-	-	50,00
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	976.961.650	25	23.850.000	25	45.375.000	50	45.375.000	-	100	-
	Tersedianya Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Paket	95.445.000	0	0	0	0	0	0			0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	unit	630.826.000	11	23.850.000	13	45.375.000	13	45.375.000	-	-	100
	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.690.650	0	0	0	0	0	0			0
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	Persen	476.858.925	25	99.536.020	25	135.753.164	50	135.753.164	-	50,00	-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) sub kegiatan
								I		II						
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6+7+8+				
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	22.800.000	3	1.800.000	6	4.500.000	6	4.500.000	-	-	50,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	135.368.925	3	21.327.501	6	40.785.665	6	40.785.665	-	-	50,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	318.690.000	3	76.408.519	6	90.467.499	6	90.467.499	-	-	50,00
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	688.034.000	25	25.024.422	25	84.731.708	50	84.731.708	-	50,00	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	38.990.000	1	5.856.316	1	11.747.226	1	11.747.226	-	-	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	225.280.000	4	14.207.006	6	44.889.882	6	44.889.882	-	-	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	10.000.000	0	0	0	0	0	0			0
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	unit	90.120.000	3	2.129.600	13	7.977.600	13	7.977.600	-	-	50,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	323.644.000	2	2.831.500	5	20.117.000	5	20.117.000	-	-	71,43
	Meningkatnya Tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI)	74	indeks	1.945.262.400	0	110.057.820	0	327.944.920	0	327.944.920	0	-	-
	Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan NSPK yang berlaku dan Tata kelola keuangan desa yang akuntabel			Persentase desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh (Pj: irban I)	100	Persen	1.685.212.400	25	94.757.820	50	306.944.920	50	306.944.920	-	0	-
				Persentase desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh (Pj.Irban II)	100	persen		25		50		50				
				Persentase peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah (Pj.Irban III)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah (Pj.Irban III)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah (Pj.Irban II)	76	Persen		0		0		0				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) sub kegiatan	
							I		II							
1	2	3		4	5		6		7		8 = 6+7+8+					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				Persentase peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah (Pj. Irban I)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah (Pj.Irban I)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah (Pj.Irban II)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh (Pj.Irban III)	100	Persen		25		50		50				
				Persentase peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah (Pj.Irban III)	76	Persen		0		0		0				
				Persentase peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah (Pj.Irban II)	76	Persen		0		68.29		68.29				
				Persentase peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah (Pj.Irban I)	76	Persen		0		69.67		69.67				
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	20	Laporan	496.520.000	3	18.187.600	16	123.007.800	16	123.007.800	-	-	80
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	30	Laporan	251.400.000	7	32.872.000	10	49.372.000	10	49.372.000	-	-	33,33
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	9	Laporan	167.624.000	3	23.250.620	6	51.463.120	6	51.463.120	-	-	66,67
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	2	Laporan	49.546.400	2	11.250.000	2	11.250.000	2	11.250.000	-	-	100
	Terlaksananya Pengawasan Desa		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	24	Laporan	340.312.000	2	5.700.000	9	21.785.000	9	21.785.000	-	-	60,00
	Temuan yang di tindaklanjuti sesuai ketentuan		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	6	Dokumen	379.810.000	1	3.497.600	3	50.067.000	3	50.067.000	-	-	50,00

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%) sub kegiatan	
							I		II							
1	2	3	4	5			6		7		8 = 6+7+8+					
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K
	Ditindaklanjuti pengaduan masyarakat secara efektif		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100	persen	260.050.000	100	15.300.000	100	21.000.000	100	21.000.000	-	100,00	-
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	30	Laporan	260.050.000	22	15.300.000	22	21.000.000	22	21.000.000	-	-	73,33
	Efektivitas Peran APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4.3	indeks	2.170.415.000	4.32	65.061.954	4.35	533.255.030	4.35	533.255.030	101,16	-	-
	Peningkatan Kapabilitas APIP		Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	level	2.170.415.000	3	65.061.9540	3	533.255.030	3	533.255.030	-	100	-
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	Perangkat Daerah	255.835.000	12	20.783.200	47	29.313.520	47	29.313.520	-	-	100
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah	110.000.000	10	8.450.000	10	11.650.000	10	11.650.000	-	-	100
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	Kegiatan	1.255.900.000	4	25.777.054	4	444.174.310	4	444.174.310	-	-	33,33
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat daerah	548.680.000	3	10.051.700	47	48.117.200	47	48.117.200	-	-	100

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam urusan Pengawasan dan Pendampingan Pemerintah Daerah sudah di jalankan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat beberapa program / kegiatan belum optimal dalam pelaksanaanya dengan persentase capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif	Indeks Integritas	N/A	Indeks	N/A	N/A
		Kapabilitas APIP	N/A	Level	N/A	N/A
2	Meningkatnya tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	76	Indeks	N/A	N/A
3	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektorat Daerah	97	Indeks	N/A	N/A
4	Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan NSPK yang berlaku Tata kelola keuangan desa yang akuntabel	- Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah	60	Persen	N/A	N/A
		- Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah	60	Persen	N/A	N/A
		- Persentase Peningkatan nilai	60	Persen	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
		pelayanan publik perangkat daerah				
5	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	14	Laporan	10	71,4
6	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8	Laporan	6	75
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	4	66.6
8	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Paket	N/A	N/A
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	13	65
10	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	N/A	N/A
11	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	N/A	N/A
12	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	43	Unit	13	30.2

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024)

2) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program / kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat beberapa program / kegiatan telah sesuai target pelaksanaannya dengan persentase capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, Subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif	Indeks Integritas	N/A	Indeks	N/A	N/A
		Kapabilitas APIP	N/A	Level	N/A	N/A
2	Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan NSPK yang berlaku Tata kelola keuangan desa yang akuntabel	Persentase Desa yang mengimplementasikan penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh	50	Persen	50	50 %
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang sesuai standar	Level Kapabilitas APIP	N/A	Persen	N/A	N/A
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat mutu	47.8	Persen	47.8	100
5	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	52	Persen	52	100
6	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	58	Persen	58	100
7	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	38	Persen	38	100
8	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	50	Persen	50	100
9	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	50	Persen	50	100
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	50	Persen	50	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	50	Persen	50	100
12	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Laporan	2	100
13	Temuan yang di tindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	Dokumen	3	100
14	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	Perangkat Daerah	47	100
15	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah	10	100
16	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat Daerah	47	100
17	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100
18	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Laporan	13	100
19	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	Orang/Bulan	48	100
20	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	100
21	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
22	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
23	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	3	100
24	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	3	100
25	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	6	100
26	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	Paket	6	100
27	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	6	100
28	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	6	100
29	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	100
30	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	100
31	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	6	100
32	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6	Laporan	6	100
33	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	Laporan	6	100
34	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	Laporan	6	100
35	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100
36	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12	Unit	12	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
	operasional atau lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
37	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	7	Unit	7	100

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024)

3) Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluran yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 4 Program, Kegiatan, Subkegiatan yang telah melebihi target kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektivitas Peran APIP	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,3	Indeks	4,35	101,16 %
2	Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat secara efektif	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti sesuai SOP	15	Laporan	17	113.3
3	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	Laporan	16	123
4	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8	Laporan	9	112.5
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15	Laporan	17	113.3
6	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	7	Laporan	8	114.2
7	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	Orang	48	171.4

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024)

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah karena program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

1. Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

a) Program Yang Tidak Mencapai Target

Pada Level Program tahun anggaran 2024 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2024 terdapat program yang belum mencapai target secara fisik yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan disebabkan oleh adanya perubahan jadwal penilaian IKKI Kabupaten Banjar yang akan dilakukan di Triwulan IV.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah juga masih belum mencapai target secara fisik juga disebabkan adanya perubahan Peraturan Bupati terkait penilaian IKKI dan pergeseran jadwal penilaiannya ke triwulan IV.

b) Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target

Pada level kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2024 yang belum ada realisasi capaian kinerjanya adalah pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal Perubahan Peraturan Bupati tentang Penilaian IKKI Perangkat Daerah dan Pergeseran jadwal Penilaian ke triwulan IV.

c) Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target

Pada level sub kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

Pengadaan Mebel disebabkan adanya perubahan perencanaan pengadaan mebel yang akan dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga proses pelaksanaan pengadaan ditunda sampai APBD Perubahan ditetapkan.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya disebabkan adanya keterlambatan proses pengadaan yang menggunakan e-catalog dan adanya beberapa perubahan perencanaan pengadaan peralatan mesin sehingga proses pelaksanaan pengadaan ditunda sampai APBD Perubahan ditetapkan.

Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya disebabkan batalnya pengadaan gedung arsip sehingga dilakukan perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan, sehingga proses pengadaan untuk gedung bangunan ditunda sampai APBD Perubahan ditetapkan.

Pemeliharaan Mebel disebabkan perubahan rencana anggaran kas pemeliharaan mebel yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV.

Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya disebabkan karena peralatan dan mesin yang ada tidak semuanya memerlukan pemeliharaan sampai dengan triwulan II ini, dan adanya rencana anggaran kas yang digeser ke triwulan II dan IV.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan adanya perubahan pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh berubah nya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

Reviu Laporan Kinerja belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena adanya perubahan pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh berubah nya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena adanya Kegiatan sosialisasi Pelaporan LHKPN lingkup Kabupaten Banjar yang belum dilaksanakan dan rencana akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2024.

2. Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target

a) Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (63,00%), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (63,00%), Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (75,00%), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (63,00%), Administrasi Umum Perangkat Daerah (50,00%), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100,00%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (50,00%), Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (100,00%), dan Pendampingan dan Asistensi (50,00%).

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disebabkan karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sama halnya pada kegiatan perencanaan dikarenakan sudah merupakan tugas bagian keuangan dan aset sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 75,00%. Merupakan realisasi atas pengadministrasian Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah sesuai dengan penyusunan rencana anggaran kas.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian ini dapat diperoleh dengan melakukan perencanaan yang sudah ditetapkan pada awal tahun dengan terus berkoordinasi antar sub bagian dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 50,00%. Capaian ini dapat diperoleh dengan

melakukan perencanaan yang sudah ditetapkan pada awal tahun dengan terus berkoordinasi antar sub bagian dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang bersifat rutin dalam pelaksanaannya. Sehingga capaian kinerja dapat diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Capaian ini dapat diperoleh dengan melakukan perencanaan yang sudah ditetapkan pada awal tahun dengan terus berkoordinasi antar sub bagian dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

b) Sub Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Sub kegiatan yang telah mencapai target di antaranya:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 70,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 57,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah merupakan tugas rutin bagian

keuangan dan aset sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah merupakan tugas rutin bagian keuangan dan aset sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah di susunnya laporan keuangan perangkat daerah dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah SKPD dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah disusunnya Laporan Rekonsiliasi BMD sampai dengan Triwulan II dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

dengan persentase capaian sebesar 60,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan

perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terbayarnya gaji pengelola keuangan, Gaji dan BPJS Pegawai Kontrak (PTT) sampai dengan Juni 2024.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terpeliharanya Kendaraan Dinas jabatan dan telah dibayarkan pajaknya.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan

perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional yang terdiri dari 6 Mobil dan 5 Motor dan telah dibayarkan pajaknya.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terpeliharanya Gedung dan Bangunan sampai dengan bulan Juni tahun 2024.

Reviu Laporan Keuangan dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakannya Reviu LKPD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada triwulan I.

Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah tersusunnya 3 dokumen sampai dengan bulan Juni tahun 2024 yaitu Laporan Monev TLHP APIP Triwulan I dan Triwulan II, dan Laporan Monev TLHP BPK RI Semester II tahun 2024.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terlaksananya Kegiatan terkait SPIP, Kapabilitas APIP, dan Pra Evaluasi SAKIP sampai dengan bulan Juni tahun 2024.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terlaksananya Kegiatan terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi pada beberapa SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan bulan Juni tahun 2024.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terlaksananya Kegiatan terkait Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, dan terlaksananya Survey Penilaian Integritas sampai dengan bulan Juni tahun 2024.

3. Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target

a) Program Yang Melebihi Target

Pada Level Program tahun anggaran 2024 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2024 terdapat program yang telah melebihi target secara fisik yaitu Program Pendampingan dan Asistensi disebabkan oleh adanya peningkatan nilai Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP Tahun 2023 berdasarkan hasil Survei dari Kuesioner yang di sebarakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Banjar.

b) Kegiatan Yang Melebihi Target

Pada level kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2024 yang melebihi realisasi capaian kinerjanya adalah pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan capaian 56,67% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 50% dikarenakan banyaknya pengaduan yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II ini.

c) Sub Kegiatan Yang Melebihi Target

Pada level sub kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah melebihi target yaitu:

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah selesainya laporan triwulan II di akhir bulan Juni Tahun 2024.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah terpenuhinya 48 orang pejabat fungsional yang mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan banyaknya mandatory dan pengawaan tambahan pada PKPT terkait dengan pengawasan kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Pengawasan Desa Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan adanya pengawasan desa reguler berbarengan dengan pendampingan desa berintegritas sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Pengawasan Kinerja dengan Tujuan Tertentu Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan banyaknya pengaduan yang di tindaklanjuti dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

5) Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

6) Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Kebijakan yang perlu diambil untuk memenuhi target capaian Perubahan Renstra adalah:

- a. Melakukan revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan, sekaligus melakukan revisi target sehubungan dengan realokasi anggaran untuk mengoptimalkan program / kegiatan diluar program kerja pengawasan.
- b. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang sudah dipetakan sebagai risiko strategis dan risiko operasional yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja dan selalu menjaga koordinasi dan komunikasi internal.

2.3 PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Jika melihat capaian realisasi program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2024 s.d triwulan II, pada level sub kegiatan sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih pencapaiannya masih di bawah target.

Pencapaian dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dijabarkan di atas namun di sisi lain juga terdapat faktor penyebab/penghambat yang juga telah dijabarkan di atas. Terhadap kinerja yang belum bisa tercapai akan dilakukan analisa dan tindak lanjut agar pada akhir tahun periode Renstra bisa terpenuhi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 melakukan perubahan target indikator kinerja karena adanya Review Rencana Strategis Perubahan Kedua Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 – 2026 pada tanggal 28 Mei 2024 dengan disepakatinya Berita Acara Reviu antara pihak Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dengan Kepala Bidang PPM Bappedalitbang Kabupaten Banjar maka ada beberapa perubahan target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai capaian kinerja periode sebelumnya diantaranya penambahan Indikator Kinerja Tujua Inspektur Daerah, Perubahan Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Perubahan Indikator pada Kegiatan Pengawasan Internal dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mengalami penambahan sebesar Rp1.269.538.350,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari pagu setelah APBD Murni 2024 yaitu sebesar Rp18.777.455.545,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp.20.046.993.895,00 (dua puluh milyar empat puluh enam juta

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

3.4 Alasan dilakukan Perubahan

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mengajukan usulan perubahan atas usulan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar TA.2023 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar sesuai hitungan penambahan yang disusun dalam kendali anggaran gaji dan TPP.
2. Adanya optimalisasi beberapa kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut :
 - a) Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 050/1108/IJ tanggal 9 Mei 2023 Perihal Pelaksanaan Monitoring P3DN pada Pemerintah Daerah;
 - b) Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-487/D3/01/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemenuhan atribusi wewenang terkait Korsupgah KPK di Kabupaten Banjar;
4. Nota kesepakatan antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesi Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Nomor : NK/1/I/2024 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal, Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Pemenuhan pengembangan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat penjenjangan fungsional, sertifikasi dan teknis/substantif.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan dan fasilitas kantor.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					14	15	16	17		19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH								14.518.452.576,00	18.777.455.545,00	20.046.993.895,00	5.528.541.319,00						15.946.622.080,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							14.518.452.576,00	18.777.455.545,00	20.046.993.895,00	5.528.541.319,00							15.946.622.080,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							14.518.452.576,00	18.777.455.545,00	20.046.993.895,00	5.528.541.319,00							15.946.622.080,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penilaian Mandiri indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektorat				85.5 %	85.5 %	11.120.517.176,00	14.661.778.145,00	15.770.416.495,00	1.233.879.051,00							12.354.396.227,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat mutu				100 %	100 %	11.984.800,00	11.984.800,00	11.984.800,00	0,00			-	4. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		12.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			5.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	6.034.800,00	6.034.800,00	6.034.800,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.890.000,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	14 Laporan	6.228.000,00	6.228.000,00	6.228.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu</i>				100 % 7 Dokumen	100 % 7 Dokumen	11.468.000,00	11.468.000,00	11.468.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9					14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.468.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu				100 %	100 %	890.100.000,00	2.237.100.000,00	2.237.100.000,00	1.347.000.000,00			-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		915.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	K O D E	URUSAN / BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH					RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONA L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1 1	1 2		1 4	1 5	1 6	17	1 8	1 9	2 0	2 1
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.537.800,00	36.537.800,00	45.337.800,00	8.800.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			54.252.095,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	11.024.000,00	11.024.000,00	11.024.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			11.576.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH					RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024		NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.368.925,00	135.368.925,00	135.368.925,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			142.138.985,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	318.690.000,00	318.690.000,00	322.190.000,00	3.500.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			526.105.833,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan				100 %	100 %	594.410.000,00	688.034.000,00	691.054.000,00	96.644.000,00			-	4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		692.532.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		52.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	225.280.000,00	225.280.000,00	259.660.000,00	34.380.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Juml ah Meb el yang Dipel ihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	90.120.000,00	90.120.000,00	101.120.000,00	11.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kan tkelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	7 Unit	230.020.000,00	323.644.000,00	281.284.000,00	51.264.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		230.032.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern				76 Indeks	76 Indeks	1.921.900.400,00	1.945.262.400,00	1.894.262.400,00	92.698.573,00						2.014.598.973,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATI F (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2024	APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.02.2.01	Penyeleng garaan Pengawas an Internal	Persentase Desa yang mengimplem entasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah Persentase Peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah				100 % 80 %	100 % 80 %	1.661.850.400,00	1.685.212.400,00	1.634.212.400,00	-27.638.000,00			-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		1.754.548.973,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01 .0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah				20 Laporan	20 Laporan	496.520.000,00	496.520.000,00	496.520.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			496.520.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01 .0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	30 Laporan	251.400.000,00	251.400.000,00	251.400.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01 .0003	Reviu Laporan Kinerja																		

			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				25 Laporan	9 Laporan	167.624.000,00	167.624.000,00	167.624.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		176.005.305,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	49.546.400,00	49.546.400,00	58.546.400,00	9.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		52.023.668,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	24 Laporan	420.000.000,00	340.312.000,00	310.312.000,00	-109.688.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	276.760.000,00	379.810.000,00	349.810.000,00	73.050.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan n tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH					RKPD 2024	APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Level kapabilitas APIP				3 Level	3 Level	1.476.035.000,00	2.170.415.000,00	2.382.315.000,00	906.280.000,00			-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		1.577.626.880,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	255.835.000,00	255.835.000,00	255.835.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		268.626.880,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				47 perangkat daerah	11 perangkat daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	170.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		115.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	816.200.000,00	1.255.900.000,00	1.390.100.000,00	573.900.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	294.000.000,00	548.680.000,00	566.380.000,00	272.380.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan tkelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		294.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								14.518.452.576,00	18.777.455.545,00	20.046.993.895,00	5.528.541.319,00						15.946.622.080,00	

BAB IV **P E N U T U P**

Perubahan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah gambaran tentang evaluasi program kegiatan hingga triwulan II (semester I) dan program - kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu semester ke-2 ditahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.

Seluruh program , kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat Daerah.

Disamping program pengawasan yang sudah menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dalam rangka melakukan pembinaan dan penguatan integritas, Inspektorat Daerah harus juga melaksanakan fungsi *consulting* kepada *stake holder* agar penyimpangan dan penyelewengan dapat dicegah sebagai akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi amanah dibidang pengawasan, sudah sepatutnya alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mendapat perhatian dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas Perubahan Rencana Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar 2024 instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah.

Selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Kecamatan Kertak Hanyar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2024, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Kecamatan Kertak Hanyar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.600.754.654,- (Enam Milyar Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Kertak Hanyar tetap melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 6.895.169.017,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 5) Fasilitas Kunjungan Tamu, dan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan 1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak ada Program/kegiatan/Sub kegiatan yang melebihi target kinerja

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Kertak Hanyar sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan
- Pada Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Pilpres hanya dilaksanakan 1 (satu) putaran)

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

- Evaluasi secara berkala
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Kertak Hanyar

2.1.7.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2024 SD Triwulan II

	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target Kinerja Tahun 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	RK	Rp.	RK	Rp.
	Urusan : Unsur Kewilayahan												
	Bidang Urusan : Kecamatan	Evaluasi Kinerja Kecamatan	88,5	Nilai	6.600.754.654	34,30	1.785.719.677	58,59	4.234.306.927	27,00	995.589.015	58,38	3.051.654.068
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	91	Persen	4.521.185.454	22,37	1.334.329.502	43,54	2.748.148.127	16,61	750.542.844	43,54	2.438.332.915
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	3.910.000	20,53	850.000	48,46	3.075.000	18,65	815.000	48,46	815.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	2.590.000	6	500.000	7	2.000.000	6	500.000	7	500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	1.320.000	7	350.000	14	1.075.000	7	315.000	14	815.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	3.941.866.129	24,81	1.136.625.002	42,00	2.401.409.077	22,77	675.428.841	42,00	2.198.877.380
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/ bulan	3.857.081.129	31	1.115.065.002	31	2.358.774.077	31	654.353.841		2.156.727.380
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	84.300.000	3	21.075.000	6	42.150.000	3	21.075.000		42.150.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	485.000	1	485.000	1	485.000	1	0		0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persen	176.422.625	20,15	62.546.800	44,65	123.321.350	13,25	11.426.276	44,65	67.411.506
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.264.500	1	1.632.250	1	1.632.250	1	0	1	1.632.250
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.130.200	1	5.032.550	1	10.065.100	1	0	1	10.065.100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	6.319.925	1	1.600.000	1	3.200.000	1	1.587.000	1	3.187.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.708.000	1	1.532.000	1	2.924.000	1	672.300	1	1.237.000

	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target Kinerja Tahun 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	RK	Rp.	RK	Rp.
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	6.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	0	1	1.355.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	135.000.000	1	50.750.000	2	101.500.000	1	9.166.976	2	49.935.156
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	29.494.700	23,20	26.722.700	41,37	26.722.700	13,32	0	41,37	20.621.750
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	29.494.700	1	26.722.700	2	26.722.700	1	0	2	20.621.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	294.150.000	22,96	87.550.000	43,28	158.550.000	15,19	55.067.327	43,28	130.136.579
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.500.000	1	600.000	1	1.700.000	1	1.100.000	1	1.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000	3	7.500.000	6	15.000.000	3	5.417.327	6	11.092.421
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	266.650.000	3	79.450.000	7	141.850.000	3	48.550.000	7	117.344.158
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	75.342.000	22,59	20.035.000	41,47	35.070.000	16,50	7.805.400	41,47	20.470.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	41.980.000	1	12.395.000	2	24.790.000	1	6.005.400	2	17.970.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	Unit	9.830.000	1	2.640.000	2	5.280.000	1	300.000	2	1.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	23.532.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	26.227.000	60,00	19.227.000	92,00	26.227.000	27,00	0	92,00	9.850.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	26.227.000	60,00	19.227.000	92,00	26.227.000	27,00	0	92,00	9.850.000

	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target Kinerja Tahun 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	RK	Rp.	RK	Rp.
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	26.227.000	1	19.227.000	2	26.227.000	1	0	2	9.850.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	1.814.042.200	33,01	331.663.175	56,55	30.525.000	25,77	203.796.171	56,55	508.873.153
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	61.700.000	29,24	18.025.000	51,49	30.525.000	22,38	15.900.000	51,49	21.240.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga Kemasya rakatan	11.100.000	1	10.400.000	1	11.100.000	1	2.400.000	1	10.400.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	50.600.000	1	7.625.000	1	19.425.000	1	13.500.000	1	10.840.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100	Persen	1.752.342.200	36,78	313.638.175	61,60	1.252.756.800	29,15	187.896.171	61,60	487.633.153
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandarsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ ormas	556.172.550	1	93.355.450	1	399.222.350	1	59.434.729	1	154.250.854
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/ ormas	583.230.600	1	94.673.900	1	413.967.800	1	63.990.847	1	170.013.820
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kertak Hanyar I)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/ ormas	612.939.050	1	125.608.825	1	439.566.650	11	64.470.595	1	163.368.479
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	32.300.000	47,45	16.150.000	58,62	19.150.000	29,04	6.150.000	57,37	11.150.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	22.300.000	44,89	11.150.000	50,00	11.150.000	36,08	6.150.000	50,00	6.150.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	20.200.000	1	11.150.000	1	11.150.000	11	6.150.000	1	6.150.000

	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target Kinerja Tahun 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	RK	Rp.	RK	Rp.
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	10.000.000	50,00	5.000.0000	67,23	8.000.000	22,00	0	64,73	5.000.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	10.000.000	1	5.000.0000	1	8.000.000	1	0	1	5.000.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	186.000.000	20,02	78.350.000	46,66	145.500.000	16,45	30.600.000	46,66	72.948.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	186.000.000	20,02	78.350.000	46,44	145.500.000	16,45	30.600.000	46,66	72.948.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	Orang	30.000.000	0	2.250.000	0	4.500.000	0	1.200.000	0	2.400.000
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	156.000.000	2	76.100.000	2	141.000.000	2	29.400.000	2	70.548.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	Persen	21.000.000	22,93	6.000.000	54,14	12.000.000	21,43	4.500.000	54,14	10.500.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	21.000.000	22,93	6.000.000	54,14	12.000.000	21,43	4.500.000	54,14	10.500.000

	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Target Kinerja Tahun 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	RK	Rp.	RK	Rp.
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	18.000.000	3	4.500.000	6	9.000.000	3	4.500.000	6	9.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	0	1	1.500.000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000

Sumber:

- - Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Kab. Banjar 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 14 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 6.895.169.017,- (Enam Milayar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya penambahan pagu untuk kenaikan berkala dan ada perubahan standar harga satuan honor bendahara dalam rangka penyesuaian Belanja Daerah untuk hal tersebut.
2. Adanya Penambahan pagu pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena kebutuhan Tingginya mobilitas camat untuk kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar memerlukan penambahan operasional pemeliharaan dan BBM
3. Adanya perubahan Pagu dan Penyesuaian pagu pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang fasilitas perkantoran
4. Adanya pergeseran dan penambahan pagu pada Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena Adanya kegiatan yang harus diikuti dan yang perlu dikoordinasikan serta dikonsultasikan oleh Camat ke luar daerah camat agar bisa melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian maupun daerah lainnya sesuai arahan kepala daerah dan keperluan anggaran perjalanan luar daerah untuk TP PPK Kecamatan agar bisa melaksanakan koordinasi serta mendampingi kegiatan TP PPK Kabupaten
5. Adanya pergeseran rekening belanja pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Adanya penambahan pagu anggaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sb Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu upah pasukan pengibar Bendera karena tidak teranggarkan di DPA murni
7. Adanya pengurangan pagu pada sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Sub kegiatan karena berkurangnya jumlah kafilah MTQ.
8. Adanya penambahan pagu pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di kelurahan
9. Adanya penambahan pagu Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan untuk keperluan Fasilitasi penyelenggaraan Pilkada
10. Adanya Pergeseran dan Penambahan Pagu Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil kegiatan		Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat																	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/ Desa	89 Nilai	91 Nilai	13 Dokumen	13 Dokumen	100 persen	100 persen	2.590.000	2.590.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	2.590.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/ Desa	89 Nilai	91 Nilai	21 Laporan	21 Laporan	100 persen	100 persen	1.320.000	1.320.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	1.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/ Desa	89 Nilai	91 Nilai	31 orang/bul an	31 orang/bul an	100 persen	100 persen	3.857.081.129	4.126.866.129	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	4.000.000.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/ Desa	89 Nilai	91 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	84.300.000	84.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	84.300.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/ Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	845.000	845.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	500.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	3.264.500	3.264.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	3.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil kegiatan		Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	20.130.200	20.130.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	16.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	6.319.925	6.319.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	5.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	5.608.000	5.608.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	5.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	6.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	135.000.000	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	170.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	29.494.700	31.972.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	40.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	2.500.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	15.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Indeks	Jumlah	Persentase Jasa	Kab. Banjar	89 Nilai	91 Nilai	13 Laporan	13 Laporan	100	100	266.650.000	266.650.000	Dana		Indeks	91,5	154.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil kegiatan		Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Umum Kantor	Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa					persen	persen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	41.980.000	51.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	50.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	9.830.000	9.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	9.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	89 Nilai	91 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	23.532.000	23.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	91,5 Nilai	20.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																	
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	26.227.000	26.227.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	100 Persen	26.227.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	2 Lembaga Kemasyaraka kat	2 Lembaga Kemasyara kat	100 persen	100 persen	11.100.000	11.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	13.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil kegiatan		Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							di Desa															
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	50.600.000	50.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	60.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraa n Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	20.200.000	30.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggar aan Kententerama n dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	2.500.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraa n Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	2.100.000	2.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggar aan Kententerama n dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	2.500.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraa n Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggar aan Kententerama n dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100 persen	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil kegiatan		Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kepolisian Negara Republik Indonesia															
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	50 orang	50 orang	100 persen	100 persen	30.000.000	33.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	35.000.000
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	156.000.000	154.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	154.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala	Persentase Fasilitasi	Jumlah Dokumen	Persentase Fasilitasi	Kab. Banjar Kertak Hanvar.	100 persen	100 persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer		Persentase Fasilitasi	100 persen	18.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub kegiatan			Hasil kegiatan		Tolok Ukur	Target									
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Desa dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kel/Desa								Umum-Dana Alokasi Umum		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	1.000.000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	1.500.000	
Kelurahan Manarap Lama																						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	100 persen	100 persen	583.230.600	597.218.721	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 persen	597.218.721	
Kelurahan kertak Hanyar 1																						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	100 persen	100 persen	612.939.050	626.927.171	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan	100 persen	626.927.171	

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan		Tolok Ukur	Target									
							Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah						
							Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	terlaksana									Alokasi Umum		Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan			
Kelurahan Mandar Sari																							
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01					KECAMATAN																	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Banjar Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa	100 persen	100 persen	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	100 persen	100 persen	556.172.550	579.132.671	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 persen	579.132.671	
TOTAL																6.600.754.654	6.895.169.017						

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Kertak Hanyar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Astambul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen Perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Astambul dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Astambul Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

(Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Astambul tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 kedalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Astambul agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasifaktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar melaksanakan Enam program, Dua Belas kegiatan dan Tiga puluh enam sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.555.048.552,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Astambul berubah menjadi enam program, Dua Belas kegiatan dan Tiga Puluh sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.604.856.444 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Pada sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja.
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Pada sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD,

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- Kegiatan administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Pada sub kegiatan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dan sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat.
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Pada sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan sub kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Sedangkan program/kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Astambul sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan pada triwulan keempat.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan dilaksanakan pada Triwulan III di awal Bulan.
- Pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu karena masih Menunggu JUKNIS dari Kabupaten dan diperpanjang periode jabatan kepala desa

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

Karena tidak ada target yang melebihi target, maka tidak ada faktor penyebabnya.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua subkegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Astambul

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – factor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN ASTAMBUL TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			Volume	Satuan		TK	Rp.	TK	Rp.	TK	Rp.	TK	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR KEWILAYAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	87	Indeks	2.555.048.552	56,14	581.762.000	97,53	1.444.923.889	31,09	295.853.991	72,22	938.467.292
	KECAMATAN	Nilai Evaluasi Kecamatan	81	Nilai	2.555.048.552	56,14	581.762.000	97,53	1.444.923.889	31,09	295.853.991	72,22	938.467.292
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	2.294.347.552	111,46	503.185.000	199,16	1.255.906.889	76,87	248.584.991	216,15	837.433.292
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persentase	3.311.000	22,08	731.000	48,05	1.591.000	9,57	995.200	53,31	1.765.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	1.001.000		731000		821000		635.000		635.000

		Perangkat Daerah											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	2.310.000		0		770000		360.200		1.130.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	1.922.236.012	21,47	412.713.000	50,00	1.068.781.889	9,57	183.896.520	36,03	692.498.406
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang / Bulan	1.888.996.012		404.403.000		1.052.161.889		175.586.520		675.878.406
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	33.240.000		8310000		16.620.000		8.310.000		16.620.000
					-								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persentase	22.300.000	44,84	10.000.000	50,00	11.150.000	-	-	5,16	1.150.000

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2.300.000		0		1.150.000		0		1.150.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	20.000.000		10.000.000		10.000.000		0		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	87.348.000	-	19.650.500	-	37.823.000	16,85	14.722.000	41,91	36.606.870
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	597.000		199.000		398.000		-		394.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket	1.797.000		847.000		1.322.000		-		2.266.500

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	13.240.000		4.926.000		6.746.000		2.652.000		5.469.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.714.000		678.500		1.357.000		-		-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	69.000.000		13.000.000		28.000.000		12.070.000		28.476.870
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase	204.172.540	-	47.405.500	-	108.461.000	17,76	36.259.271	41,27	84.255.816

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000		-		500.000		-		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12.222.540		3.055.500		6.111.000		3.486.646		6.043.776
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	190.950.000		44.350.000		101.850.000		32.772.625		78.212.040
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persentase	54.980.000	23,07	12.685.000	51,11	28.100.000	23,12	12.712.000	38,48	21.157.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	7	Unit	41.980.000		10.495.000		20.990.000		10.500.000		18.215.000

		Pajak dan Perizinannya											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	8.000.000		2.190.000		4.110.000		2.212.000		2.942.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2	Unit	5.000.000		-		3.000.000		-		-
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persentase	101.469.000	14,24	14.450.000	90,56	91.886.000	14,24	14.450.000	51,51	52.265.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	101.469.000	14,24	14.450.000	90,56	91.886.000	14,24	14.450.000	51,51	52.265.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	101.469.000		14.450.000		91.886.000		14.450.000		52.265.000
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persentase	42.203.000	100,00	42.203.000	100,00	42.203.000	37,90	15.995.000	51,05	21.545.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persentase	42.203.000	100,00	42.203.000	100,00	42.203.000	37,90	15.995.000	51,05	21.545.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2	Lembaga	17.028.000		17.028.000		17.028.000		15.166.000		15.166.000
	Perencanaan Pembangunan di Desa		2										
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2	Laporan	25.175.000		25.175.000		25.175.000		829.000		6.379.000

04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Persentase	42.760.000	100,00	11.838.000	73,21	29.936.000	22,22	9.088.000	36,16	14.788.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persentase	40.892.000	100,00	11.838.000	73,21	29.936.000	22,22	9.088.000	36,16	14.788.000
	Sinergitas dengan Ke polisian Negara Repu blik Indonesia, Tenta ra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	39.024.000		11.838.000		29.936.000		9.088.000		14.788.000

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1.868.000	-	-	-	-	-	-	-	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	1.868.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1.868.000	-	-	-	-	-	0	-	0

05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persentase	63.377.000	11,12	7.050.000	22,25	14.100.000	7,42	4.700.000	7,42	4.700.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persentase	63.377.000	11,12	7.050.000	22,25	14.100.000	7,42	4.700.000	7,42	4.700.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	35.000.000	-	-	-	0
--	---	---	-----	-------	------------	---	---	---	---

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen									
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	28.377.000		7.050.000		14.100.000		4.700.000		4.700.000
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persentase	10.892.000	-	3.036.000	100,00	10.892.000	27,87	3.036.000	71,02	7.736.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persentase	10.892.000	-	3.036.000	100,00	10.892.000	27,87	3.036.000	71,02	7.736.000

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1.750.000		-		1.750.000		1.750.000		1.750.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen	3.000.000		-		3.000.000		-		-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1.750.000		1.750.000		1.750.000		-		1.750.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	1	Dokumen	1.286.000		1.286.000		1.286.000		1.286.000		1.286.000

		Permusyawaratan Desa											
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen			-		3.106.000		-		2.950.000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	3.106.000		-		-		-		-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Astambul Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indicator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Ada perubahan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Nama subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.604.856.444 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi untuk Kendaraan Roda 2

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi, untuk Pemeliharaan AC dan Laptop/Komputer
2. Pada Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

O N	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2022	PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE LOMPO K SASAR AN	PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAER AH PENAN GGUN G JAWA B
							TARG ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamb ah/Berkura ng (10-12)	L OKASI	SUM BER DAN A	PRIORITAS					
							SEB ELU M	SES UDA H	KPD 2024	PBD 2024	RKP D PERUB AHAN 2024				N ASIONA L	DAERA H		T ARGE T	PAG U INDIKA TIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ASTAMBUL								2.400.7 32.514, 00	2.555.0 48.552, 00	2.604.8 56.444, 00	204.123.93 0,00						2.586.0 75.000, 00	
	7	UNSUR KEWILAY AHAN							2.400.7 32.514, 00	2.555.0 48.552, 00	2.604.8 56.444, 00	204.123.93 0,00							2.586.0 75.000, 00	
	7.01	KECAMAT AN							2.400.7 32.514, 00	2.555.0 48.552, 00	2.604.8 56.444, 00	204.123.93 0,00							2.586.0 75.000, 00	
1,	7.01.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Indeks Kepatuha n dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamata n Astambul				76 Inde ks	76 Inde ks	2.057.5 31.514, 00	2.294.3 47.552, 00	2.343.8 75.444, 00	164.918.48 6,00							2.222.4 50.000, 00	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD				100 Persen	100 Persen	3.311.000,00	3.311.000,00	3.311.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		7.500.000,00	KECAMATAN ASTAM BUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Astambul, Semudesa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	4. Meningkatkan kelola		2.500.000,00	KECAMATAN ASTAM BUL

																kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				17 Lapo ran	17 Lapo ran	2.310.0 00,00	2.310.0 00,00	2.310.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			5.000.0 00,00	KECA MATAN ASTAM BUL

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.685.419.974,00	1.922.236.012,00	1.922.236.012,00	236.816.038,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		1.835.400.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.652.179.974,00	1.888.996.012,00	1.888.996.012,00	236.816.038,00	Kab. Banjara, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.800.000.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

																kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.01. 2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Doku men	1 Doku men	33.240. 000,00	33.240. 000,00	33.240. 000,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			35.400. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		27.600.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Astambul, Semudesa	DANATRANSFER UMUM-DAN ALOKASIMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.600.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
																4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				

																kepe rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.01. 2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan</i>				3 Oran g	3 Oran g	20.000. 000,00	20.000. 000,00	20.000. 000,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			25.000. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	87.348.000,00	87.348.000,00	119.348.000,00	32.000.000,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		93.400.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Astambul, Semudesa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			600.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Pake t	1 Pake t	13.240. 000,00	13.240. 000,00	13.240. 000,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			14.000. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL
	7.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediakan				1 Pake t	1 Pake t	2.714.0 00,00	2.714.0 00,00	4.714.0 00,00	2.000.000,0 0	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola			3.000.0 00,00	KECA MATAN ASTAM BUL

																kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Lapo ran	4 Lapo ran	69.000. 000,00	69.000. 000,00	99.000. 000,00	30.000.000, 00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			74.000. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	204.172.540,00	204.172.540,00	205.220.432,00	1.047.892,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		202.550.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Astambul, Semudesa	DAN TRANSFER UMUM-DAN ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	4. Meningkatkan kelola		1.200.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Lapo ran	12 Lapo ran	190.950 .000,00	190.950 .000,00	190.950 .000,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i		188.350 .000,00	KECA MATAN ASTAM BUL
	7.01.01. 2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	<i>Persentas e Pemeliha aan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah</i>				100 Pers en	100 Pers en	54.980. 000,00	54.980. 000,00	71.460. 000,00	16.480.000, 00			-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui	-	56.000. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	8.000.0 00,00	8.000.0 00,00	10.680. 000,00	2.680.000,0 0	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			8.500.0 00,00	KECA MATAN ASTAM BUL
	7.01.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				2 Unit	2 Unit	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	5.000.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola			5.500.0 00,00	KECA MATAN ASTAM BUL

																kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	101.469.000,00	101.469.000,00	101.469.000,00	281.000,00							101.750.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan</i>				100 Persen	100 Persen	101.469.000,00	101.469.000,00	101.469.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kelola pemerintahan	-		101.750.000,00	101.750.000,00

																rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.02. 2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksana an Kewenang an Lain yang Dilimpahka n</i>				6 Lapo ran	6 Lapo ran	101.469 .000,00	101.469 .000,00	101.469 .000,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				A AN AM

3,	7.01.03	PROGRA M PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	Persentas e desa dan kelurahan yang melaksan akan MusDes/ MusKel yang tepat waktu Persentas e Koordinas i dan Fasilitasi Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Kecamata n				100 100 % Pers en	100 100 % Pers en	42.203. 000,00	42.203. 000,00	42.203. 000,00	11.297.000, 00							53.500. 000,00	
	7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	Persentas e desa dan kelurahan yang melaksana kan MusDes/M usKel yang tepat waktu Persentas e Koordinasi Pemberda yaan Masyaraka t Desa yang Terlaksana				100 % 100 Pers en	100 % 100 Pers en	42.203. 000,00	42.203. 000,00	42.203. 000,00	0,00			-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an	-		53.500. 000,00	KECA MATAN ASTAM BUL

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</i>				100 Persen	100 Persen	123.392.000,00	40.892.000,00	41.172.000,00	- 82.220.000,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		124.000.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	121.524.000,00	39.024.000,00	39.304.000,00	- 82.220.000,00	Kab. Banjarr, Astambul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				A AN AM

																kepe rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i				
	7.01.04. 2.01.00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksana an Harmonisa si Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka t				1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.868.0 00,00	1.868.0 00,00	1.868.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i			20000 00,00	KOTA MANTAN ANJAM BUL

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi				100 Persen	100 Persen	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian				1 Laporan	1 Laporan	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Astambul, Semudesa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				ANAM

			<i>Negara Republik Indonesia</i>													kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	63.377.000,00	63.377.000,00	63.377.000,00	6.623.000,00							70.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi</i>				100 Persen	100 Persen	63.377.000,00	63.377.000,00	63.377.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan	-		70.000.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

																birokrasi				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Banjara, Astambul, Semu Kel/Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

			Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.377.000,00	28.377.000,00	28.377.000,00	0,00	Kab. Banjarr, Astambul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Meningkatkan kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			ANAM

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Banjara, Astambul, Semu Kel/Desa Semu Kota/Kab, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.100.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banjara, Astambul, Semu Kel/Desa	DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN ASTAMBUL

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksana an Tugas dan Fungsi Badan Permusya waratan Desa				1 Doku men	1 Doku men	1.286.0 00,00	1.286.0 00,00	1.286.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i		1.375.0 00,00	KECA MATAN ASTAM BUL
	7.01.06. 2.01.00 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaat an, dan Pendayag unaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasa n Batas Desa				1 Doku men	1 Doku men	3.106.0 00,00	3.106.0 00,00	3.106.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Asta mbul, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4. Mening katkan t kelola kepeme rintahan melalui reforma si dan penyed erhana an birokras i 4. Mening katkan t kelola			A AN AM

															kepe- rintahan melalui reforma- si dan penyed- erhana- an birokras- i				
	J U M L A H								2.400.7 32.514, 00	2.555.0 48.552, 00	2.604.8 56.444, 00	1.064.611.2 69.243,00						2.586.0 75.000, 00	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Astambul Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**.

Perubahan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Astambul secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencanakerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Gambut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Gambut dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut Tahun 2024 ini :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Timur dan juga ada perubahan sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur adanya indikator kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian seluruh indikator di level sub
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/663/PPE/Bapelitbang tentang Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 48);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 64);
17. Peraturan Bupati Banjar tanggal 26 Juli 2024 Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
2. Untuk menyesuaikan pagu indikatif sesuai Surat Edaran Bupati Banjar dengan nomor 000.7.2.4/663/PPE-Bappedalitbang.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok

materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi targetkinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.554.945.014,- (*Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Belas Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp 5.130.370.514,- (*Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 742.826.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 681.748.500,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pada saat perubahan Kecamatan Gambut melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 6.636.890.934,- (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.168.250.392,- (*Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 756.814.121,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 711.826.421,- (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/ kegiatan / sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

9. PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

11. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Gambutsampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4 Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terkendala dikarenakan Data keuangan dan aset belum terarsip dengan baik sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terkendala dikarenakan adanya beberapa kebutuhan kantor tidak tersedia di dalam DPA.
- Pada sub kegiatan Pe Penyedian Peralatan Rumah Tangga terkendala dikarenakan adanya beberapa kebutuhan kantor tidak tersedia di dalam DPA.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terkendala dikarenakan adanya beberapa kebutuhan kantor tidak tersedia di dalam DPA.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terkendala dikarenakan belum adanya jadwal pencetakan spanduk untuk kegiatan atau hari-hari besar.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa terkendala penyusunan laporan kegiatan dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan berada di akhir bulan Juni.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program /kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai

target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Gambut.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2024 S/D TRIWULAN II

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5,130,370,514		1,153,731,945		1,708,929,761		794,408,392		1,461,432,423
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	4,769,264,514	-	974,545,445	-	1,689,291,261	-	749,326,392	-	1,393,807,423
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang tersusun	100	Persen	3,871,100	30	3,048,800	20	322,500	23.58	99,600	20	1,099,100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	1,549,300	6	1,549,300	4	-	6.00	99,600	4	300,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	322,500	-	-	-	322,500	0.00	-	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	499,800	1	499,800	-	-	1.00	-	0	406,100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	499,800	-	-	-	-	0.00	-	2	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	499,800	2	499,800	1	-	1.00	-	1	168,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	499,900	0	499,900	1	-	0.00	-	1	225,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	1	Persen	4,279,902,172	25	830,149,145	25	1,561,286,261	15.65	669,607,701	26	1,232,812,314
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang	4,236,582,172	40	819,049,145	40	1,550,546,261	29.00	658,867,701	29	1,221,042,314
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	42,960,000	3	10,740,000	3	10,740,000	3.00	10,740,000	3	11,770,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	360,000	1	360,000	-	-	0.00	-	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan BMD tepat waktu	1	Persen	21,000,000	25	5,250,000	25	5,250,000	28.91	1,750,000	25	8,750,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	21,000,000	3	5,250,000	3	5,250,000	3.00	1,750,000	3	8,750,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	1	Persen	800,000	25	800,000	25	-	20.00	-	25	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	800,000	-	800,000	-	-	0.00	-	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	1	Persen	157,960,000	25	60,572,500	25	50,537,500	11.74	23,540,836	22	78,580,260
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	5	Paket	1,499,500	1	775,500	2	724,000	0.00	-	2	1,042,500

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2,398,000	-	1,882,000	2	516,000	0.00	-	1	480,000
	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	1,979,500	1	1,065,000	2	137,500	0.00	-	1	212,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	25,000,000	18	21,000,000	1	2,000,000	5.00	-	13	23,412,500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	5,643,000	1	3,300,000	2	315,000	0.00	-	1	595,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1,995,000	-	900,000	-	300,000	0.00	-	0	450,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	112,245,000	3	29,850,000	3	44,745,000	3.00	21,740,836	3	51,188,260
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	7,200,000	3	1,800,000	3	1,800,000	3.00	1,800,000	3	1,200,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persen	26,344,000	-	-	-	-	0.00	-	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	26,344,000	-	-	-	-	0.00	-	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	1	Persen	197,935,942	25	46,815,000	25	57,875,000	23.88	40,023,255	25	51,578,049

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4,450,000	3	500,000	3	1,500,000	3.00	-	3	1,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	45,490,942	3	11,475,000	3	11,475,000	3.00	6,074,901	3	6,112,735
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	147,995,000	-	34,840,000	-	44,900,000	1.00	33,948,354	3	44,465,314
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	1	Persen	81,451,300	25	27,910,000	25	14,020,000	12.17	14,305,000	22	20,987,700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	49,580,000	-	13,300,000	2	12,800,000	0.00	12,592,000	2	9,935,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	16,871,500	2	4,610,000	2	1,220,000	2.00	1,713,000	2	1,079,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	14,999,800	-	10,000,000	2	-	0.00	-	2	9,973,000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	1	Persen	64,594,000	25	49,884,500	25	1,312,500	23.75	11,840,000	25	26,795,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kecamatan yang terlaksana											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	Persen	64,594,000	25	49,884,500	25	1,312,500	23.75	11,840,000	25	26,795,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	64,594,000	3	49,884,500	-	1,312,500	1.00	11,840,000	1	26,795,000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1	Persen	59,642,000	45	15,127,000	25	4,975,000	32.31	14,305,000	25	2,100,000
	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	1	Persen	59,642,000	45	15,127,000	25	4,975,000	28.75	14,305,000	25	2,100,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	9,264,000	3	9,264,000	-	-	3.00	8,990,000	0	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50,378,000	3	5,863,000	3	4,975,000	3.00	5,315,000	3	2,100,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	1	Persen	27,583,000	30	13,056,000	20	1,015,000	39.04	10,022,000	20	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persen	23,296,000	30	11,784,000	20	-	28.75	10,022,000	20	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	2	Laporan	19,994,000	1	10,022,000	-	-	1.00	10,022,000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3,302,000	-	1,762,000	-	-	0.00	-	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Persen	4,287,000	30	1,272,000	20	1,015,000	2.50	-	20	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	4,287,000	-	1,272,000	-	1,015,000	0.00	-	0	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Persen	191,345,000	25	97,420,000	25	6,210,000	4.50	5,440,000	25	35,010,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	1	Persen	191,345,000	25	97,420,000	25	6,210,000	7.10	5,440,000	25	35,010,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	75,295,000	-	-	-	-	0.00	-	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kesatuan Republik Indonesia												
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	91,210,000	-	91,210,000	-	-	0.00	-	0	30,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	24,840,000	-	6,210,000	-	6,210,000	0.00	5,440,000	0	5,010,000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Persen	17,942,000	25	3,699,000	25	6,126,000	20.62	3,475,000	20	3,720,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Persen	17,942,000	25	3,699,000	25	6,126,000	18.80	3,475,000	20	3,720,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	2,217,000	-	-	1	2,217,000	0.00	-	1	2,105,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3,267,000	-	-	-	1,727,000	0.00	-	0	1,615,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	3,162,000	-	1,692,000	-	-	0.00	1,580,000	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	3,792,000	-	2,007,000	-	-	0.00	1,895,000	0	-
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	2,182,000	-	-	1	2,182,000	0.00	-	0	-
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	3,322,000	-	-	-	-	0.00	-	0	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Gambut Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, tidak ada perubahan indikator kinerja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Namun, ada perubahan pada target indikator kinerja dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan item belanja.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 6.636.890.934,- (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.168.250.392,- (*Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 756.814.121,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 711.826.421,- (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

3.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Penambahan anggaran dilakukan karena anggaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, (PPTK, PPK dan bendahara pengeluaran) hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan dan Adanya pengadaan barang di perubahan yang memerlukan Pejabat Pengadaan sehingga diperlukan penambahan honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

1.2 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pengurangan dilakukan karena adanya penyesuaian kebutuhan pada pembelian belanja baterai UPS dan kursi lipat sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena penambahan Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat dan PKK untuk menunjang Kegiatan koordinasi Kecamatan dan TP. PKK Kecamatan Gambut.

1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena adanya penambahan Pengadaan layar proyektor dikarenakan proyektor lama sudah rusak demi mendukung kegiatan rapat yang sering diadakan di Aula Kecamatan Gambut, Penambahan Pengadaan AC di ruang Kessos dan Sekretariat dikarenakan rusak dan Perubahan rincian harga pada belanja laptop untuk mendukung kinerja ASN.

1.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pengurangan dilakukan karena adanya penyesuaian kebutuhan pada belanja materai sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pengurangan dilakukan karena Adanya penyesuaian kebutuhan pada belanja tagihan listrik sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan perubahan karena mengingat mobilitas Camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan di wilayah kerja masing-masing.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan perubahan karena adanya pengurangan belanja pemeliharaan AC sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent, Penambahan belanja untuk pengadaan karpet di ruang kerja Camat dikarenakan karpet sudah rusak, Adanya pengurangan belanja pada pemeliharaan computer/notebook sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent dan Adanya pengurangan belanja pada pemeliharaan printer sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent.

3.1.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilakukan perubahan karena Penambahan Belanja dilakukan karena adanya Penambahan Kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu).

1.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan perubahan karena adanya penyesuaian kebutuhan belanja dan adanya pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

3.1.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dilakukan perubahan karena adanya pengurangan belanja makanan dan minuman rapat serta jasa penyelenggaraan acara sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent.

Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GAMBUT								4.694.485.214,00	6.554.945.014,00	6.636.890.934,00	1.942.405.720,00						6.039.026.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.694.485.214,00	6.554.945.014,00	6.636.890.934,00	1.942.405.720,00							6.039.026.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.694.485.214,00	6.554.945.014,00	6.636.890.934,00	1.942.405.720,00							6.039.026.000,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (KKI)				100 100 85 % Persen Nilai	76 Nilai	4.280.879.214,00	4.769.264.514,00	4.812.447.392,00	125.320.786,00							4.406.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.871.100,00	3.871.100,00	3.871.100,00	0,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		4.400.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	1.549.300,00	1.549.300,00	1.549.300,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.750.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	322.500,00	322.500,00	322.500,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	499.800,00	499.800,00	499.800,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			550.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.960.000,00	42.960.000,00	49.120.000,00	6.160.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		900.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			900.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	157.960.000,00	157.960.000,00	200.648.000,00	42.688.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		127.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	2.398.000,00	2.398.000,00	586.000,00	-1.812.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.979.500,00	1.979.500,00	1.979.500,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.643.000,00	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.245.000,00	112.245.000,00	156.745.000,00	44.500.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			75.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	26.344.000,00	26.344.000,00	29.976.000,00	3.632.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		40.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	26.344.000,00	26.344.000,00	29.976.000,00	3.632.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	197.935.942,00	197.935.942,00	180.232.320,00	-17.703.622,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		205.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.450.000,00	4.450.000,00	2.000.000,00	-2.450.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				12 Laporan	12 Laporan	45.490.942,00	45.490.942,00	30.237.320,00	-15.253.622,00	Kab. Banjar, Gambut,	DANA TRANSFER UMUM- DANA	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi			50.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana																	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 Persen	100 Persen	64.594.000,00	64.594.000,00	64.594.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		70.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	64.594.000,00	64.594.000,00	64.594.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100 %	100 Persen	59.642.000,00	1.484.216.500,00	1.532.004.542,00	1.248.684.000,00							1.308.326.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 Persen	100 Persen	59.642.000,00	59.642.000,00	63.364.000,00	3.722.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		89.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	9.264.000,00	9.264.000,00	9.264.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			9.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.378.000,00	50.378.000,00	54.100.000,00	3.722.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.162.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.792.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.322.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
		KELURAHAN GAMBUT								481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00							0,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100 %	100 Persen	481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				100 Persen	100 Persen	481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Pokmas		0,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	481.771.000,00	0,00	0,00	-481.771.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			0,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN GAMBUT BARAT							424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00							0,00	
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				-	100 Persen	424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				-	100 Persen	424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00			-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Pokmas		0,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	424.693.500,00	0,00	0,00	-424.693.500,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut Barat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan tata kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			0,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
	J U M L A H								5.600.949.714,00	6.554.945.014,00	6.636.890.934,00	1.064.611.269.243,00						6.039.026.000,00		

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Gambut di SIPD Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagipemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaiantujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Gambut secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
 2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya

akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Karang Intan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Karang Intan dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Karang Intan tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan

perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **3.311.449.597,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh)**, dan pada saat perubahan Kecamatan Karang Intan bertambah dikarenakan adanya penambahan belanja Honorarium PPPK, PPK, dan Pejabat Pengadaan Barang, penambahan belanja bahan logistik kantor, penambahan belanja Perjalanan Dinas Biasa kecamatan dan PKK, penambahan belanja Bahan Bakar Minyak, penambahan belanja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, serta penambahan belanja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan dengan total Pagu Perubahan sebesar **Rp 3.367.218.857,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)**.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan

oleh Instansi Vertikal dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak ada Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target sampai dengan triwulan II.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Karang Intan sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan serta masih belum optimalnya penyusunan pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan adalah kegiatan rutin;
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan;
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan;
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana masih ada sub kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditentukan, hal ini berimplikasi negatif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Karang Intan.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai target yang diinginkan;
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target dengan catatan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran dibuat secara tepat;
- c. Adanya koordinasi baik di internal kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan sehingga target kinerja dapat diperoleh secara maksimal dan optimal.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARANG INTAN TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan	76	Indeks/ Nilai	2.929.437.097	0	624.467.573	0	1.636.630.435	0	429.416.371	0	1.342.010.418
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	7.214.800	25	2.764.800	25	4.684.800	0	720.000	25	720.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokume n	5.210.000	4	1.980.000	4	3.660.000	4	720.000	4	720.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokume n	2.004.800	5	784.800	5	1.024.800	5	0	5	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.448.182.731	20	455.888.273	30	1.341.445.135	0	358.955.994	25	1.156.380.151
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	orang	2.423.142.731	17	449.028.273	17	1.328.525.135	0	352.623.994	15	1.143.988.151
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	40	Dokume n	24.240.000	5	6.060.000	15	12.120.000	5	6.060.000	15	12.120.000

		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Dokumen	800.000	1	800.000	0	800.000	1	272.000	1	272.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	150.000	25	150.000	25	150.000	0	0	25	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	150.000	1	150.000	2	150.000	1	0	2	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	10.150.000	25	10.000.000	25	10.000.000	0	0	25	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	150.000	0	0	1	0	0	0	1	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	orang	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	104.694.400	25	45.296.500	25	69.760.500	0	7.731.000	25	24.674.560
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.046.000	0	1.046.000	1	2.046.000	0	0	1	537.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.092.000	0	592.000	1	592.000	0	0	1	321.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	4.842.500	1	1.942.500	1	2.242.500	1	0	1	2.222.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.123.500	1	2.860.000	1	5.720.000	1	2.731.000	1	5.668.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.080.400	0	846.000	1	1.650.000	0	100.000	1	360.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	83.510.000	3	38.010.000	6	57.510.000	3	4.900.000	6	15.566.060
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	9.936.000	25	9.936.000	25	9.936.000	0	0	25	9.900.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	9.936.000	1	9.936.000	1	9.936.000	1	0	1	9.900.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	237.679.166	25	56.622.000	25	125.844.000	0	48.229.620	25	108.307.450
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.000.000	1	600.000	1	1.200.000	1	0	1	600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	34.999.166	1	9.000.000	1	18.000.000	1	4.506.180	1	7.660.570
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	200.680.000	3	47.022.000	6	106.644.000	3	43.723.440	6	100.046.880
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	111.430.000	25	43.810.000	25	74.810.000	0	13.779.757	25	42.028.257
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	80.160.000	2	26.700.000	4	46.700.000	2	13.479.757	2	28.841.257
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11	Unit	7.270.000	4	3.110.000	8	4.110.000	4	300.000	8	1.825.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	24.000.000	0	14.000.000	1	24.000.000	0	0	1	11.362.000

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	40.529.500	25	7.365.000	25	17.008.000	0	3.520.000	25	6.640.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.577.500	25	0	25	0	0	0	25	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.577.500	1	0	1	0	1	0	1	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	38.952.000	25	6.665.500	25	16.308.000	0	3.520.000	25	6.640.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	38.952.000	1	6.665.500	2	16.308.000	1	3.520.000	2	6.640.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	70.561.000	25	25.686.000	25	48.411.000	0	16.600.000	25	26.600.000

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	70.561.000	25	25.686.000	25	48.411.000	0	16.600.000	25	26.600.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26	Lembag a Kemasy arakat	11.972.000	26	11.972.000	26	11.972.000	26	11.700.000	26	11.700.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	58.589.000	1	13.714.000	2	36.439.000	1	4.900.000	2	14.900.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	45.500.000	25	10.400.000	25	14.400.000	0	0	25	5.500.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	40.000.000	25	10.400.000	25	14.400.000	0	0	25	5.500.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	3	Laporan	36.000.000	1	10.400.000	2	10.400.000	1	0	2	5.500.000

		Vertikal di Wilayah Kecamatan											
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	1	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	5.500.000	25	0	25	0	0	0	25	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	180.337.000	25	61.462.000	25	128.857.000	0	19.997.000	25	59.137.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	180.337.000	25	61.462.000	25	128.857.000	0	19.997.000	25	59.137.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	Orang	29.755.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	125.205.000	1	54.985.000	1	115.705.000	1	17.720.000	1	54.470.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25.377.000	1	6.477.000	1	12.777.000	1	2.277.000	1	4.667.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	Persen	45.085.000	25	2.727.000	25	25.331.000	0	2.727.000	25	2.727.000

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	45.085.000	25	2.727.000	25	25.331.000	0	2.727.000	25	2.727.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	13.477.000	0	0	1	13.477.000	0	0	1	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	10.400.000	0	0	0	6.400.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan	1	Dokumen	11.708.000	1	2.727.000	1	5.454.000	1	2.727.000	1	2.727.000

		Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Karang Intan Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.367.218.857,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, perubahan rincian belanja karena menganggarkan honor PPTK, PPK, dan Pejabat Pengadaan Barang selama 3 bulan;
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan karena penambahan Alat Tulis Kantor;
3. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan karena penambahan anggaran Perjalanan Dinas Biasa untuk Kecamatan dan Perjalanan Dinas Biasa untuk PKK;
4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik mengalami penurunan anggaran karena pengurangan biaya tagihan air (kelebihan menganggarkan);

5. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak mobil operasional Camat.
6. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami perubahan karena penambahan anggaran makan minum rapat PKK dan penambahan anggaran untuk kegiatan Lomba PKK;
7. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengalami penurunan anggaran karena mengurangi koefisien honorarium linmas pilkada dan menambah anggaran makan minum apel siaga pilkada serta menambah anggaran untuk cetak banner pilkada;

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelo mpo k Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebel um	Sesu dah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Karang Intan						3.068.284.649,00	3.311.449.597,00	3.367.218.857,00					3.534.803.773,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.068.284.649,00	3.311.449.597,00	3.367.218.857,00					3.534.803.773,00				
	7	01				KECAMATAN						3.068.284.649,00	3.311.449.597,00	3.367.218.857,00					3.534.803.773,00				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indek Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) KEcamatan Karang Intan				76 Nilai	76 Nilai	2.588.772.149,00	2.929.437.097,00	2.981.334.357,00						2.975.511.373,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100 persen	100 persen	7.214.800,00	7.214.800,00	7.214.800,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-	7.452.000,00	KECAMATAN KARANG INTAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					120 Orang	120 Orang	29.755.000,00	29.755.000,00	29.755.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			36.198.000,00	KECAMATAN KARANG INTAN
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				2 Dokumen	2 Dokumen	125.205.000,00	125.205.000,00	125.205.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			150.249.600,00	KECAMATAN KARANG INTAN	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.377.000,00	25.377.000,00	25.377.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			30.480.000,00	KECAMATAN KARANG INTAN	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			12.480.000,00	KECAMA TAN KARANG INTAN
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawara tan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			7.200.000,00	KECAMA TAN KARANG INTAN
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaa n Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	11.708.000,00	11.708.000,00	11.708.000,00	Kab. Banjar, Karang Intan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			7.028.400,00	KECAMA TAN KARANG INTAN
	J U M L A H													3.068.284.649,00	3.311.449.597,00	3.367.218.857,00							3.534.803.773,00	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja pada SIPD Kecamatan Karang Intan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Karang Intan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Martapura

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahandari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencanakerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2024 triwulan II dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dengan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar tanggal 03 Juni 2024 Nomor : 000.7.2.4/522/PPE/Bappedalitbang, tentang Penyusunan Perubahan Kab. Banjar Tahun 2024.
3. Surat Edaran Bupati Banjar tanggal 11 Juli 2024 Nomor : 000.7.2.4/663/PPE/Bappedalitbang, tentang Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa

penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2022. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan 7 Kelurahan yang diampunya melaksanakan 6 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp9.376.640.135,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Dan pada saat perubahan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan 7 Kelurahan yang diampunya tetap melaksanakan 6 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan total pagu dana perubahan sebesar Rp15.010.520.039,- (Lima Belas Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Jika dibandingkan dengan Pagu Murni Kecamatan Martapura TA 2024, maka Pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Martapura TA 2024 bertambah sebesar Rp5.633.879.904,- (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 yaitu:

2.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pada Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Desa dan Perangkat Desa, dan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa.

2.3 Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia.
 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

2.4 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II :

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target di triwulan II.

2.5 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Kegiatan terhambat akibat tidak pastinya jadwal kegiatan bimbingan teknis yang sifatnya situasional.
- Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum terlaksana karena adanya perubahan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Faktor - faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan.
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana beberapa sub kegiatan masih belum mencapai target, hal ini berimplikasi negatif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Martapura.

2.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MARTAPURA TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	76	Nilai	9.759.648.995	0	2.163.363.896	0	5.517.630.013	0	1.720.530.550	0	4.488.479.009
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	8.240.000	35	1.925.000	50	3.446.000	35	1.225.000	50	1.925.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	3.987.000	6	1.925.000	8	2.396.000	6	1.225.000	8	1.225.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Lap	4.253.000	5	0	10	1.050.000	5	0	10	700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	8.817.550.995	20	1.743.334.796	40	4.888.523.313	20	1.588.945.978	40	4.207.399.328
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang	8.680.221.995	84	1.709.509.796	84	4.819.593.313	71	1.555.120.978	71	4.139.749.328

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41	Dok	136.580.000	9	33.825.000	23	68.930.000	9	33.825.000	23	67.650.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Lap	749.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	4.894.500	20	1.751.000	40	2.451.000	0	0	40	1.700.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	1.443.500	1	350.000	2	700.000	1	0	2	350.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	3.451.000	0	1.401.000	0	1.751.000	0	0	0	1.350.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	22.153.000	50	20.578.000	50	21.103.000	0	0	0	525.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dok	2.153.000	0	578.000	0	1.103.000	0	0	0	525.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2	Orang	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	139.898.100	0	48.059.500	0	97.079.500	0	5.356.050	0	40.372.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.369.000	0	0	0	2.044.000	0	0	0	2.044.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.192.000	0	1.782.000	0	1.782.000	0	0	0	1.491.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.055.500	0	7.527.500	0	15.053.500	0	0	0	9.860.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	9.401.600	0	1.500.000	0	3.000.000	0	466.050	0	1.797.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	9.000.000	0	1.850.000	0	4.100.000	0	0	0	2.940.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Lap	84.200.000	0	35.400.000	0	71.100.000	0	4.890.000	0	22.240.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	30.274.000	100	30.274.000	100	30.274.000	100	30.274.000	100	30.274.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1.288.000	1	1.288.000	1	1.288.000	1	1.288.000	1	1.288.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	28.986.000	3	28.986.000	3	28.986.000	3	28.986.000	3	28.986.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	414.278.400	25	98.331.600	25	220.613.200	25	88.149.522	25	183.130.361

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	41.608.400	0	10.401.600	0	20.803.200	0	3.373.258	0	18.736.604
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	371.170.000	0	86.430.000	0	198.310.000	0	83.276.264	0	162.893.757
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	322.360.000	10	219.110.000	40	254.140.000	10	6.580.000	40	23.152.720
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	Unit	57.180.000	1	14.295.000	3	28.590.000	1	3.812.500	3	17.720.220
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	Unit	15.060.000	0	3.765.000	0	7.530.000	0	2.767.500	0	3.682.500

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	4	Unit	250.120.000	0	201.050.000	1	218.020.000	0	0	1	1.750.000
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	24.395.000	20	4.451.000	40	18.447.000	0	0	40	18.407.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	24.395.000	20	4.451.000	40	18.447.000	0	0	40	18.407.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	24.395.000	1	4.451.000	2	18.447.000	0	0	2	18.407.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	4.881.399.800	50	20.586.000	50	31.502.000	50	10.600.000	50	24.608.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	50.142.000	50	20.586.000	50	31.502.000	50	10.600.000	50	24.608.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemba ga Kema syarak atan	11.308.000	6	11.308.000	6	11.308.000	6	10.600.000	6	11.192.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Lap	38.834.000	0	9.278.000	0	20.194.000	0	0	0	13.416.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	4.831.257.800								

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Kelurahan Sungai Paring				690.852.000		136.958.950		265.361.400		102.322.370		242.935.720
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	2.541.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokma s	688.100.100	0	136.433.950	0	264.311.400	0	102.322.370	0	241.885.720
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	2.100.000	1	525.000	2	1.050.000	1	0	2	1.050.000
	Kelurahan Murung Keraton				606.817.000		152.421.786		369.331.004		87.317.081		182.338.638
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	3.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	599.939.000	0	151.571.786	0	367.631.004	0	87.317.081	0	181.738.638
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	3.400.000	0	850.000	0	1.700.000	0	0	0	600.000
	Kelurahan Jawa				665.913.000		106.121.356		264.780.712		85.453.100		210.306.950
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	2.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	661.605.000	0	105.596.356	0	263.730.712	0	85.453.100	0	209.781.950
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	2.100.000	0	525.000	0	1.050.000	0	0	0	525.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Kelurahan Keraton				915.011.000		369.179.497		563.198.994		150.537.700		294.572.150
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokma s	901.011.000	0	369.179.497	0	559.698.994		150.537.700	0	291.072.150
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	10.500.000	0	0	0	3.500.000		0	0	3.500.000
	Kelurahan Sekumpul				723.820.800		378.246.200		493.553.200		99.069.220		182.071.675
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	3.712.800	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	717.508.000	0	377.596.200	0	492.253.200	0	99.069.220	0	182.071.675
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	2.600.000	0	650.000	0	1.300.000		0	0	0
	Kelurahan Tanjung Rema Darat				622.797.000		112.462.725		410.078.450		90.477.340		199.172.990
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	3.253.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	617.380.600	0	111.921.925	0	408.996.850		90.477.340	0	198.091.390
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	2.163.200	0	540.800	0	1.081.600		0	0	1.081.600

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Kelurahan Pasayangan				608.465.000		92.170.375		331.861.750		79.365.600		187.270.848
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga Kemas yaraka tan	376.942.000	0	89.130.375	0	202.321.750	0	76.885.600	0	176.230.848
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokma s	229.283.000	0	2.480.000	0	128.420.000	0	2.480.000	0	9.920.000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Lap	2.240.000	0	560.000	0	1.120.000	0	0	0	1.120.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	53.532.000	10	14.822.000	50	22.916.000	10	14.600.000	50	18.344.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	49.360.000	20	14.822.000	40	18.744.000	20	14.600.000	50	18.344.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	41.938.000	1	14.822.000	2	18.744.000	1	14.600.000	2	18.344.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Lap	7.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	4.172.000	0	0	100	4.172.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Lap	4.172.000	0	0	1	4.172.000	0	0	1	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	121.518.000	25	16.981.000	50	87.417.000	0	0	50	34.256.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persne	121.518.000	25	16.981.000	50	87.417.000	0	0	50	34.256.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	Orang	23.703.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dok	77.019.000	1	11.708.000	2	77.019.000	0	0	2	31.658.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dok	20.796.000	0	5.273.000	0	10.398.000	0	0	0	2.598.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	Persen	16.410.000	25	5.951.000	75	12.536.000	0	0	0	0
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	16.410.000	25	5.951.000	75	12.536.000	0	0	0	0
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dok	3.300.000	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0
	Fasilitas Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	4.014.000	1	4.014.000	1	4.014.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satua n		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dok	7.748.000	0	1.937.000	0	3.874.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dok	1.348.000	0	0	1	1.348.000	0	0	0	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, Kecamatan Martapura melakukan penyesuaian/perubahan pada indikator kinerja pada sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Berubah

Ada 8 perubahan target indikator sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program, 21 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini. Nama program/kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar Rp15.010.520.039,- (Lima Belas Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran dan perubahan terget yaitu :

1. Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan pada indikator kinerja sub kegiatan.
2. Adanya perubahan peraturan tentang pembayaran tunjangan PPPK sehingga terdapat kurang anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Luas dan banyaknya kelurahan dan desa yang melingkupi Kecamatan Martapura sehingga semakin meningkatkan mobilitas dalam melakukan monitoring dan

pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu belanja perjalanan dinas dalam daerah yang telah dianggarkan tidak memenuhi kebutuhan yang ada.

4. Adanya beberapa penyesuaian dalam perencanaan dan belanja dengan kondisi *real time* saat pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	86 Indeks	86 Indeks	14.856.903.795	15.010.520.039	5.633.879.904	Perubahan Anggaran
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	85 Nilai	85 Nilai	14.856.903.795	15.010.520.039	5.633.879.904	Perubahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	76 Nilai	76 Nilai	9.759.648.995	9.813.548.995	18.016.960	Perubahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persentase	100 Persentase	8.240.000	8.240.000	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	3.987.000	3.987.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	4.253.000	4.253.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	8.817.550.995	8.817.550.995	746.505.860	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	8.680.221.995	8.680.221.995	746.505.860	Penambahan Anggaran
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	41 Dokumen	136.580.000	136.580.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	749.000	749.000	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persentas e	100 Persentase	4.894.500	4.894.500	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.443.500	1.443.500	0	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	3.451.000	3.451.000	0	Perubahan Indikator menjadi 4 Triwulan

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100 Persentas e	100 Persentase	22.153.000	12.153.000	(10.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	2.153.000	2.153.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1 Orang	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	Pengurangan Anggaran menjadi 1 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentase	139.898.100	180.280.100	40.382.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.369.000	2.369.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.680.000	1.680.000	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.192.000	3.192.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.055.500	30.437.500	382.000	Penambahan Anggaran untuk belanja ATK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.401.600	9.401.600	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	9.000.000	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	84.200.000	124.200.000	40.000.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	30.274.000	51.560.000	21.286.000	Penambahan Anggaran
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1.288.000	1.288.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	28.986.000	50.272.000	21.286.000	Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	100 Persentase	414.278.400	416.278.400	2.000.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	3.500.000	2.000.000	Penambahan Anggaran Belanja Materai

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	41.608.400	41.608.400	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	371.170.000	371.170.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	322.360.000	322.592.000	232.000	Penambahan dan Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	57.180.000	67.180.000	10.000.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	15.060.000	15.060.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	250.120.000	240.352.000	(9.768.000)	Pengurangan Anggaran yang akan dipindahkan ke Belanja Modal

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	24.395.000	24.395.000	0	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	24.395.000	24.395.000	0	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5 Laporan	24.395.000	24.395.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	50.142.000	50.142.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentas e	100 Persentase	50.142.000	50.142.000	0	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	11.308.000	11.308.000	0	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	38.834.000	38.834.000	0	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	53.532.000	53.532.000	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	49.360.000	49.360.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	41.938.000	41.938.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	7.422.000	7.422.000	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentas e	100 Persentase	4.172.000	4.172.000	0	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	4.172.000	4.172.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persentas e	100 Persentase	121.518.000	121.518.000	0	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentas e	100 Persentase	121.518.000	121.518.000	0	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia-	120 Orang	120 Orang	23.703.000	23.703.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Kesatuan Republik Indonesia							
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	77.019.000	77.019.000	0	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.796.000	20.796.000	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	16.410.000	16.410.000	0	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentas e	100 Persentase	16.410.000	16.410.000	0	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000	3.300.000	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.014.000	4.014.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.748.000	7.748.000	0	-
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.348.000	1.348.000	0	-
	KELURAHAN SUNGAI PARING								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
	KELURAHAN MURUNG KERATON								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
	KELURAHAN JAWA								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
KELURAHAN KERATON									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
KELURAHAN SEKUMPUL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	
KELURAHAN PASAYANGAN									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentas e	100 Persentase	0	0	0	

No.	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/S ub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyara katan	0	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	0	0	0	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2024, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
3. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumendokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar) ;
4. Perubahan RENJA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2024, harus menjadidasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoringdan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan

sinergisitas RKPD tahun 2024, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2024 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2024.

2. Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional bagi bagian-bagian di lingkup Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.
3. Renja Perubahan 2024 yang disusun ini juga diharapkan dapat ditutup dengan capaian kinerja yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Kecamatan Aranio

Abstract

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Aranio tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Aranio Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Aranio tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Aranio Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Aranio dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

- 2) Peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan
- 3) Adanya kegiatan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar
- 4) Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04,

- Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
 14. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Aranio tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aranio agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Aranio pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.744.898.627,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Adapun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II (dua) adalah sebesar Realisasi Fisik 59,73 dari target 63,071 dan Realisasi Keuangan Rp. (1.232.046.305) atau sebesar 44,88 dari target 1.620.453.238 atau sebesar 59,04 .

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Aranio hingga triwulan II secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 hingga Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD
(Sesuai Tabel T-C.29 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	83	NA	74	74.18	100.24	NA	NA	NA	74.18	89.37
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	NA	100	100	100	68.18	41	60	31.62	31.62
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	NA	12	12	100	7	6	85.71	18	37.50
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	NA	22	22	100	8	3	37.50	25	28.41
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	NA	100	100	100	79.31	76	96	50.72	50.72
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	NA	14	14	100	16	15	93.75	15	93.75
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	NA	12	12	100	6	6	100	18	37.50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	1	1	1	100	1	1	100	2	40
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	NA	100	100	100	25	50	200	60	60
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	NA	1	1	100	1	2	200	3	60
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	NA	100	100	100	66.67	0	0	30	30
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	NA	1	1	100	0	0	0]	1	20
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	NA	2	2	100	2	0	0	2	40
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	NA	100	100	100	55.26	26	48	25	25
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	NA	3	3	100	2	0	0	3	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	NA	3	3	100	3	0	0	3	60
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	NA	2	2	100	8	3	38	5	12.50
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	NA	3	3	100	2	1	50	4	80
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	NA	1	1	100	0	0	0	1	20
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	NA	12	12	100	6	6	100	18	30
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	NA	100	100	100	100	67	67	61	61
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	NA	20	20	100	3	2	67	22	61.11
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	NA	100	100	100	51.35	51	100	35	35
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	NA	12	12	100	6	6	100	18	37.50
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	NA	12	12	100	6	6	100	18	30

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	NA	13	13	100	7	7	100	20	38.46
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	NA	100	100	100	60	48	80	34	34
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	NA	11	11	100	6	8	133	19	39.58
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48	NA	12	12	100	6	1	17	13	27.08
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	NA	3	3	100	3	3	100	6	40
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	NA	100	100	100	63	69	114	31.48	31.48
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	NA	100	100	100	50	50	100	38	38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	NA	12	12	100	6	6	100	18	37.50
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	NA	100	100	100	50	75	150	50	50
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	NA	2	2	100	2	3	150	5	50
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	NA	100	100	100	88	82	93	52	52
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	NA	100	100	100	88	82	93	52	52
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48	NA	12	12	100	12	12	100	24	50
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	NA	1	1	100	3	2	67	3	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	NA	100	100	100	16.67	16.67	50	29.17	29.17
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	NA	100	100	100	0	0	0	25	25
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	NA	1	1	100	0	0	0	1	25
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	NA	100	100	100	33	33	100	33	33
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	NA	1	1	100	1	1	100	2	33.33
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	NA	100	100	100	6.73	5.77	85.71	27.73	27.73

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	NA	100	100	100	6.73	5.77	85.71	27.73	27.73
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	NA	50	50	100	0	0	0	50	25
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	NA	3	3	100	1	1	100	4	50
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	NA	12	12	100	6	5	83	17	35.42
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	NA	100	80	80	67	33	50	29	29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi ()	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024 triwulan II	Tingkat Realisasi ()	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ()
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	NA	100	80	80	67	33	50	29	29
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	NA	1	1	100	1	1	100	2	50
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	NA	1	1	100	1	0	0	1	25.00
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	NA	1	0	0	1	0	0	0	0.00
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	NA	1	1	100	1	1	100	2	50.00
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	NA	1	1	100	0	0	0	1	25.00
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	NA	1	1	100	0	0	0	1	25.00

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Aranio. Tahun 2023 dan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Kec Aranio Kab. Banjar 2024

Sejatinya bab II ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, sesuai target, telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II yaitu :

2.2. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 88 persen adapun realisasinya 82 persen sehingga capaiannya adalah 93 persen.
- 2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 16.67 persen adapun realisasinya 16.67 persen sehingga capaiannya adalah 50 persen.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6.73 persen adapun realisasinya 5.77 persen sehingga capaiannya adalah 85.71 persen.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 67 persen adapun realisasinya 33 persen sehingga capaiannya adalah 50 persen.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 79.31 persen adapun realisasinya 76 persen sehingga capaiannya adalah 96 persen.

7) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 66.67 persen adapun realisasinya 0 persen sehingga capaiannya adalah 0 persen.

8) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi umum Perangkat Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 55.26 persen adapun realisasinya 26 persen sehingga capaiannya adalah 48 persen.

9) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pengadaan BDM penunjang urusan daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 100 persen adapun realisasinya 67 persen sehingga capaiannya adalah 67 persen.

10) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Perangkat Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 60 persen adapun realisasinya 48 persen sehingga capaiannya adalah 80 persen.

11) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 88 persen adapun realisasinya 82 persen sehingga capaiannya adalah 93 persen.

12) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase

pemerintahan desa dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 67 persen adapun realisasinya 33 persen sehingga capaiannya adalah 50 persen.

- 14) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 7 dokumen adapun realisasinya 6 dokumen sehingga capaiannya adalah 85.71 persen.

- 15) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 8 laporan adapun realisasinya 3 laporan sehingga capaiannya adalah 37.50 persen.

- 16) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 16 orang adapun realisasinya 15 orang sehingga capaiannya adalah 93.75 persen.

- 17) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 orang adapun realisasinya 0 sehingga capaiannya adalah 0 persen.

- 18) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 paket adapun realisasinya 0 paket sehingga capaiannya adalah 0 persen.

- 19) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 paket adapun realisasinya 1 paket sehingga capaiannya adalah 50 persen.

22) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 3 unit adapun realisasinya 2 unit sehingga capaiannya adalah 67 persen.

23) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 unit adapun realisasinya 1 unit sehingga capaiannya adalah 17 persen.

24) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 3 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 67 persen.

25) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 dokumen adapun realisasinya 5 dokumen sehingga capaiannya adalah 83 persen.

26) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 0 sehingga capaiannya

2.3. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 51.35 persen adapun realisasinya 51.35 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 50 persen adapun realisasinya 50 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 3) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 33 persen adapun realisasinya 33 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 4) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 dokumen adapun realisasinya 6 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

8) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

9) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 7 laporan adapun realisasinya 7 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

10) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 3 unit adapun realisasinya 3 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.

11) Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 laporan adapun realisasinya 6 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

12) Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 13) Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 14) Sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 15) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 16) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

2.4. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Fasilitasi

Pajak dan Perizinannya dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 6 unit adapun realisasinya 8 unit sehingga capaiannya adalah 133 persen.

3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target triwulan II pada tahun 2024 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 3 laporan sehingga capaiannya adalah 150 persen.

2.5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024 yaitu :

1. Hasil EKK masih dalam proses penilaian, dikarenakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada semester ke-2 (dua) tahun berjalan maka nilai capaian EKK belum bisa disajikan pada Laporan Kinerja Triwulan II ini.
2. Sering terjadi gangguan pada jaringan internet di kantor kecamatan
3. Server SIPD kemendagri sering error yang menyebabkan terjadi keterlambatan pelaksanaan proses penatausahaan keuangan
4. Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.
5. Kurang mendukungnya sarana seperti tidak ada komputer, laptop yang sudah tidak layak pakai.
6. Adanya perubahan jadwal rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD oleh bidang asset
7. Belum ada usulan permintaan bimtek
8. Belum dilaksanakannya kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dikarenakan jadwal kegiatan dilaksanakan pada awal triwulan ketiga
9. Tidak terjadwalkan pengadaan barang yang menyebabkan banyak

14. Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional sangat terbatas yang menyebabkan jadwal pemeliharaan harus ditunda
15. Keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat.
16. Menunggu informasi pelaksanaan penyelenggara/mencari hari agar jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain
17. Tidak semua aparat desa disiplin dalam kesepakatan pengumpulan laporan pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal penyelesaian laporan.
18. Kurangnya akses terhadap layanan keamanan dan perlindungan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh masyarakat kecamatan.
19. Minimnya SDM yang dimiliki Kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan layanan keamanan dan perlindungan masyarakat.
20. Minimnya kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat menghambat pelaksanaan yang efektif

2.6. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Adapun faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah yaitu :

1. Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
2. Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
4. Adanya koordinasi dengan pemerintahan desa terkait pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
5. Adanya kerjasama yang baik antara aparat keamanan, pemerintah

7. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif.

2.7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Aranio.

2.8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target.
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Aranio s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
									I		II				I		II					
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7					Urusan : Unsur Kewilayahan			2,744,898, 627		602,957,3 23												
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan			2,744,898, 627		602,957,3 23		1,389,791,7 88		1,992,749, 111		72,111,4 16		1,184,343, 909		1,256,455, 325		
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	76	2,529,394, 327	NA	563,211,0 23	NA	1,364,793,7 88	NA	1,928,004, 811	NA	58,764,3 16	NA	1,149,030, 409	NA	1,207,794, 725	NA	47.75
7	1	1	2 · 0 1		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD	100 Persen	4,075,000	36.36	810,000	31.82	2,300,000	68.18	3,110,000	18.18	700,000	22.73	-	40.91	700,000	40.91	17.18
7	1	1	2 · 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokume n	1,965,000	4	700,000	3	1,200,000	7	1,900,000	3	700,000	3	-	6	700,000	60	35.62
7	1	1	2 · 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2,110,000	4	110,000	4	1,100,000	8	1,210,000	1	-	2	-	3	-	25	0.00
7	1	1	2 · 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,112,302,9 20	65.52	455,516,26 8	13.79	1,231,737,3 38	79.31	1,687,253,6 06	58.62	-	65.52	1,017,229,7 89	75.86	1,017,229,7 89	75.86	48.16
7	1	1	2 · 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	2,071,868,9 20	16	444,512,26 8	0	1,211,733,3 38	16	1,656,245,6 06	14		15	1,000,879,7 89	15	1,000,879,7 89	93.75	48.31
7	1	1	2 · 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif	12 Dokume n	39,624,000	3	10,194,000	3	20,004,000	6	30,198,000	3		3	16,350,000	6	16,350,000	50	41.26

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian (I)	
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						kasi Keuangan SKPD	ikasi Keuangan SKPD																
7	1	1	2 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	810,000	0	810,000	1	-	1	#VALUE!	0	-	1		1	-	100	0.00	
7	1	1	2 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	600,000	0.00	-	25	298,000	25	298,000	25	-	25	-	50	-	50	0.00	
7	1	1	2 0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600,000	0	-	1	298,000	1	298,000	1	-	1	-	2	-	50	0.00	
7	1	1	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	20,700,000	0.00	20,000,000	66.67	-	66.67	20,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
7	1	1	2 0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokume n	700,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	
7	1	1	2 0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	20,000,000	0	20,000,000	2	-	2	20,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()		
									I		II				I		II						
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	1	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	102,851,500	23.68	26,906,650	31.58	60,728,450	55.26	87,635,100	10.53	32,563,896	15.79	1,310,000	26.32	33,873,896	26	32.93	
7	1	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,976,000	0	1,319,150	2	1,319,150	2	2,638,300	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00
7	1	1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,686,000	1	500,000	2	1,000,000	3	1,500,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00
7	1	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,866,000	4	1,310,000	4	2,910,000	8	4,220,000	1	-	2	1,310,000	3	1,310,000	25	26.92
7	1	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1,646,000	1	300,000	1	821,800	2	1,121,800	0	646,000	1	-	1	646,000	33.33	39.25
7	1	1	2	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,500,000	0	500,000	0	1,500,000	0	2,000,000	0	500,000	0	-	0	500,000	0	20.00
7	1	1	2	06	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90,177,500	3	22,977,500	3	53,177,500	6	76,155,000	3	31,417,896	3		6	31,417,896	50	34.84
7	1	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	23,683,000	100	23,683,000	0	-	100	23,683,000	0.00	15,000,000	66.67	19,520,000	66.67	34,520,000	66.67	145.76	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Pemerintah Daerah																	
7	1	1	2 0 7	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	23,683,000	3	23,683,000	0	-	3	23,683,000	0	15,000,000	2	19,520,000	2	34,520,000	66.67	145.76
7	1	1	2 0 8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	153,321,907	24.32	35,755,475	27.03		51.35	35,755,475	24.32	10,500,420	27.03	62,679,320	51.35	73,179,740	51.35	47.73
7	1	1	2 0 8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	3	500,000	3	100,000	6	600,000	3	100,000	3	100,000	6	200,000	50	8.00
7	1	1	2 0 8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,341,907	3	3,335,475	3	6,670,950	6	10,006,425	3	1,600,420	3	2,479,320	6	4,079,740	50	30.58
7	1	1	2 0 8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	137,480,000	3	31,920,000	4	73,640,000	7	105,560,000	3	8,800,000	4	60,100,000	7	68,900,000	53.85	50.12
7	1	1	2 0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	111,860,000	24	539,630	36	69,730,000	60	70,269,630	8	-	40	48,291,300	48	48,291,300	48	43.17
7	1	1	2 0 9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	12 Unit	88,820,000	3	539,630	3	49,530,000	6	50,069,630	2		6	32,976,300	8	32,976,300	66.67	37.13

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
									I		II				I		II					
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																
7	1	1	2	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	8,240,000	3	-	3	5,400,000	6	5,400,000	0		1	515,000	1	515,000	10	6.25
7	1	1	2	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	14,800,000	0	-	3	14,800,000	3	14,800,000	0	-	3	14,800,000	3	14,800,000	100	100.00
7	1	2			Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	18,204,000	25	11,395,000	25	13,604,000	50	24,999,000	25	46,500	37.50	7,675,500	62.50	7,722,000	125	42.42
7	1	2	2	02	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	666,000	25	366,000	25	366,000	50	732,000	25	46,500	25	46,500	50	93,000	50	13.96
7	1	2	2	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	666,000	3	366,000	3	366,000	6	732,000	3	46,500	3	46,500	6	93,000	50	13.96
7	1	2	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100 Persen	17,538,000	25	11,029,000	25	13,238,000	50	24,267,000	25	-	50	7,629,000	75	7,629,000	75	43.50

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Dilimpahkan kepada Camat	yang Dilimpahkan kepada Camat																
7	1	2	0	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	17,538,000	1	11,029,000	1	13,238,000	2	24,267,000	1	-	2	7,629,000	3	7,629,000	75	43.50
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	50,286,300	100	18,016,300	0.00	-	100	18,016,300	100	7,665,600	0.00	10,865,000	100	18,530,600	100	36.85
7	1	3	2	0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	50,286,300	100	18,016,300	0.00	-	1	18,016,300	100	7,665,600	0.00	10,865,000	100	18,530,600	100	36.85
7	1	3	2	0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasya rakatan	8,513,100	12	8,513,100	0	-	12	8,513,100	12	5,265,600	0	8,465,000	12	13,730,600	100	161.29
7	1	3	2	0	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	41,773,200	1	9,503,200	2		3	9,503,200	1	2,400,000	1	2,400,000	2	4,800,000	40	11.49
7	1	4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggara an ketentraman	100 Persen	26,934,000	16.67	10,335,000	0.00	-	16.67	10,335,000	16.67	5,635,000	0.00	8,365,000	16.67	14,000,000	16.67	51.98

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian (I)	
									I		II				I		II					
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan																
7	1	4	2 · 0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	2,624,000	0.00	-	0.00	-	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	0.00
7	1	4	2 · 0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2,624,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00
7	1	4	2 · 0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	24,310,000	33.33	10,335,000	0.00	-	33.33	10,335,000	33.33	5,635,000	0.00	8,365,000	33.33	14,000,000	33.33	57.59
7	1	4	2 · 0 2	1	Koordinasi/Sine rgi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan	3 Laporan	24,310,000	1	10,335,000	0	-	1	10,335,000	1	5,635,000	0	8,365,000	1	14,000,000	33.33	57.59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	1	5				Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	101,404,00 0	2.88	6,397,000	3.85	68,369,000	6.73	74,766,000	1.92	5,094,35 0	3.85	5,971,350	5.77	11,065,700	5.77	10.91
7	1	5	2 · 0 1			Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	101,404,00 0	2.88	6,397,000	3.85	68,369,000	6.73	74,766,000	1.92	5,094,35 0	3.85	5,971,350	5.77	11,065,700	5.77	10.91
7	1	5	2 · 0 1	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang	18,575,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00		
7	1	5	2 · 7			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan	2 Dokume n	55,852,000	0	-	1		1	55,852,000	0	1,344,350	1	1,344,350	1	2,688,700	50	4.81

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
									I		II				I		II					
									Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				01	merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	26,977,000	3	6,397,000	3		6	18,914,000	2	3,750,000	3	4,627,000	5	8,377,000	41.67	31.05
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/ Kelurahan	100 Persen	18,676,000	0	-	67.67		67.67	11,394,000	0	-	33	8,408,000	33	8,408,000	33.33	45.02
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	18,676,000	0.00	-	66.67		66.67	11,394,000	0.00	-	33.33	8,408,000	33.33	8,408,000	33.33	45.02
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,986,000	0	-	1		1	2,986,000	0	-	1	2,986,000	1	2,986,000	100	100.00
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2,986,000	0	-	1		1	2,986,000	0	-	0	2,986,000	0	2,986,000	0.00	100
7	1	6	201	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka	1 Dokumen	2,986,000	0	-	1		1	2,986,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2024	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan				Akumulasi RK dan Anggaran		Capaian ()	
										I		II				I		II					
										Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK	Rp	RK
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
7	1	6	2 0 1	6		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokume n	2,436,000	0	-	1		1	2,436,000	0	-	1	2,436,000	1	2,436,000	100	100
7	1	6	2 0 1	6		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokume n	2,986,000	0	-	0		0	-	0	-	0		0	-	0.00	0.00
7	1	6	2 0 1	5		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokume n	4,296,000	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00

Sumber Data : simondalev

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Kecamatan Aranio mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Aranio untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan akhir periode.

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini tidak ada program, kegiatan dan subkegiatan yang berubah semuanya tetap sama, ada 6 Program 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Kecamatan Aranio Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 13. Fasilitas Kunjungan Tamu
 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 22. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 23. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 11) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 24. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 26. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 13) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 27. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 14) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

28. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
29. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
30. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 15) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 31. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 32. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 33. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 34. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 35. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 36. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.847.716.747 (Dua Milyar Delapan ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enambelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Aranio Tahun Anggaran 2024 ini antara lain :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
3. Peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.
4. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar.

Dari alasan dilakukan perubahan diatas maka ada beberapa subkegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

- 1) Adanya Perubahan Pagu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah subkegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2) Adanya Perubahan Pagu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Adanya Perubahan Pagu kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
- 4) Adanya Perubahan Pagu kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5) Adanya Perubahan Pagu pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Adanya Perubahan Pagu berupa Pengurangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan
- 7) Adanya Perubahan Pagu Berupa Penambahan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk keterangan lebih jelas terkait uraian diatas dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Aranio Tahun 2024

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7					Urusan : Unsur Kewilayahan				2,744,898,627	2,847,716,747	102,818,120	
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan				2,744,898,627	2,847,716,747	102,818,120	
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	76	76	2,529,394,327	2,627,712,447	98,318,120	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen	4,075,000	4,075,000	0	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	1,965,000	1,965,000	0	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2,110,000	2,110,000	0	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,112,302,920	2,112,302,920	0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	2,071,868,920	2,071,868,920	0	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	39,624,000	39,624,000	0	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	810,000	810,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	100 Persen	600,000	600,000	0	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	600,000	600,000	0	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	20,700,000	700,000	0	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000	700,000	0	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	20,000,000	-20,000,000	0	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	102,851,500	158,530,500	55,679,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,976,000	1,976,000	0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	1,686,000	19,665,000	17,979,000	Adanya Penambahan kebutuhan Peralatan dan kelengkapan untuk aula Kecamatan dan sarana kerja serta mengurangi kerusakan pada peralatan computer dengan dilengkapi UPS
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4,866,000	4,866,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1,646,000	1,646,000	0	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90,177,500	127,877,500	37,700,000	Penambahan Pagu Anggaran Peralanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	100 Persen	23,683,000	64,129,000	40,446,000	Penambahan Kelengkapan kerja berupa personal computer, printer dan penambahan alat pendingin pada ruang kerja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8 Unit	23,683,000	64,129,000	40,446,000	Penambahan Kelengkapan kerja berupa personal computer, printer dan penambahan alat pendingin pada ruang kerja
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	153,321,907	153,321,907	0	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	2,500,000	0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,341,907	13,341,907	0	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	137,480,000	137,480,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	111,860,000	134,053,120	22,193,120	Penambahan pagu Biaya Pemeliharaan
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	88,820,000	105,413,120	16.593,120	Penambahan Pagu Biaya Pemeliharaan
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	20 Unit	8,240,000	13,840,000	5,600,000	Penambahan Pagu Biaya Pemeliharaan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	14,800,000	14,800,000	0	
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	18,204,000	18,204,000	0	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	666,000	666,000	0	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	666,000	666,000	0	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	17,538,000	17,538,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	17,538,000	17,538,000	0	
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	50,286,300	50,286,300	0	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	50,286,300	50,286,300	0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8,513,100	8,513,100	0	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	41,773,200	41,773,200	0	
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	26,934,000	26,934,000	0	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	2,624,000	2,624,000	0	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	2,624,000	2,624,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	24,310,000	24,310,000	0	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan	3 Laporan	3 Laporan	24,310,000	24,310,000	0	
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	101,404,000	101,404,000	0	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	101,404,000	101,404,000	0	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	90 Orang	90 Orang	18,575,000	18,575,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
					Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia						
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	55,852,000	55,852,000	0	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26,977,000	26,977,000	0	
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/ Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18,676,000	18,676,000	0	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	18,676,000	18,676,000	0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2,986,000	2,986,000	0	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2,986,000	2,986,000	0	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2,986,000	2,986,000	0	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2,436,000	2,436,000	0	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan n (+/-)	
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2,986,000	2,986,000	0	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,296,000	4,296,000	0	

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”.

Perubahan Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aranio. Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Aranio. secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN ARANIO KAB. BANJAR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Aranio						2.459.36 2.280,00	2.744.89 8.627,00	2.847.71 6.747,00						2.487.10 7.977,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.459.36 2.280,00	2.744.89 8.627,00	2.847.71 6.747,00						2.487.10 7.977,00			
	7	0 1				KECAMATAN						2.459.36 2.280,00	2.744.89 8.627,00	2.847.71 6.747,00						2.487.10 7.977,00			
1	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio				76,00 Nilai	76,00 Nilai	2.198.85 7.980,00	2.529.39 4.327,00	2.627.71 2.447,00						2.209.83 0.577,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100 persen	100 persen	4.075.00 0,00	4.075.00 0,00	4.075.00 0,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan	-	4.075.00 0,00	KECAMATAN ARANIO	

																	penyede rhanaan birokrasi						
	7	0 1	0 1	2. 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah				15 Dokume n	15 Dokume n	1.965.00 0,00	1.965.00 0,00	1.965.00 0,00	Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			1.965.00 0,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0 1	0 1	2. 0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	2.110.00 0,00	2.110.00 0,00	2.110.00 0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			2.110.00 0,00	KECA MATA N ARANI O

	7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.781.766.573,00	2.112.302.920,00	2.112.302.920,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		1.781.956.573,00	KECA MATAN ARANIO
	7	0	0	2.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.741.332.573,00	2.071.868.920,00	2.071.868.920,00	Kab. Banjar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa Kab. Banjar, Aranio, Semu a Kel/Desa	Dan a Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.741.332.573,00	KECA MATAN ARANIO
	7	0	0	2.	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V				40 Dokumen	40 Dokumen	39.624.000,00	39.624.000,00	39.624.000,00	Kab. Banjar, Aranio,	Dan a Transfer	-	4. Meningkatkan tata kelola			39.624.000,00	KECA MATAN ARANIO

							erifikasi Keuangan SKPD								Semu a Kel/D esa	Um um- Dan a Alok asi Um um	kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi						
	7	0 1	0 1	2. 0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	810.000, 00	810.000, 00	810.000, 00	Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			1.000.00 0,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0 1	0 1	2. 0 3		Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	-			100 Persen	100 Persen	600.000, 00	600.000, 00	600.000, 00			-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi	-		600.000, 00	KECA MATA N ARANI O
	7	0 1	0 1	2. 0 3	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Banjar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banjar, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um-Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			600.000,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0	0	2.		Administr asi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n yang terpenuhi	-			100 Persen	100 Persen	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi	-		20.700.000,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	05
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokume n	1 Dokume n	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Banjar, Semu a Keca mata n, Semu	Dan a Tra nsfe r Um um-Dan a	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma			700.000,00	KECA MATA N ARANI O

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Konsultasi SKPD									n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Alok asi Um um		melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi						
	7	01	01	2.07		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	23.683.000,00	23.683.000,00	23.683.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi	-			24.000.000,00	KECA MATA N ARANI O	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	23.683.000,00	23.683.000,00	64.129.000,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani	Dan a Tra nsfe r Um um-Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi				24.000.000,00	KECA MATA N ARANI O		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	13.341.9 07,00	13.341.9 07,00	13.341.9 07,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			13.342.0 00,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0 1	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13 Laporan	13 Laporan	137.480. 000,00	137.480. 000,00	137.480. 000,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			137.480. 000,00	KECA MATA N ARANI O

	7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	111.860. 000,00	111.860. 000,00	111.860. 000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		131.800. 000,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0	0	2.	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	88.820.0 00,00	88.820.0 00,00	105.413. 120,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Arani O, Semua Kel/Desa	Dan a Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			100.000. 000,00	KECA MATA N ARANI O	
	7	0	0	2.	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				10 Unit	20 Unit	8.240.00 0,00	8.240.00 0,00	13.840.0 00,00	Kab. Banjar, Semua	Dan a Transfer	-	4. Meningkatkan tata kelola			17.000.0 00,00	KECA MATA N ARANI O	

							yang Dipelihara									Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Um um- Dan a Alok asi Um um		kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi					
	7	0 1	0 1	2. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				3 Unit	3 Unit	14.800.0 00,00	14.800.0 00,00	14.800.0 00,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			14.800.0 00,00	KECA MATA N ARANI O		

2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	18.204.000,00	18.204.000,00	18.204.000,00							20.666.000,00	
	7	0	0	2.002		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			38 Jenis/Laporan	38 Jenis/Laporan	666.000,00	666.000,00	666.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		666.000,00	KECAMATAN ARANI O
	7	0	0	2.002	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	666.000,00	666.000,00	666.000,00	Kab. Banjara Arani o, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dan Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			666.000,00	KECAMATAN ARANI O

	7	0	0	2.		Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-			4 Laporan	4 Laporan	17.538.0 00,00	17.538.0 00,00	17.538.0 00,00			-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi	-		20.000.0 00,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0	0	2.	00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	17.538.0 00,00	17.538.0 00,00	17.538.0 00,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			20.000.0 00,00	KECA MATA N ARANI O
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat				100 Persen	100 Persen	50.286.3 00,00	50.286.3 00,00	50.286.3 00,00							60.773.2 00,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				90 Orang	90 Orang	18.575.000,00	18.575.000,00	18.575.000,00	Kab. Banjara, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa Kab. Banjara, Arani o, Semu a Kel/Desa	Dan a Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			18.250.000,00	KECA MATAN ARANIO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan				2 Dokumen	2 Dokumen	55.852.000,00	55.852.000,00	55.852.000,00	Kab. Banjara, Semu a Kecamatan,	Dan a Transfer Umum-Dan	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui			55.852.000,00	KECA MATAN ARANIO

[illegible]

[illegible]

							Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa									n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Alok asi Um um	melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi					
	7	0 1	0 6	2. 0 1	00 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokume n	1 Dokume n	2.986.00 0,00	2.986.00 0,00	2.986.00 0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um-Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningk atkan tata kelola kepemer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			2.986.00 0,00	KECA MATA N ARANI O
	7	0 1	0 6	2. 0 1	00 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Arani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.436.000,00	KECAMATAN ARANIO
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Arani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.986.000,00	KECAMATAN ARANIO

	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																				
		1	6	0	15		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokume n	1 Dokume n	4.296.00 0,00	4.296.00 0,00	4.296.00 0,00	Kab. Banja r, Arani o, Semu a Kel/D esa	Dan a Tra nsfe r Um um- Dan a Alok asi Um um	-	4. Meningkatkan tata kelola kepermer intahan melalui reforma si dan penyede rhanaan birokrasi			4.296.00 0,00	KECA MATAN ARANI O			
						J U M L A H										2.459.362.280 ,00	2.744.898.627 ,00	2.847.716.747 ,00							2.487.107.977 ,00	

Kecamatan Sungai Tabuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Tabuk dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melaksanakan 7 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.989.380.161,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Sungai Tabuk melaksanakan 7 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 6.057.917.961,- (Enam Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Enam puluh Satu Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Kistriik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas

Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan 86 sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu arahan Camat
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK dan persetujuan Sekcam

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi/ tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sungai Tabuk

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan
- d. Adanya upaya yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, setiap ASN harus memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI TABUK TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5.989.380.161		1.505.059.430		2.559.165.340		595.479.311		1.770.432.766
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indek	3.652.138.971	0	1.039.021.891	0	2.171.068.550	0	512.298.283	0	1.696.036.738
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	8.660.000	25	2.812.000	50	5.994.000	25	3.392.000	50	3.392.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	3.660.000	13	158000	13	2.860.000	7	738.000	7	738.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	5.000.000	21	2654000	21	3.134.000	5	2.654.000	6	2.654.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.796.186.741	25	676.120.329	50	1.544.085.036	25	360.365.244	50	1.322.486.202
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	273	Orang/Bulan	2.756.746.741	273	665.660.329	273	1.523.965.036	63	350.705.244	126	1.303.166.202
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	38.640.000	4	9.660.000	4	19.320.000	1	9.660.000	1	19.320.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	800.000	1	800.000	1	800.000	0	0	0	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerahyang Tersusun	100	Persen	12.350.000	25	3.350.000	50	350.000	25	2.000.000	50	4.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	350.000	1	350.000	1	350.000	0	0	0	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	12.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	0	2.000.000	0	4.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	31.500.000	25	500.000	50	30.500.000	25	0	50	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.500.000	1	500.000	1	500.000	0	0	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	30.000.000	3	0	3	30.000.000	0	0	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	160.793.712	25	43.442.300	50	84.900.500	25	35.241.964	50	69.414.060
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.789.000	4	757.800	4	1.894.500	1	374.000	1	741.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	19.495.212	4	15.314.500	4	17.634.500	3	13.962.500	3	15.839.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	18.909.500	4	4.650.000	4	9.571.500	2	4.650.000	2	7.815.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	3.600.000	1	720.000	1	1.800.000	-	720.000	0	1.440.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	5.000.000	1	1.000.000	1	2.500.000	-	1.000.000	0	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	110.000.000	12	21.000.000	12	51.500.000	3	14.535.464	6	42.078.560
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	334.872.400	25	213.065.400	50	334.872.400	25	39.420.000	50	154.573.400
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	Unit	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	287	Unit	322.872.400	287	201.065.400	287	322.872.400	3	27.420.000	37	142.573.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	240.019.008	25	69.154.752	50	126.309.504	25	50.981.965	50	102.514.506

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	3.000.000	4	900.000	4	1.800.000	1	900.000	1	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	47.179.008	12	11.794.752	12	23.589.504	3	6.721.965	6	12.504.506
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	189.840.000	12	56.460.000	12	100.920.000	3	43.360.000	6	88.210.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	67.757.110	25	30.577.110	50	44.057.110	25	20.897.110	50	39.656.570
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	45.780.000	4	11.850.000	4	23.700.000	1	10.900.000	2	22.750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	18	Unit	11.980.000	18	8.730.000	18	10.360.000	2	0	17	6.910.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	9.997.110	1	9.997.110	1	9.997.110	0	9.997.110	1	9.996.570

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan YangTerlaksana	100	Persen	30.500.000	25	1.050.000	50	-	25	0	50	5.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	23.000.000	25	1.050.000	50	-	25	0	50	5.500.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	23.000.000	5	1.050.000	5	-	0	0	0	5.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	7.500.000,00	25	0	50	0	25	0	50	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	7.500.000,00	1	0	1	0	0	0	0	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	65.405.000	100	27.498.000	50	50.105.000	25	18.000.000	50	18.000.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	65.405.000	25	27.498.000	50	50.105.000	25	18.000.000	50	18.000.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	Kelembagaan Kemasyarakatan	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	50.405.000	3	12.498.000	3	35.105.000	0	3.000.000	0	3.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	25.431.000	25	20.681.000	50	25.431.000	25	7.163.000	50	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	22.681.000	25	20.681.000	50	22.681.000	25	7.163.000	50	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	20.681.000	1	20.681.000	1	20.681.000	0	7.163.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2.000.000	1	0	1	2.000.000	0	0	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	2.750.000	25	0	50	2.750.000	25	0	50	-
	Koordinasi/SinergiDengan PerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Funsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dllaksanakan	1	Laporan	2.750.000	1	0	1	2.750.000	1	0	0	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	1.358.595.000	25	77.910.000	50	238.700.000	25	7.122.000	50	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	1.358.595.000	25	77.910.000	50	238.700.000	25	7.122.000	50	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	49.995.000	200	0	200	0	0	0	0	-
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	1.275.000.000	3	69.510.000	3	221.900.000	1	1.922.000	0	54.137.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	33.600.000	1	8.400.000	1	16.800.000	0	5.200.000	0	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	23.755.790	25	23.755.790	50	23.755.790	25	-	50	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	23.755.790	25	23.755.790	50	23.755.790	25	-	50	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0	0	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3.000.000	1	14.755.790	1	14.755.790	0	0	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	14.755.790	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0	0	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	Persen	833.554.400	25	315.142.749	50	50.105.000	25	50.896.028	50	50.896.028
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	Tahun	833.554.400	25	315.142.749	50	50.105.000	25	50.896.028	50	50.896.028
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas / Ormas	833.554.400	1	315.142.749	1	50.105.000	0	50.896.028	0	50.896.028

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/ kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sungai Tabuk. Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. 6.057.917.961,- (Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Penambahan anggaran Belanja Makan dan Minum Rapat/ Desk Penyusunan Dokumen Perencanaan karena tidak ada anggaran rapat di Sub Bagian Perencanaan
2. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena tidak mencukupi agar bisa melaksanakan koordinasi terkait aturan terbaru maupun permasalahan yang harus dikonsultasikan ke Kementerian maupun daerah lain dan melaksanakan koordinasi serta mendampingi kegiatan TP PKK Kabupaten (Sesuai dengan Telaahan Staf Ketua Forum Camat)

3. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena anggaran tidak mencukupi (hanya sampai bulan Oktober) mengingat mobilitas Camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayah kerja
4. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan anggaran berkurang karena Anggaran Tidak terserap pada Kegiatan Pra Rembuk Stunting dan kegiatan Pembentukan Tim Rembuk stunting
5. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penambahan anggaran pada honor Petugas Pengamanan Pilkada, Petugas Lapangan, dan Petugas Humas /peliput Acara/ Dokumentasi karena belum teranggarkan untuk Pilkada (Sesuai dengan Telaahan Staf Ketua Forum Camat)
6. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bertambah pagu anggaran untuk daya listrik, yang digunakan sekarang (2200w) masih tidak bisa mengcover keperluan listrik kantor utama, apalagi kalo ada beban pemakaian listrik lagi untuk aula.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0 1				KECAMATAN														5.989.380.161	6.057.918.282			
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3.652.138.971	3.694.638.971			
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terselengg aranya urusan penyusuna n program perencana an, keuangan, umum dan kepegawai an	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	76 Nilai	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	76 Nilai	76 Nilai					3.652.138.971	3.694.638.971			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	76 Nilai	3.694.638.971	
7	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														8.660.000	11.160.000			
7	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			8.660.000	11.160.000			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	11.160.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		
										Program		Keluaran Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolak Ukur	Target
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana nya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					13 Dokumen	13 Dokumen	3.660.000	4.910.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4.910.000
7	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					21 Laporan	21 Laporan	5.000.000	6.250.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	6.250.000
7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaa n Penatausa haan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			2.796.186.741	2.796.186.741			Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	2.796.186.741

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
											Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
											Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	273 Orang/bu lan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					273 Orang/bu lan	273 Orang/bu lan	2.756.746.741	2.756.746.741	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	273 Orang/bu lan	2.756.746.741
7	0	0	2.	00	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Dokumen	4 Dokumen	38.640.000	38.640.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	38.640.000
7	0	0	2.	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediany a Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	800.000	800.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	800.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaa n pengelolaa n Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			12.350.000	12.350.000			Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	12.350.000
7	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksana nya Rekonsilias i dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	350.000	350.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	350.000
7	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksana nya Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administra si kepegawai an daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan			100 Persen	100 Persen			31.500.000	31.500.000			Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100 Persen	31.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target		
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
									Kelura han														
7	0 1	0 1	2. 05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksana nya Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.500.000	
7	0 1	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksana nya Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					3 Orang	3 Orang	30.000.000	30.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	30.000.000	
7	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselengg aranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			160.793.712	190.793.712			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	190.793.712	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersediany a Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Paket	4 Paket	3.789.000	3.789.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.789.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediany a peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Paket	4 Paket	19.495.212	19.495.212	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.495.212
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediany a Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Paket	4 Paket	18.909.500	18.909.500	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.909.500
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediany a Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan					1 Paket	1 Paket	3.600.000	3.600.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah							Sebelum
									Kelura han								UMU M					
7	0 1	0 1	2. 06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselengg aranya kegiatan kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000
7	0 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana nya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	140.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000
7	0 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			334.872.400	334.872.400			Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100 Persen	334.872.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0 1	0 1	2. 07	00 05	Pengadaan Mebel	Tersediany a Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					2 Unit	2 Unit	12.000.000	12.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12.000.000
7	0 1	0 1	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediany a Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	287 Unit	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					287 Unit	287 Unit	322.872.400	322.872.400	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	287 Unit	322.872.400
7	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselengg aranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			240.019.008	240.019.008			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	240.019.008
7	0 1	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediany a jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																	UMU M					
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					12 Laporan	12 Laporan	47.179.008	47.179.008	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.179.008
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					12 Laporan	12 Laporan	189.840.000	189.840.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.840.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihar anya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			67.757.110	77.757.110			Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	77.757.110

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					4 Unit	4 Unit	45.780.000	55.780.000	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOK ASI UMUM		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	55.780.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana nya Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					18 Unit	18 Unit	11.980.000	11.980.000	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOK ASI UMUM		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.980.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Unit	1 Unit	9.997.110	9.997.110	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOK ASI UMUM		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	9.997.110

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Koordinasi dan Fasilitasi Penyeleng garaan Pelimpaha n Kewenang an, Pemerlu Pelayanan Kesejahter aan Sosial dan Kebencana an Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 Persen	100 Persen					30.500.000	22.550.000			Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	22.550.000
7	0	0	2.	02	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksana nya Urusan Pemerinta han yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			23.000.000	15.050.000			Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	15.050.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelurahan					5 Laporan	5 Laporan	23.000.000	15.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	15.050.000
7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelurahan			100 Persen	100 Persen			7.500.000	7.500.000			Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100 Persen	7.500.000
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelurahan					1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	7.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkat nya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberda yaan masyaraka t di kecamatan sesuai dengan ketentuan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 persen	100 persen					65.405.000	65.405.000			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 persen	65.405.000
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 persen	100 persen			65.405.000	65.405.000			Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 persen	65.405.000
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkat nya Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawah ah Perencana an Pembangu nan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					21 Lembaga Kemasyar akatan	21 Lembaga Kemasyar akatan	15.000.000	15.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyar akatan	15.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0 1	0 3	2. 01	00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkat nya Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					3 Laporan	3 Laporan	50.405.000	50.405.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	50.405.000
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkat nya Koordinasi dan Fasilitasi Penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum serta perlindung an masyaraka t di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 Persen	100 Persen					25.431.000	35.431.000			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	35.431.000
7	0 1	0 5	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksana nya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlin mas	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Presen	100 Presen			22.681.000	32.681.000			Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlin mas	100 Persen	32.681.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
7	0 1	0 5	2. 01	00 07	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana nya Harmonisa si Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka t	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	20.681.000	30.681.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.681.000
7	0 1	0 4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkat nya Koordinasi Penerapan dan Penegakka n Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0 1	4	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkat nya Koordinasi Penerapan dan Penegakka n Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Presen	100 Presen			2.750.000	2.750.000			Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	2.750.000
7	1	4	2	1	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana nya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Laporan	1 Laporan	2.750.000	2.750.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.750.000
7	0 1	0 6			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkat nya Penyeleng garan Urusan Pemerinta han Umum	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 Persen	100 Persen					1.358.595.000	1.358.595.000,0 0			Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	1.358.595.000, 00

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2		Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksana nya Penyeleng garaan Pemerinta han Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			1.358.595.000	1.358.595.000			Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	1.358.595.000
7	0	0	2.	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksana nya Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	200 Orang	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					200 Orang	200 Orang	49.995.000	49.995.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan	200 Orang	49.995.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Kesatuan Republik Indonesia													Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanak an oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelurahan					3 Dokumen	3 Dokumen	1.275.000.000	1.275.000.000	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1.275.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksana nya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000	33.600.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.600.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkat nya fasilitasi pembinaan dan pengawasa n penyeleng garaan pemerinta han desa/kelur ahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 Persen	100 Persen					23.755.790	23.755.790			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	23.755.790
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Penyeleng garaan Pemerinta han Desa/Kelur ahan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Fasilitasi	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Persen	100 Persen			23.755.790	23.755.790			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Fasilitasi	23.755.790

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Administra si Tata Pemerinta han Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	3.000.000
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	3.000.000
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					1 Dokumen	1 Dokumen	14.755.790	14.755.790	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	21 Lembaga Kemasyar akatan	14.755.790
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkat nya Fasilitasi Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	21 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	21 Lembaga Kemasyar akatan	3.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikator (Rp)		Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
											Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
											Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Permusya waratan DesaKepal a Desa	Permusyawar atan Desa		Kelura han								UMU M		Permusyawar atan Desa				
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkat nya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberda yaan masyaraka t di kecamatan sesuai dengan ketentuan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han	100 Persen	100 Persen					833.554.400	857.542.521			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	857.542.521	
7	0 1	0 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksana nya Fasilitasi Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t di Kecamatan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Presen	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han			100 Presen	100 Presen			833.554.400	857.542.521			Presentase Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Presen	857.542.521	
7	0 1	0 3	2. 02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksana nya Pemberda yaan Masyaraka t di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	Kab. Banjar Sungai Tabuk Semua Desa dan Kelura han					3 Pokmas	3 Pokmas	833.554.400	857.542.521	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	857.542.521	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kec. Sungai Tabuk Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sungai Tabuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Aluh aluh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Aluh aluh Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Aluh aluh Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Aluh Aluh dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh Tahun 2024 ini :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 48);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 64);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar tanggal 26 Juli 2024 Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
2. Untuk menyesuaikan pagu indikatif sesuai Surat Edaran Bupati Banjar dengan nomor 000.7.2.4/663/PPE-Bappedalitbang.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aluh Aluh agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp3.168.024.513,00,- (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pada saat perubahan Kecamatan Aluh Aluh melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.269.445.173,00,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*)

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Mebel

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKP
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- SubPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- #### Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- #### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- #### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

-

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Aluh Aluh sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 saat ini tidak ada realisasi yang melebihi target

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terkendala dikarenakan belum siapnya data pendukung laporan pertanggung jawaban dari rekanan yang terkumpul.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terkendala dikarenakan adanya pertanggung jawaban dari pengampu jabatan dengan penyedia fasilitasi kegiatan.
- Pada sub kegiatan Pengadaan Mebel kendala dikarenakan adanya saat ini masih dilakukan tahapan penyusunan laporan kegiatan.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja

Program/ kegiatan

- Tidak ada faktor penyebab yang melebihi target tercapainya kinerja Program kegiatan

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Aluh Aluh.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN ALUH ALUH TAHUN 2024 S/D TRIWULAN II

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARANTA HUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh	77	Persen	2.772.295.00	0	645,570,311.00	0	1,602,024,856.00	0	344,611,459.00	0	1.228.154.264,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	14.975.500	60	4,975,500.00	20	10,975,500.00	50	0	17	4.005.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	4.975.500	1	4,975,500.00	0	4,975,500.00	1	0	0	2,125,500.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	-	1	2,000,000.00	0	0	1	400.000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGARANTA HUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN			
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
					VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	R K
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	-	1	2,000,000.00	0	0	1	280.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	1	-	1	1,000,000.00	1	0	1	760.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000	0	-	1	1,000,000.00	0	0	1	440.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	laporan	2.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-
--	--	--	---	---	---	---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGARANTAHUN 2024		TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
										TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
										TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2			3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	1.907.634.703		24	378,659,556.00	24	1,026,637,056.00	24	266,275,793.00	24	921,958,930.00
			Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	Orang/Bulan	1.867.694.703		3	367,299,556.00	6	1,006,417,056.00	3	260,215,793.00	6	905,271,930.00
			Pelaksanaa n Penatausah aa n da n Pengujian/ Ver ifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan da n Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	Dokumen	31.440.000		0	7,860,000.00	1	15,720,000.00	0	6,060,000.00	1	15,120,000.00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4	laporan	6.500.000	1	3,500,000.00	2	4,500,000.00	1	0	2	1,567,000.00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN			
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
								VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD											
			Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah SubKegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	15.759.800	25	2,997,855.00	25	7,932,300.00	23	2,100,000.00	-	6,000,000.00
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	13.760.000	0	2,940,000.00	0	6,880,000.00	0	2,100,000.00	0	6,000,000.00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	1.999.800	1	57,855.00	2	1,052,300.00	1	0	2	-
			Administrasi KepegawaianPerangka t Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yangterpenuhi	100	Persen	11.005.000	25	2,000,000.00	25	5,000,000.00	25	0	25	-
			Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	1	Dokumen	11.005.000	0	2,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
					VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				dan Penilaian KinerjaPegawai											
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	210.277.700	73	87,957,400.00	22	160,387,700.00	67	15,526,936.00	20	72.513.742,00
			Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	12	Paket	2.650.000	12	2,650,000.00	6	2,650,000.00	11	-	6	-
			Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	23.259.900	0	8,629,900.00	0	11,129,900.00	0	-	0	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	1	Paket	11.479.900	1	6,000,000.00	0	8,229,900.00	1	550.00	0	3,942,000.00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yangDisediakan	1	Paket	5.025.400	1	2,275,000.00	1	5,025,400.00	1	-	0	184.000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	167.862.500	6	68,402,500.00	6	133,352,500.00	6	15,526,386.00	6	68,387,742. 00
--	--	--	---	---	----	---------	-------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---	-------------------

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase PengadaanBDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	129.990.000	83	84,449,000.00	15	111,931,000.00	75	0	15	89,353,000.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	30.425.000	1	30,425,000.00	0	30,425,000.00	0	0	0	25,833,000.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	5	unit	99.565.000	0	54,024,000.00	3	81,506,000.00	0	0	3	63,520,000.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	220.800.300	25	59,291,000.00	25	128,949,300.00	24	42,208,730.00	20	92,441,092.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.999.800	3	3,000,000.00	6	4,999,800.00	3	-	6	4,824,600.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	20.000.500	3	7,191,000.00	6	11,449,500.00	3	2,758,730.00	6	4,345,932.00

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	195.800.000	3	49,100,000.00	6	112,500,000.00	3	39,450,000.00	6	83,270,560.0 0
--	--	--	---	--	----	---------	-------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---	-------------------

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMDPenunjang Urusan Perangkat darah	100	persen	261.852.000	38	25,240,000.00	38	150,212,000.00	38	18,500,000.00	33	41,882,000.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	95.262.000	3	25,240,000.00	3	57,622,000.00	3	18,500,000.00	3	41,882,000.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	166.590.000	0	-	0	92,590,000.00	0	0	0	-
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat KecamatanAluh-Aluh	100	Persen	126.601.000	30		40	93.680.000,00	26	0	35	31,355,000.00
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi	100	Persen	17.680.000	55	6,142,000.00	31	10,680,000.00	50	0	31	8,131,500.00

[illegible]

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGARANTA HUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
									TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
						VOLUME	SATUAN		TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1	laporan	4.890.000	1	2,352,000.00	0	3,890,000.00	1	0	0	2,351,500. 00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1	Dokumen	12.790.000	0	3,790,000.00	0	6,790,000.00	0	0	0	5,780,000. 00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan		100	persen	22.738.000	5	1,558,000.00	22	7,738,000.00	5	0	22	7,723,500. 00
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	laporan	22.738.000	0	1,558,000.00	0	7,738,000.00	0	0	0	7,723,500. 00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	86.183.000	30	18,242,000.00	55	75,262,000.00	28	0	55	15,500,000.00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	86.183.000	0	18,242,000.00	0	75,262,000.00	0	0	0	15,500,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Terlaksana nya Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan	100	Persen	96.216.500	100	49,439,500.00	0	67,628,500.00	95	18750000	0	31,448,500.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	persen	92.423.000	100	45,646,000.00	0	63,835,000.00	100	18,750,000.00	0	31,448,500.00

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19	Lembaga Kemasyarakatan	43.467.000	19	38,896,000.00	19	43,467,000.00	19	16,500,000.00	19	20,198,500.00
--	--	--	---	--	----	------------------------	------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
					VOLUME	SATUAN		DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	19	laporan	48.956.000	19	6,750,000.00	19	20,368,000.00	19	2,250,000.00	19	11,250,000.00
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	persen	3.793.500	100	3,793,500.00	0	3,793,500.00	90	0	0	-
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1	keluarga	3.793.500	1	3,793,500.00	0	3,793,500.00	1	0	0	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat di kecamatan Persentase	100	Persen	46.771.810	13	12,670,000.00	50	26.001.810,00	13	0	35	17.823.810,00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	persen	30.440.000	25	12,670,000.00	25	15,670,000.00	25	0	25 12,750,000.00
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	25.340.000	1	12,670,000.00	0	12,670,000.00	1	0	0 9,750,000.00
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	5.100.000	0	-	1	3,000,000.00	0	0	1 3,000,000.00

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	100	persen	16.331.810	0	-	60	10,331,810.00	0	0	60	5,073,810.00
--	--	--	---	-----	--------	------------	---	---	----	---------------	---	---	----	--------------

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Daerah dan PeraturanKepala Daerah											
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerahyang Tugas dan Fungsinyadi Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	16.331.81 0	0	-	0	10,331,810.0 0	0	0	0	5,073,810. 00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Angka stabilitas keamanan lokal	100	Persen	107.140.0 00	0	8,578,000.00	0	24,298,000. 00	0	2.600.000,00	0	21.620.000 ,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	persen	107.140.0 00	0	8,578,000.00	6 0	24,298,000. 00	0	2,600,000.00	60	21.620.000 ,00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	50	orang	68.862.00 0	0	-	50	5,820,000.00	0	-	50 5,820,000. 00
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah danTidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakanoleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	38.278.00 0	0	8,578,000.00	1	18,478,000.00	0	2,600,000.00	1 15,800,000. 00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
								VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	19.000.200	0	0	25	5,000,100.00	0	0	0	0
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	persen	19.000.200	0	-	22	5,000,100.00	0	0	0	-
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	4.999.800	0	-	0	-	0	0	0	-
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	5.000.300	0	-	0	-	0	0	0	-
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	1	Dokumen	5.000.100	0	-	0	5,000,100.00	0	0	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA TAHUN2024		ANGGAR AN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARANTRIWULAN				REALISASI KINERJA& TARGET ANGGARANTRIWULAN			
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	4.000.000	0	-	0	-	0	0	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Aluh-Aluh Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, tidak ada perubahan indikator kinerja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Namun, ada perubahan pada target indikator kinerja dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan item belanja.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 17 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.269.445.173,00,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

- 1 . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,
 - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Penambahan anggaran dilakukan karena anggaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, (PPTK, PPK dan bendahara pengeluaran) hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan dan Adanya pengadaan barang di perubahan yang memerlukan Pejabat Pengadaan sehingga diperlukan penambahan honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.2 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena adanya penyesuaian kebutuhan pada pembelian belanja baterai UPS dan kursi lipat sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena penambahan Belanja Perjalanan

Dinas Sekretariat dan PKK untuk menunjang Kegiatan koordinasi Kecamatan dan TP. PKK Kecamatan Aluh-Aluh.

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD karena adanya penyesuaian kebutuhan pada pembayaran honorarium pengelola arsip sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
- 1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena adanya penambahan Pengadaan layar proyektor dikarenakan proyektor lama sudah rusak demi mendukung kegiatan rapat yang sering diadakan di Aula Kecamatan Gambut, Penambahan Pengadaan AC di ruang Kessos dan Sekretariat dikarenakan rusak dan Perubahan rincian jumlah unit belanja laptop untuk mendukung kinerja ASN.
- 1.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena Adanya penyesuaian kebutuhan pada belanja materai sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena Adanya penyesuaian kebutuhan pada belanja tagihan listrik sehingga anggaran dialihkan ke belanja lain yang urgent.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena adanya penambahan anggaran karena ada kenaikan pembayaran Upah PTT (penyesuaian dengan SSH).
- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan perubahan karena mengingat mobilitas Camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan di wilayah kerja masing-masing.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan perubahan karena adanya pengurangan belanja pemeliharaan AC sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent, Penambahan belanja untuk pengadaan karpet di ruang kerja Camat dikarenakan karpet sudah rusak, Adanya pengurangan belanja pada pemeliharaan computer/notebook sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent dan Adanya pengurangan belanja pada pemeliharaan printer sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya dilakukan perubahan karena Penambahan Belanja Pemeliharaan Gedung (Luas bangunan 328.5 M²).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilakukan perubahan karena Penambahan Belanja dilakukan karena adanya Penambahan Kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu).

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dilakukan perubahan karena adanya pengurangan belanja makanan dan minuman rapat serta jasa penyelenggaraan acara sehingga anggaran dialihkan ke belanja yang lebih urgent.

Tabel 3.1 :

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Aluh-Aluh							2.936.355.319,00	3.168.024.513,00	3.269.445.173,00						2.869.650.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.936.355.319,00	3.168.024.513,00	3.269.445.173,00						2.869.650.000,00		
	7	01				KECAMATAN							2.936.355.319,00	3.168.024.513,00	3.269.445.173,00						2.869.650.000,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh				77,00 Persen	77,00 Persen	2.429.597.309,00	2.772.295.003,00	2.882.414.203,00							2.414.150.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100 Persen	100 Persen	14.975.500,00	14.975.500,00	14.975.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		15.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	4.975.500,00	4.975.500,00	4.975.500,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renst r a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional			Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.604.895.329,00	1.907.634.703,00	1.907.634.703,00			-	4. Meningkatkan a n tata kelola pemerintahan a han melalui reformasi dan penyelerha n aan birokrasi	SKPD		1.637.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 Orang/bulan		1.564.955.329,00	1.867.694.703,00	1.867.694.703,00	Kab. Banjar, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan a n tata kelola pemerintahan a han melalui reformasi dan penyelerha n aan birokrasi			1.600.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		31.440.000,00	31.440.000,00	31.440.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan a n tata kelola pemerintahan a han melalui reformasi dan penyelerha n aan birokrasi			30.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatk a n tata kelola kepemrint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi		2.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	11.005.000,00	11.005.000,00	11.005.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	161.377.700,00	210.277.700,00	210.277.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		93.150.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.259.900,00	23.259.900,00	23.259.900,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			25.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.479.900,00	11.479.900,00	11.479.900,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			10.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.025.400,00	5.025.400,00	5.025.400,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	206.500.300,00	220.800.300,00	220.800.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperintah a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		225.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kab. Banjar, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperintah a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.500,00	20.000.500,00	13.126.500,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			20.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.500.000,00	195.800.000,00	195.800.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			200.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH				

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Persentase PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen 4 Unit 6 Unit	100 Persen 4 Unit 6 Unit	272.529.920,00	261.852.000,00	261.852.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		385.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	95.755.020,00	95.262.000,00	120.565.400,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			85.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				2 Unit	2 Unit	176.774.900,00	166.590.000,00	187.862.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			300.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh- Aluh				100 Persen	100 Persen	135.591.210,00	126.601.000,00	126.601.000,00							115.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-			1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		20.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH

	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			15.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	24.739.800,00	22.738.000,00	22.738.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		25.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	24.739.800,00	22.738.000,00	22.738.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			25.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	91.851.410,00	86.183.000,00	86.183.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola keperimert a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		70.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	

		Urusan / Bidang	Indikator Program /	Target Akhir	Realisasi Capai	Prakiraan Capaian	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas			

No	Kode					Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Period e Renst r a OPD	a n RENJ A OPD Tahun 2022	n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumbe r Dana	Nasional	Daerah	o k Sasaran	Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)	Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	91.851.410,00	86.183.000,00	86.183.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			70.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	120.509.910,00	96.216.500,00	77.519.000,00							138.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan yang tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	116.716.410,00	92.423.000,00	92.423.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		135.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19 Lembaga Kemasyara k atan	19 Lembaga Kemasya r akatan	44.409.810,00	43.467.000,00	24.769.500,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			65.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	72.306.600,00	48.956.000,00	48.956.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			70.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	3.793.500,00	3.793.500,00	3.793.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		3.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																	

						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	1 Keluarga	3.793.500,00	3.793.500,00	3.793.500,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyszerha n aan birokrasi			3.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--------------	----------------------

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinma s Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan				100 100 Persen Persen	100 100 Persen Persen	117.931.510,00	46.771.810,00	56.770.770,00							72.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	101.599.700,00	30.440.000,00	30.440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		70.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	98.599.700,00	25.340.000,00	35.338.960,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			70.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan			0,00	KECAMATA N ALUH- ALUH

																		birokrasi					
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	-			100 Persen	100 Persen	16.331.810,00	16.331.810,00	16.331.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		2.500.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	16.331.810,00	16.331.810,00	16.331.810,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			2.500.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumbe r Dana	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal				100 Persen	100 Persen	113.725.180,00	107.140.000,00	107.140.000,00							110.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahyangTerfasil it asi	-			100 Persen	100 Persen	113.725.180,00	107.140.000,00	107.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi	SKPD		110.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	73.027.180,00	68.862.000,00	68.862.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			80.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	40.698.000,00	38.278.000,00	38.278.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			30.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 Persen	100 Persen	19.000.200,00	19.000.200,00	19.000.200,00							20.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	100 Persen	19.000.200,00	19.000.200,00	19.000.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatk a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan	SKPD		20.000.000,00	KECAMATA N ALUH- ALUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renst r a OPD	Realis asi Capai a n RENJ A OPD Tahun 2022	Prakira a n Capaia n Target RENJA OPD Tahu n 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp o k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumbe r Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.300,00	5.000.300,00	5.000.300,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.100,00	5.000.100,00	5.000.100,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Banjar, Aluh, Aluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Meningkatkan a n tata kelola kepemerint a han melalui reformasi dan penyederha n aan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATA N ALUH-ALUH
	J U M L A H											2.936.355.319,00	3.168.024.513,00	3.269.445.173,00						2.869.650.000,00			

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Aluh-Aluh di SIPD Tahun 2024

BAB IV

PENUTU

P

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aluh-Aluh Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Aluh-Aluh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
 2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.
- c. Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya

Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatam Mataraman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Mataraman dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2024 ini:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Mataraman dan juga ada perubahan sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah yang mengatur adanya indikator kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian seluruh indikator di level sub kegiatan dengan apa yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun

- 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- 2) Untuk menyesuaikan indikator pada sub kegiatan yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Mataraman tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.940.844.156,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Mataraman tetap melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 3.004.569.771 (Tiga Milyar Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
- Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Penyusunan Dokemen Perencanaan Perangkat daerah menyesuaikan dengan jadwal penyusunan perencanaan tahun 2024 sesuai dengan surat edaran yang berlaku
- Ada Beberapa Penyusunan Dokumen yang menunggu jadwal dan Pendampingan dari Instansi Terkait Adanya Format baru yang digunakan dalam penyusunan LKJ TW II
- Kegiatan dilaksanakan di bulan juli dan agustus
- Keuangan masaih dalam proses pengajuan GU

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Dll

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Mataraman.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MATARAMAN TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

Commented [L1]: Target kinerja yg dimaksud adalah jumlah keluaran indikator

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satuan		DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.940.844.156								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	75	Nilai	2.656.478.156	0	493.805.289	0	1.364.010.981	0	160.519.740	0	1.255.741.508
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	9.706.000	25 %	2.700.000	25 %	4.900.000	20 %	1.112.000	25 %	1.112.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	5.706.000	4 Dokumen	1.700.000	7 Dokumen	2.900.000	3 Dokumen	112.000	6 Dokumen	112.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	4.000.000	5 Laporan	1.000.000	9 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.000.000	7 Laporan	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.145.494.616	25%	334.560.039	25%	1.046647.441	11%	68.282.004	38%	1.033.579.178
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji, Tunjangan ASN	14	Orang/ Bulan	2.100.974.616	14 Orang/ Bulan	321.270.039	14 Orang/ Bulan	1.024.907.441	14 Orang/ Bulan	62.342.004	14 Orang/ Bulan	1.018.337.178
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Ve	40	Dokumen	44.520.000	5 Dokumen	13.290.000	24 Dokumen	21.740.000	5 Dokumen	5.940.000	25 Dokumen	15.242.000

		rifikasi Keuangan SKPD											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	110.932.000	25%	62.916.250	25%	64.872.500	21%	23.587.386	28%	53.473.979
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.321.000	1 Paket	900.000	2 Paket	2.100.000	0	326.000	3	630.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	18.566.000	1 Paket	10.491.250	3 Paket	13.132.500	1 Paket	1.130.000	3 Paket	11.036.691
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	5.700.000	1 Paket	14.425.000	2 Paket	3.440.000	1 Paket	1.425.000	2 Paket	2.775.250

		yang disediakan											
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	5.400.000	3 Lapo ran	1.350.000	6 Lap ora n	2.700.000	3 Lapo ran	1.350.000	6 Lapo ran	1.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	77.945.000	3 Lapo ran	35.750.000	6 Lap ora n	43.500.000	3 Lapo ran	19.356.386	6 Lapo ran	37.231.538
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	247.755.540	25%	59.399.000	25%	134.241.040	21%	54.299.698	28%	116.126.385
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	19.998.500	1 Lapo ran	5.729.000	1 Lap ora n	11.694.000	1 Lapo ran	2.931.500	1 Lapo ran	6.008.500

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	Laporan	20.757.040	3 Lapo ran	5.550.000	3 Lap ora n	11.507.040	3 Lapor an	3.816.698	3 Lapo ran	8.871.447
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	Laporan	207.000.000	3 Lapo ran	48.120.000	3 Lap ora n	111.040.000	3 Lapor an	47.551.500	3 Lapo ran	101.246.438
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaa n BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	142.590.000	25%	47.230.000	25 %	113.350.000	27%	13.238.652	22%	51.449.966
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	7	Unit	57.180.000	1 Unit	16.080.000	6 Uni t	30.780.000	1 Unit	10.438.652	6 Unit	21.774.966

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	8	Unit	35.410.000	1 Unit	31.150.000	7 Unit	32.570.000	1 Unit	2.800.000	7 Unit	29.675.000
	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Di rehabilitasi	1	Unit	50.000.000	1 Unit	0	1 Unit	50.000.000	0 Unit	0	1 Unit	0
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa	100	Persen	75.000.000	25%	22.261.000	25%	67.044.500	21%	0	35%	27.800.000

	PELAYANAN PUBLIK	n Sosial dan Kebencanaa n Kecamatan YangTerlaks ana											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	75.000.000	25%	22.261.000	25 %	67.044.500	21%	0	35%	27.800.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	75.000.000	2 Lapo ran	22.261.000	2 Lapo ran	67.044.500	2 Lapo ran	0	4 Lapo ran	27.800.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdaya	100	Persen	69.700.000	25%	17.810.000	25 %	33.135.000	50%	11.750.000	20%	21.650.000

		an Masyarakat di Kecamatan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	69.700.000	25%	17.810.000	25%	33.135.000	21%	11.750.000	28%	21.650.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.750.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.750.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.750.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.750.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	4	Laporan	46.200.000	0 Laporan	6.060.000	3 Laporan	21.385.000	0 Laporan	0	3 Laporan	9.900.000

	wilayah Kecamatan	Pemberdayaa n Masyarakat di wilayah Kecamatan											
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengga raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	31.436.000	25%	10.718. 000	25 %	15.218.0 00	33%	10.600.0 00	25%	15.100.0 00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	31.436.000	25%	10.718. 000	25 %	15.218.0 00	33%	10.600.0 00	16%	15.100.0 00

	Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	21.436.000	2 Lapo ran	10.718. 000	2 Lap ora n	10.718.0 00	2 Lapor an	10.600.0 00	2 Lapo ran	10.600.0 00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	10.000.000	1 Lapo ran	0	2 Lap ora n	4.500.00 0	1 Lapor an	0	2 Lapo ran	4.500.00 0
5	PROGRAM PENYELENGGA	Persentase Penyelengga	100	Persen	51.080.000	25%	5.970.0 00	25 %	11.940.0 00	7%	4.070.00 0	25%	9.770.00 0

	RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	raan Urusan Pemerintahan Umum											
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	51.080.000	25%	5.970.000	25%	11.940.000	15%	4.070.000	35%	9.770.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila,	320	Orang	27.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	12	Lapora n	23.880.000	3 Lapo ran	5.970.0 00	6 Lap ora n	11.940.0 00	3 Lapor an	4.070.00 0	6 Lapo ran	9.770.00 0
6	PROGRAM PEMBINAAN	Persentase fasilitasi	100	Persen	57.150.000	25%	16.160. 000	25 %	29.430.0 00	15%	9.000.00 0	25%	15.000.0 00

	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	57.150.000	25%	16.160. 000	25 %	29.430.0 00	15%	9.000.00 0	34%	15.000.0 00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokume n	49.100.000	0	11.500. 000	1 Dok um en	25.900.0 00	0	9.000.00 0	1 Doku men	15.000.0 00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka	1	Dokume n	8.050.000	0	4.660.0 00	1 Dok um en	3.530.00 0	0	0	1 Doku men	0

	Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayaguna an Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Mataraman Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.004.569.771 (Tiga Milyar Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
2. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
3. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.

4. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
5. Adanya penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, penambahan sub kegiatan tersebut karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan sesuai kebutuhan.
6. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
7. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
8. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
9. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
10. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
11. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
12. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Dan Pendaugunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.1 :

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Mataraman
Tahun 2024

Commented [L2]: Masih blm sesuai dengan yg di sipd ri

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progran/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegi atan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubaha n/Keteran gan
				Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Jumlah Perubahan (+/-)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	73 Indeks	73 Indeks	2.656.478.156	2.730.639.771	- 2.086.638.752	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	100 Persen	9.706.000	11.666.000	1.960.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	5.706.000	7.666.000	1.960.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17 Laporan	4.000.000	4.000.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.145.494.616	2.138.434.616	236.237.864	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.100.974.616	2.100.974.616	243.297.864	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50 Dokumen	44.520.000	37.460.000	-7.060.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	110.932.000	150.932.000	40.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.321.000	3.321.000	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.566.000	18.566.000	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.700.000	5.700.000	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.400.000	5.400.000	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	77.945.000	117.945.000	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	0	24.098.000	24.098.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	42 Unit	0	24.098.000	24.098.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	247.755.540	249.259.155	1.503.615	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	19.998.500	19.998.500	0	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.757.040,00	22.260.655	1.503.615	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	207.000.000	207.000.000	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	142.590.000	156.250.000	13.660.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	57.180.000	67.180.000	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	35.410.000,00	39.070.000	3.660.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	0	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	75.000.000	75.000.000	-75.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	75.000.000	75.000.000	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	6 Laporan	75.000.000	75.000.000	0	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	69.700.000	57.950.000	-69.700.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	69.700.000	57.950.000	-11.750.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasya- katan	23.500.000	11.750.000	-11.750.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	46.200.000	46.200.000	0	

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	100 Persen	31.436.000	41.470.000	-56.216.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	31.436.000	41.470.000	-46.216.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	21.436.000	31.470.000	-46.216.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	51.080.000	46.880.000	-27.200.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	51.080.000	46.880.000	-4.200.000	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	320 Orang	320 Orang	27.200.000	27.200.000	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	1 Dokumen	23.880.000	19.680.000	-4.200.000	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	57.150.000	52.630.000	-49.100.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	57.150.000	52.630.000	-4.520.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	49.100.000	49.100.000	0	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000	3.530.000	-4.520.000	
JUMLAH						2.940.844.156	3.004.569.771	250.773.479	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Mataraman Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Mataraman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Simpang Empat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Simpang Empat dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26)

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.536.289.272,- (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Simpang Empat melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp2.624.613.272,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA, TERDIRI DARI:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERDIRI DARI:

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terdiri dari:

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERDIRI DARI:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERDIRI DARI:

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TERDIRI DARI:
- 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA TERDIRI DARI:
- 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu informasi dari Perangkat Daerah teknis terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis.
- Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penyesuaian terkait kebutuhan barang sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Adanya petunjuk, arahan serta komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
- koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Simpang Empat.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SIMPANG EMPAT TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	2.283.441.772	-	718.986.312	-	1.510.621.211	-	354.891.225	-	1.202.881.635
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	7.152.000	22%	2.781.000	44%	4.188.000	21,88%	-	44%	4.188.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	600.000	2	356.000	1	600.000	2	0	3	600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	413.000	-	0	2	413.000	-	0	2	413.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	499.000	-	0	-	0	-	0	-	0

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	568.000	-	343.000	-	343.000	-	0	-	343.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	684.000	-	0	-	0	-	0	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	Laporan	1.332.000	1	1.332.000	-	1.332.000	1	0	1	1.332.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	3.056.000	4	750.000	4	1.500.000	5	0	9	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.765.796.572	25%	511.882.262	49%	1.170.162.111	25%	280.856.319	49%	970.514.634
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	154	Orang/Bulan	1.723.124.572	11	498.640.262	11	1.147.110.111	10	271.046.319	11	947.462.634
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	Dokumen	39.240.000	4	9.810.000	4	19.620.000	6	9.810.000	9	19.620.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	3.432.000	1	3.432.000	-	3.432.000	1	0	1	3.432.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerahyang Tersusun	100	Persen	745.000	20%	391.000	40%	487.000	20%	-	40%	487.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	244.000	1	94.000	1	122.000	1	0	-	122.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	501.000	-	297.000	-	365.000	-	0	-	365.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	13.000.000	-	10.750.000	50%	11.500.000	-	750.000	-	1.500.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	3.000.000	-	750.000	-	1.500.000	-	750.000	-	1.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	10.000.000	-	10.000.000	1	10.000.000	-	0	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	190.206.000	25%	73.149.000	50%	134.868.000	25%	23.676.836	50%	107.838.102

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	6.880.000	1	263.000	1	3.386.000	1	0	2	3.386.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	20.145.500	1	7.852.500	1	15.627.500	1	1.000.000	2	15.492.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	13.026.500	1	6.069.500	1	12.901.500	1	2.866.000	2	12.901.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	1.154.000	1	358.000	1	577.000	1	240.000	2	577.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	2.800.000	1	806.000	1	1.776.000	1	0	2	60.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	1.200.000	1	300.000	1	600.000	1	300.000	2	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	145.000.000	3	57.500.000	3	100.000.000	3	19.270.836	6	74.821.102
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	36.470.000	-	36.470.000	100%	36.470.000	67%	14.505.618	67%	14.505.618
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	Unit	36.470.000	2	36.470.000	1	36.470.000	2	14.505.618	2	14.505.618
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	169.552.200	24%	39.788.050	51%	89.976.100	24,32%	29.492.452	50%	67.133.281

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.000.000	3	250.000	3	500.000	3	250.000	6	500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	17.152.200	3	4.288.050	3	8.576.100	3	3.442.452	6	6.039.344
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	Laporan	151.400.000	3	35.250.000	4	80.900.000	3	25.800.000	7	60.593.937
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	100.520.000	24%	43.775.000	60%	62.970.000	12%	5.610.000	50%	36.715.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	68.580.000	3	18.430.000	3	34.480.000	3	5.610.000	3	16.895.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	14	Unit	9.740.000	3	3.145.000	5	6.290.000	3	0	8	5.820.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	22.200.000	-	22.200.000	1	22.200.000	-	0	1	14.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100	Persen	25.652.000	25%	7.146.000	50%	14.804.000	24%	2.550.000	49%	14.110.000

		Kecamatan YangTerlaksana											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	2.160.000	24%	-	47%	2.160.000	24%	-	47%	2.160.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17	laporan	2.160.000	4	0	4	2.160.000	4	0	9	2.160.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	23.492.000	25%	7.146.000	50%	12.644.000	25%	2.550.000	50%	11.950.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	23.492.000	1	7.146.000	1	12.644.000	1	2.550.000	2	11.950.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	42.352.000	25%	34.350.000	50%	37.718.000	25%	12.170.000	50%	25.960.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	42.352.000	81%	34.350.000	88%	37.718.000	25%	12.170.000	50%	25.960.000

	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	LembagaKemasyarakatan	8.428.000	12	8.428.000	-	8.428.000	12	8.170.000	12	8.170.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4	Laporan	33.924.000	1	25.922.000	1	29.290.000	1	4.000.000	2	17.790.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	37.077.500	25%	14.538.500	50%	17.618.500	50%	9.820.000	50%	15.710.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	26.287.000	-	14.538.500	50%	17.618.500	50%	9.680.000	50%	15.570.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	23.207.000	-	14.538.500	1	14.538.500	-	9.680.000	1	12.680.000

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3.080.000	-	0	1	3.080.000	-	0	1	2.890.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	10.790.500	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	10.790.500	-	0	-	0	-	140.000	-	140.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	130.244.000	-	18.996.000	-	85.312.000	-	14.900.000	-	39.800.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	130.244.000	5%	18.996.000	-	85.312.000	-	14.900.000	-	39.800.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	33.184.000	-	0	-	0	-	0	-	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	97.060.000	1	18.996.000	1	85.312.000	1	14.900.000	1	39.800.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	17.522.000	9%	3.558.000	27%	7.346.000	18,18%	3.500.000	45%	6.390.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	17.522.000	9%	3.558.000	27%	7.346.000	18,18%	3.500.000	45%	6.390.000

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	3.788.000	-	0	1	3.788.000	-	0	2	2.890.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3.308.000	-	0	-	0	-	0	-	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	Dokumen	3.788.000	-	0	-	0	1	0	3	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	3.080.000	-	0	-	0	-	0	-	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	3.558.000	1	3.558.000	-	3.558.000	1	3.500.000	1	3.500.000

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.624.613.272,- (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga perlu dilakukan perbaikan taplak meja dalam rangka menunjang kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan di aula Kecamatan Simpang Empat, taplak meja yang ada kondisi sudah usang dan perlu diperbaharui.
2. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Alokasi tambahan anggaran diperuntukkan untuk kegiatan Perjalanan dinas luar daerah kecamatan dalam rangka peningkatan wawasan dan untuk mengakomodir kegiatan PKK Kecamatan Simpang Empat.
3. Penyesuaian pagu anggaran pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan administrasi di Kecamatan Simpang Empat.
4. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam rangka

mengakomodir pembayaran tagihan listrik bangunan yang dilimpahkan oleh Setda bagian Umum kepada Kecamatan Simpang Empat.

5. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam rangka mengakomodir kegiatan Pokjanal Posyandu dan Kegiatan PKK untuk optimalisasi peran kader posyandu desa dalam percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan Simpang Empat.
6. Penyesuaian pagu anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam rangka optimalisasi kegiatan.
7. Penambahan pagu pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam rangka mengakomodir belanja bahan bakar minyak.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

NO	KODE	NAMA / DESKRIPSI KENDARAAN / PERANGKAT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	KETERANGAN / KETERANGAN KENDARAAN / PERANGKAT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KENDARAAN PERANGKAT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	REKORD KENDARAAN PERANGKAT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	PROJEKSI KENDARAAN PERANGKAT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN					KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN			
							KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN		KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN		KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN									KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN
							KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN												
1	1	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
2	2	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
3	3	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
4	4	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
5	5	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
6	6	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
7	7	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
8	8	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
9	9	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
10	10	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
11	11	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
12	12	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
13	13	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
14	14	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
15	15	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
16	16	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
17	17	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
18	18	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
19	19	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
20	20	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
21	21	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
22	22	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
23	23	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
24	24	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
25	25	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
26	26	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
27	27	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
28	28	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
29	29	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
30	30	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
31	31	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
32	32	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
33	33	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
34	34	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
35	35	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
36	36	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
37	37	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
38	38	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
39	39	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
40	40	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
41	41	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
42	42	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
43	43	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
44	44	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
45	45	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
46	46	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
47	47	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
48	48	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
49	49	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
50	50	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
51	51	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
52	52	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
53	53	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
54	54	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
55	55	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
56	56	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
57	57	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
58	58	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
59	59	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
60	60	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
61	61	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
62	62	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
63	63	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
64	64	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
65	65	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
66	66	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
67	67	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
68	68	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
69	69	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
70	70	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
71	71	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
72	72	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
73	73	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
74	74	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
75	75	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
76	76	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
77	77	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
78	78	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
79	79	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
80	80	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
81	81	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
82	82	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
83	83	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
84	84	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
85	85	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
86	86	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
87	87	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
88	88	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
89	89	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
90	90	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
91	91	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
92	92	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
93	93	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
94	94	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
95	95	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
96	96	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
97	97	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
98	98	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
99	99	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				
100	100	KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN KENDARAAN																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Kategori Program / Sub Program / Kegiatan	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran										Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase Realisasi
						Rincian Anggaran				Rincian Realisasi				Rincian Realisasi				
						Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2014	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2014	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
2	2015	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2015	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
3	2016	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2016	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
4	2017	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2017	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
5	2018	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2018	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
6	2019	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2019	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
7	2020	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2020	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
8	2021	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2021	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
9	2022	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2022	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
10	2023	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2023	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
11	2024	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2024	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
12	2025	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2025	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
13	2026	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2026	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
14	2027	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2027	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
15	2028	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2028	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
16	2029	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2029	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
17	2030	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2030	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
18	2031	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2031	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
19	2032	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2032	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
20	2033	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2033	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
21	2034	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2034	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
22	2035	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2035	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
23	2036	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2036	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
24	2037	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2037	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
25	2038	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2038	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
26	2039	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2039	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
27	2040	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2040	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
28	2041	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2041	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
29	2042	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2042	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
30	2043	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2043	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
31	2044	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2044	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
32	2045	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2045	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
33	2046	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2046	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
34	2047	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2047	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
35	2048	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2048	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
36	2049	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2049	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
37	2050	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2050	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
38	2051	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2051	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
39	2052	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2052	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
40	2053	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2053	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
41	2054	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2054	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
42	2055	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2055	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
43	2056	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2056	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
44	2057	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2057	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
45	2058	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2058	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
46	2059	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2059	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
47	2060	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2060	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
48	2061	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2061	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
49	2062	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2062	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
50	2063	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2063	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
51	2064	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2064	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
52	2065	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2065	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
53	2066	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2066	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
54	2067	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2067	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000	100.000.000	100%	
55	2068	PROGRAM KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	Program KECENDERUNGAN	2068	100.0												

[illegible]

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Simpang Empat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Pengaron

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Pengaron dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan ur Tahun 2022 ini:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Timur dan juga ada perubahan sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur adanya

indikator kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian seluruh indikator di level sub kegiatan dengan apa yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- 2) Untuk menyesuaikan indikator pada sub kegiatan yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Pengaron tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.3.558.865.249,00 (Tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah)** dan pada saat perubahan Kecamatan Pengaron tidak mengalami perubahan indikator dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan perubahan pagu sebesar **Rp.3.628.865.249,00 (Tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima dua ratus empat puluh sembilan)**.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, Fasilitas Kujungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari:

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:

- Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan

merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan Penugasan Batas Desa.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari:

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Realisasi program/kegiatan pada Kecamatan Pengaron tidak ada yang melebihi target sampai dengan triwulan II. Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Pengaron sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Beberapa Kegiatan terlambat ,Akibat Adanya permasalahan pada Penatausahaan di aplikasi SIPD-RI yang mengakibatkan Hampir 85% Kegiatan tidak sesuai dengan alur jalanya RAK dan jadwal kegiatan yang di susun.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

- Manajemen aplikasi yang baik dan mempertimbangkan besaran resiko penggunaan aplikasi yang tidak stabil.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Pengaron.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melaksanakan rincian aktivitas sesuai dengan rencana anggaran kas dan mengupayakan serta segera merealisasikan rincian aktivitas yang tertunda
- c. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- d. Meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan Kertak Hanyar maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya agar target kinerja Kegiatan bisa tercapai.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PENGARON TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

LAPORAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Kecamatan Pengaron
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Pagu	Target Tahunan	Triwulan I			Triwulan II		
							Target Triwulan	Realisasi Keuangan	Realisasi Indikator	Target Triwulan	Realisasi Keuangan	Realisasi Indikator
07.01.01	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	Nilai	3.270.430.349	76	0	406.595.191	0	0	1.200.644.039	0
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	persen	12.600.000	100	25	2.587.000	25	25	3.587.000	25
7.01.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.800.000	13	6	1.837.000	6	2	1.837.000	7
7.01.01.2.01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.000.000	4	1	0	1	1	1.000.000	4
7.01.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.800.000	21	9	750.000	3	13	750.000	10

7.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	2.696.835.249	100	25	362.566.317	25	25	891.302.141	25
7.01.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2.662.995.249	16	16	354.856.317	13	16	875.882.141	14
7.01.01.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30.840.000	1	0	7.710.000	1	0	15.420.000	1
7.01.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3.000.000	1	0	0	1	0	0	0
7.01.01.2.03	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	persen	10.320.000	100	25	2.250.000	0	25	4.500.000	0
7.01.01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.320.000	1	0	0	1	0	0	1
7.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	9.000.000	1	0	2.250.000	1	0	4.500.000	1
7.01.01.2.05	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	persen	19.500.000	100	25	5.000.000	0	25	15.000.000	50
7.01.01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4.500.000	1	0	0	1	0	0	1
7.01.01.2.05.0011	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	15.000.000	10	0	5.000.000	3	3	15.000.000	3

	Peraturan Perundang- Undangan	Perundang- Undangan	Peraturan Perundang- Undangan									
7.01.01.2.06	Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	80.065.500	100	25	5.153.500	0	25	67.775.960	25
7.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.851.500	1	0	0	1	0	550.000	1
7.01.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.541.000	5	1	3.653.500	2	3	9.003.500	5
7.01.01.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3.573.000	7	2	1.500.000	2	4	3.247.000	6
7.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	11.100.000	1	1	0	1	0	5.500.000	1
7.01.01.2.06.0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50.000.000	1	0	0	1	0	49.475.460	1
7.01.01.2.07	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	persen	93.242.000	100	25	2.000.000	0	25	49.968.000	25
7.01.01.2.07.0005	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	39.968.000	10	3	2.000.000	2	5	39.968.000	10
7.01.01.2.07.0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	53.274.000	5	0	0	1	1	10.000.000	5
7.01.01.2.08	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	200.657.600	100	25	27.038.374	0	25	100.016.938	25
7.01.01.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.000.000	1	0	0	1	0	0	1
7.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13.197.600	2	0	0	2	1	3.233.656	2

7.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	185.460.000	1	0	27.038.374	1	0	96.783.282	1
7.01.01.2.09	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen	157.210.000	100	25	0	0	25	68.494.000	25
7.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	78.000.000	11	4	0	3	3	3.247.000	9
7.01.01.2.09.0004		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
7.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	34.210.000	10	4	0	5	6	20.247.000	8
7.01.01.2.09.0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45.000.000	3	0	0	0	2	45.000.000	3
07.01.02	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	36.196.400	250	25	0	25	50	11.085.000	25
7.01.02.2.02	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	persen	8.811.160	100	25	0	0	25	2.644.500	30.01.00

	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.0003	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8.811.160	13	3	0	3	8	2.644.500	10
7.01.02.2.04	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen	27.385.240	100	25	0	0	25	8.440.500	30.82
7.01.02.2.04.0003	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	27.385.240	4	0	0	0	2	8.440.500	4
07.01.03	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	46.058.500	100	25	1.563.800	25	25	17.802.600	44.34.00
7.01.03.2.01	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen	46.058.500	100	25	1.563.800	25	25	17.802.600	25
7.01.03.2.01.0001	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	15.000.000	5	5	1.563.800	2	0	6.563.800	5
7.01.03.2.01.0003	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	31.058.500	4	0	0	3	2	11.238.800	4
07.01.04	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta	Persen	37.195.000	100	25	0	25	25	7.218.000	25

	serta perlindungan masyarakat di kecamatan		perlindungan masyarakat di kecamatan									
7.01.04.2.01	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	persen	32.062.000	100	25	0	25	25	7.218.000	25
7.01.04.2.01.0001	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	30.194.000	1	1	0	1	0	7.218.000	1
7.01.04.2.01.0002	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1.868.000	1	1	0	1	0	0	1
7.01.04.2.02	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	persen	5.133.000	100	25	0	25	25	0	0
7.01.04.2.02.0001	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5.133.000	1	0	0	1	0	0	1
07.01.05	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	159.790.000	100	25	0	25	25	46.238.000	25
7.01.05.2.01	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	159.790.000	100	25	0	25	25	46.238.000	0

	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi									
7.01.05.2.01.0001	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	45.000.000	100	0	0	20	0	0	50
7.01.05.2.01.0007	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	114.790.000	5	0	0	3	1	46.238.000	5
07.01.06	Meningkatnya fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	Persen	9.195.000	100	0	0	0	100	0	0
7.01.06.2.01	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	9.195.000	100	25	0	25	25	0	0

7.01.06.2.01.0003	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3.977.000	1	0	0	1	1	0	1
7.01.06.2.01.0015	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	5.218.000	1	0	0	1	1	0	1

Sumber data : *Aplikasi Simondalev Laporan Realisasi Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2024 TW II*

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

4.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Pengaron. Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah **Rp 3.628.865.249,00** (*Tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

4.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adanya penambahan pagu untuk kegiatan bimbingan teknis untuk memenuhi kebutuhan Kualitas SDM pada Kecamatan Pengaron.
2. pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD penambahan pagu untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dikarenakan anggaran sebelum perubahan tidak mencukupi dengan banyaknya aktifitas dan kegiatan diluar Kecamatan dan di dalam Kecamatan.
3. Adanaya perubahan penambahan pagu pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk Operasional kendaraan dinas bahan bakar.

4. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alasannya karena kesalahan rekening ke belanja modal karena menyesuaikan review inspektorat.
5. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dilakukan perubahan anggaran Penambahan Pagu untuk Persiapan Kegiatan Pilkada tahun 2024.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Kecamatan Pengaron							3.322.492.184,00	3.558.865.249,00	3.628.865.249,00						3.546.709.999,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.322.492.184,00	3.558.865.249,00	3.628.865.249,00						3.546.709.999,00				
	7	01				KECAMATAN							3.322.492.184,00	3.558.865.249,00	3.628.865.249,00						3.546.709.999,00				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron				10076,00%	10076,00%	2.989.057.284,00	3.270.430.349,00	3.330.430.349,00							3.081.030.000,00			
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	-			100 Persen	100 Persen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan	-		14.000.000,00	KECAMATAN PENGARON		

																	penyederh anaan birokrasi						
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah				13 Doku men	13 Do ku me n	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			8.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Lapor an	4 Lap ora n	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			3.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Lapor an	21 Lap ora n	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi			3.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.200.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	-				100 Persen	100 Persen	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		12.450.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	203	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.700.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokas	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui			9.750.000,00	KECAMATAN PENGARON

																i Umum		reformasi dan penyederh anaan birokrasi						
	7	0 1	0 1	2 . 0 5		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persentase Administras i Kepegawaia n yang terpenuhi	-			100 Perse n	100 Per sen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00			-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi	-			19.600.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 5	0 0 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Doku men	1 Do ku me n	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi				3.600.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 5	0 0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan				10 Oran g	10 Ora ng	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi				16.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 6		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentase Administras i Umum Perangkat Daerah	-			100 Perse n	100 Per sen	80.065.500,00	80.065.500,00	80.065.500,00			-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint	-			74.900.000,00	KECAMAT AN PENGARO N

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																	anaan birokrasi						
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			46.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	93.242.000,00	93.242.000,00	93.242.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		82.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	39.968.000,00	39.968.000,00	39.968.000,00	Kab. Banjar, Pengarom,	Dana Transfer Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola			36.000.000,00	KECAMATAN PENGARON

																Semua Kel/Desa	-Dana Alokas i Umum		keperimint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi				
	7	0 1	0 1	2 . 0 7	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Uni t	53.274.000,00	53.274.000,00	53.274.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperimint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			46.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 8		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	-			100 Perse n	100 Per sen	200.657.600,0 0	200.657.600,0 0	200.657.600,0 0			-	4. Meningkat kan tata kelola keperimint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi	-		181.880.000,0 0	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 8	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lapor an	1 Lap ora n	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperimint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			3.500.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

				08	02																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	13.197.600,00	13.197.600,00	13.197.600,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	185.460.000,00	185.460.000,00	185.460.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			171.380.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	157.210.000,00	157.210.000,00	157.210.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		161.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	88.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi			80.000.000,00	KECAMATAN PENGARON

							dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a											dan penyederh anaan birokrasi					
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinanny a				0 Unit	0 Uni t	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	2. Meningkat kan kualitas sumber daya manusia yang berdayasai ng dan berkarakte r agamis			9.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Uni t	34.210.000,00	34.210.000,00	34.210.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			26.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				3 Unit	3 Uni t	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			46.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N

2	7	01	02			PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN PEMERI NTAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	IKM Kecamatan Pengaron Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron				83,00 83 % Nilai	83, 00 83 % Nila i	36.196.400,00	36.196.400,00	36.196.400,00								49.000.000,00	
	7	01	02	2 . 0 2		Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan yang Tidak Dilaksan akan oleh Unit Kerja Perangka t Daerah yang Ada di Kecamat an	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanaka n	-			100 Perse n	100 Per sen	8.811.160,00	8.811.160,00	8.811.160,00			-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi	-			16.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	01	02	2 . 0 2	0 0 0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Lapor an	13 Lap ora n	8.811.160,00	8.811.160,00	8.811.160,00	Kab. Banjar, Pengaron, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi				16.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	01	02	2 . 0 4		Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanaka n	-			100 Perse n	100 Per sen	27.385.240,00	27.385.240,00	27.385.240,00			-	4. Meningkat kan tata kelola keperemint ahan melalui reformasi dan penyederh	-			33.000.000,00	KECAMAT AN PENGARO N

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	75.194.000,00	30.194.000,00	40.194.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				75.000.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	04	200002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				10.500.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	04	2002		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumli nmas	-			100 Persen	100 Persen	5.133.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-			10.500.000,00	KECAMATAN PENGARON
	7	01	04	2002	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat				1 Laporan	1 Laporan	5.133.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan				10.500.000,00	KECAMATAN PENGARON

							Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									i Umum		melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi						
5	7	01	05				PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal Persentase fasilitasi Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum				0100% Perse n	0100% Per sen	159.790.000,00	159.790.000,00	159.790.000,00						214.000.000,00		
	7	01	05	201			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	-			100 Perse n	100 Per sen	159.790.000,00	159.790.000,00	159.790.000,00		-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN PENGARON	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan					100 Oran g	100 Ora ng	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			62.000.000,00	KECAMATAN PENGARON

						si Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa	pengawasan pemerintah an desa										kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi					
	7	01	06	20013	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa				1 Doku men	1 Do ku me n	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			10.500.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	7	01	06	20015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaata n, dan Pendayagun aan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Doku men	1 Do ku me n	5.218.000,00	5.218.000,00	5.218.000,00	Kab. Banjar, Pengarom, Semua Kel/Desa	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			10.500.000,00	KECAMAT AN PENGARO N
	J U M L A H										3.322.492.184,00	3.558.865.249,00	3.628.865.249,00									

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Pengaron secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Sungai Pinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Pinang dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.549.505.648 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.631.828.048 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 2.1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 4.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- 4.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 5.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 6.1.2. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 6.1.3. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 6.1.4. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 6.1.5. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1.1. Sub kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Padatnya jadwal dan banyaknya permintaan data dan pelaporan dari beberapa instansi dalam waktu yang bersamaan

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Data dan informasi dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pengampu kegiatan hanya sebatas laporan normatif

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Pemenuhan syarat kelengkapan pencairan TPP memerlukan waktu dan melibatkan semua aparatur

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yaitu berbedanya kebutuhan setiap aparatur

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu pagu tidak mencukupi karena ada belanja lain yang lebih mendesak

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Perubahan proses Gu ke LS sehingga di aplikasi tidak terbaca karena pagu sudah dibayar pada Triwulan 1;
- 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu pagu dicairkan secara bertahap sesuai keperluan yang ada;
- 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu Anggaran akan dicairkan secara bertahap sesuai jadwal dan rencana kebutuhan yang telah disusun;
- 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu pagu akan direalisasikan secara bertahap berdasarkan rencana kebutuhan yang telah dirancang;
- 1.5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu masih banyak kegiatan lain yang harus dibayar;

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu ada pagu yang dibayar lebih utama dan ada penjadwalan pengadaan Belanja Modal

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu pagu dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu ada pagu lain yang lebih utama dan penyesuaian pembayaran dari GU ke LS.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan

- 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat yaitu Sumber Daya Masyarakat Kantor Kecamatan yang terbatas dalam hal jumlah

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kurangnya koordinasi dan konsultasi

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan belum mencapai target yang ditentukan, hal ini belum berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.271.964.048								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	74	Nilai	2.271.964.048					0	322.719.649	0	1.027.877.956
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	4.039.600	44		44		0	0	15	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	354.800	4	-	-	-	0	0	1	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	500.000	-	-	-	-	0	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	120.000	-	-	-	-	0	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	500.000	-	-	-	-	0	0	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0	Dokumen	835.000	-	-	-	-	0	0	0	199.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	Laporan	829.800	1	-	2	-	0	0	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	900.000	-	-	-	-	0	0	0	79.800

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.843.220.928	97	-	97	-	10	265.884.075	15	861.735.401
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	1.811.216.128	12	-	12	-	3	258.699.075	6	847.365.401
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	31.130.000	-	-	-	-	3	7.185.000	6	14.370.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	874.800	-	-	-	-	0	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	9.648.800	-	-	50	-	10	2.250.000	15	3.750.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	648.800	-	-	1	-	0	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	9.000.000	1	-	2	-	1	2.250.000	3	3.750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	10.770.000	67	-	67	-	10	0	15	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	770.000	-	-	1	-	0	0	-	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	10.000.000	-	-	-	-	0	0	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	103.175.800		-		-	10	8.390.460	15	39.948.940
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	749.500	-	-	5	-	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	11.750.000	-	-	1	-	0	0	0	5.740.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	Paket	2.163.000	7	-	10	-	-	0	2	430.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25	Paket	3.500.000	12	-	-	-	1	0	25	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	2.763.300	-	-	3	-	1	0	2	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	82.250.000	3	-	6	-	2	8.390.460	4	33.778.940
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	11.070.000	-	-	100	-	10	0	15	4.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	Unit	11.070.000	-	-	4	-	0	0	0	4.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	201.028.920		-		-	10	36.291.614	15	84.997.115
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.750.000	1	-	-	-	0	0	0	500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	23.318.920	3	-	6	-	3	1.791.614	6	3.997.115
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	175.960.000	80	-	80	-	0	34.500.000	0	80.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	89.010.000		-		-	10	9.903.500	15	33.092.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	70.980.000	1	-	3	-	3	9.903.500	6	22.477.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	1	Unit	8.050.000	-	-	-	-	0	0	0	615.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	19.980.000	-	-	-	-	0	0	0	10.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	26.704.400	-	-	-	-	25	0	25	5.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100	persen	3.503.400	-	-	-	-	10	0	15	0

	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	laporan	3.503.400	70	-	70	-	0	0	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	23.201.000	-	-	-	-	10	0	15	5.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	23.201.000	1	-	2	-	1	0	2	5.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	44.723.500	-	-	-	-	25	5.685.500	25	7.735.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	44.723.500	67	-	67	-	10	5.685.500	15	7.735.500
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Kelembagaan Kemasyarakatan	8.038.500	-	-	-	-	1	5.685.500	2	5.685.500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Laporan	36.685.000	-	-	1	-	0	0	1	2.777.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	43.376.500		-		-	0	8.100.000	0	2.050.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	38.603.500		-		-	10	8.100.000	15	14.100.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	30.246.500	-	-	-	-	0	8.100.000	-	8.100.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	2	Laporan	8.357.000	1	-	-	-	1	0	1	6.000.000

		Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	4.773.000	-	-	-	-	10	0	15	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	2	Laporan	4.773.000	1	-	2	-	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	151.339.500		-		-	25	16.350.000	25	31.800.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	151.339.500		-		-	10	16.350.000	15	31.800.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	Orang	59.128.500	-	-	-	-	0	0	0	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	92.211.000	-	-	-	-	0	16.350.000	1	31.800.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	11.397.700		-		-	0	0	0	1.900.000

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	11.397.700	-	-	1	-	10	0	15	1.900.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1.900.000	-	-	-	-	0	0	0	1.900.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1.848.000	-	-	-	-	0	0	0	0
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	2.200.000	-	-	-	-	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.749.700	-	-	-	-	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	3.700.000	-	-	-	-	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 (Enam) Program 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.631.828.048 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Alasan karena ada perbaikan target
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 1. Alasan karena ada perbaikan target
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 1. Alasan karena ada perbaikan target

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - i. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 1. Alasan karena ada perbaikan target

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

[illegible]

ID	NAME	DESCRIPTION	STATUS	DATE	TIME	LOCATION	CATEGORY	SUB-CATEGORY	PRIORITY	ASSIGNED TO	START DATE	END DATE	DUE DATE	COMPLETION DATE	COMPLETION PERCENTAGE	COMMENTS	TAGS	ATTACHMENTS	REMARKS	ACTION
1	Task 1	Task 1 Description	Open	2023-01-01	10:00	Room 101	Category 1	Sub-Category 1	High	John Doe	2023-01-01	2023-01-05	2023-01-05	2023-01-05	100%	Task 1 completed successfully.	Tag 1	Attachment 1	Remark 1	Action 1
2	Task 2	Task 2 Description	In Progress	2023-01-02	11:00	Room 102	Category 2	Sub-Category 2	Medium	Jane Smith	2023-01-02	2023-01-10	2023-01-10	2023-01-10	50%	Task 2 is in progress.	Tag 2	Attachment 2	Remark 2	Action 2
3	Task 3	Task 3 Description	On Hold	2023-01-03	12:00	Room 103	Category 3	Sub-Category 3	Low	Mike Johnson	2023-01-03	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	20%	Task 3 is on hold.	Tag 3	Attachment 3	Remark 3	Action 3
4	Task 4	Task 4 Description	Completed	2023-01-04	13:00	Room 104	Category 4	Sub-Category 4	High	Emily White	2023-01-04	2023-01-08	2023-01-08	2023-01-08	100%	Task 4 completed successfully.	Tag 4	Attachment 4	Remark 4	Action 4
5	Task 5	Task 5 Description	Open	2023-01-05	14:00	Room 105	Category 5	Sub-Category 5	Medium	David Brown	2023-01-05	2023-01-12	2023-01-12	2023-01-12	30%	Task 5 is open.	Tag 5	Attachment 5	Remark 5	Action 5
6	Task 6	Task 6 Description	In Progress	2023-01-06	15:00	Room 106	Category 6	Sub-Category 6	High	Sarah Green	2023-01-06	2023-01-18	2023-01-18	2023-01-18	60%	Task 6 is in progress.	Tag 6	Attachment 6	Remark 6	Action 6
7	Task 7	Task 7 Description	On Hold	2023-01-07	16:00	Room 107	Category 7	Sub-Category 7	Low	Chris Black	2023-01-07	2023-01-20	2023-01-20	2023-01-20	10%	Task 7 is on hold.	Tag 7	Attachment 7	Remark 7	Action 7
8	Task 8	Task 8 Description	Completed	2023-01-08	17:00	Room 108	Category 8	Sub-Category 8	High	Alexander Grey	2023-01-08	2023-01-10	2023-01-10	2023-01-10	100%	Task 8 completed successfully.	Tag 8	Attachment 8	Remark 8	Action 8
9	Task 9	Task 9 Description	Open	2023-01-09	18:00	Room 109	Category 9	Sub-Category 9	Medium	Olivia Blue	2023-01-09	2023-01-22	2023-01-22	2023-01-22	40%	Task 9 is open.	Tag 9	Attachment 9	Remark 9	Action 9
10	Task 10	Task 10 Description	In Progress	2023-01-10	19:00	Room 110	Category 10	Sub-Category 10	High	Noah Yellow	2023-01-10	2023-01-25	2023-01-25	2023-01-25	70%	Task 10 is in progress.	Tag 10	Attachment 10	Remark 10	Action 10

K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	K.6 - K.15										K.16 - K.17		K.18	K.19	K.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K.6 - K.15										K.16 - K.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					K.6	K.7	K.8	K.9	K.10	K.11	K.12	K.13	K.14	K.15	K.16	K.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

[illegible]

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sungai Pinang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Beruntung Baru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Beruntung Baru dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2024 ini:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Beruntung Baru dan juga ada perubahan sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur adanya indikator kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan

penyesuaian seluruh indikator di level sub kegiatan dengan apa yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/522/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor..... (belum diberi bag hukum) tahun 2024 tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- 2) Untuk menyesuaikan indikator pada sub kegiatan yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Beruntung Baru. Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empatbelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran **Rp 2.647.307.514,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).**

dan pada saat perubahan Kecamatan Beruntung Baru tetap melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empatbelas) kegiatan dan 34 (tigapuluh) sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **Rp 2.712.328.614,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).**

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan sub kegiatan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak

dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa subkegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, sub kegiatan Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Sampai dengan triwulan II ini tidak ada target kinerja yang melebihi hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dikarenakan masih menunggu tukang untuk rehab gedung

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Beruntung Baru.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BERUNTUNG BARU TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			90	Nilai	2,647,307,514	0	466,013,743	0	1,376,504,651	0	426,365,065	0	1,170,076,637
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	82	Nilai	2,389,852,814	0	435,860,643	0	1,308,835,551	0	385,797,065	0	1,117,292,137
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	Presentase	5,055,000	0.00%	1,382,500	52.56%	2,290,500	34.38%	700,000	50.00%	2,098,500
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	3,285,000	7	1,230,500	9	2,050,500	7	700,000	8	2,050,500
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	17	Laporan	1,770,000	4	152,000	8	240,000	4	-	8	48,000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Presentase	1,953,117,598	26.83%	355,088,948	54.88%	1,030,954,861	26.83%	326,047,534	52.44%	1,030,858,061
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang	1,912,356,598	34	344,607,948	34	1,010,463,861	13	316,237,534	34	1,010,463,861
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39	Dokumen	40,290,000	9	10,010,000	21	20,020,000	9	9,810,000	20	20,020,000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	471,000	1	471,000	1	471,000	1	-	1	374,200
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	Presentase	363,000	25.00%	160,500	50.00%	205,500	25.00%	-	50.00%	205,500
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	363,000	1	160,500	2	205,500	1	-	2	205,500
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	Presentase	30,700,000	0%	-	75%	30,000,000	0.00%	-	50.00%	1,200,000
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	700,000	0	-	0	-	0	-	0	-
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	orang	30,000,000	0	-	3	30,000,000	0	-	2	1,200,000
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Presentase	106,032,300	17.24%	20,100,300	41.38%	53,470,900	17.24%	18,840,860	41.38%	49,468,940
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	paket	5,476,500	0	-	2	1,277,000	0	-	1	-
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	paket	11,629,400	1	4,327,900	2	7,568,400	1	4,408,900	2	6,256,900
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	1,126,400	1	72,400	2	725,500	1	160,500	2	725,500

18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	87,800,000	3	15,700,000	6	43,900,000	3	14,271,460	6	42,486,540
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	Presentase	66,368,000	30.00%	10,644,000	90.00%	64,452,000	0.00%	-	70.00%	-
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	3	paket	10,644,000	3	10,644,000	3	10,644,000	0	-	3	-
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	paket	55,724,000	0	-	6	53,808,000	0	-	4	-
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Presentase	142,046,916	25.00%	31,159,395	50.00%	75,151,790	25.00%	29,502,880	50.00%	6,575,250
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9,486,916	3	169,395	6	4,571,790	3	328,500	6	555,250
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	132,560,000	3	30,990,000	6	70,580,000	3	29,174,380	6	6,020,000
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	Presentase	86,170,000	66.67%	17,325,000	66.67%	52,310,000	66.67%	10,705,791	42.31%	26,885,886
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	60,980,000	8	15,295,000	8	30,490,000	8	10,065,791	8	26,371,886
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11	unit	7,430,000	11	2,030,000	6	4,060,000	11	640,000	5	514,000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	17,760,000	0	-	1	17760000	0	-	0	-
29	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	Presentase	35,309,000	14.29%	10,716,000	42.86%	24028000	14.29%	6,770,000	42.86%	16,645,000
30	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Presentase	35,309,000	14.29%	10,716,000	42.86%	24028000	14.29%	6,770,000	42.86%	16,645,000
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	35,309,000	1	10,716,000	3	24028000	1	6,770,000	3	16,645,000
32	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	Presentase	33,583,300	25.00%	11,214,300	75.00%	23620300	25.00%	10,302,800	50.00%	16,585,300
33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Presentase	33,583,300	25.00%	11,214,300	75.00%	23620300	25.00%	10,302,800	50.00%	16,585,300
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	LKM	7,162,800	6	7,162,800	6	7162800	6	7,152,800	6	7,152,800
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	26,420,500	0	4,051,500	2	16457500	0	3,150,000	1	9,432,500

36	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%	Presentase	16,125,000	0.00%	3,670,200	33.33%	9634200	0.00%	3,670,200	66.67%	9,634,200
37	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	Presentase	12,968,000	0.00%	3,670,200	33.33%	6477200	0.00%	3,670,200	33.33%	6,477,200
38	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	10,161,000	0	3,670,200	0	3670200	0	3,670,200	0	3,670,200
39	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2,807,000	0	-	1	2807000	0	-	1	2,807,000
40	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	Presentase	3,157,000	0.00%	-	100.00%	3157000	0.00%	-	100.00%	3,157,000
41	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3,157,000	0	-	1	3157000	0	-	1	3,157,000
42	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Presentase	152,331,400	20%	50,229,400	40%	97920400	20.00%	16,665,000	25.00%	54,210,000
43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	Presentase	152,331,400	20.00%	50,229,400	40%	97920400	20.00%	16,665,000	25.00%	54,210,000
44	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90	orang	33,164,000	0	-	0	0	0	-	0	
45	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Laporan	88,012,000	1	43,374,000	2	82965000	1	9,865,000	1	43,210,000
46	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	31,155,400	0	6,855,400	0	14955400	0	6,800,000	0	11,000,000
47	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Presentase	20,106,000	25.00%	4,552,600	50.00%	10386600	25.00%	3,160,000	50.00%	9,920,000
48	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Presentase	20,106,000	25.00%	4,552,600	50.00%	10386600	25.00%	3,160,000	50.00%	9,920,000
49	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	4,634,000	0	-	0	0	0	-	0	-
50	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	3,327,000	1	1,752,000	1	1752000	1	1,660,000	1	1,660,000

51	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	2,777,000	0	-	1	2777000	0	-	1	2,715,000
52	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1,577,000	1	1,577,000	1	1577000	1	1,500,000	1	1,500,000
53	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	Dokumen	4,734,000	0	1,223,600	0	1223600	0	-	0	1,050,000
54	Fasilitasi Penataan Pemanfatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	3,057,000	0	-	1	3057000	0	-	1	2,995,000

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Beruntung Baru. Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

4.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp **Rp 2.712.328.614,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)**. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

4.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD karena adanya Penambahan anggaran untuk Penyusunan Laporan Keuangan Audited
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor , anggaran tersebut dikurangi karena akan dilakukan pergeseran anggaran ke Belanja Modal
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan PKK, Monev, Musdes, dan Kegiatan yang menunjang lainnya

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat pengurangan dan penambahan anggaran , pengurangannya adalah pembelian APAR karena sudah tersedia APAR di Kecamatan, Penambahannya karena adanya pergeseran Belanja dari Ekstracom ke Belanja Modal
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena adanya Penambahan anggaran pembayaran Air dan Pengurangan di pembayaran listrik (karena KWH meter akan diganti, sedang token masih banyak, dari PLN menyarankan untuk menghabiskan token yang ada, sehingga tidak terdapat pengisian token)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena adanya penambahan belanja BBM Mobil Dinas Operasional
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena adanya penambahan anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena adanya tambahan anggaran untuk Fasilitas Lomba di kabupaten
9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan karena adanya Penambahan anggaran untuk kegiatan PILKADA

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

NKO ODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN AOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BERUNTUNG BARU								2.375.333.693,00	2.647.307.514,00	2.712.328.614,00	336.994.921,00						2.564.850.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.375.333.693,00	2.647.307.514,00	2.712.328.614,00	336.994.921,00							2.564.850.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.375.333.693,00	2.647.307.514,00	2.712.328.614,00	336.994.921,00							2.564.850.000,00	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				82 Nilai	82 Nilai	2.072.878.993,00	2.389.852.814,00	2.432.986.914,00	194.271.007,00							2.267.150.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	5.055.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	0,00			-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi	-		5.350.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			1.850.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	40.290.000,00	40.290.000,00	40.290.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			42.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	471.000,00	471.000,00	1.002.000,00	531.000,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

NKO CDE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TA RG ET AK HIR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAMA JU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
							TARGE T 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORI TAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL					D A E R A H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1
			Jumlah Laporan Rekonsilias idan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Lapor an	4 Lapor an	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Menin gkatkan t kelola kepermerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepermerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			400.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU
	7.01.01.2. 05	Administr asi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	30.700.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00			-	4. Menin gkatkan t kelola kepermerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepermerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi	-		31.400.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU

	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.400.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	106.032.300,00	106.032.300,00	145.366.300,00	39.334.000,00			-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		143.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

															keperimertan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan				9 Paket	6 Paket	5.476.500,00	5.476.500,00	4.810.500,00	-666.000,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola keperimertan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola keperimertan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN BERUNTU NG BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.629.400,00	11.629.400,00	11.629.400,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola keperimertan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola keperimertan melalui reformasi dan penyederha naan			12.000.000,00	KECAMATAN BERUNTU NG BARU

															birokrasi					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.126.400,00	1.126.400,00	1.126.400,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	87.800.000,00	87.800.000,00	127.800.000,00	40.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			125.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHU N 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	66.368.000,00	66.368.000,00	63.355.000,00	-3.013.000,00			-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan ahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan ahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		27.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.644.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan ahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

															4. Meningkatkan t kelola keperintah melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi					
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedi akan				7 Unit	7 Unit	55.724.000,00	55.724.000,00	52.711.000,00	-3.013.000,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola keperintah melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola keperintah melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			20.000.000,00	KECAMATA N BERUNTUN G BARU
	7.01.01.2.0 8	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	142.046.916,00	142.046.916,00	133.889.016,00	-8.157.900,00			-	4. Meningkatkan t kelola keperintah melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola keperintah melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi	-		170.000.000,00	KECAMATA N BERUNTUN G BARU

	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyedi aanJasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an				12 Lapor an	12 Lapor an	9.486.916,00	9.486.916,00	1.329.016,00	-8.157.900,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meni ngkatkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi 4. Meni ngkatkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			10.000.000,00	KECAMATA N BERUNTUN G BARU
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyedi aanJasa Pelayan an Umum Kantor yang Disediak an				12 Lapor an	12 Lapor an	132.560.000,00	132.560.000,00	132.560.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meni ngkatkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi 4. Meni ngkatkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederh anaan birokrasi			160.000.000,00	KECAMATA N BERUNTUN G BARU

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	86.170.000,00	86.170.000,00	100.610.000,00	14.440.000,00			-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-			97.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	60.980.000,00	60.980.000,00	70.980.000,00	10.000.000,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi				70.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			7.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NKO CDE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TAR GET AK HIR PE RIO DE RE NST RA OP D	REAL ISASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ AOPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOPO K SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H					
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	20	2 1
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.760.000,00	17.760.000,00	22.200.000,00	4.440.000,00	Kab. Banjar, Beruntu ng Baru, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	4. Meni ngkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meni ngkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			20. 000 .00 0,0 0	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU
	7.01.02	PROGRA M PENYELE NGGARA AN PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenanga n Pemerlu Pelayanan Kesejahter aanSosial dan Kebencana an Kecamatan Yang Terlaksana				100 persen	100 perse n	35.309.000,00	35.309.000,00	35.309.000,00	1.691.000,00							37. 000 .00 0,0 0	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	35.309.000,00	35.309.000,00	35.309.000,00	0,00			-	4. Meni ngkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meni ngkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi	-			37.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	35.309.000,00	35.309.000,00	35.309.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntu ng Baru, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meni ngkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meni ngkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi				37.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi danFasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatdi Kecamatan				100 Perse n	100 Perse n	33.583.300,00	33.583.300,00	48.470.300,00	14.916.700,00								48.500.000,00	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	33.583.300,00	33.583.300,00	48.470.300,00	14.887.000,00			-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		48.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.162.800,00	7.162.800,00	7.162.800,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			8.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	4 Laporan	26.420.500,00	26.420.500,00	41.307.500,00	14.887.000,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

[illegible]

[illegible]

NKO CDE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKA TOR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TAR GET AK HIR PER IOD E REN STR A OP D	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NAS ION AL	D A E R A H					
	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1
			Jumlah Laporan Pelaksa naan Harmoni sasi Hubung an dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyara kat				1 Lapor an	1 Lapor an	2.807.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Menin gkatkan t kelola kepereminta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepereminta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			3.000.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU
	7.01.04.2. 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	3.157.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00			-	4. Menin gkatkan t kelola kepereminta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepereminta han melalui reformasi dan penyederha	-		3.500.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU

																naan birokrasi				
	7.01.04.2. 02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Lapor an	1 Lapor an	3.157.000,00	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			3.500.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU
	7.01.05	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINTA HANUMUM	Persenta se Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum				100 Perse n	100 Perse n	152.331.400,00	152.331.400,00	152.331.400,00	16.168.600,00							168.500.000,00	
	7.01.05.2. 01	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan				90 Nilai	90 Nilai	152.331.400,00	152.331.400,00	152.331.400,00	0,00			-	4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta	-		168.500.000,00	KECAMAT AN BERUNTU NG BARU

																han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik				90 Orang	90 Orang	33.164.000,00	33.164.000,00	33.164.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			38.500.000,00	KECAMATAN BERUNTUN G BARU

			Indonesia																	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	3 Dokumen	88.012.000,00	88.012.000,00	88.012.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.155.400,00	31.155.400,00	31.155.400,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.634.000,00	4.634.000,00	4.634.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola pemerintahan han melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUN G BARU
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	--	--------------------------------------	---	--	--	--	--------------	---------------------------

NKO ODE		URU SAN / BID ANG URU SAN / PRO GRA M/ KEG IAT AN / SUB KEG IAT AN	INDIKA TOR PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKA T DAER AH PENAN GGUN G JAWA B
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORIT AS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASI ONAL	D A E R A H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokum en yang Difasilit asi dalam rangka Admini strasi Tata Pemer intahan Desa				2 Doku men	2 Doku men	3.327.000,00	3.327.000,00	3.327.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntun g Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederhan aan birokrasi 4. Menin gkatkan t kelola kepemerinta han melalui reformasi dan penyederhan aan birokrasi			4.700.000,00	KECAMATA N BERUNTUN G BARU
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.000,00	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.600.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	4.734.000,00	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			4.800.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU

																han melalui reformasi dan penyederhan aan birokrasi				
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desaserta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.057.000,00	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	Kab. Banjar, Beruntung Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Meningkatkan t kelola pemerintahan han melalui reformasi dan penyederhan aan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola pemerintahan han melalui reformasi dan penyederhan aan birokrasi			3.100.000,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
	J U M L A H								2.375.333.693,00	2.647.307.514,00	2.712.328.614,00	336.994.921,00							2.564.850.000,00	

Sumber: Sipd RI 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Beruntung Baru secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Perubahan Renja Tahun 2023, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Martapura Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Martapura Barat dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain

meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 3.126.928.872,-** (*Tiga milyar seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) dan pada saat perubahan Kecamatan Martapura Barat melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **Rp 3.165.627.872,-** (*Tiga milyar seratus enam puluh lima juta delapan enam dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi
 - dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 2 dokumen belum dilaksanakan karena tahapan perubahan APBD dijadwal kan awal bulan Juli tahun 2024
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan target kinerja 2 dokumen belum dilaksanakan karena tahapan perubahan APBD dijadwal kan awal bulan Juli tahun 2024
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 dan target 3 Orang belum dilaksanakan dikarenakan menunggu adanya jadwal pemanggilan peserta Bimtek/ diklat, Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan target kinerja 13 lembaga masyarakat Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan masih 0 %, dikarenakan Pemangku kegiatan sedang izin cuti melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada penunjukan PLH Kasi Pemberdayaan masyarakat
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 13 Laporan dengan Realisasi Fisik sebesar 0% dan Realisasi Keuangan sebesar 0% dikarenakan Pemangku kegiatan sedang izin cuti melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada penunjukan PLH Kasi Pemberdayaan masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 13 lembaga masyarakat dengan Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 0% dikarenakan Pemangku kegiatan sedang izin cuti melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada penunjukan PLH Kasi Pemberdayaan masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Realisasi Fisik dan Keuangan masih 0 %,
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan target kinerja 3 keluarga Realisasi Fisik dan Keuangan masih 0 % karena Pemangku kegiatan sedang izin cuti
 - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga dengan target kinerja 3 keluarga Realisasi Fisik dan Keuangan masih 0 %, dikarenakan pemangku kegiatan sedang izin cuti melaksanakan ibadah haji, dan tidak ada penunjukan PLH Kasi Pemberdayaan masyarakat

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target kinerja 3 laporan Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan masih 0% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan IV

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Realisasi Fisik 23% dan Realisasi Keuangan masih 0 %, kegiatan belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaan pada triwulan III (bulan agustus) pada setiap tahun nya

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada sub kegiatan :
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan target kinerja 13 dokumen dan Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan masih 0 % karena kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa , dengan target kinerja 13 dokumen Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan masih 0 % karena kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan target kinerja 13 dokumen Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan masih 0 % karena kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Realisasi Fisik dan Keuangan masih 0 % dikarenakan adanya penambahan masa kerja untuk seluruh Kepala Desa Se Indonesia

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian pada triwulan II sebesar 50.26% yang terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 13 dokumen sudah tercapai 8 dokumen dan Realisasi Fisik sebesar 58 % dan Realisasi Keuangan sebesar 59,31 %
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 2 dokumen sudah dilaksanakan sesuai target dan Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 2 dokumen dan Realisasi Fisik 100% dan Realisasi Keuangan 100%
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 12 laporan sudah terlaksana 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 52% dan Realisasi Keuangan sebesar 44,13%
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 Laporan dan terpenuhi 3 Laporan Realisasi Fisik sebesar 49% dan Realisasi Keuangan sebesar 48,37%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 66,67% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target 13 orang/bulan dengan Realisasi Fisik sebesar 45% dan Realisasi Keuangan sebesar 48,99%
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target kinerja 4 dokumen dan tercapai 3 dokumen. Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 50%
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan terpenuhi. Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan target kinerja 4 laporan terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan target kinerja 4 laporan terpenuhi 3 laporan Realisasi Fisik sebesar 47% dan Realisasi Keuangan sebesar 67,70%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 65,65% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target kinerja 4 Laporan dan terpenuhi 2 Laporan Realisasi Fisik sebesar 47% dan Realisasi Keuangan sebesar 65,65%
- Kegiatan Administrasi kepegawaian Daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 63% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan target kinerja 4 dokumen terpenuhi 3 dokumen Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 62,50%

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 54,68% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 4 paket terpenuhi 3 paket Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 50%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 4 paket terpenuhi 3 paket Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 61,01%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target kinerja 4 paket terpenuhi 3 paket Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 50,04%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 4 paket dan terpenuhi 3 paket Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 52,64%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 4 paket dan terpenuhi 3 paket Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 50,47%
 - Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target kinerja 12 laporan dan terpenuhi 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 51,92%
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 12 laporan dan terpenuhi 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 93,32%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan target kinerja 10 unit sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja 12 unit sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja 12 laporan sudah terpenuhi 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 53,51%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja 12 laporan sudah terpenuhi 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 53,35%

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 66,78% dengan sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 6 unit dan terpenuhi 6 unit Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 50,94%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 9 unit dan terpenuhi 4 unit Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 49,40%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 1 unit sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUBLIK

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 40,40% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan target kinerja 13 dokumen dan terpenuhi 6 dokumen Realisasi Fisik sebesar 40% dan Realisasi Keuangan sebesar 40%
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 75,52% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 13 laporan dan terpenuhi 5 laporan Realisasi Fisik sebesar 48% dan Realisasi Keuangan sebesar 75,25%
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 50% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan target kinerja 13 laporan dan terpenuhi 6 laporan Realisasi Fisik sebesar 62% dan Realisasi Keuangan sebesar 50%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa, dengan target 13 lembaga Masyarakat sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 50% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 5 laporan terpenuhi 2 laporan Realisasi Fisik sebesar 45% dan Realisasi Keuangan sebesar 50%
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan target kinerja 1 laporan sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, dengan target kinerja 2 dokumen sudah terpenuhi Realisasi Fisik sebesar 56% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target kinerja 12 dokumen terpenuhi 6 dokumen Realisasi Fisik 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 35%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Realisasi Capaian pada Triwulan II sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan target kinerja 13 dokumen terpenuhi 13 dokumen Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan target kinerja 13 dokumen terpenuhi 13 dokumen Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 100%
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target kinerja 13 laporan

terpenuhi 9 laporan Realisasi Fisik sebesar 46% dan Realisasi Keuangan sebesar 63,80%

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Untuk realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan II, **tidak ada**, realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran terpenuhi sesuai target yang direncanakan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi dengan Indikator Utama Kecamatan Martapura Barat yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini masih belum bisa disampaikan mengingat pelaksanaan penilaian indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun (triwulan IV).

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- a. Beberapa kegiatan ada menggunakan jasa narasumber / pembicara, kegiatan terhambat/ tertunda karena menyesuaikan jadwal dan kesedian dari narasumber .
- b. Pada Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga tidak terlaksana karena pengampu kegiatan sedang cuti melaksanakan ibadah haji, dan juga karena tidak adanya penunjukan pejabat pelaksana harian (PLH) kepala seksi pemberdayaan masyarakat
- c. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum bisa di laksanakan karena menyesuaikan dengan kesedian dan jadwal dari Narasumber
- d. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga belum bisa dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan ini dijadwal kan pada setiap bulan agustus

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya Anggaran dan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu:

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Memonitoring pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tiap- tiap pemangku kegiatan hingga sub kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MARTAPURA BARAT TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

N O.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	Rp 7	8	9	10	Rp 11	18	Rp 19	20	Rp 21
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			77	Nilai	Rp 3.126.928.872	NA	Rp 675.610.968	NA	NA	NA	Rp657.802.608	NA	Rp 1.724.679.096
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indeks	Rp 2.790.613.872	NA	Rp 616.270.968	NA	NA	NA	Rp 608.281.509	NA	Rp 1.562.234.096
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	Rp 18.697.000	25	Rp 4.462.000	25	Rp 7.277.000	25 Persen	Rp 5.467.000		Rp 9.277.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	Rp 2.212.000	5 Dokumen	Rp 1.312.000	3 Dokumen	Rp 1.312.000	5 Dokumen	Rp 1.312.000	3 Dokumen	Rp 1.312.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	Dokumen	Rp 2.000.000	2 Dokumen	Rp 1.000.000	2 Dokumen	Rp 1.000.000	2 Dokumen	Rp 1.000.000	2 Dokumen	Rp 2.000.000

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PERUBAHAN RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp 2.000.000	0	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 2.005.000	2 Dokumen	Rp 1.000.000	2 Dokumen	Rp 2.005.000	2 Dokumen	Rp 2.005.000	2 Dokumen	Rp 2.005.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 2.030.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	Rp 3.000.000	3	Rp 450.000	6 Laporan	Rp 1.324.000	3 Laporan	Rp 450.000	6 Laporan	Rp 1.324.000

1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Rp 5.450.000	1	Rp 700.000	2 Lapor an	Rp 2.636.000	1 Laporan	Rp 700.000	2 Lapo ran	Rp 2.636.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 2.028.249.872	0	Rp 508.010.468		995.228.936	0	Rp 508.010.468	0	995.228.936
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	13	Orang/ Bulan	Rp 1.983.109.872	13 Orang / bulan	Rp 495.777.468	13 Orang / bulan	971.554.936	13 Orang/ bulan	Rp 495.777.468	13 Oran g/ bula n	971.554.936
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokume n	Rp 41.640.000	1 Doku men	Rp 10.410.000	2 Doku men	Rp 20.820.000	1 Dokume n	Rp 10.410.000	2 Dok ume n	Rp 20.820.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir	1	Laporan	Rp 1.500.000	1 Lapora n	Rp 1.500.000	1 Lapor an	1.500.000	1 Laporan	Rp 1.500.000	1 Lapo ran	Rp 1.500.000

1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	Rp 2.000.000	1 Laporan	Rp 323.000	2 Laporan	Rp 1.354.000	1	Rp 323.000	2 Laporan	Rp 1.354.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	Rp 1.645.000	0	Rp -		Rp 1.080.000		Rp -	0,00	Rp 1.080.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Rp 1.645.000	1 Laporan	Rp 1.080.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.080.000	1 Laporan	Rp 1.080.000	1 Laporan	Rp 1.080.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	Rp 19.000.000	0	Rp 9.390.000	0,000	Rp 17.520.000		Rp 1.890.000	0,000	Rp 2.520.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	Rp 4.000.000	1 Dokumen	Rp 1.890.000	2 Dokumen	2.520.000	1 Dokumen	Rp 1.890.000	2 Dokumen	2.520.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	Rp 15.000.000	1	Rp 7.500.000	2 Orang	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 115.886.168	25	Rp 31.154.792	0	Rp 71.584.376		Rp 29.524.792		Rp 71.584.376
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	Rp 4.000.000	1 Paket	Rp 800.000	2 Paket	Rp 2.000.000	1 Paket	Rp 800.000	2 Paket	Rp 2.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	Rp 5.130.000	1 Paket	Rp 1.630.000	2 Paket	Rp 3.130.000	1 Paket	Rp 3.130.000	2 Paket	Rp 3.130.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	Rp 3.997.000	1 Paket	Rp 1.300.000	2 Paket	Rp 2.000.000	1 Paket	Rp 1.300.000	2 Paket	Rp 2.000.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	Rp 17.400.000	1 Paket	Rp 4.740.000	2 Paket	Rp 9.160.000	1 Paket	Rp 4.740.000	2 Paket	Rp 9.160.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	Rp 6.420.000	1 Paket	Rp 1.700.000	2 Paket	Rp 3.240.000	1 Paket	Rp 1.700.000	2 Paket	Rp 3.240.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 3.900.000	3 Laporan	Rp 975.000	6 Laporan	Rp 2.025.000	3 Laporan	Rp 975.000	6 Laporan	Rp 2.025.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp 75.039.168	3 Laporan	Rp 20.009.792	6 Laporan	Rp 50.029.376	3 Laporan	Rp 20.009.792	6 Laporan	Rp 50.029.376
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	Rp 126.801.000	0	Rp -	0	Rp 126.801.000	0	Rp -	100 Persen	Rp 126.801.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	10	Unit	Rp 47.116.000	0	Rp -	10 Unit	Rp 47.116.000	0	Rp -	10 Unit	Rp 47.116.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9	Unit	Rp 79.685.000	0	Rp -	9 Unit	Rp 79.685.000	0	Rp -	9 Unit	Rp 79.685.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 201.994.832	25 Persen	Rp 47.548.708	0	Rp 107.802.784		Rp 47.548.708		Rp 107.802.784

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	Rp 25.794.832	3 Laporan	Rp 6.448.708	6 Laporan	Rp 13.802.784	3 Laporan	Rp 6.448.708	6 Laporan	Rp 13.802.784
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	Rp 176.200.000	3 Laporan	Rp 41.100.000	6 Laporan	Rp 94.000.000	3 Laporan	Rp 41.100.000	6 Laporan	Rp 94.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 278.340.000		Rp 15.705.000		Rp 247.960.000		Rp 15.705.000		Rp 247.960.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	Rp 53.380.000	2 Unit	Rp 13.595.000	4 Unit	Rp 27.190.000	2 Unit	Rp 13.595.000	4 Unit	Rp 27.190.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9	Unit	Rp 8.280.000	1 Unit	Rp 2.110.000	3 Unit	Rp 4.090.000	1 Unit	Rp 2.110.000	3 Unit	Rp 4.090.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	Unit	Rp 216.680.000	0	Rp -	1 Unit	Rp 216.680.000	0	Rp -	1 Unit	Rp 216.680.000

	Bangunan Lainnya	dipelihara/Dirhabilitasi											
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	Rp 38.750.000		Rp 11.820.000		Rp 22.925.000		Rp -	0	Rp 22.925.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	Rp 15.000.000		Rp 4.860.000		Rp 6.000.000	0	Rp -	0	Rp 6.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	Dokumen	Rp 15.000.000	3 Dokumen	Rp 4.860.000	3 Dokumen	Rp 6.000.000	3 Dokumen	Rp -	3 Dokumen	Rp 6.000.000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	persen	Rp 20.000.000		Rp 6.960.000		Rp 15.050.000	0	Rp -		Rp 15.050.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	laporan	Rp 20.000.000	2 laporan	Rp 6.960.000	3 Laporan	Rp 15.050.000	2 laporan	Rp -	3 Laporan	Rp 15.050.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	Rp 3.750.000		Rp -	0	Rp 1.875.000	0	Rp -	50,0 0	Rp 1.875.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13	Laporan	Rp 3.750.000	3 Laporan	Rp -	3 Laporan	Rp 1.875.000	3 Laporan	Rp -	3 Laporan	Rp 1.875.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	Rp 87.100.000		Rp 24.000.000		Rp 30.600.000		Rp 24.000.000		Rp 27.500.000

		Masyarakat di Kecamatan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	Rp 41.500.000		Rp 24.000.000		Rp 7.500.000		Rp 24.000.000		Rp 27.500.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	Lembagaan Kemasyarakatan	Rp 24.000.000	13 LK	Rp 24.000.000	0	Rp -	13 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 24.000.000	0	Rp 24.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	13	Laporan	Rp 17.500.000	0	Rp -	1 Laporan	Rp 7.500.000	0	Rp -	0	Rp -
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Persen	Rp 25.400.000	0	Rp -	0	Rp 13.000.000	0	Rp -	0	Rp -

	Penyelenggara aan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	Lembaga aan Kemasyarakatan	Rp 13.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13	Laporan	Rp 12.400.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PersentasePemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	Rp 20.200.000		Rp -		Rp 10.100.000	0	Rp -	0	Rp -
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3	Keluarga	Rp 10.100.000	0	Rp -	3 Keluarga	Rp 10.100.000	0	Rp -	0	Rp -
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3	Keluarga	Rp 10.100.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	Rp 27.500.000		Rp 10.000.000		Rp -		Rp 10.000.000		

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	Rp 22.500.000	0	Rp 10.000.000	0	Rp -	0	Rp 10.000.000	0	Rp -
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	5	Laporan	Rp 20.000.000	2	Rp 10.000.000	0	Rp -	2 Laporan	Rp 10.000.000	0	Rp -
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	Rp 2.500.000	0	Rp -	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	1 Lapo ran	Rp 2.500.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	Rp 5.000.000		Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terfasilitasi	3	Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	Rp 144.875.000		Rp 10.000.000		Rp 85.875.000		Rp 10.000.000		Rp 85.875.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	Rp 144.875.000		Rp 10.000.000		Rp 85.875.000		Rp 10.000.000	59,28	Rp 85.875.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	Orang	Rp 46.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	2	Dokumen	Rp 78.875.000	1	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 78.875.000	1	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 78.875.000

	oleh Instansi Vertikal	oleh Instansi Vertikal											
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	Rp 20.000.000	0	Rp -	6 Dokumen	Rp 7.000.000	0	Rp -	6 Dokumen	Rp 7.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	Rp 38.090.000	0	Rp 3.520.000	0	Rp 25.145.000	0	Rp 3.520.000	0	Rp 15.145.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	Rp 38.090.000	0	Rp 3.520.000	0	Rp 25.145.000	0	Rp 3.520.000	0	Rp 15.145.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13	Dokumen	Rp 5.675.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	13	Dokumen	Rp 5.145.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 5.145.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 5.145.000

	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13	Dokumen	Rp 6.000.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 6.000.000	0	Rp -	13 Dokumen	Rp 6.000.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13	Laporan	Rp 6.270.000	3 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 4.000.000	3 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 4.000.000

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak Ada perubahan untuk jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 18 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp **3.165.627.872,-** (*Tiga milyar serratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas Biasa untuk Kecamatan Martapura Barat
 - Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena adanya penambahan pagu untuk belanja modal PC All In One , belanja Alat pendingin dan belanja Persolan Komputer
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada Penambahan Pagu anggaran Belanja untuk BBM Mobil Dinas Camat
2. Pada Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ada penambahan pagu anggaran

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ada penambahan pagu anggaran belanja Fasilitas Pilkada kabuapten Banjar Tahun 2024
3. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Adanya Perubahan dan Pergeseran Sub Kegiatan yaitu pada sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pagu belanja sub kegiatan ditambahkan ke belanja modal.
 4. Pada Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Adanya Perubahan dan Pergeseran Sub Kegiatan yaitu sub kegiatan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024, pada tahun 2024 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa tidak dilaksanakan karena ada nya penambahan masa kerja Kepala Desa Seluruh Indonesia sebanyak 2 tahun, pagu belanja sub kegiatan ditambahkan ke belanja modal.

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD				100 Persen	100 Persen	18.697.000,00	18.697.000,00	18.697.000,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		22.500.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.212.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.000.000,00

			Jumlah Dokume n Perubah an RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyus unan Dokume n Perubah an RKA- SKPD				2 Dok ume n	2 Dok ume n	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			3.000.000 ,00
7.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokume n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Dokume				2 Dok ume n	2 Dok ume n	2.005.000 ,00	2.005.000 ,00	2.005.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			2.000.000 ,00

			<i>n DPA- SKPD</i>													4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			
	7.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			<i>Jumlah Dokume n Perubah an DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyus unan Dokume n Perubah an DPA- SKPD</i>				2 Dok ume n	2 Dok ume n	2.030.000 ,00	2.030.000 ,00	2.030.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4. Meni ngkatka n t kelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			3.000.000 ,00

	7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD				3 Lap ora n	3 Lap ora n	3.000.000 ,00	3.000.000 ,00	3.000.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4. Meni ngkatka n tkelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4. Meni ngkatka n tkelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			3.000.000 ,00
	7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumla h Lapor an Evalu asi Kinerj a Peran gkat				17 Lapo ran	17 Lapo ran	5.450.000 ,00	5.450.000 ,00	5.450.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI	-	4. Meni ngkatka n tkelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder			5.500.000 ,00

			Daerah											Kel/ Desa	UMU M		hanaan birokrasi 4. Meni ngkatka n tkelola kepemer ntahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------	--	---	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAD OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
															NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.694.997.272,00	2.028.249.872,00	2.028.249.872,00	333.252.600,00			-	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		1.738.000.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.649.857.272,00	1.983.109.872,00	1.983.109.872,00	333.252.600,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semu a	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALO	-	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan			1.700.000.000,00

												Kel/ Desa	KASI UMU M		birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i				
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD																		
		Jumlah Dokum en Penata usahaa n dan Penguji an/Veri fikasi Keuang an SKPD				4 Dok ume n	4 Dok ume n	41.640.0 00,00	41.640.0 00,00	41.640.0 00,00	0,00	Kab. Banj ar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer			33.000.0 00,00	

																intahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semuma Kecamatan, Semuma Kel/Desa	DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyede			3.000.000,00	

																rhanaan birokras i			
7.01.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD																		
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulana n/ Semesteran SKPD</i>				4 Lap ora n	4 Lap ora n	2.000.00 0,00	2.000.00 0,00	2.000.00 0,00	0,00	Kab. Banj ar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede			2.000.00 0,00	

		pada SKPD					4 Laporan	4 Laporan	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			1.500.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			

			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			9.000.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</i>				100 Persen	100 Persen	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		17.500.000,00

																t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			
	7.01.01.2.05.0005																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD ESTRENSTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Banjarr, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola kepermerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			4.500.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Banjarr, Martapura Barat, Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola kepermerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			13.000.000,00

			<i>n</i>													kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			
7.01.01.2. 06	Ad min istr asi Um um Per ang kat Dae rah	<i>Persent ase Admini strasi Umum Perang kat Daerah</i>					100 Perse n	100 Perse n	115.886. 168,00	115.886. 168,00	135.886. 168,00	20.000.000, 00			-	4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi	Meningka tnya Pelenyelen ggaraan Pemerinta han Di Kecamata n		75.550. 000,00
7.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan</i>					4 Pake t	4 Pake t	4.000.00 0,00	4.000.00 0,00	4.000.00 0,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca	DANA TRAN SFER UMU M- DANA	-	4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui			4.500.0 00,00

			Bangunan Kantor yang Disediakan										mata n, Semu a Kel/D esa	ALOK ASI UMU M		reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer intahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			
7.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an				4 Pake t	4 Pake t	5.130.00 0,00	5.130.00 0,00	5.130.00 0,00	0,00	Kab. Banja r, Marta pura Barat, Semu a Kel/D esa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemer intahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer intahan melalui reformasi dan penyeder			7.650.0 00,00

																hanaan birokrasi			
7.01.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumla h Paket Perala tan Ruma h Tangg a yang Disedi akan				4 Pake t	4 Pake t	3.997.00 0,00	3.997.00 0,00	3.997.00 0,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			5.000.0 00,00	
7.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang				4 Pake t	4 Pake t	17.400.0 00,00	17.400.0 00,00	17.400.0 00,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca	DANA TRAN SFER UMU M- DANA	-	4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui			17.400. 000,00	

			Disediakan										mata n, Semu a Kel/D esa	ALOK ASI UMUM		reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK ASI UMUM	-	4.Mening katkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyeder			4.000.000,00

NO	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJ A OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJ A OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsulta siSKPD				12 Lapo ran	12 Lap oran	75.039.1 68,00	75.039.1 68,00	95.039.1 68,00	20.000.000 ,00	Kab. Banjar, Martap ura Barat, Semua Kel/De sa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			33.000.0 00,00

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	126.801.000,00	126.801.000,00	140.105.000,00	13.304.000,00			-	4.Meningkatkan t kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Meningkatnya Pelenyenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		127.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	47.116.000,00	47.116.000,00	47.116.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola keperintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	4.Meningkatkan t kelola		47.000.000,00

															kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			
7.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an				9 Unit	12 Unit	79.685.0 00,00	79.685.0 00,00	92.989.0 00,00	13.304.000 ,00	Kab. Banjar, Martap ura Barat, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			80.000.0 00,00
7.01.01.2. 08	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan	Persentas e Jasa Penunjan gUrusan Pemerinta h Daerah				100 Pers en	100 Pers en	201.994. 832,00	201.994. 832,00	201.994. 832,00	0,00			-	4.Mening katkan t kelola kepemeri ntahan melalui	Meningka tnya Pelenyelen ggaraan Pemerinta han Di		198.400. 000,00

		Pemerintah Daerah													reformasi dan penyederhanaan birokrasi	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Kecamatan		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.794.832,00	25.794.832,00	25.794.832,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyeder		25.800.000,00

																hanaan birokrasi			
7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n</i>				12 Lapo ran	12 Lap oran	176.200. 000,00	176.200. 000,00	176.200. 000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi			172.600. 000,00
7.01.01.2. 09	Pemeli haraan Barang Milik Daera h Penunj	<i>Persentase Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>					100 Pers en	100 Pers en	278.340. 000,00	278.340. 000,00	288.340. 000,00	10.000.000 ,00			-	4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi	Meningka tnya Pelenyelen ggaraan Pemerinta han Di Kecamata		305.000. 000,00

		ang Urusa n Pemer ntahan Daera h	Perangkat daerah												dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi	n		
7.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipeliha ra dan dibayar kan Pajakny a				6 Unit	6 Unit	53.380.0 00,00	53.380.0 00,00	63.380.0 00,00	10.000.000 ,00	Kab. Banjar, Martap ura Barat, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan birokrasi 4.Mening katkan t kelola kepemer ntahan melalui reformasi dan penyeder hanaan		50.000.0 00,00

																birokrasi			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

N C	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TA RG ET AK HI R PE RI OD	REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH	PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANAA N							KELOM POK SASAR AN	PRAKI RAAN MAJU RENC ANA TAHU N 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah	LOKA	SUM	PRIORITAS		TAR	PAGU

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	216.680.000,00	216.680.000,00	216.680.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			250.000.000,00
2	7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Nilai Evaluasi				10077 Persen Nilai	10077 Persen Nilai	38.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	3.000.000,00							41.750.000,00

			Kecamatan																
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		15.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat</i>				13 Dokumen	13 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semu	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A	-	4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			15.000.000,00

			Kecamatan										a Kel/ Desa	ALO KASI UMU M		rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			
	7.01.02.2 .02	Penyelengga raan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencana an Kegiatan Pelayanan kepada Masyaraka t di Kecamatan				100 Perse n	100 Perse n	20.000. 000,00	20.000. 000,00	20.000. 000,00	0,00			-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i	Mening katnya Penyelen ggaraan Pemerin tahan Di Kecama tan		23.000. 000,00

																i			
	7.01.02.2 .02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Lapo ran	13 Lapo ran	20.000. 000,00	20.000. 000,00	20.000. 000,00	0,00	Kab. Banj ar, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			23.000. 000,00

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				100 Persen	100 Persen	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		3.750.000,00
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				13 Laporan	13 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			3.750.000,00

														M		4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Nilai Evaluasi Kecamatan				100 77 Per sen Nilai	100 77 Per sen Nilai	87.100.000,00	87.100.000,00	87.100.000,00	0,00							87.100.000,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana</i>				100 Per sen	100 Per sen	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		41.500.000,00

																t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENDISTRAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAH OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAH OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
															SEBELUM	SESUDAH			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

			Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa				13 Lem baga K emas yara k atan	13 Lem baga K emas yara k atan	24.000. 000,00	24.000. 000,00	24.000. 000,00	0,00	Kab. Banj ar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan birokras i			24.000. 000,00
	7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan				13 Lapor an	13 Lapor an	17.500. 000,00	17.500. 000,00	17.500. 000,00	0,00	Kab. Banj ar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU	-	4. Men ingkatka n t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyede rhanaan			17.500. 000,00

														M		birokrasi 4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100 Person	100 Person	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		25.400.000,00

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				2 Laporan	2 Laporan	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			12.400.000,00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberday</i>				100 Persen	100 Persen	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan t kelola kepemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan		20.200.000,00

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4.Meningka t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi		2.500.000,00
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi</i>	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			4.Meningka t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4.Meningka t kelola pemerintahan	Meningkat nya Penyelengg araan Pemerinta han Di Kecamatan	2.500.000,00

												melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	4.Meningka tkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4.Meningka tkan t kelola kepemerint ahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi		2.500.000,00
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Nilai	100 77 Perse n Nilai	100 77 Perse n Nilai	144.875.000,00	144.875.000,00	135.975.000,00	8.000.000,00					152.875.000,00

			Evaluasi Kecamatan											
	7.01.05.2.01	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Perse n	100 Perse n	144.875.00 0,00	144.875.00 0,00	135.975.00 0,00	- 8.900.00 0,00			4. Meningkatkan t kelola kepemrint ahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola kepemrint ahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi	Meningkat nya Penyelengg araan Pemerinta han Di Kecamatan	152.875.00 0,00
	7.01.05.2.01. 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	150 Orang	150 Orang	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	4. Meningkatkan kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		46.000.000,00
--	--	--	--	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	------	--	---------------------------------------	--	--	---------------

7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal												
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	2 Dokumen	78.875.000,00	78.875.000,00	78.875.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		78.875.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.100.000,00	- 8.900.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	4. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi		28.000.000,00

												naan birokrasi 4. Meningkatkan t kelola kepemrint ahan melalui reformasi dan penyederha naan birokrasi		
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah an desa Nilai Evaluasi Kecamatan	100 77 Perse n Nilai	100 77 Perse n Nilai	38.090.00 0,00	38.090.00 0,00	32.415.00 0,00	500.000, 00					38.590.00 0,00

N C	KODE	URU SAN / BID ANG URU SAN / PRO GRA M / KEG IAT	INDIKA TOR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TA RG ET AK HIR PE RIO DE RE NST RA OP D	REAL ISASI CAPA IAN REN JA OPD TAH UN 2022	PRAK IRAA N CAPAI AN TARG ET RENJ AOPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGE T 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA		PRIORITAS		TA RG ET
							SEB ELU M	SES UDA H	RKP D 202 4	APBD 2024	RKPD PERUBAH AN 2024				NASI ONAL	DAERAH		

1	2	AN / SUB KEG IAT AN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.06.2 .01	Fasilit asi, Rekom endasi dan Koordi nasi Pembi naan dan Penga wasan Pemer intah an Desa	<i>Persenta se Kegiatan Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordina si Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa yang Terlaksa na</i>				100 Pers en	100 Pers en	38.090.00 0,00	38.090.00 0,00	32.415.00 0,00	- 5.675.000,0 0			-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi	Meningk atnya Penyelen ggaraan Pemerin tahan Di Kecamat an		38.590.00 0,00
	7.01.06.2 .01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Des																	
			<i>Jumla h Dokum en yang Difasili tasi dalam</i>				13 Dok ume n	13 Dok ume n	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n,	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan			5.000.000 ,00

			<i>rangka Admini strasi Tata Peme ri ntahan Desa</i>										Semu a Kel/ Desa	ALOK ASI UMU M		penyeder hanaan birokrasi 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			
	7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa</i>				13 Dok ume n	13 Dok ume n	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			5.000.000 ,00

	7.01.06.2 .01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	5.000.000 ,00	0,00	Kab. Banjar, Semuma Kecamatan, Semuma Kel/ Desa	DAN A TRANSFER UMU M-DAN A ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			5.500.000 ,00
	7.01.06.2 .01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				13 Dokumen	0 Dokumen	5.675.000 ,00	5.675.000 ,00	0,00	- 5.675.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat , Semuma Kel/D esa	DAN A TRANSFER UMU M-DAN A ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola kepemrintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Menin			5.675.000 ,00

																gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			
7.01.06.2 .01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokume n Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas dan Fungsi Badan Permusy awarata n Desa				13 Dok ume n	13 Dok ume n	5.145.000 ,00	5.145.000 ,00	5.145.000 ,00	0,00	Kab. Banja r, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/ Desa	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	-	4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi 4.Menin gkatkan t kelola kepemer intahan melalui reformas i dan penyeder hanaan birokrasi			5.145.000 ,00
7.01.06.2 .01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				13 Dokumen	13 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Banjara Kematana, Semu Kel/ Desa	DAN A TRANSFER M-DAN A ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			6.000.000,00
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				13 Laporan	13 Laporan	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	Kab. Banjara Kematana, Semu Kel/ Desa	DAN A TRANSFER M-DAN A ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan t kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi 4.Meningkatkan t kelola			6.270.000,00

															keperintah melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			
	J U M L A H								2.842.426.272,00	3.126.928.872,00	3.165.627.872,00	323.201.600,00						2.888.515.000,00

Sumber data: SIPD RI- Perubahan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

6.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

6.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Martapura Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Sambung Makmur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sambung Makmur dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun

2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.196.433.402 (II milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus II rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Sambung Makmur tidak mengalami perubahan pagu (tetap seperti sebelumnya) dengan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.196.433.402 (II milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus II rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar 1.224.000 dengan realisasi sebesar 597.000 atau 48,77 %
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD dengan rencana anggaran 13.090.000 dengan realisasi sebesar 11.220.000 atau 50,00% dengan total anggaran sebesar 22.440.000,00 berarti telah mencapai target 50% dari total anggaran.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan rencana anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 5.250.00 dan realisasi sebesar

4.500.000 atau 50,00%. Berarti telah mencapai target yang diinginkan sebesar 50% dari total anggaran tahun 2024 sebesar 9.000.000,00.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan rencana anggaran sampai triwulan II sebesar 20.000.000 dan realisasi sebesar 10.086.810 atau 50,43% tercapainya target yang diinginkan dari anggaran sebesar 20.000.000,00 pada tahun 2024.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Dari Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan rencana anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 1.153.885.183 dengan realisasi sebesar 1.067.979.026 atau 55,88% capaian target telah melampaui dari target sebesar 50% dengan total anggaran untuk tahun 2024 sebesar 1.911.328.602,00.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II, dengan rencana anggaran sebesar 1932.722.445 dengan realisasi sebesar 890.814.044 atau dengan capaian sebesar 57,17% dari total anggaran tahun 2024 sebesar 1.558.125.702,00
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan II dengan target dan rencana anggaran sebesar 1.600.000 dan realisasi sebesar 1.703.000 atau capaian sebesar 55,16% dari total anggaran tahun 2024 sebesar 3.087.500,00.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan II rencana anggaran sebesar 37.788.338 dengan realisasi sebesar 39.849.000 atau dengan capaian sebesar 61,51% dari total anggaran tahun 2024 sebesar 64.780.000,00
- Begitupun Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sampai dengan triwulan II capaian rencana anggaran sebesar 12.432.000 dan realisasi sebesar 12.432.000 atau 100% total keseluruhan anggaran tahun 2024.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Dari Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, sampai dengan triwulan II rencana anggaran sebesar Rp. 96.335.800,- dengan relisasi sebesar Rp. 95.145.800,- atau dengan capaian sebesar 98,76% dari total anggaran pada sub kegiatan tersebut.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, sampai dengan triwulan II rencana anggaran sebesar Rp. 8.439.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.389.000,- atau dengan capaian sebesar 96,84% dari total anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.663.000,00.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Realisasi kegiatan yang melampaui target adalah Kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, sampai dengan triwulan II perencanaan anggaran sebesar Rp. 735.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 700.000,- atau Tingkat capaian sebesar 95,24% dari total pagu anggaran pada sub kegiatan tersebut.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Adapun realisasi yang melampaui targer pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan capaian 100% sampai dengan triwulan II dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dari totak anggaran pada sub kegiatan tersebut.
- Begitu juga pasa Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, realisasi capaiam sampai dengan triwulan II sebesar 100% dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- dati total anggaran pada sub kegitan tersebut.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Sambung Makmur

sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

- Beberapa kegiatan terhambat dikarenakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV seperti pada Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Adapun kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan diikuti.
- Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat belum terlaksanakan dikarenakan penundaan kegiatan MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Banjar.
- Pada Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal dikarenakan kegiatan belum terencanakan dengan baik.
- Pada Sub Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa belum terlaksana dikarenakan Kasi Pemerintahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut melaksanakan jadwal PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sehingga pelaksanaan diundur pada triwulan III.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa belum terlaksana dikarenakan Kasi Pemerintahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut melaksanakan jadwal PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sehingga pelaksanaan diundur pada triwulan III.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu aktifitas rapat koordinasi BPD belum terlaksana dikarenakan Kasi Pemerintahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut melaksanakan jadwal PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sehingga pelaksanaan diundur pada triwulan III.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi, dan fasilitasi sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan sangat baik
- Koordinasi internal (antar seksi terjalin dengan baik)
- Koordinasi dan kerjasama lintas sektor terjalin dengan baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Dukungan dari masyarakat dan aparat desa dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan
- dll

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sambung Makmur

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat.
- b. Melakukan evaluasi dan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target.
- c. Lebih meningkatkan koordinasi yang baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah desa yang terjalin dengan baik.
- e. Perlu adanya penambahan anggaran yang lebih banyak agar pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi-seksi bisa lebih baik dan optimal
- f. Dll.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.196.433.402								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	1.911.328.602								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	4.304.000								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	3.080.000	5	1.540.000	-	3.080.000	5	-	5	441.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	1.224.000	2	612.000	-	1.224.000	2	-	3	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.581.310.702								

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	120	Orang/Bulan	1.558.125.702	30	289.414.227	60	816.739.938	30	175.708.887	60	778.579.012
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	22.440.000	-	5.610.000	1	11.220.000	-	3.740.000	1	9.350.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir	1	Laporan	645.000	1	645.000	-	645.000	-	-	1	180.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	9.000.000								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	9.000.000	3	2.250.000	6	4.500.000	2	1.500.000	5	3.750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	20.551.400								
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring	3	Dokumen	551.400	1	551.400	-	-	-	-	-	-

		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	-	-	1	750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	91.057.500								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	Paket	11.540.000	-	5.770.000	-	5.770.000	-	224.000	10	2.388.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	3.087.500	-	800.000	-	1.600.000	3	490.000	6	1.525.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	5.000.000	-	1.200.000	-	2.400.000	-	-	1	1.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	71.430.000	3	20.250.000	3	40.500.000	3	980.000	6	42.478.576
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	100	Persen	22.511.000								

		Pemerintah Daerah											
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Unit	7.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	Unit	14.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100.812.000								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	100.812.000	3	23.628.000	6	52.556.000	3	12.122.070	6	36.789.420
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	81.882.000								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	64.780.000	1	16.195.000	3	32.390.000	1	9.930.000	4	31.532,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	4	Unit	4.670.000	-	710.000		-	-	-	-	-

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	12.432.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	106.185.800								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	9.850.000								
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Laporan	9.850.000	1	400.000	3	4.925.000	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	96.335.800								

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	96.335.800	-	40.036.000	4	96.335.000	-	-	2	40.167.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	56.763.000								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	56.763.000								
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	Kelembagaan Kemasyarakatan	8.663.000	4	8.439.000	9	8.439.000	4	8.116.000	9	8.389.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	6	Laporan	48.100.000	2	11.000.000	2	22.635.000	-	-	2	12.874.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman	100	Persen	53.035.000								

		dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	52.300.000								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	8	Laporan	50.800.000	2	19.100.000	-	26.000.000	2	14.800.000	4	18.200.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1.500.000	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	735.000								

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	735.000	1	735.000	-	-	-	-	1	700.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	40.500.000								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	40.500.000								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	40	Orang	29.200.000	-	-	-	6.852.500	-	-	-	-

	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penanganan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	2	Laporan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	10.300.000	-	-	-	10.300.000	-	-	-	-

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	28.621.000								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	28.621.000								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	6.235.000		550.000	-	1.650.000		-	-	-
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	5.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa	1	Dokumen	5.200.000	-	-	1	5.200.000	-	-	-	-
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan	2	Dokumen	5.000.000	2	5.000.000	-	-	-	-	2	5.000.000

		Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan											
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	-		-	1	1.500.000	-	-	1	1.500.000
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	Dokumen	4.936.000	-	-	1	4.936.000	-	-	-	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Perubahan Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.312.544.401 (*Dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus satu rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adanya penambahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor karena adanya penambahan jaringan instalasi Listrik, penambahan daya Listrik dari 4000 kwh menjadi 6500 kwh dan Pemasangan kwh baru untuk gedung aula kecamatan.
2. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, adanya penambahan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kabupaten.
3. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alasannya akan melakukan penambahan pembelian AC Split untuk kenyamanan dalam bekerja.

4. Adanya Perubahan Pagu pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan adanya penambahan belanja BBM untuk Mobil Dinas Operasional Kecamatan.
5. Perubahan penambahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa perbaikan Komputer, service AC Split dan pemeliharaan personal komputer lainnya.
6. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dikarenakan akan dilakukan penggantian pintu kayu pada ruangan kerja menjadi pintu kaca rangka aluminium.
7. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dikarenakan adanya penambahan uang saku tim monitoring pilkada serentak.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusann/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluarag Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)				Tolak Ukur			Target							
						Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah			
7	0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													2.203.241.392						
7	0	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.203.241.392						
7	0	1	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													1.854.243.334						
7	0	1	1															4.050.000						
7	0	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur		76 Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	77	77	3.080.000	3.080.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI)	86,63	2.728.080		
7	0	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur		76 Nilai	6 Laporan	5 Laporan	77	77	1.224.000	1.224.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI)	86,63	1.321.920		
7	0	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1.479.884.690					
7	0	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	120 Orang/ Bulan	11 Orang/ Bulan	77	77	1.558.125.702	1.558.125.702	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	1.454.956.490		
7	0	1	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	77	77	22.400.000	22.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	24.235.200		
7	0	1	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	77	77	645.000	645.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	693.000		
7	0	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													9.000.000	9.000.000				
7	0	1	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	77	77	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	9.720.000		
7	0	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													20.511.800	20.511.800				21.920.760
7	0	1	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	3 Dokumen	4 Dokumen	77	77	551.400	551.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	320.760		
7	0	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Orang	2 Orang	77	77	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	21.600.000		

Kode	Urusann/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024												Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)		
				Program		Keluarag Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Tolak Ukur			Target				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum		Sesudah						
701012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												91.507.500	149.307.500				
701012.060001	Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	-	2 Paket	77	77	-	18.250.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	18.250.000
701012.060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	35 Paket	1 Paket	77	77	11.540.000	11.540.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	13.756.932
701012.060005	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	12 Paket	12 Paket	77	77	3.087.500	3.087.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	3.058.560
701012.060008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Laporan	12 Laporan	77	77	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	5.400.000
701012.060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	77	77	71.430.000	111.430.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	75.600.000
701012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												22.551.000	44.742.000				25.562.872
701012.070001	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Mebel yang disediakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	5 Unit	2 Unit	77	77	7.839.000	7.839.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	8.998.912
701012.070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	3 Unit	6 Unit	77	77	14.672.000	36.903.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	16.563.960
701012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												100.812.000	100.812.000				106.395.120
701012.080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	36 Laporan	12 Laporan	77	77	100.812.000	100.812.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	106.395.120
701012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												81.882.000	116.511.999				110.644.400
701012.090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	8 Unit	9 Unit	77	77	64.780.000	74.780.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	89.962.400
701012.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	6 unit	15 unit	77	77	4.670.000	19.130.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	7.894.800
701012.090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Unit	2 Unit	77	77	12.432.000	22.601.999	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,63	12.787.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)			
				Program		Keluarag Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Tolak Ukur	Target					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
70102			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															120.263.508	
70102	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															15.768.000	
70102	2.020003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	10 Laporan	2 Laporan	77	77	9.850.000	9.850.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	86,63	15.768.000	
70102	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															104.495.508	
70102	2.040003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	77	77	96.335.600	96.335.600	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	86,63	104.495.508	
70103			PROGRM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															56.650.320	
70103	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															56.650.320	
70103	2.010001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	77	77	8.663.000	8.663.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	86,63	9.022.320	
		0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	6 Laporan	4 Laporan	77	77	48.100.000	48.100.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	86,63	47.628.000
70104			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															95.381.350	
70104	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															94.587.550	
70104	2.010001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	8 Laporan	15 Laporan	77	77	50.800.000	51.800.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	86,63	92.934.000	
70104	2.010002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	77	77	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	86,63	1.653.550	

Kode	Urusann/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluarag Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)				Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah					
70102.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	793.800
70102.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	77	77	735.000	735.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	86,63	793.800
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	47.306.000
70105	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	47.306.000
70105.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	40 Orang	45 Orang	77	77	29.200.000	29.200.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	86,63	35.316.000
70105.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Laporan	1 Laporan	77	77	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	86,63	1.080.000
70105.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	77	77	10.300.000	10.300.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Umum	86,63	11.000.000
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	29.306.880
70106	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	29.306.880
70106.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	77	77	6.235.000	6.235.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	6.750.000

Kode						Urusann/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
										Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana PaguIndikatif (Rp.)	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluarag Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)				Tolak Ukur	Target		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah						
7	0	1	0	6	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	77	77	5.750.000	5.750.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	6.210.000
7	0	1	0	6	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	77	77	5.200.000	5.200.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	5.616.000
7	0	1	0	6	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	77	77	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	3.780.000
7	0	1	0	6	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	77	77	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	1.620.000
7	0	1	0	6	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Nilai Evaluasi Kecamatan	Kab. Banjar, Kec. Sambung Makmur	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	77	77	4.936.000	4.936.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,63	5.330.880

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sambung Makmur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Martapura Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Martapura Timur dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

(Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Timur tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar melaksanakan enam program, lima belas kegiatan dan empat puluh enam sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.266.777.652,- (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Martapura Timur berubah menjadi enam program, lima belas kegiatan dan empat puluh lima sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 3.291.177.652 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Pada sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja.
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Pada sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- Kegiatan administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Pada sub kegiatan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di

desa dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dan sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat.
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Pada sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia dan sub kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Sedangkan program/kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Martapura Timur

sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan pada triwulan keempat.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan dilaksanakan pada Triwulan III di awal Bulan JULI.
- Pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu karena masih Menunggu JUKNIS dari Kabupaten dan diperpanjang periode jabatan kepala desa

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

Karena tidak ada target yang melebihi target, maka tidak ada faktor penyebabnya.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Martapura Timur

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MARTAPURA TIMUR TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satuan	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					3.266.777. 652								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	77	Nilai	3.013.919. 252								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Presentase Dokumen Perencanaan , Penganggara	100	persen	2.940.000								

	Perangkat Daerah	n dan Evaluasi SKPD											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	559.000	4	259.000	1	124.000	4	259.000	1	124.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		Perubahan RKA-SKPD											
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4	Laporan	436.000	1	54.000	1	94.000	1	54.000	1	94.000

	Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	365.000	1	365.000	0	0	0	0	1	365.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.318.376.880								

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	17	Orang/Bulan	2.276.686.880	51	429.052.110	51	813.102.435	51	406.363.284	51	718.771.928
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	41.340.000	3	10.335.000	3	10.335.000	3	10.335.000	3	10.335.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	350.000	1	350.000	0	0	0	0	1	350.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	300.000								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	200.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	100.000	0	0	0	0	0	00	0	0
	Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	Persen	20.360.000								

	Perangkat Daerah	yang terpenuhi											
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	109.680.800								
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	4	Paket	1.500.000	1	703.500	1	291.000	1	703.500	1	291.000

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	14.278.000	3	4.532.500	3	3.642.500	3	4.532.500	3	3.642.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	1.500.000	1	751.000	1	233.000	1	751.000	1	233.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	Paket	5.000.000	2	2.016.000	2	848.000	2	2.016.000	2	848.000
	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang	2	Paket	502.800	0	114.000	1	94.000	0	114.000	1	94.000

	dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan											
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	1.500.000	1	375.000	2	375.000	1	375.000	2	375.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	85.400.000	3	35.750.000	4	30.750.000	3	9.079.100	4	11.354.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	263.454.000								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	14	Unit	4.760.000	14	4.760.000	-	-	10	4.000.000-	-	-

		yang disediakan											
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	18	Unit	108.694.000	9	67.883.000	5	18.411.000	9	47.883.000	5	9.685.000
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	150.000.000	2	150.000.000	-	-	1	100.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	236.138.072								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	1.500.000	1	300.000	2	390.000	1	300.000	2-	390.00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	26.948.072	3	6.734.400	3	6.734.400	3	2.990.704	3	3.030.135
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	207.690.000	3	48.426.000	3	62.385.000	3	42.589.020	3	55.178.040
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	62.669.500								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	7	Unit	44.719.500	2	11.179,500	2	11.160.000	2	4.000.000	2	5.000.000

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	4	Unit	5.950.000	1	1.160.000	1	1.420.000	1	330.000	1	350.000
	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Di rehabilitasi	2	Unit	12.000.000	0	0	2	12.000.000	0	0	2	12.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	100	Persen	114.721.200								

	PELAYANAN PUBLIK	n Sosial dan Kebencanaa n Kecamatan Yang Terlaks ana											
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	12.979.200								
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	4	laporan	12.979.200	1	3.657.200	1	3.622.000	1	3.567.200	1	3.622.000

		di Wilayah Kecamatan											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	101.742.000								
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	101.742.000	0	0	4	95.372.000	0	0	4	95.372.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	30.905.000								

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	30.905.000								
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Kelembagaan Kemasyarakatan	15.551.000	4	15.551.000	0	0	4	15.551.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Laporan	15.354.000	-	3.950.000	1	5.854.000	-	3.950.000	1	5.854.000

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengga raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	30.402.800								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	27.128.900								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4	Laporan	23.892.900	2	14.154. 900	1	148.000	2	14.154.9 00	1	148.000

	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan											
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	3.236.000	0	0	1	1.736.000	0	0	1	1.736.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Persentase Koordinasi Penerapan	100	Persen	3.273.900								

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi											
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	2	Laporan	3.273.900	-	373.000	1	1.800.000	-	373.000	1	1.800.000

5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum	100	Persen	80.450.000								
	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	47.223.000								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n	250	Orang	22.446.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintaha	4	Dokumen	24.777.000	1	5.577.000	1	6.900.000	0	0	1	5.577.000

	Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	n yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal											
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	29.606.400								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	29.606.400								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi	1	Dokumen	2.433.600	0	0	0	0	0	0	0	0

	dan Peraturan Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	5.408.000	0	0	1	2.708.000	0	0	1	2.708.000
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3.244.800	1	3.244.800	0	0	0	0	0	0

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	Dokumen	9.734.400	1	1.984.400	2	3.100.000	1	3.734.400	2	3.100.000
	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	Dokumen	1.622.400	1	1.622.400	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	1	Dokumen	5.000.000	-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000
	Fasilitasi penataan, pemanfaatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi	1	Dokumen	2.163.200	-	-	1	2.163.200	-	-	1	2.163.200

	dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	penataan, pemanfaatan dan pendayaguna an ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Martapura Timur Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada enam Program Lima belas Kegiatan dan empat puluh lima Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.291.177.652,00 (Tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum di Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adanya penambahan pagu dengan alasan pagu anggaran tidak mencukupi.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Pengadaan mebel Adanya Pengurangan pagu dengan alasan pagu tersebut tidak sesuai satuan harganya di pasaran.
3. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Adanya Pengurangan pagu pada belanja bahan-bahan bangunan kontruksi dan belanja paket 1 (pembuatan pagar)

dengan alasan paket pekerjaan telah dianggarkan di dinas PUPR Kab Banjar.

4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan. Ada penambahan belanja pajak kendaraan dinas karena belum teranggarkan.
5. Pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada sub kegiatan ini pagunya dihapus dikarenakan tidak ada jadwal pemilihan kepala desa serentak.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
																			Nasio nal		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Martapura Timur						3.002.719.122,00	3.266.777.652,00	3.291.177.652,00						3.020.205.770,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.002.719.122,00	3.266.777.652,00	3.291.177.652,00						3.020.205.770,00			
	7	01				KECAMATAN						3.002.719.122,00	3.266.777.652,00	3.291.177.652,00						3.020.205.770,00			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern SKPD				77 Indeks	77 Indeks	2.674.860.722,00	3.013.919.252,00	3.039.941.652,00							2.672.148.270,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100 %	100 %	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintah an melalui reformasi dan penyederhana an birokrasi	-		3.010.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	559.000,00	559.000,00	559.000,00	Kab. Banjar, Martapur a Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola kepemerintah an melalui reformasi dan penyederhana an birokrasi			600.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR

	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	395.000,00	395.000,00	395.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	395.000,00	395.000,00	395.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	395.000,00	395.000,00	395.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	395.000,00	395.000,00	395.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	436.000,00	436.000,00	436.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			440.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

										1 Laporan	1 Laporan	365.000,00	365.000,00	365.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			370.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.979.318.350,00	2.318.376.880,00	2.318.376.880,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		1.986.947.470,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.937.628.350,00	2.276.686.880,00	2.276.686.880,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.940.907.470,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			45.640.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	-			100 %	100 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		400.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	4 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			250.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			150.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	-				100 %	100 %	20.360.000,00	20.360.000,00	20.360.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		30.380.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			380.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	109.680.800,00	109.680.800,00	109.680.800,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		90.799.800,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.550.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.278.000,00	14.278.000,00	14.278.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhana an birokrasi			1.600.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhana an birokrasi			5.100.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	502.800,00	502.800,00	502.800,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhana an birokrasi			600.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.600.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	85.400.000,00	85.400.000,00	107.900.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			65.349.800,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	-			100 %	100 %	263.454.000,00	263.454.000,00	263.454.000,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		263.511.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			0,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	14 Unit	4.760.000,00	4.760.000,00	4.040.922,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			4.800.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	108.694.000,00	108.694.000,00	203.956.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			108.711.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	150.000.000,0	150.000.000,0	46.976.878,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	236.138.072,00	236.138.072,00	236.138.072,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		233.600.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			1.550.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.948.072,00	26.948.072,00	26.948.072,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.690.000,00	207.690.000,00	207.690.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			205.050.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	-			100 %	100 %	62.669.500,00	62.669.500,00	62.669.500,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		63.500.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	7 Unit	44.719.500,00	44.719.500,00	56.722.100,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			12.500.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana					100 %	100 %	114.721.200,00	114.721.200,00	114.721.200,00							115.221.000,00	
	7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	12.979.200,00	12.979.200,00	12.979.200,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-		13.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	02	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	12.979.200,00	12.979.200,00	12.979.200,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR

[illegible]

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas di kecamatan	-				100 %	100 %	102.128.900,00	27.128.900,00	27.128.900,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-			102.132.900,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	98.892.900,00	23.892.900,00	23.892.900,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					98.892.900,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi					3.240.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	-			100 %	100 %	3.273.900,00	3.273.900,00	3.273.900,00			-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi	-				3.300.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	7	01	00	2.01	0015	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.163.200,00	2.163.200,00	2.163.200,00	Kab. Banjar, Martapura Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi			2.163.200,00	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
	JUMLAH												3.002.719.122,00	3.266.777.652,00	3.291.177.652,00						3.020.205.770,00		

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Martapura Timur Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Martapura Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Paramasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Paramasan dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

(Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Paramasan tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.338.226.377,00,- (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) dan pada saat perubahan Kecamatan Paramasan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 2.421.484.167,00,- (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Realiasi Program/Kegiatan Pada Kecamatan Paramasan tidak ada yang melebihi Target sampai dengan Triwulan II.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Paramasan sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD baru terlaksana pada akhir Tahun
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal undangan BIMTEK dari Mitra
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Karena Kesulitan mencari Penyedia yang ada terdaftar di e-catalog serta Harga barang yang berubah dari pagu yang dianggarkan
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena kesulitan mencari pengada Pekerjaan Pemeliharaan lokal dan harus mencari Pengada Pekerjaan Pemeliharaan dari Luar Kecamatan Paramasan
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Karena banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan menunggu SK Bupati Tahun 2024 terkait Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Karena banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di

kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.

- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena untuk Tahun 2024 di Kecamatan Paramasan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Karena banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karena banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Manajemen Aplikasi yang baik dan mempertimbangkan besaran resiko Penggunaan Aplikasi yang tidak stabil.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Paramasan

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Melaksanakan rincian aktivitas sesuai dengan rencana anggaran kas dan mengupayakan serta segera merealisasikan rincian aktivitas yang tertunda.
- d. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan.
- e. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan Paramasan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PARAMSAN TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	80	Nilai	2.088.233.577	0	465.475.364	0	1.141.553.104		237.331.263		991.143.048
	Perencanaan,Pengan ggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	8.189.300	25		25		25	0	25	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	4.549.300	7	1.922.500	8	3.639.300	7	0	8	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Laporan	3.640.000	6	1.015.000	11	2.065.000	6	0	11	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100	Persen	1.693.491.279	25		25		25	190.778.963	25	849.134.652

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
		Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	7	Orang/Bulan	1.653.796.279	7	319.388.465	7	878.684.206	7	185.578.963	7	832.784.652
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	39.240.000	0	9.810.000	0	19.620.000	0	5.200.000	0	16.350.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat	100	Persen	1.820.000	25		25		25	0	25	455.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
		Daerahyang Tersusun											
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.820.000	0	455.000	0	910.000	0		0	455.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	5.910.000	0		0		0	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	910.000	1	0	1	455.000	1	0	1	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Orang	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	118.703.500	25		25		25	8.160.460	25	48.771.956
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	2.712.500	1	1.702.000	1	2.712.500	1	0	1	1.702.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	3.497.500	1	2.997.500	1	2.997.500	1	0	1	1.709.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	0	1	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	6.500.000	1	3.309.500	1	5.979.500	1	0	1	3.259.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	3.993.500	1	1.509.000	1	2.738.000	1	0	1	805.500

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	100.000.000	1	35.250.000	1	60.500.000	1	8.160.460	1	41.296.456
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	14.860.700	0		25		0	0	25	4.800.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3	Unit	9.975.000	0	9.975.000	0	9.975.000	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	4.885.700	0	4.885.700	1	4.885.700	1	0	1	4.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	142.449.798	25		25		25	26.931.840	25	54.776.440
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	0	1.000.000	1	1.000.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	6.119.798	1	1.529.949	1	3.059.898	1	0	1	505.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	133.830.000	1	31.380.000	1	71.210.000	1	26.931.840	1	53.271.440
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	102.809.000	25		25		25	11.460.000	25	33.205.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	76.360.000	1	19.090.000	2	38.180.000	1	11.460.000	2	30.550.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	12	Unit	6.450.000	3	4.260.000	6	6.450.000	3	0	6	2.655.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	19.999.999	0	8.995.750	0	17.991.500	0	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan YangTerlaksana	100	Persen	30.592.800	25	26.380.800	25	30.592.800	25	0	25	0
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	persen	8.400.000	25		25		25	0	25	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2	laporan	8.400.000	0	4.188.000	1	8.400.000	0	0	1	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
		Tingkat Kecamatan											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Kagiatan Urusan Pemerintah Yang dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksana	100	Persen	22.192.800	0		70		0	0	70	6.120.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	22.192.800	0	22.192.800	0	22.192.800	0	0	0	6.120.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	33.991.500	25	9.000.000	25	33.991.500	25	7.760.000	25	7.760.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	33.991.500	50		25		50	7.760.000	25	7.760.000
	Peningkatan partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatn	6	Kelembaga an	9.000.000	6	9.000.000	6	9.000.000	6	7.760.000	6	7.760.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kemasyarakan									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	24.991.500	0	0	1	24.991.500	0	0	1	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	43.853.500	25	13.925.000	25	22.324.500	25	12.650.000	25	17.115.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman	100	Persen	39.353.500	25		25		25	12.650.000	25	17.115.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum di Kecamatan											
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	3	Laporan	34.854.000	1	13.925.000	1	17.825.000	1	12.650.000	1	13.215.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4.499.500	0	0	0	4.499.500	0	0	0	3.900.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	4.500.000	0		50		0		50	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	102.118.000	25	6.148.000	25	60.118.000	25	0	25	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	102.118.000	20		20		20	0	20	20.000.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	47.970.000	1	0	1	47.970.000	1	0	1	20.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	24.148.000	0	6.148.000	0	12.148.000	0	0	0	0
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	39.437.000	25	4.000.000	25	25.583.000	25	0	25	6.688.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	39.437.000	25		25		25	0	25	6.688.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	6.488.000	1	0	2	3.688.000	1	0	2	3.688.000
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	6.000.000	1	4.000.000	2	4.000.000	1	0	2	3.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	7.970.000	0	0	0	4.270.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	2.854.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	13.625.000	0	0	0	13.625.000	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama Program, Kegiatan dan Sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. 2.421.484.167,00,- (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya Penambahan dan penyesuaian Pagu untuk Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN dan Penyesuaian Keluaran Sub Kegiatan atau Target dari 7 Orang/bulan menjadi 9 Orang/bulan
2. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Modal Alat Dapur
3. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Penambahan biaya cetak Digital Printing dan penggandaan atau Fotocopy

4. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Perjalanan dinas biasa atau luar daerah karena masih kurangnya anggaran untuk perjalanan dinas biasa atau luar daerah
5. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel untuk penambahan belanja Modal untuk Penunjang Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Paramasan
6. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk penambahan belanja Modal untuk Penunjang Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Paramasan
7. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena biaya Operasional yang kurang untuk 2 unit mobil
8. Adanya Perubahan Pengurangan Pagu pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan untuk di alihkan ke Sub Kegiatan yang lain
9. Adanya Perubahan Pagu pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk di alihkan ke Sub Kegiatan yang lain
10. Adanya Perubahan Penambahan Pagu pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan untuk Penunjang Kegiatan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah
11. Adanya Perubahan Pengurangan Pagu pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk di alihkan ke Sub Kegiatan yang lain
12. Adanya Perubahan Pengurangan Pagu pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk di alihkan ke Sub Kegiatan yang lain

13. Adanya Perubahan Pengurangan Pagu pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karena Tahun 2024 di Kecamatan Paramasan tidak ada Pemilihan Kepala Desa atau Pembakal
14. Adanya Perubahan Pengurangan Pagu pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk di alihkan ke Sub Kegiatan yang lain

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasion
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kecamatan Paramasan						2.117.323.812,00	2.338.226.377,00	2.421.484.167,00				
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.117.323.812,00	2.338.226.377,00	2.421.484.167,00				
	7	01					KECAMATAN						2.117.323.812,00	2.338.226.377,00	2.421.484.167,00				
1	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan				75 Nilai	75 Nilai	1.852.331.012,00	2.088.233.577,00	2.209.260.367,00			
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD	-			100 Persen	100 Persen	8.189.300,00	8.189.300,00	8.189.300,00			Memperl Stabilitas Polhukha Dan Transform Pelayana Publik
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13 Dokumen	13 Dokumen	4.549.300,00	4.549.300,00	4.549.300,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperl Stabilitas Polhukha Dan Transform Pelayana Publik
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	14.860.700,00	14.860.700,00	14.860.700,00			-
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10 Unit	9.975.000,00	9.975.000,00	20.622.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	4.885.700,00	4.885.700,00	72.868.090,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	142.449.798,00	142.449.798,00	142.449.798,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.119.798,00	6.119.798,00	6.119.798,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133.830.000,00	133.830.000,00	133.830.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	102.809.000,00	102.809.000,00	102.809.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	76.360.000,00	76.360.000,00	86.360.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9 Unit	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.999.000,00	19.999.000,00	19.999.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3 Laporan	22.192.800,00	22.192.800,00	14.120.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	33.991.500,00	33.991.500,00	32.619.500,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	33.991.500,00	33.991.500,00	33.991.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha Dan Transformasi Pelayanan Publik
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	24.991.500,00	24.991.500,00	24.619.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	47.970.000,00	47.970.000,00	31.670.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.148.000,00	24.148.000,00	19.948.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 Persen	100 Persen	39.437.000,00	39.437.000,00	21.637.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	100 Persen	39.437.000,00	39.437.000,00	39.437.000,00			-
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	2 Dokumen	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.970.000,00	7.970.000,00	3.270.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.854.000,00	2.854.000,00	2.854.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperl Stabilitas Polhukha Dan Transform Pelayana Publik
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	13.625.000,00	13.625.000,00	3.025.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperl Stabilitas Polhukha Dan Transform Pelayana Publik
	J U M L A H												2.117.323.812,00	2.338.226.377,00	2.421.484.167,00			

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Paramasan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Tatah Makmur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Tatah Makmur dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023

(Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2024 tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 Tanggal Penetapan 30 April 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.904.366.693,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Tatah Makmur bertambah pagu anggaran untuk menyesuaikan terhadap realisasi pendapatan dan belanja; selama tahun berjalan, realisasi pendapatan dan belanja dapat berbeda dari yang direncanakan. Penyesuaian ini diperlukan agar anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kondisi actual. Untuk Pagu anggaran 2024 Perubahan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.932.664.022,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan Pengadaan Mebel

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Intansi Vertikal
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perncanaan Pembangunan di Desa.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak ada Program/Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan triwulan II

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Tatah Makmur sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan masih kurang optimalnya penyusunan jadwal kegiatan.
- Ada beberapa Penyusunan Dokumen yang menunggu jadwal dan Pendampingan dari Instansi terkait
- Aplikasi SIPD-RI Penatausahaan masih dalam pengembangan sehingga sering terjadi eror dan kendala.
- Kurang SDM dalam penyusunan dokumen BMD sehingga laporan menjadi terlambat
- Menunggu Informasi Pelaksanaan Penyelenggaraan/Mencari hari agar jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain
- Sosialisasi yang tidak berjalan oleh Perangkat Daerah Pengampu usulan

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Tidak ada Program/Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan triwulan II

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Tatah Makmur.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara atasan dan bawahan
- b. Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan
- c. Menerapkan etika dan integritas dalam menjalankan tugas
- d. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TATAH MAKMUR TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volu me	Satuan	DPA	TK	Rp	T K	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.703.364. 058								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85	Nilai	2.367.360. 258								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Presentase Dokumen Perencanaan , Penganggara	100	persen	7.200.000								

	Perangkat Daerah	n dan Evaluasi SKPD											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	4.200.000	15	1.500.000	15	2.000.000	6	1.373.000	6	2.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	3.000.000	17	1.310.000	17	1.920.000	6	0	6	1.220.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.940.382.149								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	1.899.392.149	14	406.098.752	14	1.076.965.915	3	286.350.523	5	727.560.523
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausaha	2	Dokumen	39.240.000	2	9.810.000	2	19.620.000	0	6.040.000	0	16.900.000

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	1.750.000	1	1.105.000	1	1.427.500	1	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	300.000								

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	300.000	1	75.000	1	150.000	0	0	0	150.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	31.200.000								
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.200.000	1	0	1	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	6	Orang	30.000.000	6	15.000.000	6	30.000.000	0	0	0	0

		Peraturan Perundang- Undangan											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	146.017.60 0								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran angan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.300.000	4	1.046.5 00	4	1.106.500	1	335.000	1	955.981
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	5.297.000	4	0	4	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan	7	Paket	3.804.000	7	1.153.0 00	7	1.594.000	2	0	2	1.153.00 0

		Rumah Tangga yang disediakan											
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	15.435.100	4	6.556.5 00	4	11.481.00 0	1	965.000	1	10.830.0 00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	2.517.200	4	418.00 0	4	1.211.200	1	162.000	1	607.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	6.664.300	1	1.567.5 00	1	3.107.500	0	0	0	1.500.00 0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	4	Laporan	109.000.00 0	4	24.500. 000	4	54.250.00 0	1	12.956.0 10	1	49.715.2 50

		Konsultasi SKPD											
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	45.716.000								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	Unit	9.894.000	4	0	4	1.402.000	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	Unit	35.822.000	3	0	3	18.236.000	0	0	0	18.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	196.425.041								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	1	Laporan	3.500.000	1	1.500.000	1	3.000.000	0	0	0	1.500.000

		Jasa Surat Menyurat											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	21.925.041	12	6.818.000	12	13.394.000	3	1.753.072	3	7.187.126
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	Laporan	171.000.000	7	39.825.000	7	91.350.000	0	35.100.000	0	81.900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	249.872.103								

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	67.751.932	7	15.246.000	7	30.492.000	2	5.710.000	2	24.844.140
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	3	Unit	22.120.000	3	6.170.000	3	12.440.000	0	200.000	0	2.166.500
	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Di rehabilitasi	1	Unit	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0
	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3	Unit	140.000.171	3	60.000.000	3	80.000.171	0	0	0	0

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Di rehabilitasi											
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	84	Persen	18.288.800								
	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100	persen	868.800								

	Tingkat Kecamatan	Daerah yang ada di Kecamatan											
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	868.800	6	0	6	300.000	0	0	3	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	17.420.000								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	17.420.000	4	10.420.000	4	15.420.000	1	0	2	6.884.000

	lain yang dilimpahkan												
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	51.662.000								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	51.662.000								
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tn yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	13	Kelemb agaan Kemasy arakata n	10.104.000	13	10.104. 000	13	10.104.00 0	13	10.049.0 00	0	10.049.0 00

		Pembanguna n di Desa											
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	41.558.000	3	14.710. 500	3	22.413.50 0	1	8.110.00 0	1	18.945.5 00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengga raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	23.200.000								

	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	9.443.000								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksana n	1	Laporan	5.000.000	1	5.000.0 00	1	5.000.000	1	2.620.00 0	0	2.620.00 0

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4.443.000	1	0	1	4.443.000	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	13.757.000								
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2	Laporan	13.757.000	2	0	2	8.661.000	0	0	0	0

	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan											
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	183.703.000								
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	183.703.000								

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	100	Orang	24.695.000	100	0	100	0	0	0	0	0
--	---	--	-----	-------	------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---

		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	159.008.000	3	26.488.000	3	135.172.000	1	4.000.000	1	53.925.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan	100	Persen	10.400.000								

		pemerintah n desa											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa	100	Persen	10.400.000								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokume n	900.000	1	0	1	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	1	Dokume n	1.080.000	1	0	1	0	0	0	0	0

		Pemerintah n Desa											
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	2.080.000	1	0	1	2.080.000	0	0	0	2.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	2	Dokumen	2.180.000	2	0	2	2.180.000	0	0	0	2.118.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan	1	Dokumen	1.080.000	1	1.080.000	1	1.080.000	0	0	0	1.015.000

	Pemberhentian Perangkat Desa	n dan Pemberhentian Perangkat Desa											
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	2.080.000	1	0	1	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan , dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3	Dokumen	1.000.000	3	0	3	1.000.000	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Adanya perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.932.664.022,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Dua Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan karena adanya penambahan pagu untuk kenaikan bahan cetak keperluan kantor Kecamatan.
2. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adanya penambahan pagu untuk Perjadin dalam dan luar daerah untuk Kecamatan dan Tim PKK bertujuan agar Kecamatan dan Tim PKK dapat lebih terkoordinasi dengan tim Kabupaten.
3. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adanya penambahan Biaya Pemeliharaan untuk kendaraan dinas baik beroda 2 dan beroda 4 bertambah dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di Kecamatan Tatah Makmur.

4. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adanya pengurangan Biaya Pemeliharaan gedung dihapuskan karena direncanakan Kecamatan akan mendapat Renovasi dari Dinas PU.
5. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adanya pengurangan Biaya Pemeliharaan gedung dihapuskan karena direncanakan Kecamatan akan mendapat Renovasi dari Dinas PU.
6. Adanya Perubahan Pagu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adanya pengurangan dikarenakan Penyesuaian terhadap Realisasi Pendapatan dan Belanja; Selama Tahun anggaran berjalan, realisasi pendapatan dan belanja dapat berbeda dari yang direncanakan. Penyesuaian ini diperlukan agar anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kondisi actual.
7. Adanya Perubahan Pagu pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adanya penambahan pagu dikarenakan saran Kesbangpol Kab. Banjar untuk kegiatan Pilkada Kab Banjar Tahun 2024

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Date	Name of the Party	Address	City	State	Country	Type of Party	Status	Registration Details		Financial Details		Remarks	Signature	Date
									Registration No.	Registration Date	Amount Paid	Amount Due			
1	2018-01-01	ABC Party	123 Main St	New York	USA	Political	Active	123456789	2018-01-01	\$1000	\$0				
2	2018-02-15	XYZ Party	456 Elm St	California	USA	Political	Active	987654321	2018-02-15	\$500	\$0				
3	2018-03-10	DEF Party	789 Oak St	Texas	USA	Political	Active	567890123	2018-03-10	\$250	\$0				
4	2018-04-05	GHI Party	101 Pine St	Florida	USA	Political	Active	345678901	2018-04-05	\$750	\$0				
5	2018-05-20	JKL Party	202 Maple St	Illinois	USA	Political	Active	012345678	2018-05-20	\$1250	\$0				
6	2018-06-10	MNO Party	303 Cedar St	Ohio	USA	Political	Active	890123456	2018-06-10	\$375	\$0				
7	2018-07-01	PQR Party	404 Birch St	Georgia	USA	Political	Active	678901234	2018-07-01	\$625	\$0				
8	2018-08-15	STU Party	505 Walnut St	Arizona	USA	Political	Active	456789012	2018-08-15	\$875	\$0				
9	2018-09-01	VWX Party	606 Cherry St	Colorado	USA	Political	Active	234567890	2018-09-01	\$1125	\$0				
10	2018-10-10	YZA Party	707 Peach St	Connecticut	USA	Political	Active	012345678	2018-10-10	\$1375	\$0				
11	2018-11-05	BCD Party	808 Apple St	Delaware	USA	Political	Active	890123456	2018-11-05	\$1625	\$0				
12	2018-12-01	EFG Party	909 Orange St	District of Columbia	USA	Political	Active	678901234	2018-12-01	\$1875	\$0				
13	2019-01-15	HIJ Party	1010 Grape St	Idaho	USA	Political	Active	456789012	2019-01-15	\$2125	\$0				
14	2019-02-10	KLM Party	1111 Lemon St	Indiana	USA	Political	Active	234567890	2019-02-10	\$2375	\$0				
15	2019-03-05	NOP Party	1212 Lime St	Iowa	USA	Political	Active	012345678	2019-03-05	\$2625	\$0				
16	2019-04-01	QRS Party	1313 Mango St	Kansas	USA	Political	Active	890123456	2019-04-01	\$2875	\$0				
17	2019-05-10	TUV Party	1414 Pear St	Kentucky	USA	Political	Active	678901234	2019-05-10	\$3125	\$0				
18	2019-06-05	WXY Party	1515 Plum St	Louisiana	USA	Political	Active	456789012	2019-06-05	\$3375	\$0				
19	2019-07-01	ZAB Party	1616 Raspberry St	Maine	USA	Political	Active	234567890	2019-07-01	\$3625	\$0				
20	2019-08-15	BCD Party	1717 Strawberry St	Maryland	USA	Political	Active	012345678	2019-08-15	\$3875	\$0				
21	2019-09-10	EFG Party	1818 Tangerine St	Massachusetts	USA	Political	Active	890123456	2019-09-10	\$4125	\$0				
22	2019-10-05	HIJ Party	1919 Uguine St	Michigan	USA	Political	Active	678901234	2019-10-05	\$4375	\$0				
23	2019-11-01	KLM Party	2020 Vanilla St	Minnesota	USA	Political	Active	456789012	2019-11-01	\$4625	\$0				
24	2019-12-01	NOP Party	2121 Yogurt St	Mississippi	USA	Political	Active	234567890	2019-12-01	\$4875	\$0				
25	2020-01-15	QRS Party	2222 Zucchini St	Missouri	USA	Political	Active	012345678	2020-01-15	\$5125	\$0				
26	2020-02-10	TUV Party	2323 Avocado St	Montana	USA	Political	Active	890123456	2020-02-10	\$5375	\$0				
27	2020-03-05	WXY Party	2424 Banana St	Nebraska	USA	Political	Active	678901234	2020-03-05	\$5625	\$0				
28	2020-04-01	ZAB Party	2525 Kiwi St	Nevada	USA	Political	Active	456789012	2020-04-01	\$5875	\$0				
29	2020-05-10	BCD Party	2626 Lemon St	New Hampshire	USA	Political	Active	234567890	2020-05-10	\$6125	\$0				
30	2020-06-05	EFG Party	2727 Lime St	New Jersey	USA	Political	Active	012345678	2020-06-05	\$6375	\$0				
31	2020-07-01	HIJ Party	2828 Orange St	New Mexico	USA	Political	Active	890123456	2020-07-01	\$6625	\$0				
32	2020-08-15	KLM Party	2929 Grape St	New York	USA	Political	Active	678901234	2020-08-15	\$6875	\$0				
33	2020-09-10	NOP Party	3030 Peach St	North Carolina	USA	Political	Active	456789012	2020-09-10	\$7125	\$0				
34	2020-10-05	QRS Party	3131 Apple St	North Dakota	USA	Political	Active	234567890	2020-10-05	\$7375	\$0				
35	2020-11-01	TUV Party	3232 Banana St	Ohio	USA	Political	Active	012345678	2020-11-01	\$7625	\$0				
36	2020-12-01	WXY Party	3333 Kiwi St	Oklahoma	USA	Political	Active	890123456	2020-12-01	\$7875	\$0				
37	2021-01-15	ZAB Party	3434 Lemon St	Oregon	USA	Political	Active	678901234	2021-01-15	\$8125	\$0				
38	2021-02-10	BCD Party	3535 Lime St	Pennsylvania	USA	Political	Active	456789012	2021-02-10	\$8375	\$0				
39	2021-03-05	EFG Party	3636 Orange St	Rhode Island	USA	Political	Active	234567890	2021-03-05	\$8625	\$0				
40	2021-04-01	HIJ Party	3737 Grape St	South Carolina	USA	Political	Active	012345678	2021-04-01	\$8875	\$0				
41	2021-05-10	KLM Party	3838 Peach St	South Dakota	USA	Political	Active	890123456	2021-05-10	\$9125	\$0				
42	2021-06-05	NOP Party	3939 Apple St	Tennessee	USA	Political	Active	678901234	2021-06-05	\$9375	\$0				
43	2021-07-01	QRS Party	4040 Banana St	Texas	USA	Political	Active	456789012	2021-07-01	\$9625	\$0				
44	2021-08-15	TUV Party	4141 Kiwi St	Utah	USA	Political	Active	234567890	2021-08-15	\$9875	\$0				
45	2021-09-10	WXY Party	4242 Lemon St	Vermont	USA	Political	Active	012345678	2021-09-10	\$10125	\$0				
46	2021-10-05	ZAB Party	4343 Lime St	Virginia	USA	Political	Active	890123456	2021-10-05	\$10375	\$0				
47	2021-11-01	BCD Party	4444 Orange St	Washington	USA	Political	Active	678901234	2021-11-01	\$10625	\$0				
48	2021-12-01	EFG Party	4545 Grape St	West Virginia	USA	Political	Active	456789012	2021-12-01	\$10875	\$0				
49	2022-01-15	HIJ Party	4646 Peach St	Wisconsin	USA	Political	Active	234567890	2022-01-15	\$11125	\$0				
50	2022-02-10	KLM Party	4747 Apple St	Wyoming	USA	Political	Active	012345678	2022-02-10	\$11375	\$0				

No.	Date	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	VOTER REGISTRATION INFORMATION										VOTER REGISTRATION STATUS	VOTER REGISTRATION DATE	VOTER REGISTRATION EXPIRATION DATE
						NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE	NAME OF PARTY OR INDIVIDUAL REGISTERED TO VOTE			
1	10/10/2010	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210	JOHN DOE 123 MAIN ST ANYTOWN, CA 90210		
2	10/11/2010	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	JANE SMITH 456 ELM ST ANYTOWN, CA 90210		
3	10/12/2010	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	BOB JOHNSON 789 OAK ST ANYTOWN, CA 90210		
4	10/13/2010	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	ALICE BROWN 101 PINE ST ANYTOWN, CA 90210		
5	10/14/2010	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	CHARLIE DAVIS 202 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210		
6	10/15/2010	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	DIANA EVANS 303 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210		
7	10/16/2010	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	FRANK GREEN 404 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210		
8	10/17/2010	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210	GRACE HALL 505 WILLOW ST ANYTOWN, CA 90210		
9	10/18/2010	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210	HENRY LEE 606 ASH ST ANYTOWN, CA 90210		
10	10/19/2010	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210	IVY KING 707 HICKORY ST ANYTOWN, CA 90210		
11	10/20/2010	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210	JACK MILLER 808 MAPLE ST ANYTOWN, CA 90210		
12	10/21/2010	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210	KAREN WILSON 909 POPLAR ST ANYTOWN, CA 90210		
13	10/22/2010	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210	LEO WHITE 1010 SYCAMORE ST ANYTOWN, CA 90210		
14	10/23/2010	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210	MIA YOUNG 1111 WALNUT ST ANYTOWN, CA 90210		
15	10/24/2010	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210	NOAH BLACK 1212 CHESTNUT ST ANYTOWN, CA 90210		
16	10/25/2010	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210	OLIVIA GRAY 1313 ELM ST ANYTOWN, CA 90210		
17	10/26/2010	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210	PETER BLUE 1414 OAK ST ANYTOWN, CA 90210		
18	10/27/2010	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210	QUINN GREEN 1515 PINE ST ANYTOWN, CA 90210		
19	10/28/2010	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210	RACHEL BROWN 1616 CEDAR ST ANYTOWN, CA 90210		
20	10/29/2010	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210	SAM BLACK 1717 BIRCH ST ANYTOWN, CA 90210		
21	10/30/2010	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210	TINA WHITE 1818 SPRUCE ST ANYTOWN, CA 90210		

[illegible]

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Tatah Makmur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Telaga Bauntung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Telaga Bauntung dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024

- (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.529.579.967,- (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Telaga Bauntung mendapatkan tambahan sebesar Rp. 239.099.047,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tujuh Rupiah) dengan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.581.189.967,- (Dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Telaga Bauntung sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Beberapa program kegiatan tidak terlaksana karena pergantian dan kekosongan pejabat yang mengampu.
- Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan instansi terkait dan pihak penyedia.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- dll

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Telaga Bauntung.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Melakukan evaluasi capaian kinerja dengan cara mengadakan rapat internal di kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

Commented [L1]: Cek Kembali, apakah sudah sesuai, jika iya, bisa sesuaikan dengan narasi di subbab 2.1.1 sampai 2.1.3

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.529.579.923,00								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	2.364.585.923,00	0	506.039.116	0	1.312.169.854	0	252.252.344	0	933.411.525
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	6.656.000	38	3.316.000	54	2.252.000,00	38	1.164.000	54	1.164.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	644.000	2	0	0	644.000	1	-	0	0

		Perangkat Daerah											
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	832.000	2	0	0	0	2	0	2	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	832.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Dokumen	1.414.000	2	1.414.000	0	1.414.000	2	1.164.000	2	1.164.000

		Dokumen DPA-SKPD											
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	Laporan	926.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	838.000,00	4	0	8	0	4	0	8	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.932.068.783,00	25	355.159.674	50	1.047.098.498	25	174.821.684	50	764.941.285
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	13	Orang/Bulan	1.901.532.783	13	347.303.674	13	1.031.682.498	13	169.781.684	13	749.525.285
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40	Dokumen	30.240.000	10	7.560.000	20	15.120.000	10	5.040.000	17	15.120.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	Laporan	296.000	1	0	0	296.000	1	0	1	296.000

		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir											
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	9.100.000	20	2.350.000	40	4.600.000	20	750.000	40	4.500.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	100.000	1	0	2	100.000	0	0	1	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	9.000.000	0	2.250.000	0	4.500.000	0	750.000	0	4.500.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	119.060.528	0	45.647.78 1	0	85.628.03 0	0	25.353.66 0	0	52.858.24 0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	1.800.000	0	1.250.000	0	4.500.000	0	700.000	0	700.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	4.418.500	0	4.018.500	0	4.168.5 00	0	3.946.500	0	3.946.500

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	11.977.000	0	7.565.500	0	11.362.000	0	6.558.500	0	8.126.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	2.630.028	0	1.130.028	0	1.930.028	0	0	0	312.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	95.235.000	0	30.683.753	0	64.367.502	0	13.148.660	0	38.773.740
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	23.918.000	100	23.918.000	0	23.918.000	0	0	0	0

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	Unit	23.918.000	4	23.918.000	4	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	148.611.456	25	35.127.864	50	78.955.728	17	21.513.000	33.5	45.413.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000	3	600.000	6	1.200.000	2	400.000	5	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	11.031.456	3	2.757.864	6	5.515.728	1	203.000	6	1.503.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	Laporan	135.780.000	3	31.770.000	6	72.240000	2	20.910.000	6	42.910.000

		Umum Kantor yang disediakan											
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	123.671.156	25	40.019.797	50	67.903.598	20	28.650.000	50	64.750.598
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	100.731.200	14	25.182.797	14	50.365.598	14	16.650.000	14	50.365.598
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	10	Unit	10.804.000	10	2.701.000	10	5.402.000	0	0	4	2.385.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	Unit	12.136.000	3	12.136.000	3	12.136.000	3	12.000.000	3	12.000.000

		dipelihara/Dir ehabilitasi											
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial dan Kebencanaan Kecamatan YangTerlaksa na	100	Persen	36.800.000	17	14.450.00 0	33	23.900.00 0	0	0	0	8.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	23.800.000	20	5.950.000	40	11.900.00 0	0	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	5	laporan	23.800.000	1	5.950.000	2	11.900.000	0	0	0	0

	Wilayah Kecamatan	Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	13.000.000	0	8.500.000	0	12.000.000	0	0	0	8.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1	laporan	13.000.000	0	8.500.000	0	12.000.000	0	0	0	8.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	22.400.000	54	12.000.000	69	18.100.000	46	9.700.000	65.55	13.700.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaa	100	Persen	22.400.000	54	12.000.000	69	18.100.000	46	9.700.000	65.55	13.700.000

		n Masyarakat Desa yang Kelurahan											
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LKM	Kelembagaan Kemasyarakatan	9.700.000	6	9.700.000	6	9.700.000	6	9.700.000	6	9.700.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	7	Laporan	12.700.000	1	2.300.000	3	8.400.000	0	0	3	4.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100	Persen	47.580.000	67	21.070.000	0	30.840.000	67	3.240.000	37.5	13.740.000

		Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	47.580.000	66.67	3.850.000	66.67	3.850.000	0	0	12.5	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	2	Laporan	4.100.000	1	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1	0

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2.050.000	1	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	41.430.000	0	17.220.000	0	26.990.000	0	3.240.000	0	13.740.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan	2	Laporan	41.430.000	0	17.220.000	0	26.990000	0	3.240.000	1	13.740.000

		/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dlaksanakan											
5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	52.214.000	0	0	50	30.664.00 0	0	0	50	14.000.00 0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	52.214.000	0	0	50	30.664.00 0	0	0	50	14.000.00 0

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	120	Orang	21.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	--	-----	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

		Republik Indonesia											
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	30.664.000	0	0	1	30.664.000	0	0	0	14.000.000

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	6.000.000	50	3.000.000	100	6.000.000	50	0	75	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	6.000.000	50	3.000.000	100	6.000.000	50	0	75	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	0	1	0
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan	1	Dokumen	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	0	1	0

		Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa											
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	1	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1	dokumen	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.581.189.967,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD karena kekurangan pagu untuk kordinasi kegaiataan tersebut.
2. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alasanya karena masih adanya kebutuhan peralatan rumah tangga yang di perlukan.
3. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor, alasanya karena masih adanya kebutuhan logistik kantor yang di perlukan
4. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alasanya karena masih adanya kebutuhan logistik kantor yang di perlukan .
5. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, alasanya karena kekurangan anggaran
6. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alasanya karena masih adanya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk kegaiataan PKK .

7. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alasannya karena adanya pengadaan papan nama SKPD
8. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alasannya kelebihan pagu sehingga dana di alihkan ke sub kegiatan yang masih kurang.
9. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena lokasi kecamatan yang jauh dengan kabupaten dengan medan yang sulit sehingga memerlukan biaya pemeliharaan lebih banyak dibanding dengan SKPD yang aksesnya lebih dekat dan mudah di tempuh dari kabupetan.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024																
NO	URUTAN	NAMA PROGRAM	KETERANGAN PROGRAM	KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN SUB KEGIATAN
1	1	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
2	2	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
3	3	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
4	4	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
5	5	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
6	6	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
7	7	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
8	8	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
9	9	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
10	10	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
11	11	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
12	12	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
13	13	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
14	14	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
15	15	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
16	16	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
17	17	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
18	18	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
19	19	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
20	20	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
21	21	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
22	22	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
23	23	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
24	24	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
25	25	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
26	26	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
27	27	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
28	28	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
29	29	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
30	30	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
31	31	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
32	32	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
33	33	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
34	34	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
35	35	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
36	36	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
37	37	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
38	38	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
39	39	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
40	40	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
41	41	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
42	42	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
43	43	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
44	44	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
45	45	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
46	46	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
47	47	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
48	48	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
49	49	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
50	50	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
51	51	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
52	52	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
53	53	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
54	54	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
55	55	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
56	56	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
57	57	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
58	58	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
59	59	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
60	60	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
61	61	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
62	62	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
63	63	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
64	64	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
65	65	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
66	66	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
67	67	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
68	68	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
69	69	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
70	70	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
71	71	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
72	72	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
73	73	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
74	74	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
75	75	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
76	76	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
77	77	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
78	78	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
79	79	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
80	80	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
81	81	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
82	82	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
83	83	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
84	84	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
85	85	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
86	86	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
87	87	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
88	88	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
89	89	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
90	90	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
91	91	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
92	92	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
93	93	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
94	94	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
95	95	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
96	96	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
97	97	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
98	98	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
99	99	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														
100	100	KEPERAWATAN DAN PEMERINTAHAN														

Commented [L2]: Table diperjelas

ID	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PERSONAL INFORMATION			CONTACT INFORMATION			EMPLOYMENT INFORMATION			EDUCATION INFORMATION			MILITARY SERVICE							
						DATE OF BIRTH	SEX	RACE	PHONE NUMBER	EMAIL ADDRESS	EMPLOYER NAME	EMPLOYER ADDRESS	EMPLOYER CITY	EMPLOYER STATE	EMPLOYER ZIP	SCHOOL NAME	SCHOOL ADDRESS	SCHOOL CITY	SCHOOL STATE	SCHOOL ZIP	SERVICE NUMBER	SERVICE ADDRESS	SERVICE CITY	SERVICE STATE	SERVICE ZIP
1	JOHN DOE	123 Main St	Springfield	MA	01103	03/15/1980	M	W	555-123-4567	john.doe@email.com	ABC Company	100 Main St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	123 Main St	Springfield	MA	01103	U.S. Army	100 Main St	Springfield	MA	01103
2	JANE SMITH	456 Elm St	Springfield	MA	01103	01/22/1985	F	W	555-987-6543	jane.smith@email.com	XYZ Corp	200 Elm St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	456 Elm St	Springfield	MA	01103	U.S. Navy	200 Elm St	Springfield	MA	01103
3	JOHN SMITH	789 Oak St	Springfield	MA	01103	07/10/1978	M	W	555-234-5678	john.smith@email.com	DEF Inc	300 Oak St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	789 Oak St	Springfield	MA	01103	U.S. Air Force	300 Oak St	Springfield	MA	01103
4	JANE DOE	101 Pine St	Springfield	MA	01103	11/05/1990	F	W	555-345-6789	jane.doe@email.com	GHI LLC	400 Pine St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	101 Pine St	Springfield	MA	01103	U.S. Marine Corps	400 Pine St	Springfield	MA	01103
5	JOHN DOE	202 Maple St	Springfield	MA	01103	05/18/1982	M	W	555-456-7890	john.doe@email.com	JKL Corp	500 Maple St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	202 Maple St	Springfield	MA	01103	U.S. Coast Guard	500 Maple St	Springfield	MA	01103
6	JANE SMITH	303 Cedar St	Springfield	MA	01103	09/01/1975	F	W	555-567-8901	jane.smith@email.com	MNO Inc	600 Cedar St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	303 Cedar St	Springfield	MA	01103	U.S. Space Force	600 Cedar St	Springfield	MA	01103
7	JOHN SMITH	404 Birch St	Springfield	MA	01103	12/12/1988	M	W	555-678-9012	john.smith@email.com	PQR LLC	700 Birch St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	404 Birch St	Springfield	MA	01103	U.S. Secret Service	700 Birch St	Springfield	MA	01103
8	JANE DOE	505 Spruce St	Springfield	MA	01103	04/03/1992	F	W	555-789-0123	jane.doe@email.com	STU Corp	800 Spruce St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	505 Spruce St	Springfield	MA	01103	U.S. Customs and Border Protection	800 Spruce St	Springfield	MA	01103
9	JOHN DOE	606 Fir St	Springfield	MA	01103	08/25/1979	M	W	555-890-1234	john.doe@email.com	VWX Inc	900 Fir St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	606 Fir St	Springfield	MA	01103	U.S. Department of Homeland Security	900 Fir St	Springfield	MA	01103
10	JANE SMITH	707 Ash St	Springfield	MA	01103	02/14/1987	F	W	555-901-2345	jane.smith@email.com	YZA LLC	1000 Ash St	Springfield	MA	01103	Springfield High School	707 Ash St	Springfield	MA	01103	U.S. Department of Justice	1000 Ash St	Springfield	MA	01103

[illegible]

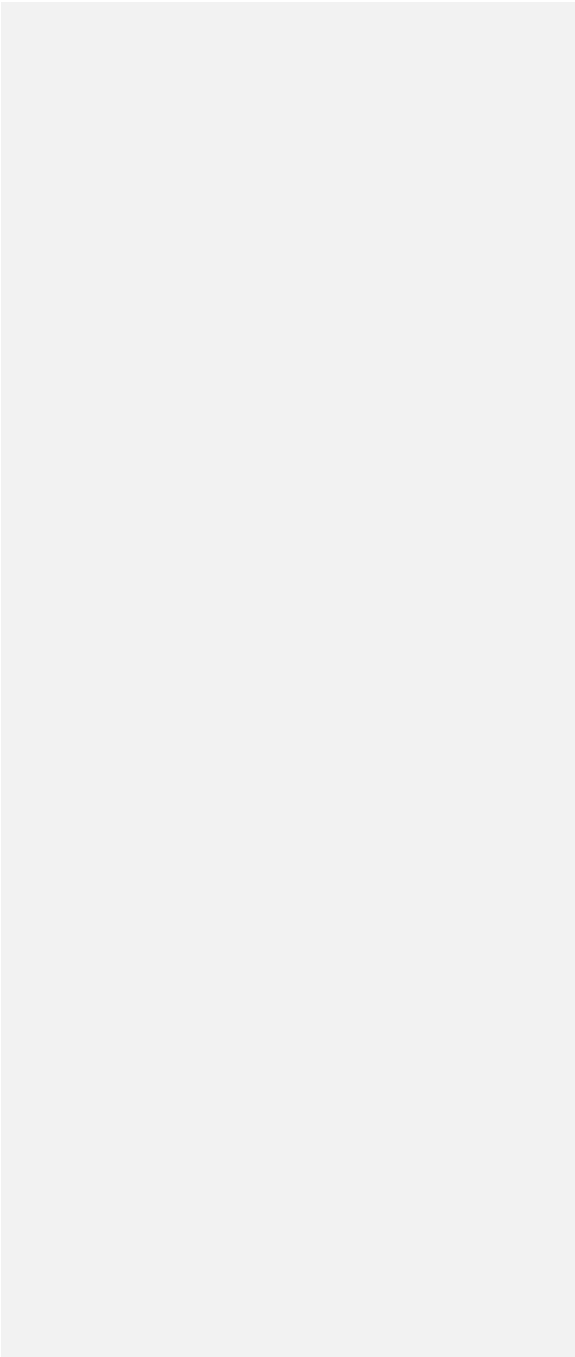
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024



BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**.

Perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Telaga Bauntung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kecamatan Cintapuri Darussalam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2024 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2024 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar melaksanakan enam program, empat belas kegiatan dan tiga puluh sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.494.268.273,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Cintapuri Darussalam melaksanakan enam program, empat belas kegiatan dan tiga puluh sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 2.544.268.073,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Cintapuri Darussalam sampai dengan Triwulan II ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2024:

- Pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu target orang yang menerima ditetapkan lebih banyak
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan dilaksanakan pada Triwulan III di awal Bulan JULI.
- Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yaitu kesalahan input target yang seharusnya 12 Laporan terinput 1 Laporan
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu banyaknya kegiatan yang dilaksanakan berbarengan, proses pencarian barang yang sesuai dengan spek yang diperlukan dan Lokasi pencarian barang yang lumayan jauh

- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu karna pekerjaan dan kegiatan yang banyak menghambat koordinasi persiapan

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM TAHUN 2024 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21
					2.494.268.273								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam	76	Indeks	2.236.027.473	-	643.497.060	-	1.420.689.943	-	345.848.979	-	773.117.819
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	5.600.000	23.53	1.400.000	50.00	1.750.000	23.53	0	50.00	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dokumen	3.500.000	3	875.000	7	1.750.000	3	0	7	0
	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	20	Laporan	2.100.000	5	525.000	10	1.050.000	5	0	10	0

	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.786.110.918	22.10	485.135.575	56.91	1.123.007.098	17.13	414.823.284	40.88	934.941.928
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	168	Orang/Bulan	1.754.520.918	36	476.675.575	96	1.106.837.098	27	406.363.284	67	918.771.928
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	30.840.000	3	7.710.000	6	15.420.000	3	7.710.000	6	15.420.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	300.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	9.734.000	0	2.510.00 0	0	5.020.000	0	2.250.00 0	0	4.500.0 00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	9.734.000	0	2.510.000	0	5.020.000	0	2.250.000	0	4.500.0 00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	10.000.000	100	10.000.0 00	100	10.000.000	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Orang	10.000.000	1	10.000.00 0	1	10.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	111.579.40 0	25.00	43.878.8 30	50.00	80.290.690	12.50	30848.94 1	27.50	65.624. 127

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	2.080.000	1	520.000	2	1.040.000	0	0	1	131.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	3.119.000	1	771.250	2	1.576.500	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	5.824.000	1	1.164.800	2	3.184.600	1	444.500	2	1.948.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	4.326.400	1	865.280	2	2.595.840	1	150.000	1	150.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6.230.000	3	1.557.500	6	3.893.750	0	0	1	500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	90.000.000	3	39.000.000	6	68.000.000	3	30.254.441	6	62.894.627

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	38.480.000	20.00	37.248.5 00	86.67	37.659.000	6.67	19.000.0 00	6.67	19.000. 000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15	Unit	38.480.000	3	37.248.50 0	13	37.659.000	1	19.000.00 0	1	19.000. 000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	170.339.15 5	24.32	39.824.1 55	51.35	90.534.155	21.62	33.774.7 50	37.84	63.941. 000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.650.000	3	275.000	6	825.000	2	0	3	400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12.479.155	3	3.159.155	6	6.279.155	3	1.824.750	4	3.241.0 00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	Laporan	156.210.00 0	3	36.390.0 00	7	83.430.000	3	31.950.0 00	7	60.300. 000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	104,184,00 0	30.77	23.500.0 00	53.85	71.379.000	23.08	5.400.00 0	46.15	34.764. 165
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	68.580.000	2	20.010.00 0	4	37.155.000	2	2.700.000	4	31.829. 165
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	3	Unit	5.560.000	2	3.490.000	2	4.180.000	1	2.700.000	2	2.935.0 00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	Unit	30.044.000	0	0	1	30.044.000	0	0	0	0

	dan Bangunan Lainnya	dipelihara/Direhabilitasi											
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	60.999.000	33.33	35.121.000	53.33	42.921.000	20.00	2.600.000	26.67	24.575.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terpenuhi	100	Persen	30.000.000	66.67	24.922.000	66.67	24.922.000	66.67	0	66.67	19.475.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	3	Laporan	30.000.000	2	24.922.000	2	24.922.000	2	0	2	19.475.000

	Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	30.999.000	25.00	10.199.000	50.00	17.999.000	8.33	2.600.000	8.47	5.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	30.999.000	3	10.199.000	6	17.999.000	1	2.600.000	2	5.100.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	52.108.000	44.44	19.905.250	66.67	30.639.500	44.44	10.412.500	55.56	16.112.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	52.108.000	44.44	19.905.250	66.67	30.639.500	44.44	10.412.500	55.56	16.112.500

	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Kelembagaan Kemasyarakatan	9.108.000	2	9.108.000	2	9.108.000	2	8.262.500	2	8.262.500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	7	Laporan	43.000.000	2	10.797.250	4	21.531.500	2	2.150.000	3	7.850.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	29.000.000	16.67	12.122.000	50.00	14.066.000	16.67	10.150.000	16.57	10.150.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggara	Persentase Penyelenggaraan	100	Persen	29.000.000	16.67	12.122.000	50.00	14.066.000	16.67	10.150.000	16.57	10.150.000

	an Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan											
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	4	Laporan	28.000.000	1	12.122.00 0	2	14.066.000	1	10.150.00 0	2	10.150. 000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	1.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN	Persentase Penyelenggara an Urusan	100	Persen	91.634.000	25.00	14.144.0 00	50.00	63.240.000	25.00	9.450.00 0	50.00	23.450. 000

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	91.634.000	25.00	14.144.000	50.00	63.240.000	25.00	9.450.000	50.00	23.450.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	1	Orang	18.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	73.040.000	1	14.144.000	2	63.240.000	1	9.450.000	2	23.450.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	24.499.800	25.00	5.381.250	50.00	13.499.900	25.00	3.500.000	33.33	6.825.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan	100	Persen	24.499.800	25.00	5.381.250	50.00	13.499.900	25.00	3.500.000	33.33	6.825.000

	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokume n	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	Dokume n	21.999.800	3	5.381.250	5	4.500.000	2	3.500.000	4	6.825.0 00

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada Empat Program Sebelas Kegiatan dan Lima Belas Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. 2.544.268.073,00,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karna ada perbaikan target
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karna ada perbaikan target
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD karna ada perbaikan target

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan perbaikan target
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di alihkan ke pagu lain yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di alihkan ke pagu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan penambahan pagu.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adanya penambahan pagu
2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adanya perbaikan target dan karna ada aktivitas tidak bisa dilaksanakan pagu di alihkan ke kegiata Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 3. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adanya perubahan pagu karna penambahan.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2024

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024																			
No	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	KETERANGAN	TANGGAL	JENIS	LOKASI	WAKTU	Jumlah Peserta	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Panitia
1	001	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
2	002	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
3	003	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
4	004	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
5	005	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
6	006	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
7	007	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
8	008	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
9	009	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
10	010	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
11	011	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
12	012	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
13	013	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
14	014	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
15	015	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
16	016	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
17	017	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
18	018	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
19	019	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
20	020	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
21	021	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
22	022	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
23	023	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
24	024	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
25	025	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
26	026	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
27	027	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
28	028	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
29	029	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
30	030	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
31	031	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
32	032	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
33	033	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
34	034	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
35	035	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
36	036	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
37	037	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
38	038	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
39	039	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
40	040	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
41	041	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
42	042	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
43	043	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
44	044	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
45	045	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
46	046	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
47	047	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
48	048	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
49	049	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
50	050	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
51	051	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
52	052	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
53	053	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
54	054	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
55	055	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
56	056	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
57	057	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
58	058	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
59	059	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
60	060	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
61	061	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
62	062	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
63	063	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
64	064	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
65	065	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
66	066	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
67	067	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
68	068	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
69	069	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
70	070	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
71	071	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
72	072	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
73	073	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
74	074	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
75	075	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
76	076	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
77	077	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
78	078	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
79	079	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
80	080	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
81	081	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
82	082	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
83	083	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
84	084	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
85	085	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
86	086	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
87	087	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
88	088	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
89	089	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
90	090	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
91	091	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
92	092	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
93	093	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
94	094	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
95	095	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
96	096	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
97	097	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
98	098	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
99	099	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	
100	100	KEGIATAN KEMASYARAKATAN																	

ID	Project Information		Location		Project Details		Project Status		Project History		Project Summary		Project Notes		Project Comments	
	Project Name	Project Description	Location	Project Type	Project Status	Project History	Project Summary	Project Notes	Project Comments	Project Summary	Project Notes	Project Comments	Project Summary	Project Notes	Project Comments	Project Summary
1	Project A	Project A Description	Location A	Project Type A	Project Status A	Project History A	Project Summary A	Project Notes A	Project Comments A	Project Summary A	Project Notes A	Project Comments A	Project Summary A	Project Notes A	Project Comments A	Project Summary A
2	Project B	Project B Description	Location B	Project Type B	Project Status B	Project History B	Project Summary B	Project Notes B	Project Comments B	Project Summary B	Project Notes B	Project Comments B	Project Summary B	Project Notes B	Project Comments B	Project Summary B
3	Project C	Project C Description	Location C	Project Type C	Project Status C	Project History C	Project Summary C	Project Notes C	Project Comments C	Project Summary C	Project Notes C	Project Comments C	Project Summary C	Project Notes C	Project Comments C	Project Summary C
4	Project D	Project D Description	Location D	Project Type D	Project Status D	Project History D	Project Summary D	Project Notes D	Project Comments D	Project Summary D	Project Notes D	Project Comments D	Project Summary D	Project Notes D	Project Comments D	Project Summary D
5	Project E	Project E Description	Location E	Project Type E	Project Status E	Project History E	Project Summary E	Project Notes E	Project Comments E	Project Summary E	Project Notes E	Project Comments E	Project Summary E	Project Notes E	Project Comments E	Project Summary E
6	Project F	Project F Description	Location F	Project Type F	Project Status F	Project History F	Project Summary F	Project Notes F	Project Comments F	Project Summary F	Project Notes F	Project Comments F	Project Summary F	Project Notes F	Project Comments F	Project Summary F
7	Project G	Project G Description	Location G	Project Type G	Project Status G	Project History G	Project Summary G	Project Notes G	Project Comments G	Project Summary G	Project Notes G	Project Comments G	Project Summary G	Project Notes G	Project Comments G	Project Summary G
8	Project H	Project H Description	Location H	Project Type H	Project Status H	Project History H	Project Summary H	Project Notes H	Project Comments H	Project Summary H	Project Notes H	Project Comments H	Project Summary H	Project Notes H	Project Comments H	Project Summary H
9	Project I	Project I Description	Location I	Project Type I	Project Status I	Project History I	Project Summary I	Project Notes I	Project Comments I	Project Summary I	Project Notes I	Project Comments I	Project Summary I	Project Notes I	Project Comments I	Project Summary I
10	Project J	Project J Description	Location J	Project Type J	Project Status J	Project History J	Project Summary J	Project Notes J	Project Comments J	Project Summary J	Project Notes J	Project Comments J	Project Summary J	Project Notes J	Project Comments J	Project Summary J

Kategori	Sub Kategori	Kode	Nama	Jenis	Status	Merk	Warna	Ukuran	Materi	Harga	Jumlah	Total	Catatan	Keterangan
Kategori A	Sub Kategori A	Kode A	Nama A	Jenis A	Status A	Merk A	Warna A	Ukuran A	Materi A	Harga A	Jumlah A	Total A	Catatan A	Keterangan A
Kategori B	Sub Kategori B	Kode B	Nama B	Jenis B	Status B	Merk B	Warna B	Ukuran B	Materi B	Harga B	Jumlah B	Total B	Catatan B	Keterangan B
Kategori C	Sub Kategori C	Kode C	Nama C	Jenis C	Status C	Merk C	Warna C	Ukuran C	Materi C	Harga C	Jumlah C	Total C	Catatan C	Keterangan C

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Cinta Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Cintapuri Darussalam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.